PLN
Nusantara Power

DRIVING **ENERGY TRANSITION** TO DELIVERING **VALUE CREATION EXCELLENCES**

Mendorong Percepatan Transisi Energi untuk Memberikan *Value Creation* Terbaik

Annual Report
Laporan Tahunan
2022

PLN Nusantara Power

DRIVING **ENERGY TRANSITION** TO DELIVERING **VALUE CREATION EXCELLENCES**

Mendorong Percepatan Transisi Energi untuk Memberikan *Value Creation* Terbaik

Perubahan iklim membawa tantangan baru sekaligus peluang baru bagi PLN Nusantara Power (PLN NP). PLN NP telah menegaskan komitmennya untuk melakukan transisi energi menuju karbon netral (*Net Zero Emission*-NZE) sebagaimana dituangkan dalam perumusan roadmap transisi energi.

Pembentukan *Subholding Generation Company* (Genco) merubah struktur dan tanggung jawab PLN NP menjadi lebih fokus dalam mendukung upaya transisi energi dan lebih jauh meningkatkan keunggulan operasional dan optimalisasi portofolio penyediaan listrik yang andal dan terjangkau. Disamping itu, menjadikan PLN NP menjadi lebih *agile* dalam mengambil keputusan dan streamlining proses bisnis karena terdapat pemisahan yang jelas antara peran strategis dan operasional. Melalui percepatan transisi energi, PLN NP optimis mampu memberikan *value creation* terbaik dan mencapai visi mewujudkan perusahaan pembangkitan tenaga listrik terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara berkapasitas 23,7 GW.

Climate change results in new challenges and also new opportunities for PLN Nusantara Power (PLN NP). PLN NP has confirmed its commitment for energy transition towards carbon neutral (Net Zero Emission-NZE) as explained in the formulation of the energy transition roadmap.

The formation of the Subholding Generation Company (Genco) changed the structure and responsibilities of PLN NP to be more focused on supporting energy transition efforts and further enhancing operational excellence and optimizing the portfolio of reliable and affordable electricity supply. Furthermore, it also turns PLN NP to be more agile in making decisions and streamlining business processes since the strategic and operational roles are clearly separated. Through accelerating the energy transition, PLN NP is optimistic to be able to provide the best value creation and achieve its vision of becoming a leading and trusted power generation company in the sustainable energy business in Southeast Asia with a capacity of 23.7 GW.

Kesinambungan Tema
Theme Continuity

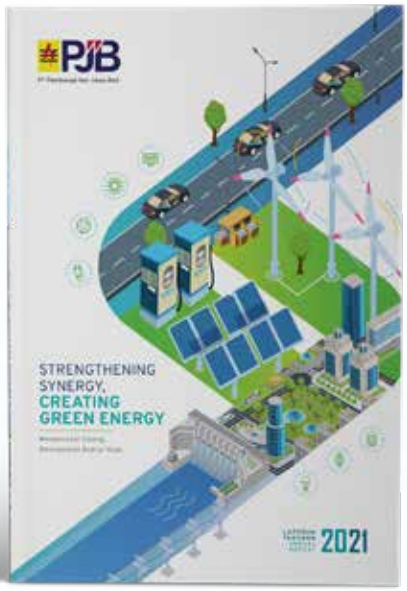

2021

'Sinergi' dan 'Energi' menjadi kata kunci yang akan membawa PJB memperkuat kolaborasi dengan segenap pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan energi hijau dan bersih. Waktunya bagi PJB untuk *Go to Market* dengan memperluas peluang potensi bisnis "*Beyond* KWh" baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
'Synergy' and 'Energy' are keywords that will bring PJB to strengthen collaboration with all stakeholders in supporting green and clean energy development. It's time for PJB to Go to Market by expanding "Beyond KWh" business potential opportunities both domestically and abroad.

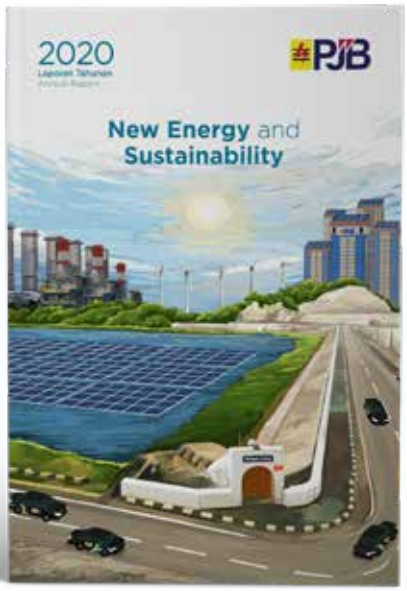

2020

Kami telah melakukan transformasi untuk menjaga agility dan semangat adaptasi yang berkesinambungan dengan mengoptimalkan *core competency* dan inovasi yang menjunjung tinggi prinsip tata kelola, kepatuhan dan pengelolaan risiko yang baik. Dengan melakukan segala sesuatu dengan baik, lebih baik dan lebih baik lagi untuk menjadi yang terbaik kelak akan dapat mewujudkan aspirasi visi PJB untuk menjadi perusahaan energi terpercaya, terdepan, dan terbaik di Indonesia maupun regional.
We have undertaken transformation to maintain agility and spirit of sustainable adaptation by optimizing core competencies and innovation upholding the principles of good governance, compliance and risk management. By performing everything well, better and even better to be the best in the future, it will be able to realize PJBâ€™s vision aspirations to become a trusted, leading, and best energy company in Indonesia and regionally.

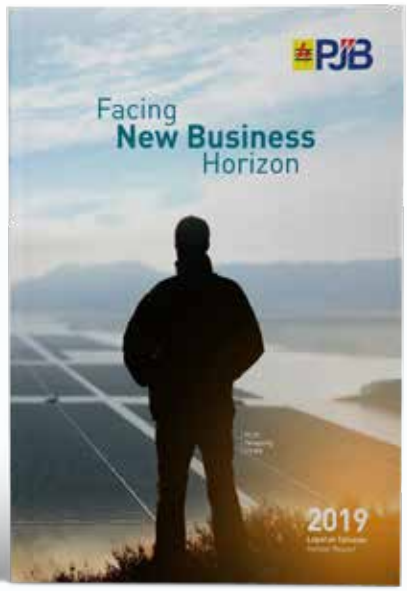

2019

Kami terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak guna mendorong portofolio bisnis yang semakin besar. Selain itu, juga mengembangkan bisnis untuk membangun horizon bisnis baru mewujudkan bisnis pembangkitan terintegrasi dalam mendukung kesinambungan korporasi dalam jangka panjang. Kami berupaya untuk terus meningkatkan nilai Perusahaan, baik bagi pemegang saham maupun segenap pemangku kepentingan lainnya.

We continue to build collaboration with various parties to drive a larger business portfolio. Furthermore, we also develop business to build new business horizon to realize an integrated generation business to support long-term corporate sustainability. We strive to continuously increase the Company values, both for the shareholders and all other stakeholders.

2018

PJB hadir untuk mewujudkan harapan pelanggan, mitra kerja, masyarakat dan pemegang saham dengan kinerja nyata, inovasi, kreatifitas, konsistensi penerapan tata kelola perusahaan serta komitmen atas tanggung jawab sosial untuk senantiasa mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

PJB presents to realize the expectations of customers, partners, communities and shareholders with real performance, innovation, creativity, consistency in the implementation of corporate governance and commitment to social responsibility to always supporting the realization of sustainable development.

Daftar Isi
Content

Tema dan Kesinambungan Tema
Theme and The Continuity 2

Daftar Isi
Content 6

Transformasi PT Pembangkitan Jawa Bali menjadi PT PLN Nusantara Power (PLN NP)
Transformation of PT Pembangkitan Jawa Bali into PT PLN Nusantara Power (PLN NP) 10

Keunggulan PLN Nusantara Power
PLN Nusantara Power's Excellence 12

Pendahuluan
Introduction

Komitmen dalam Mendukung Percepatan Transisi Energi Menuju PLN Nusantara Power Berkelanjutan
PLN Nusantara Power's Commitment in Supporting the Acceleration of the Energy Transition 16

Ringkasan Kinerja Utama 2022
2022 Key Performance Highlights 22

Penghargaan Tahun 2022
2022 Awards 24

Sertifikasi 2022
2022 Certification 40

Ikhtisar Data Keuangan Penting
Key Financial Data Highlights 44

Peristiwa Penting 2022
Event Highlights 2022 58

Testimoni
Testimony 64

Laporan Kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan
Report to Shareholders and Stakeholders

Laporan Dewan Komisaris
Report from the Board of Commissioners 68

Laporan Direksi
Report from the Board of Directors 84

Surat Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2022 PT PLN Nusantara Power
Statement from the Board of Directors and Board of Commissioners Regarding Responsibility for the 2022 Annual Report of PT PLN Nusantara Power 104

Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal PT PLN Nusantara Power
Accountability Statement by The Board of Directors Over Risk Management and Internal Control System PT PLN Nusantara Power 106

Profil Perusahaan
Company Profile

Identitas Perusahaan Corporate Identity	110
Riwayat Singkat Perusahaan Brief History	112
Bidang Usaha Business Line	116
Produk dan Layanan Products and Services	118
Skema Penyaluran Tenaga Listrik Scheme of Electricity Transmission	128
Visi, Misi dan Budaya Perusahaan Vision, Mission and Corporate Culture	131
Struktur Organisasi Organizational Structure	134
Perubahan Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Changes in the Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors	137
Profil Dewan Komisaris Profile of the Board of Commissioners	139
Profil Direksi Profile of the Board of Directors	146
Jumlah dan Komposisi SDM Number and Composition of HR	152
Pengembangan Kompetensi SDM HR Competency Development	156
Struktur dan Komposisi Pemegang Saham Structure and Composition of Shareholders	170
Struktur Grup PLN Nusantara Power Group Structure of PLN Nusantara Power	173
Profil dan Kilas Kinerja Entitas Anak, Cucu-Cicit, Asosiasi dan Ventura Bersama Profile and Performance Overview of Subsidiaries, Second to Third-Tier Subsidiaries, Associates and Joint Ventures	178
Wilayah Operasional Operational Areas	198
Alamat Kantor Pusat, Kantor Perwakilan dan Unit Usaha Address of Head Office, Representative Office and Business Unit	200
Lembaga dan Profesi Penunjang Supporting Institutions and Professions	203
Kronologis Pencatatan Saham Chronology of Share Listing	204
Kronologis Pencatatan Efek Lainnya Chronology of Other Securities Listing	204
Keanggotaan Asosiasi Association Membership	205
Informasi pada Situs Web Perusahaan Information on the Company's Website	206

Aspek Penting Pendukung Bisnis
Key Aspect of Business Support

Penguatan Kontribusi Sumber Daya Manusia Strengthening Human Resources Contribution	210
Dukungan Kuat Teknologi Informasi Solid Support of Information Technology	227
PLN Nusantara Power *Integrated Management System* 2.0 (PLN Nusantara Power -IMS 2.0) PLN Nusantara Power Integrated Management System 2.0 (PLN Nusantara Power - IMS 2.0)	235
Pengembangan Strategi Manajemen Aset Development of Asset Management Strategy	240
Optimalisasi Potensi Melalui Pengembangan Usaha Optimizing Potential Through Business Development	245

Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis

Analisis Industri Industry Analysis	250
Analisis Operasi Per Segmen Usaha Operational Analysis per Business Segment	257
Profitabilitas Per Segmen Profitability by Segment	286
Analisis Kinerja Keuangan Financial Performance Analysis	291
Analisis Laba Rugi Komprehensif Analysis on Comprehensive Profit or Loss	291
Analisis Posisi Keuangan Financial Position Analysis	303
Analisis Arus Kas Cash Flows Analysis	322
Analisis Kemampuan Membayar Utang, Tingkat Kolektibilitas Piutang dan Rasio Keuangan Lainnya Analysis of Solvency, Receivables Collectibility Rate, and Other Financial Ratios	325
Struktur Modal Capital Structure	334
Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal Material Commitments for Capital Goods Investment	336
Realisasi Investasi Barang Modal Realization of Capital Goods Investment	343
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Perusahaan Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2023 Comparison between Target and Realization of Company Performance in 2022 and Projection for 2023	347
Kebijakan Dividen Dividend Policy	358
Kontribusi kepada Negara Contribution to the State	360
Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan Manajemen Employee and Management Stock Option Program	362
Realisasi Dana Penawaran Umum Realization of Public Offering Proceeds	362
Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/ Berelasi Information on Material Transactions Containing Conflict of Interest and/or Transactions with Affiliated/Related Parties	363
Informasi Material Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, dan Restrukturisasi Utang/Modal Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Acquisition, and Debt/Capital Restructuring	371
Perubahan Kebijakan Akuntansi Changes in Accounting Policy	372
Perubahan Peraturan dan Dampaknya terhadap Perusahaan Regulatory Changes and the Impacts on the Company	376
Informasi dan Fakta Material setelah Tanggal Laporan Akuntan Material Information and Facts after the Accountant's Report Date	382
Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Luar Biasa dan Jarang Terjadi Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events	383
Key Performance Indicator dan Tingkat Kesehatan Key Performance Indicator and Company Soundness Level	383
Informasi Kelangsungan Usaha Business Continuity Information	386
Dampak Perubahan Harga terhadap Pendapatan dan Laba Perusahaan Impact of Price Changes on Company Revenue and Profit	390
Aspek Pemasaran dan Pangsa Pasar Marketing and Market Share Aspect	391
Prospek Usaha Business Prospect	394

Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance

Penerapan Tata Kelola Berkelanjutan Implementation of Sustainable Governance	406
Struktur Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Structure	442

Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders 445

Dewan Komisaris
Board of Commissioners 451

Direksi
Board of Directors 470

Hubungan Afilisasi, Kepemilikan Saham serta Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi
Affiliation, Share Ownership and Work Relations of the Board of Commissioners and the Board of Directors 488

Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
Policy on the Composition Diversity of the Board of Commissioners and the Board of Directors 497

Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris
Nomination and Remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners 498

Sekretaris Dewan Komisaris
The Board of Commissioners Secretary 507

Komite Audit
Audit Committee 511

Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee 523

Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Risk Management and Compliance Committee 535

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary 547

Audit Internal
Internal Audit 554

Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System 569

Auditor Eksternal
External Auditor 573

Manajemen Risiko
Risk Management 577

Standar Etika Perusahaan
Code of Conduct 595

Kebijakan Anti Korupsi
Anti-Corruption Policy 608

Whistleblowing System
Whistleblowing System 615

Perkara Hukum dan Sanksi yang Dikenakan Kepada Perusahaan
Legal Cases and Sanctions Imposed on the Company 623

Pengadaan Barang dan Jasa
Procurement of Goods and Services 627

Informasi dan Data Perusahaan
Company Information and Data 632

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

Strategi Keberlanjutan
Sustainability Strategy 640

Kinerja Keberlanjutan Aspek Keuangan
Sustainability Performance of Economic Aspect 645

Kinerja Keberlanjutan Aspek Lingkungan
Sustainability Performance of Environment Aspect 650

Kinerja Sosial
Social Performance 671

Laporan Keberlanjutan
Sustainability Report 697

Laporan Keuangan Audited
Audited Financial Statement

Laporan Keuangan Audited Tahun 2022
Audited Financial Statement of 2022 700

Lampiran
Appendix

Referensi SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten
Reference to SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 regarding the Form and Content of the Issuer's Annual Report 820

Transformasi PJB Menjadi PLN Nusantara Power

Transformation of PJB into PLN Nusantara Power

Tahun 2022, tepat di usia Perusahaan yang ke-27 tahun, Perusahaan siap meningkatkan kontribusi dalam industri pembangkitan tenaga listrik. Pada tanggal 21 September 2022, **PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB)** bertransformasi menjadi *Subholding* PT PLN (Persero) yaitu **PT PLN Nusantara Power (PLN NP)** sebagai *Generation Company* 1 (GenCo-1).

Kontribusi PLN NP menjadi semakin strategis dalam pengelolaan aset negara yang selama ini menjadi lini depan operasional PLN dalam melistriki nusantara. Bersama 3 (tiga) *Subholding* PLN lainnya, PJB yang kini telah menjelma menjadi PLN NP akan saling terkoneksi terutama dalam memaksimalkan rantai pasok bisnis PLN ke depan. PLN NP mengelola aset pembangkitan di seluruh Indonesia dengan Total Kapasitas sebesar **23.712 MW pada tahun 2025** dan **berkontribusi 32%** dari **Kapasitas Terpasang pembangkit secara nasional sebesar 73.736 MW**.

Perubahan logo dan nama Perusahaan menjadi salah satu momen sejarah terjadinya transformasi PLN NP menjadi *Subholding* PLN. Selain itu berbagai penyesuaian strategis dilakukan mempertimbangkan ukuran dan kompleksitas Perusahaan saat ini seperti perubahan struktur organisasi termasuk perubahan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi.

2022 coincides the 27th year of the Company, we are ready to improve contribution to the power generation industry. On September 21, 2022, **PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB)** transformed into a Subholding of PT PLN (Persero), namely **PT PLN Nusantara Power (PLN NP)** as Generation Company 1 (GenCo-1).

PLN NP's contribution is increasingly being strategic in managing state assets which have been the front line of PLN operations in providing electricity to the archipelago. Together with 3 (three) other PLN Subholdings, PJB which is currently transformed into PLN NP will be interconnected, especially in maximizing PLN business supply chain going forward. **PLN NP manages generation assets in all over Indonesia with a total capacity of 23,712 MW in 2025 and contributes 32% of the national installed capacity of 73,736 MW.**

Change in the Company's logo and name is one of the historical moments of the PLN NP transformation into a PLN Subholding. Moreover, PLN NP also adjusts various strategic considering the current size and complexity of the Company, such as changes in the organizational structure, including changes in the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Keunggulan PLN Nusantara Power

PLN Nusantara Power's Excellence

Implementasi *Digital Power Plant*

Implementation of Digital Power Plant

PLN NP telah mengimplementasikan *Digital Power Plant* pada 16 Unit Pembangkit dari target sebesar 13 Unit Pembangkit. *Digital Power Plant* mencakup implementasi modul *predictive/proactive maintenance* untuk meningkatkan keandalan dan efisiensi pembangkit.

PLN NP has implemented Digital Power Plants in 16 Generating Units from the target of 13 Generating Units. Digital Power Plant includes the implementation of predictive/proactive maintenance modules to improve power plant reliability and efficiency.

Penerapan GCG Terbaik di PLN Grup

The Best GCG Implementation in the PLN Group

PLN NP berhasil meraih skor tertinggi di PLN Grup atas *assessment* GCG Tahun 2022 oleh BPKP Jawa Timur. Berdasarkan asesmen penerapan praktik-praktik GCG dapat disimpulkan bahwa kondisi penerapan GCG pada PT PLN Nusantara Power mencapai predikat kategori **"Sangat Baik"** dengan skor 95,54.

PLN NP succeed to achieve the highest score in the PLN Group for the 2022 GCG assessment by East Java BPKP. Based on the assessment of GCG practices, it can be concluded that the condition of GCG implementation at PT PLN Nusantara Power achieves the title of **"Very Good"** category with a score of 95.54.

Pioneer: Implementasi *Biomass Cofiring*

Pioneer: Implementation of Biomass Cofiring

PLN NP sebagai *pionir* pemanfaatan *Co-Firing* di Indonesia telah melakukan pengujian di **20 pembangkit** dan beroperasi secara komersial di **16 pembangkit**, dengan total produksi MWh *Green* sebesar **250,3 GW**.

PLN NP as a pioneer in the use of Co-Firing in Indonesia has tested **20 power plants** and is operating commercially at **16 power plants**, with a total MWh Green production of **250.3 GW**.

Kinerja Perusahaan Asosiasi Unggul melalui Skema *Co-Investment*

Excellent Performance of The Associates Through the Co-Investment Schemes

PLN NP berhasil menerapkan skema *co-investment* atau kerjasama investasi bersama perusahaan asosiasi yang dibuktikan dengan peningkatan kinerja perusahaan asosiasi dan mampu memberikan kontribusi laba sebesar Rp2,85 Triliun pada tahun 2022.

PLN NP has succeeded in implementing a co-investment scheme or investment cooperation with the associates as evidenced by the increased performance of the associates and being able to contribute a profit of Rp2.85 trillion in 2022.

Peluncuran CSIRT Perdana di Sektor Energi dan Sumber Daya Alam

Launching of the Initial CSIRT in the Energy and Natural Resources Sector

PLN NP telah memperkuat keamanan siber dan mengawal transformasi digital berkolaborasi dengan BSSN melalui peluncuran *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT).

PLN NP has strengthened cyber security and supervised the digital transformation in collaboration with BSSN through the launch of the Computer Security Incident Response Team (CSIRT).

Pengembangan PLTS Terapung Terbesar di Asia Tenggara

Development of the Biggest Floating SPP in Southeast Asia

Floating PV Cirata dengan kapasitas 145 MW berlokasi di Purwakarta yang diproyeksikan dapat memproduksi energi bersih sebesar 250 GWh per tahun dan terhubung dengan sistem kelistrikan 150KV di Regional Jawa Madura Bali.

Floating PV Cirata with a capacity of 145 MW is located in Purwakarta which is projected to produce 250 GWh of clean energy per year and is connected to a 150KV electricity system in the Java Madura Bali Region.

PLN NP Melistriki Hingga Daerah Terpencil melalui Pembangkit EBT

PLN NP Distributes Electricity to the Remote Areas through NRE Power Plant

PLN NP bersama PLN UID Jawa Timur akan segera mewujudkan aliran listrik pada 6 pulau terpencil di provinsi Jawa Timur melalui pembangunan PLTS antara lain Pulau Gili Noko, Pulau Kemirian, Pulau Sadulang Besar, Pulau Sepangkur Besar, Pulau Saibus dan Pulau Saular.

PLN NP together with PLN UID East Java will soon provide electricity to 6 remote islands in East Java province through the CFPP construction, including Gili Noko Island, Kemirian Island, Sadulang Besar Island, Sepangkur Besar Island, Saibus Island and Saular Island.

Pendahuluan

Introduction

Komitmen dalam Mendukung Percepatan Transisi Energi Menuju PLN Nusantara Power Berkelanjutan

Commitment in Supporting the Acceleration of the Energy Transition Towards Sustainable PLN Nusantara Power

PLN NP memantapkan posisinya sebagai subholding pembangkit listrik terbesar di Asia Tenggara. Guna mewujudkan visinya untuk menjadi perusahaan terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara, PLN NP gencar melakukan terobosan di bidang energi baru dan terbarukan (EBT), diantaranya mempelopori *co-firing* sebagai upaya untuk menghijaukan PLTU dan mengembangkan sejumlah pembangkit EBT. Inisiatif dalam menghadirkan *green energy* semakin menguatkan komitmen PLN NP untuk tidak hanya memproduksi listrik yang andal namun juga listrik yang berlandaskan azas lingkungan.

PLN NP strengthens its position as the largest power plant subholding in Southeast Asia. In the framework to realize its vision of becoming a leading and trusted company in the sustainable energy business in Southeast Asia, PLN NP is aggressively making breakthroughs in the field of new and renewable energy (NRE), including pioneering co-firing as the effort for green power plants and developing a number of NRE power plants. Initiative in presenting green energy further strengthens PLN NP's commitment to not only producing reliable electricity but also electricity based on environmental principles.

Siap Memimpin Transformasi EBT di Indonesia melalui Pengembangan PLTS Terapung Cirata

Ready to Lead NRE Transformation in Indonesia through the Development of Cirata Floating SPP

PLN NP terus melakukan berbagai upaya dalam memimpin transformasi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Indonesia, mulai dari pengelolaan biomassa sebagai *co-firing* hingga pengembangan pembangkit-pembangkit berenergi hijau pun terus dilaksanakan. Salah satunya pengembangan PLTS Terapung Cirata yang berkapasitas 145 MW dan menjadi PLTS terapung pertama di Indonesia dan memiliki kapasitas terbesar di Asia Tenggara.

PLTS Terapung Cirata yang menempati area seluas kurang lebih 200 Hektar di Waduk Cirata ini akan memasok listrik untuk 50.000 rumah serta menyerap tenaga kerja hingga 800 orang. PLTS Terapung ini termasuk ke dalam energi EBT yang ramah lingkungan, sehingga beroperasinya PLTS ini akan mengurangi hingga 214.000 ton emisi CO_2. Dengan kehadiran PLTS ini dapat mendorong ketercapaian bauran EBT sebesar 23% di tahun 2025 sekaligus menjadi program strategis dalam Transformasi PLN terutama di pilar ***'GREEN'***.

PLN NP continues to make various efforts to lead the New and Renewable Energy (NRE) transformation in Indonesia, starting from managing biomass as co-firing to developing the green energy power plants, including the development of Cirata Floating SPP with a capacity of 145 MW and is the first floating SPP in Indonesia and has the largest capacity in Southeast Asia.

Cirata Floating SPP, which occupies an area of approximately 200 hectares in the Cirata Reservoir, will supply electricity to 50,000 people houses and absorb up to 800 workers. This Floating SPP is included in environmentally friendly EBT energy, so that this SPP operation will reduce up to 214,000 tons of CO_2 emissions. This SPP existence encourages the achievement of the NRE mix by 23% in 2025 as well as being a strategic program in PLN Transformation, especially in the **'GREEN'** pillar.

Menanam Kaliandra, Wujud Komitmen PLN Nusantara Power Sediakan Energi Hijau

Planting Calliandra, Manifestation of PLN Nusantara Power's Commitment to Providing Green Energy

PLN NP senantiasa mendukung upaya Pemerintah dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dan mencapai *Net Zero Emission* di tahun 2060. Sektor energi adalah sektor yang menghasilkan CO_2 dan yang paling mahal dari sisi pencapaian keseimbangan dalam mencapai target *Nationally Determined Contribution* (NDC). Salah satu langkah konkrit yang ditempuh PLN NP adalah melalui transisi energi untuk menuju *zero* maupun *low carbon emission* untuk energi, dan *co-firing* menjadi salah satu solusi untuk menjawab isu tersebut.

PLN NP sendiri telah mempersiapkan tanaman kaliandra sebanyak 3.211.740 pohon dengan luas lahan 713,72 ha di kawasan PLTA Cirata dan sejak 2021, setidaknya PLN NP telah menanam tanaman jenis kaliandra di lahan seluas 25 ha. Pada Desember 2022, PLN NP mulai memanen tanaman pohon kaliandra sebanyak 327.500 pohon dari lahan seluas 72,78 ha yang akan digunakan sebagai pengganti bahan baku untuk *co-firing* Pembangki Listrik Tenaga Uap (PLTU). Hingga 2025, PLN menargetkan program *co-firing* ini bisa dilakukan di 52 lokasi PLTU dengan total kapasitas 18.154 MW yang membutuhkan biomassa 10,2 juta ton/tahun.

PLN NP menjadi yang pertama di PLN Group dalam mendukung transformasi PLN dengan menjadikan aset lahan di sekitar PLTA Cirata menjadi hutan tanaman energi pendukung bahan *co-firing* di PLTU dan menjadi pusat *renewable energy* di PLN Grup. Di kawasan PLTA Cirata juga akan dibangun instalasi pengolahan biomassa dengan penggunaan nilai TKDN 90 persen yang dapat memproduksi *sawdust* (serbuk kayu) dengan proyeksi produksi sebesar 189.133 ton dari total luas lahan. Nantinya produksi sawdust dapat digunakan sebagai bahan baku *co-firing* oleh PLTU Indramayu.

PLN NP is committed to supporting the Government's efforts to reduce greenhouse gas emissions and achieve Net Zero Emissions in 2060 to actively prevent the climate changes. Energy is a sector that produces CO_2 and is the most expensive in terms of achieving a balance on the Nationally Determined Contribution (NDC) target. PLN NP applies the one of the concrete steps through the energy transition towards zero or low carbon emissions for energy, and co-firing is one of the solutions to address this issue.

PLN NP already prepared 3,211,740 calliandra trees with a land area of 713.72 ha in the Cirata hydropower area and since 2021, at least PLN NP has planted calliandra plants in an area of 25 ha. In December 2022, PLN NP began harvesting 327,500 calliandra trees from an area of 72.78 ha which will be used as a partial substitute for raw materials for the co-firing of the CFPP. Until 2025, PLN targets that the co-firing program can be carried out in 52 CFPP locations with a total capacity of 18,154 MW which requires 10.2 million tons of biomass/year.

PLN NP is the first in the PLN Group to support PLN transformation by turning the land assets around the Cirata Hydropower Plant into energy plantations supporting co-firing materials at the CFPP and becoming a renewable energy center in the PLN Group. In the Cirata hydropower area, a biomass processing installation will also be built using a TKDN value of 90 percent which can produce sawdust with a projected production of 189,133 tons of the total land area. Later sawdust production can be used as raw material for co-firing by Indramayu CFPP.

Hadirkan Energi Hijau untuk Indonesia Bersih Melalui Implementasi *Co-firing*

Presenting Green Energy for Clean Indonesia Through Dismissal of Co-firing Implementation

PLN NP terus menggalakkan *co-firing* pada PLTU dengan menggunakan biomassa bahkan kedepan tengah direncanakan menggunakan ammonia. Melalui implementasi *co-firing*, pemanfaatan EBT dapat dilaksanakan secara cepat tanpa perlu adanya pembangunan pembangkit baru. Hingga saat ini, terdapat tiga jenis konfigurasi *co-firing* yang telah digunakan, yaitu *direct co-firing*, *indirect cofiring*, dan *parallel co-firing*.

Direct co-firing pada konfigurasi ini, biomassa (sebagai bahan bakar sekunder) dimasukkan bersamaan dengan batubara (sebagai bahan bakar primer) ke dalam *boiler* yang sama. *Direct co-firing* lebih umum digunakan karena paling murah. Sementara untuk konfigurasi *indirect co-firing* mengacu pada proses gasifikasi biomassa, di mana gas hasil gasifikasi biomassa kemudian diumpankan ke dalam pembakar dan dibakar bersama batubara. Sedangkan *Parallel co-firing* melibatkan suatu pembakar dan boiler terpisah untuk biomassa, di mana hasil pembakaran dari biomassa akan membangkitkan uap yang kemudian akan digunakan pada sirkuit *power plant* pembakaran batubara.

Sampai dengan tahun 2022, implementasi *co-firing* telah dikomersialisasi di 16 pembangkit dan diujicobakan di 20 pembangkit. Selain menggunakan substitusi bahan bakar dari biomassa, PJB juga berencana mengembangkan *co-firing* menggunakan *ammonia* yang bekerja sama dengan IHI Corporation asal Jepang.

PLN NP telah mencapai target produksi energi hijau dari *co-firing* 250,397 MWh atau setara dengan reduksi emisi karbon 251.569,85 MT. Penerapan *co-firing* pada PLTU merupakan upaya PLN NP dalam meningkatkan kontribusi target bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23% pada 2025 serta merupakan suatu *quick win* untuk percepatan penggunaan energi hijau tanpa biaya investasi tinggi serta pemanfaatan sumber energi lokal sekitar wilayah PLTU.

PLN NP continues to promote CFPP co-firing using biomass and even it is planned to use ammonia in the future. Through the co-firing, the NRE usage can be carried out quickly without the need for the construction of new power plants. As of now, there are three types of co-firing configurations that have been used, namely direct co-firing, indirect co-firing, and parallel co-firing.

Direct co-firing in this configuration, biomass (as a secondary fuel) is included together with coal (as a primary fuel) into the same boiler. Direct co-firing is more commonly used due to its best price. Meanwhile, indirect co-firing configuration refers to the biomass gasification process, where the gas from the gasification of the biomass is then fed into the burner and burned with coal. Whereas Parallel co-firing involves a separate burner and boiler for biomass, where the combustion products of the biomass will generate steam which will then be used in the coal-burning power plant circuit.

Until 2022, the co-firing has been commercialized in 16 power plants and tested in 20 power plants. Apart from using substitute fuel from biomass, PLN NP also plans to develop co-firing using ammonia in collaboration with IHI Corporation from Japan.

PLN NP achieved its green energy production target of co-firing 250.397 MWh or equivalent to reducing carbon emissions of 251,569.85 MT. Co-firing application at CFPP is PLN NP's effort to increase the contribution of the New Renewable Energy (NRE) mix target by 23 percent in 2025 and is a quick win for accelerating the use of green energy without high investment costs and the utilization of local energy sources around the CFPP area.

Green Power Solution, Percepat Transisi Energi melalui Proyek Solar Panel

Green Power Solution, Accelerating Energy Transition through Solar Panel Projects

Melalui layanan *Green Power Solution*, PLN NP memiliki keunggulan di bidang operation dan maintanance Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Hal ini juga bertujuan untuk mewujudkan transisi energi di Indonesia melalui Proyek Solar Panel.

Beberapa proyek PLTS Atap PLN NP yang berhasil antara lain, yaitu PLN UP3 Makassar Selatan dengan perbaikan dan *upgrade inverter* PLTS Tanakeke dan Kodingareng; PLN UP3 Makassar Utara dengan jasa *Assesment* PLTS Balang Lampo & PLTS Salemo; PLN UP3 Baubau dengan jasa Perbaikan Optimalisasi PLTS Kapota; serta PLN UIW Suluttenggo dengan rehabilitasi solar panelnya.

Komitmen PLN NP untuk menghadirkan listrik yang andal dan ramah lingkungan bukan hanya ditujukan bagi wilayah yang telah terjangkau sistem kelistrikan PLN, namun juga menjangkau hingga wilayah kepulauan terpencil. PLN NP telah menandatangani kontrak dengan PLN untuk mengerjakan *Engineering Procurement Construction* (EPC) PLTS milik PLN tersebut. Ke enam pulau tersebut adalah Pulau Gili Noko, Kemirian, Sadulang Besar, Sepangkur Besar, Saibus, dan Saular.

Through the Green Power Solution service, PLN NP has advantages in the operation and maintenance sector of Solar Power Plants (SPP). It also purposes to realize the energy transition in Indonesia through the Solar Panel Project.

PLN NP has some of the successful Rooftop SPP projects, including PLN UP3 South Makassar with the repair and upgrade of the Tanakeke and Kodingareng SPP inverters; PLN UP3 North Makassar with Balang Lampo SPP & Salemo Assessment services SPP; PLN UP3 Baubau with Kapota SPP Optimization Repairment services; as well as PLN UIW Suluttenggo with the rehabilitation of its solar panels.

PLN NP is committed to delivering reliable and environmentally friendly electricity, not only purposed at areas that have been covered by the PLN electricity system, but also reaches out to remote island areas. PLN NP signed a contract with PLN to work on the Engineering Procurement Construction (EPC) of PLN's SPP. The six islands include Gili Noko, Kemirian, Sadulang Besar, Sepangkur Besar, Saibus, and Saular.

Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan, PLN NP Membangun Rumah Tinggal Layak Huni dari FABA

Realizing Sustainable Development, PLN NP Builds Livable Residential Houses from FABA

PLN NP melalui Unit Bisnis Jasa *Operation & Maintenance* (UBJOM) Pacitan memanfaatkan *Fly Ash Bottom Ash* (FABA) sisa pembakaran batubara PLTU untuk mengembangkan proyek Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu). FABA merupakan produk sisa dari pembakaran batubara yang memiliki karakteristik material yang 'terbang' dan 'terendapkan'. PLN NP tidak begitu saja mengabaikan sisa pembakaran batubara tersebut, tetapi justru semakin memanfaatkannya menjadi barang yang berguna untuk masyarakat.

PLN NP through the Pacitan Operations & Maintenance Service Business Unit (OMSBU) already leverage the Fly Ash Bottom Ash (FABA) from CFPP coal burning residue to develop a Livable Residential House (Rutilahu) project. FABA is a by-product of coal combustion with the characteristics of 'flying' and 'precipitating' material. PLN NP doesn't just ignore the remaining coal burning, but instead increasingly uses it to become a useful item for the community.

Program pemanfaatan FABA ini juga menjadi inovasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar PLTU sejalan dengan target pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) terkait penghapusan kemiskinan (*no poverty*) serta industri, inovasi dan infrastruktur.

This FABA utilization program is also an innovation to improve the welfare for community in the CFPP surrounding in line with the Sustainable Development Goals (SDGs) related to no poverty as well as industry, innovation and infrastructure.

Sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, PLN NP UBJOM Pacitan memanfaatkan limbah batubara menjadi campuran bahan bangunan untuk program CSR Perusahaan. Diantaranya pembangunan Rutilahu, serta peningkatan infrastruktur di sejumlah desa di sekitar PLTU. Salah satunya dengan pembangunan rumah tinggal layak huni (RTLH) di Pacitan, Jawa Timur. Tahap pertama pembangunan rumah dilakukan pada tahun 2021, dan bertambah menjadi 3 rumah pada tahun 2022. RTLH ini diperuntukan bagi masyarakat prasejahtera di kawasan sekitar UP Pacitan. Program ini adalah hasil sinergi bersama PLN NP dan Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam usaha pengentasan kemiskinan.

As the corporate social responsibility, PLN NP Pacitan OMSBU leverages coal waste to become a mixture of building materials for the Company's CSR program, including the construction of Rutilahu, as well as improving infrastructure in a number of villages around the CFPP. One of them is the construction of livable houses (RTLH) in Pacitan, East Java. The first phase will be constructed in 2021, and will increase to 3 houses in 2022. This RTLH is intended for underprivileged communities in the area around Pacitan GU. This program is the result of a synergy with PLN NP and the Government of Pacitan Regency in poverty alleviation efforts.

Program CSR UP Pacitan ini merupakan wujud kontribusi PLN NP dalam pembangunan berkelanjutan (SDGs), yakni pengentasan kemiskinan dan mengangkat taraf hidup masyarakat.

CSR program by Pacitan GU is manifestation of PLN NP's contribution to sustainable development (SDGs), namely poverty alleviation and raising people's living standards.

Ringkasan Kinerja Utama 2022

Key Performance Highlights

PLN NP berhasil mencetak Laba Rp 6,58 triliun. Laba ini merupakan prestasi PLN NP karena melampaui target sebesar 62% dari Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) tahun 2022 sebesar Rp 4,05 triliun. PLN NP juga menjadi salah satu perusahaan unggulan di PLN Grup yang berhasil membukukan laba investasi dari perusahaan asosiasi melalui *co-investment*. Pertumbuhan kinerja keuangan PLN NP ini sejalan dengan pertumbuhan Aset Perusahaan yang mengalami kenaikan sebesar Rp 2,76 triliun sehingga kini total aset PLN NP mencapai Rp 174,92 triliun.

PLN NP managed to record a profit of Rp6.58 trillion. This profit is PLN NP achievement because it exceeded the target of 62% of the 2022 Annual Budget and Operational Plan (ABOP) of Rp4.05 trillion. PLN NP is also become one of the leading companies in the PLN Group that has successfully recorder investment returns from associated companies through co-investment. PLN NP's financial performance grew in line with the Company's asset growth which increased by Rp2.76 trillion so that current total assets of PLN NP has reached Rp174.92 trillion.

Rp174,92
Triliun Trillion

Total Aset
Total Assets

7,7 GW

Kapasitas Pembangkit
Power Plant Capacity

17.064 GWh

Produksi Listrik
Electricity Production

16.379 GWh

Penjualan Energi Listrik
Electric Power Sales

Rp27,20
Triliun Trillion

Pendapatan Usaha
Operating Revenues

Rp6,58
Triliun Trillion

Laba Bersih
Net Profit

Go Live* Implementasi *Digital Power Plant
Go Live Digital Power Plant Implementation

PLTU CFPP Paiton 9
PLTGU CCPP Gresik
PLTA HPP Cirata
PLTU CFPP Pulang Pisau
PLTU CFPP Bangka
PLTU CFPP Tidore
PLTU CFPP Kendari

Proper Emas
Gold Proper

5 UP Paiton, UP Gresik, UBJOM Paiton, UBJOM Indramayu, dan UBJOM Rembang
Paiton GU, Gresik GU, Paiton OMSBU, Indramayu OMSBU, and Rembang OMSBU.

4 Proper Hijau
Green Proper

12 Proper Biru
Blue Proper

K3L Terbaik 2022 PT PLN (Persero)
The Best HSE 2022 PT PLN (Persero)

Sebaran Pembangkit
Power Plant Distribution

Sumatera – Kalimantan 349 Unit – 4.484 MW
Jawa Madura Bali 97 Unit – 12.799 MW
Sulawesi 177 Unit – 975 MW

Jumlah Pegawai
Total Employees

3.034
Orang
Employees

Karyawan milenial PLN NP (usia 21-40) sebesar:
PLN NP millennial employees (21-40 years old):
70,4%

Biaya Pengembangan SDM
HR Development Cost

Rp61,29
Miliar Billion

Jumlah Pelatihan
Total Training
675 *Batch*

Jumlah Peserta
Total Participant
10.089 karyawan employee

Skor *Assessment* GCG
GCG Assessment Score

Predikat "Sangat Baik" Skor Tertinggi di PLN Grup
"Very Good" Predicate Highest Score in PLN Group

95,54

8.838
Orang Tersertifikasi
Certified Employees

DJK Konsultan Pembangkit, DJK Operasi, DJK Pemeliharaan, Engineering, Audit/Sistem, Bisnis, Human Capital, IT, Keuangan, LK3, Logistik, dll. PLN NP telah memiliki *expertise* pada bidang I&C *System*, *Electrical*, *Steam Turbine*, PC *Boiler*, *Gas Turbine*, dan CFB *Boiler*.
Generator Consultant DJK, Operation DJK, Maintenance DJK, Engineering, Audit/System, Business, Human Capital, IT, Finance, LK3, Logistics, etc. PLN NP already has expertise in the field of I&C System, Electrical, Steam Turbine, PC Boiler, Gas Turbine and CFB Boiler.

Tingkat Kesehatan Perusahaan
Company Soundness Level

AAA (Sehat) dengan Skor:
AAA (Healthy) with Score:

102,88

Prestasi dan Penghargaan Tahun 2022

Achievements and Awards in 2022

Penghargaan Internasional

International Awards

26 Januari 2022

January 26, 2022

Medali Emas oleh "AVATOR" dalam Ajang Internasional

Karya inovasi PJBers "AVATOR" berhasil meraih medali emas pada 2 ajang penghargaan internasional yaitu ITEX (*International, Innovation & Technology Exhibition*) di Malaysia dan KIDE (Kaohsiung International Invention & Design Expo) di Taiwan oleh:

- Robbi Auzikni Anaskur
- Apolonius Adhi Hariyatmma P
- Alfian Budiarmoko

Gold Medal by "AVATOR" in International Event

PJBers' innovative work "AVATOR" won gold medals at 2 international award events, namely ITEX (International, Innovation & Technology Exhibition) in Malaysia and KIDE (Kaohsiung International Invention & Design Expo) in Taiwan by:

- Robbi Auzikni Anaskur
- Apolonius Adhi Hariyatmma P
- Alfian Budiarmoko

3 Februari 2022

February 3, 2022

- ***Gold Winner*** pada 16th *Annual Global Contact Center World Awards*. PJB melalui *talent* milenialnya dan sebagai salah satu perwakilan dari PT PLN untuk berkompetisi dalam ajang *Contact Center World* berhasil memperoleh penghargaan yaitu Saurin Apriliawan
- ***Gold Winner*** *Contact Center World Global* kategori *Best Use of Social Media in Contact Center* 2022.
- **Gold Winner** at the 16th Annual Global Contact Center World Awards. PJB through its millennial talent and as one of the representatives of PT PLN to compete in the Contact Center World event succeeded in obtaining an award, namely Saurin Apriliawan.
- **Gold Winner** Contact Center World Global in the category of the Best Use of Social Media in Contact Center 2022.

21 Juli 2022
July 21, 2022

***Asia Responsible Enterprise Award* (AREA) 2022**
Penghargaan *Asia Responsible Enterprise Award* (AREA) yang diraih melalui PJB UBJOM PLTU Rembang atas program Wanita Berdaya Tani.
Asia Responsible Enterprise Award (AREA) 2022
Asia Responsible Enterprise Award (AREA) achieved through PJB Rembang OMSBU CFPP for the Women Empowered Farmers program.

24 November 2022
November 24, 2022

***Asia Sustainability Reporting Rating* (ASRRAT) 2022**
Meraih predikat ***Gold*** di ajang *Asia Sustainability Reporting Rating* (ASRRAT) 2022.
Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2022
PLN NP achieved **Gold** in the Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2022.

8 Desember 2022
December 8, 2022

***Asean Risk Award* (ARA) 2022**
Mendapatkan 2 Penghargaan Internasional pada *Asean Risk Award* (ARA) 2022, kategori *Governance, Risk Management, and Compliance* (GRC) yang diselenggarakan oleh Enterprise Risk Management Academy (ERMA) dari Singapura.
Asean Risk Award (ARA) 2022
PLN NP achieved 2 International Awards at the Asean Risk Award (ARA) 2022 in the Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) category organized by the Enterprise Risk Management Academy (ERMA) from Singapore.

Penghargaan Nasional
National Award

12 Januari 2022
January 12, 2022

4 Penghargaan Program P2 COVID-19
Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 di Tempat Kerja dari Gubernur Jatim untuk:
- UP Brantas (*Platinum*)
- UBJOM Paiton 9 (*Platinum*)
- UBJOM Pacitan (*Gold*)
- UBJOM Tanjung Awar-Awar (*Gold*)

4 COVID-19 P2 Program Award
COVID-19 Prevention and Countermeasure Program Award in the Workplace from the Governor of East Java for:
- Brantas GU (Platinum)
- Paiton 9 OMSBU (Platinum)
- Pacitan OMSBU (Gold)
- Tanjung Awar-Awar OMSBU (Gold)

12 Januari 2022
January 12, 2022

Penghargaan Program P2 HIV AIDS (*Silver*)
Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS di Tempat Kerja dari Gubernur Jatim untuk UBJOM Pacitan.
HIV AIDS P2 Program Award (Silver)
Award for HIV AIDS Prevention and Response Program in the Workplace from the Governor of East Java for Pacitan OMSBU.

12 Januari 2022
January 12, 2022

5 Penghargaan Program K3 – *Zero Accident*
Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) *Zero Accident*:

1. UP Gresik sebanyak 21.287.987 jam kerja tanpa kecelakaan kerja sejak 1 November 2014 - 31 Oktober 2021.
2. UP Paiton sebanyak 19.713.963 Jam Kerja Orang tanpa kecelakaan kerja sejak tanggal 22 November 2012 s/d 31 Oktober 2021.
3. UP Paiton 9 sebanyak 14.270.854 Jam Kerja Orang tanpa kecelakaan kerja sejak tanggal 31 Oktober 2014 s/d 31 Oktober 2021.
4. UBJOM Pacitan sebanyak 10.108.291 Jam Kerja Orang tanpa kecelakaan kerja sejak tanggal 1 November 2017 s/d 31 Oktober 2021.
5. UBJOM Tanjung Awar-awar sebanyak 8.122.517 Jam kerja orang tanpa kecelakaan kerja sejak tanggal 1 Juni 2019 s/d 31 Oktober 2021.

5 OHS Program Awards - Zero Accident
Zero Accident Occupational Safety and Health (OHS) Award:

1. Gresik GU for 21,287,987 working hours without work accident from November 1, 2014 - October 31, 2021.
2. Paiton GU for 19,713,963 man-hours without work accident from November 22, 2012 to October 31, 2021.
3. Paiton 9 GU for 14,270,854 man-hours without work accidents from October 31, 2014 to October 31, 2021.
4. Pacitan OMSBU for 10,108,291 man-hours without work accidents from November 1, 2017 to October 31, 2021.
5. Tanjung Awar2 OMSBU for 8,122,517 man-hours without work accidents from June 1, 2019 to October 31, 2021.

3 Februari 2022
February 3, 2022

***Zero Accident* Award Provinsi Jawa Tengah 2022**
Penghargaan Zero Accident Award Provinsi Jawa Tengah 2022 dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah untuk UBJOM Rembang.
Zero Accident Award for Central Java Province 2022
The Zero Accident Award for Central Java Province 2022 from the Head of the Central Java Provincial Manpower and Transmigration Office for Rembang OMSBU.

9 Maret 2022
March 9, 2022

Indonesia CSR *Excellence Award* 2022 - *The Best Leadership on CSR Program*
Penghargaan *The Best Leadership on CSR Program* PT PJB UBJOM PLTU Indramayu dari First Indonesia Magazine.
Indonesia CSR Excellence Award 2022 - The Best Leadership on CSR Program
The Best Leadership on CSR Program award of PT PJB Indramayu CFPP OMSBU from the First Indonesia Magazine.

30 Maret 2022
March 30, 2022

Top CSR *Awards* 2022 #Star 4
Penghargaan Top CSR *Awards* (Bintang 4) untuk UBJOM PLTU Tenayan dari Majalah Top Business.
Top CSR Awards 2022 #Star 4
Top CSR Awards (4 Star) for Tenayan CFPP OMSBU from Top Business Magazine.

28 April 2022
April 28, 2022

Penghargaan Transparansi Emisi Korporasi 2022
Penghargaan Transparansi Emisi Korporasi (TEK) 2022 yang diselenggarakan oleh Beritasatu Media Holdings dan Bumi Global Karbon, yaitu:
- Gelar *Green* Sektor Korporasi Non Emiten (Kategori Transparansi Penurunan Emisi)
- Gelar *Silver* Sektor Korporasi Non Emiten (Kategori Transparansi Penurunan Emisi)

Corporate Emissions Transparency Awards 2022
The 2022 Corporate Emissions Transparency Award organized by Beritasatu Media Holdings and Bumi Global Karbon, namely:
- Green Title Non-Emitted Corporate Sector (Emission Reduction Transparency Category)
- Silver Title Non-listed Corporate Sector (Emission Reduction Transparency Category)

13 Mei 2022
May 13, 2022

5 Penghargaan P2 COVID (Kemenaker)
Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 di Tempat Kerja:
- UBJOM Indramayu (*Platinum*)
- UBJOM Paiton 9 (*Platinum*)
- UBJOM Kaltim Teluk (*Platinum*)
- UP Muara Karang (*Gold*)
- UBJOM Pacitan (*Gold*)

5 P2 COVID Awards (Ministry of Manpower)
COVID-19 Prevention and Countermeasure Program Awards in the Workplace:
- Indramayu OMSBU (Platinum)
- Paiton 9 OMSBU (Platinum)
- Kaltim Teluk OMSBU (Platinum)
- Muara Karang GU (Gold)
- Pacitan OMSBU (Gold)

13 Mei 2022
May 13, 2022

Penghargaan Program P2 HIV AIDS (Kemenaker)
Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS di Tempat Kerja dari Menteri Ketenagakerjaan RI untuk UBJOM PLTU Pacitan.

HIV AIDS P2 Program Awards (Ministry of Manpower)
HIV AIDS Prevention and Control Program Award in the Workplace from the Indonesian Minister of Manpower for Pacitan CFPP OMSBU.

13 Mei 2022
May 13, 2022

Program Kecelakaan Nihil *Zero Accident* (Kemenaker)
Penghargaan Kecelakaan Nihil dari Menteri Ketenagakerjaan RI:
- UP Muara Karang mencapai 28.796.294 jam kerja orang tanpa kecelakaan kerja sejak 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2021.
- UBJOM Indramayu mencapai 19.129.184 jam kerja orang tanpa kecelakaan kerja sejak 5 Oktober 2015. s/d 31 Desember 2021
- UBJOM Kaltim Teluk mencapai 3.129.666 jam kerja orang tanpa kecelakaan kerja sejak 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2021.
- UBJOM Tenayan mencapai 1.127.864 jam kerja orang tanpa kecelakaan kerja sejak 1 Juli 2019 s/d 31 Desember 2021.
- UBJOM Arun mencapai 1.201.152 jam kerja orang tanpa kecelakaan kerja sejak 1 Januari 2018 s/d 31 Oktober 2021.

Zero Accident Program (Ministry of Manpower)
Zero Accident Awards from the Indonesian Minister of Manpower:
- Muara Karang GU achieved 28,796,294 man-hours without work accident from January 1, 2016 to December 31, 2021.
- Indramayu OMSBU achieved 19,129,184 man-hours without work accident since October 5, 2015. until December 31, 2021
- East Kalimantan Teluk OMSBU achieved 3,129,666 man-hours without injury from January 1, 2015 to December 31, 2021.
- Tenayan OMSBU achieved 1,127,864 man-hours without injury from July 1, 2019 to December 31, 2021.
- Arun OMSBU achieved 1,201,152 man-hours without work accidents from January 1, 2018 to October 31, 2021.

20 Mei 2022
May 20, 2022

ICSB Indonesia *Presidential Award* 2022
Penghargaan ICSB Indonesia *Presidential Award* 2022 dari Indonesia Council for Small Business yang merupakan apresiasi kinerja atas kontribusi terhadap pengembangan usaha milik pengusaha mikro, kecil dan menengah yaitu telah mengelola sebanyak 95 UMK baik yang aktif maupun pasif.

ICSB Indonesia Presidential Award 2022
The ICSB Indonesia Presidential Awards 2022 from the Indonesia Council for Small Business as the performance appreciation for the contribution to business development owned by micro, small and medium entrepreneurs, which has managed 95 MSEs both active and passive.

10 Juni 2022
June 10, 2022

Indonesia CSR & TJSL *Award* (ICA) 2022
Penghargaan the 4th Indonesia CSR & TJSL *Award* (ICA) 2022 pada *Power Generation Company Sector Industry 2022 Category* dalam gelaran Seminar & *Awarding* ICA 2022.

Indonesia CSR & TJSL Award (ICA) 2022
The 4th Indonesia CSR & TJSL Awards (ICA) 2022 in the Power Generation Company Sector Industry 2022 Category at the ICA 2022 Seminar & Awarding event.

23 Juni 2022
June 23, 2022

Penghargaan CSR & PDB *Award* 2022
Penghargaan kegiatan CSR & PDB (Pengembangan Desa Berkelanjutan) *Awards* 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI:

- UP Paiton meraih *Gold* untuk Program Desa Wisata Binor Harmony;
- UP Paiton meraih *Gold* untuk Program Kampung Setrum;
- UP Gresik meraih *Gold* untuk Program Desa Wisata Lontar;
- UBJOM Paiton meraih *Silver* untuk Program Taman Pemandian SBK;
- UP Cirata meraih *Bronze* untuk Program Kelompok Ternak Domba Medal Saluyu;
- UBJOM Tj.Awar-Awar meraih *Bronze* untuk Program *Integrated Farming System*.

CSR & GDP Award 2022
CSR & GDP (Sustainable Village Development) Awards 2022 organized by the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration of the Republic of Indonesia:

- Paiton GU won Gold for Binor Harmony Tourism Village Program;
- Paiton GU won Gold for the Setrum Village Program;
- Gresik GU won Gold for Lontar Tourism Village Program;
- Paiton OMSBU won Silver for SBK Bathing Park Program;
- Cirata GU won Bronze for the Medal Saluyu Sheep Breeding Group Program;
- Tj.Awar-Awar OMSBU won Bronze for the Integrated Farming System Program.

14 Juli 2022
July 14, 2022

***Top CSR of The Year* 2022**
Penghargaan *Top CSR of The Year* 2022 yang merupakan apresiasi dari TRAS N CO dan Infobrand.id bagi perusahaan yang telah memberikan manfaat dan dampak luas melalui program-program CSR-nya.

Top CSR of The Year 2022
The Top CSR of The 2022 awards is an appreciation from TRAS N CO and Infobrand.id for companies that have provided extensive benefits and impacts through their CSR programs.

28 Juli 2022
July 28, 2022

Indonesia *Corporate Social Responsibility* V 2022
Penghargaan Indonesia *Corporate Social Responsibility* V 2022 (ICSRAV) yang diadakan oleh Economic Review:
- *The Best SDG's Program Implementation*-2022 *Responsible Consumption & Production.*
- *1st The Best Company for Environmental Social Governance* (ESG).

Indonesia Corporate Social Responsibility V 2022
The Indonesia Corporate Social Responsibility V 2022 (ICSRAV) awards organized by Economic Review:
- The Best SDG's Program Implementation-2022 Responsible Consumption & Production.
- 1st The Best Company for Environmental Social Governance (ESG).

17 Agustus 2022
August 17, 2022

Penghargaan Satyalancana Pembangunan and Satyalancana Wira Karya:

- Ir. Thommi Haposan, M.T (Dirut PLN SC), berjasa dalam pembangunan fasilitas produksi oksigen yang memanfaatkan hasil samping dari *hydrogen plant* Unit Pembangkit Muara Karang PJB.
- Ir. Purwono Jati Agung, ST, IPM, CRGP. (Direktur O&M PJBS), berjasa dalam membangkitkan listrik yang andal, efisien dan ramah lingkungan serta mendayagunakan FABA secara optimal khususnya di wilayah *isolated* dan *remote* di luar Jawa -Madura – Bali.
- Ir. Maryono, S.T., MMT, IPU, Asean Eng (GM UP Muara Karang), memimpin PT PJB UP Paiton dalam meraih Penghargaan Subroto Award bidang K2, Efisiensi Energi dan Penurunan Emisi dari KESDM tahun 2021 serta Juara 1 dalam pemanfaatan FABA.

Satyalancana Pembangunan and Satyalancana Wira Karya awards:

- Ir. Thommi Haposan, M.T (Managing Director of PLN SC), meritorious in the construction of an oxygen production facility utilizing by-products from the hydrogen plant of PLN NP's Muara Karang Generating Unit.
- Ir. Purwono Jati Agung, ST, IPM, CRGP. (PJBS O&M Director), credited for generating reliable, efficient and environmentally friendly electricity and optimally utilizing FABA, especially in isolated and remote areas outside Java -Madura - Bali.
- Ir. Maryono, S.T., MMT, IPU, Asean Eng (GM of Muara Karang GU), led PT PLN NP's Paiton GU in winning the Subroto Award in the field of K2, Energy Efficiency and Emission Reduction from KESDM in 2021 and 1st place in FABA utilization.

6 September 2022
September 6, 2022

***TOP GRC Awards* 2022**

Penghargaan *TOP GRC Awards* 2022 yang diadakan oleh Majalah Top Business:

- *4 Stars TOP GRC* - PJB.
- *The Most Committed Leader* 2022 - Gong Matua Hasibuan.

TOP GRC Awards 2022

TOP GRC Awards 2022 held by the Top Business Magazine:

- 4 Stars TOP GRC - PJB.
- The Most Committed Leader 2022 - Gong Matua Hasibuan.

4 Oktober 2022
October 4, 2022

Subroto *Award* 2022
Penghargaan dalam ajang Subroto *Award* 2022, yaitu:
- **5 penghargaan Kategori Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)** - PLTU Paiton, PLTGU Gresik, PLTA Cirata, PLTU Suge Belitung, PLTA Asahan.
- **2 penghargaan Kategori Manajemen Energi** - Sub Kategori Manajemen Energi di Industri Pertambangan dan Energi - UP Muara Karang, PLTGU Gresik.
- **10 penghargaan Sub Kategori Inovasi Khusus di Industri dan Gedung** - UP Paiton, UBJOM Pacitan, UP Muara Tawar, UBJOM Indramayu, UBJOM Tj.Awar2, UBJOM Rembang, UP Gresik, UP Brantas, UBJOM Tenayan, UP Cirata.
- **1 penghargaan Dharma Karya Energi dan Sumber Daya Mineral** - AVATOR.

Subroto Award 2022
Awards in the 2022 Subroto Award event, namely:
- **5 awards in the Electricity Safety Category (K2)** - Paiton CFPP, Gresik CCPP, Cirata HPP, Suge Belitung CFPP, Asahan HPP.
- **2 awards in Energy Management Category** - Energy Management Sub Category in Mining and Energy Industry - Muara Karang GU, Gresik CCPP.
- **10 awards Special Innovation Sub Category in Industry and Building** - Paiton GU, Pacitan OMSBU, Muara Tawar GU, Indramayu OMSBU, Tj. Awar-awar OMSBU, Rembang OMSBU, Gresik GU, Brantas GU, Tenayan OMSBU, Cirata GU.
- **1 Dharma Karya Energy and Mineral Resources award** - AVATOR.

19 Oktober 2022
October 19, 2022

***Indonesia Digital Innovation & Achievement Awards* (IDIA) 2022**
Penghargaan dalam ajang Indonesia *Digital Innovation & Achievement Awards* (IDIA) 2022 yang diselenggarakan oleh Majalah Business Update dan Business Asia Indonesia yaitu sebagai "*Best Digital Innovation in Electricity Energy* 2022".

Indonesia Digital Innovation & Achievement Awards (IDIA) 2022
Awards in the Indonesia Digital Innovation & Achievement Awards (IDIA) 2022 organized by Business Update Magazine and Business Asia Indonesia as the "Best Digital Innovation in Electricity Energy 2022".

20 Oktober 2022
October 20, 2022

Indonesia *Safety Excellence Awards* (ISEA) 2022
Penghargaan dalam ajang Indonesia *Safety Excellence Awards* (ISEA) 2022 yang diselenggarakan oleh First Indonesia Magazine yaitu sebagai:
- 4 star - *The Best Safety in Digital.*
- 4 star - *The Best Safety Innovation Award.*
- *The Best Health & Safety Leadership of The Year* – Idrus Pamungkas.

Indonesia Safety Excellence Awards (ISEA) 2022
Awards in the Indonesia Safety Excellence Awards (ISEA) 2022 organized by First Indonesia Magazine are as follows:

- 4 star - The Best Safety in Digital.
- 4 star - The Best Safety Innovation Award.
- The Best Health & Safety Leadership of The Year – Idrus Pamungkas.

20 Oktober 2022
October 20, 2022

***Learning, Innovation, Knowledge & Exhibition* (LIKE) PLN 2022**
Penghargaan dalam ajang *Learning, Innovation, Knowledge & Exhibition* (LIKE) PLN 2022, antara lain:
- Juara 1 Bidang Strategis (*Senior Leader*)
- Juara 1 Bidang Pembangkitan
- Juara 1 Bidang EBT
- Juara 2 Bidang Pembangkitan
- Juara 2 Bidang Aplikasi
- Juara 2 Bidang *Technical Support*
- Juara 3 Bidang Aplikasi
- Juara 3 Bidang Bisnis Manajemen

Learning, Innovation, Knowledge & Exhibition (LIKE) PLN 2022
Awards in the Learning, Innovation, Knowledge & Exhibition (LIKE) PLN 2022 event, including:
- 1st Place in Strategic Field (Senior Leader)
- 1st Place in the Generation Sector
- 1st place in EBT field
- 2nd Place in Generation
- 2nd Place in Application Field
- 2nd Place in Technical Support
- 3rd Place in Applications
- 3rd Place in Business Management

27 Oktober 2022
October 27, 2022

BUMN *Award* 2022: *Corporate Communication Material*
Penghargaan dalam ajang BUMN Award 2022: Corporate Communication Material yang diselenggarakan oleh Majalah Iconomics yaitu sebagai "***Best Print dan Best Video Company Profile in Electricity Category***".
SOE Award 2022: Corporate Communication Material
Awards in the SOE Award 2022: Corporate Communication Material organized by Iconomics Magazine as the **"Best Print and Best Video Company Profile in Electricity Category"**.

27 Oktober 2022
October 27, 2022

***Risk Award* 2022 PT PLN (Persero)**
Penghargaan dalam *Risk Award* 2022 PT PLN Persero, antara lain:
- Gold Award: Best Risk Leadership Anak Perusahaan.
- Gold Award: Best Risk Implementer Anak Perusahaan.

Risk Award 2022 PT PLN (Persero)
Awards in the Risk Award 2022 PT PLN Persero, among others:
- Gold Award: Best Risk Leadership Subsidiary.
- Gold Award: Best Risk Implementer Subsidiary.

27 Oktober 2022
October 27, 2022

K3L Terbaik 2022 PT PLN (Persero)
Penghargaan dalam K3L Terbaik 2022 PT PLN (Persero), antara lain:
- K3L Terbaik 2022 : Kategori PLTU Regional Sumkal - Juara 1, 2 dan 3 K3L Terbaik Pemanfaatan FABA.
- K3L Terbaik 2022 : Kategori PLTU Regional Jamali - Juara 1 dan 3 K3L Terbaik Pemanfaatan FABA.
- K3L Terbaik 2022 : Kategori Pembangkitan PLTU - Juara 1 K3L Terbaik Implementasi 3R Limbah Padat Non B3.
- K3L Terbaik 2022 : Kategori PLTU Regional Sulmapana - Juara 1 K3L Terbaik Pemanfaatan FABA.

Best HSE 2022 PT PLN (Persero)
Awards in the Best HSE 2022 PT PLN (Persero), including:

- Best HSE 2022: Sumkal Regional CFPP Category - 1st, 2nd and 3rd place Best HSE FABA Utilization.
- Best HSE 2022: Jamali Regional CFPP Category - 1st and 3rd place for Best HSE in FABA Utilization.
- Best HSE 2022: CFPP Generation Category - 1st Place for Best HSE Implementation of 3R Non-B3 Solid Waste.
- Best HSE 2022: Sulmapana Regional CFPP Category - 1st place for Best HSE in FABA Utilization.

27 Oktober 2022
October 27, 2022

***Green Energy Award* PT PLN (Persero)**
Penghargaan dalam *Green Energy Award* PT PLN (Persero), antara lain:
- Unit Pengembang Green Energy CCT & Gas *on Grid* Jamali - PLTGU Muara Karang.
- Unit Pengembang *Green Energy Cofiring on Grid* Jamali - PLTU Paiton 1-2.

Green Energy Award PT PLN (Persero)
Awards in the Green Energy Award PT PLN (Persero), among others:
- Green Energy CCT & Gas Developer Unit on Grid Jamali - Muara Karang CCPP.
- Green Energy Cofiring Developer Unit on Grid Jamali - Paiton CFPP 1-2.

27 Oktober 2022
October 27, 2022

CID PLN *Awards* 2022
Penghargaan dalam CID PLN *Awards* 2022, antara lain:
- Kategori SME *Development* - UP Paiton
- Kategori *Local Hero* - UP Paiton
- Kategori Sosial - UP Brantas
- Kategori Lingkungan - UBJOM Pacitan
- Kategori Pendidikan - UBJOM Rembang

CID PLN Awards 2022
Awards in the CID PLN Awards 2022, among others:
- SME Development Category - Paiton GU
- Local Hero Category - Paiton GU
- Social Category - Brantas GU
- Environment Category - Pacitan OMSBU
- Education Category - Rembang OMSBU

20 November 2022
November 20, 2022

***Indonesian Sustainable Development Award* (ISDA)**
14 penghargaan dalam ajang Indonesian Sustainable Development Award (ISDA) 2022 yang diselenggarakan oleh Corporate Forum for CSR Development (CFCD), antara lain:

- **3 penghargaan korporasi:**
  - *The Top Corporate Leadership on SDGs*
  - *The Most Committed Corporate on SDGs for SDGs on Social Development Pillar*
  - *The Most Committed Corporate for SDGs on Environment Development Pillars*
- **6 Penghargaan *Gold* (program):**
  - UP Muara Tawar melalui Program Ekowisata Sunge Jingkem
  - UBJOM Tanjung Awar-Awar melalui Program *Integrated Farming System*
  - UBJOM Pulang Pisau melalui Program Sekolah Pembangkitan Pulang Pisau
  - UP Cirata melalui Program Peternakan Medal Saluyu
  - UBJOM Rembang melalui Program Wisata Literasi Lentera Kisik
  - UP Paiton melalui Program Peternakan *Go-Digital.*
- **3 Penghargaan *Silver* (program):**
  - UP Muara Karang melalui Program Lingkungan yang berjudul Kampung Si Dul (AksiPeduli Lindungi) dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau, Peran Penting Bank Tama (Bank Sampah Bahari Utama) dalam Upaya Pengelolaan Sampah, dan Peran Mang Jasri (Mangrove Hijau Asri) dalam Upaya Penyelamatan Pesisir Teluk Jakarta.

Indonesian Sustainable Development Award (ISDA)
14 awards in the 2022 Indonesian Sustainable Development Award (ISDA) organized by the Corporate Forum for CSR Development (CFCD), among others:

- **3 corporate awards:**
  - The Top Corporate Leadership on SDGs,
  - The Most Committed Corporate on SDGs for SDGs on Social Development Pillar
  - The Most Committed Corporate for SDGs on Environment Development Pillars
- **6 Gold Award (program):**
  - Muara Tawar GU through Sunge Jingkem Ecotourism Program
  - Tanjung Awar-Awar OMSBU through Integrated Farming System Program
  - Pulang Pisau OMSBU through Pulang Pisau Generating School Program
  - Cirata GU through Medal Saluyu Livestock Program
  - Rembang OMSBU through Lentera Kisik Literacy Tourism Program
  - Paiton GU through Go-Digital Animal Husbandry Program.
- **3 Silver Award (program):**
  - Muara Karang GU through its Environmental Program entitled Kampung Si Dul (AksiPeduli Lindungi) in Creating Green Open Space, the Important Role of Bank Tama (Bank Sampah Bahari Utama) in Waste Management Efforts, and the Role of Mang Jasri (Mangrove Hijau Asri) in Efforts to Save the Coast of Jakarta Bay.

24 November 2022
November 24, 2022

Subroto *Award* (3 Penghargaan)
Penghargaan Subroto *Award* 2022 antara lain Keselamatan Ketenagalistrikan untuk PLTU Kaltim Teluk, PLTA Sutami dan PLTA Tulungagung dari Kementerian ESDM.

Subroto Award (3 Awards)
The 2022 Subroto Award includes Electricity Safety for East Kalimantan Teluk CFPP, Sutami HPP and Tulungagung HPP from the Ministry of Energy and Mineral Resources.

5 Desember 2022
December 5, 2022

2 Gelar Ajang *Culture Festival* PLN Group 2022
Meraih 2 gelar di ajang *Culture Festival* PLN Group 2022 yaitu juara 1 Unit *Benchmark* Implementasi Budaya 2022 Kategori Anak Perusahaan/*Subholding* dan Juara 1 *Video Competition* pada kategori *A Day in My Life Competition* (Brisky Musyahidah).

2 PLN Group Culture Festival 2022 Titles
Won 2 titles at the PLN Group 2022 Culture Festival event, namely 1st place in the 2022 Culture Implementation Benchmark Unit in the Subsidiary/Subholding Category and 1st place in the Video Competition in the A Day in My Life Competition category (Brisky Musyahidah).

29 Desember 2022
December 29, 2022

5 Penghargaan PROPER Emas Tahun 2022
Meraih penghargaan PROPER tahun 2022:
- **Proper Emas (5 unit)**: UP Paiton, UP Gresik, UBJOM Paiton, UBJOM Indramayu, dan UBJOM Rembang.
- **Proper Hijau (4 Unit)**: UP Muara Karang, UP Muara Tawar, UP Cirata, UBJOM Tj Awar-Awar.
- **Proper Biru (12 Unit)**: UBJOM Nii Tanasa, UBJOM Pacitan, UP Brantas PLTA Wlingi, UP Brantas PLTA Sutami, UBJOM Tenayan, UBJOM Bangka, UBJOM Belitung, UBJOM Tidore, UBJOM Amurang, UBJOM Arun, UBJOM Bolok, dan UBJOM Tembilahan.

5 Gold PROPER Awards in 2022
Achieved PROPER award in 2022:
- **Gold Proper (5 units):** Paiton GU, Gresik GU, Paiton OMSBU, Indramayu, OMSBU and Rembang OMSBU.
- **Green Proper (4 Units):** Muara Karang GU, Muara Tawar GU, Cirata GU, Tj Awar-Awar OMSBU.
- **Proper Blue (12 Units):** Nii Tanasa OMSBU, Pacitan OMSBU, Brantas GU Wlingi HPP, Brantas GU Sutami HPP, Tenayan OMSBU, Bangka OMSBU, Belitung OMSBU, Tidore OMSBU, Amurang OMSBU, Arun OMSBU, Bolok OMSBU, and Tembilahan OMSBU.

Sertifikasi Tahun 2022

Certification of 2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

No	Ruang Lingkup Sertifikasi Scope of Certification	Pemberi Sertifikasi Certifier	Tanggal Perolehan Date of Acquisition	Berlaku Hingga Valid Until	Masa Berlaku Sertifikasi Certification Validity
1	**ISO 22301:2019 - *Business Continuity Management System* (BCMS)** Sertifikat ini adalah *Multi-Site Certificate* yaitu: • Kantor Pusat • 6 Unit Pembangkit Eksisting (Gresik, Muara Karang, Muara Tawar, Paiton, Cirata & Brantas) This certificate is a Multi-Site Certificate, including: • Head Office • 6 Existing Generating Units (Gresik, Muara Karang, Muara Tawar, Paiton, Cirata & Brantas)	BSI	16 September 2019 September 16, 2019	15 September 2022 September 15, 2022	3 tahun 3 years
2	**ISO 9001:2015 - *Quality Management System*** Sertifikat ini adalah *Multi-Site Certificate* yaitu: • Kantor Pusat • 6 Unit Pembangkit Eksisting (Gresik, Muara Karang, Muara Tawar, Paiton, Cirata & Brantas) • 5 UBJOM Jawa (Indramayu, Rembang, Paiton 9, Pacitan dan Tanjung Awar-Awar) • Unit *Maintenance Repair & Overhaul* (UMRO) • 4 UBJOM Luar Jawa (Kaltim Teluk, Tenayan, Arun, dan Pulang Pisau) This certificate is a Multi-Site Certificate, namely: • Head Office • 6 Existing Generating Units (Gresik, Muara Karang, Muara Tawar, Paiton, Cirata & Brantas) • 5 Java OMSBU (Indramayu, Rembang, Paiton 9, Pacitan and Tanjung Awar-Awar) • Maintenance Repair Units & Overhaul (UMRO) • 4 Outer Java OMSBU (Kaltim Teluk,	BSI	8 November 2020 November 8, 2020	7 November 2023 November 7, 2023	3 tahun 3 years
3	**ISO 14001:2015 - *Environmental Management System*** Sertifikat ini adalah *Multi-Site Certificate* yaitu: • Kantor Pusat • 6 Unit Pembangkit Eksisting (Gresik, Muara Karang, Muara Tawar, Paiton, Cirata & Brantas) • 5 UBJOM Jawa (Indramayu, Rembang, Paiton 9, Pacitan dan Tanjung Awar-Awar) • 4 UBJOM Luar Jawa (Kaltim Teluk, Tenayan, Arun, dan Pulang Pisau) This certificate is a Multi-Site Certificate, namely: • Head Office • 6 Existing Generating Units (Gresik, Muara Karang, Muara Tawar, Paiton, Cirata & Brantas) • 5 Java OMSBU (Indramayu, Rembang, Paiton 9, Pacitan and Tanjung Awar-Awar) • 4 Outer Java OMSBU (Kaltim Teluk, Tenayan, Arun, and Pulang Pisau)	BSI	8 November 2020 November 8, 2020	7 November 2023 November 7, 2023	3 tahun 3 years
4	**ISO 45001:2018 - *Occupational Health & Safety Management System*** Sertifikat ini adalah *Multi-Site Certificate* yaitu: • Kantor Pusat • 6 Unit Pembangkit Eksisting (Gresik, Muara Karang, Muara Tawar, Paiton, Cirata & Brantas) • Unit *Maintenance Repair & Overhaul* (UMRO) • 5 UBJOM Jawa (Indramayu, Rembang, Paiton 9, pacitan dan Tanjung Awar-Awar) • 4 UBJOM Luar Jawa (Kaltim Teluk, Tenayan, Arun, dan Pulang Pisau) This certificate is a Multi-Site Certificate, namely: • Head Office • 6 Existing Generating Units (Gresik, Muara Karang, Muara Tawar, Paiton, Cirata & Brantas) • Maintenance Repair Units (MSUEA & MSUWA) • 5 Java OMSBU (Indramayu, Rembang, Paiton 9, Pacitan and Tanjung Awar-Awar) • 4 Outer Java OMSBU (Kaltim Teluk, Tenayan, Arun, and Pulang Pisau)	BSI	21 Oktober 2020 October 21, 2020	20 Oktober 2023 October 20, 2023	3 tahun 3 years

No	Ruang Lingkup Sertifikasi Scope of Certification	Pemberi Sertifikasi Certifier	Tanggal Perolehan Date of Acquisition	Berlaku Hingga Valid Until	Masa Berlaku Sertifikasi Certification Validity
5	**ISO 50001:2018 - *Energy Management System*** Sertifikat ini adalah *Multi-Site Certificate* yaitu: • Kantor Pusat • 6 Unit Pembangkit Eksisting (Gresik, Muara Karang, Muara Tawar, Paiton, Cirata & Brantas) • 5 UBJOM Jawa (Indramayu, Rembang, Paiton 9, pacitan dan Tanjung Awar-Awar) This certificate is a Multi-Site Certificate namely: • Head Office • 6 Existing Generating Units (Gresik, Muara Karang, Muara Tawar, Paiton, Cirata & Brantas) • 5 Java OMSBU (Indramayu, Rembang, Paiton 9, pacitan and Tanjung Awar-Awar)	BSI	8 November 2020 November 7, 2020	7 November 2023 November 7, 2023	3 tahun 3 years
6	**ISO 55001:2014 - *Asset Management System*** Sertifikat ini adalah Multi-Site Certificate yaitu: • Kantor Pusat • 6 Unit Pembangkit Eksisting (Gresik, Muara Karang, Muara Tawar, Paiton, Cirata & Brantas) This certificate is a Multi-Site Certificate namely: • Head Office • 6 Existing Generating Units (Gresik, Muara Karang, Muara Tawar, Paiton, Cirata & Brantas)	BSI	5 Maret 2021 March 5, 2021	4 Maret 2024 March 4, 2024	3 tahun 3 years
7	**PASS 99:2012 - *Integrated Management System*** Sertifikat ini adalah *Multi-Site Certificate* yaitu: • Kantor Pusat • 6 Unit Pembangkit Eksisting (Gresik, Muara Karang, Muara Tawar, Paiton, Cirata & Brantas) • Unit *Maintenance Repair & Overhaul* (UMRO) • 5 UBJOM Jawa (Indramayu, Rembang, Paiton 9, pacitan dan Tanjung Awar-Awar) • 4 UBJOM Luar Jawa (Kaltim Teluk, Tenayan, Arun, dan Pulang Pisau) This certificate is a Multi-Site Certificate, namely: • Head Office • 6 Existing Generating Units (Gresik, Muara Karang, Muara Tawar, Paiton, Cirata & Brantas) • Maintenance Units (MSUEA & MSUWA) • Citara reservoir management board • 5 Java OMSBU (Indramayu, Rembang, Paiton 9, pacitan and Tanjung Awar-Awar) • 4 Outer Java OMSBU (Kaltim Teluk, Tenayan, Arun, and Pulang Pisau)	BSI	8 November 2020 November 8, 2020	7 November 2023 November 7, 2023	3 tahun 3 years
8	**ISO 37001:2016 - *Anti Bribery Management System*** • Kantor Pusat Head Office	BSI	6 Agustus 2020 August 6, 2020	5 Agustus 2023 August 5, 2023	3 tahun 3 years
9	**ISO 27001:2013 - *Information Security Management*** • Kantor Pusat Head Office	BSI	8 Januari 2022 January 7, 2022	7 Januari 2025 January 7, 2025	3 tahun 3 years
10	**ISO 27001:2013 - *IT Service Management System*** • Kantor Pusat Head Office	BSI	12 November 2020 November 12, 2020	11 November 2023 November 11, 2023	3 tahun 3 years
11	**ISO 21001:2018 – *Educational Organizations Management System*** • PJB Academy	BSI	5 Oktober 2021 October 5, 2021	4 Oktober 2024 October 4, 2024	3 tahun 3 years

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Important Financial Data Highlight

Posisi Keuangan (Rp juta)

Financial Position (Rp million)

Uraian Description	2018	2019	2020	2021	2022
Aset Lancar Current Assets	27.276.991	27.311.267	31.686.542	32.460.225	33.394.118
Aset Tidak Lancar Non-current Assets	147.113.916	145.912.098	143.874.478	139.703.603	141.528.811
Jumlah Aset Total Assets	**174.390.907**	**173.223.365**	**175.561.020**	**172.163.828**	**174.922.929**
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	4.862.490	4.225.099	4.954.830	5.017.427	4.448.745
Liabilitas Jangka Panjang Non-current Liabilities	2.519.730	5.225.171	5.291.239	5.977.136	8.119.096
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**7.382.220**	**9.450.270**	**10.246.069**	**10.994.563**	**12.567.841**
Jumlah Ekuitas Total Equity	**167.008.687**	**163.773.095**	**165.314.951**	**161.169.265**	**162.355.088**
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	**174.390.907**	**173.223.365**	**175.561.020**	**172.163.828**	**174.922.929**
Investasi pada Entitas Asosiasi/Ventura Bersama Investment in Associates/Joint Ventures	7.445.759	7.880.576	9.744.556	12.390.846	16.114.319

* reklasifikasi reclassification

Aset Lancar (Rp juta)

Current Assets (Rp million)

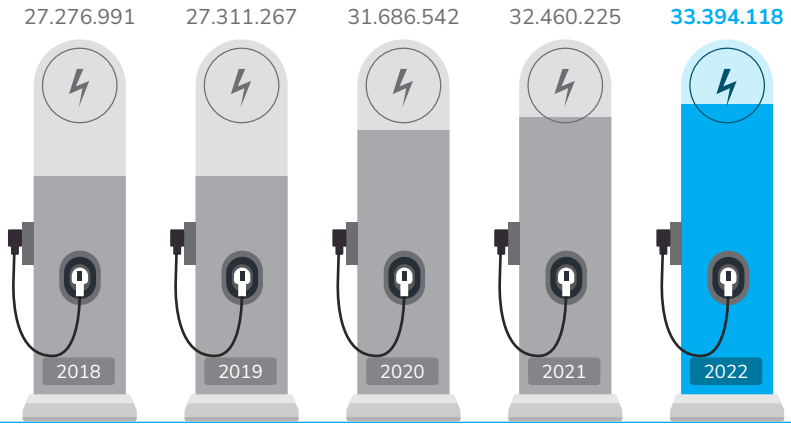

Aset Tidak Lancar (Rp juta)

Non-current Assets (Rp million)

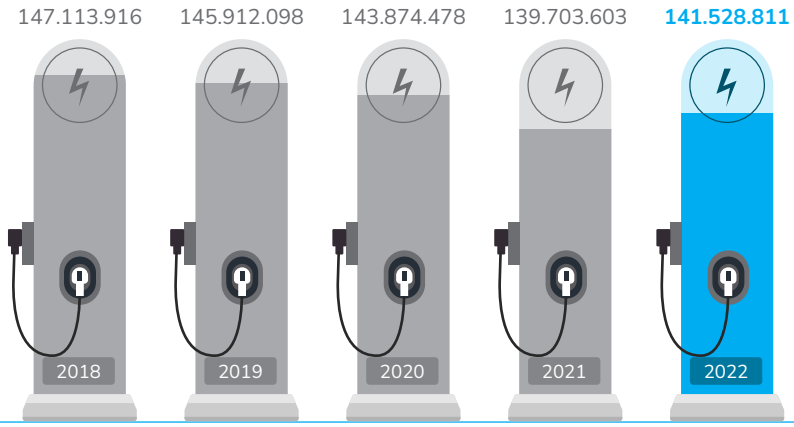

Jumlah Aset (Rp juta)
Total Assets (Rp million)

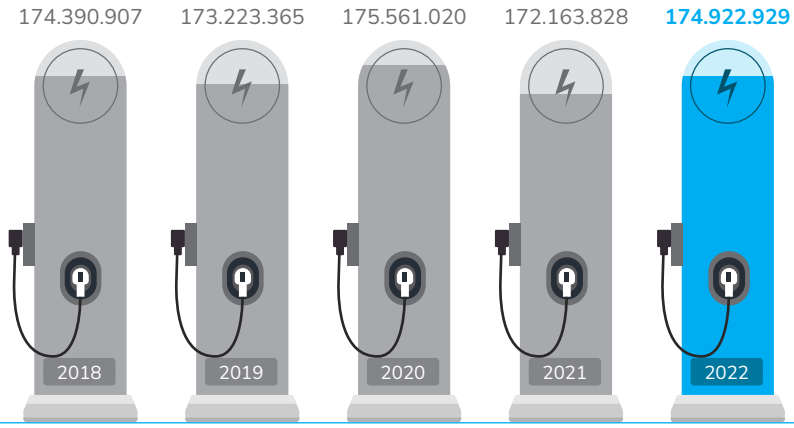

Liabilitas Jangka Pendek (Rp juta)
Current Liabilities (Rp million)

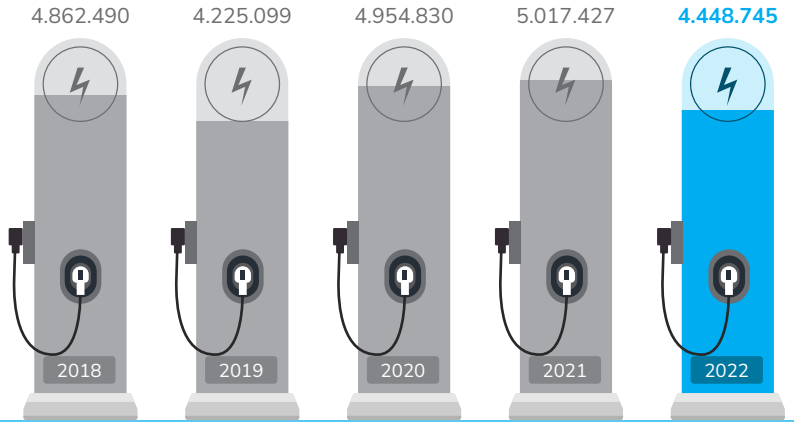

Liabilitas Jangka Panjang (Rp juta)
Non-current Liabilities (Rp million)

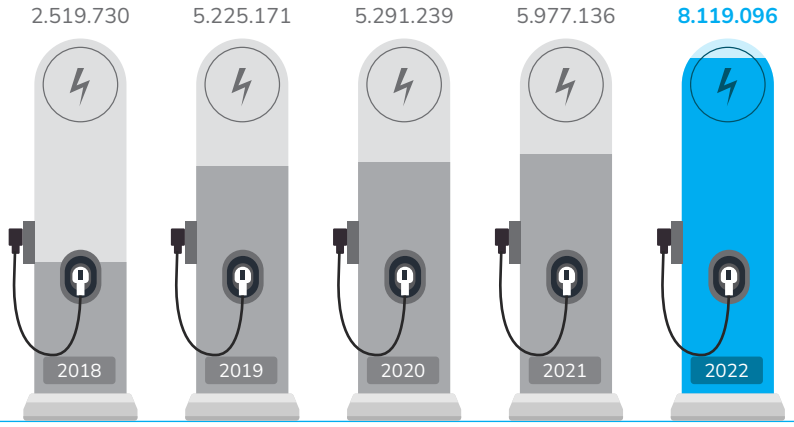

Jumlah Liabilitas (Rp juta)
Total Liabilities (Rp million)

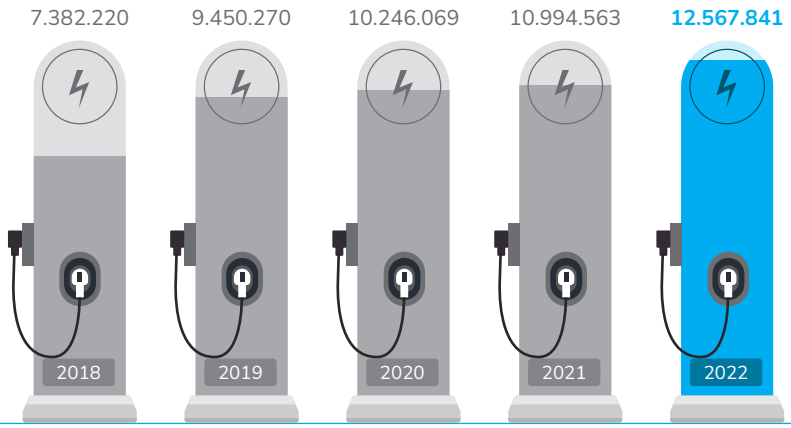

Jumlah Ekuitas (Rp juta)
Total Equity (Rp million)

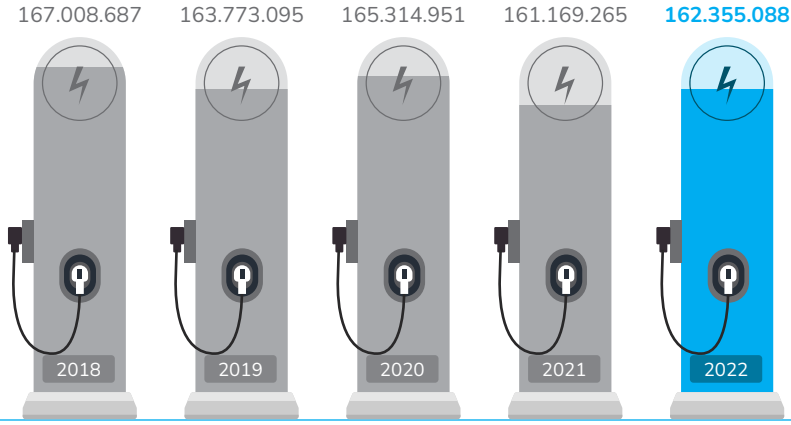

Investasi pada Entitas Asosiasi/Ventura Bersama (Rp juta)
Investment in Associates/ Joint Ventures (Rp million)

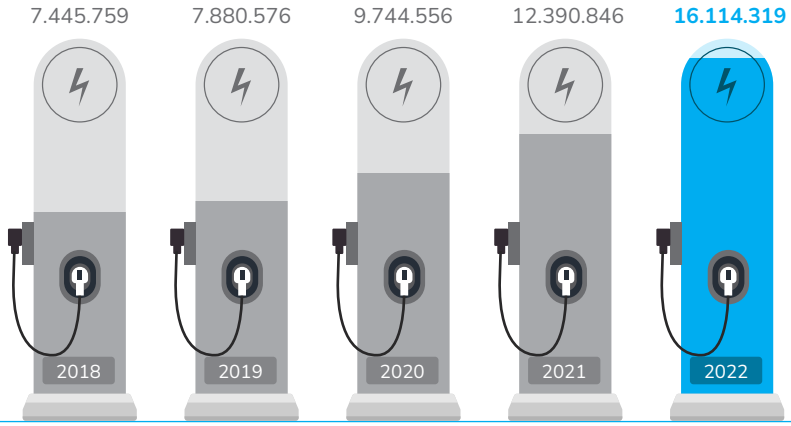

* reklasifikasi reclassification

Laba Rugi Komprehensif (Rp juta)
Comprehensive Profit or Loss (Rp million)

Uraian Description	2018	2019	2020	2021	2022
Pendapatan Usaha Revenue	40.821.026	39.757.950	30.434.176	29.508.134	27.202.200
Penjualan Tenaga Listrik Sales of Electricity	34.757.316	33.681.317	25.476.470	24.541.378	21.682.476
Jasa Operasi & Pemeliharaan Operation & Maintenance Services	4.255.967	4.422.238	4.093.834	4.057.567	4.099.714
Konstruksi Construction	1.492.640	1.396.106	702.929	727.224	845.101
Lainnya Others	315.103	258.289	160.943	181.965	574.909
Beban Usaha Operating Expenses	(34.334.181)	(31.062.892)	(21.908.552)	(25.101.143)	(22.571.427)
Laba Usaha Operating Income	6.486.845	8.695.058	8.525.624	4.406.991	4.630.773
Pos Keuangan dan Lain-lain (Bersih) Financial Items and Others (Net)	1.173.839	918.280	1.714.483	2.785.049	3.375.810
Beban Pajak Tax Expense	(1.743.252)	(2.950.016)	(2.536.295)	(1.371.852)	(1.423.037)
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	**5.917.432**	**6.663.322**	**7.703.812**	**5.820.188**	**6.583.546**
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain Tahun Berjalan setelah Pajak Other Comprehensive Income (Expenses) for the Year after Tax	(21.088.224)	(490.848)	336.930	(2.301.389)	446,746
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income for the Year	**(15.170.792)**	**6.172.474**	**8.040.742**	**3.518.799**	**7.030.292**
Laba Tahun Berjalan Diatribusikan kepada: Profit for the Year Attributable to:					
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent	5.904.512	6.645.392	7.661.396	5.810.033	6.548.477
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interests	12.920	17.930	42.416	10.155	35.069
Penghasilan Komprehensif Diatribusikan kepada: Comprehensive Income Attributable to:					
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent	(15.190.703)	6.159.853	7.995.893	3.494.125	6.985.139
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interests	19.911	12.621	44.851	24.674	45.153
Laba Per Saham Dasar (Rp penuh) Basic Earnings per Share (Rp full amount)	984	1.108	1.284	970	1.097

Pendapatan Usaha (Rp juta)
Revenue (Rp million)

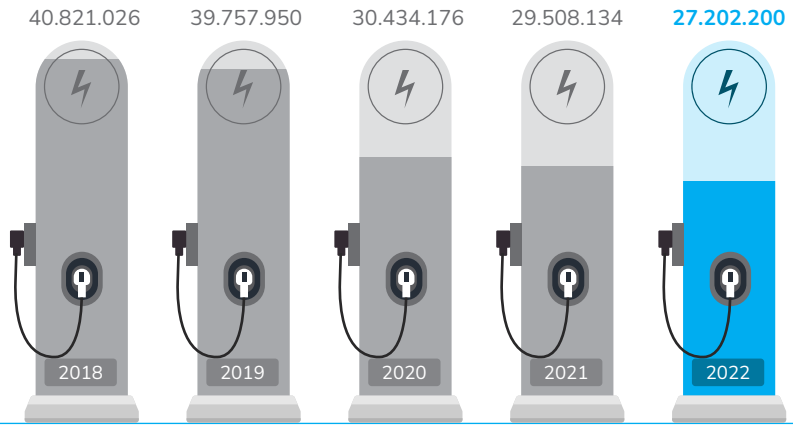

Beban Usaha (Rp juta)
Operating Expenses (Rp million)

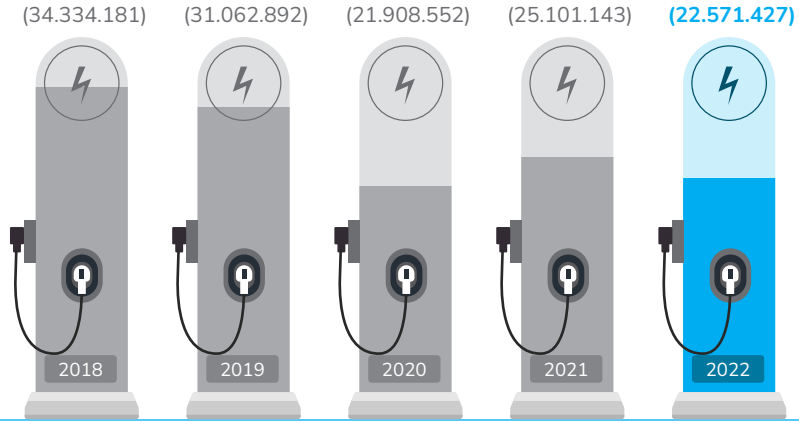

Laba Usaha (Rp juta)
Operating Income (Rp million)

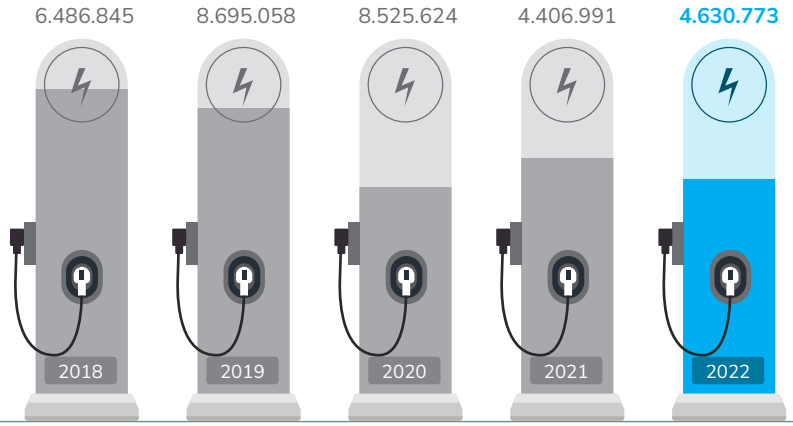

Laba Tahun Berjalan (Rp juta)
Profit for the Year (Rp million)

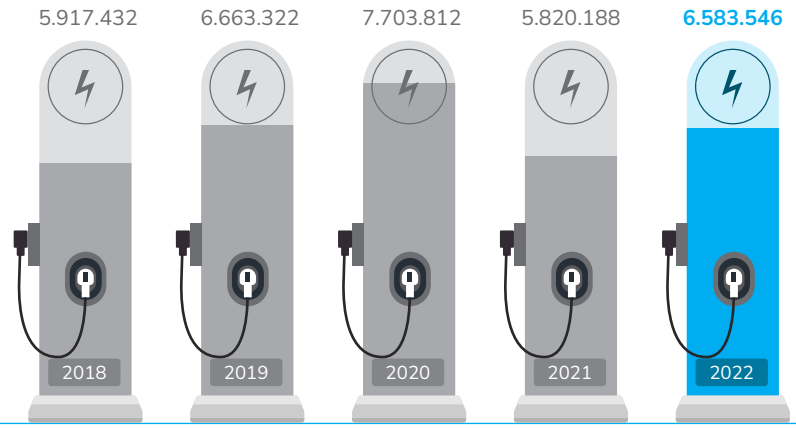

Laba Per Saham Dasar (Rp penuh)
Basic Earnings per Share (Rp full amount)

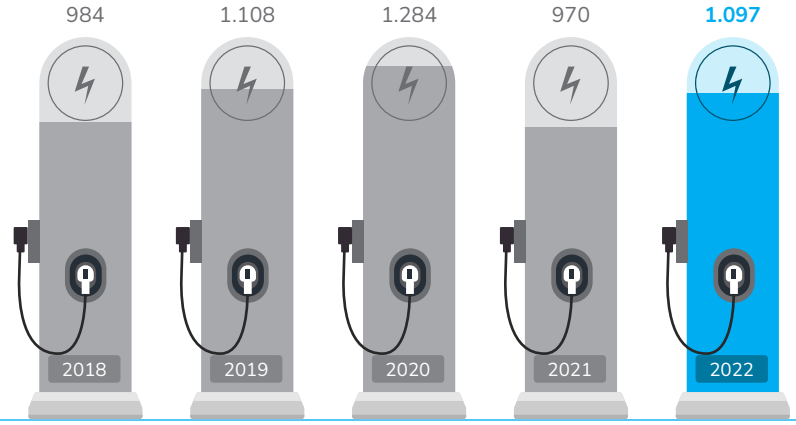

Informasi Arus Kas (Rp juta)
Information on Cash Flows (Rp million)

Uraian Description	2018	2019	2020	2021	2022
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi Net Cash Provided by Operating Activities	2.748.822	1.195.765	2.177.126	4.323.208	3.257.956
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi Net Cash Used in Investing Activities	(4.153.893)	(2.523.516)	(1.371.476)	(334.356)	(1.680.722)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities	209.562	1.480.894	851.017	(167.500)	(60.289)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	(1.195.509)	153.143	1.656.667	3.821.352	1.516.945
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year	2.879.830	1.688.004	1.838.858	3.511.113	7.343.968
Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang Asing Effect of Changes in Foreign Currency	3.683	(2.289)	15.588	11.503	97.245
Jumlah Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Total Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	1.688.004	1.838.858	3.511.113	7.343.968	8.958.158

Rasio Keuangan (%)
Financial Ratios (%)

Uraian Description	2018	2019	2020	2021	2022
RASIO PROFITABILITAS PROFITABILITY RATIO					
Rasio Laba (Rugi) terhadap Aset (%) Return on Assets (%)	3,39	3,84	4,36	3,38	3,76
Rasio Laba (Rugi) terhadap Ekuitas (%) Return on Equity (%)	3,54	4,06	4,63	3,61	4,06
Rasio Laba (Rugi) terhadap Investasi (%) Return on Investment (%)	6,70	7,83	7,86	6,19	6,48
Rasio Laba (Rugi) terhadap Pendapatan (%) Profit (Loss) to Revenue Ratio (%)	14,50	16,76	25,31	19,72	24,20
Rasio Pertumbuhan Penjualan (%) Sales Growth Ratio (%)	31,77	(9,48)	(23,60)	15,96	(17,48)
RASIO LIKUIDITAS LIQUIDITY RATIO					
Rasio Lancar (%) Current Ratio (%)	560,97	565,40	639,51	646,95	750,64
Rasio Kas (%) Cash Ratio (%)	34,71	36,37	70,86	152,15	201,36
Rasio Cepat (%) Quick Ratio (%)	518,21	529,15	608,30	589,71	707,84
RASIO SOLVABILITAS SOLVENCY RATIO					
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (%) Debt to Equity Ratio (%)	4,42	5,77	6,20	6,82	7,74
Rasio Liabilitas terhadap Total Aset (%) Debt to Assets Ratio (%)	4,23	5,46	5,84	6,39	7,18
RASIO AKTIVITAS ACTIVITY RATIO					
Collection Period (hari) Collection Period (day)	180	203	303	292	284
Perputaran Total Aset (%) Total Assets Turnover (%)	0,23	0,23	0,17	0,17	0,16

Rasio Laba (Rugi) terhadap Aset (%)
Return on Assets (%)

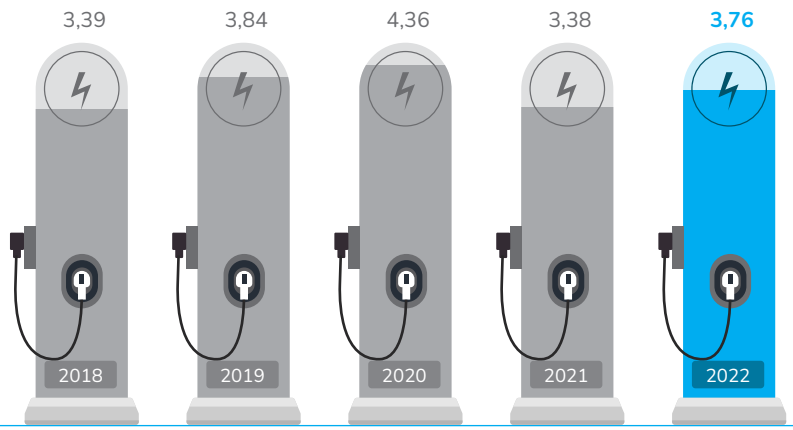

Rasio Laba (Rugi) terhadap Ekuitas (%)
Return on Equity (%)

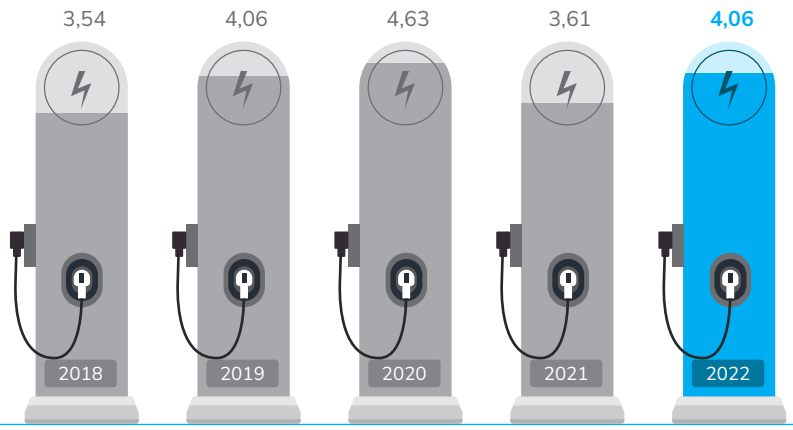

Rasio Lancar (%)
Current Ratio (%)

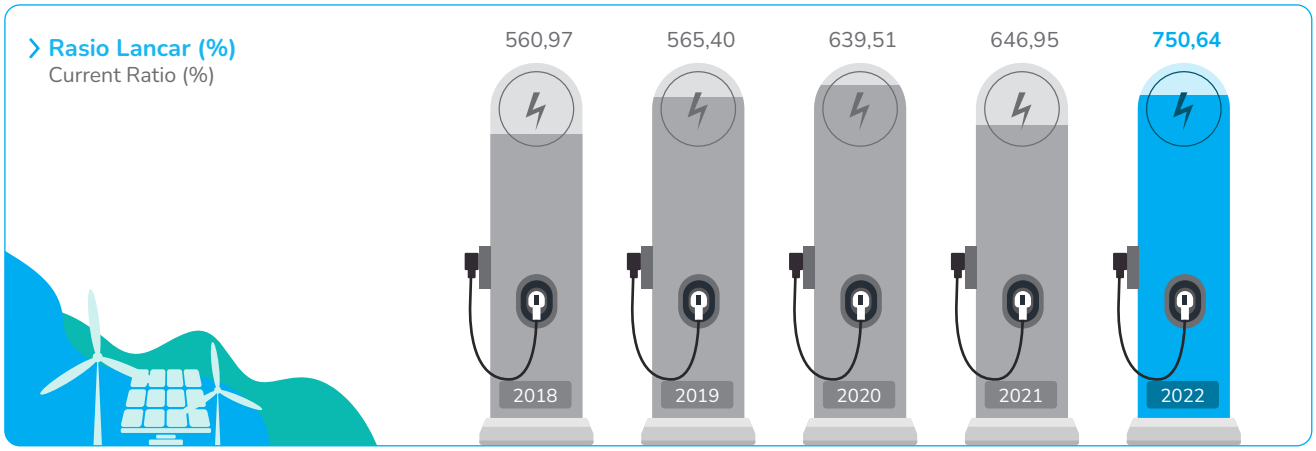

Rasio Kas (%)
Cash Ratio (%)

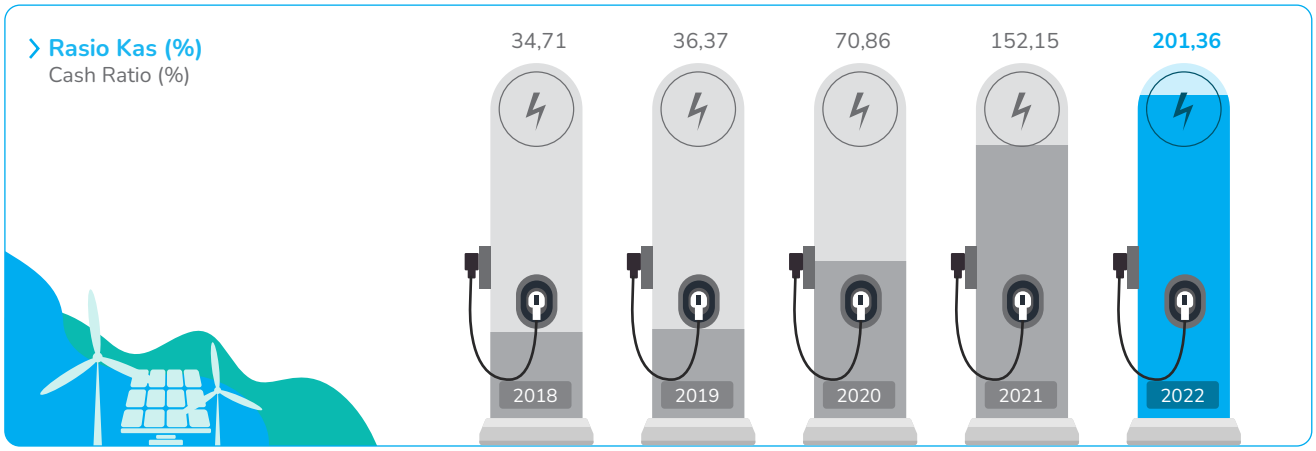

Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (%)
Debt to Equity Ratio (%)

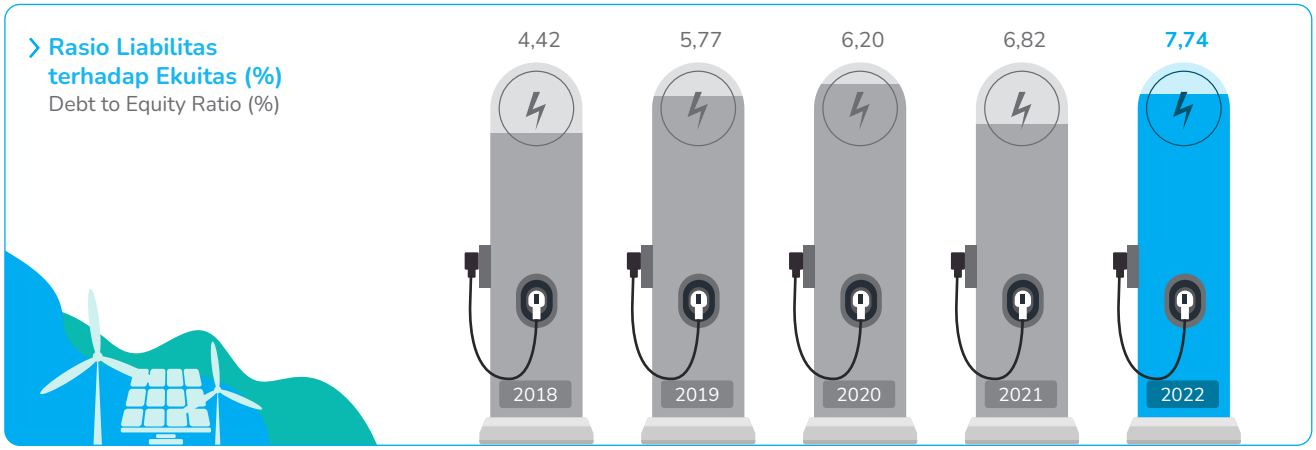

Rasio Liabilitas terhadap Total Aset (%)

Debt to Assets Ratio (%)

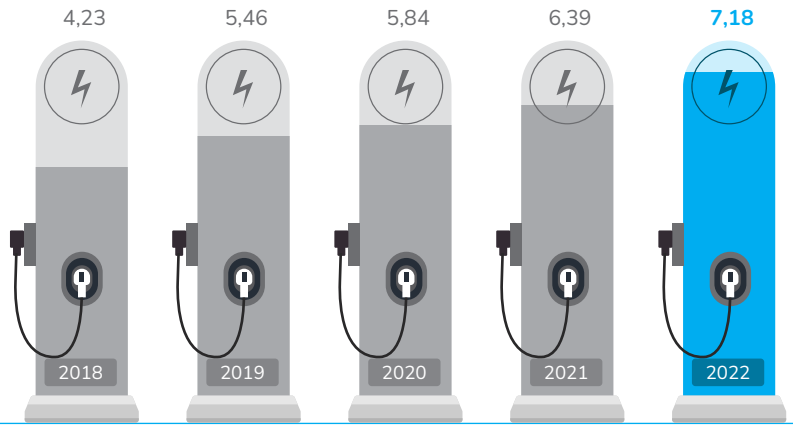

Collection Period (hari)

Collection Period (day)

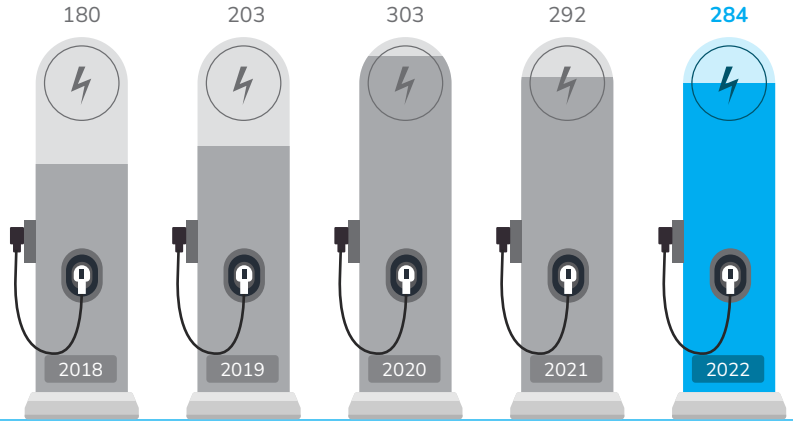

Perputaran Total Aset (%)

Total Assets Turnover (%)

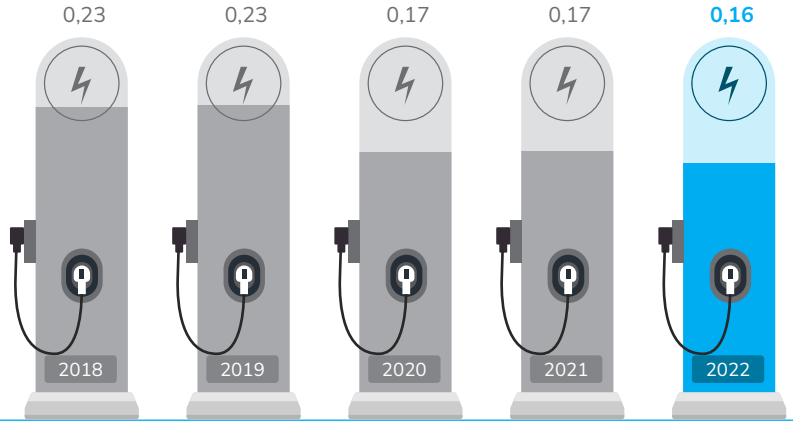

Ikhtisar Kinerja Operasional

Operational Performance Highlights

Uraian Description	2018	2019	2020	2021	2022
Produksi Energi Listrik (GWh) Electricity Production (GWh)	25.847	23.313	17.816	20.641	17.064
Penjualan Energi Listrik (GWh) Electricity Sales (GWh)	24.752	22.404	17.117	19.848	16.379
EAF Eksisting (%) EAF of Existing (%)	94,09	95,06	95,52	95,47	94,12
EAF FTP-1 atau UBJOM Wilayah Jawa (%) EAF of FTP-1 or OMSBU in Java (%)	77,20	91,06	90,67	83,31	84,41
EFOR Eksisting (%) EFOR of Existing (%)	1,01	0,80	0,95	3,70	0,45
EFOR FTP-1 atau UBJOM Wilayah Jawa (%) EFOR of FTP-1 or OMSBU in Java (%)	10,34	1,94	3,64	4,68	3,24
Tara Kalor Neto Eksisting (kcal/KWh) Net Plant Heat Rate of Existing (kcal/KWh)	2.464,36	2.490,62	2.509,04	2.484,66	2.459,38
Tara Kalor Neto FTP-1 atau UBJOM Wilayah Jawa (kcal/KWh) Net Plant Heat Rate of FTP-1 or OMSBU in Java (kcal/KWh)	2.676,67	2.530,20	2.749,53	2.787,60	2.854,69
Jumlah Daya Mampu Neto (MW) Total Net Dependable Capacity (MW)	10.815	10.597	10.664	10.866	11.020
Jumlah Karyawan (orang) Number of Employees (person)	3.085	3.186	3.123	3.071	3.034
Skor *Assessment* GCG (skor) GCG Assessment Score (score)	94,17	94,45	95,06	95,67	95,54
Tingkat Kesehatan Soundness Level	92,72	93,17	99,78	96,13	102,88
	AA	AA	AAA	AAA	AAA

Produksi Energi Listrik (GWh)
Electricity Production (GWh)

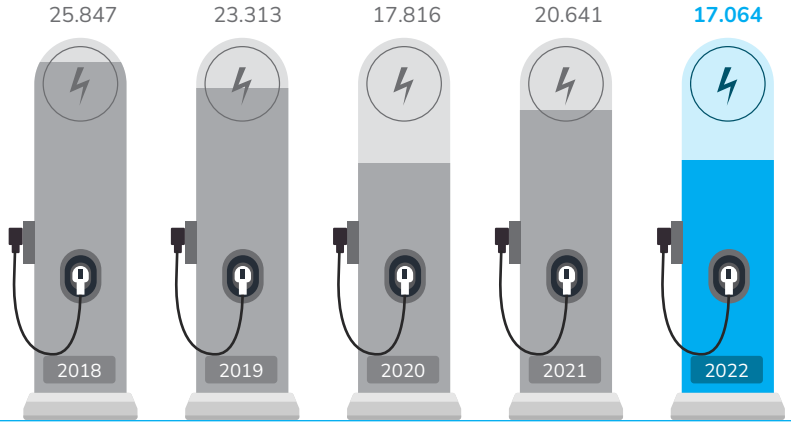

Penjualan Energi Listrik (GWh)
Electricity Sales (GWh)

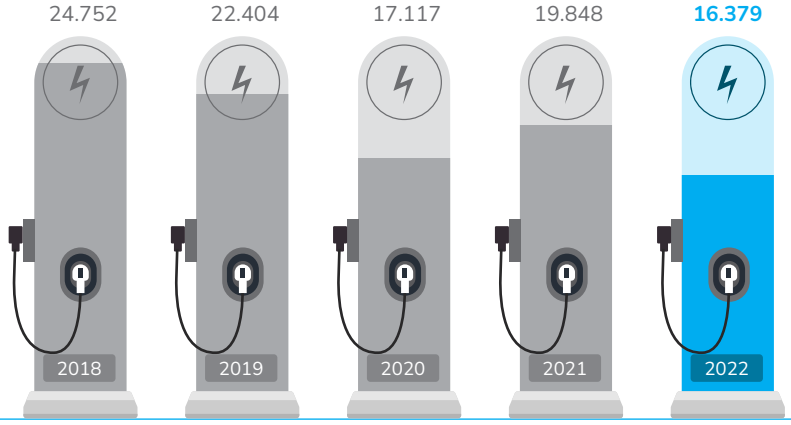

EAF Eksisting (%)

EAF of Existing (%)

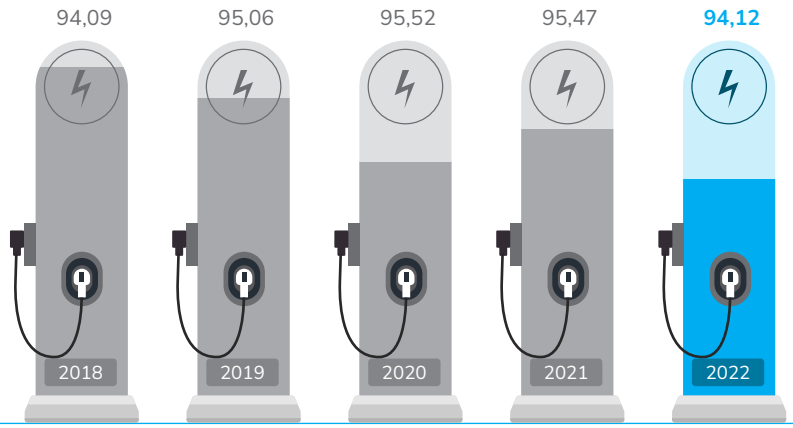

EAF FTP-1 atau UBJOM Wilayah Jawa (%)

EAF of FTP-1 or OMSBU in Java (%)

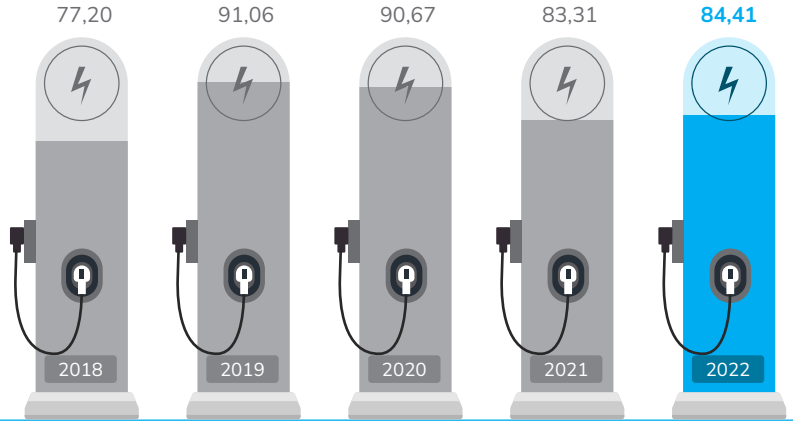

EFOR Eksisting (%)

EFOR of Existing (%)

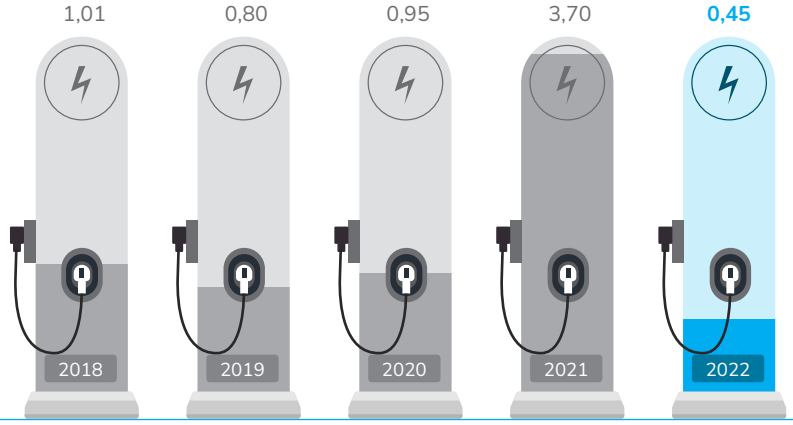

EFOR FTP-1 atau UBJOM Wilayah Jawa (%)

EFOR of FTP-1 or OMSBU in Java (%)

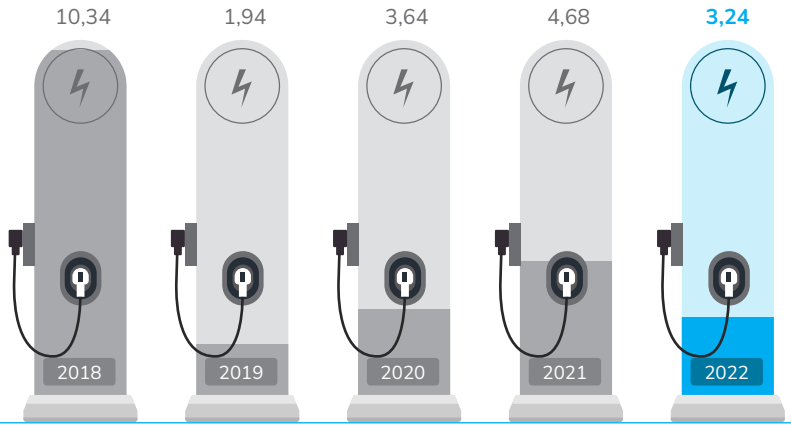

Tara Kalor Neto Eksisting (kcal/KWh)

Net Plant Heat Rate of Existing (kcal/KWh)

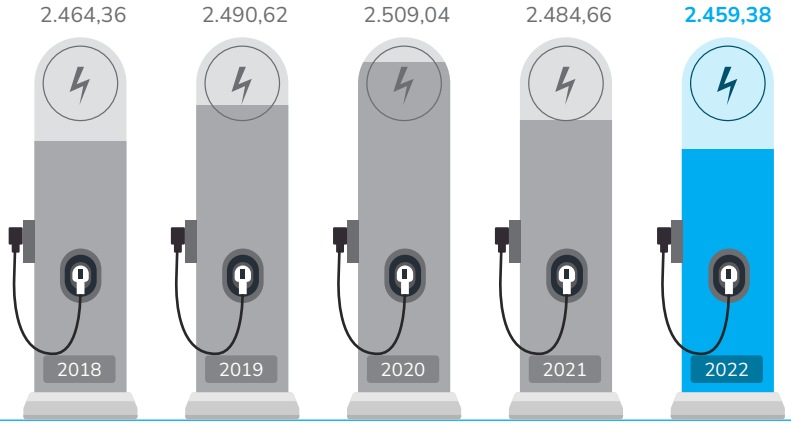

Tara Kalor Neto FTP-1 atau UBJOM Wilayah Jawa (kcal/KWh)

Net Plant Heat Rate of FTP-1 or OMSBU in Java (kcal/KWh)

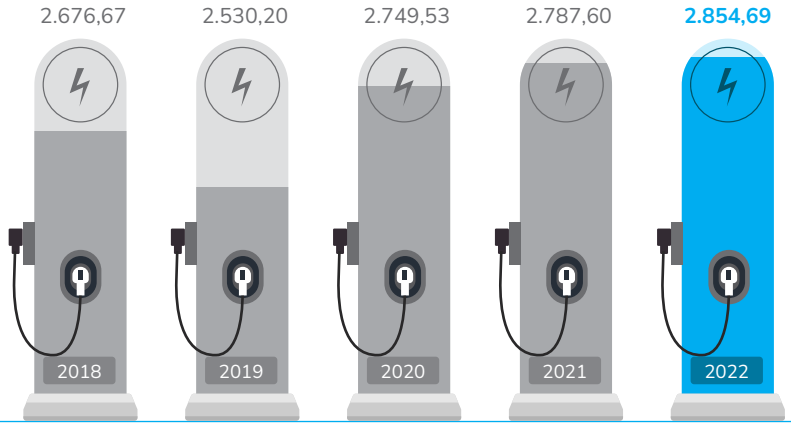

Jumlah Daya Mampu Neto (MW)

Total Net Dependable Capacity (MW)

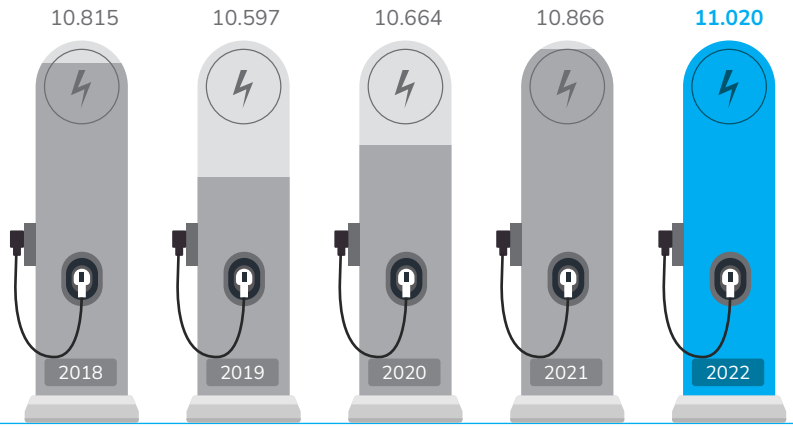

Jumlah Karyawan (orang)

Number of Employees (person)

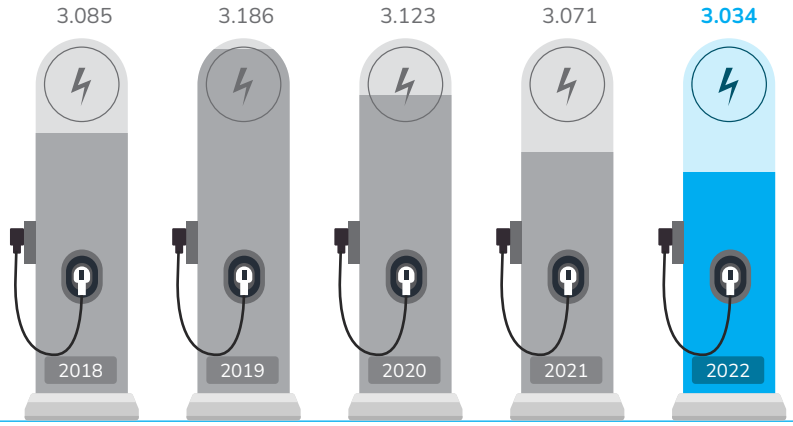

Skor *Assessment* GCG (skor)

GCG Assessment Score (score)

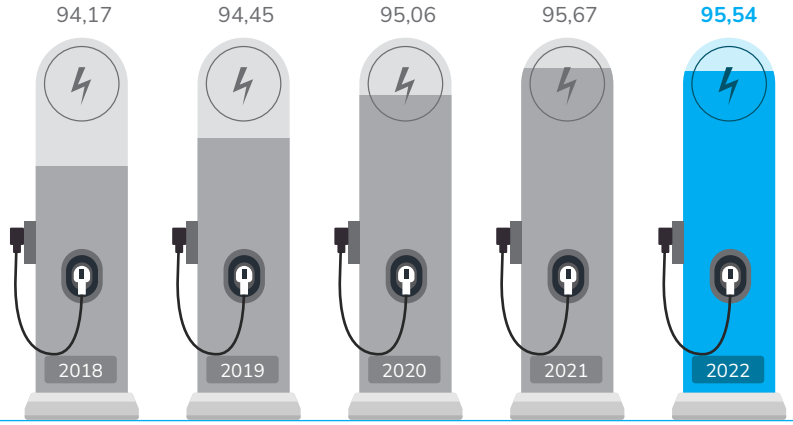

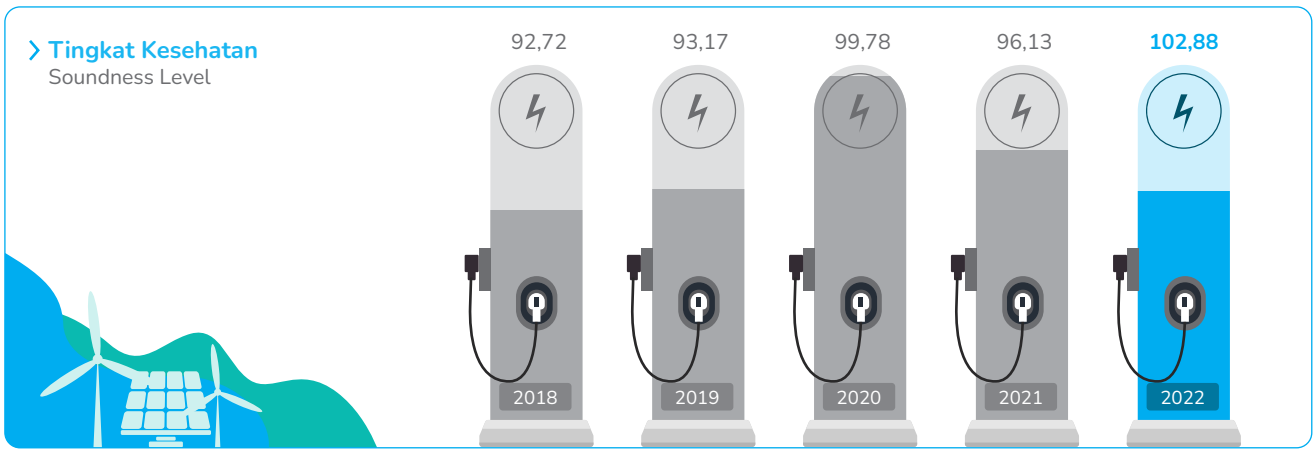

Ikhtisar Saham
Share Highlights

Sampai dengan akhir tahun 2022, PLN NP tidak melakukan perdagangan saham sehingga tidak ada informasi harga saham tertinggi, harga saham terendah dan harga saham penutupan serta volume saham yang diperdagangkan.

Saham Beredar terdiri atas:
1. PT PLN (Persero) sebanyak 1 Saham Seri 1 dan 5.999.999.998 Saham Seri 2 (99,99%),
2. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) sebanyak 1 Saham Seri 2 (0,01%).

Until the end of 2022, PLN NP did not conduct share trading, so there is no information on the highest share price, lowest share price and closing share price as well as the volume of shares traded.

Outstanding Shares consists of:
1. PT PLN (Persero) has 1 Series-1 Share and 5,999,999,998 Series-2 Shares (99,99%),
2. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) 1 Series-2 Share (0,01%).

Ikhtisar Obligasi
Bond Highlights

Sampai dengan akhir tahun 2022, PLN NP tidak menerbitkan obligasi, sukuk dan obligasi konversi sehingga tidak ada informasi terkait dengan jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar, tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo dan peringkat obligasi/sukuk.

Until the end of 2022, PLN NP did not issue bonds, sukuk and convertible bonds so there is no information related to the number of outstanding bonds/sukuk/convertible bonds, interest rates/yields, maturity dates and bond/sukuk ratings.

Peristiwa Penting Tahun 2022

Event Highlights 2022

17 Januari 2022
January 17, 2022

MoU Pengembangan Proyek PLTA Wado dengan PT Waskita Karya Infrastruktur.
MoU for Wado HPP Project Development with PT Waskita Karya Infrastruktur.

19 Januari 2022
January 19, 2022

Penandatanganan Amandemen IV Perjanjian Jasa O&M PLTU Tidore Tahap *Supporting* antara PJB bersama PLN Unit Induk Wilayah Maluku & Maluku Utara.
Signing of Amendment IV of the Tidore CFPP O&M Service Agreement Supporting Stage between PJB and PLN Main Unit for Maluku & North Maluku Region.

27 Januari 2022
January 27, 2022

MoU Pengembangan Kompetensi di bidang EBT antara PJB dengan Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP).
MoU for Competency Development in the NRE sector between PJB and Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP).

4 Februari 2022
February 4, 2022

MoU Pengembangan Pembangkit Listrik EBT dengan PT Jateng Petro Energi (JPEN).
MoU for Development of NRE Power Plants with PT Jateng Petro Energi (JPEN).

1 Maret 2022
March 1, 2022

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Perum Perhutani untuk Peningkatan *Co-firing* PLTU Rembang.
Signing of a Cooperation Agreement with Perum Perhutani to Increase the CoFiring at Rembang CFPP.

28 Maret 2022
March 28, 2022

Penandatanganan MoU Kerjasama Pengelolaan Batubara dengan PT Adhi Guna Putera (AGP).
Signing of Coal Management Cooperation MoU with PT Adhi Guna Putera (AGP).

19 April 2022
April 19, 2022

Peresmian Program PJB Class Nusa Tenggara Barat.
Inauguration of the West Nusa Tenggara PJB Class Program.

25 April 2022
April 25, 2022

MoU Kerjasama Pengembangan Teknologi Amonia *Co-Firing*.
MoU for Cooperation on Co-Firing Ammonia Technology Development.

26 April 2022
April 26, 2022

Penandatanganan Perjanjian Induk atau *Head of Agreement* (HoA) Jasa Relokasi dan Pengelolaan Aset PLTG Jakabaring dan PLTG Batanghari.
Signing of the Head of Agreement (HoA) for Relocation Services and Asset Management for Jakabaring GTPP and Batanghari GTPP.

19 Mei 2022
May 19, 2022

Penandatanganan Kerjasama Pembangunan PV *Rooftop* PJB – PLN.
Signing of Collaboration on PJB – PLN PV Rooftop Development.

2 Juni 2022
June 2, 2022

Kerjasama Pemanfaatan FABA melalui UBJOM PLTU Paiton dengan Pemerintah Kabupaten Jember.
FABA Utilization Collaboration through Paiton CFPP OMSBU with Jember District Government.

8 Juni 2022
June 8, 2022

Sinergi PJB dan PT Pertamina Power Indonesia dalam Proyek Pembangunan PLTS.
Synergy of PJB and PT Pertamina Power Indonesia in the SPP Development Project.

9 Juni 2022
June 9, 2022

Penandatanganan MoU Pemanfaatan FABA antara Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) UBJOM Pacitan.
MoU signing for FABA use between the Government of Ponorogo Regency and PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB), Pacitan OMSBU.

17 Juni 2022
June 17, 2022

Kolaborasi PJB dan Secapa TNI AD untuk Bentuk Pemimpin Andalan.
Collaboration between PJB and Secapa TNI AD to create the reliable leaders.

17 Juni 2022
June 17, 2022

Penandatanganan Amandemen AMC antara PJB dan PLN Unit Induk Pembangkitan (UIK) Sumatera Bagian Utara (SBU).
Signing of the AMC Amendment between PJB and PLN North Sumatera Power Plant Main Unit (UIK).

23 Juni 2022
June 23, 2022

Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Aset untuk Kegiatan Telematika di Wilayah Pengelolaan PJB.
Signing of the Cooperation Agreement (PKS) for Asset Utilization for Telematics Activities in the PJB Management Area.

30 Juni 2022
June 30, 2022

Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu dan Tuban untuk Pengelolaan Sampah menjadi Bahan Bakar PLTU *Co-Firing*.
MoU signing with the District Governments of Indramayu and Tuban for the Management of Waste to Fuel for the CFPP.

14 Juli 2022
July 14, 2022

Go-Live Penggabungan PLTU Paiton 1-2 dan PLTU Paiton 9.
Go-Live Merger of Paiton 1-2 CFPP and Paiton 9 CFPP.

19 Juli 2022
July 19, 2022

Penandatanganan MoU tentang Kerjasama Antar Laboratorium Kalibrasi dan *Repair* dengan PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi.
MoU signing for Collaboration between Calibration and Repair Laboratories with PT PLN (Persero) Certification Center.

22 Juli 2022
July 22, 2022

Penandatanganan MoU dengan Electricite Du Laos (EDL) terkait Kerjasama Pengelolaan Pembangkit.
MoU signing with Electricite Du Laos (EDL) regarding Power Plant Management Cooperation.

26 Juli 2022
July 26, 2022

Revitalisasi PLTS Kodingareng dan Tanakeke.
Revitalization of Kodingareng SPP and Tanakeke SPP.

27 Juli 2022
July 27, 2022

Pertama di PLN Grup, Peluncuran CSIRT (Tim Tanggap Insiden Siber) oleh PJB bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
First at PLN Group, Launch of CSIRT (Cyber Incident Response Team) by PJB together with the National Cyber and Crypto Agency (BSSN).

25 Agustus 2022
August 25, 2022

Implementasi *Enterprise Asset Management* (EAM) di PLN UPK Singkawang PLTU Bengkayang, Kalimantan Barat.
Implementation of Enterprise Asset Management (EAM) at PLN UPK Singkawang, Bengkayang CFPP, West Kalimantan.

1 September 2022
September 1, 2022

Penandatangan Perjanjian terkait Studi dan Uji Coba Amonia *Co-firing* antara PJB dan IHI Corporation.
Signing of Agreement related to Co-firing Ammonia Study and Trial between PJB and IHI Corporation.

13 September 2022
September 13, 2022

Penandatanganan MoU Pemanfaatan Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) dalam *co-firing* PLTU antara PJB dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
MoU signing for the Utilization of Solid Jumputan Fuel (BBJP) in the co-firing of the CFPP between PJB and the Government of Sidoarjo Regency.

21 September 2022
September 21, 2022

The New PLN 4.0, Unleashing Energy and Beyond.
The New PLN 4.0, Unleashing Energy and Beyond.

27 September 2022
September 27, 2022

Go Live Komersialisasi *Co-Firing* di PLTU Air Anyir Bangka.
Go Live Commercialization of Co-Firing at Air Anyir Bangka CFPP.

3 Oktober 2022
October 3, 2022

Transformasi PJB menjadi PLN Nusantara Power di Hari Jadi ke-27.
PJB transformation into PLN Nusantara Power on its 27th Anniversary.

4-6 Oktober 2022
October 4-6, 2022

PJB Connect (PLN NP *Jump Beyond Connection*) 2022.
PJB Connect (PLN NP Jump Beyond Connection) 2022.

12 Oktober 2022
October 12, 2022

Uji Coba Amonia sebagai Substitusi Bahan Bakar (*Co-Firing*) di PLTU Gresik Unit 1 yang berkapasitas 100 MW.
Trial of Ammonia as Fuel Substitution (Co-Firing) at Unit 1 Gresik CFPP with a capacity of 100 MW.

8 Desember 2022
December 8, 2022

Dari Sampah jadi Listrik, Kolaborasi PLN Nusantara Power dengan PD Pasar Surya.
From Garbage to Electricity, Collaboration between PLN Nusantara Power and PD Pasar Surya.

19 Desember 2022
December 19, 2022

PLN Nusantara Power Berhasil Raih Pelanggan Baru, Implementasi EAM PT Geo Dipa Energi (Persero).
PLN Nusantara Power Successfully Won New Customers, Implementation of EAM in PT Geo Dipa Energi (Persero).

31 Desember 2022
December 31, 2022

COD *Add On* Muara Tawar Blok 2.
COD Add On Muara Tawar Block 2.

31 Desember 2022
December 31, 2022

Relokasi 2 Pembangkit, dari Sumatra ke Maluku, dukungan PLN Nusantara Power untuk Industri Nikel.
Relocation of 2 Power Plants, from Sumatera to Maluku, supported by PLN Nusantara Power for the Nickel Industry.

Testimoni
Testimony

Ir. M. Priharto Dwinugroho. M.S.E

Direktur Teknik Kementerian ESDM
Technical Director of the Ministry of Energy and Mineral Resources

"Saya rasa PLN NP telah dengan jelas menunjukkan semangat dan komitmennya dalam menjaga *zero accident* di seluruh unit pembangkitnya. Berbagai lomba seperti *fire rescue* dan simulasi tanggap darurat serta berbagai prestasi yang kontinyu diraih PLN NP menjadi bukti akan hal tersebut."

"I think PLN NP has clearly demonstrated its passion and commitment in maintaining zero accidents in all of its generating units. It is proven by various competitions such as fire rescue and emergency response simulations as well as various achievements continuously achieved by PLN NP."

Khofifah Indar Parawansa

Gubernur Jawa Timur
Governor of East Java

"Saya merasa bangga dan berterima kasih kepada PLN Nusantara Power karena secara langsung mendorong pertumbuhan ketenagalistrikan di Indonesia, khususnya di Jawa Timur yang juga akan mendorong roda pertumbuhan ekonomi bagi Jawa Timur."

"I am proud and grateful to PLN Nusantara Power since it directly encourages electricity growth in Indonesia, especially in East Java which will also drive the wheels of economic growth for East Java."

Darmawan Prasodjo

Direktur Utama PT PLN (Persero)
President Director of PT PLN (Persero)

"PLN NP telah mampu menerapkan skema *co-investment* dalam pengelolaan sumber daya untuk menjadi energi. Hal ini lah yang mampu mendongkrak kinerja PLN NP, dimana saat ini PLN NP sudah menjadi raksasa sebagai perusahaan energi."

"PLN NP has been able to implement a co-investment scheme in managing resources to turn them into energy. It has been able to boost PLN NP performance, where PLN NP has now become a giant as an energy company."

Ganjar Pranowo

Gubernur Jawa Tengah
Governor of Central Java

"Dalam pengembangan daerah di Jawa Tengah, kami membutuhkan kontribusi dan dukungan dari perusahaan serta instansi yang ada di sekitarnya. Bantuan dan dukungan dari PLN khususnya PLN Nusantara Power yang memiliki unit pembangkit di Rembang menjadikan sinergi ini bermanfaat untuk kebutuhan infrastruktur dan sosial, serta mencegah abrasi di Pantura ini."

"In regional development in Central Java, we need contributions and support from companies and agencies that are in the vicinity. Assistance and support from PLN, especially PLN Nusantara Power, which has a generating unit in Rembang, makes this synergy useful for infrastructure and social needs, and prevents abrasion in the Pantura."

Jisman P. Hutajulu

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
Director General of Electricity, Ministry of Energy and Mineral Resources

"Kami mengapresiasi PLN Nusantara Power dalam pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), upaya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Cirata dan penggunaan *Co-firing* pada PLTU merupakan langkah-langkah strategis yang telah dilaksanakan dan perlu ditingkatkan lagi oleh PLN Nusantara Power di masa yang akan datang. Selama 7 tahun berturut-turut PLN Nusantara Power Connect telah menyumbangkan kontribusi besar dalam perkembangan industri listrik di Indonesia melalui berbagai inovasi dan diskusi dalam seminar. Semoga kegiatan ini dapat menghubungkan dan membangun relasi antara PLN Nusantara Power dan sejumlah stakeholder sehingga memberikan manfaat besar bagi perkembangan ketenagalistrikan di masa depan."

"We appreciate PLN Nusantara Power in managing the Hydro Power Plant (HPP), the efforts to build the Cirata Solar Power Plant (SPP) and the use of Co-firing at CFPPs are the implemented strategic steps that need to be further increased by PLN Nusantara Power in the future. For 7 consecutive years, PLN Nusantara Power Connect has made a major contribution to the development of the electricity industry in Indonesia through various innovations and discussions in seminars. Hopefully this activity can connect and build relationships between PLN Nusantara Power and a number of stakeholders so as to provide great benefits for the development of electricity in the future."

Alue Dohong

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Deputy Minister of Environment and Forestry

"Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap PT PLN NP atas sinergi dengan KLHK untuk berkomitmen dalam menjaga ekosistem lingkungan hidup sehingga kita dapat mengimplementasikan pariwisata Indonesia yang bersih sampah."

"I appreciate PT PLN NP for the synergy with the Ministry of Environment and Forestry to commit to protecting the environmental ecosystem so that we are able to implement waste-clean Indonesian tourism."

Laporan Kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan

Report to Shareholders and Stakeholders

Laporan Dewan Komisaris

Report from The Board of Commissioners

Evy Haryadi
Komisaris Utama
President Commissioner

Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas kinerja Perusahaan yang dapat mencapai target dan memberikan dukungan agar PLN NP dapat terus memanfaatkan peluang atas prospek usaha untuk mendukung ketahanan energi.

The Board of Commissioners appreciates the Company performance in achieving targets and provides support so that PLN NP can continue to take advantage of opportunities for business prospects to support energy security.

Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan yang Kami Hormati,

Puji syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya kepada kita semua. Oleh perkenan-Nya, PT PLN Nusantara Power (PLN NP) mampu melampaui target kinerja 2022 yang telah direncanakan, walaupun menghadapi banyak tantangan termasuk dampak dari pandemi Covid-19 yang memuncak selama tahun 2021.

Atas kinerja perusahaan pada tahun 2022, di tengah dinamisnya perubahan struktur tata kelola sehingga PLN NP mencapai *end-state* sebagai *Subholding* PLN Nusantara Power (PLN NP), kami selaku Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada jajaran Direksi. Selanjutnya, melalui laporan ini, kami menyampaikan hasil dari tugas pengawasan dan penilaian kinerja Direksi selama tahun 2022, serta pandangan atas prospek usaha yang disusun oleh Direksi dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

Dear Shareholders and Stakeholders,

Praise and gratitude to the presence of God Almighty for all grace for all of us. By His permit, PT PLN Nusantara Power (PLN NP) was able to exceed the planned 2022 performance target, despite facing many challenges including the impact of the Covid-19 pandemic which peaked during 2021.

For the Company performance in 2022, amid the dynamic changes in the governance structure so that PLN NP reached end-state as PLN Nusantara Power (PLN NP) Subholding, we, as the Board of Commissioners, would like to express our high appreciation to the Board of Directors. Furthermore, through this report, we convey the results of the supervisory duties and performance assessment of the Board of Directors for 2022, as well as views on the business prospects prepared by the Board of Directors and the implementation of good corporate governance (GCG).

Kondisi Makroekonomi 2022
2022 Macroeconomic Conditions

Selama tahun 2022, ekonomi global menghadapi tekanan yang sangat berat. Terjadinya konflik geopolitik di beberapa wilayah, terutama invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina yang sampai saat ini berlangsung dan belum menunjukkan tanda akan berakhir, memberikan tekanan bagi perekonomian global. Dampak nyata dari hal tersebut adalah lonjakan harga komoditas, khususnya komoditas energi. Dengan dijatuhkannya sanksi kepada Rusia, maka pasokan energi ke negara-negara Eropa mengalami hambatan. Beberapa negara bahkan telah menyatakan bahwa mereka mengalami krisis energi. Lonjakan harga komoditas energi juga telah membuat tingkat inflasi di banyak negara melambung tinggi. Prospek ekonomi global menurun drastis dan diperkirakan mengalami kerentanan pada beberapa negara yang mungkin memasuki masa resesi di 2023.

During 2022, the global economy was facing enormous pressure. Geopolitical conflicts in several regions, especially the ongoing invasion by Russia against Ukraine as of now and has not shown any signs of ending, has put pressure on the global economy. The real impact of this is a surge in commodity prices, especially energy commodities. Due to sanctions on Russia, the supply of energy to European countries is having obstacles. Some countries have even declared that they are in energy crisis. The surge in energy commodity prices has also made the inflation rate in many countries soar. Global economic outlook has declined drastically and is predicted to experience vulnerabilities in several countries which may get into recession in 2023.

Meski demikian, ekonomi Indonesia masih tumbuh cukup baik di 2022. Hal ini tak lepas dari pasar domestik yang sangat besar dan hasil alam Indonesia yang melimpah untuk memasok kebutuhan beberapa komoditas ke negara-negara lain. Terbukti pada 2022 ekonomi Indonesia masih dapat tumbuh 5,31% dan neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus USD54,46 miliar. Menutup tahun 2022, tingkat inflasi nasional meningkat menjadi 5,51%.

However, Indonesia's economy still grew quite well in 2022. It is inseparable from the huge domestic market and Indonesia's abundant natural products to supply the needs of several commodities to other countries. It is proven that in 2022 Indonesia's economy was still able to grow by 5.31% and Indonesia's trade balance recorded a surplus of USD 54.46 billion. Closing 2022, the national inflation rate increased to 5.51%.

Dewan Komisaris berpandangan bahwa, tahun 2022 merupakan tahun yang penuh tantangan, dimana PLN NP berhasil mencatat performa yang positif. Dewan Komisaris menyadari bahwa tantangan yang dihadapi PLN NP di tahun 2022 sangat kompleks, karena itu Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam menyikapi dinamika yang terjadi selama tahun 2022. Langkah-langkah yang diambil Direksi tidak hanya dapat membawa PLN NP melalui 2022 dengan capaian kinerja yang baik, tapi juga sesuai dengan rencana jangka panjang PLN NP.

The Board of Commissioners considers that 2022 will be a year full of challenges, in which PLN NP managed to record positive performance. The Board of Commissioners realizes that the challenges faced by PLN NP in 2022 are greatly complex, therefore the Board of Commissioners appreciates the steps taken by the Board of Directors in responding to the dynamics occurred during 2022. The steps taken by the Board of Directors was not only able to bring PLN NP through 2022 with good performance achievements, but also according to PLN NP long-term plans.

Penilaian Terhadap Kinerja Direksi dan Dasar Penilaiannya

Performance Assessment of the Board of Directors and the Basis for the Assessment

Kami menilai Direksi telah melakukan pengelolaan kegiatan secara baik sesuai dengan rencana bisnis yang telah ditetapkan. Pengelolaan dilakukan dengan penuh tanggung jawab memenuhi amanah dari pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini merupakan pencapaian yang sangat baik sebagai langkah awal sinergi seluruh fungsi PLN NP. Kami berpendapat bahwa Direksi telah mampu mengemban tugas pelaksanaan integrasi dalam pembentukan *subholding*. Ke depan, PLN NP diharapkan terus mampu menghadapi berbagai tantangan dan dapat melakukan transformasi korporasi dengan peran baru. Kami berharap kinerja PLN NP dapat terus meningkat dan bersinergi agar seluruh fungsi mampu berkembang bersama secara berkelanjutan.

We assess that the Board of Directors has managed activities properly following the established business plan. They carry out management with full responsibility in fulfilling the mandate by the shareholders and other stakeholders. This is a very good achievement as the first step in the synergy of all PLN NP functions. We consider that the Board of Directors has been able to carry out duties of implementing integration in the formation of subholdings. Going forward, PLN NP is expected to continue to be able to face various challenges and be able to carry out corporate transformation with new roles. We hope that PLN NP performance will continue to improve and synergize so that all functions are able to develop together in a sustainable manner.

Dewan Komisaris menilai kinerja Direksi dalam mengelola PLN NP selama tahun 2022 tercermin dari capaian tingkat kesehatan Perusahaan yang berada pada level “AAA” dengan skor 102,88 dan termasuk dalam kategori “Sehat”. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui reviu kinerja keuangan maupun operasional secara berkala sesuai dengan RKAP 2022, KPI Perusahaan 2022 dan Kontrak Manajemen 2022, serta selaras dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) termasuk isu penting terkait di bidang ekonomi, lingkungan, sosial maupun perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui rapat maupun penyampaian laporan kinerja Perusahaan oleh Direksi. Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja operasional PLN NP, Dewan Komisaris menyampaikan agar Direksi dapat terus memperkuat landasan kinerja secara *bottom line* dengan optimalisasi potensi yang mendorong meningkatnya sinergi usaha di lingkungan PLN NP grup sehingga menciptakan pertumbuhan kinerja berkelanjutan.

The Board of Commissioners considers that the performance of the Board of Directors in managing PLN NP during 2022 is reflected in the achievement of the Company's health level which is at the “AAA” level with a score of 102.88 and is included in the “Healthy” category. Oversight function by the Board of Commissioners is carried out through periodic reviews of financial and operational performance in line with the 2022 ABOP, 2022 Company KPI and 2022 Management Contract, and in line with the Company's Long Term Plan (RJPP) including important issues related to the economic, environmental, social and amendments to the applicable laws and regulations through meetings and submission of Company performance reports by the Board of Directors. Based on the evaluation results of the operational performance of PLN NP, the Board of Commissioners conveys that the Board of Directors can continue to strengthen the bottom line performance basis by optimizing potential that encourages the increased business synergy within the PLN NP group so as to create sustainable performance growth.

Dari segi keuangan, Pendapatan Usaha PLN NP tahun 2022 sebesar Rp27,20 triliun, menurun 7,81% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp29,51 triliun. Adapun Beban Usaha PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp22,57 triliun menurun 10,08% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp25,10 triliun. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah beban bahan bakar, pelumas dan pembelian tenaga listrik seiring dengan penjualan tenaga listrik PLN NP (Pembangkit Non – PLTU Batubara) dan optimasi PLTU Batubara pada Sistem Kelistrikan Jawa Bali.

Sementara itu, perolehan Laba tahun buku 2022 mencapai Rp6,58 triliun atau meningkat 13,12% dibanding laba tahun sebelumnya yang sebesar Rp5,82 triliun. Capaian laba ini tidak terlepas dari kerja keras dan kerja cerdas dari seluruh Insan PLN NP yang berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan. Tak hanya itu, PLN NP juga menjadi salah satu perusahaan unggulan di PLN Grup yang berhasil membukukan laba investasi dari perusahaan asosiasi melalui *co-investment*. Transformasi yang dijalankan PLN *holding* juga berperan besar dalam mendorong kinerja NP menjadi semakin *agile* dan efisien. Pertumbuhan kinerja keuangan PLN NP sejalan dengan pertumbuhan aset perusahaan. Tercatat, Aset PLN NP mengalami kenaikan sebesar Rp 2,76 triliun sehingga kini total asetnya mencapai Rp 174,92 triliun. Adapun jumlah Liabilitas PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp12,57 triliun meningkat 14,31% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp10,99 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penambahan Liabilitas Imbalan Kerja karena penyesuaian imbalan kerja jatuh tempo oleh aktuaris dan penambahan Liabilitas Pajak Tangguhan yang menyesuaikan perbedaan temporer. Sementara itu, jumlah Ekuitas PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp162,36 triliun meningkat 0,74% dibandingkan 2021 adalah sebesar Rp161,17 triliun. Peningkatan ekuitas sebagian besar disebabkan oleh peningkatan laba di tahun 2022 dan selisih kurs karena penjabaran Laporan Keuangan. Dewan Komisaris menyampaikan arahan kepada Direksi untuk fokus menerapkan strategi dan kebijakan *cost leadership program* dengan menjaga struktur beban usaha Perusahaan.

Realisasi Produksi Tenaga Listrik tahun 2022 adalah sebesar 17.064.31 MWh, mengalami penurunan 17,33% dibandingkan produksi tahun 2021 sebesar 20.640,92 GWh. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan produksi tenaga listrik pada Unit Gresik, Muara Tawar, Muara Karang dan Paiton. Adapun realisasi Penjualan Tenaga Listrik tahun 2022 adalah sebesar 16.379.481 MWh mengalami penurunan dibanding tahun 2021 sebesar 19.848,44 GWh. Hal ini dipengaruhi oleh tambahan alokasi gas pada PLTGU Muara Tawar dan Muara Karang sehingga dapat membantu lebih banyak saat sistem pada periode beban puncak, kemudian pembangkit PLTA beroperasi dengan pola basah diatas rencana tahunan dan juga pada sistem 500 KV PLTU batubara terdapat beberapa unit yang mengalami gangguan sehingga alokasi energi tersebut dialihkan ke UP Paiton. Dewan Komisaris senantiasa memberi nasihat dan arahan kepada Direksi untuk memaksimalkan produksi dan penjualan listrik ditingkatkan untuk mempercepat target *Net Zero Emission*.

In term of financial perspective, PLN NP Operating Revenues in 2022 amounted to Rp27.20 trillion, decreased by 7.81% compared to 2021 of Rp29.51 trillion. PLN NP Operating Expenses in 2022 amounted to Rp22.57 trillion, decreased by 10.08% compared to 2021 of Rp25.10 trillion. This decrease was mainly influenced by the reduced amount of fuel, lubricants and electricity purchases in line with the sale of electricity from PLN NP (Non-Coal Power Plant) and optimization of Coal CFPP in the Java-Bali Electricity System.

Meanwhile, profit for the 2022 fiscal year reached Rp6.58 trillion, increased by 13.12% compared to the previous year of Rp5.82 trillion. This profit achievement is inseparable from the hard work and smart work of the entire PLN NP personnel which presents the improvement on the financial performance. Moreover, PLN NP is also become one of the leading companies in the PLN Group that has successfully recorded investment returns from associated companies through co-investment. PLN holding transformation also takes the major role in encouraging NP performance to become more agile and efficient. PLN NP financial performance growth is in line with the Company's asset growth. PLN NP recorded the assets increased by Rp2.76 trillion so that current total assets reach Rp174.92 trillion. Meanwhile, the amount of PLN NP liabilities in 2022 is Rp12.57 trillion, increased by 14.31% compared to 2021 of Rp10.99 trillion. The increase was mainly influenced by the addition of Employee Benefits Liability due to adjustment of employee benefits due by the actuary and the addition of Deferred Tax Liability to adjust for temporary differences. Meanwhile, total Equity of PLN NP in 2022 is Rp162.36 trillion, increased by 0.74% compared to 2021 which was Rp161.17 trillion. The increase in equity was largely due to the increase in profit in 2022 and foreign exchange differences due to the translation of the Financial Statements. The Board of Commissioners conveys directions to the Board of Directors to focus on implementing cost leadership program strategies and policies by maintaining the operating expenses structure of the Company.

Realization of Electricity Production in 2022 is 17,064.31 MWh, decreased by 17.33% compared to 2021 production of 20,640.92 GWh. This decrease was mainly influenced by a decrease in electricity production at the Gresik, Muara Tawar, Muara Karang and Paiton Units. The realization of electricity sales in 2022 is 16,379,481 MWh, a decrease compared to 2021 of 19,848.44 GWh. This is influenced by the additional allocation of gas to the Muara Tawar and Muara Karang CCPP so that it can help more when the system is in peak load periods, then the HPP operates in a wet pattern above the annual plan and also in the 500 KV coal power plant system there are several units having interference, so that the energy allocation was diverted to Paiton GU. The Board of Commissioners always provides advice and directions to the Board of Directors to maximize electricity production and increase sales to accelerate the Net Zero Emission target.

Dewan Komisaris senantiasa memonitor Direksi untuk melakukan pengembangan usaha dengan tetap mengedepankan aspek pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku maupun prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk terus mempertajam strategi peningkatan efisiensi operasional dengan menjaga tingkat biaya bahan bakar, menjaga *security* dan keandalan pembangkit, optimasi utilisasi pembangkit dan menjaga level BPP yang ditetapkan oleh Pemegang Saham. Selain itu, Direksi perlu terus meningkatkan pertumbuhan *revenue mix* untuk mengoptimalkan pendanaan pengembangan usaha, meningkatkan *strategic partnership* dan pemasaran produk serta kesiapan dukungan sumber daya manusia sejalan dengan peningkatan utilisasi pembangkit dan *resources* PLN NP dalam meraih pendapatan pada segmen usaha *beyond* kWh.

Tidak lupa Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi beserta jajaran manajemen di bawahnya atas berbagai prestasi yang diperoleh PLN NP sepanjang tahun 2022. Sejumlah penghargaan dan prestasi baik internasional maupun nasional yang diperoleh diantaranya adalah *Gold Winner* dalam ajang pada *16th Annual Global Contact Center World Awards*, 2 penghargaan pada *Asean Risk Award* (ARA) 2022 kategori *Governance, Risk Management, and Compliance* (GRC), meraih predikat *Gold* di ajang *Asia Sustainability Reporting Rating* (ASRRAT), penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) *Zero Accident*, penghargaan Subroto *Award* 2022, 14 penghargaan dalam ajang Indonesian *Sustainable Development Award* (ISDA), penghargaan dalam ajang *Indonesia Safety Excellence Awards* (ISEA) dan penghargaan 5 (tiga) PROPER Emas, 4 PROPER Hijau serta 12 PROPER Biru.

The Board of Commissioners constantly monitors the Board of Directors to carry out business development while still prioritizing aspects of risk management, compliance with applicable regulations and the principles of good corporate governance. The Board of Commissioners requests the Board of Directors to continue to sharpen the strategy for increasing operational efficiency by maintaining fuel cost levels, maintaining power plant security and reliability, optimizing power plant utilization and maintaining the BPP level set by Shareholders. Moreover, the Board of Directors needs to keep increasing the revenue mix growth to optimize funding for business development, improve strategic partnerships and product marketing as well as readiness for human resource support in line with increasing the utilization of PLN NP power plants and resources in achieving revenue in the beyond kWh business segment.

The Board of Commissioners does not forget to appreciate the Board of Directors and the management under them for various achievements obtained by PLN NP throughout 2022. A number of international and national awards and achievements were obtained including the Gold Winner in the 16th Annual Global Contact Center World Awards, 2 awards at the 2022 Asean Risk Award (ARA) for the Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) category, the Gold title at the Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) event, Zero Accident Occupational Safety and Health (OHS) award, Subroto Award 2022, 14 awards in the Indonesian Sustainable Development Award (ISDA) event, awards in the Indonesia Safety Excellence Awards (ISEA) event and 5 (three) Gold PROPER awards, 4 Green PROPER and 12 Blue PROPER awards.

Tata Cara dan Frekuensi Pemberian Nasihat Kepada Direksi

Procedures and Frequency of Providing Advice to the Board of Directors

Dewan Komisaris menjalankan tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat atas kegiatan pengelolaan Perusahaan oleh Direksi. Dewan Komisaris telah memberikan arahan kepada Direksi dalam berbagai aspek operasional maupun keuangan serta pengembangan usaha Perusahaan, termasuk pengembangan Anak Perusahaan maupun Perusahaan Afiliasi, realisasi *energy mix* dan *security of supply* energi primer, realisasi pemeliharaan unit pembangkit serta aspek K3L di seluruh unit pembangkit untuk menjaga *zero accident* dan tingkat PROPER. Fungsi pengawasan dan penasihatan Dewan Komisaris kepada Direksi dilakukan baik secara formal dalam rapat, maupun secara informal serta melalui kunjungan kerja ke unit bisnis PLN NP bersama dengan Komite Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners carries out its duties and responsibilities to supervise and provide advice on the Company management activities by the Board of Directors. The Board of Commissioners has provided direction to the Board of Directors in various operational and financial aspects as well as business development of the Company, including the development of Subsidiaries and Affiliations, the realization of the energy mix and security of supply of primary energy, the realization of maintenance of generating units as well as OHSE aspects in all generating units to maintain zero accident and PROPER level. The Board of Commissioners carries out supervisory and advisory functions to the Board of Directors both formally in meetings and informally as well as through work visits to the PLN NP business unit together with the Board of Commissioners Committees.

Dewan Komisaris secara rutin melakukan kunjungan ke Unit Pembangkit maupun Anak Perusahaan guna mendapat informasi secara langsung mengenai operasional Unit/Anak Perusahaan tersebut. Sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris telah melakukan kunjungan sebanyak 21 (dua puluh satu) kali di tahun 2022. Selain itu, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat internal sebanyak 13 (tiga belas) kali dan Rapat Pengawasan bersama dengan Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali. Agenda rapat internal Dewan Komisaris meliputi tindak lanjut tugas Dewan Komisaris, Laporan Manajemen dan Kinerja, *progress* proyek maupun penugasan. Adapun agenda rapat pengawasan mencakup Laporan Manajemen dan Kinerja, maupun tindak lanjut rapat sebelumnya. Materi yang akan dibahas dalam rapat pengawasan/konsultasi terlebih dahulu dikaji dalam Rapat Internal Dewan Komisaris maupun Rapat Komite berdasarkan laporan-laporan yang dibuat oleh Manajemen.

Disamping itu, Dewan Komisaris juga memberikan saran, rekomendasi dan masukan yang disampaikan dalam Rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Direksi maupun dalam Rapat Pengawasan. Secara berkala, Dewan Komisaris melakukan evaluasi atas pencapaian RKAP 2022 melalui telaah terhadap Laporan Kinerja bulanan dan Laporan Manajemen Triwulanan maupun pembahasan kinerja dalam Rapat Pengawasan bersama Direksi dan jajaran manajemen di bawahnya setiap bulan sekali.

The Board of Commissioners regularly visits Generating Units and Subsidiaries to obtain direct information regarding the operations of these Units/Subsidiaries. Throughout 2022, the Board of Commissioners held 21 (twenty one) work visits in 2022. Moreover, the Board of Commissioners held 13 (thirteen) internal meetings and 12 (twelve) Joint Supervision Meetings with the Board of Directors . The agenda of the Board of Commissioners' internal meetings includes follow-up on the Board of Commissioners duties, Management and Performance Reports, project progress and assignments. The agenda for the supervisory meeting includes Management and Performance Reports, as well as follow-up to previous meetings. The material to be discussed in the supervisory/consulting meetings is first reviewed in the Board of Commissioners' Internal Meetings and Committee Meetings based on reports prepared by Management.

Furthermore, the Board of Commissioners also provides suggestions, recommendations and input to be submitted at the Board of Commissioners Meetings attended by the Board of Directors as well as at the Supervisory Meeting. The Board of Commissioners periodically evaluates the achievement of the 2022 ABOP through a review of the monthly Performance Reports and Quarterly Management Reports as well as discussion of performance in Supervision Meetings with the Board of Directors and the management below them once a month.

Pandangan atas Prospek Usaha yang Disusun Oleh Direksi

Views on Business Prospects Prepared by the Board of Directors

Dewan Komisaris, memberikan tanggapan positif atas prospek usaha yang telah disusun oleh Direksi berdasarkan asumsi yang realistis. Tanggapan ini kami sampaikan setelah memperhatikan kesempatan atas peluang usaha di masa depan. Pengembangan usaha di bidang pembangkitan akan menjadi hal mendasar bagi keberlanjutan yang mendorong percepatan transisi energi di dalam negeri guna mencapai target *Net Zero Emission* pada 2060. Di samping itu, pembentukan *subholding* PLN NP sebagai strategi pengembangan yang dalam jangka singkat diharapkan dapat menciptakan efisiensi biaya, peningkatan efektivitas dan produktivitas kerja serta pengembangan usaha.

Berdasarkan RUPTL 2021-2030, rencana penambahan kapasitas pembangkit untuk seluruh Indonesia adalah sebanyak 40,6 GW atau rata-rata mencapai 4 GW per tahun. Penambahan kapasitas baru akan didominasi oleh EBT (51,6%) dengan porsi hidro (25,6%%) sebagai teknologi yang paling tepat untuk memenuhi target 23% EBT pada tahun 2025 sebagaimana yang tercantum dalam RUPTL. Porsi batubara sebesar 34% dalam kapasitas tambahan hanya terdiri atas *on-going project*. Guna mengoptimalkan peluang tersebut, Dewan Komisaris berpendapat bahwa PLN NP perlu terus meningkatkan peran dan kontribusi dalam mencapai bauran energi nasional di tahun 2025.

The Board of Commissioners provides positive response to the prepared business prospects by the Board of Directors based on realistic assumptions. We convey this response after considering the opportunities for business opportunities in the future. Business development in the power generation sector will be fundamental to sustainability which will accelerate domestic energy transition to achieve the Net Zero Emission target in 2060. Moreover, the establishment of PLN NP subholding as the development strategy is expected to create cost efficiencies in the short term, increase work effectiveness and productivity as well as business development.

Based on the 2021-2030 RUPTL, plans to increase power plant capacity throughout Indonesia are 40.6 GW or an average of 4 GW per year. New capacity additions will be dominated by NRE (51.6%) with hydro portion (25.6%) as the most appropriate technology to meet the target of 23% NRE in 2025 as stated in the RUPTL. The 34% portion of coal in additional capacity consists only of on-going projects. In order to optimize these opportunities, the Board of Commissioners believes that PLN NP needs to continue to increase its role and contribution in achieving the national energy mix in 2025.

Kami berharap bahwa strategi yang telah ditetapkan Direksi tetap perlu dievaluasi secara berkala dan selalu mengelola risiko yang mungkin timbul dengan efektif, mengevaluasi proses bisnis dengan memperhatikan kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan. Kami memberikan dukungan agar PLN NP terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan demi tercapainya pertumbuhan yang berkelanjutan.

We hope that the strategy set by the Board of Directors still needs to be evaluated regularly and always manage risks that may arise effectively, evaluate business processes with due regard to health, safety and the environment. We provide support so that PLN NP keeps refining and improving in the context to achieve sustainable growth.

Pandangan Atas Implementasi Tata Kelola Perusahaan

Views on the Implementation of Corporate Governance

Dewan Komisaris berpendapat bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja PLN NP dalam jangka panjang, kami senantiasa meningkatkan fungsi pengawasan terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*/GCG) sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemegang saham, regulator maupun standar *best practice* yang berlaku. Penerapan GCG di PLN NP tidak hanya untuk memenuhi peraturan dan Perundang-undangan saja, namun harus mampu mewujudkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris mengadakan rapat gabungan bersama dengan Direksi minimal 1 (satu) bulan sekali, untuk membahas kinerja bulanan, perkembangan bisnis dan portofolio, dan isu-isu operasional PLN NP. Selama tahun 2022, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 13 (dua belas) kali rapat pengawasan sebanyak 12 (dua belas) kali dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris adalah 100%.

The Board of Commissioners believes that in the effort to improve PLN NP performance in the long term, we are constantly improving the oversight function of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) following the standards set by the shareholders, regulators and applicable best practice standards. GCG application at PLN NP is not only to comply with laws and regulations, but must be able to consistently realize the GCG principles. In carrying out the oversight function, the Board of Commissioners holds joint meeting with the Board of Directors at least once a month, to discuss monthly performance, business and portfolio developments, and PLN NP operational issues. During 2022, the Board of Commissioners held 13 (twelve) meetings with 12 (twelve) supervisory meetings with an attendance rate of each member of the Board of Commissioners reached 100%.

Dewan Komisaris terus berupaya memantau penerapan GCG yang menjadi komitmen bersama dengan Direksi. Pengawasan terhadap implementasi GCG dilakukan untuk memastikan seluruh prinsip-prinsip GCG telah diimplementasikan di setiap tingkatan dan jenjang organisasi Perusahaan. Upaya yang telah dilakukan diantaranya sosialisasi dan *refreshment* pemahaman terkait *soft structure* GCG kepada seluruh karyawan, penyelesaian program tindak lanjut AOI *Assessment* GCG 2020, termasuk perbaikan Aspek Dewan Komisaris, reviu COC dan GCG *Code*, induksi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru dengan materi RJPP, GRC, Teknologi, Pengembangan Bisnis dan lain sebagainya serta melakukan *update* Dokumen Daftar Khusus, Pakta Integritas dan Hubungan Kepengurusan Direksi dan Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners continues to strive to monitor GCG implementation as the joint commitment with the Board of Directors. Supervision of GCG implementation is carried out to ensure that all GCG principles have been implemented at every level and organization level of the Company.The Company makes efforts, including dissemination and refreshment of understanding regarding the soft structure of GCG for all employees, completion of the 2020 AOI Assessment GCG follow-up program, including improvements to the Board of Commissioners Aspect, review of COC and GCG Code, induction of new members of the Board of Directors and Board of Commissioners with CLP material, GRC, Technology, Business Development and so on as well as updating Special Register Documents, Integrity Pact and Management Relations of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

Dan untuk melihat sejauh mana implementasi GCG diterapkan, maka PLN NP telah melaksanakan *assessment* GCG yang dilaksanakan oleh BPKP Jawa Timur dengan mengacu kepada parameter yang dikembangkan oleh Kementerian BUMN sesuai dengan Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK-16/S. MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*). Hasil penilaian tersebut menunjukkan pencapaian skor sebesar 95,54 dengan klasifikasi kualitas penerapan GCG “Sangat Baik”.

Penguatan sistem pengendalian internal tentunya akan terus ditingkatkan dengan adanya kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja secara *fair*, pembagian tugas, maupun komunikasi yang efektif dalam setiap tahapan proses bisnis maupun pengambilan keputusan pada setiap tingkat pekerjaan dan unit dalam struktur organisasi termasuk keamanan terhadap aset perusahaan. Evaluasi sistem pengendalian internal dilakukan secara berkala melalui kegiatan audit baik oleh audit internal maupun audit eksternal. Bersama Komite Audit, Dewan Komisaris melakukan telaah berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian internal dengan memberikan rekomendasi, saran, dan masukan yang bermanfaat dalam rangka meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal.

Implementasi manajemen risiko terus dikembangkan dan dilakukan reviu secara berkala untuk mencapai pengelolaan risiko yang efektif dan dapat mendukung proses pengambilan keputusan secara tepat waktu. Penerapan manajemen risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis maupun operasional perusahaan, sebagai perwujudan dari penerapan GCG. Dewan Komisaris memandang bahwa pengelolaan risiko utama Perusahaan terutama terkait rencana mitigasi yang dilakukan perlu terus ditingkatkan dan diperluas, agar tidak mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Perusahaan.

Dewan Komisaris senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pengawasan terhadap jalannya Perusahaan, serta bekerja sama secara harmonis dengan jajaran Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris memandang bahwa berbagai upaya penguatan implementasi GCG perlu terus dilakukan, termasuk bekerjasama dan melakukan sinergi dengan berbagai instansi guna mendapatkan masukan tata kelola perusahaan di PLN NP maupun di lingkungan PLN NP secara grup.

And to find how far the GCG has been implemented, PLN NP has carried out GCG assessment by BPKP East Java with reference to the parameters developed by the Ministry of SOE based on the Decree of the Secretary to the Minister of SOE No. SK-16/S. MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance. The assessment results show a score of 95.54 with the classification of the quality of GCG implementation "Very Good".

PLN NP will certainly continue to improve the strengthening of internal control system with the existence of authority, authorization, verification, reconciliation, fair work performance assessment, division of tasks, as well as effective communication in every stage of the business process and decision making at every level of work and units in the organizational structure including security of company assets. Internal control system is periodically evaluated through audit activities by both internal audit and external audit. Together with the Audit Committee, the Board of Commissioners reviews it based on the evaluation results of the implementation of the internal control system by providing useful recommendations, suggestions and input in order to increase the effectiveness of the internal control system.

Implementation of risk management continues to be developed and reviewed periodically to achieve effective risk management and can support the decision-making process in a timely manner. The implementation of risk management is an integral part of the Company's strategic and operational planning processes, as a manifestation of GCG implementation. The Board of Commissioners considers that the management of the Company's main risks, especially related to the mitigation plans that are carried out, need to be continuously improved and expanded, so as not to affect the goals and targets achievement set by the Company.

The Board of Commissioners always strives to improve the quality of carrying out supervisory duties on the running of the Company, and works in harmony with the Board of Directors as stipulated in the Company's Articles of Association as well as applicable laws and regulations. The Board of Commissioners considers the need of sustainable various efforts to strengthen GCG implementation, including collaborating and synergizing with various agencies to obtain input on corporate governance in PLN NP as well as within PLN NP as a group.

Pandangan Atas Penerapan Kebijakan *Whistleblowing System*

Views on the Implementation of the Whistleblowing System Policy

Whistleblowing System (WBS) sangat diperlukan untuk memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh Insan PLN NP dan *stakeholder* lainnya untuk dapat menyampaikan laporan mengenai indikasi pelanggaran terhadap nilai–nilai etika yang berlaku, berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan disertai dengan niat baik. Dewan Komisaris memahami bahwa penyelesaian pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh stakeholder adalah merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan *stakeholder* dalam rangka menjamin hak-haknya dalam berhubungan dengan PLN NP. Oleh karenanya Dewan Komisaris sangat mendukung diimplementasikannya mekanisme WBS. Pelaporan yang diperoleh dari mekanisme ini wajib mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk pengenaan hukuman yang tepat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan juga bagi mereka yang berniat melakukan hal tersebut.

The Whistleblowing System (WBS) is urgently needed to strengthen the implementation of good corporate governance which is realized by providing opportunities for the whole PLN NP personnel and other stakeholders to be able to submit reports regarding indications of violations of applicable ethical values, based on the accountable evidence accompanied by good intentions. The Board of Commissioners understands that completing reporting of violations committed by the stakeholders is the actualization of increasing the stakeholders protection in order to guarantee their rights in dealing with PLN NP. Therefore, the Board of Commissioners strongly supports the implementation of the WBS mechanism. Reports obtained from this mechanism must receive attention and follow-up, including the imposition of appropriate penalties so as to provide a deterrent effect for the perpetrators of violations and also for those who intend to do so.

Secara umum Dewan Komisaris telah memastikan bahwa pengelolaan WBS di PLN NP telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dewan Komisaris menilai bahwa penerapan WBS adalah bagian dari sistem pengendalian internal PLN NP dalam mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan seperti korupsi, suap, gratifikasi, pencurian serta praktik kecurangan dan pelanggaran hukum lainnya. Selama tahun 2022, terdapat 3 (tiga) laporan pengaduan pelanggaran yang masuk terhadap PLN NP melalui saluran WBS. Adapun kategori pelanggaran yang disampaikan terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa, dan perbuatan melanggar hukum.

In general, the Board of Commissioners has ensured that WBS management at PLN NP has been running as expected. The Board of Commissioners considers that WBS implementation is part of PLN NP internal control system in preventing irregular and fraudulent practices such as corruption, bribery, gratuities, theft and other fraudulent practices and violations of law. During 2022, there were 3 (three) incoming reports of complaints of violations against PLN NP through the WBS channel. The categories of violations submitted are related to the process of procuring goods and services, as well as unlawful acts.

Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris

Performance Assessment of Committees Under the Board of Commissioners

Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris PLN NP dibantu oleh 3 Komite yaitu (1) Komite Audit, (2) Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan, serta (3) Komite Nominasi dan Remunerasi. Pelaksanaan tugas komite-komite di bawah Dewan Komisaris berpedoman pada Piagam Komite masing-masing komite yang telah disusun. Komite di bawah Dewan Komisaris juga secara berkala melakukan telaah Piagam Komite disesuaikan dengan ketentuan terbaru. Pelaksanaan tugas Komite mengacu pada Program Kerja yang telah disusun melalui mekanisme rapat komite termasuk dengan mengundang Direktorat atau divisi/unit kerja terkait serta penelaahan, evaluasi, dan/atau reviu secara mendalam oleh masing-masing komite di luar forum rapat sebagai dasar pemberian saran atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap hal-hal yang terkait dengan fungsi dan tugas komite yang bersangkutan.

In carrying out its supervisory function, the PLN NP Board of Commissioners is assisted by 3 Committees, namely (1) Audit Committee, (2) Risk Management and Compliance Committee, and (3) Nomination and Remuneration Committee. Duties implementation of the committees under the Board of Commissioners is guided by the prepared Committee Charter of each committee. Committees under the Board of Commissioners also periodically review the Committee Charter in line with the latest provisions. Duties implementation by the Committees refers to the prepared Work Program through the committee meeting mechanism including by inviting related Directorates or divisions/work units as well as in-depth review, evaluation and/or review by each committee outside the meeting forum as a basis for providing suggestions or recommendations to the Board of Commissioners on matters related to the functions and duties of the committee concerned.

Komite Audit
Audit Committee

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas pengendalian internal yang dijalankan oleh audit internal maupun auditor eksternal serta memastikan kebenaran dan keandalan laporan keuangan serta informasi keuangan lainnya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selama tahun 2022 Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 20 (dua puluh) kali melebihi rencana kerjanya diantaranya membahas (1) telaah laporan keuangan Perusahaan, (2) telaah program kerja audit tahunan, (3) evaluasi kinerja operasi dan investasi, (4) pembahasan *Internal Control Over Financial Report* (ICoFR), (5) kecukupan pemeriksaan oleh auditor internal maupun eksternal serta (6) tindak lanjut arahan RUPS dan Dewan Komisaris.

Komite Audit melakukan evaluasi atas Laporan Kegiatan Pengawasan Intern (LKPI) dan Laporan Hasil Audit (LHA) dari Satuan Pengawasan Intern (PI) pada Unit-unit dan Subdit di Kantor Pusat setiap 3 (tiga) bulan sekali atau triwulanan, serta mencermati temuan penting atau temuan berulang beserta monitoring tindak lanjut atas hasil audit tersebut. Seluruh temuan, catatan dan rekomendasi dari hasil pelaksanaan kegiatan, telaahan dan analisa Komite Audit selama tahun 2022 telah dikomunikasikan dan didiskusikan dengan Manajemen, Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan auditor eksternal, serta telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan dan tindak lanjut oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Audit Committee is in charge of assisting the Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of internal controls carried out by the internal audit and external auditors and ensuring the correctness and reliability of financial statements and other financial information according to the applicable accounting standards. During 2022, Audit Committee held 20 (twenty) meetings exceeding its work plan, including discussing the following: (1) review on the Company's financial statements, (2) review on the annual audit work program, (3) evaluation on operational and investment performance, (4) discussion on the Internal Control Over Financial Report (ICoFR), (5) audit adequacy by internal and external auditors and (6) follow-up on directions from the GMS and the Board of Commissioners.

Audit Committee evaluates the Internal Control Activity Report (LKPI) and Audit Results Report (LHA) from the Internal Audit Unit (PI) in the Units and Sub-Directorates at the Head Office every 3 (three) months or quarterly, and examines important findings or repeated findings along with follow-up monitoring of the audit results. The overall findings, notes and recommendations from the results of the implementation of activities, reviews and analysis of the Audit Committee during 2022 have been communicated and discussed with the Management, the Internal Oversight Unit (SPI) and external auditors, and have been reported to the Board of Commissioners for improvement and follow-up by the interested parties.

Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Risk Management and Compliance Committee

Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan bertanggungjawab untuk menilai dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas kebijakan dan strategi PLN NP dalam pengelolaan risiko berdasarkan kerangka *Enterprise Risk Management* (ERM) maupun kepatuhan termasuk analisa risiko dan kepatuhan pada kegiatan investasi.

Selama tahun 2022 Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan telah melaksanakan rapat sebanyak 27 (dua puluh) kali melebihi rencana kerjanya diantaranya membahas telaah (1) *review* implementasi ERM dalam *Risk Profile* 2022 dan *Maturity Level* ERM, (2) evaluasi manajemen portofolio dan Investasi mencakup evaluasi RJPP/RKAP Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi, (3) evaluasi pengembangan usaha, (4) IT *Master Plan*, (5) pembahasan hasil kajian pola operasi PLTA Cirata serta (6) pengembangan pembangkit EBT, dll.

The Risk Management and Compliance Committee is responsible for assessing and providing input to the Board of Commissioners on PLN NP policies and strategies in the risk management based on the Enterprise Risk Management (ERM) framework and compliance including risk analysis and compliance in the investment activities.

During 2022, the Risk Management and Compliance Committee held 27 (twenty) meetings exceeding its work plan, including discussing the following: (1) review on the ERM implementation in the 2022 Risk Profile and ERM Maturity Level, (2) evaluation of portfolio management and Investment including evaluation of RJPP/ABOP of Subsidiaries and Affiliations, (3) evaluation of business development, (4) IT Master Plan, (5) discussion of the review results of the Cirata hydropower operation pattern and (6) development of NRE power plants, etc.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee

Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas membantu Dewan Komisaris untuk mengevaluasi, memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas usulan-usulan Direksi dalam hal program pengembangan organisasi, nominasi pejabat satu tingkat di bawah Direksi, remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi termasuk kesesuaiannya dengan kebijakan PT PLN (Persero) jika diperlukan. Selama tahun 2022, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan 38 (tiga puluh delapan) kali rapat dengan membahas diantaranya (1) pengembangan EBT dan *mapping* SDM konstruksi, (2) *Integrated Management System* (IMS), (3) pemetaan proses bisnis, (4) pengolahan FBA, DAS Cirata, (5) pembahasan *talent mobility* dan (6) pembahasan remunerasi Direksi dll.

Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan serta Komite Nominasi dan Remunerasi menyampaikan laporan komite secara triwulanan dan tahunan kepada Dewan Komisaris sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya mengacu pada Piagam Komite sebagai pedoman kerjanya. Dewan Komisaris secara berkala melakukan penilaian terhadap kinerja setiap komite berdasarkan laporan komite dan indikator kinerja komite yang ditetapkan. Adapun aspek penilaian kinerja komite di tahun 2022 mencakup (a) Ketepatan waktu agenda kegiatan Dewan Komisaris, (b) Kualitas pekerjaan, (c) Kontribusi pada kegiatan Dewan Komisaris tingkat komunikasi, (d) Presentasi pada Rapat Internal Dewan Komisaris (RID), (e) Pelaksanaan rapat (RID, RDD, RKM) dan (f) Penyiapan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris secara periodik (tahunan) melakukan penilaian atas efektivitas kinerja Komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Kriteria penilaian Komite didasarkan pada pencapaian indikator kinerja atau *Key Performance Indicator* yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris untuk masing-masing Komite dengan metode penilaian sendiri (*self assessment*) sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-06/MBU/04/2021 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Dewan Komisaris menilai bahwa selama tahun 2022, Komite-komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup efektif. Dewan Komisaris menyampaikan apresiasinya atas kinerja dan pelaksanaan tugas yang telah ditunjukkan oleh seluruh komite. Dukungan dari komite menjadi dasar bagi Dewan Komisaris untuk dapat memberikan masukan secara formal kepada Direksi untuk terus meningkatkan pengelolaan Perusahaan.

The Nomination and Remuneration Committee is in charge of assisting the Board of Commissioners in evaluating, providing input and recommendations to the Board of Commissioners on the Board of Directors proposals in terms of organizational development programs, nominations for officials one level below the Board of Directors, remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors, including compliance with PT PLN (Persero) policies, if necessary. During 2022, the Nomination and Remuneration Committee held 38 (thirty eight) meetings to discuss, among others (1) EBT development and HR construction mapping, (2) Integrated Management System (IMS), (3) business process mapping, (4) processing of FBA, Cirata DAS (5) discussion of talent mobility and (6) discussion of remuneration for Directors etc.

The Audit Committee, Risk Management and Compliance Committee and the Nomination and Remuneration Committee submit quarterly and annual committee reports to the Board of Commissioners as their accountability in running duties referring to the Committee Charter as their work guidelines. The Board of Commissioners periodically evaluates the performance of each committee based on the committee reports and established committee performance indicators. The aspects of evaluating committee performance in 2022 include (a) Timeliness of the Board of Commissioners' activity agenda, (b) Quality of work, (c) Contribution to the activities of the Board of Commissioners at the communication level, (d) Presentation at the Board of Commissioners' Internal Meeting (RID), (e) Implementation of meetings (RID, RDD, RKM) and (f) Preparation of Board of Commissioners Supervisory Reports.

The Board of Commissioners periodically (annually) evaluates the performance effectiveness of the Committees under the Board of Commissioners. The Committee's assessment criteria are based on the achievement of performance indicators or Key Performance Indicators that have been determined by the Board of Commissioners for each Committee using the self-assessment method following the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-12/MBU/2012 as amended by Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-06/MBU/04/2021 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners/ Supervisory Board of State-Owned Enterprises.

The Board of Commissioners considers that during 2022, the Committees had carried out their duties and responsibilities fairly effectively. The Board of Commissioners would like to express the appreciation for the performance and duties implementation demonstrated by all committees. Support from the committees is the basis for the Board of Commissioners to be able to provide formal input to the Board of Directors to continue to improve the Company management.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Changes in the Board of Commissioners Composition

Selama tahun 2022, terjadi perubahan susunan dan komposisi Dewan Komisaris PLN NP sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan Keputusan RUPS Sirkuler tanggal 21 September 2022, memberhentikan dengan hormat Sdr. Dedeng Hidayat sebagai Komisaris Utama serta mengangkat sekaligus menetapkan Sdr. Evy Haryadi sebagai Komisaris Utama dan memberhentikan Sdr. Komang Parmita sebagai Komisaris serta mengangkat dan menetapkan Sdr. Kenedy sebagai Komisaris.

Atas nama PLN NP, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada Sdr. Dedeng Hidayat dan Sdr. Komang Parmita atas kontribusi dan dedikasinya selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris PLN NP. Kami juga mengucapkan selamat bergabung kepada Sdr. Evy Haryadi sebagai KOmisaris Utama dan Sdr. Kenedy sebagai Komisaris PLN NP. Dengan demikian maka jumlah anggota Dewan Komisaris PLN NP pada 31 Desember 2022 adalah:

1. Komisaris Utama : Evy Haryadi
2. Komisaris : Kenedy
3. Komisaris : Jisman Parada Hutajulu
4. Komisaris : Hendra Iswahyudi
5. Komisaris Independen : Bagus Puruhito
6. Komisaris Independen : Emir Kresna W

Setelah tahun buku 2022, pada saat penyusunan Laporan Tahunan ini dilaksanakan, terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris. Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) tanggal 16 Juni 2023 terjadi pemberhentian dengan hormat Sdr. Jisman Parada Hutajulu dan mengangkat Sdri. lda Nuryatin Finahari sebagai Komisaris. Dengan demikian komposisi Dewan Komisaris saat ini adalah sebagai berikut:

1. Komisaris Utama : Evy Haryadi
2. Komisaris : Kenedy
3. Komisaris : Ida Nuryatin Finahari
4. Komisaris : Hendra Iswahyudi
5. Komisaris Independen : Bagus Puruhito
6. Komisaris Independen : Emir Kresna W

Dengan komposisi ini, Dewan Komisaris berkomitmen akan terus meningkatkan soliditas internal bersama-sama dengan segenap jajaran manajemen PLN NP.

During 2022, there were 2 (two) changes to the structure and composition of the PLN NP Board of Commissioners based on the Circular GMS Decision dated September 21, 2022, honorably dismissing Mr. Dedeng Hidayat as the President Commissioner and appointed Mr. Evy Haryadi as President Commissioner, dismissed Mr. Komang Parmita as Commissioner and appointed Mr. Kenedy as Commissioner.

On behalf of PLN NP, the Board of Commissioners would like to thank Mr. Dedeng Hidayat and Mr. Komang Parmita for their contribution and dedication during serving as a member of the Board of Commissioners of PLN NP. We also welcome Mr. Evy Haryadi as President Commissioner and Mr. Kenedy as Commissioner of PLN NP. Thus, the number of members of the PLN NP Board of Commissioners on December 31, 2022 is as follows:

1. President Commissioner : Evy Haryadi
2. Commissioner : Kenedy
3. Commissioner : Jisman Parada Hutajulu
4. Commissioner : Hendra Iswahyudi
5. Independent Commissioner : Bagus Puruhito
6. Independent Commissioner : Emir Kresna W

After the 2022 fiscal year, at the time of the preparation of this Annual Report, there was a change in the composition of the Board of Commissioners. Based on the Shareholders Resolution outside the General Meeting of Shareholders (Circular) dated June 16, 2023, Mr. Jisman Parada Hutajulu was dismissed and Ms. Ida Nuryatin Finahari was appointed as Commissioner. Therefore, current composition of the Board of Commissioners is as follows:

1. President Commissioner : Evy Haryadi
2. Commissioner : Kenedy
3. Commissioner : Ida Nuryatin Finahari
4. Commissioner : Hendra Iswahyudi
5. Independent Commissioner : Bagus Puruhito
6. Independent Commissioner : Emir Kresna W

With this composition, the Board of Commissioners is committed to continuing to improve internal solidity together with all levels of PLN NP management.

Apresiasi
Letter of Appreciation

Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Pemangku Kepentingan yaitu, Pemegang Saham, Pelanggan, Mitra Bisnis, seluruh Karyawan PLN NP dan Pemangku Kepentingan lainnya atas kepercayaan dan dukungan kepada PLN NP. Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan dedikasi jajaran Direksi sehingga PLN NP dapat meraih pencapaian yang luar biasa di tahun 2022.

Dewan Komisaris mengajak seluruh jajaran PLN NP agar tidak berpuas diri dengan capaian yang berhasil diraih di tahun 2022. Dewan Komisaris berharap agar seluruh jajaran terus berbenah, meningkatkan kompetensi dan mengoptimalkan berbagai peluang yang ada serta mengatasi berbagai tantangan dalam meningkatkan nilai Perusahaan untuk mengoptimalkan peluang positif, guna mewujudkan aspirasi menjadi Perusahaan yang terdepan dan terpercaya sebagai Perusahaan Energi yang tumbuh Berkelanjutan.

Demikianlah laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris tahun 2022 ini disampaikan.

The Board of Commissioners would like to express the deepest gratitude to all Stakeholders namely, Shareholders, Customers, Business Partners, the entire PLN NP Employees and other Stakeholders for their trust and support to PLN NP. The Board of Commissioners expresses its appreciation for the hard work and dedication of the Board of Directors so that PLN NP was able to achieve extraordinary achievements in 2022.

The Board of Commissioners invites the entire levels of PLN NP not to be satisfied with the achievements in 2022. The Board of Commissioners expects that all levels will continue to refine, improve competence and optimize the various existing opportunities and overcome various challenges in increasing the Company values to optimize positive opportunities, in order to realize the aspirations of becoming a leading and trusted Company as a Sustainable Growing Energy Company.

Thus the report on the supervisory duties of the Board of Commissioners for 2022 is submitted.

Surabaya, 30 Juni 2023
Surabaya, June 30, 2023

Atas Nama Dewan Komisaris
On Behalf of the Board of Commissioners

Evy Haryadi
Komisaris Utama
President Commissioner

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

1 **Evy Haryadi**
Komisaris Utama
President Commissioner

2 **Kenedy**
Komisaris
Commissioner

3 **Ida Nuryatin Finahari**
Komisaris
Commissioner

4 **Emir Kresna Wardana**
Komisaris
Commissioner

5 **Hendra Iswahyudi**
Komisaris
Commissioner

6 **Bagus Puruhito**
Komisaris
Commissioner

1
3
2
6

Laporan Direksi
Report from The Board of Directors

Ruly Firmansyah
Direktur Utama
President Director

PLN NP selaku *subholding* pembangkitan PT PLN (Persero) mencatatkan kenaikan laba perusahaan dari tahun sebelumnya. dengan mencetak Laba Perusahaan sebesar Rp 6,58 triliun. Laba ini merupakan prestasi PLN NP karena melampaui target sebesar 62% dari Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) tahun 2022 sebesar Rp4,05 triliun. Capaian ini merupakan buah kerja keras dan kerja cerdas dari seluruh karyawan PLN NP yang berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan secara korporat yang laba bersihnya tumbuh 13% dari tahun buku 2021 dari sebesar Rp 5,82 T. Capaian laba ini tidak terlepas dari kerja keras dan kerja cerdas dari seluruh Insan PLN NP yang berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan. Tak hanya itu, PLN NP juga menjelma menjadi salah satu kontributor laba investasi terbesar di seluruh PLN Group.

As the PT PLN (Persero)'s generation subholding, PLN NP managed to record the increase in the Company's profit from the previous year by generating a company profit of Rp6.58 trillion. This profit is PLN NP's achievement since it exceeded the target of 62% of the 2022 Annual Budget and Operational Plan (ABOP) of Rp4.05 trillion. The hard work and smart work by the entire PLN NP employees results in this achievement which brings impacts on improving corporate financial performance, where the net profit gres by 13% from the 2021 fiscal year of Rp5.82 T. This profit achievement is inseparable from the hard work and smart work by the entire PLN NP personnel which affects the improving financial performance. Not only that, PLN NP has also become one of the biggest contributors to investment profit in the entire PLN Group.

Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, pada 2022 ini PLN NP, mampu mencatatkan kinerja yang baik, meskipun masih di tengah kondisi perekonomian yang menantang. Pencapaian kinerja yang membanggakan ini tidak terlepas dari komitmen Perusahaan untuk menjalankan pengembangan usaha dengan mengedepankan *operation excellence* sehingga mampu mendorong produktivitas dan efisiensi untuk menangkap peluang bisnis di tengah berbagai tantangan yang muncul.

Bersama ini kami sampaikan laporan pertanggungjawaban Direksi atas pengelolaan Perusahaan untuk tahun buku 2022 beserta laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dan memperoleh opini wajar dalam semua hal yang material. Tahun 2022 Direksi dan segenap jajaran manajemen beserta seluruh karyawan PLN NP telah berhasil melewati tahun 2022 yang penuh tantangan dengan berbagai prestasi dan penghargaan serta pencapaian penting lainnya.

Dear Shareholders and Stakeholders,

Praise to the presence of God Almighty. Due to all blessings and gifts, PLN NP was able to record good performance in 2022, despite it was amid the challenging economic conditions. Achievement of this proud performance is inseparable from the Company's commitment to carrying out business development by prioritizing operation excellence so as to be able to boost productivity and efficiency to seize business opportunities amid the various arising challenges.

We hereby present the Board of Directors' accountability report on the Company for the 2022 fiscal year along with the audited financial statements by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners and obtained a fair opinion in all material respects. In 2022, the Board of Directors and all levels of management and all employees of PLN NP had successfully passed 2022 which was full of challenges with various achievements and awards and other important achievements.

Tinjauan Makroekonomi 2022

Macroeconomic Review 2022

Meredanya pandemi Covid-19 sempat memberikan harapan terhadap proses pemulihan ekonomi global. Namun, konflik geopolitik yang terjadi di beberapa kawasan, khususnya pecahnya perang antara Rusia dan Ukraina memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian dunia. Sanksi yang diberikan negara barat terhadap Rusia malah menimbulkan masalah baru, yaitu terbatasnya pasokan minyak, gas, dan gandum karena Rusia tercatat sebagai salah satu produsen terbesar dari komoditas tersebut.

Selain itu, perang Rusia dan Ukraina menyebabkan gangguan yang lebih besar terhadap rantai pasok global. Akibatnya, prospek pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 terganggu dan sangat bergantung kepada konflik yang terjadi. Disrupsi rantai pasok global ini mengerek kenaikan harga komoditas, termasuk minyak, gas, dan batubara. Hal ini juga menyebabkan inflasi tinggi di banyak negara. Di tengah berbagai keterbatasan pada rantai pasok, banyak negara yang justru melakukan pembatasan ekspor, khususnya untuk produk pangan. Pembatasan ekspor ini terjadi karena setiap negara ingin mengutamakan pemenuhan pasokan domestiknya di tengah kondisi rantai pasok yang tidak stabil. Akibatnya, pasokan bahan baku impor untuk industri terancam langka.

Didukung fundamental ekonomi nasional yang kuat, aktivitas ekonomi domestik tetap bergeliat meski kondisi global masih mengalami perkembangan yang pasang surut. Bauran berbagai kebijakan dan strategi konstruktif yang diambil Pemerintah, salah satunya melalui Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), berhasil menjadi kunci keberhasilan dalam mendorong laju ekonomi nasional. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai sebesar 5,31 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan hanya sebesar 3,70 persen.

Berbagai tantangan perekonomian global tersebut pada akhirnya menuntut penguatan kerja sama internasional baik skala regional maupun multilateral. Kerja sama multilateral yang lebih kuat sangat penting untuk menjaga pertumbuhan dari aturan berbasis sistem multilateral dan untuk memitigasi perubahan iklim dengan membatasi emisi dan meningkatkan investasi hijau. Di sisi lain kebijakan penawaran juga dapat mengatasi faktor struktural utama yang menghambat pertumbuhan ekonomi, membantu membangun ketahanan ekonomi, dan meringankan tekanan harga. Dibutuhkan dorongan terpadu untuk investasi di sepanjang rantai pasokan dari teknologi energi hijau yang akan mendukung keamanan energi serta membantu mempercepat kemajuan transisi energi hijau.

The Covid-19 pandemic has getting easing and it gives hope for the global economic recovery process. However, the occuring geopolitical conflicts in several regions, in particular the outbreak of war between Russia and Ukraine, resulted in huge impact on the world economy. Sanctions imposed by western countries against Russia have even created new issues, namely the limited supply of oil, gas and wheat since Russia is listed as one of the largest producers of these commodities.

Moreover, the Russian and Ukrainian wars caused even greater disruption to the global supply chains. As a result, the prospects for economic recovery after the Covid-19 pandemic have been disrupted and are highly dependent on those conflicts. This global supply chain disruption has driven up commodity prices, including oil, gas and coal. This also causes high inflation in many countries. In the middle of various limitations in the supply chain, many countries are actually implementing export restrictions, especially for food products. This export restriction occurs since each country intends to prioritize fulfilling their domestic supply amid the unstable supply chain conditions. As a result, the supply of imported raw materials for industry is threatened with scarcity.

Supported by strong national economic fundamentals, domestic economic activity continues to develop despite the global conditions are still in ups and downs condition. The Government undertakes the combination of various constructive policies and strategies, including through the Covid-19 Handling and National Economic Recovery Program (PC-PEN), that has succeeded in being the key to success in driving the national economy pace. This is reflected in Indonesia's economic growth which reached 5.31 percent, higher than the achievements in 2021 which had growth of only 3.70 percent.

These various challenges to the global economy ultimately demand the strengthening of international cooperation on both regional and multilateral scale. Stronger multilateral cooperation is essential to sustain the growth of a rules-based multilateral system and to mitigate climate change by limiting emissions and increasing green investment. On the other hand, supply policy can also overcome the main structural factors that impede economic growth, help build economic resilience, and relieve price pressures. The investment needs the integrated encouragement along with the supply chain of green energy technologies that will support energy security and help the acceleration progress on the green energy transition.

Analisis Atas Pencapaian Kinerja 2022

Analysis of 2022 Performance Achievements

Pada tanggal 21 September 2022, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi meluncurkan *Holding Subholding* PT PLN (Persero). Langkah ini membawa PLN pada babak baru dalam transformasi yang membawa perubahan besar menjadi perusahaan energi yang berbasis teknologi, inovasi dan berorientasi pada masa depan menuju *The NEW PLN 4.0 UNLEASHING ENERGY and BEYOND.*

On September 21, 2022, the Ministry of State-Owned Enterprises (SOE) officially launched PT PLN (Persero) Holding Subholding. This step brings PLN to a new chapter in its transformation along with major changes to become a technology-based, innovative and future-oriented energy company towards The NEW PLN 4.0 UNLEASHING ENERGY and BEYOND.

PT PJB merupakan salah satu anak perusahaan PT PLN (Persero) yang bertransformasi menjadi *subholding* PLN sebagai *Generation Company* 1, yaitu PT PLN Nusantara Power (PLN NP). Dengan peran tersebut, maka aset-aset pembangkitan PLN yang tadinya tersebar di seluruh wilayah akan dikonsolidasikan, sehingga PLN NP akan mengelola unit pembangkit yang lebih banyak. Ini adalah sebuah tantangan sekaligus peluang besar bagi PLN NP. Peran PLN NP pun menjadi semakin strategis dalam pengelolaan aset negara yang selama ini menjadi lini depan operasional PLN dalam melistriki nusantara. Bersama tiga *subholding* PLN lainnya, PLN NP akan saling terkoneksi terutama dalam memaksimalkan rantai pasok bisnis PLN ke depan.

PT PJB is a subsidiary of PT PLN (Persero) which has transformed into a PLN subholding as Generation Company 1, namely PT PLN Nusantara Power (PLN NP). With this role, PLN's generation assets which are spread across all regions will be consolidated, so that PLN NP will manage more generating units. This is a challenge as well as a big opportunity for PLN NP. The role of PLN NP has also become increasingly strategic in managing state assets as the part of PLN's operations front line in providing electricity to the archipelago. Together with three other PLN subholdings, PLN NP will be interconnected, especially in maximizing PLN's business supply chain going forward.

Strategi dan Kebijakan Perusahaan

Corporate Strategy and Policy

Meningkatnya persaingan dalam penyediaan tenaga listrik yang andal, aman dan efisien serta pandemi Covid-19 yang memberikan dampak yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penjualan tenaga listrik merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh PLN NP. Di sisi lain perkembangan portofolio PLN NP ke depan harus dapat menjamin keberhasilan & sustainabilitas korporasi di masa mendatang melalui strategi korporat untuk mendukung *value creation & sustainability* dari portofolio bisnis PLN NP. Dukungan tersebut dilakukan melalui implementasi *streamline subsidiary.*

The increasing competition in the supply of reliable, safe and efficient electricity as well as the Covid-19 pandemic which brought a sizeable impacts on economic growth and sales growth of electricity are challenges that must be faced by PLN NP. On the other hand, future development by PLN NP portfolio is required to be able to guarantee the corporate success and sustainability in the future through a corporate strategy to support value creation and sustainability of PLN NP business portfolio. This support is carried out through the implementation of streamlined subsidiaries.

Dalam menjawab dan mengoptimalkan tantangan dan isu strategis tersebut, Direksi telah menyusun program-program strategis sebagai arah dan koridor program kerja Perusahaan agar dapat mencapai target perusahaan dengan mengacu pada peta lini bisnis Perusahaan, *green* RUPTL 2021-2030, pemenuhan bauran EBT 23% pada tahun 2025 dan mendukung komitmen pemerintah menuju karbon netral di tahun 2060. Program kerja strategis PLN NP sebagaimana tertuang dalam RKAP 2022 yang telah disahkan oleh Pemegang Saham, antara lain (1) penurunan *market share* & peningkatan kapasitas pembangkit; (2) pengembangan usaha dan peningkatan *revenue*; (3) penyediaan listrik dengan 3 prinsip ketahanan (*security, affordability, low emission*).

In responding to and optimizing these strategic challenges and issues, the Board of Directors has developed strategic programs as the direction and corridors of the Company's work program in the framework to achieve targets of the Company with reference to the Company's business line map, green RUPTL 2021-2030, fulfillment of the 23% NRE mix by 2025 and support the government's commitment to becoming carbon neutral in 2060. PLN NP's strategic work program as stated in the 2022 ABOP already approved by the Shareholders, includes (1) reducing market share and increasing power plant capacity; (2) business development and revenue increase; (3) supply of electricity with 3 principles of resilience (security, affordability, low emission).

Strategi yang dilakukan dalam menghadapi penurunan *market share* dan peningkatan kapasitas pembangkit yaitu meningkatkan penjualan tenaga listrik melalui pengembangan Add On Muara Tawar Blok 2 (150 MW), Muara Tawar Blok 3 (250 MW) & Blok 4 (250 MW) yang direncanakan COD pada tahun 2023 dan alih aset pembangkit AMC Jawa dan PLTA di wilayah Jawa Timur dengan total kapasitas sebesar 5.096,5 MW. Melaksanakan pengembangan pembangkit EBT yang tercantum dalam *green* RUPTL 2021-2030 baik melalui skema kepemilikan sendiri (PJBTL), *majority shares* maupun *minority shares* dengan inisiasi sebesar 1933,5 MW di tahun 2022-2028 dari rencana 8,7 GW sampai dengan tahun 2030.

PLN NP applies strategies in dealing with declining market share and increasing power plant capacity in order to increase the electricity sales through the development of Add On Muara Tawar Block 2 (150 MW), Muara Tawar Block 3 (250 MW) & Block 4 (250 MW) which are planned to be COD in 2023 and transfer of AMC Java and hydropower plant assets in the East Java region with a total capacity of 5,096.5 MW. The Company also carries out the NRE power plants development that are listed in the green RUPTL 2021-2030 either through self-ownership schemes (PJBTL), majority shares or minority shares with an initiation of 1933.5 MW in 2022-2028 from the planned 8.7 GW up to 2030.

Adapun strategi pengembangan usaha dan peningkatan *revenue*, diantaranya peningkatan pangsa pasar dalam bidang Jasa O&M pembangkit di semua regional dan bisnis jasa *Engineering Procurement Construction* (EPC) melalui anak perusahaan (PT Rekadaya Elektrika), serta meningkatkan Jasa *Maintenance Repair Overhaul* (MRO) di pasar nasional maupun internasional. Menyediakan *Spare Part* untuk lingkungan PLN Group maupun pembangkit IPP, dan memiliki jasa layanan *Digital Power Plant* melalui Sistem Optimasi Kehandalan & Efisiensi Unit Pembangkit Terintegrasi (SOKET).

The strategy for business development and increasing revenue includes increasing market share in the O&M services for power plants in all regions and the Engineering Procurement Construction (EPC) service business through its subsidiary (PT Rekadaya Elektrika), as well as increasing Maintenance Repair Overhaul (MRO) services in the national as well as international market. It also includes providing Spare Parts for the PLN Group environment and IPP power plants, and also having Digital Power Plant services through the Integrated Generating Unit Reliability & Efficiency Optimization System (SOKET).

PLN NP mendukung penyediaan tenaga listrik dengan 3 prinsip ketahanan, yaitu *security*, *affordability* dan *low emission* diantaranya melalui program: *coal switching*, anti *black out* dan unit *fast response*, swakelola pemeliharaan, optimasi PS melalui PLTS substitusi PS, *co-firing* dan budidaya tanaman energi untuk mendukung program *co-firing* PLTU batubara.

PLN NP supports the supply of electricity with 3 principles of resilience, namely security, affordability and low emission, including through programs: coal switching, anti black out and fast response units, maintenance self-management, optimization of PS through SPP substitution of PS, co-firing and power plant cultivation energy to support the coal power plant co-firing program.

Proses yang Dilakukan Direksi untuk Memastikan Implementasi Strategi

Processes by the Board of Directors to Ensure the Strategy Implementation

Direksi terlibat aktif dalam merumuskan strategi dan kebijakan PLN NP, yang meliputi target usaha, rencana ekspansi, teknologi, sumber daya manusia, dan berbagai hal lainnya. Direksi melakukan pengkajian, *monitoring* serta mengawasi implementasi strategi Perusahaan. Implementasi strategi dan kebijakan strategis memiliki peran penting dalam mengarahkan Perusahaan mencapai sasaran strategi yang ditetapkan.

The Board of Directors is actively involved in formulating PLN NP strategies and policies, which include business targets, expansion plans, technology, human resources, and various other matters. The Board of Directors reviews, monitors and oversees the implementation of the Company's strategy. Strategy implementation and strategic policies have an important role in directing the Company to achieve the established strategic goals.

Dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis, Direksi berperan penting dalam memastikan penerapannya dijalankan dengan baik dalam seluruh lapisan organisasi. Beberapa tugas dan peranan utama Direksi dalam perumusan strategi di antaranya menganalisis situasi internal dan eksternal perusahaan untuk memahami lingkungan bisnis dan tantangan yang harus dihadapi, serta menentukan tujuan strategis yang menjadi dasar dalam perumusan strategi dan kebijakan Perusahaan.

In formulating strategies and strategic policies, the Board of Directors takes important role in ensuring that they are implemented properly at all organization levels. Some of the main duties and roles of the Board of Directors in formulating strategy include analyzing the Company's internal and external situations to understand the business environment and challenges that must be faced, as well as determining strategic objectives as the basis for formulating strategies and policies of the Company.

Peranan Direksi dalam Perumusan Strategi dan Kebijakan Strategis

The Role of the Board of Directors in Formulating Strategy and Strategic Policy

Dalam memastikan implementasi strategi dan kebijakan strategis Perusahaan terlaksana dengan baik, Direksi melakukan penjabaran yang diperlukan sebagaimana yang tertuang dalam RKAP dan RJPP untuk memastikan implementasi strategi dan kebijakan strategis berada dalam jalur yang tepat. Keseluruhan strategi tersebut, diharapkan dapat mendorong terciptanya kinerja pembangkit yang ekselen guna mewujudkan pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan.

In ensuring the implementation of the Company's strategic strategies and policies is carried out properly, the Board of Directors makes the necessary elaboration as stated in the ABOP and CLP to ensure that the implementation of the strategies and strategic policies is on the right track. The overall strategy is expected to encourage the creation of excellent power plant performance in order to achieve sustainable revenue growth.

Perbandingan Hasil Kinerja dengan Target 2022

Comparison of Performance Results with 2022 Targets

Penerapan strategi dan kebijakan strategis PLN NP yang adaptif telah mampu mempertahankan kinerja operasional dan keuangan PLN NP tetap positif, meskipun di tengah tantangan akibat badai Covid-19. Sepanjang tahun 2022 PLN NP berupaya untuk merealisasikan target yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP 2022). Sampai dengan 31 Desember 2020, secara umum kinerja yang dibukukan PLN NP berhasil mencapai target yang positif, dengan rincian sebagai berikut:

Implementation of adaptive strategy and strategic policies within PLN NP has been able to maintain positive operational and financial performance of PLN NP, despite the challenges caused by the Covid-19. Throughout 2022, PLN NP strived to realize the established targets as stated in the Company's Annual Budget and Operational Plan (ABOP 2022). As of December 31, 2020, general performance recorded by PLN NP achieved a positive target, with the following details:

Tingkat Kinerja Perusahaan

Penilaian tingkat kinerja kesehatan PLN NP yang dilakukan berdasarkan Kriteria Penilaian yang ditetapkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) RKAP Tahun 2022. Sampai dengan Desember 2022, menghasilkan Nilai “AAA” kategori “Sehat” dengan mencapai skor 102,88 dari bobot 100, sementara tahun sebelumnya ada di posisi 96,13%. Capaian tersebut diperoleh dari 6 aspek yaitu (1) Nilai Ekonomi Sosial (47,47); (2) Inovasi Model Bisnis (22,64); (3) Kepemimpinan Teknologi (12,10); (4) Pengembangan Investasi (9,67); (5) Pengembangan Talenta (11,00); (6) Aspek Kepatuhan (0,00). Secara umum, realisasi indikator kinerja Manajemen tersebut masuk dalam kategori BAIK, namun apabila dibandingkan dengan target KPI 2022, ada beberapa hal yang perlu peningkatan antara lain: Pendapatan diluar PLN Grup dan *Milestone* JVC PLTS Cirata.

Company Performance Level

Assessment of PLN NP health performance level was carried out based on the Assessment Criteria stipulated at the 2022 ABOP by General Meeting of Shareholders (GMS). As of December 2022, it achieved "AAA" score in the "Healthy" category by achieving a score of 102.88 out of 100, while the previous year it received 96.13%. This achievement was obtained from 6 aspects, namely (1) Social Economic Value (47.47); (2) Business Model Innovation (22.64); (3) Technology Leadership (12,10); (4) Investment Development (9.67); (5) Talent Development (11.00); (6) Compliance Aspect (0.00). In general, the realization of the Management performance indicators is in the GOOD category, but when compared to the 2022 KPI target, there are several things that need improvement, including: Revenue outside the PLN Group and Milestone JVC of Cirata SPP.

Kinerja Keuangan

Realisasi Laba Bersih sampai dengan akhir tahun 2022 sebesar Rp6,58 Triliun atau 162,24% dari target RKAP 2022 sebesar Rp4,06 triliun. Pencatatan Laba sebesar Rp6,58 triliun ini meningkat 13% dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp 5,82 triliun. Salah satu upaya yang dilakukan PLN NP adalah dengan menggencarkan strategi *Co-Investment* atau kerjasama investasi bersama mitra terbatas. PLN NP menjadi salah satu kontributor terbesar kinerja keuangan PLN secara *holding*. Transformasi yang dijalankan PLN *holding* juga berperan besar dalam mendorong kinerja NP menjadi semakin *agile* dan efisien.

Adapun realisasi Beban Usaha sampai dengan akhir tahun 2022 sebesar Rp22,57 triliun atau 87,31% dari target RKAP 2022 sebesar Rp25,85 triliun. Sementara itu, Biaya Pokok Penyediaan (BPP) PLN NP sampai dengan akhir tahun 2022 mencapai Rp1.077,00/kWh atau 90,13% dari target RKAP tahun 2022 sebesar Rp1.194,88/kWh. Harga Jual PLN NP sampai dengan akhir tahun 2022 mencapai Rp1.323,76/kWh atau 96,39% dari target RKAP tahun 2022 sebesar Rp1.373,34/kW.

Pendapatan Usaha PLN NP tahun 2022 sebesar Rp27,20 triliun atau mencapai 92,54% dari target RKAP tahun 2022 sebesar Rp29,39 triliun, menurun 7,81% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp29,51 triliun. Penurunan tersebut didominasi oleh menurunnya penjualan tenaga listrik. Komposisi Pendapatan Usaha ini diperoleh dari:

- Penjualan Tenaga Listrik: sebesar sebesar Rp21,68 Triliun atau 107,49% dari target RKAP tahun 2022 dikarenakan pencapaian kWh jual yang lebih tinggi dari target RKAP.
- Jasa OM: sebesar Rp4,10 Triliun atau 69,72% dari target RKAP tahun 2022 dikarenakan belum terealisasinya beberapa kontrak AMC sesuai asumsi RKAP.
- Jasa EPC: mencapai Rp1,20 Triliun atau 50,82% dari target RKAP tahun 2022 dikarenakan penundaan beberapa pekerjaan EPC lainnya karena prioritisasi investasi.
- Usaha lain: sebesar Rp222,16 Miliar atau 22,54% dari target RKAP tahun 2022 dikarenakan MRO, OH Internasional, PV *Rooftop* belum tereksekusi.

Pengelolaan Pembangkit Eksisting

Kinerja pembangkit eksisting PLN NP di tahun 2022 adalah tetap membanggakan atau bahkan terbaik dengan pencapaian rata-rata di atas 100% dari yang ditargetkan. Unit Eksisting PLN NP menunjukkan pencapaian yang baik berdasarkan RKAP 2022, antara lain:

Financial Performance

Realization of Net Profit until the end of 2022 amounted to Rp6.58 trillion or 162.24% of the 2022 ABOP target of Rp4.06 trillion. The Company recorded a profit of Rp6.58 trillion, increased by 13% compared to the previous year which amounted to Rp5.82 trillion. PLN NP took efforts to intensify the Co-Investment strategy or investment cooperation with the limited partners. PLN NP is one of the biggest contributors to PLN's financial performance on a holding basis. PLN holding transformation also takes a major role in encouraging NP performance to become more agile and efficient.

The realization of Operating Expenses by the end of 2022 was Rp22.57 trillion or 87.31% of the 2022 ABOP target of Rp25.85 trillion. Meanwhile, PLN NP's Main Cost of Supply (BPP) as of the end of 2022 reached Rp1,077.00/kWh or 90.13% of the 2022 ABOP target of Rp1,194.88/kWh. The selling price of PLN NP by the end of 2022 reached Rp1,323.76/kWh or 96.39% of the 2022 ABOP target of Rp1,373.34/kW.

PLN NP Operating Revenues in 2022 amounted to Rp27.20 trillion or reached 92.54% of the 2022 ABOP target of IDR 29.39 trillion, a decrease of 7.81% compared to 2021 of Rp29.51 trillion. The decline was dominated by the decline in electricity sales. The composition of this operating income is obtained from the following:

- Electricity sales: Rp21.68 trillion or 107.49% of the 2022 ABOP target due to the achievement of selling kWh which is higher than the ABOP target.
- OM services: Rp4.10 trillion or 69.72% of the 2022 ABOP target due to several AMC contracts not being realized according to the ABOP assumptions.
- EPC services: reached Rp1.20 trillion or 50.82% of the 2022 ABOP target due to delays in several other EPC works due to investment prioritization.
- Other businesses: Rp222.16 billion or 22.54% of the 2022 ABOP target because MRO, OH International, PV Rooftop have not been executed.

Existing Power Plant Management

The existing power plants performance of PLN NP in 2022 is still proud or even the best with an average achievement above 100% of the target. PLN NP's Existing Unit shows good achievements based on the 2022 ABOP, including:

- Realisasi EAF yaitu 94,12% atau mencapai 103,38% dari target RKAP tahun 2022 sebesar 91,36%. Pencapaian ini didukung oleh penerapan manajemen aset terutama implementasi *preventive maintenance*, *predictive maintenance*, *patrol check*, *first line maintenance*, dan *housekeeping* yang konsisten, di samping itu eksekusi *overhaul* unit sesuai dengan kaidah 6ON (*On time, on scope, on cost, on quality*, *on safety* dan *on clean*).
- Realisasi EFOR yaitu 0,45% atau mencapai 168,64% dari target RKAP tahun 2022 sebesar 1,45%. Pencapaian ini dipengaruhi oleh penerapan manajemen aset terutama implementasi *preventive maintenance, predictive maintenance, patrol check*, *first line maintenance*, *housekeeping* yang konsisten dan pelaksanaan *overhaul* yang efektif sehingga dapat meminimalisir terjadinya *breakdown* atau gangguan selama *interval overhaul*.
- Realisasi SdOF yaitu 0,51 kali/unit atau mencapai 147,88% dari target RKAP tahun 2022 sebesar 0,99 kali/unit. Nilai SdOF menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 0,99 kali/unit, terutama dipengaruhi oleh penerapan manajemen aset terutama implementasi *preventive maintenance*, *predictive maintenance*, *patrol check*, *first line maintenance*, *housekeeping* yang konsisten dan pelaksanaan *overhaul* yang efektif sehingga dapat meminimalisir terjadinya *breakdown* atau gangguan selama *interval overhaul*.
- Realisasi SOF yaitu 5,31% atau mencapai 130,54% dari target RKAP tahun 2022 sebesar 7,64%.
- Realisasi NPHR yaitu 2.459,38 kcal/kWh atau mencapai 101,26% dari target RKAP tahun 2022 sebesar 2.491 kcal/kWh. Nilai Tara Kalor Neto menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 2.484,66 kCal/kWh. Penurunan *heat rate* tersebut terutama disebabkan oleh pengoperasian PLTU Gas yang lebih rendah dari tahun 2021.
- Realisasi NCF yaitu 27,21% atau mencapai 115,17% dari target RKAP tahun 2022 sebesar 25,42%. *Net Capacity Factor* (NCF) adalah rasio antara total produksi *netto* dengan daya mampu netto unit pembangkit dikali dengan jam periode tertentu. NCF PLN NP Eksisting lebih rendah dari tahun sebelumnya dikarenakan penurunan penjualan kWh pada Unit Gresik, Muara Tawar, Muara Karang, dan Paiton.
- Daya Mampu Neto PLN NP sebesar 6.598 MW atau berkontribusi sebesar 15,67% terhadap Sistem Jawa-Bali.

Dalam pengelolaan kinerja K3L tercapai *zero accident*, sedangkan prestasi untuk kinerja pengelolaan lingkungan PLN NP berhasil meraih 5 PROPER Emas, meningkat dari tahun lalu yang hanya sebanyak 3 unit, 4 PROPER Hijau dan 12 PROPER Biru. Kami terus berupaya meningkatkan pengelolaan Pembangkit dengan standar kelas dunia mengacu pada PAS 55 maupun sertifikasi ISO 55001:2014, agar keamanan dan keandalan pembangkit dapat terus dijaga. Tahun 2022 PLN NP berhasil mengelola kinerja operasi pembangkit dengan capaian terbaik pada indikator keandalan (*Equivalent Availability Factor*/EAF), faktor gangguan (*Equivalent Forced Outage Rate*/EFOR), pemakaian bahan bakar, dan ketepatan pelaksanaan serta durasi pemeliharaan.

- EAF realization, namely 94.12% or reaching 103.38% of the 2022 ABOP target of 91.36%. This achievement was supported by the implementation of consistent asset management, especially the implementation of preventive maintenance, predictive maintenance, patrol checks, FLM, and House Keeping, apart from the execution of overhaul units in line with the 6ON rules (On time, on scope, on cost, on quality, on safety and on clean).
- EFOR realization is 0.45% or reaching 168.64% of the 2022 ABOP target of 1.45%. This achievement was influenced by the implementation of asset management, especially the implementation of preventive maintenance, predictive maintenance, patrol checks, First Line Maintenance, consistent house keeping and effective overhaul implementation so as to minimize the occurrence of breakdowns during overhaul intervals.
- SdOF realization, namely 0.51 times/unit or reaching 147.88% of the 2022 ABOP target of 0.99 times/unit. SdOF value decreased compared to 2021 by 0.99 times/unit, mainly influenced by the implementation of asset management, especially the consistent implementation of preventive maintenance, predictive maintenance, patrol checks, First Line Maintenance, House Keeping and effective overhaul implementation so as to minimize breakdowns or interruptions during overhaul intervals.
- SOF realization, namely 5.31 times/unit or reaching 130.54% of the 2022 ABOP target of 7.64 times/unit.
- NPHR realization is 2,459.38 kcal/kWh or 101.26% of the 2022 ABOP target of 2,491 kcal/kWh. Net Calorific Tara Value decreased compared to 2021 by 2,484.66 kCal/kWh. The decrease in heat rate was mainly due to the operation of the Gas Power Plant which was lower than in 2021.
- NCF realization, namely 27.21% or reaching 115.17% of the 2022 ABOP target of 25.42%. Net Capacity Factor (NCF) is the ratio between the total net production and the net capable power of the generating unit multiplied by the hours for a certain period. NCF of the Existing PLN NP was lower than the previous year due to a decrease in sales of kWh at the Gresik, Muara Tawar, Muara Karang and Paiton Units.
- PLN NP Net Capacity of 6,598 MW or contributes 15.67% to the Java-Bali System

In terms of OHSE performance management, PLN NP achieved zero accidents, while for environmental management performance, PLN NP won 5 Gold PROPER, an increase from last year of 3 units, 4 Green PROPER and 12 Blue PROPER. We are continuously working to improve the power plants management with the world-class standards referring to PAS 55 and ISO 55001:2014 certification, so that the safety and reliability of power plants can be maintained. In 2022, PLN NP managed to manage the power plants operating performance with the best results on reliability indicators (Equivalent Availability Factor/EAF), disturbance factors (Equivalent Forced Outage Rate/EFOR), fuel usage, and accuracy of implementation and duration of maintenance.

Pengelolaan Pembangkit Jasa O&M PLTU FTP-1 AMC Jawa

Sampai dengan akhir tahun 2022, beberapa kinerja operasional pembangkit UBJOM PLTU FTP-1 AMC Jawa menunjukkan pencapaian yang baik berdasarkan RKAP 2022, antara lain:

- Realisasi EFOR yaitu 3,24% atau 107,23% dari target RKAP tahun 2022 sebesar 3,49%.
- Realisasi SdOF yaitu 2,10 kali/unit atau 140,00% dari target RKAP tahun 2022 sebesar 3,50 kali/unit.
- Realisasi NCF yaitu 71,62% atau mencapai 124,50% dari target RKAP tahun 2022 sebesar 57,52%.
- Realisasi PSST yaitu 6,49% atau mencapai 102,71% dari target RKAP tahun 2022 sebesar 6,67%.

Produksi Listrik

Produksi tenaga listrik unit eksisting PLN NP pada tahun 2022 adalah sebesar 17.064,31 GWh atau mencapai 111,70% dari target setahun RKAP 2022 sebesar 15.276,42 GWh, namun turun 17,33% dibandingkan produksi tahun 2021 sebesar 20.640,92 GWh. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan produksi tenaga listrik pada Unit Gresik, Muara Tawar, Muara Karang dan Paiton. Direksi berkomitmen untuk meng-EBT-kan seluruh PLTU batubara yang dimiliki dan dikelola PLN NP guna meningkatkan realisasi *co-firing* PLTU batubara sehingga bauran energi menjadi lebih ramah lingkungan. Hal tersebut dibuktikan, di tahun 2022 PLN NP berhasil melakukan komersialisasi *co-firing* di 16 (enam belas) PLTU, meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 9 (sembilan) PLTU.

Penjualan Listrik

Realisasi Penjualan Energi Listrik sampai dengan akhir tahun 2022 sebesar 16.379,48 GWh atau 111,51% dari target setahun RKAP 2022 sebesar 14.688,30 GWh, namun menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 19.848,44 GWh. Bila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2021, maka mengalami penurunan sebesar 17,48%. Hal ini disebabkan karena adanya pemetaan penyerapan batubara oleh PLN yang berdampak pada *capacity factor* PLTU Paiton. Selain itu pembangkit PLTGU dan PLTU gas periode tahun lalu mendapatkan alokasi energi yang sangat tinggi karena Sistem Jawa Bali mengalami krisis batubara, bahkan beberapa unit dioperasikan menggunakan bahan bakar minyak dan untuk pembangkit batubara PLTU Paiton pada tahun ini hanya dialokasikan CF sekitar 68% terdampak dari pemerataan penyerapan batubara oleh PLN.

Management of O&M Services Power Plants, Java AMC FTP-1 CFPP

As of the end of 2022, several operational performances of Jawa AMC FTP-1 CFPP OMSBU power plant demonstrates good achievements based on the 2022 ABOP, including:

- EFOR realization is 3.24% or 107.23% of the 2022 ABOP target of 3.49%.
- SdOF realization is 2.10 times/unit or 140.00% of the 2022 ABOP target of 3.50 times/unit.
- NFC realization, namely 71.62% or reaching 124.50% of the 2022 ABOP target of 57.52%.
- PSST realization, namely 6.49% or reaching 102.71% of the 2022 ABOP target of 6.67%.

Electricity Production

Electricity production by the existing PLN NP unit in 2022 is 17,064.31 GWh or reaching 111.70% of the 2022 ABOP target of 15,276.42 GWh, but a decrease of 17.33% compared to 2021 production of 20,640.92 GWh. This decrease was mainly influenced by the decrease in electricity production at the Gresik, Muara Tawar, Muara Karang and Paiton Units. The Board of Directors is committed to NRE for all coal power plants owned and managed by PLN NP in order to increase the realization of co-firing of coal power plants so that the energy mix becomes more environmentally friendly. It is proven by PLN NP success commercializing co-firing in 2022 at 16 (sixteen) CFPPs, increase from the previous year of 9 (nine) CFPPs.

Electricity Sales

By the end of 2022, realization of Electrical Energy Sales amounted to 16,379.48 GWh or 111.51% of the 2022 ABOP target of 14,688.30 GWh, but decreased compared to 2021 of 19,848.44 GWh. When compared to the realization in the same period in 2021, it decreased by 17.48% due to the mapping of coal absorption by PLN which impacted the capacity factor of CFPP Paiton. Also, CCPP and gas CFPP power plants received a very high energy allocation in the previous year since the Java-Bali System was experiencing a coal crisis, and several units were even operated using oil fuel and for the Paiton CFPP coal power plant. This year only around 68% CF was allocated due to even distribution of coal absorption by PLN.

Kendala yang Dihadapi dan Langkah Penyelesaiannya

Obstacles Faced and the Settlement Steps

Tantangan yang dihadapi PLN NP tahun 2022, diantaranya adalah meningkatnya harga energi primer yang belum diimbangi dengan tarif dasar listrik, hadirnya pemain baru di bidang energi listrik, disrupsi teknologi, dan tren di industri kelistrikan global 3DIE (*Decarbonization, Decentralization, Digitalization and Electrification*). Digitalisasi menjadi kebutuhan untuk mendorong pengelolaan bisnis pembangkit listrik dapat dijalankan lebih efisien. Disamping itu, kondisi pembangkit eksisting yang sudah tua menuntut inovasi agar dapat efisien, menurunnya pangsa pasar segmen usaha penjualan tenaga listrik, regulasi lingkungan dan dampak pandemi Covid-19 yang masih terjadi menjadi kendala lain yang dihadapi PLN NP. Oleh karena, PLN NP dituntut untuk beradaptasi menciptakan keunggulan kompetitif dan berinovasi dalam menjalankan perannya sebagai *sub holding* pembangkitan PLN.

Berbagai langkah dijalankan PLN NP dalam mengatasi kendala-kendala di atas antara lain pertama, mempertahankan dan meningkatkan bisnis inti dengan berfokus pada optimalisasi kinerja pembangkit, peningkatan fungsi *fast response*, pemanfaatan lahan tak terpakai dan menyelesaikan proyek yang sedang dikembangkan yang akan mempengaruhi keamanan pasokan listrik, BPP listrik, serta keselamatan kerja dan keandalan pembangkit. Kedua, PLN NP melakukan investasi dan pengembangan usaha, bisnis jasa O&M, produk *beyond* kWh antara lain MRO, *biomass*, *co-firing*, *rooftop* solar PV dan EAM yang akan menjadi potensi bisnis baru. Ketiga, PLN NP melakukan inisiasi pengembangan bisnis, berkolaborasi dengan mitra bisnis yang kompeten, seperti *water treatment*, digital *light house*, efisiensi dan manajemen industri, *virtual power plant* dan sebagainya. Strategi tersebut akan menjadi siklus yang terus mengalir guna mewujudkan pertumbuhan kinerja PLN NP secara berkelanjutan.

Dalam rangka menjaga keamanan pasokan energi primer berperan penting dalam menjaga kelangsungan operasional pembangkit, untuk itulah PLN NP berupaya memastikan transportasi dan logistik batubara dan gas sebagai energi primer pembangkit dapat terus terjaga pasokannya. PLN NP bersama dengan pemangku kepentingan terkait melakukan komunikasi dan koordinasi untuk memperbaiki sistem logistik dan infrastruktur untuk memastikan kebutuhan batubara terpenuhi dan mencari solusi permanen agar krisis pasokan batubara tidak terjadi lagi. Dalam jangka panjang, PLN NP berkomitmen untuk menggantikan batubara dengan energi baru terbarukan, sehingga PLN NP sejalan dengan *road map* pengembangan pembangkit hijau dan *renewable energy*.

PLN NP faced challenges in 2022, including the increasing primary energy prices which have not been matched by the basic electricity tariff, the emergence of new players in the field of electrical energy, technological disruption, and trends in the global electricity industry 3DIE (Decarbonization, Decentralization, Digitization and Electrification). Digitization is a necessity to encourage the management of the power plant business to run more efficiently. Furthermore, the condition of old existing power plants demands innovation to be efficient, the declining market share of the electricity sales business segment, environmental regulations and the ongoing impact of the Covid-19 pandemic are other obstacles faced by PLN NP. Therefore, PLN NP is required to adapt to create competitive advantage and innovate in running the role as PLN's generation sub-holding.

PLN NP took various steps in overcoming the above obstacles, including first, maintaining and improving its core business by focusing on optimizing the power plant performance, increasing fast response functions, utilizing the unused land and completing projects under development that will affect the security of electricity supply, BPP electricity, as well as work safety and generator reliability. Second, PLN NP invests and develops business, O&M service business, products beyond kWh including MRO, biomass, co-firing, rooftop solar PV and EAM which will become new business potentials. Third, PLN NP initiates business development, collaborates with competent business partners, such as water treatment, digital light houses, industrial efficiency and management, virtual power plants and so on. These strategies will become a continuous cycle in order to achieve sustainable performance growth of PLN NP.

In the context to maintain the security of primary energy supply, the power plants operational continuity maintenance takes the important roles, so that PLN NP seeks to ensure the preservation of supply of coal and gas as the primary energy for the power plants. PLN NP together with the relevant stakeholders communicates and coordinates to improve the logistics system and infrastructure to ensure the fulfillment of coal needs and seek permanent solutions so that the coal supply crisis does not recur. In the long term, PLN NP is committed to replacing coal with the renewable energy, so that PLN NP is in line with the road map for the development of green power plants and renewable energy.

Dalam hal keterbatasan pendanaan, PLN NP mengembangkan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai mitra strategis yang kompeten, baik dari dalam maupun luar negeri. PLN NP juga berupaya memanfaatkan piutang PLN menjadi pembangkit sendiri yakni melalui akuisisi atau pengalihan aset pembangkit PLN ke PLN NP. Tantangan lain yang dihadapi tidak lain adalah peningkatan kompetensi SDM secara berkesinambungan untuk menjadi yang terdepan dan terpercaya sebagai perusahaan dalam bidang energi, serta melakukan kerjasama strategis dengan berbagai perguruan tinggi dalam penyediaan tenaga kerja terampil dengan keahlian teknis pembangkit.

In terms of limited funding, PLN NP develops synergy and collaboration with various competent strategic partners, both from domestic and abroad. PLN NP is also trying to utilize PLN receivables to become its own power plant, namely through the acquisition or transfer of PLN generating assets into PLN NP. Another challenge faced is none other than continuous improvement of HR competence to become a leading and trusted company in the energy sector, as well as conducting strategic partnerships with various tertiary institutions in providing skilled manpower with technical expertise in the power plants.

Pengelolaan SDM Secara Berkelanjutan

Sustainable HR Management

PLN NP memandang sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu ujung tombak dan penentu keberhasilan perusahaan dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misinya. Kehadiran SDM terbaik yang profesional, berkompeten, berdedikasi dan berintegritas akan membuat PLN NP memiliki dasar yang kuat untuk terus tumbuh dan berkembang mencapai tujuan Perusahaan. Peran strategis SDM dalam mendukung tercapainya kinerja PLN NP secara keseluruhan perlu difokuskan pada peningkatan kemampuan *leadership*, peningkatan kapabilitas organisasi, membangun strategi kompetensi dan produktivitas untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi menjadi hal yang terus disempurnakan.

PLN NP considers human resources (HR) as one of the spearheads and determinants of the Company's success in realizing vision and carrying out mission. The best human resources who are professional, competent, dedicated and with integrity will make PLN NP have a strong foundation to continue to grow and develop to achieve the Company's goals. HR strategic roles in supporting performance achievement of PLN NP as a whole needs to be focused on improving leadership capabilities, increasing organizational capabilities, building competency and productivity strategies to overcome gaps that occur to be continuously being refined.

PJB Academy telah menyusun berbagai program pelatihan dan pengembangan karyawan yang tujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas karyawan sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Jenis program pembelajaran meliputi Pelatihan Teknik dan Non Teknik, Sertifikasi Teknik dan Non Teknik, *Workshop* Teknik dan Teknik, Program Purna Bhakti, *Soft Leadership*, *Stakeholder* (PJB Class) dan PGD. Selama tahun 2022, realisasi program pembelajaran SDM PLN NP telah melaksanakan pembelajaran sebanyak 675 batch mencapai 118,42% dari target RKAP dengan 10.089 peserta, mencapai 98,24% dari target RKAP. Adapun realisasi anggaran pendidikan dan pelatihan karyawan adalah sebesar Rp61,29 miliar atau 105,33% dari total RKAP yang telah ditetapkan.

PJB Academy has developed various employees training and development programs with the aim of improving the quality and capabilities of employees so that ultimately it can increase the Company's productivity. Types of learning programs include Technical and Non-Technical Training, Technical and Non-Technical Certification, Technical and Technical Workshops, Full Service Programs, Soft Leadership, Stakeholders (PJB Class) and PGD. During 2022, PLN NP realized HR learning program through 675 batches of training reaching 118.42% of the ABOP target with 10,089 participants, achieving 98.24% of the ABOP target. Meanwhile, the realization of the employees education and training budget amounted to Rp61.29 billion or 105.33% of the total established ABOP.

Pengembangan *skill* dan kompetensi karyawan masih terus ditingkatkan sejalan dengan pertumbuhan bisnis PLN NP, terkait dengan *intellectual challenge*, *leadership*, dan *entrepreneurial challenge*. Direksi optimis bahwa peningkatan pengetahuan dan keterampilan karyawan PLN NP akan dapat mendorong peningkatan produktivitas dan juga daya saing SDM di era kompetisi regional seperti saat ini.

The Company is still improving the skills and competencies development for the employees in line with PLN NP business growth, related to intellectual challenges, leadership, and entrepreneurial challenges. The Board of Directors is optimistic that increasing the knowledge and skills of PLN NP employees will be able to boost productivity and also HR competitiveness in the current era of regional competition.

Guna memastikan bahwa seluruh karyawan berkontribusi secara maksimal terhadap kemajuan Perusahaan, PLN NP telah mengukur keterikatan karyawan terhadap Perusahaan secara berkala melalui *Employee Engagement Survey* tahun 2022 dengan skor 84,48% meningkat dari skor tahun lalu sebesar 83,69. Sedangkan indeks kepuasan kerja karyawan yang tercermin dalam *Job Satisfaction Survey* mencapai skor sebesar 81,10% dengan kategori Sangat Puas, meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 79,7% dengan kategori Sangat Puas.

In the context to ensure that all employees contribute optimally to the Company progress, PLN NP regularly measured employee engagement with the Company through the 2022 Employee Engagement Survey with a score of 84.48%, an increase from last year's score of 83.69. Meanwhile, the employee job satisfaction index as reflected in the Job Satisfaction Survey achieved a score of 81.10% in the Very Satisfied category, an increase compared to 2021 of 79.7% in the Very Satisfied category.

Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko

Internal Control System and Risk Management

Kami menyadari sepenuhnya bahwa kinerja PLN NP terkait erat dengan pengelolaan risiko dan pengelolaan risiko tidak lepas dari penerapan sistem pengendalian internal yang menjadi bagian dari tata kelola perusahaan. Kami senantiasa mengevaluasi pengendalian internal di lingkungan PLN NP agar mampu mengikuti perkembangan usaha Perusahaan.

We are fully aware that PLN NP performance is closely related to the risk management which is inseparable from the implementation of internal control system as the part of corporate governance. We constantly evaluate internal controls within PLN NP so as to able to keep abreast of the Company's business developments.

Sistem pengendalian internal PLN NP mengacu pada prinsip-prinsip COSO (*Committee of Sponsoring Organizations*)-*Internal Control-Integrated Framework*. Direksi PLN NP menerapkan sistem pengendalian internal melalui penerapan kebijakan dan prosedur perusahaan secara konsisten, baik terkait dengan kegiatan usaha perusahaan, manajemen risiko, perencanaan strategis yang akurat, pembagian tugas dan pendelegasian wewenang yang jelas, serta kebijakan akuntansi yang memadai. Sedangkan Dewan Komisaris mengawasi kecukupan dan kewajaran dalam penyusunan laporan keuangan, pengelolaan risiko dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian yang dibantu oleh Komite Audit. Agar sistem pengendalian internal berjalan efektif, PLN NP telah memiliki fungsi Internal Audit sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengendalian internal secara keseluruhan.

PLN NP's internal control system refers to the principles of COSO (Committee of Sponsoring Organizations)-Internal Control-Integrated Framework. PLN NP's Board of Directors implements the internal control system through the consistent application of the Company's policies and procedures, both related to the Company's business activities, risk management, accurate strategic planning, clear division of tasks and delegation of authority, as well as adequate accounting policies. While the Board of Commissioners oversees the adequacy and fairness in the preparation of financial statements, risk management with due observance of the principle of prudence assisted by the Audit Committee. PLN NP already has an Internal Audit function as an integral part of the overall internal control In order to make the internal control system run effectively.

Sejalan dengan itu, PLN NP berkomitmen mengimplementasikan manajemen risiko secara efektif dalam pelaksanaan setiap program kerja atau proyek di tingkat korporat maupun unit bisnis. Dengan wilayah operasi yang luas dan volume usaha yang terus meningkat, maka PLN NP menerapkan pola pengelolaan risiko secara terpadu untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan eksposur risiko di seluruh lini organisasi. Implementasi manajemen risiko sebagai salah satu pilar GCG dilakukan untuk memastikan dan memberi jaminan yang wajar bahwa dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, PLN NP telah melakukan identifikasi risiko, mengelola dan melakukan upaya mitigasi risiko sesuai dengan ISO 31000:2018 (*Risk Management Guidelines*).

In line with that, PLN NP is committed to implementing effective risk management in the implementation of every work program or project at the corporate or business unit level. With a wide operating area and continuously increasing business volume, PLN NP applies an integrated risk management pattern to identify, measure, monitor and control risk exposure across the entire lines of the organization. Risk management as one of the GCG pillars is carried out to ensure and provide reasonable guarantees that in achieving the set targets, PLN NP has identified risks, managed and carried out risk mitigation efforts in accordance with ISO 31000:2018 (Risk Management Guidelines).

Hasil *assessment maturity level* Implementasi ERM dilakukan baik di tingkat Unit Pembangkit maupun di tingkat korporat mendapatkan hasil yang semakin baik. Untuk tahun 2022, hasil penilaian *assessment maturity level* risiko di seluruh unit di lingkungan PLN NP mencapai tingkat kematangan yang lebih baik, dimana *Self Assessment Maturity Level* ERM PLN NP berdasarkan kriteria PLN di Semester 2 tahun 2022 mendapatkan hasil dengan nilai validasi 4,15. Selain itu, aplikasi manajemen risiko berbasis *web* pada ERM *Dashboard* menjadi alat setiap karyawan me*monitor* risiko yang dikelolanya sesuai dengan tingkat otorisasi masing-masing, sehingga integrasi proses bisnis pengelolaan risiko dapat dipantau secara *real time*.

Di era disrupsi bisnis ketenagalistrikan ini, arah perubahan bisnis juga menjadi tantangan besar bagi PLN NP. Namun, menghadapi perubahan tersebut PLN NP telah menerapkan kebijakan manajemen risiko terintegrasi sejak tahun 2020. Guna mendukung penerapan manajemen risiko dalam inisiatif pengembangan bisnis, PLN NP menetapkan Peraturan Direksi tentang Penerapan GRC dan *Risk Appetite Statement* (RAS). Kebijakan GRC memuat ketentuan-ketentuan dalam proses pengambilan keputusan. PLN NP memiliki kerangka *Three Lines Model* yaitu sistem pengendalian yang dirancang melalui pembagian peran dan tanggung jawab menjadi 3 (tiga) lini dalam organisasi dengan melibatkan pemilik proses yang menerapkan kebijakan manajemen risiko (lini pertama), unit risk & compliance yang meninjau dan memantau proses penerapan risiko (*second line*), dan fungsi audit evaluasi efektivitas sistem pengendalian yang dilakukan oleh *first line* dan *second line* (*third line*).

Atas komitmen dalam menerapkan manajemen risiko terintegrasi, PLN NP meraih penghargaan hingga ke kancah global melalui ajang *Asean Risk Award* (ARA) 2022 kategori *Governance, Risk Management, and Compliance* (GRC). PLN NP dinilai unggul dalam menciptakan inovasi di bidang manajemen risiko melalui pendekatan baru dalam penerapan GRC, yakni strong leadership, penguatan implementasi GRC, serta peluncuran aplikasi manajemen risiko dan kepatuhan bernama I-CARE. Capaian ini membuktikan ketahanan dan kemampuan PLN NP dalam menjalankan lini bisnis yang berpatokan kepada manajemen risiko terintegrasi.

PLN NP obtained the better results for the maturity level assessment of ERM implementation that were carried out both at the Generating Unit level and at the corporate level. For 2022, the results of the risk maturity level assessment for all units within PLN NP achieve a better maturity level, where PLN NP ERM Maturity Level Self Assessment based on PLN criteria in Semester 2 of 2022 obtained results with a validation score of 4.15. Furthermore, the web-based risk management application on the ERM Dashboard is a tool for each employee to monitor the risks they manage according to their respective authorization levels, so that the integration of risk management business processes can be monitored in real time.

In this era of disruption in the electricity business, the direction of business change is also a big challenge for PLN NP. However, PLN NP has implemented an integrated risk management policy to face these changes since 2020. To support the implementation of risk management in the business development initiatives, PLN NP stipulates a Board of Directors Regulation concerning the Application of GRC and Risk Appetite Statement (RAS). The GRC Policy contains provisions in the decision-making process. PLN NP has a Three Lines Model framework, namely a control system designed through the division of roles and responsibilities into 3 (three) lines within the organization by involving process owners who implement risk management policies (first line), risk and compliance units that review and monitor the implementation process risk (second line), and the audit function evaluates the effectiveness of control systems carried out by the first line and second line (third line).

For its commitment to implementing integrated risk management, PLN NP won awards on the global stage through the 2022 Asean Risk Award (ARA) for the Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) category. PLN NP is considered to have excelled in creating innovation in the field of risk management through a new approach to implementing GRC, namely strong leadership, strengthening GRC implementation, and launching a risk management and compliance application called I-CARE. This achievement proves the PLN NP resilience and ability in carrying out business lines based on the integrated risk management.

Komitmen Menjaga Kualitas Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Commitment to Maintaining the Quality of Corporate Governance Implementation

PLN NP meyakini bahwa pencapaian kinerja yang baik dapat terus dipertahankan secara *sustainable* dalam jangka panjang dan berbagai prospek bisnis yang hendak diraih dapat terwujud, jika perusahaan dapat melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dengan baik dan benar. Karena itu, bagi PLN NP implementasi GCG bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, namun sudah merupakan suatu keniscayaan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Perusahaan kepada segenap pemangku kepentingan. Pengembangan GCG yang selaras dengan *best practices* secara berkesinambungan serta implementasi GCG secara konsisten tidak hanya dapat memberikan perlindungan yang memadai dan perlakuan yang adil kepada para seluruh pemegang saham, pengelola, dan pemangku kepentingan lainnya, namun lebih dari itu mendorong PLN NP untuk menciptakan nilai bagi perusahaan (*shareholder value*) secara maksimal.

PLN NP believes that achieving good performance can be maintained in a sustainable manner in the long term and various business prospects to be achieved can be realized in the event the Company is able to consistently implement GCG principles properly and correctly. Therefore, for PLN NP, GCG implementation is not just a refusal of obligations, but it is a necessity to maintain transparency and accountability in the Company management to all stakeholders. Consistent GCG development with the best practices on an ongoing basis and consistent GCG implementation is not only able to provide adequate protection and fair treatment to all shareholders, managers and other stakeholders, but more than that encourage PLN NP to create value for the Company (the shareholders value) to the maximum.

Dewan Komisaris, Direksi dan segenap karyawan PLN NP berkomitmen untuk mengimplementasikan standar yang tinggi dalam penerapan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip tersebut menjadi referensi bagi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, menghindari konflik kepentingan, optimalisasi kinerja, dan peningkatan akuntabilitas. Dalam praktiknya, GCG diimplementasikan melalui struktur tata kelola yang dilengkapi dengan organ-organ pendukung lainnya.

The Board of Commissioners, Directors and the entire PLN NP employees are committed to implementing high standards in implementing GCG principles. These principles serve as reference for responsible decision making, avoiding conflicts of interest, optimizing performance, and increasing accountability. In practice, GCG is implemented through a governance structure supplemented by other supporting organs.

PLN NP senantiasa mengedepankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kinerja usaha dan praktik-praktik tata kelola yang baik. PLN NP terus berpegang pada standar tata kelola yang tinggi dan meyakini bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik adalah faktor penting dalam upaya membangun dan memelihara kepercayaan dan kredibilitas PLN NP. Menjalankan prinsip GCG secara konsisten diyakini akan menjamin terciptanya keseimbangan bisnis secara paripurna/menyeluruh oleh karenanya kami telah merumuskan dan menerapkan segala perilaku bisnis kami dijiwai oleh nilai-nilai perusahaan, standar etika dan patuh pada ketentuan yang berlaku.

PLN NP always prioritizes the importance of maintaining a balance between business performance and good governance practices. PLN NP keeps adhering to high governance standards and believes that the implementation of good corporate governance is an important factor in efforts to build and maintain PLN NP trust and credibility. Implementing GCG principles consistently is believed to guarantee the creation of a complete/overall business balance, therefore we formulated and have implemented all of our business behavior imbued with corporate values, ethical standards and compliance with the applicable regulations.

Penerapan GCG PLN NP diaktualisasikan melalui serangkaian kegiatan yang dapat mendukung tata kelola perusahaan yang berkelanjutan, yaitu diwujudkan dalam berbagai kegiatan diantaranya dengan melakukan sosialisasi dan refreshment pemahaman terkait *soft structure* GCG kepada seluruh karyawan, penyelesaian program tindak lanjut AOI *Assessment* GCG 2020, termasuk perbaikan Aspek Pemegang Saham, reviu COC dan GCG *Code*, pelaksanaan induksi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru dan melakukan *update* dokumen Daftar Khusus, Pakta Integritas dan Hubungan Kepengurusan Direksi dan Dewan Komisaris serta melakukan penilaian penerapan GCG

PLN NP actualized the GCG implementation through a series of activities that can support sustainable corporate governance, which is manifested in various activities, including conducting socialization and refreshment of understanding related to the GCG soft structure to all employees, completing the follow-up program for the 2020 AOI Assessment GCG, including improving Shareholder Aspects Shares, review COC and GCG Code, carry out induction of new members of the Board of Directors and Board of Commissioners and update documents on the Special List, Integrity Pact and Management Relations of the Board of Directors and Board of Commissioners as well as periodically assessing the implementation of GCG using

secara berkala dengan menggunakan standar alat uji berdasarkan Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor : SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN. Hasil *assessment* GCG untuk tahun buku 2022 memperoleh skor sebesar 95,54 dengan Kualifikasi Kualitas Penerapan "Sangat Baik" Skor Tertinggi di PLN Grup. Secara bertahap dan berkelanjutan, PLN NP berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil *assessment* yang menjadi *area of improvement* GCG demi kualitas implementasi GCG yang lebih baik di masa mendatang.

Terkait dengan implementasi kebijakan WBS, PLN NP telah mengatur dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor: 004.K/021/DIR/2020 dan Nomor: 007.K/DK-PJB/2020, sebagai salah satu sarana bagi karyawan, pelanggan, mitra dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan apabila terdapat indikasi pelanggaran terkait dengan kode etik, kebijakan Perusahaan maupun potensi tindakan *fraud*. Komite WBS bertugas menerima laporan yang masuk dan melakukan *review* serta menganalisa kecukupan bukti pendukung atas laporan yang disampaikan untuk memastikan ada/tidaknya indikasi kerugian Perusahaan. Di tahun 2022, Komite WBS telah menerima 3 (tiga) pengaduan yang masuk, satu diantaranya telah selesai ditindaklanjuti dan dua masih dalam proses tindak lanjut. Adapun kategori pelanggaran yang disampaikan terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa dan perbuatan melanggar hukum.

standard test equipment based on the Decree by the Secretary of the Minister of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in SOEs. GCG assessment results for the 2022 fiscal year obtained a score of 95.54 with the "Very Good" Implementation Quality Qualification, the highest score in the PLN Group. Gradually and continuously, PLN NP is committed to following up on any recommendations from the assessment results which become GCG areas of improvement for better quality GCG implementation in the future.

Regarding the implementation of the WBS policy, PLN NP has regulated in the Joint Decrees of the Board of Commissioners and the Board of Directors No. 004.K/021/DIR/2020 and No. 007.K/DK-PJB/2020, as the facility for the employees, customers , partners and other stakeholders to convey the indications of violations related to the code of conducts, Company policies or potential acts of fraud. The WBS Committee is in charge of receiving incoming reports and reviewing and analyzing the adequacy of supporting evidence for the submitted reports to ensure whether there is/is not an indication of the Company's losses. In 2022, the WBS Committee received 3 (three) incoming complaints, one of which has been completed and two are still in the follow-up process. The categories of violations submitted are related to the process of procuring goods and services and unlawful acts.

Prospek Usaha Perusahaan
Company Business Prospects

Komposisi produksi listrik per jenis energi primer di Jawa, Madura, dan Bali diproyeksikan pada tahun 2030 akan menjadi 66,7% batubara, 17,1% gas (termasuk LNG), 4,6% tenaga air, 6,6% panas bumi, 0,2% BBM, dan 4,8% EBT lainnya. Porsi pembangkit EBT di Jawa, Madura, dan Bali akan meningkat dari 8,5% tahun 2021 menjadi 16,1% di tahun 2030. Dengan target pemerintah pembangunan energi terbarukan untuk mencapai bauran energi nasional menuju 23% pada tahun 2025. PLN NP menargetkan untuk menjadi operator solar PV yang terbesar di Indonesia, menjadi *leader* dalam *biomass co-firing* hingga 5% *fuel mix*, menjadi operator *wind* terbesar di Indonesia dan pemain terkemuka di bidang *battery storage solution*.

Pada tahun 2022 akhir PLN telah melakukan penandatanganan *Legal End State*, kedepan PLN NP akan menjadi *Generation Company* terbesar di Asia Tenggara serta siap mengelola pembangkit-pembangkit dengan total kapasitas 23,5 GW. Dengan perubahan ini, PLN NP akan mendapatkan dampak positif bagi upaya Indonesia untuk mengambil bagian pada rantai pasok global di tengah momentum transisi energi saat ini.

The composition of electricity production per type of primary energy in Java, Madura and Bali is projected in 2030 to be 66.7% coal, 17.1% gas (including LNG), 4.6% hydropower, 6.6% geothermal, 0.2% fuel, and 4.8% other NRE. The portion of NRE power plants in Java, Madura and Bali will increase from 8.5% in 2021 to 16.1% in 2030. With the government's target of developing renewable energy to reach the national energy mix towards 23% in 2025. PLN NP targets to to be the largest solar PV operator in Indonesia, to be the leader in biomass co-firing of up to 5% fuel mix, to be the largest wind operator in Indonesia and a leading player in the field of battery storage solutions.

At the end of 2022, PLN signed a Legal End State, in the future PLN NP will become the largest Generation Company in Southeast Asia and is ready to manage power plants with a total capacity of 23.5 GW. With this change, PLN NP will present positive impact on Indonesia's efforts to take part in global supply chains amid the current energy transition momentum.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

PLN NP memandang penting bahwa keberlanjutan usaha, lingkungan, dan masyarakat menjadi satu kesatuan untuk menjadikan bisnis Perusahaan terus berlanjut. PLN NP secara konsisten melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial atau *corporate social responsibility* (CSR) sebagai wujud kepedulian sekaligus apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan atas proses bisnis Perusahaan sehingga berdampak pada keberlangsungan bisnis PLN NP. Program CSR dikembangkan guna mendukung rencana jangka panjang perusahaan dalam menjaga kelangsungan bisnis, serta berkontribusi dalam pemenuhan sasaran pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang telah dicanangkan oleh Pemerintah. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dijalankan PLN NP secara sistematis dan terarah mengacu pada Roadmap CSR 2018-2022 dengan pendekatan *Community Involvement & Development* (CID) berbasis ISO 26000 dan Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) yang diatur dalam Keputusan Direksi No.065.K/010/DIR/2013. Sasaran *Roadmap* CSR 2018-2022 adalah PLN NP menjadi *Most Trusted and Preferred Company*, yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam Strategi CSR PLN NP Tahun 2018-2024.

PLN NP considers that business continuity, the environment and society are important in becoming one unit for business continuity of the Company. PLN NP consistently carries out social responsibility activities or corporate social responsibility (CSR) as the concern as well as appreciation for the community who have given trust and support for business processes of the Company so as bring impacts on PLN NP business continuity. PLN NP develops CSR program to support the Company's long-term plans in maintaining business continuity, as well as contributing to the fulfillment of the Sustainable Development Goals (SDGs) that have been proclaimed by the Government. PLN NP carries out corporate social responsibility in a systematic and directed manner referring to the 2018-2022 CSR Roadmap with a Community Involvement & Development (CID) approach based on ISO 26000 and Guidelines for Implementation of Social and Environmental Responsibility (CSR) stipulated in the Board of Directors Decree No.065 .K/010/DIR/2013. The target of the 2018-2022 CSR Roadmap is for PLN NP to become the Most Trusted and Preferred Company, which is further elaborated into PLN NP CSR Strategy in 2018-2024.

Tipologi pelaksanaan program CSR terdiri dari, *Empowerment*, *Capacity Building*, Infrastruktur, *Charity*, dan Kejadian Luar Biasa (KLBS). Program-program ini dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai Perseroan (*corporate values*), serta mengacu kepada ketentuan Pemerintah, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan kebutuhan masyarakat setempat. Program CSR dilaksanakan di 17 Unit Kerja PLN Nusantara Power yang meliputi: UP Muara Karang, UP Muara Tawar, UP Cirata, UP Brantas, UP Paiton, UP Gresik, Kantor Pusat, UBJOM Rembang, UBJOM Indramayu, UBJOM Tanjung Awar-Awar, UBJOM Tenayan, UBJOM Kaltim Teluk, UBJOM Pulang Pisau, UBJOM Arun, UBJOM Tenayan, UBJOM Paiton 9, dan Suppa.

Typology of CSR program implementation consists of Empowerment, Capacity Building, Infrastructure, Charity and Extraordinary Events. These programs are carried out according to the Company's values (corporate values), and refer to Government regulations, the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs) and the needs of local community. CSR program is implemented in 17 PLN Nusantara Power Work Units which include: Muara Karang GU, Muara Tawar GU, Cirata GU, Brantas GU, Paiton GU, Gresik GU, Head Office, Rembang OMSBU, Indramayu OMSBU, Tanjung Awar-Awar OMSBU, Tenayan OMSBU, East Kalimantan Teluk OMSBU, Pulang Pisau OMSBU, Arun OMSBU, Tenayan OMSBU, Paiton 9 OMSBU, and Suppa OMSBU.

Realisasi dana CSR tahun 2022 sebesar Rp40,70 miliar, yang terbagi menjadi 5 bidang, yaitu (1) pemberdayaan, (2) pengembangan kapasitas, (3) infrastruktur, (4) donasi dan (5) kejadian luar biasa. Realisasi dana CSR 2022 didominasi oleh bidang pemberdayaan sebesar 39,33%; dilanjutkan dengan CSR bidang pengembangan kapasitas sebesar 24,86%, CSR bidang infrastruktur sebesar 12,15%; kejadian luar biasa akibat pandemi Covid-19 sebesar 8,38% dan CSR donasi sebesar 15,28%.

CSR funds realization in 2022 is Rp40.70 billion, divided into 5 areas, namely (1) empowerment, (2) capacity building, (3) infrastructure, (4) donations and (5) extraordinary events. CSR funds realization for 2022 is dominated by the empowerment sector by 39.33%; followed by CSR in capacity building by 24.86%, CSR in infrastructure by 12.15%; extraordinary events due to the Covid-19 pandemic by 8.38% and CSR donations by 15.28%.

Selain itu, PLN NP berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan merupakan wujud pengelolaan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan operasional sebagai penyedia tenaga listrik. Kebijakan Sistem Manajemen PLN NP mengatur bahwa penggunaan sumber daya energi dan sumber daya alam dalam kegiatan operasional dan pemeliharaan unit pembangkit dilakukan secara efisien dengan mematuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta ISO 14001 tentang Sistem Manajemen Lingkungan. Dalam pengelolaan kinerja lingkungan, PLN NP berhasil meraih 5 PROPER Emas, yaitu oleh UP Paiton, UP Gresik, UBJOM Indramayu, UBJOM Rembang, dan UBJOM Paiton, serta mendapatkan juga 4 PROPER Hijau serta 12 PROPER Biru.

Komitmen dan konsistensi PLN NP dalam penerapan CSR telah diakui secara nasional maupun internasional, diantaranya dengan diperolehnya banyak penghargaan CSR, antara lain *Asia Sustainability Reporting Rating* (ASRRAT) 2022 meraih Predikat *Gold*, *Top CSR Awards* 2022 #Star 4, *Indonesia Sustainable Development Goal Award* (ISDA), *Indonesia Corporate Social Responsibility* V 2022 (ICSRAV), *Top CSR of The Year* 2022, Indonesia CSR & TJSL *Award* (ICA).

Also, PLN NP contributes to the environmental preservation as manifestation of managing the impacts arising from operational activities as the electricity provider. PLN NP Management System Policy stipulates that the use of energy and natural resources in the operational and maintenance activities of generating units is carried out efficiently by complying with Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and ISO 14001 concerning Environmental Management Systems. In managing environmental performance, PLN NP won 5 Gold PROPER by Paiton GU, Gresik GU, Indramayu OMSBU, Rembang OMSBU, and Paiton OMSBU, and also received 4 Green PROPER and 12 Blue PROPER.

PLN NP commitment and consistency in implementing CSR has been recognized nationally and internationally, including by obtaining many CSR awards, including the Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2022 won the Gold Predicate, Top CSR Awards 2022 #Star 4, Indonesia Sustainable Development Goal Award (ISDA)), Indonesia Corporate Social Responsibility V 2022 (ICSRAV), Top CSR of The Year 2022, Indonesia CSR & TJSL Award (ICA).

Perubahan Komposisi Direksi
Changes in Board of Directors Composition

Pada periode tahun buku pelaporan, terdapat perubahan komposisi anggota Direksi. Berdasarkan keputusan RUPS Sirkuler tanggal 21 September 2022, mengangkat dan menetapkan Sdr. Ruly Firmansyah sebagai Direktur Utama menggantikan Sdr. Gong Matua Hasibuan, Sdr. Muhammad Reza menggantikan Sdr. Iwan Purwana sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga dan Sdr. Dwi Hartono yang menggantikan Sdr. R. Rawan Insani sebagai Direktur Keuangan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Sdr. Gong Matua Hasibuan, Sdr. Iwan Purwana dan Sdr. R. Rawan Insani atas kontribusi dan dedikasi yang diberikan selama menjabat selaku Direktur di PLN NP. Direksi juga mengucapkan selamat bergabung dan berkarya kepada anggota Direksi yang baru. Dengan demikian komposisi Direksi sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Ruly Firmansyah : Direktur Utama
Rachmanoe Indarto : Direktur Operasi Pembangkit Batubara
M Yossy Noval A : Direktur Operasi Pembangkit Gas
Muhamad Reza : Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga

Dwi Hartono : Direktur Keuangan
Karyawan Aji : Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi

During the reporting period, there was a change in the composition of the Board of Directors members. Based on the decision of the Circular GMS dated September 21, 2022, to appoint and determine Mr. Ruly Firmansyah as the President Director replacing Mr. Gong Matua Hasibuan, Mr. Muhammad Reza replaced Mr. Iwan Purwana as Director of Business and Commerce Development and Mr. Dwi Hartono replaced Mr. R. Rawan Insani as Director of Finance.

We would like to thank Mr. Gong Matua Hasibuan, Mr. Iwan Purwana and Mr. R. Rawan Insani for the contribution and dedication during serving as Director at PLN NP. The Board of Directors also congratulates the new members of the Board of Directors on joining and working. Thus the composition of the Board of Directors as of December 31, 2022 is as follows:

Ruly Firmansyah : President Director
Rachmanoe Indarto : Director of Operation Coal Power Plant
M Yossy Noval A : Director of Operation Gas Power Plant
Muhamad Reza : Director of Business Development and Commerce

Dwi Hartono : Director of Finance
Karyawan Aji : Director of Human Capital Management and Administration

Hadirnya Direksi baru ini menjadi energi tambahan untuk mendorong peningkatan kinerja PLN NP, sehingga dapat memperluas portofolio bisnis Perusahaan di masa depan, menjawab tantangan seperti energi baru terbarukan.

This new Board of Directors is additional energy to encourage PLN NP performance improvement, so that it can expand the Company's business portfolio in the future, responding to challenges such as new and renewable energy.

Alasan Perubahan

Dalam rangka mendukung transformasi perusahaan melalui restrukturisasi *Holding* dan *Subholding*, PLN telah melakukan perubahan nomenklatur, serta pemberhentian dan pengangkatan Direksi. Dimana Pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi telah mendapatkan persetujuan Kementerian BUMN.

Reason for Change

In order to support the Company's transformation through Holding and Subholding restructuring, PLN has made changes to the nomenclature, as well as the dismissal and appointment of the Board of Directors. The dismissal and appointment of the Board of Directors members were approved by the Ministry of SOEs.

Apresiasi
Letter of Appreciation

Direksi menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris atas arahan yang diberikan dan kerjasama yang telah terjalin selama ini. Kami juga menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh karyawan, mitra bisnis dan segenap pemangku kepentingan lainnya atas kepercayaan, kontribusi dan dukungan yang telah diberikan. Pencapaian dan pertumbuhan PLN NP di tahun 2022 diraih berkat usaha dari seluruh karyawan yang mengupayakan inovasi dan kreativitas di tengah tantangan dan perubahan proses kerja, kepercayaan dan dukungan dari Pemegang Saham dan Dewan Komisaris, serta kerja sama yang baik dengan mitra usaha dan pelanggan. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, Direksi menyampaikan apresiasi yang besar atas setiap bentuk dukungan yang diberikan kepada Direksi untuk mempertahankan bahkan mengembangkan PLN NP. Optimalisasi pengelolaan akan terus Direksi upayakan ke depannya agar PLN NP dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada seluruh pemangku kepentingan.

The Board of Directors would like to express gratitude and respect to the Shareholders and the Board of Commissioners for the directions provided and the cooperation so far. We also express our appreciation and gratitude to the entire employees, business partners and all other stakeholders for the trust, contribution and support provided. PLN NP achievement and growth in 2022 was achieved due to the efforts by all employees who strive for innovation and creativity amid the challenges and changes in work processes, trust and support from the Shareholders and the Board of Commissioners, as well as good cooperation with the business partners and customers. Therefore, through this opportunity, the Board of Directors would like to express great appreciation for every support provided to the Board of Directors to maintain and even develop PLN NP. The Board of Directors will continue to optimize management in the future so that PLN NP can provide greater benefits to all stakeholders.

Kami yakin PLN NP dapat terus bergerak lebih lincah, cepat serta efektif untuk penguatan bisnis yang telah ada dalam mengelola dan menyediakan energi bagi kepentingan masyarakat hingga pelosok negeri, pengembangan bisnis yang lebih luas, terutama di bidang energi baru dan terbarukan.

We believe that PLN NP is able to continue to move more agile, fast and effectively to strengthen existing businesses in managing and providing energy for the benefit of people throughout the country, broader business development, especially in the field of new and renewable energy.

Surabaya, 30 Juni 2023
Surabaya, June 30, 2023

Atas Nama Direksi
On Behalf of the Board of Directors

Ruly Firmansyah
Direktur Utama
President Director

1 **Ruly Firmansyah**
Direktur Utama
President Director

2 **Karyawan Aji**
Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi
Director of Human Capital Management and Administration

3 **Muhamad Reza**
Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga
Director of Business Development and Commerce

4 **Dwi Hartono**
Direktur Keuangan
Director of Finance

5 **M. Yossy Noval A**
Direktur Operasi Pembangkit Gas
Director of Operation Gas Power Plant

6 **Rachmanoe Indarto**
Direktur Operasi Pembangkit Batubara
Director of Operation Coal Power Plant

5
4
1
3

Surat Pernyataan Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2022 PT PLN Nusantara Power

Statement from Board of Commissioners on Accountability Over Annual Report 2022 PT PLN Nusantara Power

Laporan Tahunan 2022 PT PLN Nusantara Power menyajikan informasi mengenai kinerja Perusahaan, penerapan tata kelola perusahaan, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan informasi lainnya yang relevan dan signifikan bagi para pemangku kepentingan.

PT PLN Nusantara Power Annual Report 2022 presents information on the Company's performance, implementation of corporate governance, implementation of corporate social responsibility, Financial Statements for the period ended on December 31, 2022, and other information relevant and significant for the stakeholders.

Kami, segenap Dewan Komisaris PT PLN Nusantara Power yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan 2022 PT PLN Nusantara Power.

We, the undersigned, the entire Board of Commissioners of PT PLN Nusantara Power, declare full accountability for the accuracy of the content of PT PLN Nusantara Power Annual Report 2022.

Surabaya, 30 Juni 2023
Surabaya, June 30, 2023

Evy Haryadi
Komisaris Utama
President Commissioner

Kenedy
Komisaris
Commissioner

Ida Nuryatin Finahari
Komisaris
Commissioner

Emir Kresna Wardana
Komisaris
Commissioner

Hendra Iswahyudi
Komisaris
Commissioner

Bagus Puruhito
Komisaris
Commissioner

Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2022 PT PLN Nusantara Power

Statement from Board of Directors on Accountability Over Annual Report 2022 PT PLN Nusantara Power

Laporan Tahunan 2022 PT PLN Nusantara Power menyajikan informasi mengenai kinerja Perusahaan, penerapan tata kelola perusahaan, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan informasi lainnya yang relevan dan signifikan bagi para pemangku kepentingan.

PT PLN Nusantara Power Annual Report 2022 presents information on the Company's performance, implementation of corporate governance, implementation of corporate social responsibility, Financial Statements for the period ended on December 31, 2022, and other information relevant and significant for the stakeholders.

Kami, segenap Direksi PT PLN Nusantara Power yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan 2022 PT PLN Nusantara Power.

We, the undersigned, the entire Board of Directors of PT PLN Nusantara Power, declare full accountability for the accuracy of the content of PT PLN Nusantara Power Annual Report 2022.

Surabaya, 30 Juni 2023
Surabaya, June 30, 2023

Ruly Firmansyah
Direktur Utama
President Director

Karyawan Aji
Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi
Director of Human Capital Management and Administration

Muhamad Reza
Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga
Director of Business Development and Commerce

Dwi Hartono
Direktur Keuangan
Director of Finance

M. Yossy Noval A
Direktur Operasi Pembangkit Gas
Director of Operation Gas Power Plant

Rachmanoe Indarto
Direktur Operasi Pembangkit Batubara
Director of Operation Coal Power Plant

Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal PT PLN Nusantara Power

Accountability Statement by The Board of Directors Over Risk Management and Internal Control System PT PLN Nusantara Power

Atas nama Direksi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ruly Firmansyah
   Jabatan : Direktur Utama
   Alamat Kantor : Jl. Ketintang Baru No.11 Surabaya 60231
   Alamat Domisili : Dharmahusada Indah Timur IV blok M203 Surabaya

2. Nama : Dwi Hartono
   Jabatan : Direktur Keuangan
   Alamat Kantor : Jl. Ketintang Baru No.11 Surabaya 60231
   Alamat Domisili : Jl. Manyar Kertoadi Blok W No. 101 Surabaya

Menyatakan bahwa:

Sehubungan dengan tanggung jawab terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian PT PLN Nusantara Power dan Entitas Anak Perusahaan untuk tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022, yang ditandatangani pada tanggal 4 April 2023 dalam kaitannya dengan integritas laporan keuangan telah disusun dengan menerapkan sistem manajemen risiko dan pengendalian internal perusahaan secara efektif dan efisien dalam seluruh aspek yang material.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

On behalf of the Board of Directors, we the undersigned:

1. Name : Ruly Firmansyah
   Position : President Director
   Office Address : Jl. Ketintang Baru No.11 Surabaya 60231
   Address of Domicile : Dharmahusada Indah Timur IV blok M203 Surabaya

2. Name : Dwi Hartono
   Position : Director of Finance
   Office Address : Jl. Ketintang Baru No.11 Surabaya 60231
   Address of Domicile : Jl. Manyar Kertoadi Blok W No. 101 Surabaya

Declare that:

The statement of The Board of Directors regarding the responsibility for the Consolidated Financial Statements of PT PLN Nusantara Power and Subsidiaries as at December 31, 2021 and December 31, 2022, which we signed on April 4, 2022 is founded on sound system of risk management and internal control system are operating efficiently and effectively in all material aspect.

The declaration has been made truthfully.

Atas Nama Direksi
On Behalf of the Board of Directors

Surabaya, 30 Juni 2023
Surabaya, June 30, 2023

Ruly Firmansyah
Direktur Utama
President Director

Dwi Hartono
Direktur Keuangan
Director of Finance

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

PJB

Profil Perusahaan

Company Profile

Identitas Perusahaan
Company Identity

PLN Nusantara Power

Transformasi PLN NP menjadi salah satu *Sub-Holding* PLN, memperkuat identitas dan posisi Perusahaan sebagai perusahaan pembangkit listrik terkemuka. Memantapkan optimisme mewujudkan sasaran Perusahaan menjadi perusahaan pembangkitan terbesar se-Asia Tenggara.

PLN NP brought off the transformation as the one of PLN's Sub-Holding that strengthens the Company's identity and position as a leading Power Plant Company. Establishing optimism in realizing the Company's target to become the largest power plant Company in Southeast Asia.

Nama Perusahaan **PT PLN Nusantara Power** Pada 21 September 2022, PT Pembangkitan Jawa-Bali telah bertransformasi dengan resmi berganti nama menjadi PT PLN Nusantara Power (PLN NP) yang menjadi perusahaan *sub-holding* dengan peran sebagai *Generation Company* 1 (Genco 1) di lingkup PLN Grup. Dengan peran tersebut, maka aset-aset pembangkitan PLN yang awalnya tersebar di seluruh wilayah akan dikonsolidasikan, sehingga mengelola unit pembangkit yang lebih banyak. PLN NP akan menjadi *Generation Company* terbesar di Asia Tenggara serta siap mengelola pembangkit-pembangkit dengan total kapasitas 23,5 GW. Dengan perubahan ini, PLN NP akan mendapatkan dampak positif bagi upaya Indonesia untuk mengambil bagian pada rantai pasok global di tengah momentum transisi energi saat ini.	**Company Name** **PT PLN Nusantara Power** In September 21, 2022, PT Pembangkitan Jawa-Bali transformed by formally changed name to PT PLN Nusantara Power (PLN NP), a sub-holding Company with the role of Generation Company 1 (Genco 1) within the PLN group. With this role, PLN's electric power generators that were previously spread across the region will be consolidated in order to manage more power plant units. PLN NP will be the largest Generation Company in Southeast Asia and will be ready to manage power plants with the total capacity of 23,5 GW. With this change, PLN NP will present positive impacts for Indonesia efforts in participating in the global supply chain amid the current energy transition momentum.
Tanggal Pendirian 3 Oktober 1995	**Date of Establishment** October 3, 1995
Bidang Usaha 1. Pembangkitan tenaga listrik; 2. Konstruksi bangunan elektrikal; 3. Pemasangan peralatan ketenagalistrikan; 4. Pemeliharaan dan/atau pengoperasian peralatan ketenagalistrikan; 5. Perdagangan dan/atau kegiatan usaha pendukung dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan, termasuk memberikan penugasan kepada Anak Perusahaan Perseroan.	**Business Line** 1. Electric Power Plant; 2. Electrical Building Construction; 3. Installation of electricity equipment; 4. Maintenance and/or operation of electrical equipment; 5. Trading and/or supporting business activities to optimize the utilization of resources owned by the Company, including delegating assignments to the Subsidiaries.
Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas	**Corporation** Limited Company
Status Perusahaan *Subholding* PT PLN (Persero)	**Company Status** Sub holding of PT PLN (Persero)

Dasar Hukum Pendirian 1. Akta Pendirian PT PLN Pembangkitan Jawa-Bali II, No. 16 tanggal 3 Oktober 1995 2. Akta Perubahan Nama menjadi PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali, oleh Notaris Henny Singgih dengan Akta No. 9 tanggal 3 Agustus 2000 3. Akta Perubahan Nama menjadi PT Pembangkitan Jawa-Bali, oleh Notaris Henny Singgih dengan Akta No. 34 tanggal 20 Februari 2001 4. Akta Perubahan Nama menjadi PT PLN Nusantara Power oleh Notaris Muhammad Hanafi S.H dengan Akta No. 70 tanggal 30 Desember 2022	**Legal Basis of Establishment** 1. Deed of Establishment of PT PLN Pembangkitan Jawa-Bali II, No. 16 on October 1995 2. Deed of Name Change to PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali, by Notary Henny Singgih with Deed No. 9 on August 3, 2000 3. Deed of Name Change to PT Pembangkitan Jawa-Bali, by Notary Henny Singgih with Deed No. 34 on February 20, 2001 4. Deed of Name Change to PT PLN Nusantara Power by Notary Muhammad Hanafi S.H with Deed No. 70 on December 30, 2022
Pemegang Saham 1. PT PLN (Persero) sebanyak 1 Saham Seri 1 dan 5.999.999.998 Saham Seri 2 (99,99%) dan 2. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) sebanyak 1 Saham Seri 2 (0,01%)	**Shareholders** 1. PT PLN (Persero) has 1 Series-1 Share and 5,999,999,998 Series-2 Shares (99,99%) and 2. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) 1 Series-2 Share (0,01%)
Modal Dasar Rp12.000.000.000.000	**Authorized Capital** Rp12,000,000,000,000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Rp3.000.000.000.000	**Issued and Fully Deposited Capital** Rp3,000,000,000,000
Jumlah Karyawan 3.034 karyawan per 31 Desember 2022	**Number of Employees** 3,034 employees as of December 31, 2022
Kantor Pusat Jl. Ketintang Baru, No.11, Surabaya 60231 – Indonesia (+62-31) 828 3180 (*Hunting*) (+62-31) 828 3183 info@plnnusantarapower.co.id	**Headquarters** Jl. Ketintang Baru, No.11, Surabaya 60231 – Indonesia (+62-31) 828 3180 (Hunting) (+62-31) 828 3183 info@plnnusantarapower.co.id
Kantor Perwakilan Gedung 18 Office Park Lantai 2 Jl. TB Simatupang Kav 18 – Jakarta Selatan - -	**Representative Office** Gedung 18 Office Park 2nd Floor Jl. TB Simatupang Kav 18 – Jakarta Selatan - -
Contact Center (+62-31) 828 3180 (*Hunting*) (+62-31) 828 3183 www.facebook.com/plnnusantarapower @ptpln_np @plnnusantarapower	**Contact Center** (+62-31) 828 3180 (Hunting) (+62-31) 828 3183 www.facebook.com/plnnusantarapower @ptpln_np @plnnusantarapower
Website www.plnnusantarapower.co.id	**Website** www.plnnusantarapower.co.id
Wilayah Kerja - 8 (delapan) Unit Pembangkit Eksisting dan 1 (satu) Unit Pembangkit Riset (PLTS Cirata); - 5 (lima) Unit Jasa Operasi dan Pemeliharaan FTP-1 Jawa; - 17 (tujuh belas) Unit Jasa Operasi dan Pemeliharaan Luar Jawa; - 5 (lima) Unit Jasa Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit PLN di *Site* PLN NP; - 1 (satu) Unit Sewa Pembangkit; - 1 (satu) Unit *Maintenance, Repair & Overhaul* (MRO); - 1 (satu) Unit PJB Academy; - 2 (dua) Unit Pelaksana Proyek - Kepemilikan saham pada 8 (delapan) Unit Pembangkit IPP; dan - Kepemilikan saham pada Perusahaan Operasi dan Pemeliharaan untuk mengelola 1 (satu) unit pembangkit PLN.	**Working Area** - 8 (eight) Existing Generation Unit and 1 (one) Research Generation Unit (Cirata SPP); - 5 (five) FTP-1 Java Operation & Maintenance Service Business Units; - 17 (seventeen) Operation & Maintenance Service Business Units outside Java; - 5 (five) Operation & Maintenance Service Business Units for PLN Generation Unit at PLN NP Site; - 1 (one) Generation Unit for Lease; - 1 (one) Unit Maintenance, Repair & Overhaul(MRO); - 1 (one) Unit of PJB Academy; - 2 (two) Project Implementation Unit - Share ownership in 8 (eight) IPP Generating Units; and - Share ownership in the Operation and Maintenance Company to manage 1 (one) PLN Generation Unit.
Anak Perusahaan - PT PJB Services - PT Rekadaya Elektrika - PT PJB Investasi - PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang - PT Navigat Innovative Indonesia	**Subsidiaries** - PT PJB Services - PT Rekadaya Elektrika - PT PJB Investasi - PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang - PT Navigat Innovative Indonesia

Riwayat Singkat Perusahaan

Brief Company History

PLN NP telah memiliki sejarah panjang di industri pembangkit listrik melalui berbagai kontribusi pada upaya penyediaan tenaga listrik nasional. Dalam rangka memperkuat kontribusi, PLN NP senantiasa melakukan transformasi menyesuaikan tantangan industri dan pasar.

PLN NP has a long history in the power plant industry through various contributions to national electricity supply efforts. In order to strengthen its contribution, PLN NP always brings off the transformation to conform the industry and market challenges.

Sekilas Pendirian Perusahaan

Company Establishment at A Glance

Pendirian Perusahaan berawal dari restrukturisasi yang dilakukan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), yang disingkat "PLN" pada tahun 1982, dengan melakukan pemisahan unit sesuai fungsinya, yaitu Unit PLN Distribusi dan Unit PLN Pembangkitan serta Unit PLN Penyaluran. Pada tanggal 3 Oktober 1995, PLN melakukan restrukturisasi khusus bidang pembangkitan dengan mendirikan 2 (dua) Anak Perusahaan, yaitu PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I yang berkantor pusat di Jakarta (sekarang PT PLN Indonesia Power) dan PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II (sekarang PT PLN Nusantara Power) yang berkantor pusat di Surabaya.

Pendirian Perusahaan telah diaktakan notaris yaitu berdasarkan Akta Notaris No. 16 tanggal 3 Oktober 1995, dari Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-12495-HT.01.01.Th.95 tanggal 3 Oktober 1995 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 9299 tanggal 10 November 1995, Tambahan No. 90.

Anggaran Dasar Perusahaan terakhir diubah berdasarkan Akta Notaris No. 70 tanggal 30 Desember 2022, dari Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta, untuk mengubah nama Perusahaan yang semula bernama PT Pembangkitan Jawa-Bali menjadi PT PLN Nusantara Power. Akta perubahan ini telah diterima dan dicatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-0000005.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 1 Januari 2023.

The establishment of the Company began with the restructuring of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), abbreviated as "PLN" in 1982, by separating units according to their functions, namely the PLN Distribution Unit and the PLN Electric Power Generator Unit as well as the PLN Distribution Unit. On October 3, 1995, PLN restructured specifically in the field of electric power generator by establishing 2 (two) Subsidiaries, namely PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I headquartered in Jakarta (now PT PLN Indonesia Power) and PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II (now PT PLN Nusantara Power) headquartered in Surabaya.

The Company establishment was legalized by the notary, namely based on Notarial Deed No. 16 dated October 3, 1995, of Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notary in Jakarta. This deed of establishment was ratified by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in Decree No. C2-12495-HT.01.01.Th.95 dated October 3, 1995 and announced in the State Gazette No. 9299 dated November 10, 1995, Supplement No. 90.

The Company's Articles of Association were lately amended based on Notarial Deed No. 70 dated December 30, 2022, from Muhammad Hanafi, S.H., Notary in Jakarta, to change the Company's name from PT Pembangkitan Jawa-Bali to PT PLN Nusantara Power. This amendment deed was received and recorded at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with its Decree No. AHU-0000005.AH.01.02.TAHUN 2023 dated January 1, 2023.

Keterangan Perubahan Nama Perusahaan
Description of Change in Company Name

Sejak didirikan pada tanggal Oktober 1995, Perusahaan telah merubah namanya sebanyak 3 (tiga) kali.

Since its establishment in October 1995, the Company had changed its name 3 (three) times.

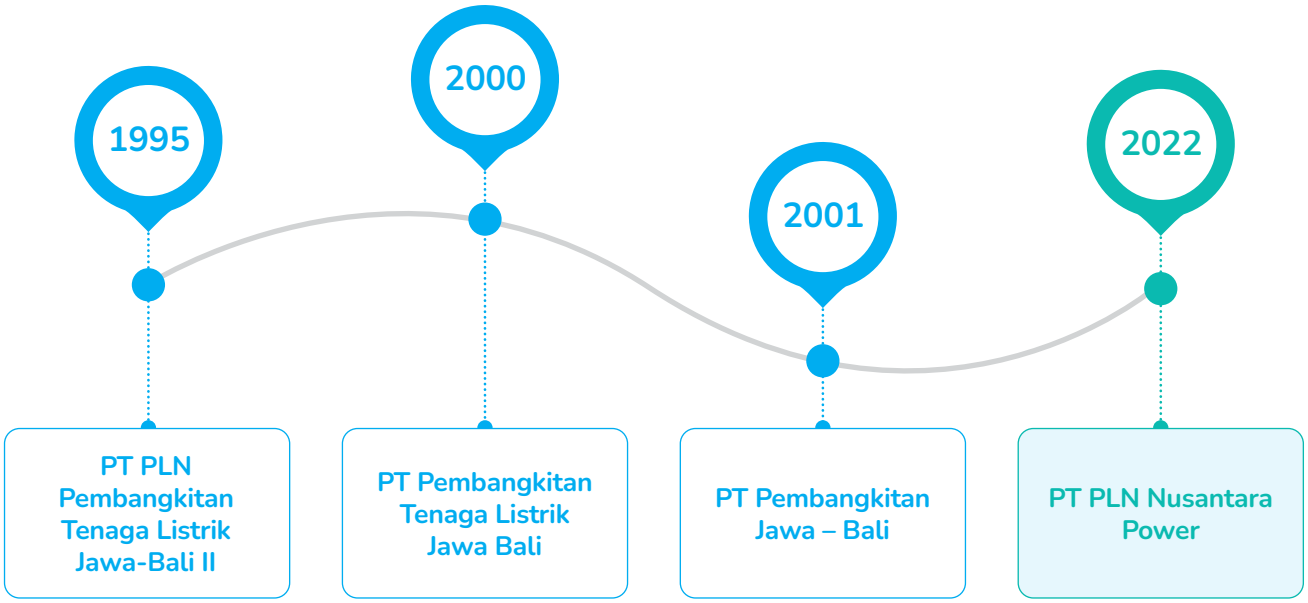

Jejak Langkah
Milestones

1995

Awal Mula
Beginning

1995
- Berdiri dengan nama PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II yang memiliki aset 5 unit pembangkitan dengan total kapasitas 5.068 MW.
  Established under the name PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II which has assets of 5 electric power generator units with a total capacity of 5,068 MW.
- Berbasis *Computerized Maintenance Management System* (CMMS).
  Based on Computerized Maintenance Management System (CMMS).

2000 - 2010

Stable Growth

2000
Perubahan nama menjadi PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali.
The name changed to PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali.

2001
- Perubahan nama menjadi PT Pembangkitan Jawa - Bali.
  The name changed to PT Pembangkitan Jawa - Bali.
- Mendirikan anak perusahaan, PT PJB Services dengan bidang usaha O&M pembangkit.
  Established a subsidiary, PT PJB Services, with the business field of power plant O&M.

2003
Penyertaan saham di PT Rekadaya Elektrika, bergerak di bidang jasa *Engineering, Procurement and Construction* (EPC) pembangkit listrik.
Share investment in PT Rekadaya Elektrika, engaged in Engineering, Procurement and Construction (EPC) services for power plants.

2004-2006
Penyertaan saham untuk pengembangan pembangkit di sejumlah perusahaan.
Share investment for power plant development in a number of companies.

2009
Mendirikan Unit Bisnis Jasa O&M (UBJOM).
Established O&M Services Business Unit (OMSBU).

2011 - 2015

Operational Excellence

2012
Implementasi Manajemen Aset PAS 55 pertama di Asia Pasifik.
Implementation of the first PAS 55 Asset Management in Asia Pacific.

2013
Raih sertifikasi PAS 55 di seluruh unit pembangkit.
Achieved PAS 55 certification in all generating units.

2014
Integrasi sistem manajemen PJB IMS dan kinerja ekselen tertinggi di Indonesia.
Integration of the PJB IMS management system and highest performance excellence in Indonesia.

2015
Pendirian anak perusahaan, PT PJB Investasi.
Establishment of subsidiary, PT PJB Investasi.

2016 - 2020

Corporate Transformation I

2016

Mendirikan Unit Bisnis Jasa O&M (UBJOM).
Established O&M Services Business Unit (UBJOM).

2017

Proper Emas PLTU Paiton.
Gold Proper for Paiton CFPP.

2018

Raih *Brand Industry Leader Baldrige Excellence Framework* pertama di Indonesia.
Achieved the first Industry Leader Baldrige Excellence Framework Brand in Indonesia.

2019

Commercial Operation Date (COD) PLTU Jawa 7 Unit 11.000 MW sebagai pembangkit terbesar dan pertama di Indonesia dengan teknologi *boiler ultra super critical*.
Commercial Operation Date (COD) of 7 Units of 11,000 MW Java CFPP as the largest and first power plant in Indonesia with ultra super critical boiler technology.

2020 - 2024

Corporate Transformation II

2020

- *Go Live* Komersialisasi *Co-firing* di 3 Pembangkit (PLTU Paiton 1-2, PLTU Ketapang dan PLTU Pacitan)
- Pendirian PT PJB Investindo, PT Pembangkit Jawa Baskara Investasi Cirata dan PT PJB Masdar Solar Energi.
- Go Live Commercialization of Co-firing in 3 Plants (Paiton 1-2 CFPP, Ketapang CFPP and Pacitan CFPP)
- Establishment of PT PJB Investindo, PT Pembangkit Jawa Baskara Investasi Cirata and PT PJB Masdar Solar Energi.

2021

- Peluncuran PJB Access.
- COD PLTGU Muara Karang Blok 3.
- *Financial Close* Pendanaan. Proyek PLTS Terapung Cirata 145 MWAc.
- Peresmian PLTS Bawean.
- Launch of PJB Access.
- COD of Muara Karang Block 3 CCPP.
- Financial Close of Funding. Cirata 145 MWAc Floating SPP Project.
- Inauguration of Bawean SPP.

2022

- Perubahan status menjadi *subholding* PT PLN (Persero).
- Perubahan nama menjadi PT PLN Nusantara Power.
- COD PLTGU *Add On* Muara Tawar Blok 2 (150 MW).
- Relokasi pembangkit PLTG Jakabaring (3×17 MW) dan PLTG Batanghari (2×30 MW).
- Change in status to PT PLN (Persero) subholding.
- Change in name to PT PLN Nusantara Power.
- COD of Muara Tawar Block 2 Add On CCPP (150 MW).
- Relocation of Jakabaring GTPP (3 × 17 MW) and Batanghari GTPP (2 × 30 MW).

Bidang Usaha
Business Line

Lingkup kegiatan Perusahaan adalah untuk menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat.

The scope of the Company's activities is to carry out electricity business based on sound industrial and commercial principles.

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar
Business Activities Based on Articles of Association

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah untuk menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat yang mencakup aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

1. Pembangkitan tenaga listrik;
2. Konstruksi bangunan elektrikal;
3. Pemasangan peralatan ketenagalistrikan;
4. Pemeliharaan dan/atau pengoperasian peralatan ketenagalistrikan;
5. Perdagangan dan/atau kegiatan usaha pendukung dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan termasuk memberikan penugasan kepada entitas anaknya.

According to with Chapter 3 of the Company's Articles of Association, the scope of the Company's activities is to carry out electricity business based on sound industrial and commercial principles, including the following activities:

1. Power Plant;
2. Electrical Building Construction;
3. Installation of electricity equipment;
4. Maintenance and/or operation of electrical equipment;
5. Trading and/or supporting business activities to optimize the utilization of resources owned by the Company, including delegating assignments to the Subsidiaries.

Kegiatan Usaha yang Dijalankan Saat Ini
Current Business Activities

Kegiatan usaha PLN NP yang dijalankan saat ini adalah:

1. Penyediaan tenaga listrik dengan keandalan yang baik melalui mekanisme Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) dengan PT PLN (Persero) sebagai *single buyer*.
2. Kegiatan usaha lainnya yang berkaitan dengan usaha Perusahaan dalam rangka memanfaatkan secara maksimal potensi yang dimiliki PLN NP guna meningkatkan *revenue* dari lini bisnis *asset light* (*beyond* kWh). Usaha lainnya ini adalah untuk menuju *Integrated Power Company*, baik dilakukan langsung oleh PLN NP maupun melalui Anak Perusahaan, Perusahaan Asosiasi maupun perusahaan terafiliasi mencakup bidang usaha berikut:
   a. Pembangkit tenaga listrik melalui kepemilikan dalam *Independent Power Producer* (IPP);
   b. Jasa *Operation and Maintenance* (O&M) pembangkit termasuk jasa penunjangnya;
   c. Jasa *Maintenance, Repair & Overhaul* (MRO) pembangkit;
   d. Jasa *Technical Supporting* (TS) *assessment* pembangkit;
   e. Penyedia material cadang pembangkit (*stockist*);

PLN NP currently runs the following business activities:

1. Electricity provision with good reliability through Power Purchase Agreement (PPA) mechanism with PT PLN (Persero) as the single buyer.
2. Other Business activities related to the Company's business activities in order to fully utilize PLN NP's potential to increase revenue from the asset light (beyond kWh) business line. These other activities is to achieve an Integrated Power Company, either directly carried out by PLN NP or through Subsidiaries, Associated Companies, and Affiliations, including the following business fields:
   a. Power Plant through ownership in Independent Power Producer (IPP);
   b. Operation and Maintenance (O&M) services for Power Plant, including the supporting services;
   c. Maintenance, Repair & Overhaul (MRO) Services of Power Plant;
   d. Technical Supporting (TS) assessment and overhaul services for Power Plant;
   e. Providers of Power Plant spare-part (stockist);

f. Jasa *Engineering, Procurement and Construction* (EPC) pembangkit, transmisi dan gardu induk;
g. Jasa *Enterprise Asset Management* (EAM);
h. Pendanaan/investasi di bidang pembangkitan;
i. Jasa konsultasi ketenagalistrikan;
j. Jasa penyediaan tenaga kerja (SDM) untuk O&M pembangkit listrik; dan
k. Jasa sertifikasi kompetensi teknik ketenagalistrikan.

f. Engineering, Procurement, and Construction (EPC) services for Power Plant, transmissions, and substations;
g. Enterprise Asset Management (EAM) services;
h. Funding/investment in Power Plant;
i. Electricity consulting services;
j. Human Capital (HC) provider for Operation & Maintenance (O&M) of power plants; and
k. Competency certification service for electricity personnel.

Uraian Segmen Usaha
Business Segment Description

Segmen usaha utama PLN NP dibedakan berdasarkan pelanggannya, yang terbagi menjadi 2 (dua), yakni (1) segmen usaha penjualan tenaga listrik dan (2) segmen usaha bisnis lainnya. Pelanggan pada segmen usaha penjualan tenaga listrik terdiri dari pelanggan *grid* dan pelanggan *embedded*. Adapun pelanggan pada segmen usaha bisnis lainnya terdiri dari pelanggan jasa Operasi dan Pemeliharaan (O&M), jasa *Engineering, Procurement and Construction* (EPC), jasa *Enterprise Asset Management* (EAM) dan Jasa Lainnya pada pembangkit milik PT PLN (Persero) maupun pembangkit IPP.

Indikator kinerja pada segmen usaha penjualan tenaga listrik adalah kinerja pembangkit, produksi dan penjualan tenaga listrik. Sedangkan indikator kinerja pada segmen usaha bisnis lainnya berbeda-beda sesuai dengan jenis dari jasa masing-masing. Secara keseluruhan, Direksi menggunakan ukuran pendapatan yang diperoleh untuk menilai kinerja seluruh segmen operasi yang ada.

PLN NP divides main business segment based on customers into 2 (two), namely (1) electricity sales business segment and (2) other business segments. Customers in the electricity sales and purchase business segment consist of grid customers and embedded customers. Customers in other business segments consist of Operations and Maintenance (O&M) customers, Engineering, Procurement and Construction (EPC) services, Enterprise Asset Management (EAM) services, and Other Services at power plants of PT PLN (Persero) and IPP Power Plant.

The performance indicators on the electricity business sales segment are on the performance of the performance, production and sales of the electricity power plant. Meanwhile the performance indicators for other business segments are different according to each service types. Overall, the Board of Directors uses the measures of revenue earned to assess performance of all existing operating segments.

Produk dan Jasa
Products and Services

Berbagai solusi bisnis yang disediakan oleh PLN NP dan seluruh entitas dalam Grup PLN NP secara bersama-sama mendukung peningkatan perluasan cakupan pasar Perusahaan dalam mendukung pencapaian visi misi Perusahaan.

Various business solutions provided by PLN NP and all entities in the PLN NP Group together support the improvement in the market coverage expansion of the Company in supporting the achievement of the Company's vision and mission.

Produk utama PLN NP adalah kesiapan operasi Unit Pembangkit dan tenaga listrik yang dihasilkan oleh Unit Pembangkit melalui mekanisme saluran transmisi langsung kepada pelanggan berdasarkan kontrak jual beli yang dinyatakan dengan EAF *Declare*.

Berdasarkan segmen usahanya, PLN NP memiliki segmen usaha utama sebagai penyedia tenaga listrik serta penyediaan jasa operasi dan pemeliharaan (*Operation and Maintenance*/O&M) pembangkit dengan mengelola pembangkit milik sendiri maupun pihak lain yang tersebar di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT dan Papua yang terdiri dari:

1. 8 (delapan) Unit Pembangkit Eksisting dan 1 (satu) Unit Pembangkit Riset (PLTS Cirata);
2. 5 (lima) Unit Jasa Operasi dan Pemeliharaan FTP-1 Jawa;
3. 17 (tujuh belas) Unit Jasa Operasi dan Pemeliharaan Luar Jawa;
4. 5 (lima) Unit Jasa Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit PLN di Site PLN NP;
5. 1 (satu) Unit Sewa Pembangkit;
6. 1 (satu) Unit *Maintenance, Repair & Overhaul* (MRO);
7. 1 (satu) Unit PJB Academy;
8. 2 (dua) Unit Pelaksana Proyek;
9. Kepemilikan saham pada 8 (delapan) Unit Pembangkit IPP; dan
10. Kepemilikan saham pada Perusahaan Operasi dan Pemeliharaan untuk mengelola 1 (satu) unit pembangkit PLN.

Selain itu juga terdapat beberapa bisnis pendukung lainnya yang dilaksanakan oleh PLN NP maupun Entitas Anak. Profil dan Kinerja Entitas yang tergabung dalam Grup PLN NP disajikan berikutnya pada bagian Profil dan Kinerja Entitas Anak, Cucu-Cicit, Asosiasi dan Ventura Bersama dalam Laporan Tahunan ini.

PLN NP's main product is the operation readiness of the Generating Unit and the electricity generated by the Generating Unit through the transmission line mechanism directly to the customers based on the sale and purchase contract stated in the EAF Declare.

PLN NP has a main business segment as a provider of electricity as well as the provider of operation and maintenance (O&M) services for power plants by managing its own and other parties' power plants spread across Java, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT and Papua, consisting of:

1. 8 (eight) Existing Generating Units and 1 (one) Research Generating Unit (Cirata SPP);
2. 5 (five) FTP-1 Java Operation and Maintenance Service Units;
3. 17 (seventeen) Operation and Maintenance Service Units Outside Java;
4. 5 (five) PLN Plant Operation and Maintenance Service Units at PLN NP Site;
5. 1 (one) Power Plant Rental Unit;
6. 1 (one) Maintenance, Repair & Overhaul (MRO) Unit;
7. 1 (one) PJB Academy Unit
8. 2 (two) Project Implementation Units;
9. Share ownership in 8 (eight) IPP Generating Units; and
10. Share ownership in an Operation and Maintenance Company to manage 1 (one) PLN generating unit.

Moreover, there are also several other supporting businesses carried out by PLN NP and Subsidiaries. Profiles and performance of entities that are members of the PLN NP Group are presented next in the Profiles and Performance of Subsidiaries, Second to Third-Tier Subsidiaries, Associates and Joint Ventures section of this Annual Report.

Secara singkat, klasifikasi produk dan jasa Perusahaan diuraikan sebagai berikut:

In brief, the Company's products and services classifications are described as follows:

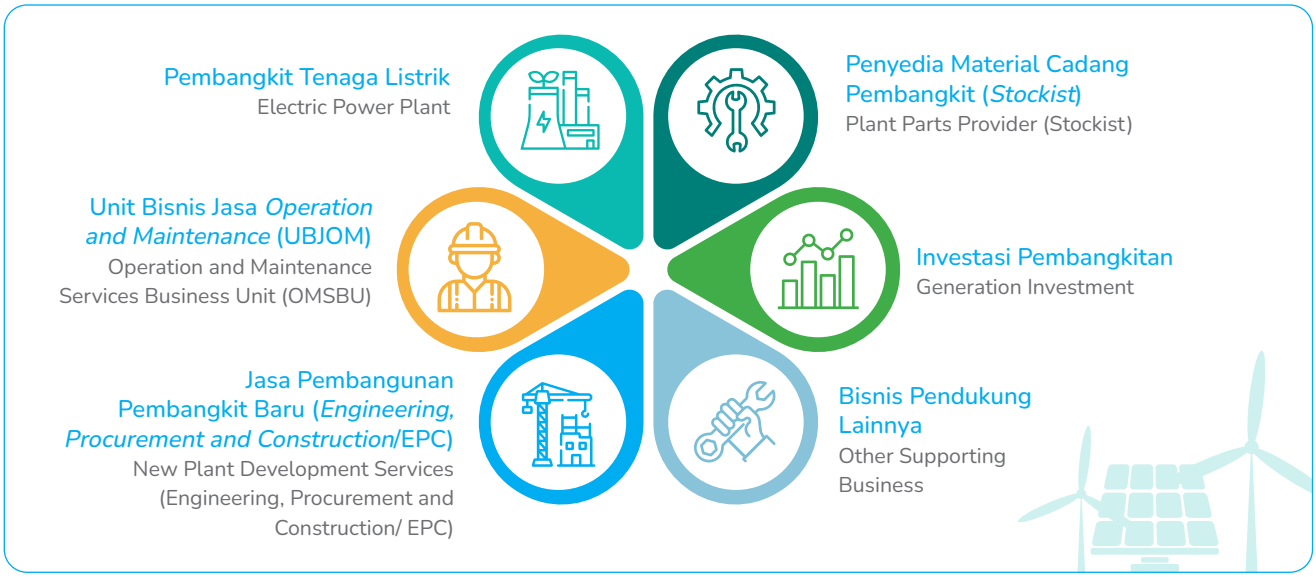

Pembangkit Tenaga Listrik
Power Plant

Usaha pembangkitan tenaga listrik dilakukan melalui pengelolaan Unit Pembangkitan (UP) Milik Sendiri. Unit Pembangkitan milik sendiri sebanyak 8 (delapan) UP dengan total kapasitas terpasang sebesar 7.211 MW yang tersebar di pulau Jawa dan di luar Jawa serta 1 (satu) Pembangkit Riset PLTS Cirata dengan kapasitas 1 MW yang berlokasi di Purwakarta, Jawa Barat. Selain pembangkit yang telah beroperasi, PJB juga memiliki Unit Pembangkit dalam tahap pengembangan yaitu *Add On* Muara Tawar Blok 3 dan 4 dengan kapasitas 500 MW.

PLN NP manages power plant business through the management of Owned Generation Unit. There are 8 (eight) generation units with a total installed capacity of 7,211 MW spread across the Java island and outside Java and 1 (one) Cirata SPP Research Plant with a capacity of 1 MW located in Purwakarta, West Java. Apart from the operating power plants, PLN NP also has Generating Unit in the development stage, namely Muara Tawar Block 3 and 4 Add On with a capacity of 500 MW.

Tabel Unit Pembangkitan Milik Sendiri
Table of Owned Generation Units

No	Unit Pembangkitan Generation Unit	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Bahan Bakar Fuel	Lokasi Location
Unit Pembangkit Eksisting Existing Generating Unit				
1.	UP Gresik Gresik GU	2.219	Minyak dan gas Oil and gas	Gresik, Jawa Timur Gresik, East Java
2.	PLTMG Bawean PLTMG Bawean	3	Gas	Bawean, Jawa Timur Bawean, East Java
3.	UP Muara Tawar Muara Tawar GU	1.928	Minyak dan gas Oil and gas	Bekasi, Jawa Barat Bekasi, West Java
4.	UP Cirata Cirata GU	1.008	Tenaga air Hydro	Purwakarta, Jawa Barat Purwakarta, West Java
5.	UP Muara Karang Muara Karang GU	909	Minyak dan gas Oil and gas	Pluit, Jakarta

No	Unit Pembangkitan Generation Unit	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Bahan Bakar Fuel	Lokasi Location
6.	UP Paiton Paiton GU	800	Batubara Coal	Pluit, Jakarta
7.	UP Brantas Brantas GU	275	Tenaga sir Hydro	Malang, Jawa Timur Malang, East Java
8.	PLTD Suppa Suppa DPP	68	Diesel	Sulawesi Selatan South Sulawesi
Unit Pembangkit Riset Research Generation Unit				
9.	PLTS Cirata Cirata SPP	1	Tenaga surya Solar	Purwakarta, Jawa Barat Purwakarta, West Java
Unit Dalam Tahap Pengembangan Unit under development				
10.	*Add On* Muara Tawar Blok 3 dan 4 Muara Tawar Add On Block 3 and 4	500	Gas	Bekasi, Jawa Barat Bekasi, West Java

Unit Bisnis Jasa *Operation & Maintenance* Pembangkit (UBJOM)

Power Plant Operation & Maintenance Services Business Unit

Pelayanan jasa operasi dan pemeliharaan (O&M) dilakukan dengan mekanisme penyampaian langsung ke pelanggan berdasarkan Kontrak Jasa O&M. Jasa O&M dilakukan langsung oleh PLN NP maupun melalui Entitas Anak (PT PJB Services) dan Ventura Bersama (PT Komipo PJB).

Total kapasitas pembangkit yang dikelola PLN NP melalui jasa O&M sebesar 6.246,6 MW yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) lokasi. Selain itu, PLN NP juga mengelola Jasa O&M pada unit pembangkit IPP (terdapat kepemilikan saham PLN NP) sebesar 400 MW yang tersebar di 2 (dua) lokasi.

Operation and Maintenance (O&M) services are performed with a direct delivery mechanism to customers based on the O&M Service Contract. O&M services are performed directly by PLN NP or through its Subsidiary (PT PJB Services) and Joint Venture (PT Komipo PJB).

Total generating capacity managed by PLN NP through O&M services amounted to 6,246.6 MW spread across 27 (twenty seven) locations. Moreover, PLN NP also manages O&M Services on IPP generating units (there is PLN NP share ownership) of 400 MW spread across 2 (two) locations.

Tabel Unit Bisnis Jasa O&M PLN NP

Table of PLN NP O&M Services Business Unit

No	Unit Pembangkitan Generation Unit	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Bahan Bakar Fuel	Lokasi Location	UBJOM OMSBU
Jasa O&M FTP-1 Jawa (3.610 MW) Java FTP-1 O&M Services (3,610 MW)					
1.	PLTU Rembang Rembang CFPP	2x315	Batubara Coal	Rembang, Jawa Tengah Rembang, Central Java	Jawa Java
2.	PLTU Indramayu Indramayu CFPP	3x330	Batubara Coal	Indramayu, Jawa Timur Indramayu, East Java	Jawa Java
3.	PLTU Pacitan Pacitan CFPP	2x315	Batubara Coal	Pacitan, Jawa Timur Pacitan, East Java	Jawa Java
4.	PLTU Paiton 9 Paiton 9 CFPP	1x660	Batubara Coal	Probolinggo, Jawa Timur Probolinggo, East Java	Jawa Java
5.	PLTU Tanjung Awar-awar Tanjung Awar-awar CFPP	2x350	Batubara Coal	Tuban, Jawa Timur Tuban, East Java	Jawa Java

No	Unit Pembangkitan Generation Unit	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Bahan Bakar Fuel	Lokasi Location	UBJOM OMSBU
Jasa O&M Pembangkit PLN di *Site* PJB (1.468,3 MW) O&M Services for PLN Power Plants at PJB Site (1,468.3 MW)					
6.	PLTGU Muara Karang Blok 2 Muara Karang Block 2 CCPP	710	Gas	Pluit, Jakarta	Jawa Java
7.	PLTGU Muara Tawar Blok 5 Muara Tawar Block 5 CCPP	242	Gas	Bekasi, Jawa Barat Bekasi, West Java	Jawa Java
8.	PLTGU Muara Karang Blok 3 Peaker Muara Karang Block 3 Peaker CCPP	500	Gas	Pluit, Jakarta	Jawa Java
9.	PLTA Ampel Gading Ampel Gading HPP	2x5	Tenaga air Hydro	Malang, Jawa Timur Malang, East Java	Jawa Java
10.	PLTA Wonorejo Wonorejo HPP	1x6,3	Tenaga air Hydro	Tulungagung, Jawa Timur Tulungagung, East Java	Jawa Java
Jasa O&M Luar Jawa (844,3 MW) Outside Java O&M Services (844.3 MW)					
11.	PLTMG Arun Arun MHPP	19x9,7	Gas	Aceh	Luar Jawa Outside Java
12.	PLTU Tenayan Tenayan CFPP	2x110	Batubara Coal	Riau	Luar Jawa Outside Java
13.	PLTU Kaltim Teluk Kaltim Teluk CFPP	2x110	Batubara Coal	Kalimantan Timur East Kalimantan	Luar Jawa Outside Java
14.	PLTU Pulang Pisau Pulang Pisau CFPP	2x60	Batubara Coal	Kalimantan Tengah Central Kalimantan	Luar Jawa Outside Java
15.	PLTU Sambelia Sambelia CFPP	2x50	Batubara Coal	Nusa Tenggara Barat West Nusa Tenggara	Luar Jawa Outside Java

Jasa O&M yang dikelola PLN NP melalui Entitas Anak yaitu PT PJB Services dan berada di luar Jawa sebesar 324 MW tersebar di 12 (dua belas) lokasi sebagai berikut:

O&M services managed by PLN NP through its subsidiary PT PJB Services and located outside Java amounted to 324 MW spread across 12 (twelve) locations as follows:

Tabel Unit Bisnis Jasa O&M PLN NP oleh Entitas Anak
Table of PLN NP O&M Services Business Units by Subsidiaries

No	Unit Pembangkitan Generation Unit	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Bahan Bakar Fuel	Lokasi Location
1.	PLTU Ampana Ampana CFPP	2x3	Batubara Coal	Sulawesi Tengah Central Sulawesi
2.	PLTU Amurang Amurang CFPP	2x25	Batubara Coal	Sulawesi Utara North Sulawesi
3.	PLTU Anggrek Anggrek CFPP	2x25	Batubara Coal	Gorontalo
4.	PLTU Bangka Bangka CFPP	2x30	Batubara Coal	Bangka Belitung
5.	PLTU Belitung Baru Belitung Baru Unit 3	2x16,5	Batubara Coal	Bangka Belitung
6.	PLTU Bolok Bolok CFPP	2x16,5	Batubara Coal	Nusa Tenggara Timur East Nusa Tenggara
7.	PLTU Kendari Unit 1 & 2 Unit 1 & 2 Kendari CFPP	2x10	Batubara Coal	Sulawesi Tenggara Southeast Sulawesi
8.	PLTU Kendari Unit 3 Unit 3 Kendari CFPP	1x10	Batubara Coal	Sulawesi Tenggara Southeast Sulawesi

No	Unit Pembangkitan Generation Unit	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Bahan Bakar Fuel	Lokasi Location
9.	PLTU Ketapang Ketapang CFPP	2x10	Batubara Coal	Kalimantan Barat West Kalimantan
10	PLTU Ropa (Ende) Ropa (Ende) CFPP	2x7	Batubara Coal	Nusa Tenggara Timur Esat Nusa Tenggara
11.	PLTU Tembilahan Tembilahan CFPP	2x7	Batubara Coal	Indragili Hilir, Riau
12.	PLTU Tidore Tidore CFPP	2x7	Batubara Coal	Maluku Utara North Maluku

Jasa Pembangunan Pembangkit Baru (*Engineering, Procurement and Construction*/ EPC)

New Power Plant Development Services (Engineering, Procurement and Construction/ EPC)

PLN NP menjalankan jasa pembangunan pembangkit baru (*Engineering Procurement and Construction* /EPC) melalui Entitas Anak yaitu PT Rekadaya Elektrika yang tersebar di 4 (empat) lokasi sebagai berikut:

PLN NP operates new power plant construction services (Engineering Procurement and Construction /EPC) through its subsidiary, PT Rekadaya Elektrika, located in 4 (four) locations as follows:

Tabel Unit Pembangkitan EPC PLN NP

Table of PLN NP EPC Generation Units

No	Unit Pembangkitan Generation Unit	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Bahan Bakar Fuel	Lokasi Location
1.	PLTU Timika (Sorong) Timika (Sorong) CFPP	4x7	Batubara Coal	Papua
2.	PLTU Bima Bima CFPP	2x10	Batubara Coal	Nusa Tenggara Barat West Nusa Tenggara
3.	PLTU Sofifi Sofifi CFPP	2x3	Batubara Coal	Maluku Utara North Maluku
4.	PLTU Ende Sofifi CFPP	2x7	Batubara Coal	Nusa Tenggara Timur East Nusa Tenggara

Penyedia Material Cadang Pembangkit *(Stockist)*

Power Plant Spare Parts Provider (Stockist)

Bidang usaha jasa *stockist* saat ini dikelola langsung oleh Entitas Anak yaitu PT PLN SC, untuk melayani kebutuhan suku cadang pembangkitan, penyediaan *services*, dan dukungan *retrofit* kepada Pelanggan PLTU dan Pelanggan Non-PLTU di seluruh Indonesia yang berasal dari PT PLN (Persero), PLN Nusantara Power, PLN Indonesia Power, dan IPP serta termasuk memberikan dukungan kepada Energi Baru Terbarukan (EBT).

Stockist services business is currently managed directly by the Subsidiary, PT PLN SC, to serve the needs of generation spare parts, provision of services, and retrofit support to CFPP Customers and Non-CFPP Customers throughout Indonesia from PT PLN (Persero), PLN Nusantara Power, PLN Indonesia Power, and IPPs and including providing support to New Renewable Energy (NRE).

Berikut adalah rincian 36 (tiga puluh enam) lokasi usaha jasa *stockist*:

The following are details of 36 (thirty-six) stockist service business locations:

Pelanggan *Stockist* PLTU
CFPP Stockist Customer

Tabel Pelanggan *Stockist* PLTU
Table of CFPP Stockist Customers

No	Unit Pembangkitan Generation Unit	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Bahan Bakar Fuel	Lokasi Location
Regional Jawa (10.130 MW) Java Region (10,130 MW)				
1.	PLTU Suralaya 8 Suralaya 8 CFPP	1x625	Batubara Coal	Merak, Jawa Barat Merak, West Java
2.	PLTU Labuan Labuan CFPP	2x300	Batubara Coal	Pandeglang, Banten
3.	PLTU Pelabuhan Ratu Pelabuhan Ratu CFPP	3x350	Batubara Coal	Sukabumi, Jawa Barat Sukabumi, West Java
4.	PLTU Adipala Adipala CFPP	1x660	Batubara Coal	Cilacap, Jawa Tengah Cilacap, Central Java
5.	PLTU Lontar Lontar CFPP	3x315	Batubara Coal	Tangerang, Banten
6.	PLTU Indramayu Indramayu CFPP	3x330	Batubara Coal	Indramayu, Jawa Barat Indramayu, West Java
7.	PLTU Pacitan Pacitan CFPP	2x315	Batubara Coal	Pacitan, Jawa Timur Pacitan, East Java
8.	PLTU Paiton 9 Paiton 9 CFPP	1x660	Batubara Coal	Probolinggo, Jawa Timur Probolinggo, East Java
9.	PLTU Rembang Rembang CFPP	2x315	Batubara Coal	Rembang, Jawa Tengah Rembang, Central Java
10.	PLTU Tanjung Awar-awar Tanjung Awar-awar CFPP	2x350	Batubara Coal	Tuban, Jawa Timur Tuban, East Java
11.	PLTU Tanjung Jati B Tanjung Jati B CFPP	2x660	Batubara Coal	Jepara, Jawa Tengah Jepara, Central Java
12.	PLTU TJBPS TJBPS CFPP	2x660	Batubara Coal	Jepara, Jawa Tengah Jepara, Central Java
Regional Sumatera (720 MW) Sumatera Region (409 MW)				
13.	PLTU Pangkalan Susu Pangkalan Susu CFPP	2x220	Batubara Coal	Sumatera Utara North Sumatera
14.	PLTU Bangka (Air Anyir #3) Bangka (Air Anyir #3) CFPP	2x30	Batubara Coal	Bangka Belitung
15.	PLTU Tenayan Tenayan CFPP	2x110	Batubara Coal	Pekanbaru, Riau
Regional Kalimantan (409 MW) Regional Kalimantan (409 MW)				
16.	PLTU Kaltim Teluk Kaltim Teluk CFPP	2x110	Batubara Coal	Kalimantan Timur East Kalimantan
17.	PLTU Pulang Pisau Pulang Pisau CFPP	2x60	Batubara Coal	Kalimantan Tengah Central Kalimantan
18.	PLTU Muara Jawa Muara Jawa CFPP	2x27,5	Batubara Coal	Kalimantan Timur East Kalimantan
19.	PLTU Sanggau Sanggau CFPP	2x7	Batubara Coal	Kalimantan Barat West Kalimantan

No	Unit Pembangkitan Generation Unit	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Bahan Bakar Fuel	Lokasi Location
Regional Sulawesi (170 MW) Sulawesi Region (170 MW)				
20.	PLTU Amurang Amurang CFPP	2x25	Batubara Coal	Sulawesi Utara North Sulawesi
21.	PLTU Barru Barru CFPP	2x50	Batubara Coal	Barru, Sulawesi Selatan Barru, South Sulawesi
22.	PLTU Kendari Unit 1 & 2 Unit 1 & 2 Kendari CFPP	2x10	Batubara Coal	Konawe, Sulawesi Tenggara Konawe, Southeast Sulawesi
Regional Papua (20 MW) Papua Region (20 MW)				
23.	Holtekamp	2x10	Batubara Coal	Jayapura, Papua
Regional Nusa Tenggara (111 MW) Nusa Tenggara Region (111 MW)				
24.	PLTU Jeranjang Jeranjang CFPP	2x25	Batubara Coal	Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat West Lombok, West Nusa Tenggara
25.	PLTU Ropa Ropa CFPP	2x7	Batubara Coal	Nusa Tenggara Timur East Nusa Tenggara
26.	PLTU Bolok Bolok CFPP	2x16,5	Batubara Coal	Kupang, Nusa Tenggara Timur Kupang, East Nusa Tenggara
27.	PLTU Sumbawa Barat Sumbawa Barat CFPP	2x7	Batubara Coal	Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat West Sumbawa, West Nusa Tenggara

Pelanggan *Stockist* Non-PLTU
Non-CFPP Stockist Customer

Tabel Pelanggan *Stockist* Non-PLTU
Table of Non-CFPP Stockist Customers

No	Unit/Perusahaan Unit/Company
Regional Jawa Java Region	
28.	Kantor Pusat Indonesia Power Indonesia Power Head Office
29.	Kantor Pusat PLN NP PLN NP Head Office
30.	PLN Pusertif
31.	UJLJ
32.	Cogindo
33.	Indo Ridhlotama

No	Unit/Perusahaan Unit/Company
Regional Sulawesi Sulawesi Region	
34.	UPK Kendari
Regional Nusa Tenggara Nusa Tenggara Region	
35.	UPK Timor
36.	UPK Tambora

Investasi Pembangkitan
Generation Investment

Usaha Kepemilikan Saham di Perusahaan O&M
Shareholding Business in O&M Company

PLN NP memiliki perusahaan patungan, yakni PT Komipo PJB yang melakukan jasa O&M pada unit pembangkit milik PT PLN (Persero) di Tanjung Jati B #3 dan #4 dengan kapasitas 2x660 MW.

PLN NP has a joint venture company, namely PT Komipo PJB, which performs O&M services on generating units owned by PT PLN (Persero) in Tanjung Jati B #3 and #4 with a capacity of 2x660 MW.

Usaha Kepemilikan *Independent Power Producer* (IPP)
Independent Power Producer (IPP) Ownership Business

PLN NP mengembangkan pembangkit IPP melalui perusahaan patungan sebesar 5.665 MW sebagai berikut:

PLN NP is developing an IPP power plant through a joint venture of 5,665 MW as follows:

Tabel Unit Pembangkitan IPP PLN NP
Table of PLN NP IPP Generation Units

No	Unit Pembangkitan Generation Unit	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Bahan Bakar Fuel	Lokasi Location
Pembangkit IPP Beroperasi (4.710 MW) Pembangkit IPP Beroperasi (4.710 MW)				
1.	PLTA Asahan Asahan CFPP	2x90	Tenaga air Hydro	Sumatera Utara North Sumatera
2.	PLTU Banjarsari Banjarsari CFPP	2x110	Batubara Coal	Sumatera Utara North Sumatera
3.	PLTU Jawa 7 Unit 1 dan 2 Unit 1 and 2 Jawa 7 CFPP	2x1.000	Batubara Coal	Serang, Banten
4.	PLTU Cilacap Unit #1 dan #2 Unit #1 and #2 Cilacap CFPP	2x300	Batubara Coal	Cilacap, Jawa Tengah Cilacap, Central Java
5.	PLTU Cilacap Unit #3 (Ekspansi 1) Unit #3 Cilacap (Expansion 1) CFPP	1x660	Batubara Coal	Cilacap, Jawa Tengah Cilacap, Central Java
6.	PLTU Cilacap Ekspansi 2 Expansion 2 Cilacap CFPP	1x1.000	Batubara Coal	Cilacap, Jawa Tengah Cilacap, Central Java
7.	PLTU Mamuju Mamuju CFPP	2x25	Batubara Coal	Mamuju, Sulawesi Barat Mamuju, West Sulawesi
Dalam Tahap Pengembangan (955 MW) Under Development (955 MW)				
8.	PLTA Batang Toru Batang Toru CFPP	4x127,5	Tenaga air Hydro	Tapanuli Selatan South Tapanuli
9.	PLTS Terapung Cirata Terapung Cirata CFPP	145	Surya Solar	Purwakarta, Jawa Barat Purwakarta, West Java
10.	PLTU Sumbagsel 1 Sumbagsel 1 CFPP	2x150	Batubara Coal	Sumatera Selatan South Sumatera

Bisnis Pendukung Lainnya
Other Supporting Business

Usaha Jasa *Enterprise Asset Management* (EAM)
Enterprise Asset Management (EAM) Services Business

EAM merupakan segmen usaha bisnis PLN NP dengan kegiatan mengelola aset Perusahaan agar memberikan kontribusi yang optimal melalui penerapan tata kelola aset yang disesuaikan dengan kebutuhan proses bisnis pada suatu Unit Kerja. Hal tersebut merupakan penciptaan nilai tambah dalam proses bisnis pembangkit tenaga listrik dan jasa pendukung lainnya.

Pada tahun 2022, PLN NP telah melakukan implementasi EAM di sejumlah unit PLN, antara lain: EAM Gorontalo, EAM UID Jatim, EAM Asam- Asam, EAM UPK Flores dan UPK Timor (Tahap I), EAM UPK Singkawang (Tahap II dan III).

PLN NP EAM is a business segment with activities to manage the Company's assets in order to provide optimal contribution through the implementation of asset governance tailored to the needs of business processes in a Work Unit. It represents the creation of added value in the business process of power plants and other supporting services.

In 2022, PLN NP implemented EAM in several PLN units, including: Gorontalo EAM, UID Jatim EAM, Asam Asam EAM, UPK Flores and UPK Timor EAM (Phase I), UPK Singkawang EAM (Phase II and III).

Usaha Jasa *Maintenance, Repair, and Overhaul* (MRO)
Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) Services Business

Jasa MRO pembangkit merupakan pekerjaan pemeliharaan unit pembangkit sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mengembalikan kondisi pembangkit kepada performa terbaiknya.

Pada tahun 2022, PLN NP melakukan *Major Inspection* 150 MW CCP Chandpur di Bangladesh, RLA *Boiler* Unit #2 PT S2P, Jasa Pengukuran PA *Flow* PLTU Keban Agung Unit #2 dan Jasa *Expert Tunning* DEH PLTU Keban Agung.

Power plant MRO services are maintenance work on power plant units as needed in order to restore the condition of the power plant to the best performance.

In 2022, PLN NP conducted Major Inspection on 150 MW CCP Chandpur in Bangladesh, RLA Boiler Unit #2 PT S2P, PA Flow Measurement Services Keban Agung CFPP Unit #2 and Expert Tunning Services DEH Keban Agung CFPP.

Usaha Optimalisasi Aset
Asset Optimization Effort

Kegiatan usaha ini bertujuan untuk mengoptimalkan aset yang ada di area unit milik PLN NP agar memiliki nilai guna dan memberikan pemasukan terhadap pendapatan *Non-Core* PLN NP. Kegiatan usaha yang dilakukan antara lain adalah pemanfaatan aset, pemanfaatan lahan atau bangunan, fasilitas pendukung, serta *tools* yang dimiliki Perusahaan.

Pada tahun 2022, kegiatan usaha optimalisasi aset yang dilakukan antara lain pemanfaatan *fly ash bottom ash* (FABA), pendayagunaan aset properti, pengelolaan *guest house*/wisma/ objek wisata, dan pemakaian lahan di BPWC untuk pembangunan PLTS Terapung 145 MWAC.

This business activity purposes to optimize the existing assets in PLN NP's unit area so as to have use value and provide income to PLN NP's Non-Core income. Business activities carried out include asset utilization, land or building utilization, supporting facilities, and tools owned by the Company.

In 2022, the asset optimization business activities carried out include the utilization of fly ash bottom ash (FABA), utilization of property assets, management of guest houses/homestay/ tourist attractions, and the land use at BPWC for the construction of 145 MWAC Floating Solar Power Plant.

PJB Academy
PJB Academy

Menyediakan layanan pembelajaran, pelatihan dan sertifikasi yang berstandar sesuai dengan kompetensi DJK Kementerian ESDM hingga standar internasional. PJB Academy Campus berada di beberapa lokasi yaitu:

a. **Kampus UP Gresik**: Manajemen Aset;
b. **Kampus UP Paiton & UP Brantas**: Manajemen Pembangkit Listrik & K3;
c. **Kampus UP Muara Karang**: *Remaining Life Assessment* (RLA);
d. **Kampus UP Cirata**: Pembangkit EBT & Pengembangan Usaha;
e. **Kampus Surabaya**: Kepemimpinan & Budaya Perusahaan.

Providing standardized learning, training and certification services according to the competencies by the Ministry of Energy and Mineral Resources DGCE to international standards. PJB Academy Campus is located in several locations, namely:

a. **Gresik GU Campus**: Asset Management;
b. **Paiton GU & Brantas GU Campus**: Power Plant Management & OHS;
c. **Muara Karang GU Campus**: Remaining Life Assessment (RLA);
d. **Cirata GU Campus**: Renewable Energy Generation & Business Development;
e. **Surabaya Campus**: Leadership & Corporate Culture.

Laboratorium Kalibrasi
Calibration Laboratory

Laboratorium terakreditasi oleh KAN untuk mengkalibrasi dan mengefisiensikan biaya pemeliharaan peralatan pembangkit listrik.

KAN-accredited laboratory to calibrate and streamline power plant equipment maintenance costs.

Skema Penyaluran Tenaga Listrik

Scheme of Electricity Transmission

PT PLN Nusantara Power

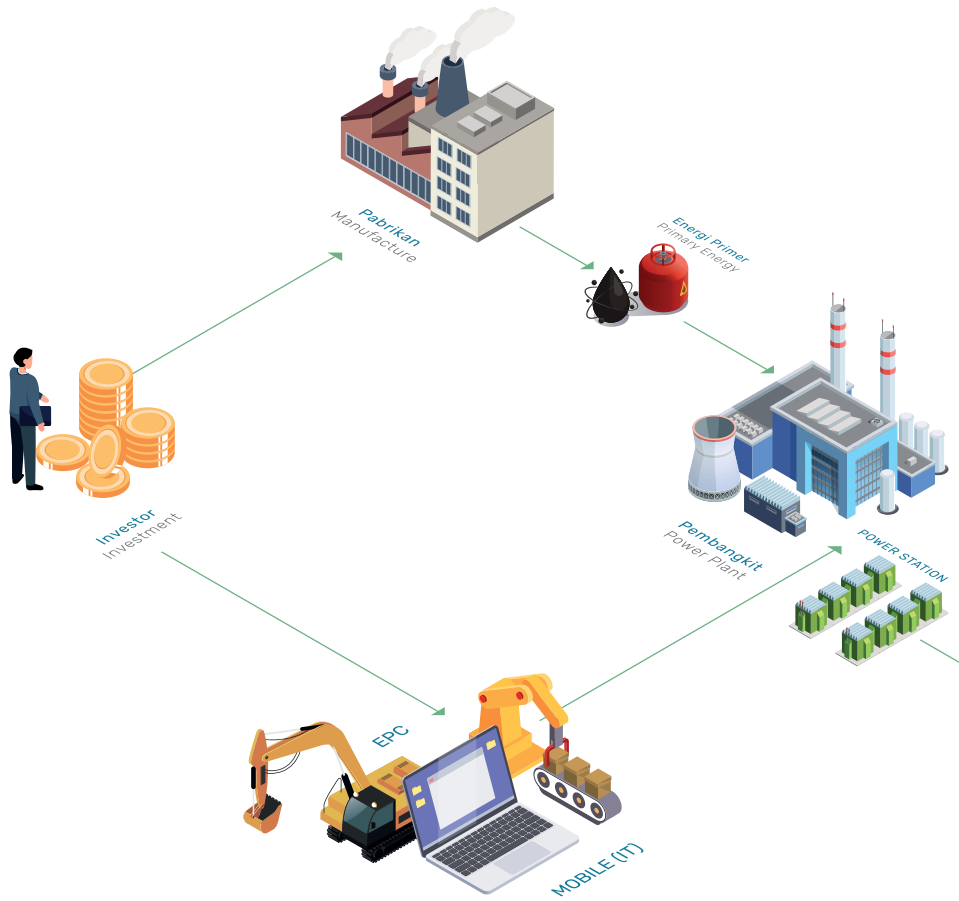

Porsi PLN NP dalam skema penyaluran listrik adalah pada tahap pembangkitan yaitu penyediaan tenaga listrik. Kontribusi Perusahaan pada penyediaan tenaga listrik nasional didukung oleh sinergi usaha Entitas Anak dan afiliasinya yang tergabung dalam PLN NP Grup.

PLN NP's portion in the electricity transmission scheme is at the electric power generator stage, namely the electricity provision. The Company's contribution to the provision of national electricity is supported by the business synergy of its Subsidiaries and affiliates incorporated in the PLN NP Group.

Kegiatan bisnis pembangkit tenaga listrik terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik. Porsi PLN NP dalam skema penyaluran listrik adalah pada tahap pembangkitan yaitu penyediaan tenaga listrik. Selanjutnya tenaga listrik disalurkan (transmisi) melalui Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sistem Jawa-Bali dan didistribusikan kepada pelanggan industri maupun rumah tangga oleh PT PLN (Persero).

The business activities of electricity generation consist of 3 (three) stages, namely electric power generator, transmission and distribution of electricity. PLN NP's portion in the electricity transmission scheme is at the electric power generator stage, namely the electricity provision. Furthermore, electricity is transmitted (transmission) through the Java-Bali system High Voltage Air Lines (SUTT) and distributed to industrial and household customers by PT PLN (Persero).

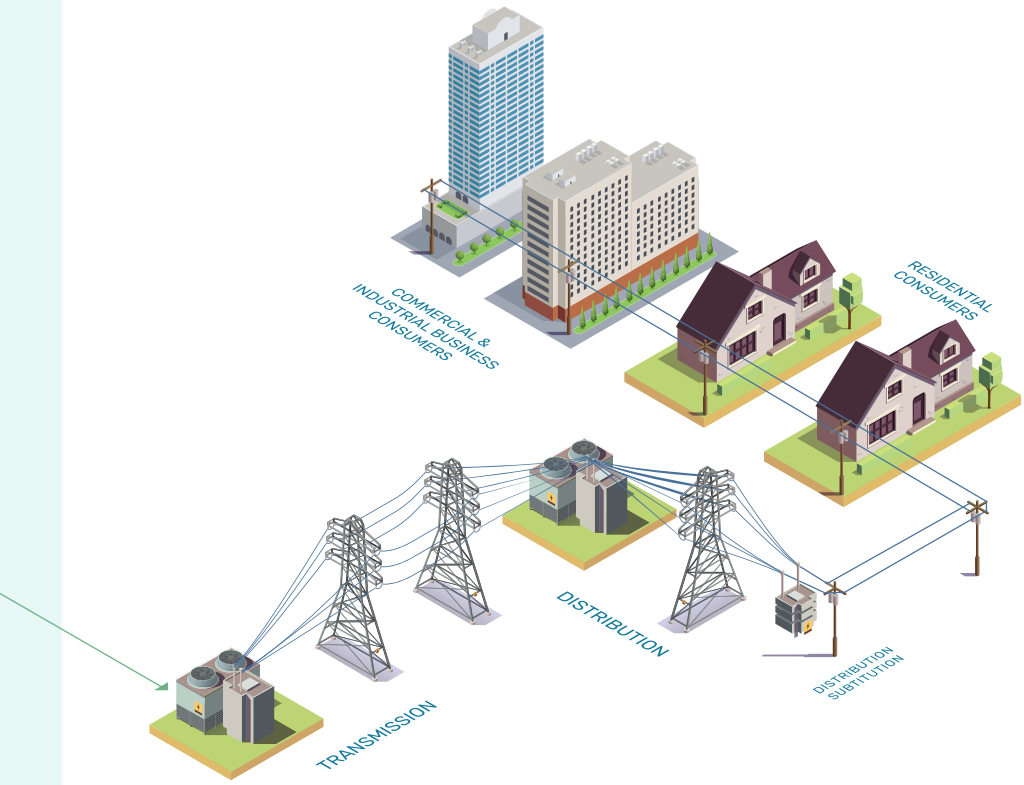

PT PLN (Persero)

Sinergi Grup PLN NP Perkuat Kontribusi pada Penyediaan Tenaga Listrik Nasional

Synergy of PLN NP Group Strengthens Contribution to National Electricity Supply

Sinergi dan integrasi usaha Grup PLN NP merupakan salah satu upaya pencapaian aspirasi Visi untuk menjadi Terdepan dan Terpercaya dalam Bisnis Energi Berkelanjutan di Asia Tenggara. Lingkup sinergi usaha Grup PLN NP mencakup bidang rekayasa teknik (EPC); pengelolaan pembangkit yang milik sendiri; pembangkit yang dikelola maupun berupa investasi; penyediaan jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit; pendanaan; penyediaan SDM untuk jasa operasi dan pemeliharaan; sertifikasi kompetensi SDM ketenagalistrikan; dan juga penyediaan suku cadang pembangkit.

The synergy and integration of the PLN NP Group's business is one of the efforts to achieve the Vision aspiration to become the Leading and Trusted in Sustainable Energy Business in Southeast Asia. PLN NP Group's business synergy covers engineering (EPC) sector; management of self-owned power plants; managed power plants as well as investments; provision of power plant operation and maintenance services; funding; provision of human resources for operation and maintenance services; human resource competency certification in electricity; and also provision of power plant spare parts.

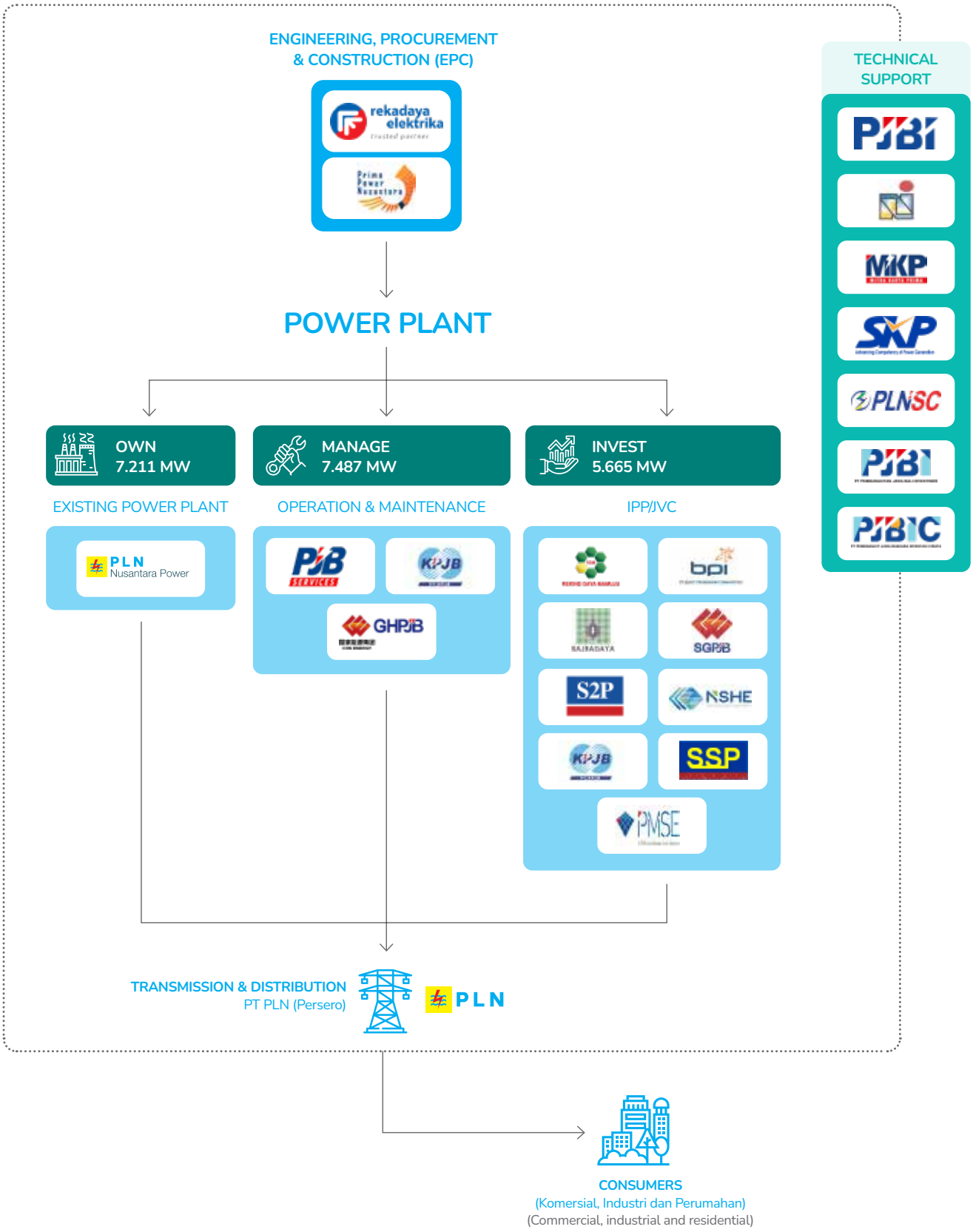
ENGINEERING, PROCUREMENT & CONSTRUCTION (EPC)
rekadaya elektrika
Prima Power Nusantara
POWER PLANT
OWN 7.211 MW
MANAGE 7.487 MW
INVEST 5.665 MW
EXISTING POWER PLANT
OPERATION & MAINTENANCE
IPP/JVC
PLN Nusantara Power
PJB SERVICES
KPJB
GHPJB
bpi
SAJADAYA
SGPJB
S2P
NSHE
KPJB
SSP
PMSE
TECHNICAL SUPPORT
PJBI
MKP
SKP
PLNSC
PJBI
PJBIC
TRANSMISSION & DISTRIBUTION
PT PLN (Persero)
PLN
CONSUMERS
(Komersial, Industri dan Perumahan)
(Commercial, industrial and residential)

Visi, Misi dan Budaya Perusahaan
Vision, Mission and Corporate Culture

Internalisasi Budaya Perusahaan kepada seluruh karyawan PLN NP mampu memberikan dukungan pada proses pencapaian Visi dan Misi Perusahaan.

Corporate Culture Internalization to the entire PLN NP employees is able to provide support in the process of achieving the Company's Vision and Mission.

Dasar Pengesahan Visi dan Misi
Basis of Vision and Mission Ratification

Visi dan Misi Perusahaan ditinjau secara berkala dan telah dikaji untuk mengetahui kesesuaiannya dengan kondisi PLN NP saat ini dan dinamika industri listrik yang terjadi serta disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Periode Tahun 2020-2024 pada tanggal 30 Juli 2020 dan Keputusan Rapat Direksi di Luar Rapat No. 030/DIR/2020.

The Company's vision and mission are periodically reviewed and had been studied to determine their suitability with the current conditions of PLN NP's and the dynamics of the electricity industry that are occurring as well as got the approval from the Board of Directors and the Board of Commissioners in the Company's Long Term Plans (RJPP) for the 2020-2024 period of July 30, 2020, and the Board of Directors Meetings Resolutions Outside of Meetings No. 030/DIR/2020.

Visi
Vision

Menjadi Perusahaan Terdepan dan Terpercaya dalam Bisnis Energi Berkelanjutan di Asia Tenggara

To be the trusted leader company in sustainable energy of South East Asia

Makna Visi

1. **Perusahaan Terdepan dan Terpercaya**, bermakna bahwa PLN NP merupakan perusahaan pionir yang menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan tata kelola perusahaan kelas dunia dengan indikator operasional dan finansial terbaik di Asia Tenggara sehingga meningkatkan kredibilitas Perusahaan untuk menjadi pilihan utama dalam melakukan bisnis.
2. **Bisnis Energi**, bermakna bahwa PLN NP memiliki kompetensi di bidang pembangkitan fosil dan energi terbarukan sesuai tren global mendatang dengan pengembangan usaha yang meliputi penjualan tenaga listrik, investasi bidang energi, dan jasa-jasa lainnya.
3. **Berkelanjutan**, bermakna bahwa PLN NP bergerak dan berkembang secara terus menerus dengan menjalankan bisnis eksisting, membangun dan mengembangkan bisnis baru serta berinovasi untuk meningkatkan *profit* dan *value* Perusahaan bagi *stakeholders*.

Vision Definition

1. **Trusted Leader Company** can be defined that PLN NP is the pioneer company running and developing its business based on the world-class corporate governance with the best operational and financial indicators in Southeast Asia, to increase the Company credibility to be the primary choice for partners in running business.
2. **Energy Business** can be defined that PLN NP has competence in the field of fossil generation and renewable energy following the upcoming global trend with business development including selling electricity, investing in energy, and other services.
3. **Sustainable** can be defined that PLN NP moves and develops continuously by running the existing businesses, building and developing new businesses, as well as innovating to increase the Company's profit and values for the stakeholders

Misi
Mission

- Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.
- Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.
- Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang *agile* dan adaptif.

- To conduct an innovative and collaborative, sustainably growing and environmentally-friendly energy business.
- To maintain the highest performance to provide added-value for the stakeholders.
- To attract interest and develop the best talent, and to run an agile and adaptive organization.

Makna Misi

1. **Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan** artinya PLN NP berfokus pada bisnis energi yang tidak terbatas pada pembangkitan *heavy asset*, melainkan *asset light* dan energi inovatif lainnya untuk mencapai diversifikasi usaha sehingga dapat meningkatkan nilai pertumbuhan Perusahaan secara berkelanjutan. PLN NP juga turut berpartisipasi aktif membentuk kerjasama dengan perusahaan lain melalui skema penugasan maupun IPP sesuai kaidah tata kelola perusahaan yang baik dan berorientasi pada keberlangsungan lingkungan.
2. **Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi *stakeholder*** artinya dalam menjalankan bisnisnya, PLN NP berkomitmen untuk menjaga tingkat kinerja tertinggi baik dari sisi operasional maupun finansial sehingga mendukung pemegang saham dalam memberikan *value creation* yang optimal.
3. **Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang agile dan adaptif** artinya PLN NP berfokus dalam pengembangan kapabilitas dan kompetensi karyawan sesuai strategi pengembangan usaha dari aspek pengembangan bisnis, teknologi sampai dengan semua pendukung penting yang harus dimiliki oleh PLN NP. Diharapkan menghasilkan talenta terbaik sehingga PLN NP menjadi Perusahaan yang diminati serta organisasi yang terus *agile* dan adaptif.

Mission Definition

1. **To conduct an innovative and collaborative, sustainably growing and environmentally-friendly energy business** means that PLN NP focuses on the energy business that is not limited to heavy asset generation, but light assets and other innovative energies to achieve business diversification to sustainably increase the Company growth value. PLN NP also actively participates in collaborating with other companies through assignment schemes and IPP following the good corporate governance principles and environmental sustainability oriented.
2. **To maintain the highest performance to provide added value for the stakeholders** means that PLN NP in running business is committed to maintaining the highest performance level either from operational or financial perspective to support the shareholders in providing optimal value creation.
3. **To attract interest and develop the best talent, and to run an agile and adaptive organization** means that PLN NP focuses on developing capabilities and competencies of employees based on the Company's business development strategy from the aspects of business development up to the whole important supporters that PLN NP is required to have. It is expected to generate the best talents so that PLN NP is going to become the interested company and an organization continuing to be agile and adaptive.

Budaya Perusahaan
Corporate Culture

Sebagai Anak Perusahaan BUMN, PLN NP mengimplementasikan AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) sebagai *core values* di Perusahaan. Adopsi *core values* AKHLAK di Perusahaan sejak tanggal 9 November 2020.

As an SOE subsidiary, PLN NP implements AKHLAK (Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, Collaborative) as the Company's core values. The Company adopts AKHLAK as the core values since November 9, 2020.

AKHLAK

Core Values		Definisi Definition	Panduan Perilaku Code of Conduct
A	Amanah Trustworthy	Memegang teguh kepercayaan yang diberikan Upholding the trust given	- Memenuhi janji dan komitmen - Bertanggung-jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan - Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika - Keeping promises and commitments - Being responsible for the tasks, decisions, and actions taken - Upholding the moral and ethical values
K	Kompeten Competent	Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas Continuing to learn and develop capabilities	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik - Improving self-competence to respond to ever-changing challenges - Helping others in learning - Completing tasks with the highest quality
H	Harmonis Harmonious	Saling peduli dan menghargai perbedaan Caring for each other and respecting differences	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif - Respecting everyone regardless of background - Willing to help others - Building conducive work environment
L	Loyal	Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa negara Dedicated and prioritizing the interest of the nation and state	- Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara - Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar - Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika - Maintaining the good reputation of fellow employees, leaders, SEOs, and the State - Willing to sacrifice to achieve a greater goal - Adhering the leadership as long as it is not against the law and ethics
A	Adaptif Adaptive	Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Keep innovating and being enthusiastic in driving or facing changes	- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik - Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi - Bertindak proaktif - Quickly adapting to be better - Continuously making improvements to keep up with technological developments - Acting proactively
K	Kolaboratif Collaborative	Membangun kerja sama yang sinergis Building Synergistic Cooperation	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama - Providing opportunities for various parties to contribute - Open in working together to generate added value - Mobilizing the use of various resources for common goals

Struktur Organisasi

Organization Structure

Struktur Organisasi yang berlaku di akhir tahun 2022 adalah Struktur Organisasi yang mengacu pada Peraturan Direksi No. 026.P/019/DIR/2022 tanggal 21 September 2022. Adapun skema struktur organisasi PLN NP adalah sebagai berikut:

The applicable Organizational Structure at the end of 2022 is based on the Board of Directors Regulation No. 026.P/019/DIR/2022 dated September 21, 2022. The scheme of PLN NP organizational structure is as follows:

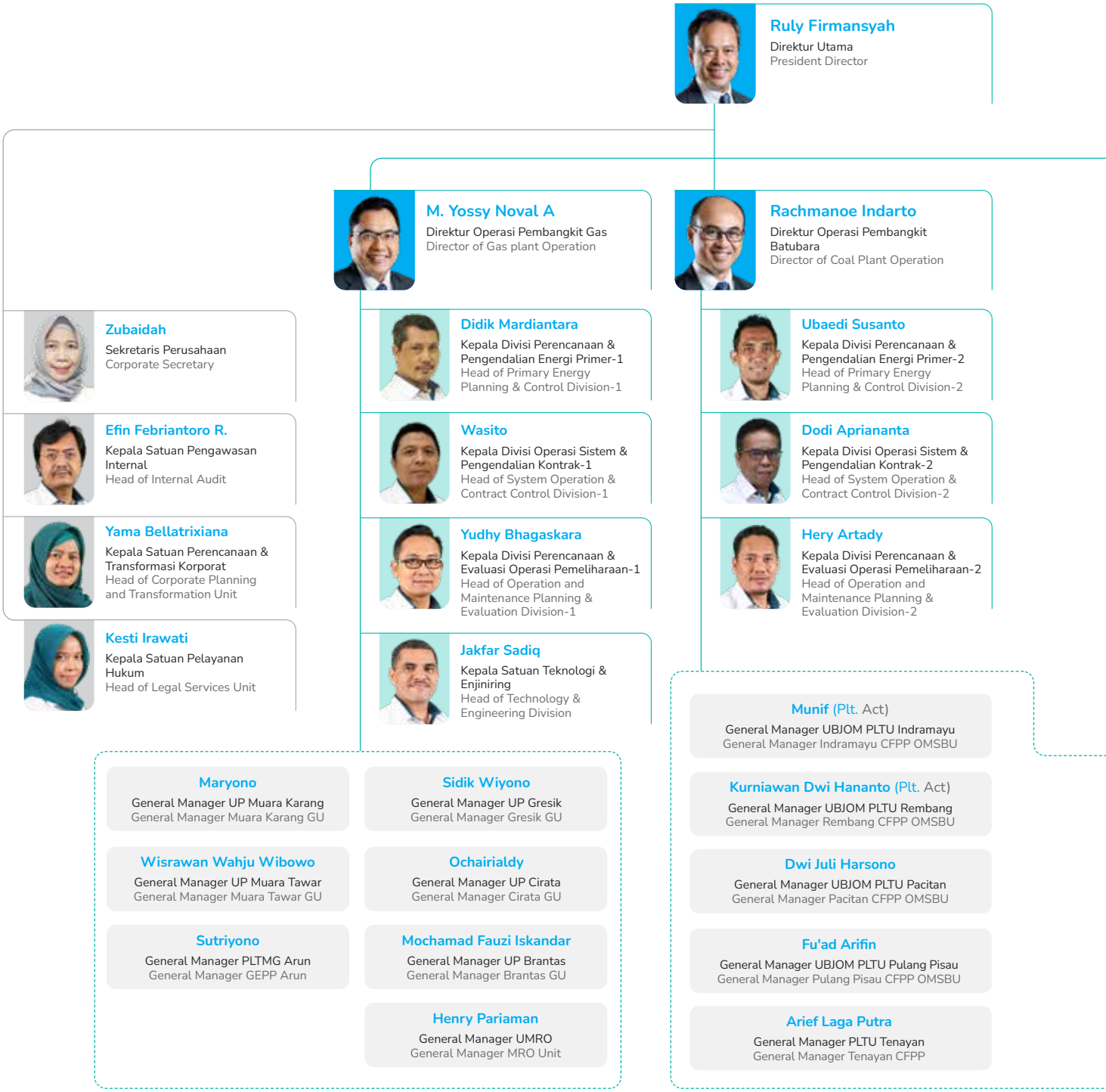

Muhamad Reza
Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga
Director of Business Development and Commerce

Retno Handayani
Kepala Divisi Niaga
Head of Commerce Division

Lusianna Ester
Kepala Divisi EBT dan Pengembangan Pembangkit
Head of NRE and Power Plant Development Division

Harjono
Kepala Divisi Konstruksi dan PMO
Head of Construction and PMO Division

Judi Rahmanu
Kepala Divisi Supply Chain Management
Head of Supply Chain Management Division

Abdi Nafi'
General Manager UBJOM PLTU Tanjung Awar-Awar
General Manager Tanjung Awar-Awar CFPP OMSBU

Agus Prastyo Utomo
General Manager UP Paiton
General Manager Paiton GU

Syarief Andrian
General Manager PLTU Kaltim Teluk
General Manager Kaltim Teluk CFPP

Achmad Djalaludin
General Manager PLTU Sambelia
General Manager Sambelia CFPP

Dwi Hartono
Direktur Keuangan
Director of Finance

Burhanuddin
Kepala Divisi Anggaran
Head of Budget Division

Niken Widhi Nugraheni
Kepala Divisi Perbendaharaan & Pajak
Head of Treasury and Tax Division

Eni Wulansari
Kepala Divisi Portofolio
Head of Portfolio Division

Mohammad Fauzan Jamah Sari
Kepala Divisi Akuntansi
Head of Accounting Division

Agus Wibawa
Kepala Satuan Kinerja Korporat & Pengembangan Sistem Manajemen
Head of Corporate Performance and Management System Development Unit

Gunawan Yudi Hariyanto
Kepala Satuan Manajemen Risiko & Kepatuhan
Head of Risk Management and Compliance Unit

Karyawan Aji
Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi
Director of Human Capital Management and Administration

Eny Mar'atus Solikah
Kepala Divisi Performance Management & Sistem Informasi Human Capital
Head of Performance Management and Human Capital Information System Division

Indarto Purbo Utomo
Kepala Divisi Sistem Human Capital & Organisasi
Head of Human Capital System and Organization Division

Oki Oktaviani
Kepala Divisi Pengembangan Talenta
Head of Talent Development Division

Vacant
Kepala Divisi Lingkungan dan K3-1
Head of Environment & HSE Division-1

Puspahadi
Kepala Divisi Lingkungan dan K3-2
Head of Environment & HSE Division-2

Bambang Hendrayanto
Kepala Bidang Umum & Administrasi
Head of General and Administration Division

Denik Putri Perdani
General Manager PJB Academy
General Manager PJB Academy

Berikut juga adalah struktur organisasi Dewan Komisaris dan Komite PLN NP di akhir tahun 2022:

The following is the organizational structure of PLN NP's Board of Commissioners and Committees at the end of 2022:

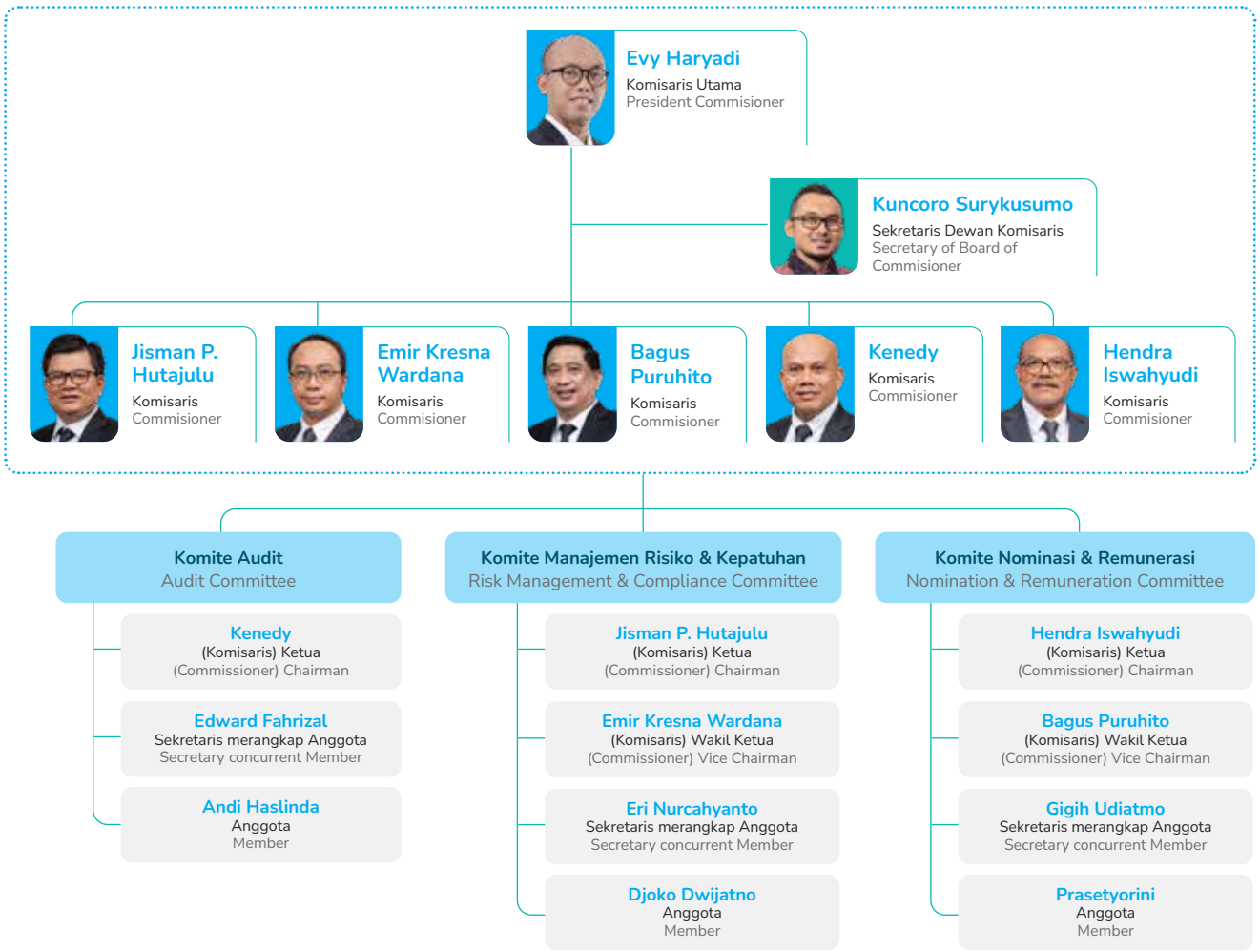

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Changes in the Composition of the Board of Commissioners

Sampai dengan komposisi Dewan Komisaris terakhir saat ini, terdapat 3 (kali) perubahan komposisi Dewan Komisaris. Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 21 September 2022, yang diaktakan melalui Akta Notaris No. 10 tanggal 14 Oktober 2022, dari Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta, terdapat pengangkatan Sdr. Evy Haryadi sebagai Komisaris Utama. Dan sesuai dengan keputusan RUPS tanggal 14 Desember 2022, yang diaktakan melalui Akta Notaris No. 2 tanggal 4 Januari 2023, dari Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta, terdapat pengangkatan Sdr. Kenedy sebagai Komisaris. Serta sesuai dengan keputusan RUPS tanggal 16 Juni 2023, terdapat pengangkatan Sdri. Ida Nuryatin Finahari sebagai Komisaris. Secara singkat, berikut ini disajikan kronologis komposisi Dewan Komisaris sepanjang tahun 2022:

Up to the current composition of the Board of Commissioners, there were 3 (three) changes in the composition of the Board of Commissioners. According to the resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS) dated September 21, 2022, notarized by Notarial Deed No. 10 dated October 14, 2022, of Muhammad Hanafi, S.H., Notary in Jakarta, Mr. Evy Haryadi was appointed as President Commissioner. And according to the GMS resolution dated December 14, 2022, notarized by Notarial Deed No. 2 dated January 4, 2023, by Muhammad Hanafi, S.H., Notary in Jakarta, Mr. Kenedy was appointed as Commissioner. And according to the GMS resolution dated June 16, 2023, Ms. Ida Nuryatin Finahari was appointed as Commissioner. In brief, the following is a chronology of the composition of the Board of Commissioners throughout 2022:

Tabel Kronologis Perubahan Komposisi Dewan Komisaris Sepanjang Tahun 2022

Table of the Chronology of the Board of Commissioners Composition Changes Throughout 2022

Komposisi Dewan Komisaris Periode 1 Januari 2022 – 21 September 2022 Composition of the Board of Commissioners on January 1, 2022 - September 21, 2022		Komposisi Dewan Komisaris Periode 21 September 2022 – 14 Desember 2022 Composition of the Board of Commissioners on September 21, 2022 - December 14, 2022		Komposisi Dewan Komisaris Periode 14 Desember 2022 – 16 Juni 2023 Composition of the Board of Commissioners on December 14, 2022 - June 16, 2023		Komposisi Dewan Komisaris Periode 16 Juni 2023 - saat ini Composition of the Board of Commissioners on June 16, 2023 - Present	
Jabatan Position	Nama Name	Jabatan Position	Nama Name	Jabatan Position	Nama Name	Jabatan Position	Nama Name
Komisaris Utama President Commissioner	Dedeng Hidayat	Komisaris Utama President Commissioner	Evy Haryadi	Komisaris Utama President Commissioner	Evy Haryadi	Komisaris Utama President Commissioner	Evy Haryadi
Komisaris Commissioner	Komang Parmita	Komisaris Commissioner	Komang Parmita	Komisaris Commissioner	Kenedy	Komisaris Commissioner	Kenedy
Komisaris Commissioner	Jisman P. Hutajulu	Komisaris Commissioner	Jisman P. Hutajulu	Komisaris Commissioner	Jisman P. Hutajulu	Komisaris Commissioner	Ida Nuryatin Finahari
Komisaris Commissioner	Hendra Iswahyudi	Komisaris Commissioner	Hendra Iswahyudi	Komisaris Commissioner	Hendra Iswahyudi	Komisaris Commissioner	Hendra Iswahyudi
Komisaris Commissioner	Emir Kresna Wardana	Komisaris Commissioner	Emir Kresna Wardana	Komisaris Commissioner	Emir Kresna Wardana	Komisaris Commissioner	Emir Kresna Wardana
Komisaris Commissioner	Bagus Puruhito	Komisaris Commissioner	Bagus Puruhito	Komisaris Commissioner	Bagus Puruhito	Komisaris Commissioner	Bagus Puruhito

Sedangkan, sampai dengan komposisi Direksi terakhir saat ini, terdapat 1 (satu) kali perubahan komposisi Direksi. Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 21 September 2022, yang diaktakan melalui Akta Notaris No. 10 tanggal 14 Oktober 2022, dari Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta, terdapat pengangkatan 3 (tiga) Direksi yaitu Sdr. Ruly Firmansyah sebagai Direktur Utama, Sdr. Muhamad Reza sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga serta Sdr. Dwi Hartono sebagai Direktur Keuangan. Secara singkat, berikut ini disajikan kronologis komposisi Direksi sepanjang tahun 2022:

Meanwhile, up to the last current composition of the Board of Directors, there was 1 (one) change in the composition of the Board of Directors. According to the resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS) dated September 21, 2022, which was notarized through Notarial Deed No. 10 dated October 14, 2022, by Muhammad Hanafi, S.H., Notary in Jakarta, 3 (three) Directors were appointment, namely Mr. Ruly Firmansyah as President Director, Mr. Muhamad Reza as Director of Business Development and Commerce and Mr. Dwi Hartono as Director of Finance. In brief, the following is a chronology of the Board of Directors composition throughout 2022:

Tabel Kronologis Perubahan Komposisi Direksi Sepanjang Tahun 2022

Table of the Chronology of the Board of Directors Composition Changes Throughout 2022

Komposisi Direksi Periode 1 Januari 2022 - 21 September 2022 Composition of the Board of Directors on January 1, 2022 - September 21, 2022		Komposisi Direksi Periode 21 September 2022 - saat ini Composition of the Board of Directors on September 21, 2023 - Present	
Jabatan Position	**Nama** Name	**Jabatan** Position	**Nama** Name
Direktur Utama President Director	Gong Matua Hasibuan	Direktur Utama President Director	Ruly Firmansyah
Direktur Sumber Daya Manusia dan Administrasi Director of Human Resources and Administration	Karyawan Aji	Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi Director of Human Capital Management and Administration	Karyawan Aji
Direktur Pengembangan dan Niaga Director of Development and Commerce	Iwan Purwana	Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga Director of Business Development and Commerce	Muhamad Reza
Direktur Keuangan Director of Finance	R. Rawan Insani	Direktur Keuangan Director of Finance	Dwi Hartono
Direktur Operasi -1 Director of Operations -1	M. Yossy Noval A.	Direktur Operasi Pembangkit Gas Director of Gas Plant Operations	M. Yossy Noval A.
Direktur Operasi -2 Director of Operations -2	Rachmanoe Indarto	Direktur Operasi Pembangkit Batubara Director of Coal Plant Operation	Rachmanoe Indarto

Profil Dewan Komisaris
Profile of the Board of Commissioners

Evy Haryadi

Komisaris Utama President Commissioner
(2022 – saat ini) (2022 – present)

Warga Negara Indonesia, berusia 53 tahun. Lahir di Jakarta, 19 Desember 1969. Berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana Elektro dari Institut Teknologi Bandung (1993) dan gelar Master of Electrical Engineering dari Waseda University (1999).

Indonesian citizen, 53 years old. Born in Jakarta, December 19, 1969. Domiciled in Jakarta. He holds a Bachelor of Electrical Engineering degree from Bandung Institute of Technology (1993) and a Master of Electrical Engineering degree from Waseda University (1999).

Dasar Hukum Penunjukkan sebagai Dewan Komisaris
Diangkat sebagai Komisaris Utama melalui Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler tanggal 21 September 2022.

Riwayat Jabatan
Bekerja di PLN sejak tahun 1995, beliau memulai karirnya sebagai staff perencanaan pengusahaan Kantor Induk pada PT PLN Wilayah XI. Beliau pernah memegang beberapa posisi penting antara lain General Manager Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali (2013 - 2015), General Manager Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan (2017 - 2019), General Manager Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa, Madura dan Bali (2019 - 2021), Kepala Satuan Pusat Keunggulan PT PLN (Persero) (2021) dan Direktur Perencanaan Korporat PT PLN (Persero) (2021 - 2022).

Rangkap Jabatan
Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT PLN (Persero) (2022 - saat ini).

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Legal Basis for Appointment as the Board of Commissioners
Appointed as President Commissioner through Circular Shareholders Decree dated September 21, 2022.

Position History
He works at PLN since 1995, started his career as a planning staff of the Main Office at PT PLN Region XI. He held several important positions, including General Manager of Java Bali Distribution and Load Control Center (2013 - 2015), General Manager of the Electricity Research and Development Center (2017 - 2019), General Manager of the Main Unit of the Java, Madura and Bali Load Control Center (2019 - 2021), Head of the PT PLN (Persero) Center of Excellence Unit (2021) and Director of Corporate Planning at PT PLN (Persero) (2021 - 2022).

Concurrent Position
Director of Transmission and System Planning of PT PLN (Persero) (2022 - present).

Affiliation
Having no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, nor with the Majority and Controlling Shareholders.

Jisman Parada Hutajulu

Komisaris Commissioner
(2019 – saat ini) (2019 - present)

Warga Negara Indonesia, berusia 56 tahun. Lahir di Tapanuli, 18 Januari 1967. Berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana Elektro dari Institut Sains dan Teknologi Nasional, Jakarta (1992) dan gelar Pascasarjana bidang Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen Labora Jakarta (2004). Beliau memiliki sertifikasi CRGP (*Certified in Risk Governance Professional*).

Indonesian citizen, 56 years old. Born in Tapanuli, January 18, 1967. Domiciled in Jakarta. He holds a Bachelor's degree in Electrical Engineering from the National Institute of Science and Technology, Jakarta (1992) and a Postgraduate degree in Management from Labora Management College Jakarta (2004). He has CRGP (Certified in Risk Governance Professional) certification.

Dasar Hukum Penunjukkan sebagai Dewan Komisaris

Diangkat sebagai Plt. Komisaris pertama kali melalui RUPS secara Sirkuler tanggal 11 Maret 2019 dan diangkat kembali secara definitif sebagai Komisaris melalui Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 12 November 2020.

Riwayat Jabatan

Memulai karir di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sejak tahun 2000 dan menduduki berbagai posisi penting antara lain sebagai Kasubdit Standardisasi Ketenagalistrikan (2011), Kasubdit Harga dan Subsidi Listrik (2015), Kasubdit Harga Tenaga Listrik (2016), Kepala Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Ketenagalistrikan (2014 - saat ini), Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan (2018 - 2023).

Rangkap Jabatan

- Kepala Penyidik PPNS Bidang Ketenagalistrikan merangkap Kasubdit Haga dan Subsidi Listrik (Kementerian ESDM) (2014 - saat ini),
- Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (2023 - saat ini).

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan anggota Direksi, namun memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Legal Basis for Appointment as the Board of Commissioners

Appointed as Acting. Commissioner for the first time through a Circular GMS on March 11, 2019 and was reappointed definitively as Commissioner through Circular Shareholders Decree dated November 12, 2020.

Position History

Started his career at the Ministry of Energy and Mineral Resources since 2000 and held various important positions, including as Head of Sub-Directorate of Electricity Standardization (2011), Head of Sub-Directorate of Electricity Prices and Subsidies (2015), Head of Sub-Directorate of Electricity Prices (2016), Head of Civil Servant Investigator for Electricity (2014 - present), Director of Electricity Program Development (2018 - 2023).

Concurrent Position

- Chief Investigator of PPNS in the Electricity Sector as well as Head of Sub-Directorate of Electricity Prices and Subsidies (Ministry of Energy and Mineral Resources) (2014 - present),
- Director General of Electricity (2023 - present),

Affiliation

Having no affiliation with other members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, but has an affiliation with the Majority and Controlling Shareholders.

Emir Kresna Wardana

Komisaris Independen Independent Commissioner
(2021 – saat ini) (2021 - present)

Warga Negara Indonesia, berusia 42 tahun. Lahir di Malang, 27 November 1980. Berdomisili di Jakarta. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Informatika dari Sekolah Tinggi Informatika & Komputer Indonesia (2004) dan gelar Pascasarjana bidang Ilmu Komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2020).

Indonesian citizen, 42 years old. Born in Malang, November 27, 1980. Domiciled in Jakarta. Obtained a Bachelor's degree in Informatics Engineering from Sekolah Tinggi Informatika & Komputer Indonesia (2004) and a Postgraduate degree in Communication Science from Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2020).

Dasar Hukum Penunjukkan sebagai Dewan Komisaris
Diangkat sebagai Komisaris melalui Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler tanggal 30 Desember 2021.

Riwayat Jabatan
Memulai karir di Sony BMG sebagai Talent, Arranger & Composer (2005 - 2008) dan Manager General Affair PT Sinergi Bara Pratama Energy (2011 - 2013) serta pernah menduduki jabatan penting antara lain sebagai Tenaga Ahli Wakil Ketua DPR RI (2012 - 2014), Tenaga Ahli Komisi I DPR RI (2014 - 2015), Staf Khusus I Sekretaris Kabinet RI (2015-Sekarang), Komisaris PT Patra Jasa (2018 - 2021).

Rangkap Jabatan
Staf Khusus I Sekretaris Kabinet Republik Indonesia (2015 - saat ini).

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Legal Basis for Appointment as the Board of Commissioners
Appointed as Commissioner through Circular Shareholders Decree dated December 30, 2021.

Position History
He started his career at Sony BMG as Talent, Arranger & Composer (2005 - 2008) and General Affair Manager of PT Sinergi Bara Pratama Energy (2011 - 2013) and held important positions including, as an Expert for the Deputy Speaker at the House of Representatives (2012 - 2014), Expert for Commission I at the House of Representatives (2014 - 2015), Special Staff I of the Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia (2015-Present), Commissioner at PT Patra Jasa (2018 - 2021).

Concurrent Position
Special Staff I of the Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia (2015 - present).

Affiliation
Having no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, nor with the Majority and Controlling Shareholders.

Bagus Puruhito

Komisaris Independen Independent Commissioner
(2021 – saat ini) (2021 – present)

Warga Negara Indonesia, 60 tahun. Lahir di Purwokerto, 3 Oktober 1962. Berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana di bidang Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen IMMI Jakarta (2002) dan Pascasarjana di bidang Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen IMMI Jakarta (2014).

Indonesian citizen, 60 years old. Born in Purwokerto, October 3, 1962. Domiciled in Jakarta. He holds a Bachelor's degree in Management from IMMI College of Management Jakarta (2002) and a Postgraduate degree in Management from IMMI College of Management Jakarta (2014).

Dasar Hukum Penunjukkan sebagai Dewan Komisaris

Diangkat sebagai Komisaris melalui Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 30 Desember 2021.

Riwayat Jabatan

Mengawali karir di TNI Angkatan Udara RI sejak tahun 2001 di Lanud Hasanuddin dan memiliki pengalaman profesional antara lain sebagai Danlanud Halim Perdanakusuma (2009), Komandan Komando Pendidikan Angkatan Udara (2011), Panglima Komando Operasi Angkatan Udara I (2012) dan Wakil Kepala Staf TBI Angkatan Udara (2014), Wakil Gubernur Lemhanas (2015) dan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) (2019 - 2021).

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan, baik di PLN NP maupun di perusahaan lain.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Legal Basis for Appointment as the Board of Commissioners

Appointed as Commissioner through Circular Shareholders Decree dated December 30, 2021.

Position History

He started his career in the Indonesian Air Force in 2001 at Hasanuddin Air Base and has professional experiences, including as Danlanud Halim Perdanakusuma (2009), Commander of the Air Force Education Command (2011), Commander of Air Force Operations Command I (2012) and Deputy Chief of Staff of the Air Force TBI (2014), Deputy Governor of Lemhanas (2015) and Head of the National Search and Rescue Agency (Basarnas) (2019 - 2021).

Concurrent Position

Having no concurrent positions, either in PLN NP or in other companies.

Affiliation

Having no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, nor with the Majority and Controlling Shareholders.

Kenedy

Komisaris Independen Independent Commissioner
(2021 – saat ini) (2021 – present)

Warga Negara Indonesia, berusia 58 tahun. Lahir di Cirebon, 12 November 1964. Berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Tanjungpura (2001) dan gelar Master of Management dari Universitas Winaya Mukti (2004).

Indonesian citizen, 58 years old. Born in Cirebon, November 12, 1964. Domiciled in Jakarta. He holds a Bachelor of Law degree from Tanjungpura University (2001) and a Master of Management degree from Winaya Mukti University (2004).

Dasar Hukum Penunjukkan sebagai Dewan Komisaris

Diangkat sebagai Komisaris melalui Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler tanggal 14 Desember 2022.

Riwayat Jabatan

Memulai karir di Kepolisian Republik Indonesia dengan pangkat terakhir IRJEN POL Deputi Pemberantasan BNN. Berbagai jabatan di Kepolisian pernah didudukinya di antaranya menempati posisi sebagai Kasat Serse Polresta Pekanbaru (1994), Wakapolres Pontianak (2001), Kapolres Deli Serdang (2005), Wakapoltabes Pekanbaru (2007), Dirreskrimsus Polda Bali (2016), KA BNNP Sulawesi Barat (2019), KA BNNP Riau (2020), dan Direktur Intelijen Deputi Pemberantasan BNN (2021). Selain itu beliau juga pernah mendapat penugasan luar negeri diantaranya, London Metropolitan Police – Counter Terrorism Exercise dan Bilateral Cooperation Conference di Kuba, Argentina, Panama dan Equador.

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan, baik di PLN NP maupun di perusahaan lain.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Legal Basis for Appointment as the Board of Commissioners

Appointed as Commissioner through Circular Shareholders Decree dated December 14, 2022.

Position History

He started his career in the Indonesian National Police with the last rank at Inspector General of Police POL Deputy of Eradication of the National Narcotics Agency. He held various positions in the Police, including positions as Head of Detection Unit at Pekanbaru City Police (1994), Deputy Chief at Pontianak City Police (2001), Chief at Deli Serdang City Police (2005), Deputy Chief at Pekanbaru City Police (2007), Director of Criminal Investigation at Bali City Police (2016), Head of the West Sulawesi National Narcotics Agency (2019), Head at the Riau National Narcotics Agency (2020), and Director of Intelligence of the Deputy for Eradication of the National Narcotics Agency (2021). Furthermore, he also received overseas assignments including, London Metropolitan Police - Counter Terrorism Exercise and Bilateral Cooperation Conference in Cuba, Argentina, Panama and Equator.

Concurrent Position

Having no concurrent positions, either in PLN NP or in other companies.

Affiliation

Having no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, nor with the Majority and Controlling Shareholders.

Hendra Iswahyudi

Komisaris Commissioner
(2017 – saat ini) (2017 – present)

Warga Negara Indonesia, berusia 54 tahun. Lahir di Banyuwangi, 30 November 1968. Berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana Teknik Fisika dari Institut Teknologi Sepuluh November (1993), Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (2003) dan Doktor Ilmu Ekonomi dari Universitas Indonesia (2013). Beliau memiliki sertifikasi CRGP (*Certified in Risk Governance Professional*).

Indonesian citizen, 54 years old. Born in Banyuwangi, November 30, 1968. Domiciled in Jakarta. He holds a Bachelor's degree in Engineering Physics from the Sepuluh November Institute of Technology (1993), a Master's degree in Planning and Public Policy from the University of Indonesia (2003) and a Doctor of Economics from the University of Indonesia (2013). He has CRGP (Certified in Risk Governance Professional) certification.

Dasar Hukum Penunjukkan sebagai Dewan Komisaris

Diangkat sebagai Plt. Komisaris pertama kali melalui Rapat Umum Pemegang Saham secara Sirkuler tanggal 19 Desember 2017 dan diangkat kembali secara definitif sebagai Komisaris melalui Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 12 November 2020.

Riwayat Jabatan

Memulai karir di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan sejak tahun 1998 dan pernah menduduki jabatan penting antara lain sebagai Kepala Bagian Rencana dan Laporan (2011 - 2016), Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (2016 - 2017), Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan (2017 - 2019), dan Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Energi baru Terbarukan dan Konservasi Energi (2021 - saat ini).

Rangkap Jabatan

- Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Energi baru Terbarukan dan Konservasi Energi (2021 - saat ini),
- Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi (2022 - saat ini).

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan anggota Direksi, namun memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Legal Basis for Appointment as the Board of Commissioners

Appointed as Acting. Commissioner for the first time through a Circular General Meeting of Shareholders dated December 19, 2017 and was reappointed definitively as Commissioner through Circular Shareholders Decree dated November 12, 2020.

Position History

He started his career at the Directorate General of Electricity, Directorate of Electricity Business Development since 1998 and held important positions, including as Head of Plan and Report Section (2011 - 2016), Director of Planning and Infrastructure Development for New, Renewable Energy and Energy Conservation (2016 - 2017), Director of Electricity Business Development (2017 - 2019), and Director of Planning and Infrastructure Development for New, Renewable Energy and Energy Conservation (2021 - present).

Concurrent Position

- Director of Infrastructure Planning and Development for Renewable Energy and Energy Conservation (2021 - present),
- Chairman of Nomination and Remuneration Committee (2022 - present).

Affiliation

Having no affiliation with other members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, but has an affiliation with the Majority and Controlling Shareholders.

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 16 Juni 2023 terjadi pengangkatan seorang anggota Dewan Komisaris menggantikan pejabat sebelumnya dengan profil sebagai berikut:

Based on the Circular Shareholders Decree dated June 16, 2023, there was an appointment of a member of the Board of Commissioners replacing the previous official with the following profile:

Ida Nuryatin Finahari

Komisaris Commissioner
(2023 – saat ini) (2023 – present)

Warga Negara Indonesia, berusia 55 tahun. Lahir di Kediri, 8 Januari 1968. Berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana Teknik Kimia dari Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (1990) dan gelar Master of Engineering di bidang Applied Chemistry dari Tokyo University of Agriculture and Technology (2003).

Indonesian citizen, 55 years old. Born in Kediri, January 8, 1968. Domiciled in Jakarta. She holds a Bachelor of Chemical Engineering degree from Sepuluh Nopember Institute of Technology Surabaya (1990) and a Master of Engineering degree in Applied Chemistry from Tokyo University of Agriculture and Techno ogy (2003).

Dasar Hukum Penunjukkan sebagai Dewan Komisaris

Diangkat sebagai Komisaris melalui Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler tanggal 16 Juni 2023.

Riwayat Jabatan

Memulai karir di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan menduduki berbagai posisi penting antara lain sebagai Kepala Subdirektorat Penyiapan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan (2015 - 2017), Direktur Konservasi Energi (2017 - 2018), Direktur Panas Bumi (2018 - 2021), dan Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan (2021 - 2022).

Rangkap Jabatan

Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (2022 - saat ini).

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan anggota Direksi, namun memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Legal Basis for Appointment as the Board of Commissioners

Appointed as Commissioner through Circular Shareholders Decree dated June 16, 2023.

Position History

She started her career at the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) and held various important positions, including as Head of Sub Directorate for Preparation of Various New Energy and Renewable Energy (2015 - 2017), Director of Energy Conservation (2017 - 2018), Director of Geothermal (2018 - 2021), and Director of Electricity Business Development (2021 - 2022).

Concurrent Position

Secretary of the Directorate General of Electricity (2022 - present).

Affiliation

Having no affiliation with other members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, but has an affiliation with the Majority and Controlling Shareholders.

Profil Direksi
Profile of the Board of Directors

Ruly Firmansyah

Direktur Utama President Director
(2022 – saat ini) (2022 – Present)

Warga Negara Indonesia, berusia 59 tahun. Lahir di Jakarta, 13 Maret 1964. Berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Indonesia (1990) dan Master of Business Management dari dari Institut Teknologi Bandung (2002).

Indonesian citizen, 59 years old. Born in Jakarta, March 13, 1964. Domiciled in Jakarta. He holds a Bachelor of Electrical Engineering from the University of Indonesia (1990) and a Master of Business Management from Bandung Institute of Technology (2002).

Dasar Hukum Penunjukkan sebagai Direksi
Diangkat sebagai Direktur Utama melalui RUPS secara Sirkuler tanggal 21 September 2022.

Riwayat Jabatan
Bekerja di PLN sejak tahun 1995, beliau memulai karirnya pada bidang pemeliharaan listrik PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II. Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama PT PLN Nusantara Power, beliau pernah memegang beberapa posisi penting antara lain General Manager Unit Pembangkitan Muara Tawar (2010 - 2011), Kepala Satuan Pengadaan PT PJB (2011), General Manager PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan (2012 - 2015), Executive Vice President Pengembangan Regional Kalimantan PT PLN (Persero) (2018 - 2019), dan terakhir menjabat sebagai Direktur Utama pada PT Bahtera Adhiguna (2019 - 2022).

Rangkap Jabatan
Tidak memiliki rangkap jabatan, baik di PLN NP maupun di perusahaan lain.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Legal Basis for Appointment as the Board of Directors
Appointed as President Director through Circular Shareholders Decree dated September 21, 2022.

Position History
He works at PLN since 1995, started his career in the electricity maintenance field of PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II. Prior to serving as President Director of PT PLN Nusantara Power, he held several important positions including General Manager of Muara Tawar Generator Unit (2010 - 2011), Head of Procurement Unit of PT PJB (2011), General Manager of PT PLN (Persero) South Sumatera Generation (2012 - 2015), Executive Vice President of Kalimantan Regional Development of PT PLN (Persero) (2018 - 2019), and most recently served as President Director of PT Bahtera Adhiguna (2019 - 2022).

Concurrent Position
Having no concurrent positions, either in PLN NP or in other companies.

Affiliation
Having no affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, nor with the Majority and Controlling Shareholders.

Karyawan Aji

Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi
Director of Human Capital Management and Administration
(2020 – saat ini) (2020 – Present)

Warga Negara Indonesia, berusia 56 tahun. Lahir di Yogyakarta, 1 Mei 1967. Berdomisili di Surabaya. Meraih gelar Sarjana Teknik Nuklir dari Universitas Gadjah Mada (1992) dan Master di bidang Kelistrikan dari Curtin University of Technology Perth (2009). Beliau memiliki sertifikasi *Certified Risk Governance Professional* (CRGP) dan Insinyur Profesional Utama.

Indonesian citizen, 56 years old. Born in Yogyakarta, May 1, 1967. Domiciled in Surabaya. He holds a Bachelor's degree in Nuclear Engineering from Gadjah Mada University (1992) and a Master's degree in Electrical Engineering from Curtin University of Technology, Perth (2009). He holds Certified Risk Governance Professional (CRGP) and Master Professional Engineer certifications.

Dasar Hukum Penunjukkan sebagai Direksi

Diangkat sebagai Direktur SDM dan Administrasi melalui RUPS secara Sirkuler tanggal 12 November 2020 dan ditetapkan sebagai Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi melalui RUPS secara Sirkuler tanggal 21 September 2022.

Riwayat Jabatan

Memulai karir di PT PLN (Persero) sejak tahun 1994 dan pernah menduduki jabatan strategis di antaranya Executive Vice President Talent Development PT PLN (Persero) (2018 - 2020), Kepala Divisi Pengembangan Talenta PT PLN (Persero) (2018), Kepala Divisi Pengembangan Organisasi PT PLN (Persero) (2017 - 2018), General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat (2016 - 2017), dan Manajer Enjiniring PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B.

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan, baik di PLN NP maupun di perusahaan lain.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Legal Basis for Appointment as the Board of Directors

Appointed as Director of Human Capital and Administration by GMS Circular dated November 12, 2020 and appointed as Director of Human Capital Management and Administration through Circular Shareholders Decree dated September 21, 2022.

Position History

He started his career at PT PLN (Persero) in 1994 and held strategic positions, including Executive Vice President of Talent Development of PT PLN (Persero) (2018 - 2020), Head of Talent Development Division of PT PLN (Persero) (2018), Head of Organization Development Division of PT PLN (Persero) (2017 - 2018), General Manager of West Nusa Tenggara Region PT PLN (Persero) (2016 - 2017), and Engineering Manager of PT PLN (Persero), Tanjung Jati B Power Plant.

Concurrent Position

Having no concurrent positions, either in PLN NP or in other companies.

Affiliation

Having no affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, nor with the Majority and Controlling Shareholders.

Muhamad Reza

Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga
Director of Business Development and Commerce
(2022 – saat ini) (2022 – present)

Warga Negara Indonesia, berusia 48 tahun. Lahir di Bandung, 4 November 1974. Berdomisili di Jakarta. Memperoleh gelar Sarjana Electrical Engineering dari Institut Teknologi Bandung (1997), Magister of Electrical Engineering dari Delft University of Technology di Netherlands (2000) dan Doctor of Philosophy Electrical Power Systems dari Delft University of Technology di Netherlands (2006). Beliau memiliki sertifikasi *Certified Risk Governance Professional* (CRGP).

Indonesian citizen, 48 years old. Born in Bandung, November 4, 1974. Domiciled in Jakarta. He obtained his Bachelor of Electrical Engineering from Bandung Institute of Technology (1997), Master of Electrical Engineering from Delft University of Technology in the Netherlands (2000) and Doctor of Philosophy Electrical Power Systems from Delft University of Technology in the Netherlands (2006). He holds the Certified Risk Governance Professional (CRGP) certification.

Dasar Hukum Penunjukkan sebagai Direksi

Diangkat sebagai Direktur melalui RUPS secara Sirkuler tanggal 21 September 2022.

Riwayat Jabatan

Pernah menjabat sebagai Direktur Enjiniring di PT PLN Enjiniring pada (2021 – 2022), Technical Expert, Business Development & Business Line Manager Power System, Advisory & Advanced Analytics di PT Tractebel Engineering Indonesia (2019 - 2021) dan sebagai Business Development Manager, Power System Specialist & Country Representative di Solvina International (2016 - 2019).

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan, baik di PLN NP maupun di perusahaan lain.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Legal Basis for Appointment as the Board of Directors

Appointed as Director through Circular Shareholders Decree dated September 21, 2022.

Position History

He served as Director of Engineering at PT PLN Enjiniring in (2021 - 2022), Technical Expert, Business Development & Business Line Manager Power System, Advisory & Advanced Analytics at PT Tractebel Engineering Indonesia (2019 - 2021) and as Business Development Manager, Power System Specialist & Country Representative at Solvina International (2016 - 2019).

Concurrent Position

Having no concurrent positions, either in PLN NP or in other companies.

Affiliation

Having no affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, nor with the Majority and Controlling Shareholders.

Dwi Hartono

Direktur Keuangan Director of Finance
(2022 – saat ini) (2022 – present)

Warga Negara Indonesia, berusia 47 tahun. Lahir di Wonogiri, 13 November 1975. Berdomisili di Jakarta. Memperoleh gelar Sarjana Sarjana Mesin dari Universitas Gadjah Mada (1999) dan Master di Bidang Kelistrikan di Delft University of Technology, Netherlands (2011). Beliau memiliki sertifikasi *Qualified Risk Governance Professional* (QRGP).

Indonesian citizen, 47 years old. Born in Wonogiri, November 13, 1975. Domiciled in Jakarta. Obtained a Bachelor's degree in Mechanical Engineering from Gadjah Mada University (1999) and a Master's degree in Electrical Engineering from Delft University of Technology, Netherlands (2011). He holds a Qualified Risk Governance Professional (QRGP) certification.

Dasar Hukum Penunjukkan sebagai Direksi
Diangkat sebagai Direktur melalui RUPS secara Sirkuler tanggal 21 September 2022.

Riwayat Jabatan
Memulai karir sebagai Teknisi Utama Mesin di PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (2003). Beliau pernah menjabat sebagai EVP Manajemen Keuangan Aset PT PLN (Persero) (2021 – 2022), Direktur Operasi PT PJB Investasi pada tahun (2017 - 2021) dan Deputi Manajer Perencanaan IPP PT PLN (Persero) (2015 - 2017).

Rangkap Jabatan
Tidak memiliki rangkap jabatan, baik di PLN NP maupun di perusahaan lain.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Legal Basis for Appointment as the Board of Directors
Appointed as Director through Circular Shareholders Decree dated September 21, 2022.

Position History
He started his career as a Main Engine Technician at PT PLN (Persero) South Kalimantan and Central Kalimantan Region (2003). He has served as EVP of Asset Financial Management of PT PLN (Persero) (2021 - 2022), Director of Operations of PT PJB Investasi (2017 - 2021) and Deputy Manager of IPP Planning of PT PLN (Persero) (2015 - 2017).

Concurrent Position
Having no concurrent positions, either in PLN NP or in other companies.

Affiliation
Having no affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, nor with the Majority and Controlling Shareholders.

M. Yossy Noval A.

Direktur Operasi Pembangkit Gas
Director of Gas Power Plant Operations
(2021 – saat ini) (2021 – present)

Warga Negara Indonesia, berusia 54 tahun. Lahir di Jakarta, 18 November 1968. Berdomisili di Surabaya. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Indonesia (1993) dan Master Bidang Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung (2002). Beliau memiliki sertifikasi *Certified Risk Governance Professional* (CRGP).

Indonesian citizen, 54 years old. Born in Jakarta, November 18, 1968. Domiciled in Surabaya. Obtained a Bachelor of Mechanical Engineering from the University of Indonesia (1993) and a Master of Mechanical Engineering from Bandung Institute of Technology (2002). He holds a Certified Risk Governance Professional (CRGP) certification.

Dasar Hukum Penunjukkan sebagai Direksi

Diangkat sebagai Direktur Operasi-1 melalui RUPS secara Sirkuler tanggal 23 April 2021 dan ditetapkan sebagai Direktur Operasi Pembangkit Gas melalui RUPS secara Sirkuler tanggal 21 September 2022.

Riwayat Jabatan

Mengawali karir di PLN NP sejak tahun 1997 sebagai Ahli Muda II Kinerja UP Muara Karang. Pernah menduduki posisi penting antara lain Direktur Utama PT PJB Services (2021), General Manager UP Muara Karang (2019 - 2021), Kepala Satuan Rencana & Transformasi Korporat (2017 - 2019), Kepala Satuan Kinerja Korporat & Pengembangan Sistem Manajemen (2016 - 2017), Kepala Satuan Manajemen Risiko & Kepatuhan (2014 - 2015), Manajer Teknologi Informasi (2008 - 2009), dan Deputi Manajer Operasi (2005 - 2006).

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan, baik di PLN NP maupun di perusahaan lain.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Legal Basis for Appointment as the Board of Directors

Appointed as Director of Operations-1 through Circular Shareholders Decree dated April 23, 2021 and appointed as Director of Gas Power Plant Operations through Circular Shareholders Decree dated September 21, 2022.

Position History

Started his career at PLN NP since 1997 as a Junior Expert II Performance Muara Karang GU. He held important positions, including President Director of PT PJB Services (2021), General Manager of Muara Karang GU (2019 - 2021), Head of Corporate Plan & Transformation Unit (2017 - 2019), Head of Corporate Performance & Management System Development Unit (2016 - 2017), Head of Risk Management & Compliance Unit (2014 - 2015), Information Technology Manager (2008 - 2009), and Deputy Operations Manager (2005 - 2006).

Concurrent Position

Having no concurrent positions, either in PLN NP or in other companies.

Affiliation

Having no affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, nor with the Majority and Controlling Shareholders.

Rachmanoe Indarto

Direktur Operasi Pembangkit Batubara
Director of Coal Power Plant Operations
(2020 – saat ini) (2020 – present)

Warga Negara Indonesia, berusia 53 tahun. Lahir di Trenggalek, 10 November 1969. Berdomisili di Surabaya. Meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Brawijaya (1993) dan Master di Bidang Manajemen dari ITB Bandung (2003). Beliau memiliki sertifikasi *Certified Risk Governance Professional* (CRGP).

Indonesian citizen, 53 years old. Born in Trenggalek, November 10, 1969. Domiciled in Surabaya. He holds a Bachelor's degree in Mechanical Engineering from Brawijaya University (1993) and a Master's degree in Management from Bandung Institute of Technology (2003). He holds a Certified Risk Governance Professional (CRGP) certification.

Dasar Hukum Penunjukkan sebagai Direksi

Diangkat sebagai Direktur Operasi-2 melalui RUPS secara Sirkuler tanggal 12 November 2020 dan ditetapkan sebagai Direktur Operasi Pembangkit Batubara melalui RUPS secara Sirkuler tanggal 21 September 2022.

Riwayat Jabatan

Memulai karir di PLN NP sejak tahun 1997 dan ditugaskan sebagai AM II Keandalan Operasi PLTU/G-PLTGU. Pernah menduduki jabatan penting antara lain sebagai General Manager UP Sumbagsel (2019 - 2020), General Manager Unit Pembangkitan Gresik (2015 - 2016), General Manager Unit Pembangkitan Paiton (2013 - 2015), General Manager PLTU Pacitan (2011 - 2013), Manajer Perencanaan Korporat (2010 - 2011), dan Spesialis Pemeliharaan PLTU & PLTG (2002 - 2003).

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan, baik di PLN NP maupun di perusahaan lain.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Legal Basis for Appointment as the Board of Directors

Appointed as Director of Operations-2 through Circular Shareholders Decree dated November 12, 2020 and appointed as Director of Coal Plant Operations through Circular Shareholders Decree dated September 21, 2022.

Position History

He started his career at PLN NP in 1997 and was assigned as AM II Operation Reliability of CFPP/G-CCPP. He held important positions, including General Manager of South Sumatera Generating Unit (2019 - 2020), General Manager of Gresik Generating Unit (2015 - 2016), General Manager of Paiton Generating Unit (2013 - 2015), General Manager of Pacitan CFPP (2011 - 2013), Corporate Planning Manager (2010 - 2011), and CFPP & GTPP Maintenance Specialist (2002 - 2003).

Concurrent Position

Having no concurrent positions, either in PLN NP or in other companies.

Affiliation

Having no affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, nor with the Majority and Controlling Shareholders.

Jumlah dan Komposisi SDM
Number and Composition of HR

Kecukupan kuantitas SDM menjadi salah satu faktor pendukung dari efektivitas proses kerja dan operasional Perusahaan serta dapat memberikan produktivitas yang maksimal.

Adequate HR quantity is one of the supporting factors of the effectiveness of the Company's work processes and operations. It also can provide maximum productivity.

Per 31 Desember 2022, jumlah karyawan PLN NP adalah sebanyak 3.034 karyawan, yaitu lebih rendah dibandingkan tahun 2021 sebanyak 3.071 karyawan. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya karyawan yang pensiun, mengundurkan diri atau meninggal dunia serta tidak adanya pelaksanaan rekrutmen oleh PLN (*zero recruitment*) pada saat itu.

As of December 31, 2022, the number of PLN NP's employees was 3,034, which was lower than in 2021 of 3,071 employees. This was mainly due to employees who retired, resigned or passed away and the absence of recruitment by PLN (zero recruitment) at that time.

Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin
Number of Employees by Gender

Tabel Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2022 (orang)
Table of Number of Employees by Gender in 2020-2022 (person)

Jenis Kelamin Gender	2020	2021	2022	Perubahan Changes in 2021-2022
Laki-laki Male	2.717	2.667	2.640	-27
Perempuan Female	406	404	394	-10
Jumlah Total	**3.123**	**3.071**	**3.034**	**-37**

Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan
Number of Employees by Position Level

Tabel Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan Tahun 2020-2022 (orang)
Table of Number of Employees by Position Level in 2020-2022 (person)

Jenjang Jabatan Position Level	2020	2021	2022	Perubahan Changes in 2021-2022
F1	10	17	22	5
F2	32	27	37	10
F3	73	88	148	60
F4	495	474	505	31
F5	1.257	1.402	1.384	-18
F6	558	343	270	-73

Jenjang Jabatan Position Level	2020	2021	2022	Perubahan Changes in 2021-2022
Manajemen Atas Upper Management	2	2	1	-1
Manajemen Menengah Middle Management	56	56	50	-6
Manajemen Dasar Basic Management	148	155	141	-14
Supervisor Atas Upper Supervisor	410	417	379	-38
Supervisor Dasar Basic Supervisor	82	90	97	7
Jumlah Total	**3.123**	**3.071**	**3.034**	**-37**

Jumlah Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Number of Employees by Education Level

Tabel Jumlah Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020-2022 (orang)

Table of Number of Employees by Education Level in 2020-2022 (person)

Tingkat Pendidikan Education Level	2020	2021	2022	Perubahan Changes in 2021-2022
Strata 3 Doctor's Degree	1	1	1	-
Strata 2 Master's degree	225	265	261	-4
Strata 1 Bachelor's degree	1.747	1.703	1.695	-8
Sarjana Muda Fresh Graduates	582	575	570	-5
Diploma Diploma	29	28	27	-1
SMA Senior High School	538	499	480	-19
SMP Junior High School	1	-	-	-
Jumlah Total	**3.123**	**3.071**	**3.034**	**-37**

Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

Number of Employees by Employment Status

Tabel Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2020-2022 (orang)

Table of Number of Employees by Employment Status in 2020-2022 (person)

Status Kepegawaian Employment Status	2020	2021	2022	Perubahan Changes in 2021-2022
Karyawan Tetap Permanent Employee	3.123	3.071	3.034	-37
On the Job Training	-	-	-	-
Jumlah Total	**3.123**	**3.071**	**3.034**	**-37**

Jumlah Karyawan Berdasarkan Rentang Usia

Number of Employees by Age Range

Tabel Jumlah Karyawan Berdasarkan Rentang Usia Tahun 2020-2022 (orang)

Table of Number of Employees by Age Range in 2020-2022 (person)

Rentang Usia Age Range	2020	2021	2022	Perubahan Changes in 2021-2022
< 26 tahun years old	206	128	81	-47
26 - 30 tahun years old	1.038	881	706	-175
31 - 35 tahun years old	575	771	913	142
36 - 40 tahun years old	446	422	443	21
41 - 45 tahun years old	137	172	226	54
46 - 50 tahun years old	461	398	305	-93
51 - 56 tahun years old	260	299	360	61
Jumlah Total	**3.123**	**3.071**	**3.034**	**-37**

Jumlah Karyawan Berdasarkan Wilayah Kerja

Number of Employees by Work Area

Tabel Jumlah Karyawan Berdasarkan Wilayah Kerja Tahun 2020-2022 (orang)

Table of Number of Employees by Work Area in 2020-2022 (person)

Wilayah Kerja Work Area	2020			2021			2022			Perubahan Changes in 2021-2022
	L M	P F	Jumlah Total	L M	P F	Jumlah Total	L M	P F	Jumlah Total	
Kantor Pusat Head Office	395	166	561	407	168	575	421	176	597	22
UP Gresik Gresik GU	269	33	302	261	33	294	254	31	285	-9
UP Muara Karang Muara Karang GU	296	31	327	283	30	313	280	31	311	-2
UP Paiton Paiton GU	242	19	261	232	19	251	248	16	264	13
UP Cirata Cirata GU	128	10	138	153	15	168	146	17	163	-5
UP Brantas Brantas GU	147	9	156	142	9	151	136	8	144	-7
UP Muara Tawar Muara Tawar GU	265	21	286	259	21	280	250	20	270	-10
Unit Pemeliharaan Wilayah Timur (UPHT)*** Maintenance Service Unit of Eastern Area (MSUEA)***	240	21	261	234	21	255	-	-	-	-255
Unit Pemeliharaan Wilayah Barat (UPHB)*** Maintenance Service Unit of Western Area (MSUWA)***	176	19	195	173	20	193	-	-	-	-193
Badan Pengelola Waduk Cirata* Cirata Reservoir Management Agency*	36	7	43	-	-	-	-	-	-	-
Unit MRO (UMRO)*** MRO Unit (UMRO)***	-	-	-	-	-	-	443	41	484	484
UBJOM Indramayu Indramayu OMSBU	35	-	35	35	-	35	34	-	34	-1
UBJOM Paiton** Paiton OMSBU**	33	2	35	34	1	35	-	-	-	-35

Wilayah Kerja Work Area	2020			2021			2022			Perubahan Changes in 2021-2022
	L M	P F	Jumlah Total	L M	P F	Jumlah Total	L M	P F	Jumlah Total	
UBJOM Rembang Rembang OMSBU	33	2	35	32	2	34	33	2	35	1
UBJOM Pacitan Pacitan OMSBU	34	1	35	34	1	35	34	1	35	-
UBJOM Tanjung Awar-Awar Tanjung Awar-Awar OMSBU	33	1	34	34	1	35	34	1	35	-
UBJOM Luar Jawa-2**** Luar Jawa-2 OMSBU****	32	11	43	15	9	24	-	-	-	-24
UBJOM Kaltim Teluk Kaltim Teluk OMSBU	31	-	31	32	-	32	33	-	33	1
UBJOM Tenayan Tenayan OMSBU	32	1	33	32	1	33	30	1	31	-2
UBJOM Pulang Pisau Pulang Pisau OMSBU	32	-	32	33	-	33	31	-	31	-2
UBJOM Arun Arun OMSBU	4	-	4	5	-	5	5	-	5	-
Unit Pengembangan***** Business Development Unit*****	28	11	39	27	10	37	-	-	-	-37
Unit Pelaksana Proyek 1 (UPP-1) Project Implementation Unit 1 (UPP-1)	-	-	-	-	-	-	17	1	18	18
Unit Pelaksana Proyek 2 (UPP-2) Project Implementation Unit 2 (UPP-2)	-	-	-	-	-	-	10	-	10	10
PJB Academy	31	14	45	33	15	48	34	14	48	-
UBJOM Sambelia Sambelia OMSBU	-	-	-	3	-	3	5	-	5	2
Tugas Karya ke PLN Work Assignment to PLN	25	7	32	37	10	47	35	12	47	-
Tugas Karya ke PJBS Work Assignment to PJBS	36	5	41	33	4	37	29	4	33	-4
Tugas Karya ke AP/ PA Lain Work Assignment to other AP/PA	104	15	119	104	14	118	98	18	116	-2
Jumlah Total	**2.717**	**406**	**3.123**	**2.667**	**404**	**3.071**	**2.641**	**394**	**3.034**	**-37**

Catatan:

* BPWC telah direorganisasi pada tahun 2021.
** telah direorganisasi pada tahun 2022, yaitu penggabungan UP Paiton dan UBJOM Paiton.
*** telah direorganisasi pada tahun 2022, yaitu penggabungan UPHT dan UPHB menjadi UMRO.
**** UBJOM Luar Jawa-2 telah direorganisasi pada tahun 2022.
***** Unit Pengembangan telah direorganisasi pada tahun 2022.

Note:

* BPWC had been reorganized in 2021.
** had been reorganized in 2022, which was the merger of Paiton GU and Paiton OMSBU.
*** had been reorganized in 2022, which was the merger of MSUEA and MSUWA into UMRO.
**** Outer Java-2 UBJOM had been reorganized in 2022.
***** The Business Development Unit had been reorganized in 2022.

Pengembangan Kompetensi SDM

HR Competency Development

Kompetensi dan keterampilan SDM menjadi *enabler* utama dari pengelolaan SDM yang efektif dan efisien guna memperoleh produktivitas yang maksimal. PLN NP memberikan perhatian khusus pada perkembangan kompetensi karyawan sehingga mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman dan industri, serta memiliki daya saing yang unggul.

HR competencies and skills are the main enablers of effective and efficient HR management to obtain maximum productivity. PLN NP pays special attention to the development of employee competence so that they are able to adapt to the times and industry, and have superior competitiveness.

Pengembangan Kompetensi untuk Dewan Komisaris, Direksi, Komite, Sekretaris Perusahaan, Kepala SPI dan Kepala Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Competency Development for Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, Head of IAU and Head of Risk Management and Compliance Unit

PLN NP berkomitmen memfasilitasi setiap organ Perusahaan mendapatkan program pengembangan sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Adapun Informasi mengenai pendidikan dan pelatihan bagi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, Kepala SPI dan Kepala Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

PLN NP is committed to facilitating each organ of the Company to obtain development programs in accordance with the needs in carrying out their respective duties. Information on education and training for the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, Head of IAU and Head of Risk Management and Compliance Unit throughout 2022 is as follows:

Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

All members of the Board of Commissioners serving in 2022

Nama Name	Jabatan dan Masa Jabatan Position and Term of Office	Pelatihan/Seminar/ Workshop/Narasumber Training/Seminar/ Workshop/Narrator	Waktu Pelaksanaan Time of Implementation	Penyelenggara dan Lokasi Organizer and Location
Dedeng Hidayat	Komisaris Utama (1 Januari 2022 – 21 September 2022) President Commissioner (January 1, 2022 – September 21, 2022)	PJB *Integrity Level Up* (Seminar mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan) PJB Integrity Level Up (Seminar on Anti-Bribery Management System)	13 Juli 2022 July 13, 2022	PJB Academy - Online
Komang Parmita	Komisaris (1 Januari 2022 – 14 Desember 2022) Commissioner (January 1, 2022 – December 14, 2022)	*Workshop* ESG ESG Workshop	22 Agustus 2022 August 22, 2022	PLN Nusantara Power - Surabaya

Nama Name	Jabatan dan Masa Jabatan Position and Term of Office	Pelatihan/Seminar/ Workshop/Narasumber Training/Seminar/ Workshop/Narrator	Waktu Pelaksanaan Time of Implementation	Penyelenggara dan Lokasi Organizer and Location
Jisman P. Hutajulu	Komisaris (1 Januari 2022 – 31 Desember 2022) Commissioner (January 1, 2022 – December 31, 2022)	Seminar PJB Connect (PLN NP *Jump Beyond Connection*) Seminar on PJB Connect (PLN NP Jump Beyond Connection)	4 – 6 Oktober 2022 October 4 – 6, 2022	PLN NP – Jatim Expo Surabaya
Hendra Iswahyudi	Komisaris (1 Januari 2022 – 31 Desember 2022) Commissioner (January 1, 2022 – December 31, 2022)	Seminar PJB Connect (PLN NP *Jump Beyond Connection*) Seminar on PJB Connect (PLN NP Jump Beyond Connection)	4 – 6 Oktober 2022 October 4 – 6, 2022	PLN NP – Jatim Expo Surabaya
Emir Kresna Wardana	Komisaris (1 Januari 2022 – 31 Desember 2022) Commissioner (January 1, 2022 – December 31, 2022)	Seminar PJB Connect (PLN NP *Jump Beyond Connection*) Seminar on PJB Connect (PLN NP Jump Beyond Connection)	4 – 6 Oktober 2022 October 4 – 6, 2022	PLN NP – Jatim Expo Surabaya
Bagus Puruhito	Komisaris (1 Januari 2022 – 31 Desember 2022) Commissioner (January 1, 2022 – December 31, 2022)	Seminar PJB Connect (PLN NP *Jump Beyond Connection*) Seminar on PJB Connect (PLN NP Jump Beyond Connection)	4 – 6 Oktober 2022 October 4 – 6, 2022	PLN NP – Jatim Expo Surabaya

Program Pengembangan Kompetensi Direksi

Competency Development Program of the Board of Directors

Nama Name	Jabatan dan Masa Jabatan Position and Term of Office	Pelatihan/Seminar/ Workshop/Narasumber Training/Seminar/ Workshop/Narrator	Waktu Pelaksanaan Time of Implementation	Penyelenggara dan Lokasi Organizer and Location
Ruly Firmansyah	Direktur Utama (21 September 2022 – 31 Desember 2022) President Director (September 21, 2022 - December 31, 2022)	*Executive Education : Board Ready – High Performance Boards*	24-25 November 2022 November 24-25, 2022	Pertamina Training & Consulting - Online
M Yossy Noval A	Direktur Operasi Pembangkit Gas Director of Gas Power Plant Operation	Webinar Series "Dukungan dan Komitmen PJB dalam Pengembangan Energi Baru Terbarukan" Webinar Series "PJB's Support and Commitment in the Development of New and Renewable Energy"	14 Januari 2022 January 14, 2022	LKS Gatrik UI
		Narasumber Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) FMP UNHAN RI Resource Person for Domestic Work Lecture (KKDN) FMP UNHAN RI	10 Februari 2022 February 10, 2022	Universitas Pertahanan RI Indonesia Defense University
		Webinar on Digitising Asset Management for State Owned Enterprises	10 Maret 2022 March 10, 2022	British Embassy Jakarta
		Webinar Ruang Energi : Pemanfaatan FABA Untuk Infrastruktur dan Kesejahteraan Masyarakat Energy Room Webinar: Utilization of FABA for Infrastructure and Community Welfare	7 April 2022 April 7, 2022	Ruang Energi Energy Room

Nama Name	Jabatan dan Masa Jabatan Position and Term of Office	Pelatihan/Seminar/ Workshop/Narasumber Training/Seminar/ Workshop/Narrator	Waktu Pelaksanaan Time of Implementation	Penyelenggara dan Lokasi Organizer and Location
		Webinar Pengenalan SMK 2 dan Sosialisasi Penghargaan K2 Webinar on Introduction of Vocational High School 2 and Socialization of K2 Awards	19 Mei 2022 May 19, 2022	Kementerian Energi dan SDM RI Dirjen Ketenagalistrikan Ministry of Energy and Human Resources RI Director General of Electricity
		Investment Strategies and Portfolio Management	28 Oktober 2022 October 28, 2022	Pertamina Training & Consulting - Online
		Seminar Nasional Internal Audit 2022 National Seminar on Internal Audit 2022	30 November 2022 November 30, 2022	Yayasan Pendidikan Internal Audit Internal Audit Education Foundation
		Narasumber Pengembangan Energi Baru Terbarukan sebagai wujud transisi energi menuju *net zero emission* Resource Person for New and Renewable Energy Development as a form of energy transition towards net zero emission	22 Desember 2022 December 22, 2022	PT Bukit Pembangkit Innovative
Rachmanoe Indarto	Direktur Operasi Pembangkit Batubara Director of Coal Power Plant Operation	*Investment Strategies and Portfolio Management*	28 Oktober 2022 October 28, 2022	Pertamina Training & Consulting - Online
Muhamad Reza	Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga (21 September 2022 – 31 Desember 2022) Director of Business Development and Commerce (September 21, 2022 - December 31, 2022)	*Business Development*	31 Oktober 2022 October 31, 2022	Surabaya
		Narasumber Kuliah Tamu, Topik: Etika Profesi dan Isu Kontemporer Bidang Teknik Kelautan ITB Guest Lecture Speaker, Topic: Professional Ethics and Contemporary Issues in Marine Engineering ITB	9 November 2022 November 9, 2022	ITB
		Pelatihan Pengembangan Profesional Sosial Media Social Media Professional Development Training	18 November 2022 November 18, 2022	PT PLN (Persero)
		Narasumber *The 6th Internal Conference on Learning & Development* (ICLAD) Resource Person of The 6th Internal Conference on Learning & Development	30 November 2022 November 30, 2022	ICLAD
		Executive Education : Board Ready – High Performance Boards	24-25 November 2022 November 24-25, 2022	Pertamina Training & Consulting - Online
		Narasumber dalam *Improving Lives Through Innovation and Sustainable Business* Resource Person in Improving Lives Through Innovation and Sustainable Business	22 Desember 2022 December 22, 2022	Instellar
Dwi Hartono	Direktur Keuangan (21 September 2022 – 31 Desember 2022) Director of Finance (September 21, 2022 - December 31, 2022)	*Executive Education : Board Ready – High Performance Boards*	24-25 November 2022 November 24-25, 2022	Pertamina Training & Consulting - Online

Nama Name	Jabatan dan Masa Jabatan Position and Term of Office	Pelatihan/Seminar/ Workshop/Narasumber Training/Seminar/ Workshop/Narrator	Waktu Pelaksanaan Time of Implementation	Penyelenggara dan Lokasi Organizer and Location
Karyawan Aji	Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi Director of Human Capital Management and Administration	Narasumber : *How HR Leaders Can Help To Build The Future Organization During Disruptive And Virtual Era : an experience of PJB* Resource Person: How HR Leaders Can Help To Build The Future Organization During Disruptive And Virtual Era : an experience of PJB	26 Februari 2022 February 26, 2022	Pascasarjana Universitas Airlangga Airlangga University Postgraduate Program
		Effective Asset Management Culture and Leadership (Case Study in PT PJB)	6 April 2022 April 6, 2022	AMPEAK
		Narasumber : Kesiapan PJB untuk SDM EBT Resource Person: PJB Readiness for NRE HR	8 Juli 2022 July 8, 2022	Radio Suara Muslim Radio Suara Muslim
		Narasumber Kuliah Tamu dengan Topik : Implementasi Talent Management di PJB Guest Lecture Speaker with Topic: Implementation of Talent Management in PJB	23 September 2022 September 23, 2022	Fakultas Psikologi, Universitas Airlangga Faculty of Psychology, Airlangga University
		Workshop Aspek Perizinan & Aspek Kontrak Terkait Pembentukan *Subholding* PLN Workshop on Licensing & Contract Aspects Related to the Establishment of PLN Subholding	17 Oktober 2022 October 17, 2022	PT PLN (Persero)
		Speaker pada Agenda *Energy Transition Day* (*Road to* G20)	1 November 2022 November 1, 2022	PT PLN (Persero)
		Pembelajaran Pengembangan Profesional Sosial Media (*Self Learning*) Pembelajaran Pengembangan Profesional Sosial Media (Self Learning)	14 November 2022 November 14, 2022	PLN Pusdiklat UPDL Jakarta PLN Pusdiklat UPDL Jakarta

Program Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Competency Development Program of the Audit Committee

Nama Name	Jabatan dan Masa Jabatan Position and Term of Office	Pelatihan/Seminar/ Workshop/Narasumber Training/Seminar/ Workshop/Narrator	Waktu Pelaksanaan Time of Implementation	Penyelenggara dan Lokasi Organizer and Location
Edward Fahrizal	Wakil Ketua (Januari – Desember 2022) Vice Chairman (January – December 2022)	Seminar PJB Connect (PLN NP *Jump Beyond Connection*) Seminar on PJB Connect (PLN NP Jump Beyond Connection)	4 – 6 Oktober 2022 October 4 – 6, 2022	PLN NP – Jatim Expo Surabaya
Andar Sudiar Sukma	Anggota (Januari – Desember 2022) Member (January – December 2022)	Seminar PJB Connect (PLN NP *Jump Beyond Connection*) Seminar on PJB Connect (PLN NP Jump Beyond Connection)	4 – 6 Oktober 2022 October 4 – 6, 2022	PLN NP – Jatim Expo Surabaya
Sigit Djalu Purwoko	Sekretaris (Januari – Desember 2022) Secretary (January – December 2022)	Seminar PJB Connect (PLN NP *Jump Beyond Connection*) Seminar on PJB Connect (PLN NP Jump Beyond Connection)	4 – 6 Oktober 2022 October 4 – 6, 2022	PLN NP – Jatim Expo Surabaya

Program Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi
Competency Development Program of the Nomination and Remuneration Committee

Nama Name	Jabatan dan Masa Jabatan Position and Term of Office	Pelatihan/Seminar/ Workshop/Narasumber Training/Seminar/ Workshop/Narrator	Waktu Pelaksanaan Time of Implementation	Penyelenggara dan Lokasi Organizer and Location
Chaerudin Darsa	Sekretaris (Januari – Desember 2022) Secretary (January – December 2022)	Seminar PJB Connect (PLN NP *Jump Beyond Connection*) Seminar on PJB Connect (PLN NP Jump Beyond Connection)	4 – 6 Oktober 2022 October 4 – 6, 2022	PLN NP – Jatim Expo Surabaya
Eri Nurcahyanto	Anggota (Januari – Desember 2022) Member (January – December 2022)	Seminar PJB Connect (PLN NP *Jump Beyond Connection*) Seminar on PJB Connect (PLN NP Jump Beyond Connection)	4 – 6 Oktober 2022 October 4 – 6, 2022	PLN NP – Jatim Expo Surabaya

Program Pengembangan Kompetensi Komite Manajemen Risiko & Kepatuhan
Competency Development Program of the Risk Management & Compliance Committee

Nama Name	Jabatan dan Masa Jabatan Position and Term of Office	Pelatihan/Seminar/ Workshop/Narasumber Training/Seminar/ Workshop/Narrator	Waktu Pelaksanaan Time of Implementation	Penyelenggara dan Lokasi Organizer and Location
Bambang Istianto	Sekretaris (Januari – Desember 2022) Secretary (January – December 2022)	Konferensi Nasional Manajemen Risiko Tahun 2022 National Conference on Risk Management 2022	Desember 2022 December 2022	LPSMR
Gigih Udi Atmo	Anggota (Januari – Desember 2022) Member (January – December 2022)	Seminar PJB Connect (PLN NP *Jump Beyond Connection*) Seminar on PJB Connect (PLN NP Jump Beyond Connection)	4 – 6 Oktober 2022 October 4 – 6, 2022	PLN NP – Jatim Expo Surabaya

Program Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan
Competency Development Program of the Corporate Secretary

Nama Name	Pelatihan/Seminar/ Workshop/Narasumber Training/Seminar/ Workshop/Narrator	Waktu Pelaksanaan Time of Implementation	Penyelenggara dan Lokasi Organizer and Location
Zubaidah	*Governance Risk Compliance*	19 – 21 April 2022 April 19 – 21, 2022	PT Grajosa Resources – Online
	ISO 37001 Manajemen Anti Suap ISO 37001 Anti-Bribery Management	6 Juli 2022 July 6, 2022	BSI – Online
	Forum Hukum Legal Forum	1 – 5 Agustus 2022 August 1 – 5, 2022	PJB Academy – Mataram

Program Pengembangan Kompetensi Kepala Satuan Pengawasan Internal
Competency Development Program of the Head of Internal Audit Unit

Nama Name	Pelatihan/Seminar/ Workshop/Narasumber Training/Seminar/ Workshop/Narrator	Waktu Pelaksanaan Time of Implementation	Penyelenggara dan Lokasi Organizer and Location
Efin Febriantoro R	*Governance Risk Compliance*	19 – 21 April 2022 April 19 – 21, 2022	PT Grajosa Resources – Online
	Pembekalan Masa Persiapan Pensiun Debriefing on Retirement Preparation Period	26 – 27 April 2022 April 26 – 27, 2022	PJB Academy – Online
	ISO 37001 Manajemen Anti Suap ISO 37001 Anti-Bribery Management	6 Juli 2022 July 6, 2022	BSI – Online
	ISO 37302 *Whistle Blowing System* ISO 37302 Whistle Blowing System	19 – 20 September 2022 September 19 – 20, 2022	BSI – Online

Program Pengembangan Kompetensi Kepala Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Competency Development Program of the Head of Risk Management and Compliance Unit

Nama Name	Pelatihan/Seminar/ Workshop/Narasumber Training/Seminar/ Workshop/Narrator	Waktu Pelaksanaan Time of Implementation	Penyelenggara dan Lokasi Organizer and Location
Gunawan Yudi Hariyanto	*Governance Risk Compliance*	19 – 21 April 2022 April 19 – 21, 2022	PT Grajosa Resources – Online
	Wawasan Kebangsaan *Leadership* Leadership Insight	12 – 17 Juni 2022 June 12 – 17, 2022	PJB Academy – Bandung
	ISO 37001 Manajemen Anti Suap ISO 37001 Anti-bribery Management	4 Juli 2022 July 4, 2022	BSI - Online
	GRC *Summit*/Webinar GRC Summit/Webinar	25 – 26 Agustus 2022 August 25 – 26, 2022	CRMS Indonesia – Yogyakarta

Pengembangan Kompetensi untuk Karyawan
Competency Development for Employees

Kesetaraan dan Kesempatan yang Sama dalam Pendidikan dan Pelatihan
Equality and Equal Opportunity in Education and Training

PLN NP memberikan kesempatan yang sama bagi pengembangan kompetensi seluruh karyawan tanpa memandang *gender*, suku, agama dan ras (SARA) maupun level jabatan. Oleh karena itu, PLN NP menerapkan prinsip non diskriminasi yang ketat dan konsisten dalam pengelolaan SDM. PLN NP senantiasa berkomitmen meningkatkan kapasitas dan kapabilitas setiap karyawan pada seluruh jenjang organisasi dalam mendukung kinerja Perusahaan saat ini dan di masa depan. Komitmen ini tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama antara PLN NP dengan Serikat Kerja serta kebijakan *Human Experience Management System*, terutama aspek pendidikan dan pelatihan karyawan. Untuk informasi lebih lengkap terkait pengelolaan Sumber Daya Manusia secara menyeluruh, dapat dilihat pada Bab Aspek Penting Pendukung Bisnis bagian Sumber Daya Manusia dalam Laporan Tahunan ini.

PLN NP provides equal opportunities for the competency development of all employees regardless of gender, ethnicity, religion and race or position level. Therefore, PLN NP applies strict and consistent non-discrimination principles in HR management. PLN NP always committed to increasing the capacity and capability of every employee at all levels of the organization in supporting the Company's current and future performance. This commitment is stipulated in the Collective Labor Agreement between PLN NP and the Labor Union as well as the Human Experience Management System policy, especially the aspect of employee education and training. For more complete information regarding the overall management of Human Resources, please refer to the Important Aspects of Business Support chapter of the Human Resources section in this Annual Report.

PJB Academy

PJB Academy

PJB Academy memperoleh sertifikasi internasional dari Pearson UK sejak tahun 2017 dan tersertifikasi ISO 21001:2018. Sepanjang tahun 2022, PJB Academy telah memberikan pembelajaran terhadap 10.453 karyawan atau tercapai 101,78% dari target 10.270 karyawan.

PJB Academy obtained international certification from Pearson UK since 2017 and is ISO 21001:2018 certified. Throughout 2022, PJB Academy has provided learning to 10,453 employees or achieved 101.78% of the target of 10,270 employees.

PJB Academy didirikan sebagai upaya dalam meningkatkan kompetensi karyawan di lingkungan Grup PLN NP. Sertifikasi Pearson UK menjadi pengakuan bahwa pelaksanaan pembelajaran oleh PJB Academy dibangun dengan arah dan proses *learning & knowledge management* yang benar sekaligus untuk meyakinkan pemangku kepentingan bahwa kehadirannya menjadi kebutuhan dalam perkembangan transformasi PLN NP saat ini dan masa mendatang.

PJB Academy juga telah tersertifikasi ISO 21001:2018 sehingga PJB Academy dapat memberikan layanan pembelajaran berskala internasional bagi seluruh penerima layanan pembelajaran. Saat ini, PJB Academy memiliki 24 karyawan dengan sertifikat *Corporate Learning Technologist* (CLT) untuk mengelola *learning processs* dan *content* berstandar internasional.

Pembelajaran di PJB Academy meliputi pembelajaran kepemimpinan, pembelajaran profesional dan sertifikasi (*Operation & Maintenance*, Manajemen Aset Pembangkitan dan Bisnis Pembangkitan Terintegrasi), serta pembelajaran *corporate strategic*. Adapun pendekatan pembelajaran dilakukan dengan 2 (dua) metode:

1. *Performance Based Learning* (PBL)
   Pembelajaran dilakukan berdasarkan permasalahan yang terjadi disebabkan faktor karyawan atau SDM yang mengakibatkan kinerja unit tidak tercapai.
2. *Competence Based Learning* (CBL)
   Pembelajaran dilakukan untuk menutup kesenjangan kompetensi berdasarkan *assessment job competency* terhadap kebutuhan perusahaan baik yang bersifat jangka pendek maupun panjang.

PJB Academy was established as an effort to improve the competence of employees within the PLN NP Group. The Pearson UK certification is an acknowledgement that the implementation of learning by PJB Academy is built with the right direction and process of learning & knowledge management as well as to convince stakeholders that its presence is a necessity in the development of PLN NP's current and future transformation.

PJB Academy has also been certified with ISO 21001:2018 so that PJB Academy can provide international learning services for all learning service recipients. Currently, PJB Academy has 24 employees with Corporate Learning Technologist (CLT) certificates to manage international standard learning process and content.

Learning at PJB Academy includes leadership learning, professional learning and certification (Operation & Maintenance, Electric Power Generator Asset Management and Integrated Electric Power Generator Business), as well as corporate strategic learning. The learning approach is conducted with 2 (two) methods:

1. Performance Based Learning (PBL)
   Learning is based on issues caused by the employee or HR factors that result in unit performance not being achieved.
2. Competence Based Learning (CBL)
   Learning is carried out to close competency gaps based on job competency assessments against short and long term company needs.

PJB Academy memiliki program pembelajaran rutin yang merupakan hasil dari *Learning Need Analysis* setiap tahun dalam bentuk Kalender Akademik, dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi karyawan sesuai *gap* kompetensi masing-masing karyawan, temuan audit, regulasi baru atau pun menunjang tujuan Perusahaan. Jenis pengembangan kompetensi karyawan yang diselenggarakan oleh PJB Academy terdiri dari pengembangan kompetensi mulai dari jenjang Pelaksana, Supervisor, Manajemen Dasar sampai dengan Manajemen Atas.

PJB Academy has a routine learning program which is the result of Learning Need Analysis every year in the form of Academic Calendar, with the aim of improving employee competencies according to each employee's competency gap, audit findings, new regulations or supporting the Company's goals. The type of employee competency development organized by PJB Academy consists of competency development starting from the level of Executor, Supervisor, Basic Management to Upper Management.

Anggaran Pengembangan Kompetensi untuk Karyawan

Competency Development Budget for Employees

Realisasi anggaran untuk pengembangan kompetensi karyawan tahun 2022 adalah sebesar Rp61,29 miliar, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp46,83 miliar. Peningkatan ini terutama karena pelaksanaan kegiatan pembelajaran (secara *offline* / luring) untuk mendukung program HSH di tahun 2023.

The budget realization for employee competency development in 2022 was Rp61.29 billion, increased when compared to 2021 of Rp46.83 billion. This increase was mainly due to the implementation of learning activities (offline) to support the HSH program in 2023.

Grafik Realisasi Anggaran Pendidikan dan Pelatihan Karyawan Tahun 2020-2022 (Rp miliar)

Chart of Employee Education and Training Budget Realization in 2020-2022 (Rp billion)

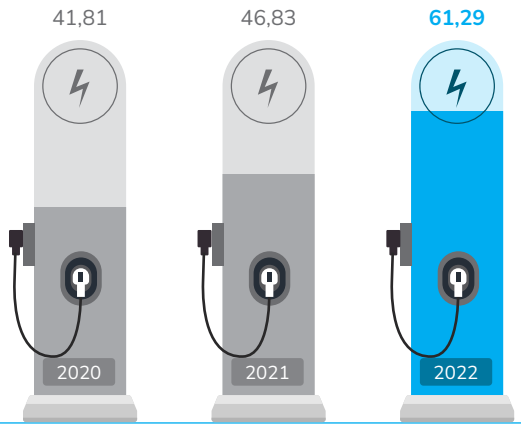

Rencana dan Realisasi Pengembangan Kompetensi Karyawan 2022

Employee Competency Development Plan and Realization in 2022

Rencana program pengembangan karyawan tahun 2022 tercapai seluruhnya. Berikut ini disajikan realisasi pengembangan kompetensi karyawan sepanjang tahun 2022:

The planned employee development program in 2022 was fully achieved. The following presents the realization of employee competency development throughout 2022:

Tabel Rencana Pengembangan Kompetensi Karyawan Tahun 2022

Table of Employee Competency Development Plan for 2022

Jenis Pengembangan Kompetensi Type of Competency Development	Jumlah *Batch* Number of Batches		Jumlah Peserta Number of Participants	
	Target Target	Realisasi Realization	Target Target	Realisasi Realization
Program Pelatihan Teknik Engineering Training Program	244	261	4.740	3.868
Program Pelatihan Non Teknik Non-Engineering Training Program	176	205	3.096	3.682
Program Sertifikasi Teknik Engineering Certification Program	109	125	1.864	1.707
Program Sertifikasi Non Teknik Non-Engineering Certification Program	41	38	570	454
Workshop Teknik Engineering Workshop	-	20	-	443
Workshop Non Teknik Non-Engineering Workshop	-	19	-	127
PGD	-	7	-	172
Jumlah Total	**570**	**675**	**10.270**	**10.453**

Diklat Penjenjangan

Upgrading Training

Diklat Penjenjangan merupakan diklat yang bersifat *mandatory* untuk diikuti oleh seluruh karyawan sebagai persyaratan kenaikan level atau penyetaraan level kompetensi dengan tanggung jawab pekerjaan. Hal tersebut berlaku bagi seluruh Anak Perusahaan yang telah meratifikasi sistem pembinaan karir dan kompetensi PT PLN (Persero) terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:

1. *Executive Education* (EE)/ *Supervisory Education* (SE), merupakan diklat bagi karyawan yang diproyeksikan menduduki jabatan struktural dengan persyaratan kebutuhan kompetensi jabatan di atas level kompetensinya, terdiri dari level SE-1 untuk Level Supervisor, EE-3 untuk Level Manajemen Dasar, EE-2 untuk *Level* Manajemen Menengah dan EE-1 untuk Level Manajemen Atas.
2. *Strategic Specialist Education* (SSE)/ *Strategic Specialist Education* (SPE), merupakan diklat bagi karyawan yang berada pada *grade* tertinggi pada suatu level kompetensi dan akan pindah level kompetensi di atasnya, atau ditujukan bagi karyawan yang akan menduduki jabatan fungsional dengan persyaratan kebutuhan kompetensi jabatan di atas level kompetensinya, terdiri dari Level SPE-1, SSE III sampai dengan Level SSE I.

Upgrading Training is a mandatory training to be attended by all employees as a requirement for leveling up or equalizing competency levels with job responsibilities. This applies to all subsidiaries that have ratified the career and competency development system of PT PLN (Persero) consisting of 2 types, namely:

1. Executive Education (EE)/Supervisory Education (SE), is training for employees who are projected to occupy structural positions with the requirements of position competency needs above their competency level, consisting of SE-1 level for Supervisor Level, EE-3 for Basic Management Level, EE-2 for Middle Management Level and EE-1 for Upper Management Level.
2. Strategic Specialist Education (SSE)/Strategic Specialist Education (SPE), is training for employees who are at the highest grade at a competency level and will move to the competency level above, or intended for employees who will occupy functional positions with the requirements of the competency needs of positions above their competency level, consisting of Level SPE-1, SSE III to Level SSE I.

Berikut adalah realisasi diklat penjenjangan sepanjang tahun 2022:

The following is the realization of upgrading training throughout 2022.

Tabel Diklat Penjenjangan Tahun 2022
Table of Upgraded Training in 2022

Jenis Diklat Penjenjangan Type of Upgrading Training	Jumlah Peserta Number of Participants	Dalam Proses In Process	Lulus Passed
EE 1	-	-	-
EE 2	63	35	28
EE 3	19	9	10
SE 1	95	15	80
SSE 1	8	-	8
SSE 2	1	-	1
SSE 3	50	3	47
SPE 1	7	0	7

Program Pendidikan Formal
Formal Education Program

PLN (Persero) juga membuka kesempatan bagi seluruh Karyawan PLN Group yang memiliki keminatan dan keinginan untuk mengembangkan kompetensi melalui pendidikan formal khususnya pada jenjang Magister maupun Doktoral melalui metode Program pendidikan formal PLN dan Luar PLN, baik dalam Negeri melalui skema Program Belajar Jarak Jauh (PBJJ) maupun Luar Negeri melalui skema Program Tugas Belajar (PTB).

Pada tahun 2022, terdapat 6 karyawan yang telah ditetapkan sebagai Peserta Program Pendidikan Formal PLN Group sebagai berikut:

PLN (Persero) also opens opportunities for all PLN Group employees who have the interest and desire to develop competencies through formal education, especially at the Masters and Doctoral levels through PLN and Outside PLN formal Education Program methods, both Domestically through the Distance Learning Program (PBJJ) scheme and Abroad through the Learning Task Program (PTB) scheme.

In 2022, there were 6 employees who had been determined as Participants of the PLN Group Formal Education Program as follows:

Tabel Program Pendidikan Formal PLN Group Tahun 2022
Table of PLN Group's Formal Education Programs in 2022

No	Lembaga Pendidikan Educational Institution	Jenjang Jenjang	Jurusan Department	Jumlah Karyawan Number pf Employees	Skema Schemes
1.	University of Auckland	S2 Master Degree	Master of Energy	1	Program Tugas Belajar (PTB) Learning Task Program (LTP)
2.	Monash University	S2 Master Degree	The Master of Business Innovation	1	Program Tugas Belajar (PTB) Learning Task Program (LTP)
3.	University of Manchester	S2 Master Degree	Management MSC	1	Program Tugas Belajar (PTB) Learning Task Program (LTP)
4.	Universitas Indonesia University of Indonesia	S2 Master Degree	Economic & Finance	2	Program Tugas Belajar (PTB) Learning Task Program (LTP)
5.	Universitas Indonesia University of Indonesia	S2 Master Degree	Hukum Law	1	Program Tugas Belajar (PTB) Learning Task Program (LTP)

Program Magang
Internship Program

Program Magang di PLN NP terbagi menjadi 2 (dua) macam bentuk pelaksanaan, yaitu (1) sebagai *reward* bagi peserta *scholarship* agar dapat mengembangkan diri sesuai tujuan PLN NP dalam membentuk SDM unggul dan (2) diinisiasi oleh PLN NP sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

Program magang yang dilaksanakan selama tahun 2022 adalah magang selama 2 minggu di Sembcorp Power, Singapura pada tanggal 4 – 17 Desember 2022. Program magang ini merupakan salah satu tindak lanjut dari benchmark yang dilaksanakan pada tahun 2022, dan diikuti oleh 9 peserta magang dari PLN NP yang bertujuan untuk menyasar pengembangan kompetensi terkait teknologi *Floating* PV yang sudah lebih dulu diimplementasikan di Singapura.

The Internship Program at PLN NP is divided into 2 (two) forms of implementation, namely (1) as a reward for scholarship participants in order to develop themselves according to PLN NP's goal of forming superior human resources and (2) initiated by PLN NP according to the needs of the Company.

The internship program carried out during 2022 was a 2-week internship at Sembcorp Power, Singapore on December 4-17, 2022. This internship program is a follow-up to the benchmark carried out in 2022, and was attended by 9 interns from PLN NP which aims to target competency development related to Floating PV technology that has been implemented in Singapore.

Program *Benchmarking*
Benchmarking Program

Program benchmarking dilaksanakan dengan melakukan kunjungan langsung ke perusahaan terkait agar mendapat *experience* secara langsung untuk kemudian dapat diimplementasikan praktiknya di PLN NP.

Pada tahun 2022, kegiatan *benchmarking on-site* baru dapat terlaksana di Semester 2 melalui program PJB Global Race Adventure (GREAT). Adapun program ini bertujuan untuk:
1. Menambah wawasan dan perspektif secara global
2. Mendapatkan pengalaman dan *networking* semakin luas
3. Membuka cakrawala melalui kebudayaan lokal, teknologi dan isu bisnis terkini
4. Memberikan *self-development* menghadapi tantangan secara kritis dan cepat tanggap
5. Melatih *social-adaptation*, *leadership*, *teamwork*, kepercayaan diri dan jiwa kemandirian

Terdapat 20 karyawan yang ditugaskan sebagai peserta untuk dapat mencari perusahaan terbaik di 5 negara ASEAN yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina dan Vietnam.

The benchmarking program is carried out by conducting direct visits to related companies in order to gain direct experience and then implement its practices in PLN NP.

In 2022, on-site benchmarking activities can only be carried out in Semester 2 through the PJB Global Race Adventure (GREAT) program. This program aims to:
1. Gain global insight and perspective
2. Gain wider experience and networking
3. Open horizons through local culture, technology and the latest business issues
4. Provide self-development to face challenges critically and responsively
5. Train social-adaptation, leadership, teamwork, self-confidence and independence

There are 20 employees assigned as participants to find the best companies in 5 ASEAN countries namely Singapore, Malaysia, Thailand, Philippines and Vietnam.

Tabel Program *Benchmarking* PLN NP ke Perusahaan Lain Tahun 2022
Table of PLN NP Benchmarking Program to Other Companies in 2022

No	Nama Perusahaan Company Name	Tema Theme	Jumlah Peserta dari PLN NP Number of Participants from PLN NP
1.	Sembcorp, Singapura	*Site Visit Floating* PV dan *Renewable Energy* Site Visit to Floating PV and Renewable Energy	4
2.	Sembcorp, Vietnam	*Site Visit Floating* PV dan *Renewable Energy* Site Visit to Floating PV and Renewable Energy	4
3.	Kedutaan Besar Indonesia di Filipina dan Vietnam Indonesian Embassies in the Philippines and Vietnam	Diskusi, *Networking* dan penjajakan peluang kerjasama bagi PJB di Filipina Discussion, Networking and exploration of cooperation opportunities for PJB in the Philippines	4
4.	Kedutaan Besar Indonesia di Vietnam Indonesian Embassies in the Vietnam	Diskusi, *Networking* dan penjajakan peluang kerjasama bagi PJB di Vietnam Discussion, Networking and exploration of cooperation opportunities for PJB in the Vietnam	4
5.	Honeywell, Malaysia	Inovasi dan Teknologi alat industri global Innovation and Technology of global industrial tools	4
6.	HAPUA WG 5 Secretary, Malaysia	Penjajakan program pengembangan karyawan di komunitas perusahaan listrik di Asia Tenggara Exploration of employee development programs in the electric company community in Southeast Asia	4
7.	Ethos Energy, Thailand	Penjajakan Peluang Kerjasama dengan Ethos Energy dan Teknologi Pembangkit terkini Exploring Cooperation Opportunities with Ethos Energy and the latest Power Plant Technology	4

Selain itu, PLN NP juga menjadi tujuan *benchmarking* oleh Perusahaan lain. Adapun kunjungan dari Perusahaan lain sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

In addition, PLN NP also became a benchmarking destination by other companies. The visits from other companies throughout 2022 were as follows:

Tabel Program *Benchmarking* Perusahaan Lain ke PLN NP Tahun 2022
Table of Benchmarking Program of Other Companies to PLN NP in 2022

No	Nama Perusahaan Company Name	Tema Theme	Jumlah Peserta Number of Participants
1.	PT Sumber Segara Primadaya	Sistem Informasi Teknologi Information Technology System	8
2.	PT Indonesia Power (PLTU Banten 3 Lontar) PT Indonesia Power (Banten 3 Lontar CFPP)	Pencapaian Proper Emas UBJOM Rembang Rembang OMSBU Gold Proper Achievement	16
3.	Haleyora Power	Sistem Manajemen Terintegrasi Integrated Management System	5
4.	PT Barata Indonesia	Sistem Manajemen Terintegrasi Integrated Management System	21
5.	PLN UIT JBT	*Decision Support System*	14
6.	PT Icon Plus	*Benchmark* Manajemen Risiko Terintegrasi Integrated Risk Management Benchmark	7

Program Sertifikasi
Certification Program

Sertifikasi merupakan pengakuan terhadap kompetensi seorang profesional yang telah memenuhi standar profesi pada bidangnya masing-masing. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam industri pembangkitan serta penyediaan jasa operasi dan pemeliharaan kelistrikan, melakukan sertifikasi kepada karyawannya guna menjaga standar kompetensi yang dimiliki dalam bekerja.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan Unit maupun Korporat terkait isu keinsinyuran yang berkembang dewasa ini sebagaimana Undang-undang No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran yang menyebutkan bahwa bagi pekerja di bidang pembangkit wajib memiliki sertifikasi, jika tidak maka dianggap sebagai kegiatan malpraktek. Untuk itulah, PJB Academy menjalin kerjasama dengan UGM untuk melakukan pendampingan dan sertifikasi keinsinyuran bagi karyawan PLN NP di bidang teknik agar dapat diakui sebagai anggota Persatuan Insinyur Indonesia (PII).

Certification is recognition of the competence of a professional who has met professional standards in their respective fields. As a company engaged in the electric power generator industry and the provision of electricity operation and maintenance services, certifying its employees in order to maintain their competency standards at work.

In order to meet the needs of the Unit and Corporate related to engineering issues that are currently developing as Law No. 11 of 2014 concerning Engineering which states that for workers in the field of power plants are required to have certification; otherwise it is considered a malpractice activity. For this reason, PJB Academy collaborates with UGM to provide assistance and engineering certification for PLN NP employees in the field of engineering so that they can be recognized as members of the Indonesian Engineers Association (PII).

Tabel Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Tahun 2020-2022
Table of Implementation of Competency Certification for Electricity Engineering Personnel in 2020-2022

Jenis Sertifikasi Type of Certification	Jumlah Karyawan yang Disertifikasi Number of Certified Employees		
	2020	2021	2022
Core Competence			
Sertifikasi PMK (Kelas B, C & D) FMD Certification (Class B, C & D)	53	180	175
Sertifikasi K3 (Listrik, Umum, Kimia, Ketinggian, Ruang Terbatas) OHS Certification (Electrical, General, Chemical, Altitude, Confined Space)	110	110	79
Sertifikasi Operator *Boiler* Boiler Operator Certification	-	-	-
Supporting Competence			
Sertifikasi *Process Safety* Process Safety Certification	-	-	34
Process Safety Certification Management (PSM)	-	-	-
Sertifikasi Manajemen Pelatihan - BNSP Training Management Certification - BNSP	-	31	-
Sertifikasi *Training for Trainer* Training for Trainer Certification	-	103	19
CHRPE	-	-	-
Sertifikasi Auditor SMK3 OHSMS Auditor Certification	43	40	1

Selain itu, terdapat sertifikasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) yang diwajibkan oleh pemerintah sebagai perusahaan yang bergerak di bidang usaha ketenagalistrikan. Sebagai bentuk komitmen dan kepatuhan tersebut, PJB Academy juga telah melakukan sertifikasi bagi seluruh karyawan di bidang teknik mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No. 46 Tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan. Jumlah karyawan yang memperoleh Sertifikasi dari DJK pada tahun 2022 adalah sebanyak 466 karyawan, yaitu tercapai 135,86% dari target yang ditetapkan sebanyak 343 karyawan.

In addition, there is a Directorate General of Electricity (DJK) certification required by the government as a company engaged in the electricity business. As a form of commitment and compliance, PJB Academy has also certified all employees in the field of engineering referring to the Regulation of the Minister of EMR No. 46 of 2017 concerning Standardization of Competence of Electricity Engineering Personnel. The number of employees who obtained Certification from DGCE in 2022 was 466 employees, which achieved 135.86% of the set target of 343 employees.

Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi
Evaluation of Competency Development Implementation

Program Evaluasi Pengembangan Kompetensi
Competency Development Evaluation Program

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan produktivitas karyawan, PLN NP senantiasa melakukan evaluasi kegiatan pengembangan kompetensi secara berkesinambungan guna mendapatkan tanggapan, masukan dan penyempurnaan, antara lain terkait aspek-aspek berikut:

1. Pengoptimalan pelaksanaan pembelajaran yang dapat dilakukan secara *offline*/ luring untuk beberapa pembelajaran yang membutuhkan pendalaman dan praktikum,
2. Memperbarui materi pembelajaran menyesuaikan dengan kondisi teknologi saat ini dan tujuan perusahaan,
3. Penyesuaian waktu pelaksanaan pembelajaran dengan program-program besar korporat dan penugasan khusus unit peserta seperti *overhaul* dan lain sebagainya.

In order to improve employee effectiveness and productivity, PLN NP continuously evaluates competency development activities to obtain feedback, input and improvements, among others, related to the following aspects:

1. Optimizing the implementation of learning that can be conducted offline for several lessons that require deepening and practicum,
2. Updating learning materials according to current technological conditions and company goals,
3. Adjustment of learning implementation time with major corporate programs and special assignments of participant units such as overhaul and etc.

Rencana Pengembangan Kompetensi Karyawan Tahun 2023
Employee Competency Development Plan for 2023

Pada tahun 2023, PLN NP merencanakan kegiatan pengembangan kompetensi karyawan sebagai berikut:

In 2023, PLN NP plans employee competency development activities as follows:

Tabel Rencana Pengembangan Kompetensi Karyawan Tahun 2023
Table of Employee Competency Development Plan for 2023

Jenis Pengembangan Kompetensi Type of Competency Development	Jumlah *Batch* Number of Batches	Jumlah Peserta Number of Participants
Program Pelatihan Teknik Engineering Training Program	221	4.983
Program Pelatihan Non Teknik Non-Engineering Training Program	127	3.935
Program Sertifikasi Teknik Engineering Certification Program	103	2.749
Program Sertifikasi Non Teknik Non-Engineering Certification Program	36	423
Jumlah Total	**487**	**12.090**

Struktur dan Komposisi Pemegang Saham
Structure and Composition of the Shareholders

Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali
Information on Major and Controlling Shareholders

Pemegang saham PLN NP yaitu PT PLN (Persero) dengan kepemilikan saham sebesar 99,99% dan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) dengan kepemilikan saham sebesar 0,01%. PT PLN (Persero) merupakan pemegang saham utama dan pengendali PLN NP. Direktur Utama PT PLN (Persero) merupakan representasi pemegang saham utama dan pengendali, dimana secara teknis hubungan dengan pemegang saham berada di bawah Sekretaris Perusahaan PT PLN (Persero) Fungsi Hubungan Investor.

Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait dengan: (a) Rincian 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya, (b) nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham maupun kelompok pemegang saham masyarakat yang kurang dari 5%.

PLN NP shareholders are PT PLN (Persero) with 99.99% shareholding and Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) with 0.01% shareholding. PT PLN (Persero) is the major and controlling shareholder of PLN NP. The President Director of PT PLN (Persero) is the representative of the major and controlling shareholders, where technically the relationship with shareholders is under the Corporate Secretary of PT PLN (Persero), the Investor Relations Function.

Therefore, there is no information related to: (a) Details of the 20 largest shareholders and their percentage ownership, (b) names of shareholders who own 5% or more of the shares as well as public shareholder groups with less than 5%.

Komposisi Pemegang Saham
Composition of the Shareholders

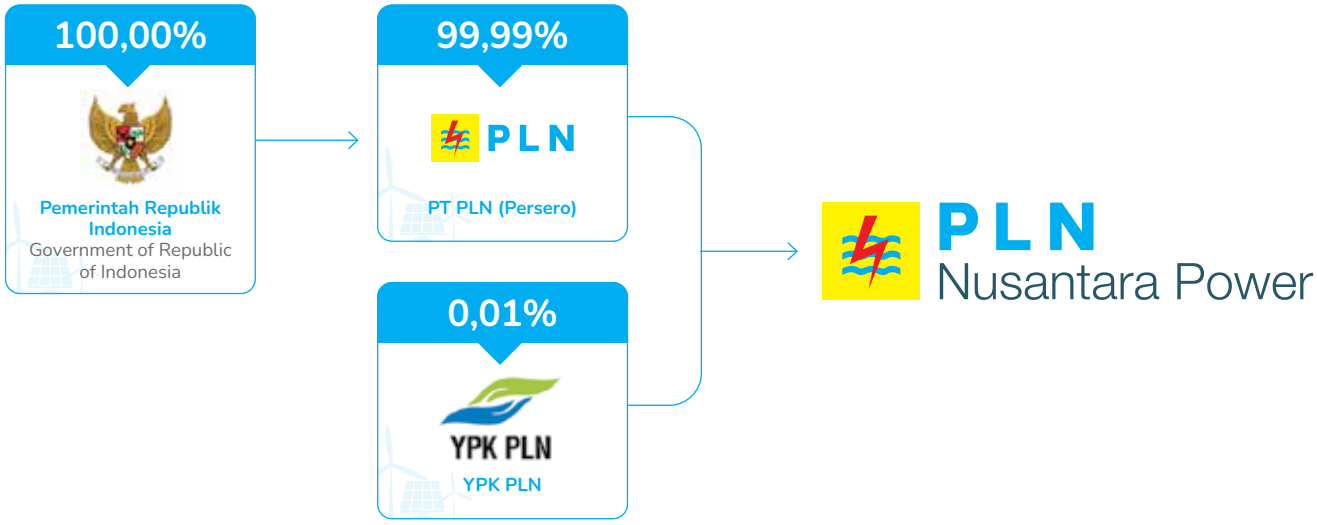

Berdasarkan pasal 4 Anggaran Dasar, modal dasar Perusahaan ditetapkan sebesar Rp12.000.000.000.000,- (dua belas triliun Rupiah) terbagi dalam 24.000.000.000 saham, terdiri atas 1 Saham Seri 1 dan 23.999.999.999 Saham Seri 2, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah).

Modal tersebut telah ditempatkan dan disetor dengan komposisi sebagai berikut:

1. PT PLN (Persero) sebanyak 1 Saham Seri 1 dan 5.999.999.998 Saham Seri 2 dengan nilai nominal sebesar Rp2.999.999.999.500,- (dua triliun sembilan ratus sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah);
2. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) sebanyak 1 Saham Seri 2 dengan nilai nominal sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah).

Based on article 4 of the Company's Articles of Association, the Company's authorized capital is set at Rp12,000,000,000,000 (twelve trillion Rupiah) divided into 24,000,000,000 shares, consisting of 1 Series-1 Share and 23,999,999,999 Series-2 Shares, each share has the nominal value of Rp500 (five hundred Rupiah).

The capital has been issued and paid up with the following composition:

1. PT PLN (Persero) as much as 1 Share of Series 1 and 5,999,999,998 Shares of Series 2 with a nominal value of Rp2.999.999.999.500, - (two trillion nine hundred nine billion nine hundred ninety-nine million nine hundred ninety-nine thousand five hundred Rupiah);
2. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) of 1 Share of Series 2 with a nominal value of Rp500, - (five hundred Rupiah).

Kepemilikan Saham oleh Direksi dan Dewan Komisaris
Share Ownership by the Board of Directors and Board of Commissioners

Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris PLN NP yang menjabat sepanjang tahun 2022 tidak memiliki saham baik secara langsung maupun tidak langsung di Perusahaan.

All Board of Directors and Board of Commissioners of PLN NP who served throughout 2022 had no shares either directly or indirectly in the Company.

Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali
Information on Major and Controlling Shareholders

Pemegang saham mayoritas PLN NP adalah PT PLN (Persero) dengan kepemilikan sebesar 99,99%, sehingga Pemegang Saham Utama dan Pengendali PLN NP adalah PT PLN (Persero). Pemegang Saham pengendali adalah pemilik saham mayoritas dan memiliki peran untuk mengendalikan kebijakan yang akan diambil oleh manajemen Perusahaan.

PLN NP's majority shareholder is PT PLN (Persero), with 99.99% shareholding, and therefore making PT PLN (Persero) as the Majority and Controlling Shareholder of PLN NP. Controlling Shareholder holds the majority of shares and has the ability to control the policies to be adopted by the Company management.

Pemegang Saham dengan Kepemilikan 5% atau Lebih
Shareholders with 5% or More Ownership

Pemegang Saham PLN NP persentase kepemilikan saham 5% dan lebih adalah PT PLN (Persero) dengan persentase sebesar 99,99%.

Shareholder of PLN NP with share ownership percentage of 5% and more is PT PLN (Persero) with a percentage of 99.99%.

Pemegang Saham dengan Kepemilikan Kurang dari 5%

Shareholders with Less than 5% Ownership

Pemegang Saham PLN NP presentase kepemilikan saham kurang dari 5% adalah Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) dengan kepemilikan saham sebesar 0,01%.

Shareholders of PLN NP with shareholding percentage of less than 5% are Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) with shareholding of 0.01%.

Kepemilikan Saham oleh Masyarakat

Public Share Ownership

Sampai dengan akhir tahun 2022, PLN NP tidak mencatatkan sahamnya di bursa saham, baik di Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun di bursa saham lainnya. Sehingga tidak terdapat informasi pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan 5%, lebih dari 5% atau kurang dari 5%.

Until the end of 2022, PLN NP does not list its shares on the stock exchange, either on the Indonesia Stock Exchange (IDX) or on other stock exchanges. Therefore, there is no information on public shareholders with ownership of 5%, more than 5% or less than 5%.

Jumlah Pemegang Saham dan Persentase Kepemilikan, Berdasarkan Klasifikasi

Number of Shareholders and Shareholding Percentage, by Classification

Kepemilikan Saham PLN NP seluruhnya dimiliki oleh institusi lokal yaitu PT PLN (Persero) dan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) yang seluruhnya berkedudukan di Indonesia.

PLN NP's shares are fully held by local institution, i.e., PT PLN (Persero) and Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero), both of which are based in Indonesia.

Struktur Grup PLN Nusantara Power

Group Structure of PLN Nusantara Power

Dalam rangka memperluas dan menambah kontribusi dalam industri kelistrikan nasional terutama pada industri pembangkitan tenaga listrik, Grup PLN NP senantiasa melakukan pengembangan beragam proyek pembangkit unggulan di Indonesia.

In order to expand and increase its contribution in the national electricity industry, especially in the electric power generator industry, PLN NP Group always develops various leading power plant projects in Indonesia.

Sampai dengan akhir tahun 2022, PLN NP memiliki 5 (lima) Entitas Anak, 4 (empat) Cucu-Cicit Perusahaan, 4 (empat) Entitas Asosiasi dan memiliki 6 (enam) Entitas Patungan (*Joint Venture Company*/ JVC) dengan kepemilikan saham oleh Anak Perusahaan.

Entitas Anak adalah suatu perusahaan yang dikendalikan oleh PLN NP, memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasionalnya untuk memperoleh manfaat dari aktivitas entitas tersebut. Sedangkan untuk Entitas Cucu-Cicit adalah perusahaan yang dikendalikan oleh PLN NP melalui Entitas Anak dengan kepemilikan terhadap Entitas Cucu-Cicit adalah mayoritas.

Entitas Asosiasi adalah suatu perusahaan dimana PLN NP dan entitas anak mempunyai pengaruh yang signifikan, dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian partisipasi dalam ventura bersama. Definisi "Pengaruh Signifikan" adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

Entitas Patungan (*Joint Venture Company*/JVC) merupakan perusahaan bersama dimana para pihak mempunyai bagian partisipasi dan diatur oleh persetujuan untuk berbagi pengendalian atas suatu aktivitas. Pada Entitas Patungan, keputusan keuangan dan operasional strategis terkait dengan aktivitasnya, dipersyaratkan secara konsensus dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

As of the end of 2022, PLN NP had 5 (five) Subsidiaries, 4 (four) Second to Third-Tier Subsidiaries, 4 (four) Associated Entities and had 6 (six) Joint Venture Companies (JVC) with share ownership by Subsidiaries.

Subsidiary Entity is a company controlled by PLN NP, has the power to regulate its financial and operational policies to obtain benefits from the entity's activities. Meanwhile, Second to Third-Tier Entities are companies controlled by PLN NP through Subsidiaries with majority ownership of the Second to Third-Tier Entities.

Associated Entity is a company where PLN NP and its subsidiaries have significant influence, and is neither a subsidiary nor a participating part in a joint venture. The definition of "Significant Influence" is the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee, but not control or joint control over the policy.

Joint Venture Company (JVC) is a joint enterprise in which the parties have a participating part and are regulated by an agreement to share control over an activity. In a Joint Venture Entity, strategic financial and operational decisions relating to its activities are required by consensus of all parties who share control.

Adapun struktur PLN NP Group tahun 2022 dapat digambarkan pada gambar berikut:

The structure of PLN NP Group in 2022 can be illustrated in the following picture:

5 Entitas Anak
Subsidiary

3 Entitas Asosiasi
Associated Entity

4 Entitas Cucu-Cicit
Second to Third-Tier Entity

7 Ventura Bersama
Joint Venture

- 40,25% — PT Bukit Pembangkit Innovative
- 49,00% — PT Sumber Segara Primadaya
- 36,61% — PT Bajradaya Sentranusa
- 49,00% — PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali
- 30,00% — PT Guo Hua Taidian PJB
- 25,00% — PT North Sumatera Hulu Energy
- 10,00% — PT Sumbagselenergi Sakti Pewali

Daftar Entitas Anak, Cucu-Cicit, Asosiasi dan Ventura Bersama

List of Subsidiaries, Second to Third-Tier Subsidiaries, Associates and Joint Ventures

Berikut disajikan daftar Entitas Anak, Cucu-Cicit, Asosiasi dan Ventura Bersama yang tergabung dalam Grup PLN NP sampai dengan tahun 2022:

The following is a list of Subsidiaries, Second to Third-Tier Subsidiaries, Associates and Joint Ventures that are members of the PLN NP Group until 2022:

Tabel Daftar Entitas Anak, Cucu-Cicit, Asosiasi dan Ventura Bersama

Table of List of Subsidiaries, Second to Third-Tier Subsidiaries, Associates and Joint Ventures

No	Nama Perusahaan Company Name	Tanggal Pendirian Date of Establishment	Status Operasi Operation Status	Kepemilikan Saham PLN NP PLN NP Share Ownership		Bidang Usaha Line of Business
				Penyertaan Modal Capital Investment	%	
Entitas Anak Subsidiary Entities						
1.	PT Pembangkitan Jawa Bali Services (PJBS)	30 Maret 2001 March 30, 2001	Beroperasi Operating	Rp102,9 miliar Rp102.9 billion	99,00%	Jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik dan pembangunan/(pemasangan) peralatan ketenagalistrikan Operation and maintenance services of power plants and construction/ (installation) of electricity equipment
2.	PT Rekadaya Elektrika (RE)	20 Oktober 2000 October 20, 2000	Beroperasi Operating	Rp710,7 miliar Rp710.7 billion	99,00%	Enjiniring, pengadaan dan konstruksi, dan operasi dan pemeliharaan sektor ketenagalistrikan Engineering, procurement and construction, as well as operation and maintenance of the electricity sector
3.	PT Navigat Innovative Indonesia (NII)	21 Oktober 2002 October 21, 2002	Beroperasi Operating	Rp99,8 miliar Rp99.8 billion	72,97%	Investasi pada pembangkit IPP Investment in IPP power plant
4.	PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI)	18 Desember 2015 December 18, 2015	Beroperasi Operating	Rp4,39 triliun Rp4.39 trillion	100,00%	Investasi pada pembangkit IPP/ ketenagalistrikan Investment in IPP/electricity power plant
5.	PT Prima Layanan Suku Cadang (PLNSC)	16 Juni 2017 June 16, 2017	Beroperasi Operating	Rp76,5 miliar Rp76.5 billion	51,00%	Penyediaan suku cadang Provision of spare parts for Power Plant
Entitas Cucu-Cicit Second to Third-Tier Subsidiary Entities						
1.	PT Mitra Karya Prima (MKP)	23 September 2004 September 23, 2004	Beroperasi Operating	Rp2,5 miliar Rp2.5 billion	92,00%	Penyediaan SDM untuk O&M Provision of HR for O&M
2.	PT Prima Power Nusantara (PPN)	16 Juni 2016 June 16, 2016	Beroperasi Operating	Rp125 miliar Rp125 billion	100,00%	Enjiniring, pengadaan dan konstruksi, dan operasi dan pemeliharaan sektor ketenagalistrikan Engineering, procurement and construction, as well as operation and maintenance of the electricity sector
3.	PT Pembangkitan Jawa Bali Investindo (PJB Investindo)	7 Juli 2020 July 7, 2020	Beroperasi Operating	Rp23,9 miliar Rp23.9 billion	100,00%	Penempatan investasi di pengadaan listrik Investment placement in electricity procurement
4.	PT Pembangkit Jawa Baskara Investasi Cirata (PJBIC)	7 Juli 2020 July 7, 2020	Beroperasi Operating	Rp23,9 miliar Rp23.9 billion	100,00%	Pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dan usaha Financing in the form of capital investment and electricity procurement business

No	Nama Perusahaan Company Name	Tanggal Pendirian Date of Establishment	Status Operasi Operation Status	Kepemilikan Saham PLN NP PLN NP Share Ownership		Bidang Usaha Line of Business
				Penyertaan Modal Capital Investment	%	
Entitas Asosiasi Associated Entities						
1.	PT Sumber Segara Primadaya (P2P)	12 Mei 2003 May 12, 2003	Beroperasi Operating	Rp437,5 miliar Rp437.5 billion	49,00%	Pembangkit listrik tenaga uap (IPP PLTU Cilacap Unit 1,2,3, Ekspansi Unit 4) Steam power plant (IPP Cilacap CFPP Unit 1,2,3, Unit 4 Expansion)
2.	PT Rekind Daya Mamuju (RDM)	21 Februari 2013 February 21, 2013	Beroperasi Operating	Rp24,6 miliar Rp24.6 billion	10,00%	Pembangkitan Tenaga Listrik Electric Power Generator
3.	PT Sumbagselenergi Sakti Pewali (SS Pewali)	6 Juni 2018 June 6, 2018	Tahap Pengembangan Development Stage	Rp13,97 miliar Rp13.97 billion	10,00%	Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU MT Sumbagsel 1, 2x150 MW) Steam power plant (MT Sumbagsel 1 CFPP, 2x150 MW)
Entitas Ventura Bersama Joint Venture Entities						
1.	PT Bajradaya Sentranusa (BDSN)	30 Oktober 1995 October 30, 1995	Beroperasi Operating	Rp388,5 miliar Rp388.5 billion	36,61%	Pembangkit listrik tenaga air (IPP PLTA Asahan 1, 2x90 MW) Hydro power plant (IPP Asahan 1 HPP, 2x90 MW)
2.	PT Bukti Pembangkit Innovative (BPI)	28 Agustus 2006 August 28, 2006	Beroperasi Operating	Rp332,1 miliar Rp332.1 billion	40,25%	Pembangkit listrik tenaga uap (IPP PLTU Banjarsari Unit 1-2, 2x110 MW) Steam power plant (IPP Banjarsari Unit 1-2 CFPP, 2x110 MW)
3.	PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali (KPJB)	30 September 2010 September 30, 2010	Beroperasi Operating	Rp11,1 miliar Rp11.1 billion	49,00%	Jasa operasi dan pemeliharaan PLTU Tanjung Jati B Unit 3-4, 2x660 MW) Operation and maintenance services of Tanjung Jati B Unit 3-4 CFPP, 2x660 MW)
4.	PT Shenhua Guo Hua Pembangkitan Jawa Bali (SGPJB)	13 Januari 2016 January 13, 2016	Beroperasi Operating	Rp1,56 triliun Rp1.56 trillion	30,00%	Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU Jawa 7, 2x1000 MW) Steam power plant (Java 7 CFPP, 2x1000 MW)
5.	PT Guo Hua Taidian Pembangkitan Jawa Bali (GTPJB)	23 September 2016 September 23, 2016	Beroperasi Operating	Rp1,95 miliar Rp1.95 billion	30,00%	Jasa operasi dan pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik (PLTU Jawa 7 2x1000 MW) Operation and maintenance services of Power Plant (2x1000 MW Java 7 CFPP)
6.	PT Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energy (PMSE)	7 Juli 2020 July 7, 2020	Tahap Pengembangan Development Stage	Rp23,7 miliar Rp23,7 billion	51,00%	Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS Terapung Cirata, 145 MW) Solar power plant (Cirata Floating SPP, 145 MW)
7.	PT North Sumatera Hulu Energy (NSHE)	30 April 2008 April 30, 2008	Tahap Pengembangan Development Stage	USD76.330.820 USD76,330,820	25,00%	Pembangkit listrik tenaga air (PLTA Batang Toru, 3x125 MW) Hydro power plant (Batang Toru HPP, 3x125 MW)

Profil dan Kilas Kinerja Entitas Anak, Cucu-Cicit, Asosiasi dan Ventura Bersama

Profile and Performance Overview of Subsidiaries, Second to Third-Tier Subsidiaries, Associates and Joint Ventures

Seluruh entitas yang tergabung dalam Grup PLN NP turut andil mendukung Perusahaan meningkatkan kontribusi pada industri pembangkitan tenaga listrik.

All entities that are members of the PLN NP Group participate in supporting the Company to increase its contribution to the electric power generator industry.

Profil dan Kilas Kinerja Entitas Anak

Profile and Performance Overview of Subsidiaries

PT Pembangkitan Jawa Bali Services (PJBS)

PJBS merupakan entitas anak PLN NP yang bergerak di bidang penyediaan jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik, pengadaan peralatan ketenagalistrikan, dan pembangunan atau pemasangan peralatan energi listrik. PJBS didirikan pada tanggal 30 Maret 2001 dengan persentase kepemilikan saham oleh PLN NP sebesar 99,00%.	PJBS is a subsidiary entity of PLN NP which is engaged in the provision of operation and maintenance services of power plants, procurement of electricity equipment, and construction or installation of electrical energy equipment. PJBS was established on March 30, 2001 with the percentage of share ownership by PLN NP of 99.00%.
Alamat Kantor Pusat Head Office Address	**Alamat Kantor Perwakilan** Representative Office Address
Jl. Raya Juanda No. 17 Sidoarjo 61253	Jl. Tebet Utara VI 6A, Tebet Timur, Jakarta Selatan 12810 info@pjbservices.com www.pjbservices.com

Dewan Komisaris Board of Commissioners		**Direksi** Board of Directors	
Komisaris Utama President Commissioner	Supangkat Iwan Santoso	Direktur Utama President Director	Teguh Widjajanto
Komisaris Commissioner	Retno Handayani	Direktur Perencanaan dan Pemasaran Director of Planning and Marketing	I Nyoman Awatara
Komisaris Commissioner	Supriyadi	Direktur Keuangan Director of Finance	Rudy Hertanto
Komisaris Commissioner	I Nyoman Ngurah Widiyatnya	Direktur Proyek Director of Project	Lavi Rumandioko
		Direktur Operation & Maintenance Director of Operation & Maintenance	Purwono Jati Agung
		Direktur Human Capital Director of Human Capital	Muhammad Bardan

Kinerja Keuangan Tahun 2020-2022 (Rp miliar) Financial Performance in 2020-2022 (Rp billion)

Uraian Description	2020	2021	2022
Jumlah Aset Total Assets	1.356,27	1.358,50	1.702,58
Pendapatan Usaha Revenues	1.712,74	1.853,80	2.170,86
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	120,98	123,86	187,09

PT Rekadaya Elektrika (RE)

rekadaya elektrika
trusted partner

RE merupakan entitas anak PLN NP yang bergerak di bidang *Engineering, Procurement and Construction* (EPC) sektor ketenagalistrikan yang melaksanakan pembangunan pembangkitan, serta fasilitas transmisi dan distribusi. RE berdiri sejak 20 Oktober 2000 dengan nama PT Delta Rekadaya Mandiri yang kemudian berganti nama menjadi PT Rekadaya Elektrika setelah PLN NP masuk sebagai pemegang saham pada 20 Desember 2002 dengan persentase kepemilikan saham oleh PLN NP sebesar 99,00%.	RE is a subsidiary entity of PLN NP which is engaged in Engineering, Procurement and Construction (EPC) in the electricity sector which carries out the construction of electric power generator, as well as transmission and distribution facilities. RE was established on October 20, 2000 under the name PT Delta Rekadaya Mandiri which later changed its name to PT Rekadaya Elektrika after PLN NP joined as a shareholder on December 20, 2002 with the percentage of share ownership by PLN NP of 99.00%.

Alamat Kantor Pusat
Head Office Address

Gedung 18 Office Park Building 18 Office Park
Jl. TB Simatupang No.18, RT.2/RW.1, Kebagusan, Kec. Pasar Minggu,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520
(+62 21) 2787 1818
rekadaya@rekadaya.com
www.rekadaya.co.id

Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
Komisaris Utama President Commissioner	Alfath Cordea Imalutha	Direktur Utama President Director	Jonner MP Pardosi
Komisaris Commissioner	Judi Rahmanu	Direktur Bisnis 1 Director of Business 1	Indrayoga Suharto
Komisaris Commissioner	Ahmad Bustami	Direktur Keuangan, SDM & Umum Director of Finance, HR & General Affairs	Onny Afrizal
Komisaris Commissioner	Achmad Fachruddin	Direktur Bisnis 2 Director of Business 2	Nur Hidayat
		Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha Director of Marketing and Business Development	Vernon Sapalatua Tampubolon

Kinerja Keuangan Tahun 2020-2022 (Rp miliar)
Financial Performance in 2020-2022 (Rp billion)

Uraian Description	2020	2021	2022
Jumlah Aset Total Assets	1.861,00	1.403,09	1.910,51
Pendapatan Usaha Revenues	840,02	869,64	1.206,35
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	8,95	2,16	6,96

PT Navigat Innovative Indonesia (NII)

NII merupakan entitas anak PLN NP yang bergerak di bidang perdagangan, konstruksi dan pertambangan. NII didirikan pada 21 Oktober 2002 dan PJB (PLN NP) masuk menjadi pemegang saham NII sejak 13 Januari 2012. Kegiatan usaha NII saat ini berupa penyertaan saham sebesar 11,10% di PT Bukit Pembangkit Innovative (BPI) sebagai pengembang IPP PLTU Banjarsari 2x110 MW serta pengembangan beberapa proyek pembangkit di wilayah Sumatera. Persentase kepemilikan saham NII oleh PLN NP adalah sebesar 72,97%.

NII is a subsidiary entity of PLN NP which is engaged in trading, construction and mining. NII was established on October 21, 2002 and PJB (PLN NP) has become a shareholder of NII since January 13, 2012. NII's current business activities are in the form of 11.10% share investment in PT Bukit Pembangkit Innovative (BPI) as the developer of IPP 2x110 MW Banjarsari CFPP and the development of several power plant projects in the Sumatra region. The percentage of NII share ownership by PLN NP is 72.97%.

Alamat Kantor Pusat
Head Office Address

Jl. Ketintang Baru No. 11, Surabaya 60231
(+62 31) 8283 180 ext. 540
(+62 31) 8283 183

Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
Komisaris Commissioner	Deni Susanto	Direktur Utama President Director	Luluk S. Andayani
Komisaris Commissioner	M. Soleh Thamrin	Direktur Director	Sri Andini

Kinerja Keuangan Tahun 2020-2022 (Rp miliar)
Financial Performance in 2020-2022 (Rp billion)

Uraian Description	2020	2021	2022
Jumlah Aset Total Assets	356,78	394,82	485,49
Pendapatan Usaha Revenues	37,81	17,09	51,57
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	29,49	17,09	51,57

PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI)

PJBI merupakan entitas anak PLN NP yang berfokus pada investasi di bidang pembangkit tenaga listrik, fasilitas pembangkit tenaga listrik, O&M pembangkit dan usaha penunjang pembangkit tenaga listrik, pembuatan dan peralatan ketenagalistrikan, penyediaan energi primer dan transportasinya, serta perdagangan peralatan pembangkit listrik. PJBI didirikan pada tanggal 18 Desember 2015 dengan persentase kepemilikan oleh PLN NP sebesar 100,00%.

PJBI is a subsidiary entity of PLN NP which focuses on investment in power plant, power plant facilities, O&M of power plant and power plant supporting business, manufacture and equipment of electricity, supply of primary energy and its transportation, as well as trading of power plant equipment. PJBI was established on December 18, 2015 with the percentage of ownership by PLN NP of 100.00%.

Alamat Kantor Pusat Head Office Address	Alamat Kantor Perwakilan Representative Office Address
Gedung 18 Office Park, Lt. 19 Building 18 Office Park, 19th Floor Jl. TB Simatupang No.18, RT.2/RW.1, Kebagusan Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12520 (+62 21) 783 41353 - info@pjbinvest.com www.pjbinvest.com	PT PLN Nusantara Power, Gedung D Building D Jl. Ketintang Baru No. 11 Surabaya 60231, Indonesia (+62 31) 838 3180 (+62 31) 838 3183 info@pjbinvest.com

Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
Komisaris Utama President Commissioner	Yama Bellatrixiana	Direktur Utama President Director	Amir Faisal
Komisaris Commissioner	Robikin Emhas	Direktur Operasi Director of Operation	Wirawan
Komisaris Commissioner	Susilo Widhyantoro	Direktur Keuangan Director of Finance	Ponti Silitonga

Kinerja Keuangan Tahun 2020-2022 (Rp miliar)
Financial Performance in 2020-2022 (Rp billion)

Uraian Description	2020	2021	2022
Jumlah Aset Total Assets	5.196,28	6.483,41	8.002,65
Pendapatan Usaha Revenues	389,41	708,28	892,15
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	444,44	799,99	1.000,37

PT Prima Layanan Suku Cadang (PLNSC)

PLNSC merupakan entitas anak PLN NP yang bergerak di bidang penyediaan *spareparts* pembangkit dari pabrikan, *reverse engineering*, standarisasi dan *product catalogue database*. PLN SC didirikan pada tanggal 16 Juni 2017 dengan persentase kepemilikan saham oleh PLN NP sebesar 51,00%.	PLNSC is a subsidiary entity of PLN NP which is engaged in the provision of spare parts for power plants from manufacturers, reverse engineering, standardization and product catalogue database. PLN SC was established on June 16, 2017 with the percentage of share ownership by PLN NP of 51.00%.
Alamat Kantor Pusat Head Office Address	**Alamat Kantor Perwakilan** Representative Office Address
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18 Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950 corsec@plnsc.co.id www.plnsc.co.id	Recapital Building, 3rd Floor Jl Adityawarman No. 55, Jakarta Selatan DKI Jakarta 12160 (+62 21) 8370 8760/62 (+62 21) 8370 8761

Dewan Komisaris Board of Commissioners		**Direksi** Board of Directors	
Komisaris Commissioner	Sapto Harjono Wahjoe Sedjati	Direktur Utama President Director	Thommi Haposan
Komisaris Commissioner	Najahul Imtihan	Direktur Bisnis dan Keuangan Director of Business and Finance	Miftahul Huda
		Direktur Enjinering & Layanan Director of Engineering & Service	Andy Adam

Kinerja Keuangan Tahun 2020-2022 (Rp miliar)
Financial Performance in 2020-2022 (Rp billion)

Uraian Description	2020	2021	2022
Jumlah Aset Total Assets	426,41	293,23	438,44
Pendapatan Usaha Revenues	356,52	261,84	506,51
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	34,64	11,66	30,69

Profil dan Kilas Kinerja Entitas Cucu-Cicit

Profile and Performance Overview of Second to Third-Tier Subsidiaries

PT Mitra Karya Prima (MKP)

MKP merupakan entitas anak dari PJBS yang bergerak di bidang penyediaan tenaga kerja atau SDM untuk O&M pembangkit listrik. MKP didirikan pada tanggal 23 September 2004 dengan persentase kepemilikan saham PJBS sebesar 92,00%.	MKP is a subsidiary entity of PJBS which is engaged in the provision of labor or HR for O&M of power plants. MKP was established on September 23, 2004 with the percentage of PJBS share ownership of 92.00%.

Alamat Kantor Pusat
Head Office Address

Juanda Business Center (JBC), Blok A, No. 4, 5 & 6
Jl. Raya Juanda No. 1, Sidoarjo, Jawa Timur 61253
(+62 31) 8548595
(+62 31) 8548596
info@mitrakaryaprima.com
www.mitrakaryaprima.com

Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
Komisaris Utama President Commissioner	Pramudya	Direktur Utama President Director	Hendra Hartanto Efendi
Komisaris Commissioner	Ade Sita Damayanti	Direktur SDM dan Keuangan Director of HR and Finance	Joni Arifin
Komisaris Commissioner	Eny Mar'atus Solikah	Direktur Pemasaran & Operasi Director of Marketing & Operation	Slamet Supriyanto

Kinerja Keuangan Tahun 2020-2022 (Rp miliar)
Financial Performance in 2020-2022 (Rp billion)

Uraian Description	2020	2021	2022
Jumlah Aset Total Assets	123,08	152,67	167,50
Pendapatan Usaha Revenues	285,15	360,84	398,02
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	23,53	24,47	21,60

PT Prima Power Nusantara (PPN)

PPN merupakan entitas anak dari RE yang bergerak di bidang *Engineering, Procurement and Construction* (EPC) sektor ketenagalistrikan yang melaksanakan pembangunan pembangkitan, serta fasilitas transmisi dan distribusi. PPN didirikan pada 16 Juni 2016 Pada tanggal 28 Juli 2022, RE mengakuisisi PPN dengan persentase kepemilikan saham oleh RE sebesar 100,00%.	PPN is a subsidiary entity of RE which is engaged in Engineering, Procurement and Construction (EPC) in the electricity sector which carries out the construction of electric power generator, as well as transmission and distribution facilities. PPN was established on June 16, 2016. On July 28, 2022, RE acquired PPN with the percentage of share ownership by RE of 100.00%.

Alamat Kantor Pusat
Head Office Address

Jl. Ciputat Raya, Pondok Pinang,
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
Komisaris Commissioner	Mohammad Sofyan	Direktur Utama President Director	Sarono
		Direktur Director	Setyo Herupurwoko
		Direktur Director	Abdul Fadil

Kinerja Keuangan Tahun 2020-2022 (Rp miliar)
Financial Performance in 2020-2022 (Rp billion)

Uraian Description	2020	2021	2022
Jumlah Aset Total Assets	277,62	240,39	199,11
Pendapatan Usaha Revenues	269,53	334,31	242,52
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	4,96	10,95	4,66

PT Pembangkitan Jawa Bali Investindo (PJB Investindo)

PJB Investindo merupakan entitas anak dari PJBI yang bergerak di bidang pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dan usaha pengadaan listrik. PJB Investindo didirikan pada tanggal 7 Juli 2020 dengan persentase kepemilikan saham oleh PJBI sebesar 100,00%.

PJB Investindo is a subsidiary entity of PJBI which is engaged in financing in the form of capital investment and electricity procurement business. PJB Investindo was established on July 7, 2020 with the percentage of share ownership by PJBI of 100.00%.

Alamat Kantor Pusat
Head Office Address

Gedung 18 Office Park, Lt. 19 Building 18 Office Park, 19th Floor
Jl. TB Simatupang No.18, RT.2/RW.1, Kebagusan
Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan
(+62 21) 783 41353

Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
Komisaris Commissioner	Irene Diana Putri	Direktur Director	Adimas Praditya

Kinerja Keuangan Tahun 2020-2022 (Rp miliar)
Financial Performance in 2020-2022 (Rp billion)

Uraian Description	2020	2021	2022
Jumlah Aset Total Assets	-	23,75	101,36
Pendapatan Usaha Revenues	-	(37,04)	16,28
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	-	(37,41)	16,28

PT Pembangkit Jawa Baskara Investasi Cirata (PJBIC)

PJBIC merupakan entitas anak dari PJBI yang bergerak di bidang pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dan usaha pengadaan listrik. PJBIC didirikan pada tanggal 7 Juli 2020 dengan persentase kepemilikan saham oleh PJBI sebesar 100,00%	PJBIC is a subsidiary entity of PJBI which is engaged in financing in the form of capital investment and electricity procurement business. PJBIC was established on July 7, 2020 with the percentage of share ownership by PJBI of 100.00%.

Alamat Kantor Pusat
Head Office Address

Gedung 18 Office Park, Lt. 19 Building 18 Office Park, 19th Floor
Jl. TB Simatupang No.18, RT.2/RW.1, Kebagusan
Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan
(+62 21) 783 41353

Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
Komisaris Commissioner	Hikma Pratama	Direktur Director	Herry Nico Siagian

Kinerja Keuangan Tahun 2020-2022 (Rp miliar)
Financial Performance in 2020-2022 (Rp billion)

Uraian Description	2020	2021	2022
Jumlah Aset Total Assets	-	23,75	193,91
Pendapatan Usaha Revenues	-	3,09	68,53
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	-	(37,04)	65,85

Profil dan Kilas Kinerja Entitas Asosiasi

Profile and Performance Overview of Associated Entities

PT Sumber Segara Primadaya (S2P)

S2P merupakan entitas asosiasi PLN NP dengan persentase kepemilikan saham sebesar 49,00%. S2P bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik (IPP) dengan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga uap Cilacap 2x300 MW yang beroperasi komersial pada 2 September 2006, Unit 3 dengan kapasitas 1x660 MW yang beroperasi komersial pada Juni 2016, dan Unit IIIA dengan kapasitas 1x1000 MW yang beroperasi komersial pada tanggal 9 November 2019.	S2P is an associated entity of PLN NP with the percentage of share ownership of 49.00%. S2P is engaged in the provision of electricity (IPP) by operating the 2x300 MW Cilacap steam power plant which commercially operated on September 2, 2006, Unit 3 with a capacity of 1x660 MW which commercially operated in June 2016, and Unit IIIA with a capacity of 1x1000 MW which commercially operated on November 9, 2019.
Alamat Kantor Pusat Head Office Address	**Alamat Kantor PLTU Cilacap** Cilacap CFPP Office Address
Treasury Tower, Lt. 39 Treasury Tower, 39th Floor SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 (+62 21) 2912 6888 (+62 21) 2912 6886 jakarta@ssprimadaya.co.id www.ssprimadaya.co.id	Jl. Lingkar Timur Karang Kandri, Kec. Kesugihan, Cilacap, Jawa Tengah

Dewan Komisaris Board of Commissioners		**Direksi** Board of Directors	
Komisaris Commissioner	Dewi Kam	Direktur Utama President Director	Agus Nurwahyudi
Komisaris Commissioner	Mohamad Abdullah Jasin	Direktur Teknologi & Operasi Director of Technology & Operation	Irvan Rahmat
Komisaris Commissioner	Agus Bagyo Hartadi	Direktur Keuangan & Umum Director of Finance & General Affairs	Lifransyah Gumay
Komisaris Commissioner	Gunawan Yudi Hariyanto		
Komisaris Commissioner	Kiswantara Partadiredja		

Kinerja Keuangan Tahun 2020-2022 (Rp miliar)
Financial Performance in 2020-2022 (Rp billion)

Uraian Description	2020	2021	2022
Jumlah Aset Total Assets	27.324,71	25.591,58	25.361,24
Pendapatan Usaha Revenues	12.780,61	12.113,68	13.127,95
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	1.861,30	1.253,04	824,16

PT Rekind Daya Mamuju (RDM)

REKIND DAYA MAMUJU

RDM merupakan entitas asosiasi dari RE dengan persentase kepemilikan saham sebesar 10,00%. RDM didirikan pada tanggal 21 Februari 2013 dengan bidang usaha sebagai pengelola PLTU Mamuju 2x25 MW yang telah COD sejak tanggal 19 September 2018.	RDM is an associated entity of RE with the percentage of share ownership of 10.00%. RDM was established on February 21, 2013 with a business field as the manager of the 2x25 MW Mamuju CFPP which has been COD since September 19, 2018.
Alamat Kantor Pusat Head Office Address	**Alamat Kantor PLTU Mamuju** Mamuju CFPP Office Address
Gedung Nucira Lt. 4 Nucira Building 4th Floor Jl. MT. Haryono Kav 27, Jakarta Selatan Jakarta 10230 (+62 21) 8378 7760/ 8378 5961 (+62 21) 8307 578 info@rdm.co.id www.rdm.co.id	Dusun Talaba, Ds. Belang-Belang Kec. Kalukku, Kab. Mamuju Sulawesi Barat

Dewan Komisaris Board of Commissioners		**Direksi** Board of Directors	
Komisaris Utama President Commissioner	Dedy Rinaldi	Direktur Utama President Director	Doni Mahardiansyah
Komisaris Commissioner	Iwan Slamet Triawan	Direktur Keuangan Director of Finance	Harry Fardiman
		Direktur Operasi Director of Operation	Akmaludin Bahri

Kinerja Keuangan Tahun 2020-2022 (USD)
Financial Performance in 2020-2022 (US$)

Uraian Description	2020	2021	2022
Jumlah Aset Total Assets	123.214.951	119.904.700	177.222.511
Pendapatan Usaha Revenues	19.931.938	16.962.849	21.495.793
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	1.970.627	(4.205.871)	(1.170.794)

PT Sumbagselenergi Sakti Pewali (SS Pewali)

SSP merupakan entitas asosiasi PJBI sebagai IPP PLTU MT Sumbagsel 1 2x150 MW yang didirikan pada tanggal 6 Juni 2018 dengan persentase kepemilikan saham PJBI sebesar 10,00%. Sampai dengan akhir tahun 2022, SS Pewali masih dalam tahap pengembangan.	SSP is an associated entity of PJBI as IPP of MT Sumbagsel 1 2x150 MW CFPP established on June 6, 2018 with the percentage of PJBI's share ownership of 10.00%. Until the end of 2022, SS Pewali is still in the development stage.
Alamat Kantor Pusat Head Office Address	**Alamat Unit** Unit Address
KYK Building Jl. Cideng Barat No. 32-33 Jakarta Pusat	Kec. Semidang Aji Kab. Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan

Dewan Komisaris Board of Commissioners		**Direksi** Board of Directors	
Komisaris Utama President Commissioner	Dewi Kam	Direktur Utama President Director	Hakim Nawawi
Komisaris Commissioner	Mohamad Abdullah Jasin	Direktur Director	Miftahur Rahman
Komisaris Commissioner	Yasin Rizal	Direktur Director	Zhou Jun
Komisaris Commissioner	Arif Istanto	Direktur Director	Ivony Salim

Kinerja Keuangan Tahun 2020-2022 (Rp miliar)
Financial Performance in 2020-2022 (Rp billion)

Uraian Description	2020	2021	2022
Jumlah Aset Total Assets	1.139,30	1.178,13	1.459,29
Pendapatan Usaha Revenues	-	-	-
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	1,53	(0,72)	12,67

Profil dan Kilas Kinerja Ventura Bersama

Profile and Performance Overview of Joint Ventures

PT Bajradaya Sentranusa (BDSN)

BAJRADAYA

BDSN merupakan entitas ventura bersama PLN NP yang bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik *Independent Power Producer* (IPP) mengoperasikan PLTA Asahan-I 2x90 MW. BDSN didirikan pada tanggal 30 Oktober 1995 dan PJB masuk sebagai pemegang saham pada tanggal 30 November 1996 dengan persentase kepemilikan saham oleh PLN NP sebesar 36,61%.	BDSN is a joint venture entity of PLN NP which is engaged in the provision of Independent Power Producer (IPP) electricity operating Asahan-I 2x90 MW HPP. BDSN was established on October 30, 1995 and PJB entered as a shareholder on November 30, 1996 with the percentage of share ownership by PLN NP of 36.61%.

Alamat Kantor Pusat
Head Office Address

Jl. Wijaya III No. 5 Kebayoran Baru, Jakarta 12160
(+62 21) 7202 117
bdsn.ho@bajradaya.com
www.bajradaya.com

Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
Komisaris Utama President Commissioner	Kesti Irawati	Direktur Utama President Director	Sumate Thongserm
Komisaris Commissioner	Alan Frendy Koropitan	Direktur Keuangan Director of Finance	Amran Sattu
Komisaris Commissioner	Sarwono Kusumaatmaja	Direktur (General & Administration) Director (General & Administration)	Sakchai Chaiyawan
Komisaris Commissioner	Montree Taothaisong		
Komisaris Commissioner	Thana Boonyasirikul		

Kinerja Keuangan Tahun 2020-2022 (USD)
Financial Performance in 2020-2022 (US$)

Uraian Description	2020	2021	2022
Jumlah Aset Total Assets	27.324,71	427.895,89	457.756.981
Pendapatan Usaha Revenues	12.780,61	46.425,40	43.091.246
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	1.861,30	23.827,40	16.608.592

PT Bukti Pembangkit Innovative (BPI)

BPI merupakan entitas ventura bersama PLN NP yang bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik IPP dengan mengoperasikan PLTU Banjarsari 2x110 MW di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. BPI didirikan pada tanggal 28 Agustus 2006 dengan persentase kepemilikan saham PLN NP sebesar 40,25%.	BPI is a joint venture entity of PLN NP which is engaged in the provision of IPP electricity by operating the 2x110 MW Banjarsari CFPP in Lahat Regency, South Sumatra. BPI was established on August 28, 2006 with the percentage of PLN NP's share ownership of 40.25%.
Alamat Kantor Pusat Head Office Address	**Alamat Kantor PLTU Banjarsari** Banjarsari CFPP Office Address
Graha Surveyor Indonesia Building, Lt. 17, Suite 1703 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta 12950 (+62 21) 5212 463/ 5212 470 (+62 21) 5210 725 secretary@bpi-ipp.com www.bpi-ipp.com	Jl. Lintas Tengah Sumatera Desa Sirah Pulau & Desa Gunung Kembang

Dewan Komisaris Board of Commissioners		**Direksi** Board of Directors	
Komisaris Utama President Commissioner	Sri Andini	Direktur Utama President Director	Wibisono
Komisaris Commissioner	Farida Thamrin	Direktur Keuangan & Umum Director of Finance & General Affairs	Wibisono
Komisaris Commissioner	Didik Mardiantara	Direktur Produksi dan Niaga Director of Production and Commerce	Ompang Reski Hasibuan

Kinerja Keuangan Tahun 2020-2022 (Rp miliar)
Financial Performance in 2020-2022 (Rp billion)

Uraian Description	2020	2021	2022
Jumlah Aset Total Assets	443.616.628	392.728,90	352.118.841
Pendapatan Usaha Revenues	69.939.347	72.737,55	71.532.302
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	23.377.582	29.039,83	31.232.436

PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali (KPJB)

KPJB merupakan entitas ventura bersama PLN NP yang bergerak di bidang jasa O&M, *coal handling, jetty* dan *port management* pada PLTU Tanjung Jati B Unit 3 & 4 yang berkapasitas 2x660 MW. KPJB didirikan pada tanggal 24 November 2010 dengan persentase kepemilikan saham PLN NP sebesar 49,00%.	KPJB is a joint venture entity of PLN NP which is engaged in O&M, coal handling, jetty and port management services at Tanjung Jati B Unit 3 & 4 CFPP with a capacity of 2x660 MW. KPJB was established on November 24, 2010 with the percentage of share ownership of PLN NP of 49.00%.

Alamat Kantor Pusat
Head Office Address

PLTU Tanjung Jati B Jawa Bali Unit 3 & 4 Tanjung Jati B Java Bali Unit 3 & 4 CFPP
Ds. Tubanan, Kec. Kembang, Kab. Jepara, Jawa Tengah
(+62 291) 4270 493
(+62 291) 4270 601
www.kpjb.co.id

Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
Komisaris Utama President Commissioner	Dodi Aprianata	Direktur Utama President Director	Kim Yun Kyu
Komisaris Commissioner	Adi Setiawan	Direktur Director	Robert Manyuzar
Komisaris Commissioner	Park Kyung Woo	Direktur Director	Kunto Wibisono
Komisaris Commissioner	Kang Hee Suck		

Kinerja Keuangan Tahun 2020-2022 (Rp miliar)
Financial Performance in 2020-2022 (Rp billion)

Uraian Description	2020	2021	2022
Jumlah Aset Total Assets	165,25	151,21	184,77
Pendapatan Usaha Revenues	224,04	228,55	223,17
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	54,72	14,74	44,09

PT Shenhua Guo Hua Pembangkitan Jawa Bali (SGPJB)

SGPJB merupakan entitas ventura bersama PJBI yang didirikan pada tanggal 13 Januari 2016 dengan persentase kepemilikan saham oleh PJBI sebesar 30,00%. Bidang usaha SGPJB adalah pengelola PLTU yaitu IPP PLTU Jawa-7 2x1000 MW yang telah COD sejak tahun 2019.	SGPJB is a joint venture entity of PJBI established on January 13, 2016 with the percentage of share ownership by PJBI of 30.00%. SGPJB's business field is the manager of CFPP, namely the IPP of Java-7 2x1000 MW CFPP which has been COD since 2019.
Alamat Kantor Pusat Head Office Address	**Alamat Unit** Unit Address
APL Tower Lt. 39 APL Tower 39th Floor Jl. Letjen S. Parman Kav. 28 Jakarta Barat	Kramatwatu Kab. Serang, Banten

Dewan Komisaris Board of Commissioners		**Direksi** Board of Directors	
Komisaris Utama President Commissioner	Burhanudin	Direktur Utama President Director	Zhao Zhigang
Komisaris Commissioner	Jakfar Sadiq	Direktur Director	Lu Chengjun
Komisaris Commissioner	Huang Bin	Direktur Director	Xu Beichen
Komisaris Commissioner	Ma Jianxin	Direktur Director	Cui Yukui
Komisaris Commissioner	Sun Yiding	Direktur Director	Doddy Nafiudin
Komisaris Commissioner	Wei Aili	Direktur Director	Eko Ariyanto

Kinerja Keuangan Tahun 2020-2022 (USD)
Financial Performance in 2020-2022 (US$)

Uraian Description	2020	2021	2022
Jumlah Aset Total Assets	2.122.253.545	2.256.136.234	2.252.759.576
Pendapatan Usaha Revenues	587.751.009	593.348.193	635.425.942
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	120.946.618	154.317.662	160.957.384

PT Guo Hua Taidian Pembangkitan Jawa Bali (GTPJB)

GHPJB merupakan entitas ventura bersama PJBI sebagai Jasa O&M Pembangkit PLTU Jawa 7 2x1000 MW yang didirikan pada tanggal 23 September 2016 dengan persentase kepemilikan saham oleh PJBI sebesar 30,00%.	GHPJB is a joint venture entity of PJBI as O&M Services for 2x1000 MW Java 7 CFPP established on September 23, 2016 with the percentage of share ownership by PJBI of 30.00%.
Alamat Kantor Pusat Head Office Address	**Alamat Unit** Unit Address
APL Tower Lt. 39 Jl. Letjen S. Parman Kav. 28 Jakarta Barat	Cilegon, Banten

Dewan Komisaris Board of Commissioners		**Direksi** Board of Directors	
Komisaris Utama President Commissioner	Puspahadi	Direktur Utama President Director	Zhao Zigang
Komisaris Commissioner	Wei Aili	Direktur Director	Lu Chengjun
Komisaris Commissioner	Lu Tao	Direktur Director	Tumpal Pangihutan Sirait

Kinerja Keuangan Tahun 2020-2022 (USD)
Financial Performance in 2020-2022 (US$)

Uraian Description	2020	2021	2022
Jumlah Aset Total Assets	2.272.554	3.189.152	2.911.441
Pendapatan Usaha Revenues	13.726.342	16.540.805	14.151.067
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	66.048	68.486	67.289

PT Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energy (PMSE)

PMSE merupakan entitas ventura bersama PJBI sebagai IPP PLTS Cirata 145 MW yang didirikan pada tanggal 7 Juli 2020 dengan persentase kepemilikan saham PJBI sebesar 51,00%. Sampai dengan akhir tahun 2022, PMSE masih dalam tahap pengembangan.	PMSE is a joint venture entity of PJBI as the IPP of Cirata 145 MW SPP established on July 7, 2020 with the percentage of PJBI's share ownership of 51.00%. Until the end of 2022, PMSE is still in the development stage.
Alamat Kantor Pusat Head Office Address	**Alamat Unit** Unit Address
Gedung 18 Office Park, Lt. 19 Building 18 Office Park, 19th floor Jl. TB Simatupang No.18, RT.2/RW.1 Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan (+62 21) 783 41353	Waduk Cirata Cirata Reservoir Kab. Bandung Barat Jawa Barat

Dewan Komisaris Board of Commissioners		**Direksi** Board of Directors	
Komisaris Utama President Commissioner	Ochairialdy	Direktur Utama President Director	Hugh Raeburn
Komisaris Commissioner	Yudhy Bhagaskara	Direktur Operasi Director of Operation	Dimas Kaharudin Indra Rupawan
Komisaris Commissioner	Borja Valero Polo	Direktur Keuangan dan Administrasi Director of Finance and Administration	Alfret Parulian Sinambela
Komisaris Commissioner	Abdulla Mohamed Abdulla Zayed		

Kinerja Keuangan Tahun 2020-2022 (USD)
Financial Performance in 2020-2022 (US$)

Uraian Description	2020	2021	2022
Jumlah Aset Total Assets	3.246.019	41.313.293	52.894.513
Pendapatan Usaha Revenues	-	7.180.765	26.376.968
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	416	(1.186.943)	9.032.787

PT North Sumatera Hulu Energy (NSHE)

NSHE merupakan ventura bersama PJBI sebagai IPP PLTA Batang Toru 4x125 MW yang didirikan pada tanggal 30 April 2008 dengan persentase kepemilikan saham oleh PJBI sebesar 25,00%. Sampai dengan akhir tahun 2022, NSHE masih dalam tahap pengembangan.	NSHE is a joint venture of PJBI as the IPP of the 4x125 MW Batang Toru HPP, which was established on April 30, 2008 with the percentage of share ownership by PJBI of 25.00%. Until the end of 2022, NSHE was still in the development stage.
Alamat Kantor Pusat Head Office Address	**Alamat Unit** Unit Address
Jl. Darmawangsa VII No. 7 Pulo, Kebayoran Baru Jakarta Selatan	Kab. Tapanuli Selatan Sumatera Utara

Dewan Komisaris Board of Commissioners		**Direksi** Board of Directors	
Komisaris Utama President Commissioner	Zhang Kaihong	Direktur Utama President Director	Du Yubao
Komisaris Commissioner	Ong Tion Soon	Direktur Keuangan Director of Finance	Zhang Shuai
Komisaris Commissioner	Jing Qiuyun	Direktur Urusan Luar Director of External Affairs	I Putu Yoga Wahyu Diputra
Komisaris Commissioner	Wandy Wanto	Direktur Proyek Director of Project	Chen Linzhong
Komisaris Commissioner	Weddy Bernadi Sudirman	Direktur Teknik Director of Technical	Djauhar Husni

Kinerja Keuangan Tahun 2020-2022 (USD)
Financial Performance in 2020-2022 (US$)

Uraian Description	2020	2021	2022
Jumlah Aset Total Assets	390.607.040	416.003.075	647.920.094
Pendapatan Usaha Revenues	42.032.194	96.452.977	224.676.959
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	17.792.587	15.167.312	27.898.778

Wilayah Operasional
Operational Area

Perkembangan usaha pembangkit listrik semakin kompetitif, sehingga PLN NP terus berupaya mengambil peran serta kontribusi yang semakin luas dalam mendukung ketahanan energi listrik nasional.

Development of power plant business is increasingly competitive, so that PLN NP continues to strive to take an increasingly broad role and contribution in supporting national electric energy resilience.

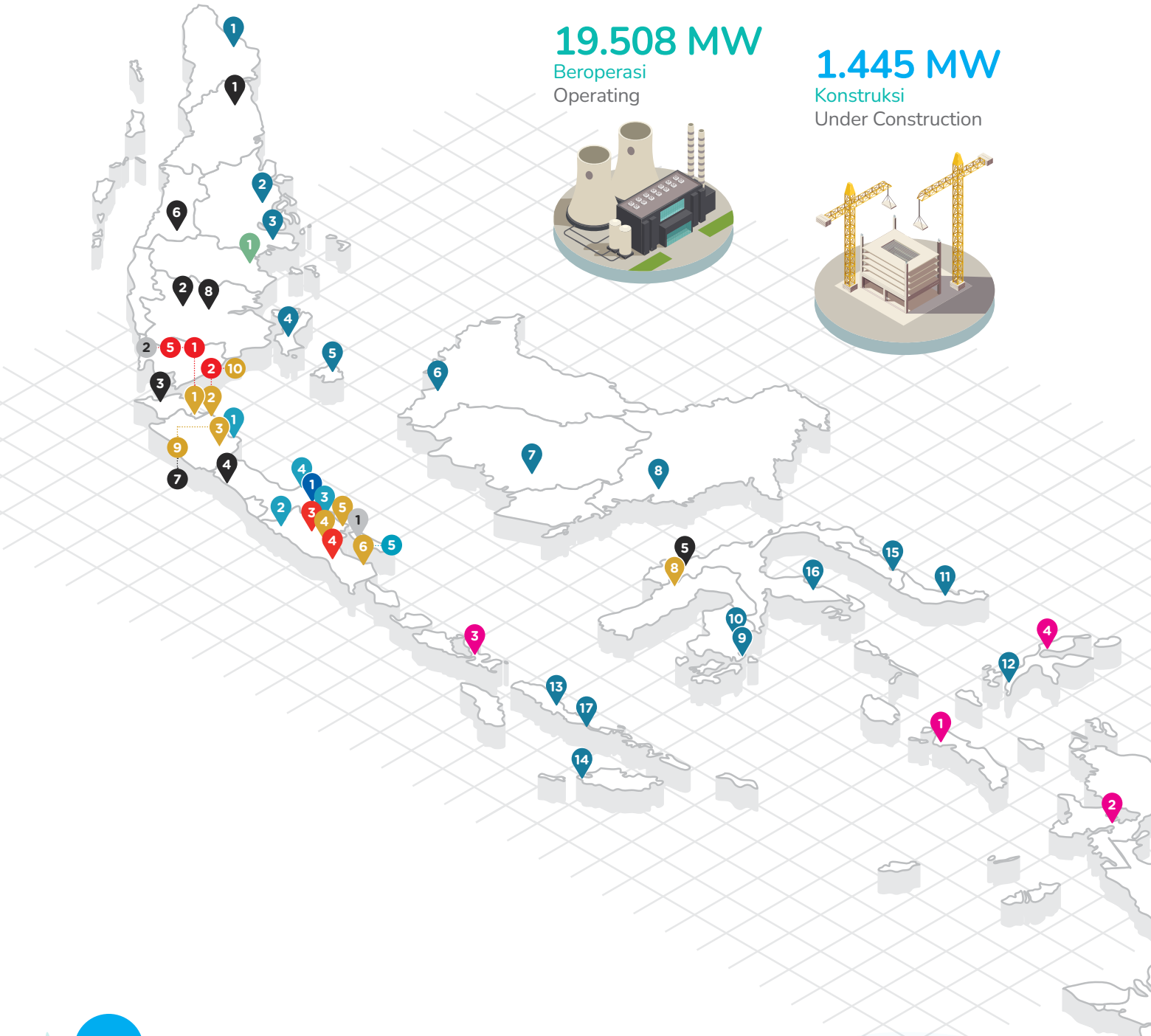

Pembangkit Eksisting
Existing Power Plant

- **7.210 MW (8 Pembangkit)**
  7,210 MW (8 Power Plants)
- **1 MW (Pembangkit Riset - PLTS Cirata)**
  1 MW (Research Plants – Cirata SPP)
- **500 MW (*Add On* MTW 3-4)**
  500 MW (Add-on MTW 3-4)

Beroperasi (7.210 MW)
Operating (7,210 MW)

1. **Muara Karang**
   PLTGU CCPP
   PLTU Gas/BBM
   GFPP/FFPP
   909 MW
2. **Muara Tawar**
   PLTGU CCPP
   PLTG Gas/BBM
   GFPP/FFPP
   1.928 MW
3. **Cirata**
   PLTA HPP
   1.008 MW
4. **Brantas**
   PLTA HPP
   275 MW
5. **Gresik**
   PLTGU CCPP
   PLTU Gas/BBM
   Gas/Fuel CFPP
   2.219 MW
6. **Paiton**
   PLTU Batubara CFPP
   800 MW
7. **Bawean**
   PLTMG GEPP
   3 MW
8. **Suppa**
   PLTD DEPP
   68 MW

Pembangkit Riset (1 MW)
Research Plant (1 MW)

9. **PLTS Cirata** Cirata SPP
   1 MW

Tahap Pengembangan Konstruksi (500 MW)
Construction Development Stage (500 MW)

10. ***Add On* MTW 3-4**
    PLTGU CCPP 500 MW

Jasa O&M FTP-1 Jawa
O&M Service of FTP-1 Java

3.610 MW (5 Pembangkit)
3,610 MW (5 Power Plants)

1. **Indramayu**
   PLTU Batubara CFPP
   3x330 MW
2. **Pacitan**
   PLTU Batubara CFPP
   2x315 MW
3. **Tanjung Awar-awar**
   PLTU Batubara CFPP
   2x350 MW
4. **Rembang**
   PLTU Batubara CFPP
   2x315 MW
5. **Paiton 9**
   PLTU Batubara CFPP
   1x660 MW

Jasa O&M Pembangkit PLN di *Site* PJB
O&M Service for PLN Power Plant at PJB Site

1.468,3 MW (5 Pembangkit)
1.468,3 MW (5 Power Plants)

Beroperasi (1.468,3 MW)
Operating (1,468.3 MW)

1. **MKR Blok 2**
   PLTGU CCPP
   710 MW
2. **MTW Blok 5**
   PLTGU CCPP
   242 MW
3. **Ampel Gading**
   PLTA HPP
   2x5 MW
4. **Wonorejo**
   PLTA HPP
   1x6,3 MW
5. **MKR Blok 3**
   PLTGU CCPP
   500 MW

Jasa O&M FTP-1 Luar Jawa
O&M Service Outside Java

1.168,3 MW (17 Pembangkit)
1,168.3 MW (17 Power Plants)

1. **Arun**
   PLTMG Gas Gas GEPP
   19x9,7 MW
2. **Tenayan**
   PLTU Batubara CFPP
   2x110 MW
3. **Tembilahan**
   PLTU Batubara CFPP
   2x7 MW
4. **Bangka**
   PLTU Batubara CFPP
   2x30 MW
5. **Belitung Baru**
   PLTU Batubara CFPP
   2x16,5 MW
6. **Ketapang**
   PLTU Batubara CFPP
   2x10 MW
7. **Pulang Pisau**
   PLTU Batubara CFPP
   2x60 MW
8. **Kaltim Teluk**
   PLTU Batubara CFPP
   2x110 MW
9. **Kendari 1-2**
   PLTU Batubara CFPP
   2x10 MW
10. **Kendari 3**
    PLTU Batubara CFPP
    1x10 MW
11. **Amurang**
    PLTU Batubara CFPP
    2x25 MW
12. **Tidore**
    PLTU Batubara CFPP
    2x7 MW
13. **Ropa (Ende)**
    PLTU Batubara CFPP
    2x7 MW
14. **Bolok**
    PLTU Batubara CFPP
    2x16,5 MW
15. **Anggrek**
    PLTU Batubara CFPP
    2x25 MW
16. **Ampana**
    PLTU Batubara CFPP
    2x3 MW
17. **Sambelia**
    PLTU Batubara CFPP
    2x10 MW

Kepemilikan Saham di Perusahaan O&M
Share Ownership in O&M Company

1.320 MW (1 Pembangkit)
1,320 MW (1 Power Plant)

1. **Tanjung Jati B #3 dan #4**
   PLTU Batubara CFPP
   2x660 MW
   (Jasa O&M dikelola oleh KPJB – Perusahaan JVC PJB dengan Komipo)
   (O&M Services Managed by KPJB - JVC company with Komipo)

Jasa EPC
EPC Services

4 Pembangkit
4 Power Plants

1. **Ambon**
   PLTU CFPP
   2x15 MW
2. **Timika (Sorong)**
   PLTU CFPP
   4x7 MW
3. **Bima**
   PLTU CFPP
   2x10 MW
4. **Soffi**
   PLTU CFPP
   2x3 MW

Unit Bisnis Pendukung
Supporting Business Unit

2 Unit Bisnis
2 Business Units

1. **Surabaya, Jawa Timur**
   PJB Academy
2. **Pluit, Jakarta**
   Unit Maintenance, Repair & Overhaul (UMRO)

Sewa Pembangkit
Power Plant for Lease

20 MW (1 Pembangkit)
20 MW (1 Power Plant)

1. **Duri**
   PLTG GPP
   1x20 MW

Kepemilikan Saham di IPP
Share Ownership in IPP

5.665 MW (8 Pembangkit)
5,665 MW (8 Power Plants)

Beroperasi (4.710 MW)
Operating (4,710 MW)

1. **Asahan**
   PLTA HPP
   2x90 MW
2. **Banjarsari**
   PLTU Batubara CFPP
   2x110 MW
3. **Jawa 7 (Unit 1&2), Serang**
   PLTU Batubara CFPP
   2x1.000 MW
4. **Cilacap**
   PLTU Batubara CFPP
   2x300 MW
   Ekspansi 1 Expansion 1
   1x660 MW
   Ekspansi 2 Expansion 2
   1x1.000 MW
5. **Mamuju**
   PLTU Batubara CFPP
   2x25 MW

Tahap Pengembangan Konstruksi (955 MW)
Construction Development Stage (955 MW)

6. **Batang Toru**
   PLTA HPP
   4x127,5 MW
7. **Cirata Floating PV**
   PLTS SPP
   145 MW
8. **Sumbagsel 1**
   PLTU Batubara CFPP
   2x150 MW

Alamat Kantor Pusat, Kantor Perwakilan dan Unit Usaha

Address of Head Office, Representative Office and Business Unit

Alamat Kantor Pusat dan Kantor Jakarta

Address of Head Office and Jakarta Office

Kantor Pusat
Headquarters
Jl. Ketintang Baru No. 11
Surabaya 60231, Indonesia
(+62 31) 828 3180 (*Hunting*)
(+62 31) 828 3183
info@plnnusantarapower.co.id

Kantor Perwakilan
Representative Office
Gedung 18 Office Park Lantai 2
Building Office Park 2nd Floor
Jl. TB Simatupang Kav 18, Jakarta Selatan
-
-

Alamat Unit Usaha

Business Unit Address

Unit Pembangkitan (UP)

Generation Unit (GU)

Unit Pembangkitan Gresik **Gresik Generation Unit** Jl. Harun Tohir, Gresik 61112 (+62 31) 3981569, 3984540 (+62 31) 3981568 upgrk@plnnusantarapower.co.id	**Unit Pembangkitan Muara Karang** **Muara Karang Generation Unit** Jl. Raya Pluit Karang Ayu No. 01, Jakarta Utara 14450 (+62 21) 6600054, 6692784 (+62 21) 6692806 upmkr@plnnusantarapower.co.id	**Unit Pembangkitan Muara Tawar** **Muara Tawar Generation Unit** Jl. PLTGU Muara Tawar No. 1, Ds. Segara Jaya, Kec. Taruma Jaya Bekasi, Jawa Barat 17218 (+62 21) 88990052 (+62 21) 88990052 upmtw@plnnusantarapower.co.id
Unit Pembangkitan Cirata **Cirata Generation Unit** Ds. Cadas Sari, Kec. Tegal Waru, Plered, Purwakarta 41162 (+62 264) 270840, 270928 (+62 264) 270859 upcrt@plnnusantarapower.co.id	**Unit Pembangkitan Brantas** **Brantas Generation Unit** Jl. Basuki Rakhmad No. 271, Karangkates Sumberpucung, Malang 65165 (+62 341) 385545, 385546 (+62 341) 385462 upbrs@plnnusantarapower.co.id	**Unit Pembangkitan Paiton** **Paiton Generation Unit** Jl. Raya Surabaya - Situbondo KM 142, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo 67291 (+62 -335) 7718059 (+62 335) 771810 upptn@plnnusantarapower.co.id
PLTD Suppa **Suppa DPP** Jl. Pramuka, Lingkungan Karaballo, Kel. Tellumpanua, Kec. Suppa, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan 91272 (+62 421) 25390 pltdsuppa01@gmail.com	**PLTMG Bawean** **Bawean GEPP** Perikanan Bawean, Sungai Tlk. Sangkapura, Bawean, Jawa Timur 61181 pltmgbawean@gmail.com	**PLTS Cirata (Pembangkit Riset)** **Cirata SPP (Research Power Plant)** Ds. Cadas Sari, Kec. Tegal Waru, Plered, Purwakarta 41162 (+62 264) 270840, 270928 (+62 264) 270859

Unit *Maintenance, Repair, Overhaul* (UMRO)

Maintenance, Repair, Overhaul Unit (MROU)

Jl. Raya Pluit Karang Ayu No. 01,
Jakarta Utara 14450
(+62 21) 6620594, 6620595
(+62 21) 6613190

Jasa *Operation & Maintenance* (O&M)

Operation & Maintenance (O&M) Services

Unit Bisnis Jasa O&M (UBJOM) Rembang Rembang O&M Services Business Unit (OMSBU) Jl. Raya Semarang-Surabaya Km. 130, Kec. Sluke, Kab. Rembang 59272 (+62 295) 4552792, (0295) 4552791 (+62 295) 4552791	**UBJOM Indramayu** Indramayu OMSBU Ds. Sumur Adem, Kec.Sukra, Kab. Indramayu 45257 (+62 234) 5613236 (+62 234) 5613236	**UBJOM Pacitan** Pacitan OMSBU Jl. Raya Pacitan - Trenggalek KM. 55, Ds. Sukorejo, Kec. Sudimoro, Kab. Pacitan (+62 357) 5173444 (+62 357) 5156698
UBJOM Paiton Paiton OMSBU Jl. Surabaya-Situbondo KM. 141, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo 67291 (+62 335) 771668 (+62 335) 771669	**UBJOM Tanjung Awar-awar** Tanjung Awar-awar OMSBU Jl. Tanjung Awar-awar, Ds. Wadung, Kec. Jenu, Kab. Tuban, Jawa Timur 62352 (+62 356) 320320 (+62 356) 329090	**Jasa O&M PLTGU Muara Karang Blok 2** O&M Services of Block 2 Muara Karang CCPP Jl. Raya Pluit Karang Ayu No. 01, Jakarta Utara 14450 (+62 21) 6600054, 6692784 (+62 21) 6692806 upmkr@plnnusantarapower.co.id
Jasa O&M PLTGU Muara Tawar Blok 5 O&M Services of Block 5 Muara Tawar CCPP Jl. PLTGU Muara Tawar No. 1, Ds Segara Jaya, Kec. Taruma Jaya Bekasi, Jawa Barat 17218 (+62 21) 88990052 (+62 21) 88990052 upmtw@plnnusantarapower.co.id	**Jasa O&M PLTA Ampel Gading** O&M Services of Ampel Gading HPP Kalituri, Wonorejo, Pagerwojo, Kab. Tulungagung, Jawa Timur 66262	**Jasa O&M PLTA Wonorejo** O&M Services of Wonorejo HPP Purwoharjo, Ampelgading, Malang, Jawa Timur 65183
Jasa O&M PLTGU Muara Karang Blok 3 Peaker O&M Services of Block 3 Muara Karang Peaker CCPP Jl. Raya Pluit Karang Ayu No. 01, Jakarta Utara 14450 (+62 21) 6600054, 6692784 (+62 21) 6692806 upmkr@plnnusantarapower.co.id	**UBJOM PLTMG Arun** Arun GEPP OMSBU Jl. Medan-Banda Aceh Gate 5.3, Ds. Meuria Paloh Kec. Muara Satu Lhokseumawe, Aceh (+62 645) 8052555 sekretariat.pjbarun@gmail.com	**UBJOM PLTU Tenayan** Tenayan CFPP OMSBU Simpang Badak, Jl. Ringroad 70 RT 4 RW 2, Kel. Industri Tenayan, Kec. Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau 28285 (+62 811) 7085777/ 7083777 secretariat.pjbtenayan@gmail.com
UBJOM PLTU Teluk Balikpapan Teluk Balikpapan CFPP OMSBU Jl. PLTU No. 1 Kawasan Industri Karangriau KM.13, Kelurahan Karangriau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan (+62 542) 8530818 sekumujktbpn@gmail.com	**UBJOM PLTU Pulang Pisau** Pulang Pisau CFPP OMSBU Jl. Trans kalimantan, Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau (+62 513) 2027 007	**UBJOM PLTU Tembilahan** Tembilahan CFPP OMSBU Sungai Perak, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir
UBJOM PLTU Bangka Bangka CFPP OMSBU Jl. Lintas Timur Desa Air Anyir, Kec. Merawang, Kab. Bangka Bangka Belitung 33172	**UBJOM PLTU Belitung Baru** Belitung Baru CFPP OMSBU Desa Pengantungan, Kecamatan Badau, Kab. Belitung	**UBJOM PLTU Ketapang** Ketapang CFPP OMSBU Suka Bangun Dalam, Delta Pawan, Ketapang, Kalimantan Barat 78813
UBJOM PLTU Kendari Kendari CFPP OMSBU Desa Nii Tanasa, Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Kendari, Sulawesi Tenggara 93126	**UBJOM PLTU Amurang** Amurang CFPP OMSBU Jl. Raya Trans Sulawesi, Amurang – Tawang, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara 95954	**UBJOM PLTU Tidore** Tidore CFPP OMSBU Desa Rum Balibunga, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara
UBJOM PLTU Ropa Ropa CFPP OMSBU Jl. Trans Utara, Dusun Ropa, Desa Kaliwumbu Kecamatan Mourole, Kab. Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur 86351	**UBJOM PLTU Bolok** Bolok CFPP OMSBU Kawasan Industri Bolok Desa Bolok, Kecamatan Alak, Kab. Kupang, Nusa Tenggara Timur 85231	**UBJOM PLTU Anggrek** Anggrek CFPP OMSBU Ilangata, Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo 96525
UBJOM PLTU Ampana Ampana CFPP OMSBU Jl. Trans Sulawesi, Sabo, Ampana Tete, Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah	**UBJOM PLTU Sambelia** Sambelia CFPP OMSBU Labuhan Pandan, Sambelia, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat 83656	

Kepemilikan Saham di *Independent Power Producer* (IPP)

Share Ownership in Independent Power Producer (IPP)

PLTA Asahan **Asahan HPP** Komplek PT Bajradaya Sentranusa Simangkuk, Desa Tangga Batu, Kec. Permaksian, Porse Kab. Toba Samosir, Sulawesi Utara	**PLTU Banjarsari** **Banjarsari CFPP** Jl. Lintas Tengah Sumatera, Ds. Sirah Pulau & Gunung Kembang, Kec. Merapi Timur, Kab. Lahat, Sumatera Selatan, Indonesia	**PLTU Jawa 7** **Java 7 CFPP** Kantor Proyek PLTU Jawa 7 Jl. Raya Bojonegara, Desa Terate, Kec. Kramatwatu Serang, Banten 42161
PLTU Cilacap **Cilacap CFPP** Jl. Lingkar Timur Karang Kandri, Kec. Kesugihan, Cilacap (+62 282) 538863 (+62 282) 538863	**PLTU Mamuju** **Mamuju CFPP** Belang-Belang, Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat 91561	**PLTA Batang Toru** **Batang Toru HPP** Desa Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara
PLTS Terapung Cirata **Cirata Floating SPP** Desa Cadas Sari, Kec. Tegal Waru, Plered, Purwakarta 41162 (+62 264) 270840, 270928 (+62 264) 270859	**PLTU MT Sumbagsel 1** **MT Sumbagsel 1 CFPP** Jl. Cideng Barat 32-33, Jakarta Pusat 10150 (+62 21) 63858 999 (+62 21) 63860 823	

Kepemilikan Saham di Perusahaan O&M

Share Ownership in O&M Company

Tanjung Jati B #3 dan #4
Tanjung Jati B #3 and #4
Ds. Tubanan, Kec. Kembang, Sekuping, Tubanan, Kembang, Kab. Jepara, Jawa Tengah 59453
(+62 291) 772121
(+62 291) 4270601

Bisnis Penunjang

Supporting Business

PJB Academy
Jl. Raya Jemursari No.185, Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60237
(+62 31) 99841946
(+62 21) 29023227

Lembaga Profesi Penunjang Perusahaan
Supporting Institutions and Professions

Pada tahun 2022, PLN NP menggunakan jasa lembaga dan profesi penunjang sebagai berikut:

In 2022, PLN NP used the services of the following supporting institutions and professions:

Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik
Public Accounting Firm and Public Accountant

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia) Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (PwC Indonesia)		
Akuntan Publik Public Accountant	Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA (No. AP.0241)	Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA (No. AP.0241)
Alamat Address	WTC 3 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 - Indonesia (+62 21) 5099 2901/ 31192 901 (+62 21) 5290 5555/ 5290 5050 www.pwc.com/id	WTC 3 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 - Indonesia (+62 21) 5099 2901/ 31192 901 (+62 21) 5290 5555/ 5290 5050 www.pwc.com/id
Lingkup Jasa Audit Scope of Audit Services	Audit laporan keuangan Perusahaan tahun buku 2022	Audit of the Company's financial statements for the 2022 fiscal year
Biaya Audit Audit Fees	Rp4.630.381.000	Rp4,630,381,000
Jasa Non-Audit Non-Audit Services	-	-
Biaya Non-Audit Non-Audit Fees	-	-

Notaris
Notary

Lenny Janis Ishak, S.H.
Jl. Hang Lekir IX No.1, Kebayoran Baru Jakarta 12120 (+62 21) 7221 077 (+62 21) 7233 855

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
Public Appraisal Services Office (PASO)

KJPP Rengganis, Hamid & Rekan (KJPP RHR)
Menara Kuningan 8th Floor, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav 5, Jakarta 12940 (+62 21) 3001 6002/ 2205 7243 (+62 21) 3001 6003 secretariat@rhr.co.id www.kjpp.rhr.co.id

Konsultan Bisnis
Business Consultant

PT PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory	KPMG Siddharta Advisory
Plaza 89, Jl. H.R. Rasuna Said kav. X-7 No. 6 Jakarta 12940 (+62 21) 5212 901	35th Floor Wisma GKBI 28 Jl. Jend. Sudirman Jakarta 10210, Indonesia (+62 21) 5742 333/ 2888
PT Ernst & Young Indonesia	**RSM Indonesia**
Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1, Lantai 13, Tower 2, Lantai 7 JL. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan, Jakarta 12190 (+62 21) 5289 5000	Plaza ASIA, Level 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190 (+62 21) 5140 1340

Kantor Konsultan Hukum
Legal Consultant Firm

Murdono Lawfirm	UMBRA Partnership
Mitra Building 9th floor, Suite 902 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Kav. 21 Jakarta 12930 (+62 21) 5220 027	Telkom Landmark Tower, Tower 2 49th Floor, Jakarta (+62 21) 5082 0999

Kronologis Pencatatan Saham
Chronology of Share Listing

Sampai dengan tahun 2022, PLN NP belum pernah melakukan pencatatan saham di bursa, sehingga tidak terdapat informasi terkait jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek, pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal.

As ofl 2022, PLN NP has never listed its shares on the stock exchange, so there is no information related to the number of shares, nominal value, and offering price from the initial listing to the end of the fiscal year as well as the name of the stock exchange, stock split, stock merger (reverse stock), stock dividends, bonus shares, and changes in the nominal value of shares, the implementation of convertible securities, the implementation of capital addition and reduction.

Kronologis Pencatatan Efek Lainnya
Chronology of Other Securities Listing

Sampai dengan tahun 2022, PLN NP belum pernah melakukan pencatatan efek dan efek lainnya di bursa, sehingga tidak terdapat informasi terkait nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran dan peringkat efek.

As of 2022, PLN NP has never listed securities and other securities on the stock exchange, so there is no information related to the name of the securities, year of issuance, interest rate/yield, maturity date, offering value and securities rating.

Keanggotaan Asosiasi
Association Membership

Sampai dengan tahun 2022, PLN NP bergabung dalam beberapa keanggotaan asosiasi atau organisasi sebagai berikut:

As of 2022, PLN NP joins several association or organization memberships as follows:

Tabel Keanggotaan Asosiasi
Table of Association Membership

Nama Asosiasi/ Organisasi Name of Association/ Organization	Deskripsi Organisasi Description	Posisi Perusahaan dalam Organisasi Company Position in the Organization	Lingkup Scope
The Heads of ASEAN Power Utilities (HAPUA)	Organisasi yang terdiri dari Perusahaan Pemasok/ Penyedia Energi Listrik di negara-negara ASEAN yang terdiri dari 5 *Working Groups.* Organization consisting of Electricity Supply/Provider Companies in ASEAN countries consisting of 5 Working Groups.	Anggota Member	Internasional International
Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI)	Organisasi yang terdiri dari Perusahaan Pemasok/ Penyedia Energi Listrik yang berfokus pada pengembangan energi baru terbarukan nasional. Organization consisting of Electricity Supply/Provider Companies focusing on the development of national renewable energy.	Anggota Member	Nasional National
CIGRE Indonesia – National Committee	Organisasi non-profit yang bertujuan fokus membahas isu yang berhubungan dengan pengembangan, operasi dan manajemen tentang sistem kelistrikan termasuk juga desain, konstruksi, dan pemeliharaan atau dalam rangka pengelolaan sistem kelistrikan dunia. Non-profit organization that focuses on issues related to the development, operation and management of electricity systems including design, construction, and maintenance or in order to manage the world electricity system.	Anggota Member	Nasional – Internasional National-International
Asosiasi Perusahaan Penyedia Listrik Nasional (APPELIN) National Association of Electricity Supply Companies (APPELIN)	Asosiasi Penyedia Listrik Nasional yang menaungi perusahaan penyedia listrik di Indonesia. The National Electricity Providers Association, which oversees the electricity providers in Indonesia.	Pendiri dan Anggota Founder and Member	Nasional National
Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia) Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN Indonesia)	Organisasi pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian. Jaringan kontak bisnis Kadin yang luas menjadi daya tarik dan strategis untuk kegiatan bisnis, perdagangan dan investasi. Indonesian business organization engaged in the economy. Kadin's extensive network of business contacts is attractive and strategic for business, trade and investment activities.	Anggota Member	Nasional National

Informasi pada Situs Web Perusahaan

Information on the Company's Website

www.plnnusantarapower.co.id

Sebagai salah satu bentuk implementasi prinsip transparansi, PLN NP menyediakan situs web resmi yang menyajikan informasi yang akurat dan terkini kepada Pemegang Saham, Publik dan Pemangku Kepentingan lainnya.

In the context to realize the implementation of the transparency principle, PLN NP provides an official website that presents accurate and up-to-date information to the Shareholders, the Public and other Stakeholders.

Situs web resmi PLN NP dapat diakses pada tautan **www.plnnusantarapower.co.id** tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Situs *web* Perusahaan menyajikan berbagai informasi terkini, akurat dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi bagi publik.

Situs *web* PLN NP dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas, mencakup informasi antara lain sebagai berikut:

1. **Informasi terkait Profil Perusahaan**, memuat informasi terkait dengan Tentang Kami, Struktur Organisasi, Lini Bisnis, PLN NP Group, Perjalanan PLN NP, Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Penghargaan, Budaya Kerja, Pencapaian serta LK3 & CSR.
2. **Informasi terkait Tata Kelola Perusahaan**, menyajikan berbagai informasi terkait dengan *Whistle Blowing System*, Anti Penyuapan, PLN NP Bersih, Pedoman Kerja Direksi dan Dekom, Tata Kelola Perusahaan, RUPS, Penilaian Tata Kelola Perusahaan, Pedoman Pengadaan, dan Piagam Internal Audit.
3. **Informasi Pengadaan**, menu ini berisikan pilihan informasi terkait dengan Info Pendaftaran CSMS, *E-Procurement* dan Register Daftar Penyedia Perusahaan (DPP).
4. **Informasi terkait Investor**, menyajikan berbagai informasi terkait dengan Laporan Tahunan, Laporan Berkelanjutan, Publikasi Posisi Keuangan, Ikhtisar Data Keuangan, Laporan Keuangan Tahunan, dan Statistik Perusahaan.
5. **Informasi tentang Media**, memuat informasi terkait dengan MACO PLN NP, Info PLN NP, Seputar PLN NP, dan *Press Release*.
6. **Informasi terkait Kontak**, menu ini berisikan pilihan informasi terkait dengan Alamat Kami dan *Feedback Sponsorship*.

PLN NP has official website that can be accessed at **www.plnnusantarapower.co.id** and is available in Bahasa Indonesia and English. The Company's website presents various up-to-date, accurate and responsible information in line with the principles of transparency and information disclosure for public.

PLN NP's website can be easily accessed by the general public, and includes the following information:

1. **Information related to Company Profile**, containing information related to About Us, Organizational Structure, Line of Business, PLN NP Group, PLN NP Journey, Shareholders, Board of Commissioners, Board of Directors, Awards, Work Culture, Achievements and LK3 & CSR.
2. **Information related to Corporate Governance**, presenting various information related to Whistle Blowing System, Anti-Bribery, PLN NP Bersih, Board Manual, Corporate Governance, GMS, Corporate Governance Assessment, Procurement Guidelines, and Internal Audit Charter.
3. **Information on Procurement**, containing a selection of information related to CSMS Registration Info, E-Procurement and Company Provider Register (DPP).
4. **Information related to Investors**, presenting various information related to Annual Reports, Sustainability Reports, Financial Position Publications, Financial Data Highlights, Annual Financial Statements, and Company Statistics.
5. **Information on Media**, containing information related to MACO PLN NP, Info PLN NP, Flash News of PLN NP, and Press Release.
6. **Information related to Contact**, containing information options related to Our Address and Sponsorship Feedback.

Aspek Penting Pendukung Bisnis

Key Aspect of Business Support

Penguatan Kontribusi Sumber Daya Manusia

Strengthening Human Resources Contribution

Salah satu pilar penting dalam upaya pencapaian tujuan Perusahaan adalah kontribusi maksimal dari Sumber Daya Manusia (SDM) Perusahaan. Perkembangan dunia industri yang dinamis diperlukan adaptasi yang cepat dan tepat. Dengan latar belakang ini, PLN NP secara berkelanjutan mengelola SDM secara fokus demi memperoleh SDM yang andal dan kompetitif untuk memaksimalkan kontribusinya kepada Perusahaan.

One of the important pillars in the effort to achieve the Company's goals is the maximum contribution of the Company's Human Resources (HR). The dynamic development of the industrial world requires fast and precise adaptation. With this background, PLN NP continuously manages human resources in a focused manner in order to obtain reliable and competitive human resources to maximize their contribution to the Company.

Fungsi Pengelola Sumber Daya Manusia

Human Resources Management Function

Di tahun 2022, fungsi pengelolaan SDM di lingkungan PLN NP diatur dalam Peraturan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali No. 0001.P/019/DIR/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pembangkitan Jawa-Bali. Pada masa transisi sebelum berlakunya kebijakan *Holding Subholding* (HSH), pengelolaan SDM ditetapkan dalam Peraturan Direksi No. 0026.P/019/DIR/2022 dan dikelola oleh Direktorat SDM dengan Divisi Sistem *Human Capital* & Organisasi, Divisi Pengembangan Talenta, dan Divisi *Performance Management* & Sistem Informasi *Human Capital* serta Unit PJB Academy.

In 2022, the HR management function within PLN NP was regulated in the Regulation of the Board of Directors of PT Pembangkitan Jawa-Bali No. 0001.P/019/DIR/2021 concerning the Organization and Work Procedures of PT Pembangkitan Jawa-Bali. In the transition period prior to the enactment of the Holding Subholding policy, HR management is stipulated in the Regulation of the Board of Directors No. 0026.P/019/DIR/2022 and managed by the Directorate of HR with the Human Capital & Organizational Systems Division, Talent Development Division, and Performance Management & Human Capital Information Systems Division as well as PJB Academy Unit.

Cakupan Tata Kelola Sumber Daya Manusia

Scope of Human Resources Governance

Dengan adanya kebijakan HSH, pengelolaan SDM meliputi perencanaan dan pengendalian sistem manajemen, pelatihan dan pengembangan, serta administrasi SDM diatur dalam Peraturan Direksi No. 0088.P/019/DIR/2022 tentang Kebijakan Strategis *Human Experience Management System* (HXMS) yang berlaku per 1 Oktober 2022, yang kemudian menggantikan Peraturan Direksi No. 009.P/019/DIR/2020 tentang Human *Capital Management System* (HCMS).

With the HSH policy, HR management including management system planning and control, training and development, as well as HR administration is regulated in the Regulation of the Board of Directors No. 0088.P/019/DIR/2022 concerning Strategic Policy on Human Experience Management System (HXMS) effective as of October 1, 2022, which then replaces the Regulation of the Board of Directors No. 009.P/019/DIR/2020 concerning Human Capital Management System (HCMS).

Sistem Pengembangan Organisasi dan Perencanaan Tenaga Kerja

Manpower Organizational Development and Planning System

Pengembangan organisasi adalah penjabaran strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang sesuai dengan visi, misi dan tata nilai. Perencanaan tenaga kerja digunakan sebagai dasar pelaksanaan rekrutmen yang mengacu pada kebutuhan organisasi dan Strategi Perusahaan.

Organizational development is the elaboration of short-term, medium-term and long-term strategies in accordance with the vision, mission and values. Manpower planning is used as the basis for recruitment implementation that refers to organizational needs and Company Strategy.

Sistem Rekrutmen Karyawan

Employee Recruitment System

Rekrutmen dilakukan untuk mendapatkan karyawan yang memenuhi persyaratan kompetensi yang dibutuhkan untuk mengisi Formasi Tenaga Kerja yang kosong atau akan kosong dalam rangka menjamin kontinuitas ketersediaan Karyawan untuk mendukung operasional, peningkatan kinerja dan pencapaian visi perusahaan.

Recruitment is conducted to obtain employees who meet the competency requirements needed to fill vacant or to be vacant Manpower Formations in order to ensure the continuity of Employee availability to support operations, improve performance and achieve the Company's vision.

Sistem Pembinaan Kompetensi dan Karir

Competency and Career Development System

Pembinaan Kompetensi dan Karir karyawan telah dilakukan secara sistemik dan dibuat menarik untuk dapat memacu peningkatan kinerja karyawan. Pembinaan kompetensi dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria talenta yang diperoleh dan merupakan hasil pencapaian kinerja serta penilaian kompetensi yang ditetapkan periodik semester. Bagi karyawan yang memiliki penilaian kinerja baik akan lebih cepat mendapatkan kenaikan *grade*. Dalam setiap tingkatan levelnya diberikan pembekalan yang tersistematis dan komprehensif dalam suatu Diklat Penjenjangan untuk mempersiapkan kompetensi dalam menjalankan tugas yang lebih tinggi. Sedangkan kesempatan karir disusun untuk memberikan kesempatan percepatan karir bagi karyawan yang *star performer* untuk dapat menjalankan *fast track program*. Alur penempatan karyawan disusun dengan mempertimbangkan pengkayaan kompetensi secara berjenjang melalui mekanisme *career path*. Untuk meningkatkan daya saing perusahaan dalam rangka menonjolkan keunggulan kompetensi diberikan jalur karir kepakaran/*expertise*. Hal ini juga untuk memfasilitasi kemampuan karyawan yang memiliki kompetensi teknis yang baik namun memiliki keterbatasan kemampuan *leadership*. Kedua hal tersebut dibuat untuk meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan yang mayoritas merupakan generasi millenial.

Competency and Career Development of employees has been conducted systemically and made interesting to be able to boost the improvement of employee performance. Competency development is conducted by considering the talent criteria obtained and is the result of performance achievement and competency assessment determined periodically in the semester. Employees who have a good performance assessment will get a grade increase faster. In each level, systematic and comprehensive debriefing is provided in an Upgrading Training to prepare competence in carrying out higher tasks. Meanwhile, career opportunities are arranged to provide career acceleration opportunities for employees who are star performers to be able to carry out fast track programs. The flow of employee placement is prepared by considering the enrichment of competencies in stages through a career path mechanism. To increase the competitiveness of the Company in order to highlight the excellence of competence, an expertise career path is provided. This is also to facilitate the ability of employees who have good technical competence but have limited leadership skills. Both of these are made to increase the motivation and performance of employees, the majority of whom are millennials.

Sistem Pendidikan dan Pelatihan
Education and Training System

Pendidikan dan pelatihan karyawan dilakukan dengan prinsip berkesinambungan. Berdasarkan SK Direksi No. 0033.K/019/DIR/2021 tentang Sistem Pembelajaran, jenis program pembelajaran adalah:

a. Program pembelajaran seleksi karyawan baru,
b. Program pembelajaran profesi,
c. Program pembelajaran Penjenjangan,
d. Program pembelajaran Penunjang,
e. Program pembelajaran Strategis Korporat,
f. Program pembelajaran Masa Purnabakti.

Employee education and training is conducted with the principle of sustainability. Based on the Decree of the Board of Directors No. 0033.K/019/DIR/2021 concerning the Learning System, the types of learning programs are:

a. New employee screening program,
b. Professional learning program,
c. Promotional learning program,
d. Supporting learning programs,
e. Corporate Strategic learning program,
f. Retirement learning program.

Sistem Manajemen Kinerja
Performance Management System

Manajemen kinerja karyawan dilakukan untuk menyelaraskan target kinerja Perusahaan dan Unit dengan target kinerja Karyawan sekaligus memotivasi karyawan dalam meningkatkan kompetensi dan kontribusinya bagi Perusahaan dengan mengoptimalkan sumber daya untuk mencapai visi Perusahaan. Prinsip Manajemen Kinerja Karyawan adalah fokus, terukur, transparan dan obyektif. Manajemen Kinerja Karyawan terdiri atas 3 siklus yaitu Perencanaan, Pemantauan dan Penilaian Kinerja yang dilakukan setiap 1 (satu) semester.

Employee performance management is conducted to align Company and Unit performance targets with Employee performance targets while motivating employees to improve their competence and contribution to the Company by optimizing resources to achieve the Company's vision. The principles of Employee Performance Management are focused, measurable, transparent and objective. Employee Performance Management consists of 3 cycles, namely Planning, Monitoring and Performance Assessment conducted every 1 (one) semester.

Sistem Penghargaan
Reward System

Sistem penghargaan yang diberikan berupa:

a. Penghargaan Intrinsik: program pembelajaran dan sertifikasi kompetensi/profesi, program keseimbangan hidup, bantuan hukum, pengakuan, dan kesempatan khusus untuk melakukan sesuatu yang membuat Karyawan bangga (*privilege*).
b. Penghargaan Ekstrinsik: kompensasi baik yang bersifat tetap maupun tidak tetap, yang terdiri dari: kompensasi jangka pendek, kompensasi jangka panjang dan manfaat.

The reward system is in the form of:

a. Intrinsic Rewards: competency/professional learning and certification programs, life balance programs, legal assistance, recognition, and special opportunities to conduct something that makes Employees proud (privilege).
b. Extrinsic Rewards: fixed and non-fixed compensation, which consists of: short-term compensation, long-term compensation and benefits.

Sistem Hubungan Industrial
Industrial Relations System

Prinsip yang dipegang dalam sistem hubungan industrial adalah profesional, harmonis, dan transparan. Permasalahan yang dibahas dalam hubungan industrial adalah permasalahan yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan hubungan kerja antara karyawan, manajemen, dan pemerintah.

The principles held in the industrial relations system are professional, harmonious, and transparent. The issues discussed in industrial relations are those that are directly and indirectly related to the working relationship between employees, management, and the government.

Kecukupan Jumlah Sumber Daya Manusia

Sufficient Number of Human Resources

Jumlah SDM pada tahun 2022 adalah sebanyak 3.034 karyawan. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2021 sebanyak 3.071 karyawan. Perusahaan secara berkala melakukan *review* terhadap kecukupan jumlah SDM melalui *manpower planning*.

Komposisi karyawan berdasarkan tingkat pendidikan, jenjang jabatan, kelompok usia, dan jenis kelamin telah diuraikan sebelumnya pada bagian Profil Perusahaan sub bab Profil SDM.

The number of human resources in 2022 was 3,034 employees. This number was lower than in 2021 of 3,071 employees. The Company periodically reviews the adequacy of the number of human resources through manpower planning.

The composition of employees based on education level, position level, age group, and gender has been described previously in the Company Profile section of the HR Profile sub chapter.

Realisasi Rekrutmen Sumber Daya Manusia

Realization of Human Resources Recruitment

Salah satu upaya untuk mendukung kecukupan SDM, PLN NP melaksanakan rekrutmen dengan ketentuan yang disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan. Upaya pemenuhan kecukupan SDM, PLN NP berasal dari internal dan eksternal.

One of the efforts to support the adequacy of human resources, PLN NP carries out recruitment with provisions adjusted to the needs of the Company. Efforts to fulfill the adequacy of PLN NP's human resources come from internal and external sources.

Resourcing Strategy

Build	Mengembangkan *talent* yang ada di Perusahaan, dengan cara merekrut *talent-talent* baru (*fresh graduate*) dan mengembangkan kompetensi mereka agar dapat memenuhi persyaratan.	Developing existing talents in the Company, by recruiting new talents (fresh graduates) and developing their competencies to meet the requirements.
Buy	Merekrut karyawan yang sudah kompeten di bidang tertentu dari eksternal perusahaan (*expert hiring*).	Recruiting employees who are already competent in certain fields from external of the Company (expert hiring).
Borrow	Mendatangkan sementara karyawan yang kompeten dari luar perusahaan, diantaranya dengan tugas karya dari dan ke PLN atau ke anak perusahaan PLN NP .	Temporarily bringing in competent employees from outside the Company, including with work assignments to and from PLN or to PLN NP subsidiaries.

Pada tahun 2022, terdapat 3 (tiga) karyawan baru yang merupakan rekrutmen dari metode rekrutmen ProHire PKWT.

In 2022, there were 3 new employees who were recruited from the ProHire Fixed-Term Employment Agreement (PKWT) recruitment method.

Pendidikan dan Pembelajaran Sumber Daya Manusia

Human Resources Education and Learning

Selama tahun 2022, pelaksanaan Pendidikan dan Pembelajaran adalah sebanyak 675 pembelajaran dengan jumlah peserta yang diikutsertakan sebanyak 10.453 peserta. Seluruh karyawan memiliki kesempatan yang sama dalam ikut serta dalam pembelajaran dan pendidikan. Namun dalam pelaksanaannya tetap disesuaikan dengan bidang jabatan, tingkat kebutuhan dan kemampuan Perusahaan saat ini.

During 2022, the implementation of Education and Learning was 675 lessons with a total of 10,453 participants. All employees have the same opportunity to participate in learning and education. However, the implementation is still adjusted to the field of position, the level of need and the current ability of the Company.

Pendidikan dan pelatihan SDM secara lebih lengkap telah diuraikan sebelumnya pada bagian Profil Perusahaan sub bab Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal.

More complete education and training of human resources has been described previously in the Company Profile section of the Education and Training of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit sub-chapter.

PJB Academy

PJB Academy

PJB Academy, dibentuk seiring dengan proses transformasi PJB Group berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 041 tanggal 1 Juli 2016. Terbentuknya PJB Academy dilatarbelakangi oleh perlunya untuk membangun dan memperkuat kembali kejayaan PJB dalam keseimbangan, yaitu kompetensi *Operation & Maintenance* (O&M) serta Manajemen Aset Pembangkitan sebagai modal utama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada *stakeholder*, sementara di sisi lain, untuk menjamin keberlanjutan dan pertumbuhan korporasi, maka PLN NP harus berkembang maju dalam *competitive market*, seiring dengan dinamika bisnis ketenagalistrikan di Indonesia yang utamanya sebagai dampak *multiplier effect* dari proyek 35 GW.

PJB Academy, established along with the transformation process of PJB Group based on the Decree of the Board of Directors No. 041 dated July 1, 2016. The establishment of PJB Academy is motivated by the need to build and re-strengthen PJB's glory in balance, namely the competence of Operation & Maintenance (O&M) as well as Electric Power Generator Asset Management as the main capital to provide the best service to stakeholders, while on the other hand, to ensure sustainability and corporate growth, PLN NP must develop forward in the competitive market, along with the dynamics of the electricity business in Indonesia, mainly as a multiplier effect of the 35 GW project.

PJB Academy mendapatkan *International Certificate* dari PEARSON Assured UK sebagai pengakuan bahwa perangkat pembelajaran di PJB Academy sudah berstandar kelas dunia dan menjadi rujukan *best practice*. Hal ini berarti kualitas proses pembelajaran PJB Academy sudah memenuhi standar Internasional PEARSON Assured UK.

PJB Academy received an International Certificate from PEARSON Assured UK as an acknowledgment that the learning tools in PJB Academy are world-class standard and become a reference for best practice. This means that the quality of PJB Academy's learning process has met the international standards of PEARSON Assured UK.

Sistem Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia

Human Resources Performance Management System

Sistem Manajemen Kinerja Karyawan (SIMKK) PLN NP menggunakan sistem *online* yang terbagi dalam beberapa periode untuk memastikan terjadinya komunikasi, diskusi, dan bimbingan yang efektif dari atasan kepada para staf. Pelaksanaan SIMKK mengacu pada prinsip fokus, terukur, transparan, dan objektif. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, SIMKK dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu tahapan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja karyawan.

PLN NP's Employee Performance Management System (SIMKK) uses an online system divided into several periods to ensure effective communication, discussion and guidance from superiors to staff. SIMKK implementation refers to the principles of focus, measurability, transparency and objectivity. Based on these principles, SIMKK is divided into 3 (three) stages, namely the planning, monitoring and evaluation stages of employee performance.

Karyawan Employee
Melakukan pengisian Sasaran Kinerja Perorangan (SKP) di SIMKK
Filling out Individual Performance Target (IPT) in SIMKK

1 Perencanaan SKP
IPT Planning

Atasan Supervisor
Melakukan komunikasi tentang KPI yang melekat di bawahan (target, kurun waktu, dll.)
Communicating KPI that is inherent in subordinate (targets, period of time, etc.)

2 *Approval* SKP
IPT Approval

Atasan Supervisor
Melakukan *approval* terhadap SPK bawahannya melalui SIMKK
Approving the subordinate's IPT through SIMKK

3 Pemantauan (*Monitoring* & Revisi)
Monitoring (Monitoring & Revision)

Atasan Supervisor
Melakukan komunikasi terhadap *progress* pencapaian KPI bawahannya
Communicating KPI achievement progress of the subordinate

Karyawan Employee
Melakukan komunikasi tentang *progress* KPI yang dikerjakan (kendala yang dihadapi, status pencapaian, dll.)
Communicating KPI progress (challenges faced, status of achievement, etc.)

4 Pengisian Kuesioner Kompetensi
Filling out the Competence Questionnaire

Atasan Supervisor
Atasan melakukan pengisian kuesioner kompetensi bawahannya melalui SIMKK
Supervisor fills out competence questionnaire of its subordinate through SIMKK

5 Pengisian Pencapaian SKP
Filling out the IPT Achievement

Karyawan Employee
Melakukan pengisian realisasi SKP dan PDP lain di SIMKK
Filling out the realization of IPT and other PDPs in SIMKK

6 *Approval* Pencapaian Target
Approval of Target Achievement

Atasan Supervisor
Melakukan *approval* pencapaian target SKP masing-masing bawahannya.
Approving the IPT target achievement of each subordinate

1. **Perencanaan**
   Persetujuan antara Atasan dan Bawahan terkait pekerjaan dan target yang harus diselesaikan.

2. **Pemantauan**
   Atasan memonitor progres pencapaian target bawahannya dan melakukan kegiatan *coaching/mentoring/counseling*.

3. **Evaluasi**
   Atasan melakukan pengukuran nilai sasaran kinerja perorangan dan kompetensi individu karyawan.

PLN NP melaksanakan penilaian kinerja terhadap karyawan pada setiap semester yang dilakukan oleh Divisi *Performance Management* & Sistem Informasi *Human Capital*.

1. **Planning**
   Agreement between Superiors and Subordinates related to work and targets to be completed.

2. **Monitoring**
   Superiors monitor the progress of their subordinates' target achievement and conduct coaching/mentoring/counseling activities.

3. **Evaluation**
   Supervisors measure the value of individual performance targets and individual competencies of employees.

PLN NP carries out performance assessments of employees every semester conducted by the Performance Management & Human Capital Information System Division.

Survei Karyawan
Employee Survey

Survei yang dilaksanakan oleh PLN NP adalah survei untuk mengetahui tingkat keterikatan dan kepuasan karyawan. Keterikatan karyawan diukur melalui *Employee Engagement Survey* dan kepuasan karyawan dilakukan melalui *Job Satisfaction Survey*.

The survey carried out by PLN NP is a survey to determine the level of employee engagement and satisfaction. Employee engagement is measured through Employee Engagement Survey and employee satisfaction is conducted through Job Satisfaction Survey.

Indeks Keterikatan Kerja Karyawan
Employee Job Engagement Index

Hasil *Employee Engagement Survey* pada tahun 2022 adalah sebesar 84,48 **(SANGAT *ENGAGE*)**. Hasil tersebut meningkat dibandingkan tahun 2021 adalah sebesar 83,69 **(SANGAT *ENGAGE*)**.

The result of the Employee Engagement Survey in 2022 was 84.48 (**VERY ENGAGED**). This result increased compared to 2021 of 83.69 (**VERY ENGAGED**).

Hasil *Employee Engagement Survey* Tahun 2022
Employee Engagement Survey Results in 2022

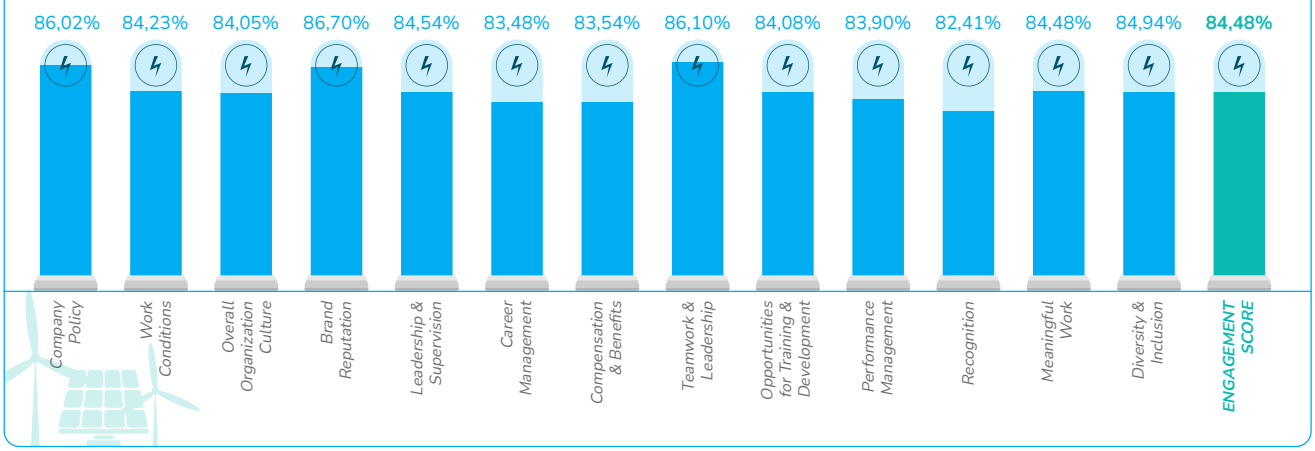

Indeks Kepuasan Kerja Karyawan
Employee Job Satisfaction Index

Hasil *Job Satisfaction Survey* pada tahun 2022 adalah sebesar 81,10 **(SANGAT PUAS)**. Hasil tersebut meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 79,70 **(SANGAT PUAS)**.

The Job Satisfaction Survey result in 2022 was 81.10 (**VERY SATISFIED**). This result increased compared to 2021 of 79.70 (**VERY SATISFIED**).

Hasil *Job Satisfaction Survey* Tahun 2022
Job Satisfaction Survey Results in 2022

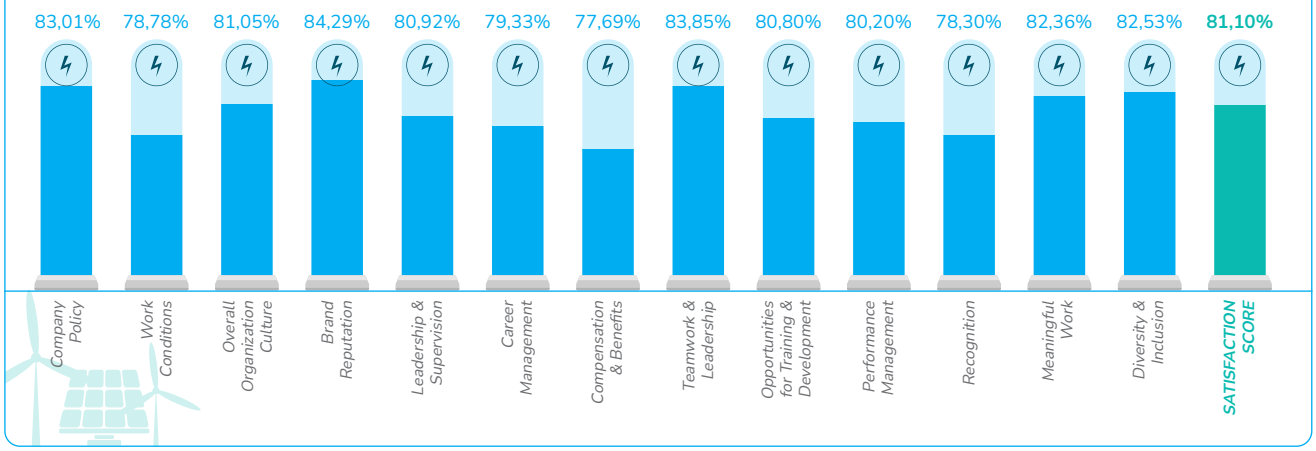

Pengembangan Karir dan *Talent Management*
Career Development and Talent Management

PLN NP menentukan kebijakan jalur karir yang jelas melalui Manajemen Suksesi yang mengacu pada Peraturan Direksi No. 031.P/019/DIR/2020 tentang Manajemen Suksesi di Lingkungan PT Pembangkitan Jawa-Bali. Manajemen suksesi dapat diikuti oleh karyawan yang memiliki kompetensi dan potensi terbaik tanpa membedakan *gender* ataupun faktor-faktor lain seperti suku, agama, dan antar golongan.

PLN NP determines a clear career path policy through Succession Management which refers to the Regulation of the Board of Directors No. 031.P/019/DIR/2020 concerning Succession Management within PT Pembangkitan Jawa-Bali. Succession management can be participated by employees who have the best competence and potential without distinguishing gender or other factors such as ethnicity, religion, and intergroup.

Manajemen Suksesi
Succession Management

Manajemen Suksesi merupakan serangkaian proses penelusuran, pengidentifikasian, pembinaan dan pengembangan Karyawan dalam mengisi Jabatan yang dibutuhkan Perusahaan terutama untuk pengisian Jabatan Struktural dan Fungsional Ahli/*Expertise* di Perusahaan. Program ini dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya. Adapun rangkaian proses dalam Manajemen Suksesi terdiri atas:

Succession Management is a series of processes for tracking, identifying, coaching and developing Employees in filling positions needed by the Company, especially for filling Structural and Functional Expert/Expertise Positions in the Company. This program is carried out routinely every year. The series of processes in Succession Management consist of:

1. Pemetaan Karyawan,
2. Penetapan Karyawan yang masuk pada program *Talent Pool*,
3. Pembinaan pada program *Talent Pool* sebagai kandidat Suksesi Jabatan,
4. Persiapan urutan kandidat Suksesi Jabatan,
5. Penetapan dan pengesahan pemangku Jabatan.

Dalam tahap pemetaan Karyawan dilakukan *assessment talent* terhadap Karyawan yang telah memenuhi persyaratan secara administratif. *Assessment* talent ini didesain untuk mengukur potensi dan kompetensi yang dimiliki para talent. Selanjutnya berdasarkan hasil *assessment* talent tersebut, Perusahaan akan mengelompokkan para talent tersebut ke dalam 9 Box HAV sebagaimana berikut:

1. Employee Mapping,
2. Determination of Employees who are included in the Talent Pool program,
3. Coaching in the Talent Pool program as a candidate for Position Succession,
4. Preparation of the sequence of candidates for Position Succession,
5. Determination and ratification of Position holders.

In the Employee mapping stage, a talent assessment is conducted on Employees who have met the administrative requirements. This talent assessment is designed to measure the potential and competence of the talents. Furthermore, based on the results of the talent assessment, the Company will group the talents into 9 HAV Boxes as follows:

Gambar HAV 9-Box Model
Picture of HAV 9-Box Model

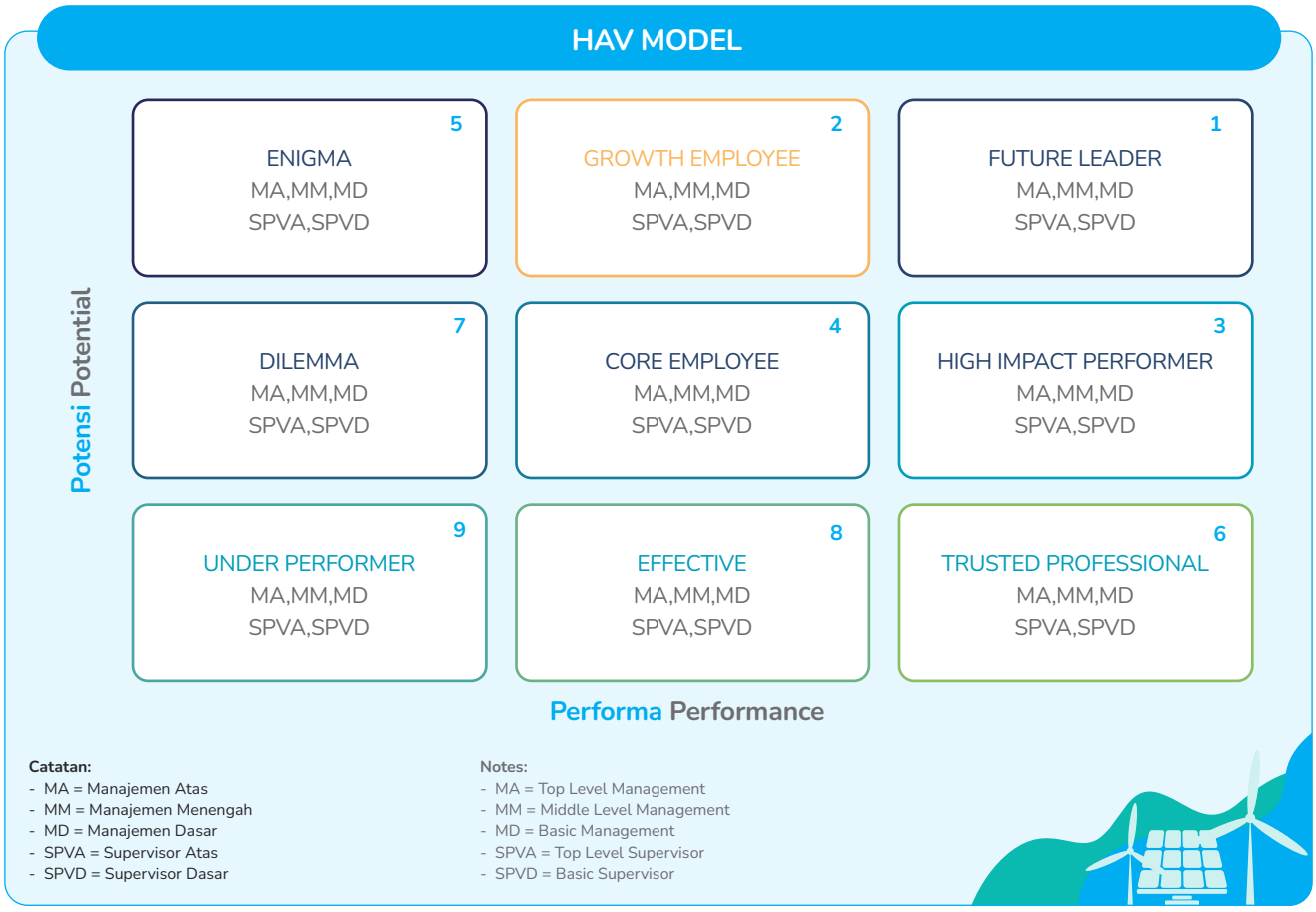

Catatan:
- MA = Manajemen Atas
- MM = Manajemen Menengah
- MD = Manajemen Dasar
- SPVA = Supervisor Atas
- SPVD = Supervisor Dasar

Notes:
- MA = Top Level Management
- MM = Middle Level Management
- MD = Basic Management
- SPVA = Top Level Supervisor
- SPVD = Basic Supervisor

Talent yang telah dikelompokkan dalam HAV 9-Box Model selanjutnya dilakukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan *talent* agar sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan Perusahaan sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal saat menduduki jabatannya. Pembinaan *Talent* menggunakan metode pengembangan yang berfokus pada 4 (empat) ranah kompetensi yaitu interpersonal *skill, leadership skill, business skill*, dan *intrapersonal skill*. Program pembinaan *Talent* yang terdapat di PLN NP adalah sebagai berikut:

1. Diklat *Executive Education* (EE) dan *Supervisory Education*-1 (SE-1).
2. *Project Assignment* yang terbagi menjadi:
   a. Program pengembangan dalam pekerjaan, seperti *On the Job Development, Job Enrichment, Job Enlargement, Special Assignment* dan Rotasi Pekerjaan,
   b. Program pendidikan dan pelatihan, seperti *Action-based Learning*, Pelatihan/ Lokakarya/ Tugas Belajar, *Cross Training*, Studi Literatur,
   c. Program pendampingan seperti *Coaching*, *Counselling* dan *Mentoring*.

Potensi yang diperoleh dari hasil *assessment talent* yang telah dilakukan adalah:

1. Penilaian kompetensi yang diperoleh dari hasil penggabungan,
2. *History talent* (riwayat jabatan, jenjang jabatan, kriteria talenta),
3. Nilai kinerja,
4. Usulan diklat penjenjangan.

Selain itu, PLN NP juga melakukan retensi *talent* yang bertujuan untuk memastikan *Talent* yang terpilih tetap bekerja dalam Perusahaan dan berkinerja sesuai dengan yang diharapkan melalui beberapa program akselerasi karir dan pendidikan formal pada Universitas terbaik dalam taraf nasional.

Sampai dengan tahun 2022, ketersediaan *talent* untuk jabatan Struktural tersedia dalam tabel di bawah ini:

Talents who have been grouped in the HAV 9-Box Model are then coached to improve the ability of talents to be in accordance with the competencies needed by the Company so that they can provide maximum contribution when occupying their positions. Talent coaching uses a development method that focuses on 4 (four) domains of competence, namely interpersonal skills, leadership skills, business skills, and intrapersonal skills. Talent coaching programs in PLN NP are as follows:

1. Executive Education (EE) and Supervisory Education-1 (SE-1) training.
2. Project Assignment which is divided into:
   a. On-the-job development programs, such as On the Job Development, Job Enrichment, Job Enlargement, Special Assignment and Job Rotation,
   b. Education and training programs, such as Action-based Learning, Training/Workshops/Learning Assignments, Cross Training, Literature Study,
   c. Mentoring programs such as Coaching, Counseling and Mentoring.

The potential obtained from the results of the talent assessment that has been conducted is:

1. Competency assessment obtained from the merging results,
2. Talent history (position history, position level, talent criteria),
3. Performance score,
4. Proposed upgrading training.

In addition, PLN NP also conducts talent retention which aims to ensure that selected Talents continue to work in the Company and perform as expected through several career acceleration programs and formal education at the best Universities at the national level.

Until 2022, the availability of talents for Structural positions is provided in the table below:

Tabel Pemenuhan Jabatan Struktural
Table of Structural Position Fulfillment

Deskripsi Description	Jumlah *Talent* Total Talent	Jumlah Formasi Total Formation
Manajemen Atas Top Level Management	15	2
Manajemen Tengah Middle Level Management	120	55
Manajemen Dasar Basic Management	399	153
Supervisor Atas Top Level Supervisor	897	388

Selain itu, sebagai bentuk integrasi PLN Group, PLN NP memberikan penugasan dan menerima karyawan melalui Sistem Tugas Karya. Berikut jumlah karyawan tugas karya masuk PLN NP dan tugas karya keluar PLN NP pada tahun 2022.

In addition, as a form of integration of the PLN Group, PLN NP assigns and accepts employees through the Work Assignment System. The following is the number of PLN NP incoming work assignment and outgoing work assignment employees in 2022.

Jumlah Karyawan Tugas Karya dari dan ke PLN
Number of Employees of Work Tasks from and to PLN

269 Status Tugas Karya
Job Status

PLN NP ke PLN Group PLN NP to PLN Group
PLN Nusantara Power → **49** Orang People → PLN, PLN Energi Primer Indonesia, icon+, PT Pelayaran Bahtera Adhiguna

PLN Group ke PLN NP PLN Group to PLN NP
PLN → **34** Orang People → rekadaya elektrika, PJBI, PLN Nusantara Power

PLN NP ke APPA PLN NP to Subsidiary & Association
PLN Nusantara Power → **114** Orang People → rekadaya elektrika, PJBI, PLNSC, KPJB, bpi, S2P, Bajradaya, PJB Services

APPA ke PLN NP Subsidiary & Association to PLN NP
rekadaya elektrika, PJBI → **72** Orang People → PLN Nusantara Power

Pembentukan *Expertise Talent*
Expertise Talent Establishment

Selain pengembangan karir melalui manajemen suksesi, PLN NP juga melaksanakan program pembentukan *talent* jalur *expertise* (kepakaran) yang diatur dalam Peraturan Direksi No. 0093.P/DIR/019/2022 tentang Peraturan Pelaksana Jalur Karir Fungsional Kepakaran, yang merupakan perubahan dan pembaharuan dari Peraturan Direksi No. 009.P/019/DIR/2019 tentang Sistem *Expertise*. Pembentukan *talent* jalur *expertise* ini meliputi beberapa tahapan yaitu:

1. Identifikasi kebutuhan kepakaran, yaitu tahapan penentuan jenis, jumlah dan nomenklatur kompetensi dan standar level kompetensi *expertise*.
2. Pemetaan *expertise*, yaitu tahap dalam menentukan kader *expertise*, proses seleksi kandidat sampai dengan penetapan *expert*. Tahapan seleksi dan uji kepakaran melewati serangkaian proses yang melibatkan Komite Uji Kepakaran baik dari internal maupun eksternal.
3. Pengelolaan dan pengembangan *expertise*, yaitu *talent expertise* dilibatkan dalam penugasan khusus serta mendapatkan program pengembangan seperti sertifikasi kompetensi, pendidikan formal ataupun menjadi narasumber di *international conference*.
4. Pembinaan *expertise*.

In addition to career development through succession management, PLN NP also carries out an expertise path talent formation program regulated in the Regulation of the Board of Directors No. 0093.P/DIR/019/2022 concerning Regulations for Executors of the Expertise Functional Career Path, which is an amendment and renewal of the Regulation of the Board of Directors No. 009.P/019/DIR/2019 concerning the Expertise System. The establishment of this expertise path talent includes several stages, namely:

1. Identification of expertise needs, which is the stage of determining the type, number and nomenclature of competencies and standards of expertise competency levels.
2. Expertise mapping, which is the stage of determining the cadre of expertise, the candidate selection process until the determination of the expert. The selection and expertise test stages go through a series of processes involving both internal and external Expertise Test Committees.
3. Expertise management and development, where talent expertise is involved in special assignments and receives development programs such as competency certification, formal education or becoming a resource person at international conferences.
4. Expertise coaching.

Pada tahun 2022, PLN NP memiliki 7 (tujuh) *expert* yang telah melewati serangkaian seleksi dan uji kepakaran dengan keterangan sebagai berikut:

In 2022, PLN NP had 7 experts who had passed a series of selection and expertise tests with the following information:

Tabel Jumlah *Expert*
Table of Number of Experts

Jenjang Kepakaran Expertise Level	Bidang Kepakaran Expertise Sector	Jumlah Total
Expert	*Electrical*	2
Expert	*Instrument & Control System*	2
Junior Expert	*Mechanical - Turbine & Rotating Equipment*	1
Junior Expert	*Engineering Design*	1
Junior Expert	*Start up & Commissioning*	1

Remunerasi Sumber Daya Manusia

Human Resources Remuneration

PLN NP senantiasa mengimplementasikan strategi remunerasi yang kompetitif di industri tenaga listrik guna menarik, memotivasi individu-individu terbaik yang dimiliki Perusahaan. PLN NP memiliki kebijakan remunerasi yang berlandaskan pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2022 - 2024 No. PT PJB 001.K/021/DIR/2022; No. SP PJB 003.K/SP-DPP/2022.

Dalam PKB, nomenklatur kebijakan remunerasi di PLN NP terdapat istilah Kompensasi dan Sistem Remunerasi 3P. Kompensasi merupakan imbalan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Karyawan dalam bentuk uang yang diberikan pada kurun waktu tertentu (bulanan, semesteran, tahunan, winduan, dan lainnya). Sementara Sistem Remunerasi 3P adalah sistem remunerasi sebagai Kompensasi atas kompetensi individu, tanggung jawab dalam Jabatan, dan prestasi kerja yang diberikan kepada Karyawan dalam bentuk *Pay for Person, Pay for Position*, dan *Pay for Performance*. PLN NP menetapkan besaran remunerasi karyawan dengan mengacu pada Keputusan Direksi Perusahaan.

Sejalan dengan kebijakan HXMS, per 1 Oktober 2022 berlaku sistem remunerasi baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi No. 0089.P/019/DIR/2022 tentang Peraturan Pelaksana Sistem Manajemen Penghargaan Karyawan PT Pembangkitan Jawa-Bali. Berdasarkan keputusan Direksi tersebut, terdapat 3 (tiga) jenis remunerasi yang diuraikan sebagai berikut:

Pay for Person (P1)

Tarif *Grade* (*Pay for Person*) adalah kompensasi tetap yang diberikan Perusahaan kepada Karyawan dengan mempertimbangan kompetensi, kinerja tertentu, termasuk pertimbangan faktor tanggungan istri/suami, dan anak yang besarannya ditentukan berdasarkan level kompetensi dan *Grade* Karyawan sesuai bentangan atau rentang nilai pada masing-masing *Grade* dengan mengikuti kenaikan remunerasi PT PLN (Persero).

Pay for Position (P2)

Tunjangan Posisi (*Pay for Position*) adalah kompensasi yang diberikan Perusahaan kepada karyawan dalam bentuk tunjangan tidak tetap dengan mempertimbangkan faktor tanggung jawab jabatan, lokasi pekerjaan, kekhususan pekerjaan dengan mempertimbangkan kehadiran karyawan.

PLN NP always implements a competitive remuneration strategy in the electricity industry in order to attract, motivate the best individuals owned by the Company. PLN NP has a remuneration policy based on the Collective Labor Agreement (CLA) for the period 2022 - 2024 No. PT PJB 001.K/021/DIR/2022; No. SP PJB 003.K/SP-DPP/2022.

In the CLA, the nomenclature of the remuneration policy in PLN NP contains the terms Compensation and 3P Remuneration System. Compensation is a reward given by the Company to employees in the form of money given at a certain period of time (monthly, semi-annually, annually, 8-yearly, and others). While the 3P Remuneration System is a remuneration system as Compensation for individual competence, responsibility in Position, and work performance given to Employees in the form of Pay for Person, Pay for Position, and Pay for Performance. PLN NP determines the amount of employee remuneration by referring to the Decision of the Company's Board of Directors.

In line with the HXMS policy, as of October 1, 2022, a new remuneration system is in effect as stipulated in the Regulation of the Board of Directors No. 0089.P/019/DIR/2022 concerning Regulations for Executors of the Employee Reward Management System of PT Pembangkitan Jawa-Bali. Based on the decision of the Board of Directors, there are 3 (three) types of remuneration which are described as follows:

Grade Tariff (Pay for Person) is a fixed compensation given by the Company to Employees by considering competence, certain performance, including consideration of dependents of wife/husband, and children, the amount of which is determined based on the level of competence and Grade of Employees according to the stretch or range of values in each Grade by following the increase in remuneration of PT PLN (Persero).

Position Allowance (Pay for Position) is compensation provided by the Company to employees in the form of non-permanent allowances by considering the factors of position responsibility, job location, job specificity by considering employee attendance.

Pay for Performance (P3)

Pay for Performance adalah Kompensasi atas prestasi kerja Karyawan, penghargaan dari Perusahaan berdasarkan hasil kinerja yang dicapai, baik kinerja individu, kinerja unit maupun kinerja korporat yang merupakan kontribusi nyata dan terukur. PLN NP menerapkan kebijakan sistem remunerasi dengan berpedoman pada konsep *Merit System*. Perusahaan juga selalu memastikan telah mentaati seluruh aturan yang berlaku yang terkait dengan sistem remunerasi. Terkait dengan remunerasi, PLN NP senantiasa berupaya agar tidak terjadi *gap* remunerasi terlalu tinggi.

Pay for Performance is compensation for Employee work performance, an award from the Company based on the results of the performance achieved, both individual performance, unit performance and corporate performance which is a real and measurable contribution. PLN NP implements a remuneration system policy based on the Merit System concept. The Company also always ensures that it has complied with all applicable regulations related to the remuneration system. In relation to remuneration, PLN NP always strives to avoid excessive remuneration gaps.

Penerapan *Reward* and *Punishment*

Reward and Punishment Implementation

Bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu penghargaan ekstrinsik dan intrinsik. Penghargaan ekstrinsik diberikan dalam bentuk kompensasi dan manfaat karyawan. Untuk Kompensasi Karyawan terdiri dari:

1. Kompensasi tetap, berupa *Pay for Person* (P1) atau Tunjangan *Grade*.
2. Kompensasi tidak tetap yang terdiri atas:
   a. Kompensasi Jangka Pendek terdiri dari *Pay for Position* (P2) atau Tunjangan Posisi, *Pay for Performance* (P3), Insentif Kinerja/Bonus, Tunjangan Hari Raya, dan Tunjangan Cuti Tahunan.
   b. Kompensasi Jangka Panjang, terdiri dari Tunjangan Cuti Besar, Penghargaan Kesetiaan Kerja, Pesangon, Kompensasi selama Masa Persiapan Pensiun, dan hal lain yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Bersama.

Untuk manfaat karyawan terdiri atas:

1. Manfaat Umum yang terdiri atas jaminan sosial (Kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiunan dan kematian), hak cuti, pemeliharaan Kesehatan, pakaian dinas, bantuan akomodasi terkait mutasi, bantuan kematian/pemakaman, dan hal lain yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Bersama.
2. Manfaat Khusus (*Perquisites*) yang terdiri atas bantuan/fasilitas kendaraan, bantuan/fasilitas perumahan, bantuan/fasilitas alat dan ruang kerja, tenaga pengamanan, keanggotaan profesi, kartu kredit korporat, dan keanggotaan klub tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Dan penghargaan Intrinsik yang diberikan dalam bentuk non tunai yang bermakna bagi individu karyawan yang diberikan berupa:

1. Program Pembelajaran dan Sertifikasi Kompetensi/Profesi, yang merupakan kesempatan yang diberikan kepada karyawan yang telah memberi kontribusi nyata kepada Perusahaan dan memenuhi kriteria talenta tertentu,

The form of rewards provided to employees can be divided into 2 (two) types, namely extrinsic and intrinsic rewards. Extrinsic awards are provided in the form of compensation and employee benefits. Employee Compensation consists of:

1. Fixed compensation, in the form of Pay for Person (P1) or Grade Allowance.
2. Non-fixed compensation consisting of:
   a. Short-term Compensation consists of Pay for Position (P2) or Position Allowance, Pay for Performance (P3), Bonus, Religious Holiday Allowance, and Annual Leave Allowance.
   b. Long-Term Compensation, consisting of Grand Leave Allowance, Work Loyalty Award, Severance Pay, Compensation during Retirement Preparation Period, and other matters agreed in the Collective Labor Agreement.

Employee benefits consist of:

1. General Benefits consisting of social security (health, work accident, old age, pension and life), leave entitlement, health care, official clothing, accommodation assistance related to mutation, death/funeral assistance, and other matters agreed in the Collective Labor Agreement.
2. Perquisites consisting of vehicle assistance/facilities, housing assistance/facilities, tools and workspace assistance/facilities, security personnel, professional membership, corporate credit cards, and membership of certain clubs as required.

And Intrinsic awards provided in the form of non-cash awards that are meaningful to individual Employees provided in the form of:

1. Competency/Profession Learning and Certification Program, which is an opportunity provided to Employees who have made a real contribution to the Company and meet certain talent criteria,

2. Program Keseimbangan Hidup, merupakan penghargaan kepada karyawan untuk menciptakan keseimbangan antara kehidupan pekerjaan dan kehidupan di luar pekerjaan berupa kegiatan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan spiritual, fisik dan mental untuk memotivasi karyawan agar mendapat kinerja yang *excellence*,
3. Bantuan hukum, berupa pembelaan atas tuntutan hukum dari pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di Perusahaan,
4. Pengakuan (*Recognition*), merupakan program pengakuan sosial yang diberikan kepada karyawan yang telah mendapatkan penghargaan Direksi,
5. Kesempatan untuk melakukan sesuatu yang membuat karyawan bangga (*privilege*), diberikan kepada karyawan yang telah memberikan prestasi dan kontribusi ekstra dalam mendukung pencapaian kinerja Perusahaan dan atau citra Perusahaan.

Bentuk pemberian penghargaan kepada karyawan dalam bentuk:
1. Pendidikan Formal,
2. Sertifikasi,
3. Penghargaan Kesetiaan Kerja (winduan),
4. Bantuan Pinjaman Pemilikan Rumah Karyawan (BPPR),
5. Penghargaan Pensiun.

Sepanjang tahun 2022 terdapat 289 karyawan yang mendapatkan *reward* berupa Penghargaan Kesetiaan Kerja (winduan) untuk 126 orang, Bantuan Pinjaman Pemilikan Rumah Karyawan (BPPR) sebanyak 135 orang dan Penghargaan pensiun untuk 28 orang.

Sedangkan karyawan yang mendapatkan *punishment* sebanyak 4 (empat) orang karyawan berupa Sanksi Hukuman Disiplin Sedang berupa Peringatan Tertulis Pertama.

2. Life Balance Program, is a reward for Employees to create a balance between work life and life outside work in the form of activities in improving spiritual, physical and mental well-being to motivate employees to get excellent performance,
3. Legal assistance, in the form of defense of legal claims from other parties related to the implementation of duties and responsibilities in the Company,
4. Recognition, is a social recognition program provided to Employees who have received the Board of Directors' award,
5. Opportunity to conduct something that makes Employees proud (privilege), provided to employees who have made extra achievements and contributions in supporting the achievement of the Company's performance and or the Company's image.

Forms of rewarding employees include:
1. Formal Education,
2. Certification,
3. Work Loyalty Award (8-yearly),
4. Employee Home Ownership Loan Assistance (BPPR),
5. Retirement Award.

Throughout 2022, there were 289 employees who received rewards in the form of Work Loyalty Awards (8-yearly) for 126 people, Employee Home Ownership Loan Assistance (BPPR) for 135 people and Retirement Awards for 28 people.

While employees who received punishment were 4 employees in the form of Moderate Disciplinary Penalty Sanctions in the form of First Written Warnings.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
Occupational Health and Safety (OHS)

Aspek kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawan menjadi bagian yang sangat vital di bidang usaha Perusahaan. PLN NP memandang bahwa kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawan merupakan aspek penting yang berpengaruh terhadap keberlangsungan aktivitas operasional Perusahaan. Tingkat kesehatan dan keselamatan karyawan memiliki dampak yang signifikan terhadap performa dan hasil kerja karyawan, serta berdampak terhadap hubungan karyawan dengan karyawan lain. Uraian lebih lanjut mengenai K3 akan dijelaskan di Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah, namun menjadi bagian dari Laporan Tahunan ini.

The aspect of occupational health and safety for employees is a very vital part of the Company's business. PLN NP considers that occupational health and safety for employees is an important aspect that affects the sustainability of the Company's operational activities. The level of occupational health and safety of employees has a significant impact on employee performance and work results, as well as impacting employee relations with other employees. Further description of OHS will be explained in the Sustainability Report which is presented separately, but is part of this Annual Report.

Hubungan Industrial
Industrial Relations

Hubungan industrial merupakan suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hubungan industrial bertujuan untuk mewujudkan hubungan yang harmonis, dinamis, kondusif dan berkeadilan di perusahaan antara manajemen dan karyawan yang diwakili oleh serikat pekerja. Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. PKB antara PLN NP dengan Serikat Pekerja yang berlaku di tahun 2022 adalah PKB 2022-2024 No. PT PJB 0001.K/021/DIR/2022; No. SP PJB 003.K/SP-DPP/2022.

Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruhnya mempunyai fungsi:
1. Menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya,
2. Menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi,
3. Menyalurkan aspirasi secara demokratis,
4. Mengembangkan keterampilan, dan keahliannya,
5. Ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.

Kegiatan Hubungan Industrial antara PLN NP dan Serikat Pekerja di tahun 2022 adalah sebagai berikut:
1. Perundingan PKB PT PJB Tahun 2022-2024,
2. Kegiatan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit yang dilaksanakan periodik (Bulanan),
3. Kegiatan Pertemuan Berkala,
4. Musyawarah Besar (Mubes) SP PJB Tahun 2022,
5. Pembinaan Hubungan Industrial,
6. Dialog Cerdas Bareng Serikat Pekerja (GAS),
7. HUT SP Ke-23.

Industrial relations is a system of relationships formed between actors in the production process of goods and/or services consisting of the elements of employers, workers/laborers, and government based on the values of Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Industrial relations aim to realize harmonious, dynamic, conducive and fair relations in the Company between management and employees represented by trade unions. Trade unions are organizations established from, by, and for workers/laborers both in the Company and outside the Company, which are free, open, independent, democratic, and responsible to fight for, defend and protect the rights and interests of workers/laborers as well as to improve the welfare of workers/laborers and their families. The CLA between PLN NP and the Labor Union that is valid in 2022 is CLA 2022-2024 No. PT PJB 0001.K/021/DIR/2022; No. SP PJB 003.K/SP-DPP/2022.

In carrying out industrial relations, workers/laborers and their trade unions have the following functions:
1. Carrying out work in accordance with their obligations,
2. Maintaining order for the continuity of production,
3. Channeling aspirations in a democratic manner,
4. Developing their skills and expertise,
5. Participating in advancing the Company and fighting for the welfare of members and their families.

Industrial Relations activities between PLN NP and Trade Unions in 2022 were as follows:
1. Negotiation of PT PJB's CLA Year 2022-2024,
2. Bipartite Cooperation Institution (LKS) activities that are carried out periodically (Monthly),
3. Periodic Meeting Activities,
4. Great Deliberation (Mubes) of SP PJB in 2022,
5. Industrial Relations Development,
6. Smart Dialogue with Trade Unions (GAS),
7. 23rd SP Anniversary.

Rencana Program Kerja Sumber Daya Manusia Tahun 2023

Human Resources Work Program Plan for 2023

Rencana Program Kerja SDM di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan *Human Capital Information System* untuk mendukung implementasi SAP *Success Factor*,
2. Pelayanan *excellence* untuk meningkatkan produktivitas perusahaan (dengan indikator tertentu),
3. Penguatan pelayanan *human capital* terkait dengan kantor strategis Jakarta dan operasional Surabaya,
4. Penetapan Kebijakan *Hybrid Working* (WFA),
5. Peningkatan kompetensi melalui pelaksanaan program magang dan pembelajaran,
6. Pengembangan inovasi.

The HR Work Program plan for 2023 is as follows:

1. Strengthening the Human Capital Information System to support the implementation of SAP Success Factor,
2. Service excellence to increase company productivity (with certain indicators),
3. Strengthening human capital services related to the Jakarta strategic office and Surabaya operations,
4. Determination of Hybrid Working Policy (WFA),
5. Competency improvement through the implementation of internship and learning programs,
6. Innovation development.

Dukungan Kuat Teknologi Informasi

Solid Support of Information Technology

Industri 4.0 menitikberatkan pada transformasi digital yang menjadi tren dan berkembang menuju otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi dan proses. Teknologi Informasi (TI) dan digitalisasi menciptakan proses bisnis yang efisien, efektif dan berdaya saing tinggi.

Industry 4.0 focuses on digital transformation that is trending and evolving towards automation and data exchange in technology and processes. Information Technology (IT) and digitalization create efficient, effective and highly competitive business process.

Fungsi Pengelola Teknologi Informasi

Function of Information Technology Management

Pada tahun 2022, pengelolaan TI dilakukan oleh Bidang Teknologi Informasi yang merupakan sub organisasi PLN NP sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. 0030.P/019/DIR/2022 tanggal 21 September 2022 tentang Peraturan Pelaksana Susunan Organisasi dan Formasi Tenaga Kerja pada Direktorat Keuangan PT Pembangkitan Jawa-Bali. Bidang Teknologi Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Teknologi Informasi yang bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kinerja Korporat dan Pengembangan Sistem Manajemen. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Bidang teknologi Informasi dibantu oleh Manajer dan staf yang formasi jabatannya sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh Keputusan Direksi. Bidang *Information Technolo*gy and Digital membawahi 3 (tiga) sub bidang yaitu Perencanaan dan Kebijakan TI, Pengembangan TI dan Analisa Bisnis, dan Operasi Layanan TI.

In 2022, IT management was conducted by the Information Technology Division which is a sub-organization of PLN NP as stated in the Board of Directors Decree No. 0030.P/019/DIR/2022 dated September 21, 2022 concerning Regulations for Executors of Organizational Structure and Manpower Formation at the Directorate of Finance of PT Pembangkitan Jawa-Bali. Information Technology Division is chaired by the Head of Information Technology Division who is responsible to the Head of the Corporate Performance and Management System Development Unit. In carrying out the main duties and functions, the Head of Information Technology Division is assisted by Managers and staff whose position formations are following the needs and are determined by the Board of Directors Decree. The Information Technology and Digital Division is in charge of 3 (three) sub-divisions, namely IT Planning and Policy, IT Development and Business Analysis, and IT Service Operations.

Tata Kelola Teknologi Informasi

Information Technology Governance

Tata kelola TI PLN NP berlandaskan pada Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 067.K/010/DIR/2017 tentang Pedoman dan Kebijakan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan *best practice* lainnya seperti COBIT (*Control Objective for Information Technologies*). Secara garis besar pelaksanaan Tata Kelola TI PLN NP dapat dilihat pada gambar berikut:

PLN NP's IT governance is based on the Information Technology Strategic Plan (RSTI) regulated in the Board of Directors Decree No. 067.K/010/DIR/2017 concerning Guidelines and General Policies for Information Technology Governance and other best practices such as COBIT (Control Objective for Information Technologies). Generally, PLN NP's IT Governance implementation is reflected in the following picture:

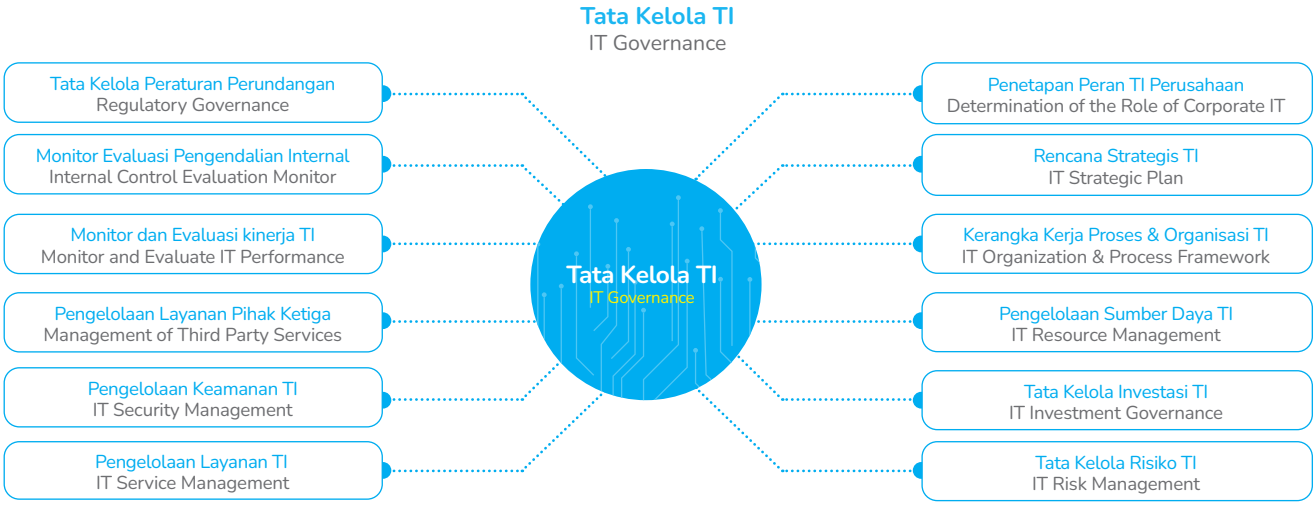

Arsitektur Teknologi Informasi

Information Technology Architecture

Arsitektur TI menggambarkan bangunan teknologi informasi, baik aplikasi maupun infrastruktur yang akan dibangun oleh PLN NP sebagai arah pengembangan aplikasi TI di lingkungan Perusahaan, sebagaimana dalam gambar berikut:

IT Architecture illustrates the building of information technology, both applications and infrastructure that will be built by PLN NP as the direction of IT application development within the Company, as in the following picture:

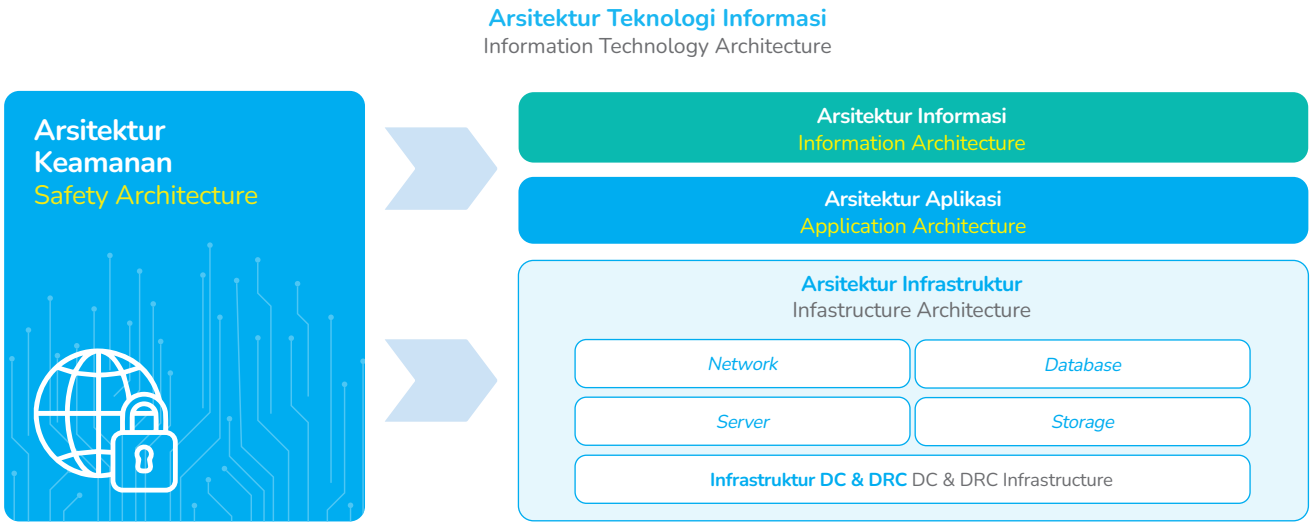

Prinsip Arsitektur Teknologi Informasi

Principles of Information Technology Architecture

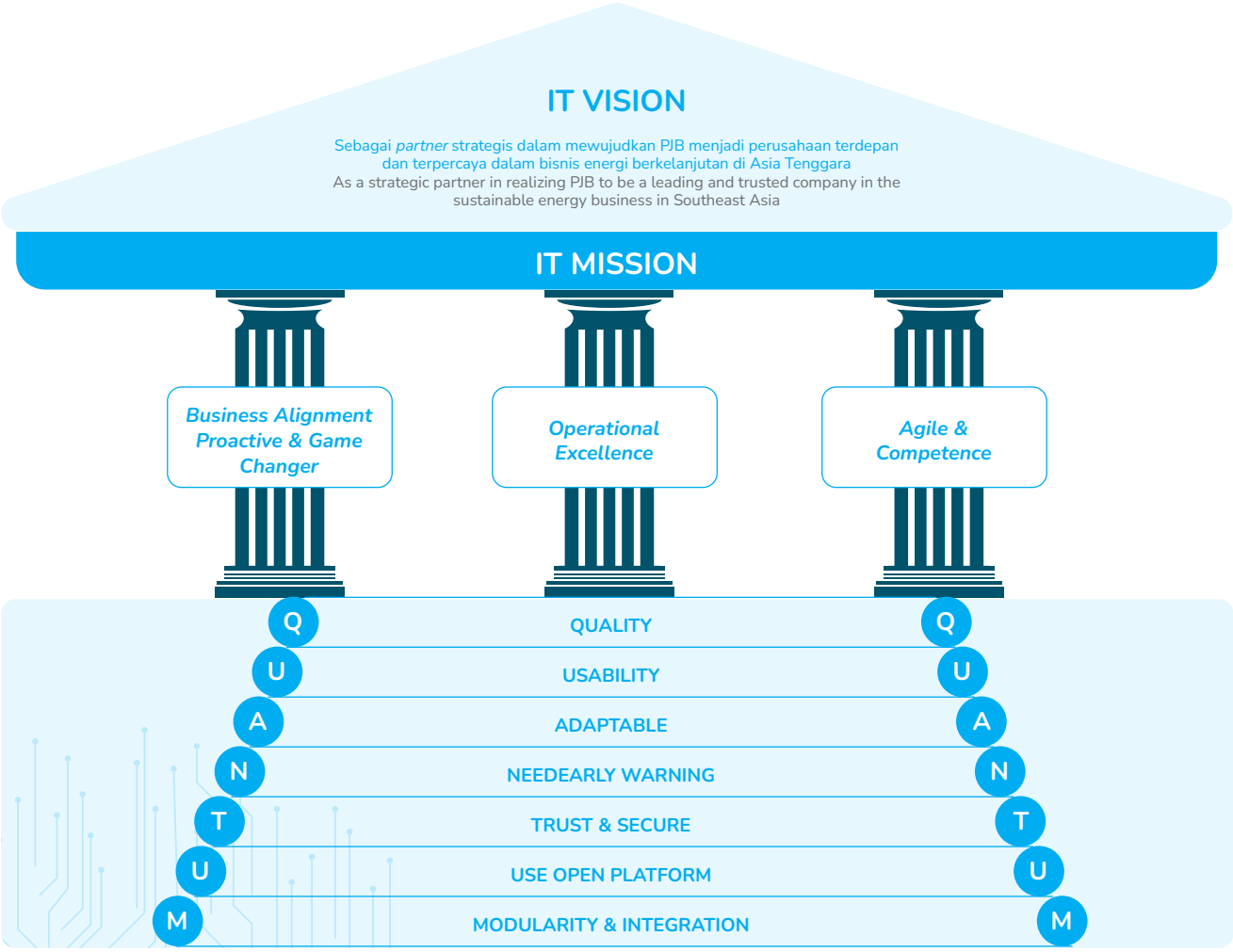

Roadmap Teknologi Informasi

Information Technology Roadmap

Roadmap TI PLN NP disusun sesuai dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) Periode Tahun 2020-2024 sebagaimana dalam gambar berikut:

PLN NP prepared IT Roadmap according to the Information Technology Strategic Plan (RSTI) for the 2020-2024 Period as presented in the following picture:

***Roadmap* Teknologi Informasi**
Information Technology Roadmap

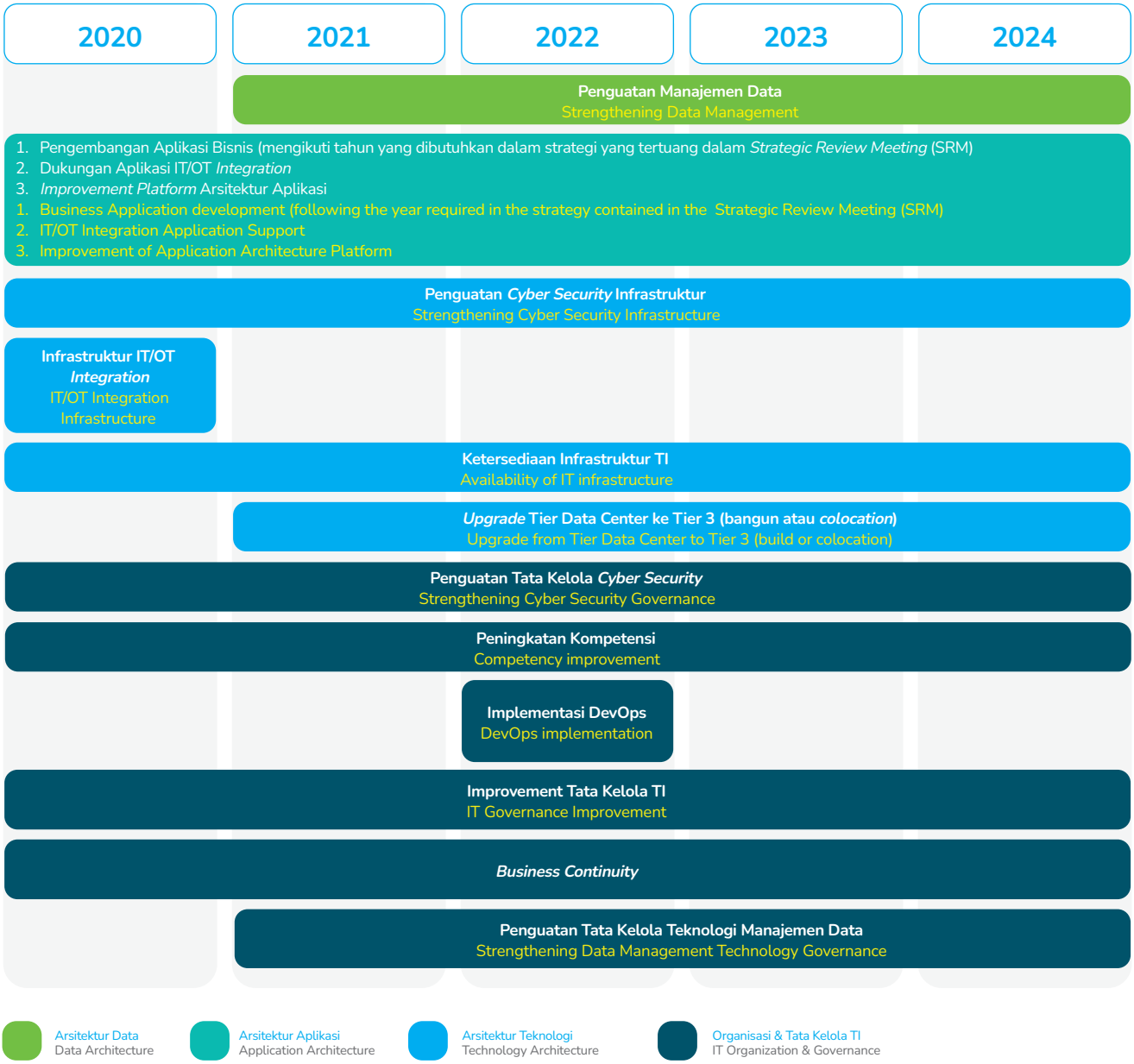

Penguatan *Cyber Security*

Strengthening Cyber Security

Dengan adanya tren peningkatan serangan siber di lingkungan PLN NP, Bidang Teknologi Informasi melakukan penguatan pengamanan siber baik dari segi *People*, *Process* dan *Technology*. Penguatan *Cyber Security* yang dilakukan antara lain:

1. Pengukuran *Cyber Security Maturity* (CSM);
2. Pengukuran Tingkat Maturitas Penanganan Insiden (TMPI);
3. Pembentukan *Cyber Security Incident Response Team* (CSIRT);
4. Resertifikasi ISO 27001;
5. IT *Security Assessment/ Penetration Testing*;
6. Pemeliharaan/ *Update Security Device*;
7. Peningkatan Kompetensi *Cyber Security* (*Training/ Workshop/ PGD/ Forum/ Awareness*).

With the increasing trend of cyber attacks within PLN NP, the Information Technology Division strengthens the cyber security in terms of People, Process and Technology. Cyber Security strengthening carries out:

1. Measurement of Cyber Security Maturity (CSM);
2. Measurement of Incident Handling Maturity Level (TMPI);
3. Establishment of Cyber Security Incident Response Team (CSIRT);
4. ISO 27001 Recertification;
5. IT Security Assessment/Penetration Testing;
6. Security Device Maintenance/Update;
7. Cyber Security Competency Improvement (Training/Workshop/PGD/Forum/Awareness).

Risiko Utama dan *Disruption* Teknologi Informasi

Major Risks and Information Technology Disruption

Dalam operasional Teknologi Informasi tentunya terdapat risiko yg akan muncul, untuk itu di tahun 2022 Bidang Teknologi Informasi PLN NP memetakan risiko internal beserta mitigasinya sebagai berikut:

In the Information Technology operation, there are certainly risks that will arise; therefore, PLN NP's Information Technology Division mapped the internal risks and their mitigations in 2022 as follows:

No	Risiko Risk	Mitigasi Mitigation
1	Potensi arsitektur aplikasi tidak selaras dengan arsitektur bisnis. Potential application architecture is not aligned with business architecture	Melakukan asesmen kebutuhan sumber daya TI untuk mendukung agenda *sub-holding* PLN IT resource needs assessment to support PLN's sub-holding agenda
		Review/Validasi Proses Bisnis 2022 Reviewing/Validating the 2022 Business Process
		Meninjau program *roadmap* RSTI tahun 2022 Reviewing the 2022 RSTI roadmap program
2	Potensi serangan siber dari internal maupun eksternal perusahaan Potential cyber attacks from the Company internal and external	Melakukan pembaharuan lisensi aplikasi/ *software* korporat untuk meminimalkan penggunaan lisensi bajakan (tidak resmi) Updating corporate application/software licenses to minimize the use of pirated (unofficial) licenses
		Penyempurnaan produk hukum terkait penggunaan aplikasi pada fasilitas komputer Perusahaan Refinement of legal products related to the use of applications on the Company's computer facilities
		Penguatan *Cyber Security* dengan Pembentukan CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*). Strengthening Cyber Security with the Establishment of CSIRT (Computer Security Incident Response Team)
		Penyusunan skenario BCM terkait potensi serangan siber Preparation of BCM scenarios related to potential cyber attacks
		Melakukan asesmen Tingkat Maturitas Penanganan Insiden (TMPI) bersama BSSN Incident Management Maturity Level (TMPI) assessment with BSSN
3	Potensi pelanggaran pemanfaatan hak kekayaan intelektual Potential violation of intellectual property rights utilization	Memperbaharui dan Menambah lisensi *software* yang digunakan oleh korporat secara umum Updating and Adding software licenses used by corporates in general
		Penyempurnaan produk hukum terkait penggunaan aplikasi pada fasilitas komputer Perusahaan Refinement of legal products related to the use of applications on the Company's computer facilities
		Inventarisasi dan *uninstall* program bajakan Inventory and uninstall pirated programs
		Update knowledge POC teknologi *desktop management* Updating POC knowledge of desktop management technology

No	Risiko Risk	Mitigasi Mitigation
4	Operasional layanan TI korporat terganggu (*down*) Corporate IT service operations are disrupted (down)	Peningkatan kapasitas DNS *cloud load balancer* Increasing the capacity of DNS cloud load balancer
		Workshop BCP DRP BCP DRP Workshop
5	Potensi kehilangan data korporat Potential corporate data loss	Pengadaan kontrak WAN dan internet Procurement of WAN and internet contracts
		Pengembangan aplikasi baru DMS (*Document Management System*) dalam mendukung tata kelola pengelolaan dokumen Development of a new DMS (Document Management System) application to support document management governance

Disaster Recovery Plan

Disaster Recovery Plan

Disaster Recovery Plan (DRP) adalah perencanaan yang fokus pada pemulihan sistem dan layanan teknologi informasi yang digunakan secara korporat dalam rangka mendukung strategi *Business Continuity Plan* (BCP). PLN NP telah menerapkan *Disaster Recovery Plan* (DRP) serta melakukan pengujian secara berkala setiap tahun untuk memastikan sistem DRP berjalan dengan baik dan sistem bisa dipulihkan sesuai target *Recovery Time Objective* (RTO) maupun *Recovery Point Objective* (RPO) yang diharapkan.

Disaster Recovery Plan (DRP) focuses on the recovery of information technology systems and services used corporately in order to support Business Continuity Plan (BCP) strategy. PLN NP has implemented a Disaster Recovery Plan (DRP) and conducts periodic testing every year to ensure the DRP system is running well and the system can be restored according to the expected Recovery Time Objective (RTO) and Recovery Point Objective (RPO) targets.

Realisasi Program Kerja Teknologi Informasi Tahun 2022

Realization of Information Technology Work Program in 2022

PLN NP telah melakukan beberapa program kerja TI selama tahun 2022, diantaranya adalah:

1. Mengintegrasikan aplikasi Ellipse dan Maximo untuk meminimalisir *double entry* dan menjaga integritas data pada kedua aplikasi.
2. Implementasi *Digital O&M workflow management* di seluruh pembangkit.
3. *Monitoring* dokumen pembayaran dihitung dari serah terima Batubara, Transportir Batubara dan BBM sampai dengan proses pembayaran.
4. Pengembangan Aplikasi To Do List meliputi; Fokus Hari Ini, Notifikasi, Input *Progress*, *Rating* Pekerjaan, *Review Report* dan Modul Admin serta Integrasi dengan *Office Automation* (OA)
5. Implementasi CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*) meliputi *Assessment & Awareness* CSIRT serta Implementasi CSIRT.
6. Pembangunan Infrastruktur *Microservices*,
7. Implementasi *Enterprise Asset Management* (EAM) Distribusi Jawa Timur.
8. *Roll out* EAM Maximo di PLTU UPK Singkawang, Kalimantan Barat; UPDK Minahasa (5 PL); UPDK Gorontalo, Sulawesi; UPK Asam-Asam; dan UIK NTT.

PLN NP carried out several IT work programs during 2022, including:

1. Integrated Ellipse and Maximo applications to minimize double entry and maintained data integrity in both applications.
2. Implementation of Digital O&M workflow management in all power plants.
3. Monitored payment documents calculated from the Coal handover, Coal and Fuel Transporters until the payment process.
4. To Do List Application Development, including: Today's Focus, Notification, Progress Input, Job Rating, Review Report and Admin Module as well as Integration with Office Automation (OA).
5. Implementation of CSIRT (Computer Security Incident Response Team) including CSIRT Assessment & Awareness as well as CSIRT Implementation.
6. Microservices Infrastructure Development,
7. Implementation of Enterprise Asset Management (EAM) for East Java Distribution.
8. Roll out of EAM Maximo in CFPP of Singkawang UPK, West Kalimantan; Minahasa UPDK (5 PLs); Gorontalo UPDK, Sulawesi; Asam-Asam UPK; and NTT UIK.

Audit Teknologi Informasi
Information Technology Audit

Dalam rangka pengembangan dan perbaikan TI, PLN NP secara berkesinambungan melaksanakan evaluasi implementasi tata kelola TI. Di tahun 2022 dilakukan audit TI sebagai berikut:

In order to develop and improve IT, PLN NP continuously evaluates the implementation of IT governance. In 2022, PLN NP carried out the following IT audits:

Tabel Audit TI Tahun 2022
Table of IT Audit in 2022

No	Judul Audit Audit Title	Jumlah Temuan Total Findings	Jumlah OFI/ Rekomendasi Total OFI/Recommendation	Status
1	ISO 20000-1:2018	0	2	*Closed*
2	ISO 27001:2013	0	3	*Closed*
3	KAP	0	0	*Closed*

Tindak lanjut dari temuan dan rekomendasi telah dilaksanakan seluruhnya.

Follow-up on findings and recommendations had been fully carried out.

Assessment Eksternal Teknologi Informasi
Assessment of External Information Technology

Untuk meningkatkan kualitas layanan Teknologi Informasi, PLN NP juga melaksanakan *assessment* yang dilakukan oleh tim independen, yaitu:

- **IT *Maturity Level Assessment* COBIT 5** *(Control Objective for Information Technologies 5)*
  PLN NP melaksanakan kegiatan *Assessment Maturity* dengan mengacu pada standar internasional yang digunakan juga di lingkungan BUMN sebagai *framework* pengukuran *maturity level* pengelolaan tata kelola TI yaitu *Standard Control Objectives for Information and related Technology* (COBIT). PLN NP mendapatkan nilai akhir 3,78.

To improve the quality of Information Technology services, PLN NP also carried out assessment conducted by an independent team, namely:

- **IT Maturity Level Assessment COBIT 5** (Control Objective for Information Technologies 5)
  PLN NP carries out Maturity Assessment activities by referring to international standards that are also used within SOEs as a framework for measuring the maturity level of IT governance management, namely the Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) Standard. PLN NP received a final score of 3.78.

Penghargaan TI Tahun 2022
IT Awards in 2022

Pada Tahun 2022, PLN NP berhasil meraih penghargaan *Bronze Winner* dalam Stevie International Business Awards untuk kategori IT *Awards*.

In 2022, PLN NP won the Bronze Winner award in the Stevie International Business Awards for the IT Awards category.

Rencana Program Kerja Teknologi Informasi Tahun 2023

Work Program Plan for Information Technology in 2023

Rencana Program Kerja TI di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Aplikasi iPlan 2023;
2. Pengembangan integrasi aplikasi AMS Korporat PLN dengan *Office Automation* PLN NP;
3. Pengembangan integrasi BBO - Ellipse;
4. Kesiapan Infrastruktur *Security* unit HSH;
5. Digitalisasi Penagihan dan Pembayaran;
6. *Digital Power Plant* (DPP) PLN 2023;
7. *Dashboard Monitoring Project*.

The Work Program Plan for IT in 2023 is as follows:

1. Development of iPlan 2023 Application;
2. Development of PLN Corporate AMS application integration with PLN NP Office Automation;
3. Development of BBO - Ellipse integration;
4. Readiness of Security Infrastructure for HSH unit;
5. Digitalization of Billing and Payment;
6. Digital Power Plant (DPP) PLN 2023;
7. Dashboard Monitoring Project.

PLN Nusantara Power *Integrated Management System* (PLN NP-IMS)

PLN Nusantara Power Integrated Management System (PLN NP-IMS)

Efektivitas dan efisiensi menjadi semangat utama pada pengelolaan *Integrated Management System* (IMS) Perusahaan. Melalui integrasi sistem, memberikan dorongan pada operasional Perusahaan menuju standar terbaik dan praktik terbaik yang relevan, yang pada akhirnya menghasilkan kinerja yang maksimal di Perusahaan.

Effectiveness and efficiency are the primary spirit to manage the Company's Integrated Management System (IMS). Through the system integration, PLN NP encourages the best relevant standards and practices for the Company's operations, which ultimately results in maximum performance of the Company.

Sertifikasi PAS 99:2012 PLN NP membuktikan bahwa penerapan PLN NP-IMS *Enterprise Architecture* di lingkungan Perusahaan mempunyai andil dalam memaksimalkan efektivitas dan efisiensi roda operasional Perusahaan. Secara keseluruhan, implementasi PLN NP-IMS menghadirkan efisiensi bagi Perusahaan melalui penghematan waktu, biaya, dan minimalisasi gangguan kegiatan bisnis.

PLN NP achieved PAS 99:2012 certification that proves that PLN NP-IMS Enterprise Architecture implementation within the Company holds the role in maximizing the effectiveness and efficiency the Company's operations. Overall, PLN NP-IMS brings efficiency to the Company through time and cost savings, and business disruption minimization.

PLN NP-IMS mengintegrasikan standar internasional *Baldrige Excellence Framework* (BEF), ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018, ISO 55001:2014, ISO 20000-1:2018, ISO 27001:2013, ISO 22301:2012, ISO 17025:2017, ISO 19600:2014, ISO 31001:2018, ISO 9001:2015, ISO 26001:2010, ISO 37001:2016, ISO 21001:2018, ISO 10667-1:2020, ISO 10667-2:2020, SMK3, SMP, Sistem Manajemen lain yang terintegrasi dengan PLN NP-IMS.

PLN NP-IMS integrates international standard Baldrige Excellence Framework (BEF), ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018, ISO 55001:2014, ISO 20000-1:2018, ISO 27001:2013, ISO 22301:2012, ISO 17025:2017, ISO 19600:2014, ISO 31001:2018, ISO 9001:2015, ISO 26001:2010, ISO 37001:2016, ISO 21001:2018, ISO 10667-1:2020, ISO 10667-2:2020, SMK3, SMP, other Management Systems integrated with PLN NPS-IMS.

Pengelola PLN NP-IMS

PLN NP-IMS Management

PLN NP-IMS dikelola oleh Satuan Kinerja Korporat dan Pengembangan Sistem Manajemen khususnya Bidang Pengembangan Sistem Manajemen. Hal ini berdasarkan Peraturan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali No. 0030.P/019/DIR/2022 tentang Pelaksana Susunan Organisasi dan Formasi Tenaga Kerja pada Direktorat Keuangan PT Pembangkitan Jawa-Bali. Pengelola PLN NP-IMS berada dibawah Satuan Kinerja Korporat & Pengembangan Sistem Manajemen dan membawahi 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Kinerja Korporat, Bidang Teknologi Informasi, dan Bidang Pengembangan Sistem Manajemen.

PLN NP-IMS is managed by Corporate Performance and Management System Development Unit specifically for Department of Management System Development. This is based on the Regulation of PT Pembangkitan Jawa-Bali's Board of Directors No. 0003.P/019/DIR/2022 concerning the implementation of Organizational Structure and Work Force Formations at the Finance Directorate of PT Pembangkitan Jawa-Bali. PLN NP-IMS is managed by Corporate Performance and Management System Development Unit and supervises 3 (three) Departments, namely Corporate Performance Department, Information Technology Department, and Management System Development Department.

Tata Kelola dan Lingkup PLN NP-IMS

Governance and Scope of PLN NP-IMS

PLN NP-IMS merupakan penyempurnaan dari berbagai proses sistem integrasi termasuk interelasi diantara proses-proses yang digambarkan dalam bagan Proses Bisnis atau Sistem Kerja menurut *Baldrige Excellence Framework*. Penerapan PLN NP-IMS ini sesuai dengan Peraturan Direksi Nomor 003.P/019/DIR/2019 tentang Implementasi PJB-IMS 2.0 di PT Pembangkitan Jawa-Bali. Dalam proses penyusunan PLN NP-IMS, PLN NP merujuk pada konsep *Plan Do Check Action* (PDCA) ISO 9001:2015 sebagai kerangka *Integrated Process*.

PLN NP-IMS is accomplishment of various systems integration processes, including interrelation among the processes described in the chart of Business Process or Work System based on Baldrige Excellence Framework. PLN NP-IMS implementation is according to the Board of Directors Regulation No. 003.P/019/DIR/2019 concerning PJB-IMS 2.0 implementation at PT Pembangkitan Jawa-Bali. In the process of preparing PLN NP-IMS, PLN NP refers to Plan Do Check Action (PDCA) of ISO 9001:2015 concept as the Integrated Process framework.

Skema Proses *Plan Do Check Action*
Plan Do Check Action Scheme

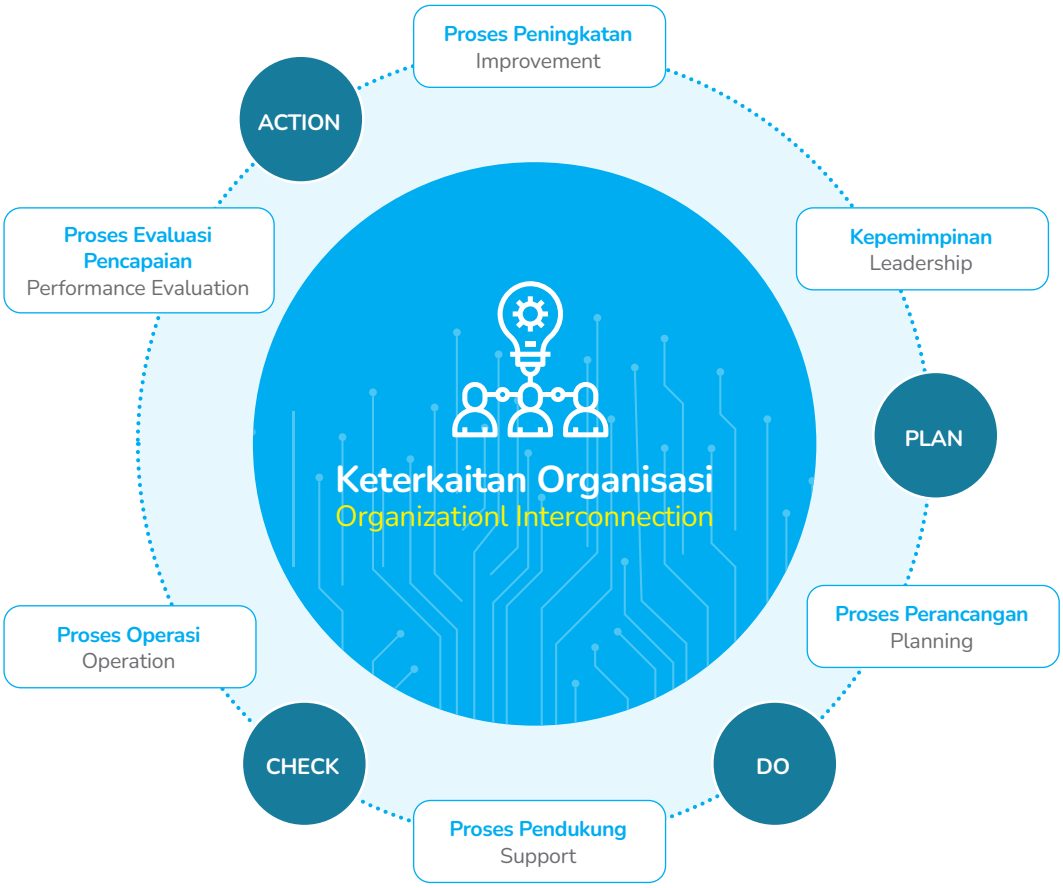

Dalam skema di atas dihasilkan dan dikendalikan melalui delapan langkah-langkah proses integrasi sebagai berikut:

a. Pemetaan bisnis proses dan interaksi prosesnya,
b. Identifikasi diagram konteks dan kesesuaian dengan tupoksi organisasi dan masing-masing unit,
c. *Alignment standard* yang digunakan dengan menghilangkan duplikasi prosedur dan format, uji dan *review* proses-proses,

Based on the scheme above, it is generated and controlled through eight steps of integration process as follows:

a. Business Processes and Interaction Mapping Process,
b. Identification of Context Diagrams and suitability with the main tasks and functions for the organization and each Unit,
c. Applied alignment standard through eliminating duplication of Procedure and Format, Test, and, Review of the processes,

d. Pengembangan kebijakan, *objective*, target dan *action plan* sistem integrasi,
e. Menetapkan *manual* integrasi dan pengembangan *generic procedure* yang berlaku dalam sistem integrasi,
f. Melaksanakan pelatihan pemahaman dan sosialisasi sebelum penerapan PLN NP-IMS,
g. Melaksanakan pemantauan dan peningkatan berkelanjutan terhadap Sistem Integrasi,
h. Penjaminan *conformance* proses sistem integrasi terkait pemenuhan persyaratan standar-standar manajemen, melalui suatu badan sertifikasi.

Adapun sistem manajemen yang diadopsi Perusahaan dalam PLN NP-IMS meliputi beberapa sistem manajemen sebagai berikut:

d. Policy Development, Objective, Target, and Action Plan Integrated System,
e. Establishment of Integrated Manual and Generic Procedure development applied in integrated systems,
f. Implementation of knowledge and socialization training prior to PLN NP-IMS application,
g. Continuous monitoring and improvement towards Integrated System,
h. Conformance process Guarantee for the Integrated System process related to the fulfillment of management standard requirements through Certification department.

The Company adopts management system in the PLN NP-IMS, including several management systems as follows:

Tabel Sistem Manajemen yang Diadopsi dalam PLN NP-IMS
Table of Management System Adopted in PLN NP-IMS

No	Sistem Manajemen Management System	Keterangan Penerapan Implementation Description
1	Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Quality Management System ISO 9001:2015	Seluruh persyaratan klausal diterapkan kecuali Klausul 7.3 Design and Development, dikarenakan kegiatan ini tidak dilakukan oleh PLN NP All requirement clauses are applied, unless the 7.3 Clause on Design and Development since this activity is not implemented by PLN NP
2	Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 Environmental Management System ISO 14001:2015	Seluruh persyaratan klausal diterapkan All requirement clauses are applied
3	Sistem Manajemen K3 ISO 45001:2018 OHS Management System ISO 45001:2018	Seluruh persyaratan klausal diterapkan All requirement clauses are applied
4	Sistem Manajemen Energi ISO 50001:2018 Energy Management System ISO 50001:2018	Seluruh persyaratan klausal diterapkan All requirement clauses are applied
5	Sistem Manajemen Aset ISO 55001:2014 Asset Management System ISO 55001:2014	Seluruh persyaratan klausal diterapkan All requirement clauses are applied
6	(KAN) Akreditasi Pengujian Lab ISO 17025:2017 (KAN) Laboratory and Calibration Management System ISO 17025:2017	Seluruh persyaratan klausal diterapkan All requirement clauses are applied
7	Sistem Manajemen ISO 20000-1:2018 ISO Management System 20000-1:2018	Seluruh persyaratan klausal diterapkan All requirement clauses are applied
8	Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001:2013 Cyber Security Management System ISO 27001:2013	Seluruh persyaratan klausal diterapkan All requirement clauses are applied
9	Sistem Manajemen Keberlangsungan Usaha/ Bisnis ISO 22301:2012 Business Continuity Management System ISO 22301:2012	Seluruh persyaratan klausal diterapkan All requirement clauses are applied
10	Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System ISO 37001:2016	Seluruh persyaratan klausal diterapkan All requirement clauses are applied
11	Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan ISO 21001:2018 Educational Organizations Management System ISO 21001:2018	Seluruh persyaratan klausal diterapkan All requirement clauses are applied
12	Sistem Manajemen Risiko ISO 31001:2018 Risk Management System ISO 31001:2018	Seluruh persyaratan klausal diterapkan sebagai *guidance* All requirement clauses are applied as guidance
13	Sistem Manajemen Kepatuhan ISO 19600:2014 Compliance Management System ISO 19600:2014	Seluruh persyaratan klausal diterapkan sebagai *guidance* All requirement clauses are applied as guidance
14	Sistem Manajemen Tanggung Jawab Sosial ISO 26000:2010 Corporate Social Responsibility Management System ISO 26000:2010	Seluruh persyaratan klausal diterapkan sebagai *guidance* All requirement clauses are applied as guidance

No	Sistem Manajemen Management System	Keterangan Penerapan Implementation Description
15	Sistem Manajemen *Assessment Service Delivery* ISO 10667:2020 Assessment Service Delivery Management System ISO 10667:2020	Seluruh persyaratan klausal diterapkan sebagai *guidance* All requirement clauses are applied as guidance
16	Kriteria *Baldrige* Baldrige Criteria	Seluruh dokumen kriteria All Criteria Documents

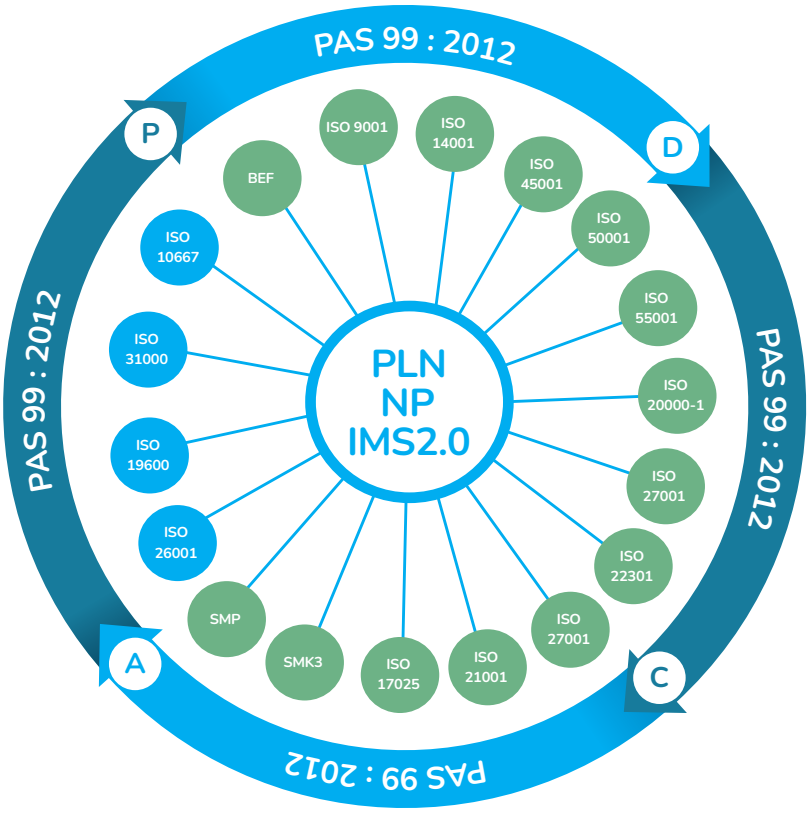

Sudah Bersertifikat
Certified

Sudah diimplementasikan sesuai standar *guide*
Applied based on guideline standard

Perusahaan menjamin bahwa kebijakan, program, sasaran dan proses-proses selalu mutakhir (*up-to-date*) sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam rangka pemenuhan masing-masing standar sistem manajemen yang diimplementasikan. Selain itu, persyaratan standar sistem manajemen ditetapkan, diimplementasikan dan dipelihara sesuai standar terbaru.

The Company guarantees that the policies, program, target and processes are always up-to-date following the Company needs in order to fulfill each of the applied management system standards. Moreover, PLN NP also establishes, implements, and maintains the management system standard requirements according to the latest standards.

Realisasi Program Kerja PLN NP-IMS Tahun 2022

Realization of PLN NP-IMS' Work Program Plan for 2022

PLN NP telah melakukan beberapa program kerja dalam rangka menjaga kualitas PLN NP-IMS selama tahun 2022, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan Proses Bisnis *Holding-Subholding* untuk 6 *Stream*;
2. Melakukan *Surveillance* Audit Sistem Manajemen Terintegrasi PT PLN Nusantara Power;
3. Melakukan Update Usulan Proses Bisnis IMS 2.0.

PLN NP have carried out several work program in order to maintain the quality of PLN NP-IMS throughout 2022, including:

1. Drafted the Holding-Sub holding Business Process for 6 Streams;
2. Surveillance Audit of Integrated Management System of PT PLN Nusantara Power;
3. Updated the IMS 2.0 Business Process Proposal.

Rencana Program Kerja PLN NP-IMS Tahun 2023

PLN NP-IMS' Work Program Plan for 2023

Rencana Program Kerja PLN NP-IMS di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Me*review* Proses Bisnis Pasca *Legal End-State* Perubahan Organisasi PLN Nusantara Power;
2. Meratifikasi Sistem Manajemen Terintegrasi PT PLN Persero;
3. Resertifikasi Sistem Manajemen Terintegrasi PT PLN Nusantara Power;
4. Melakukan Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan SMK2 dan Sistem Manajemen Gas Rumah Kaca ISO 14064:2018.

PLN NP-IMS Work Program Plan for 2023 is as follows:

1. Reviewing Post-Legal End-State Business Processes for PLN Nusantara Power Organizational Changes;
2. Ratifying Integrated Management System of PT PLN Persero;
3. Re-certification of the Integrated Management System of PT PLN Nusantara Power;
4. Conducting Certification of SMK2 Electricity Safety Management System and ISO 14064:2018 Greenhouse Gas Management System.

Pengembangan Strategi Manajemen Aset

Development of Asset Management Strategy

Manajemen aset Perusahaan mencakup proses pengembangan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengalihan aset secara efisien yang mengacu pada standard ISO 55001-2014. Melalui manajemen aset yang berkelanjutan, memungkinkan Perusahaan mendeteksi risiko yang mungkin timbul dan memberikah hasil pengembalian atas aset yang optimal.

The Company's asset management includes the process of developing, operating, maintaining, and transferring assets efficiently which refers to the ISO 55001-2014 standard. Through continuous asset management, the Company is able to detect risks that may arise and provide optimal return on assets.

Pengelola Manajemen Aset

Asset Management Executive

Unit kerja di Perusahaan yang bertanggung jawab mengelola manajemen aset adalah Satuan Kinerja Korporat dan Pengembangan Sistem Manajemen sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali No. 0003.P/019/DIR/2021 tentang Organisasi dan Formasi Tenaga Kerja pada Satuan Kinerja Korporat dan Pengembangan Sistem Manajemen PT Pembangkitan Jawa-Bali, pengelola Aset Manajemen adalah Satuan Kinerja Korporat dan Pengembangan Sistem Manajemen.

Pengelolaan Manajemen Aset berada di bawah wewenang Satuan Pengembangan Sistem Manajemen dan membawahi 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Kinerja Korporat, Bidang Teknologi Informasi, dan Bidang Pengembangan Sistem Manajemen.

The work unit in the Company that is in charge of managing asset management is the Corporate Performance and Management System Development Unit as stipulated in the Regulation of the Board of Directors of PT Pembangkitan Jawa-Bali No. 0003.P/019/DIR/2021 concerning Organization and Manpower Formation in the Corporate Performance and Management System Development Unit of PT Pembangkitan Jawa-Bali, the manager of Asset Management is the Corporate Performance and Management System Development Unit.

Asset Management is under the authority of the Management System Development Unit and is in charge of 3 (three) departments, namely the Corporate Performance Department, the Information Technology Department, and the Management System Development Department.

Kerangka Kerja Manajemen Aset

Asset Management Framework

Pelaksanaan konsep manajemen aset di Perusahaan mengacu pada *standard best practice* ISO 55001-2014 yang disesuaikan dengan Aset yang dikelola oleh PLN NP, yaitu Aset pembangkit listrik. Pedoman implementasi manajemen aset pembangkitan di PLN NP mengacu pada Peraturan Direksi PT Pembangkitan Jawa Bali No. 0024.P/019/DIR/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Implementasi Manajemen Aset Pembangkitan PT PJB. Proses pengelolaan manajemen aset tersebut dituangkan dalam *Framework* Manajemen Aset Pembangkitan pada Peraturan Direksi tersebut diatas, sebagaimana ditunjukkan melalui bagan berikut:

The implementation of the asset management concept in the Company refers to the ISO 55001-2014 best practice standard adjusted to the Assets managed by PLN NP, namely power plant Assets. Guidelines for the implementation of Electric Power Plant asset management in PLN NP refer to the Regulation of the Board of Directors of PT Pembangkitan Jawa Bali No. 0024.P/019/DIR/2022 concerning Regulations for the Implementation of PT PJB's Electric Power Plant Asset Management. The asset management process is outlined in the Electric Power Plant Asset Management Framework in the above regulation, as shown in the following chart:

Kerangka Kerja Manajemen Aset Pembangkitan
Electric Power Plant Asset Management Framework

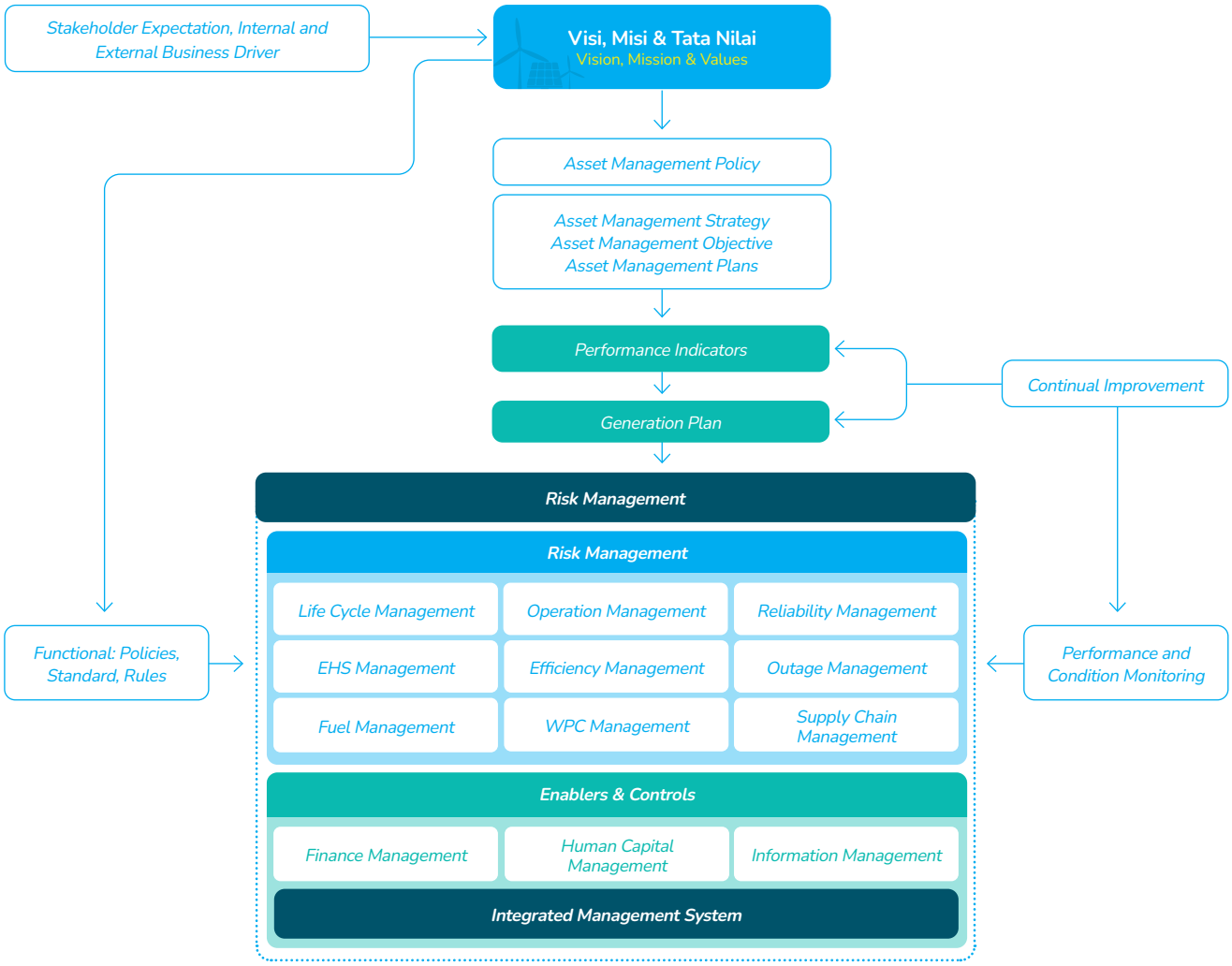

Strategi Manajemen Aset
Asset Management Strategy

Penerapan strategi manajemen aset bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen serta menyediakan dan mempertahankan aset sehingga mencapai hasil layanan yang *excellence*. Strategi manajemen aset membantu elemen-elemen Perusahaan dalam membuat keputusan atas aset guna mencapai hasil yang diinginkan secara efektif dan efisien diantaranya:

1. Pemanfaatan seoptimal mungkin aset yang ada;
2. Pemanfaatan nilai uang saat dilakukan investasi aset baru;
3. Pembuatan keputusan untuk berinvestasi, mempertahankan, atau divestasi aset dengan memperhatikan serta melindungi kebutuhan generasi sekarang dan masa depan.

Asset management strategy purposes to meet the customers needs as well as to provide and maintain assets so as to achieve excellent service results. The asset management strategy assists the Company's elements in making decisions on assets to achieve the desired results effectively and efficiently, including:

1. Utilization of the existing assets as optimal as possible;
2. Utilization of value for money when new asset investments are made;
3. Making decisions to invest, retain or divest assets by taking into account and protecting the needs of current and future Electric Power Plants.

Area yang menjadi sasaran strategis implementasi Manajemen Aset di Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. *Plant Availability & Reliability*;
2. Peningkatan efisiensi *thermal*;
3. Kepemimpinan yang *sustainable*;
4. *Sustainable Human & Knowledge Asset Performance*;
5. *Risk Management* dalam pengelolaan aset.

Pengelolaan aset ditujukan untuk mencapai kinerja ekselen pada area strategis di atas dengan menerapkan Strategi Manajemen Aset sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan kesiapan dan keandalan pembangkit;
2. Mengoptimalkan efisiensi pembangkit;
3. Menyelaraskan *Supply Chain Management* dengan seluruh kegiatan pembiayaan dan kinerja pembangkit berdasarkan prinsip *life cycle cost*;
4. Mengoptimalkan komunikasi internal dan eksternal;
5. Mengembangkan kapasitas organisasi dalam mencapai dan mempertahankan pencapaian kinerja;
6. Mengoptimalkan *Knowledge Management*;
7. Pengelolaan aset pembangkit dengan mengedepankan faktor HSE (*Health, Safety and Environment*).

Strategic targets for the implementation of Asset Management in the Company are the following areas:

1. Plant Availability & Reliability;
2. Improved thermal efficiency;
3. Sustainable leadership;
4. Sustainable Human & Knowledge Asset Performance;
5. Risk Management in asset management.

Asset management is intended to achieve excellent performance above strategic areas by implementing the following Asset Management Strategies:

1. Optimizing power plant readiness and reliability;
2. Optimizing power plant efficiency;
3. Aligning Supply Chain Management with all financing activities and power plant performance based on life cycle cost principles;
4. Optimizing internal and external communication;
5. Developing organizational capacity in achieving and sustaining performance achievements;
6. Optimizing Knowledge Management;
7. Managing power plant assets by prioritizing the HSE (Health, Safety and Environment) factor.

Proses Manajemen Aset
Asset Management Process

Proses Manajemen Aset Perusahaan ditunjukan dalam gambar sebagai berikut:

The Company Asset Management process is as the following picture:

Diagram Proses Manajemen Aset
Diagram of Asset Management Process

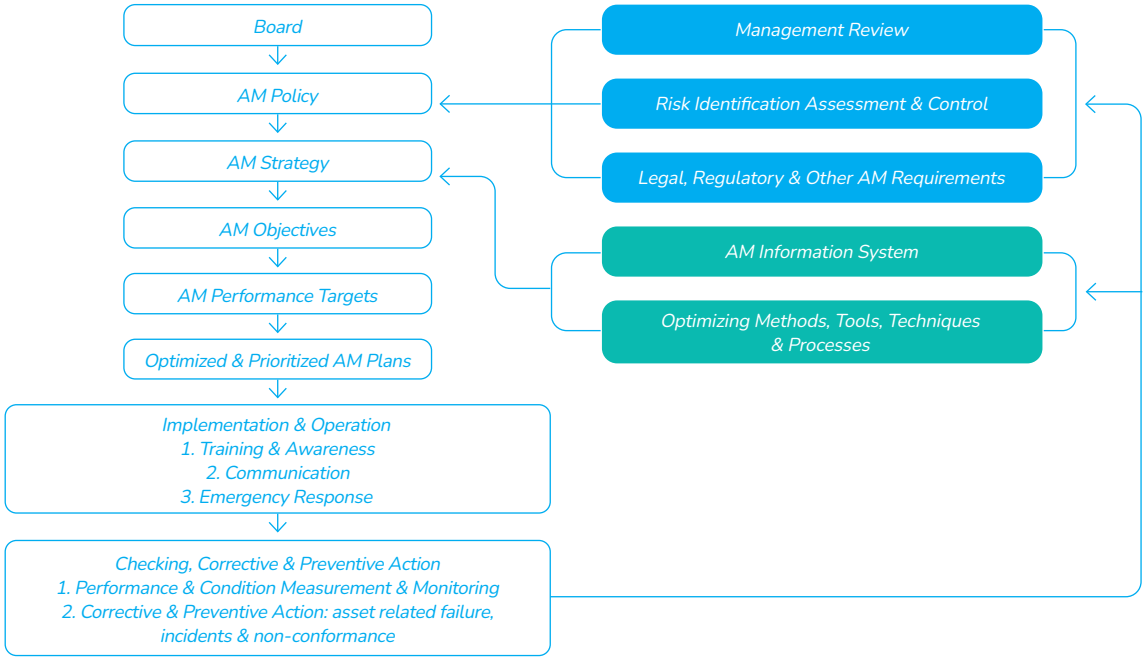

Eksekusi Manajemen Aset
Asset Management Execution

Manajemen aset Perusahaan menerapkan prinsip *life cycle* dan kaidah manajemen risiko yang didukung oleh berbagai sumber daya dan prosedur pengelolaan aset yang dilakukan oleh seluruh unit. Pengelolaan tersebut diwujudkan dengan melakukan *cascading* sebagaimana ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut:

The Company's asset management implements life cycle principles and risk management principles supported by various resources and asset management procedures conducted by all units. The management is realized by cascading as shown in the following picture:

Cascading Manajemen Aset
Asset Management Cascading

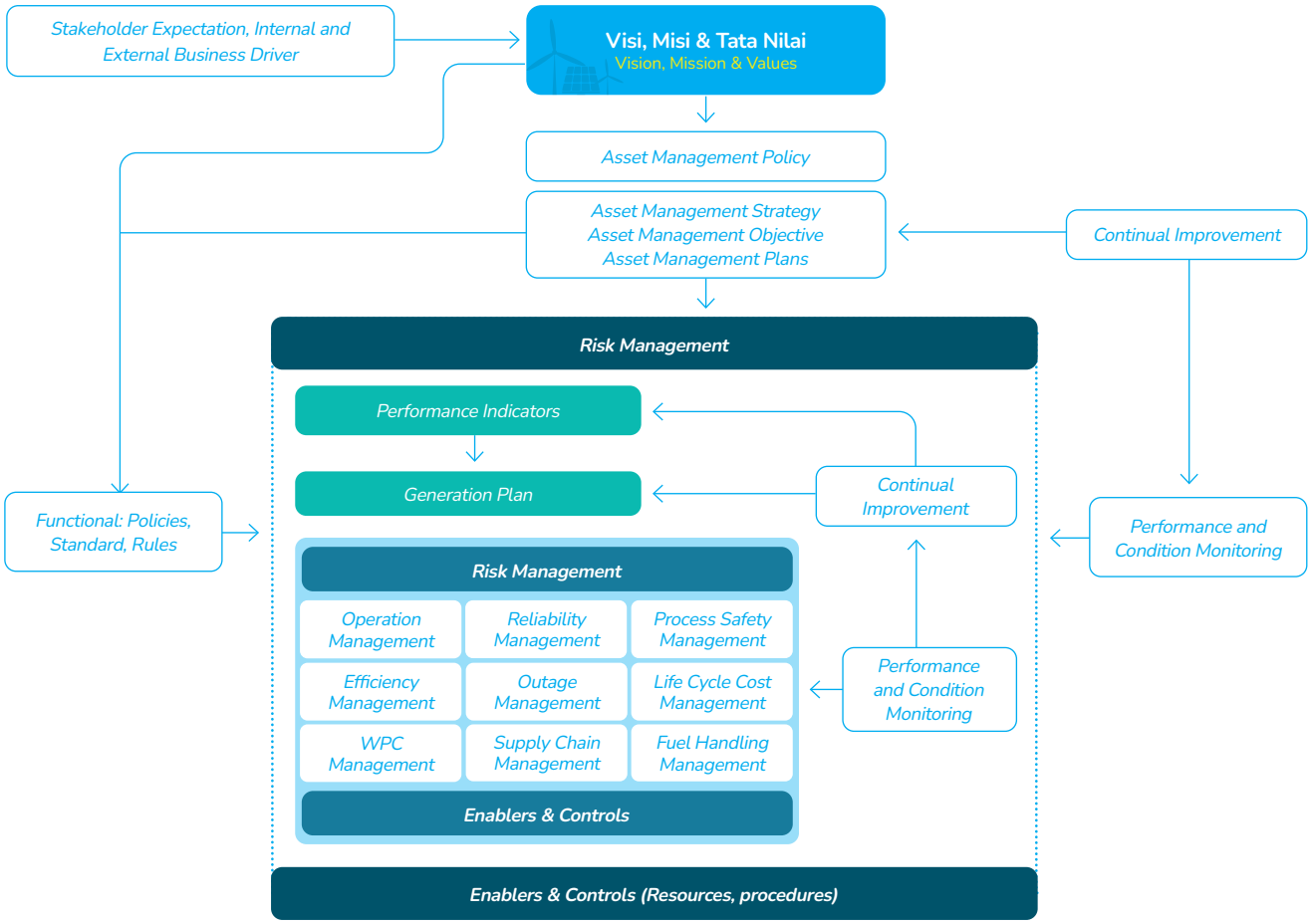

Realisasi Program Kerja Manajemen Aset Tahun 2022
Realization of Asset Management Work Program in 2022

Program kerja dalam rangka menjaga kualitas Manajemen Aset selama tahun 2022, diantaranya adalah:

1. *Awareness* dan sosialisasi Peraturan Direksi No. 0024.P/019/DIR/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Implementasi Manajemen Aset Pembangkitan PLN NP;
2. *Workshop*, sosialisasi dan pendampingan proses sertifikasi terkait ISO 55001-2014;

The work program in order to maintain the quality of Asset Management during 2022 is as follows:

1. Awareness and socialization of Regulation of the Board of Directors No. 0024.P/019/DIR/2022 concerning Regulations on the Implementation of PLN NP Electric Power Plant Asset Management;
2. Workshop, socialization and assistance in the certification process related to ISO 55001 - 2014;

3. Penguatan implementasi manajemen aset pembangkitan dengan melakukan program *plan walkdown*, *workshop*, dan FGD;
4. Penyusunan Kriteria Standar Kompetensi yang digunakan untuk sertifikasi oleh Dirjen Ketenagalistrikan terkait Personel Manajemen Aset Pembangkitan;
5. *Update* materi pembelajaran di PJB Academy terkait pembelajaran *Asset Management* dan Tata Kelola Pembangkitan;
6. Penyiapan Materi Pembelajaran dan Kriteria *Maturity Level* untuk tiga stream Baru (*Life Cycle Cost Management, Process Safety Management*, Pengelolaan Energi Primer).

3. Strengthened the implementation of Electric Power Plant asset management by conducting plan walkdown programs, workshops, and FGDs;
4. Preparation of Competency Standard Criteria used for certification by the Director General of Electricity related to Electric Power Plant Asset Management Personnel;
5. Updated learning materials in PJB Academy related to Asset Management and Electric Power Plant Governance learning;
6. Preparation of Learning Materials and Maturity Level Criteria for three new streams (Life Cycle Cost Management, Process Safety Management, Primary Energy Management).

Rencana Program Kerja Manajemen Aset Tahun 2023

Asset Management Work Program Plan for 2023

Rencana Program Kerja Manajemen Aset di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan *Asset Management* dan Tata Kelola Pembangkitan:
   a. *Review* Proses Bisnis dan penetapan *Business Process Owner* (BPO)/Pembina *Stream* pada panduan Manajemen Aset Pembangkitan PLN NP;
   b. *Review* Kurikulum & Silabus, serta materi pembelajaran terkait *Asset Management* dan Tata Kelola Pembangkitan;
   c. *Webinar Series Asset Management*;
   d. Program *Parenting – Sistering Great* Nusantara (12 Unit UPK/UPDK);
   e. *Workshop*/ FGD untuk masing-masing stream Tata Kelola Pembangkitan;
   f. *Plant Walkdown* terkait Tata Kelola Pembangkitan pasca HSH;
   g. Sosialisasi dan pembinaan terkait ISO 55001-2014 pasca HSH.
2. *Improvement Asset Management* dan Tata Kelola Pembangkitan:
   a. Penyusunan Kriteria *Maturity Level* untuk *Stream* LCCM dan PSM;
   b. Sertifikasi Kompetensi Personel Implementer Tata Kelola Pembangkitan;
   c. Optimalisasi Fitur aplikasi *Enterprise Asset Management* (EAM) dalam *stream* Tata Kelola Pembangkitan PLN NP.
3. *Project Owner* untuk Proyek Implementasi *Enterprise Asset Management*:
   a. Proyek implementasi *Asset Management* Pilar Operasi dan ISO 55000 di PT Geo Dipa Energi (GDE);
   b. Implementasi EAM *Stream* OME di 6 UPDK.

Asset Management Work Program Plan in 2023 is as follows:

1. Management of Asset Management and Electric Power Plant Governance:
   a. Review of Business Processes and determination of Business Process Owner (BPO)/Stream Supervisor in guidelines for PLN NP Electric Power Plant Asset Management;
   b. Review of Curriculum & Syllabus, as well as learning materials related to Asset Management and Electric Power Plant Governance;
   c. Webinar Series Asset Management;
   d. Parenting - Sistering Great Nusantara program (12 UPK/UPDK units);
   e. Workshop/FGD for each Electric Power Plant Governance stream;
   f. Plant Walkdown related to Electric Power Plant Governance post HSH;
   g. Socialization and guidance related to ISO 55001-2014 post HSH.
2. Improvement of Asset Management and Electric Power Plant Governance:
   a. Preparation of Maturity Level Criteria for LCCM and PSM Streams;
   b. Competency Certification of Electric Power Plant Governance Implementer Personnel;
   c. Optimization of Enterprise Asset Management (EAM) application Features in PLN NP Electric Power Plant Governance stream.
3. Project Owner for Enterprise Asset Management Implementation Project:
   a. Project on the implementation of Asset Management Pillar Operations and ISO 55000 at PT Geo Dipa Energi (GDE);
   b. Implementation of EAM Stream OME in 6 UPDKs.

Optimalisasi Potensi melalui Pengembangan Usaha

Optimizing Potential through Business Development

Industri pembangkitan tenaga listrik menjadi sangat dinamis menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan sumber daya, teknologi dan daya saing. PLN NP memaksimalkan potensi sumber daya internal melalui pengembangan dan inisiasi, semata-mata untuk kepentingan keberlanjutan usaha Perusahaan.

Electric power plant industy turns into highly dynamic to adapt with the growth demands of resources, technology and competitiveness. PLN NP maximizes the internal resources potential through development and initiation, exclusively for the interest of sustainable business of the Company.

Pengelola Pengembangan Usaha

Business Development Management

Pengelola Pengembangan Usaha dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Bisnis dan Niaga sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali No. 026.P/019/DIR/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pembangkitan Jawa-Bali. Pengelola pengembangan usaha berada di bawah Direktorat Pengembangan Bisnis dan Niaga, yang membawahi 4 Bidang yaitu Divisi Niaga, Divisi EBT dan Pengembangan Pembangkit, Divisi Konstruksi dan PMO, dan Divisi *Supply Chain Management*.

Di dalam pelaksanaan pengembangan usaha, bidang-bidang tersebut didukung oleh Anak Perusahaan di bidang Investasi (PT PJBI), bidang konstruksi (PT RE) serta didukung oleh Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi lainnya.

The Directorate of Business Development and Commerce runs Business Development Management as stipulated in the Board of Directors Regulation of PT Pembangkitan Jawa-Bali No. No. 026.P/019/DIR/2022 concerning Organization and Work Procedure of PT Pembangkitan Jawa-Bali. The Business Development is under the Directorate of Business Development and Commerce, which supervise 4 fields namely, Commerce Division, NRE and Power Plant Development Division, Construction and PMO Division, and Supply Chain Management Division.

In carrying out business development, these fields are supported by Subsidiaries in the Investment field (PT PJBI), Construction field (PT RE), and the support of other Subsidiaries and Affiliates.

Tata Kelola Pengembangan Usaha

Business Development Governance

Fokus utama pengembangan usaha adalah mempersiapkan optimasi dari sumber daya internal untuk memberikan kontribusi yang maksimal dari segala peluang bisnis yang akan muncul. Selain itu, juga meningkatkan kinerja proyek yang telah berjalan sehingga maksimal dalam memberikan andil dalam pencapaian *excellent performance* dan *business sustainability*.

Pengembangan usaha PLN NP sampai saat ini fokus pada beberapa pengembangan diantaranya:

1. Terdapat beberapa proyek yang saat ini dalam tahap konstruksi yaitu PLTS *Floating* Cirata sebesar 145 MWAC, PLTA Batang Toru dengan kapasitas 510 MW dan PLTU Sumbagsel 1 dengan kapasitas 2x150 MW.

The main focus of business development is to prepare the optimization of internal resources and provide maximum contribution in every upcoming business opportunities. Furthermore, it also improves the performance of ongoing project so as to be able to maximally contribute in achieving excellent performance and business sustainability.

PLN NP's business development focuses on several developments, including:

1. Currently, there are several projects under construction, namely the Cirata Floating SPP with a capacity of 145 MWAC, the Batang Toru HPP with a capacity of 510 MW and Southern Sumatera CFPP 1 with a capacity of 2x150 MW.

2. Terdapat beberapa proyek yang saat ini dalam tahap inisiasi dan *development*, yaitu Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dengan kapasitas sekitar 70 MW di Tanah Laut, Kalimantan Selatan; Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) *Floating* Karangkates 100 MW di Jawa Timur; PLTS Dediselisasi sekitar 60 MW yang tersebar di 48 lokasi baik di Jawa, Sumatera dan Kalimantan; PLTA Sulbagsel (Kuota) Tersebar 200 MW; PLTA Jawa-Bali (Kuota) Tersebar 50 MW dan PLTS Terapung Batam 42 MWp.
3. Telah dilakukan inisiasi berupa kajian kelayakan proyek (*Feasibility Study*) untuk potensi pengembangan pembangkit, baik PLTS, PLTB dan PLTA/M dengan lokasi tersebar berdasarkan RUPTL PT PLN (Persero) 2021-2030 serta penyusunan kajian kelayakan dan pengurusan perizinan untuk proyek PLTA di DAS Mamberamo.

Dalam melaksanakan pengembangan usaha, PLN NP telah dilengkapi dengan perangkat kebijakan tata kelola pengembangan usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengembangan usaha oleh divisi terkait. Selain itu, telah tersedia aplikasi PMO (*Program Management Office*) untuk membantu Project Manager dalam melakukan fungsi kontrol dan monitor proyek mulai dari tahap inisiasi hingga tahap penyelesaian proyek tersebut.

2. There are several projects currently in the initiation and development stages, namely the Development of a Wind Power Plant (WPP) with a capacity of around 70 MW in Tanah Laut, South Kalimantan; Development of a 100 MW Floating Karangkates Solar Power Plant (SPP) in East Java; SPP de-dieselization of around 60 MW spread across 48 locations in Java, Sumatera and Kalimantan; spread across the Southern Sumatera HPP (Quota) of 200 MW; spread across Java-Bali HPP (quota) of 50 MW and Floating Batam SPP of 42 MWp.
3. The Company initiated a project feasibility study (Feasibility Study) for the potential in order to develop power plants, both SPP, WPP and HPP/MHPP with the scattered locations based on Electricity Supply Business Plan (RUPTL) of PT PLN (Persero) for 2021-2030 as well as preparation of feasibility studies and licensing arrangements for hydropower projects in Mamberamo Watershed.

In carrying out business development, PLN NP has been equipped with business development governance policy tools as the guideline in implementing business development by the relevant divisions. Moreover, the PMO (Program Management Office) application is available to assist the Project Manager in running project control and monitoring functions from the initiation stage to the project completion stage.

Realisasi Program Kerja Pengembangan Usaha Tahun 2022

Realization of Business Development Performance in 2022

Realisasi Program kerja Pengembangan Usaha selama tahun 2022, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. PLN NP mendapatkan Penugasan dari Pemegang Saham untuk mengembangkan PLTS Dediselisasi pada 14 April 2022.
2. PLN NP mendapatkan Penugasan dari Pemegang Saham untuk mengembangkan PLTS Floating Karangkates pada 28 Desember 2022.
3. Penyampaian hasil proses lelang oleh PLN (*Letter of Intent*/ LoI) untuk pengembangan PLTB Tanah Laut pada 20 April 2022 dimana PLN NP sebagai *mandatory partner* pada proyek tersebut.
4. PLN NP mendapatkan Penugasan Pengembangan Potensi Hidro di DAS Mamberamo, Papua pada 8 Maret 2022 dan telah dilakukan penyusunan kajian kelayakan dan pengurusan perizinan untuk PLTA Mamberamo.
5. PLN NP mendapatkan Penugasan Penyusunan Kajian Opsi Penambahan Kapasitas Daya Sistem *Isolated* PLTS Bawean pada 29 Desember 2022.
6. Telah dilakukan penyusunan kajian kelayakan proyek (*feasibility study*) untuk proyek-proyek potensial sesuai RUPTL PT PLN (Persero) meliputi PLTS, PLTB, PLTA/PLTM.

Realization of Business Development Performance throughout 2022 is as follows:

1. PLN NP received an Assignment from the Shareholders to develop SPP de-dieselization on April 14, 2022.
2. PLN NP received an Assignment from Shareholders to develop the Floating Karangkates SPP on December 28, 2022.
3. Submission of the results of the auction process by PLN (Letter of Intent/LoI) for the Tanah Laut WPP development on April 20, 2022 where PLN NP was the mandatory partner for the project.
4. PLN NP received a Hydro Potential Development Assignment in the Mamberamo Watershed, Papua on March 8, 2022 as well as prepared the feasibility study and carried out the licensing arrangements for the Mamberamo Hydropower Plant.
5. PLN NP received the Assignment to Prepare a Study of Options for Additional Power Capacity of the Bawean Isolated SPP System on December 29, 2022.
6. Feasibility study have been prepared for potential projects according to Electricity Supply Business Plan (RUPTL) of PT PLN (Persero), including SPP, WPP, HPP/MHPP.

Rencana Program Kerja Pengembangan Usaha Tahun 2023

Business Development Work Plan for 2023

Rencana Program Kerja Pengembangan Usaha di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Proses pengembangan dan pemilihan *partner* untuk PLTS Floating Karangkates dan PLTS IKN.
2. Proses pemberkasan lahan untuk proyek PLTS Dediselisasi.
3. Proses *due diligence* sampai dengan *inject* ekuitas berdasarkan saham PLN NP untuk proyek PLTB Tanah Laut.
4. Proses pengembangan untuk PLTA Sulbagsel (Kuota) Tersebar 200 MW.
5. Proses pengembangan untuk PLTA Jawa Bali (Kuota) Tersebar 50 MW.
6. Proses pengembangan untuk PLTS Terapung Batam 42 MWp.
7. Akuisisi PLTGU Sengkang 315 MW.
8. Inisiasi proyek yang akan ditugaskan kepada PLN NP yaitu PLTS, PLTA, PLTM dan proyek lainnya sesuai dengan RUPS Penugasan Strategis.
9. Inisiasi proyek-proyek di luar RUPTL seperti potensi pengembangan PLTA DAS Mamberamo di Papua, *additional demand*, potensi akuisisi pembangkit, pengembangan *captive power*, serta proyek lainnya.

Business Development Work Plan for 2023 is as follows:

1. The process of developing and selecting partners for Floating Karangkates SPP and IKN SPP.
2. The land documenting process for the SPP de-dieselization project.
3. Due diligence process up to equity injection based on PLN NP shares for the Tanah Laut WPP project.
4. Development process for Southern Sulawesi HPP (Quota) Spread over 200 MW.
5. The development process for the Java Bali hydropower plant (quota) spread over 50 MW.
6. Development process for the Floating Batam SPP of 42 MWp.
7. Acquisition of Sengkang CCPP of 315 MW.
8. Initiating projects that will be assigned to PLN NP, namely SPP, HPP, MHPP and other projects following the Strategic Assignment General Meeting of Shareholders.
9. Initiation of projects outside the RUPTL such as the potential for the development of the Mamberamo DAS hydropower plant in Papua, additional demand, potential acquisition of power plants, development of captive power, and other projects

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

Analisis Industri
Industry Analysis

Tinjauan Perekonomian Dunia
World Economy Overview

Risiko perekonomian global yang kembali meningkat pada 2022 memberikan tantangan bagi upaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Risiko global tersebut dipicu oleh perang antara Rusia dan Ukraina yang kembali meningkatkan fragmentasi politik dan ekonomi dunia. Secara umum perekonomian dunia pada 2022 menghadapi lima tantangan serius yang sangat perlu diwaspadai. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang menurun (*slow growth*). Kedua, inflasi yang sangat tinggi (*high inflation*) dipicu kenaikan harga energi dan pangan global. Ketiga, kebijakan suku bunga tinggi dalam waktu yang lama (*higher for longer*). Keempat, dolar AS yang sangat kuat (*strong dollar*) sehingga memberikan tekanan depresiasi nilai tukar banyak negara. Kelima, penarikan dana investor global dan mengalihkan ke aset likuid (*cash is the king*). Berbagai tantangan perekonomian global tersebut pada akhirnya menuntut penguatan kerja sama internasional baik skala regional maupun multilateral.

Global economic risks re-increased in 2022, resulted in challenges for efforts in accelerating national economic recovery. Global risks were triggered by the war between Russia and Ukraine, which re-increased the fragmentation of world politics and economics. In general, the world economy in 2022 faced five serious challenges that needed to be anticipated. First, declining economic growth (slow growth). Second, high inflation was triggered by the increase in global energy and food prices. Third, high interest rate policy for a long time (higher for longer). Fourth, greatly strong US dollar so as to put pressure on the depreciation of many countries' exchange rates. Fifth, the withdrawal of global investor funds and shifting to liquid assets (cash is the king). Various challenges of the global economy ultimately require strengthening international cooperation, both regionally and multilaterally.

Kerja sama multilateral yang lebih kuat sangat penting untuk menjaga pertumbuhan dari aturan berbasis sistem multilateral dan untuk memitigasi perubahan iklim dengan membatasi emisi dan meningkatkan investasi hijau. Di sisi lain kebijakan penawaran juga dapat mengatasi faktor struktural utama yang menghambat pertumbuhan ekonomi, membantu membangun ketahanan ekonomi, dan meringankan tekanan harga. Dibutuhkan dorongan terpadu untuk investasi di sepanjang rantai pasokan dari teknologi energi hijau yang akan mendukung keamanan energi serta membantu mempercepat kemajuan transisi energi hijau.

Stronger multilateral cooperation is essential to maintain the growth of the multilateral system-based rules and to mitigate climate change by limiting emissions and increasing green investment. On the other hand, bidding policies can also address key structural factors that constrain economic growth, assist in building economic resilience, and alleviate price pressures. An integrated encouragement for investment throughout the supply chain of green energy technologies is needed to support energy security and assist in accelerating the progress of the green energy transition.

Sumber: World Economic Outlook International Monetary Fund (IMF) Januari 2023
Source: World Economic Outlook International Monetary Fund (IMF) January 2023

Grafik Pertumbuhan Ekonomi Dunia (%)
Chart of World Economic Growth (%)

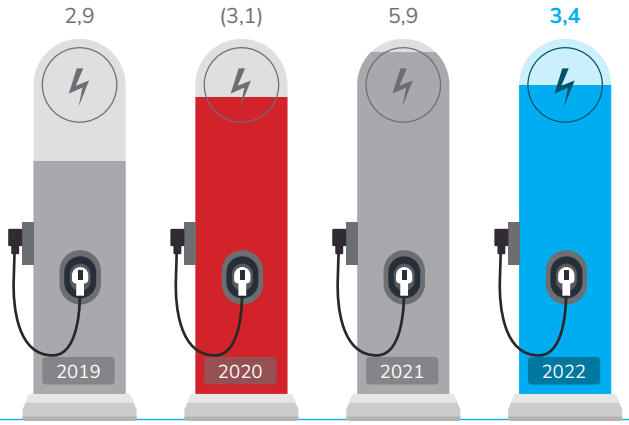

Sumber: World Economic Outlook International Monetary Fund (IMF) Januari 2023
Source: World Economic Outlook International Monetary Fund (IMF) January 2023

Analisis Perekonomian Indonesia
Indonesian Economy Analysis

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Indonesian Economic Growth

Perekonomian Indonesia diperkirakan mampu melanjutkan pemulihan ekonomi di tengah tekanan inflasi global dan perlambatan ekonomi beberapa negara pada keseluruhan tahun 2022. Indonesia harus mewaspadai risiko dan dampak yang ditimbulkan seperti ketegangan geopolitik yang masih meningkat, pengetatan kebijakan moneter global, dan kenaikan harga komoditas. Banyak negara telah menunjukkan perlambatan perkembangan ekonomi dan peningkatan tekanan inflasi sehingga mengindikasikan bahwa semakin kuat dan dekat pada risiko stagflasi. Namun, kondisi tersebut tidak terlihat pada kondisi perekonomian domestik. Fenomena *windfall* memungkinkan pemerintah untuk memperluas stimulus fiskal dengan tetap fokus utama pada proses pemulihan.

The Indonesian economy is expected to be able to continue economic recovery amid the global inflationary pressures and the economic slowdown of several countries throughout 2022. Indonesia should be aware of the risks and impacts such as heightened geopolitical tensions, tightening global monetary policy, and rising commodity prices. Many countries indicated the slowdown in economic development and increase in inflationary pressures, thus indicating that they are getting stronger and closer to the risk of stagflation. However, these conditions are not seen in the domestic economy. The windfall phenomenon allows the government to expand fiscal stimulus while keeping the main focus on the recovery process.

Didukung fundamental ekonomi nasional yang kuat, aktivitas ekonomi domestik tetap bergeliat meski kondisi global masih mengalami perkembangan yang pasang surut. Bauran berbagai kebijakan dan strategi konstruktif yang diambil Pemerintah, salah satunya melalui Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), berhasil menjadi kunci keberhasilan dalam mendorong laju ekonomi nasional. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai sebesar 5,31 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,70 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 19,87 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 16,28 persen.

Supported by strong national economic fundamentals, domestic economic activity keeps moving despite global conditions are still experiencing ups and downs. Combination of various constructive policies and strategies taken by the Government, including the Covid-19 Handling Program and National Economic Recovery (PC-PEN), has succeeded in encouraging the pace of the national economy. This is reflected in Indonesia's economic growth which reached 5.31 percent, higher than the achievement in 2021 which increased by 3.70 percent. In terms of production, the highest growth occurred in the Transportation and Warehousing Business Field at 19.87 percent. Meanwhile, in terms of expenditure, the highest growth was achieved by the Component of Goods and Services Exports at 16.28 percent.

Ekonomi Indonesia triwulan IV-2022 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 0,36 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,56 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 30,13 persen. Selama tahun 2022 kelompok provinsi di Pulau Jawa mewarnai struktur dan kinerja ekonomi Indonesia secara spasial dengan kontribusi sebesar 56,48 persen dan kinerja ekonomi yang mencatat pertumbuhan 5,31 persen (c-to-c).

Indonesia's economy in the fourth quarter of 2022 against the previous quarter increased by 0.36 percent (q-to-q). In terms of production, Public Administration, Defense, and Compulsory Social Security Business Field experienced the highest increase of 10.56 percent. In terms of expenditure, the Government Consumption Expenditure (PK-P) Component experienced the highest increase of 30.13 percent. During 2022, the group of provinces in Java Island spatially dominated the structure and performance of the Indonesian economy with a contribution of 56.48 percent and an economic performance that recorded an increase of 5.31 percent (c-to-c).

Sumber: Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia No. 15/02/Th. XXVI, 6 Februari 2023
Source: Official Gazette of Indonesia's Economic Growth Statistics No. 15/02/Th. XXVI, February 6, 2023

Tingkat Inflasi Indonesia
Indonesia's Inflation Rate

Inflasi IHK
Consumer Price Index Inflation

0,06% (mtm)

5,51% (yoy)

Perkembangan pada Desember 2022 menunjukkan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) terkendali. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh positif sinergi kebijakan yang makin erat antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Bank Indonesia, serta berbagai mitra strategis dalam menurunkan laju inflasi, termasuk mengendalikan dampak lanjutan penyesuaian harga BBM

Developments in December 2022 show Price Index inflation Consumers (CPI) under control. The development of controlled Consumer Price Index inflation is inseparable from the positive influence of the closer policy synergy between the Central and Regional Governments, Bank Indonesia, and various strategic partners in reducing the inflation rate, including controlling the continued impact of fuel price adjustments.

Inflasi Inti (*Core*)
Core Inflation

>> 0,22% (mtm) | 3,36% (yoy)

Inflasi Kelompok Bahan Makanan Bergejolak (*Volatile Food*)
Volatile Food Inflation

>> 2,24% (mtm) | 5,61% (yoy)

Inflasi Kelompok Harga yang Diatur Pemerintah (*Administered Price*)
Administered Price Inflation

>> 0,73% (mtm) | 13,34% (yoy)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Inflasi Indeks Harga Konsumen pada Desember 2022 tercatat menjadi 0,66% (mtm) sehingga inflasi Indeks Harga Konsumen 2022 menjadi 5,51% (yoy), meningkat dibandingkan dengan inflasi Indeks Harga Konsumen 2021 sebesar 1,87% (yoy) dan lebih tinggi dari sasaran 3,0+1%, terutama dipengaruhi oleh dampak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada September 2022. Berbagai perkembangan bulanan menunjukkan inflasi pasca kenaikan harga BBM kembali terkendali tercermin pada ekspektasi inflasi dan tekanan inflasi yang terus menurun dan lebih rendah dari prakiraan awal. Perkembangan inflasi Indeks Harga Konsumen yang terkendali tidak terlepas dari pengaruh positif dari sinergi kebijakan yang makin erat antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Bank Indonesia, serta berbagai mitra strategis dalam menurunkan laju inflasi, termasuk mengendalikan dampak lanjutan penyesuaian harga BBM. Dalam pelaksanaannya Bank Indonesia kedepan akan terus memperkuat respons kebijakan guna memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi sehingga inflasi inti tetap terjaga dalam kisaran 3,0±1%.

Based on data from the Central Bureau of Statistics (BPS), the Consumer Price Index inflation in December 2022 was recorded to 0.66% (mtm) so that the 2022 Consumer Price Index inflation was 5.51% (yoy), increased compared to the 2021 Consumer Price Index inflation of 1.87% (yoy) and higher than the target of 3.0+1%, mainly influenced by the impact of subsidized fuel (BBM) price adjustments in September 2022. Various monthly developments indicate that post-fuel price increase inflation is back under control as reflected in inflation expectations and inflationary pressures that continue to decrease and are lower than initial forecasts. The development of controlled Consumer Price Index inflation is inseparable from the positive influence of the closer policy synergy between the Central and Regional Governments, Bank Indonesia, and various strategic partners in reducing the inflation rate, including controlling the continued impact of fuel price adjustments. In its implementation, Bank Indonesia will continue to strengthen policy responses in the future to ensure the continued decrease in inflation and inflation expectations so that core inflation is maintained within the range of 3.0±1%. Policy coordination will

Koordinasi kebijakan juga terus diperkuat. Dalam kaitan ini, koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) terus dilanjutkan melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.

also continue to be strengthened. In this regard, coordination in the Central and Regional Inflation Control Teams (TPIP and TPID) will continue through strengthening the National Food Inflation Control Movement (GNPIP) program in various regions.

Sumber: Berita Terkini Departemen Komunikasi Bank Indonesia, "Inflasi Desember 2022 Terkendali Dan Diprakirakan Kembali Ke Dalam Sasaran Pada 2023" dipublikasikan tanggal 2 Januari 2023
Source: Latest News from the Communication Department of Bank Indonesia, "December 2022 Inflation is Under Control and Expected to Return to Target in 2023" published on January 2, 2023.

Nilai Tukar Mata Uang
Currency Exchange Rates

Indeks nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama (DXY) atau indeks yang menunjukkan pergerakan dolar terhadap 6 mata uang negara utama lainnya yaitu EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF tercatat 106,28 pada 16 November 2022 atau mengalami penguatan sebesar 11,09% (ytd) selama tahun 2022. Sementara itu, dengan langkah-langkah stabilisasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia, nilai tukar Rupiah sampai dengan 16 November 2022 terdepresiasi 8,65% (ytd) dibandingkan dengan level akhir 2021. Depresiasi nilai tukar Rupiah tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan depresiasi mata uang sejumlah negara lain di kawasan, seperti Korea Selatan 10,30% (ytd) dan Filipina 11,10% (ytd). Sangat kuatnya dolar AS didorong oleh pengetatan kebijakan moneter yang agresif di AS dan penarikan modal dari berbagai negara ke AS, di tengah melemahnya ekonomi dan tingginya inflasi di Eropa. Pada saat bersamaan, tingginya ketidakpastian pasar keuangan global berlanjut. Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai dengan bekerjanya mekanisme pasar dan nilai fundamentalnya untuk mendukung upaya pengendalian inflasi dan stabilitas makroekonomi.

Sumber: Bank Indonesia, Tinjauan Kebijakan Moneter November 2022
Source: Bank Indonesia, Monetary Policy Review in November 2022

US dollar exchange rate index against major currencies (DXY) or an index that shows the movement of the dollar against 6 other major country currencies namely EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF was recorded at 106.28 on November 16, 2022 or strengthened by 11.09% (ytd) during 2022. Meanwhile, with the stabilization measures by Bank Indonesia, Rupiah exchange rate as of November 16, 2022 depreciated by 8.65% (ytd) compared to the level at the end of 2021. The depreciation of the Rupiah exchange rate is relatively better than the depreciation of the currencies of a number of other countries in the region, such as South Korea of 10.30% (ytd) and Philippines of 11.10% (ytd). The strong US dollar was driven by aggressive monetary policy tightening in the US and capital withdrawal from various countries to the US, in the middle of economic weakness and high inflation in Europe. At the same time, high uncertainty in global financial markets continued. In the future, Bank Indonesia continues to strengthen its policy of stabilizing the Rupiah exchange rate in accordance with the operation of market mechanisms and its fundamental value to support efforts to control inflation and macroeconomic stability.

Kondisi Industri Listrik Indonesia
Condition of Indonesian Electricity Industry

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, konsumsi listrik per kapita di Indonesia mencapai 1.173 kilowatt hour (kWh) pada 2022. Jumlah itu meningkat 4,45% dari tahun sebelumnya yang sebesar 1.123 kWh. Meski meningkat, angka tersebut belum mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah. Rata-rata konsumsi listrik di ASEAN sebesar 3.672 kWh per kapita di mana hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat konsumsi listrik di Indonesia masih cukup tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

The Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) recorded that electricity consumption per capita in Indonesia reached 1,173 kilowatt hours (kWh) in 2022. The number increased by 4.45% from the previous year of 1,123 kWh. Despite the increase, this number has not yet reached the target determined by the Government. The average electricity consumption in ASEAN is 3,672 kWh per capita which indicates that the level of electricity consumption in Indonesia is still quite behind if compared to neighboring countries.

Dilihat dari sisi Bauran Energi di Indonesia dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Tahun 2021 -2030 yang disusun Pemerintah dengan porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) yaitu 51,6% lebih besar dibandingkan penambahan pembangkit fosil sebesar 48,4%. Sejalan dengan RUPTL, arah kebijakan energi nasional yaitu transisi dari energi fosil ke energi yang lebih bersih, minim emisi, dan ramah lingkungan. Sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk mencapai penurunan emisi gas rumah kaca pada Paris Agreement sebesar 29% dan 41% dengan bantuan internasional. Komitmen Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim diimplementasikan melalui *roadmap Net Zero Emission* dengan penyediaan listrik dan energi yang rendah karbon sampai pada keharusan kurangi energi fosil, batu bara, pada pembangkitan besar dan punya harga relatif murah.

Bauran energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional hingga tahun 2022 tercatat hanya 14,11% sedikit meningkat dari realisasi tahun 2021 yakni 13,65%. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengungkapkan bauran energi primer di Indonesia masih didominasi oleh batu bara yaitu 67,21% di tahun 2022, sementara 15,96% gas, dan 2,7% dari BBM. Jika dihitung secara mendetail sumbangsih EBT dalam bauran energi nasional terus meningkat walau tidak terlalu signifikan. Salah satunya dalam pembangkit listrik bertenaga EBT.

Berdasarkan kapasitas terpasang pembangkit listrik di Indonesia mencapai 81,2 gigawatt (GW) di 2022, masih didominasi oleh PLTU sebanyak 42,1 GW, lalu disusul oleh PLTG/GU/MG sebesar 21,6 GW, baru kemudian pembangkit listrik EBT sebesar 12,5 GW. Adapun saat ini, pembangkit listrik EBT mayoritas adalah PLTA sebanyak 6,6 GW, kemudian PLTP 2,3 GW, dan bioenergi sebesar 3 GW. Targetnya, kapasitas terpasang pembangkit listrik EBT mencapai 12,9 GW di tahun 2023.

In terms of the Energy Mix in Indonesia in the 2021-2030 Electricity Supply Business Plan (RUPTL) prepared by the Government with the portion of New and Renewable Energy (EBT) which is 51.6% greater than the addition of fossil power plants of 48.4%. In line with the RUPTL, the direction of national energy policy is to transition from fossil energy to cleaner, less emission, and environmentally friendly energy. As a form of Indonesia's commitment to achieving greenhouse gas emission reductions in the Paris Agreement by 29% and 41% with international assistance. Indonesia's commitment to overcoming climate change is implemented through the Net Zero Emission roadmap by providing low-carbon electricity and energy to the point of requiring less fossil energy, coal, in large electric power generators and having relatively cheap prices.

The new and renewable energy (NRE) mix in the national energy mix until 2022 was recorded at only 14.11%, slightly increased from the realization in 2021 of 13.65%. The Minister of Energy and Mineral Resources (EMR), revealed that the primary energy mix in Indonesia was still dominated by coal at 67.21% in 2022, while gas at 15.96%, and fuel at 2.7%. If calculated in detail, the contribution of NRE in the national energy mix continues to increase even though it is not too significant. One of them is in NRE-powered power plants.

Based on the installed capacity of power plants in Indonesia reaching 81.2 gigawatts (GW) in 2022, it is still dominated by CFPP of 42.1 GW, followed by GTPP/CCPP/GEPP of 21.6 GW, and then NRE power plants of 12.5 GW. Currently, the majority of NRE power plants are HPP of 6.6 GW, then GPP of 2.3 GW, and bioenergy of 3 GW. The target is for the installed capacity of NRE power plants to reach 12.9 GW in 2023.

https://www.dunia-energi.com/tahun-2022-bauran-ebt-ketenagalistrikan-baru-1411-target-ruen-sulit-tercapai/
https://www.dunia-energi.com/tahun-2022-bauran-ebt-ketenagalistrikan-baru-1411-target-ruen-sulit-tercapai/

Proyeksi Bauran Energi 2021-2030
Projected Energy Mix 2021-2030

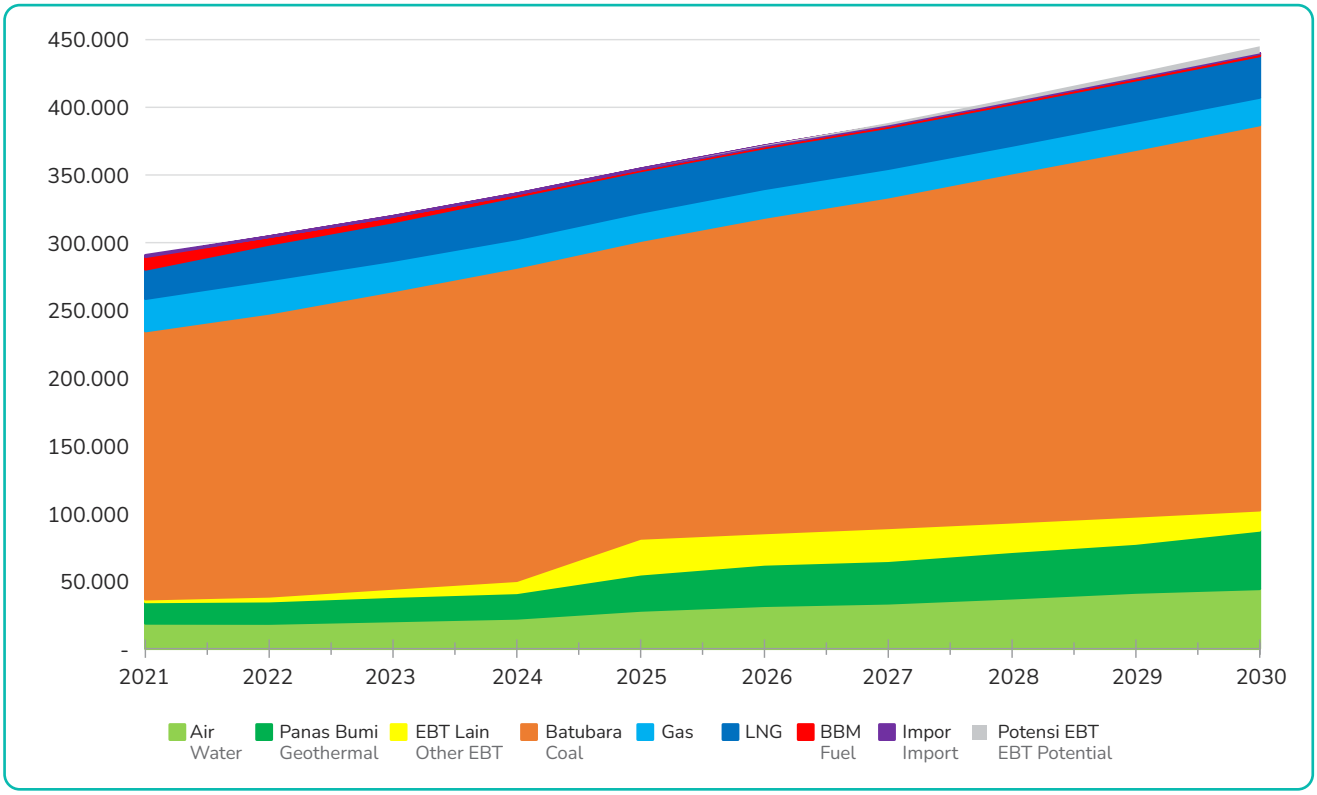

Dalam rangka mengurangi bauran energi dari batubara hingga menjadi 59,4% pada tahun 2030, maka diperlukan upaya sebagai berikut: implementasi *co-firing* biomassa pada PLTU PLN dengan porsi rata-rata 10% untuk PLTU di Jawa-Bali dan 20% untuk PLTU di luar Jawa-Bali, dengan *Capacity Factor* 70%, total kapasitas ekuivalen 2.700 MW (kebutuhan biomassa sekitar 11,8 juta ton/tahun). Serta untuk PLTU baru yang direncanakan beroperasi setelah tahun 2025, didesain agar dapat beroperasi dengan porsi *co-firing* minimal 30%.

In order to reduce the energy mix from coal to 59.4% by 2030, the following efforts are needed: Implementation of biomass co-firing in PLTU PLN with an average proportion of 10% for PLTU in Java-Bali and 20% for PLTU outside Java-Bali, with a Capacity Factor of 70%, a total equivalent capacity of 2,700 MW (biomass needs around 11.8 million tons/year). And for the new PLTU that is planned to operate after 2025, it is designed to be able to operate with a minimum co-firing portion of 30%.

Sumber: Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2021-2030
Source: Electricity Supply Business Plan (RUPTL) of PT PLN (Persero) for 2021-2030

Kontribusi PLN NP dalam Industri Pembangkit Listrik Indonesia

PLN NP's Contribution to Indonesia's Power Plant Industry

Pada tanggal 21 September 2022 Kementerian BUMN resmi meluncurkan *Holding Subholding* PT PLN (Persero). PT PJB merupakan salah satu anak perusahaan PT PLN (Persero) yang bertransformasi menjadi *subholding* PLN sebagai *Generation Company* 1, yaitu PT PLN Nusantara Power (PLN NP). Dengan adanya peran ini, maka aset-aset pembangkitan PLN yang sebelumnya tersebar di seluruh wilayah akan dikonsolidasikan, sehingga PLN NP akan mengelola unit pembangkit yang lebih banyak.

On September 21, 2022, the Ministry of SOEs officially launched the Holding Subholding of PT PLN (Persero). PT PJB is one of the subsidiaries of PT PLN (Persero) which was transformed into a PLN subholding as Generation Company 1, namely PT PLN Nusantara Power (PLN NP). With this role, PLN's generation assets that were previously spread throughout the region will be consolidated, so that PLN NP will manage more generation units.

PLN NP akan menjadi *Generation Company* terbesar di Asia Tenggara serta siap mengelola pembangkit-pembangkit dengan total kapasitas 23,5 GW. Dengan perubahan ini, PLN NP akan mendapatkan dampak positif bagi upaya Indonesia untuk mengambil bagian pada rantai pasok global di tengah momentum transisi energi saat ini.

PLN NP will become the largest Generation Company in Southeast Asia and is ready to manage power plants with a total capacity of 23.5 GW. With this change, PLN NP will have a positive impact on Indonesia's efforts to take part in the global supply chain in the middle of the current energy transition momentum.

Kontribusi PLN NP terhadap penyediaan listrik nasional dan pembangkitan sejalan dengan transformasi PLN di mana berdasarkan pada empat aspirasi yang menjadi arah perubahan PLN, yaitu *Green, Lean, Innovative*, dan *Customer Focused*. Bentuk kontribusi PLN NP terhadap penyediaan listrik nasional dan pembangkitan adalah sebagai berikut:

PLN NP's contribution to national electricity provision and electric power generator is in line with PLN's transformation which is based on four aspirations that are the direction of PLN's change, namely Green, Lean, Innovative, and Customer Focused. The form of PLN NP's contribution to national electricity provision and electric power generator is as follows:

Power Plant Program

Melakukan penjualan tenaga listrik melalui pengembangan *Add On* Muara Tawar Blok 2, 3 dan 4 sebesar 650 MW dan alih aset pembangkit AMC Jawa dan PLTA di wilayah Jawa Timur. Melaksanakan pengembangan pembangkit EBT yang tercantum dalam *green* RUPTL 2021-2030 baik melalui skema kepemilikan sendiri (PJBTL), *majority shares* maupun *minority shares* dengan inisiasi sebesar 1.933,5 MW di tahun 2022-2028 dari rencana 8,7 GW sampai dengan tahun 2030.

Selling electricity through the development of Add On Muara Tawar Block 2, 3 and 4 of 650 MW and transferring the assets of AMC Java and HPP in the East Java region. Carrying out the development of the NRE power plants listed in the 2021-2030 green RUPTL both through self-ownership schemes (PJBTL), majority shares and minority shares with an initiation of 1,933.5 MW in 2022-2028 from the plan of 8.7 GW until 2030.

Power Solutions Program

Peningkatan pangsa pasar dalam bidang Jasa O&M pembangkit di semua regional dan bisnis jasa *Engineering Procurement Construction* (EPC) melalui PT Rekadaya Elektrika, serta meningkatkan Jasa *Maintenance Repair Overhaul* (MRO) di pasar nasional maupun internasional. Menyediakan *Spare Part* untuk lingkungan PLN Group maupun pembangkit IPP, dan memiliki jasa layanan *Digital Power Plant* melalui Sistem Optimasi Kehandalan & Efisiensi Unit Pembangkit Terintegrasi (SOKET).

Increasing market share in O&M services for power plants in all regions and Engineering Procurement Construction (EPC) services business through PT Rekadaya Elektrika, as well as increasing Maintenance Repair Overhaul (MRO) services in national and international markets. Providing Spare Parts for PLN Group and IPP power plants, and having Digital Power Plant services through the Integrated Generation Unit Reliability & Efficiency Optimization System (SOKET).

Beyond Power Program

Jasa Konsultan Teknik & Enjiniring melalui *Enterprise Asset Management* (EAM) di lingkungan PLN Grup, serta Jasa total *solutions industry & utility* melalui Penyediaan EPC untuk PV *Rooftop* di industri dan SPKLU. Komersialisasi kompetensi melalui PJB Academy dan Pengembangan bisnis *non-core* melalui pemanfaatan *idle asset.*

Technical & Engineering Consultant Services through Enterprise Asset Management (EAM) within PLN Group, as well as Total Solutions Industry & Utility Services through EPC Provision for PV Rooftop in industry and SPKLU. Competency commercialization through PJB Academy and Non-core business development through idle asset utilization.

Komitmen PLN NP Dukung Dekarbonisasi

PLN NP's Commitment to Supporting the Decarbonization

PLN NP telah meraih 21 penghargaan dalam Subroto Award oleh Kementerian ESDM RI. Hal ini merupakan capaian atas komitmen PLN NP yang tinggi dalam meraih target *Net Zero Emission* (NZE). NZE atau nol emisi karbon sendiri adalah kondisi jumlah emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer tidak melebihi jumlah emisi yang mampu diserap oleh bumi. Untuk mencapainya diperlukan sebuah transisi dari sistem energi yang digunakan ke sistem energi bersih guna mencapai kondisi seimbang antara aktivitas manusia dengan keseimbangan alam.

PLN NP has won 21 awards in the Subroto Award by the Ministry of EMR of the Republic of Indonesia. This is an achievement of PLN NP's high commitment in achieving the Net Zero Emission (NZE) target. NZE or zero carbon emission itself is a condition where the amount of carbon emissions released into the atmosphere does not exceed the amount of emissions that can be absorbed by the earth. To achieve this, a transition from the energy system used to a clean energy system is needed to achieve a balanced condition between human activities and the balance of nature.

Sumber: https://www.plnnusantarapower.co.id/info-pjb/
Source: https://www.plnnusantarapower.co.id/info-pjb/

Analisis Operasi Per Segmen Usaha

Operational Analysis per Business Segment

Segmen Usaha PLN NP

Business Segment of PLN NP

PLN Nusantara Power

- **Penjualan Tenaga Listrik** — Electricity Sales
- **Jasa Operasi dan Pemeliharaan (O&M)** — Operation and Maintenance (O&M) Services
- **Jasa *Engineering, Procurement and Construction* (EPC)** — Engineering, Procurement and Construction (EPC) Services
- **Lainnya** — Others

Segmen Usaha Penjualan Tenaga Listrik
Electricity Sales Business Segment

PT PLN NP memiliki 8 unit pembangkit eksisting yang tersebar dalam 6 lokasi atau area yang memproduksi dan menjual tenaga listrik. Penjualan Tenaga Listrik merupakan bisnis utama yang dimiliki oleh PLN NP dimana 79% pendapatan berasal dari penjualan tenaga listrik pembangkit eksisting. Segmen usaha penjualan tenaga listrik mencakup kegiatan pembangkitan tenaga listrik, sampai dengan penyaluran listrik kepada pelanggan. Dalam segmen usaha ini, PLN NP memperhatikan beberapa indikator kinerja yaitu kinerja pembangkit, produksi, dan penjualan tenaga listrik.

PT PLN NP has 8 existing power plant units spread in 6 locations or areas that produce and sell electricity. Electricity Sales is the main business owned by PLN NP where 79% of revenue comes from the sale of electricity from existing power plants. The electricity sales business segment includes electric power generator activities, up to the distribution of electricity to customers. In this business segment, PLN NP takes into account several performance indicators, namely the performance of power plants, production, and sales of electricity.

Kinerja Pembangkit Eksisting
Existing Power Plant Performance

Indikator kinerja pembangkit mencakup faktor ketersediaan, faktor gangguan, efisiensi pembangkit, pemeliharaan pembangkit, dan kapasitas daya terpasang. Kinerja operasi PLN NP tahun 2022 dinilai memuaskan, terlihat dari beberapa indikator kinerja pembangkit yang mencakup efisiensi pembangkit, dan ketepatan pelaksanaan serta durasi pemeliharaan.

The indicators of power plant performance include availability factors, outage factors, power plant efficiency, power plant maintenance, and installed power capacity. PLN NP's operating performance in 2022 was considered satisfactory, as seen from several indicators of power plant performance including power plant efficiency, and the accuracy of maintenance implementation and duration.

Faktor Ketersediaan Pembangkit Eksisting
Availability Factor of Existing Power Plant

PLN NP menekankan fokus penciptaan nilai bisnis pembangkit eksisting pada penjualan tenaga listrik yang lebih optimal dengan standar performa *excellence* EAF yang mencapai *world-class standard* dan mengusung prinsip *cost leadership* agar dapat mendukung kinerja usaha pemegang saham. Faktor ketersediaan mesin pembangkit diukur berdasarkan indikator *Equivalent Availability Factor* (EAF) dan *Scheduled Outage Factor* (SOF).

PLN NP emphasizes the focus to create the existing power plant business value on more optimal electricity sales with the excellence EAF performance standard that reaches the world-class standard and carries the principle of cost leadership in order to support the business performance of shareholders. The availability factor of power plants is measured based on the Equivalent Availability Factor (EAF) and Scheduled Outage Factor (SOF) indicators.

EAF Pembangkit Eksisting

EAF of Existing Power Plant

Realisasi EAF sebesar 94,12%

menunjukkan bahwa tingkat kesiapan pembangkit PLN NP eksisting sangat tinggi untuk menyuplai kelistrikan di Sistem Jawa Bali

The realization of EAF of 94.12%
Shows that the readiness level of the existing PLN NP power plant to supply electricity in the Java Bali System was very high.

EAF adalah indikator yang menunjukkan tingkat kesiapan suatu pembangkit untuk beroperasi menghasilkan energi listrik. EAF menjadi indikator utama Perusahaan dalam mewujudkan pelayanan

EAF is the indicator that shows the readiness level of a power plant to operate and produce electricity. EAF is the Company's main indicator in realizing services to customers.

kepada pelanggan. Nilai EAF korporat berfungsi untuk mengetahui faktor ketersediaan pembangkit secara korporat untuk beroperasi dengan Daya Mampu Netto (DMN) pada periode tertentu. Semakin tinggi nilai EAF menunjukkan kinerja pembangkit yang semakin baik.

Nilai EAF pembangkit eksisting PLN NP pada tahun 2022 adalah 94,12% sedikit menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 95,47%. Penurunan tersebut disebabkan oleh SOF yang cukup tinggi pada PLTA Cirata terkait dilakukannya pemeliharaan *General Inspection* sedangkan SOF UP Paiton terkait dilakukannya *Serious Inspection* dan luncuran *Mean Inspection.*

The corporate EAF value has a function to know the availability factor of the power plant corporately to operate with Net Dependable Capacity (NDC) in a certain period. The higher the EAF value, the better the power plant performance.

The EAF value of PLN NP's existing power plant in 2022 was 94.12%, a slight decrease compared to 2021 of 95.47%. The decrease was caused by a fairly high SOF at Cirata HPP related to General Inspection maintenance, while the SOF of Paiton GU was related to the implementation of Serious Inspection and the launch of Mean Inspection.

Tabel EAF Pembangkit Eksisting Berdasarkan Jenis Pembangkitan (%)
Table of EAF of Existing Power Plant by Generation Types (%)

EAF Jenis Pembangkitan EAF of Generation Types	2020	2021	2022	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease %
PLTA HPP	96,26	93,35	92,62	(0,78)
PLTU Batubara Coal CFPP	94,05	95,12	91,08	(4,25)
PLTU Non-Batubara Non-Coal CFPP	99,56	99,47	95,13	(4,36)
PLTG GTPP	98,20	95,71	97,88	2,27
PLTGU CCPP	93,08	95,24	94,61	(0,66)
EAF Pembangkit Eksisting EAF of Existing Power Plant	**95,52**	**95,47**	**94,12**	**(1,41)**

Tabel EAF Pembangkit Eksisting Berdasarkan Unit Pembangkitan (%)
Table of EAF of Existing Power Plant by Generation Units (%)

EAF Unit Pembangkitan EAF of Generation Units	2020	2021	2022	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease %
UP Brantas Brantas GU	98,99	97,67	97,73	0,06
UP Cirata Cirata GU	95,51	92,17	91,62	(0,60)
UP Gresik Gresik GU	96,23	97,77	96,52	(1,28)
UP Paiton Paiton GU	94,05	95,12	91,08	(4,25)
UP Muara Karang Muara Karang GU	94,97	97,81	93,87	(4,03)
UP Muara Tawar Muara Tawar GU	95,21	93,72	93,87	0,16
EAF Pembangkit Eksisting Power	**95,52**	**95,47**	**94,12**	**(1,41)**

Grafik EAF Pembangkit Eksisting (%)
Chart of EAF of Existing Power Plant (%)

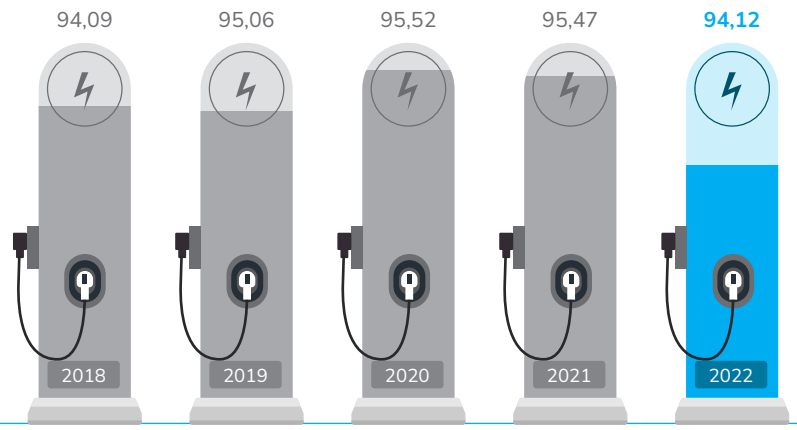

SOF Pembangkit Eksisting

SOF of Existing Power Plant

Realisasi SOF sebesar 5,31%

menunjukkan bahwa optimasi durasi pemeliharaan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

The realization of SOF of 5.31%
Shows that the optimization of maintenance duration was better compared to the previous year.

SOF adalah indikator untuk mengukur tingkat pembangkit keluar sistem karena pemeliharaan terencana, yaitu *Planned Outage Hour* dan *Maintenance Outage Hour* yang sudah direncanakan sebelumnya. Semakin tinggi nilai SOF menunjukkan pemeliharaan terencana yang dilakukan pada mesin pembangkit lebih banyak (dari sisi durasi). Semakin rendah nilai SOF, maka dinilai semakin baik karena menunjukkan optimasi durasi pemeliharaan yang sudah direncanakan sebelumnya.

Nilai SOF pembangkit eksisting PLN NP pada tahun 2022 adalah 5,31% meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 2,27%. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh PLTA Cirata terkait dilakukannya pemeliharaan *General Inspection* serta UP Paiton terkait dilakukannya *Serious Inspection* dan luncuran *Mean Inspection.*

SOF is the indicator to measure the level of power plant out of the system due to planned maintenance, namely Planned Outage Hour and Maintenance Outage Hour that has been planned previously. The higher the SOF value, the more planned maintenance is implemented on the power plant (in terms of duration). The lower the SOF value, the better it is due to the optimization of the pre-planned maintenance duration.

The SOF value of PLN NP's existing power plants in 2022 was 5.31%, increased compared to 2021 of 2.27%. The increase was mainly due to Cirata HPP related to General Inspection maintenance and Paiton GU related to the implementation of Serious Inspection and the launch of Mean Inspection.

SOF Jenis Pembangkitan

Table of SOF of Existing Power Plant by Generation Types (%)

SOF Jenis Pembangkitan SOF of Generation Types	2020	2021	2022	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease %
PLTA HPP	3,09	2,94	7,03	139,12
PLTU Batubara Coal CFPP	4,83	3,88	8,47	118,30

SOF Jenis Pembangkitan SOF of Generation Types	2020	2021	2022	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease %
PLTU Non-Batubara Non-Coal CFPP	0,32	0,00	4,35	0,00
PLTG GTPP	1,73	4,27	2,06	(51,76)
PLTGU CCPP	5,71	1,20	4,50	275,00
SOF Pembangkit Eksisting SOF of Existing Power Plant	**3,72**	**2,27**	**5,31**	**133,92**

Tabel SOF Pembangkit Eksisting Berdasarkan Unit Pembangkitan (%)

Table of SOF of Existing Power Plant by Generation Units (%)

SOF Unit Pembangkitan SOF of Generation Units	2020	2021	2022	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease %
UP Brantas Brantas GU	0,99	2,26	2,27	0,44
UP Cirata Cirata GU	3,66	3,13	7,96	154,31
UP Gresik Gresik GU	3,00	1,04	3,03	191,35
UP Paiton Paiton GU	4,83	3,88	8,47	118,30
UP Muara Karang Muara Karang GU	3,85	1,42	5,50	287,32
UP Muara Tawar Muara Tawar GU	4,34	2,83	5,25	85,51
SOF Pembangkit Eksisting SOF of Existing Power Plant	**3,72**	**2,27**	**5,31**	**133,92**

Grafik SOF Pembangkit Eksisting (%)

Chart of SOF of Existing Power Plant (%)

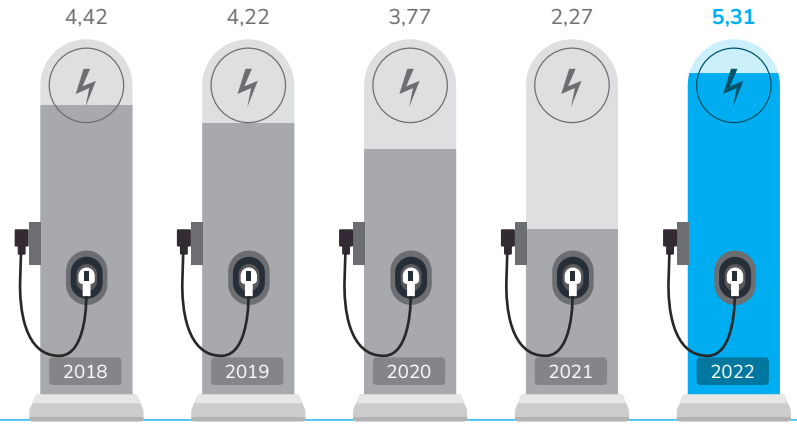

Faktor Gangguan Pembangkit Eksisting
Outage Factors of Existing Power Plant

Faktor gangguan mesin pembangkit diukur berdasarkan indikator *Equivalent Forced Outage Rate* (EFOR) dan *Sudden Outage Frequency* (SdOF).

The outage factor of power plants is measured based on the Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) and Sudden Outage Frequency (SdOF) indicators.

EFOR Pembangkit Eksisting

EFOR of Existing Power Plant

Realisasi EFOR sebesar 0,45%

menunjukkan bahwa jumlah durasi jam gangguan pembangkit PLN NP eksisting menurun dari tahun sebelumnya.

The realization of EFOR of 0.45%
Shows that the number of outage duration of PLN NP's existing power plants decreased from the previous year.

EFOR merupakan indikator untuk mengukur tingkat mesin pembangkit keluar paksa atau ketidaksiapan unit untuk beroperasi karena gangguan. Semakin rendah nilai EFOR menunjukkan penanganan gangguan semakin cepat.

EFOR is the indicator to measure the reliability level of power plants to operate during an outage or the inability of the unit to operate due to interference. The lower the EFOR value, the faster the outage is handled.

Nilai EFOR pembangkit eksisting PLN NP pada tahun 2022 adalah 0,45% lebih baik dibandingkan tahun 2021 sebesar 3,70%. Pencapaian nilai EFOR tersebut terutama disebabkan oleh penerapan manajemen aset terutama implementasi *preventive maintenance*, *predictive maintenance, patrol check, First Line Maintenance*, *House Keeping* yang konsisten dan pelaksanaan *overhaul* yang efektif sehingga dapat meminimalisir terjadinya *breakdown* atau gangguan selama *interval overhaul*.

The EFOR value of PLN NP's existing power plant in 2022 was 0.45%, increased compared to 2021 of 3.70%. The decrease in EFOR value was mainly due to the implementation of asset management, especially the consistent implementation of preventive maintenance, predictive maintenance, patrol checks, First Line Maintenance, House Keeping and effective overhaul implementation so as to minimize the occurrence of breakdowns or disruptions during the overhaul interval.

Tabel EFOR Pembangkit Eksisting Berdasarkan Jenis Pembangkitan (%)
Table of EFOR of Existing Power Plant by Generation Types (%)

EFOR Jenis Pembangkitan EFOR of Generation Types	2020	2021	2022	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease %
PLTA HPP	2,37	9,06	0,80	(91,17)
PLTU Batubara Coal CFPP	1,10	0,92	0,47	(48,91)
PLTU Non-Batubara Non-Coal CFPP	0,41	2,02	0,42	(79,21)
PLTG GTPP	0,66	0,06	0,02	(66,67)
PLTGU CCPP	0,71	4,92	0,34	(93,09)
EFOR Pembangkit Eksisting EFOR of Existing Power Plant	**0,93**	**3,70**	**0,45**	**(87,84)**

Tabel EFOR Pembangkit Eksisting Berdasarkan Unit Pembangkitan (%)
Table of EFOR of Existing Power Plant by Generation Units (%)

EFOR Unit Pembangkitan EFOR of Generation Units	2020	2021	2022	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease %
UP Brantas Brantas GU	0,03	0,09	0,00	(100,00)
UP Cirata Cirata GU	3,47	11,51	1,44	(87,49)
UP Gresik Gresik GU	0,28	1,40	0,12	(91,43)
UP Paiton Paiton GU	1,10	0,92	0,47	(48,91)
UP Muara Karang Muara Karang GU	0,67	0,60	0,60	0,00
UP Muara Tawar Muara Tawar GU	1,61	8,78	0,63	(92,82)
EFOR Pembangkit Eksisting EFOR of Existing Power Plant	**0,93**	**3,70**	**0,45**	**(87,84)**

Grafik EFOR Pembangkit Eksisting (%)
Chart of EFOR of Existing Power Plant (%)

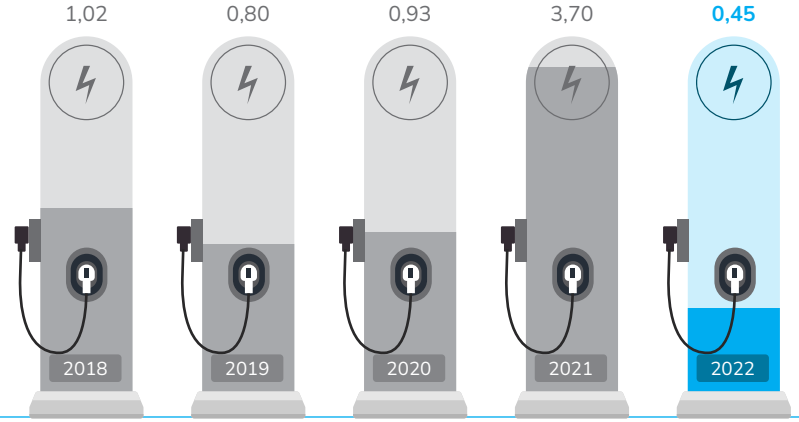

SdOF Pembangkit Eksisting

SdOF of Existing Power Plant

Realisasi SdOF sebesar 0,51 kali/unit

menunjukkan bahwa jumlah gangguan mendadak pembangkit PLN NP eksisting lebih rendah dari tahun sebelumnya.

The realization of SdOF of 0.51 times/unit
Shows that the number of sudden outages of PLN NP's existing power plants was lower compared to the previous year.

SdOF merupakan indikator yang menunjukkan jumlah gangguan yang terjadi dalam periode tertentu, terutama frekuensi terjadinya gangguan yang berulang. Semakin rendah nilai SdOF maka semakin baik.

SdOF is the indicator that shows the number of outage that occurs within a certain period, especially the frequency of repeated outage. The lower the SdOF value, the better.

Nilai SdOF pembangkit eksisting PLN NP pada tahun 2022 adalah 0,51 kali/unit lebih baik dibandingkan tahun 2021 sebesar 0,99 kali/unit. Pencapaian tersebut terutama dipengaruhi oleh penerapan manajemen aset terutama implementasi *preventive maintenance, predictive maintenance, patrol check, First Line Maintenance, House Keeping* yang konsisten dan pelaksanaan *overhaul* yang efektif sehingga dapat meminimalisir terjadinya *breakdown* atau gangguan selama *interval overhaul.*

The SdOF value of PLN NP's existing power plant in 2022 was 0.51 times/unit, decreased compared to 2021 of 0.99 times/unit. This decrease was mainly influenced by the implementation of asset management, especially the consistent implementation of preventive maintenance, predictive maintenance, patrol checks, First Line Maintenance, House Keeping and effective overhaul implementation so as to minimize the occurrence of breakdowns or disruptions during the overhaul interval.

Tabel SdOF Pembangkit Eksisting Berdasarkan Jenis Pembangkitan (kali/unit)

Table of SdOF of Existing Power Plant by Generation Types (times/unit)

SdOF Jenis Pembangkitan SdOF of Generation Types	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	kali/unit times/unit
PLTA HPP	0,39	0,64	1,04	62,50	0,40
PLTU Batubara Coal CFPP	1,50	2,50	1,00	(60,00)	(1,50)
PLTU Non-Batubara Non-Coal CFPP	0,17	0,33	0,59	78,79	0,26
PLTG GTPP	0,90	0,30	0,20	(33,33)	(0,10)
PLTGU CCPP	1,00	1,95	1,20	(38,46)	(0,75)
SdOF Pembangkit Eksisting **SdOF of Existing Power Plant**	**0,65**	**0,99**	**0,51**	**(48,48)**	**(0,48)**

Tabel SdOF Pembangkit Eksisting Berdasarkan Unit Pembangkitan (kali/unit)

Table of SdOF of Existing Power Plant by Generation Units (times/unit)

SdOF Unit Pembangkitan SdOF of Generation Units	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	kali/unit times/unit
UP Brantas Brantas GU	0,36	0,40	0,04	(90,00)	(0,36)
UP Cirata Cirata GU	0,50	1,38	1,00	(27,54)	(0,38)
UP Gresik Gresik GU	0,50	0,72	0,39	(45,83)	(0,33)
UP Paiton Paiton GU	1,50	2,50	1,00	(60,00)	(1,50)
UP Muara Karang Muara Karang GU	1,33	2,50	1,33	(46,80)	(1,17)
UP Muara Tawar Muara Tawar GU	1,08	1,33	0,85	(36,09)	(0,48)
SdOF Pembangkit Eksisting **SdOF of Existing Power Plant**	**0,65**	**0,99**	**0,51**	**(48,48)**	**(0,48)**

Grafik SdOF Pembangkit Eksisting (kali/unit)
Chart of SdOF of Existing Power Plant (times/unit)

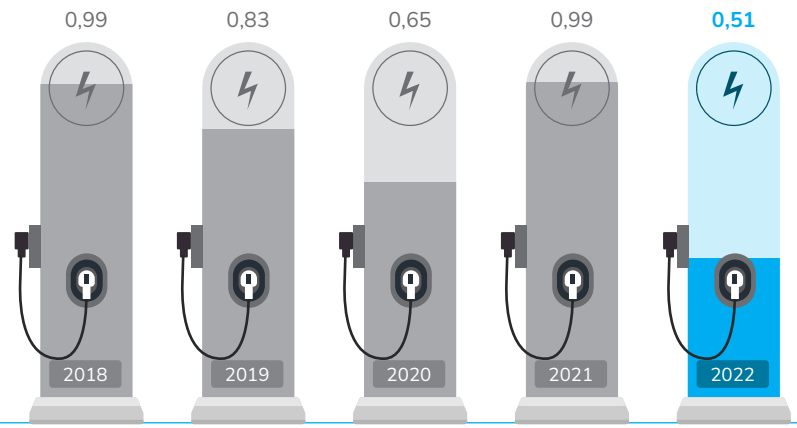

Faktor Efisiensi Pembangkit Eksisting
Efficiency Factors of Existing Power Plant

Realisasi Tara Kalor Neto sebesar 2.459,38 kcal/kWh

menunjukkan bahwa efisiensi pembangkit thermal PLN NP eksisting lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

The Realization of Net Plant Heat Rate of2.459,38 kcal/kWh
Shows that the efficiency of PLN NP's existing thermal power plants was higher compared to the previous year.

Efisiensi mesin pembangkit thermal diukur berdasarkan indikator Tara Kalor Neto (*Net Plant Heat Rate*/NPHR). Indikator Tara Kalor Neto bertujuan untuk mengukur efisiensi pemakaian bahan bakar yang dikonversikan ke dalam nilai kalori yang dibutuhkan untuk setiap kWh produksi neto yang dibangkitkan oleh unit pembangkit pada suatu periode. Semakin rendah nilai Tara Kalor Neto menunjukkan bahwa pembangkit tersebut semakin efisien.

Nilai Tara Kalor Neto pembangkit eksisting PLN NP pada tahun 2022 adalah 2.459,38 kCal/kWh lebih baik dibandingkan tahun 2021 sebesar 2.484,66 kCal/kWh. Pencapaian *heat rate* tersebut terutama disebabkan oleh pengoperasian PLTU Gas yang lebih rendah dari tahun 2021.

The efficiency of thermal power plants is measured based on the Net Plant Heat Rate (NPHR) indicator. The Net Plant Heat Rate indicator aims to measure the efficiency of fuel consumption converted into the calorific value needed for each kWh of net production generated by the power plant unit in a period. The lower the Net Plant Heat Rate indicates that the power plant is more efficient.

The Net Plant Heat Rate value of PLN NP's existing power plant in 2022 was 2.459,38 kCal/kWh, decreased compared to 2021 of 2,484.66 kCal/kWh. The decrease in heat rate was mainly due to the lower operation of the Gas CFPP from 2021.

Tabel Tara Kalor Neto Pembangkit Eksisting Berdasarkan Jenis Pembangkitan (kCal/kWh)
Table of Net Plant Heat Rate of Existing Power Plant by Generation Types (kCal/kWh)

Tara Kalor Neto dari Jenis Pembangkitan Net Plant Heat Rate of Generation Types	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	kCal/kWh
PLTU Batubara Coal CFPP	2.702,84	2.749,89	2.824,00	2,70	74,11
PLTU Non-Batubara Non-Coal CFPP	2.689,21	2.714,47	2.294,20	(15,48)	(420,27)

Tara Kalor Neto dari Jenis Pembangkitan Net Plant Heat Rate of Generation Types	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	kCal/kWh
PLTG GTPP	3.279,09	3.278,57	3.273,44	(0,16)	(5,13)
PLTGU CCPP	2.281,41	2.233,92	2.253,97	0,90	20,05
Tara Kalor Neto Pembangkit Eksisting **Net Plant Heat Rate of Existing Power Plant**	**2.509,04**	**2.484,66**	**2.459,38**	**(1,02)**	**(25,28)**

Tabel Tara Kalor Neto Pembangkit Eksisting Berdasarkan Unit Pembangkitan (kCal/kWh)

Table of Net Plant Heat Rate of Existing Power Plant by Generation Units (kCal/kWh)

Tara Kalor Neto Unit Pembangkitan Net Plant Heat Rate of Generation Units	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	kCal/kWh
UP Gresik Gresik GU	2.304,31	2.321,94	2.288,71	(1,43)	(33,23)
UP Paiton Paiton GU	2.702,84	2.749,89	2.797,22	1,72	47,33
UP Muara Karang Muara Karang GU	2.360,46	2.354,09	2.238,34	(4,92)	(115,75)
UP Muara Tawar Muara Tawar GU	3.115,79	2.461,84	2.363,81	(3,98)	(98,03)
Tara Kalor Neto Pembangkit Eksisting **Net Plant Heat Rate of Existing Power Plant**	**2.509,04**	**2.484,66**	**2.459,38**	**(1,02)**	**(25,28)**

Grafik Tara Kalor Neto Pembangkit Eksisting (kCal/kWh)

Chart of Net Plant Heat Rate of Existing Power Plant (kCal/kWh)

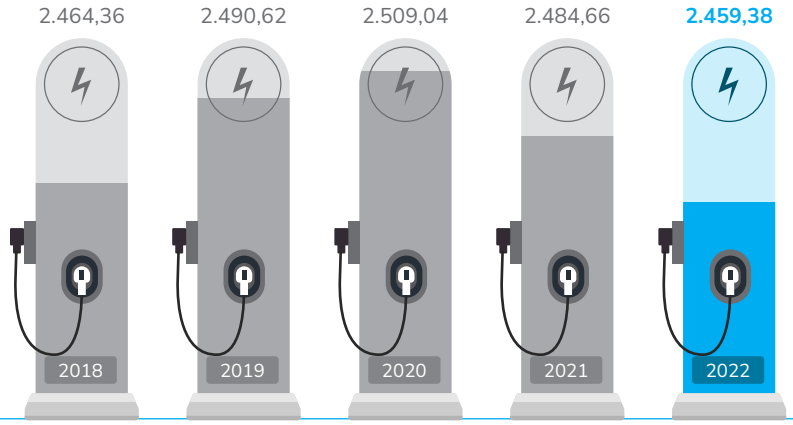

Faktor Pemeliharaan Pembangkit Eksisting
Overhaul Factors of Existing Power Plant

Realisasi Jumlah *Overhaul* sebanyak 39

menunjukkan bahwa unit pembangkit PLN NP pada Tahun 2022 melakukan lebih banyak *overhaul* dibanding tahun sebelumnya

The realization of Total Overhaul was 39, showing that PLN NP power plant units in 2022 conducted more overhauls compared to the previous year.

Tingkat kesiapan pembangkit sangat dipengaruhi oleh pemeliharaan yang diterapkan. Oleh karena itu ketepatan pelaksanaan dan durasi pemeliharaan menjadi faktor yang sangat penting bagi tingkat kesiapan pembangkit.

Jumlah pemeliharaan pembangkit eksisting PLN NP pada tahun 2022 adalah sebanyak 39 *overhaul* meningkat sedikit dibandingkan tahun 2021 sebanyak 30 *overhaul*. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh banyaknya pemeliharaan di PLTGU Muara Tawar, PLTGU Gresik, dan PLTGU Muara Tawar.

The readiness level of power plants is significantly influenced by the maintenance implemented. Therefore, the accuracy of implementation and duration of maintenance becomes a significant factor for the readiness level of power plants.

The number of maintenance of PLN NP's existing power plants in 2022 was 39 overhauls, slightly increased compared to 2021 of 30 overhauls. The increase was mainly due to the large number of maintenance at Muara Tawar CCPP, Gresik CCPP, and Muara Tawar CCPP.

Tabel *Overhaul* Pembangkit Eksisting Berdasarkan Jenis Pembangkitan (jumlah *overhaul*)
Table of Overhaul of Existing Power Plant by Generation Types (total overhaul)

Overhaul Jenis Pembangkitan Overhaul of Generation Types	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Jumlah *Overhaul* Total Overhaul
PLTA HPP	14	14	13	(7,14)	(1)
PLTU CFPP	1	1	3	200,00	2
PLTG GTPP	4	8	9	12,50	1
PLTGU CCPP	10	7	14	100,00	7
***Overhaul* Pembangkit Eksisting** **Overhaul of Existing Power Plant**	**29**	**30**	**39**	**30,00**	**9**

Grafik *Overhaul* Pembangkit Eksisting (jumlah *overhaul*)
Chart of Overhaul of Existing Power Plant (total overhaul)

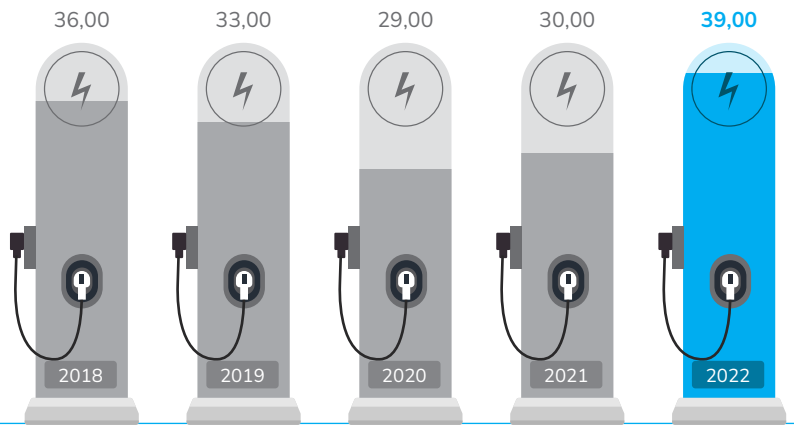

Daya Terpasang Pembangkit Eksisting
Installed Capacity of Existing Power Plant

Kontribusi PLN NP di DTP Sistem Jawa-Bali adalah 15,73% (7.210 MW)

PLN NP's contribution to the Installed Capacity of the Java-Bali System was 15.73% (7,210 MW).

DTP merupakan daya yang tertera sesuai dengan setiap mesin pembangkit. Dari total DTP sistem Jawa-Bali 45.835 MW, saat ini PLN NP memiliki DTP sebesar 7.210 MW, yaitu mencapai 15,73% dari DTP Sistem Jawa-Bali.

DTP is the power listed according to each power plant. From the total Installed Capacity of the Java-Bali system of 45,835 MW, PLN NP currently has an Installed Capacity of 7,210 MW, which is 15.73% of the Installed Capacity of the Java-Bali system.

Tabel Daya Terpasang Pembangkit Eksisting
Table of Installed Capacity of Existing Power Plant

Unit Pembangkitan Generation Unit	Daya Terpasang Installed Capacity	
	MW	%
UP Brantas Brantas GU	275	3,81
UP Cirata Cirata GU	1.008	13,98
UP Gresik Gresik GU	2.219	30,78
UP Paiton Paiton GU	800	11,10
UP Muara Karang Muara Karang GU	909	12,61
UP Muara Tawar Muara Tawar GU	1.928	26,74
PLTD Suppa Suppa DPP	68	0,94
UP Bawean Bawean GU	3	0,04
DTP Pembangkit Eksisting Installed Capacity of Existing Power Plant	**7.210**	**100,00**

Daya Mampu Neto
Net Dependable Capacity

Daya Mampu Neto PLN NP sebesar 6.598 MW atau berkontribusi sebesar 15,67% terhadap Sistem Jawa-Bali

Net Dependable Capacity of PLN NP was 6,598 MW or contributed 15.67% to the Java-Bali System

Kapasitas Daya Mampu Neto (DMN) adalah daya mampu pembangkit dalam satuan Mega Watt berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang dituangkan dalam Sertifikat Laik Operasi. Daya Mampu Netto Sistem Jawa Bali adalah sebesar 42.104 MW, sedangkan DMN PLN NP eksisting sebesar 6.598 MW, atau memberikan kontribusi di Sistem Jawa-Bali sebesar 15,67%.

Net Dependable Capacity (NDC) is the power plant's capacity in Mega Watt based on the results of examination and testing as outlined in the Commissioning Certificate. The Net Dependable Capacity of the Java Bali System was 42,104 MW, while the NDC of PLN NP's existing was 6,598 MW, or contributed to the Java-Bali System by 15.67%.

Tabel DMN Pembangkit Eksisting
Table of NDC of Existing Power Plant

Unit Pembangkitan Generation Unit	DTP NDC	
	MW	%
UP Brantas Brantas GU	268	4,06
UP Cirata Cirata GU	984	14,91
UP Gresik Gresik GU	1.934	29,31
UP Paiton Paiton GU	740	11,22
UP Muara Karang Muara Karang GU	728	11,03
UP Muara Tawar Muara Tawar GU	1.879	28,48
PLTD Suppa Suppa DPP	62	0,94
UP Bawean Bawean GU	3	0,05
DTP Pembangkit Eksisting NDC of Existing Power Plant	**6.598**	**100,00**

Net Capacity Factor

Net Capacity Factor (NCF) adalah rasio antara total produksi netto dengan daya mampu netto unit pembangkit dikali dengan jam periode tertentu. Semakin tinggi nilai NCF maka semakin baik tingkat utilitas unit pembangkit. Pada tahun 2022, NCF PLN NP Eksisting sebesar 27,21% dan lebih rendah dari tahun sebelumnya dikarenakan penurunan penjualan kWh pada Unit Gresik, Muara Tawar, Muara Karang, dan Paiton.

Net Capacity Factor (NCF) is the ratio between total net production and net dependable capacity of a power plant unit multiplied by the hours of a certain period. The higher the NCF value, the better the utility level of power plant unit. In 2022, the NCF of PLN NP's Existing was 27,21% and lower compared to the previous year due to a decrease in kWh sales at the Gresik, Muara Tawar, Muara Karang, and Paiton Units.

Tabel NCF Pembangkit Eksisting (%)
Table of NCF of Existing Power Plant (%)

Unit Pembangkitan Generation Unit	2020	2021	2022	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease %
UP Brantas Brantas GU	44,31	54,02	60,04	11,14
UP Cirata Cirata GU	16,16	14,70	18,73	27,41
UP Gresik Gresik GU	36,67	33,54	30,22	(9,90)
UP Paiton Paiton GU	71,27	80,80	68,15	(15,66)
UP Muara Karang Muara Karang GU	40,13	46,56	28,30	(39,22)
UP Muara Tawar Muara Tawar GU	8,16	22,33	10,18	(54,41)
PLTD Suppa Suppa DPP	0,37	2,18	11,35	420,64
UP Bawean Bawean GU	75,43	75,44	78,82	4,48
NCF Pembangkit Eksisting NCF of Existing Power Plant	**30,54**	**35,13**	**27,21**	**(22,54)**

Pemakaian Bahan Bakar
Fuel Consumption

Pemakaian bahan bakar untuk pembangkit di tahun 2022 masih didominasi bahan bakar batubara sebanyak 2.775.728 ton, *biomass* sebanyak 94.795 ton, gas alam sebanyak 80.362 BBTU, MFO sebanyak 15.616 kL, dan HSD sebanyak 10.115 kL, dengan pemakaian *energy mix* sebagai berikut:

Fuel consumption for power plants in 2022 was still dominated by coal fuel of 2,775,728 tons, biomass of 94,795 tons, natural gas of 80,362 BBTU, MFO of 15,616 kL, and HSD of 10,115 kL, with the following energy mix:

Tabel Pemakaian Bahan Bakar
Table of Fuel Consumption

Jenis Bahan Bakar Fuel Types	Satuan Unit	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
					%	Nominal
Batubara Coal	ton	2.846.189	3.241.528	2.775.728	(14,37)	(465.800)
Gas Alam Natural Gas	BBTU	95.612	106.500	80.362	(24,54)	(26.138)
HSD	kL	14.026	129.289	10.115	(92,18)	(119.174)
MFO	kL	8.618	59.612	15.616	(73,80)	(43.996)
Biomass	ton	8.212	61.408	94.795	54,37	33.387

Produksi Tenaga Listrik
Electricity Production

Produksi Tenaga Listrik adalah sebesar 17.064,31 GWh menurun 17,33% dibandingkan dengan tahun 2021

Electricity Production was 17,064.31 GWh, decreased by 17.33% compared to 2021.

Produksi tenaga listrik unit eksisting PLN NP pada tahun 2022 adalah sebesar 17.064,31 GWh menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 20.640,92 GWh. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh penurunan produksi tenaga listrik pada Unit Gresik, Muara Tawar, Muara Karang, dan Paiton.

The electricity production of PLN NP's existing units in 2022 was 17,064.31 GWh, decreased compared to 2021 of 20,640.92 GWh. The decrease was influenced by a decrease in electricity production at the Gresik, Muara Tawar, Muara Karang, and Paiton Units.

Tabel Produksi Tenaga Listrik Pembangkit Eksisting Berdasarkan Jenis Pembangkitan (GWh)
Table of Electricity Production of Existing Power Plant by Generation Types (GWh)

Jenis Pembangkitan Generation Types	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	GWh
PLTA HPP	2.498,03	2.590,34	3.077,84	18,82	487,50
PLTU Batubara Coal CFPP	5.005,90	5.604,96	4.694,17	(16,25)	(910,79)
PLTU Biomassa Biomass CFPP	9,79	63,98	103,00	60,99	39,02
PLTU BBM Fuel CFPP	34,49	227,62	9,59	(95,79)	(218,03)
PLTU Gas Gas CFPP	1.387,36	944,39	287,57	(69,55)	(656,82)
PLTG HSD HSD GTPP	22,48	162,99	13,20	(91,90)	(149,79)
PLTG Gas Gas GTPP	824,89	905,17	223,14	(75,35)	(682,03)
PLTGU HSD HSD CCPP	17,06	323,88	17,83	(94,49)	(306,05)
PLTGU Gas Gas CCPP	7.992,52	9.784,56	8.553,45	(12,58)	(1.231,11)
PLTMG Gas Gas GEPP	21,25	20,88	21,48	2,87	0,60
PLTD DPP	2,05	12,15	63,03	418,77	50,88
PLTS SPP	-	-	-	-	-
Jumlah Produksi Tenaga Listrik Pembangkit Eksisting **Total Electricity Production of Existing Power Plant**	**17.815,81**	**20.640,92**	**17.064,31**	**(17,33)**	**(3.576,61)**

Tabel Produksi Tenaga Listrik Pembangkit Eksisting Berdasarkan Unit Pembangkitan (GWh)

Table of Electricity Production of Existing Power Plant by Generation Units (GWh)

Unit Pembangkitan Generation Unit	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	GWh
UP Brantas Brantas GU	1.070,28	1.294,96	1.428,47	10,31	133,51
UP Cirata Cirata GU	1.427,75	1.295,38	1.649,36	27,33	353,98
UP Gresik Gresik GU	6.355,27	5.809,60	5.253,00	(9,58)	(556,60)
UP Paiton Paiton GU	5.015,69	5.670,36	4.797,84	(15,39)	(872,52)
UP Muara Karang Muara Karang GU	2.664,97	3.093,48	1.878,20	(39,29)	(1.215,28)
UP Muara Tawar Muara Tawar GU	1.258,55	3.444,12	1.972,92	(42,72)	(1.471,20)
PLTMG Bawean Bawean GEPP	21,25	20,88	21,48	2,87	0,60
PLTD SUPPA SUPPA DPP	2,05	12,15	63,04	418,85	50,89
Jumlah Produksi Tenaga Listrik Pembangkit Eksisting **Total Electricity Production of Existing Power Plant**	**17.815,81**	**20.640,92**	**17,064,31**	**(17,33)**	**(3.576,62)**

Tabel Produksi Tenaga Listrik Pembangkit Eksisting Berdasarkan Jenis Bahan Bakar (GWh)

Table of Electricity Production of Existing Power Plant by Fuel Types (GWh)

Jenis Bahan Bakar Fuel Types	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	GWh
Hidro Hydro	2.498	2.590,34	3.077,84	18,82	487,50
Batubara Coal	5.006	5.604,96	4,694,18	(16,25)	(910,78)
Gas Alam Natural Gas	10.226	11.655,01	9.085,64	(22,05)	(2.569,37)
Minyak Oil	76	726,65	103,65	(85,74)	(623,00)
Biomassa Biomass	10	63,98	103,00	60,99	39,02
Jumlah Produksi Tenaga Listrik Pembangkit Eksisting **Total Electricity Production of Existing Power Plant**	**17.815,81**	**20.640,92**	**17,064,31**	**(17,33)**	**(3.576,63)**

Grafik Produksi Tenaga Listrik Pembangkit Eksisting (GWh)

Chart of Electricity Production of Existing Power Plant (GWh)

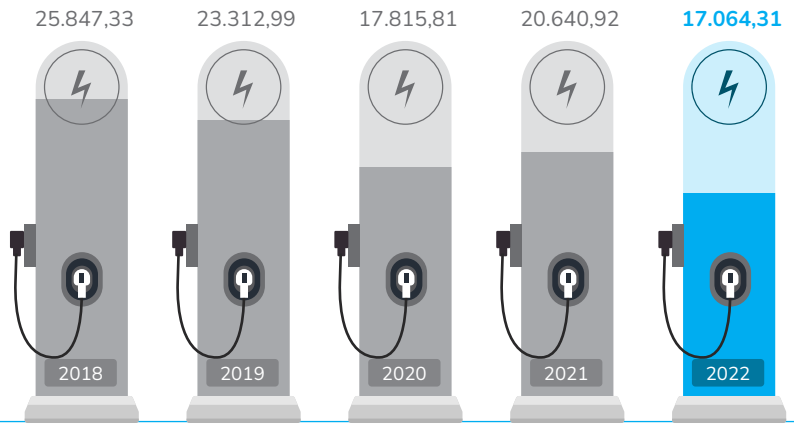

Peningkatan/Penurunan Kapasitas Produksi
Increase/Decrease in Production Capacity

Produksi tenaga listrik unit eksisting PLN NP pada tahun 2022 adalah sebesar 17.064,31 GWh menurun 17,33% dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 20.640,92 GWh. Jumlah produksi tersebut mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 111,70% dari RKAP 2022.

The electricity production of PLN NP's existing units in 2022 was 17,064.31 GWh, decreased by 17.33% compared to 2021 of 20,640.92 GWh. The total production reached the predetermined target of 111.70% of the 2022 ABOP.

Produksi tenaga listrik di tahun 2022 lebih rendah dari tahun 2021, hal ini disebabkan oleh penurunan produksi tenaga listrik pada Unit Gresik, Muara Tawar, Muara Karang, dan Paiton.

The electricity production in 2022 was lower compared to 2021, this was due to a decrease in electricity production at the Gresik, Muara Tawar, Muara Karang, and Paiton Units.

Tabel Pencapaian Realisasi Produksi Listrik
Table of the Achievement of Electricity Production Realization

Produksi Production	Realisasi 2021 (GWh) 2021 Realization (GWh)	Target RKAP 2022 (GWh) 2022 ABOP Target (GWh)	Realisasi 2022 (GWh) 2022 Realization (GWh)	Persentase (%) Percentage (%)	
				Pertumbuhan 2022 2022 Growth	Pencapaian RKAP 2022 2022 ABOP Achievement
Tenaga Listrik Electricity	20.640,92	15.276,42	17,064,31	(17,33)	111,70

Pemakaian Sendiri
Self Consumption

Pemakaian Sendiri menurun dari tahun lalu yaitu menjadi 684,83 GWh atau 4,02% terhadap produksi tenaga listrik.

Self-Consumption decreased from last year to 684,83 GWh or 4,02% of electricity production.

Pemakaian sendiri merupakan tenaga listrik yang digunakan untuk aktivitas operasional unit pembangkit. Jumlah pemakaian sendiri pada tahun 2022 adalah sebesar 684,83 GWh atau 4,02%. Pemakaian sendiri tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2021 sebesar 792,49 GWh atau 3,84%.

The self-consumption is the electricity used for operational activities in power plant units. Total self-consumption in 2022 was 684,83 GWh or 4,02%. This self-consumption was lower compared to 2021 of 792.49 GWh or 3.84%.

Tabel Produksi Tenaga Listrik Pembangkit Eksisting Berdasarkan Jenis Bahan Bakar (GWh)
Table of Self Consumption by Generation Units (GWh)

Unit Pembangkitan Generation Unit	2020		2021		2022		Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%
UP Brantas Brantas GU	23,98	0,13	16,36	0,08	16,09	1,13	(0,27)	13,13
UP Cirata Cirata GU	30,70	0,17	28,03	0,14	34,76	2,11	6,73	14,07
UP Gresik Gresik GU	136,06	0,76	127,89	0,62	132,96	2,53	5,07	3,08

Unit Pembangkitan Generation Unit	2020		2021		2022		Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%
UP Paiton Paiton GU	382,96	2,15	432,63	2,10	372,57	7,78	(60,06)	2,70
UP Muara Karang Muara Karang GU	104,52	0,59	124,18	0,60	73,65	3,92	(50,53)	5,53
UP Muara Tawar Muara Tawar GU	19,14	0,11	62,08	0,30	52,85	2,68	(9,23)	7,93
PLTMG Bawean Bawean GEPP	1,37	0,01	1,05	0,01	0,77	3,57	(0,28)	356,00
PLTD SUPPA SUPPA DPP	0,05	0,00	0,26	0,00	1,19	1,89	0,93	0,00
Jumlah Pemakaian Sendiri **Total Self Consumption**	**698,72**	**3,92**	**792,49**	**3,84**	**684,83**	**4,02**	**(107,64)**	**(0,05)**

Penjualan Tenaga Listrik
Electricity Sales

Penjualan tenaga listrik unit eksisting PLN NP pada tahun 2022 adalah sebesar 16.379,48 GWh menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 19.848,44 GWh. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena adanya pemerataan penyerapan batubara oleh PLN yang berdampak pada *capacity factor* PLTU Paiton, selain itu pembangkit PLTGU & PLTU gas periode tahun lalu mendapatkan alokasi energi yang sangat tinggi karena Sistem Jawa Bali mengalami krisis batubara.

The electricity sales of PLN NP's existing units in 2022 was 16,379.48 GWh, decreased compared to 2021 of 19,848.44 GWh. The decrease was mainly due to the equalization of coal absorption by PLN which had an impact on the capacity factor of the Paiton CFPP. In addition, the gas CCPP & CFPP last year received a very high energy allocation due to the Java Bali System experienced a coal crisis.

Tabel Penjualan Tenaga Listrik Pembangkit Eksisting Berdasarkan Jenis Pembangkitan (GWh)
Table of Electricity Sales of Existing Power Plant by Generation Types (GWh)

Jenis Pembangkitan Generation Types	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	GWh
PLTA HPP	2.443,35	2.545,95	3.026,99	18,89	481,04
PLTU Batubara Coal CFPP	4.623,68	5.178,62	4.330,30	(16,38)	(848,32)
PLTU Biomassa Biomass CFPP	9,04	59,11	94,98	60,68	35,87
PLTU BBM Fuel CFPP	32,38	213,11	8,16	(96,17)	(204,95)
PLTU Gas Gas CFPP	1.302,76	884,18	264,51	(70,08)	(619,67)
PLTG HSD HSD GTPP	22,19	160,74	12,94	(91,95)	(147,80)
PLTG Gas Gas GTPP	814,27	892,65	181,52	(79,67)	(711,13)
PLTGU HSD HSD CCPP	16,71	316,64	17,4	(94,50)	(299,24)
PLTGU Gas Gas CCPP	7.830,77	9.565,72	8.360,13	(12,60)	(1.205,59)
PLTMG Gas Gas GEPP	19,88	19,83	20,71	4,44	0,88
PLTD DPP	2,00	11,89	61,84	420,10	49,95
PLTS SPP	-	-	-	-	-
Jumlah Penjualan Tenaga Listrik Pembangkit Eksisting **Total Electricity Sales of Existing Power Plant**	**17.117,04**	**19.848,44**	**16.379,48**	**(17,48)**	**(3.468,96)**

Grafik Penjualan Tenaga Listrik Pembangkit Eksisting (GWh)
Chart of Electricity Sales of Existing Power Plant (GWh)

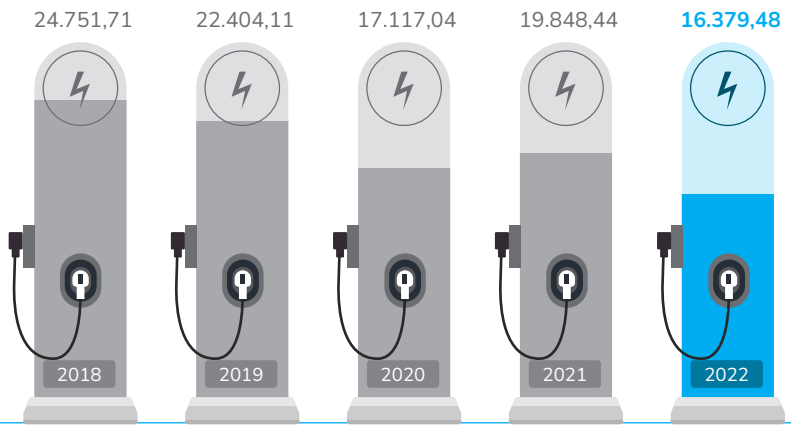

Segmen Usaha Jasa *Operation and Maintenance* (O&M)
Operation and Maintenance (O&M) Services Business Segment

PLN NP menyediakan Jasa *Operation and Maintenance* (O&M) sebagai bentuk pengembangan Perusahaan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki secara maksimal. Bidang usaha jasa O&M dilakukan oleh PLN NP secara langsung (wilayah Jawa dan luar Jawa) maupun melalui anak perusahaan (PT PJB Services) dan perusahaan patungan (PT Komipo PJB). Total pembangkit yang dikelola PLN NP melalui jasa O&M adalah sebesar 6.146,6 MW.

PLN NP provides Operation and Maintenance (O&M) Services as a form of Company development and utilizes its maximum potential. The O&M services business field is conducted by PLN NP directly (Java and outside Java) as well as through subsidiaries (PT PLN NP Services) and joint ventures (PT Komipo PLN NP). Total power plants managed by PLN NP through O&M services were 6,146.6 MW.

Jasa O&M Wilayah Jawa
O&M Services in Java

Unit Bisnis Jasa O&M (UBJOM) yang dikelola oleh PLN NP di wilayah Jawa sebesar 5.078,3 MW tersebar di 10 (sepuluh) unit pembangkit, namun yang dikelola kinerjanya oleh PLN NP adalah 8 (delapan) unit pembangkit.

The O&M Services Business Unit (UBJOM) managed by PLN NP in the Java region is 5,078.3 MW spread across 10 (ten) power plant units, however, the performance managed by PLN NP is 8 (eight) power plant units.

Kinerja UBJOM Wilayah Jawa Tahun 2022
Performance of Java Region OMSBU in 2022

NCF	EFOR	SdOF	Tara Kalor Neto Net Plant Heat Rate	SOF	EAF
64,31%	2,40%	1,74 kali/unit times/unit	2.570,49 kCal/kWh	9,01%	88,34%

Tabel EAF Pembangkit UBJOM Wilayah Jawa (%)

Table of EAF of OMSBU Power Plant in Java (%)

Pembangkit Power Plant	2020	2021	2022	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease %
PLTU Indramayu 1,2,3 Indramayu 1,2,3 CFPP	93,82	86,08	85,81	(0,31)
PLTU Rembang 1,2 Rembang 1,2 CFPP	89,36	67,58	71,49	5,79
PLTU Paiton 9 Paiton 9 CFPP	91,32	85,32	88,07	3,22
PLTU Pacitan 1,2 Pacitan 1,2 CFPP	90,52	86,09	94,81	10,13
PLTU Tanjung Awar Awar 1,2 Tanjung Awar-Awar 1,2 CFPP	87,07	88,89	81,21	(8,64)
PLTGU Muara Tawar Blok 5 Muara Tawar Block 5 CCPP	94,66	87,59	99,23	13,29
PLTGU Muara Karang Blok 2 Muara Karang Block 2 CCPP	95,61	93,02	98,64	6,04
PLTGU Muara Karang Blok 3 *Peaker* Muara Karang Block 3 Peaker CCPP	-	98,56	95,35	(3,26)
EAF Pembangkit UBJOM Wilayah Jawa **EAF of OMSBU Power Plant in Java**	**91,69**	**86,01**	**88,34**	**2,71**

Tabel SOF Pembangkit UBJOM Wilayah Jawa (%)

Table of SOF of OMSBU Power Plant in Java (%)

Pembangkit Power Plant	2020	2021	2022	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease %
PLTU Indramayu Indramayu CFPP	3,67	9,99	9,23	(7,61)
PLTU Rembang Rembang CFPP	6,83	29,57	21,43	(27,53)
PLTU Paiton 9 Paiton 9 CFPP	2,25	10,51	11,41	8,56
PLTU Pacitan Pacitan CFPP	3,25	5,75	2,60	(54,78)
PLTU Tanjung Awar Awar Tanjung Awar-Awar CFPP	10,09	8,71	15,85	81,97
PLTGU Muara Karang Blok 2 Muara Karang Block 2 CCPP	3,27	6,19	1,35	(78,19)
PLTGU Muara Tawar Blok 5 Muara Tawar Block 5 CCPP	4,97	12,01	0,45	(96,25)
PLTGU Muara Karang Blok 3 *Peaker* Muara Karang Block 3 Peaker CCPP	-	0,00	4,17	-
SOF Pembangkit UBJOM Wilayah Jawa **SOF of OMSBU Power Plant in Java**	**4,83**	**10,20**	**9,01**	**(11,67)**

Tabel EFOR Pembangkit UBJOM Wilayah Jawa (%)

Table of EFOR of OMSBU Power Plant in Java (%)

Pembangkit Power Plant	2020	2021	2022	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease %
PLTU Indramayu Indramayu CFPP	2,00	4,28	4,36	1,87
PLTU Rembang Rembang CFPP	4,02	4,02	6,22	54,73
PLTU Paiton 9 Paiton 9 CFPP	6,16	4,51	0,46	(89,80)
PLTU Pacitan Pacitan CFPP	4,21	8,19	1,98	(75,82)
PLTU Tanjung Awar Awar Tanjung Awar-Awar CFPP	2,71	2,64	3,19	20,83
PLTGU Muara Karang Blok 2 Muara Karang Block 2 CCPP	1,01	0,02	0,02	0,00
PLTGU Muara Tawar Blok 5 Muara Tawar Block 5 CCPP	0,42	1,21	0,64	(47,11)
PLTGU Muara Karang Blok 3 *Peaker* Muara Karang Block 3 Peaker CCPP	-	1,59	0,52	(67,30)
EFOR Pembangkit UBJOM Wilayah Jawa **EFOR of OMSBU Power Plant in Java**	**3,06**	**3,59**	**2,40**	**(33,15)**

Tabel SdOF Pembangkit UBJOM Wilayah Jawa (kali/unit)

Table of SdOF of OMSBU Power Plant in Java (times/unit)

Pembangkit Power Plant	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	kali/unit times/unit
PLTU Indramayu Indramayu CFPP	3,00	0,67	1,00	49,25	0,33
PLTU Rembang Rembang CFPP	4,50	1,00	3,50	250,00	2,50
PLTU Paiton 9 Paiton 9 CFPP	5,00	3,00	1,00	(66,67)	(2,00)
PLTU Pacitan Pacitan CFPP	1,00	2,50	1,50	(40,00)	(1,00)
PLTU Tanjung Awar Awar Tanjung Awar-Awar CFPP	1,00	0,00	3,50	-	3,50
PLTGU Muara Karang Blok 2 Muara Karang Block 2 CCPP	0,20	0,20	0,00	(100,00)	(0,20)
PLTGU Muara Tawar Blok 5 Muara Tawar Block 5 CCPP	3,50	2,00	5,50	175,00	3,50
PLTGU Muara Karang Blok 3 *Peaker* Muara Karang Block 3 Peaker CCPP	-	1,00	0,50	(50,00)	(0,50)
SdOF Pembangkit UBJOM Wilayah Jawa **SdOF of OMSBU Power Plant in Java**	**2,60**	**1,00**	**1,74**	**74,00**	**0,74**

Tabel Tara Kalor Neto Pembangkit UBJOM Wilayah Jawa (kCal/kWh)

Table of Net Plant Heat Rate of OMSBU Power Plant in Java (kCal/kWh)

Pembangkit Power Plant	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	kCal/kWh
PLTU Indramayu Indramayu CFPP	2.700,63	2.797,04	2.856,17	2,11	59,13
PLTU Rembang Rembang CFPP	2.794,24	2.806,67	3.059,14	9,00	252,47
PLTU Paiton 9 Paiton 9 CFPP	2.684,34	2.694,80	2.674,01	(0,77)	(20,79)
PLTU Pacitan Pacitan CFPP	2.827,75	2.819,58	2.818,93	(0,02)	(0,65)
PLTU Tanjung Awar Awar Tanjung Awar-Awar CFPP	2.794,94	2.825,96	2.909,31	2,95	83,35
PLTGU Muara Karang Blok 2 Muara Karang Block 2 CCPP	1.963,74	1.986,84	1.993,84	0,35	7,00
PLTGU Muara Tawar Blok 5 Muara Tawar Block 5 CCPP	1.915,65	2.035,42	2.015,84	(0,96)	(19,58)
PLTGU Muara Karang Blok 3 *Peaker* Muara Karang Block 3 Peaker CCPP	-	1.909,98	1.695,70	(11,22)	(214,28)
Tara Kalor Neto Pembangkit UBJOM Wilayah Jawa **Net Plant Heat Rate of OMSBU Power Plant in Java**	**2.581,32**	**2.542,90**	**2.570,49**	**1,08**	**27,59**

Tabel NCF Pembangkit UBJOM Wilayah Jawa (%)

Table of NCF of OMSBU Power Plant in Java (%)

Pembangkit Power Plant	2020	2021	2022	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease
				%
PLTU Indramayu Indramayu CFPP	82,10	71,34	73,57	3,13
PLTU Rembang Rembang CFPP	80,61	63,63	61,42	(3,47)
PLTU Paiton 9 Paiton 9 CFPP	77,50	73,76	73,44	(0,43)
PLTU Pacitan Pacitan CFPP	67,11	59,99	77,11	28,54
PLTU Tanjung Awar Awar Tanjung Awar-Awar CFPP	73,09	75,42	71,33	(5,42)
PLTGU Muara Karang Blok 2 Muara Karang Block 2 CCPP	44,82	36,73	36,60	(0,35)
PLTGU Muara Tawar Blok 5 Muara Tawar Block 5 CCPP	80,13	21,91	43,07	96,58
PLTGU Muara Karang Blok 3 *Peaker* Muara Karang Block 3 Peaker CCPP	-	46,45	63,58	36,88
EFOR Pembangkit UBJOM Wilayah Jawa **NCF of OMSBU Power Plant in Java**	**71,57**	**59,92**	**64,31**	**7,33**

Jasa O&M Wilayah Luar Jawa

O&M Services Outside Java

Unit Bisnis Jasa O&M (UBJOM) yang dikelola oleh PLN NP di wilayah Luar Jawa sebesar 844,3 MW (1 pembangkit masih dalam tahap konstruksi) tersebar di 4 (empat) lokasi dengan kinerja sebagai berikut:

The O&M Services Business Unit (OMSBU) managed by PLN NP in Outside Java is 844.3 MW (1 power plant is still under construction) spread across 4 (four) locations with the following performance:

Kinerja UBJOM Wilayah Luar Jawa Tahun 2022

Performance of OMSBU Outside Java Region in 2022

NCF	EFOR	SdOF	Tara Kalor Neto Net Plant Heat Rate	SOF	EAF
61,80%	2,17%	1,60 kali/unit times/unit	3.289,77 kCal/kWh	8,79%	88,94%

Tabel EAF Pembangkit UBJOM Wilayah Luar Jawa (%)

Table of EAF of OMSBU Power Plant Outside Java (%)

Pembangkit Power Plant	2020	2021	2022	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease %
PLTU Tenayan Tenayan CFPP	77,55	81,02	82,57	1,91
PLTU Kaltim Teluk Kaltim Teluk CFPP	88,80	88,80	91,19	2,69
PLTMG Arun Arun GEPP	95,79	98,05	93,36	(4,78)
PLTU Pulang Pisau Pulang Pisau CFPP	73,09	91,56	89,43	(2,33)
EAF Pembangkit UBJOM Wilayah Luar Jawa **EAF of OMSBU Power Plant Outside Java**	**85,11**	**89,44**	**88,94**	**(0,56)**

Tabel SOF Pembangkit UBJOM Wilayah Luar Jawa (%)

Table of SOF of OMSBU Power Plant Outside Java (%)

Pembangkit Power Plant	2020	2021	2022	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease %
PLTU Tenayan Tenayan CFPP	13,64	13,31	13,10	(1,58)
PLTU Kaltim Teluk Kaltim Teluk CFPP	6,24	9,74	7,20	(26,08)
PLTMG Arun Arun GEPP	4,07	1,74	6,08	249,43
PLTU Pulang Pisau Pulang Pisau CFPP	10,23	5,10	8,13	59,41
SOF Pembangkit UBJOM Wilayah Luar Jawa **SOF of OMSBU Power Plant Outside Java**	**8,37**	**7,94**	**8,79**	**10,71**

Tabel EFOR Pembangkit UBJOM Wilayah Luar Jawa (%)

Table of EFOR of OMSBU Power Plant Outside Java (%)

Pembangkit Power Plant	2020	2021	2022	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease %
PLTU Tenayan Tenayan CFPP	7,80	5,94	4,60	(22,56)
PLTU Kaltim Teluk Kaltim Teluk CFPP	4,40	1,99	0,66	(66,83)
PLTMG Arun Arun GEPP	0,21	0,43	1,03	139,53
PLTU Pulang Pisau Pulang Pisau CFPP	4,31	2,22	2,24	0,90
EFOR Pembangkit UBJOM Wilayah Luar Jawa **EFOR of OMSBU Power Plant Outside Java**	**4,22**	**2,76**	**2,17**	**(21,38)**

Tabel SdOF Pembangkit UBJOM Wilayah Luar Jawa (kali/unit)

Table of SdOF of OMSBU Power Plant Outside Java (times/unit)

Pembangkit Power Plant	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	kali/unit times/unit
PLTU Tenayan Tenayan CFPP	1,50	3,00	3,50	16,67	0,5
PLTU Kaltim Teluk Kaltim Teluk CFPP	1,50	1,50	1,00	(33,33)	(0,5)
PLTMG Arun Arun GEPP	3,79	2,74	1,37	(50,00)	(1,37)
PLTU Pulang Pisau Pulang Pisau CFPP	4,00	1,00	2,50	150,00	1,5
SdOF Pembangkit UBJOM Wilayah Luar Jawa **SdOF of OMSBU Power Plant Outside Java**	**2,70**	**2,52**	**1,60**	**(36,51)**	**(0,92)**

Tabel Tara Kalor Neto Pembangkit UBJOM Wilayah Luar Jawa (kCal/kWh)

Table of Net Plant Heat Rate of OMSBU Power Plant Outside Java (kCal/kWh)

Pembangkit Power Plant	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	kCal/kWh
PLTU Tenayan Tenayan CFPP	4.170,45	4.638,00	4.111,33	(11,36)	(526,67)
PLTU Kaltim Teluk Kaltim Teluk CFPP	3.809,76	3.575,83	3.324,29	(7,03)	(251,54)
PLTMG Arun Arun GEPP	2.232,53	2.253,34	1.955,33	(13,23)	(298,01)
PLTU Pulang Pisau Pulang Pisau CFPP	3.787,33	3.948,73	3.945,42	(0,08)	(3,31)
Tara Kalor Neto Pembangkit UBJOM Wilayah Luar Jawa **Net Plant Heat Rate of OMSBU Power Plant Outside Java**	**3.461,41**	**3.596,34**	**3.289,77**	**(8,52)**	**(306,57)**

Tabel NCF Pembangkit UBJOM Wilayah Luar Jawa (%)
Table of UBJOM Power Plant NCF Outside Java (%)

Pembangkit Power Plant	2020	2021	2022	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease %
PLTU Tenayan Tenayan CFPP	72,87	63,57	62,88	(1,09)
PLTU Kaltim Teluk Kaltim Teluk CFPP	45,83	56,01	69,03	23,25
PLTMG Arun Arun GEPP	66,43	36,05	50,96	41,36
PLTU Pulang Pisau Pulang Pisau CFPP	65,93	59,89	65,22	8,90
NCF Pembangkit UBJOM Wilayah Luar Jawa **NCF of OMSBU Power Plant Outside Java**	**62,23**	**53,54**	**61,80**	**15,43**

Jasa O&M melalui Anak Perusahaan
O&M Services through Subsidiaries

Unit Bisnis Jasa O&M (UBJOM) melalui Anak Perusahaan (PT PJB Services) sebesar 773,4 MW yang tersebar di 15 lokasi.

O&M Services Business Unit (OMSBU) through its Subsidiary (PT PJB Services) is 773.4 MW spread across 15 locations.

Kinerja Pembangkit UBJOM yang dikelola Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan
Performance of UBJOM Power Plants managed by Subsidiaries and Joint Ventures

Jenis Bahan Bakar Power Plant	EAF (%)		EFOR (%)		NPHR (kCal/kWh)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
PLTU Amurang Amurang CFPP	84,10	98,41	2,59	1,09	4.119,82	4.639,33
PLTU Ampana Ampana CFPP	47,67	68,59	0,32	0,89	7.364,65	6.619,07
PLTU Bangka Bangka CFPP	72,77	74,58	18,06	14,20	4.894,21	5.393,16
PLTU Belitung Belitung CFPP	87,78	92,92	2,01	2,78	4.444,91	5.009,79
PLTU Bolok Bolok CFPP	84,98	95,70	1,79	0,41	4.144,00	4.154,67
PLTU Kendari Kendari CFPP	76,75	72,51	3,55	2,32	5.654,52	5.708,32
PLTU Ketapang Ketapang CFPP	69,05	76,88	4,59	2,11	6.481,23	7.077,15
PLTU Ropa Ropa CFPP	80,00	89,40	5,32	1,62	5.288,20	5.050,87
PLTU Tembilahan Tembilahan CFPP	82,70	90,77	4,64	0,72	5.989,84	5,931.04
PLTU Tidore Tidore CFPP	86,40	77,90	3,99	4,71	5.533,59	5.436,34
PLTU Anggrek Anggrek CFPP	87,88	90,91	2,36	5,40	5.066,01	5.601,28
PLTA Asahan Asahan HPP	98,60	96,95	0,45	0,00	-	-
PLTU Banjarsari Banjarsari CFPP	74,44	81,36	12,42	8,08	3.353,68	3.510,94
PLTD Suppa Suppa DPP	83,27	82,93	86,90	57,81	2.189,55	2.205,32
PLTMG Bawean Bawean GEPP	92,69	97,70	0,02	0,21	2.672,67	2.624,90

Segmen Usaha Jasa *Engineering, Procurement and Construction* (EPC)

Engineering, Procurement and Construction (EPC) Services Business Segment

PLN NP menyediakan Jasa *Engineering, Procurement and Construction* (EPC) melalui salah satu Anak Perusahaannya yaitu PT Rekadaya Elektrika (RE). Jasa EPC yang dilakukan oleh PLN NP tersebut terdiri atas pembangunan pembangkit-pembangkit baru, khususnya di luar Pulau Jawa yang didukung tenaga profesional dan kemampuan dalam penguasaan teknologi pembangkitan, serta pembangunan jaringan Transmisi dan Distribusi (T&D) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Terdapat 8 proyek EPC yang dikelola oleh PT Rekadaya Elektrika (RE) dengan total kapasitas 166 MW.

PLN NP provides Engineering, Procurement and Construction (EPC) Services through one of its subsidiaries, PT Rekadaya Elektrika (RE). The EPC services conducted by PLN NP consist of the construction of new power plants, especially outside Java Island, supported by professionals and capabilities in mastering electric power generator technology, as well as the construction of Transmission and Distribution (T&D) networks spread throughout Indonesia. There are 8 EPC projects managed by PT Rekadaya Elektrika (RE) with a total capacity of 166 MW.

Tabel Proyek EPC yang dikelola PLN NP melalui Anak Perusahaan

Table of EPC Projects managed by PLN NP through Subsidiaries

Pembangkit Power Plant	Kapasitas Terpasang Installed Capacity	Lokasi Location	Progress Pekerjaan (%) Work Progress (%)
PLTU Kepulauan Riau Riau Island CFPP	2 x 7 MW	Kepulauan Riau Riau Island	Selesai Completed
PLTU Kendari Kendari CFPP	2 x 10 MW	Sulawesi Tenggara Southeast Sulawesi	Selesai Completed
PLTU Gorontalo Gorontalo CFPP	2 x 25 MW	Gorontalo	Selesai Completed
PLTU Tidore Tidore CFPP	2 x 7 MW	Maluku Utara North Maluku	Selesai Completed
PLTU Timika Timika CFPP	4 x 7 MW	Papua	47,51
PLTU Bima Bima CFPP	2 x 10 MW	Nusa Tenggara Barat West Nusa Tenggara	30,03
PLTU Ende Ende CFPP	2 x 7 MW	Nusa Tenggara Timur East Nusa Tenggara	Selesai Completed
PLTU Sofifi Sofifi CFPP	2 x 3 MW	Maluku Utara North Maluku	33,48

Segmen Usaha Jasa Lainnya

Other Services Business Segment

Segmen Usaha Lainnya merupakan proyek yang berada dibawah Divisi Business Solution dengan fungsi utama untuk memastikan pengembangan strategi bisnis, melakukan evaluasi eksekusi strategi bisnis, bertindak sebagai pelaku aktivitas pemasaran, serta mengelola bisnis penunjang Jasa O&M, dan pemanfaatan aset untuk mendukung pengembangan bisnis Perusahaan. Adapun beberapa proyek strategis yang menjadi segmen jasa usaha lainnya di tahun 2021 terdiri dari Pemanfaatan Aset, Pemanfaatan Lahan/Bangunan, Pemanfaatan Laboratorium, Marketing Strategis, serta Penunjang Jasa O&M.

The Other Business Segment is a project under the Business Solution Division with the main function of ensuring the development of business strategies, evaluating the execution of business strategies, acting as a marketing activity actor, and managing the supporting business of O&M Services, and asset utilization to support the Company's business development. Several strategic projects that became other business services segments in 2022 consisted of Asset Utilization, Land/Building Utilization, Laboratory Utilization, Strategic Marketing, and Supporting O&M Services.

Pemanfaatan *Fly Ash Bottom Ash* (FABA)
Utilization of Fly Ash Bottom Ash (FABA)

PLN NP telah melakukan kerjasama jual-beli *Bottom Ash* (BA) ke PT Semen Imasco Asiatic (PT IMASCO) untuk *supply* BA sebesar 2.000 Ton per bulan. Kontrak ini berdurasi 1 tahun dan akan menyerap BA UP Paiton 1&2 sebanyak 24.000 Ton. Pada tanggal 29 September 2021 hingga 8 April 2022 telah dilakukan pengangkutan BA oleh PT IMASCO sebanyak 70.977,09 Ton. Pada tanggal 17 Juni 2022, Imasco telah mengajukan PO kedua sebesar 100.000 ton ke UP Paiton 1&2 dan UBJOM Paiton 9.

PT PLN NP bekerja sama dengan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (ITP) dalam pemanfaatan *Fly Ash* (FA) sebanyak 425 Ton untuk proses produksi semen. Uji coba pertama pemanfaatan FA berhasil dilakukan pada bulan Juni dan Juli 2022. Kerjasama ini dilanjutkan dengan kesepakatan pemanfaatan FA antara PLN NP dan ITP pada tanggal 30 Juni 2022 sebanyak 2.500 ton dengan jangka waktu setahun.

PLN NP has conducted a Bottom Ash (BA) sale and purchase cooperation with PT Semen Imasco Asiatic (PT IMASCO) for BA supply of 2,000 tons per month. This contract has a duration of 1 year and will absorb 24,000 tons of BA from Paiton 1&2 GU. On September 29, 2021 to April 8, 2022, 70,977.09 Tons of BA were transported by PT IMASCO. On June 17, 2022, Imasco has submitted a second PO of 100,000 tons to Paiton 1&2 GU and Paiton 9 OMSBU.

PT PLN NP collaborated with PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (ITP) in utilizing 425 tons of Fly Ash (FA) for the cement production process. The first trial of FA utilization was successfully conducted in June and July 2022. This collaboration was continued with an FA utilization of 2,500 tons between PLN NP and ITP on June 30, 2022 with a period of one year.

Pemanfaatan Lahan dan Bangunan
Land and Building Utilization

Sewa Menyewa Gedung Ex-BPWC dan Wisma Penginapan oleh BUT Sinohydro Corporation Limited
Lease of Ex-BPWC Building and Lodging House by BUT Sinohydro Corporation Limited

Pada tanggal 01 Januari 2022 telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Sewa Villa 1 & 2 Cirata antara PT PLN Nusantara Power dan BUT Sinohydro Corporation Limited. Durasi sewa villa selama 1 tahun terhitung hingga 31 Desember 2022.

On January 01, 2022, a Lease Agreement for Villa 1 & 2 Cirata was signed between PT PLN Nusantara Power and BUT Sinohydro Corporation Limited. The duration of the villa lease is for 1 year starting from December 31, 2022.

Pendayagunaan Aset Properti PT PLN (Persero)
Utilization of Property Assets of PT PLN (Persero)

Pendayagunaan aset properti yang sudah terkontrak meliputi Sewa lahan ATM di PLTU Tanjung Awar-Awar dan Sewa lahan ATM di PLTU Pacitan. Total pendapatan yang telah diterima PT PLN NP sehubungan dengan pelaksanaan kontrak Pendayagunaan Aset Properti PT PLN (Persero) dengan pelanggan.

Utilization of property assets that have been contracted include ATM land Lease at Tanjung Awar-Awar CFPP and ATM land Lease at Pacitan CFPP. Total revenue that has been received by PT PLN NP in connection with the implementation of PT PLN (Persero) Property Asset Utilization contracts with customers.

Pengelolaan *Guest House*/Wisma/Objek Wisata
Guest House/House/Tourist Object Management

- ☑ Pengelolaan Kawista Guest House UBJOM Rembang
- ☑ Pengelolaan Wisma UBJOM Tanjung Awar-Awar
- ☑ Pengelolaan Wisma UBJOM Indramayu
- ☑ Pengelolaan Objek Wisata Pantai Niyama, Tulungagung
- ☑ Pengelolaan Paiton Resort Hotel (PAREHO)

- ☑ Management of Kawista Guest House of Rembang OMSBU
- ☑ Management of House of Tanjung Awar-Awar OMSBU
- ☑ Management of House of Indramayu OMSBU
- ☑ Management of Niyama Beach Tourism Object, Tulungagung
- ☑ Management of Paiton Resort Hotel (PAREHO)

Pemanfaatan Laboratorium
Laboratory Utilization

PLN NP telah membangun sebuah ide bisnis *non core* baru yaitu jasa kalibrasi yang bergerak dan fokus di 2 jasa kalibrasi & *repair* dan telah memiliki sertifikasi KAN. Saat ini Laboratorium tersebut difokuskan untuk mendukung proses bisnis internal PT PLN NP. Rencana jangka panjang akan melakukan ekspansi ke pasar Eksternal seperti PLN, Indonesia Power dan menambah ruang lingkup U–LAB yaitu *Temperature* dan *Pressure*.

U-LAB semakin banyak memiliki *customer* untuk jasa *repair* maupun kalibrasi untuk PLN UPDK Mahakam, PT Indonesia Power Maintenance Service Unit dan PT Cogindo.

PLN NP has built a new non-core business idea, namely calibration services that are engaged and focused on 2 calibration & repair services and already have KAN certification. Currently, UPHB Laboratory is focused on supporting the internal business process of PT PLN NP. The long-term plan is to expand to external markets such as PLN, Indonesia Power and increase the scope of U-LAB, namely Temperature and Pressure.

U-LAB increasingly had customers for repair and calibration services for PLN UPDK Mahakam, PT Indonesia Power Maintenance Service Unit and PT Cogindo.

Marketing Strategis
Strategic Marketing

- *Major Inspection* 150 MW CCP Chandpur di Bangladesh
- Set Up SMP Banjarsari
- Pekerjaan PVR bali 242 kwp
- RLA Boiler Unit #2 PT S2P

- Major Inspection of 150 MW CCP Chandpur in Bangladesh
- Set Up of Banjarsari Junior High School
- PVR work for Bali 242 kWp
- RLA Boiler Unit #2 PT S2P

Penunjang Jasa O & M
Supporting O&M Services

EAM Gorontalo Minahasa, EAM Minahasa, dan EAM UPK Singkawang (Tahap II dan Tahap III)
EAM Gorontalo Minahasa, EAM Minahasa, and EAM UPK Singkawang (Stage II and Stage III)

Pekerjaan EAM Gorontalo Minahasa telah dilaksanakan *Go Live* pada 22 Juli 2022, untuk selanjutnya akan dilakukan Pendampingan I & II. Sedangkan EAM Asam-Asam telah berlanjut ke tahap III yaitu agenda *Key User Training stream* OME & MM. Dan untuk EAM UPK Singkawang (Tahap II dan Tahap III) telah dilaksanakan agenda *Go Live* pada tanggal 25 Agustus 2022, dilanjutkan Pendampingan I & II

The Gorontalo Minahasa EAM work has been carried out Go Live on July 22, 2022, for the next Assistance I & II will be carried out. Meanwhile, EAM Asam-Asam has progressed to stage III, namely the OME & MM Key User Training stream agenda. And for the Singkawang UPK EAM (Phase II and Stage III) the Go Live agenda was carried out on August 25 2022, followed by Assistance I & II

Jasa Pengukuran PA *Flow* PLTU Keban Agung Unit #1
PA Flow Measurement Services of Keban Agung Unit #1 CFPP

Pekerjaan Jasa Pengukuran PA *Flow* PLTU Keban Agung Unit #1 dengan periode eksekusi mulai 12-17 September 2022. Pekerjaan ini telah selesai dilaksanakan.

PA Flow Measurement Services of Keban Agung Unit #1 CFPP with an execution period from September 12-17, 2022. This work has been completed.

Sewa dan BOT PV *Rooftop* di 20 Gedung PLN UID Bali Group

PV Rooftop Lease and BOT in 20 PLN UID Bali Group Buildings

Per tanggal 31 Agustus 2022, telah terbit Berita Acara Serah Terima yang menandakan pekerjaan Instalasi & Konstruksi telah selesai dilaksanakan secara tepat waktu.

As of August 31, 2022, a Minutes of Handover has been issued indicating that the Installation & Construction work has been completed in a timely manner.

Jasa Pendampingan I-Care PLN GG

PLN GG I-Care Assistance Services

PLN NP berkontrak dengan PLN Gas dan Geothermal terkait pekerjaan Jasa Pengembangan Aplikasi I-Care PT PLN GG dengan durasi pekerjaan selama 3 tahun. Pada tanggal 30 September 2022 telah dilakukan Penyusunan dokumen *Business Solution Design* dan Pengujian Jaringan di PLN GG. Untuk selanjutnya akan dilakukan agenda *Key User Training*.

PLN NP contracted with PLN Gas and Geothermal related to PT PLN GG's I-Care Application Development Services work with a duration of work of 3 years. On September 30, 2022, the Business Solution Design and Network Testing documents were prepared at PLN GG. Henceforth, the Key User Training agenda will be carried out.

Studi dan Uji Coba *Ammonia Co-Firing* UP Gresik

Study and Trial of Ammonia Co-Firing at Gresik GU

PLN NP melakukan Perjanjian dengan IHI *Corporation* terkait Studi dan Uji Coba *Ammonia Co-Firing* di PLTU Gresik dengan nomor perjanjian 110.PJ/060/PJB-IHI/IX/2022 dengan tenggat penyelesaian pekerjaan paling lambat pada 31 Maret 2023. Eksekusi pekerjaan dilakukan oleh UP Gresik.

PLN NP made an Agreement with IHI Corporation related to the Study and Trial of Ammonia Co-Firing at Gresik CFPP with agreement number 110.PJ/060/PJB-IHI/IX/2022 with a deadline for work completion no later than March 31, 2023. The execution of the work is carried out by Gresik GU.

Profitabilitas Per Segmen
Profitability by Segment

Komponen Pendapatan Usaha
Component of Revenues

Segmen dengan kontribusi tertinggi terhadap pendapatan usaha berasal dari Penjualan Tenaga Listrik sebesar 79,71% atau Rp21,68 triliun

The segment with the highest contribution to revenues came from Electricity Sales at 79.71% or Rp21.68 trillion.

Komponen pendapatan PLN NP sesuai dengan segmen usaha yang dimiliki yaitu penjualan tenaga listrik, jasa operasi dan pemeliharaan, konstruksi, dan pendapatan lainnya. Pada tahun 2022, kontribusi dari masing-masing segmen terhadap pendapatan usaha yaitu penjualan tenaga listrik sebesar 79,71%, jasa operasi dan pemeliharaan sebesar 15,07%, konstruksi sebesar 3,11%, dan pendapatan lainnya sebesar 2,11%.

The revenue component of PLN NP is in accordance with its business segments, namely electricity sales, operation and maintenance services, construction, and other revenues. In 2022, the contribution of each segment to revenues, namely sales of electricity by 79.71%, operation and maintenance services by 15.07%, construction by 3.11%, and other revenues by 2.11%.

Tabel Komponen dan Komposisi Pendapatan Usaha
Table of Components and Composition of Revenues

Jenis Pendapatan Type of Revenue	2020		2021		2022	
	Rp juta Rp million	%	Rp juta Rp million	%	Rp juta Rp million	%
Pendapatan Usaha: Revenue:						
Penjualan Tenaga Listrik Sales of Electricity	25.476.470	83,71	24.541.378	83,17	21.682.476	79,71
Pendapatan Usaha Lainnya: Other Operating Revenue:						
Jasa Operasi dan Pemeliharaan Operation and Maintenance Services	4.093.834	13,45	4.057.567	13,75	4.099.714	15,07
Konstruksi Construction	702.929	2,31	727.224	2,46	845.101	3,11
Lainnya Others	160.943	0,53	181.965	0,62	574.909	2,11
Jumlah Pendapatan Usaha Total Revenues	**30.434.176**	**100,00**	**29.508.134**	**100,00**	**27.202.200**	**100,00**

Pendapatan Usaha Per Segmen
Revenues by Segment

Pendapatan usaha PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp27,20 triliun menurun 7,81% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp29,50 triliun. Penurunan pendapatan usaha PLN NP disebabkan oleh penurunan penjualan tenaga listrik yang disebabkan oleh penurunan penyaluran energi listrik dari pembangkit Non - PLTU batubara (mayoritas pembangkit PLN NP) oleh Penyaluran dan dan Pusat Pengatur Beban PLN seiring mulai dioperasikannya PLTU pada Sistem Kelistrikan Jawa Bali dan mulai pulihnya kembali pasokan batubara pada tahun 2022.

PLN NP's revenues in 2022 amounted to Rp27.20 trillion, decreased by 7.81% compared to 2021 of Rp29.50 trillion. The decrease in PLN NP's revenues was due to a decrease in electricity sales caused by a decrease in the distribution of electrical energy from Non-coal CFPP (the majority of PLN NP's power plants) by PLN's Distribution and Load Dispatch Center in line with the start of the operation of CFPPs in the Java Bali Electricity System and the recovery of coal supply in 2022.

Tabel Pendapatan Usaha Per Segmen (Rp juta)
Table of Revenues by Segment (Rp million)

Segmen Usaha Business Segment	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik **Electric Power Generator Business**	**25.476.470**	**24.541.378**	**21.682.476**	**(11,65)**	**(2.858.902)**
PLTGU CCPP	15.876.632	16.165.226	12.361.663	(23,53)	(3.803.563)
PLTU CFPP	6.534.397	6.072.357	4.910.439	(19,13)	(1.161.918)
PLTA HPP	3.016.618	2.264.250	2.312.668	2,14	48.418
PLTG GTPP	48.824	39.544	2.097.705	5.204,74	2.058.161
Usaha Jasa O&M dan EPC **O&M and EPC Services Business**	**5.908.368**	**6.179.739**	**6.600.528**	**6,81**	**420.789**
Usaha Jasa EAM, IMAP, *Stockiest* **EAM, IMAP, Stockiest Services Business**	**548.062**	**533.480**	**1.165.596**	**118,49**	**632.116**
Usaha Jasa Lainnya Other Services Businesses	**2.241**	**4.776**	**-**	**(100,00)**	**(4.776)**
Jumlah Pendapatan Usaha sebelum Eliminasi **Total Revenues before Elimination**	**31.935.142**	**31.259.372**	**29.448.600**	**(5,79)**	**(1.810.772)**
Eliminasi Elimination	(1.500.966)	1.751.238	(2.246.401)	(228,28)	(3.997.639)
Jumlah Pendapatan Usaha Total Revenues	**30.434.176**	**29.508.134**	**27.202.200**	**(7,81)**	**(2.305.934)**

Grafik Pendapatan Usaha (Rp juta)
Chart of Revenues (Rp million)

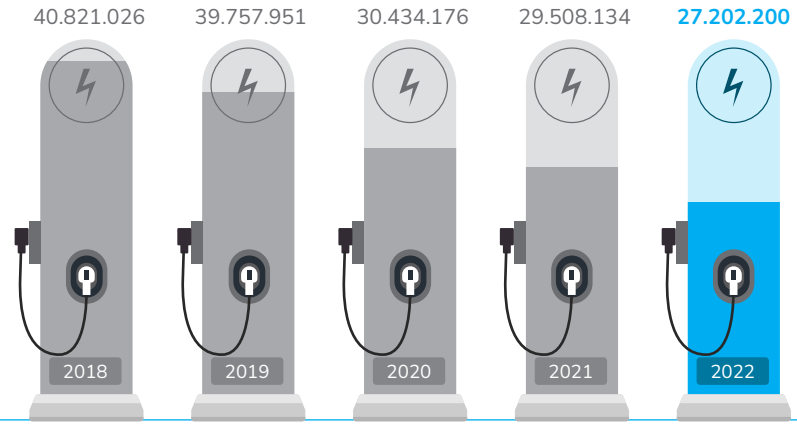

Laba Usaha Per Segmen
Operating Income by Segment

Laba usaha PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp8,01 triliun meningkat 11,33% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp7,19 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan operasi pembangkit Non - batubara (berbahan bakar minyak) dan peningkatan operasi pembangkit batubara dimana harga bahan bakar minyak lebih tinggi dibandingkan dengan harga batubara.

PLN NP's operating income in 2022 amounted to Rp8,01 trillion, increased by 11,33% compared to 2021 of Rp7,19 trillion. The increase was mainly due to a decrease in the operation of Non-coal (oil-fired) power plants and an increase in the operation of coal power plants where the price of fuel was higher than the price of coal.

Tabel Laba Usaha Per Segmen (Rp juta)
Table of Operating Income by Segment (Rp million)

Segmen Usaha Business Segment	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik **Electric Power Generator Business**	**8.049.443**	**4.019.720**	**4.041.847**	**0,55**	**22.127**
PLTGU CCPP	4.110.701	1.747.625	1.720.534	(1,55)	(27.091)
PLTU CFPP	2.265.764	1.312.499	1.230.321	(6,26)	(82.178)
PLTA HPP	1.640.314	938.806	963.597	2,64	24.791
PLTG GTPP	32.665	20.790	127.394	512,77	106.604
Usaha Jasa O&M dan EPC **O&M and EPC Services Business**	**471.432**	**368.684**	**548.656**	**48,81**	**179.972**
Usaha Jasa EAM, IMAP, *Stockiest* **EAM, IMAP, Stockiest Services Business**	**4.748**	**18.588**	**40.270**	**116,65**	**21.682**
Jumlah Laba Usaha sebelum Eliminasi **Total Operating Income before Elimination**	**8.525.624**	**4.406.991**	**4.630.773**	**5,08**	**223.782**
Eliminasi Elimination	-	-	-	-	-
Hasil Segmen Segment Results	8.525.624	4.406.991	4.630.773	5,08	223.782
Penghasilan (Beban) Lain-lain Other Revenues (Expenses)	1.714.483	2.785.049	3.375.810	21,21	590.761
Jumlah Laba Usaha Total Operating Income	**10.240.107**	**7.192.040**	**8.006.583**	**11,33**	**814.543**

Grafik Laba Usaha (Rp juta)
Chart of Operating Income (Rp million)

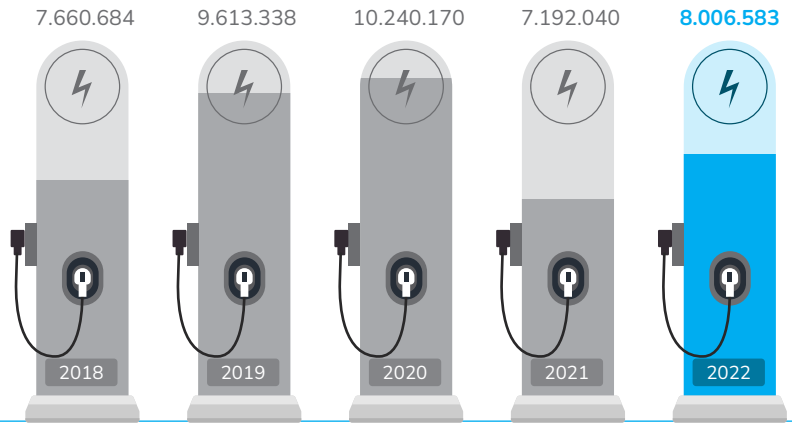

Strategi dan Arah Pengembangan Segmen Usaha
Strategy and Direction of Business Segment Development

Dalam rangka keberlanjutan usaha, strategi dan arah pengembangan disusun untuk setiap segmen usaha sehingga operasional dapat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

In the context of business sustainability, strategies and development directions are prepared for each business segment so that operations can be in accordance with predetermined targets.

Strategi dan Arah Pengembangan Segmen Usaha Penjualan Tenaga Listrik

Development Strategy and Direction of Electricity Sales Business Segment

PLN NP pada tahun 2022 mengoptimalkan kinerja penjualan tenaga listrik berdasarkan pada 3 prinsip antara lain: *security, affordability*, dan *low emission*. Untuk mencapai 3 prinsip tersebut adapun program-program yang direncanakan antara lain:

1. Penguatan *fail safe* & 6 *line of defense anti blackout*;
2. Penguatan keandalan *coal handling facility*;
3. Penguatan *plant assessment* dan RLA (*Remaining Life Asset*), pengembangan implementasi tata kelola 3.0 dan perbaikan proses bisnis untuk mendukung kecepatan eksekusi program keandalan pembangkit;
4. *Coal optimation* (pemakaian batubara dengan nilai kalor yang lebih rendah) untuk mendukung penurunan BPP;
5. Implementasi digitalisasi pembangkit;
6. Optimasi pengelolaan O&M pembangkit;
7. Pemenuhan regulasi lingkungan;
8. Optimasi pemanfaatan FABA;
9. Mendukung peningkatan bauran EBT (*biomass*) dengan *co-firing*.

In 2022, PLN NP optimized the performance of electricity sales based on 3 principles, among others: security, affordability, and low emission. To achieve these 3 principles, the programs planned include:

1. Strengthening fail safe & 6 lines of defense for anti-blackout;
2. Strengthening the reliability of coal handling facilities;
3. Strengthening plant assessment and RLA (Remaining Life Asset), development of governance 3.0 implementation and business process improvement to support the speed of power plant reliability program execution;
4. Coal optimization (use of coal with lower calorific value) to support the CES reduction;
5. Implementation of power plant digitalization;
6. Optimization of power plant O&M management;
7. Fulfillment of environmental regulations;
8. Optimization of FABA utilization;
9. Supporting the increase of NRE mix (biomass) by co-firing.

Strategi dan Arah Pengembangan Segmen Usaha Jasa O&M

Strategy and Development Direction of O&M Services Business Segment

Penciptaan nilai bisnis jasa O&M dilakukan melalui peningkatan proses operasi dan pemeliharaan pada pembangkit PLN NP maupun pembangkit milik pihak lain. Penerapan manajemen aset pembangkitan akan menjadi kekuatan utama dalam pengelolaan aset yang berkinerja tinggi. Untuk pengembangan bisnis jasa O&M, strategi yang akan digunakan adalah pengembangan portfolio jasa O&M dengan melibatkan Anak Perusahaan PLN NP sebagai bagian dari segmentasi usaha jasa O&M dan meningkatkan *competitiveness* dan efisiensi biaya atas usaha jasa O&M. Pada tahun 2022 PLN NP melakukan efisiensi dan penurunan BPP melalui optimasi kegiatan O&M yang didukung SDM & organisasi serta prioritisasi investasi.

The O&M service business value creation is done through improved operation and maintenance processes at PLN NP power plants and power plants owned by other parties. The implementation of generation asset management will be a key strength in high-performance asset management. For the development of the O&M services business, the strategy that will be used is the development of the O&M services portfolio by involving PLN NP Subsidiaries as part of the O&M services business segmentation and increasing the competitiveness and cost efficiency of the O&M services business. In 2022, PLN NP conducted efficiency and reduced CES through optimization of O&M activities supported by HR & organization as well as investment prioritization.

Strategi dan Arah Pengembangan Segmen Usaha EPC

Strategy and Development Direction of EPC Business Segment

Bisnis EPC yang dimiliki oleh PLN NP dikelola oleh anak perusahaan. Strategi yang akan digunakan pada bisnis EPC adalah mengembangkan jasa EPC untuk berbagai tipe dan ukuran pembangkit, serta dalam pembangunan transmisi. Fokus pengembangan bisnis EPC bertumpu pada pengembangan kapabilitas untuk memberikan jasa yang berkualitas dengan harga yang kompetitif agar dapat bersaing dalam *non-commercial* (penugasan PLN) dan *commercial market*. Untuk proses internal perusahaan, bisnis EPC akan mengembangkan *Integrated Management System* yang sesuai dengan *best practice*.

The EPC business owned by PLN NP is managed by a subsidiary. The strategy that will be used in the EPC business is to develop EPC services for various types and sizes of power plants, as well as in transmission construction. The focus of EPC business development relies on developing capabilities to provide quality services with competitive prices in order to be able to compete in the non-commercial (PLN assignment) and commercial markets. For the Company's internal processes, the EPC business will develop an Integrated Management System in accordance with the best practice.

Strategi dan Arah Pengembangan Segmen Usaha Lainnya

Strategy and Development Direction of Other Business Segments

Dalam lini bisnis usaha lain ini, PLN NP memiliki beberapa usaha, seperti *Business Solution* dan pelayanan penyediaan suku cadang. *Business Solution* yakni lini bisnis jasa berbasis teknologi informasi yang menyediakan jasa pendukung O&M pembangkit. Di antaranya adalah jasa Implementasi Manajemen Aset Pembangkitan, dimana PLN NP menawarkan implementasi manajemen aset pembangkit yang terintegrasi dengan *software* yang mendukung prosedur dan proses bisnis yang dikembangkan. Bisnis pelayanan penyediaan suku cadang untuk pembangkit akan dikelola oleh anak perusahaan PLN NP yang akan men *supply* kebutuhan *spare part* untuk pembangkit FTP – 1 baik yang dikelola PLN NP, IP dan beberapa unit PLN.

In this other business line, PLN NP has several businesses, such as Business Solution and spare parts procurement services. Business Solution is an information technology-based service business line that provides O&M supporting services for power plants. Among these are Electric Power Generator Asset Management Implementation services, where PLN NP offers the implementation of integrated power plant asset management with software that supports the procedures and business processes developed. The business of spare parts procurement services for power plants will be managed by a subsidiary of PLN NP which will supply spare part needs for FTP - 1 power plants, both managed by PLN NP, IP and several PLN units.

Analisis Kinerja Keuangan
Financial Performance Analysis

Kinerja Keuangan PLN NP 2022
Financial Performance of PLN NP in 2022

Jumlah Liabilitas	Jumlah Aset	Jumlah Pendapatan Usaha	Jumlah Laba Tahun Berjalan	Jumlah Ekuitas
Rp12,57 triliun	Rp174,92 triliun	Rp27,20 triliun	Rp6,58 triliun	Rp162,36 triliun
Total Liabilities Rp12.57 trillion	Total Assets Rp174.92 trillion	Total Revenues Rp27.20 trillion	Total Profit for the Year Rp6.58 trillion	Total Equity Rp162.36 trillion

Analisis Laba Rugi Komprehensif
Analysis on Comprehensive Profit or Loss

Jumlah Laba Tahun Berjalan PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp6,58 triliun meningkat 13,12% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp5,82 triliun. Sedangkan, jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp7,03 triliun meningkat 99,79% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp3,52 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penghasilan komprehensif lain setelah pajak.

PLN NP's total Profit for the Year in 2022 was Rp6.58 trillion, increased by 13.12% compared to 2021 of Rp5.82 trillion. Meanwhile, total Comprehensive Income for the Year of PLN NP in 2022 was Rp7.03 trillion, increased by 99.79% compared to 2021 of Rp3.52 trillion. The increase was mainly due to other comprehensive income after tax.

Tabel Laba Rugi Komprehensif (Rp juta)
Table of Comprehensive Profit or Loss (Rp million)

Uraian Description	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Pendapatan Usaha Revenues	30.434.176	29.508.134	27.202.200	(7,81)	(2.305.934)
Beban Usaha Operating Expenses	(21.908.552)	(25.101.143)	(22.571.427)	(10,08)	2.529.716
Laba Usaha Operating Income	8.525.624	4.406.991	4.630.773	5,08	223.782
Pos Keuangan dan Lain-lain Bersih Net Financial Items and Others	1.714.483	2.785.049	3.375.810	21,21	590.761
Laba Sebelum Pajak Profit before Tax	10.240.107	7.192.040	8.006.583	11,33	814.543
Beban Pajak Tax Expense	(2.536.295)	(1.371.852)	(1.423.037)	3,73	(51.185)
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	**7.703.812**	**5.820.188**	**6.583.546**	**13,12**	**763.358**
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain Tahun Berjalan setelah Pajak Other Comprehensive Income (Expenses) for the Year after Tax	336.930	(2.301.389)	446.746	(119,41)	2.748.135

Uraian Description	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan **Total Comprehensive Income for the Year**	**8.040.742**	**3.518.799**	**7.030.292**	**99,79**	**3.511.493**
Laba Tahun Berjalan Diatribusikan kepada: Profit for the Year Attributable to:					
- Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent	7.661.396	5.810.033	6.548.477	12,71	738.444
- Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interests	42.416	10.155	35.069	245,34	24.914
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan kepada: Total Comprehensive Income for the Year Attributable to:					
- Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent	7.995.893	3.494.125	6.985.139	99,91	3.491.014
- Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interests	44.851	24.674	45.153	83,00	20.479
Laba Per Saham Dasar (Rupiah penuh) **Basic Earnings per Share (full Amount)**	**1.284**	**970**	**1.097**	**13,09**	**127**

Grafik Jumlah Laba Tahun Berjalan (Rp juta)
Chart of Total Profit for the Year (Rp million)

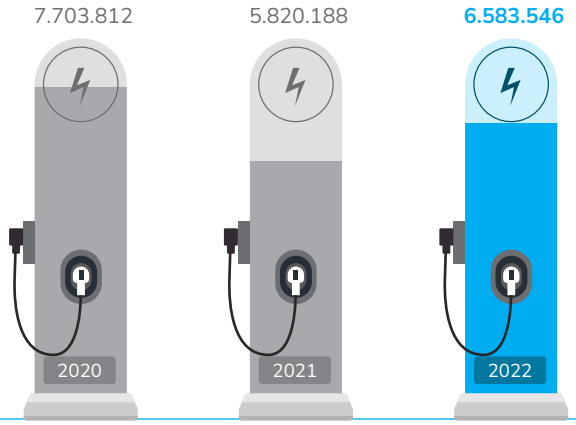

Pendapatan Usaha
Revenues

Pendapatan Usaha menurun menjadi Rp27,20 triliun
Operating Revenues decreased to Rp27.20 trillion

Komponen atas pendapatan Usaha PLN NP terdiri dari Penjualan Tenaga Listrik, Jasa O&M, Jasa EPC dan Usaha Lainnya. Kontribusi terbesar terhadap pendapatan usaha berasal dari penjualan tenaga listrik untuk sistem Jawa Bali.

The components of PLN NP's Operating revenues consist of Sales of Electricity, O&M Services, EPC Services and Other Businesses. The largest contribution to operating revenues comes from the sales of electricity for the Java-Bali system.

Pendapatan usaha PLN NP tahun 2022 sebesar Rp27,20 triliun menurun 7,81% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp29,51 triliun. Penurunan tersebut didominasi oleh menurunnya penjualan tenaga listrik PLN NP (Pembangkit Non – PLTU Batubara) dan Optimasi PLTU Batubara pada Sistem Kelistrikan Jawa Bali.

PLN NP's revenues in 2022 was Rp27.20 trillion, decreased by 7.81% compared to 2021 of Rp29.51 trillion. The decline was dominated by the decrease in sales of PLN NP electricity (Non-Coal CFPP) and Coal CFPP Optimization in the Java-Bali Electricity System.

Tabel Pendapatan Usaha (Rp juta)
Table of Revenues (Rp million)

Uraian Description	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Penjualan Tenaga Listrik Sales of Electricity	25.476.470	24.541.378	21.682.476	(11,65)	(2.858.902)
Pendapatan Usaha Lainnya Other Operating Revenues	4.957.706	4.966.756	5.519.724	11,13	552.968
Jumlah Pendapatan Usaha Total Revenues	**30.434.176**	**29.508.134**	**27.202.200**	**(7,81)**	**(2.305.934)**

Grafik Pendapatan Usaha (Rp juta)
Chart of Revenues (Rp million)

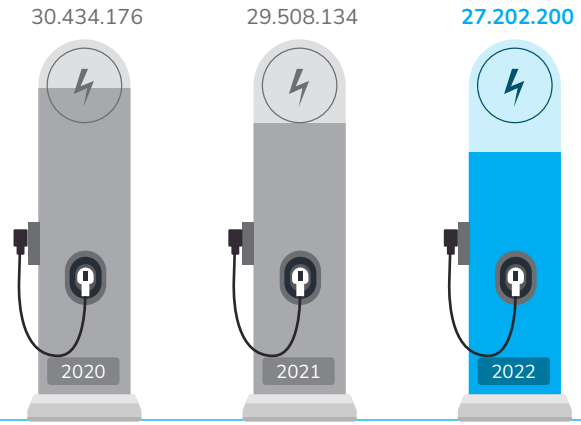

Penjualan Tenaga Listrik
Sales of Electricity

PLN NP memiliki sejumlah *Power Purchase Agreement* dengan PT PLN (Persero). Dalam perjanjian tersebut, PLN membayar pasokan tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan formula pembayaran. Pembayaran tersebut mencakup komponen biaya kapasitas, energi, operasional dan pemeliharaan yang tergantung pada tingkat pasokan energi serta variabel lain yang ditentukan dalam perjanjian.

PLN NP has a number of Power Purchase Agreements with PT PLN (Persero). Under these agreements, PLN pays for the supply of electricity provided by the Company at an amount determined based on a payment formula. The payment includes capacity, energy, operational and maintenance cost components that depend on the level of energy supply as well as other variables determined in the agreement.

Jumlah Penjualan Tenaga Listrik PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp21,68 triliun menurun 11,65% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp24,54 triliun. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan penyaluran energi listrik dari pembangkit Non - PLTU batubara (mayoritas pembangkit PLN NP) oleh Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban PLN seiring mulai dioperasikannya PLTU pada Sistem Kelistrikan Jawa Bali dan mulai pulihnya kembali pasokan batubara pada tahun 2022.

PLN NP's total Sales of Electricity in 2022 was Rp21.68 trillion, decreased by 11.65% compared to 2021 of Rp24.54 trillion. The decrease was caused by a decrease in the distribution of electrical energy from Non-coal CFPP (the majority of PLN NP power plants) by PLN Distribution and Load Dispatch Center in line with the start of the operation of CFPP in the Java-Bali Electricity System and the recovery of coal supply in 2022.

Grafik Penjualan Tenaga Listrik (Rp juta)
Chart of Sales of Electricity (Rp million)

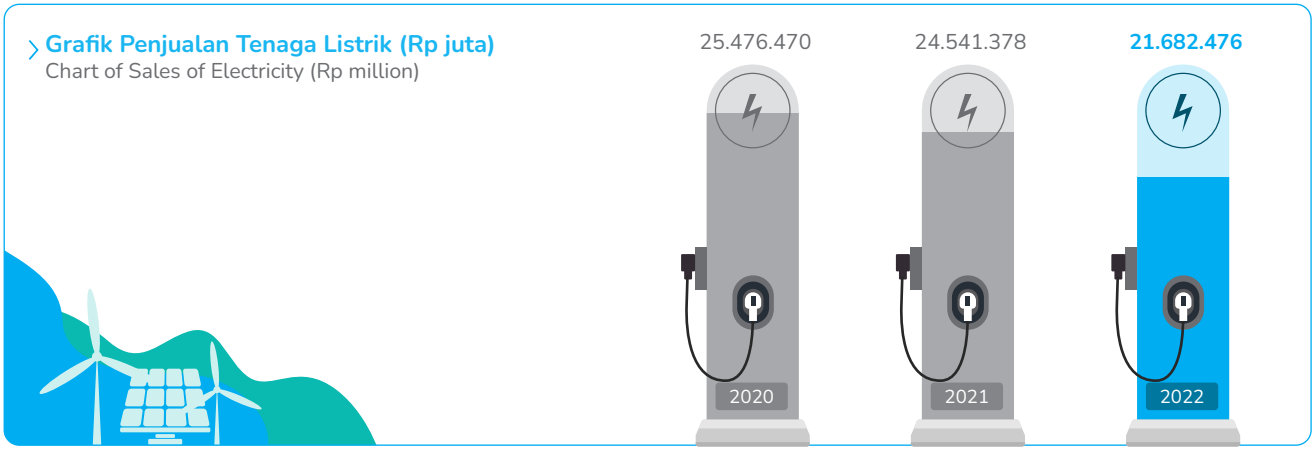

Pendapatan Usaha Lainnya
Other Operating Revenues

Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp5,52 triliun meningkat 11,13% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp4,97 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh bertambahnya pendapatan usaha lain-lain (EAM, *Stockiest*, IMAP dan Lainnya).

PLN NP's total Other Operating Revenues in 2022 was Rp5.52 trillion, increased by 11.13% compared to 2021 of Rp4.97 trillion. The increase was mainly influenced by the addition of other operating revenues (EAM, Stockiest, IMAP and Others).

Tabel Pendapatan Usaha Lainnya (Rp juta)
Table of Other Operating Revenues (Rp million)

Uraian Description	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Jasa Operasi dan Pemeliharaan Operation and Maintenance Services	4.093.834	4.057.567	4.099.714	1,04	42.147
Konstruksi Construction	702.929	727.224	845.101	16,21	117.877
Lainnya Others	160.943	181.965	574.909	215,94	392.944
Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya **Total Other Operating Revenues**	**4.957.706**	**4.966.756**	**5.519.724**	**11,13**	**552.968**

Grafik Pendapatan Usaha Lainnya (Rp juta)
Chart of Other Operating Revenues (Rp million)

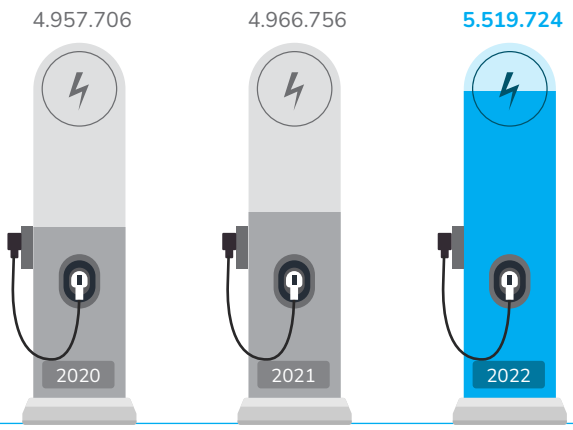

Beban Usaha
Operating Expenses

Beban Usaha menurun menjadi Rp22,57 triliun
Operating Expenses decreased to Rp22.57 trillion

Jumlah Beban Usaha PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp22,57 triliun menurun 10,08% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp25,10 triliun. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah beban bahan bakar, pelumas dan pembelian tenaga listrik seiring dengan penjualan tenaga listrik PLN NP (Pembangkit Non – PLTU Batubara) dan optimasi PLTU Batubara pada Sistem Kelistrikan Jawa Bali.

PLN NP's total Operating Expenses in 2022 was Rp22.57 trillion, decreased by 10.08% compared to 2021 of Rp25.10 trillion. The decrease was mainly influenced by the reduction in the amount of fuel, lubricants and purchased electricity expenses in line with the sale of PLN NP electricity (Non-Coal CFPP) and Coal CFPP optimization in the Java-Bali Electricity System.

Tabel Beban Usaha (Rp juta)
Table of Operating Expenses (Rp million)

Uraian Description	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Pembelian Tenaga Listrik Purchased Electricity	325.288	333.617	275.409	(17,45)	(58.208)
Bahan Bakar dan Pelumas Fuel and Lubricants	11.538.786	14.672.806	11.851.078	(19,23)	(2.821.728)
Pemeliharaan Maintenance	4.180.398	4.126.561	4.283.473	3,80	156.912
Penyusutan Depreciation	3.277.413	3.253.144	3.203.292	(1,53)	(49.852)
Kepegawaian Personnel	1.682.988	1.790.453	1.811.388	1,17	20.935
Lain-lain Others	903.679	924.562	1.146.787	24,04	222.225
Jumlah Beban Usaha Total Operating Expenses	**21.908.552**	**25.101.143**	**22.571.427**	**(10,08)**	**(2.529.716)**

Grafik Beban Usaha (Rp juta)
Chart of Operating Expenses (Rp million)

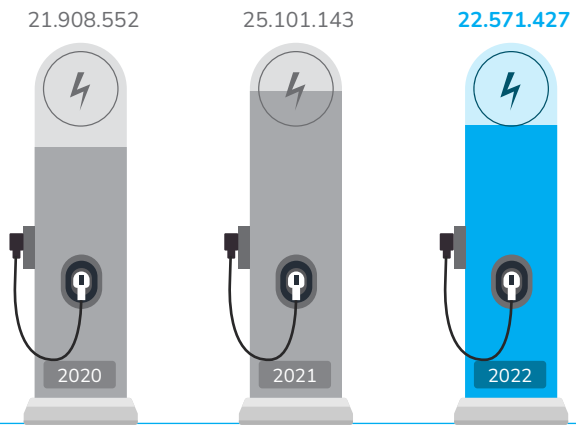

Beban Bahan Bakar dan Pelumas
Fuel and Lubricants

Jumlah Beban Bahan Bakar dan Pelumas PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp11,85 triliun menurun 19,23% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp14,67 triliun. Penurunan biaya bahan bakar di tahun 2022 salah satunya disebabkan dengan berkurangnya beban biaya bahan bakar minyak secara signifikan sebagai akibat penurunan penjualan tenaga listrik PLN NP (Pembangkit Non – PLTU Batubara) dan optimasi PLTU Batubara pada Sistem Kelistrikan Jawa Bali.

PLN NP's total Fuel and Lubricant Expenses in 2022 were Rp11.85 trillion, decreased by 19.23% compared to 2021 of Rp14.67 trillion. The decrease in fuel costs in 2022 was partly due to a significant reduction in fuel costs as a result of a decrease in PLN NP's electricity sales (Non-Coal CFPP) and Coal CFPP optimization in the Java-Bali Electricity System.

Tabel Beban Bakar dan Pelumas (Rp juta)
Table of Fuel and Lubricants (Rp million)

Uraian Description	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Bahan Bakar Minyak Fuel	**191.374**	**1.562.072**	**216.320**	**(86,15)**	**(1.345.752)**
Solar (HSD) Solar (High-Speed Diesel)	139.869	1.148.437	105.207	(90,84)	(1.043.230)
Residu (MFO) Residual (Marine Fuel Oil)	51.505	413.635	111.113	(73,14)	(302.522)
Bahan Bakar Non Minyak Non-Oil Fuels	**11.322.571**	**13.085.947**	**11.602.732**	**(11,33)**	**(1.483.215)**
Gas Alam Natural Gas	9.240.645	10.328.556	8.829.391	(14,51)	(1.499.165)
Batubara Coal	1.778.071	2.409.639	2.326.506	(3,45)	(83.133)
Air Water	249.469	295.026	319.351	8,25	24.325
Biomassa Biomass	-	-	62.214	100,00	62.214
Pajak Air Permukaan Surface Water Tax	19.147	17.203	26.374	53,31	9.171
Bahan Kimia dan Bahan Lainnya Chemicals and Other Materials	35.239	35.523	38.896	9,50	3.373
Minyak Pelumas Lubricants	24.841	24.787	32.026	29,20	7.239
Jumlah Beban Bakar dan Pelumas **Total Fuel and Lubricants**	**11.538.786**	**14.672.806**	**11.851.078**	**(19,23)**	**(2.821.728)**

Grafik Beban Bakar dan Pelumas (Rp juta)
Chart of Fuel and Lubricants (Rp million)

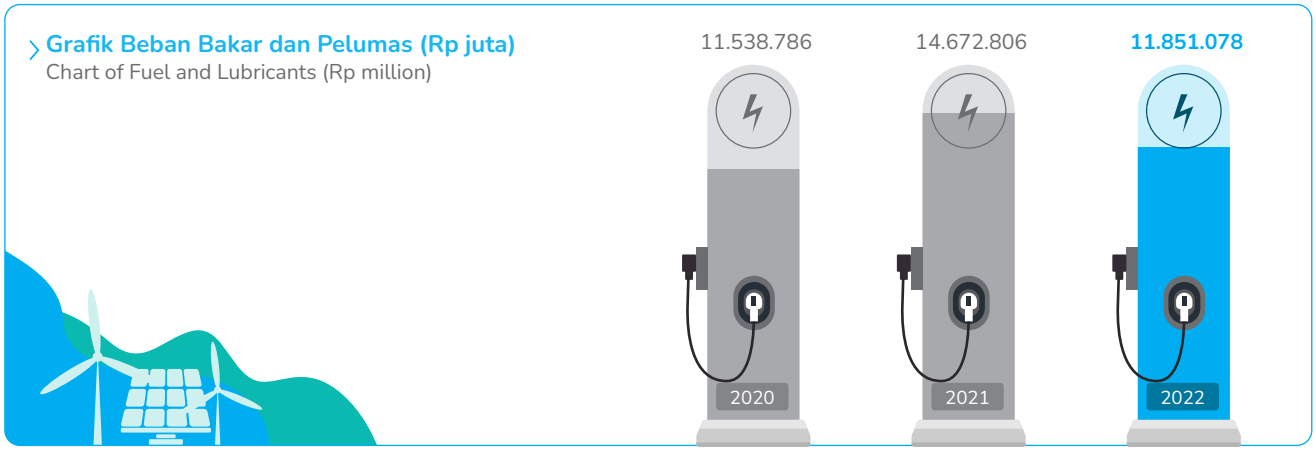

Beban Pemeliharaan
Maintenance Expenses

Jumlah Beban Pemeliharaan PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp4,28 triliun meningkat 3,80% dibandingkan tahun 2021 adalah sebesar Rp4,12 triliun. Peningkatan ini disebabkan oleh percepatan/penambahan *scope* pekerjaan OM & penambahan proyek-proyek investasi, serta *reschedule* kedatangan *sparepart* di PLNSC.

PLN NP's total Maintenance Expenses in 2022 were Rp4.28 trillion, increased by 3.80% compared to 2021 of Rp4.12 trillion. This increase was due to the acceleration/addition of OM work scope & addition of investment projects, as well as rescheduling the arrival of spare parts at PLNSC.

Tabel Beban Pemeliharaan (Rp juta)
Table of Maintenance Expenses (Rp million)

Uraian Description	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Pemakaian Material Pemeliharaan Maintenance Materials Used	1.460.754	1.386.272	1.368.361	(1,29)	(17.911)
Jasa Borongan Contracted Services	2.719.644	2.740.289	2.915.112	6,38	174.823
Jumlah Beban Pemeliharaan Total Maintenance Expenses	**4.180.398**	**4.126.561**	**4.283.473**	**3,80**	**156.912**

Grafik Beban Pemeliharaan (Rp juta)
Chart of Maintenance Expenses (Rp million)

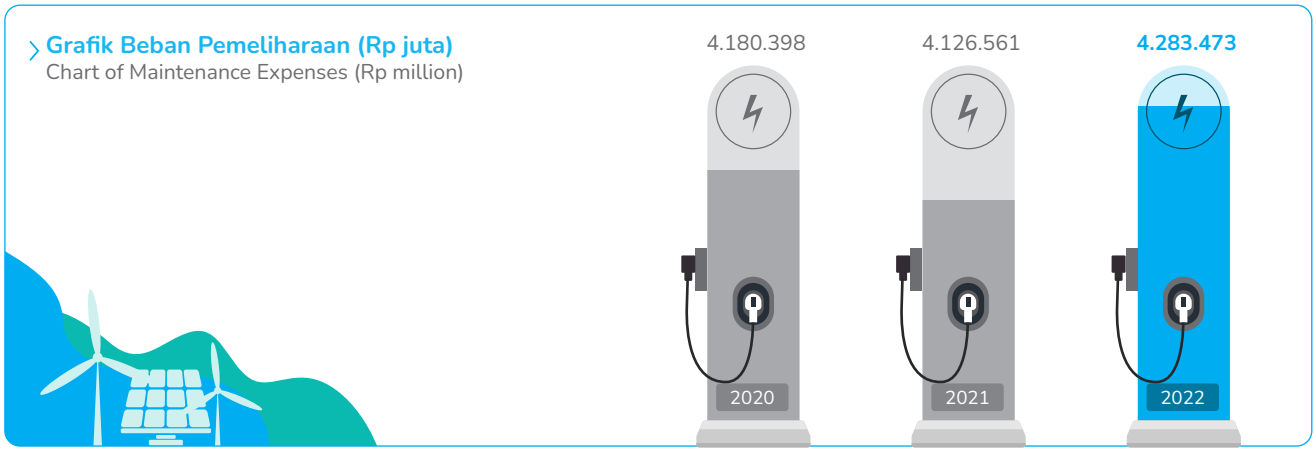

Beban Penyusutan
Depreciation Expenses

Jumlah Beban Penyusutan PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp3,20 triliun menurun 1,53% dibandingkan tahun 2021 adalah sebesar Rp3,25 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh beberapa aset yang telah memiliki nilai buku 0 di tahun 2022.

PLN NP's total Depreciation Expenses in 2022 were Rp3.20 trillion, decreased by 1.53% compared to 2021 of Rp3.25 trillion. The decrease was mainly due to several assets that had 0 book value in 2022.

Beban Kepegawaian
Personnel Expenses

Jumlah Beban Kepegawaian PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp1,81 triliun meningkat 1,17% dibandingkan tahun 2021 adalah sebesar Rp1,79 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah tunjangan kesehatan, jumlah gaji dan tunjangan, biaya pendidikan dan pelatihan pegawai.

PLN NP's total Personnel Expenses in 2022 were Rp1.81 trillion, increased by 1.17% compared to 2021 of Rp1.79 trillion. The increase was mainly influenced by the increase in the number of medical allowances, total salaries and allowances, education and training costs for employees.

Tabel Beban Kepegawaian (Rp juta)
Table of Personnel Expenses (Rp million)

Uraian Description	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Gaji dan Tunjangan Salaries and Allowances	762.651	812.955	894.199	9,99	81.244
Imbalan Kerja Employee Benefits	374.959	353.705	271.200	(23,33)	(82.505)
Bonus dan Insentif Karyawan Employee Bonus and Incentives	396.936	448.048	415.144	(7,34)	(32.904)
Pendidikan dan Pelatihan Education and Training	43.172	54.275	77.380	42,57	23.105
Tunjangan Kesehatan Medical Allowances	76.570	90.367	129.439	43,24	39.072
Lain-lain Others	28.700	31.103	24.026	(22,75)	(7.077)
Jumlah Beban Kepegawaian Total Personnel Expenses	**1.682.988**	**1.790.453**	**1.811.388**	**1,17**	**20.935**

Grafik Beban Kepegawaian (Rp juta)
Chart of Personnel Expenses (Rp million)

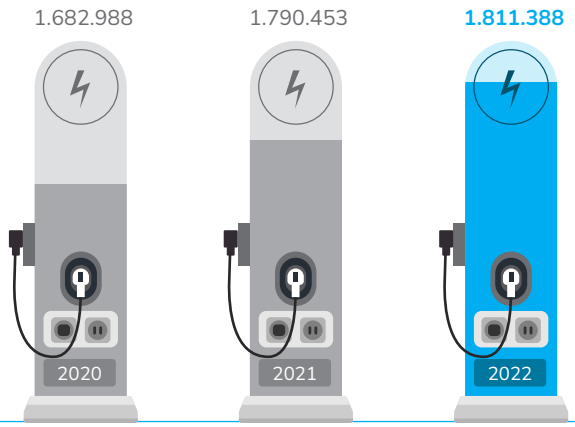

Beban Usaha Lain-lain
Other Operating Expenses

Jumlah Beban Lain-Lain PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp1,15 triliun meningkat 24,04% dibandingkan tahun 2021 adalah sebesar Rp924,56 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah biaya perjalanan dinas, honorarium, serta biaya konstruksi.

PLN NP's total Other Expenses in 2022 were Rp1.15 trillion, increased by 24.04% compared to 2021 of Rp924.56 billion. The increase was mainly influenced by the increase in the amount of business traveling expenses, honorarium, and construction costs.

Tabel Beban Lain-lain (Rp juta)
Table of Other Expenses (Rp million)

Uraian Description	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Beban Konstruksi Construction Cost	550.108	596.759	732.507	22,75	135.748
Asuransi Insurance	73.370	54.803	53.824	(1,79)	(979)
Honorarium	78.095	69.125	106.303	53,78	37.178
Perjalanan Dinas Business Travelling	16.856	15.246	40.385	164,89	25.139
Konsumsi Meals Consumption	16.216	19.007	20.907	10,00	1.900
Pos dan Telekomunikasi Postage and Telecommunications	11.686	12.531	11.840	(5,51)	(691)
Jasa Profesional Professional Fees	18.504	17.261	17.149	(0,65)	(112)
Pajak dan Retribusi Lainnya Taxes and Other Retribution	37.953	28.130	31.513	12,03	3.383
Pajak Final Final Tax	23.342	25.459	25.871	1,62	412
Sewa Bangunan dan Tanah Building and Land Rental	13.394	24.171	23.557	(2,54)	(614)
Listrik, Air, dan Gas Electricity, Water, and Gas	12.089	11.479	11.671	1,67	192
Lain-lain Others	52.066	50.591	71.260	40,86	20.669
Jumlah Beban Lain-lain Total Other Expenses	**903.679**	**924.562**	**1.146.787**	**24,04**	**222.225**

Grafik Beban Lain-lain (Rp juta)
Chart of Other Expenses (Rp million)

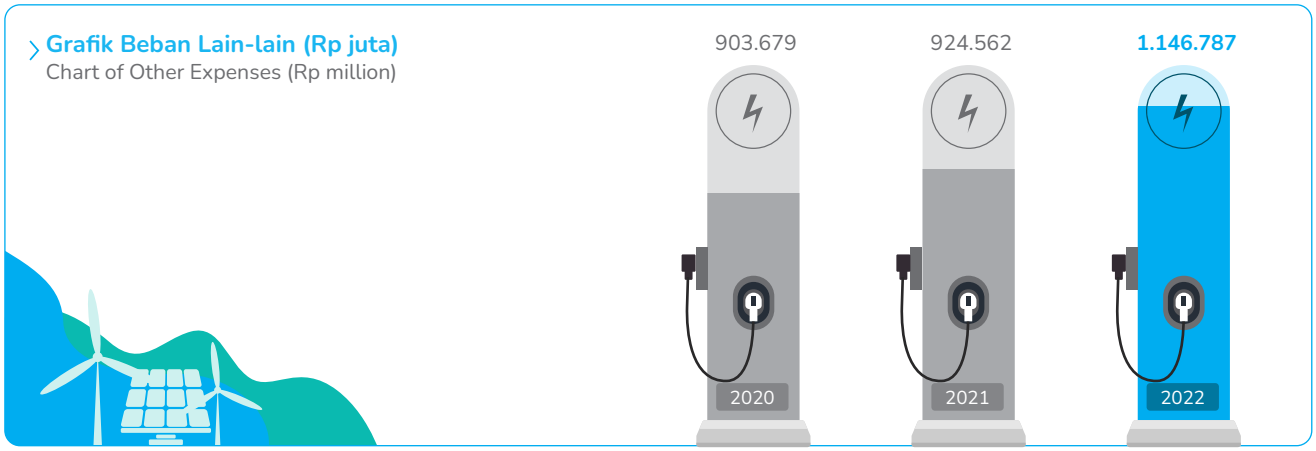

Laba Usaha
Operating Income

Jumlah Laba Usaha PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp4,63 triliun meningkat 5,08% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp4,41 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan operasi pembangkit non-batubara (berbahan bakar minyak) dan peningkatan operasi pembangkit batubara dimana harga bahan bakar minyak lebih tinggi dibandingkan dengan harga batubara.

PLN NP's total Operating Income in 2022 was Rp4.63 trillion, increased by 5.08% compared to 2021 of Rp4.41 trillion. The increase was mainly due to a decrease in non-coal (oil-fired) power plant operations and an increase in coal power plant operations where fuel oil prices were higher than coal prices.

Pos Keuangan dan Lain-lain
Financial Items and Others

Jumlah Pos Keuangan dan Lain-lain Bersih PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp3,38 triliun meningkat 21,21% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp2,78 trilliun. Peningkatan tersebut terutama dikarenakan di tahun 2022 terdapat penghasilan lain-lain bersih.

PLN NP's total Net Financial Items and Others in 2022 were Rp3.38 trillion, increased by 21.21% compared to 2021 of Rp2.78 trillion. The increase was mainly due to net other income in 2022.

Tabel Pos Keuangan dan Lain-lain Bersih (Rp juta)
Table of Net Financial Items and Others (Rp million)

Uraian Description	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Penghasilan Keuangan Finance Income	126.658	186.603	182.327	(2,29)	(4.276)
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing – bersih Gain (loss) on foreign exchange – net	(8.913)	3.924	(4.205)	(207,16)	(8.129)
Bagian laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama Share in net profit of associates and joint ventures	1.952.507	2.868.311	2.854.031	(0,50)	(14.280)
Penghasilan/(Beban) Lain-lain Bersih Net Other Income/(Expenses)	(355.769)	(273.789)	343.657	(225,52)	617.446
Jumlah Pos Keuangan dan Lain-lain Bersih Total Net Financial Items and Others	**1.714.483**	**2.785.049**	**3.375.810**	**21,21**	**590.761**

Grafik Pos Keuangan dan Lain-lain Bersih (Rp juta)
Chart of Net Financial Items and Others (Rp million)

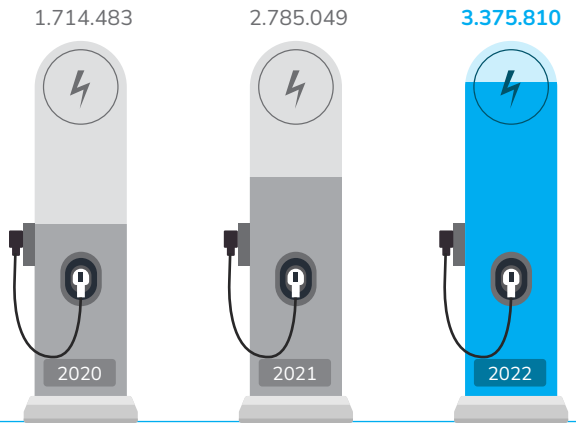

Beban Pajak
Tax Expense

Jumlah Beban Pajak PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp1,42 triliun meningkat 3,73% dibandingkan tahun 2021 adalah sebesar Rp1,37 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh bertambahnya pajak penghasilan di tahun 2022.

PLN NP's total Tax Expense in 2022 was Rp1.42 trillion, increased by 3.73% compared to 2021 of Rp1.37 trillion. The increase was mainly influenced by the increase in income tax in 2022.

Tabel Beban Pajak (Rp juta)
Table of Tax Expense (Rp million)

Uraian Description	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Beban Pajak Kini Current Tax Expense	61.211	71.336	121.091	69,75	49.755
Beban Pajak Tangguhan Deferred Tax Expense	2.475.084	1.300.516	1.301.946	0,11	1.430
Jumlah Beban Pajak Total Tax Expense	**2.536.295**	**1.371.852**	**1.423.037**	**3,73**	**51.185**

Grafik Beban Pajak (Rp juta)
Chart of Tax Expense (Rp million)

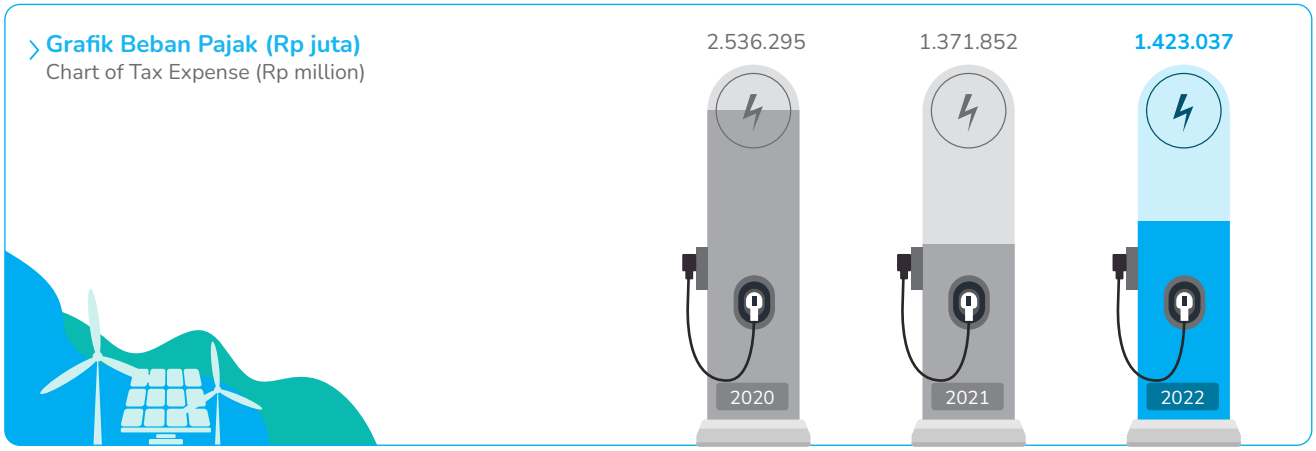

Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan
Comprehensive Income for the Year

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan tahun 2022 adalah sebesar Rp446 miliar meningkat 615,14% dibandingkan tahun 2021 sebesar (Rp2,30) triliun. Peningkatan penghasilan komprehensif lain terutama dipengaruhi oleh revaluasi aset tetap yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 dan adanya peningkatan penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan Ventura Bersama.

Total Comprehensive Income for the Year in 2022 was Rp446 billion, increased by 615.14% compared to 2021 of (Rp2.30) trillion. The increase in other comprehensive income was mainly influenced by the revaluation of fixed assets which was carried out in 2021 and an increase in other comprehensive income from associates and Joint Ventures.

Tabel Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain Tahun Berjalan (Rp juta)
Table of Other Comprehensive Income (Expenses) for the Year (Rp million)

Uraian Description	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Pos-pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi: **Items that may be Reclassified Subsequently to Profit or Loss:**					
Bagian Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain dari Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Share in Other Comprehensive Income (Expenses) from Associates and Joint Ventures	191.041	(4.868)	969.996	100,50	974.864
Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba rugi: **Items that will not be Reclassified to Profit or Loss:**					
Revaluasi Aset Tetap Revaluation of Property, Plant and Equipment	(6.916)	(3.154.021)	(7.054)	(44.612,52)	3.146.967
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti Remeasurement of Defined Benefit Plans	234.360	192.415	(664.508)	(445,35)	(856.923)
Manfaat Pajak Penghasilan Terkait Related Income Tax Benefits	(81.555)	665.085	148.312	(77,70)	(516.773)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan **Total Comprehensive Income for the Year**	**336.930**	**(2.301.389)**	**446.746**	**615,14**	**2.748.135**

Laba Per Saham Dasar
Basic Earnings per Share

Perusahaan memiliki jumlah saham sebanyak 6.000 juta saham dimana hampir seluruhnya dimiliki oleh PT PLN (Persero). Perhitungan jumlah laba per saham dasar atau biasa disebut *Earning Per Share* atau Laba per saham merupakan perhitungan yang dilakukan untuk menemukan pendapatan yang diperoleh perusahaan sesuai dengan jumlah saham beredar yang dimiliki. Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi dilusi saham, sehingga laba per saham dasar sama dengan laba per saham dilusian.

The Company has a total of 6,000 million shares which are almost entirely owned by PT PLN (Persero). The calculation of total basic earnings per share or commonly called Earning Per Share is a calculation conducted to find the revenue earned by the Company in accordance with the number of outstanding shares owned. The Company does not have the potential effect of stock dilution, so that basic earnings per share is the same as diluted earnings per share.

Jumlah Laba Per Saham PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp1.097 meningkat 13,09% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp970. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah laba tahun berjalan di tahun 2022.

PLN NP's total Earnings Per Share in 2022 was Rp1,097, increased by 13.09% compared to 2021 of Rp970. The increase was mainly influenced by the increase in the amount of profit for the year in 2022.

Analisis Posisi Keuangan
Financial Position Analysis

Jumlah aset PLN NP pada tahun 2022 adalah sebesar Rp174,92 triliun, jumlah liabilitas sebesar Rp12,57 triliun, dan jumlah ekuitas sebesar Rp162,36 triliun.

PLN NP's total assets in 2022 were Rp174.92 trillion, total liabilities were Rp12.57 trillion, and total equity was Rp162.36 trillion.

Tabel Posisi Keuangan (Rp juta)
Table of Financial Position (Rp million)

Uraian Description	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Aset Assets	**175.561.020**	**172.163.828**	**174.922.929**	**1,60**	**2.759.101**
Aset Lancar Current Assets	31.686.542	32.460.225	33.394.118	2,88	933.893
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	143.874.478	139.703.603	141.528.811	1,31	1.825.208
Liabilitas Liabilities	**10.246.069**	**10.994.563**	**12.567.841**	**14,31**	**1.573.278**
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	4.954.830	5.017.427	4.448.745	(11,33)	(568.682)
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	5.291.239	5.977.136	8.119.096	35,84	2.141.960
Ekuitas Equity	**165.314.952**	**161.169.265**	**162.355.088**	**0,74**	**1.185.823**

Aset
Assets

Jumlah Aset meningkat menjadi Rp174,92 triliun
Total assets increased to Rp174.92 trillion

Pada tahun 2022 komponen aset terbesar perusahaan masih didominasi oleh aset tidak lancar. Jumlah Aset PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp174,92 triliun meningkat sebesar 1,60% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp172,16 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah Investasi pada Entitas Asosiasi/Ventura Bersama dan jumlah Kas dan Setara Kas sebagai akibat dari proses Penagihan (*Collection Period*) yang lebih baik.

In 2022, the Company's largest asset component is still dominated by non-current assets. PLN NP's total Assets in 2022 were Rp174.92 trillion, increased by 1.60% compared to 2021 of Rp172.16 trillion. The increase was mainly influenced by the increase in the amount of Investments in Associates/Joint Ventures and the amount of Cash and Cash Equivalents as a result of a better Collection Period process.

Tabel Aset (Rp juta)
Table of Assets (Rp million)

Uraian Description	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Aset Lancar Current Assets	31.686.542	32.460.225	33.394.118	2,88	933.893
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	143.874.478	139.703.603	141.528.811	1,31	1.825.208
Jumlah Aset Total Assets	**175.561.020**	**172.163.828**	**174.922.929**	**1,60**	**2.759.101**

Grafik Aset (Rp juta)
Chart of Assets (Rp million)

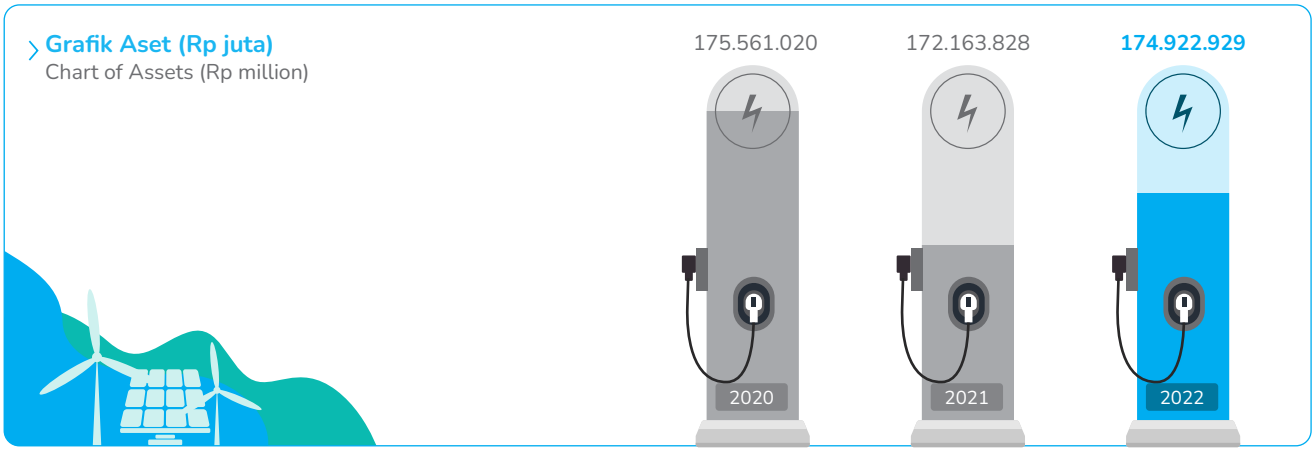

Aset Lancar
Current Assets

Jumlah Aset Lancar tahun 2022 adalah sebesar Rp33,39 triliun meningkat 2,88% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp32,46 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan jumlah Kas dan Setara Kas sebagai akibat dari proses Penagihan (*Collection Period*) yang lebih baik.

Total Current Assets in 2022 were Rp33.39 trillion, increased by 2.88% compared to 2021 of Rp32.46 trillion. The increase was mainly influenced by an increase in total Cash and Cash Equivalents as a result of a better Collection Period.

Tabel Aset Lancar (Rp juta)
Table of Current Assets (Rp million)

Uraian Description	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	3.511.113	7.343.968	8.958.158	21,98	1.614.190
Deposito Berjangka Time Deposits	325.046	290.103	491.299	69,35	201.196
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya Restricted cash in banks and time deposits	-	206.279	301.420	46,12	95.141
Piutang Usaha Trade Receivables	25.296.923	21.954.378	20.550.254	(6,40)	(1.404.124)
Piutang Lain-lain Other Receivables	182.172	187.199	317.919	69,83	130.720
Piutang kepada ventura bersama bagian lancar Receivables from joint ventures – current portion	-	124.055	67.785	(45,36)	(56.270)
Persediaan Inventories	1.546.239	1.463.848	1.904.262	30,09	440.414
Pajak Dibayar Dimuka Prepaid Taxes	733.167	755.157	701.465	(7,11)	(53.692)
Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka Prepaid Expenses and Advances	91.882	135.238	101.556	(24,91)	(33.682)
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	**31.686.542**	**32.460.225**	**33.394.118**	**2,88**	**933.893**

Grafik Aset Lancar (Rp juta)
Chart of Current Assets (Rp million)

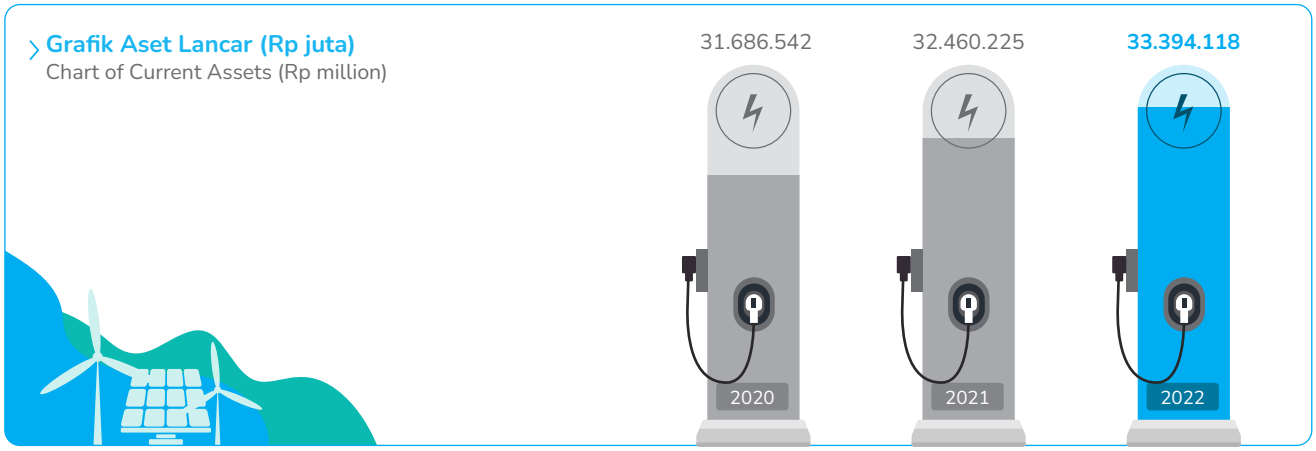

Kas dan Setara Kas
Cash and Cash Equivalents

Jumlah Kas dan Setara Kas tahun 2022 adalah sebesar Rp8,96 triliun meningkat 21,98% dibandingkan tahun 2021 adalah sebesar Rp7,34 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh proses Penagihan (*Collection Period*) yang lebih baik.

Total Cash and Cash Equivalents in 2022 were Rp8.96 trillion, increased by 21.98% compared to 2021 of Rp7.34 trillion. The increase was mainly influenced by a better Collection Period process.

Tabel Kas dan Setara Kas (Rp juta)
Table of Cash and Cash Equivalents (Rp million)

Uraian Description	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Kas Cash on hand	2.673	1.804	1.478	(18,07)	(326)
Bank Cash in banks	3.404.263	6.399.519	8.375.353	30,87	1.975.834
Pihak Berelasi Related Parties	3.104.254	6.261.488	8.318.410	32,85	2.056.922
Pihak Ketiga Third Parties	300.009	138.031	56.943	(58,75)	(81.088)
Setara Kas - Deposito Berjangka Cash Equivalents – Time Deposits	104.177	942.645	581.327	(38,33)	(361.318)
Pihak Berelasi Related Parties	94.105	942.533	581.215	(38,33)	(361.318)
Pihak Ketiga Third Parties	10.112	112	112	-	-
Jumlah Kas dan Setara Kas Total Cash and Cash Equivalents	**3.511.113**	**7.343.968**	**8.958.158**	**21,98**	**1.614.190**

Grafik Kas dan Setara Kas (Rp juta)
Chart of Cash and Cash Equivalents (Rp million)

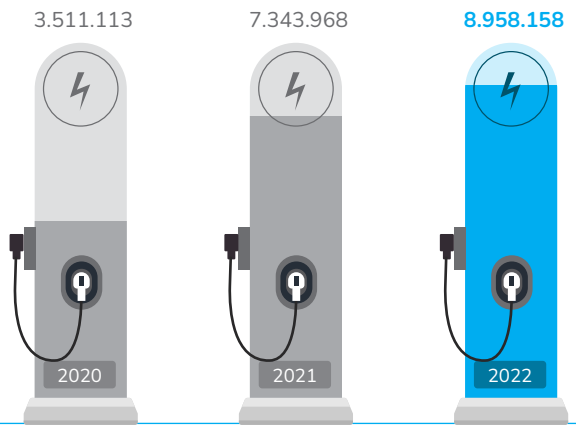

Deposito Berjangka
Time Deposits

Jumlah Deposito Berjangka tahun 2022 adalah sebesar Rp491,30 miliar meningkat 69,35% dibandingkan tahun 2021 adalah sebesar Rp290,10 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penambahan investasi pada deposito berjangka pada tahun 2022.

Total Time Deposits in 2022 were Rp491.30 billion, increased by 69.35% compared to 2021 of Rp290.10 billion. The increase was mainly due to additional investment in time deposits in 2022.

Grafik Deposito Berjangka (Rp juta)
Chart of Time Deposits (Rp million)

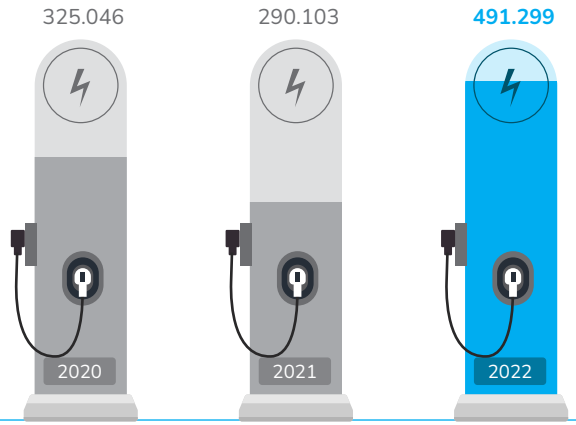

Rekening Bank dan Deposito Berjangka Dibatasi Penggunaannya
Restricted Cash in Banks and Time Deposits

Pada tahun 2022 saldo atas jumlah rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya dalam jangka pendek sebesar Rp301,42 miliar meningkat 46,12% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp206,30 miliar. Hal ini dipengaruhi karena pada tanggal 22 Desember 2022, PJBI dan PJBIC memberikan jaminan berupa *Standby Letter of Credit* ("SBLC") kepada Bank Mandiri sebesar US$7.200.000 atau setara dengan Rp112.262 Juta untuk proyek PLTS Cirata di Kabupaten Purwakarta yang dilakukan oleh PT Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energy (PMSE).

In 2022, the balance of total restricted cash in banks and time deposits in short-term was Rp301.42 billion, increased by 46.12% compared to 2021 of Rp206.30 billion. This was affected due to on December 22, 2022, PJBI and PJBIC provided a guarantee in the form of a Standby Letter of Credit ("SBLC") to Bank Mandiri amounted to US$7,200,000 or equivalent to Rp112,262 Million for the Cirata SPP project in Purwakarta Regency conducted by PT Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energy (PMSE).

Piutang Usaha
Trade Receivables

Jumlah Piutang Usaha PLN NP pada tahun 2022 adalah sebesar Rp20,55 triliun menurun 6,40% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp21,95 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh proses Penagihan (*Collection Period*) yang lebih baik.

PLN NP's total Trade Receivables in 2022 were Rp20.55 trillion, decreased by 6.40% compared to 2021 of Rp21.95 trillion. The decrease was mainly due to a better Collection Period process.

Tabel Piutang Usaha (Rp juta)
Table of Trade Receivables (Rp million)

Uraian Description	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Pihak Berelasi Related Parties	25.288.025	21.938.127	20.475.373	(6,67)	(1.462.754)
Pihak Ketiga Third Parties	32.595	39.948	131.219	228,47	91.271
Cadangan kerugian kredit ekspektasian Allowance for expected credit losses	(23.697)	(23.697)	(56.338)	137,74	(32.641)
Jumlah Piutang Usaha Total Trade Receivables	**25.296.923**	**21.954.378**	**20.550.254**	**(6,40)**	**(1.404.124)**

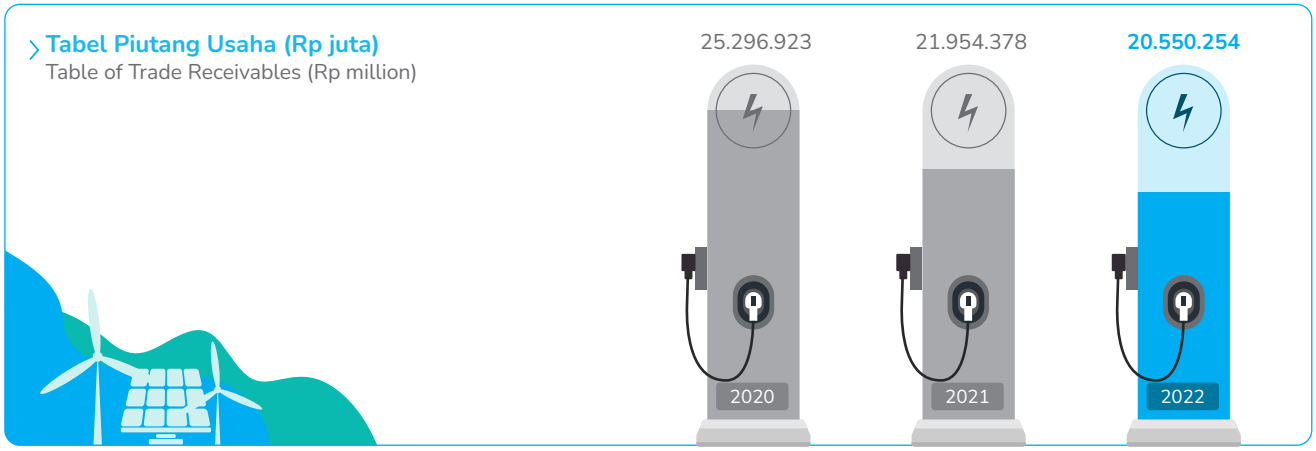

Piutang Lain-lain
Other Receivables

Jumlah Piutang Lain-lain PLN NP pada tahun 2022 adalah sebesar Rp317,92 miliar meningkat 23,92% dibandingkan tahun 2021 adalah sebesar Rp311,25 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh bertambahnya piutang bunga atas Pinjaman Anak Perusahaan Kepada PLN NP.

PLN NP's total Other Receivables in 2022 were Rp317.92 billion, increased by 23.92% compared to 2021 of Rp311.25 billion. The increase was mainly influenced by the increase in interest receivable on Subsidiary Loans to PLN NP.

Piutang kepada Ventura Bersama
Receivables from Joint Ventures

Jumlah Piutang kepada Ventura Bersama PNP tahun 2022 adalah sebesar Rp756,07 miliar meningkat 9,26% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp692,00 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan Piutang Pinjaman Perusahaan Asosiasi PJBI pada tahun 2022.

PLN NP's total Receivables from Joint Ventures in 2022 were Rp756.07 billion, increased by 9.26% compared to 2021 of Rp692.00 billion. The increase was mainly due to the addition of Loan Receivables from PJBI Associated Companies in 2022.

Persediaan
Inventories

Jumlah Persediaan tahun 2022 adalah sebesar Rp1,90 triliun meningkat 30,09% dibandingkan tahun 2021 adalah sebesar Rp1,46 triliun. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh penyiapan stok bahan bakar minyak sebanyak 10 hari operasi untuk mengantisipasi kelangkaan batubara.

Total Inventories in 2022 were Rp1.90 trillion, increased by 30.09% compared to 2021 of Rp1.46 trillion. The increase was influenced by the preparation of fuel stock of 10 days of operation to anticipate the scarcity of coal.

Tabel Persediaan (Rp juta)
Table of Inventories (Rp million)

Uraian Description	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Batu Bara, Bahan Bakar dan Pelumas Coal, Fuel and Lubricants	1.139.853	1.135.328	1.527.026	34,50	391.698
Material Pemeliharaan Maintenance Materials	423.428	347.548	397.858	14,48	50.310
Sub Jumlah Sub Total	**1.563.281**	**1.482.876**	**1.924.884**	**29,81**	**442.008**
Penyisihan Penurunan Nilai Provision for Impairment Losses	(17.042)	(19.028)	(20.622)	8,38	(1.594)
Jumlah Persediaan Total Inventories	**1.546.239**	**1.463.848**	**1.904.262**	**30,09**	**440.414**

Tabel Persediaan (Rp juta)
Table of Inventories (Rp million)

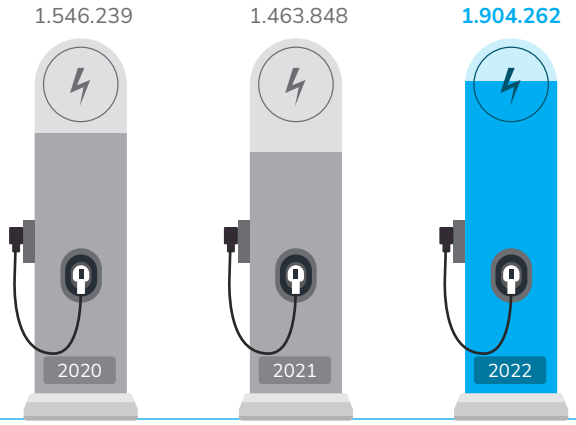

Pajak Dibayar Dimuka
Prepaid Taxes

Jumlah Pajak Dibayar Dimuka Jangka Pendek PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp701,46 miliar menurun 7,11% dibandingkan tahun 2021 adalah sebesar Rp755,16 miliar dan Pajak Dibayar Dimuka Jangka Panjang PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp189,48 miliar menurun 74,81% dibandingkan tahun 2021 adalah sebesar Rp752,25 miliar. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh berkurangnya pembayaran dimuka atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

PLN NP's total Current Prepaid Tax in 2022 was Rp701.46 billion, decreased by 7.11% compared to 2021 of Rp755.16 billion and PLN NP's Non-Current Prepaid Tax in 2022 was Rp189.48 billion, decreased by 74.81% compared to 2021 of Rp752.25 billion. The decrease was mainly influenced by the reduction in prepayment of Tax Assessment Letter for Underpayment.

Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka
Prepaid Expenses and Advances

Jumlah Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka tahun 2022 adalah sebesar Rp101,55 miliar menurun 24,91% dibandingkan tahun 2021 adalah sebesar Rp135,24 miliar. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh berkurangnya penambahan kontrak sewa baru di tahun 2022.

Total Prepaid Expenses and Advances in 2022 were Rp101.55 billion, decreased by 24.91% compared to 2021 of Rp135.24 billion. The decrease was mainly due to the reduction in new lease contract additions in 2022.

Aset Tidak Lancar
Non-Current Assets

Jumlah Aset Tidak Lancar PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp141,53 triliun meningkat 1,31% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp139,70 triliun. Peningkatan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh adanya penambahan investasi pada entitas asosiasi/ventura bersama PLN NP dan PJBI (S2P dan SGPJB).

PLN NP's total Non-Current Assets in 2022 were Rp141.53 trillion, increased by 1.31% compared to 2021 of Rp139.70 trillion. The increase was largely influenced by the addition of investments in associates/joint ventures of PLN NP and PJBI (S2P and SGPJB).

Tabel Aset Tidak Lancar (Rp juta)
Table of Non-Current Assets (Rp million)

Uraian Description	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Aset Tetap Property, Plant, and Equipment	129.523.845	124.151.268	122.531.260	(1,30)	(1.620.008)
Properti Investasi Investment Properties	1.540.756	1.460.599	1.577.154	7,98	116.555
Investasi pada Entitas Asosiasi/Ventura Bersama Investment in Associates/Joint Ventures	9.744.556	12.390.846	16.114.319	30,05	3.723.473
Rekening Bank dan Deposito Berjangka Dibatasi Penggunaannya Restricted Cash in Banks and Time Deposits	61.158	-	37.231	-	37.231
Aset Pajak Tangguhan - Bersih Deferred Tax Assets – Net	57.509	47.778	74.566	56,07	26.788

Uraian Description	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Piutang kepada Ventura Bersama bagian tidak lancar Receivables from Joint Ventures – non-current portion	797.169	692.002	756.068	9,26	64.066
Piutang Lain-lain bagian tidak lancar Other Receivables – non-current portion	45.467	44.028	47.789	8,54	3.761
Pajak dibayar di muka bagian tidak lancar Prepaid Taxes – non-current portion	1.231.545	752.248	189.478	(74,81)	(562.770)
Aset Tidak Lancar Lain Other Non-Current Assets	872.473	164.834	200.946	21,91	36.112
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	**143.874.478**	**139.703.603**	**141.528.811**	**1,31**	**1.825.208**

Grafik Aset Tidak Lancar (Rp juta)
Chart of Non-Current Assets (Rp million)

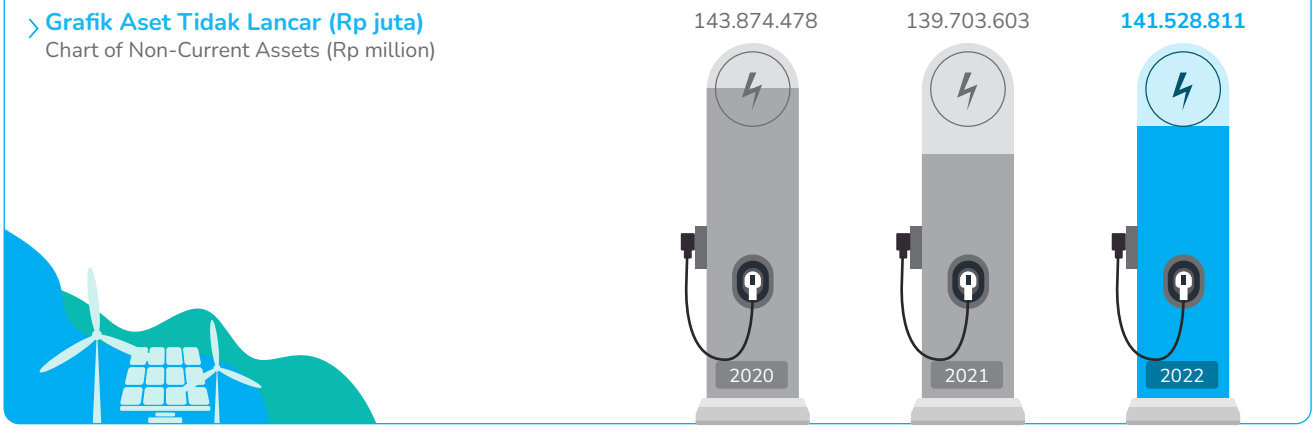

Aset Tetap
Property, Plant, and Equipment

Jumlah Aset Tetap PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp122,53 triliun menurun 1,30% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp124,15 triliun. Penurunan tersebut disebabkan oleh beberapa aset yang sudah mencapai umur ekonomisnya.

PLN NP's total Property, Plant and Equipment in 2022 was Rp122.53 trillion, decreased by 1.30% compared to 2021 of Rp124.15 trillion. The decrease was due to several assets that have reached their economic life.

Tabel Aset Tetap (Rp juta)

Table of Property, Plant, and Equipment (Rp million)

Uraian Description	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Tanah dan Hak Atas Tanah Land and Land Rights	17.293.303	17.050.809	17.050.809	-	-
Bangunan Umum, Waduk, dan Prasarana Buildings, Reservoirs, and Infrastructure	7.747.954	7.899.199	7.811.002	(1,12)	(88.197)
Instalasi dan Mesin Pembangkit Installation and Power Plants	93.192.744	87.981.243	88.599.330	0,70	618.087
Perlengkapan Transmisi dan Distribusi Transmissions and Distribution Equipment	4.733.297	4.287.673	4.179.197	(2,53)	(108.476)
Perlengkapan Pengolahan Data dan Telekomunikasi Telecommunications and Data Processing Equipment	7.454	5.908	4.845	(17,99)	(1.063)
Perlengkapan Umum General Equipment	255.937	296.976	282.492	(4,88)	(14.484)
Kendaraan Bermotor Motor Vehicles	53.321	42.750	30.938	(27,63)	(11.812)
Material Cadangan Utama Major Spare Parts	21.398	20.789	33.298	60,17	12.509
Aset Hak Guna Right-of-Use Assets	65.333	55.382	46.598	(15,86)	(8.784)
Aset Dalam Pembangunan Assets in Development	4.996.372	5.377.245	3.610.959	(32,85)	(1.766.286)
Aset Tidak Digunakan dalam Operasi Assets not Used in Operations	1.162.041	1.143.429	891.927	(22,00)	(251.502)
Penyisihan Penurunan Nilai Provision for Impairment	(5.309)	(10.135)	(10.135)	-	-
Jumlah Aset Tetap Total Property, Plant, and Equipment	**129.523.845**	**124.151.268**	**122.531.260**	**(1,30)**	**(1.620.008)**

Grafik Aset Tetap (Rp juta)

Chart of Property, Plant, and Equipment (Rp million)

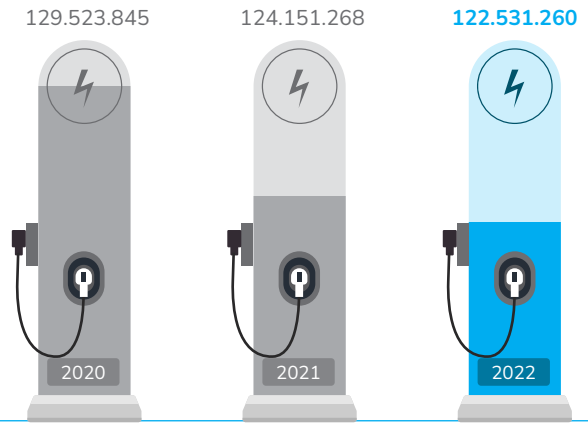

Properti Investasi
Investment Properties

Properti investasi merupakan tanah milik Perusahaan yang terletak di Paiton - Jawa Timur, Bekasi - Jawa Barat, Pluit - Jakarta Utara, Cipeundeuy - Bandung Barat dan Asahan - Sumatera Utara dengan hak legal berupa HGB (Hak Guna Bangunan) berjangka waktu dari 32 sampai 40 tahun, jatuh tempo pada 2032, yang disewakan kepada PT PLN (Persero), PT Paiton Energy, PT Jawa Power, PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero), PT Anugerah Mega Energi, PT Pertamina Hulu Energi ONWJ, PT Nusantara Regas, PT Cirata Karya Lestari, BUT Sinohydro Corporation Limited dan PT Bajradaya Sentranusa.

Investment property is land owned by the Company located in Paiton - East Java, Bekasi - West Java, Pluit - North Jakarta, Cipeundeuy - West Bandung and Asahan - North Sumatra with legal rights in the form of HGB (Right to Build) with a period of 32 to 40 years, maturing in 2032, leased to PT PLN (Persero), PT Paiton Energy, PT Jawa Power, PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero), PT Anugerah Mega Energi, PT Pertamina Hulu Energi ONWJ, PT Nusantara Regas, PT Cirata Karya Lestari, BUT Sinohydro Corporation Limited and PT Bajradaya Sentranusa.

Jumlah Properti Investasi PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp1,57 triliun meningkat 7,98% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp1,46 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya perubahan pada nilai wajar. Grup juga mencatat perubahan nilai wajar yang disajikan sebagai bagian dari penghasilan/(beban) lain-lain-bersih dalam laporan laba rugi konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

PLN NP's total Investment Property in 2022 was Rp1.57 trillion, increased by 7.98% compared to 2021 of Rp1.46 trillion. The increase was mainly due to changes in fair value. The Group also recorded changes in fair value which are presented as part of other income/(expenses) - net in the consolidated statements of profit or loss for the years ended December 31, 2022 and 2021.

Investasi pada Entitas Asosiasi/Ventura Bersama
Investment in Associates/Joint Ventures

Jumlah Investasi pada Entitas Asosiasi/Ventura Bersama PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp16,11 triliun meningkat 30,05% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp12,39 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh perolehan laba asosiasi yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

PLN NP's total Investment in Associates/Joint Ventures in 2022 was Rp16.11 trillion, increased by 30.05% compared to 2021 of Rp12.39 trillion. The increase was mainly influenced by the better profit acquisition of associates from the previous year.

Aset Pajak Tangguhan – Bersih
Deferred Tax Assets - Net

Jumlah Aset Pajak Tangguhan – Bersih PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp74,56 miliar meningkat 56,07% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp47,78 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh posisi beda temporer pajak di anak perusahaan yang menambah posisi Aset Pajak Tangguhan.

PLN NP's total Deferred Tax Assets - Net in 2022 were Rp74.56 billion, increased by 56.07% compared to 2021 of Rp47.78 billion. The increase was mainly influenced by the position of temporary tax differences in subsidiaries which increased the position of Deferred Tax Assets.

Piutang kepada Ventura Bersama
Receivables from Joint Ventures

Jumlah Piutang kepada Ventura Bersama PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp756,06 miliar meningkat 9,26% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp692 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penambahan Pinjaman kepada Perusahaan Asosiasi PJBI (SGPJB).

PLN NP's total Receivables from Joint Ventures in 2022 were Rp756.06 billion, increased by 9.26% compared to 2021 of Rp692 billion. The increase was mainly influenced by the addition of Loans to PJBI Associated Companies (SGPJB).

Aset Tidak Lancar Lainnya
Other Non-Current Assets

Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp200,94 miliar meningkat 21,91% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp164,83 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh perpanjangan sertifikat hak atas tanah yang mempengaruhi peningkatan jumlah biaya ditangguhkan.

PLN NP's total Other Non-Current Assets in 2022 were Rp200.94 billion, increased by 21.91% compared to 2021 of Rp164.83 billion. The increase was mainly influenced by the extension of land rights certificates which affected the increase in total deferred charges.

Liabilitas
Liabilities

Jumlah Liabilitas meningkat menjadi Rp12,57 triliun
Total Liabilities increased to Rp12.57 trillion

Jumlah Liabilitas PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp12,57 triliun meningkat 7,31% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp10,99 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penambahan Liabilitas Imbalan Kerja karena penyesuaian imbalan kerja jatuh tempo oleh aktuaris dan penambahan Liabilitas Pajak Tangguhan yang menyesuaikan perbedaan temporer.

PLN NP's total Liabilities in 2022 was Rp12.57 trillion, increased by 7.31% compared to 2021 of Rp10.99 trillion. The increase was mainly influenced by the addition of Employee Benefits Liabilities due to the adjustment of employee benefits due by actuaries and the addition of Deferred Tax Liabilities that adjust temporary differences.

Tabel Liabilitas (Rp juta)
Table of Liabilities (Rp million)

Uraian Description	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	4.954.830	5.017.427	4.448.745	(11,33)	(568.682)
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	5.291.239	5.977.136	8.119.096	35,84	2.141.960
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**10.246.069**	**10.994.563**	**12.567.841**	**14,31**	**1.573.278**

Grafik Liabilitas (Rp juta)
Chart of Liabilities (Rp million)

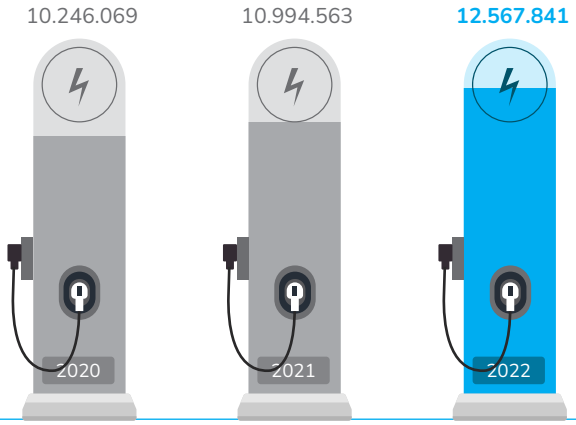

Liabilitas Jangka Pendek
Current Liabilities

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp4,45 triliun menurun 11,33% dibandingkan tahun 2021 adalah sebesar Rp5,01 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan Utang Usaha Bahan Bakar dan penurunan harga gas pada tahun 2022.

PLN NP's total Current Liabilities in 2022 was Rp4.45 trillion, decreased by 11.33% compared to 2021 of Rp5.01 trillion. The decrease was mainly due to a decrease in Fuel Trade Payables and a decrease in gas prices in 2022.

Tabel Liabilitas Jangka Pendek (Rp juta)
Table of Current Liabilities (Rp million)

Uraian Description	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Utang Usaha Trade Payables	3.048.614	3.261.362	2.337.913	(28,31)	(923.449)
Utang Lain-lain Other Payables	685.538	597.040	795.048	33,16	198.008
Utang Pajak Lainnya Other Taxes Payable	174.208	109.124	121.969	11,77	12.845
Utang Pajak Penghasilan Badan Corporate Income Tax Payable	-	18.239	62.024	240,06	43.785
Biaya Masih Harus Dibayar Accrued Expenses	89.391	61.761	56.026	(9,29)	(5.735)
Liabilitas Sewa Lease Liabilities	33.414	33.730	19.317	(42,73)	(14.413)
Pinjaman dari Pemegang Saham – Jangka Pendek Loans from Shareholder – Short-Term Portion	334.725	233.979	291.050	24,39	57.071
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek Short-Term Employee Benefits Liabilities	588.940	702.192	765.398	9,00	63.206
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	**4.954.828**	**5.017.427**	**4.448.745**	**(11,33)**	**(568.682)**

Grafik Liabilitas Jangka Pendek (Rp juta)
Chart of Current Liabilities (Rp million)

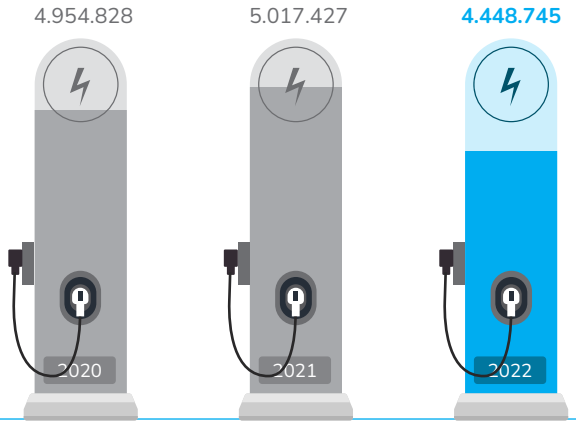

Utang Usaha
Trade Payables

Jumlah utang usaha PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp2,34 triliun menurun 28,31% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp3,26 triliun. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan Utang Usaha Bahan Bakar dan penurunan harga gas pada tahun 2022.

PLN NP's total trade payables in 2022 was Rp2.34 trillion, decreased by 28.31% compared to 2021 of Rp3.26 trillion. The decrease was mainly influenced by a decrease in Fuel Trade Payables and a decrease in gas prices in 2022.

Tabel Utang Usaha (Rp juta)
Table of Trade Payables (Rp million)

Uraian Description	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Pihak berelasi Related parties	1.198.456	1.541.586	472.926	(69,32)	(1.068.660)
Pihak ketiga Third parties	1.850.158	1.719.776	1.864.987	8,44	145.211
Jumlah Utang Usaha Total Trade Payables	**3.048.614**	**3.261.362**	**2.337.913**	**(28,31)**	**(923.449)**

Grafik Utang Usaha (Rp juta)
Chart of Trade Payables (Rp million)

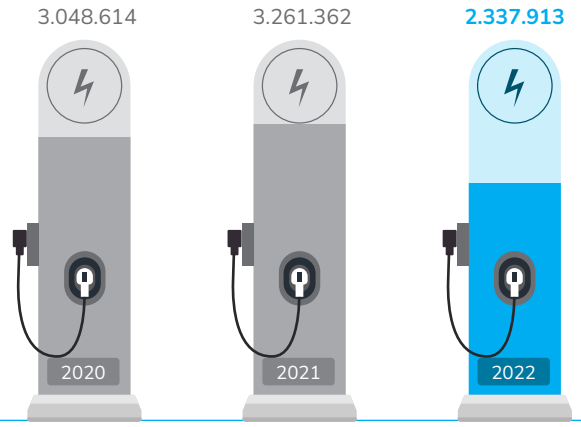

Utang Lain-lain
Other Payables

Jumlah Utang Lain-lain PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp795,05 miliar meningkat 33,16% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp597,04 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh koreksi reklasifikasi pencatatan Proyek Timika Bima Gorontalo PT Rekadaya Elektrika.

PLN NP's total Other Liabilities in 2022 were Rp795.05 billion, increased by 33.16% compared to 2021 amounting to Rp597.04 billion. The increase was mainly due to the reclassification correction of the recording of PT Rekadaya Elektrika's Timika Bima Gorontalo Project.

Tabel Utang Lain-lain (Rp juta)
Table of Other Payables (Rp million)

Uraian Description	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Pihak ketiga Third parties	661.288	561.683	495.794	(11,73)	(65.889)
Pihak berelasi Related parties	24.250	35.357	299.254	746,38	263.897
Jumlah Utang Lain-lain Total Other Payables	**685.538**	**597.040**	**795.048**	**33,16**	**198.008**

Utang Pajak
Taxes Payable

Jumlah Utang Pajak PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp121,97 miliar meningkat 11,77% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp109,12 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan EPC pada tahun 2022.

PLN NP's total Tax Payable in 2022 was Rp121.97 billion, increased by 11.77% compared to 2021 of Rp109.12 billion. The increase was mainly influenced by an increase in EPC revenue in 2022.

Tabel Utang Pajak (Rp juta)
Table of Taxes Payable (Rp million)

Uraian Description	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Pajak Lainnya Other Income Taxes	69.178	75.409	107.799	42,95	32.390
PPN Value Added Tax	103.147	33.313	13.541	(59,35)	(19.772)
Lain-lain Others	1.346	402	629	56,47	227
Jumlah Utang Pajak Total Taxes Payable	**173.671**	**109.124**	**121.969**	**11,77**	**12.845**

Beban Masih Harus Dibayar
Accrued Expenses

Jumlah beban masih harus dibayar PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp56,02 miliar menurun 9,29% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp61,76 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh telah terealisasinya beberapa biaya kepegawaian di tahun 2022 sehingga mengurangi jumlah akrual biaya kepegawaian.

PLN NP's total accrued expenses in 2022 were Rp56.02 billion, decreased by 9.29% compared to 2021 of Rp61.76 billion. The decrease was mainly due to several personnel expenses have been realized in 2022, thus reducing the amount of accrued personnel expenses.

Pinjaman dari Pemegang Saham Jangka Pendek
Loans from Shareholder – Short-Term Portion

Pinjaman dari Pemegang Saham Jangka Pendek tahun 2022 adalah sebesar Rp291,05 miliar meningkat 24,39% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp233,98 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan pinjaman kepada PT PLN (Persero) dan reklasifikasi ke nilai jangka pendek sesuai dengan jadwal pembayaran.

Loans from Shareholders - Short-Term Portion in 2022 was Rp291.05 billion, increased by 24.39% compared to 2021 of Rp233.98 billion. The increase was mainly due to the addition of loans to PT PLN (Persero) and reclassification to short-term value in accordance with the payment schedule.

Liabilitas Sewa
Lease Liabilities

Jumlah Liabilitas Sewa tahun 2022 adalah sebesar Rp19,32 miliar menurun 42,73% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp33,73 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh reklasifikasi ke nilai jangka pendek sesuai dengan jadwal masa kontrak sewa yang lebih rendah dibandingkan tahun 2021.

Total Lease Liabilities in 2022 was Rp19.32 billion, decreased by 42.73% compared to 2021 of Rp33.73 billion. The decrease was mainly due to reclassification to short-term value in accordance with the schedule of lower lease contract period compared to 2021.

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek
Short-Term Employee Benefits Liabilities

Jumlah Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek tahun 2022 adalah sebesar Rp765,40 miliar meningkat 9,00% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp702,19 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penyesuaian nilai imbalan kerja jatuh tempo oleh aktuaris.

Total Short-Term Employee Benefits Liabilities in 2022 amounted to Rp765.40 billion, an increase of 9.00% compared to 2021 of Rp702.19 billion. The increase was mainly influenced by the adjustment of the maturity employee benefits value by the actuary.

Liabilitas Jangka Panjang
Non-Current Liabilities

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp8,12 triliun meningkat 35,84% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp5,97 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penambahan Liabilitas Imbalan Kerja karena penyesuaian imbalan kerja jatuh tempo oleh aktuaris dan penambahan Liabilitas Pajak Tangguhan yang menyesuaikan perbedaan temporer.

PLN NP's total Non-Current Liabilities in 2022 was Rp8.12 trillion, increased by 35.84% compared to 2021 of Rp5.97 trillion. The increase was mainly influenced by the addition of Employee Benefits Liabilities due to the adjustment to maturity employee benefits by actuaries and the addition of Deferred Tax Liabilities that adjust temporary differences.

Tabel Utang Pajak (Rp juta)
Table of Non-Current Liabilities (Rp million)

Uraian Description	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Liabilitas Pajak Tangguhan - Bersih Deferred Tax Liabilities - Net	446.617	1.072.316	2.252.738	110,08	1.180.422
Pinjaman dari Pemegang Saham Jangka Panjang Loans from Shareholder – Long-Term	2.163.361	2.183.226	2.376.033	8,83	192.807
Liabilitas Sewa Lease Liabilities	34.246	26.274	32.354	23,14	6.080
Liabilitas Imbalan Kerja Employee Benefits Liabilities	2.647.016	2.695.320	3.457.971	28,30	762.651
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities	**5.291.239**	**5.977.136**	**8.119.096**	**35,84**	**2.141.960**

Grafik Liabilitas Jangka Panjang (Rp juta)
Chart of Non-Current Liabilities (Rp million)

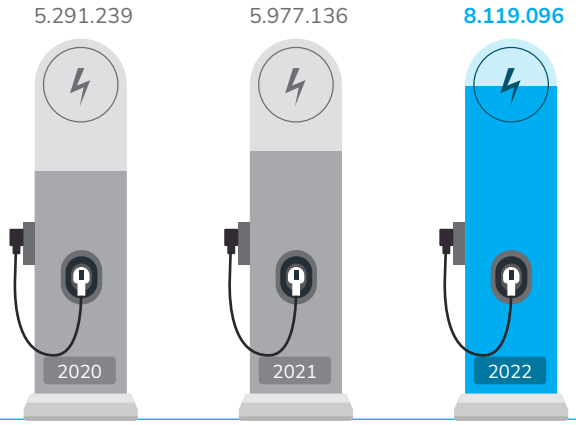

Liabilitas Pajak Tangguhan – Bersih
Deferred Tax Liabilities - Net

Jumlah Liabilitas Pajak Tangguhan – Bersih tahun 2022 adalah sebesar Rp2,25 triliun meningkat 110,08% dibandingkan tahun 2021 adalah sebesar Rp1,07 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penyesuaian imbalan kerja jatuh tempo oleh aktuaris.

Total Deferred Tax Liabilities - Net in 2022 was Rp2.25 trillion, increased by 110.08% compared to 2021 of Rp1.07 trillion. The increase was mainly influenced by the adjustment to maturity employee benefits by the actuary.

Pinjaman dari Pemegang Saham Jangka Panjang
Loans from Shareholder - Long-Term

Jumlah Liabilitas kepada Pemegang Saham tahun 2022 adalah sebesar Rp2,38 triliun meningkat 8,83% dibandingkan tahun 2021 adalah sebesar Rp2,18 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penambahan pinjaman PLN NP Kepada PT PLN (Persero) pada tahun 2022.

Total Liabilities to Shareholders in 2022 was Rp2.38 trillion, increased by 8.83% compared to 2021 of Rp2.18 trillion. The increase was mainly influenced by the addition of PLN NP loans to PT PLN (Persero) in 2022.

Liabilitas Sewa
Lease Liabilities

Jumlah Liabilitas sewa tahun 2022 adalah sebesar Rp32,35 miliar meningkat 23,14% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp26,27 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh reklasifikasi ke nilai jangka pendek sesuai dengan jadwal masa kontrak sewa yang lebih rendah dibandingkan tahun 2021 dan secara total jumlah liabilitas sewa menurun karena berkurangnya penambahan kontrak sewa baru di tahun 2022.

Total Lease Liabilities in 2022 was Rp32.35 billion, increased by 23.14% compared to 2021 of Rp26.27 billion. The increase was mainly due to the reclassification to short-term value in accordance with the schedule of lower lease contract periods compared to 2021 and the total amount of lease liabilities decreased due to the reduction in new lease contract additions in 2022.

Liabilitas Imbalan Kerja
Employee Benefits Liabilities

Jumlah Liabilitas Imbalan Kerja tahun 2022 adalah sebesar Rp3,46 triliun meningkat 28,30% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp2,70 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penyesuaian nilai imbalan kerja jatuh tempo oleh aktuaris.

Total Employee Benefits Liabilities in 2022 was Rp3.46 trillion, increased by 28.30% compared to 2021 of Rp2.70 trillion. The increase was mainly due to the adjustment to maturity employee benefits value by the actuary.

Ekuitas
Equity

Jumlah Ekuitas meningkat menjadi Rp162,36 triliun
Total Equity increased to Rp162.36 trillion

Jumlah Ekuitas PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp162,36 triliun meningkat 0,74% dibandingkan 2021 adalah sebesar Rp161,17 triliun. Peningkatan ekuitas sebagian besar disebabkan oleh peningkatan laba di tahun 2022 dan selisih kurs karena penjabaran Laporan Keuangan.

PLN NP's total Equity in 2022 was Rp162.36 trillion, increased by 0.74% compared to 2021 of Rp161.17 trillion. The increase in equity was largely due to an increase in profit in 2022 and foreign exchange differences due to the elaboration of the Financial Statements.

Tabel Ekuitas (Rp juta)
Table of Equity (Rp million)

Uraian Description	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Modal Saham - Nilai Nominal Rp500 (Nilai Penuh) Per Saham Capital Stock – Par Value of Rp500 (Full Amount) per Share					
Modal Dasar - 24.000 juta Saham Authorized – 24,000 million Shares					
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 6.000 juta Saham Subscribed and Fully Paid-up – 6,000 million Shares	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	-
Tambahan Modal Disetor Additional Paid-in Capital	2.915.205	2.915.205	2.890.829	(0,84)	(24.376)

Uraian Description	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Selisih Transaksi dengan Kepentingan Non-Pengendali Difference in Transaction with Non-Controlling Interest	(62.725)	(62.725)	(62.725)	-	-
Saldo Laba: Retained Earnings:					
Ditentukan Penggunaannya Appropriated	1.429.875	1.429.875	1.429.875	-	-
Tidak Ditentukan Penggunaannya Unappropriated	31.915.518	30.064.155	30.802.599	2,46	738.444
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	125.895.480	123.579.572	124.016.234	0,35	436.662
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada: Equity Attributable to:					
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent	165.093.353	160.926.082	124.016.234	(22,94)	(36.909.848)
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interests	221.598	243.183	278.276	14,43	35.093
Jumlah Ekuitas Total Equity	**165.314.951**	**161.169.265**	**162.355.088**	**0,74**	**1.185.823**

Grafik Ekuitas (Rp juta)
Chart of Equity (Rp million)

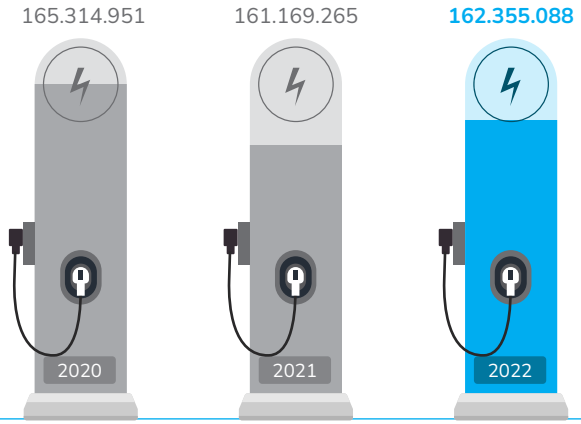

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Subscribed and Fully Paid-up

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perusahaan diharuskan untuk membuat penyisihan cadangan wajib hingga sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Tidak ada batasan waktu untuk membentuk cadangan tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan belum membentuk cadangan umum sesuai dengan Undang-Undang tersebut.

Based on the Law on Limited Liability Companies, the Company is required to make a mandatory reserve provision of up to at least 20% of the total subscribed and fully paid-up capital. There is no time limit to establish such reserves. As of December 31, 2022 and 2021, the Company has not established a general reserve in accordance with the Law.

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh merupakan saham biasa yang memberikan hak untuk membawa satu suara per saham dan berpartisipasi dalam dividen. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp3,00 triliun sebesar jumlah yang sama seperti pada tahun 2021.

The Subscribed and Fully Paid-up Capital is common stock that provides the right to carry one vote per share and participate in dividends. PLN NP's total Subscribed and Fully Paid-up Capital in 2022 was Rp3.00 trillion, the same amount as in 2021.

Tambahan Modal Disetor
Additional Paid-in Capital

Tambahan modal disetor berasal dari nilai pengalihan aset tetap, termasuk dana rehabilitasi PLTU Gresik Unit 1 dan 2 (berdasarkan Surat Direktur Utama PLN No. 1311/533/DIRUT/2001 tanggal 19 Maret 2001), dan material pemeliharaan sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2000 yang diterima dari PLN. Jumlah Tambahan Modal Disetor tahun 2022 adalah sebesar Rp2,89 triliun menurun 0,84% dibandingkan tahun 2021 adalah sebesar Rp2,92 triliun.

Additional paid-in capital is derived from the transfer value of property, plant and equipment, including rehabilitation funds for Gresik Unit 1 and 2 CFPP (based on the Letter of PLN's President Director No. 1311/533/DIRUT/2001 dated March 19, 2001), and maintenance materials from 1996 to 2000 received from PLN. Total Additional Paid-in Capital in 2022 was Rp2.89 trillion, decreased by 0.84% compared to 2021 of Rp2.92 trillion.

Berdasarkan Akta Notaris No. 101 tanggal 28 Juli 2022, dari Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, RE mengadakan perjanjian jual beli saham dengan PT PLN Enjiniring (“PLNE”) yang merupakan entitas sepengendali, untuk mengakuisisi 125.074.552 lembar saham biasa atau setara dengan 100% kepemilikan atas PPN (Prima Power Nusantara) dengan mengalihkan 93.411.836 lembar saham biasa atau setara dengan 99,8% kepemilikan atas REC. Selisih sebesar Rp24.376 antara nilai pengalihan dan nilai buku bersih yang diterima dicatat dalam akun ekuitas sebagai tambahan modal disetor.

Based on Notarial Deed No. 101 dated July 28, 2022, from Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notary in Jakarta, RE held a share purchase agreement with PT PLN Enjiniring ("PLNE") which is an entity under common control, to acquire 125,074,552 common stocks or equivalent to 100% ownership of PPN (Prima Power Nusantara) by transferring 93,411,836 common stocks or equivalent to 99.8% ownership of REC. The difference of Rp24,376 between the transfer value and net book value received is recorded in equity account as additional paid-in capital.

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk
Equity Attributable to Owners of the Parent

Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp162,01 triliun meningkat 0,72% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp160,93 triliun meningkat. Peningkatan ini disebabkan karena peningkatan laba di tahun 2022 dan selisih kurs karena penjabaran Laporan Keuangan.

PLN NP's Total Equity Attributable to Owners of the Parent in 2022 was Rp162.01 trillion, increased by 0.72% compared to 2021 of Rp160.93 trillion. This increase was due to an increase in profit in 2022 and foreign exchange differences due to the elaboration of the Financial Statements.

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali
Equity Attributable to Non-Controlling Interests

Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp278,28 miliar meningkat 14,43% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp243,18 miliar. Peningkatan ini dipengaruhi oleh peningkatan laba di tahun 2022 dan selisih kurs karena penjabaran Laporan Keuangan.

PLN NP's total Equity Attributable to Non-Controlling Interests in 2022 was Rp278.28 billion, increased by 14.43% compared to 2021 of Rp243.18 billion. This increase was influenced by an increase in profit in 2022 and foreign exchange differences due to the elaboration of the Financial Statements.

Analisis Arus Kas
Cash Flows Analysis

Jumlah Kas dan Setara Kas meningkat menjadi Rp8,96 triliun
Total Cash and Cash Equivalents increased to Rp8.96 trillion

Jumlah Kas dan Setara Kas PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp8,96 triliun meningkat 21,98% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp7,34 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh proses Penagihan (*Collection Period*) yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

PLN NP's total Cash and Cash Equivalents in 2022 was Rp8.96 trillion, increased by 21.98% compared to 2021 of Rp7.34 trillion. The increase was mainly influenced by a better Collection Period than the previous year.

Tabel Arus Kas (Rp juta)
Table of Cash Flows (Rp million)

Uraian Description	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi Net Cash Provided by Operating Activities	2.177.126	4.323.208	3.257.956	(24,64)	(1.065.252)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi Net Cash Used in Investing Activities	(1.371.476)	(334.356)	(1.680.722)	402,67	(1.346.366)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities	851.017	(167.500)	(60.289)	(64,01)	107.211
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	1.656.667	3.821.352	1.516.945	(60,30)	(2.304.407)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year	1.838.858	3.511.113	7.343.968	109,16	3.832.855
Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang Asing Effect of Changes in Foreign Currency	15.588	11.503	97.245	745,39	85.742
Jumlah Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	**3.511.113**	**7.343.968**	**8.958.158**	**21,98**	**1.614.190**

Grafik Jumlah Kas dan Setara Kas (Rp juta)
Chart of Total Cash and Cash Equivalents (Rp million)

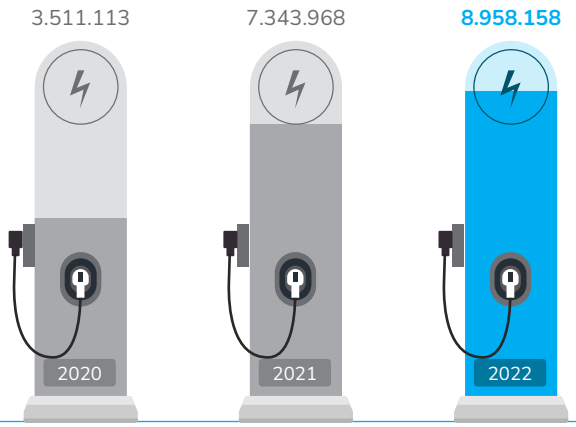

Arus Kas Aktivitas Operasi
Cash Flows of Operating Activities

Jumlah Kas Bersih diperoleh dari aktivitas operasi PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp3,26 triliun menurun 24,64% dibandingkan tahun 2021 adalah sebesar Rp4,32 triliun. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan jumlah tagihan penjualan tenaga listrik PLN NP (Pembangkit Non – PLTU Batubara) dan optimasi PLTU Batubara pada Sistem Kelistrikan Jawa Bali.

PLN NP's total Net Cash provided by operating activities in 2022 was Rp3.26 trillion, decreased by 24.64% compared to 2021 of Rp4.32 trillion. The decrease was mainly influenced by a decrease in the number of PLN NP electricity sales bills (Non-Coal CFPP) and Coal CFPP optimization in the Java-Bali Electricity System.

Tabel Arus Kas Aktivitas Operasi (Rp juta)
Table of Cash Flows of Operating Activities (Rp million)

Uraian Description	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Penerimaan Kas dari Pelanggan Cash Receipts from Customers	11.667.301	15.415.195	14.539.557	(5,68)	(875.638)
Pembayaran Kas kepada Pemasok, Karyawan, dan Lainnya Cash Paid to Suppliers, Employees, and Others	(9.610.081)	(11.533.375)	(12.362.975)	7,19	(829.600)
Penerimaan Bunga Interest Received	80.181	106.441	225.454	111,81	119.013
Pembayaran surat keterangan pajak kurang bayar Payment of tax assessment letter for underpayment	(162.946)	(136.172)	-	(100,00)	(136.172)
Penerimaan pengembalian atas surat keterangan pajak kurang bayar Refund receipt of tax assessment letter for underpayment	-	-	450.195	100,00	450.195
Penerimaan restitusi pajak penghasilan badan Cash receipt for corporate income tax refund	252.192	227.944	234.488	2,87	6.544
Penerimaan restitusi Pajak Penambahan Nilai Cash receipt for Value Added Taxes refund	287.731	581.587	424.759	(26,97)	(156.828)
Pembayaran PPh Badan & PPh Final Payment of Corporate Income Tax & Final Income Tax	(337.252)	(338.412)	(253.522)	(25,08)	84.890
Jumlah Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi Total Net Cash Provided by Operating Activities	**2.177.126**	**4.323.208**	**3.257.956**	**(24,64)**	**(1.065.252)**

Arus Kas Aktivitas Investasi
Cash Flows of Investing Activities

Jumlah Kas Bersih digunakan untuk aktivitas investasi PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp1,68 triliun meningkat 402,67% dibandingkan tahun 2021 adalah sebesar Rp334,35 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penambahan perolehan Aset Tetap, Investasi pada Perusahaan Asosiasi dan pemberian pinjaman pada Perusahaan Asosiasi.

PLN NP's total Net Cash used in investing activities in 2022 was Rp1.68 trillion, increased by 402.67% compared to 2021 of Rp334.35 billion. The increase was mainly influenced by the additional acquisition of Property, Plant and Equipment, Investment in Associated Companies and provision of loans to Associated Companies.

Tabel Arus Kas Aktivitas Investasi (Rp juta)
Table of Cash Flows of Investing Activities (Rp million)

Uraian Description	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Penerimaan Dividen dari Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Dividends Received from Associates and Joint Ventures	315.410	307.069	496.634	61,73	189.565
Penempatan Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Additional Investments in Associates and Joint Ventures	(23.778)	(92.598)	(393.398)	324,85	(300.800)
Penempatan Pinjaman kepada Ventura Bersama Placement of Loan to Joint Ventures	-	(9.632)	-	-	(9.632)
Penerimaan atas piutang kepada ventura bersama Receipt of receivables from joint ventures	-	-	64.720	-	64.720
Penarikan Deposito Berjangka Withdrawal of Time Deposits	-	554.372	30.000	(94,59)	(524.372)
Penempatan Deposito Berjangka Placement of Time Deposits	-	-	(231.196)	-	(231.196)
Penarikan Rekening Bank dan Deposito Berjangka Dibatasi Penggunaannya Withdrawal of Restricted Cash in Banks and Time Deposits	-	15.737	972	(93,82)	(14.765)
Penempatan Rekening Bank dan Deposito Berjangka Dibatasi Penggunaannya Placement of Restricted Cash in Banks and Time Deposits	-	(15.400)	(122.022)	692,35	(106.622)
Perolehan Aset Tetap Purchase of Property, Plant and Equipment	(1.591.389)	(1.093.904)	(1.484.086)	35,67	(390.182)
Perolehan Aset Tak Berwujud Purchase of Intangible Assets	-	-	(42.346)	-	(42.346)
Jumlah Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi **Total Net Cash Used in Investing Activities**	**(1.371.476)**	**(334.356)**	**(1.680.722)**	**402,67**	**(1.346.366)**

Arus Kas Aktivitas Pendanaan

Cash Flows of Financing Activities

Jumlah Kas Bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp60,30 miliar menurun 64,01% dibandingkan tahun 2021 adalah sebesar Rp167,50 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya tambahan Pinjaman pada Pemegang Saham yang diberikan oleh PT PLN (Persero) kepada PT PLN NP di tahun 2022.

PLN NP's total Net Cash used in financing activities in 2022 was Rp60.30 billion, decreased by 64.01% compared to 2021 of Rp167.50 billion. The decrease was mainly due to additional Loans to Shareholders provided by PT PLN (Persero) to PT PLN NP in 2022.

Tabel Arus Kas Aktivitas Pendanaan (Rp juta)
Table of Cash Flows of Financing Activities (Rp million)

Uraian Description	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Penerimaan pinjaman pemegang saham Proceeds of loan from shareholder	1.048.955	227.467	355.940	56,48	128.473
Pembayaran pinjaman dari pemegang saham Payments of loan from shareholder	(165.340)	(334.297)	(358.505)	7,24	(24.208)
Pembayaran Penambahan Kepemilikan pada entitas anak dari Kepentingan Non-Pengendali Payments of Additional Ownership in subsidiaries from Non-Controlling Interests	-	-	(11.184)	-	(11.184)
Penerimaan atas divestasi entitas anak Proceeds from divestment of subsidiaries	-	-	8.785	-	8.785
Pembayaran liabilitas sewa Payments of lease liabilities	(30.709)	(57.991)	(54.546)	(5,94)	3.445
Pembayaran Dividen oleh Entitas Anak Kepada Kepentingan Non-Pengendali Payments of Dividend by Subsidiaries to Non-Controlling Interests	(1.889)	(2.679)	(779)	(70,92)	1.900
Jumlah Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan **Total Net Cash Used in Financing Activities**	**851.017**	**(167.500)**	**(60.289)**	**(64,01)**	**107.211**

Analisis Kemampuan Membayar Utang, Tingkat Kolektibilitas Piutang dan Rasio Keuangan Lainnya

Analysis of Solvency, Receivables Collectibility and Other Financial Ratios

Kemampuan Membayar Utang

Solvency

Tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya diukur menggunakan rasio solvabilitas dan rasio likuiditas. Berikut adalah rincian tanggal jatuh tempo kontraktual untuk liabilitas keuangan dengan pembayaran yang telah disepakati:

The Company's ability level in fulfilling its obligations is measured using solvency ratios and liquidity ratios. The following is a detail of contractual maturity dates for financial liabilities with the agreed payments:

Tabel Rincian Jatuh Tempo Liabilitas (Rp juta)
Table of Liabilities Maturity Details (Rp million)

Uraian Description	Jatuh Tempo Due date				
	Satu tahun One Year	Lebih dari 1 tahun namun tidak lebih dari 3 tahun More than 1 year but not more than 3 years	Lebih dari 3 tahun namun tidak lebih dari 5 tahun More than 3 years but not more than 5 years	Lebih dari 5 tahun More than 5 years	Jumlah Total
Utang usaha Trade Payables	2.337.913	-	-	-	2.337.913
Liabilitas Sewa Lease Liabilities	26.957	39.071	-	-	66.028
Utang Lain-lain Other Payables	795.048	-	-	-	795.048
Biaya yang Masih Harus Dibayar Accrued Expenses	56.026	-	-	-	56.026
Pinjaman dari Pemegang Saham Loans from Shareholder	437.736	825.237	755.226	1.450.521	3.468.720
Jumlah Total	**3.653.680**	**864.308**	**755.226**	**1.450.521**	**6.723.735**

Rasio Solvabilitas
Solvency Ratio

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan membayar seluruh utangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio solvabilitas dapat dilihat melalui beberapa rasio keuangan diantaranya adalah *Debt to Assets Ratio* (DAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER).

The solvency ratio is a ratio that measures the Company's ability to pay all its debts, both short and long term. The solvency ratio can be seen through several financial ratios including Debt to Assets Ratio (DAR) and Debt to Equity Ratio (DER).

Tabel Rasio Solvabilitas (%)
Table of Solvency Ratio (%)

Uraian Description	2020	2021	2022	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease
				%
DAR	5,84	6,39	7,18	12,36
DER	6,20	6,82	7,74	13,49

Debt to Assets Ratio (DAR)

Nilai DAR PLN NP tahun 2022 adalah 7,18% yaitu lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yaitu 6,39%. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan Liabilitas Imbalan Kerja karena penyesuaian imbalan kerja jatuh tempo oleh aktuaris dan penambahan Liabilitas Pajak Tangguhan yang menyesuaikan perbedaan temporer.

PLN NP's DAR value in 2022 was 7.18%, which was higher compared to 2021 of 6.39%. The increase was mainly due to the addition of Employee Benefits Liabilities due to the adjustment to maturity employee benefits by actuaries and the addition of Deferred Tax Liabilities that adjust temporary differences.

Grafik DAR (%)
Chart of DAR (%)

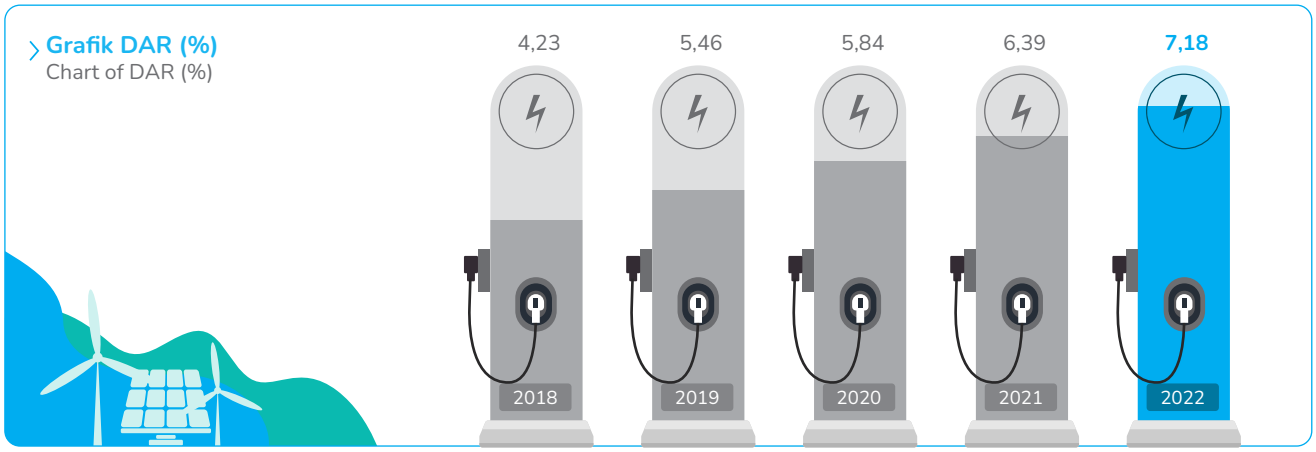

Debt to Equity Ratio (DER)

Nilai DER PLN NP tahun 2022 adalah 7,74% yaitu lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yaitu 6,20%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penambahan Liabilitas Imbalan Kerja karena penyesuaian imbalan kerja jatuh tempo oleh aktuaris dan penambahan Liabilitas Pajak Tangguhan yang menyesuaikan perbedaan temporer.

PLN NP's DER value in 2022 was 7.74%, which was higher compared to 2021 of 6.20%. The increase was caused by the addition of Employee Benefits Liabilities due to the adjustment to maturity employee benefits by actuaries and the addition of Deferred Tax Liabilities that adjust temporary differences.

Grafik DER (%)
Chart of DER (%)

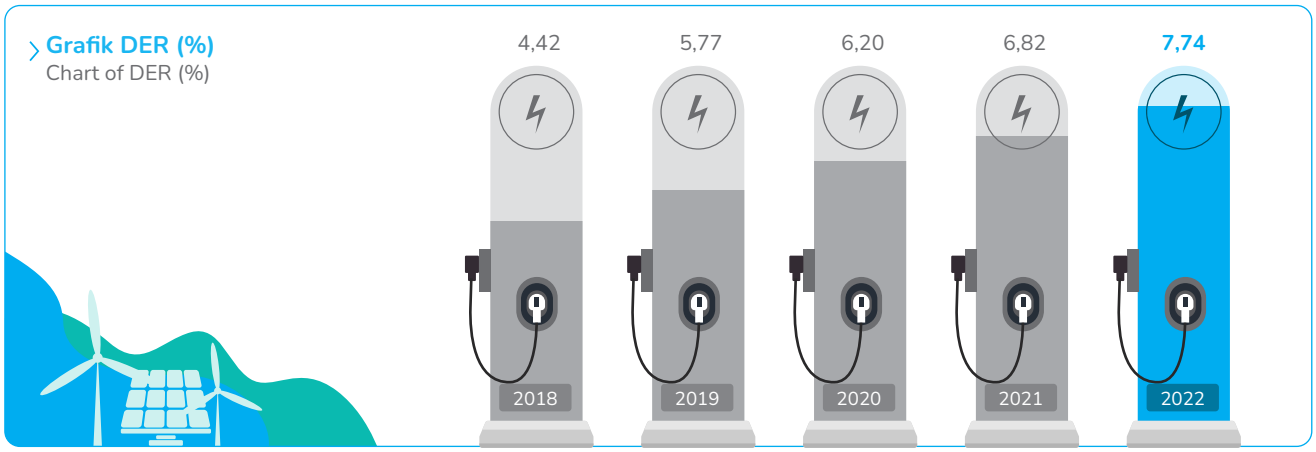

Namun secara keseluruhan rasio DAR dan DER masih sangat kecil dan tidak mengindikasikan adanya risiko *insolvency* dikarenakan perusahaan memiliki nilai ekuitas yang lebih tinggi dari nilai liabilitasnya.

However, the overall DAR and DER ratios are still very small and do not indicate insolvency risk due to the Company having a higher equity value than its liabilities value.

Rasio Likuiditas
Liquidity Ratio

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang akan jatuh tempo. Rasio yang digunakan untuk menilai rasio likuiditas diantaranya adalah *cash ratio, quick ratio,* dan *current ratio*. Semakin tinggi nilai dari rasio-rasio tersebut, maka mengindikasikan bahwa PLN NP mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya yang akan jatuh tempo.

The liquidity ratio is used to measure the Company's ability in fulfilling its short-term obligations that will be due. The ratios used to assess liquidity ratios include cash ratio, quick ratio, and current ratio. The higher the value of these ratios, the more capable PLN NP is of fulfilling its obligations that will be due.

Tabel Rasio Likuiditas (%)
Table of Liquidity Ratio (%)

Uraian Description	2020	2021	2022	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease %
Cash Ratio	70,86	152,15	201,36	32,34
Quick Ratio	608,30	589,71	707,84	20,03
Current Ratio	639,51	646,95	750,64	16,03

Cash Ratio

Cash Ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban yang harus segera dipenuhi dengan aset lancar. Nilai *Cash Ratio* PLN NP tahun 2022 adalah 201,36% yaitu lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yaitu 152,15%. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan jumlah Kas dan Setara Kas sebagai akibat dari proses penagihan (*Collection Period*) yang lebih baik.

Cash Ratio is used to measure the Company's ability in paying obligations that must be fulfilled immediately with current assets. The Cash Ratio value of PLN NP in 2022 was 201.36%, which was higher compared to 2021 of 152.15%. The increase was mainly influenced by an increase in total Cash and Cash Equivalents as a result of a better Collection Period process.

Grafik *Cash Ratio* (%)
Chart of Cash Ratio (%)

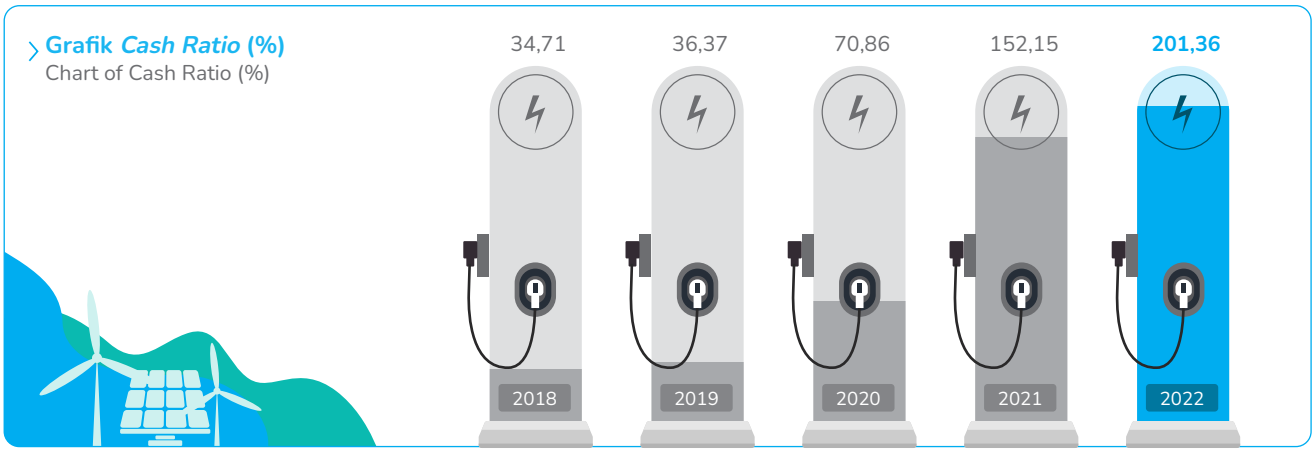

Quick Ratio

Quick Ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban yang harus segera dipenuhi dengan Aset Lancar di luar persediaan, karena persediaan dianggap tidak mudah digunakan untuk memenuhi kewajiban yang akan segera jatuh tempo. Nilai *Quick Ratio* PLN NP tahun 2022 adalah 707,84% yaitu lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yaitu 589,71%. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh tingginya jumlah persediaan stok bahan bakar minyak sebanyak 10 hari operasi untuk mengantisipasi kelangkaan batubara serta penurunan jumlah Utang Usaha Bahan Bakar dan penurunan harga gas pada tahun 2022.

Quick Ratio is used to measure the Company's ability in paying obligations that must be fulfilled immediately with Current Assets outside of inventory, since inventory is considered not easy to be used to fulfill obligations that will be due soon. The Quick Ratio value of PLN NP in 2022 was 707.84%, which was higher compared to 2021 of 589.71%. The increase was influenced by the high amount of fuel stock inventory of 10 operating days to anticipate coal scarcity as well as a decrease in the amount of Fuel Trade Payables and a decrease in gas prices in 2022.

Grafik *Quick Ratio* (%)
Chart of Quick Ratio (%)

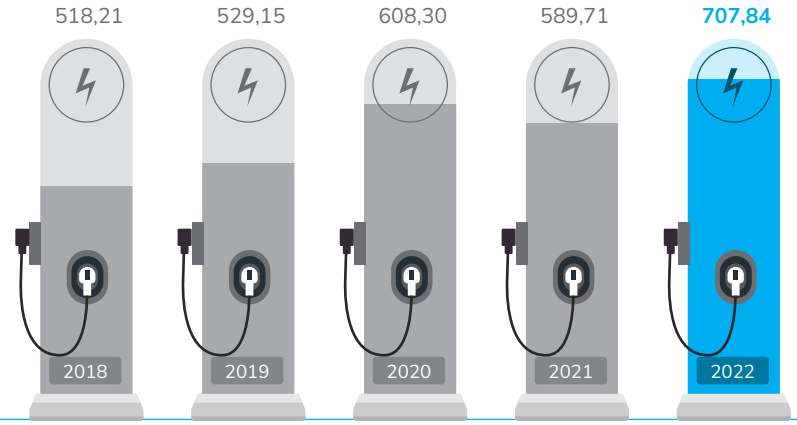

Current Ratio

Current Ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang akan segera jatuh tempo dengan Aset Lancar yang dimilikinya. Nilai *Current Ratio* PLN NP tahun 2022 adalah 750,64% yaitu meningkat dibandingkan tahun 2021 yaitu 646,95%. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh tingginya jumlah persediaan stok bahan bakar minyak sebanyak 10 hari operasi untuk mengantisipasi kelangkaan batubara serta penurunan jumlah utang usaha bahan bakar dan penurunan harga gas pada tahun 2022.

Current Ratio is used to measure the Company's ability to fulfill obligations that will be due soon with its Current Assets. The Current Ratio value of PLN NP in 2022 was 750.64%, which increased compared to 2021 of 646.95%. The increase was influenced by the high amount of fuel stock inventory of 10 operating days to anticipate coal scarcity as well as a decrease in the amount of fuel trade payables and a decrease in gas prices in 2022.

Grafik *Current Ratio* (%)
Chart of Current Ratio (%)

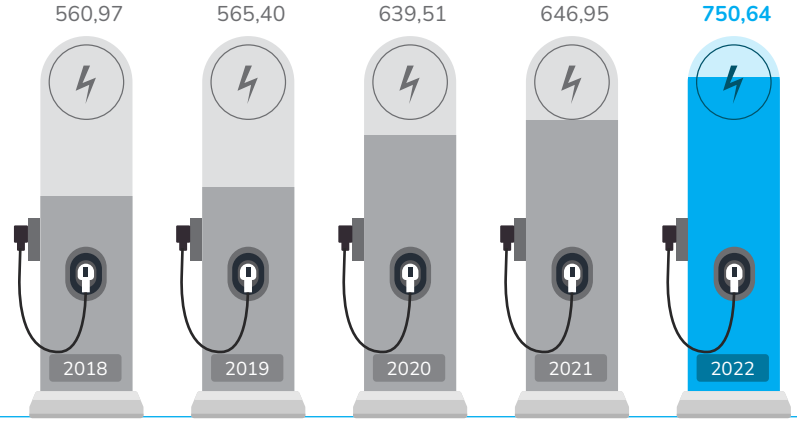

Tingkat Kolektibilitas Piutang
Receivables Collectibility

Kemampuan perusahaan dalam mengumpulkan piutang dapat diketahui dengan menghitung nilai *Collection Period.* Nilai *Collection Period* semakin kecil maka semakin baik, artinya kemampuan perusahaan dalam mengumpulkan piutang semakin cepat. Nilai *Collection Period* PLN NP tahun 2022 adalah 284 hari, yaitu lebih cepat dibandingkan tahun 2021 yaitu 292 hari. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan jumlah Kas dan Setara Kas sebagai akibat dari proses penagihan (*Collection Period*) piutang yang lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

The Company's ability in collecting receivables can be known by calculating the Collection Period value. The smaller the Collection Period value, the better, meaning that the Company's ability in collecting receivables is getting faster. PLN NP's Collection Period value in 2022 was 284 days, which was faster compared to 2021 of 292 days. This is mainly influenced by an increase in the amount of Cash and Cash Equivalents as a result of a better Collection Period process for receivables compared to the previous year.

Grafik *Collection Period* (hari)
Chart of Collection Period (day)

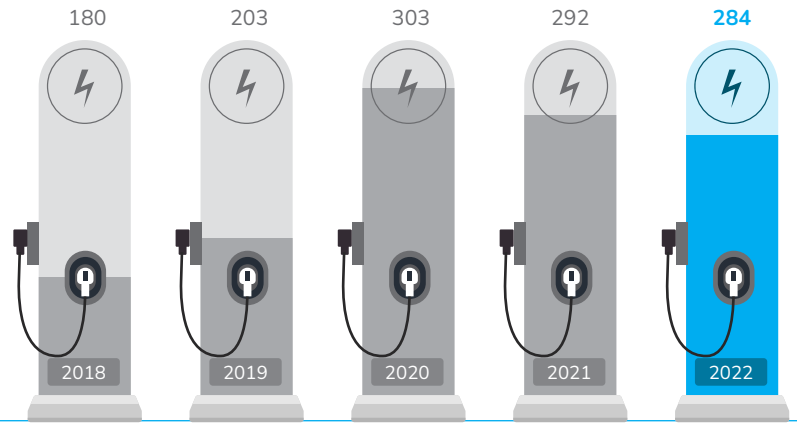

Rasio Keuangan Lainnya
Other Financial Ratios

Selain rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang serta tingkat kolektibilitas piutang, berikut diuraikan rasio penting lainnya yang relevan di PLN NP untuk mengukur kinerja keuangan.

Apart from ratios to determine the Company's ability in fulfilling short-term and long-term obligations as well as the receivables collectibility, the following are described other important ratios that are relevant in PLN NP to measure financial performance.

Rasio Profitabilitas
Profitability Ratio

Rasio Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitabilitas perusahaan dapat dilihat dari *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE).

Profitability ratio is a ratio used to measure the Company's ability in generating profits. The Company's profitability can be seen from Return on Asset (ROA) and Return on Equity (ROE).

Tabel Rasio Profitabilitas (%)
Table of Profitability Ratio (%)

Uraian Description	2020	2021	2022	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease %
ROA	4,36	3,38	3,76	11,24
ROE	4,63	3,61	4,06	12,47

Return on Asset (ROA)

ROA digunakan untuk mengukur perolehan laba yang tersedia bagi pemilik perusahaan atas setiap nilai aset yang ada pada perusahaan. Nilai ROA PLN NP tahun 2022 adalah sebesar 3,76% lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yaitu 3,38%. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan diluar operasi atas keuntungan investasi pada perusahaan asosiasi PLN NP utamanya pada PT S2P.

ROA is used to measure the acquisition of profits available for the owners of the Company on each asset value in the Company. The ROA value of PLN NP in 2022 was 3.76%, higher compared to 2021 of 3.38%. The increase was mainly influenced by an increase in revenue beyond operations on investment gains in PLN NP's associated companies, especially in PT S2P.

Grafik ROA (%)
Chart of ROA (%)

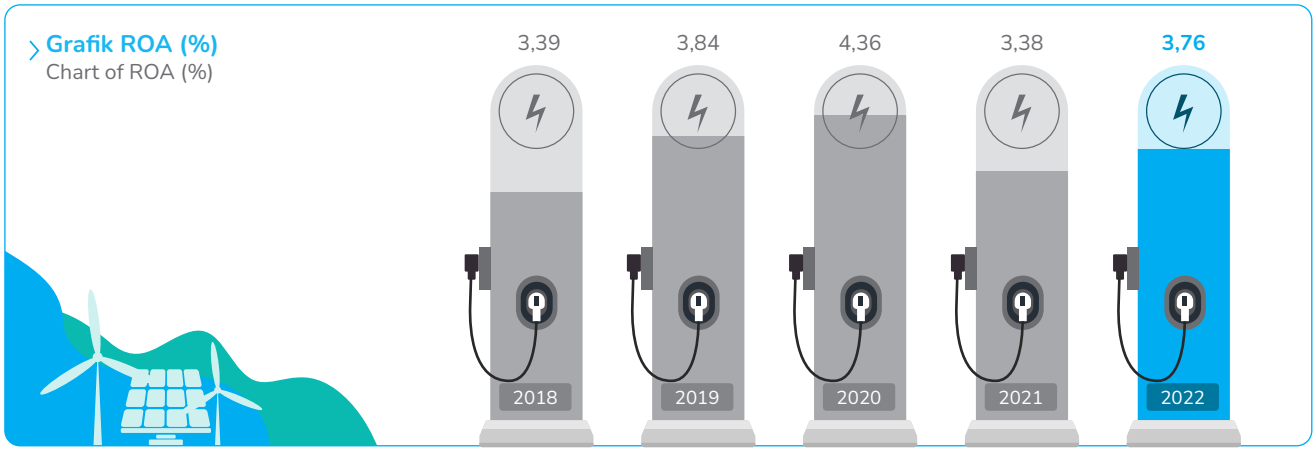

Return on Equity (ROE)

ROE digunakan untuk mengukur perolehan laba yang tersedia bagi pemilik perusahaan atas modal yang diinvestasikan di dalam perusahaan. Nilai ROE PLN NP tahun 2022 adalah 4,06%, yaitu lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yaitu 3,61%. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan diluar operasi atas keuntungan investasi pada perusahaan asosiasi PLN NP utamanya pada PT S2P.

ROE is used to measure the acquisition of profits available for the owners of the Company on the capital invested in the Company. The ROE value of PLN NP in 2022 was 4.06%, which was higher compared to 2021 of 3.61%. The increase was mainly influenced by an increase in revenue beyond operations on investment gains in PLN NP's associated companies, especially in PT S2P.

Grafik ROE (%)
Chart of ROE (%)

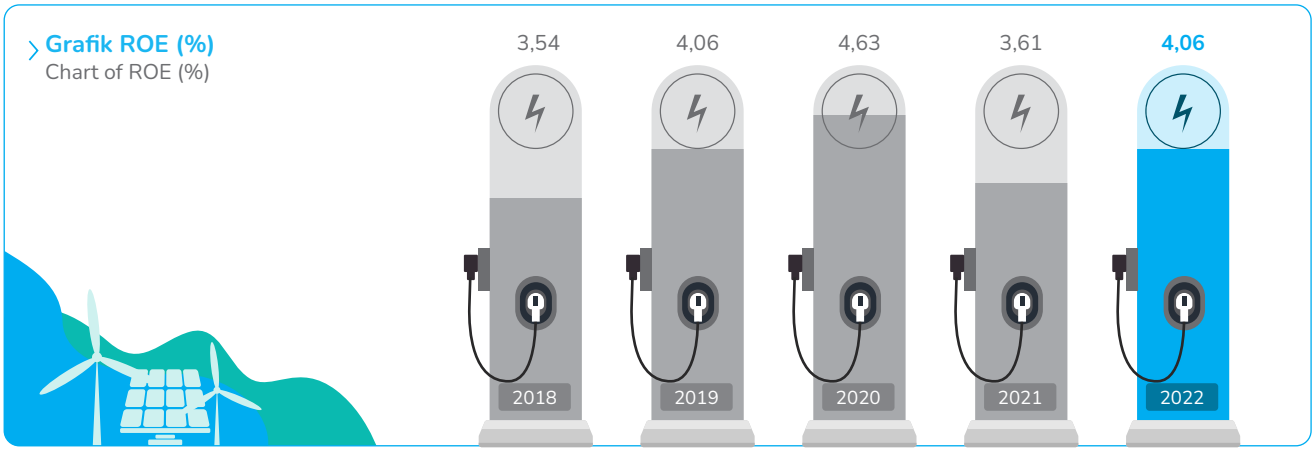

Rasio Aktivitas
Activity Ratio

Rasio aktivitas digunakan untuk memberikan gambaran aktivitas operasional yang dilakukan Perusahaan baik yang berkaitan dengan kegiatan penjualan, pembelian, dan kegiatan lainnya. *Inventory Turn Over* (ITO) dan *Total Asset Turn Over* (TATO) merupakan bagian rasio aktivitas.

Activity ratio is used to provide an overview of the operational activities conducted by the Company both related to sales, purchasing, and other activities. Inventory Turn Over (ITO) and Total Asset Turn Over (TATO) are part of the activity ratio.

Tabel Rasio Aktivitas (%)
Table of Activity Ratio (%)

Uraian Description	2020	2021	2022	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease %
ITO (hari) {days}	15	17	13	(24%)
TATO (kali) {times}	0,17	0,17	0,16	(5,88)

Inventory Turn Over (ITO)

ITO menunjukkan kemampuan dana yang tertanam dalam persediaan berputar dalam suatu periode tertentu, atau likuiditas dari persediaan dan tendensi untuk adanya overstock. Rasio perputaran persediaan mengukur efisiensi pengelolaan persediaan untuk menilai efisiensi operasional, yang memperlihatkan seberapa baiknya manajemen mengontrol modal yang ada pada persediaan.

ITO shows the ability of funds embedded in inventory to rotate in a certain period, or the liquidity of inventory and the tendency for overstock. The inventory turnover ratio measures the efficiency of inventory management to assess operational efficiency, which shows how well management controls the capital in inventory.

Nilai ITO PLN NP tahun 2022 adalah 13 hari yaitu lebih cepat dibandingkan tahun 2021 yaitu 17 hari. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh perencanaan operasi dan pemeliharaan yang lebih tepat dan akurat selama tahun 2022 sehingga barang (*stock*) yang dibeli dapat langsung digunakan untuk keperluan pembangkitan tanpa harus lama menunggu di gudang.

The ITO value of PLN NP in 2022 was 13 days, which was faster compared to 2021 of 17 days. The increase was mainly due to more precise and accurate operation and maintenance planning during 2022, so that purchased goods (stock) could be used immediately for electric power generator purposes without having to wait long in the warehouse.

Grafik ITO (hari)
Chart of ITO (day)

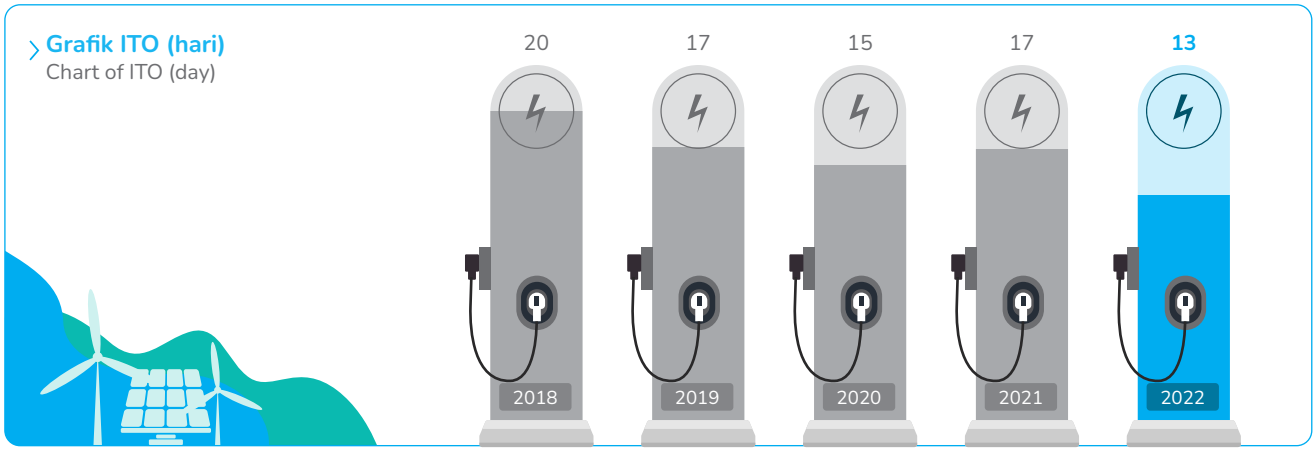

Total Asset Turn Over (TATO)

TATO merupakan rasio yang menggambarkan perputaran aset diukur dari penjualan. Jadi semakin besar rasio ini semakin baik yang berarti bahwa aset dapat lebih cepat berputar dan meraih laba dan menunjukkan semakin efisien penggunaan keseluruhan aset dalam menghasilkan penjualan.

TATO is a ratio that describes asset turnover measured from sales. Therefore, the greater this ratio, the better, which means that assets can turn faster and achieve profits, and show the more efficient use of overall assets in generating sales.

Nilai TATO PLN NP tahun 2022 adalah 0,16 kali lebih rendah dibandingkan nilai TATO di tahun 2021 yaitu 0,17 kali. Hal tersebut terjadi karena menurunnya Pendapatan Usaha dari penjualan tenaga listrik PLN NP (Pembangkit Non – PLTU Batubara) dan optimasi PLTU Batubara pada Sistem Kelistrikan Jawa Bali.

The TATO value of PLN NP in 2022 was 0.16 times lower than the TATO value in 2021 of 0.17 times. This occurred due to a decrease in Revenue from the sale of PLN NP electricity (Non-Coal CFPP) and Coal CFPP optimization in the Java-Bali Electricity System.

Grafik TATO (hari)
Chart of TATO (day)

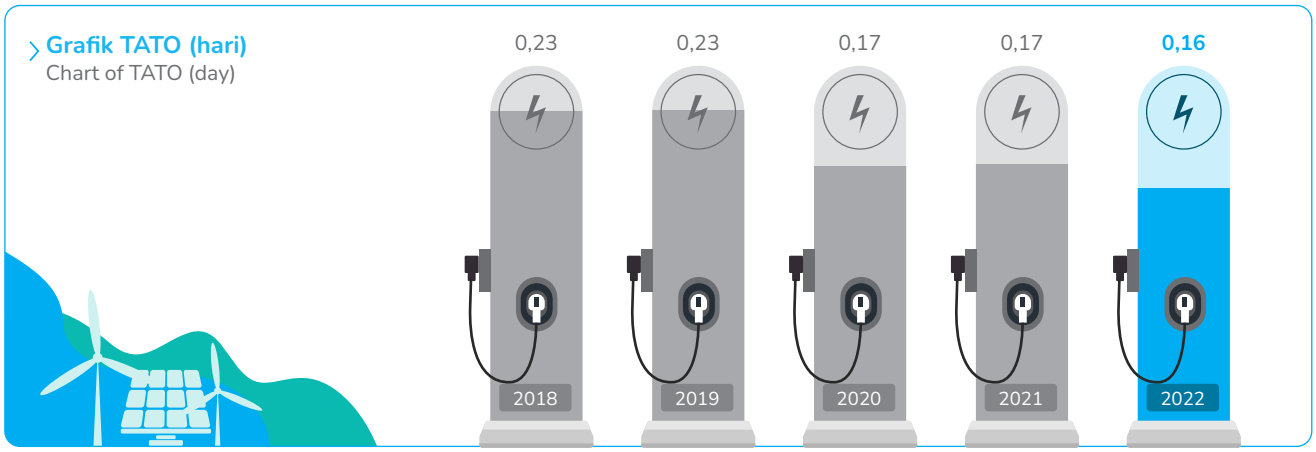

Struktur Modal
Capital Structure

Struktur modal adalah perbandingan antara liabilitas dan ekuitas. Liabilitas terdiri dari jangka panjang dan jangka pendek, sedangkan ekuitas terdiri dari saham disetor dan laba ditahan. PLN NP senantiasa mengelola struktur modal untuk mendukung keberlanjutan bisnis dan memaksimalkan imbalan bagi Pemegang Saham.

Capital structure is the comparison between liabilities and equity. Liabilities consist of long-term and short-term, while equity consists of paid-in shares and retained earnings. PLN NP continuously manages its capital structure to support business sustainability and maximize returns for Shareholders.

Struktur Modal tahun 2022 didominasi oleh Ekuitas yaitu sebesar Rp162,35 triliun atau 92,82%, sedangkan Liabilitas sebesar Rp12,57 triliun, atau 7,18%.

The Capital Structure in 2022 was dominated by Equity of Rp162.35 trillion or 92.82%, while Liabilities were Rp12.57 trillion or 7.18%.

Tabel Struktur Modal (Rp juta)
Table of Capital Structure (Rp million)

Uraian Description	2020		2021		2022	
Liabilitas Liabilities	10.246.069	5,84	10.994.563	6,39	12.567.841	7,18
Ekuitas Equity	165.314.951	94,16	161.169.265	93,61	162.355.088	92,82
Aset Assets	**175.561.020**	**100,00**	**172.163.828**	**100,00**	**174.922.929**	**100,00**

Grafik Struktur Modal (%)
Chart of Capital Structure (%)

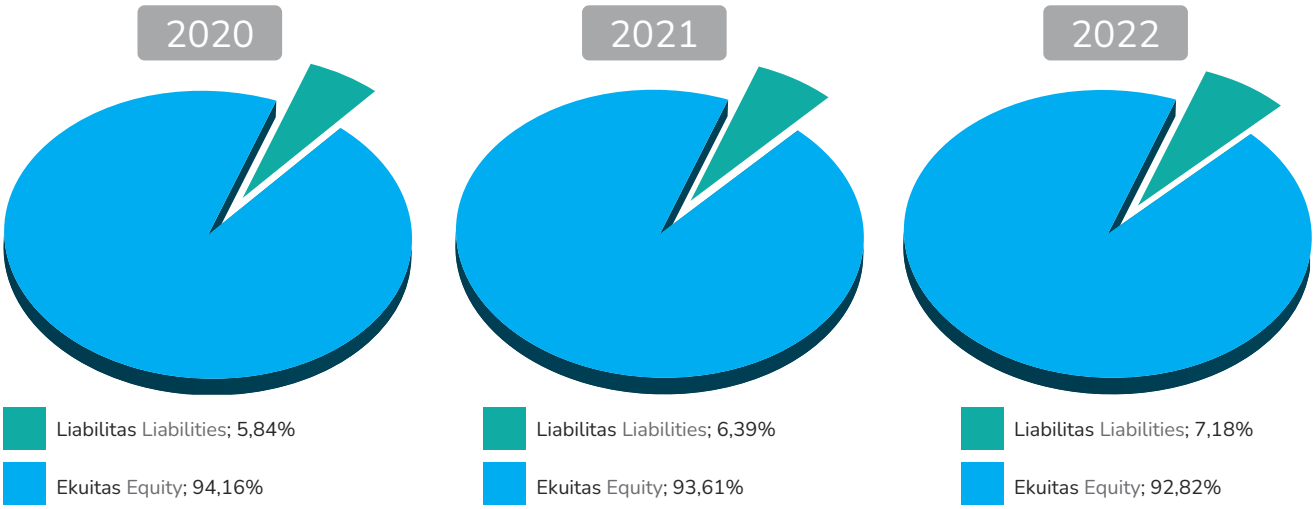

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal
Management Policy on Capital Structure

Manajemen mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa perusahaan akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan usaha dan untuk memastikan pemenuhan batas rasio kecukupan modal. Kebijakan struktur modal tidak hanya ditentukan oleh faktor

The management manages capital risk to ensure that the Company will be able to continue its business continuity and to ensure the fulfillment of capital adequacy ratio limits. Capital structure policy is not only determined by internal and external factors that affect

internal dan eksternal yang mempengaruhi risiko dan *control*, tetapi juga ditentukan oleh nilai, tujuan, preferensi, dn keinginan manajemen sebagai input pada keputusan struktur modal, yang memiliki implikasi pada kinerja keuangan suatu Perusahaan. Struktur modal yang baik ditujukan untuk mengelola risiko modal dan memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan usaha dan untuk memastikan pemenuhan batasan rasio kecukupan modal.

Manajemen Perusahaan secara berkala melakukan tinjauan struktur permodalan untuk meminimalkan biaya modal sehingga dapat memaksimalkan nilai Perusahaan. Sebagai bagian dari tinjauan ini, Manajemen mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan. Oleh karena itu, kebijakan Perusahaan dalam mencari pendanaan akan selalu memperhitungkan risiko keuangan yang mungkin timbul di masa depan. Struktur modal yang sehat dapat melindungi Perusahaan dari risiko finansial melalui komposisi utang dan ekuitas secara bijaksana. Struktur modal dapat menunjukkan proporsi utang dan ekuitas yang bisa menghasilkan modal rata-rata tertimbang terendah untuk Perusahaan.

risk and control, but also determined by the values, objectives, preferences, and desires of management as input to capital structure decisions, which have implications on the financial performance of a Company. A good capital structure is intended to manage capital risk and ensure that they will be able to continue as a going concern and to ensure the fulfillment of capital adequacy ratio limits.

The Company's management periodically reviews its capital structure to minimize the cost of capital so as to maximize the value of the Company. As part of this review, the Management considers the capital costs and related risks. Therefore, the Company's policy in seeking funding will always take into account the financial risks that may arise in the future. A sound capital structure can protect the Company from financial risks through a wise composition of payables and equity. The capital structure can show the proportion of debt and equity that can generate the lowest weighted average capital for the Company.

Dasar Pemilihan Kebijakan Struktur Modal
Basis for Capital Structure Policy Selection

Perusahaan menetapkan kebijakan terkait struktur modal dengan mempertimbangkan:
1. Biaya permodalan dan risiko yang berhubungan;
2. Meminimalisir biaya modal untuk memaksimalkan nilai Perusahaan
3. Memitigasi risiko di masa depan dengan memperhitungkan risiko keuangan dalam pendanaan
4. Peningkatan kesiapan modal kerja untuk operasional dan investasi
5. Alternatif skema pembiayaan dari perbankan dan non perbankan
6. Efisiensi biaya operasional Perusahaan
7. Pengelolaan aset untuk mendapatkan nilai tambah bagi Perusahaan

The Company determines policies related to capital structure by considering:
1. Capital costs and related risks
2. Minimizing the capital cost to maximize the Company value
3. Mitigating future risks by taking into account financial risks in funding
4. Improved working capital readiness for operations and investment
5. Alternative financing schemes from banks and non-banks
6. Company's operational cost efficiency
7. Asset management to obtain added value for the Company

Tingkat Likuiditas Perusahaan
Liquidity Ratio of the Company

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang akan jatuh tempo. Perusahaan melakukan *monitoring* berkala secara konsisten terhadap tingkat likuiditas Perusahaan. adapun rasio likuiditas Perusahaan di tahun 2022 yaitu rasio kas sebesar 201,36%, rasio cepat sebesar 707,84%, dan rasio lancar sebesar 750,64%.

PLN NP uses liquidity ratio to measure the Company's ability in fulfilling the maturing short-term obligations. The Company consistently monitors the liquidity ratio. The Company's liquidity ratio in 2022 was cash ratio of 201.36%, quick ratio of 707.84%, and current ratio of 750.64%.

Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal
Material Commitments for Capital Goods Investment

Perjanjian Pengadaan Bahan Bakar
Fuel Procurement Agreement

Nama Pihak dan Tujuan Pengadaan Bahan Bakar
Name of the Party and Purposes of Fuel Procurement

Pada tahun 2022, PLN NP memiliki ikatan material untuk pengadaan bahan bakar dengan beberapa pemasok diantaranya perjanjian pengadaan batubara, perjanjian pengadaan gas alam, dan perjanjian pengadaan bahan bakar minyak (BBM). Tujuan dari adanya perikatan ini agar Perusahaan memperoleh bahan bakar yang bermutu tinggi tanpa mengesampingkan efisiensi biaya modal. Sehingga dapat menunjang dengan baik keandalan kegiatan pembangkitan tenaga listrik. Berikut adalah bentuk bentuk perikatan pengadaan bahan bakar tersebut:

In 2022, PLN NP had material commitments for fuel procurement with several suppliers including coal procurement agreements, natural gas procurement agreements, and fuel procurement agreements. The purpose of these commitments is for the Company to obtain high quality fuel without compromising capital cost efficiency. So that it can support well the reliability of electric power generator activities. The following are the forms of commitments for fuel procurement:

Perjanjian Pengadaan Batubara
Coal Procurement Agreement

Pemasok Supplier	Nomor Kontrak Contact Number	Satuan Unit	Jumlah Total	Periode Period
PT PLN Batubara	013.PJ/061/PJB-PLNBB/V/2020	Metrik ton Metric ton	Sesuai kebutuhan As needed	Maret 2020 - Desember 2040 March 2020 – December 2040
PT Kaltim Prima Coal	070.PJ/061/2018	Metrik ton Metric ton	3.120.000	Januari 2019 - Desember 2021* January 2019 – December 2021*
PT Global Energi Lestari	043.PJ/061/2021	Metrik ton Metric ton	103.205	Agustus 2021 - Februari 2023 August 2021 – February 2023
PT Bara Tabang	093.PJ/061/2022	Metrik ton Metric ton	1.320.000	November 2022 -September 2023 November 2022 -September 2023
PT Berkah Berjaya Energi Indonesia	054.PJ/061/2022	Metrik ton Metric ton	500.000	Agustus 2022 - Juni 2023 August 2022 – June 2023
PT Anugrah Borneo Sinergy	SPK No. Z6103904R	Metrik ton Metric ton	90.000	September 2022 - Juli 2023 September 2022 – July 2023
PT Borneo Inter Global	SPK No. Z6105103R	Metrik ton Metric ton	220.000	Desember 2022 – Oktober 2023 December 2022 – October 2023

*Berlaku sampai kuota terpenuhi
*Valid until the quota is fulfilled

Pada tanggal 31 Desember 2021, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk dan atas nama Menteri ESDM menerbitkan surat No. B-1605/MB.05/DJB.B/2021 (Surat B-1605) yang antara lain mengatur bahwa seluruh pemegang PKP2B, IUP, IUPK Operasi Produksi, IUPK Kelanjutan Kontrak/Perjanjian Operasi, dan pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara, yaitu:

1. Dilarang melakukan penjualan batubara ke luar negeri sejak tanggal 1 sampai dengan 31 Januari 2022.
2. Wajib memasok seluruh produksi batubaranya untuk memenuhi kebutuhan listrik untuk kepentingan umum sesuai kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO) dan/atau penugasan dari Pemerintah kepada perusahaan dan/atau kontrak dengan PLN dan *Independent Power Producer* (IPP).
3. Dalam hal sudah terdapat batubara di pelabuhan muat dan/atau telah dimuat di kapal, harus segera dikirim ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik Grup PLN dan IPP yang pelaksanaannya agar segera diselesaikan dengan PLN. Dalam Surat B-1605 juga terdapat informasi bahwa larangan ekspor batubara akan dievaluasi dan ditinjau berdasarkan realisasi pasokan batubara untuk pembangkit listrik tenaga batubara PLN dan IPP.

Pada tanggal 19 Januari 2022, KESDM mengeluarkan Keputusan Menteri No. 13.K/HK.021/MEM.B/2022 yang mengatur tentang pedoman pengenaan sanksi administratif, larangan ekspor batubara, pengenaan denda dan pemberian dana kompensasi untuk memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri.

Selama tahun 2022, harga dasar batubara di tempat penyerahan stockpile unit berkisar antara Rp603.838 (nilai penuh) sampai dengan Rp1.093.608 (nilai penuh) per ton, yang disesuaikan terhadap nilai kalori, kadar abu, sulfur, air, *Ash Fusion Temperature* (AFT), *Hardgrove Grindability Index* (HGI) dan ukuran batubara.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 07 tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara, seluruh harga dasar kontrak diatas akan ditinjau secara periodik setiap 3 (tiga) bulanan untuk disesuaikan dengan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang AS$, dan harga dasar bahan bakar minyak HSD untuk industri.

Sehubungan dengan perjanjian jual beli batubara, pemasok diwajibkan untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan.

On December 31, 2021, the Director General of Mineral and Coal for and on behalf of the Minister of EMR issued letter No.B-1605/MB.05/DJB.B/2021 (Letter B-1605) which, among others, stipulates that all holders of PKP2B, IUP, Production Operation IUPK, Contract Continuity/Operation Agreement IUPK, as well as Coal Transportation and Sales License holders, namely:

1. Prohibited from selling coal abroad since January 1 to 31, 2022.
2. Required to supply all of its coal production to fulfill electricity needs for the public interest in accordance with the Domestic Market Obligation (DMO) and/or assignments from the Government to the Company and/or contracts with PLN and Independent Power Producer (IPP).
3. In the event that coals are already present at the loading port and/or have been loaded on the ship, it must be delivered immediately to the Steam Power Plant ("CFPP") owned by PLN Group and IPP, the implementation of which should be immediately settled with PLN. There is also information in Letter B-1605 that the coal export ban will be evaluated and reviewed based on the realization of coal supply for coal-fired power plants of PLN and IPP.

On January 19, 2022, the Ministry of Energy and Mineral Resources issued the Ministerial Decree No. 13.K/HK.021/MEM.B/2022 which regulates the guidelines for imposing administrative sanctions, coal export bans, imposing fines and providing compensation funds to fulfill domestic coal needs.

During 2022, the basic price of coal at the delivery point of the stockpile unit ranged from Rp603,838 (full amount) to Rp1,093,608 (full amount) per ton, adjusted for calorific value, ash content, sulfur, water, Ash Fusion Temperature (AFT), Hardgrove Grindability Index (HGI) and coal size.

In accordance with the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 07 of 2017 concerning Procedures for Determining Sales Benchmark Prices for Metal Minerals and Coal, all of the above basic contract prices will be reviewed periodically every 3 (three) months to be adjusted to the Rupiah exchange rate against the US$, and the basic price of HSD fuel oil for industry.

In connection with the coal trading agreement, suppliers are required to assure guarantees.

Perjanjian Pengadaan Gas Alam
Natural Gas Procurement Agreement

Sektor Sector	Pemasok Supplier	Nomor/Tanggal Kontrak Number/Date of Contract	Periode Period	Satuan Unit	Jumlah Total
Gresik	PT Pertamina Hulu Energi WMO	Kesepakatan Bersama Perjanjian Jual Beli Gas Joint Agreement of Gas Sale and Purchase Agreement	2016 – 2023	BCF	837.692
Gresik	PGN SAKA (SIPL)	Amandemen GSA 8 Nov 2011 Amendment to GSA Nov 8, 2011	2016 – 2023	BCF	330.20
Gresik	Kangean Energy Indonesia	462.PJ AMDII/041/DIR/2010 beserta Amandemen kesepakatannya 462.PJ AMDII/041/DIR/2010 along with the Amendment to the agreement	2016 – 2023	BCF	371.00
Gresik	PT Petrogas Jatim Utama	061.PJ/061/2013 beserta Adendum dan kesepakatannya 061.PJ/061/2013 along with the Addendum and agreement	2016 – 2023	BCF TBTU	41.59 7.30
Muara Karang	PT Pertamina Hulu Energi ONWJ	0083.Pj/EPI.01.03/C01050000/2022	2016 – 2023	BCF	5.475
Muara Karang	PT Perusahaan Gas Negara	0041.Pj/Epi.01.02/F01010600/2022	2016 – 2023	BCF	7.227
Muara Tawar	PT Pertamina EP	0103-2.PJ/EPI.01.02/DIR/2019	2016 – 2023	BCF	29.244
Muara Karang & Muara Tawar	PT Nusantara Regas	PLN.273.PJ/041/DIR/2012	2016 – 2023	BCF	191
Muara Karang & Muara Tawar	PT Tangguh PSC	0237.PJ/EPI.01.02/DIRUT/2016	2016 – 2023	BCF	732
Muara Karang & Muara Tawar	PT Pertamina (Persero)	0592.PJ/EPI.01.02/DITDAN-2/2017	2016 – 2023	BCF	sesuai kebutuhan As needed

*Dalam proses perpanjangan
*In the extension process

Harga realisasi pembelian gas pipa pada titik penyerahan di tahun 2022 berkisar antara AS$6,17 sampai dengan AS$13,59 dan Rp94.106 (nilai penuh) sampai dengan Rp213.925 (nilai penuh) per *Million British Thermal Unit* (MMBTU)/*Million Standard Cubic Feet* (MSCF).

The realized purchase price of pipeline gas at the delivery point in 2022 ranged from US$6.17 to US$13.59 and Rp94,106 (full amount) to Rp213,925 (full amount) per Million British Thermal Units (MMBTU)/Million Standard Cubic Feet (MSCF).

Perjanjian Pengadaan Bahan Bakar Minyak
Fuel Procurement Agreement

Perusahaan melalui PLN dan Pertamina mengadakan Perjanjian Induk Jual Beli Bahan Bakar Minyak No.071.PJ/060/DIR/2001 tanggal 8 Oktober 2001. Perjanjian ini telah diadendum pada tanggal 16 Mei 2007, dimana PLN dan Pertamina menyepakati antara lain:

The Company through PLN and Pertamina made a Master Agreement for Fuel Sale and Purchase No.071.PJ/060/DIR/2001 dated October 8, 2001. This agreement has been amended on May 16, 2007, where PLN and Pertamina agreed among others:

1. Penggunaan harga bahan bakar bulanan ditetapkan oleh Pertamina untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 April 2007 dan harga bahan bakar 109,5% dari *Mid Oil Platts Singapore* (MOPS) ditambah PPN untuk periode 1 Mei 2007 sampai dengan 31 Desember 2007.
2. Harga bahan bakar setelah tanggal 31 Desember 2007 akan ditetapkan oleh kedua belah pihak setiap tahun.
3. Jangka waktu pembayaran berikut pengenaan denda keterlambatan pembayaran sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia bulanan ditambah 1,3%.
4. Efektif mulai 1 Mei 2007, saldo utang yang belum dibayar atas pembelian bahan bakar sampai dengan 30 April 2007 dikenakan bunga sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia per tahun ditambah 1,3%, sampai diselesaikan dengan menerbitkan obligasi PLN paling lambat tanggal 31 Agustus 2007.
5. Utang kepada Pertamina, termasuk obligasi yang akan diterbitkan maksimum sebesar Rp18 triliun.
6. Perjanjian ini berlaku untuk 5 tahun sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.
7. Sucofindo ditunjuk sebagai *surveyor* independen.
   Perjanjian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Berdasarkan Adendum VIII tertanggal 8 Februari 2022, kesepakatan harga jual beli bahan bakar minyak (HSD dan MFO) sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2023 antara Pertamina dan Perusahaan adalah sebagai berikut:
   a. Terhitung sejak 1 September 2021, seluruh tanggung jawab, hak dan kewajiban Pertamina berdasarkan perjanjian dialihkan kepada PT Pertamina Patra Niaga.
   b. Perubahan formulasi harga bahan bakar minyak yang berlaku sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023.
   c. Penyerahan BBM pada tanggal 1 hingga akhir bulan, MOPS, Jakarta *Interbank Spot Dollar* (JISDOR) dan Jakarta *Interbank Offered Rate* (JIBOR) yang berlaku adalah rata-rata tengah MOPS, rata-rata JISDOR dan rata-rata JIBOR selama 1 bulan, yang terbit sejak tanggal 25 pada 2 bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 24 pada 1 bulan sebelum bulan penyerahan BBM.

Perusahaan telah mencatat pembelian HSD dan MFO selama tahun 2022 berdasarkan harga tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo utang usaha atas pembelian bahan bakar kepada Pertamina adalah masing-masing sebesar Rp24,46 miliar dan Rp833,45 miliar.

1. The use of monthly fuel prices was determined by Pertamina for the period January 1 to April 30, 2007 and fuel prices of 109.5% from Mid Oil Platts Singapore (MOPS) plus VAT for the period May 1, 2007 to December 31, 2007.
2. Fuel prices after December 31, 2007 will be determined by both parties annually.
3. Payment period and penalty charges for late payment amounted to the interest rate of the monthly Certificate of Bank Indonesia plus 1.3%.
4. Effective starting May 1, 2007, the unpaid balance of payables for fuel purchases up to April 30, 2007 will be subject to interest at the interest rate per year of the Certificate of Bank Indonesia plus 1.3%, until settled by issuing PLN bonds no later than August 31, 2007.
5. Payables to Pertamina, including bonds that will be issued, amount to a maximum of Rp18 trillion.
6. This agreement is valid for 5 years since January 1, 2007 until December 31, 2011.
7. Sucofindo was appointed as the independent surveyor.
   The agreement has been amended several times. Based on Addendum VIII dated February 8, 2022, the agreement on the sale and purchase price for fuel (HSD and MFO) from January 1, 2021 to December 31, 2023 between Pertamina and the Company is as follows:
   a. As of September 1, 2021, all responsibilities, rights and obligations of Pertamina based on the agreement are transferred to PT Pertamina Patra Niaga.
   b. Changes in fuel oil price formulation effective from January 1, 2022 to December 31, 2023.
   c. Fuel delivery on the 1st to the end of the month, the applicable MOPS, Jakarta Interbank Spot Dollar (JISDOR) and Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) are the middle average of MOPS, average JISDOR and average JIBOR for 1 month, published from the 25th of the previous 2 months to the 24th of the 1 month before the month of fuel delivery.

The Company has recorded HSD and MFO purchases during 2022 based on these prices.

On December 31, 2022 and 2021, the balance of trade payables for fuel purchases to Pertamina were Rp24,455 and Rp833,450, respectively.

RKAP Biaya Bahan Bakar
ABOP on Fuel Cost

RKAP untuk biaya bahan bakar tahun 2022 sebesar Rp11.019.163 juta.

The ABOP for fuel costs in 2022 was Rp11,019,163 million.

Mata Uang yang Menjadi Denominasi Pengadaan Bahan Bakar
Denominated Currency for Fuel Procurement

Sampai dengan 31 Desember 2022, perincian ikatan material untuk pengadaan bahan bakar berdasarkan mata uang adalah Rupiah (Rp).

Until December 31, 2022, the details of material commitments for fuel procurement based on currency were Rupiah (Rp).

Langkah-Langkah Perlindungan Risiko Mata Uang atas Pengadaan Bahan Bakar
Currency Risk Protection Measures for Fuel Procurement

Perusahaan memiliki eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar yang timbul dari transaksi dengan pelanggan maupun pemasok yang didenominasi dalam mata uang asing, sehingga Perusahaan terekspos terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Untuk menghindari risiko terkait beberapa perikatan pengadaan bahan bakar dengan para pemasok termasuk didalamnya risiko keuangan dan risiko pasar (risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Manajemen menelaah dan mengeluarkan kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko (mitigasi risiko). Dengan menerapkan kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalisasi pengaruh dari ketidakpastian risiko keuangan terhadap kinerja keuangan Perusahaan.

The Company has exposure to exchange rate fluctuations arising from transactions with customers and suppliers that are denominated in foreign currencies, thus the Company is exposed to foreign exchange rate fluctuations. To avoid risks related to several fuel procurement commitments with suppliers including financial and market risks (foreign currency risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. Management reviews and issues policies to manage each risk (risk mitigation). By implementing risk management policies that aim to minimize the effect of uncertain financial risks on the Company's financial performance.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 07 tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara, seluruh harga dasar kontrak diatas akan ditinjau secara periodik setiap 3 (tiga) bulanan untuk disesuaikan dengan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang AS$, dan harga dasar bahan bakar minyak HSD untuk industri. Sehubungan dengan perjanjian jual beli batubara, pemasok diwajibkan untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan.

In accordance with the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 07 of 2017 concerning Procedures for Determining Sales Benchmark Prices of Metal Minerals and Coal, all of the above basic contract prices will be reviewed periodically every 3 (three) months to be adjusted to the Rupiah exchange rate against the US$, and the basic price of HSD fuel oil for industry. In connection with the coal sale and purchase agreement, the supplier is required to assure guarantees.

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL)

Power Purchase Agreement (PPA)

Perusahaan memiliki sejumlah PJBTL dengan PLN. Dalam perjanjian tersebut, PLN membayar pasokan tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan formula pembayaran. Pembayaran tersebut mencakup komponen biaya kapasitas, energi, operasional dan pemeliharaan yang tergantung pada tingkat pasokan energi serta variabel lain yang ditentukan dalam perjanjian.

Pada tanggal 30 Desember 2022, PLN dan Perusahaan telah menandatangani 20 amandemen dan pernyataan kembali PJBTL yang terdiri dari: 5 Buku PJBTL atas wilayah Jawa-Bali, 7 Buku PJBTL atas wilayah Sumatera, 4 atas Buku PJBTL atas wilayah Kalimantan, dan 4 Buku PJBTL atas wilayah Sulawesi. Amandemen dan pernyataan kembali PJBTL tersebut akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2023 dengan periode kontrak dari tahun 2023 sampai dengan 2032.

The Company has a number of PPAs with PLN. Under these agreements, PLN pays for electricity supply provided by the Company at an amount determined based on a payment formula. The payment includes the components of capacity, energy, operational and maintenance costs which depend on the level of energy supply as well as other variables determined in the agreement.

On December 30, 2022, PLN and the Company have signed 20 PPA amendments and restatements consisting of: 5 PPA Books for Java-Bali region, 7 PPA Books for Sumatera region, 4 PPA Books for Kalimantan region, and 4 PPA Books for Sulawesi region. The amendment and restatement of the PPA will be effective on January 1, 2023 with contract period from 2023 to 2032.

Perjanjian Pengadaan dan Pemeliharaan

Procurement and Maintenance Agreement

Nama Pihak dan Tujuan Pengadaan dan Pemeliharaan

Name of the Party as well as Purposes of Procurement and Maintenance

Perusahaan memiliki beberapa Perjanjian Jasa Operasi dan Pemeliharaan sampai dengan 31 Mei 2025. Sebagai tindak lanjut pembentukan *subholding*, manajemen berkeyakinan bahwa Perjanjian Jasa Operasi dan Pemeliharaan akan diterminasi sejak 1 Januari 2023.

Selain itu, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Jasa Operasi dan Pemeliharaan PLTU Sambelia (2x50 MW) tahap *Supporting Based* pada tanggal 29 November 2021. Masa penyelesaian kontrak sampai dengan 30 November 2022. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, kontrak masih dalam proses perpanjangan.

The Company has several Operation and Maintenance Service Agreements until May 31, 2025. As a follow-up to the establishment of the subholding, management believes that the Operation and Maintenance Services Agreement will be terminated since January 1, 2023.

In addition, the Company has signed the Operation and Maintenance Services Agreement for Sambelia CFPP (2x50 MW) at the Supporting Based stage on November 29, 2021. The contract completion period is up to November 30, 2022. Up to the completion date of the consolidated financial statements, the contract is still in the extension process.

RKAP Pemeliharaan

ABOP on Maintenance

- RKAP pemeliharaan eksisting tahun 2022 sebesar Rp928.399 juta.
- RKAP pemeliharaan Jasa O&M tahun 2022 sebesar Rp3.871.543 juta.

- ABOP on the existing maintenance in 2022 was Rp928,399 million.
- ABOP on the O&M Services maintenance in 2022 was Rp3,871,543 million.

Mata Uang yang Menjadi Denominasi Pengadaan dan Pemeliharaan
Denominated Currency for Procurement and Maintenance

Sampai dengan 31 Desember 2022, perincian ikatan material untuk pengadaan dan pemeliharaan berdasarkan mata uang adalah Rupiah (Rp).

Until December 31, 2022, the details of material commitments for procurement and maintenance based on currency were Rupiah (Rp).

Langkah-Langkah Perlindungan Risiko Mata Uang atas Pengadaan dan Pemeliharaan
Currency Risk Protection Measures for Procurement and Maintenance

Dalam hal perikatan pengadaan dan pemeliharaan, PLN NP tidak menggunakan mata uang asing sehingga tidak dilakukan langkah perlindungan risiko dari posisi mata uang asing terkait berupa mengelola eksposur mata uang asing dalam batas yang dapat diterima atas setiap kenaikan dan penurunan Rupiah terhadap mata uang asing yang relevan.

In terms of procurement and maintenance commitments, PLN NP does not use foreign currencies so that no risk protection measures of the related foreign currency positions are taken in the form of managing foreign currency exposures within acceptable limits of every increase and decrease in Rupiah to the relevant foreign currencies.

Perolehan Barang Modal
Acquisition of Capital Expenditures

Pada tanggal 19 Desember 2017, Perusahaan telah menandatangani perjanjian novasi dengan PLN, Konsorsium Doosan Heavy Industries and Construction Co. Ltd. dan PT Hutama Karya (Persero) sehubungan dengan Perjanjian Kontrak No. 0125.PJ/DAN.02.01/ DIR/2017, tertanggal 29 Maret 2017 untuk proyek add on PLTGU Muara Tawar Blok 2, 3 dan 4. Perjanjian tersebut terakhir diubah yaitu Addendum II, pada tanggal 1 September 2021 terkait kerja tambah untuk pekerjaan pemancangan. Sehubungan dengan perjanjian diatas, Perusahaan mempunyai fasilitas *stand-by letter of credit.*

On December 19, 2017, the Company has signed a novation agreement with PLN, Consortium of Doosan Heavy Industries and Construction Co. Ltd. and PT Hutama Karya (Persero) in connection with Contract Agreement No. 0125.PJ/DAN.02.01/ DIR/2017, dated March 29, 2017 for the add on project of Muara Tawar Block 2, 3 and 4 CCPP. The agreement was last amended, namely Addendum II, on September 1, 2021 related to additional work for piling work. In connection with the above agreement, the Company has a stand-by letter of credit facility.

RKAP Barang Modal
ABOP on Capital Expenditures

RKAP untuk *Add On* Muara Tawar Blok 2,3,4 tahun 2022 sebesar Rp1.013.093 juta.

The ABOP for Add On Muara Tawar Block 2,3,4 in 2022 was Rp1,013,093 million.

Mata Uang yang Menjadi Barang Modal
Denominated Currency for Capital Expenditure

Sampai dengan 31 Desember 2022, perincian ikatan material untuk barang berdasarkan mata uang adalah Japan Yen, Korea Won, Amerika Dollar, dan Euro Eropa. Hal ini berdasarkan adanya fasilitas *stand-by letter of credit.*

Until December 31, 2022, the details of material commitments for goods based on currency were Japan Yen, Korean Won, American Dollar, and European Euro. This was based on the stand-by letter of credit facility.

Langkah-Langkah Perlindungan Risiko Mata Uang atas Barang Modal
Currency Risk Protection Measures for Capital Expenditure

Dalam hal perikatan perjanjian atas barang modal, apabila Perusahaan memiliki eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar yang timbul dari transaksi dengan pelanggan maupun pemasok yang didenominasi dalam mata uang asing. Perusahaan melakukan penilaian atas kenaikan dan penurunan atas sensitivitas nilai tukar yang menggambarkan penilaian manajemen terhadap perubahan yang rasional pada nilai tukar setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini. Analisis sensitivitas ini hanya mencakup saldo item moneter setelah pajak dalam mata uang asing dan menyesuaikan translasi pada akhir tahun untuk 10% perubahan dalam nilai tukar mata uang asing.

In terms of the commitments of capital expenditure agreements, if the Company has exposure to exchange rate fluctuations arising from transactions with customers and suppliers that are denominated in foreign currencies. The Company assesses the increases and decreases in exchange rate sensitivity which reflects management's assessment of rational changes in exchange rates after considering current economic conditions. This sensitivity analysis includes only after-tax balances of monetary items in foreign currencies and adjusts translations at the end of the year for 10% changes in foreign exchange rates.

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi mata uang fungsional menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, setiap aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing menggunakan kurs yang berlaku pada akhir tahun pelaporan diakui dalam laba rugi.

Transactions in foreign currencies are translated into the functional currency using the exchange rate prevailing at the date of the transaction. At the reporting date, each monetary asset and liability denominated in a foreign currency is adjusted to reflect the exchange rate prevailing at that date. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of foreign currency transactions and from the translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies using the exchange rates prevailing at the end of the reporting period are recognized in profit or loss.

Realisasi Investasi Barang Modal
Realization of Capital Goods Investment

PLN NP melakukan investasi barang modal dalam bentuk aset tetap berupa tanah, bangunan umum, waduk dan prasarana, instalasi dan mesin pembangkit, perlengkapan transmisi dan distribusi, perlengkapan umum dan kendaraan bermotor. Selain itu juga terdapat investasi pada penguatan pembangkitan dan pengembangan usaha pembangkitan. Secara umum, tujuan investasi barang modal yang dilakukan Perusahaan adalah untuk mendukung kinerja operasional Perusahaan sehingga pembangkit semakin efisien dan andal serta memperlancar proses bisnis.

PLN NP invests in capital goods in the form of property, plant, and equipment, including land, buildings, reservoirs and infrastructure, installations and power plants, transmission and distribution equipments, general equipment and motor vehicles. In addition, there are also investments in electric power generator strengthening and business development. In general, the purpose of investment in capital goods conducted by the Company is to support the Company's operational performance so that the power plant is more efficient and reliable as well as to facilitate business processes.

Investasi Barang Modal pada Aset Tetap
Capital Goods Investment in Property, Plant, and Equipment

Investasi barang modal PLN NP pada aset tetap di tahun 2022 adalah sebesar Rp1,72 triliun meningkat 48,95% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp1,15 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh tambahan aset baru yang signifikan seiring Proyek/*Project add-on* PLTGU Muara Tawar Blok 2 telah COD pada 31 Desember 2022.

PLN NP's capital goods investment in property, plant and equipment in 2022 was Rp1.72 trillion, increased by 48.95% compared to 2021 of Rp1.15 trillion. The increase was mainly influenced by the significant addition of new assets along with the add-on Project of Muara Tawar Block 2 CCPP which has COD on December 31, 2022.

Tabel Jenis, Tujuan, dan Nilai Investasi Barang Modal Aset Tetap

Table of Type, Purpose, and Value of Capital Goods Investment in Property, Plant, and Equipment

Jenis Investasi Barang Modal Type of Capital Goods Investment	Tujuan Investasi Investment Purpose	Realisasi Kegiatan Investasi (Rp juta) Realization of Investment Activities (Rp million)		Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease (%)
		2021	2022	
Tanah Land	Pembangunan pembangkit baru Building new power plant	-	-	-
Bangunan Umum, Waduk dan Prasarana Buildings, Reservoirs, and Infrastructure	Operasional Perusahaan Company Operational	18.646	165.521	787,70
Instalasi dan Mesin Pembangkit Installations and Power Plants	Efisiensi dan keandalan pembangkit Power plant efficiency and reliability	77.812	187.725	141,25
Peralatan Transmisi dan Distribusi Trasmissions and Distribution Equipment	Operasional Perusahaan Company Operational	26.291	3.906	(85,14)
Perlengkapan, Pengolahan Data, dan Telekomunikasi Telecommunications and Data Processing Equipment	Operasional Perusahaan Company Operational	-	49	-
Perlengkapan Umum General Equipment	Operasional Perusahaan Company Operational	101.342	64.220	(36,63)
Kendaraan Bermotor Motor Vehicles	Operasional Perusahaan Company Operational	11.627	8.214	(29,35)
Material Cadang Utama Main Spare Parts		-	13.212	-
Aset dalam Pembangunan Assets in Development	Operasional Perusahaan Company Operational	858.083	1.227.332	43,03
Aset Hak Guna Right-of-Use Assets		44.991	46.213	2,72
Aset Tidak Digunakan dalam Operasi Assets Not Used in Operations	Operasional Perusahaan Company Operational	13.537	-	-
Jumlah Realisasi Kegiatan Investasi Total Realization of Investment Activities		1.152.329	1.716.392	48,95

Dengan capaian realisasi investasi di tahun 2022, maka jumlah Aset Tetap tahun 2022 adalah sebesar Rp122,53 triliun menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp124,15 triliun. Penurunan ini disebabkan karena beberapa aset yang sudah mencapai umur ekonomisnya.

With the achievement of investment realization in 2022, total Property, Plant and Equipment in 2022 was Rp122.53 trillion, decreased compared to 2021 of Rp124.15 trillion. This decrease was due to several assets that have reached their economic life.

Tabel Aset Tetap (Rp juta)

Table of Property, Plant and Equipment (Rp million)

Uraian Description	1 Januari 2022 January 1, 2022	Penambahan Addition	Pengurangan Deduction	Reklasifikasi Reclassification	31 Desember 2022 Desember 31, 2022
Biaya Perolehan: Acquisition Cost:					
Tanah dan Hak Atas Tanah Land and Land Rights	17.050.809	-	-	-	17.050.809
Bangunan Umum, Waduk dan Prasarana Buildings, Reservoirs, and Infrastructure	7.899.199	165.521	-	7.155	8.071.875
Instalasi dan Mesin Pembangkit Installations and Power Plants	87.981.243	187.725	-	3.069.370	91.238.338
Perlengkapan Transmisi dan Distribusi Transmissions and Distribution Equipment	4.287.673	3.906		10.819	4.302.398
Perlengkapan, Pengolahan Data, dan Telekomunikasi Telecommunications and Data Processing Equipment	5.908	49	-	-	5.957
Perlengkapan Umum General Equipment	1.267.806	64.220	-	37.976	1.370.002
Kendaraan Bermotor Motor Vehicles	164.351	8.214	-	(20.480)	152.085
Material Cadang Utama Main Spare Parts	20.789	13.212	-	-	34.001
Sub Jumlah Sub Total	**118.677.778**	**442.847**	**-**	**3.104.840**	**122.225.465**
Aset Hak Guna Right-of-Use Assets	126.211	46.213	(35.066)	-	137.358
Aset dalam Pembangunan Assets in Development	5.377.245	1.227.332	(87.040)	(2.906.578)	3.610.959
Aset Tidak Digunakan dalam Operasi Assets Not Used in Operations	1.903.100	-	-	(198.262)	1.704.838
Jumlah Biaya Perolehan **Total Acquisition Cost**	**126.084.334**	**1.716.392**	**(122.106)**	**-**	**127.678.620**
Akumulasi Penyusutan: **Accumulated Depreciation:**					
Bangunan Umum, Waduk dan Prasarana Buildings, Reservoirs, and Infrastructure	-	260.873	-	-	260.873
Instalasi dan Mesin Pembangkit Installations and Power Plants	-	2.639.140	-	(132)	2.639.008
Perlengkapan Transmisi dan Distribusi Transmissions and Distribution Equipment	-	123.201	-	-	123.201
Perlengkapan, Pengolahan Data, dan Telekomunikasi Telecommunications and Data Processing Equipment	-	1.112	-	-	1.112
Perlengkapan Umum General Equipment	970.830	123.266	-	(6.586)	1.087.510
Kendaraan Bermotor Motor Vehicles	121.601	12.662	-	(13.116)	121.147
Material Cadang Utama Main Spare Parts	-	703	-	-	703
Sub Jumlah Sub Total	**1.092.431**	**3.160.957**	**-**	**(19.834)**	**4.233.554**

Uraian Description	1 Januari 2022 January 1, 2022	Penambahan Addition	Pengurangan Deduction	Reklasifikasi Reclassification	31 Desember 2022 Desember 31, 2022
Aset Hak Guna Right-of-Use Assets	70.829	42.335	(22.404)	-	90.760
Aset Tidak Digunakan dalam Operasi Assets Not Used in Operations	759.671	33.496	(90)	19.834	812.911
Jumlah Akumulasi Penyusutan Total Accumulated Depreciation	**1.922.931**	**3.236.788**	**(22.494)**	**-**	**5.137.225**
Penyisihan Penurunan Nilai Provision for Impairment	(10.135)	-	-	-	(10.135)
Nilai Buku Book Value	**124.151.268**	**(1.520.396)**	**(99.612)**	**-**	**122.531.260**

Investasi Barang Modal pada Pembangkitan, Pengembangan Usaha dan Penugasan

Capital Goods Investment in Electric Power Generator, Business Development, and Assignment

Selain investasi pada barang modal di aset tetap, PLN NP juga melakukan investasi barang modal dimana sebagian besar diprogramkan dalam rangka untuk penguatan kinerja *core business* aset eksisting dan pembiayaan program pengembangan usaha. Investasi tersebut pada tahun 2022 adalah sebesar Rp1,37 triliun meningkat 7,03% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp1,28 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan kapitalisasi penguatan pembangkit dan penambahan modal disetor di anak perusahaan.

Apart from capital goods investment in property, plant and equipment, PLN NP also invests in capital goods where the majority are programmed in order to strengthen the core business performance of the existing assets and financing business development programs. The investment in 2022 was Rp1.37 trillion, increased by 7.03% compared to 2021 of Rp1.28 trillion. The increase was mainly due to an increase in capitalization of power plant strengthening and additional paid-up capital in subsidiaries.

Tabel Investasi Barang Modal pada Pembangkitan, Pengembangan Usaha dan Penugasan

Table of Capital Goods Investment in Electric Power Generator, Business Development, and Assignment

Jenis dan Tujuan Investasi Types and Objectives of Investment	2021	2022
Penguatan Pembangkitan: Electric Power Generator Strengthening:		
Kapitalisasi Capitalization	134.783	318.376
Penguatan Sistem Pembangkit Power Plant Strengthening	194.788	99.633
Penggantian Peralatan Utama Pembangkit Main Power Plant Equipment Replacement	154.712	79.190
Sistem dan Sarana Informatika Information Systems and Facilities	37.301	31.236
Jumlah Penguatan Pembangkitan Total Electric Power Generator Strengthening	**521.584**	**528.435**
Pengembangan Usaha Pembangkitan: Electric Power Generator Business Development:		
Pengembangan Usaha Pembangkitan Electric Power Generator Business Development	759.109	844.552
Jumlah Pengembangan Usaha Pembangkitan Total Electric Power Generator Business Development	**759.109**	**844.552**
Jumlah Investasi Barang Modal pada Penguatan dan Pengembangan Usaha Pembangkitan Total Capital Goods Investment in Electric Power Generator Strengthening and Business Development	**1.280.693**	**1.372.986**

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Perusahaan Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2023

Comparison between Target and Realization of Company Performance in 2022 and Projection for 2023

Target, Realisasi dan Proyeksi Kinerja Keuangan

Target, Realization, and Projection of Financial Performance

Sebelum dimulainya tahun anggaran baru PLN NP membuat target terkait kinerja yang akan dicapai untuk tahun mendatang dalam RKAP. Hal ini sebagai bentuk evaluasi Perusahaan dengan melakukan perbandingan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun 2 komponen inti untuk mengukur kinerja Perusahaan yang telah dicapai yaitu berdasarkan kinerja keuangan dan kinerja operasional. Kinerja keuangan diuraikan dalam pencapaian PLN NP pada target pendapatan dan laba Perusahaan sebagaimana pada Laporan Laba Rugi Komprehensif sebagai berikut:

Prior to the commencement of the new fiscal year, PLN NP set targets related to the performance that will be achieved for the coming year in the ABOP. This is a form of evaluation of the Company by comparing the realization with the pre-determined target. There are 2 core components to measure the Company's performance that has been achieved, namely based on financial performance and operational performance. Financial performance is described in PLN NP's achievement in the Company's revenue and profit targets as in the Comprehensive Income Statement as follows:

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Pendapatan dan Laba Tahun 2022 serta Proyeksi Tahun 2023 (Rp juta)

Table of Comparison between Target and Realization of Revenue and Profit in 2022 and Projection for 2023 (Rp million)

Uraian Description	Target RKAP 2022 2022 ABOP Target	Realisasi 2022 2022 Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)	Proyeksi 2023 Projection for 2023
Pendapatan Usaha Revenues	29.395.680	27.202.200	92,54	94.148.174
Beban Usaha Operating Expenses	25.851.954	22.571.427	(87,31)	81.146.039
Laba Usaha Operating Income	3.543.726	4.630.773	130,68	13.002.135
Pos Keuangan dan Lain-lain Bersih Financial Items and Others – Net	1.682.599	3.375.810	200,63	1.361.569
Laba Sebelum Pajak Profit before Tax	5.226.325	8.006.583	153,20	14.363.704
(Beban) Manfaat Pajak Tax (Expenses) Benefits	(1.168.472)	(1.423.037)	121,79	(5.946.425)
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	**4.057.853**	**6.583.546**	**162,24**	**8.417.280**

Target, Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Usaha

Target, Realization, and Projection of Revenues

Pendapatan usaha yang dimaksud adalah hasil dari penjualan energi listrik untuk sistem Jawa Bali, Jasa Operasi & Pemeliharaan (O&M), Jasa Konstruksi, dan Lainnya.

The referred revenues are the proceeds from the electricity sales for Java Bali system, Operation & Maintenance (O&M) Services, Construction Services, and Others.

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Pendapatan Usaha Tahun 2022 serta Proyeksi Tahun 2023 (Rp juta)
Table of Comparison between Target and Realization of Revenues in 2022 and Projection for 2023 (Rp million)

Uraian Description	Target RKAP 2022 2022 ABOP Target	Realisasi 2022 2022 Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)	Proyeksi 2023 Projection for 2023
Pendapatan Usaha Revenues	29.395.680	27.202.200	92,54	94.148.174
Penjualan Tenaga Listrik Electricity Sales	20.172.006	21.682.476	107,49	90.119.134
Jasa O&M O&M Services	5.880.621	4.099.714	69,72	1.316.535
Jasa Konstruksi Construction Services	2.357.221	845.101	35,85	2.121.944
Jasa Usaha Lainnya Other Business Services	985.831	574.909	58,32	590.561

Penjualan Tenaga Listrik
Electricity Sales

Realisasi pendapatan dari penjualan tenaga listrik tahun 2022 adalah sebesar Rp21,68 triliun dengan pencapaian 107,49% dari target RKAP 2022. Pencapaian ini didukung oleh alokasi pembebanan sistem yang lebih tinggi di tahun 2022. Selanjutnya, di tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp90,12 triliun berdasarkan asumsi kenaikan produksi listrik dan beralihnya aset pembangkit PLN ke PLN NP.

The realization of revenue from electricity sales in 2022 was Rp21.68 trillion with an achievement of 107.49% of the 2022 ABOP target. This achievement was supported by a higher system loading allocation in 2022. Furthermore, it is projected at Rp90.12 trillion in 2023 based on the assumption of an increase in electricity production and the transfer of PLN's power plant assets to PLN Nusantara Power.

Jasa O&M
O&M Services

Realisasi pendapatan dari jasa O&M tahun 2022 adalah sebesar Rp4,10 triliun dengan pencapaian 69,72% dari target RKAP 2022. Pencapaian ini didukung oleh belum terealisasinya beberapa kontrak OM sesuai asumsi RKAP di tahun 2022. Selanjutnya, di tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp1,32 triliun berdasarkan asumsi pembangkit-pembangkit yang sebelumnya merupakan kontrak Jasa OM ditangani oleh PLN NP, asetnya kemudian menjadi milik PLN NP.

The realization of revenue from O&M services in 2022 was Rp4.10 trillion with an achievement of 69.72% of the 2022 ABOP target. This achievement was supported by the unrealization of several OM contracts according to ABOP assumptions in 2022. Furthermore, it is projected at Rp1.32 trillion in 2023 based on the assumption that the power plants that were previously OM Service contracts are handled by PLN NP, the assets then belong to PLN NP.

Jasa Konstruksi
Construction Services

Realisasi pendapatan dari jasa konstruksi tahun tahun 2022 adalah sebesar Rp845 miliar dengan pencapaian 35,85% dari target RKAP 2022. Tidak tercapainya pendapatan jasa konstruksi di tahun 2022 disebabkan oleh penundaan/pengurangan pembatalan proyek-proyek investasi karena prioritisasi investasi & pemeliharaan di PLN Grup. Selanjutnya, di tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp2,13 triliun berdasarkan asumsi proyek-proyek yang akan diperoleh pada tahun 2023.

The realization of revenue from construction services in 2022 was Rp845 billion with an achievement of 35.85% of the 2022 ABOP target. The non-achievement of construction services revenue in 2022 was caused by delays/reduced cancellation of investment projects due to prioritization of investment & maintenance in PLN Group. Furthermore, it is projected at Rp2.13 trillion in 2023 based on the assumption of projects that will be obtained in 2023.

Jasa Lainnya
Other Services

Realisasi pendapatan dari jasa Lainnya tahun 2022 adalah sebesar Rp574 miliar dengan pencapaian 58,32% dari target RKAP 2022. Pencapaian ini didukung oleh belum terealisasinya Kontrak MRO, *Overhaul* internasional, dan PV *Rooftop* sesuai asumsi RKAP, serta realisasi pekerjaan investasi & EPC yang rendah karena prioritisasi investasi & pemeliharaan di PLN Grup. Selanjutnya, di tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp590 miliar berdasarkan asumsi pemetaan proyek usaha lainnya yang dapat dikembangkan oleh PLN NP.

The realization of revenue from Other services in 2022 was Rp574 billion with an achievement of 58.32% of the 2022 ABOP target. This achievement was supported by the unrealization of MRO, international Overhaul, and PV Rooftop Contracts according to ABOP assumptions, as well as low realization of investment & EPC work due to prioritization of investment & maintenance in PLN Group. Furthermore, it is projected at Rp590 billion in 2023 based on the assumption of mapping other business projects that can be developed by PLN Nusantara Power.

Target, Realisasi dan Proyeksi Laba
Target, Realization, and Projection of Profit

Realisasi Laba Tahun Berjalan tahun 2022 adalah sebesar Rp6,58 triliun dengan pencapaian 162,24% dari target RKAP 2022. Pencapaian ini didukung oleh adanya peningkatan pendapatan di luar operasi dari entitas asosiasi dan Ventura Bersama. Selanjutnya, di tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp8,42 triliun berdasarkan asumsi masuknya aset-aset PLN yang dialihkan menjadi aset PLN NP.

The realization of Profit for the Year in 2022 was Rp6.58 trillion with an achievement of 162.24% of the 2022 ABOP target. This achievement was supported by an increase in revenue outside of operations from associates and Joint Ventures. Furthermore, it is projected at Rp8.42 trillion in 2023 based on the assumption of the entry of PLN assets transferred to PLN Nusantara Power assets.

Target, Realisasi dan Proyeksi Posisi Keuangan
Target, Realization, and Projection of Financial Position

Kinerja posisi keuangan ditunjukkan pada pencapaian pada target jumlah aset, liabilitas dan ekuitas sebagaimana pada Laporan Posisi Keuangan.

Financial position performance is shown in the target achievement of total assets, liabilities and equity as in the Statement of Financial Position.

Target, Realisasi dan Proyeksi Aset
Target, Realization, and Projection of Assets

Realisasi Jumlah Aset tahun 2022 adalah sebesar Rp174,93 triliun dengan pencapaian 100,27% dari target RKAP 2022. Pencapaian ini didukung oleh bertambahnya jumlah Investasi pada Entitas Asosiasi/Ventura Bersama dan jumlah Kas dan Setara Kas sebagai akibat dari proses Penagihan (*Collection Period*) yang lebih baik. Selanjutnya, di tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp349,63 triliun berdasarkan asumsi penambahan aset-aset pembangkit PLN yang dialihkan ke PLN NP.

The realization of Total Assets in 2022 was Rp174.93 trillion with an achievement of 100.27% of the 2022 ABOP target. This achievement was supported by an increase in the number of Investments in Associates/Joint Ventures and total Cash and Cash Equivalents as a result of a better Collection Period. Furthermore, it is projected at Rp349.63 trillion in 2023 based on the assumption of additional PLN power plant assets transferred to PLN Nusantara Power.

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Jumlah Aset Tahun 2022 serta Proyeksi Tahun 2023 (Rp juta)
Table of Comparison between Target and Realization of Total Assets in 2022 and Projection for 2023 (Rp million)

Uraian Description	Target RKAP 2022 2022 ABOP Target	Realisasi 2022 2022 Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)	Proyeksi 2023 Projection for 2023
Aset Lancar Current Assets	31.102.098	33.394.118	107,37	47.456.287
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	143.343.636	141.528.811	98,73	302.175.896
Jumlah Aset Total Assets	**174.445.734**	**174.922.929**	**100,27**	**349.632.183**

Aset Lancar
Current Assets

Realisasi Jumlah Aset Lancar tahun 2022 adalah sebesar Rp33,39 triliun dengan pencapaian 107,37% dari target RKAP 2022. Pencapaian ini didukung oleh peningkatan jumlah Kas dan Setara Kas sebagai akibat dari proses Penagihan (*Collection Period*) yang lebih baik. Selanjutnya, di tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp47,46 triliun berdasarkan asumsi penambahan akibat peralihan aset dari PLN ke PLN NP.

The realization of Total Current Assets in 2022 was Rp33.39 trillion with an achievement of 107.37% of the 2022 ABOP target. This achievement was supported by an increase in total Cash and Cash Equivalents as a result of a better Collection Period. Furthermore, it is projected at Rp47.46 trillion in 2023 based on the assumption of additions due to the transfer of assets from PLN to PLN Nusantara Power.

Aset Tidak Lancar
Non-Current Assets

Realisasi Jumlah Aset Tidak Lancar tahun 2022 adalah sebesar Rp141,53 triliun dengan pencapaian 98,73% dari target RKAP 2022. Pencapaian ini didukung oleh penundaan/pengurangan pembatalan proyek-proyek investasi. Selanjutnya, di tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp308,13 triliun berdasarkan asumsi penambahan akibat peralihan aset dari PLN ke PLN NP.

The realization of Total Non-Current Assets in 2022 was Rp141.53 trillion with an achievement of 98.73% of the 2022 ABOP target. This achievement was supported by postponement/reduced cancellation of investment projects. Furthermore, it is projected at Rp308.13 trillion in 2023 based on the assumption of additions due to the transfer of assets from PLN to PLN Nusantara Power.

Target, Realisasi dan Proyeksi Liabilitas
Target, Realization, and Projection of Liabilities

Realisasi Jumlah Liabilitas tahun 2022 adalah sebesar Rp12,57 triliun dengan pencapaian 100,02% dari target RKAP 2022. Pencapaian ini didukung oleh penyesuaian imbalan kerja jatuh tempo oleh aktuaris dan Penambahan Liabilitas Pajak Tangguhan yang menyesuaikan Perbedaan Temporer. Selanjutnya, di tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp28,60 triliun berdasarkan asumsi penambahan akibat peralihan aset dari PLN ke PLN NP.

The realization of Total Liabilities in 2022 was Rp12.57 trillion with an achievement of 100.02% of the 2022 ABOP target. This achievement was supported by the adjustment of maturity employee benefits by actuaries and the Addition of Deferred Tax Liabilities that adjusted Temporary Differences. Furthermore, it is projected at Rp28.60 trillion in 2023 based on the assumption of additions due to the transfer of assets from PLN to PLN Nusantara Power.

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Jumlah Aset Tahun 2022 serta Proyeksi Tahun 2023 (Rp juta)
Table of Comparison between Target and Realization of Total Liabilities and Equity in 2022 and Projection for 2023 (Rp million)

Uraian Description	Target RKAP 2022 2022 ABOP Target	Realisasi 2022 2022 Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)	Proyeksi 2023 Projection for 2023
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	3.739.228	4.448.745	118,97	12.522.634
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	8.825.484	8.119.096	92,00	16.071.897
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**12.564.712**	**12.567.841**	**100,02**	**28.594.531**
Jumlah Ekuitas Total Equity	**161.881.022**	**162.355.088**	**100,29**	**321.037.652**

Liabilitas Jangka Pendek
Current Liabilities

Realisasi Jumlah Liabilitas Jangka Pendek tahun 2022 adalah sebesar Rp4,45 triliun dengan pencapaian 118,97% dari target RKAP 2022. Pencapaian ini didukung oleh adanya peningkatan utang material dan jasa pemeliharaan. Selanjutnya, di tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp12,52 triliun berdasarkan asumsi penambahan akibat peralihan aset dari PLN ke PLN NP.

The realization of Total Current Liabilities in 2022 was Rp4.45 trillion with an achievement of 118.97% of the 2022 ABOP target. This achievement was supported by an increase in material and maintenance service payables. Furthermore, it is projected at Rp12.52 trillion in 2023 based on the assumption of additions due to the transfer of assets from PLN to PLN Nusantara Power.

Liabilitas Jangka Panjang
Non-Current Liabilities

Realisasi Jumlah Liabilitas Jangka Panjang tahun 2022 adalah sebesar Rp8,12 triliun dengan pencapaian 92,00% dari target RKAP 2022. Pencapaian ini didukung oleh penundaan/pengurangan pembatalan proyek-proyek investasi yang berjalan selaras dengan penundaan pengakuan SHL kepada pemegang saham. Selanjutnya, di tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp16,08 triliun berdasarkan asumsi penambahan akibat peralihan aset dari PLN ke PLN NP.

The realization of Total Non-Current Liabilities in 2022 was Rp8.12 trillion with an achievement of 92.00% of the 2022 ABOP target. This achievement was supported by the postponement/reduced cancellation of ongoing investment projects in line with the postponement of SHL recognition to shareholders. Furthermore, it is projected at Rp16.08 trillion in 2023 based on the assumption of additions due to the transfer of assets from PLN to PLN Nusantara Power.

Target, Realisasi dan Proyeksi Ekuitas
Target, Realization, and Projection of Equity

Realisasi Jumlah Ekuitas tahun 2022 adalah sebesar Rp162,36 triliun dengan pencapaian 100,29% dari target RKAP 2022. Pencapaian ini didukung oleh Laba Periode berjalan di atas RKAP yang utamanya didukung kontribusi perolehan laba investasi di anak perusahaan dan perusahaan asosiasi sebesar Rp3,2 triliun di tahun 2021. Selanjutnya, di tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp321,04 triliun berdasarkan asumsi penambahan akibat peralihan aset dari PLN ke PLN NP.

The realization of Total Equity in 2022 was Rp162.36 trillion with an achievement of 100.29% of the 2022 ABOP target. This achievement was supported by Profit for the Period above the ABOP, which was mainly supported by the contribution of investment profit acquisition in subsidiaries and associated companies of Rp3.2 trillion in 2021. Furthermore, it is projected at Rp321.04 trillion in 2023 based on the assumption of additions due to the transfer of assets from PLN to PLN Nusantara Power.

Target, Realisasi dan Proyeksi Struktur Modal

Target, Realization, and Projection of Capital Structure

Realisasi Struktur Modal tahun 2022 adalah sebesar Rp174,93 triliun dengan pencapaian 100,00% dari target RKAP 2022. Pencapaian ini didukung oleh pencapaian realisasi laba operasi yang mendukung pencapaian ekuitas tahun 2022.

The realization of Capital Structure in 2022 was Rp174.93 trillion with an achievement of 100.00% of the 2022 ABOP target. This achievement was supported by the achievement of operating profit realization which supported the achievement of equity in 2022.

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Struktur Modal Tahun 2022 serta Proyeksi Tahun 2023 (Rp juta)
Table of Comparison between Target and Realization of Capital Structure in 2022 and Projection for 2023 (Rp million)

Uraian Description	Target RKAP 2022 2022 ABOP Target		Realisasi 2022 2022 Realization		Pencapaian Achievement (%)	Proyeksi 2023 Projection for 2023	
	Nominal (Rp juta) Nominal (Rp million)	Komposisi Composition (%)	Nominal (Rp juta) Nominal (Rp million)	Komposisi Composition (%)		Nominal (Rp juta) Nominal (Rp million)	Komposisi Composition (%)
Liabilitas Liabilities	12.564.712	7,20	12.567.841	7,18	95,07	28.594.531	8,18
Ekuitas Equity	161.881.022	92,80	162.355.088	92,82	100,35	321.037.652	91,82
Aset Assets	**174.445.734**	**100,00**	**174.922.929**	**100,00**	**100,00**	**349.632.183**	**100,00**

Target, Realisasi dan Proyeksi Aspek Operasional

Target, Realization, and Projection of Operational Aspect

Aspek operasional mencakup pada pencapaian faktor kinerja pembangkit eksisting, produksi tenaga listrik dan pemakaian listrik.

Operational aspect includes the achievement of performance factors of existing power plants, electricity production and electricity consumption.

Target, Realisasi dan Proyeksi Faktor Kinerja Pembangkit

Target, Realization, and Projection of Power Plant Performance Factors

Indikator kinerja pembangkit mencakup faktor ketersediaan, faktor gangguan dan efisiensi pembangkit.

Power Plant performance indicator includes the factors of availability, disruption, and efficiency of the power plant.

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Pembangkit Tahun 2022 serta Proyeksi Tahun 2023
Table of Comparison between Target and Realization of Power Plant Performance in 2022 and Projection for 2023

Uraian Description	Target RKAP 2022 2022 ABOP Target	Realisasi 2022 2022 Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)	Proyeksi 2023 Projection for 2023
EAF Pembangkit Eksisting (%) EAF of Existing Power Plants (%)	91,04	94,12	103,38	91,87
EAF PLTU FTP-1 (%) EAF of FTP-1 CFPP (%)	85,38	84,41	98,86	86,81
EFOR Pembangkit Eksisting (%) EFOR of Existing Power Plants (%)	1,45	0,45	168,64	3,38
EFOR PLTU FTP-1 (%) EFOR of FTP-1 CFPP (%)	3,49	3,24	107,23	2,69
Tara Kalor Neto Pembangkit Eksisting (kCal/kWh) Net Plant Heat Rate of Existing Power Plants (kCal/kWh)	2.490,74	2.459,38	101,26	2.787,28
Tara Kalor Neto PLTU FTP-1 (kCal/kWh) Net Plant Heat Rate of FTP-1 CFPP (kCal/kWh)	2.778,25	2.854,69	97,25	2.796,20

Equivalent Availability Factor (EAF)

Realisasi EAF Pembangkit Eksisting tahun 2022 adalah sebesar 94,12% dengan pencapaian 103,38% dari target RKAP 2022. Pencapaian ini didukung oleh penerapan manajemen aset terutama implementasi *preventive maintenance, predictive maintenance, patrol check*, FLM, dan *House Keeping* yang konsisten, di samping itu eksekusi *overhaul* unit sesuai dengan kaidah 6ON (*On time, on scope, on cost, on quality, on safety dan on clean)*. Selanjutnya, di tahun 2023 Capaian EAF diproyeksikan sebesar 91,87% berdasarkan asumsi total unit eksisting dan *holding subholding* sejumlah 550 unit dengan *Planned Outage Hours* 494 jam selama setahun.

The realization of EAF of Existing Power Plants in 2022 was 94.12% with an achievement of 103.38% of the 2022 ABOP target. This achievement was supported by the application of asset management, especially the consistent implementation of preventive maintenance, predictive maintenance, patrol checks, FLM, and House Keeping, in addition to the execution of unit overhauls in accordance with the 6ON rules (On time, on scope, on cost, on quality, on safety and on clean). Furthermore, the EAF Achievement in 2023 is projected at 91.87% in 2023 based on the assumption of total existing units and subholding holding of 550 units with Planned Outage Hours of 494 hours during a year.

Realisasi EAF PLTU FTP-1 tahun 2022 adalah sebesar 84,41% dengan pencapaian 98,86% dari target RKAP 2022. Pencapaian ini dipengaruhi oleh adanya gangguan *generator* di PLTU Rembang dan PLTU Tanjung Awar-Awar. Selanjutnya, di tahun 2023 Capaian EAF Batubara Jawa Bali diproyeksikan sebesar 86,81% berdasarkan asumsi pelaksanaan *overhaul* sesuai jadwal.

The realization of EAF of FTP-1 CFPP in 2022 was 84.41% with an achievement of 98.86% of the 2022 ABOP target. This achievement was influenced by generator disruptions at Rembang CFPP and Tanjung Awar-Awar CFPP. Furthermore, the EAF Achievement of Java Bali Coal in 2023 is projected at 86.81% based on the assumption that the overhaul implementation is on schedule.

Equivalent Forced Outage Rate (EFOR)

Realisasi EFOR Pembangkit Eksisting tahun 2022 adalah sebesar 0,45% dengan pencapaian 168,64% dari target RKAP 2022. Pencapaian ini dipengaruhi oleh penerapan manajemen aset terutama implementasi *preventive maintenance, predictive maintenance, patrol check, First Line Maintenance, house keeping* yang konsisten dan pelaksanaan *overhaul* yang efektif sehingga dapat meminimalisir terjadinya *breakdown* atau gangguan selama interval *overhaul*. Selanjutnya, di tahun 2023 capaian EFOR diproyeksikan sebesar 3,38% berdasarkan asumsi total unit eksisting dan *holding subholding* sejumlah 550 unit dengan *Forced Outage Hours* 125 jam selama setahun.

The realization of EFOR of Existing Power Plants in 2022 was 0.45% with an achievement of 168.64% of the 2022 ABOP target. This achievement was influenced by the implementation of asset management, especially the consistent implementation of preventive maintenance, predictive maintenance, patrol checks, First Line Maintenance, house keeping and effective overhaul implementation so as to minimize the occurrence of breakdowns or disruptions during the overhaul interval. Furthermore, the EFOR achievement in 2023 is projected at 3.38% based on the assumption of total existing units and subholding holding of 550 units with Forced Outage Hours of 125 hours during a year.

Realisasi EFOR PLTU FTP-1 tahun 2022 adalah sebesar 3,24% dengan pencapaian 107,23% dari target RKAP 2022. Selanjutnya, di tahun 2023 capaian EFOR PLTU Batubara Jawa Bali diproyeksikan sebesar 2,69% dengan asumsi tidak terjadi gangguan dengan *downtime* tidak lebih dari 65,95 Jam.

The realization of EFOR of FTP-1 CFPP in 2022 was 3.24% with an achievement of 107.23% of the 2022 ABOP target. Furthermore, the EFOR achievement of the Java Bali Coal CFPP in 2023 is projected at 2.69% with the assumption that no disruptions occur with a downtime of no more than 65.95 hours.

Tara Kalor Neto
Net Plant Heat Rate

Realisasi Tara Kalor (*Net Plant Heat Rate* /NPHR) Neto Pembangkit Eksisting tahun 2022 adalah sebesar 2.459,38 kCal/kWh dengan pencapaian 101,26% dari target RKAP 2022. Selanjutnya, di tahun 2023 diproyeksikan sebesar 2.787,28 kCal/kWh berdasarkan asumsi Pemakaian Sendiri dan Susut Trafo sebesar 5,80% dan NCF 39,88%.

The realization of Net Plant Heat Rate (NPHR) of Existing Power Plants in 2022 was 2.459,38 kCal/kWh with an achievement of 101,26% of the 2022 ABOP target. Furthermore, it is projected at 2,787.28 kCal/kWh in 2023 based on the assumption of Self-Consumption and Transformer Loss of 5.80% and NCF of 39.88%.

Realisasi Tara Kalor Neto PLTU FTP-1 tahun 2022 adalah sebesar 2.854,69 kCal/kWh dengan pencapaian 97,25% dari target RKAP 2022, hal ini dipengaruhi adanya *start & stop* paska gangguan. Selanjutnya, di tahun 2023 diproyeksikan sebesar 2.796,20 kCal/kWh.

The realization of Net Plant Heat Rate of FTP-1 CFPP in 2022 was 2,854.69 kCal/kWh with an achievement of 97.25% of the 2022 ABOP target, this was influenced by the post-disturbance start & stop. Furthermore, it is projected at 2,796.20 kCal/kWh in 2023.

Target, Realisasi dan Proyeksi Produksi dan Penjualan

Target, Realization and Projection of Production and Sales

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Produksi dan Penjualan Tahun 2022 serta Proyeksi Tahun 2023

Table of Comparison between Target and Realization of Production and Sales Performance in 2022 and Projection for 2023

Uraian Description	Target RKAP 2022 2022 ABOP Target	Realisasi 2022 2022 Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)	Proyeksi 2023 Projection for 2023
MWh Produksi Tenaga Listrik MWh Electricity Production	15.276.418	17.064.310	111,70	58.915.202
MWh Penjualan Tenaga Listrik MWh Electricity Sales	14.688.300	16.379.481	111,51	55.497.830
Persentase pemakaian & Susut Trafo Percentage of consumption & Transformer Loss	3.85%	4,02%	95,71	5.80%

Realisasi Produksi Tenaga Listrik tahun 2022 adalah sebesar 17.064.310 MWh dengan pencapaian 111,66% dari target RKAP 2022. Pencapaian ini dipengaruhi oleh alokasi pembebanan sistem yang lebih tinggi dari RKAP. Selanjutnya, di tahun 2023 diproyeksikan sebesar 58.915.202 MWh, berdasarkan asumsi RKAP Tahun 2023 dikarenakan kebutuhan sistem dengan bertambahnya Daya Mampu Netto paska *Holding Subholding* dengan total 550 unit yaitu 15.887 MW dan NCF 39,88%.

The realization of Electric Power Production in 2022 was 17,064,310 MWh with an achievement of 111.66% of the 2022 ABOP target. This achievement was influenced by a higher system loading allocation than the ABOP. Furthermore, it is projected at 58,915,202 MWh in 2023, based on the assumption of the 2023 ABOP due to the system needs with the increase of Net Dependable Capacity after Holding Subholding with a total of 550 units of 15,887 MW and NCF of 39.88%.

Realisasi Penjualan Tenaga Listrik tahun 2022 adalah sebesar 16.379.481 MWh dengan pencapaian 111,51% dari target RKAP 2022. Pencapaian ini dipengaruhi oleh tambahan alokasi gas pada PLTGU Muara Tawar dan Muara Karang sehingga dapat membantu lebih banyak saat sistem pada periode beban puncak, kemudian pembangkit PLTA beroperasi dengan pola basah diatas rencana tahunan dan juga pada sistem 500 KV PLTU batubara terdapat beberapa unit yang mengalami gangguan sehingga alokasi energi tersebut dialihkan ke UP Paiton. Selanjutnya, di tahun 2023 diproyeksikan sebesar 55.497.830 MWh, berdasarkan asumsi RKAP Tahun 2023 karena adanya program *holding subholding* dimana PLN NP mendapatkan pengalihan aset pembangkitan dari PLN ke PLN NP sehingga menambah jumlah Daya Mampu Netto pembangkitan.

The realization of Electricity Sales in 2022 was 16,379,481 MWh with an achievement of 111.51% of the 2022 ABOP target. This achievement was influenced by additional gas allocation at Muara Tawar and Muara Karang CCPPs so that it could help more when the system was in peak load period, then the HPP operated with a wet pattern above the annual plan and also in the 500 KV coal CFPP system, there were several units that experienced disruptions so that the energy allocation was diverted to Paiton GU. Furthermore, it is projected at 55,497,830 MWh in 2023, based on the assumption of the 2023 ABOP due to the subholding holding program where PLN NP obtained the transfer of electric power generator assets from PLN to PLN NP so as to increase the amount of Net Dependable Capacity of electric power generator.

Realisasi Pemakaian Sendiri dan Susut Trafo tahun 2022 adalah sebesar 4,02% dengan pencapaian 95,71% dari target RKAP 2022. Pencapaian ini dipengaruhi oleh optimasi pola operasi unit-unit peaker dan optimasi Pemakaian Sendiri unit saat *Reserve Shutdown*. Selanjutnya, di tahun 2023 diproyeksikan sebesar 5,80%, berdasarkan asumsi total NCF Unit PLN NP 39,88% dan asumsi NCF Unit PLTU Batubara 59,40% dengan PSST Unit PLTU Batubara 8,85% sedangkan NCF Unit Non PLTU Batubara 29,21% dengan PSST Unit Non PLTU Batubara 2,16%.

The realization of Self-Consumption and Transformer Loss in 2022 was 4.02% with an achievement of 95.71% of the 2022 ABOP target. This achievement was influenced by the operating pattern optimization of peaker units and the optimization of Self-Consumption units during Reserve Shutdown. Furthermore, it is projected at 5.80% in 2023, based on the assumption of total NCF of PLN NP Unit at 39.88% and the assumption of NCF of Coal CFPP Unit at 59.40% with PSST of Coal CFPP Unit at 8.85%, while NCF of Non-Coal CFPP Unit at 29.21% with PSST of Non-Coal CFPP Unit at 2.16%.

Target, Realisasi dan Proyeksi Produksi dan Pengelolaan Energi *Mix*

Target, Realization and Projection of Energy Mix Production and Management

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Energi Mix Tahun 2022 serta Proyeksi Tahun 2023

Table of Comparison between Target and Realization of Energy Mix in 2022 and Projection for 2023

Uraian Description	Target RKAP 2022 2022 ABOP Target	Realisasi 2022 2022 Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)	Proyeksi 2023 Projection for 2023
Hidro Hydro	2.256,89	3.077,84	136,38	5.071,70
Batubara Coal	3.887,88	4.694,18	120,74	32.053,10
Gas alam Natural gas	8.943,03	9.085,64	101,59	23.013,43
HSD (Minyak) HSD (Oil)	148,19	103,65	69,94	230,63
Biomass	40,43	103,00	254,76	408,47

Realisasi produksi pembangkit hidro mencapai 3.077,83 GWh atau 136,38% dari target RKAP tahun 2022 sebesar 2.256,89 GWh. Pencapaian ini dipengaruhi oleh kebutuhan sistem, panjangnya musim basah sehingga PLTA beroperasi lebih banyak dan optimasi hidrologi pada PLTA Brantas. Selanjutnya, di tahun 2023 diproyeksikan sebesar 5.071,70 GWh, berdasarkan asumsi bertambahnya kapasitas daya mampu pembangkit hidro paska *Holding Subholding.*

The realization of hydro power plant production reached 3,077.83 GWh or 136.38% of the 2022 ABOP target of 2,256.89 GWh. This achievement was influenced by system needs, the length of the wet season so that HPP operated more, and hydrological optimization at the Brantas HPP. Furthermore, it is projected at 5,071.70 GWh in 2023, based on the assumption of increasing the dependable capacity of hydro power plant after Subholding Holding.

Realisasi produksi pembangkit batubara mencapai 4.694,18 GWh atau 120,74% dari target RKAP tahun 2022 sebesar 3.887,88 GWh. Pencapaian ini dipengaruhi oleh kebutuhan sistem, implementasi *coal switching* dan *co-firing*. Selanjutnya, di tahun 2023 diproyeksikan sebesar 32.053,10 GWh, berdasarkan asumsi bertambahnya kapasitas daya mampu PLTU Batubara menjadi 5.615 MW paska *Holding Subholding.*

The realization of coal power plant production reached 4,694.18 GWh or 120.74% of the 2022 ABOP target of 3,887.88 GWh. This achievement was influenced by system needs, implementation of coal switching and co-firing. Furthermore, it is projected at 32,053.10 GWh in 2023, based on the assumption of increasing the dependable capacity of Coal CFPP to 5,615 MW after Subholding Holding.

Realisasi produksi pembangkit gas mencapai 9.085,64 GWh atau 101,59% dari target RKAP tahun 2022 sebesar 8.943,03 GWh. Pencapaian ini dipengaruhi oleh kebutuhan sistem, mulai beroperasinya PLTGU Blok 3 Muara Karang dan pola operasi yang efisien. Selanjutnya, di tahun 2023 diproyeksikan sebesar 23.013,43 GWh, berdasarkan asumsi bertambahnya kapasitas daya mampu Pembangkit Gas menjadi 6.499 MW paska *Holding Subholding.*

The realization of gas power plant production reached 9,085.64 GWh or 101.59% of the 2022 ABOP target of 8,943.03 GWh. This achievement was influenced by system needs, the commencement of operation of Muara Karang Block 3 CCPP and efficient operating patterns. Furthermore, it is projected at 23,013.43 GWh in 2023, based on the assumption of increasing the dependable capacity of Gas Power Plant to 6,499 MW after Subholding Holding.

Realisasi pembangkit berbahan bakar minyak memproduksi 103,65 GWh dari target RKAP tahun 2022 sebesar 148,19 GWh. Pencapaian ini dipengaruhi oleh kebutuhan sistem dan pembangkit berbahan bakar minyak yang lebih efisien. Selanjutnya, di tahun 2023 diproyeksikan sebesar 230,63 GWh, berdasarkan asumsi bertambahnya kapasitas daya mampu Pembangkit berbahan bakar minyak menjadi 4.243 MW paska *Holding Subholding.*

The realization of oil-fired power plants produced 102.99 GWh of the 2022 ABOP target of 103,65 GWh. This achievement was influenced by system needs and more efficient oil-fired power plants. Furthermore, it is projected at 230.63 GWh in 2023, based on the assumption of increasing the dependable capacity of oil-fired Power Plant to 4,243 MW after Subholding Holding.

Realisasi produksi pembangkit biomassa mencapai 103,00 GWh atau 254,76% dari target RKAP tahun 2022 sebesar 40,43 GWh. Pencapaian ini dipengaruhi oleh optimalnya implementasi *co-firing* pada pembangkit Selanjutnya, di tahun 2023 diproyeksikan sebesar 408,47 GWh, berdasarkan asumsi bertambahnya implementasi *co-firing* unit paska *Holding Subholding.*

The realization of biomass power plant production reached 103.00 GWh or 254.76% of the 2022 ABOP target of 40.43 GWh. This achievement was influenced by the optimal implementation of co-firing in the power plant. Furthermore, it is projected at 408.47 GWh in 2023, based on the assumption of increasing the implementation of co-firing units after Subholding Holding.

Target, Realisasi dan Proyeksi Aspek Pemasaran

Target, Realization and Projection of Marketing Aspect

Terkait aspek pemasaran dapat dilihat dari pencapaian atas target penjualan tenaga listrik dan cakupan pangsa pasar.

The marketing aspect can be seen from the achievement of electricity sales target and market share coverage.

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Aspek Pemasaran Tahun 2021 serta Proyeksi Tahun 2022
Table of Comparison between Target and Realization of Marketing Aspect in 2022 and Projection for 2023

Uraian Description	Target ROT 2022 2022 AOP Target	Realisasi 2022 2022 Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)	Proyeksi 2023 Projection for 2023
Pangsa Pasar (%) Market Share (%)	7,42	7,79	104,99	17,94

Realisasi Pangsa Pasar tahun 2022 adalah sebesar 7,79% dengan pencapaian 104,99% dari target ROT (Rencana Operasi Tahunan) 2022. Pencapaian ini dipengaruhi oleh PLTA Brantas yang memasuki periode pola basah lebih lama dari target tahunan, dan juga terdapat penambahan pasokan gas dari alokasi gas tahunan pada PLTGU Muara Tawar dan Muara Karang. Selanjutnya, di tahun 2023 diproyeksikan sebesar 17,94% berdasarkan asumsi adanya pembangkit baru yang COD dan juga relokasi pembangkit.

The realization of Market Share in 2022 was 7.79% with an achievement of 104.99% of the 2022 ROT (Annual Operating Plan) target. This achievement was influenced by the Brantas HPP which entered the wet pattern period longer than the annual target, and there was also an additional gas supply from the annual gas allocation at Muara Tawar and Muara Karang CCPPs. Furthermore, it is projected at 17.94% in 2023 based on the assumption of a new COD power plant and also power plant relocation.

Target, Realisasi dan Proyeksi Pengembangan SDM

Targets, Realization, and Projection of HR Development

Terkait dengan pengembangan SDM indikator yang digunakan adalah biaya pelatihan.

Related to HR development, the indicator used is training costs.

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Pengembangan SDM Tahun 2022 serta Proyeksi Tahun 2023
Table of Comparison between Target and Realization of HR Development in 2022 and Projection for 2023

Uraian Description	Target ROT 2022 2022 AOP Target	Realisasi 2022 2022 Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)	Proyeksi 2023 Projection for 2023
Biaya Pendidikan & Pelatihan (Rp Miliar) Education & Training Costs (Rp Billion)	58,19	61,29	105,33	71,8

Biaya Pelatihan

Training Costs

Realisasi Biaya Pelatihan tahun 2022 adalah sebesar Rp61,29 miliar dengan pencapaian 105,33% dari target RKAP 2022. Pencapaian ini dipengaruhi oleh mulai diimplementasikannya kembali pelaksanaan pembelajaran dengan metode *offline* maupun *blended* (*online & offline*) pada beberapa pembelajaran yang memerlukan praktik langsung dan sertifikasi sehingga terjadi peningkatan biaya pelatihan dan perjalanan dinas. Selanjutnya, di tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp71,8 miliar berdasarkan asumsi bertambahnya jumlah karyawan yang cukup signifikan dari penggabungan *Holding Subholding.*

The realization of Training Costs in 2022 was Rp61.29 billion with an achievement of 105.33% of the 2022 ABOP target. This achievement was influenced by the re-implementation of learning with offline and blended (online & offline) methods in several learnings that require direct practice and certification, thus increasing the costs of training and official travel. Furthermore, it is projected at Rp71.8 billion in 2023 based on the assumption of a significant increase in the number of employees from the merger of the Subholding Holding.

Proyeksi Kebijakan Dividen

Dividend Policy Projection

Terkait proyeksi kebijakan dividen diputuskan mengacu pada Keputusan RUPS didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Related to the projection of dividend policy, it is decided to refer to the GMS Resolution based on the prevailing laws and regulations.

Kebijakan Dividen
Dividend Policy

Kebijakan Pembagian Dividen
Dividend Distribution Policy

Kebijakan Dividen PLN NP diatur berdasarkan Anggaran Dasar PT PLN Nusantara Power Pasal 26 tentang Penggunaan Laba yaitu sebagai berikut:

1. Pembagian dividen diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif;
3. Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukan dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu;
4. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan dengan syarat pengambilannya tidak secara sekaligus dan dengan membayar biaya administrasi yang ditetapkan Direksi;
5. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan;
6. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir apabila diminta oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan;
7. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris;
8. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan;
9. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim.

PLN NP's Dividend Policy is regulated based on the Articles of Association of PT PLN Nusantara Power Article 26 on the Use of Profit, as follows:

1. Dividend distribution is decided by the General Meeting of Shareholders;
2. Dividends may only be distributed if the Company has a positive retained earnings;
3. Dividends that are not taken within 5 (five) years after being provided to be paid, are deposited in a reserve fund specifically designated for that purpose;
4. Dividends in the special reserve fund can be claimed by the entitled Shareholders by submitting proof of their rights to the dividends which can be received by the Board of Directors of the Company on the condition that the collection is not in a lump sum and by paying administrative costs determined by the Board of Directors;
5. Dividends that have been included in the special reserve and not taken within a period of 10 (ten) years will become the rights of the Company;
6. The Company may distribute interim dividends prior to the end of the Company's financial year if requested by Shareholders representing at least 1/10 (one-tenth) of the issued shares, by taking into account the projected profit and financial capabilities of the Company;
7. The distribution of interim dividends shall be determined based on the decision of the Board of Directors after obtaining the approval of the Board of Commissioners;
8. In the event that after the end of the financial year the Company suffers a loss, the interim dividends that have been distributed must be returned by the Shareholders to the Company;
9. The Board of Directors and Board of Commissioners are jointly and severally responsible for the Company's losses, in the event that the Shareholders are unable to return the interim dividends.

Pembagian Dividen
Dividend Distribution

Pembagian Dividen Tahun 2022
Dividend Distribution in 2022

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 29 Juni 2022, pemegang saham memberi kuasa kepada pemegang saham mayoritas untuk menetapkan saldo laba, cadangan umum dan tujuan serta dividen atas laba Perusahaan tahun 2021. Berdasarkan surat PLN tanggal 8 September 2022, pembagian dividen untuk tahun buku 2021 ditetapkan sebesar Rp5,81 triliun atau Rp968,- (nilai penuh) per lembar saham.

Berdasarkan surat nomor ZE1153550 tanggal 19 Oktober 2022 perihal Tindak Lanjut Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021, disampaikan bahwa Laba Bersih Tahun Buku 2021 yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk adalah sebesar Rp5,81 triliun ditetapkan 100% dibagi sebagai dividen dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dividen untuk PT PLN (persero) telah dilakukan *offset* Dividen dengan Piutang Tenaga Listrik sebesar Rp5,81 triliun;
2. Dividen untuk pemegang saham minoritas sebesar Rp968,- dibayarkan secara tunai.

Based on the Minutes of the General Meeting of Shareholders dated June 29, 2022, the shareholders granted authority to the majority shareholder to determine the retained earnings, appropriation of general reserves and dividends of the Company's profit for 2021. Based on PLN's letter dated September 8, 2022, the dividend distribution for the 2021 financial year was determined at Rp5.81 trillion or Rp968 (full amount) per share.

Based on letter number ZE1153550 dated October 19, 2022 regarding Follow-up on the Determination of the Use of the Company's Net Profit for the 2021 Financial Year, it is submitted that the Net Profit for the 2021 Financial Year distributed to the owners of the parent entity was Rp5.81 trillion, 100% of which was determined to be distributed as dividends with the following provisions:

1. Dividends for PT PLN (Persero) have been offset with Electricity Receivables of Rp5.81 trillion;
2. Dividends for minority shareholders was Rp968, - paid in cash.

Pembagian Dividen Tahun 2021
Dividend Distribution in 2021

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 29 Juni 2021, pemegang saham memberi kuasa kepada pemegang saham mayoritas untuk menetapkan saldo laba, cadangan umum dan tujuan serta dividen atas laba Perusahaan tahun 2020. Berdasarkan surat PLN tanggal 31 Desember 2021, pembagian dividen untuk tahun buku 2020 ditetapkan sebesar Rp7,66 triliun atau Rp1.277,- (nilai penuh) per lembar saham.

Pada tahun 2021 PLN NP membagikan dividen berdasarkan surat Nomor ZE0004550 tanggal 4 Januari 2022 perihal Tindak Lanjut Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan untuk Tahun Buku 2020. Disampaikan bahwa Laba Bersih Tahun Buku 2020 yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk adalah sebesar Rp7,66 triliun ditetapkan 100% sebagai dividen dengan ketentuan pembagian sebagai berikut:

1. Dividen untuk PLN dilakukan melalui *offset* Dividen dengan Piutang Tenaga Listrik sebesar Rp7,66 triliun.
2. Dividen untuk pemegang saham minoritas sebesar Rp1.277,- dibayarkan secara tunai.

Based on the Minutes of the General Meeting of Shareholders dated June 19, 2021, the Shareholders granted authority to the majority shareholders to determine retained earnings, appropriation of general reserves and dividends for the Company's profit in 2020. Based on letter from PLN dated December 31, 2021, dividends distribution for the 2020 fiscal year was determined at Rp7.66 trillion or Rp1,277,- (full amount) per share.

In 2021, PLN NP distributed dividend based on Letter Number ZE0004550 dated January 4, 2022, concerning Follow-up of Determining the Use of the Company's Net Income for the 2020 Fiscal Year. It was conveyed that the 2020 Fiscal Year Net Income distributed to owners of the parent entity was Rp7.66 trillion, determined 100% as dividends with the following distribution provisions:

1. Dividend for PLN was conducted through offset Dividend with Electricity Receivables of Rp7.66 trillion.
2. Dividend for the minority shareholders was Rp1,277,- paid in cash.

Tabel Pembagian Dividen
Table of Dividend Distribution

Uraian Description	2020	2021	2022
Laba Bersih Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk (Rp miliar) Net Income Attributable to Owners of the Parent (Rp billion)	6.645	7.661	5.810
Dividen yang Dibagikan (Rp miliar) Distributed Dividend (Rp billion)	6.645	7.661	5.810
Dividen per Lembar (Rp) Dividend per Share (Rp)	1.108	1.277	968
Dividend Pay Out Ratio (%)	100	100	100
Tanggal Pengumuman Dividen Date of Dividend Announcement	12 Oktober 2020 October 12, 2020	31 Desember 2021 December 31, 2021	8 September 2022 September 8, 2022
Tanggal Pembayaran Dividen Date of Dividend Payment	2 November 2020 November 2, 2020	3 Januari 2022 January 3, 2022	13 Oktober 2022 October 13, 2022

Grafik Dividen yang Dibagikan (Rp miliar)
Chart of Distributed Dividend (Rp billion)

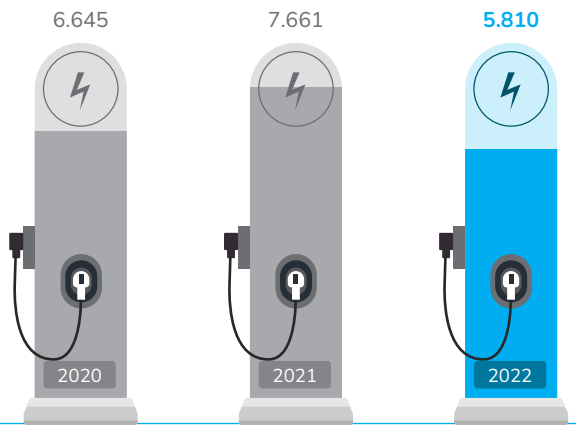

Kontribusi kepada Negara
Contribution to the State

Pajak bukan hanya sebagai sumber penerimaan dalam APBN, namun memegang peranan penting dalam upaya menjaga perekonomian dan pemulihan ekonomi. PLN NP sebagai Perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN yaitu PT PLN (Persero) ikut berperan sebagai *agent of value creator* dan *agent of development* yang diharapkan mampu memberikan kontribusi keuntungan ke Negara. Oleh karena itu, komitmen PLN NP kepada Negara terwujud dalam kepatuhan pemenuhan kewajiban Perusahaan sebagai Wajib Pajak melalui pembayaran pajak serta dividen. Jumlah setoran pajak tahun 2022 sebesar Rp1,23 Triliun, meningkat 9,18% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp1,12 Triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh jumlah pembelian material dan penggunaan jasa dari pihak ketiga.

Taxes are not only the revenue source in the State Budget, but also take important role in the efforts to maintain the economy and economic recovery. PLN NP as a Company whose shares are mostly owned by SOE, PT PLN (Persero), plays a role as an agent of value creator and agent of development that is expected to be able to contribute profits to the State. Therefore, PLN NP's commitment to the State is realized in compliance with the fulfillment of the Company's obligations as a Taxpayer through tax and dividend payments. The amount of tax payment in 2022 was Rp1.23 Trillion, increased by 9.18% compared to 2021 of Rp1.12 Trillion. The increase was mainly influenced by the amount of material purchases and the use of services from third parties.

Sebagai Pemotong Pajak, Perusahaan secara aktif berperan serta dalam melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas pajak-pajak seperti PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi dan sewa bangunan; PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi; dan PPh Pasal 23 atas penghasilan yang diterima wajib pajak badan.

As a Tax Withholder, the Company actively participates in withholding, depositing and reporting on taxes such as Income Tax Article 4 paragraph 2 on construction services and building leases; Income Tax Article 21 on income received by individual taxpayers; and Income Tax Article 23 on income received by corporate taxpayers.

Tabel Setoran Pajak (Rp Miliar)
Table of Tax Payment (Rp Billion)

Uraian Description	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
PPh Pasal 21 Income Tax Article 21	31,31	177,72	143,15	(19,45)	(34,57)
PPh Pasal 23 Income Tax Article 23	53,61	58,25	55,57	(4,60)	(2,68)
PPh Pasal 4 ayat 2 Income Tax Article 4 paragraph 2	31,31	21,98	12,96	(41,04)	(9,02)
PPh Pasal 15 Income Tax Article 15	0,10	0,59	0,00000202	(100,00)	(0,58999798)
PPh Pasal 22 Income Tax Article 22	51,61	63,08	76,63	21,48	13,55
PPh Pasal 26 Income Tax Article 26	0,592	0,063	0,018	(71,43)	(0,05)
PBB Land and Building Tax	6,51	18,81	25,65	36,36	6,84
PPN Masukan Input VAT	484,31	785,10	915,41	16,60	130,31
Jumlah Setoran Pajak Total Tax Payment	**659,35**	**1.126,00**	**1.229,39**	**9,18**	**103,39**

Grafik Setoran Pajak (Rp miliar)
Chart of Tax Payment (Rp billion)

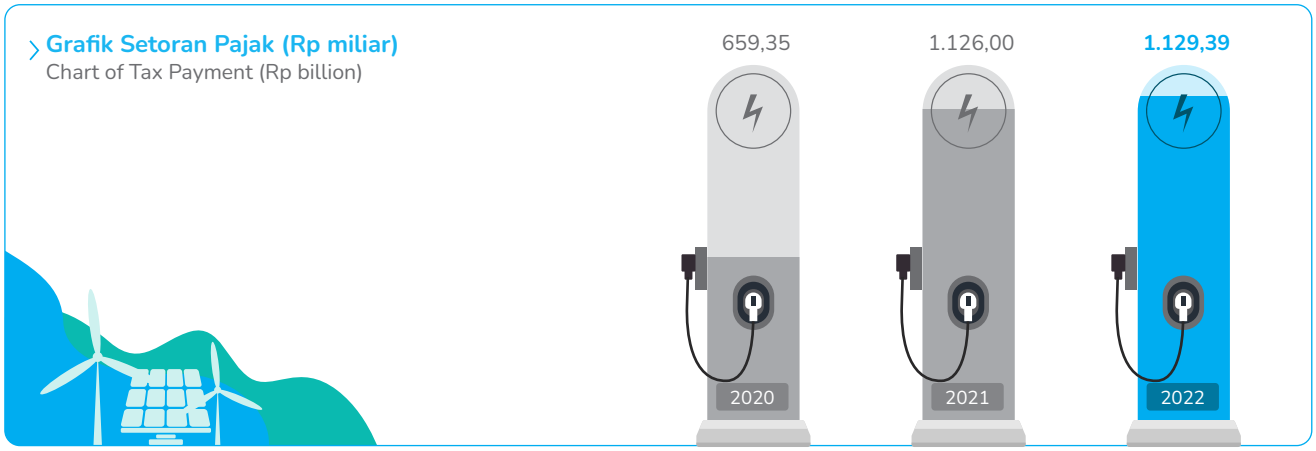

Pajak yang dipungut oleh pihak lain sampai dengan akhir tahun 2022 sebesar Rp149,25 miliar menurun 38,77% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp243,74 miliar yang terdiri dari:

Taxes collected by other parties until the end of 2022 were Rp149.25 billion, decreased by 38.77% compared to 2021 of Rp243.74 billion, consisting of:

Tabel Penerimaan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain (Rp miliar)
Table of Tax Revenues Collected by Other Parties (Rp billion)

Uraian Description	2020	2021	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
PPh Pasal 22 Income Tax Article 22	258,51	202,91	126,09	(37,86)	(76,82)
PPh Pasal 23 Income Tax Article 23	24,10	40,83	23,16	(43,28)	(17,67)
Jumlah Pungutan Pajak Total Tax Collected	**282,61**	**243,74**	**149,25**	**(38,77)**	**(94,49)**

Selain pembayaran pajak kepada Negara, adapun kontribusi lain PLN NP terhadap Negara secara tidak langsung melalui peningkatan APBN yaitu PLN NP telah menyumbang dividen kepada PT PLN (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun 2022. Pembahasan mengenai pembagian dividen telah dijelaskan di sub-bab sebelumnya yaitu bagian Kebijakan Dividen.

In addition to tax payments to the State, another indirect contribution of PLN NP to the State is through an increase in the State Budget, namely PLN NP has contributed dividends to PT PLN (Persero), which is a State-Owned Enterprise (SOE) in 2022. The discussion regarding dividend distribution has been explained in the previous sub-chapter, namely the Dividend Policy section.

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan Manajemen

Employee and Management Stock Option Program

Sampai dengan 31 Desember 2022, PLN NP tidak memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan atau *Employee Stock Option Program* (ESOP) dan kepemilikan saham oleh manajemen atau *Management Stock Option Program* (MSOP). Sehingga tidak ada informasi terkait jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak serta harga *exercise*.

As of December 31, 2022, PLN NP had no Employee Stock Option Program (ESOP) and Management Stock Option Program (MSOP). Therefore, there is no information related to the number of ESOP/MSOP shares and its realization, time period, requirements for eligible employees and/or management as well as the exercise price.

Realisasi Dana Penawaran Umum

Realization of Public Offering Proceeds

Sampai dengan 31 Desember 2022, status PLN NP bukan merupakan *Listed Company* dan belum melakukan penawaran umum, sehingga tidak ada informasi mengenai total perolehan dana, rencana penggunaan dana, rincian penggunaan dana, saldo dana, maupun tanggal persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana.

As of December 31, 2022, PLN NP status was not a Listed Company and had not conducted a public offering, so there is no information regarding the total funds obtained, the planned use of funds, details of the use of funds, the balance of funds, or the date of the GMS approval of the changes in the use of funds.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Berelasi

Information on Material Transactions Containing Conflict of Interest and/or Transactions with Affiliated/Related Parties

Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan

Material Transaction Containing Conflict of Interest

Sampai dengan 31 Desember 2022, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

As of December 31, 2022, there were no transactions containing conflicts of interest.

Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Berelasi

Transactions with Affiliated/Related Parties

Pihak-Pihak Berelasi

Related Parties

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sesuai yang didefinisikan oleh PSAK No. 7, Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi sebagai berikut:

a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor,
   ii. Memiliki pengaruh signifikan atas pelapor atau entitas pelapor, atau
   iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain),
   ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau Ventura Bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya),
   iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama,
   iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga,

The Group conducts transactions with related parties as defined by SFAS No. 7, Related Party Disclosures, as follows:

a. A person or their close family member is related to the reporting entity if that person:
   i. Has control or joint control over the reporting entity,
   ii. Has significant influence over the reporter or the reporting entity, or
   iii. Is a key management personnel of the reporting entity or a parent of the reporting entity.
b. An entity is related to the reporting entity if it fulfills any of the following matters:
   i. The entity and the reporting entity are members of the same group (meaning that the parent, subsidiary and fellow subsidiary are related to each other),
   ii. One entity is an associate or joint venture of another entity (or an associate or joint venture that is a member of a group of which the other entity is a member),
   iii. Both entities are joint ventures of the same third party,
   iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity,

v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor,
vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a),
vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas),

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh Pemerintah. Pemerintah mengacu kepada instansi Pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan pemegang saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai kuasa pemegang saham.

v. The entity is a post-employment benefit plan for employee benefits of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is the entity that organizes the plan, the sponsoring entity is also related to the reporting entity,

vi. Entities controlled or jointly controlled by a person identified in (a),
vii. The person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or the entity's key management personnel (or a parent of the entity),

Government-related entities are entities that are controlled, jointly controlled, or influenced by the Government. Government refers to Government agencies and similar agencies whether local, national or international.

Government-related entities can be entities controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance, which is the entity's shareholder, or entities controlled by the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN) as the shareholder's proxy.

Sifat Hubungan Pihak Berelasi
Nature of Related Party Relationship

Dalam kegiatan usahanya, PLN NP melakukan transaksi tertentu dengan pihak hubungan berelasi. Berikut adalah penjelasan mengenai sifat hubungan berelasi yang dimiliki oleh PLN NP:
a. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia yang merupakan pemegang saham Perusahaan dan BUMN,
b. Perusahaan mempunyai hubungan berelasi dengan BUMN lainnya yang dimiliki bersama oleh Kementerian Keuangan,
c. Grup mempunyai pengaruh signifikan atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama,
d. Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci Grup.

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Perusahaan:

In its business activities, PLN NP conducts certain transactions with related parties. The following is an explanation regarding the nature of the related relationships owned by PLN NP:
a. The Government in this case is the Minister of Finance of the Republic of Indonesia who is a shareholder of the Company and SOE, respectively,
b. The Company has a related relationship with other SOEs jointly owned by the Ministry of Finance,
c. The Group has significant influence over investments in associates or joint ventures,
d. The Board of Commissioners and Board of Directors are the key management personnel of the Group.

The following is a list of related parties that have transactions with the Company:

No.	Uraian Description	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transaction
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka Placement of cash in banks and time deposits
2	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka Placement of cash in banks and time deposits
3	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka Placement of cash in banks and time deposits
4	PT Bank Syariah Indonesia (BSI)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan rekening bank Placement of cash in banks
5	PT Pertamina (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar dan minyak pelumas Purchase of fuels and lubricants
6	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar gas Purchase of gas fuel
7	PT Nusantara Regas	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar gas Purchase of gas fuel
8	PT Superintending Company of Indonesia (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pelayanan teknik, survei dan pengukuran batubara Engineering services, survey and coal measurement
9	PT Asuransi Jasa Indonesia	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Asuransi instalasi dan mesin pembangkit, dan peralatan transmisi Insurance services for installation and power plants and transmissions equipment
10	Perum Jasa Tirta	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian air Purchase of water
11	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Entitas Induk Pengendali Controlling parent entity	Transaksi penjualan tenaga listrik Sales of electricity
12	Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero)	Pemegang saham minoritas Minority shareholder	Penyertaan modal Paid-in capital
13	PT Indonesia Power	Entitas sepengendali Entity under common control	Transaksi penjualan barang dan jasa Sales of goods and services
14	PT PLN Batam	Entitas sepengendali Entity under common control	Transaksi penjualan barang dan jasa Sales of goods and services
15	PT PLN Batubara	Entitas sepengendali Entity under common control	Transaksi pembelian bahan bakar Purchase of fuels
16	PT Haleyora Power	Entitas sepengendali Entity under common control	Transaksi pembelian barang dan jasa Purchase of goods and services

No.	Uraian Description	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transaction
17	PT Indonesia Comnets Plus	Entitas sepengendali Entity under common control	Transaksi pembelian barang dan jasa Purchase of goods and services
18	PT PLN Enjinering	Entitas sepengendali Entity under common control	Transaksi pembelian barang dan jasa Purchase of goods and services
19	PT PLN Tarakan	Entitas sepengendali Entity under common control	Transaksi pembelian barang dan jasa Purchase of goods and services
20	PT Energy Management Indonesia (Persero)	Entitas sepengendali Entity under common control	Transaksi pembelian barang dan jasa Purchase of goods and services
21	PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara	Entitas sepengendali Entity under common control	Transaksi pembelian barang dan jasa Purchase of goods and services
22	PT Pelayaran Bahtera Adiguna	Entitas sepengendali Entity under common control	Jasa pengangkutan batubara Coal transport services
23	PT Asuransi Perisai Listrik Nasional	Pihak berelasi lainnya Other related parties	Asuransi bangunan dan perlengkapan umum Insurance for buildings and general equipment
24	PT Sumber Segara Primadaya	Entitas asosiasi Associate	Jasa operasi dan pemeliharaan Operation and maintenance services
25	PT Rekind Daya Mamuju	Entitas asosiasi Associate	Transaksi jasa proyek Project services
26	PT Bajradaya Sentranusa	Ventura bersama Joint venture	Jasa operasi dan pemeliharaan Operation and maintenance services
27	PT Bukit Pembangkit Innovative	Ventura bersama Joint venture	Jasa operasi dan pemeliharaan Operation and maintenance services
28	PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali	Ventura bersama Joint venture	Piutang kepada ventura Bersama Receivables from joint ventures
29	PT Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energy	Ventura bersama Joint venture	Piutang kepada ventura Bersama Receivables from joint ventures
30	PT North Sumatera Hydro Energy	Ventura bersama Joint venture	Piutang lain-lain Other receivables
31	PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali	Ventura bersama Joint venture	Jasa operasi dan pemeliharaan Operation and maintenance services
32	PT Geo Dipa Energi (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Jasa pemeliharaan dan pemeriksaan Operation and maintenance services
33	PT Pupuk Indonesia Energi	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Jasa pemeliharaan dan pemeriksaan Operation and maintenance services
34	PT Hutama Karya (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi jasa konstruksi Construction services
35	Dana pensiun PLN PLN pension fund	Pihak berelasi lainnya Other related parties	Pengelolaan dana pensiun Pension fund manager
36	Personil manajemen kunci Key management personnel	Komisaris, Direktur dan Kepala Divisi Commissioners, Directors and Division Heads	Upah dan tunjangan Salaries and allowances

Kewajaran Transaksi
Transaction Fairness

Seluruh transaksi dengan pihak berelasi telah sesuai dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati kedua belah pihak, sehingga Perseroan menganggap bahwa semua transaksi masih dalam batas wajar sesuai dengan PSAK Nomor 7 tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. Hal ini mengindikasikan bahwa Perusahaan telah melakukan transaksi dengan pihak yang berelasi secara wajar. Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

All transactions with related parties have been in accordance with the policies and terms agreed by both parties, so the Company considers that all transactions are still within reasonable limits in accordance with PSAK Number 7 concerning Related Party Disclosures. This indicates that the Company has fairly conducted transactions with related parties. All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.

Alasan Dilakukannya Transaksi
Reason for Transaction

Transaksi afiliasi dilakukan berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan profesional dengan tujuan menguntungkan kedua belah pihak (*efficient related party transaction*). Transaksi pihak berelasi menjadi efisien jika menguntungkan pemegang saham pengendali maupun pemegang saham non pengendali.

Affiliated transactions are conducted based on the principles of mutual need and professionalism with the aim of benefiting both parties (efficient related party transaction). Related party transactions are efficient if they benefit both controlling shareholders and non-controlling shareholders.

Nilai Transaksi dengan Pihak Berelasi
Transaction Value with Related Party

Berikut adalah saldo dan transaksi dengan pihak berelasi tahun 2021 dan 2022 (persentase yang diuraikan di tabel berikut merupakan persentase terhadap jumlah aset/liabilitas/pendapatan/beban yang bersangkutan):

The following are balances and transactions with related parties in 2021 and 2022 (the percentages described in the following table are percentages to the total assets/liabilities/revenues/expenses):

Tabel Nilai Transaksi dengan Pihak Berelasi (Rp juta)
Table of Transaction Value with Related Parties (Rp million)

Jenis Transaksi Type of Transaction	Pihak Yang Bertransaksi Transacting Party	2021		2022	
		Rp juta Rp million	%	Rp juta Rp million	%
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	BNI	2.569.716	34,99	4.960.548	2,84
	Bank Mandiri	2.565.677	34,94	2.780.039	1,59
	BRI	2.068.627	28,17	1.149.036	0,66
	BSI	1	0,00	10.002	0,01
	Sub Jumlah Sub Total	**7.204.021**	**98,09**	**8.899.625**	**5,09**
Aset Tidak Lancar Lain Other Non-Current Assets	BRI	-	-	-	-
	Sub Jumlah Sub Total	**-**	**-**	**-**	**-**

Jenis Transaksi Type of Transaction	Pihak Yang Bertransaksi Transacting Party	2021		2022	
		Rp juta Rp million	%	Rp juta Rp million	%
Deposito Berjangka Time Deposits	BRI	260.000	89,62	297.421	0,17
	BNI	30.000	10,34	31.462	0,02
	Bank Mandiri	103	0,04	162.416	0,09
	Sub Jumlah Sub Total	**290.103**	**100,00**	**491.299**	**0,28**
Rekening Bank dan Deposito Berjangka dibatasi penggunaannya Restricted Cash in Banks and Time Deposits	BRI	160.792	77,95	181.314	0,10
	BNI	577	0,28	1.137	0,00
	Bank Mandiri	-	-	112.262	0,06
	Sub Jumlah Sub Total	**161.369**	**78,23**	**294.713**	**0,17**
Piutang Usaha Trade Receivables	PLN	21.788.196	99,24	20.324.438	11,62
	BPI	88.400	0,40	37.173	0,02
	IP	28.094	0,13	95.031	0,05
	BDSN	23.711	0,11	13.660	0,01
	Lain-lain Others	9.726	0,05	5,071	0,00
	Sub Jumlah Sub Total	**21.938.127**	**99,93**	**20.475.373**	**11,70**
Piutang kepada ventura bersama Receivables from joint venture	PT Shenhua Guohua PJB	806.425	116,54	813.424	0,47
	PMSE	9.632	1,39	10.429	0,01
	Sub Jumlah Sub Total	**816.057**	**117,93**	**823.853**	**0,47**
Utang Usaha Trade Payables	PT Pertamina (Persero)	833.450	25,56	24.455	0,19
	PLNBB	307.854	9,44	22.962	0,18
	Perum Jasa Tirta	167.152	5,13	207.342	1,65
	PT Nusantara Regas	155.242	4,76	-	-
	Hutama Karya	71.043	2,18	207.826	1,65
	PLN	6.845	0,21	10.341	0,08
	Sub Jumlah Sub Total	**1.541.586**	**47,27**	**472.926**	**3,76**
Utang Lain-lain Other Payables	PLN	16.965	2,84	285.649	2,27286
	PT Indonesia Comnet Plus	14.023	2,35	3.023	0,02
	PT Haleyora Power	2.388	0,40	2.313	0,02
	PT Indonesia Power	1.981	0,33	683	0,01

Jenis Transaksi Type of Transaction	Pihak Yang Bertransaksi Transacting Party	2021		2022	
		Rp juta Rp million	%	Rp juta Rp million	%
	BAG	-	-	4.461	0,04
	PLNE	-	-	3.125	0,02
	Sub Jumlah Sub Total	**35.537**	**5,95**	**299.254**	**2,38**
Pinjaman dari pemegang saham Loans from shareholder	PLN	2.417.205	110,72	2.667.083	21,22
	Sub Jumlah Sub Total	**2.417.205**	**110,72**	**2.667.083**	**21,22**
Penjualan Tenaga Listrik Sales of Electricity	PLN	24.541.378	100,00	21.682.476	79,71
	Sub Jumlah Sub Total	**24.541.378**	**100,00**	**21.682.476**	**79,71**
Pendapatan Usaha Lainnya Other Operating Revenues	PLN	4.593.225	92,48	4.852.017	17,84
	PT Indonesia Power	122.763	2,47	335.832	1,23
	PT Bukit Pembangkit Innovative	92.771	1,87	92.143	0,34
	PT Bajradaya Sentranusa	91.671	1,85	82.446	0,30
	Lain-lain	30.655	0,61	30.527	0,11
	Sub Jumlah Sub Total	**4.931.085**	**99,28**	**5.392.965**	**19,83**
Pembelian Bahan Bakar dan Pelumas Fuel and Lubricant Purchases	PT Pertamina (Persero)	4.705.735	0,16	2.462.527	10,91
	PT Perusahaan Gas Negara (Persero)	2.696.693	0,10	2.928.146	12,97
	PT Nusantara Regas	731.108	0,03	224.247	0,99
	PT PLN Batubara	597.099	-	104.772	0,46
	Perum Jasa Tirta	295.026	0,29	319.351	1,41
	Sub Jumlah Sub Total	**9.025.661**	**0,16**	**6.039.043**	**26,76**
Beban Pemeliharaan Maintenance Expenses	PT PLN Enjiniring	23.241	0,16	53.476	0,24
	PT PLN Indonesia Power	-	-	289.397	1,28
	Lain-lain	18.907	-	52.143	0,23
	Sub Jumlah Sub Total	**42.148**	**0,29**	**395.016**	**1,75**
Beban Usaha Lain-lain Other Operating Expenses	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	54.615	5,91	52.335	0,23
	PT Asuransi Perisai Listrik Nasional	188	0,02	1.489	0,01
	Sub Jumlah Sub Total	**54.803**	**5,93**	**53.824**	**0,24**

* persentase terhadap jumlah aset/liabilitas/pendapatan/beban yang bersangkutan
* percentage to related total assets/liabilities/revenues/expenses

a. Pinjaman kepada Pemegang Saham

Pada tanggal 20 Maret 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan PLN sebesar AS$280.000.000 dengan tingkat bunga tahunan LIBOR USD enam bulan dengan marjin 0,98%. Pinjaman ini digunakan untuk mendanai proyek add-on PLTGU Muara Tawar Blok 2, 3 dan 4. Jangka waktu perjanjian efektif sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan akan berakhir pada tanggal 8 Mei 2032.

Saldo pinjaman ini pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp2,67 triliun (setara dengan AS$171.054.541) dan Rp2,42 triliun (setara dengan AS$169.402.450), dengan porsi jangka pendek masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp291,05 miliar dan Rp233,98 miliar.

b. Kompensasi Manajemen Kunci

Jumlah kompensasi Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp15,97 miliar dan Rp10,14 miliar. Jumlah kompensasi Direksi Perusahaan untuk tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp28,83 miliar dan Rp24,28 miliar. Seluruh kompensasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan merupakan imbalan kerja jangka pendek.

a. Loan to the Shareholders

On March 20, 2018, the Company signed a loan agreement with PLN amounted to US$280,000,000 with an annual interest rate of six-month US$ LIBOR with a margin of 0.98%. This loan is used to fund the add-on project of Muara Tawar Block 2, 3 and 4 CCPP. The term of the agreement is effective since the signing of this agreement and will expire on May 8, 2032.

The balance of these loans as of December 31, 2022 and 2021 was Rp2.67 trillion (equivalent to US$171,054,541) and Rp2.42 trillion (equivalent to US$169,402,450), respectively, with the short-term portion as of December 31, 2022 and 2021 of Rp291.05 billion and Rp233.98 billion, respectively.

b. Compensation for the Key Management

Total compensation of the Company's Board of Commissioners for 2022 and 2021 was Rp15.97 billion and Rp10.14 billion, respectively. Total compensation of the Company's Board of Directors for 2022 and 2021 was Rp28.83 billion and Rp24.28 billion, respectively. All compensation to the Company's Board of Commissioners and Board of Directors are short-term employee benefits.

Kebijakan Perusahaan terkait Mekanisme *Review* atas Transaksi

Company Policy Related to Review Mechanism of Transaction

Mekanisme *review* atas transaksi dengan pihak berelasi melalui proses audit baik yang dilakukan oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Sebagai upaya untuk memastikan tingkat kewajaran transaksi dan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, laporan transaksi afiliasi di atas telah diaudit oleh Auditor.

Dewan Komisaris dan Komite Audit berperan dalam memberikan arahan dan masukan kepada Direksi agar transaksi dengan pihak berelasi dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip transaksi yang wajar (*arm's-length principle*). Direksi memastikan seluruh transaksi dengan pihak berelasi di sepanjang tahun 2022, telah melalui prosedur yang memadai dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's-length principle*). Informasi lebih rinci terkait transaksi pihak berelasi telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan yang terlampir dalam Laporan Tahunan ini.

The review mechanism of transactions with related parties is through an audit process conducted by both internal and external auditors. As an effort to ensure the level of fairness of transactions and conformity with accounting standards generally applied in Indonesia, the report of affiliated transactions above have been audited by the Auditor.

The Board of Commissioners and the Audit Committee provides directives and inputs to the Board of Directors, to ensure that the transactions with related parties are performed according to the arm's length principle. The Board of Directors makes sure that all transactions with related parties throughout 2022 have used proper procedures and been performed according to generally applied business practices while meeting the arm's length principle. Detailed information on transactions with related parties is available in the Company's Consolidated Financial Statements are attached to this Annual Report.

Informasi Material Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, dan Restrukturisasi Utang/Modal

Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Acquisition, and Debt/Capital Restructuring

Investasi

Investment

Pada tahun 2022, PLN NP melakukan tiga bentuk investasi yaitu investasi pada kinerja unit dan pengembangan usaha, investasi pada entitas asosiasi/ventura bersama, dan investasi penyertaan saham pada entitas anak. Jenis mata uang yang digunakan adalah dalam mata uang Rupiah. Sumber dana investasi merupakan alokasi dana internal perusahaan/Anggaran RKAP tahun 2022.

In 2022, PLN NP invested in 3 sectors, including investment in unit performance and business development, investment in associates/joint ventures, and share investment in subsidiaries. The type of currency used is in Rupiah. The source of investment funds is the allocation of the Company's internal funds/ABOP Budget in 2022.

Investasi pada Penguatan Pembangkitan dan Pengembangan Usaha

Investment in Strengthening Electric Power Generator and Business Development

Investasi penguatan pembangkit pada tahun 2022 adalah sebesar Rp528,24 miliar atau lebih tinggi 1,28% bila dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp521,58 miliar. Bila dibandingkan dengan RKAP 2022, pencapaiannya sebesar 63,84%. Investasi untuk program pengembangan usaha pada tahun 2022 adalah sebesar Rp844,55 miliar atau lebih tinggi 11,26% bila dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp759,10 miliar. Bila dibandingkan dengan RKAP 2022, pencapaiannya sebesar 50,15%. Ketidaktercapaian ini disebabkan terutama karena mundurnya COD blok 2 Muara Tawar yang menyebabkan mundurnya disburse dari target RKAP, rendahnya penyerapan atas program EBT dengan skema kemitraan dan non kemitraan yang belum mendapatkan penugasan dari pemegang saham serta terdapat beberapa keterlambatan *levering* untuk Anggaran Investasi penguatan pembangkit.

Investment in power plant strengthening in 2022 was Rp528.24 billion or 1.28% higher if compared to the realization in 2021 of Rp521.58 billion. If compared to the 2022 ABOP, the achievement was 63.84%. Investment for business development programs in 2022 was Rp844.55 billion or 11.26% higher if compared to the realization in 2021 of Rp759.10 billion. If compared to the 2022 ABOP, the achievement was 50.15%. This non-achievement was mainly due to the delay in the COD of Muara Tawar block 2 which caused a delay in disbursement from the ABOP target, low absorption of the NRE program with partnership and non-partnership schemes that have not yet received assignments from shareholders and there are several delays in levering for the Investment Budget for power plant strengthening.

Investasi pada Entitas Asosiasi/Ventura Bersama

Investment in Associates/Joint Ventures

PLN NP melakukan investasi pada enam perusahaan ventura bersama dan satu entitas asosiasi:

PLN NP invested in six joint ventures and one associated entity:

Tabel Investasi pada Entitas Asosiasi/Ventura Bersama
Table of Investment in Associates/Joint Ventures

Perusahaan Company	Domisili Domicile	Jenis Usaha Type of Business	Tahun Operasi Operation Year	% Penyertaan % Investment	
				2021	2022
Entitas Asosiasi: Associated Entities:					
PT Sumber Segara Primadaya (SSP)	Cilacap	Pembangkit listrik tenaga uap Steam power plant	2006	49,00	49,00

Perusahaan Company	Domisili Domicile	Jenis Usaha Type of Business	Tahun Operasi Operation Year	% Penyertaan % Investment	
				2021	2022
PT Rekind Daya Mamuju (RDM)	Jakarta	Pembangkit listrik tenaga uap Steam power plant	2018	10,00	10,00
PT Sumbagsel Energi Sakti Pewali	Jakarta	Pembangkit listrik tenaga uap Steam power plant	*)	10,00	10,00
Ventura Bersama: Joint Ventures:					
PT Bajradaya Sentranusa (BDSN)	Asahan	Pembangkit Listrik tenaga air Hydro power plant	2011	36,61	36,61
PT Bukit Pembangkit Innovative (BPI)	Palembang	Pembangkit listrik tenaga uap Steam power plant	2015	40,25	40,25
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali (KPJB)	Jepara	Operasi dan Pemeliharaan Operation and Maintenance	2010	49,00	49,00
PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa-Bali	Jakarta	Pembangkit listrik tenaga uap Steam power plant	2019	30,00	30,00
PT Guohua Taidian Pembangkitan Jawa-Bali	Jakarta	Operasi dan Pemeliharaan Operation and Maintenance	2019	30,00	30,00
PT Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energy (PMSE)	Jakarta	Pembangkit listrik tenaga surya Solar power plant	*)	51,00	51,00
PT North Sumatera Hydro Energy	Jakarta	Pembangkit Listrik Power Plant	*)	25,00	25,00

*) dalam tahap pengembangan
*) dalam tahap pengembangan

Investasi Penyertaan Saham pada Entitas Anak
Share Investment in Subsidiaries

Perusahaan memiliki saham entitas anak baik langsung maupun tidak langsung sebagai berikut:

The Company owns shares of subsidiaries either directly or indirectly as follows:

Tabel Investasi Penyertaan Saham pada Entitas Anak
Table of Share Investment in Subsidiaries

Perusahaan Company	Domisili Domicile	Jenis Usaha Type of Business	% Penyertaan % Investment	
			2021	2022
PT Pembangkitan Jawa-Bali Services (PJBS)	Surabaya	Jasa Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik dan Pembangunan (Pemasangan) Peralatan Ketenagalistrikan Operation and Maintenance Services of Power Plants and Construction (Installation) of Electricity Equipment	98,00	99,00
PT Mitra Karya Prima (MKP) *	Surabaya	Jasa Services	92,00	92,00
PT Sertifikasi Kompetensi Pembangkit Tenaga Listrik (SKP) *	Jakarta	Sertifikasi kompetensi tenaga listrik, konsultasi di bidang ketenagalistrikan Certification of electricity competence, consulting in the electricity sector	-	

Perusahaan Company	Domisili Domicile	Jenis Usaha Type of Business	% Penyertaan % Investment	
			2021	2022
PT Rekadaya Elektrika (RE) dan entitas anak PT Rekadaya Elektrika (RE) and entities	Jakarta	Enjiniring, Pengadaan dan Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan Sektor Ketenagalistrikan Engineering, Procurement and Construction, Operation and Maintenance of the Electricity Sector	98,90	99,00
PT Rekadaya Elektrika Consult (REC) *	Jakarta	Supervisi dan konsultasi Supervision and consulting	99,80	-
PT Navigat Innovative Indonesia (NII)	Palembang	Perdagangan, konstruksi, pertambangan dan pertanian Trade, construction, mining and agriculture	72,97	72,97
PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJB Investasi)	Jakarta	Investasi Ketenagalistrikan Electricity Investment	100,00	100,00
PT Pembangkitan Jawa Bali Investindo (PJB Investindo) *	Jakarta	Penempatan investasi di pengadaan listrik Placement of investment in electricity procurement	100,00	100,00
PT Pembangkit Jawa Baskara Investasi Cirata (PJBIC) *	Jakarta	Pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal Financing in the form of capital investment	100,00	100,00
PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang (PLNSC)	Jakarta	Perdagangan barang dan jasa, enjiniring, rantai pasokan, dan konsultasi di bidang ketenagalistrikan Trade in goods and services, engineering, supply chain, and consulting in the electricity sector	51,00	51,00

* pemilikan tidak langsung
* indirect ownership

Ekspansi
Expansion

Pada tahun 2022, PLN NP tidak melakukan aktivitas ekspansi, sehingga tidak terdapat informasi terkait tujuan dan nilai transaksi.

In 2022, PLN NP had no expansion activities, so there is no information regarding the purpose and value of the transaction.

Divestasi
Divestment

Pada tahun 2022, PLN NP tidak melakukan aktivitas divestasi, sehingga tidak terdapat informasi terkait tujuan dan nilai transaksi.

In 2022, PLN NP had no divestment activities, so there is no information regarding the purpose and value of the transaction.

Akuisisi
Acquisition

Pada tahun 2022, PLN NP tidak melakukan aktivitas akuisisi perusahaan, sehingga tidak terdapat informasi terkait tujuan dan nilai transaksi.

In 2022, PLN NP had no company acquisition activities, so there is no information regarding the purpose and value of the transaction.

Restrukturisasi Utang/Modal
Debt/Capital Restructuring

Pada tahun 2022, PLN NP tidak melakukan restrukturisasi baik utang maupun modal. Sehingga tidak terdapat informasi terkait hal tersebut.

In 2022, PLN NP had no restructuring of either debt or capital. Therefore, there is no information related to this matter.

Perubahan Kebijakan Akuntansi
Changes in Accounting Policy

Alasan Perubahan Kebijakan Akuntansi
Reason of Changes in Accounting Policy

Kebijakan akuntansi perusahaan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan.

Perusahaan melakukan review berkelanjutan kebijakan akuntansi terhadap perkembangan revisi Standar Akuntansi Keuangan yang relevan dengan perusahaan. Berikut adalah penerapan standar akuntansi keuangan baru dan revisi (PSAK) dan interpretasi standar akuntansi keuangan (ISAK) yang berlaku efektif tahun 2022, dan standar yang telah diterbitkan tetapi belum diterapkan.

The Company's accounting policies are prepared in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia. The preparation of the financial statements in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia requires the use of estimates and assumptions. It also requires management to make considerations in the process of applying the Company's accounting policies. Areas that are complex or require a higher degree of consideration or areas where assumptions and estimates could have a significant impact on the financial statements.

The Company conducts continuous review of accounting policies on the development of revised Financial Accounting Standards that are relevant to the Company. The following is the application of new and revised financial accounting standards (PSAK) and interpretations of financial accounting standards (ISAK) that are effective in 2022, and standards that have been issued but not yet applied.

Uraian Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya
Description on the Changes in Accounting Policy and the Impact

Standar Akuntansi Berlaku Efektif Tahun 2022
Accounting Standards Effective in 2022

Penerapan dari amandemen dan penyesuaian tahunan terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2022 antara lain:

- Amandemen PSAK No. 22, Kombinasi Bisnis - Referensi ke Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan;
- Amandemen PSAK No. 57, Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi - Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak;
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 69, Agrikultur;
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan;
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 73, Sewa;

Sehubungan dengan amandemen PSAK No. 71, No. 55, No. 60, No. 62, dan No. 73, Grup saat ini memiliki piutang kepada ventura bersama (Catatan 10) dan pinjaman dari pemegang saham (Catatan 31) yang mengacu pada Dolar Amerika Serikat *London Interbank Offered Rate* (“LIBOR”) dan berlaku hingga lebih dari tahun 2022. Pada tanggal 31 Desember 2022, suku bunga acuan alternatif belum ditentukan.

The implementation of the annual amendments and adjustments to the accounting standards, which are effective from January 1, 2022 include:

- Amendment to SFAS No. 22, Business Combinations - Reference to the Conceptual Framework for Financial Reporting;
- Amendment to SFAS No. 57, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets - Onerous Contracts - Cost of Fulfilling the Contract;
- Annual improvement to SFAS No. 69, Agriculture;
- Annual improvement to SFAS No. 71, Financial Instruments;
- Annual improvement to SFAS No. 73, Leases;

In connection with the amendment of SFAS No. 71, No. 55, No. 60, No. 62, and No. 73, the Group currently has receivables from joint ventures (Note 10) and loans from shareholders (Note 31) which refer to the United States Dollar London Interbank Offered Rate ("LIBOR") and are valid until more than 2022. On December 31, 2022, the alternative benchmark interest rate has not yet been determined.

Dampak atas Penerapan Standar Akuntansi Berlaku Efektif Tahun 2022

Impact of the Accounting Standard Implementation Effective in 2022

Penerapan dari amandemen dan penyesuaian tahunan terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2022 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian pada tahun berjalan.

The implementation of the annual amendments and adjustments to accounting standards, effective from January 1, 2022 did not result in any significant changes to the Group's accounting policies and did not have a material impact on the amounts reported in the consolidated financial statements in the current year.

Standar dan Interpretasi telah Diterbitkan tetapi Belum Diterapkan

Issued Standards and Interpretations but Not Yet Implemented

Standar baru, amandemen dan revisi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2022 adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 74, Kontrak Asuransi;
- Amandemen PSAK No. 1, Penyajian Laporan Keuangan - Klasifikasi Kewajiban Lancar atau Tidak Lancar;
- Amandemen PSAK No. 1, Penyajian Laporan Keuangan - Pengungkapan Kebijakan Akuntansi;
- Amandemen PSAK No. 16, Aset Tetap – Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensifkan;
- Amandemen PSAK No. 22, Kombinasi Bisnis - Referensi ke Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan;
- Amandemen PSAK No. 25, Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan - Definisi Estimasi Akuntansi;
- Amandemen PSAK No. 46, Pajak Penghasilan - Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal;
- Amandemen PSAK No. 73, Sewa - Liabilitas Sewa Pada Transaksi Jual dan Sewa-balik;
- Amandemen PSAK No. 74, Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK No. 74 dan PSAK No. 71 - Informasi Komparatif;
- Revisi PSAK No. 101, Penyajian Laporan Keuangan Syariah;
- Revisi PSAK No. 107, Akuntansi Ijarah;
- Revisi PSAK No. 109, Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah.

Standar baru, amandemen, dan revisi di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2023, kecuali untuk Amandemen PSAK No. 1 “Penyajian Laporan Keuangan - Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan”, Amandemen PSAK No. 73, Revisi PSAK No. 101 dan Revisi PSAK No. 109 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2024, dan PSAK No. 74 dan Amandemen PSAK No. 74 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, tetapi penerapan dini diperkenankan.

New standards, amendments and revisions that have been issued but are not yet effective for the financial year beginning January 1, 2022 are as follows:

- SFAS No. 74, Insurance Contracts;
- Amendment to SFAS No. 1, Presentation of Financial Statements - Classification of Current or Non-Current Liabilities;
- Amendment to SFAS No. 1, Presentation of Financial Statements - Disclosure of Accounting Policies;
- Amendment to SFAS No. 16, Property, Plant and Equipment - Proceeds before Intended Use;
- Amendment to SFAS No. 22, Business Combinations - Reference to the Conceptual Framework for Financial Reporting;
- Amendment to SFAS No. 25, Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors - Definition of Accounting Estimates;
- Amendment to SFAS No. 46, Income Taxes - Deferred Taxes related to Assets and Liabilities Arising from a Single Transaction;
- Amendment to PSAK No. 73, Leases - Lease Liability in a Sale and Leaseback;
- Amendment to SFAS No. 74, Insurance Contracts on the Initial Application of PSAK No. 74 and PSAK No. 71 - Comparative Information;
- Revision of SFAS No. 101, Presentation of Islamic Financial Statements;
- Revision of SFAS No. 107, Ijarah Accounting;
- Revision of SFAS No. 109, Zakat, Infaq and Sadaqah Accounting.

The above new standards, amendments and revisions are effective from January 1, 2023, except for Amendment to SFAS No. 1 "Presentation of Financial Statements - Non-Current Liabilities with Covenants", Amendment to SFAS No. 73, Revision of SFAS No. 101 and Revision of SFAS No. 109 which are effective from January 1, 2024, and SFAS No. 74 and Amendment to SFAS No. 74 which are effective from January 1, 2025, but early adoption is permitted.

Potensi Dampak atas Standar dan Interpretasi yang telah Diterbitkan tetapi Belum Diterapkan

Potential Impact of Standards and Interpretations Issued but Not Yet Implemented

Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan dan entitas anak sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amandemen dan revisi pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

At the date of completion of this consolidated financial statements, the Company and its subsidiaries are currently studying the impact that may arise from the implementation of new standards, amendments and revisions on the Group's consolidated financial statements.

Perubahan Peraturan dan Dampaknya terhadap Perusahaan

Regulatory Changes and the Impacts on the Company

Berikut beberapa perubahan peraturan perundang-undangan dan peraturan baru yang berlaku efektif pada tahun 2022 serta dampaknya terhadap kinerja PLN NP:

The following are several changes in laws and regulations as well as new regulations effective in 2022 and their impact on PLN NP's performance:

Tabel Perubahan Peraturan Perundang-undangan dan Dampaknya terhadap Perusahaan

Table of Changes in Laws and Regulations and Their Impact on the Company

No.	Peraturan Regulation	Keterangan Perubahan Changes Description		Dampaknya Terhadap PLN NP secara Kualitatif dan/atau Kuantitatif Qualitative and/or Quantitative Impact on PLN NP
1.	Keputusan Menteri ESDM No.13.K/HK.021/MEM.B/2022 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Administratif, Pelarangan Penjualan Batubara ke Luar Negeri, dan Pengenaan Denda serta Dana Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri Decree of the Minister of EMR No. 13.K HK.021/MEM.B/2022 concerning Guidelines for the Imposition of Administrative Sanctions, Prohibition of Coal Sales Abroad, and Imposition of Fines and Funds. Imposition of Fines and Funds Compensation Funds for Fulfilling Domestic Coal Needs	Pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan), IUP Khusus (IUPK) untuk tahap operasi produksi, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, Pihak dalam PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) untuk tahap operasi produksi serta Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara yang tidak memenuhi kebutuhan dalam negeri/ *Domestic Market Obligation* (DMO) atau tidak memenuhi kontrak penjualan sesuai ketentuan Kepmen ESDM No 139/2021 dikenai sanksi: 1. Pelarangan ekspor batubara sampai Pelaku Usaha Pertambangan Batubara terkait telah memenuhi persentase; 2. Pengenaan denda tertentu dan kewajiban penyediaan dana kompensasi; 3. Penghentian sementara seluruh kegiatan operasi produksi atau pernyataan kelalaian dalam jangka waktu paling lama 60 hari kalender; 4. Pencabutan IUP, IUP Khusus atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian atau PKP2B	Holders of IUP (Mining Business Permits), Special IUP (IUPK) for the production operation stage, IUPK as a Continuation of Contract/Agreement Operations, Parties to PKP2B (Coal Mining Concession Work Agreement) for the production operation stage and Coal Transportation and Sales Permit Holders who do not meet domestic needs/Domestic Market Obligation (DMO) or do not fulfill sales contracts in accordance with the provisions of Decree of the Minister of EMR No. 139/2021 are subject to sanctions: 1. Prohibition of coal exports until the relevant Coal Mining Business Actor has fulfilled the percentage; 2. Imposition of certain fines and obligation to provide compensation funds; 3. Temporary suspension of all production operation activities or a statement of negligence for a maximum period of 60 calendar days; 4. Revocation of IUP, Special IUP or IUPK as a Continuation of Contract/ Agreement Operations or PKP2BB.	1. Pemenuhan pasokan batubara PLN NP menjadi prioritas bagi Pelaku Usaha Pertambangan Batubara karena adanya kewajiban memenuhi DMO dan sanksi jika tidak memenuhinya. 2. Dengan diterbitkannya peraturan ini, akan mendukung pemenuhan kebutuhan batubara PLN NP sebagaimana diatur dalam kontrak. 1. Fulfillment of PLN NP coal supply is a priority for Coal Mining Business Actors due to the obligation to fulfill DMO and sanctions if it is unfulfilled. 2. With the issuance of this regulation, it will support the fulfillment of PLN NP's coal needs as stipulated in the contract.

No.	Peraturan Regulation	Keterangan Perubahan Changes Description		Dampaknya Terhadap PLN NP secara Kualitatif dan/atau Kuantitatif Qualitative and/or Quantitative Impact on PLN NP
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis Dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Government Regulation No. 26 of 2022 concerning Types and Tariffs on Types of Non-Tax Revenue (PNBP) Applicable to the Ministry of Energy and Mineral Resources	1. Terdapat kewajiban pembayaran PNBP atas pelayanan pada sub bidang ketenagalistrikan dalam rangka pemenuhan administrasi perizinan, administrasi sertifikat, dan akreditasi pada bidang ketenagalistrikan. 2. Terhadap ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban pengutamaan produk dan potensi dalam negeri dalam melakukan usaha ketenagalistrikan dapat dikenakan denda yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dan dimasukan ke dalam PNBP. 3. Terdapat denda subsektor ketenagalistrikan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dan dimasukan ke dalam PNBP. 4. Tarif PNBP untuk pemanfaatan sumber daya alam dan jasa dalam bidang energi dan sumber daya mineral dapat ditetapkan serendah Rp0,00 atau 0%. Jumlah, persyaratan dan prosedur pengenaan tarif khusus tersebut diatur dalam Peraturan Menteri ESDM dan harus disetujui oleh Menteri Keuangan	1. There is an obligation to pay Non-Tax Revenue (PNBP) for services in the electricity sub-field in order to fulfill the administration of licensing, certificate administration, and accreditation in the electricity sector. 2. For non-compliance with the obligation to prioritize domestic products and potential in conducting electricity business, a fine may be imposed in accordance with relevant laws and regulations and included in PNBP. 3. There is a fine of electricity subsector which is determined in accordance with relevant laws and regulations and included in PNBP. 4. PNBP tariff for utilization of natural resources and services in the field of energy and mineral resources can be determined as low as Rp0.00 or 0%. The amount, requirements and procedures for the imposition of special tariffs are regulated in the Regulation of the Minister of EMR and must be approved by the Minister of Finance.	1. Terdapat kewajiban pembayaran PNBP bagi PLN NP dalam rangka pemenuhan administrasi perizinan, administrasi sertifikat, dan akreditasi pada bidang ketenagalistrikan sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022. 2. Terdapat potensi denda bagi PLN NP dalam hal terbukti adanya ketidakpatuhan terhadap kewajiban untuk memprioritaskan produk dan potensi dalam negeri ketika terlibat dalam usaha ketenagalistrikan, serta denda sub sektor ketenagalistrikan lainnya. 1. There is PNBP payment obligation for PLN NP in the context of fulfillment of license administration, certificate administration, and accreditation in the electricity sector as stipulated in Government Regulation No. 26 of 2022. 2. There is a potential fine for PLN NP in the event of proven non-compliance with the obligation to prioritize domestic products and potential when engaging in electricity business, as well as other electricity sub-sector fines.
3.	Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik Presidential Regulation No. 112 of 2022 concerning Acceleration of Renewable Energy Development for Electricity Supply	1. Pemerintah memberi dukungan kepada PPL (Pengembang Pembangkit Listrik) dalam rangka pengembangan EBT untuk penyediaan tenaga listrik. 2. Pengembangan PLTU baru dilarang kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) sebagai berikut: a. Terintegrasi dengan industri yang dibangun untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam atau yang merupakan bagian dari proyek strategis nasional yang memberikan kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan/atau pertumbuhan ekonomi nasional; b. Berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca minimal 35% dalam waktu 10 tahun sejak PLTU yang bersangkutan mulai beroperasi jika dibandingkan dengan rata-rata emisi PLTU Indonesia untuk tahun 2021, melalui pengembangan teknologi, *carbon offset* dan/atau bauran energi terbarukan; dan c. Berhenti beroperasi paling lambat tahun 2050.	1. The government provides support to PPL (Power Plant Developer) in the context of developing NRE for electricity supply. 2. Development of new CFPP is prohibited except as stipulated in Article 3 paragraph (4) as follows: a. Integrated with industries that are built to increase the added value of natural resources or that are part of national strategic projects that make a major contribution to job creation and/or national economic growth; b. Committed to reducing greenhouse gas emissions by at least 35% within 10 years since the concerned CFPP starts operating if compared to the average Indonesian CFPP emissions for 2021, through technology development, carbon offset and/or renewable energy mix; and c. Stop operating no later than 2050.	1. PT PLN (Persero) akan memprioritaskan pembelian tenaga listrik dari Pembangkit Listrik Energi Terbarukan di PLN NP. 2. Pengembangan PLTU baru di PLN NP dapat dilakukan sepanjang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (4). 1. PT PLN (Persero) will prioritize the purchase of electricity from Renewable Energy Power Plants in PLN NP. 2. The development of new CFPP in PLN NP can be conducted as long as it fulfills the terms stipulated in Article 3 paragraph (4).

No.	Peraturan Regulation	Keterangan Perubahan Changes Description		Dampaknya Terhadap PLN NP secara Kualitatif dan/ atau Kuantitatif Qualitative and/or Quantitative Impact on PLN NP
		3. PT PLN (Persero) akan mempercepat pengakhiran Pengoperasian PLTU yang dimiliki oleh PT PLN (Persero) dan/atau Kontrak PJBL (Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik) PLTU yang dikembangkan oleh PPL dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana Pasal 3 ayat (7). 4. PT PLN (Persero) akan memprioritaskan pembelian tenaga listrik dari Pembangkit Listrik Energi Terbarukan. 5. Pembelian tenaga listrik dari Pembangkit Listrik Energi Terbarukan harus mengacu pada RUPTL. 6. Pemerintah memberikan dukungan berikut kepada badan usaha yang terlibat dalam pengembangan Pembangkit Listrik Energi Terbarukan dalam bentuk fiskal dan nonfiskal.	3. PT PLN (Persero) will accelerate the termination of the Operation of CFPP owned by PT PLN (Persero) and/ or PJBL Contract (Power Purchase Agreement) of CFPP developed by PPL while still taking into account the provisions in Article 3 paragraph (7). 4. PT PLN (Persero) will prioritize the purchase of electricity from Renewable Energy Power Plant. 5. Purchasing electricity from Renewable Energy Power Plant must refer to the Electricity Supply Business Plan (RUPTL). 6. The government provides the following support to business entities involved in the development of Renewable Energy Power Plants in the form of fiscal and non-fiscal.	
4.	Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2022 Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 10 of 2022	1. Pemegang IUPTLU (Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum) yang memiliki Wilayah Usaha memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan tenaga listrik di dalam wilayah usahanya. Dalam memenuhi kebutuhannya, Pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha dapat melakukan pembelian tenaga listrik dan/atau Sewa Jaringan Tenaga Listrik dari Badan Usaha lain. 2. Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya setelah melalui tahapan evaluasi. 3. Tarif Tenaga Listrk untuk konsumen Pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha ditetapkan oleh Menteri setelah memperoleh persetujuan DPR.	1. The IUPTLU holder (Electricity Provision License for Public Interest) which has Business Area has the obligation to fulfill the need of electricity in its business area. In fulfilling its needs, the IUPTLU Holder that owns the Business Area may purchase electricity and/or Lease the Electricity Network from other Business Entities. 2. The Selling Price of Electricity and the Lease of Electricity Network must obtain approval from the Minister or Governor in accordance with their authority after going through the evaluation stage. 3. Electricity Tariff for consumer of IUPTLU Holder which has Business Area is determined by Minister after obtaining approval from the Indonesian Parliament.	1. Perusahaan sebagai pemegang IUPTLU pembangkit listrik dapat menjual tenaga listrik kepada Pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik dalam wilayah usahanya. 2. Dalam hal PLN NP menjual tenaga listrik kepada Pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha, PLN NP wajib melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri ESDM No 10 Tahun 2022. 1. The Company as the IUPTLU holder of power plant may sell the electric power to the IUPTLU Holder that has Business Area in order to fulfill the need of electric power in its business area. 2. In the event that PLN NP sells electricity to IUPTLU Holders that have Business Area, PLN NP must complete the requirements that have been determined in the Regulation of the Minister of EMR No. 10 of 2022.

No.	Peraturan Regulation	Keterangan Perubahan Changes Description		Dampaknya Terhadap PLN NP secara Kualitatif dan/ atau Kuantitatif Qualitative and/or Quantitative Impact on PLN NP
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Pembubaran Badan Usaha Milik Negara Government Regulation No. 23 of 2022 concerning Amendments to Government Regulation Number 45 of 2005 concerning Establishment, Management, Supervision, Dissolution of State-Owned Enterprises	1. Penambahan beberapa aturan baru dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 yaitu ketentuan mengenai sistem pemilihan Direksi dan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN, ketentuan baru pemberhentian Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas serta rekrutmen karyawan BUMN. 2. Kriteria dan tata cara pengangkatan Direksi dengan daftar dan rekam jejak akan diatur oleh Menteri. Daftar dan rekam jejak tersebut menjadi salah satu penilaian untuk mengukur integritas, perilaku yang baik, dan perilaku jujur calon anggota Direksi. 3. Terdapat ketentuan tambahan larangan anggota Direksi menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan larangan anggota Direksi menjadi calon kepala/ wakil kepala daerah dan/atau kepala/ wakil kepala daerah. 4. Salah satu alasan pemberhentian anggota Direksi dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau keuangan negara. Kerugian yang dimaksud tidak termasuk kerugian yang terjadi karena risiko bisnis. 5. Ketentuan baru untuk pemberhentian anggota Direksi dapat dilakukan apabila anggota Direksi melakukan tindakan yang melanggar etika dan/ atau kepatutan serta Direksi dapat diberhentikan berdasarkan alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS/ Menteri demi kepentingan dan tujuan BUMN. Pemberhentian Direksi oleh RUPS untuk Persero sedangkan pemberhentian Direksi oleh Menteri untuk Perum. 6. Ketentuan pada pasal 27 ayat (2a), anggota Direksi BUMN/anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila telah melakukan prinsip-prinsip *Business Judgement Rule.* 7. Direksi dapat merekrut profesional (*professional hire*) untuk menjadi karyawan dan/atau mengisi posisi/ jabatan di bawah Direksi, dalam rangka memenuhi kebutuhan dan/ atau meningkatkan kinerja BUMN. Pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.	1. The addition of several new rules from Government Regulation No. 45 Year 2005, namely provisions regarding the system for selecting the Board of Directors and Commissioners/ Supervisory Board of SOEs, new provisions for dismissal of the Board of Directors and Commissioners/ Supervisory Board as well as recruitment of SOE employees. 2. Criteria and procedures for the appointment of the Board of Directors with a list and track record will be regulated by the Minister. The list and track record is one of the assessments to measure the integrity, good behavior, and honest behavior of prospective members of the Board of Directors. 3. There are additional provisions prohibiting members of the Board of Directors from becoming political party administrators and/or legislative candidates/members and prohibiting members of the Board of Directors from becoming candidates for head/ deputy head of the region and/or head/ deputy head of the region. 4. One of the reasons for the dismissal of a member of the Board of Directors is if, based on the facts, the member of the Board of Directors concerned is involved in actions that harm SOEs and/or state finances. The loss in question does not include losses incurred due to business risks. 5. New provisions for the dismissal of members of the Board of Directors can be conducted if members of the Board of Directors conduct actions that violate ethics and/or propriety and the Board of Directors can be dismissed based on other reasons deemed appropriate by the GMS/Minister for the interests and objectives of SOEs. Dismissal of the Board of Directors by the GMS is for Persero while dismissal of the Board of Directors by the Minister is for Perum. 6. Provisions in article 27 paragraph (2a), members of the Board of Directors of SOEs/members of the Board of Commissioners/Supervisory Board cannot be held liable for losses if they have conducted the principles of the Business Judgement Rule. 7. The Board of Directors may recruit professionals (professional hire) to become employees and/or fill positions under the Board of Directors, in order to meet the needs and/or improve the performance of SOEs. Appointment, dismissal, rights and obligations are determined based on a collective labor agreement in accordance with the provisions of the laws and regulations in the labor sector.	1. Tata cara pengangkatan/ ketentuan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini tidak berdampak atau berlaku langsung terhadap PLN NP, mengingat saat ini pengangkatan/pemberhentian Direksi/Dewan Komisaris di PLN NP dilakukan oleh PLN selaku Pemegang Saham. Namun demikian dalam Anggaran Dasar PLN NP diatur tata cara pengangkatan/ ketentuan Direksi dan Dewan Komisaris yang dijadikan acuan oleh Pemegang Saham, sehingga berpotensi PLN NP perlu mengubah Anggaran Dasar dan *Board Manual.* 2. Merujuk pada Pasal 27 ayat (3), Menteri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perum. 1. The procedures for appointment/provisions of dismissal of the Board of Directors and Board of Commissioners stipulated in this Government Regulation do not impact or apply directly to PLN NP, considering that currently the appointment/ dismissal of the Board of Directors/Board of Commissioners in PLN NP is conducted by PLN as the Shareholder. However, the Articles of Association of PLN NP regulate the procedures for the appointment/provisions of the Board of Directors and Board of Commissioners which are used as a reference by the Shareholders, thus PLN NP potentially needs to amend the Articles of Association and Board Manual. 2. Referring to Article 27 paragraph (3), the Minister may file a lawsuit to the court against members of the Board of Directors who due to their fault or negligence cause losses to Perum.

No.	Peraturan Regulation	Keterangan Perubahan Changes Description		Dampaknya Terhadap PLN NP secara Kualitatif dan/atau Kuantitatif Qualitative and/or Quantitative Impact on PLN NP
6.	Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Presidential Instruction No. 2 of 2022 concerning the Acceleration of Increasing the Use of Domestic Products and Products of Micro, Small and Cooperative Enterprises in the Context of Successful National Movement on Proudly Made in Indonesia in the Implementation of Government Procurement of Goods/Services	1. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah diinstruksikan untuk menetapkan dan/atau mengubah kebijakan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah. 2. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah diinstruksikan untuk merencanakan, mengalokasikan dan merealisasikan paling sedikit 40% nilai anggaran belanja barang/jasa untuk produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi. Pengurangan impor pada tahun 2023 sampai 5%. Penggunaan produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN 25% dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40%. 3. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah diinstruksikan untuk mengalihkan proses pengadaan manual menjadi pengadaan elektronik pada tahun 2023. Meningkatkan jumlah produk dalam negeri pada Katalog Elektronik/Katalog Sektoral/Katalog Lokal. 4. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah diinstruksikan untuk mencantumkan syarat wajib menggunakan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada semua kontrak kerja sama serta menghapus persyaratan yang menghambat. 5. Mewajibkan BUMN untuk mengalokasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) untuk peningkatan kapasitas Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi. 6. Menyiapkan BUMN sebagai produsen barang/jasa substitusi impor	1. Ministries/Institutions/Regional Governments are instructed to determine and/or change policies on the use of domestic products and products of Micro, Small and Cooperative Enterprises in the implementation of procurement of government goods/services. 2. Ministries/Institutions/Regional Governments are instructed to plan, allocate and realize at least 40% of the budget value of goods/services expenditure for domestic products and products of Micro, Small and Cooperative Enterprises. Reduction of imports in 2023 is up to 5%. The use of domestic products that have a TKDN value of 25% and a Company Benefit Weight value of at least 40%. 3. Ministries/Institutions/Regional Governments are instructed to shift manual procurement processes to electronic procurement in 2023. Increasing the number of domestic products in the Electronic Catalog/Sectoral Catalog/Local Catalog. 4. Ministries/Institutions/Regional Governments are instructed to include mandatory requirements for the use of domestic products and products of Micro, Small and Cooperative Enterprises in all cooperation contracts and remove obstructive requirements. 5. Requiring SOEs to allocate corporate social and environmental responsibility (CSR) for capacity building of Micro, Small and Cooperative Enterprises. 6. Preparing SOEs as producers of import substitution goods/services.	1. Perusahaan dalam hal sebagai penyedia barang/jasa pada pengadaan barang/jasa pemerintah wajib memperhatikan nilai TKDN serta persyaratan-persyaratan lain terkait penggunaan produk dalam negeri, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi. 2. Perusahaan sebagai Anak Perusahaan BUMN wajib memperhatikan kebijakan PT PLN (Persero) yang berpengaruh kepada PLN NP khususnya terkait pengalokasian tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) untuk peningkatan kapasitas Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi serta penyiapan BUMN sebagai produsen barang/jasa substitusi impor. 1. The Company in terms of being a provider of goods/services in the procurement of government goods/services must take into account the TKDN value and other requirements related to the use of domestic products, Micro Enterprises, Small Enterprises and Cooperatives. 2. The Company as a Subsidiary of SOEs must take into account the policies of PT PLN (Persero) which affect PLN NP, especially related to the allocation of corporate social and environmental responsibility (CSR) to increase the capacity of Micro, Small and Cooperative Enterprises and the preparation of SOEs as producers of import substitution goods/services.

No.	Peraturan Regulation	Keterangan Perubahan Changes Description		Dampaknya Terhadap PLN NP secara Kualitatif dan/atau Kuantitatif Qualitative and/or Quantitative Impact on PLN NP
7.	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Sub Ketenagakerjaan Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation Sub Manpower	1. Ketentuan mengenai jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP). 2. Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, baik perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu. 3. Perusahaan alih daya harus berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. 4. Perusahan alih daya harus memperhatikan ketentuan upah minimum bagi pekerjanya.	1. Provisions regarding the types of work that can be outsourced will be further regulated in a Government Regulation (PP). 2. The working relationship between outsourcing companies and the workers/laborers they employ is based on a work agreement made in writing, either a specific time work agreement or an indefinite time work agreement. 3. Outsourcing companies must be legal entities and must comply with Business Licensing issued by the Central Government. 4. Outsourcing companies must take into account the provisions of the minimum wage for their workers.	1. PLN NP dapat berperan aktif terhadap penyusunan PP terkait penetapan sebagai pelaksanaan pekerjaan. 2. Dalam membuat perjanjian dengan Perusahaan Alih Daya, PLN NP wajib memperhatikan ketentuan Perusahaan Alih Daya wajib berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi Perizinan Berusaha. 3. PLN NP perlu memperhatikan ketentuan upah minimum yang diberikan oleh Perusahaan Alih Daya kepada karyawannya agar tidak terjadi tuntutan dari karyawan alih daya yang dipekerjakan di PLN NP 1. PLN NP can play an active role in the preparation of PP related to the determination of partial work implementation. 2. In making agreements with Outsourcing Companies, PLN NP is required to take into account the provisions that Outsourcing Companies must be in the form of legal entities and must fulfill Business Licensing. 3. PLN NP needs to take into account the provisions of the minimum wage provided by the Outsourcing Company to its employees so that there are no claims from outsourcing employees employed at PLN NP.
8.	Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-5/MBU/09/2022 Regulation of the Minister of SOEs No. PER-5/MBU/09/2022	Untuk melaksanakan penerapan manajemen risiko: 1. Direksi dan/atau Dekom/Dewas BUMN wajib menyusun dan/atau menyesuaikan pedoman internal, struktur organisasi, fungsi, dan organ pengelola risiko berdasarkan karakteristik dan kewenangan perusahaan yang bersangkutan. Penyusunan dan/atau penyesuaian tersebut harus diselesaikan dalam waktu satu tahun sejak tanggal 2 September 2022 dan setiap BUMN yang tidak memenuhi kewajiban ini harus memberikan alasan atas kegagalannya. 2. Direksi wajib menyusun rencana manajemen risiko sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Direksi BUMN bertanggung jawab atas penyusunan dan penyampaian laporan Manajemen Risiko.	To carry out risk management implementation: 1. The Board of Directors and/or Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs shall develop and/or adjust internal guidelines, organizational structures, functions and risk management organs based on the characteristics and authority of the Company concerned. The preparation and/or adjustment must be completed within one year since September 2, 2022 and any SOE that fails to fulfill this obligation must provide reasons for its failure. 2. The Board of Directors shall prepare a risk management plan as an integral part of the Company's Annual Budget and Operational Plan (ABOP). SOEs Board of Directors is responsible for the preparation and submission of the Risk Management report.	PLN NP dapat menerapkan prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko pada BUMN dengan melakukan ratifikasi Peraturan Menteri BUMN ini melalui pengukuhan RUPS Anak Perusahaan dan dapat melakukan penyesuaian sesuai karakteristik dan kebutuhan PLN NP PLN NP dapat menerapkan prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko pada BUMN dengan melakukan ratifikasi Peraturan Menteri BUMN ini melalui pengukuhan RUPS Anak Perusahaan dan dapat melakukan penyesuaian sesuai karakteristik dan kebutuhan PLN NP

No.	Peraturan Regulation	Keterangan Perubahan Changes Description		Dampaknya Terhadap PLN NP secara Kualitatif dan/atau Kuantitatif Qualitative and/or Quantitative Impact on PLN NP
		Laporan Manajemen Risiko tersebut terdiri dari: 1. Laporan penerapan manajemen risiko; 2. Laporan audit intern; dan 3. Laporan tata kelola terintegrasi.	The Risk Management Report consists of: 1. Risk management implementation report; 2. Internal audit report; and 3. Integrated governance report.	
		Laporan-laporan tersebut dimasukkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan triwulanan dan tahunan BUMN sebagai bab tersendiri.	The reports are included as an integral part of the SOE's quarterly and annual reports as a separate chapter.	
		Bagi Anak Perusahaan dapat memberlakukan Peraturan Menteri ini yang dikukuhkan dalam RUPS Anak Perusahaan yang bersangkutan dengan penyesuaian sesuai karakteristik dan kebutuhan Anak Perusahaan.	Subsidiaries may apply this Ministerial Regulation which is confirmed in the GMS of the concerned Subsidiary with adjustments according to the characteristics and needs of the Subsidiary.	
		Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai kewenangan Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	The Board of Directors and/or Board of Commissioners who do not carry out the provisions stipulated in this Ministerial Regulation are subject to sanctions in accordance with the Minister's authority based on the provisions of laws and regulations.	

Informasi dan Fakta Material setelah Tanggal Laporan Akuntan

Material Information and Facts after the Accountant's Report Date

Setelah Laporan Keuangan Konsolidasian tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan terbit memuat informasi terkait kejadian material setelah periode pelaporan yaitu pada tanggal 20 Maret 2023, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pendahuluan Jual Beli dengan PT Energi Sengkang (Penjual) untuk pembelian PLTGU Sengkang (315 MW). Dari peristiwa tersebut, tidak terdapat dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian grup.

Dengan pembelian aset PLTGU Sengkang ini, maka secara resmi PLTGU Sengkang menjadi bagian dari Perusahaan sehingga pembangkit dapat dimanfaatkan dan dioptimalisasikan kembali untuk meningkatkan dan menjaga kehandalan pasokan energi listrik di Sistem Sulawesi. Dengan beroperasinya kembali PLTGU Sengkang, diharapkan pemanfaatan gas yang ada di Blok Sengkang dan sekitarnya dapat dioptimalisasikan kembali serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui pembukaan lapangan kerja serta kegiatan CSR dari Perusahaan kedepannya.

After the issuance of the Consolidated Financial Statements for the 2022 financial year that has been audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partner, there is information related to material events after the reporting period, namely on March 20, 2023, the Company signed a Preliminary Sale and Purchase Agreement with PT Energi Sengkang ("Seller") for the purchase of Sengkang CCPP (315 MW). From this event, there is no significant impact on the group's consolidated financial statements.

With the purchase of Sengkang CCPP's assets, the Sengkang CCPP officially becomes part of the Company so that the power plant can be utilized and optimized again to improve and maintain the reliability of electricity supply in the Sulawesi System. With the re-operation of Sengkang CCPP, it is expected that the utilization of existing gas in the Sengkang Block and its surroundings can be re-optimized and can improve the welfare of the surrounding community through job openings and CSR activities from the Company in the future.

Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Luar Biasa dan Jarang Terjadi

Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events

Setelah Laporan Keuangan Konsolidasian tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan terbit memuat informasi tidak terdapat peristiwa yang mengandung kejadian luar biasa dan jarang terjadi di tahun 2022.

After the publication of the Consolidated Financial Statements for the 2022 financial year, which have been audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners, the information stated that there were no events containing extraordinary and rare events in 2022.

Key Performance Indicator dan Tingkat Kesehatan Perusahaan

Key Performance Indicator and Soundness Level of the Company

Key Performance Indicator (KPI)

Sistem manajemen kinerja yang baik merupakan Inti bagi Perusahaan untuk memaksimalkan pencapaian visi dan misinya dengan mengoptimalisasi sumberdaya yang dimiliki. KPI diyakini sebagai sistem yang mampu memuat ukuran dengan merepresentasikan kinerja dari keseluruhan bagian organisasi, serta memuat indikator untuk mengevaluasi kinerja organisasi dalam tujuan mencapai target Perusahaan.

Pengelolaan KPI yang meliputi penyusunan standar, indikator, target kinerja Perusahaan dan penjabarannya sampai dengan satuan unit kerja terkecil di lingkungan Perusahaan serta seluruh pegawai dilakukan oleh Satuan Manajemen Mutu & Kinerja yang berada di bawah Satuan Manajemen Risiko dan Kinerja.

Rapat Umum Pemegang Saham RKAP PLN NP 2022 dimana salah satu agenda didalamnya terkait Persetujuan dan Pengesahan *Key Performance Indicator* (KPI)/Kontrak Manajemen Tahun 2022 oleh Pemegang Saham Perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2022. Adapun Realisasi KPI Kontrak Manajemen antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Perusahaan tahun 2022 adalah sebesar 102,88 sebagaimana tabel berikut:

A good performance management system is the Core for the Company to maximize the achievement of vision and mission by optimizing the resources it has. The Company believes that KPI is a system that is able to contain measures by representing the performance of all parts of the organization, and contains indicators to evaluate organizational performance in order to achieve the Company's targets.

KPI management which covers the preparation of standards, indicators, Company performance targets and its elaboration up to the smallest work unit within the Company and all employees is managed by the Quality & Performance Management Unit under the Risk and Performance Management Unit.

General Meeting of Shareholders of the 2022 PLN NP ABOP was held was held on January 29, 2022, with one of the agendas was related to the Approval and Ratification of the Key Performance Indicator (KPI)/Management Contract for 2022 by the Company's Shareholders, Board of Commissioners and Board of Directors. KPI Realization of the Management Contract between the Board of Directors and Board of Commissioners with the Company's Shareholders in 2022 was 102.88 as follows:

Tabel Realisasi Kontrak Manajemen Tahun 2022 (*Audited*)

Table of Management Contract Realization in 2022 (Audited)

No.	Indikator Kinerja Kunci Key Performance Indicator		Satuan Unit	Bobot Weight	Target	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement	Nilai Value	Keterangan Description
A	**Nilai Ekonomi Sosial** Social economic value			**45**				**9,68**	
1	*Equivalent Availability Factor* (EAF) Pembangkit Jawa Bali Equivalent Availability Factor (EAF) of Java Bali Power Plant:			10				10,24	
	a. EAF PLTU Batubara EAF of CFPP	▲	%		85,20	85,65	100,53%		●
	b. EAF Non PLTU EAF of CFPP	▲	%		91,25	95,18	104,31%		●
2	Biaya Pokok Penyediaan Pembangkit Cost of Electricity Supply (CES) of Power Plant			10				10,54	
	a. BPP Eksisting CES of Existing	▼	Rp/kWh		1.194,88	1.077,00	109,87%		●
	b. BPP AMC Jawa Bali CES of Java Bali AMC	▼	Rp/kWh		830,45	822,57	100,95%		●
3	*Equivalent Forced Outage Rate* (EFOR) Jawa Bali Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) of Java Bali:			8				8,80	
	a. EFOR PLTU Batubara EFOR of CFPP	▼	%		3,49	2,70	110,00%		●
	b. EFOR Pembangkit non PLTU EFOR of Non-CFPP	▼	%		1,57	0,41	110,00%		●
4	*Specific Fuel Consumption* (SFC)			12				12,39	
	a. Batubara Coal	▼	Rp/kWh		0,6327	0,6210	101,85%		●
	b. Gas	▼	MMBTU/kWh		0,0086	0,0082	104,65%		●
5	EBITDA	▲	Rp Miliar Rp Billion	5	8.702,01	10.711,49	110,00%	5,50%	●
B	**Inovasi Model Bisnis** Business Model Innovation			**24**				**22,64**	
1	Sinergi antar Anak Perusahaan Lain (tidak termasuk Sinergi Unit PLN) Synergy among Other Subsidiaries (excluding PLN Unit Synergy)	▲	Rp Miliar Rp Billion	6	183,68	395,02	110,00%	6,60	●
2	*Maturity Level* ERM	▲	Level	6	3,70	4,15	110,00%	6,60	●
3	Pendapatan di luar PLN Grup Income outside PLN Group	▲	Rp Miliar Rp Billion	6	649,92	306,90	47,44%	2,84%	●
4	*Co-firing biomass*	▲	GWh	6	140,42	250,30	110,00%	6,60	●
C	**Kepemimpinan Teknologi** Technology Leadership			**11**				**12,10**	
1	*Digital Power Plant*	▲	Jumlah Unit Total Unit	6	13	16	110,00%	6,60	●
2	*Program Making Digital Talent*	▲	%	5	5,00	6,37	110,00%	5,50	●

No.	Indikator Kinerja Kunci Key Performance Indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	Target	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement	Nilai Value	Keterangan Description
D	**Pengembangan Investasi** Investment Development		**10**				**9,67**	
1	*Milestone* JVC PLTS Cirata Milestone of Cirata SPP JVC	Tahapan Stages	6	Konstruksi *Transmission Line* Construction Transmission Construction	Konstruksi *Transmission Line* 87,91% Construction Transmission Construction 87,91%	87,91%	5,27%	🔴
2	Tingkat Proper Unit (*Beyond Compliance*) Proper Unit Level (Beyond Compliance)	Jumlah Unit Total Unit	4	7	9	110,00%	4,40	🟢
E	**Pengembangan Talenta** Talent Development		**10**				**11,00**	
1	% Perempuan dalam *nominated talent* % Female in nominated talent	%	5	21	26,19	110,00%	5,50	🟢
2	% Milenial (<42 tahun) dalam *nominated talent* % Millennial (<42 years old) in nominated talent	%	5	52	71,43	110,00%	5,50	🟢
F	**Aspek Kepatuhan** Compliance Aspect						**0,00**	
1	Keselamatan Ketenagalistrikan dan Penglolaan Lingkungan Hidup Electricity Safety and Environmental Management		Max (-8)			100,00	0,00	🟢
2	Ketepatan Penyampaian Laporan dan Akurasi data Kinerja Report Submission Accuracy and Performance data Accuracy		Max (-4)			100,00		🟢
	Total		**100**				**102,88**	🟢

Keterangan:
- Belum dilakukan proses pengukuran
- 🟢 Tercapai (NKO ≥ 100)
- 🟡 Hampir Tercapai (NKO ≤ NKO < 100)
- 🔴 Perlu Peningkatan (NKO < 95)

Description:
- Measurement process has not been carried out
- 🟢 Achieved (NKO 100)
- 🟡 Almost Reached (NKO NKO < 100)
- 🔴 Need Improvement (NKO < 95)

Tingkat Kesehatan Perusahaan
Soundness Level of the Company

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PLN Nusantara Power (Perusahaan) tanggal 29 Januari 2022, tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2022, serta Kontrak Manajemen Tahun 2022 tanggal 29 Januari 2022, Pemegang Saham Perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan menyepakati Kontrak Manajemen/*Key Performance Indicators* (KPI) tahun 2022.

Penilaian tingkat kinerja kesehatan PLN NP dilakukan berdasarkan Kriteria Penilaian yang ditetapkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) RKAP Tahun 2022, dimana pada tahun 2022 Tingkat Kesehatan PLN NP berada pada nilai **AAA** kategori **SEHAT** dengan skor **102,88** dari bobot 100.

Based on the Minutes of the General Meeting of Shareholders (GMS) of PT PLN Nusantara Power (the Company) dated January 29, 2022, regarding the Ratification of the Company's Annual Budget and Operational Plan (ABOP) for 2022, as well as the Management Contract for 2022 dated January 29, 2022, the Company's Shareholders, Board of Commissioners and Board of Directors agreed on the Management Contract/Key Performance Indicators (KPI) for 2022.

The assessment of PLN NP's soundness performance level is conducted based on the Assessment Criteria determined at the General Meeting of Shareholders (GMS) of the 2022 ABOP, where in 2022, PLN NP's Soundness Level was at the value of **AAA** in the **SOUND** category with a score of **102.88** out of a weight of 100.

Grafik Tingkat Kesehatan Perusahaan (skor)
Chart of the Company's Soundness Level (score)

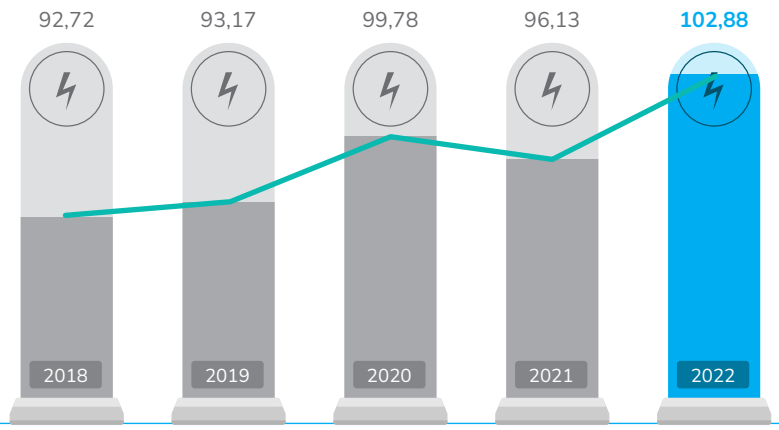

Informasi Kelangsungan Usaha
Business Continuity Information

Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha
Matters with Potentially Significant Effect on Business Continuity

Pada tahun 2022 tidak terdapat hal yang menyebabkan kelangsungan usaha Perusahaan terhenti, berdasarkan atas penilaian faktor keuangan yang dibuktikan dengan hasil opini wajar dalam semua hal yang material dalam Laporan Keuangan *Audited* Perusahaan Tahun 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis, & Rekan. Namun ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dan pemantauan mitigasi risiko. Beberapa hal tersebut berasal dari faktor eksternal dan internal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha PLN NP.

Adapun beberapa faktor eksternal dan internal yang memiliki dampak terhadap Perusahaan di antaranya adalah:

1. Perubahan dinamika pasar
   a. Pertumbuhan permintaan listrik lebih rendah dibandingkan perkiraan, khususnya di wilayah Pulau Jawa
   b. Terbatasnya ruang untuk proyek pembangkit konvensional
   c. Meningkatnya kesadaran lingkungan dan komitmen transisi energi yang berdampak pada proyek-proyek batubara terutama di Pulau Jawa

In 2022 there were no matters that caused the Company's business continuity to stop, based on the assessment of financial factors as evidenced by the results of a fair opinion in all material respects in the Company's Audited Financial Statements for 2022 which had been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis, & Rekan. However, there are several things that need attention and risk mitigation monitoring. Some of these things come from external and internal factors that have the potential to significantly affect the continuity of PLN NP's business.

Some external and internal factors that have an impact on the Company include:

1. Changes in market dynamics
   a. Electricity demand growth is lower than expected, particularly in the Java Island region
   b. Limited space for conventional generation projects
   c. Increased environmental awareness and energy transition commitments impacting coal projects especially in Java Island

2. Risiko pelaksanaan proyek di masa depan
   Penundaan pembangunan di beberapa proyek yang sedang berjalan serta pembatalan proyek yang ada di PLN NP
3. Marginalisasi produksi PLN NP dikarenakan IPP baru
   Pembangkit PLN NP terdampak pada penurunan produksi akibat komitmen *take-or-pay* terhadap IPP
4. Pemain baru di pasar pembangkit listrik, khususnya Energi Terbarukan
5. Peluang proyek relokasi pembangkit yang semakin besar sehubungan dengan pengalihan aset pembangkit dari PLN dan adanya *demand* di daerah *isolated*.
6. Pembentukan *holding-subholding* di sektor ketenagalistrikan
   a. Pembentukan *subholding generation company* (genco): menjadikan lebih *agile*, pemisahan yang jelas antara peran strategis dan operasional, transparansi kinerja dengan model/tata kelola langsung.
   b. Pembentukan *subholding* energi primer: memungkinkan *benefit of scale* (penghematan logistik dan tenaga kerja) dan alokasi batubara yang lebih baik.
   c. Pembentukan *subholding beyond* kWh: mengonsolidasi semua inisiatif *beyond* kWh dalam PLN Group untuk mengembangkan skala bisnis dan *market share* bisnis *beyond* kWh.
   d. Penambahan lingkup pengelolaan karyawan sehubungan dengan bertambahnya jumlah karyawan paska pembentukan *subholding*

2. Future project implementation risks
   Delays in the construction of several ongoing projects as well as cancellation of existing projects in PLN NP
3. Marginalization of PLN NP's production due to new IPPs PLN NP's generation is affected by a decrease in production due to take-or-pay commitments to IPPs
4. New players in the power generation market, particularly Renewable Energy
5. Greater opportunities for power plant relocation projects in connection with the transfer of power plant assets from PLN and the demand in isolated areas.
6. Establishment of subholdings in the electricity sector.
   a. Formation of subholding generation company (genco): makes it more agile, clear separation between strategic and operational roles, performance transparency with direct model/governance.
   b. Establishment of primary energy subholding: enables benefits of scale (logistics and labor savings) and better coal allocation.
   c. Establishment of beyond kWh subholding: consolidate all beyond kWh initiatives within PLN Group to develop business scale and market share of beyond kWh business.
   d. Increase in scope of employee management due to increase in number of employees post subholding establishment.

Assessment Manajemen untuk Mengelola Potensi yang Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha

Management Assessment to Manage Potentials that Significantly Affect Business Continuity

Berdasarkan analisis faktor internal, dapat disimpulkan bahwa PLN NP memiliki kekuatan internal menengah ("*MEDIUM*") karena memiliki kinerja operasi yang mencapai kelas dunia, pengalaman dalam bisnis pembangkit secara *end-to-end* dan SDM yang muda, dinamis dan *engagement* tinggi, akan tetapi dalam hal pengembangan bisnis baru masih terkendala beberapa hal antara lain terbatasnya sumber daya investasi, kurangnya pengalaman dalam pengelolaan pelanggan dan belum banyak pengalaman dalam proyek EBT non-PLTA.

Berdasarkan analisis faktor eksternal saat ini, dapat disimpulkan bahwa PLN NP memiliki banyak kesempatan di pasar untuk berkembang dengan adanya inisiatif pemerintah untuk mencapai 100% rasio elektrifikasi pada tahun 2020, target *energy mix* dari sumber *renewable energy* sebesar 23% pada tahun 2025,

Based on the analysis of internal factors, it can be concluded that PLN NP has medium internal strengths ("MEDIUM") because it has world-class operating performance, experience in the end-to-end generation business and young, dynamic and highly engaged human resources, but in terms of new business development it is still constrained by several things, including limited investment resources, lack of experience in customer management and not much experience in non-hydropower NRE projects.

Based on the analysis of current external factors, it can be concluded that PLN NP has many opportunities in the market to grow with the government's initiative to achieve 100% electrification ratio by 2020, the target energy mix from renewable energy sources of 23% by 2025, the large potential for solar

besarnya potensi pengembangan PLTS di Indonesia, dan tuntutan atas peningkatan keandalan sistem kelistrikan Nasional. Walaupun akan terdapat persaingan yang tinggi serta risiko perubahan peraturan yang berlaku, industri ketenagalistrikan di Indonesia diperkirakan akan masih mengalami pertumbuhan yang pesat karena kesempatan untuk implementasi teknologi digital terutama di sektor pembangkitan, transmisi dan distribusi dan dorongan untuk melakukan peningkatan efisiensi. Maka, *Industry Attractiveness* dapat diniliai secara positif ("*HIGH*").

Dari kedua analisis tersebut, PLN NP memiliki potensi untuk bertumbuh pesat, sehingga perlu dipastikan PLN NP memiliki sumber daya yang cukup untuk menopang pertumbuhan tersebut, baik dari internal, maupun eksternal. Investasi dapat dilakukan untuk menopang pertumbuhan organik di lini bisnis eksisting dan lini bisnis baru. Pertumbuhan organik diwujudkan dengan memperkuat dan menambah kapasitas lini bisnis utama yaitu pembangkit tenaga listrik, melakukan penetrasi market baru untuk lini bisnis jasa EPC, jasa O&M, investasi dalam proyek IPP dan pengembangan bisnis baru atas *resource* dan *capability* yang dimiliki PLN NP termasuk penetrasi ke industri *utility* lain.

power development in Indonesia, and the demand for increased reliability of the National electricity system. Although there will be high competition and risk of regulatory changes, the electricity industry in Indonesia is expected to continue to experience rapid growth due to opportunities for the implementation of digital technology, especially in the generation, transmission and distribution sectors, and the drive to improve efficiency. Therefore, Industry Attractiveness can be rated positively ("HIGH").

From both analyses, PLN NP has the potential to grow rapidly, so it is necessary to ensure that PLN NP has sufficient resources to support this growth, both from internal and external sources. Investments can be made to support organic growth in existing business lines and new business lines. Organic growth is realized by strengthening and increasing the capacity of the main business line, namely power generation, penetrating new markets for EPC services, O&M services, investing in IPP projects and developing new businesses on the resources and capabilities owned by PLN NP including penetration into other utility industries.

Asumsi yang Digunakan dalam Melakukan *Assessment*

Assumptions Used in Conducting an Assessment

Dalam hal penilaian dan evaluasi risiko kelangsungan usaha melalui analisis posisi masing-masing bisnis PLN NP yang dinilai dari keunggulan kompetitif ("*Competitive Advantage*") dan daya tarik ("*Attractiveness*"). Berdasarkan analisis faktor internal, dapat disimpulkan bahwa PLN NP memiliki kekuatan internal menengah ("*MEDIUM*") karena memiliki kinerja operasi yang mencapai kelas dunia, pengalaman dalam bisnis pembangkit secara *end-to-end* dan SDM yang muda, dinamis dan *engagement* tinggi, akan tetapi dalam hal pengembangan bisnis baru masih terkendala beberapa hal antara lain terbatasnya sumber daya investasi, kurangnya pengalaman dalam pengelolaan pelanggan dan belum banyak pengalaman dalam proyek EBT non-PLTA.

Berdasarkan analisis posisi *Competitive Strength,* dapat disimpulkan bahwa bisnis pembangkit eksisting, investasi (IPP) dan O&M masih dapat dikembangkan dan memberikan nilai tambah yang besar kepada perusahaan karena memiliki *margin* laba tertinggi, merupakan bisnis inti dengan kapabilitas *best in class*, berpotensi meningkatkan daya saing bisnis melalui inisiatif-inisiatif strategis, dan permintaan pasar yang terus bertumbuh sekitar 4%.

In terms of business continuity risk assessment and evaluation through analysis of the position of each PLN NP business assessed from competitive advantage ("Competitive Advantage") and attractiveness ("Attractiveness"). Based on the analysis of internal factors, it can be concluded that PLN NP has medium internal strengths ("MEDIUM") because it has world-class operating performance, experience in the end-to-end generation business and young, dynamic and highly engaged human resources, but in terms of new business development it is still constrained by several things, including limited investment resources, lack of experience in customer management and not much experience in non-hydropower renewable projects.

Based on the Competitive Strength position analysis, it can be concluded that the existing power plant business, investment (IPP) and O&M can still be developed and provide great added value to the company because it has the highest profit margin, is a core business with best in class capabilities, has the potential to increase business competitiveness through strategic initiatives, and market demand continues to grow at around 4%.

Arahan atau Keputusan Manajemen atas hasil *Assessment*

Management Direction or Decision on Assessment results

Posisi PLN NP berada pada kuadran *Grow & Build,* strategi yang bisa diterapkan PLN NP adalah:

a. Melakukan *Product* dan *Market development*
b. *Market Penetration*
c. Melakukan *Backward Concentric Diversification* dan *Forward Integration*

PLN NP's position is in the Grow & Build quadrant, the strategies that can be applied by PLN NP are:

a. Conduct Product and Market development
b. Market Penetration
c. Conduct Backward Concentric Diversification and Forward Integration

Penyesuaian yang Dilakukan

Adjustments Made

Berdasarkan pada proyeksi, penjualan tenaga listrik unit pembangkit milik PLN NP diperkirakan akan menurun seiring dengan masuknya pembangkit-pembangkit PLTU batubara dengan kapasitas besar (1000 MW) yang menggunakan teknologi *Ultra Super Critical* (USC) yang lebih efisien. Kondisi tersebut mendorong PLN NP untuk terus berkarya dan berinovasi agar dapat bertahan dan berkembang sebagai perusahaan penyedia tenaga listrik yang andal dan terpercaya melalui deklarasi semangat dan tekad *"Jump to the new S Curve*". Tekad PLN NP untuk melompat menuju kurva baru melalui inovasi pengembangan lini bisnis baru untuk meningkatkan pendapatan *Beyond* kWh dengan tetap menjaga dan meningkatkan keunggulan PLN NP dalam penyediaan tenaga listrik. Selain itu, selaras dengan komitmen mendukung transisi energi menuju EBT, PLN NP juga mendorong inovasi peningkatan kWh pada pembangkit eksisting melalui *co-firing.*

Based on projections, sales of electricity from PLN NP's generating units are expected to decline along with the entry of coal-fired power plants with large capacities (1000 MW) that use more efficient Ultra Super Critical (USC) technology. These conditions encourage PLN NP to continue to work and innovate in order to survive and develop as a reliable and trusted electricity provider company through the declaration of the spirit and determination of "Jump to the new S Curve". PLN NP's determination to jump to the new curve through innovation in developing new business lines to increase Beyond kWh revenue while maintaining and improving PLN NP's excellence in providing electricity. In addition, in line with the commitment to support the energy transition towards EBT, PLN NP also encourages innovation in increasing kWh in existing plants through co-firing.

Pada tahun 2022, PJB Academy telah memasarkan produk pelatihan Teknik dan non Teknik sesuai dengan kebutuhan pasar. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan *Beyond* kWh telah dilaksanakan dengan menindaklanjuti peluang proyek teridentifikasi. Penyusunan proposal bisnis pelatihan secara rutin dilakukan dan disampaikan kepada calon *customer*. Serta dilakukan proses *monitoring* proyek Divisi *Business Solution* berdasarkan tahapan negosiasi/eksekusi/selesai di tahun 2022.

By 2022, PJB Academy has marketed Technical and non-Technical training products in accordance with market needs. Efforts have been made to increase Beyond kWh revenue by following up on identified project opportunities. Preparation of training business proposals is routinely carried out and submitted to prospective customers. As well as the Business Solution Division project monitoring process based on the stages of negotiation/execution/completion in 2022.

Selain langkah-langkah diatas, dari 3 arah pengembangan *strategic goals* yang sudah ditetapkan, PLN NP menyusun 5 pilar strategi dan 3 *key enablers*, yang dijabarkan dalam 16 *Strategic Initiatives* dan 3 *enablers* yang secara periodik pencapaiannya dimonitor dan dievaluasi. Dalam menjalankan 16 *strategic initiatives* perlu dukungan 3 *enablers* seperti *Organization, Capabilities and Culture, Stakeholder and Regulations,* dan *Financial Sustainability.*

In addition to the above steps, from the 3 directions of development of strategic goals that have been set, PLN NP compiled 5 strategic pillars and 3 key enablers, which are described in 16 Strategic Initiatives and 3 enablers whose achievements are periodically monitored and evaluated. In carrying out the 16 strategic initiatives, it needs the support of 3 enablers such as Organization, Capabilities and Culture, Stakeholders and Regulations, and Financial Sustainability.

Dampak Perubahan Harga terhadap Pendapatan dan Laba Perusahaan

Impact of Price Changes on Company Revenue and Profit

Dampak Perubahan Biaya Pokok Penyediaan (BPP)

Impact of Changes in Cost of Electricity Supply (BPP)

Biaya pokok penyediaan tenaga listrik merupakan biaya yang disediakan PLN NP dalam hal ini adalah dari sisi pembangkit yaitu dari pembelian energi primer sampai tenaga listrik dijual kepada PLN.

The cost of electricity supply is the cost provided by PLN NP, in this case is in terms of power plants, namely from the primary energy purchase until the electricity is sold to PLN.

Dampak perubahan BPP terhadap pendapatan operasi yaitu setiap perubahan Rp1 biaya pokok penyediaan tenaga listrik mempengaruhi pendapatan operasi di tahun 2022 berubah sebesar Rp20,13 miliar dan Rp23,73 miliar di tahun 2021.

The impact of BPP changes BPP on operating income is that every Rp1 change in the cost of electricity supply affects operating income in 2022 to change by Rp20.13 billion and Rp23.73 billion in 2021.

Dampak perubahan BPP terhadap laba operasi perusahaan yaitu setiap perubahan Rp1 biaya pokok penyediaan tenaga listrik mempengaruhi laba operasi di tahun 2022 berubah sebesar Rp3,75 miliar dan Rp3,88 miliar di tahun 2021.

The impact of changes in BPP on the Company's operating profit is that every Rp1 change in the cost of electricity supply affects operating profit in 2022 to change by Rp3.75 billion and Rp3.88 billion in 2021.

Dampak Perubahan Harga Jual Tenaga Listrik

Impact of Changes in Electricity Selling Price

Dampak perubahan harga jual tenaga listrik terhadap pendapatan operasi yaitu setiap perubahan Rp1 harga jual listrik mempengaruhi pendapatan operasi di tahun 2022 berubah sebesar Rp16,38 miliar dan Rp19,85 miliar untuk tahun 2021.

The impact of changes in electricity selling prices on operating income is that every Rp1 change in electricity selling prices affects operating income in 2022 to change by Rp16.38 billion and Rp19.85 billion for 2021.

Dampak perubahan harga jual tenaga listrik terhadap laba operasi yaitu setiap perubahan Rp1 harga jual listrik mengakibatkan laba operasi di tahun 2022 berubah senilai Rp3,05 miliar dan Rp3,24 miliar untuk tahun 2021.

The impact of changes in electricity selling prices on operating profit is that every Rp1 change in electricity selling prices results in operating profit in 2022 to change by Rp3.05 billion and Rp3.24 billion for 2021.

Aspek Pemasaran dan Pangsa Pasar
Marketing and Market Share Aspect

Penjualan Listrik dan Inisiasi Pengembangan Bisnis
Electricity Sales and Business Development Initiatives

Pelanggan PLN NP dalam segmen usaha penyediaan listrik adalah PT PLN (Persero) UIP2B (Unit Induk Penyaluran dan Pengaturan Beban), sedangkan segmen bisnis penyedia jasa O&M dan jasa lainnya adalah PT PLN (Persero) Regional maupun *Independent Power Producer* (IPP). Penjualan Tenaga Listrik masih menjadi bisnis utama yang dimiliki oleh PLN NP dimana 70% pendapatan perusahaan berasal dari penjualan tenaga listrik pembangkit eksisting.

Di tahun 2022 PLN NP telah melakukan melakukan upaya-upaya terkait pengembangan bisnis di luar negeri terkait jasa *Operation & Maintenance,* serta MRO, dan bisnis *non core* (*new curve*) untuk mengurangi dampak penurunan penjualan tenaga listrik. Sasaran Korporat lini bisnis Penjualan Tenaga Listrik tahun 2022, adalah sebagai berikut:

1. Kesiapan & Keandalan: Nilai EAF 90,67% dan EFOR 1,56%;
2. Utilisasi Pembangkit: Nilai NCF 23,63%;
3. Biaya Pokok Produksi: 1.195 Rp/kWh dan Nilai NPHR 2.490 kcal/kWh;
4. Pengelolaan K3L: 0 *Accident, beyond compliance* proper untuk unit yang dikelola PLN NP.

Salah satu upaya yang dilakukan PLN NP untuk terus meningkatkan pangsa pasarnya serta menjaga kepuasan pelanggannya adalah dengan melakukan survei kepuasan Pelanggan.

PLN NP's customers in the electricity supply business segment are PT PLN (Persero) UIP2B (Main Unit of Load Distribution and Regulation), while the business segments of O&M services providers and other services are PT PLN (Persero) Regional and Independent Power Producer (IPP). Electricity Sales is still the main business owned by PLN NP where 70% of the Company's revenue comes from the sale of electricity from existing power plants.

In 2022, PLN NP has made efforts related to overseas business development related to Operation & Maintenance services, as well as MRO, and non-core business (new curve) to reduce the impact of decreasing electricity sales. Corporate targets for the Electricity Sales business line in 2022, are as follows:

1. Readiness & Reliability: EAF value of 90.67% and EFOR of 1.56%;
2. Power Plant Utilization: NCF value of 23.63%;
3. Cost of Production: 1,195 Rp/kWh and NPHR Value of 2,490 kcal/kWh;
4. OHSE Management: 0 Accident, beyond compliance proper for units managed by PLN NP.

One of the efforts made by PLN NP to continue increasing its market share and maintaining customer satisfaction is by conducting customer satisfaction surveys.

Analisis Segmen Pasar dan Kondisi Persaingan
Analysis of Market Segments and Competition Conditions

Seiring dengan perkembangan ketenagalistrikan di Indonesia, khususnya pada sistem Jawa-Bali, tren penjualan tenaga listrik PLN NP mengalami penurunan dengan *market share* di tahun 2022 diperkirakan sebesar 6,3%. Penjualan energi listrik Sistem Jawa Bali sampai dengan akhir tahun 2022 adalah sebesar 208.655 GWh mencapai 99,45% dari Rencana Operasi Tahunan (ROT) dan mengalami pertumbuhan sebesar 5,89% bila dibandingkan dengan penjualan di periode yang sama tahun 2021.

Along with the development of electricity in Indonesia, especially in the Java-Bali system, the trend of PLN NP's electricity sales has decreased with a market share in 2022 estimated at 6.3%. Sales of electrical energy for the Java Bali System until the end of 2022 were 208,655 GWh, reached 99.45% of the Annual Operating Plan (ROT) and experienced an increase of 5.89% if compared to sales in the same period in 2021.

Meskipun mengalami pertumbuhan positif dalam penjualan energi listrik di tahun 2022, Perusahaan menghadapi persaingan dalam segmen penjualan tenaga listrik. Oleh karena itu, Perusahaan menyusun strategi pengembangan pasar baru untuk pasar jasa operasi dan pemeliharaan serta bisnis *non core* (*new curve*) untuk mengurangi dampak penurunan penjualan tenaga listrik. Serta mengembangkan produk-produk PLN NP Academy berbasis Operasi dan Pemeliharaan sehingga mampu merealisasikan bisnis *beyond* kWh. Dengan tujuan memaksimalkan upaya peningkatan pendapatan beyond KWh, serta dalam rangka ekspansi bisnis dengan memperluas pangsa pasar baru.

Despite experiencing positive growth in electricity sales in 2022, the Company faces competition in the electricity sales segment. Therefore, the Company developed a new market development strategy for the operation and maintenance services market and non-core business (new curve) to reduce the impact of decreasing electricity sales. As well as developing PLN NP Academy products based on Operation and Maintenance so as to be able to realize the beyond kWh business. With the aim of maximizing efforts to increase revenue beyond KWh, as well as in the context of business expansion by expanding new market shares.

Posisi Produk di Pasar
Product Position in the Market

Pasar utama Perusahaan terkait penjualan energi listrik masih berfokus di Sistem Jawa-Bali. Namun dalam waktu kurun 10 tahun terakhir kapasitas pembangkit milik PLN NP tidak tumbuh, *aging* pembangkit yang menua disertai kompetisi di sistem Jawa-Bali. Oleh karena itu, diperlukan langkah terobosan untuk meningkatkan kapasitas pembangkit, yang disertai dengan pengembangan usaha dan peningkatan *revenue*.

The Company's main market related to the sale of electricity is still focused on the Java-Bali System. However, PLN NP's power plants capacity has not increased in the last 10 years, aging power plants and competition in the Java-Bali system. Therefore, a breakthrough measure is needed to increase power plants capacity, which is accompanied by business development and increasing revenue.

Potensi pengembangan usaha dari green RUPTL 2021-2030 dan mendukung kebijakan pemerintah terkait EBT. Dengan target pemerintah pembangunan energi terbarukan untuk mencapai bauran energi nasional menuju 23% pada tahun 2025. PLN NP menargetkan untuk menjadi operator *solar* PV yang terbesar di Indonesia, menjadi *leader* dalam biomass *co-firing* hingga 5% *fuel mix*, menjadi *operator wind* terbesar di Indonesia dan pemain terkemuka di bidang *battery storage solution.*

The business development potential of the 2021-2030 green RUPTL and supporting government policies related to NRE. With the government's target of renewable energy development to achieve a national energy mix towards 23% in 2025. PLN NP targets to become the largest solar PV operator in Indonesia, a leader in biomass co-firing up to 5% fuel mix, the largest wind operator in Indonesia and a leading player in the battery storage solution sector.

PLN NP menargetkan menjadi pengelola energi paling terpercaya bagi pelanggan C&I skala menengah di Indonesia (mencapai efisiensi hingga 30%), *partner* bagi pelaku teknologi global untuk mengembangkan solusi energi inovatif bagi Indonesia, *rooftop* solar untuk pelanggan C&I dan residensial, dan mengembangkan pembangkit listrik virtual.

PLN NP targets to become the most trusted energy manager for medium-scale C&I customers in Indonesia (achieving up to 30% efficiency), a partner for global technology actors to develop innovative energy solutions for Indonesia, rooftop solar for C&I and residential customers, and develop virtual power plants.

Strategi dan Target Pencapaian Strategi Pasar
Strategy and Target of Market Strategy Achievement

Seiring dengan pengembangan usaha PLN NP yang merambah pada *value chain* ketenagalistrikan selain pembangkitan, maka diperlukan perencanaan yang strategis terkait pemasaran. Adapun strategi yang ditetapkan perusahaan merupakan penjabaran dari

Along with the development of PLN NP's business which penetrates the electricity value chain in addition to electric power generator, strategic planning is needed related to marketing. The strategy determined by the Company is an elaboration of the Vision

Visi dan Misi serta RJPP yang telah ditetapkan. Potensi *market* yang besar di PLN dan pasar Internasional melalui pengembangan produk dengan dukungan kesiapan proses bisnis dan *resources* serta lini bisnis baru dalam meraih pendapatan *beyond* kWh.

Pada tahun 2022, realisasi program strategis *marketing* untuk perluasan pangsa pasar serta pengembangan usaha PLN NP antara lain:

a. Penyelesaian *project* penugasan;
b. Pengembangan pembangkit EBT dan non-EBT dalam RUPTL 2021-2030 melalui skema IPP *Majority* dan *Minority Shares*;
c. Pengembangan usaha lain (*beyond* kWh) melalui pengelolaan jasa O&M dan bisnis EPC (Kit, Trans & GI, Relokasi serta infrastruktur lainnya), pengembangan bisnis *rooftop* solar PV, *power quality* (DRUPS), penyedia logistik dan *part*, optimasi *idle asset* serta komersialisasi kompetensi;
d. Implementasi *quick win* transformasi portofolio PLN Group.

and Mission as well as the RJPP that has been determined. Large market potential in PLN and international markets through product development with the support of business process readiness and resources as well as new business lines in achieving revenue beyond kWh.

In 2022, the realization of strategic marketing programs for market share expansion and business development of PLN NP included:

a. Completion of project assignments;
b. Development of NRE and non-NRE power plants in the 2021-2030 RUPTL through the IPP Majority and Minority Shares schemes;
c. Development of other businesses (beyond kWh) through management of O&M services and EPC business (Kit, Trans & GI, Relocation as well as other infrastructure), development of rooftop solar PV business, power quality (DRUPS), asset management, logistics and parts provider, idle asset optimization and competency commercialization;
d. Implementation of PLN Group's quick win portfolio transformation.

Pangsa Pasar
Market Share

Pada tahun 2022 kegiatan pasokan listrik di sistem Jawa Bali yang di*supply* oleh PLN NP (Eksisting dan UBJOM), Indonesia Power (Eksisting dan UJP), PLN dan IPP. Berikut adalah gambar diagram pangsa pasar industri kelistrikan sistem Jawa Bali:

In 2022, electricity supply activities in the Java Bali system were supplied by PLN NP (Existing and OMSBU), Indonesia Power (Existing and UJP), PLN and IPP. The following is a diagram of the electricity industry market share of the Java-Bali system:

Tabel Pangsa Pasar Kelistrikan Sistem Jawa Bali
Table of Electricity Market Share of the Java-Bali System

Produsen Producer	2020		2021		2022	
	GWh	%	GWh	%	GWh	%
PLN NP Eksisting PLN NP Existing	17.055	9,09	19.779	10,04	16.256	7,79
UBJOM OMSBU	26.430	14,08	24.540	12,45	26.258	12,58
Indonesia Power Eksisting Indonesia Power Existing	33.117	17,64	37.426	18,99	35.751	17,13
UJP	32.341	17,23	28.709	14,57	30.352	14,55
PLN	17.532	9,34	19.018	9,65	19.268	9,23
IPP (Listrik Swasta) IPP (Private Electricity)	61.244	32,63	67.568	34,29	80.769	38,71
Jumlah Sistem Jawa Bali Total Java-Bali System	**187.718**	**100,00**	**197.039**	**100,00**	**208.654**	**100,00**

Prospek Usaha
Business Prospect

Prospek Perekonomian Dunia
World Economic Prospect

Berdasarkan proyeksi dari IMF, pertumbuhan ekonomi AS akan melambat signifikan dari 5,7 persen (yoy) di tahun 2021, menjadi hanya 1,6 persen di tahun 2022 dan 1,0 persen di tahun 2023. Sementara dalam proyeksi lebih terkini dari OECD di bulan November, pertumbuhan ekonomi AS di tahun 2022 diproyeksi sebesar 1,8 persen, tetapi untuk pertumbuhan tahun 2023 melambat tajam di kisaran 0,5 persen. Pengetatan moneter yang sangat agresif menjadi faktor utama yang akan memberi dampak pada pelemahan ekonomi AS selain dari permintaan eksternal yang juga mengalami pelemahan.

According to IMF projections, US economic growth will significantly slow down from 5.7 percent (yoy) in 2021, to only 1.6 percent in 2022 and 1.0 percent in 2023. While in the most recent OECD projection in November, US economic growth in 2022 was projected at 1.8 percent. However, 2023 growth sharply slowed at around 0.5 percent. Highly aggressive monetary tightening is the main factor that will have an impact on the weakening of the US economy apart from the weakening external demand.

Proyeksi IMF menunjukkan pertumbuhan dunia akan melambat tajam dari 6,0 persen di tahun 2021 menjadi 3,2 persen dan 2,7 persen di 2022 dan 2023. Sepanjang tahun 2022, *outlook* pertumbuhan global terus mengalami revisi ke bawah seiring peningkatan berbagai tekanan seperti perang di Ukraina dan tensi geopolitik global secara umum, tekanan inflasi tinggi yang berkepanjangan, pengetatan moneter yang agresif, serta perlambatan ekonomi Tiongkok akibat kebijakan *Zero* Covid-19. Perlambatan di negara besar seperti AS, Eropa dan Tiongkok menjadi kontributor utama dalam pelemahan prospek pertumbuhan global. Di tengah pertumbuhan ekonomi global yang melemah, beberapa negara Asia diperkirakan masih akan menunjukkan prospek pertumbuhan yang kuat seperti India dan ASEAN-5.

The IMF's projections show that world growth will slow sharply from 6.0 percent in 2021 to 3.2 percent and 2.7 percent in 2022 and 2023, respectively. Throughout 2022, the global growth outlook continues to undergo downward revisions in line with the increase in various pressures such as the war in Ukraine and global geopolitical tensions in general, prolonged high inflationary pressures, aggressive monetary tightening, and China's economic slowdown due to Zero Covid-19 policies. The slowdown in major countries such as the US, Europe and China is a major contributor in the weakening global growth outlook. In the middle of the weakening global economic growth, several Asian countries are expected to still show strong growth prospects such as India and ASEAN-5.

Tabel *Outlook* Pertumbuhan Ekonomi Global dan Beberapa Negara (%, yoy)
Table of Economic Growth Outlook for Global and Several Countries (%, yoy)

Negara Country	2021	IMF		OECD	
		2022f	2023f	2022f	2023f
Global	6,0	3,2	2,7	3,1	2,2
Tiongkok	8,0	3,2	4,4	3,3	4,6
Eropa	5,3	3,1	0,0	3,3	0,5
Amerika Serikat	5,7	1,6	1,0	1,8	0,5
India	8,7	6,8	6,1	6,6	5,7
ASEAN-5	3,4	5,3	4,9	-	-

Sumber: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian RI, Tinjauan Ekonomi, Keuangan, dan Fiskal Melaju di Tengah Turbulensi Ekonomi Global Edisi IV Tahun 2022
Source: Fiscal Policy Agency of the Ministry of the Republic of Indonesia, Economic, Financial and Fiscal Review Advancing Amid the Global Economic Turbulence, Edition IV of 2022

Prospek Perekonomian Indonesia

Indonesia's Economic Prospect

Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diproyeksikan masih cukup kuat yaitu masih berada di sekitar 5,0 persen. Hal ini juga sesuai dengan proyeksi terakhir dari banyak Lembaga internasional. IMF dan Asean Development Bank memproyeksikan 5,0 persen, Bank Dunia 5,1 persen, dan Bloomberg Consensus: 4,9 persen. Beberapa hal yang mendukung pertumbuhan Indonesia di sekitar 5,0 persen di tahun 2023, di antaranya perekonomian Indonesia tidak memiliki eksposur yang terlalu besar pada perekonomian global.

Economic growth in 2023 is projected to remain strong at around 5.0 percent. This is also in line with the latest projections from many international Institutions. The IMF and Asean Development Bank project 5.0 percent, the World Bank 5.1 percent, and the Bloomberg Consensus 4.9 percent. Several matters that support Indonesia's growth at around 5.0 percent in 2023, including that the Indonesian economy does not have too much exposure to the global economy.

Pertumbuhan ekonomi pada 2023 diprakirakan tetap tinggi didorong oleh permintaan domestik serta kinerja ekspor yang tetap positif di tengah risiko lebih dalamnya perlambatan perekonomian global, dengan *domestic demand* yang cukup besar, khususnya konsumsi masyarakat. Selain itu, tingkat inflasi relatif terkendali, terutama terkait efektivitas pengendalian inflasi makanan.

Economic growth in 2023 is predicted to remain high driven by domestic demand and export performance that remains positive amid the risk of a deeper global economic slowdown, with considerable domestic demand, especially public consumption. Moreover, the inflation rate is relatively controlled, especially related to the effectiveness of food inflation control.

Kinerja NPI (Neraca Pembayaran Indonesia) diprakirakan tetap terjaga dengan surplus transaksi berjalan berada dalam kisaran 0,4 - 1,2% dari PDB dan kinerja neraca transaksi modal dan finansial yang tetap baik terutama dalam bentuk PMA. Kinerja NPI pada 2023 diprakirakan tetap baik, ditopang oleh neraca transaksi modal dan finansial dan transaksi berjalan yang solid, di tengah risiko berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global.

Performance of Indonesia's Balance of Payments (BOP) is predicted to be maintained with a current account surplus in the range of 0.4 - 1.2% of GDP and good performance of the capital and financial account balance, especially in the form of FDI. The performance of Indonesia's Balance of Payments in 2023 is predicted to remain good, supported by a solid balance of capital and financial transactions and current account, in the middle of the risk of the ongoing global financial market uncertainty.

Fundamental ekonomi yang kokoh sangat dibutuhkan dalam rangka menghadapi tantangan saat ini maupun di masa yang akan datang. Selain itu, APBN 2023 disiapkan untuk merespons risiko ketidakpastian perekonomian global. Oleh karena itu, kebijakan fiskal tahun 2023 diarahkan untuk mendorong "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Solid economic fundamentals are strongly needed in order to face current and future challenges. Moreover, the 2023 State Budget is prepared to respond to the risk of global economic uncertainty. Therefore, the 2023 fiscal policy is directed to encourage "Increased Productivity for Inclusive and Sustainable Economic Transformation".

Sumber: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian RI, Tinjauan Ekonomi, Keuangan, dan Fiskal Melaju di Tengah Turbulensi Ekonomi Global Edisi IV Tahun 2022
Source: Fiscal Policy Agency of the Ministry of the Republic of Indonesia, Economic, Financial and Fiscal Review Advancing Amid the Global Economic Turbulence, Edition IV of 2022

Prospek Industri Kelistrikan Nasional

National Electricity Industry Prospect

Proyeksi Ketenagalistrikan

Electricity Projections

Pada tahun 2023 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Renstra Kementerian ESDM Tahun 2020-2024 menargetkan beberapa kinerja di subsektor ketenagalistrikan, diantaranya penambahan pembangkit listrik sebesar 5.511,69 MW, jaringan transmisi ditargetkan 3.519,5 kms, gardu induk targetnya 3.900 MVA, jaringan distribusi ditargetkan 43.065 Kms, gardu distribusi dengan target 3.206 MVA serta infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dengan target 1.030 unit. Target dan program kerja ketenagalistrikan tahun 2023 lainnya, yaitu:

1. Jumlah pelanggan listrik yang ditargetkan 83.219 ribu pelanggan
2. Konsumsi listrik per kapita yang ditargetkan 1.336 kWh/kapita
3. Rasio elektrifikasi dengan target 100%
4. Penurunan emisi CO_2 pembangkit ditargetkan 5,91 juta ton CO_2
5. Pengembangan *Smart Grid* dengan target di 5 lokasi
6. Susut jaringan ditargetkan 8,78%
7. Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) untuk 83.000 SR

PT PLN (Persero) memperkirakan konsumsi listrik tahun 2023 akan meningkat mencapai 283,12 TWh atau naik 4,74 %. Hal ini didukung pemulihan ekonomi di tahun ini dan kepercayaan publik terhadap perekonomian di tahun 2023. Sedangkan isu transisi energi dan misi pengurangan emisi karbon diprediksi akan menjadi agenda bersama dunia di tahun 2023.

Following the 2020-2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN) and the Ministry of EMR's 2020-2024 Strategic Plan, several performances are being targeted in the electricity subsector in 2023, including the addition of 5,511.69 MW of power plants, transmission networks with a target of 3,519.5 kms, substations with a target of 3,900 MVA, distribution networks with a target of 43,065 Kms, distribution substations with a target of 3,206 MVA and Public Electric Vehicle Charging Station (SPKLU) infrastructure with a target of 1,030 units. Other targets and work programs for electricity in 2023, including:

1. The targeted number of electricity customers is at 83,219 thousand customers
2. The targeted electricity consumption per capita is at 1,336 kWh/capita
3. The targeted electrification ratio is at 100%
4. The targeted reduction of power plant CO_2 emissions is at 5.91 million tons of CO2
5. The targeted Smart Grid development is at 5 locations
6. The targeted network shrinkage is at 8.78%
7. New Electricity Installment Assistance (BPBL) for 83,000 SR.

PT PLN (Persero) estimates that electricity consumption in 2023 will increase to 283.12 TWh or increased by 4.74%. This is supported by economic recovery this year and public confidence in the economy in 2023. Meanwhile, the issue of energy transition and the mission to reduce carbon emissions are predicted to become the world's common agenda in 2023.

Proyeksi Penjualan Listrik

Electricity Sales Projection

PT PLN (Persero) memperkirakan konsumsi listrik tahun 2023 akan meningkat mencapai 283,12 TWh atau naik 4,74 %. Hal ini didukung pemulihan ekonomi di tahun ini dan kepercayaan publik terhadap perekonomian di tahun depan. Dalam menghadapi tantangan ekonomi di tahun 2023 mendatang, PLN terus berkolaborasi dengan pemerintah dan *stakeholder* dan berkontribusi khususnya di sektor ketenagalistrikan.

PT PLN (Persero) estimates that electricity consumption in 2023 will increase to 283.12 TWh or an increase of 4.74%. This is supported by economic recovery this year and public confidence in the economy next year. In facing economic challenges in 2023, PLN continues to collaborate with the government and the stakeholders as well as contribute, especially in the electricity sector.

Tabel Proyeksi Penjualan Tenaga Listrik Indonesia (GWh) dengan Skenario Optimis
Table of Indonesian Electricity Sales (GWh) Projection with Optimistic Scenario

Uraian Description	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Rumah Tangga Household	117,742	122.626	127.603	132.697	137.697	143.121	148.456	153.956	159.527	165.374
Bisnis Business	46.172	49.962	53.653	57.606	61.842	66.270	70.780	75.562	80.623	85.941
Publik Public	16.822	17.795	18.840	19.950	21.106	22.306	23.544	24.824	26.139	27.514
Industri Industry	75.641	82.018	87.712	94.810	101.130	107.507	113.389	118.988	124.318	130.007
Total	256.376	272.401	287.808	305.062	322.045	339.203	356.170	373.330	390.607	408.836
Pertumbuhan (%) Growth (%)	6,3	6,3	5,7	6,0	5,6	5,3	5,0	4,8	4,6	4,7
Pertumbuhan tenaga listrik per kapita (kWh/kapita)* Pertumbuhan tenaga listrik per kapita (kWh/kapita)*	946	996	1.043	1.095	1.146	1.197	1.247	1.296	1.346	1.398
Beban Puncak *Non-Coincident* (MW) Beban Puncak Non-Coincident (MW)	43.289	45.962	48.592	51.366	54.096	56.786	59.452	62.182	64.930	67.984

*) kWh pada konsumsi listrik per kapita hanya melihat konsumsi listrik PLN
*) kWh in electricity consumption per capita only looks at PLN electricity consumption.

Sumber: RUPTL PLN 2021-2030
Source: PLN Electricity Supply Business Plan (RUPTL PLN) in 2021-2030

Proyeksi Kondisi Pembangkit
Projection of Power Plant Condition

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap energi fosil masih mendominasi bauran energi nasional hingga 87,4% sedangkan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) baru 12,6%. Jika dihitung secara mendetail sumbangsih EBT dalam bauran energi nasional terus meningkat walau tidak terlalu signifikan. Salah satunya dalam pembangkit listrik bertenaga EBT.

Berdasarkan data RUPTL 2021-2030, tambahan *supply* baru sebesar 30 GW berpusat pada gas, hidro dan batubara untuk menjamin kecukupan pasokan, solar, dan angin untuk meningkatkan bauran energi dari pembangkit Energi Baru dan Terbarukan di masa depan.

The Ministry of Energy and Mineral Resources (EMR) revealed that fossil energy still dominates the national energy mix to 87.4% while the utilization of new and renewable energy (NRE) is only 12.6%. If calculated in detail, NRE contribution for the national energy mix continues to increase even though it is not too significant, including the NRE power plant.

Based on the 2021-2030 ESBP data, the additional 30 GW of new supply is centered on gas, hydro and coal to ensure adequate supply, solar, and wind to increase the energy mix of New and Renewable Energy power plants in the future.

Penambahan kapasitas baru didominasi oleh EBT (51,6%) dengan porsi hidro (25,6%) sebagai teknologi yang paling tepat untuk memenuhi target 23% EBT pada tahun 2025 sebagaimana yang tercantum dalam RUPTL. Porsi batubara sebesar 34% dalam kapasitas tambahan hanya terdiri atas *on-going project*. Jawa dan Sumatera tetap menjadi daerah dengan permintaan yang intensif dengan tingkat pertumbuhan 4% dan 6,6% secara berurutan.

New capacity additions are dominated by NRE (51.6%) with a portion of hydro (25.6%) as the most appropriate technology to meet the 23% NRE target in 2025 as stated in the RUPTL. The portion of coal at 34% in additional capacity consists only of on-going projects. Java and Sumatera remain demand-intensive regions with the growth rates of 4% and 6.6% respectively.

Proyeksi Pengembangan Pembangkit EBT

Projection of NRE Power Plant Development

Di tahun 2022 Pemerintah telah menetapkan larangan untuk ekspor bijih bauksit yang dapat mendorong industri pengolahan dan pemurnian komoditas tersebut dalam negeri. Hal ini mempengaruhi potensi bertambahnya industri yang membutuhkan listrik tegangan tinggi juga semakin besar. Dalam hal ini PT PLN (Persero) tidak hanya melihat potensi penambahan listrik tegangan tinggi berkat program hilirisasi tambang sebagai peluang untuk meningkatkan permintaan, melainkan juga menambah bauran energi baru terbarukan (EBT) dalam sistem kelistrikan nasional. Dimana dalam RUPTL 2021-2030, PLN telah menghapus rencana 13 GW PLTU baru dan berkomitmen membangun 29 GW pembangkit EBT baru (51 persen dari total tambahan kapasitas). Rencana tersebut sejalan dengan target PLN untuk dapat mereduksi emisi karbon dioksida sebanyak 1,8 miliar ton dalam 25 tahun mendatang.

In 2022, the government has determined a ban on the export of bauxite ore, which is able to encourage a domestic processing and refining industry for the commodity. It affects the potential for more industries that require high voltage electricity. In this case, PT PLN (Persero) not only sees the potential for additional high-voltage electricity due to the downstream mining program as an opportunity to increase demand, but also to increase the mix of new and renewable energy (NRE) in the national electricity system. In the 2021-2030 ESBP, PLN has removed plans for 13 GW of new CFPP and is committed to building 29 GW of new NRE power plants (51 percent of the total additional capacity). The plan is in line with PLN's target to be able to reduce carbon dioxide emissions by 1.8 billion tons in the upcoming 25 years.

Rencananya kedepan akan ada penambahan kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) sebesar 3,4 GW serta sumber daya lain seperti bayu, biomassa, biogas, sampah dan pembangkit EBT *baseload* dengan total penambahan kapasitas pengembangan bisa mencapai 2,5 GW. Perkembangan EBT di Indonesia untuk solar, angin dan hidro akan menjadi relevan dengan *renewable energy services* (RES) dalam 10 tahun ke depan.

PLN NP plans to add the installed capacity of geothermal power plants (GPP) of 3.4 GW as well as other resources such as wind, biomass, biogas, waste and baseload NRE power plants with a total additional development capacity of up to 2.5 GW in the future. The development of NRE in Indonesia for solar, wind and hydro will become relevant to renewable energy services (RES) in the next 10 years.

Sumber: https://www.fortuneidn.com/business/friana/strategi-pln-penuhi-kebutuhan-listrik-hilirisasi-mineral-dengan-ebt
Source:https://www.fortuneidn.com/business/friana/strategi-pln-penuhi-kebutuhan-listrik-hilirisasi-mineral-dengan-ebt

Tabel Rencana Pengembangan Pembangkit EBT (MW)

Table of NRE Power Plant Development Plan (MW)

Pembangkit-EBT NRE Power Plant	Satuan Unit	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Jumlah Total
PLTP GPP	MW	136	108	190	141	870	290	123	450	240	808	808
PLTA HPP	MW	400	53	132	87	2.478	327	456	1.611	1.778	1.950	9.272
PLTM MPP	MW	144	155	277	289	189	43	-	2	13	6	1.118
PLT Surya Solar Power Plant	MWp	60	287	1.308	624	1.631	127	148	165	172	157	4.680
PLT Bayu Wind Power Plant	MW	-	2	33	337	155	70	-	-	-	-	597
PLT Biomassa/ Sampah Biomass/ Waste Power Plant	MW	12	43	88	191	221	20	-	15	-	-	590
PLT EBT Base EBT Base Power Plant	MW	-	-	-	-	-	100	265	215	280	150	1.010
PLT EBT *Peaker* EBT Peaker Power Plant	MW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	300
Jumlah Total	**MW**	**752**	**648**	**2.028**	**1.670**	**5.544**	**978**	**991**	**2.458**	**2.484**	**.3.370**	**20.923**

Sumber: RUPTL PLN 2021-2030
Source: PLN ESBP in 2021-2030

Pada sistem Jawa-Bali, kandidat pembangkit yang dipertimbangkan untuk rencana pengembangan adalah PLTU batubara *ultra supercritical* (USC) kelas 1.000 MW dan 600 MW, PLTGU LNG/gas alam 800 MW, PLTG/GU LNG/CNG pemikul beban puncak 400-500 MW dan PLTA *Pumped Storage* 250 MW. Selain itu terdapat beberapa PLTP kelas 55 MW dan 110 MW, serta PLTA, PLTN jenis *pressurized water reactor* (PWR) kelas 1.000 MW juga disertakan sebagai kandidat dalam model optimisasi perencanaan pembangkitan.

In the Java-Bali system, the candidate power plants considered for the development plan are 1,000 MW and 600 MW ultra supercritical (USC) coal CFPP, 800 MW LNG/natural gas CCPP, 400-500 MW peak load-bearing LNG/CNG GTPP/CCPP and 250 MW Pumped Storage HPP. In addition, there are several 55 MW and 110 MW class GPP, as well as HPP, 1,000 MW class pressurized water reactor (PWR) type NPP are also included as candidates in the electric power generator planning optimization model.

Prospek Usaha PLN NP

Business Prospect of PLN NP

Komposisi produksi listrik per jenis energi primer di Jawa, Madura, dan Bali diproyeksikan pada tahun 2030 akan menjadi 66,7% batubara, 17,1% gas (termasuk LNG), 4,6% tenaga air, 6,6% panas bumi, 0,2% BBM, dan 4,8% EBT lainnya. Porsi pembangkit EBT di Jawa, Madura, dan Bali akan meningkat dari 8,5% tahun 2021 menjadi 16,1% di tahun 2030.

Composition of electricity production per type of primary energy in Java, Madura, and Bali in 2030 is projected to be 66.7% coal, 17.1% gas (including LNG), 4.6% hydropower, 6.6% geothermal, 0.2% fuel, and 4.8% other NRE. The portion of NRE power plants in Java, Madura, and Bali will increase from 8.5% in 2021 to 16.1% in 2030.

Gambar Komposisi Bauran Energi Listrik Berdasarkan Jenis Bahan Bakar Jawa, Madura, dan Bali (GWh)
Picture of Electricity Energy Mix Composition by Fuel Type in Java, Madura, and Bali (GWh)

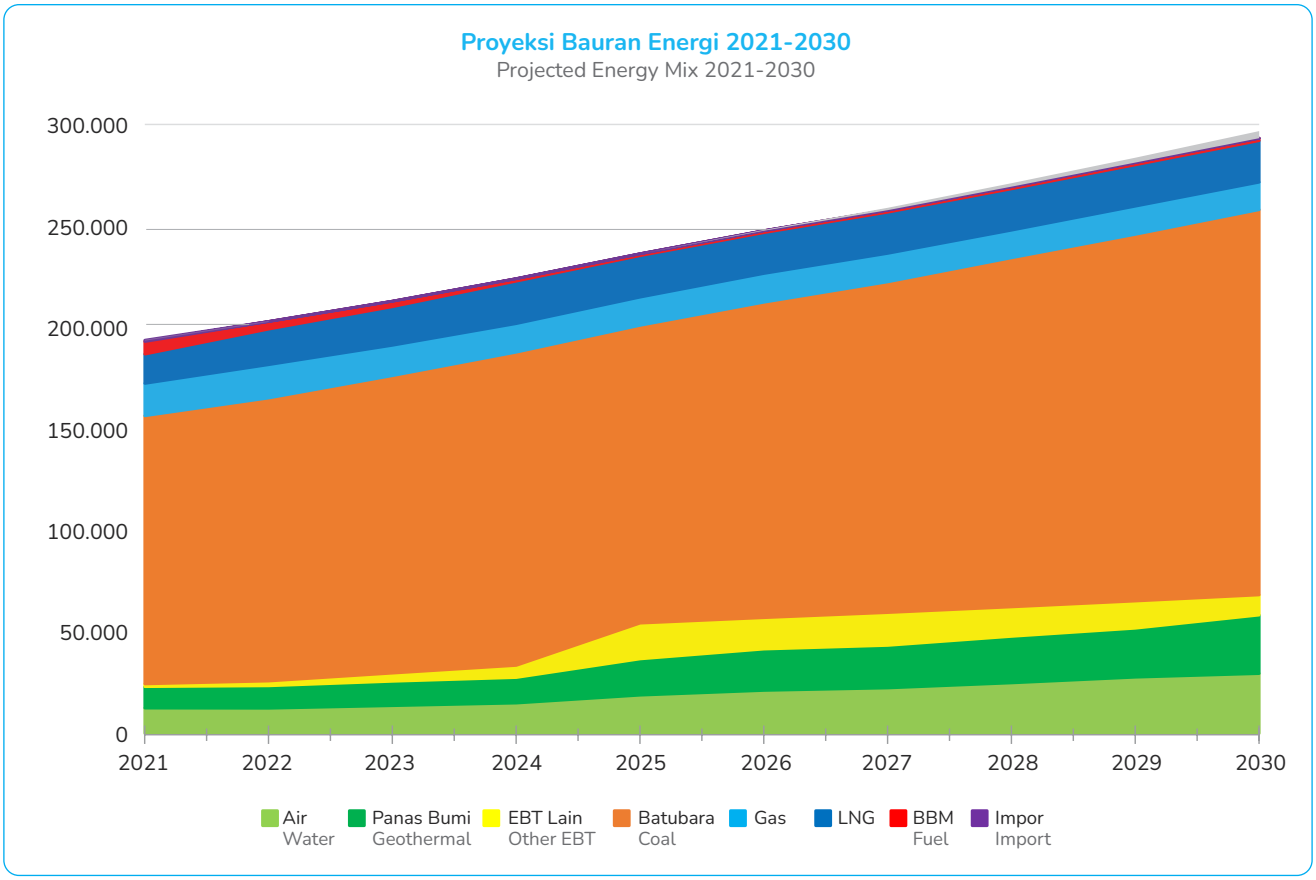

Sumber: RUPTL PLN 2021-2030
Source: PLN ESBP in 2021-2030

Dengan target pemerintah pembangunan energi terbarukan untuk mencapai bauran energi nasional menuju 23% pada tahun 2025. PLN NP menargetkan untuk menjadi operator solar PV yang terbesar di Indonesia, menjadi *leader* dalam *biomass co-firing* hingga 5% *fuel mix,* menjadi *operator wind* terbesar di Indonesia dan pemain terkemuka di bidang *battery storage solution.*

Pada tahun 2022 akhir PLN telah melakukan penandatanganan *Legal End State*, kedepan PLN NP akan menjadi *Generation Company* terbesar di Asia Tenggara serta siap mengelola pembangkit-pembangkit dengan total kapasitas 23,5 GW. Dengan perubahan ini, PLN NP akan mendapatkan dampak positif bagi upaya Indonesia untuk mengambil bagian pada rantai pasok global di tengah momentum transisi energi saat ini.

Penjualan Tenaga Listrik masih menjadi bisnis utama yang dimiliki oleh PLN NP dimana 79% pendapatan perusahaan berasal dari penjualan tenaga listrik pembangkit eksisting. Seiring dengan perkembangan ketenagalistrikan di Indonesia, Di tahun 2023, kontribusi PLN NP dalam mendukung sistem ketenagalistrikan Jawa Madura Bali akan bertambah seiring dengan rencana COD *Add On* blok 3 dan blok 4 PLTGU Muara Tawar dengan kapasitas masing-masing 250 MW maupun rencana pembentukan *holding subholding* PLN dengan implikasi pengalihan aset PLN yang dikelola PLN NP di sistem Jawa Madura Bali.

PLN NP mendukung penyediaan tenaga listrik dengan 3 prinsip ketahanan, yaitu *security, affordability* dan *low emission* di antaranya melalui program: *coal switching, anti black out* dan unit *fast response*, swakelola pemeliharaan, optimasi Pemakaian Sendiri (PS) melalui PLTS substitusi PS, *co-firing* dan budidaya tanaman energi untuk mendukung program *co-firing* PLTU batubara.

With the government's target of renewable energy development to achieve a national energy mix towards 23% in 2025. PLN NP aims to become the largest solar PV operator in Indonesia, a leader in biomass co-firing up to 5% fuel mix, the largest wind operator in Indonesia and a leading player in the battery storage solution sector.

By the end of 2022, PLN signed a Legal End State, in the future, PLN NP will become the largest Generation Company in Southeast Asia and is ready to manage power plants with a total capacity of 23.5 GW. With this change, PLN NP will have a positive impact on Indonesia's efforts to take part in the global supply chain amid the current energy transition momentum.

Electricity Sales is still the main business owned by PLN NP where 79% of the Company's revenue comes from the sale of electricity from existing power plants. Along with the development of electricity in Indonesia, in 2023, PLN NP's contribution in supporting the Java Madura Bali electricity system will increase along with the plan to COD Add On the Muara Tawar block 3 and block 4 CCPP with a capacity of 250 MW each and the plan to establish a PLN holding sub holding with the implication of transferring PLN's assets managed by PLN NP in the Java Madura Bali system.

PLN NP supports the provision of electricity with 3 principles of resilience, namely security, affordability and low emission, including through programs: coal switching, anti-black out and fast response units, self-managed maintenance, optimization of Self-Consumption (PS) through PS substitution SPP, co-firing and cultivation of energy plants to support the coal CFPP co-firing program.

Tabel Rencana COD Pembangkitan 2023-2025

Table of COD Plan for Electric Power Generator in 2023-2025

Proyek Project	Kapasitas Capacity	Keterangan Description	Progress
Add on Muara Tawar Blok 3 Add on Muara Tawar Block 3	**250 MW**	Penugasan Assignment	Konstruksi Construction
Add on Muara Tawar Blok 4 Add on Muara Tawar Block 4	**250 MW**	Penugasan Assignment	Konstruksi Construction
Cirata *floating* PV	**145 MW**	Penugasan Assignment	Konstruksi Construction
Total COD 2023	**645 MW**		

Proyek Project	Kapasitas Capacity	Keterangan Description	Progress
PLTU Sumbagsel 1 Southern Sumatera 1 CFPP	300 MW	Penugasan Assignment	Konstruksi Construction
PLTA Batang Toru Batang Toru HPP	510 MW	Penugasan Assignment	Konstruksi Construction
PLTS IKN IKN SPP	50 MW	Penugasan Assignment	Pengembangan Development
PLTS Karangakates Karangkates SPP	100 MW	Penugasan Assignment	Pengembangan Development
PLTB Tanah Laut Tanah Laut WPP	70 MW	Penugasan Assignment	PPA
PLTS Dedieselisasi Dedieselized SPP	60 MW	Penugasan Assignment	Lelang Auction
Total COD s.d 2025	**1.090 MW**		

Strategi Perusahaan Kedepan
Future Company Strategy

PLN NP memiliki peran strategis dalam mendukung *solid* PLN di industri kelistrikan Nasional yaitu:

1. ***Securing Business Sustainability***
   Dukungan 6 *line of defense system* Jawa Bali dengan cara penguatan sistem proteksi di semua pembangkit dan fasilitas *blackstart* di Muara Tawar, Muara Karang, dan Cirata. Serta optimasi CNG Gresik dan Muara Tawar sebagai *peak saving.*

2. ***Optimizing Cost Efficiency***
   Efisiensi pemakaian sendiri pembangkit dan implementasi digitalisasi pembangkit.
3. ***Leading Industries Capabilities***
   Pengelolaan kinerja *excellence* melalui pembangkit non batubara dan pembangkit batubara. Implementasi *Three Line of Defense,* iCOFR & ISO 37001 sebagai *Governance Risk Compliance.*
4. ***Increasing Profit Contribution***
5. ***Developing New Edge (Renewable Energy)***
   Menginisiasi *project baru* berdasarkan RUPTL 2021-2030 dengan total kapasitas 1.933,5 MW dengan target COD 2022-2028, termasuk di dalamnya PLTS dedieselisasi sebesar 81,2 MW. Pemanfaatan biomass untuk *co-firing* PLTU batubara & inisiasi implementasi di pembangkit *existing* skala besar dan unit pembangkit yang dikelola PLN NP s.d 200 MW (5% dari 4.000 MW).

PLN NP has strategic roles in supporting solid PLN in the National electricity industry, namely:

1. **Securing Bussiness Sustainability**
   6 lines of defense support for the Java Bali system by strengthening the protection system in all power plants and blackstart facilities in Muara Tawar, Muara Karang, and Cirata. As well as optimizing CNG Gresik and Muara Tawar as peak saving.
2. **Optimizing Cost Efficiency**
   Self-consumption efficiency of power plants and implementation of power plant digitization.
3. **Leading Industries Capabilities**
   Management of excellence performance through non-coal and coal power plants. Implementation of Three Lines of Defense, iCOFR & ISO 37001 as Governance Risk Compliance.

4. **Increasing Profit Contribution**
5. **Developing New Edge (Renewable Energy)**
   Initiating new projects based on the 2021-2030 ESBP with a total capacity of 1,933.5 MW with a COD target of 2022-2028, including 81.2 MW of dedieselized SPP. Utilization of biomass for co-firing coal CFPP & initiation of implementation in large-scale existing power plants and generating units managed by PLN NP up to 200 MW (5% of 4000 MW).

CONTROL UNIT 2
49.97Hz
ANDRITZ

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Penerapan Tata Kelola Berkelanjutan

Implementation of Sustainable Governance

Terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan menjadi gagasan yang mendorong Perusahaan untuk menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh berkelanjutan serta berwawasan lingkungan dalam mendukung industri ketenagalistrikan nasional. Perusahaan menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik; menjalankan organisasi yang *agile* dan adaptif serta menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi *stakeholders* dengan berpegang pada kaidah Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

Leading and trusted in the sustainable energy business is the idea that encourages the Company to carry out an innovative and collaborative energy business, grow sustainably and environmentally sound in supporting the national electricity industry. The Company attracts and develops the best talent; carries out an agile and adaptive organization and maintains the highest level of performance to provide added value to stakeholders by adhering to the rules of Good Corporate Governance.

Persaingan bisnis bidang ketenagalistrikan menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, ketidakpastian ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan trend bisnis saat ini juga mengalami perubahan memberikan tantangan bagi semua pelaku bisnis dan industri. Perusahaan merasakan dampak yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penjualan tenaga listrik yang diproyeksikan akan terus terjadi, seiring dengan beroperasinya pembangkit tenaga listrik dengan teknologi *Ultra Super Critical* (USC) yang lebih efisien dan berkapasitas besar. Kondisi tersebut mendorong Perusahaan untuk terus berkarya dan berinovasi agar dapat bertahan dan berkembang sebagai perusahaan penyedia tenaga listrik yang andal dan terpercaya melalui deklarasi semangat dan tekad '*Jump to the new S Curve*'. Di sisi lain, perkembangan portofolio PLN ke depan harus dapat menjamin keberhasilan dan sustainabilitas korporasi di masa mendatang melalui strategi korporat untuk mendukung value creation & sustainability dari portofolio bisnis PLN. Perusahaan mendukung *value creation & sustainability* portofolio bisnis PLN Group melalui implementasi *streamline subsidiary.*

Competition in the electricity business shows an increasing trend, economic uncertainty after the COVID-19 pandemic and current business trends are also changing, providing challenges for all business and industry players. The Company feels a considerable impact on economic growth and electricity sales growth which is projected to continue, along with the operation of power plants with Ultra Super Critical (USC) technology that are more efficient and have large capacities. These conditions encourage the Company to continue to work and innovate in order to survive and develop as a reliable and trusted electricity provider company through the declaration of the spirit and determination of 'Jump to the new S Curve'. On the other hand, the future development of PLN's portfolio must be able to ensure the success and sustainability of the corporation in the future through a corporate strategy to support the value creation & sustainability of PLN's business portfolio. The Company supports the value creation & sustainability of PLN Group's business portfolio through the implementation of streamline subsidiary.

Perusahaan terus melakukan perbaikan agar dapat bertahan dan berkembang sebagai perusahaan penyedia tenaga listrik yang andal dan terpercaya diantaranya melalui inovasi pengembangan lini bisnis baru dalam meningkatkan pendapatan *beyond* kWh dengan tetap menjaga dan meningkatkan keunggulan Perusahaan dalam penyediaan tenaga listrik. Proses pengalihan aset pembangkit milik PLN yang diinisiasi di tahun 2022 juga menjadi salah satu tantangan sekaligus peluang bagi Perusahaan untuk dapat terus berkontribusi secara maksimal dalam penyediaan tenaga listrik Nasional. Perusahaan berupaya menjawab tantangan tersebut dan memanfaatkan setiap peluang dengan berpegang pada prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik agar arah pengembangan korporasi Perusahaan yang telah memasuki tahap Transformasi Korporat 2 menuju ke arah *new energy* dan *sustainable* tetap berjalan pada jalurnya.

The Company continues to make improvements in order to survive and develop as a reliable and trusted electricity provider company, including through innovation in developing new business lines in increasing revenue beyond kWh while maintaining and improving the Company's excellence in providing electricity. The process of transferring PLN's power plant assets initialized in 2022 is also one of the challenges as well as opportunities for the Company to be able to continue to contribute optimally in the provision of National electricity. The Company strives to answer these challenges and take advantage of every opportunity by adhering to the principles of Good Corporate Governance so that the direction of the Company's corporate development which has entered the Corporate Transformation 2 stage towards new energy and sustainability remains on track.

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Principles of Good Corporate Governance (GCG)

Transparansi
Transparency

Prinsip Transparansi merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi material yang relevan bagi Perusahaan. Transparansi diupayakan dan diwujudkan oleh Perusahaan dengan selalu berusaha untuk mempelopori pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan kepada *stakeholder* serta dalam pengungkapannya tidak terbatas pada informasi yang bersifat wajib dengan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan praktik terbaik GCG.

The principle of Transparency is openness in carrying out the decision-making process and disclosing material information relevant to the Company. Transparency is pursued and realized by the Company by always striving to pioneer the disclosure of financial and non-financial information to stakeholders as well as in its disclosure is not limited to information that is mandatory by not violating applicable laws and regulations as well as in accordance with GCG best practices.

Akuntabilitas
Accountability

Prinsip akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga pengelolaan Perusahaan dilaksanakan secara efektif. Penerapan akuntabilitas dengan mendorong seluruh individu dan/atau Organ Perusahaan agar menyadari hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya.

The principle of accountability is the clarity of functions, implementation and accountability of the Company Organs so that the management of the Company is carried out effectively. The implementation of accountability by encouraging all individuals and/or Company Organs to realize their rights and obligations, duties and responsibilities and authorities.

Pertanggung-jawaban
Responsibility

Prinsip pertanggungjawaban merupakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dan etika bisnis yang sehat dalam pengelolaan Perusahaan. Pertanggungjawaban diwujudkan oleh Perusahaan dengan selalu berusaha menjadi warga Perusahaan yang baik (*Good Corporate Citizen*).

The principle of responsibility is compliance with applicable laws and regulations and the principles of corporate governance and sound business ethics in the management of the Company. Responsibility is realized by the Company by always striving to be a Good Corporate Citizen.

Kemandirian
Independence

Prinsip kemandirian merupakan pengelolaan Perusahaan secara mandiri tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat termasuk tidak adanya kepentingan politik dan kepentingan pribadi dalam pengelolaan Perusahaan. Kemandirian merupakan suatu keharusan agar Organ Perusahaan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang terbaik bagi Perusahaan dan dilaksanakan dengan selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan masing-masing Organ Perusahaan.
The principle of independence is the independent management of the Company without conflict of interest and influence/pressure from any party that is not in accordance with the applicable laws and regulations and the principles of sound corporate governance including the absence of political interests and personal interests in the management of the Company. Independence is a must so that the Company's Organs can serve well and be able to make the best decisions for the Company and is carried out by always respecting the rights and obligations, duties and responsibilities and authorities of each Company Organ.

Kewajaran
Fairness

Prinsip kewajaran merupakan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *Stakeholder* sesuai perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan menjamin bahwa setiap Pemegang Saham dan *Stakeholder* mendapatkan perlakuan yang wajar, dan dapat menggunakan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
The principle of fairness is justice and equality in fulfilling the rights of Stakeholders in accordance with agreements and applicable laws and regulations. The Company ensures that each Shareholder and Stakeholder receives fair treatment, and can exercise their rights in accordance with applicable laws and regulations.

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) diharapkan dapat menekan biaya, memperkuat sistem manajemen risiko dan kepatuhan terhadap hukum; mendorong pertumbuhan nilai perusahaan yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kepercayaan para investor dan pemangku kepentingan. Sehingga Perusahaan mampu mendorong efektivitas implementasi program strategis Perusahaan.

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles is expected to reduce costs, strengthen risk management systems and compliance with the law; encourage growth in corporate value in line with the principles of sustainable development and increase investor and stakeholder confidence. Thus, the Company is able to encourage the effectiveness of the implementation of the Company's strategic programs.

Landasan Hukum dan Standar Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Legal Basis and Standard of Good Corporate Governance Implementation

Dasar hukum dan standar penerapan tata kelola perusahaan yang baik sangat penting sebagai acuan untuk mengimplementasikan dan memenuhi kaidah-kaidah dalam menata organ dan menjalankan operasional perusahaan guna melindungi kepentingan dan memenuhi harapan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan lain serta tercapainya penciptaan nilai korporasi yang berkelanjutan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan Perusahaan berlandaskan pada peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

The legal basis and standards for the implementation of good corporate governance are very important as a reference for implementing and fulfilling the rules in organizing organs and running company operations in order to protect the interests and fulfill the expectations of shareholders and other stakeholders as well as the achievement of sustainable corporate value creation. The implementation of good corporate governance within the Company is based on the following regulations:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;
2. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;

3. Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara, serta perubahannya melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No. 09/MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012;

4. Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara.

Perusahaan juga mengadopsi standar penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagai acuan *best practices* dengan mempertimbangkan kebutuhan, lingkungan tempat beroperasi, ukuran dan kompleksitas bisnis, serta sifat risiko dan tantangan yang dihadapi Perusahaan. Standar penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang menjadi acuan Perusahaan antara lain:

1. *Principles of Corporate Governance* oleh *Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG);
3. ASEAN *Corporate Governance Scorecard;*
4. Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

3. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises number PER-01/MBU/2011 dated August 01, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, as well as its amendment through Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. 09/MBU/2012 dated July 06, 2012;
4. Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

The Company also adopts standards for the implementation of good corporate governance as a reference of best practices by considering the needs, the environment in which it operates, size and complexity of the business, as well as the nature of risks and challenges faced by the Company. The standards of good corporate governance implementation that become the Company's reference, among others:

1. Principles of Corporate Governance by the Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) and the Financial Services Authority (OJK);
2. General Guidelines for Indonesian Corporate Governance by the National Committee on Governance Policy (KNKG);
3. ASEAN Corporate Governance Scorecard;
4. Guidelines for the Corporate Governance of Public Companies in the Regulation of the Financial Services Authority (POJK).

Sasaran Strategis dan Upaya Membangun Tata Kelola Berkelanjutan

Strategic Targets and Efforts to Build Sustainable Governance

Penerapan tata kelola berkelanjutan diharapkan mampu mengawal efektivitas program strategis Perusahaan dalam menjawab dan mengoptimalkan tantangan dan isu strategis di tahun 2022. Perusahaan telah menyusun program-program strategis sebagai arah dan koridor program kerja Perusahaan agar dapat mencapai target Perusahaan dengan mengacu pada peta lini bisnis Perusahaan, *Green* RUPTL 2021-2030, Pemenuhan Bauran EBT 23% pada tahun 2025 dan mendukung komitmen Pemerintah menuju karbon netral di tahun 2060, berdasarkan isu stratetgis yang menjadi sasaran strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan *Market Share* dan Kapasitas Pembangkit;
2. Pengembangan Usaha dan Peningkatan *Revenue*;
3. Penyediaan Listrik dengan 3 Prinsip Ketahanan (*Security, Affordability, Low Emission*).

The implementation of sustainable governance is expected to be able to oversee the effectiveness of the Company's strategic programs in answering and optimizing challenges and strategic issues in 2022. The Company has developed strategic programs as the direction and corridor of the Company's work program in order to achieve the Company's targets by referring to the Company's business line map, the 2021-2030 Green Electricity Supply Business Plan (ESBP), Fulfilling the 23% NRE Mix in 2025 and supporting the Government's commitment towards carbon neutral in 2060, based on strategic issues that become strategic targets as follows:

1. Increased Market Share and Power Plant Capacity;
2. Business Development and Increased Revenue;
3. Provision of Electricity with 3 Principles of Resilience (Security, Affordability, Low Emission).

Implementasi GCG merupakan proses berkesinambungan dan dinamis yang terus berkembang seiring dengan munculnya gagasan-gagasan dan *best practices* yang sebaiknya diterapkan korporasi untuk dapat mencapai substansi keluaran yang terkandung dalam prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sehingga praktik GCG dapat mendorong terciptanya nilai yang berkelanjutan. Penerapan praktik GCG tersebut bukan hanya dalam bentuk penyusunan seperangkat aturan internal dan organ pendukung, tetapi secara substansi dapat mendorong kepedulian setiap unsur dalam Perusahaan dan para pemangku kepentingan lainnya terhadap kepentingan terbaik Perusahaan dalam jangka panjang. Perusahaan merancang proses tata kelola yang sejalan dengan nilai-nilai yang ada di Perusahaan dalam rangka memastikan penerapan setiap proses bisnis dilandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

GCG implementation is a continuous and dynamic process that continues to develop along with the emergence of ideas and best practices that should be implemented by corporations to achieve the output substance contained in the principles of good corporate governance. Thus, GCG practices can encourage the creation of sustainable value. The implementation of GCG practices is not only in the form of the preparation of a set of internal rules and supporting organs, however, in substance, can encourage the concern of every element in the Company and other stakeholders for the best interests of the Company in the long term. The Company has designed a governance process that is in line with the values of the Company in order to ensure that the implementation of each business process is based on the principles of good corporate governance.

Proses Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Process

Keterangan:

1. *Develop* GCG
   Pengembangan struktur dalam penerapan GCG, yang meliputi panduan organisasi, pedoman kebijakan dan panduan perilaku. Hasil *output* proses ini adalah CG *Code* dan *Roadmap* GCG sebagai pedoman implementasi GCG di Perusahaan. Kedua output ini akan menjadi referensi dalam penyusunan pedoman kebijakan lainnya atau *soft structure* GCG. Pedoman tersebut dievaluasi secara berkala disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan Perusahaan.
2. *Cascade to all Parties*
   Kegiatan mengkomunikasikan dan mensosialisasikan *soft structure* yang telah ditetapkan kepada seluruh Insan Perusahaan. Hasil dari proses ini adalah ditetapkannya *Board Manual* (Tatalaksana Hubungan Direksi dan Dewan Komisaris), PKB hasil kesepakatan Manajemen dengan Serikat Pekerja, dan *Code of Conduct* sebagai pedoman perilaku seluruh Insan Perusahaan. Pedoman tersebut dievaluasi secara berkala disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan Perusahaan. Selain itu, Seluruh karyawan juga menandatangani komitmen atas kepatuhan terhadap pedoman perilaku setiap tahunnya.
3. *Plan the Implementation*
   Proses mengkoordinasikan sumber daya untuk mencapai tujuan. Hasil dari proses ini adalah ditetapkannya *Charter* (Komite Audit *Charter* & Internal Audit *Charter*), Pedoman Pelaksanaan Audit, Surat Keputusan Direksi, dan penandatanganan Pakta Integritas oleh Direksi.
4. *Execution*
   Tahapan proses dimana kegiatan bisnis yang dilaksanakan Perusahaan memperhatikan prinsip-prinsip GCG.
5. *Monitor & Learn*
   Kegiatan pengukuran pelaksanaan GCG dan tata nilai Perusahaan. Hasil dari proses ini adalah hasil *assessment* GCG, baik yang dilakukan oleh badan independen (pada tahun genap), atau secara *self assessment* (pada tahun ganjil), serta Budaya Perusahaan dan *Workforce Engagement Survey.*
6. *Test & Adapt*
   Pengembangan berkelanjutan atas hasil *assessment* GCG. Perlu dilakukan *continuous improvement* dari penerapan GCG yang telah dilakukan dengan memperbaiki *Area of Improvement* yang ditemukan saat pelaksanaan *assessment*.

Perusahaan berupaya menjalankan proses tata kelola perusahaan secara konsisten dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan sehingga mampu menyandang predikat sebagai *Good Corporate Citizen* serta mampu menyelaraskan dan mewujudkan upaya pencapaian tujuan perusahaan yang terintegrasi dengan aspek keberlanjutan. Perusahaan juga terus meningkatkan penerapan GCG dengan membangun kesadaran dan kepedulian setiap individu di lingkungan Perusahaan untuk menjalankan praktik GCG yang mengutamakan kelangsungan bisnis Perusahaan dalam jangka panjang dan kepentingan *stakeholders*.

Description:

1. Develop GCG
   Development of structure in GCG implementation, which includes organizational guidelines, policy guidelines and behavioral guidelines. The output of this process is the CG Code and GCG Roadmap as guidelines for GCG implementation in the Company. These two outputs will become references in the preparation of other policy guidelines or GCG soft structures. The guidelines are evaluated periodically in accordance with the development of the Company's needs.
2. Cascade to all Parties
   The activity of communicating and socializing the soft structure that has been determined to all Company Personnel. The result of this process is the determination of the Board Manual (Management of Relationship between the Board of Directors and Board of Commissioners), PKB as a result of Management's agreement with the Labor Union, and Code of Conduct as a guideline for the behavior of all Company personnel. These guidelines are evaluated periodically in accordance with the development of the Company's needs. In addition, all employees also sign a commitment to comply with the code of conduct every year.
3. Plan the Implementation
   The process of coordinating resources to achieve objectives. The result of this process is the determination of the Charter (Audit Committee Charter & Internal Audit Charter), Guidelines for Audit Implementation, Decree of the Board of Directors, and the signing of the Integrity Pact by the Board of Directors.
4. Execution
   The stage of process where the business activities carried out by the Company take into account the principles of GCG.
5. Monitor & Learn
   Activities to measure the implementation of GCG and corporate values. The results of this process are the GCG assessment results, either conducted by an independent agency (in even years), or by self-assessment (in odd years), as well as the Corporate Culture and Workforce Engagement Survey.
6. Test & Adapt
   Continuous development of GCG assessment results. It is necessary to carry out continuous improvement of the implementation of GCG that has been carried out by improving the Areas of Improvement found during the assessment.

The Company strives to carry out the corporate governance process consistently and make continuous improvements so as to be able to hold the title of Good Corporate Citizen as well as being able to align and realize efforts to achieve corporate goals that are integrated with sustainability aspects. The Company also continues to improve the implementation of GCG by building awareness and concern of every individual within the Company to carry out GCG practices that prioritize the Company's business continuity in the long term and the interests of stakeholders.

Program kegiatan yang telah dilakukan Perusahaan pada tahun 2022 dalam rangka mendorong pencapaian sasaran strategis GCG Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian Hasil Rekomendasi (*Area of Improvement*) atas *Assessment* GCG Tahun 2021;
2. Pembahasan Program Tindak Lanjut *Area of Improvement* (AOI) *Assessment* GCG Tahun 2021 seluruh Anak Perusahaan PLN pada Aspek Pemegang Saham;
3. Penyusunan Program Tindak Lanjut AOI *Assessment* GCG Tahun 2021;
4. Penyelesaian Program Tindak Lanjut AOI *Assessment* GCG Tahun 2021, termasuk pada Aspek Pemegang Saham dan telah disampaikan kepada DIVPKK PLN;
5. Review GCG *Code* dan *Code of Conduct* serta penyusunan dan *review* kebijakan yang diperlukan;
6. Pelaksanaan Induksi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru dengan materi RJPP, GRC, Teknologi, Pengembangan Bisnis dan materi lainnya;
7. *Review* dan pengesahan Peraturan Direksi Penerapan GCG Tahun 2022;
8. *Review* dan pengesahan Peraturan Direksi tentang Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan;
9. Melakukan *update* Dokumen Daftar Khusus, Pakta Integritas, Hubungan Keluarga dan Keuangan Direksi Dewan Komisaris dan Hubungan Kepengurusan dan Kepemilikan Saham Direksi Dewan Komisaris.
10. Persiapan pelaksanaan *assessment* GCG periode implementasi Tahun 2022;
11. Sosialisasi dan *refreshment* pemahaman terkait *soft structure* GCG kepada seluruh karyawan;
12. Komitmen Integritas atas Sistem Manajemen Anti Penyuapan oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

The activity programs that have been conducted by the Company in 2022 in order to encourage the achievement of the Company's GCG strategic targets are as follows:

1. Submission of Recommendation Results (Areas of Improvement) on the 2021 GCG Assessment;
2. Discussion of the Follow-up Program for the Area of Improvement (AOI) of the 2021 GCG Assessment for all PLN Subsidiaries on the Shareholder Aspect;
3. Preparation of the Follow-up Program for the AOI of the 2021 GCG Assessment;
4. Completion of the 2021 GCG AOI Assessment Follow-Up Program, including the Shareholder Aspect and has been submitted to DIVPKK PLN;
5. Review of GCG Code and Code of Conduct as well as preparation and review of necessary policies;
6. Induction of new Members of the Board of Directors and Board of Commissioners with RJPP, GRC, Technology, Business Development and other materials;
7. Review and ratification of the Regulation of the Board of Directors on the 2022 GCG Implementation;
8. Review and ratification of the Regulation of the Board of Directors on the Limitation of Decision-Making Authority;
9. Updating the Special Register Document, Integrity Pact, Family and Financial Relationships of the Board of Directors of Board of Commissioners as well as Management Relationship and Share Ownership of the Board of Directors and Board of Commissioners.
10. Preparation for GCG assessment implementation period in 2022;
11. Socialization and refreshment of understanding related to GCG soft structure to all employees;
12. Integrity Commitment on the Anti-Bribery Management System by the Board of Directors and Board of Commissioners.

Penanggung Jawab Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Person in Charge of Good Corporate Governance Implementation

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada dasarnya menjadi tanggung jawab seluruh elemen yang ada di lingkungan Perusahaan termasuk Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) baik fisik maupun sirkuler, Dewan Komisaris dan Direksi sebagai organ utama dalam tata kelola Perusahaan maupun karyawan serta *stakeholder* lainnya. Untuk dapat memastikan kualitas penerapannya, Direksi melalui Keputusan Direksi di Luar Rapat tentang Penunjukkan Penanggung Jawab dalam Penerapan dan Pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) tanggal 2 Juli 2013 telah menetapkan secara khusus Direktur SDM dan Administrasi

The implementation of good corporate governance is basically the responsibility of all elements within the Company including Shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS) both physical and circular, the Board of Commissioners and Board of Directors as the main organs in the corporate governance as well as employees and other stakeholders. To ensure the quality of its implementation, the Board of Directors through the Board of Directors' Decision outside the Meeting on Appointment of Person in Charge of Implementation and Monitoring of Good Corporate Governance dated July 2, 2013 has specifically determined the Director of Human Resources and Administration as the person in

sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG. Secara teknis, Direktur SDM dan Administrasi dibantu oleh Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Peraturan Direksi No. 0026.P/019/DIR/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pembangkitan Jawa-Bali dalam memastikan penerapan dan pemantauan GCG di lingkungan PJB.

Tanggung jawab Direktur SDM dan Administrasi terkait penerapan dan pemantauan GCG antara lain:

1. Menyusun rencana kerja yang diperlukan untuk memastikan perusahaan memenuhi Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) di Perusahaan dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
3. Memantau dan menjaga kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan dengan pihak ketiga;
4. Melaporkan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang disampaikan kepada RUPS dan Dewan Komisaris minimal sekali dalam setahun.

Sekretaris Perusahaan menyusun laporan pelaksanaan GCG untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Komisaris dan RUPS melalui Laporan Hasil *Assessment* GCG, Laporan Manajemen dan Laporan Tahunan Perusahaan.

charge of the implementation and monitoring of GCG. Technically, the Director of Human Resources and Administration is assisted by the Corporate Secretary in accordance with the Regulation of the Board of Directors No. 0026.P/019/DIR/2022 concerning Organization and Work Procedures of PT Pembangkitan Jawa-Bali in ensuring the implementation and monitoring of GCG within PJB.

Responsibilities of the Director of HR and Administration related to the implementation and monitoring of GCG include:

1. Developing work plans necessary to ensure that the Company complies with the Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance in the Company and other laws and regulations in order to implement the principles of Good Corporate Governance;
2. Monitoring and maintaining that the Company's business activities do not deviate from applicable provisions;
3. Monitoring and maintaining the Company's compliance with all agreements and commitments made by the Company with third parties;
4. Reporting the implementation of Good Corporate Governance submitted to the GMS and the Board of Commissioners at least once a year.

The Corporate Secretary prepares GCG implementation reports to be submitted to the Board of Commissioners and GMS through the GCG Assessment Report, Management Report and the Company's Annual Report.

Penilaian Implementasi GCG
Assessment of GCG Implementation

Penilaian implementasi GCG dilakukan dalam rangka mengukur kualitas penerapan standar tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan Perusahaan. Penilaian implementasi GCG tahun 2022 dilakukan oleh Pihak Independen dalam hal ini yaitu Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Direktur Utama Nomor ZA0070093 tanggal 6 Februari 2023 perihal Permohonan sebagai Asesor Independen - Dalam Rangka *Assessment* GCG Periode 2022 PT Pembangkitan Jawa-Bali dan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor PE.05.02/S-576/PW13/4.1/2023 tanggal 15 Februari 2023 perihal Asesmen GCG Pada PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB) Periode Tahun 2022. Sedangkan penilaian GCG untuk periode implementasi tahun 2021 dilakukan secara mandiri (*self assessment*) yang

Assessment of GCG implementation is conducted in order to measure the quality of implementation of good corporate governance standards within the Company. The assessment of GCG implementation in 2022 was conducted by an Independent Party, in this case namely the Representative of the East Java Province Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) based on Letter of the President Director Number ZA0070093 dated February 6, 2023 regarding Application as an Independent Assessor - In the Context of GCG Assessment for the 2022 Period of PT Pembangkitan Jawa-Bali and Letter of the Head of BPKP Representative of East Java Province Number PE.05.02/S-576/PW13/4.1/2023 dated February 15, 2023 regarding GCG Assessment at PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB) for the 2022 Period. While the GCG assessment for the 2021 implementation

berita acara validasinya telah ditandatangani pada tanggal 14 Januari 2022. Kriteria yang digunakan dalam penilaian tersebut mengacu pada Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.

Hasil penilaian GCG oleh BPKP untuk periode implementasi tahun 2022 memperoleh klasifikasi "Sangat Baik" dengan capaian skor 95,54. Capaian tersebut menurun dari tahun 2021 (*self assessment*) dengan skor 95,67 dan meningkat dari capaian tahun 2020 yang dilakukan *assessment* oleh BPKP dengan skor 95,06. Pencapaian per aspek pengujian tahun 2022 adalah sebagai berikut:

period is conducted independently (self assessment) whose validation minutes have been signed on January 14, 2022. The criteria used in the assessment refer to the Decision of the Secretary of the Ministry of SOEs Number SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs.

The results of the GCG assessment by BPKP for the 2022 implementation period obtained a "Very Good" classification with a score of 95.54. This achievement decreased from 2021 (self-assessment) with a score of 95.67 and increased from the 2020 achievement which was assessed by BPKP with a score of 95.06. Achievements per testing aspect in 2022 were as follows:

Skor *Assessment* GCG PLN NP Periode 2022
PLN NP GCG Assessment Score for 2022 Period

No.	Aspek Pengujian Assessment Aspects	Bobot Weight	Capaian Tahun 2022 Achievement in 2022		Keterangan Description
			Skor Score	% Capaian Achievement	
1	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	7	6,73	96,20	Sangat Baik Very Good
2	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and GMS/Capital Owners	9	7,83	86,95.	Sangat Baik Very Good
3	Dewan Komisaris Board of Commissioners	35	33,26	95,03	Sangat Baik Very Good
4	Direksi Board of Directors	35	33,90	96,86	Sangat Baik Very Good
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9	8,83	98,06	Sangat Baik Very Good
6	Aspek Lainnya Other Aspects	5	5,00	5,00	Sangat Baik Very Good
Skor Keseluruhan Total Score		**100**		**95,54**	
Kualifikasi Kualitas Penerapan GCG **GCG Quality Qualification**				**Sangat Baik** **Very Good**	

Penilaian penerapan GCG Perusahaan telah dilakukan sejak tahun 2009. Capaian *assessment* GCG yang diperoleh PLN NP selalu dalam kualifikasi "Sangat Baik" (nilai di atas 85) dalam 5 (lima) tahun terakhir, sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut:

Assessment of the Company's GCG implementation has been conducted since 2009. The GCG assessment achievement obtained by PLN NP has always been in the "Very Good" qualification (score above 85) in the last 5 (five) years, as shown in the following chart:

Skor Penilaian GCG Tahun 2018 - 2022
GCG Assessment Score in 2018 - 2022

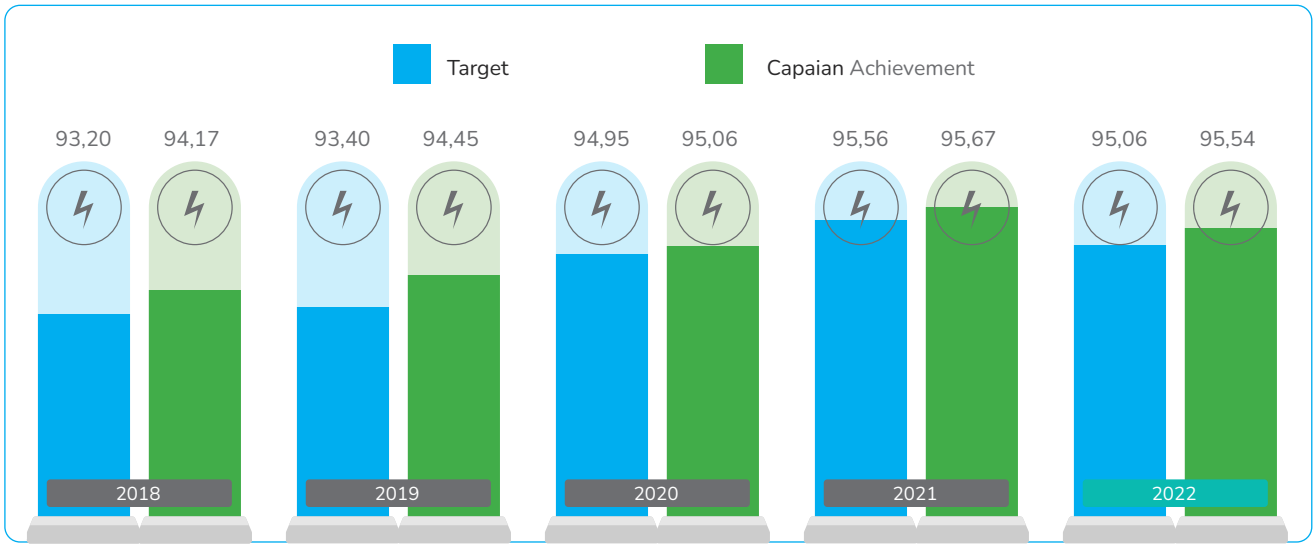

Penilaian penerapan GCG tahun 2022 menghasilkan beberapa *Area of Improvement* (AoI) berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan kualitas penerapan GCG di tahun selanjutnya. Rekomendasi penilaian penerapan GCG tahun 2022 adalah sebagai berikut:

The assessment of GCG implementation in 2022 resulted in several Areas of Improvement (AoI) in the form of recommendations to be followed-up in order to improve the quality of GCG implementation in the following year. Recommendations for the assessment of GCG implementation in 2022 are as follows:

Rekomendasi Hasil *Assessment* GCG Perusahaan Periode 2022
Recommendations on the Company's GCG Assessment Results for the 2022 Period

Aspek Aspect	Rekomendasi Recommendation	
Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan **Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance**	1. Pedoman tata kelola belum dimutakhirkan karena mengikuti *timeline* yang ditetapkan PLN. 2. Pemutakhiran Pedoman Perilaku masih dalam bentuk draft. 3. Rekomendasi AoI *Assessment* GCG tahun 2020 sebagian selesai dan sebagian masih dalam proses penyelesaian.	1. Governance guidelines have not been updated due to following the timeline set by PLN. 2. The update of the Code of Conduct is still in draft form. 3. GCG AoI Assessment recommendations in 2020 are partly completed and partly still in the settlement process.
Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal **Shareholders and GMS/ Capital Owners**	1. Pelantikan Direksi belum didukung dengan Berita Acara Pelantikan. 2. Tidak ada ketetapan Pemegang Saham/RUPS mengenai jumlah jabatan Direksi yang dapat dirangkap, bila tidak terjadi konflik kepentingan. 3. Penetapan pengangkatan/pelantikan Dewan Komisaris belum didukung berita acara pelantikan hanya didukung dengan Berita Acara serah terima jabatan. 4. Anggota Komisaris Independen tidak dinyatakan secara eksplisit dalam SK pengangkatan sebanyak 20% dari jumlah seluruh Komisaris. 5. Belum ada aturan yang secara eksplisit menetapkan jumlah maksimal jabatan sebagai Komisaris yang dapat dipegang seorang anggota Komisaris. 6. Pengajuan RJPP kepada Pemegang Saham tanggal 16 November 2020, sedangkan pengesahan oleh Pemegang Saham tanggal 9 November 2021 sehingga melebihi waktu 60 hari dari pengajuan oleh Direksi.	1. The inauguration of the Board of Directors has not been supported by the Minutes of Inauguration. 2. There is no Shareholder/GMS provision regarding the number of Board of Directors positions that can be held concurrently, if there is no conflict of interest. 3. The appointment/inauguration of the Board of Commissioners has not been supported by the Minutes of Inauguration, only supported by the Minutes of Handover of Position. 4. Members of the Independent Commissioners are not explicitly stated in the appointment decree as 20% of the total number of Commissioners. 5. There is no regulation that explicitly stipulates the maximum number of Commissioner positions that can be held by a member of the Commissioners. 6. Submission of the RJPP to the Shareholders on November 16, 2020, while the ratification by the Shareholders on November 9, 2021, thus exceeding 60 days from the submission by the Board of Directors.

Aspek Aspect	Rekomendasi Recommendation	
	7. Belum seluruhnya aksi korporasi dilakukan pemaparan terlebih dahulu oleh Direksi. 8. Aksi korporasi terkait Penghapusbukuan ATTB dengan nilai ekonomis diatas 5 tahun yang telah mendapat tanggapan dari Dewan Komisaris sesuai surat nomor DK 007552 tanggal 4 Februari 2022 yg telah diusulkan oleh Direksi, tetapi belum mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham. 9. Belum seluruhnya persetujuan aksi korporasi diberikan tepat waktu sesuai ketentuan yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari. 10. Belum ada pedoman/sistem Penilaian Kinerja Dewan Komisaris yang memuat sekurang-kurangnya indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan. 11. Realisasi progres pelaksanaan tindak lanjut untuk aspek Pemegang Saham belum seluruhnya ditindaklanjuti	7. Corporate actions have not been fully explained in advance by the Board of Directors. 8. Corporate action related to the write-off of ATTB with an economic value of more than 5 years which has received a response from the Board of Commissioners in accordance with letter number DK 007552 dated February 4, 2022 which has been proposed by the Board of Directors, but has not yet received approval from the Shareholders. 9. Corporate action approvals have not been fully granted on time in accordance with the provisions, which is no later than 30 (thirty) days. 10. There is no guideline/system for Performance Assessment of the Board of Commissioners that contains at least key performance indicators and success criteria. 11. The realization of progress on the implementation of follow-up for the Shareholders aspect has not been fully followed-up.
Dewan Komisaris **Board of Commissioners**	1. Dewan Komisaris telah melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Dewan Komisaris, tetapi pelaksanaannya belum sesuai dengan yang direncanakan. 2. Penyampaian RKA Dewan Komisaris kepada Direksi untuk dimasukkan sebagai bagian dari RKAP belum tepat waktu. 3. Dewan Komisaris belum mencantumkan rencana pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa dalam RKA Dewan Komisaris tahun 2022. 4. Dewan Komisaris belum memiliki kebijakan pengawasan kepatuhan perusahaan terhadap perjanjian dan komitmen yang dibuat dengan pihak ketiga. 5. Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap transaksi atau tindakan Direksi melalui proses pembahasan dari rapat internal Dewan Komisaris dan rapat pengawasan Direksi. Namun, terhadap usulan penempatan wakil PT PJB pada Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi PT PJB belum didapatkan dokumen pembahasan dan penilaian. 6. Belum seluruhnya pemberian otorisasi atau rekomendasi setelah diterimanya dokumen secara lengkap dan penjelasan tertulis secara resmi dari Direksi dilakukan tepat waktu. 7. Dewan Komisaris melalui surat nomor DK014550 tanggal 19 Mei 2022, telah mengusulkan nama KAP yang akan mengaudit laporan keuangan PT PJB beserta alasan pencalonan tersebut, tetapi belum mencantumkan besarnya honoraium KAP tersebut (bersifat kualitatif). 8. Dewan Komisaris belum melakukan telaah terhadap laporan GCG yang diungkapkan dalam laporan tahunan. 9. Dewan Komisaris belum memiliki kebijakan mengenai pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris. 10. BOC Manual terhadap tata tertib Rapat Dewan Komisaris belum memuat: a. Pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya; b. Pembahasan/telaah atas usulan Direksi dan arahan/keputusan RUPS terkait dengan usulan Direksi. 11. Belum seluruhnya dalam risalah rapat mencantumkan alasan Dewan Komisaris yang berhalangan hadir.	1. The Board of Commissioners has implemented a training program in order to improve the competence of members of the Board of Commissioners, however, the implementation has not been as planned. 2. Submission of the Board of Commissioners' Work Program and Budget (WPB) to the Board of Directors to be included as part of the ABOP has not been timely. 3. The Board of Commissioners has not included a plan to supervise the procurement of goods and services in the 2022 WPB of the Board of Commissioners. 4. The Board of Commissioners does not yet have a policy for monitoring the Company's compliance with agreements and commitments made with third parties. 5. The Board of Commissioners reviews the transactions or actions of the Board of Directors through the discussion process of the Board of Commissioners internal meeting and the Board of Directors supervision meeting. However, the proposed placement of PT PJB's representative in its Subsidiaries and Affiliated Companies has not yet been reviewed and assessed. 6. The granting of authorization or recommendation after the receipt of complete documents and official written explanation from the Board of Directors has not been conducted in a timely manner. 7. The Board of Commissioners through letter number DK014550 dated May 19, 2022, has proposed the name of PAF that will audit the financial statements of PT PJB along with the reasons for the nomination, but has not included the amount of honorarium for the PAF (qualitative). 8. The Board of Commissioners has not reviewed the GCG report disclosed in the annual report. 9. The Board of Commissioners does not yet have a policy on measuring and assessing the performance of the Board of Commissioners. 10. The BOC Manual on the rules of the Board of Commissioners Meeting does not yet contain: a. Implementation of follow-up evaluation on the results of the previous meeting; b. Discussion/review of the proposal of the Board of Directors and the direction/resolution of the GMS related to the proposal of the Board of Directors. 11. The minutes of the meeting do not fully state the reasons for the absence of the Board of Commissioners.

Aspek Aspect	Rekomendasi Recommendation	
Direksi **Board of Directors**	1. SOP pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya dilaksanakan secara efektif karena masih dijumpai adanya temuan audit. 2. Direksi menyampaikan rancangan RKAP kepada Dewan Komisaris sesuai Surat ZA0002521 tanggal 24 Januari 2022 tentang Penyampaian Usulan RKAP Tahun 2022, seharusnya rancangan tersebut disampaikan sebelum tanggal 15 September 2021. 3. Nilai total HPS bervariasi, bisa bersifat rahasia/tertutup maupun terbuka tergantung jenis pengadaan barang/ jasa yang dilakukan, namun sebagian besar HPS tertutup 4. Terdapat temuan audit internal atas pengadaan barang dan jasa sebanyak 16 dari 28 unit yang diperiksa. 5. Pedoman tentang gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas penghasilan Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Afiliasi masih berupa *draft*. 6. Perusahaan mampu memenuhi harapan Pemegang Saham melalui pencapain target yang telah disepakati. Namun: a. pertumbuhan modal bersih perusahaan (*growth in the networth*) selama 3 (tiga) tahun terakhir belum konsisten; b. dividen selama 3 tahun terakhir terjadi secara fluktuasi; 7. Tren EPS untuk kurun waktu 3 tahun terakhir belum konsisten.	1. The SOP for the procurement of goods and services has not been fully implemented effectively due to audit findings. 2. The Board of Directors submits the ABOP draft to the Board of Commissioners in accordance with Letter ZA0002521 dated January 24, 2022 concerning Submission of the 2022 ABOP Proposal, the draft should have been submitted before September 15, 2021. 3. The total value of HPS varies, it can be confidential/ closed or open depending on the type of goods/services procurement conducted, however, most of the HPS are closed. 4. There are internal audit findings on the procurement of goods and services of 16 out of 28 units examined. 5. Guidelines on salaries/honorariums, allowances and income facilities for the Board of Directors and Commissioners of Subsidiaries/Affiliated Companies are still in draft form. 6. The Company is able to meet the expectations of Shareholders through the achievement of agreed targets. However: a. the growth in the networth of the Company over the last 3 (three) years has not been consistent; b. dividends over the last 3 years have fluctuated; 7. The EPS trend for the last 3 years has not been consistent
Pengungkapan Informasi dan Transparansi **Information Disclosure and Transparency**	1. Terkait publikasi pada *website* PT PJB atas kebijakan/ pedoman penerapan tata kelola Perusahaan. Terdapat dokumen seperti *Board Manual* (yang diunggah hanya lembar pengesahan saja), Internal Audit *Charter* (2017-tidak dilakukan *update*), Kebijakan LK3 (2014 – tidak dilakukan *update*). 2. Terkait informasi dalam *website* telah di *update* sesuai perkembangan. Terdapat beberapa informasi yang tidak dilakukan *update* seperti pada Laporan Penyampaian LHKPN hanya sampai tahun 2020, ringkasan risalah RUPS hanya sampai tahun 2018, piagam audit internal yang diunggah masih tahun 2017, ikhtisar data keuangan masih sampai dengan tahun 2020. 3. Dalam *Annual Report* 2021 terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai komitmen perusahaan terhadap perlindungan konsumen. Tidak terdapat informasi terkait biaya yang telah dikeluarkan, hanya ada anggaran saja tanpa ada realisasi.	1. Related to the publication on PT PJB website of policies/guidelines for the implementation of corporate governance. There are documents such as Board Manual (uploaded only ratification sheet), Internal Audit Charter (2017 - no update), LK3 Policy (2014 - no update). 2. Related information on the website has been updated according to developments. There are several information that is not updated, such as the State Administration Wealth Report (LHKPN) Submission Report only until 2020, the summary of the GMS minutes only until 2018, the uploaded internal audit charter is still 2017, the financial data highlights are still up to 2020. 3. In the 2021 Annual Report related to corporate social responsibility, especially regarding the Company's commitment to consumer protection. There is no information regarding the costs that have been incurred, there is only a budget without realization.
Aspek Lainnya **Other Aspects**	-	-

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Penilaian GCG

Follow-up on Recommendations of GCG Assessment Results

Perusahaan telah melakukan perbaikan dan *monitoring* atas pelaksanaan tindak lanjut atas *Area of Improvement* (AoI) hasil penilaian tahun 2021 yang dilaksanakan di tahun 2022. Tindak lanjut rekomendasi atas hasil penilaian tahun 2021 sebagai berikut:

The Company has improved and monitored the implementation of follow-up on the Area of Improvement (AoI) assessment results in 2021 which will be carried out in 2022. Follow-up recommendations on the results of the 2021 assessment are as follows:

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil *Assessment* GCG PLN NP Periode 2021

Follow-up on Recommendations of PLN NP GCG Assessment Results for 2021 Period

No.	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut Follow-Up
ASPEK 2: PEMEGANG SAHAM DAN RUPS/PEMILIK MODAL: **Proses tindak lanjut atas hal ini sedang dalam tahap pembahasan di Pemegang Saham** **ASPECT 2: SHAREHOLDERS AND GMS/CAPITAL OWNERS:** **The follow-up process on this matter is currently under discussion with the Shareholders**		
1	Pengangkatan/pelantikan anggota Dewan Komisaris baru didukung dengan berita acara pengangkatan/pelantikan. The appointment/inauguration of new members of the Board of Commissioners is supported by minutes of the appointment/ inauguration.	Penyusunan BA serah terima jabatan dan penyampaian ke Anak Perusahaan Preparation of BA for handover and submission to Subsidiaries
2	Membuat aturan yang secara eksplisit menetapkan jumlah maksimal jabatan sebagai Komisaris yang dapat dipegang oleh seorang anggota Komisaris. Making rules that explicitly stipulate the maximum number of positions as Commissioner that can be held by a Commissioner member.	Penyusunan aturan yang secara eksplisit menetapkan jumlah maksimal jabatan sebagai Komisaris yang dapat dipegang oleh seorang anggota Komisaris dalam subsidiary governance. Drafting of rules that explicitly stipulate the maximum number of positions as Commissioner that can be held by a Commissioner member in subsidiary governance.
3	Mengesahkan RKAP Perusahaan pada akhir tahun sebelum tahun anggaran berjalan. Ratifying the Company's ABOP at the end of the year prior to the current fiscal year.	Alignment ke proses penyusunan RKAP di PLN sebagai induk perusahaan, dan ke peraturan KBUMN. Alignment to the ABOP preparation process in PLN as the parent company, and to the regulation of the Ministry of State-owned Enterprises (KBUMN).
4	Memberikan persetujuan terhadap setiap usulan Direksi tepat waktu yaitu tidak melebihi 30 hari sejak tanggal pengusulan dari Direksi. Approving each proposal of the Board of Directors in a timely manner, namely not exceeding 30 days from the date of the proposal from the Board of Directors.	Persetujuan yang memerlukan RUPS. Approval that requires the GMS.
5	Menetapkan pedoman/sistem penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris yang memuat indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan baik secara individual maupun secara kolegial. Determining the guidelines/system for performance assessment of the Board of Directors and Board of Commissioners that contain key performance indicators and success criteria both individually and collegially.	1. *Benchmarking* penyusunan KPI di AP lainnya (GDE) 2. Penetapan KPI komisaris 1. Benchmarking of KPI preparation in other APs (GDE) 2. Determination of KPIs for commissioners
6	Menetapkan pedoman gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas, tantiem/insentif kinerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang disahkan RUPS yang memuat formula penghitungan tantiem dengan mempertimbangkan pencapaian target, tingkat kesehatan dan faktor-faktor merit lainnya. Determining guidelines for salary/honorarium, allowances, facilities, tantiem/performance incentives for the Board of Directors and Board of Commissioners ratified by the GMS which contains a tantiem calculation formula by considering target achievement, soundness and other merit factors.	Menyusun pedoman gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas, tantiem/insentif kinerja bagi direksi dan dewan komisaris dengan merefer pada Kepdir PLN. Preparing guidelines for salaries/honorarium, allowances, facilities, tantiem/performance incentives for the Board of Directors and Board of Commissioners by referring to the Decision of PLN's Board of Directors.

No.	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut Follow-Up
7	Menetapkan Pedoman Penunjukkan Auditor Eksternal yang ditetapkan oleh RUPS. Determining the Guidelines for the Appointment of External Auditors stipulated by the GMS.	Penyampaian surat mekanisme penunjukan auditor eksternal. Submission of the external auditor appointment mechanism letter.
8	Meminta usulan imbal jasa/honorarium KAP dari Dewan Komisaris Perusahaan dan membahasnya sebelum ditetapkan dalam RUPS. Requesting the proposal of PAF fee/honorarium from the Board of Commissioners of the Company and discussing it before it is determined in the GMS.	Informasi kepada seluruh AP terkait nilai honorarium KAP. Information to all PAs regarding the value of PAF honorarium.
9	Menetapkan pedoman penyusunan laporan tahunan (*annual report*) dan laporan tentang tugas Pengawasan Dewan komisaris. Determining the guidelines for the preparation of the annual report and the report on the Supervisory duties of the Board of Commissioners.	Penyusunan pedoman dalam *subsidiary governance*. Preparation of guidelines in subsidiary governance.
10	Menetapkan pedoman tentang dividen. Determining guidelines on dividends.	Penyusunan pedoman dalam *subsidiary governance*. Preparation of guidelines in subsidiary governance.
ASPEK 3: DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS **ASPECT 3: BOARD OF COMMISSIONERS/SUPERVISORY BOARD**		
1	Dalam mengusulkan KAP yang akan mengaudit laporan keuangan Perusahaan disertai dengan usulan besaran honorarium/imbal jasa KAP tersebut. In proposing a PAF that will audit the Company's financial statements accompanied by a proposal for the amount of honorarium/service fee of the PAF.	Pemberian usulan besaran honorarium/imbal jasa KAP dalam pengusulan KAP. Providing proposals for the amount of honorarium/service fees for PAF in proposing the PAF.
ASPEK 4: DIREKSI **ASPECT 4: BOARD OF DIRECTORS**		
1	Mengisi jabatan yang kosong pada level jabatan tertentu dalam struktur organisasi Perusahaan sesuai dengan kebutuhan. Filling vacant positions at certain position levels in the Company's organizational structure as needed.	Direksi telah menugaskan karyawan pada setiap jenjang jabatan dalam organisasi perusahaan dengan penerbitan Surat Keputusan Direksi. Pengisian jabatan level struktural dimonitoring melalui aplikasi talent management. Pada aplikasi tersebut dapat terlihat jabatan yang masih kosong dan dapat dilakukan pemilihan/seleksi calon kandidat melalui aplikasi tersebut. Implementasi pengisian jabatan struktural sudah diproses sebelum terjadi kekosongan jabatan dengan menyiapkan kandidat dalam satu rangkaian rotasi/mutasi sehingga tidak ada jabatan yang kosong. Jika tidak memungkinkan dalam satu rangkaian mutasi karena beberapa kondisi, pengisian jabatan struktural tersebut dilakukan segera setelah kekosongan Jabatan. Kekosongan beberapa jabatan struktural di tahun 2022 disebabkan terdapat transisi perubahan organisasi dalam rangka persiapan *Holding* dan *Subholding* (HSH) PLN Group sebagai bagian dari arahan Menteri BUMN. The Board of Directors has assigned employees to each level of position in the Company's organization by issuing a Decree of the Board of Directors. The filling of structural level positions is monitored through the talent management application. The application shows positions that are still vacant and the selection of candidates can be conducted through the application. The implementation of filling structural positions has been processed before a vacancy occurs by preparing candidates in a series of rotations/mutations so that there are no vacant positions. If it is not possible in a series of mutations due to several conditions, the filling of structural positions is carried out immediately after the vacancy. The vacancy of several structural positions in 2022 was due to the transition of organizational changes in the context of preparing the PLN Group Holding and Subholding (HSH) as part of the direction of the Minister of SOEs.
2	Melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan nilai total HPS bersifat terbuka. Carrying out the procurement of goods/services with a total value of HPS is open.	Berdasarkan *appetite* Direksi dan sesuai pedoman pengadaan PT PJB, HPS tidak wajib diumumkan. Based on the appetite of the Board of Directors and in accordance with PT PJB procurement guidelines, HPS is not required to be announced.

No.	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut Follow-Up
3	Terkait dengan pengelolaan anak perusahaan (*subsidiary governance*): a. Membuat pedoman tentang penilaian kinerja direksi (individu/kolegial) dan komisaris (kolegial) anak perusahaan/ perusahaan afiliasi yang ditetapkan oleh RUPS. b. Membuat pedoman tentang gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas penghasilan direksi dan komisaris anak perusahaan/ perusahaan afiliasi yang ditetapkan oleh RUPS. Related to subsidiary governance: a. Preparing guidelines on performance assessment of the Board of Directors (individual/collegial) and Commissioners (collegial) of subsidiaries/affiliated companies as stipulated by the GMS. b. Preparing guidelines on the salary/honorarium, allowances and income facilities of the Board of Directors and Commissioners of subsidiaries/affiliated companies as stipulated by the GMS.	a. Proses penyusunan pedoman penilaian kinerja Direksi (individu/kolegial) dan Komisaris (kolegial) Anak Perusahaan/Perusahaan Afiliasi; b. Proses penyusunan pedoman gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas penghasilan Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Afiliasi. a. The process of preparing guidelines for the performance assessment of the Board of Directors (individual/collegial) and Commissioners (collegial) of Subsidiaries/Affiliated Companies; b. The process of preparing guidelines for the salary/honorarium, allowances and income facilities of the Board of Directors and Commissioners of Subsidiaries/Affiliated Companies.
4	Mengupayakan untuk memenuhi harapan pemegang saham melalui pencapaian target-target yang telah disepakati, dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Striving to meet shareholders' expectations through the achievement of agreed targets, by using the available resources.	*Shareholder expectation* telah disusun dalam Kontrak Kinerja Direksi/Unit/ Divisi/AP melalui mekanisme *cascading*. Melakukan *monitoring* pencapaian kontrak kinerja tersebut. Shareholder expectations have been compiled in the Performance Contracts of the Board of Directors/Units/Divisions/AP through a cascading mechanism. Monitoring the achievement of the performance contract.

Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

Implementation of the Corporate Governance Guidelines

Perusahaan mengadopsi standar penerapan tata kelola perusahaan yang baik salah satunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang dijabarkan lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka sebagai acuan *best practices* dalam rangka mendorong kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, Perusahaan juga mengacu pada Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi tahun 2021. Prinsip dan rekomendasi berdasarkan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia yang telah dijalankan Perusahaan adalah sebagai berikut :

The Company adopts good corporate governance implementation standards, one of which is the Regulation of the Financial Services Authority (POJK) Number 21/POJK.04/2015 concerning the Implementation of Guidelines for Public Company Governance which is further elaborated in the Circular Letter of the Financial Services Authority (SEOJK) No.32/SEOJK.04/2015 dated November 17, 2015 concerning Guidelines for Public Company Governance as a reference for best practices in order to encourage the quality of good corporate governance implementation. In addition, the Company also refers to the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance issued by the National Committee on Governance Policy in 2021. The principles and recommendations based on the General Guidelines of Indonesian Corporate Governance that have been implemented by the Company are as follows:

Penerapan Prinsip dan Rekomendasi Pedoman Governansi Perusahaan

Implementation of Principles and Recommendations of Guidelines for Corporate Governance

Prinsip 1. Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Principle 1. Roles and Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners		
	Rekomendasi Recommendation	**Pemenuhan** Fulfillment
1.1.	**Peran dan Tanggung Jawab Direksi** **Roles and Responsibilities of the Board of Directors**	
1.1.1.	Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi sebagai berikut: a. berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang; b. beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis; c. berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan; serta d. berkemampuan dalam bertahan dan bertumbuh (*corporate resilience*). To achieve sustainable value creation, the Board of Directors carries out its leadership role and strives to achieve the following governance outcomes: a. competitive and focused on long-term performance; b. ethical and responsible in carrying out business; c. contribute positively to society and the environment; and d. have the ability to survive and grow (corporate resilience).	Direksi telah menyusun RJPP sebagai *grand design* dan tujuan jangka panjang Perusahaan. The Board of Directors has prepared the RJPP as the grand design and long-term goal of the Company.
1.1.2.	Direksi harus memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencanatahunan dan jangka menengah korporasi konsisten dengan tujuan jangka panjang, dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif. The Board of Directors must ensure that the corporation's mission, vision, goals, targets, strategies, and annual and medium-term plans are consistent with long-term goals, by effectively utilizing innovation and technology	Direksi telah menyusun pedoman perilaku yang berisi mengenai etika dalam menjalankan bisnis Direksi telah menyusun struktur organisasi serta seluruh peraturan dan pedoman atau SOP yang mengatur seluruh kepengurusan Perusahaan. The Board of Directors has prepared a code of conduct that contains ethics in carrying out business.
1.1.3.	Direksi memastikan bahwa korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. The Board of Directors ensures that the corporation implements appropriate and effective risk management and internal control systems that are aligned with the corporation's vision, mission, goals, targets and strategies as well as complying with applicable laws and standards.	Direksi telah melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung keberlanjutan operasi perusahaan. Perusahaan memiliki kebijakan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan. The Board of Directors has implemented corporate social responsibility to support the sustainability of the Company's operations. The Company has a policy on corporate social and environmental responsibility.
1.1.4.	Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai korporasi. The Board of Directors ensures the integrity of the corporation's accounting and financial reporting systems and the timely and accurate disclosure of all material information concerning the corporation.	Direksi telah mengidentifikasi value creation mapping sebagai perusahaan pembangkit. Sebagai kemampuan *agility* menghadapi tantangan dan *corporate resilience,* perusahaan telah menyusun program pengembangan pembangkit dan *beyond* kWh. The Board of Directors has identified value creation mapping as a power plant company. As an agility to face challenges and corporate resilience, the Company has developed a power plant development program and beyond kWh.
1.1.5.	Direksi memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya. The Board of Directors ensures that sustainability reporting has been properly prepared.	Direksi telah menyusun visi misi, sasaran, strategi, rencana jangka panjang (RJPP) dan rencana tahunan (RKAP). The Board of Directors has prepared a vision and mission, targets, strategies, long-term plans (RJPP) and annual plans (ABOP).
1.1.6.	Direksi membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) korporasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi korporasi. The Board of Directors establishes a framework for corporate information technology (IT) governance that is aligned with the corporation's business needs and priorities, encourages business opportunities and performance, strengthens risk management, and supports corporate goals and strategies.	Direksi menetapkan aturan dan pedoman penerapan manajemen risiko di Perusahaan melalui Peraturan Direksi terkait Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi. The Board of Directors determines the rules and guidelines for the implementation of risk management in the Company through the Board of Directors Regulation related to the Implementation of Integrated Risk Management.

	Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment
1.1.7.	Bagi korporasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, Direksi perlu memastikan kewenangan dan ketersediaan perangkat pendukung yang memadai agar Dewan Pengawas Syariah dapat menjalankan perannya dengan efektif. For corporations carrying out business activities based on Sharia principles, the Board of Directors needs to ensure adequate authority and availability of supporting tools so that the Sharia Supervisory Board can carry out its role effectively.	Direksi telah memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai korporasi. The Board of Directors has ensured the integrity of the corporation's accounting and financial reporting systems and the timely and accurate disclosure of all material information regarding the corporation.
1.1.8.	Piagam Direksi secara periodik ditinjau. Piagam mencakup antara lain pembagian peran Direktur secara individual dapat diatur di Piagam Direksi atau dengan surat keputusan Direksi. The Board of Directors Charter is periodically reviewed. The Charter includes, among others, the division of roles of individual Directors can be regulated in the Board of Directors Charter or by a decree of the Board of Directors.	Direksi telah menyusun *sustainability report*. The Board of Directors has prepared a sustainability report.
1.1.9.	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. The Board of Directors has a policy related to the resignation of members of the Board of Directors if involved in financial crimes and proven wrongdoing.	PT PLN NP memiliki dokumen Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) yang menjadi arahan/pedoman pengembangan aspek teknologi informasi Perusahaan dan digunakan sebagai acuan rutin tahunan, serta telah memiliki arsitektur sistem informasi. Penerapan/pengembangan TI di perusahaan sesuai dengan *master plan*, dimana sesuai dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi korporasi. PT PLN NP has an Information Technology Strategic Plan (RSTI) document that becomes the direction/guidance for the development of the Company's information technology aspects and is used as an annual routine reference, and has the information system architecture. IT implementation/development in the Company is in accordance with the master plan, which is in line with corporate business needs and priorities, encourages business opportunities and performance, strengthens risk management, as well as supports corporate goals and strategies.
1.2.	**Penilaian Kinerja - Direksi dan Anggotanya** **Performance Assessment - Board of Directors and its Members**	
1.2.1.	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu direktur. The Board of Commissioners conducts an annual formal evaluation objectively and independently to determine the effectiveness of the Board of Directors and each individual director.	Dewan Komisaris membuat Laporan Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris dan Laporan Penilaian Kinerja Individu Direksi setiap triwulan dan tahunan. The Board of Commissioners drafts the Board of Commissioners Annual Supervisory Report and the Board of Directors Individual Performance Assessment Report quarterly and annually.
1.2.2.	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi, bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya. The Board of Commissioners, with consideration from the Nomination and Remuneration Committee, is responsible for determining the performance evaluation criteria and assessing the performance of the President Director and other members of the Board of Directors.	Dewan Komisaris membuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Penilaian atas Kinerja Individu Direksi setiap Triwulan dan Tahunan. The Board of Commissioners drafts the Board of Commissioners Monitoring Report and Assessment Report on the Individual Performance of the Board of Directors Quarterly and Annually.
1.3.	**Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris** **Roles and Responsibilities of the Board of Commissioners**	
1.3.1.	Dewan Komisaris mereviu strategi korporasi paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi korporasi yang dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga mereviu, memberikan saran dan menyetujui rencana bisnis dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek korporasi. Dewan Komisaris memberikan advis dan melakukan pemantauan kepada Direksi atas pengelolaan implementasinya. Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi korporasi, diatur dalam anggaran dasar korporasi. The Board of Commissioners reviews the corporate strategy at least annually and approves the corporate mission, vision and strategy formulated by the Board of Directors. The Board of Commissioners also reviews, advises and approves the business plan as well as the long-term and short-term financial plans of the corporation. The Board of Commissioners advises and monitors the Board of Directors on the management of its implementation. The Board of Directors and Board of Commissioners are involved in decisions that are very important to the corporation, regulated in the corporation's articles of association.	1. Dewan Komisaris membuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Penilaian atas Kinerja Individu Direksi setiap Triwulan. 2. Dewan Komsiaris menyelenggarakan Rapat Pengawasan Dewan Komsiaris dan Dewan Direksi setiap bulan. 3. Dewan Komisaris memberikan tanggapan tertulis atas rancangan RKAP yang diajukan oleh Direksi untuk dimintakan persetujuannya kepada RUPS. 1. The Board of Commissioners drafts the Board of Commissioners Monitoring Report and an Assessment Report on the Individual Performance of the Board of Directors quarterly. 2. The Board of Commissioners holds monthly Board of Commissioners and Board of Directors Supervisory Meeting. 3. The Board of Commissioners provides a written response to the RKAP draft submitted by the Board of Directors for approval at the GMS.

	Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment
1.3.2.	Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris harus diungkapkan dalam laporan tahunan. The types of decisions that require the approval of the Board of Commissioners must be disclosed in the annual report.	Persetujuan Dewan Komisaris dituangkan dalam Annual Report pada bagian Dewan Komisaris. The Board of Commissioners' approval is set out in the Annual Report in the Board of Commissioners section.
1.3.3.	Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris mengusulkan kepada, dan untuk diputuskan oleh, RUPS pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam mengusulkan hal di atas, Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, unsur nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan jender. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah formal dan transparan. By taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee, the Board of Commissioners proposes to, and to be decided by, the GMS on the appointment and/or dismissal of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. In proposing the matters above, the Board of Commissioners pays attention to diversity, nondiscriminatory elements and provides equal opportunities without distinguishing ethnicity, religion, race, intergroup and gender. The Board of Commissioners ensures that the nomination and election process for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners is formal and transparent.	Dewan Komsiaris melakukan evaluasi dan memberikan tanggapan atas usulan anggota Direksi dan Dewan Komsiaris. The Board of Commissioners evaluates and provides responses to the suggestions from members of the Board of Directors and Board of Commissioners.
1.3.4.	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. Setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direktur Utama. The Board of Commissioners or the Committee that carries out the nomination function prepares a succession policy in the nomination process for members of the Board of Directors. Each year, the Board of Commissioners reviews the report on the implementation of the development and succession plan submitted by the President Director.	1. Kebijakan Suksesi Direksi sebagai bagian dari penerapan fungsi nominasi di tingkat manajerial tertinggi PLN Nusantara Power, mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor Menteri BUMN Nomor PER- 04/MBU/06/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara. 2. Proses suksesi Direksi sepenuhnya menjadi wewenang PT PLN (Persero) selaku *Holding*. 1. The Board of Directors Succession Policy as part of implementing the nomination function at the highest managerial level of PLN Nusantara Power, refers to the Minister of SOE Regulation No. PER-04/MBU/06/2020 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of SOE No. PER- 03/MBU/2012 concerning Guidelines for the Appointment of Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the State-Owned Enterprises Subsidiaries. 2. The succession process for the Board of Directors is fully under the authority of PT PLN (Persero) as Holding.
1.3.5.	Dewan Komisaris a). mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite yang menjalankan fungsi remunerasi, besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang korporasi dan pemegang saham; b). secara berkala mereviu sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. The Board of Commissioners a). proposes to the GMS, which may be preceded by a proposal from the Committee carrying out the remuneration function, the amount of remuneration for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners that is in line with the sustainable development of the corporation and the long-term interests of the corporation and shareholders; b). periodically reviews the remuneration system of the Board of Directors and Board of Commissioners.	1. Dewan komisaris melakukan evaluasi terhadap usulan remunerasi yang disampaikan oleh Direksi dengan menugaskan Komite Nominasi & Remunerasi. 2. Dewan Komsiaris melakukan review dan evaluasi terhadap remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris dalam Rapat Internal Dewan Komisaris setelah mendapatkan masukan dari Komite Nominasi & Remunerasi. 1. The Board of Commissioners evaluates the remuneration proposal submitted by the Board of Directors by assigning the Nomination & Remuneration Committee. 2. The Board of Commissioners reviews and evaluates the remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners at the Board of Commissioners' Internal Meeting after receiving input from the Nomination & Remuneration Committee.
1.3.6.	Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan governansi korporat dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan. The Board of Commissioners oversees the effectiveness of corporate governance policies and their implementation as well as proposes changes if necessary.	Dewan Komisaris membuat Laporan Pengawasan Triwulanan yang salah satunya berisi review kebijakan yang dilakukan Manajemen. The Board of Commissioners drafts Quarterly Supervision Reports, one of which contains policy reviews by the Management.

	Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment
1.3.7.	Dewan Komisaris memantau dan mengarahkan agar korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan, kode perilaku dan standar yang berlaku. The Board of Commissioners monitors and directs that the corporation implements appropriate and effective risk management and internal control systems that are aligned with the goals, targets and strategies of the corporation as well as complies with applicable laws and regulations, codes of conduct and standards.	1. Dewan Komisaris membuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris setiap Triwulan dan Laporan Tahunan 2. Dewan Komsiaris menyelenggarakan Rapat Pengawasan Dewan Komsiaris dan Dewan Direksi dengan salah satu topik terkait *review* dan evaluasi manajemen risiko. 3. Dewan Komisaris melalui Komite Investasi dan manajemen Risiko melakukan *review* dan evaluasi terhadap laporan menajemen risiko setiap triwulan dan setiap saat apabila diperlukan. 1. The Board of Commissioners drafts the Board of Commissioners Supervisory Report Quarterly and also Annual Report 2. The Board of Commissioners holds Supervisory Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors with one topic related to review and evaluation of risk management. 3. The Board of Commissioners through the Investment and Risk Management Committee reviews and evaluates the risk management report every quarter and at any time if necessary.
1.3.8.	Dewan Komisaris mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal. The Board of Commissioners monitors and directs that the integrity of the corporate accounting and financial reporting system is achieved, as well as the independence of the internal and external audit functions.	Dewan komisaris melakukan rapat rutin berkala dengan Divisi Akuntansi dan KSPI dan jajarannya untuk memastikan semua prosedur dan sistem Laporan Keuangan telah *inline* dengan kaidah terkini dan bebas intervensi. The Board of Commissioners holds regular meetings with the Accounting Division as well as IAU and their staff to ensure that all procedures and systems for financial reporting are in line with the latest standards and are free from intervention.
1.3.9.	Dewan Komisaris memantau, mereviu dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Korporasi serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian korporasi. The Board of Commissioners monitors, reviews and approves the Corporation's annual report and sustainability report as well as ensures their integrity, and supervises the corporation's disclosure and communication processes.	Dewan Komisaris membuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris tiap tahun setelah selesai tahun berjalan. The Board of Commissioners drafts the Board of Commissioners Supervisory Report annually after the end of the current year.
1.3.10.	Piagam Dewan Komisaris secara periodik ditinjau. The Board of Commissioners Charter is periodically reviewed.	Dewan Komisaris secara berkala melakukan *review* terhadap pedoman kerja Dewan Komisaris dan jika dipandang perlu, dilakukan pemutakhiran sesuai kebutuhan Dewan Komisaris dan perkembangan Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. The Board of Commissioners periodically reviews the work guidelines of the Board of Commissioners and if deemed necessary, updates them following the Board of Commissioners needs and the Company development as well as the applicable laws and regulations.
1.3.11.	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. The Board of Commissioners has a policy related to the resignation of members of the Board of Commissioners if involved in financial crimes and proven wrongdoing.	Kebijakan pengunduran diri Komisaris diatur berdasarkan Anggaran Dasar dan *Board Manual of Commisioner* yang berlaku di Perusahaan. Resignation policy for the Board of Commissioners is regulated based on the Company's Articles of Association and the Board Manual of Commissioners.
1.3.12.	Komisaris independen sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam diskusi yang jujur, obyektif, aktif dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris. Independent commissioners are expected to contribute to honest, objective, active and constructive discussions at the Board of Commissioners meetings.	Setiap Komisaris diwajibkan untuk selalu berpartisipasi aktif secara kolegial dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang diatur di dalam Anggaran Dasar serta *Board Manual of Commisioner*. Each Commissioner is required to always participate actively collegially and the principles of good corporate governance are regulated in the Articles of Association and the Board Manual of Commissioners.

	Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment
1.3.13.	Komisaris Utama berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Selain itu, juga harus ada kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior. The President Commissioner acts as coordinator of the Board of Commissioners and ensures its effectiveness. The President Commissioner encourages a culture of openness and constructive dialog that allows a wide range of views to be expressed, including coordinating the setting of appropriate board meeting agendas and ensuring sufficient time is available to discuss all agendas. In addition, there should also be opportunities for the Board of Commissioners to meet with the Board of Directors and senior management.	Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama secara rutin melaksanakan Rapat Internal Dewan Komisaris setiap akhir bulan untuk mendiskusikan seluruh aspek Perusahaan termasuk isu-isu Perusahaan. Selain itu, Dewan Komisaris juga rutin melaksanakan Rapat Pengawasan bersama Direksi. Rapat tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama. Komisaris melalui Komite secara aktif melakukan fungsi pengawasan dan penasihatan kepada Direktur sesuai bidangnya masing-masing. The Board of Commissioners chaired by the President Commissioner routinely holds an Internal Meeting of the Board of Commissioners at the end of each month to discuss all aspects of the Company including the Company issues. Furthermore, the Board of Commissioners also routinely holds Supervisory Meetings with the Board of Directors. The meeting is chaired by the President Commissioner. The Board of Commissioners through the Committees actively carry out supervisory and advisory functions to the Board of Directors according to their respective fields.
1.4.	**Pembentukan Komite** **Establishment of Committee**	
1.4.1.	Korporasi memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Manajemen Risiko. The Corporation has committees under the Board of Commissioners consisting of at least: Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Risk Management Monitoring Committee.	Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Investasi dan Manajemen Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi. The Board of Commissioners has established an Audit Committee, an Investment and Risk Management Committee, and a Nomination and Remuneration Committee.
1.4.2.	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen, serta semua anggota komite memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independen. The Board of Commissioners ensures that members of the Audit Committee are entirely independent and other committees formed by the Board of Commissioners are majority independent parties, and all committee members are competent, committed, and have sufficient authority to carry out their roles effectively and independently.	Dewan Komisaris menunjuk sosok yang dianggap independen dan kompeten sebagai organ Komite Audit, Komite Investasi dan Manajemen Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi. The Board of Commissioners appoints individuals considered independent and competent as the organs of the Audit Committee, Investment and Risk Management Committee, as well as the Nomination and Remuneration Committee.
1.4.3.	Untuk memastikan pemantauan atas pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan obyektif dan independen, Komisaris Utama tidak boleh menjadi ketua Komite Audit, kecuali dalam keadaan luar biasa yang harus dijelaskan dalam laporan tahunan. To ensure objective and independent monitoring of the Audit Committee's duties implementation, the President Commissioner cannot be the chairman of the Audit Committee, except in exceptional circumstances that must be explained in the annual report.	Komisaris Utama tidak merangkap Ketua Komite Audit. The President Commissioner is not concurrently the Chairman of the Audit Committee.
1.5.	**Penilaian Kinerja - Dewan Komisaris dan Anggotanya** **Performance Assessment - Board of Commissioners and its Member**	
1.5.1.	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komitenya, dan setiap individu komisaris. The Board of Commissioners conducts a formal annual objective evaluation to determine the effectiveness of the Board, its committees, and each individual commissioner.	Evaluasi Komite secara kelompok pada masing-masing Komite diberikan penilaian yang dapat dilihat pada *Annual Report* Perusahaan. Evaluation of the Committee as a group on each Committee is given an assessment which is available in the Company's Annual Report.

	Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment
1.6.	**Benturan Kepentingan** **Conflict of Interest**	
1.6.1.	Anggota Direksi yang mempunyai rangkap jabatan di luar korporasi, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Seorang Komisaris memberi tahu Dewan Komisaris dan ketua komite yang menjalankan fungsi nominasi, sebelum menerima penunjukan baru sebagai direktur atau komisaris dari korporasi terbuka, jabatan direktur lainnya atau posisi lain dengan komitmen waktu yang signifikan. Members of the Board of Directors, who hold concurrent positions outside the corporation, must obtain approval from the Board of Commissioners. A Commissioner shall notify the Board of Commissioners and the chairman of the committee carrying out the nomination function, before accepting a new appointment as a director or commissioner of a public corporation, other directorships or other positions with significant time commitments.	Pada Anggaran Dasar telah diatur bahwa anggota Direksi dilarang untuk memangku jabatan rangkap. The Articles of Association stipulate that members of the Board of Directors are prohibited from holding concurrent positions.
1.6.2.	Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset korporasi dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pengambilan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan Komisaris atau afiliasi Komisaris yang bersangkutan. The Board of Commissioners monitors and manages potential conflicts of interest of management, members of the Board of Directors, Board of Commissioners and shareholders, including misuse of corporate assets and misuse in related party transactions. Commissioners who have a conflict of interest do not participate in monitoring and decision-making on potential conflicts of interest involving the Commissioner or an affiliate of the Commissioner concerned.	Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan sesuai dengan Surat Keputusan Bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris PT PJB Nomor 003.K/021/DIR/2020 dan 004.K/DK/PJB/2020 tentang Pengelolaan Benturan Kepentingan di Lingkungan PT PJB. Pencegahan benturan kepentingan di Perusahaan juga dilakukan dengan penyampaian Pakta Integritas setiap tahun oleh Insan Perusahaan termasuk seluruh Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat, yang berisikan pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan dan akan mencegah/menangani benturan kepentingan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Perusahaan. The Board of Commissioners monitors and manages potential conflicts of interest based on Joint Decree between the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT PJB No. 003.K/021/DIR/2020 and 004.K/DK/PJB/2020 concerning Management of Conflicts of Interest within PT PJB. Conflicts of interest in the Company are also prevented by submitting an Integrity Pact every year by the Company personnel including all serving Board of Directors and Board of Commissioners, which contains a statement that they have no conflicts of interest and will prevent/handle conflicts of interest so as not to cause harm to the Company.
1.7.	**Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris** **Competency Improvement for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners**	
1.7.1.	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran dan tanggung jawab mereka, karakteristik dan operasi korporasi, peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan serta kewajiban lain yang berlaku. Direksi melalui sekretaris korporasi mendukung semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbarui dan menyegarkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka di Dewan. The Board of Commissioners ensures that members of the Board of Directors and Board of Commissioners understand their roles and responsibilities, corporate characteristics and operations, relevant laws, regulations and standards as well as other applicable obligations. The Board of Directors through the corporate secretary supports all members of the Board of Directors and Board of Commissioners in updating and refreshing their skills and knowledge required to perform their roles on the Board.	Sekretaris Perusahaan memiliki kewajiban program pengenalan perusahaan kepada Direktur dan/atau Komisaris yang baru diangkat, salah satunya mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris serta hal-hal yang tidak diperbolehkan. The Corporate Secretary has an obligation to introduce the Company to newly appointed Directors and/or Commissioners, including the duties and responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners as well as matters that are not allowed.

Prinsip 2. Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Principle 2. Composition and Remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners		
	Rekomendasi Recommendation	**Pemenuhan** Fulfillment
2.1.	**Komposisi Direksi** **Composition of the Board of Directors**	
2.1.1.	Dalam menentukan kandidat calon direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. In determining director candidates, the Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee does not rely solely on recommendations from the Board of Commissioners, management or majority shareholders. The Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee may use independent sources to determine qualified candidates.	1. Kebijakan Suksesi Direksi sebagai bagian dari penerapan fungsi nominasi di tingkat manajerial tertinggi PLN Nusantara Power, mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor Menteri BUMN Nomor PER- 04/MBU/06/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara. 2. Proses suksesi dan kandidat calon Direktur sepenuhnya menjadi wewenang PT PLN (Persero) selaku *Holding*. 1. The Board of Directors Succession Policy as part of implementing the nomination function at the highest managerial level of PLN Nusantara Power, refers to the Minister of SOE Regulation No. PER-04/MBU/06/2020 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of SOE No. PER- 03/MBU/2012 concerning Guidelines for the Appointment of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of the State-Owned Enterprises Subsidiaries. 2. The process of succession and candidates for the Board of Directors is fully under the authority of PT PLN (Persero) as the Holding.
2.1.2.	Dewan Komisaris memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi. The Board of Commissioners ensures that the criteria for selecting members of the Board of Directors include at least the knowledge, skills and expertise required to appropriately fulfill the role of the Board of Directors and takes into account the fulfillment of the Board of Directors' diversity.	1. Kebijakan Suksesi Direksi sebagai bagian dari penerapan fungsi nominasi di tingkat manajerial tertinggi PLN Nusantara Power, mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor Menteri BUMN Nomor PER- 04/MBU/06/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara. 2. Proses suksesi dan memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi sepenuhnya menjadi wewenang PT PLN (Persero) selaku *Holding*. 1. The Board of Directors Succession Policy as part of implementing the nomination function at the highest managerial level of PLN Nusantara Power, refers to the Minister of SOE Regulation No. PER-04/MBU/06/2020 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of SOE No. PER- 03/MBU/2012 concerning Guidelines for the Appointment of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of the State-Owned Enterprises Subsidiaries. 2. The succession process and ensuring that the criteria for selecting members of the Board of Directors include at least the knowledge, abilities and skills needed to properly fulfill the role of the Board of Directors and taking into account the fulfillment of the diversity of the Board of Directors is fully under the authority of PT PLN (Persero) as the Holding.
2.1.3.	Kebijakan korporasi tentang keberagaman pada, Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan. The corporate policy on diversity in the Board of Directors and Board of Commissioners is disclosed in the Annual Report.	Dalam Laporan Tahunan telah tercantum kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. In the Annual Report, the diversity policy for the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors has been stated.

	Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment
2.1.4.	Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan yang diinginkan. Dewan Komisaris menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. The Board of Commissioners ensures that the policies and procedures for selection and nomination of Commissioners are clear and transparent so as to produce the desired Board composition. The Board of Commissioners uses independent sources to determine qualified candidates.	Kebijakan seleksi dan nominasi Komisaris PLN Nusantara Power, mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor Menteri BUMN Nomor PER- 04/MBU/06/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Terkait dengan proses seleksi dan nominasi Komisaris sepenuhnya menjadi wewenang PT PLN (Persero) selaku *Holding*. The Board of Directors Succession Policy as part of implementing the nomination function at the highest managerial level of PLN Nusantara Power, refers to the Minister of SOE Regulation No. PER-04/MBU/06/2020 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of SOE No. PER- 03/MBU/2012 concerning Guidelines for the Appointment of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of the State-Owned Enterprises Subsidiaries. Regarding the selection and nomination process for Commissioners, it is fully under the authority of PT PLN (Persero) as the Holding.
2.1.5.	Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi. The Board of Commissioners/Committee carrying out the nomination function determines the nomination procedures and criteria that are consistent with the Board of Commissioners' skills matrix approved by the Board of Commissioners and ensures that candidates' profiles meet the requirements set out in the skills matrix and nomination criteria.	Kebijakan seleksi dan nominasi Komisaris PLN Nusantara Power, mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor Menteri BUMN Nomor PER- 04/MBU/06/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Terkait dengan prosedur, kriteria serta proses seleksi dan nominasi Komisaris sepenuhnya menjadi wewenang PT PLN (Persero) selaku *Holding*. The Board of Directors Succession Policy as part of implementing the nomination function at the highest managerial level of PLN Nusantara Power, refers to the Minister of SOE Regulation No. PER-04/MBU/06/2020 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of SOE No. PER- 03/MBU/2012 concerning Guidelines for the Appointment of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of the State-Owned Enterprises Subsidiaries. Regarding the selection and nomination process for Commissioners, it is fully under the authority of PT PLN (Persero) as the Holding.
2.1.6.	Komposisi Dewan Komisaris harus dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota -anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan jender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Dewan Komisaris. The composition of the Board of Commissioners should be such that its members as a group reflect the diversity in terms of skills, expertise, knowledge, experience, age, cultural background and gender required to properly fulfill the role of the Board of Commissioners.	1. Kebijakan seleksi dan nominasi Komisaris PLN Nusantara Power, mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor Menteri BUMN Nomor PER- 04/MBU/06/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Terkait dengan prosedur, kriteria serta proses seleksi dan nominasi termasuk penentuan komposisi Dewan Komisaris sepenuhnya menjadi wewenang PT PLN (Persero) selaku *Holding*. 2. Sepanjang tahun 2022 terdapat Komisaris yang memiliki pengalaman sebelumnya di Bidang Ketenalistrikan. 1. The Board of Directors Succession Policy as part of implementing the nomination function at the highest managerial level of PLN Nusantara Power, refers to the Minister of SOE Regulation No. PER-04/MBU/06/2020 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of SOE No. PER- 03/MBU/2012 concerning Guidelines for the Appointment of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of the State-Owned Enterprises Subsidiaries. Regarding the selection and nomination process for Commissioners, it is fully under the authority of PT PLN (Persero) as the Holding. 2. Throughout 2022, there were Commissioners who have previous experience in the Electricity Sector.

	Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment
2.1.7.	Untuk memampukan Dewan Komisaris dalam memberikan advis dan supervisi secara independen kepada Direksi dan untuk peran-peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen yang cukup jumlahnya, dengan masa jabatan yang dibatasi dan terdapat pengungkapan Jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris serta independensi mereka dari sudut pandang korporasi. To enable the Board of Commissioners to provide independent advice and supervision to the Board of Directors and for roles where there is a potential conflict of interest, the Board of Commissioners consists of a sufficient number of Independent Commissioners, with limited terms of office and disclosure of the term of membership of the Board of Commissioners as well as their independence from a corporate perspective.	Anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham dan memenuhi kriteria Komisaris Independen, namun tidak definitif dinyatakan sebagai Komisaris Independen berjumlah 2 (dua) orang komisaris atau 33 % dari 6 (enam) orang anggota Dewan Komisaris per 31 Desember 2022. Members of the Board of Commissioners who are not affiliated with shareholders and meet the criteria for Independent Commissioners, but are not definitively declared as Independent Commissioners, are 2 (two) Commissioners or 33% of the 6 (six) members of the Board of Commissioners as of December 31, 2022.
2.1.8.	Untuk memfasilitasi fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. To facilitate the effective functioning of the Board of Directors and Board of Commissioners and to enhance investor and stakeholder confidence, the Nomination and Remuneration Committee ensures that there is a formal, rigorous and transparent process for the appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	Kebijakan seleksi dan nominasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris PLN Nusantara Power, mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor Menteri BUMN Nomor PER- 04/MBU/06/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Terkait dengan penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sepenuhnya menjadi wewenang PT PLN (Persero) selaku *Holding*. The Board of Directors Succession Policy as part of implementing the nomination function at the highest managerial level of PLN Nusantara Power, refers to the Minister of SOE Regulation No. PER-04/MBU/06/2020 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of SOE No. PER- 03/MBU/2012 concerning Guidelines for the Appointment of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of the State-Owned Enterprises Subsidiaries. Regarding the selection and nomination process for Commissioners, it is fully under the authority of PT PLN (Persero) as the Holding.
2.2.	**Remunerasi Direksi** **Composition of the Board of Directors**	
2.2.1.	Kebijakan remunerasi anggota Direksi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Direksi harus diusulkan, dapat dengan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Direksi dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. The remuneration policy for members of the Board of Directors consists of a remuneration structure that is oriented towards sustainable corporate development and encourages the achievement of long-term goals. The remuneration for the Board of Directors must be proposed, possibly through the Nomination and Remuneration Committee, by the Board of Commissioners to be decided by the GMS. The amount of remuneration proposed to the GMS is determined by considering the role of each member of the Board of Directors and the economic situation as well as corporate performance.	Usulan Remunerasi Direksi melalui proses dari Direksi ke Dewan Komisaris, selanjutnya Dewan Komisaris akan mengusulkan ke Pemegang Saham. Penetapan Remunerasi Direksi dilakukan oleh Pemegang Saham Mayoritas (PT PLN (Persero)) yang diberikan kewenangan melalui RUPS (RUPS Laporan Tahunan). The Remuneration Proposal of the Board of Directors goes through a process from the Board of Directors to the Board of Commissioners, then the Board of Commissioners will propose to the Shareholders. Determination of the Remuneration for the Board of Directors is conducted by the Majority Shareholder (PT PLN (Persero)) which is authorized through the GMS (Annual Report GMS).

	Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment
2.2.2.	Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Jumlah remunerasi yang diusulkan Dewan Komisaris kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Dewan Komisaris dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. Di samping itu juga harus dipertimbangkan posisinya sebagai Komisaris Utama dan ketua serta keanggotaannya dalam komite-komite. The remuneration policy for members of the Board of Commissioners consists of a remuneration structure that is oriented towards sustainable corporate development and encourages the achievement of long-term goals. The amount of remuneration proposed by the Board of Commissioners to the GMS is determined by considering the role of each member of the Board of Commissioners and the economic situation as well as corporate performance. In addition, it must also consider his/her position as President Commissioner and chairman as well as his/her membership in committees.	Usulan Remunerasi Dewan Komisaris melalui proses dari Direksi ke Dewan Komisaris, selanjutnya Dewan Komisaris akan mengusulkan ke Pemegang Saham. Penetapan Remunerasi Dewan komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham Mayoritas (PT PLN (Persero)) yang diberikan kewenangan melalui RUPS (RUPS Laporan Tahunan). Adapun kebijakan terkait pengaturan organ pendukung Dekom telah diatur oleh Pemegang Saham, yaitu salah satu unsur komite adalah berasal dari anggota Dekom. The Remuneration Proposal of the Board of Commissioners goes through a process from the Board of Directors to the Board of Commissioners, then the Board of Commissioners will propose to the Shareholders. The determination of the remuneration for the Board of Commissioners is conducted by the Majority Shareholder (PT PLN (Persero)), which is authorized through the GMS (Annual Report GMS). The policy related to the arrangement of the Board of Commissioners' supporting organs has been regulated by the Shareholders, namely one of the committee elements is a member of the Board of Commissioners.
2.2.3.	Untuk memastikan bahwa paket remunerasi ditentukan berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi direktur dan komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi, kinerja individu dan kondisi pasar, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. To ensure that remuneration packages are determined based on the achievements, qualifications and competencies of directors and commissioners by taking into account the performance of corporate operations, individual performance and market conditions, the Nomination and Remuneration Committee ensures that there are fair and transparent procedures for determining the remuneration policies of members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	Usulan Remunerasi Direktur Utama mempertimbangkan beberapa faktor antara lain : 1. Perbandingan remunerasi antara perusahaan dengan perusahaan dengan jenis bisnis yang sama, melalui salary survey yang dilakukan oleh Konsultan. 2. Kinerja perusahaan pada tahun sebelumnya. 3. Anggaran yang telah ditetapkan pada RKAP serta nilai akrual yang telah ditetapkan. Remunerasi bagi Direksi & Dekom mengikuti faktor jabatan yang berlaku sesuai dengan Permen BUMN No. PER-13/MBU/09/2021. The proposed remuneration of the President Director considers several factors, among others: 1. Comparison of remuneration between the Company and companies with the same type of business, through a salary survey conducted by a Consultant. 2. Company performance in the previous year. 3. The budget set in the ABOP and the accrual value that has been determined. Remuneration for the Board of Directors & Board of Commissioners follows the applicable position factor in accordance with the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-13/MBU/09/2021.

Prinsip 3. Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris Principle 3. Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris		
	Rekomendasi Recommendation	**Pemenuhan** Fulfillment
3.1.	**Sifat Hubungan Kerja** **Nature of Work Relationship**	
3.1.1.	Terdapat diskusi yang terbuka antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta di antara para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris. Namun, tetap penting menjaga kerahasiaan informasi agar tidak terjadi kebocoran informasi rahasia. There are open discussions between the Board of Directors and Board of Commissioners and between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. However, it is still important to maintain the confidentiality of information to avoid leakage of confidential information.	1. Hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris merupakan hubungan yang bersifat formal dan harus senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang berlaku di Perusahaan. 2. Korespondensi antara Direksi dengan Dewan Komisaris menggunakan media surat elektronik yang berlaku di Perusahaan, yang didalamnya mengandung penjelasan maksud dan tujuan atas surat tersebut. Dalam hal korespondensi bersifat rahasia maka dapat dilakukan secara surat non elektronik. Dalam hal administratif, Sekretaris Dewan Komisaris dapat berkorespondensi formal kepada Sekretaris Perusahaan (dan sebaliknya). Dewan Komisaris melalui Komisaris Utama dapat melakukan korespondensi kepada Direksi melalui Direktur Utama terkait fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dengan ditembuskan kepada Sekretaris Dewan Komisaris dan Sekretaris Perusahaan. 3. Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit setiap 1 (bulan) sekali, yang mengundang Direksi (Rapat Pengawasan). 4. Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi Perusahaan secara tepat waktu, lengkap, terukur dan akurat; dan Direksi bertanggung jawab atas penyampaian informasi Perusahaan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu, lengkap, terukur dan akurat. 1. The work relationship between the Board of Directors and Board of Commissioners is a formal relationship and must always be based on a standard mechanism or correspondence that applies in the Company. 2. Correspondence between the Board of Directors and Board of Commissioners uses electronic mail media applicable in the Company, which contains an explanation of the purpose and objectives of the letter. In the event that the correspondence is confidential, it may be conducted by non-electronic mail. In terms of administrative, the Secretary of the Board of Commissioners may conduct formal correspondence to the Corporate Secretary (and vice versa). The Board of Commissioners through the President Commissioner may correspond with the Board of Directors through the President Director in relation to the supervisory and advisory functions, copied to the Secretary of the Board of Commissioners and the Corporate Secretary. 3. The Board of Commissioners holds a meeting at least once every 1 (month), which invites the Board of Directors (Supervisory Meeting). 4. The Board of Commissioners is entitled to obtain Company information in a timely, complete, measurable and accurate manner; and the Board of Directors is responsible for the submission of Company information to the Board of Commissioners in a timely, complete, measurable and accurate manner.
3.1.2.	Sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, Direksi bekerjasama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara reguler membahas pengimplementasiannya. In accordance with their respective duties and roles, the Board of Directors collaborates with the Board of Commissioners in formulating the corporate mission, vision and strategy and regularly discusses their implementation.	Direksi secara periodik melakukan review atas rencana jangka panjang yang telah disusun, ketika dirasa sudah tidak relevan, maka Direksi akan menyusun revisi RJPP yang akan dibahas dan dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris, sebelum diusulkan kepada Pemegang Saham. The Board of Directors periodically reviews the long-term plan that has been prepared, when it is deemed irrelevant, the Board of Directors will prepare a revised RJPP which will be discussed and requested for approval by the Board of Commissioners, before being proposed to the Shareholders.

	Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment
3.1.3.	Sekretaris Korporasi memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan komisaris, mendorong implementasi praktek governansi korporat yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. The Corporate Secretary has an important role in supporting the effectiveness of work relationships between the Board of Directors and Board of Commissioners, encouraging the implementation of good corporate governance practices, including effective communication with shareholders and other stakeholders.	Sekertaris Perusahaan memiliki peran dalam mendukung efektivitas hubungan kerja maupun korespondensi formal dan non formal antara Direksi dan Dewan Komisaris. Sekretaris Perusahaan juga efektif mengelola komunikasi eksternal dengan pemegang saham dan *stakeholder* eksternal (*stakeholder management*). The Corporate Secretary has a role in supporting the effectiveness of work relationships as well as formal and non-formal correspondence between the Board of Directors and Board of Commissioners. The Corporate Secretary also effectively manages external communication with shareholders and external stakeholders (stakeholder management).
3.2.	**Akses informasi Dewan Komisaris** **Access to information for the Board of Commissioners**	
3.2.1.	Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris sendiri memastikan bahwa ia memperoleh informasi yang memadai. Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan korporasi. Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan. The Board of Directors is responsible for ensuring that the Board of Commissioners has access to accurate, relevant and timely information. The Board of Commissioners itself ensures that it obtains adequate information. The Board of Directors provides information to the Board of Commissioners regularly, without delay and in a comprehensive manner on all issues relevant to the corporation. The Board of Commissioners may at any time request the Board of Directors to provide additional information.	Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi Perusahaan secara tepat waktu, lengkap, terukur dan akurat; dan Direksi bertanggung jawab atas penyampaian informasi Perusahaan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu, lengkap, terukur dan akurat. The Board of Commissioners is entitled to obtain Company information in a timely, complete, measurable and accurate manner; and the Board of Directors is responsible for the submission of Company information to the Board of Commissioners in a timely, complete, measurable and accurate manner.
3.3.	**Tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur Kepemilikan terhadap Korporasi** **Responsibility of the Board of Directors and Board of Commissioners for the Impact of Ownership Structure on the Corporation**	
3.3.1.	Dampak struktur kepemilikan terhadap korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi yang mungkin berdampak terhadap pengelolaan dan operasi korporasi. Impact of ownership structure on the corporation. The Board of Directors and Board of Commissioners consider its responsibilities in the context of the corporation's shareholding structure and inter-shareholder relationships that may impact the corporation's management and operations.	1. Direksi dan Dewan Komisaris memahami hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawabnya masing-masing dalam mengarahkan dan mengendalikan kegiatan Perseroan. Hal tersebut penting sehingga masing-masing mampu melaksanakan tugas secara profesional, efisien, efektif, dan berkualitas. 2. Direksi dan Dewan Komisaris menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif. 3. Direksi dan Dewan Komisaris menghormati tugas dan wewenang Direksi dalam mengelola Perseroan dan wewenang Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan serta memberikan nasihat terhadap kebijakan pengelolaan Perusahaan. 4. Perusahaan memiliki struktur pemegang saham yaitu PT PLN (Persero) dengan kepemilikan saham sebesar 99,99% dan YPK PLN dengan kepemilikan saham sebesar 0,01%. 1. The Board of Directors and Board of Commissioners understand their respective rights, obligations, authorities and responsibilities in directing and controlling the Company's activities. This is important so that each is able to carry out their duties professionally, efficiently, effectively and with quality. 2. The Board of Directors and Board of Commissioners avoid domination by any party, are not influenced by certain interests, are free from conflicts of interest and from any influence or pressure, so that decision making can be conducted objectively. 3. The Board of Directors and Board of Commissioners respect the duties and authority of the Board of Directors in managing the Company and the authority of the Board of Commissioners in supervising and advising on the Company's management policies. 4. The Company has a shareholder structure, namely PT PLN (Persero) with a share ownership of 99.99% and YPK PLN with a share ownership of 0.01%.

Prinsip 4. Perilaku Etis dan bertanggung jawab Principle 4. Ethical and Responsible Behavior		
	Rekomendasi Recommendation	**Pemenuhan** Fulfillment
4.1.	**Pedoman Etika dan Perilaku** **Code of Ethics and Conduct**	
4.1.1.	Pernyataan ini dituangkan dalam Pedoman Perilaku dan Etika Usaha yang harus secara jelas mengungkapkan harapan korporasi bahwa setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan akan: a. Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi; b. Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi; c. Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian. d. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi korporasi dan operasinya; e. Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pedoman etika korporasi; f. Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan terbaik korporasi atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi korporasi; g. Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki korporasi, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi korporasi dan pelanggannya. h. Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi. i. Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, gratifikasi atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang menimbulkan benturan kepentingan/ memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan. j. Menghormati perbedaan pendapat dan hak-hak setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan. k. Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan korporasi kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya.	a. Setiap Insan Perusahaan berkomitmen untuk tumbuh dan berkembang bersama dengan Perusahaan, serta menerapkan praktik praktik bisnis terbaik dalam pengelolaan perusahaan. b. Setiap Insan Perusahaan berkomitmen untuk menjunjung tinggi etika, jujur dan amanah, serta berintegritas. c. Setiap Insan Perusahaan berkomitmen untuk menghindari setiap tindakan yang menimbulkan benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi independensi. Setiap Insan Perusahaan berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan sesuai dengan klasifikasi informasi. Pengungkapan informasi kepada publik dan *stakeholder* lainnya harus dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi informasi, kepentingan perusahaan dan kebutuhan pihak yang berkepentingan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. d. Setiap Insan Perusahaan berkomitmen untuk menghindari setiap tindakan yang menimbulkan benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi independensi. Setiap Insan Perusahaan berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan sesuai dengan klasifikasi informasi. Pengungkapan informasi kepada publik dan *stakeholder* lainnya harus dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi informasi, kepentingan perusahaan dan kebutuhan pihak yang berkepentingan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. e. Setiap Insan Perusahaan berkomitmen untuk menghindari setiap bentuk tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis. f. Setiap Insan Perusahaan berkomitmen untuk menghindari setiap tindakan yang menimbulkan benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi independensi. g. Setiap Insan Perusahaan berkomitmen untuk mengoptimalkan aset perusahaan untuk kepentingan penambahan nilai perusahaan sesuai dengan kewenangan dan lingkup pekerjaan. Menjaga, memelihara dan mengamankan aset perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tidak menggunakan aset perusahaan untuk kegiatan yang melanggar hukum dan etika. h. Setiap Insan Perusahaan berkomitmen untuk menghindari setiap tindakan yang menimbulkan benturan kepentingan, salah satunya memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. i. Perusahaan mengusahakan terjadinya hubungan yang harmonis antara Perusahaan dengan Mitra Usaha. Seluruh Insan Perusahaan dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan apabila Insan Perusahaan tersebut memiliki benturan kepentingan dengen Mitra Usaha, serta membuka peluang terjadinya gratifikasi serta menerima suap dan gratifikasi. j. Setiap Insan Perusahaan wajib untuk menjaga hubungan baik dengan seluruh *stakeholder* perusahaan sesuai dengan nilai-nilai perusahaan. Dalam rangka menjaga keharmonisan antar Insan Perusahaan, maka Insan Perusahaan wajib untuk menghormati sesama Insan Perusahaan, bertindak adil dalam menyelesaikan permasalahan atau perbedaan pendapat, serta menciptakan suasana kerja yang kondusif untuk Insan Perusahaan. k. Setiap Insan Perusahaan berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan sesuai dengan klasifikasi informasi. Pengungkapan informasi kepada publik dan *stakeholder* lainnya harus dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi informasi, kepentingan perusahaan dan kebutuhan pihak yang berkepentingan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

	Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment
	This statement is set out in the Code of Conduct and Business Ethics which must clearly express the corporation's expectation that each member of the Board of Directors and Board of Commissioners and employees will: a. Act for the best interests of the corporation; b. Act honestly and with a high standard of integrity; c. Be independent and act based on complete information, in good faith, with due diligence and prudence. d. Comply with laws and regulations applicable to the corporation and its operations; e. Avoiding actions that violate laws and regulations or unethical actions based on corporate code of ethics; f. Not engage or participate in any activity that will create a conflict of interest with the best interests of the corporation or that will negatively impact the reputation of the corporation; g. Not taking advantage of property or information owned by the corporation, ownership of other assets or its customers for personal gain or that causes harm to the corporation and its customers. h. Not utilizing his/her position or opportunities generated by his/her position for personal interests. i. Avoid the act of requesting or receiving from third parties payments, gratuities or other benefits for themselves or for others that cause conflicts of interest/provide benefits to third parties in violation of laws and regulations. j. Respect differences of opinion and the rights of each member of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees. k. Ensure complete, fair, accurate, timely, and understandable disclosure in reports and documents submitted by the corporation to regulators and in other public communications.	a. Every employee of the Company is committed to growing and developing together with the Company, as well as implementing best business practices in the management of the Company. b. Every Company Personnel is committed to upholding ethics, honesty and trustworthiness, and integrity. c. Each Company Personnel is committed to avoiding any action that creates a conflict of interest that can affect independence. Each Company Personnel is obliged to maintain the confidentiality of the Company's information in accordance with the classification of information. Disclosure of information to the public and other stakeholders must be made by taking into account the classification of information, the interests of the Company and the needs of interested parties in accordance with applicable legislation. d. Each Company Personnel is committed to avoiding any action that creates a conflict of interest that can affect independence. Each Company Personnel is obliged to maintain the confidentiality of the Company's information in accordance with the classification of information. Disclosure of information to the public and other stakeholders must be made by taking into account the classification of information, the interests of the Company and the needs of interested parties in accordance with applicable legislation. e. Every Company personnel is committed to avoiding any form of action that violates laws and regulations or unethical actions. f. Each Company Personnel is committed to avoiding any action that creates a conflict of interest that can affect independence. g. Every Company personnel is committed to optimizing the Company's assets for the benefit of adding value to the Company in accordance with the authority and scope of work. Safeguarding, maintaining and securing the Company's assets in accordance with applicable regulations and not using the Company's assets for activities that violate the law and ethics. h. Every Company Personnel is committed to avoiding any action that creates a conflict of interest, one of which is utilizing the position for personal gain. i. The Company strives for a harmonious relationship between the Company and Business Partners. All Company personnel are prohibited from participating in decision making if the Company personnel have a conflict of interest with Business Partners, as well as opening opportunities for gratuities as well as accepting bribes and gratuities. j. Every Company Personnel is obliged to maintain good relations with all Company stakeholders in accordance with the Company's values. In order to maintain harmony among Company personnel, Company personnel are obliged to respect fellow Company personnel, act fairly in resolving issues or differences in opinion, and create a conducive work atmosphere for Company personnel. k. Every employee of the Company is obliged to maintain the confidentiality of the Company's information in accordance with the classification of information. Disclosure of information to the public and other stakeholders must be made by taking into account the classification of information, the interests of the Company and the needs of interested parties in accordance with applicable legislation.
4.1.2.	Direksi menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, anti korupsi, anti kecurangan (anti *fraud*), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti pencucian uang, anti suap, anti korupsi, anti kecurangan atau standar terkait lainnya. The Board of Directors establishes policies and practices on anti-money laundering and terrorism financing, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, involvement in politics with reference to national or international standards on anti-money laundering, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud or other relevant standards.	Dalam rangka menciptakan korporasi yang patuh terhadap tata kelola yang baik, perusahaan berkomitmen untuk menjalankan setiap proses bisnis secara transparan dan akuntabel. Sebagai bentuk komitmen Direksi, Dewan Komisaris serta Insan Perusahaan dalam mendukung peningkatan integritas untuk mewujudkan manajemen anti *fraud*, mengelola dan mencegah terjadinya *fraud*, memperkuat sistem pengendalian anti *fraud*, serta meningkatkan budaya kerja dan lingkungan bisnis yang berintegritas. In order to create a corporation that complies with good governance, the Company is committed to running every business process in a transparent and accountable manner. As a form of commitment of the Board of Directors, Board of Commissioners and Company Personnel in supporting the improvement of integrity to realize anti-fraud management, manage and prevent fraud, strengthen anti-fraud control systems, and improve work culture and business environment with integrity.

	Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment
4.2.	**Nilai – nilai dan Budaya Organisasi** **Organizational Values and Culture**	
4.2.1.	Korporasi mengartikulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilai-nilai korporasi. The Corporation articulates, fosters and expresses its corporate culture and values.	Perusahaan telah menetapkan panduan dalam implementasi tata nilai perusahaan dalam bersikap, bertindak dan berperilaku bagi Insan Perusahaan. The Company has determined guidelines for the implementation of corporate values in the attitude, action and behavior of the Company's personnel.
4.3.	**Komunikasi dan Penegakan Pedoman Etika, Nilai-nilai dan Budaya** **Communication and Enforcement of Code of Ethics, Values and Culture**	
4.3.1.	Pedoman perilaku dan kode etik korporasi dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan, diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegakan. The corporate code of conduct and code of ethics are effectively communicated to the Board of Directors, Board of Commissioners, and all employees, integrated into corporate strategy and operations including risk management systems and remuneration structures, and enforced.	Perusahaan telah menetapkan Standar Etika Perusahaan, sebagai pedoman etika dan perilaku Insan Perusahaan, sebagai landasan dalam menjalankan proses bisnis dalam rangka menjalankan visi, misi dan tujuan perusahaan. Perusahaan telah menetapkan aturan dan pedoman penerapan manajemen risiko terintegrasi serta struktur remunerasi. The Company has determined the Company's Ethical Standards, as a guideline for the ethics and behavior of Company Personnel, as a foundation in carrying out business processes in order to carry out the Company's vision, mission and objectives. The Company has determined the rules and guidelines for the implementation of integrated risk management and remuneration structure.

Prinsip 5. Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan Principle 5. Risk Management, Internal Control and Compliance		
	Rekomendasi Recommendation	**Pemenuhan** Fulfillment
5.1.	**Pengendalian Internal dan Kepatuhan** **Internal Control and Compliance**	
5.1.1.	Direksi melakukan reviu secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil reviu kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan Korporasi. The Board of Directors periodically reviews the appropriateness of the design and operational effectiveness of the Corporation's systems of governance, risk management, internal control and compliance as well as reports the implementation and results of the review to the shareholders through the Corporation's annual report.	Telah dilaksanakan reviu secara berkala atas: 1. efektivitas sistem governansi melalui assessment GCG yang dilaksanakan secara periodik oleh asesor independen, 2. reviu atas pelaksanaan pengelolaan risiko melalui assessment maturity level risiko, 3. reviu kepatuhan terhadap pengendalian internal telah dilakukan oleh auditor eksternal, serta tidak terdapat temuan berkaitan dengan pengendalian internal, 4. auditor eksternal telah melakukan audit pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Hasil atas reviu dan laporan auditor disampaikan kepada pemegang saham. Periodic reviews have been carried out on: 1. Effectiveness of the governance system through GCG assessments carried out periodically by independent assessors, 2. Review of the implementation of risk management through risk maturity level assessment, 3. A review of compliance with internal control has been conducted by the external auditor, and there are no findings related to internal control, 4. The external auditor has conducted an audit on compliance with laws and regulations. The results of the review and the auditor's report were submitted to the shareholders.

	Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment
5.2.	**Manajemen Risiko** **Risk Management**	
5.2.1.	Strategi dan risiko merupakan satu kesatuan, diungkapkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta dalam diskusi di rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Strategy and risk are integrated, disclosed transparently, incorporated into the implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners, and in discussions at the Board of Commissioners and Board of Directors meetings.	1. Peran dan akuntabilitas Direksi telah dijabarkan dalam Peraturan Direksi terkait Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi. 2. Pengambilan keputusan strategis didasarkan pada mekanisme 4EP yang tertuang dalam Peraturan Direksi terkait Penerapan GRC. 1. The roles and accountabilities of the Board of Directors have been outlined in the Board of Directors Regulation on the Implementation of Integrated Risk Management. 2. Strategic decision making is based on the 4EP mechanism as set out in the Board of Directors' Regulation related to the Implementation of GRC.
5.2.2.	Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko korporasi. Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko korporasi.	Komite Investasi dan Manajemen Risiko melakukan pengawasan manajemen risiko korporasi dengan melakukan rapat secara berkala dengan bidang manajemen risiko. The Investment and Risk Management Committee supervises corporate risk management by conducting regular meetings with the risk management sector.
5.3.	**Integrasi Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan** **Integration of Governance, Risk Management and Compliance**	
5.3.1.	Direksi membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya. The Board of Directors establishes an integrated system of governance, risk management, and compliance (GRC), by addressing various uncertainties in an integrated manner and with high integrity, to ensure that the corporation can achieve its objectives.	Perusahaan telah menetapkan panduan sebagai acuan dalam penerapan *governance, risk and compliance* (GRC) di lingkungan perusahaan, agar penerapan GRC dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan yang memenuhi kaidah GCG sesuai dengan visi, misi dan dilandasi dengan budaya perusahaan. The Company has determined guidelines as a reference in the implementation of governance, risk and compliance (GRC) within the Company, so that the implementation of GRC can improve the effectiveness, efficiency, growth and sustainability of the Company that meets the principles of GCG in accordance with the vision, mission and is based on corporate culture.
5.3.2.	Direksi memastikan bahwa bagian yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. The Board of Directors ensures that the section in charge of the compliance function does not concurrently carry out functions that have the potential to cause conflicts of interest.	Fungsi kepatuhan berada dibawah VP Risk Management and Compliance. The compliance function is under the VP of Risk Management and Compliance.
5.4.	**Audit Internal** **Internal Audit**	
5.4.1.	Dewan Komisaris melalui Komite Audit memantau dan memastikan bahwa fungsi audit internal membantu korporasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan governansi korporat. The Board of Commissioners through the Audit Committee monitors and ensures that the internal audit function assists the corporation to achieve its objectives by bringing an objective and disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, internal control, and corporate governance.	Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat Pengawasan Dewan Komisaris kepada KSPI dan Tim terkait dengan evaluasi realisasi rencana kerja dan isu terkini yang perlu mendapatkan perhatian dan tindaklanjut Dewan Komisaris. The Board of Commissioners holds the Board of Commissioners Supervisory Meetings for IAU and the Team related to evaluation of the work plans realization and current issues that need attention and follow-up by the Board of Commissioners.

Prinsip 6. Pengungkapan dan Transparansi Principle 6. Disclosure and Transparency		
	Rekomendasi Recommendation	**Pemenuhan** Fulfillment
6.1.	**Kebijakan Pengungkapan** **Disclosure Policy**	
6.1.1.	Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia korporasi. The Corporation has disclosure and transparency policies and procedures that ensure the disclosure of material information and safeguard sensitive information and corporate confidential.	Perusahaan menyusun pedoman pengelolaan informasi, data dan dokumen perusahaan secara aman, tepat waktu dan bertanggung jawab sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat menjaga kredibilitas perusahaan. Dalam kebijakan ini diatur mengenai pengklasifikasian, pengungkapan dan pengamanan informasi, data dan dokumen Perusahaan. The Company prepares guidelines for managing information, data and company documents in a safe, timely and responsible manner as a form of compliance with applicable laws and regulations, which can maintain the credibility of the Company. This policy regulates the classification, disclosure and security of information, data and documents of the Company.
6.1.2.	Hak pemegang saham untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang korporasi harus dipenuhi. The right of shareholders to obtain on a regular and timely basis relevant material information on the corporation must be fulfilled.	Direksi memberikan perlakuan yang sama (*fairness*) dalam memberikan informasi kepada pemegang saham secara teratur dan tepat waktu. Perusahaan menyampaikan informasi (laporan manajemen triwulanan dan laporan manajemen tahunan) dengan muatan dan waktu yang sama kepada pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas The Board of Directors provides equal treatment (fairness) in providing information to shareholders on a regular and timely basis. The Company delivers information (quarterly management reports and annual management reports) with the same content and timing to majority shareholders and minority shareholders.
6.2.	**Laporan Keuangan dan Keberlanjutan** **Financial Statements and Sustainability Report**	
6.2.1.	Korporasi mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat. The Corporation discloses systems and procedures to ensure that interim financial statements that are not materially audited or reviewed by external auditors are accurate, complete, and provide investors with appropriate information to make proper investment decisions.	Perusahaan telah mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat. The Company has disclosed systems and procedures to ensure that interim financial statements that are not materially audited or reviewed by external auditors are accurate, complete and provide investors with appropriate information to make proper investment decisions.
6.2.2.	Komite Audit memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal. The Audit Committee ensures the quality of audit of financial statements conducted by the external auditors. This includes recommending the appointment, reappointment and, if necessary, dismissal and remuneration of the external auditor.	1. Dewan Komisaris secara rutin menyelanggarakan rapat pengawasan dan koordinasi progres audit Laporan Keuangan dengan KAP terpilih. 2. Dewan Komisaris menerbitkan surat rekomendasi penunjukan auditor eksternal. 1. The Board of Commissioners routinely holds supervisory meetings and coordinates the audit progress of Financial Statements with the selected PAF. 2. The Board of Commissioners issues a letter of recommendation for the appointment of an external auditor.
6.2.3.	Laporan keberlanjutan harus disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional. Sustainability reports shall be prepared and disclosed accurately and in accordance with national or international sustainability reporting frameworks.	Direksi telah menyusun *sustainability report.* The Board of Directors has prepared a sustainability report.
6.2.4.	Korporasi menerbitkan laporan tahunan secara terintegrasi yang menempatkan kinerja historis ke dalam konteks dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek korporasi di masa depan, sehingga membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan. The Corporation publishes an integrated annual report that puts historical performance into context and describes the risks, opportunities and future prospects of the corporation, thereby helping shareholders and stakeholders understand the strategic objectives of the corporation and its progress in creating sustainable value.	Perusahaan menerbitkan laporan tahunan terintegrasi yang menggambarkan historis kinerja, risiko, peluang dan *strategic goal* perusahaan ke depan. The Company publishes an integrated annual report that describes the Company's historical performance, risks, opportunities and future strategic goals.

	Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment
6.3.	**Diseminasi Informasi** **Information Dissemination**	
6.3.1.	Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna. Information dissemination channels should provide equal, timely and relatively inexpensive access to information relevant to users.	Perusahaan memiliki situs *web* perusahaan dan media sosial yang dapat diakses secara umum, dimana menyediakan informasi yang *update* dan tepat waktu. The Company has a publicly accessible corporate website and social media, which provide updated and timely information.
6.3.2.	Korporasi memastikan bahwa pernyataan tahunan terhadap penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia, termasuk penjelasan atas penerapan atas masing-masing Rekomendasi dan Panduan tersedia di situs web selama jangka waktu minimal lima tahun. The Corporation ensures that an annual statement on the application of the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance, including an explanation of the application of each of the Recommendations and Guidelines is available on the website for a minimum period of five years.	Perusahaan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan Permen BUMN PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN serta dengan indikator pengelolaan sesuai dengan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor Sk-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. The Company has implemented good corporate governance in accordance with the Regulation of the Minister of SOEs PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs and with management indicators in accordance with the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs Number Sk-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs.
6.3.3.	Untuk korporasi yang terdaftar di pasar modal di yurisdiksi selain yurisdiksi asal, peraturan perundang-undangan atas governansi korporat yang berlaku harus diungkapkan dengan jelas. Dalam hal *cross listing*, kriteria dan prosedur *cross listing*, kriteria dan prosedur untuk mengakui persyaratan listing untuk listing utama harus transparan dan didokumentasikan. For corporations listed on capital markets in jurisdictions other than the original jurisdiction, the applicable laws and regulations on corporate governance should be clearly disclosed. In the case of cross listing, the cross listing criteria and procedures, criteria and procedures for recognizing the listing requirements for the primary listing should be transparent and documented.	Perusahaan tidak terdaftar pada pasar modal. The Company is not listed on the stock market.

Prinsip 7. Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham
Principle 7. Protection of Shareholders' Rights

	Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment
7.1.	**Hak Pemegang Saham** **Shareholders' Rights**	
7.1.1.	Korporasi memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor. The Corporation has a communication policy that facilitates and encourages shareholder or investor participation.	Perusahaan memiliki panduan/mekanisme hubungan kerja formal dengan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham. The Company has guidelines/mechanisms for formal working relationships with shareholders through the General Meeting of Shareholders.
7.1.2.	Korporasi yang merupakan entitas induk memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas anak dan entitas sepengendali yang di dalamnya investasi korporasi adalah signifikan. A corporation that is a parent ensures that its corporate governance policies apply to subsidiaries and entities under common control in which the corporation has a significant investment.	PT PLN NP memiliki tata kelola APPA yang mengatur alur komunikasi antara PT PLN NP selaku Induk dengan AP PLN NP. Selain itu juga terdapat arahan-arahan dari Pemegang Saham dalam RUPS RKAP & LPT AP yang mengamanatkan kebijakan-kebijakan di lingkup PLN Group terlaksana di masing-masing AP PLN NP. PT PLN NP has APPA governance that regulates the flow of communication between PT PLN NP as the Parent and PLN NP AP. In addition, there are also directives from Shareholders in the GMS of ABOP & LPT AP that mandate policies within the PLN Group to be implemented in each PLN NP AP.

	Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment
7.1.3.	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambilalihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya. The Corporation has rules and procedures regulating acquisitions, takeovers, and extraordinary transactions such as mergers and sales of substantial corporate assets to ensure transactions occur transparently and under fair conditions and protect the rights of all shareholders according to their class.	Terkait aturan prosedur tersebut telah diatur dalam Anggaran Dasar PLN NP serta *Board Manual* PLN NP. Related rules of procedure have been regulated in the PLN NP's Articles of Association and PLN NP's Board Manual.
7.2.	**Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham** **Fair Treatment towards Shareholders**	
7.2.1.	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan a). semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham harus diperlakukan setara, b). pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya. The Corporation has rules and procedures that ensure a). all shareholders of the same series in a class of shares shall be treated equally, b). disclosure of such rules and procedures as well as disclosure of the capital structure and arrangements that allow certain shareholders to obtain influence or control disproportionate to their shareholding	Perusahaan memiliki struktur pemegang saham yaitu PT PLN (Persero) dengan kepemilikan saham sebesar 99,99% dan YPK PLN dengan kepemilikan saham sebesar 0,01%. Direksi memberikan perlakuan yang sama (*fairness*) dalam memberikan informasi kepada Pemegang Saham. The Company has a shareholder structure, namely PT PLN (Persero) with share ownership of 99.99% and YPK PLN with share ownership of 0.01%. The Board of Directors provides equal treatment (fairness) in providing information to Shareholders.
7.2.2.	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham. The Corporation has rules and procedures that ensure related party transactions are approved and carried out in a manner that ensures that conflicts of interest are appropriately managed, and protects the interests of the corporation and its shareholders.	Perusahaan telah memiliki aturan mengenai pengelolaan benturan kepentingan. The Company has rules regarding the management of conflicts of interest.
7.2.3.	Korporasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. Korporasi memiliki aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh direktur, komisaris dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapapun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/belum tersedia di pasar. The Corporation has and discloses policies to prevent insider trading. The corporation has clear rules regarding any trading in the corporation's shares by directors, commissioners and insiders to ensure that no one may benefit directly or indirectly from information that is not/not yet available in the market.	Perusahaan telah memiliki aturan mengenai pedoman perilaku, benturan kepentingan. Setiap tahunnya Direksi dan dewan Komisaris menandatangani Pakta Integritas, dimana didalamnya diatur bahwa Direksi dan Dewan Komisaris berkomitmen untuk tidak melakukan pengambilan keputusan serta tidak melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan. The Company has had rules regarding the code of conduct, conflict of interest. Every year, the Board of Directors and Board of Commissioners sign an Integrity Pact, in which it is stipulated that the Board of Directors and Board of Commissioners are committed not to making decisions and not conducting transactions that contain conflicts of interest.
7.3.	**Rapat Umum Pemegang Saham** **General Meeting of Shareholders**	
7.3.1.	Korporasi melakukan panggilan RUPS dengan agenda dan materi RUPS selengkap dan sedini mungkin (paling lambat 28 hari sebelum RUPS) untuk memberikan waktu dan materi yang cukup bagi pemegang saham untuk mempelajari dengan baik agenda rapat. Undangan rapat dan seluruh informasi RUPS diungkapkan melalui sarana elektronik seperti melalui situs *web* korporasi.	Dalam Anggaran Dasar telah disebutkan bahwa Direksi wajib melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat, disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan. Dalam prakteknya, materi RUPS telah disampaikan kepada Pemegang Saham, sehingga terdapat waktu yang cukup bagi Pemegang Saham untuk mempelajari dengan baik agenda rapat. Korporasi bukan merupakan Perusahaan Terbuka dimana undangan rapat dan seluruh informasi RUPS tidak wajib diungkapkan melalui situs *web* perusahaan, hanya ringkasan atas pelaksanaan RUPS yang dicantumkan pada *website* perusahaan.

	Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment
	The Corporation conducts the GMS invitation with the agenda and materials of the GMS as complete and early as possible (at least 28 days before the GMS) to provide sufficient time and materials for shareholders to properly study the meeting agenda. The meeting invitation and all GMS information are disclosed through electronic means such as through the corporation's website.	In the Articles of Association, it is stated that the Board of Directors must make an invitation to the General Meeting of Shareholders no later than 14 (fourteen) days before the date of the General Meeting of Shareholders. The invitation to the GMS shall include the date, time, place, and agenda of the meeting, along with a notification that the materials to be discussed at the GMS are available at the Company's office from the date of the invitation to the GMS until the date of the GMS. In practice, the GMS materials have been submitted to the Shareholders, so that there is sufficient time for the Shareholders to properly study the meeting agenda. The Corporation is not a Public Company where the meeting invitation and all GMS information are not required to be disclosed through the Company's website, only a summary of the implementation of the GMS is included on the Company's website.
7.3.2.	Korporasi memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS. The Corporation has and discloses rules and procedures that facilitate shareholders in participating and voting effectively at the GMS.	Perusahaan telah menyusun aturan dan prosedur mengenai Rapat Umum Pemegang Saham pada Anggaran Dasar (Pasal 21, 22, 23 dan 24). The Company has prepared rules and procedures regarding the General Meeting of Shareholders in the Articles of Association (Articles 21, 22, 23 and 24).
7.3.3.	Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Shareholders participate effectively in determining the appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	Pemegang Saham menetapkan Direksi dan Dewan Komisaris melalui Keputusan RUPS secara Sirkuler setelah dilakukan proses penilaian atas calon-calon Direksi dan/atau Komisaris. Shareholders determine the Board of Directors and Board of Commissioners through a Circular GMS Resolution after an assessment process of the candidates for the Board of Directors and/or Commissioners.
7.3.4.	Korporasi memastikan transparansi dan akuntabilitas auditor eksternal di RUPS. The Corporation ensures transparency and accountability of the external auditor at the GMS.	RUPS memberikan Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan, laporan evaluasi kinerja dan laporan kepatuhan. The GMS authorized the majority Shareholders to determine the appointment of a Public Accounting Firm as the auditor who will audit the Company's financial statements, performance evaluation reports and compliance reports.
7.3.5.	Penyampaian hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS secara lengkap diumumkan ke publik pada hari kerja berikutnya. Submission of voting results and a complete summary of the GMS minutes are announced to the public on the next business day.	Korporasi bukan merupakan Perusahaan Terbuka serta hanya memiliki 2 pemegang saham dengan pemegang saham mayoritas adalah PT PLN (Persero) dengan persentase kepemilikan saham sebesar 99,99% dan YPK PLN dengan persentase kepemilikan saham sebesar 0,01%. Seluruh hasil suara/keputusan Pemegang Saham tidak wajib diungkapkan melalui situs *web* perusahaan, hanya ringkasan atas pelaksanaan RUPS yang dicantumkan pada *website* perusahaan. The Corporation is not a Public Company and only has 2 shareholders with the majority shareholder is PT PLN (Persero) with a share ownership percentage of 99.99% and YPK PLN with a share ownership percentage of 0.01%. All results of the Shareholders' votes/decisions are not required to be disclosed through the Company's website, only a summary of the implementation of the GMS is included on the Company's website.

Prinsip 8. Pemangku Kepentingan Lainnya Principle 8. Other Stakeholders		
	Rekomendasi Recommendation	**Pemenuhan** Fulfillment
8.1.	**Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kunci (*Stakeholder Engagement*)** **Key Stakeholder Engagement**	
8.1.1.	Korporasi melalui Sekretaris Korporasi melaksanakan komunikasi yang regular, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci serta melibatkan mereka untuk memahami harapan dan keluhan mereka serta dampak korporasi terhadap mereka. The Corporation through the Corporate Secretary carries out regular, transparent and effective communication with key stakeholders and engages them to understand their expectations and grievances as well as the impact of the corporation on them.	Sekretaris Perusahaan memiliki kewajiban dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan evaluasi pengelolaan strategi komunikasi, hubungan masyarakat, media dan *stakeholders* Perusahaan. The Corporate Secretary is responsible for planning, implementing, developing and evaluating the management of the Company's communication strategy, public relations, media and stakeholders.
8.2.	**Integrasi Keberlanjutan dalam Model Bisnis** **Integration of Sustainability in Business Models**	
8.2.1.	Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab, akuntabel dan transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris memasukkan pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan perannya, termasuk antara lain dalam pengembangan dan implementasi strategi korporasi, rencana bisnis, rencana aksi utama dan manajemen risiko. The Board of Commissioners together with the Board of Directors is responsible, accountable and transparent for sustainability governance, including determining corporate sustainability strategies, priorities and targets. The Board of Directors and Board of Commissioners incorporate sustainability considerations when carrying out their roles, including among others in the development and implementation of corporate strategies, business plans, key action plans and risk management.	Dewan Komisaris setiap bulan menyelenggarakan Rapat Pengawasan/ Rapat Koordinasi Dewan Komsiaris dan Direksi. The Board of Commissioners holds monthly Supervisory Meeting/ Coordination Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors.
8.3.	**Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan** **Protection of Stakeholders**	
8.3.1.	Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi korporasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh korporasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan. The Board of Directors ensures and discloses that the corporation's operations reflect the application of high ethical, social and environmental responsibility standards throughout the corporation and ensures that appropriate policies and procedures are implemented to respect and comply with the rights of stakeholders.	Perusahaan telah menerapkan standar etika perusahaan serta adanya kebijakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. The Company has implemented corporate ethics standards as well as social and environmental responsibility policies.
8.3.2.	Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan. The Board of Directors encourages employees to work for the long-term interests of the corporation and prioritizes sustainability.	Setiap Insan Perusahaan berkomitmen untuk tumbuh dan berkembang bersama dengan perusahaan, dengan wajib untuk berani mengambil inisiatif terkait urusan pekerjaan, belajar secara sistematis dan berkelanjutan, serta cepat menyesuaikan diri dan tanggap terhadap perubahan yang terjadi. Every Company Personnel is committed to growing and developing together with the Company, with the obligation to take initiatives related to work matters, learn systematically and continuously, as well as quickly adjust and respond to changes that occur.

Struktur Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Structure

Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) merupakan rangkaian proses, perilaku, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengelolaan, pengendalian dan pengarahan korporasi termasuk hubungan antara para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Struktur tata kelola Perusahaan sangat erat kaitannya dengan bagaimana perilaku dan proses hubungan dengan *stakeholders* serta pencapaian tujuan Perusahaan dapat berjalan dengan baik. Struktur tata kelola yang memadai baik dari segi organ maupun kebijakan dapat mendukung kinerja Perusahaan dan pengelolaan bisnis berkelanjutan. Perusahaan secara berkala melakukan evaluasi dan pengembangan struktur tata kelola sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dan sejalan dengan ketentuan perundangan serta *best practices* yang terus berkembang sehingga mampu mendukung transformasi dalam menghadapi perubahan lingkungan dan jangkauan bisnis Perusahaan.

Corporate Governance is a series of processes, behaviors, policies, rules and institutions that influence the management, control and direction of the corporation including the relationship between the stakeholders involved and the objectives of managing the Company. The corporate governance structure is closely related to how the behavior and process of relationships with stakeholders as well as the achievement of the Company's objectives can run well. An adequate governance structure both in terms of organs and policies can support the Company's performance and sustainable business management. The Company periodically evaluates and develops the governance structure in accordance with the needs of the Company and in line with the provisions of legislation and best practices that continue to develop so as to be able to support transformation in facing environmental changes and the Company's business reach.

Organ Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Organs

Struktur tata kelola Perusahaan secara institusi atau organ mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan. Organ tata kelola Perusahaan terdiri dari organ utama dan organ pendukung. Organ utama tata kelola Perusahaan dibantu oleh organ pendukung dalam melaksanakan fungsi yang dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen serta kewajaran dan kesetaraan.

The Company's governance structure by institution or organ refers to the Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the Company's Articles of Association. The organs of corporate governance consist of main organs and supporting organs. The main organ of corporate governance is assisted by supporting organs in carrying out its functions based on the principles of transparency, accountability, responsibility, independence as well as fairness and equality.

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Structure of Corporate Governance Organs

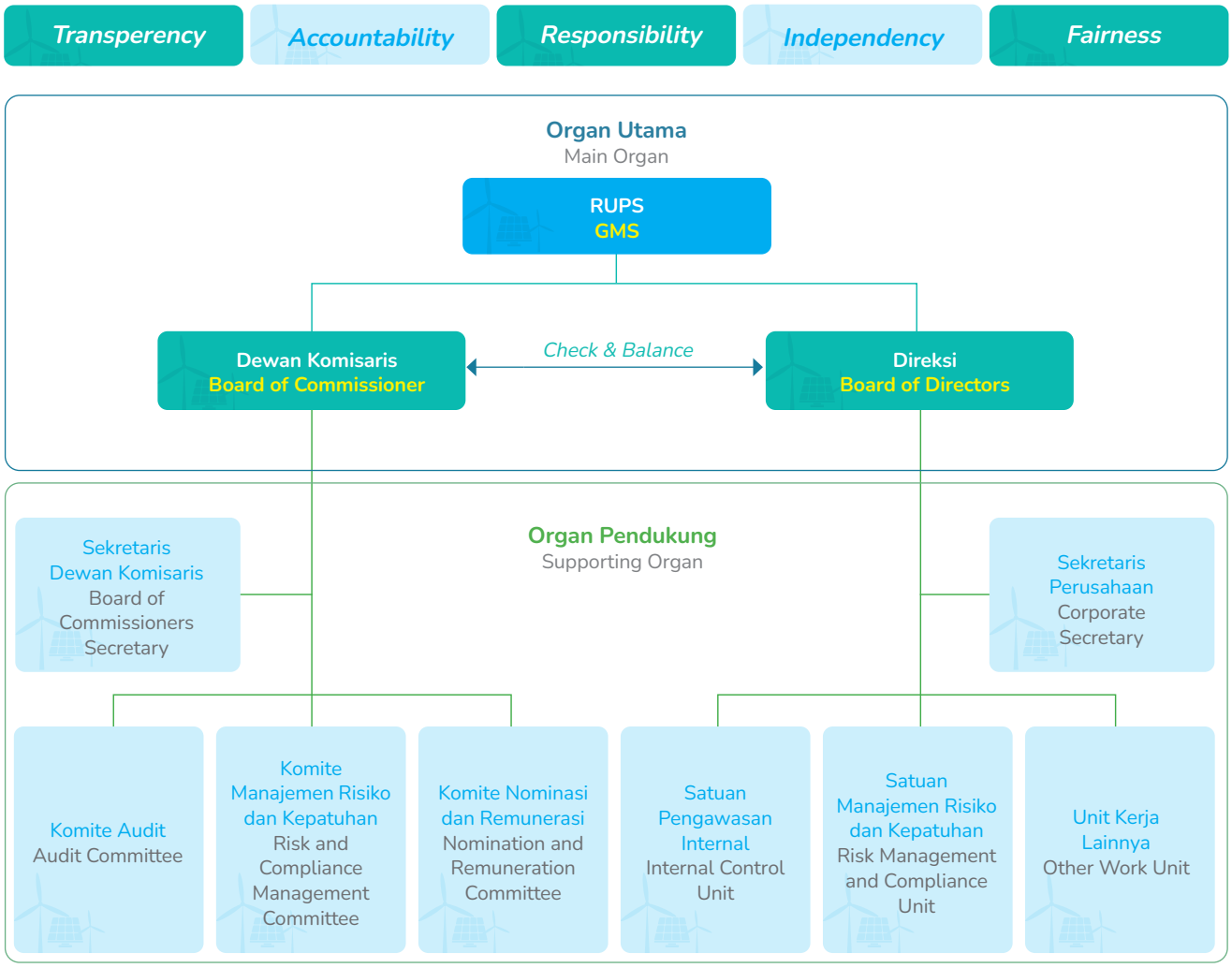

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi merupakan organ utama yang menentukan pengelolaan, pengendalian dan pengarahan korporasi. Direksi sebagai pelaksana fungsi pengelolaan Perusahaan dibantu oleh organ di bawah Direksi yang terdiri dari Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawasan Internal, Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan serta Unit Kerja Lainnya sebagai organ pendukung tata kelola Perusahaan. Dewan Komisaris juga membentuk organ pendukung yang terdiri dari Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan, Komite Nominasi dan Remunerasi.

The General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners and Board of Directors are the main organs that determine the management, control and direction of the corporation. The Board of Directors as the executor of the Company's management function is assisted by organs under the Board of Directors consisting of the Corporate Secretary, Internal Audit Unit, Risk Management and Compliance Unit and Other Work Units as supporting organs of corporate governance. The Board of Commissioners also establishes supporting organs consisting of the Secretary of the Board of Commissioners, Audit Committee, Risk Management and Compliance Committee, Nomination and Remuneration Committee.

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Policy

Organ tata kelola Perusahaan dalam melakukan pengelolaan, pengendalian dan pengarahan korporasi perlu dilengkapi dengan kebijakan dan aturan (*softstructure*) yang menjadi acuan dalam berperilaku dan menjalankan proses bisnis sehingga dapat mendorong efektivitas pencapaian tujuan Perusahaan. Perusahaan menyusun kebijakan sebagai perangkat aturan yang menjadi pedoman bagi organ tata kelola Perusahaan dalam mendukung implementasi GCG sesuai dengan peraturan perundang-undangan, best practice serta nilai-nilai budaya Perusahaan. Pelaksanaan kebijakan yang diterapkan setiap fungsi dalam tata kelola Perusahaan berdasarkan pendekatan tiga pilar utama, yaitu *Objective, Risk and Control* (ORC). Setiap fungsi didorong untuk dapat mengelola risiko dan memiliki kontrol atas organisasi yang mencakup seluruh rangkaian proses di dalam Perusahaan sesuai dengan dinamika usaha dan regulasi yang berlaku.

Perusahaan melakukan peninjauan secara berkala dan memutakhirkan kebijakan yang ada apabila diperlukan serta menyusun kebijakan pendukung lainnya untuk mengakomodir kebutuhan dan perkembangan Perusahaan, peraturan perundang-undangan serta *best practices* penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan tata kelola yang telah dimiliki Perusahaan antara lain:

1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (CG *Code*);
2. Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*);
3. Pedoman Tatalaksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*);
4. Pedoman Tatalaksana Kerja Dewan Komisaris (*Board of Commissioner Manual*);
5. Pedoman Tatalaksana Kerja Direksi (*Board of Director Manual*);
6. Pedoman *Subsidiary Governance* (Tata Kelola Komunikasi APPA);
7. Kebijakan Pengungkapan Informasi (Disclosure Information);
8. *Audit Internal Charter*;
9. *Charter* Komite;
10. Pedoman Kebijakan Perusahaan;
11. Tata Nilai Perusahaan;
12. Pedoman Penerapan *Governance, Risk, Compliance* (GRC);
13. Pedoman terkait Kebijakan Anti Penyuapan;
14. Pedoman terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN);
15. Pedoman terkait benturan kepentingan;
16. Program Pengendalian Gratifikasi;
17. Pedoman penegakan disiplin dan penanganan pelanggaran (*Whistleblowing System*/WBS);

The corporate governance organs in conducting management, control and directing the corporation are required to be equipped with policies and rules (softstructure) that serve as a reference in behaving and carrying out business processes so as to encourage the effectiveness of achieving the Company's objectives. The Company prepares policies as a set of rules that serve as guidelines for the corporate governance organs in supporting the implementation of GCG in accordance with laws and regulations, best practices and the Company's cultural values. The implementation of policies applied by each function in the corporate governance is based on the three main pillars approach, namely Objective, Risk and Control (ORC). Each function is encouraged to be able to manage risks and have control over the organization that covers the entire set of processes within the Company in accordance with business dynamics and applicable regulations.

The Company conducts periodic reviews and updates existing policies if necessary as well as prepares other supporting policies to accommodate the needs and development of the Company, laws and regulations as well as best practices for the implementation of good corporate governance. The governance policies that have been owned by the Company include:

1. Corporate Governance Code (CG Code);
2. Code of Conduct;
3. Board Manual;
4. Board of Commissioners Manual;
5. Board of Directors Manual;
6. Subsidiary Governance Guidelines (APPA Communication Governance);
7. Information Disclosure Policy;
8. Internal Audit Charter;
9. Committee Charter;
10. Company Policy Guidelines;
11. Company's Code of Values;
12. Guidelines for the Implementation of Governance, Risk, Compliance (GRC);
13. Guidelines related to Anti-Bribery Policy;
14. Guidelines related to the State Official Wealth Report (LKHPN);
15. Guidelines related to conflict of interest;
16. Gratification Control Program;
17. Guidelines for discipline enforcement and handling violations (Whistleblowing System/WBS);

18. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pelestarian Lingkungan (K3L);
19. Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
20. Berbagai kebijakan dan prosedur Perusahaan yang senantiasa dilengkapi dan disempurnakan secara terus-menerus serta disesuaikan dengan peraturan/ perundang-undangan yang berlaku dan terbaru.

18. Occupational Health and Safety as well as Environmental Conservation (OHSE) Policy;
19. Goods and Services Procurement Policy; and
20. Various policies and procedures of the Company that is continuously completed and refined as well as adjusted to the latest applicable regulations/legislation.

Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ kepemilikan yang memiliki wewenang tertinggi dalam menentukan keputusan strategis serta hal-hal lain yang tidak diserahkan kepada Dewan Komisaris atau Direksi. Sebagai organ utama tata kelola Perusahaan, Pengambilan keputusan oleh RUPS dapat dilakukan dalam forum pertemuan secara fisik atau melalui surat keputusan yang ditetapkan secara sirkuler. RUPS secara khusus memiliki kewenangan diantaranya mengesahkan perubahan Anggaran Dasar, mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris, menyetujui atau menolak rencana kerja Perusahaan, menetapkan perhitungan alokasi laba perusahaan, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, memberikan persetujuan atas laporan tahunan, dan menunjuk akuntan publik, serta menetapkan jumlah dan jenis kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi.

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the ownership organ that has the highest authority in determining strategic decisions and other matters that are not submitted to the Board of Commissioners or the Board of Directors. As the main organ of corporate governance, decision-making by the GMS can be conducted in a physical meeting forum or through a decree determined circularly. The GMS specifically has the authority to, among others, ratify amendments to the Articles of Association, appoint and dismiss the Board of Directors and Board of Commissioners, approve or reject the Company's work plan, determine the calculation of the Company's profit allocation, evaluate the performance of the Board of Commissioners and Board of Directors, provide approval for the annual report, and appoint a public accountant, as well as determine the amount and type of compensation of the Board of Commissioners and Board of Directors.

Pemegang Saham Utama dan Pengendali
Majority and Controlling Shareholders

Pemegang Saham Perusahaan sebagian besar dimiliki oleh PT PLN (Persero) dengan kepemilikan saham sebesar 99,99 %. Sementara 0,01% kepemilikan saham Perusahaan dimiliki oleh Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero). Komposisi kepemilikan saham tersebut menjadikan PT PLN (Persero) sebagai Pemegang Saham utama dan pengendali Perusahaan. Direktur Utama PT PLN (Persero) merupakan representasi pemegang saham utama dan pengendali. Secara teknis hubungan dengan anak perusahaan berada di bawah Direktur Perencanaan PT PLN (Persero) melalui Divisi Manajemen Portofolio.

Pengambilan keputusan oleh Pemegang Saham sepenuhnya didasarkan pada kepentingan Perusahaan dengan mengedepankan prinsip kewajaran dan kesetaraan serta aspek keberlanjutan. Berdasarkan hal tersebut, Pemegang Saham Pengendali bertanggung jawab untuk:

The Company's shareholders are mostly owned by PT PLN (Persero) with 99.99% share ownership. While 0.01% of the Company's share ownership is owned by the Education and Welfare Foundation of PT PLN (Persero). The composition of share ownership makes PT PLN (Persero) as the major and controlling shareholder of the Company. The President Director of PT PLN (Persero) is the representation of the major and controlling shareholders. Technically, the relationship with subsidiaries is under the Director of Planning of PT PLN (Persero) through the Portfolio Management Division.

Decision making by Shareholders is fully based on the interests of the Company by prioritizing the principles of fairness and equality as well as sustainability aspects. Based on this matter, the Controlling Shareholders are responsible for:

1. Memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan para pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengungkapkan kepada pihak yang berwenang, informasi tentang Pemegang Saham Pengendali sampai dengan Pemegang Saham Pengendali Terakhir (*Ultimate Shareholders*) dalam hal terdapat dugaan terjadi pelanggaran ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau dalam hal diminta oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengupayakan agar akuntabilitas dan hubungan antara perusahaan-perusahaan yang dibawah kendalinya dilakukan secara jelas.

1. Taking into account the interests of minority shareholders and other stakeholders in accordance with the Articles of Association as well as applicable laws and regulations.
2. Disclosing to the authorized parties, information on the Controlling Shareholders up to the Ultimate Shareholders in the event that there are allegations of violations of the provisions of the Articles of Association and/or applicable laws and regulations, or in the event that it is requested by the authorized institution in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.
3. Striving for clear accountability and relationships between companies under its control.

Ketentuan Penyelenggaraan RUPS
Provisions for Holding the GMS

Penyelenggaraan RUPS mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam *Corporate Governance Code* (CG *Code*). Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan merupakan representasi manajerial Grup PLN dalam mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan fungsi pengelolaan dan fungsi pengawasan atas entitas yang bernaung di dalamnya, dimana RUPS Perusahaan terdiri dari RUPS Tahunan serta RUPS Luar Biasa.

RUPS Tahunan diselenggarakan terkait persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) dan Laporan Tahunan Perusahaan. RUPS tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah tahun anggaran berjalan. RUPS tentang Persetujuan Laporan Tahunan diadakan paling lambat dalam bulan Juni atau 6 (enam) bulan setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan.

RUPS Luar Biasa (RUPSLB) diselenggarakan di luar jadwal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, dapat diadakan setiap saat, jika dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham. Direksi wajib menyelenggarakan RUPSLB sesuai permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permintaan RUPS diterima. Dalam hal Direksi tidak menyelenggarakan RUPSLB maka Dewan Komisaris/Pemegang Saham yang menandatangani surat permintaan, berhak untuk memanggil sendiri RUPS atas biaya Perusahaan, setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perusahaan.

The holding of the GMS refers to the Company's Articles of Association and the provisions as described in the Corporate Governance Code (CG Code). The Company's General Meeting of Shareholders is a managerial representation of the PLN Group in being accountable for the entire implementation of the management and supervisory functions of the entities under its umbrella, where the Company's GMS consists of the Annual GMS and Extraordinary GMS.

The Annual GMS is held in relation to the approval of the Company's Annual Budget and Operational Plan (ABOP) and the Company's Annual Report. The GMS on the Approval of the Company's Annual Budget and Operational Plan is held no later than 30 (thirty) days after the current fiscal year. The GMS on the Approval of the Annual Report is held no later than June or 6 (six) months after the closing of the relevant fiscal year.

Extraordinary GMS (EGMS) is held outside the schedule stipulated in the Articles of Association, can be held at any time, if deemed necessary by the Board of Directors and/or Board of Commissioners and/or Shareholders. The Board of Directors must hold the EGMS in accordance with a written request from the Board of Commissioners or Shareholders within a period of no later than 30 (thirty) days from the date the request for the EGMS is received. In the event that the Board of Directors does not hold the EGMS, the Board of Commissioners/Shareholders who sign the request letter, are entitled to summon the EGMS themselves at the Company's expense, after obtaining permission from the Chairman of the District Court whose jurisdiction covers the Company's domicile.

Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dengan mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan tata cara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perusahaan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan. Jangka waktu pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 hari sebelum RUPS. Salin itu, RUPS harus didokumentasikan dalam bentuk risalah RUPS yang memuat sekurang-kurangnya waktu, agenda, peserta, pendapat yang berkembang dalam RUPS dan keputusan RUPS. Risalah RUPS tersebut, wajib ditandatangani oleh ketua RUPS dan paling sedikit 1 (satu) Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Tanda tangan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat dengan Akta Notaris.

The invitation to the GMS is conducted by registered letter by stating the date, time, place and procedure of the meeting along with a notification that the materials to be discussed in the GMS are available at the Company's office from the date of the invitation to the GMS until the date of the GMS. The period of invitation to the GMS is no later than 14 days before the GMS. In addition, the GMS must be documented in the form of GMS minutes containing at least the time, agenda, participants, opinions developed in the GMS and GMS resolutions. The minutes of the GMS must be signed by the chairman of the GMS and at least 1 (one) Shareholder appointed from and by the participants of the GMS. The signature is not required if the minutes of the GMS are made by Notarial Deed.

Penyelenggaraan RUPS Tahun 2022
Holding GMS in 2022

Perusahaan sepanjang tahun 2022, telah melaksanakan RUPS Tahunan tentang Pengesahan RKAP Tahun 2021 tanggal 29 Januari 2022 dan RUPS Tahunan tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 pada tanggal 29 Juni 2022 dengan dihadiri oleh seluruh pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham yang seluruhnya mewakili 6.000.000.000 saham, bertempat di PT PLN (Persero) serta melalui *video conference*. Pelaksanaan RUPS dilaksanakan secara mandiri tanpa menggunakan pihak independen dalam penghitungan suara.

Throughout 2022, the Company has carried out the Annual GMS on the Ratification of the 2021 ABOP on January 29, 2022 and the Annual GMS on the Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statements for the 2021 Financial Year on June 29, 2022, attended by all shareholders and/or proxies/representatives of shareholders representing a total of 6,000,000,000 shares, located at PT PLN (Persero) and via video conference. The implementation of the GMS was carried out independently without using an independent party in the vote count.

Hasil Penyelenggaran RUPS RKAP Tahun 2022
Results of the GMS of 2022 ABOP

Pemanggilan: **Surat No. ZA0007072 tanggal 7 Januari 2022**	**Invitation:** **Letter No. ZA0007072 dated January 7, 2022**
Berita Acara: Dimuat dalam Akta Notaris Nomor 25 tanggal 22 Februari 2022. Berita Acara Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Pembangkitan Jawa-Bali Tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 tanggal 29 Januari 2022.	**Minutes of Meeting:** Contained in Notarial Deed Number 25 dated February 22, 2022. Minutes of the Resolution of the General Meeting of Shareholders of PT Pembangkitan Jawa-Bali Regarding the Ratification of the Company's Annual Budget and Operational Plan (ABOP) for 2022 dated January 29, 2022.
Agenda Rapat 1: Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2022	**Meeting Agenda 1:** Approval and Ratification of the Annual Budget and Operational Plan for the 2022 Financial Year
Keputusan: RUPS Menyetujui dan Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan Tahun 2022 **Tindak Lanjut:** Risalah RUPS RKAP 2022 Nomor 001/RUPS.1/I/2022	**Resolution:** The GMS Approved and Ratified the Company's Annual Budget and Operational Plan for 2022 **Follow-up:** Minutes of the GMS of the 2022 ABOP Number 001/RUPS.1/I/2022
Agenda Rapat 2: Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen/*Key Performance Indicator* tahun 2022	**Meeting Agenda 2:** Approval and Ratification of Management Contract/Key Performance Indicator for 2022
Keputusan: RUPS Menyetujui dan Mengesahkan *Key Performance Indicator* (KPI) Perseroan Tahun 2022 **Tindak Lanjut:** Risalah RUPS RKAP 2022 Nomor 001/RUPS.1/I/2022	**Resolution:** The GMS Approved and Ratified the Company's Key Performance Indicator (KPI) for 2022 **Follow-up:** Minutes of the GMS of the 2022 ABOP Number 001/RUPS.1/I/2022

Hasil Penyelenggaran RUPS Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2021

Results of the GMS on Approval of the Annual Report for the 2021 Financial Year

Pemanggilan: **Surat No. ZA0054072 tanggal 6 Juni 2022**	**Invitatio:** **Letter No. ZA0054072 dated June 6, 2022**
Berita Acara: Akta Notaris Nomor 61 Berita Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2021, tanggal 29 Juni 2022	**Minutes of Meeting:** Notarial Deed Number 61 Minutes of the Annual GMS for the 2021 Financial Year, dated June 29, 2022
Agenda Rapat 1: Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2021 serta Pemberian Pembebasan Tanggung jawab Sepenuhnya (V*olledig Acquit et de Charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas Pengelolaan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021.	**Meeting Agenda 1:** Approval and Ratification of the Company's Annual Report for the 2021 Financial Year, including the Board of Commissioners Supervisory Report for 2021, and the Provision of a Full Responsibility Release (Volledig Acquit et de Charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners for the Management and Supervision that have been carried out during the 2021 Financial Year.
Keputusan: 1. RUPS menyetujui dan menerima Laporan Tahunan mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2021 yang terdiri atas : Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan. 2. RUPS menyetujui dan menerima Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2021. 3. RUPS mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 yang memuat Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian, Laporan Arus Kas Konsolidasian dan Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian beserta penjelasannya, dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC Indonesia) dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana dimaksud dalam laporan No.00488/2.1025/AU.1/02/0241-2/0/III/2022 tanggal 31 Maret 2022. 4. RUPS memberikan pembebasan sepenuhnya (*Volledig Acquit et de Charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan sesuai dengan tanggung jawab dan tindakan dalam bidang masing-masing yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta termuat dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC Indonesia). Pengesahan dan Pembebasan tanggung jawab tersebut tidak melepaskan tanggung jawab hukum terhadap Direksi dan/atau Dewan Komisaris apabila Laporan yang diungkapkan tersebut terbukti melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan/atau ternyata dikemudian hari terbukti adanya tindakan yang menyimpang dan/atau merugikan Perseroan.	**Resolution:** 1. The GMS approved and accepted the Annual Report on the Company's Condition and Operation during the 2021 Financial Year consisting of: Financial Report, Performance Evaluation Report and Compliance Report. 2. The GMS approved and accepted the Report on the Implementation of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners during the 2021 Financial Year. 3. The GMS ratified the Company's Financial Statements for the 2021 Financial Year containing the Consolidated Statements of Financial Position, Consolidated Statements of Comprehensive Income, Consolidated Statements of Cash Flows and Consolidated Statements of Changes in Equity and their explanations, and have been audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partner (PWC Indonesia) with the opinion of "fair in all material respects" as referred to in report No.00488/2.1025/AU.1/02/0241-2/0/III/2022 dated March 31, 2022. 4. The GMS grants full release (Volledig Acquit et de Charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for management and supervision in accordance with the responsibilities and actions in their respective fields that have been carried out during the 2020 Financial Year, as long as these actions do not conflict with applicable laws and regulations and are contained in the Financial Statements that have been audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partner (PWC Indonesia). The ratification and release of responsibility does not release the legal responsibility of the Board of Directors and/or Board of Commissioners if the disclosed Report is proven to violate applicable legal provisions and procedures and/or it turns out that in the future there is evidence of actions that deviate and/or harm the Company.
Tindak Lanjut: Risalah RUPS RKAP 2022 Nomor 001/RUPS.1/I/2022.	**Follow-up:** Minutes of the GMS of the 2022 ABOP Number 001/RUPS.1/I/2022.
Agenda Rapat 2: Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2021.	**Meeting Agenda 2:** Determination of the Use of Net Profit for the 2021 Financial Year.
Keputusan: RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2021. **Tindak Lanjut:** 1. Surat Direktur Utama PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham Mayoritas Perusahaan Nomor 52264/MNJ.01.02/D01000000/2022-R tanggal 8 September 2022 Perihal Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun 2021, Remunerasi 2022 dan Tantiem 2021 Direksi/Dewan Komisaris. 2. Surat Nomor: ZE1153550 tanggal 19 Oktober 2022 perihal Tindak Lanjut Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021.	**Resolution:** The GMS granted Authority to the majority Shareholders to determine the Use of Net Profit for the 2021 Financial Year. **Follow-up:** 1. Letter from the President Director of PT PLN (Persero) as the Company's Majority Shareholder Number 52264/MNJ.01.02/D01000000/2022-R dated September 8, 2022 Regarding the Determination of the Use of 2021 Net Profit, 2022 Remuneration and 2021 Tantiem of the Board of Directors/Board of Commissioners. 2. Letter Number: ZE1153550 dated October 19, 2022 regarding Follow-up on the Determination of the Use of the Company's Net Profit for the 2021 Financial Year.

Agenda Rapat 3: Penetapan Tantiem Tahun Buku 2021 dan Remunerasi Tahun Buku 2022 bagi Direksi dan Komisaris, serta Bonus bagi Karyawan Tahun Buku 2021.	**Meeting Agenda 3:** Determination of Tantiem for the 2021 Financial Year and Remuneration for the 2022 Financial Year for the Board of Directors and Commissioners, and Bonus for Employees for the 2021 Financial Year.
Keputusan: RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Tantiem Tahun Buku 2021 dan Remunerasi Tahun Buku 2022 bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta Bonus bagi Karyawan untuk Tahun Buku 2021. **Tindak Lanjut:** 1. Surat Direktur Utama PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham Mayoritas Perusahaan Nomor 52264/MNJ.01.02/D01000000/2022-R tanggal 8 September 2022 Perihal Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun 2021, Remunerasi 2022 dan Tantiem 2021 Direksi/Dewan Komisaris. 2. Surat Direktur SDM PT PLN Nomor 41153/SDM.06.01/D01050000/2022-R Tanggal 21 Juli 2022 perihal Pembayaran Penghasilan Non-Rutin Periode Bulan Juli Tahun 2022.	**Resolution:** The GMS granted Authority to the majority Shareholders to determine Tantiem for the 2021 Financial Year and Remuneration for the 2022 Financial Year for the Board of Directors and Board of Commissioners as well as Bonus for Employees for the 2021 Financial Year. **Follow-up:** 1. Letter from the President Director of PT PLN (Persero) as the Company's Majority Shareholder Number 52264/MNJ.01.02/D01000000/2022-R dated September 8, 2022 Regarding the Determination of the Use of 2021 Net Profit, 2022 Remuneration and 2021 Tantiem of the Board of Directors/Board of Commissioners. 2. Letter from the Director of Human Resources of PT PLN Number 41153/SDM.06.01/D01050000/2022-R dated July 21, 2022 regarding Payment of Non-Routine Income for the Period of July, 2022.
Agenda Rapat 4: Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Perseroan Tahun Buku 2022.	**Meeting Agenda 4:** Determination of the Public Accountant Firm to Audit the Company's Report for the 2022 Financial Year.
Keputusan: RUPS memberi kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan untuk Tahun Buku 2022. **Tindak Lanjut:** Surat EVP Akuntansi PT PLN (Persero) Nomor 46372/KEU.02.04/D01060400/2022 Tanggal 12 Agustus 2022 Perihal Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Tahun 2022.	**Resolution:** The GMS granted authority to the majority Shareholders to determine the Appointment of a Public Accounting Firm as the auditor that will audit the Company's Financial Statements, Performance Evaluation Report and Compliance Report for the 2022 Financial Year. **Follow-up:** Letter of EVP of Accounting of PT PLN (Persero) Number 46372/KEU.02.04/D01060400/2022 Dated August 12, 2022 Regarding the Implementation of Audit for the 2022 Financial Statements.

RUPS Tahunan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya baik secara kolegial maupun individu. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 adalah sebagai berikut:

The Annual GMS was attended by all members of the Board of Commissioners and Board of Directors to account for the implementation of their duties both collegially and individually. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors who attended the Approval of the Annual Report for the 2021 Financial Year are as follows:

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS

Attendance of the Board of Commissioners and Board of Directors in the GMS

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Dedeng Hidayat	Gong Matua Hasibuan
Komang Parmita	Yossy Noval
Jisman P Hutajulu	Rachmanoe Indarto
Hendra Iswahyudi	Iwan Purwana
Bagus Puruhito	R. Rawan Insani
	Karyawan Aji

Catatan:
Emir Kresna (Dewan Komisaris) berhalangan hadir dan telah dikuasakan kepada komisaris utama PLN NP

Notes:
Emir Kresna (Board of Commissioners) was unable to attend and has been authorized by PLN NP's president commissioner.

Pemegang Saham menerbitkan beberapa keputusan secara sirkuler terkait hal-hal yang memerlukan persetujuan Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Keputusan Pemegang Saham secara sirkuler sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

The Shareholders issued several circular decisions related to matters requiring Shareholders' approval in accordance with the provisions of the Articles of Association. Circular decisions of Shareholders throughout 2022 are as follows:

Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler Tahun 2022

Circular Shareholder Decision in 2022

No.	Tanggal Date	Perihal Subject		Status Realisasi Realization Status
1	14 April 2022 April 14, 2022	Persetujuan Turut Serta dalam Program Konversi PLTD ke Pembangkit Berbasis EBT melalui Skema *Mandatory Partner*.	Approval of Participation in the DEPP Conversion Program to NRE-based Power Plant through the Mandatory Partner Scheme.	Telah direalisasikan Has been realized
2	11 Mei 2022 May 11, 2022	Persetujuan Pemberian Tambahan Modal Disetor PT Pembangkitan Jawa Bali pada PT Rekadaya Elektrika dan Penggabungan PT Prima Power Nusantara ke Dalam PT Rekadaya Elektrika.	Approval of the Provision of Additional Paid-up Capital of PT Pembangkitan Jawa Bali to PT Rekadaya Elektrika and the Merger of PT Prima Power Nusantara into PT Rekadaya Elektrika.	Telah direalisasikan Has been realized
3	8 Juli 2022 July 8, 2022	Persetujuan usulan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan.	Approval of the proposal of Members of Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries.	Telah direalisasikan Has been realized
4	21 September 2022 September 21, 2022	Persetujuan *Re-branding* dan Perubahan Logo, Struktur Organisasi dan Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan.	Approval of Re-branding and Logo Changes, Organizational Structure and Appointment of Members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.	Telah direalisasikan Has been realized
5	21 Oktober 2022 October 21, 2022	Persetujuan Penetapan Penghasilan Tahun 2022 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan.	Approval of the Determination of Income in 2022 for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.	Telah direalisasikan Has been realized
6	16 November 2022 November 16, 2022	Persetujuan Penugasan Relokasi dan O&M PLTG Jakabaring 3x17 MW dan PLTG Batanghari 2x30 MW dalam rangka pemenuhan PJBTL PLN – ANTAM.	Approval of the Assignment of Relocation and O&M of 3x17 MW Jakabaring GTPP and 2x30 MW Batanghari GTPP in order to fulfill PJBTL PLN - ANTAM.	Telah direalisasikan Has been realized
7	14 Desember 2022 December 14, 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan.	Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Company.	Telah direalisasikan Has been realized
8	28 Desember 2022 December 28, 2022	Persetujuan Penugasan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Listrik Surya (PLTS) Terapung Sutami/Karang Kates.	Approval of Assignment of Development of Sutami/Karang Kates Floating Solar Power Plant (SPP).	Telah direalisasikan Has been realized
9	30 Desember 2022 December 30, 2022	Tindak Lanjut Pembentukan *Holding* dan *Subholding* PLN Masa/Tahap *Legal End-Stat.*	Follow-up on the Establishment of PLN Holding and Subholding in Legal End-State Period/Stage.	Telah direalisasikan Has been realized

Perusahaan telah menindaklanjuti seluruh Keputusan serta arahan Pemegang Saham tahun buku 2022, baik yang diberikan melalui keputusan RUPS RKAP, RUPS Persetujuan Laporan Tahunan maupun Keputusan Pemegang Saham secara sirkuler.

The Company has followed-up on all Decisions and directions of the Shareholders for the 2022 fiscal year, both those provided through the GMS resolution of the ABOP, GMS Approval of the Annual Report and circular Shareholder Decisions.

Realisasi Keputusan Pemegang Saham Tahun 2021
Realization of Shareholder Decisions in 2021

Perusahaan telah menindaklanjuti seluruh Keputusan serta arahan Pemegang Saham tahun buku 2021, diantaranya terkait pengelolaan dan rencana pengembangan Perusahaan sepanjang tahun 2021. Keputusan tersebut diberikan baik melalui keputusan RUPS RKAP, RUPS Persetujuan Laporan Tahunan maupun Keputusan Pemegang Saham secara sirkuler. Tidak terdapat Keputusan Pemegang Saham tahun buku 2021 yang direalisasikan pada tahun 2022.

The Company has followed-up on all Decisions and directions of the Shareholders for the 2021 financial year, including those related to the management and development plans of the Company throughout 2021. The decisions were made either through the GMS resolution of the ABOP, GMS Approval of the Annual Report or circular Shareholder Decisions. There are no Shareholder Decisions for the 2021 financial year that were realized in 2022.

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Perusahaan memastikan bahwa pengambilan keputusan yang berdampak strategis bagi kinerja, kredibilitas dan keberlangsungan Perusahaan telah melalui mekanisme *check and balances*. Hal tersebut tidak terlepas dari peran Dewan Komisaris sebagai organ yang diberi amanat untuk menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi sehingga mampu menciptakan nilai yang berkelanjutan untuk kepentingan terbaik jangka panjang Perusahaan dan pemegang saham, dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan. Dewan Komisaris merupakan majelis, dimana kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

The Company ensures that decision-making that has a strategic impact on the performance, credibility and sustainability of the Company has gone through a check and balances mechanism. This is inseparable from the role of the Board of Commissioners as an organ mandated to carry out supervisory functions and provide advice to the Board of Directors so as to be able to create sustainable value for the long-term best interests of the Company and its shareholders, by taking into account the interests of stakeholders. The Board of Commissioners is an assembly, where the position of each member of the Board of Commissioners including the President Commissioner is equal. Each member of the Board of Commissioners cannot act individually, but based on the decision of the Board of Commissioners.

Susunan Dewan Komisaris
Composition of the Board of Commissioners

Dewan Komisaris berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari 2 orang Komisaris Independen dan 4 orang Komisaris. Sebagai organ pengawasan, Susunan Dewan Komisaris ditetapkan oleh Pemegang Saham melalui keputusan RUPS. Anggota Dewan Komisaris yang menjabat telah melalui proses penjaringan dan seleksi serta dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham. Susunan Dewan Komisaris Perusahaan periode Januari sampai dengan Desember 2022 adalah sebagai berikut:

The Board of Commissioners consists of 6 (six) people, consisting of 2 Independent Commissioners and 4 Commissioners. As a supervisory organ, the Composition of the Board of Commissioners is determined by the Shareholders through a GMS resolution. Members of the Board of Commissioners who served have gone through the screening and selection process as well as passed the fit and proper test by PT PLN (Persero) as the Shareholder. The composition of the Company's Board of Commissioners for the period January to December 2022 is as follows:

Susunan Dewan Komisaris Tahun 2022

Composition of the Board of Commissioners in 2022

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	
Dedeng Hidayat[1]	Komisaris Utama President Commissioner	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PJB Tanggal 21 Oktober 2021.	Circular GMS Resolution on the Dismissal and Appointment of PT PLN NP Board of Commissioners Members Dated October 21, 2021.
Evy Haryadi[1]	Komisaris Utama President Commissioner	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PJB Tanggal 21 September 2022.	Circular GMS Resolution on the Dismissal and Appointment of PT PLN NP Board of Commissioners Members Dated September 21, 2022.
Bagus Puruhito	Komisaris (Independen) Commissioner (Independent)	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PJB Tanggal 30 Desember 2021.	Circular GMS Resolution on the Appointment of PT PLN NP Board of Commissioners Members Dated December 30, 2021.
Emir Kresna Wardana	Komisaris (Independen) Commissioner (Independent)	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PJB Tanggal 30 Desember 2021.	Circular GMS Resolution on the Appointment of PT PLN NP Board of Commissioners Members Dated December 30, 2021.
Jisman P. Hutajulu	Komisaris Commissioner	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PJB Tanggal 11 Maret 2019 jo. Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PJB Tanggal 12 November 2020.	Circular GMS Resolution on the Dismissal and Appointment of PT PLN NP Board of Commissioners Members Dated March 11, 2019. Circular GMS Resolution on the Dismissal and Appointment of PT PLN NP Board of Commissioners Members Dated November 12, 2020.
Komang Parmita[2]	Komisaris Commissioner	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris PT PJB Tanggal 23 April 2021.	Circular GMS Resolution on the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of PT PJB Dated April 23, 2021.
Hendra Iswahyudi	Komisaris Commissioner	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PJB Tanggal 19 Desember 2017 jo. Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PJB Tanggal 12 November 2020.	Circular GMS Resolution on the Dismissal and Appointment of PT PLN NP Board of Commissioners Members Dated December 19, 2017. Circular GMS Resolution on the Dismissal and Appointment of PT PLN NP Board of Commissioners Members Dated November 12, 2020.
Kenedy[2]	Komisaris Commissioner	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PJB tanggal 14 Desember 2022.	Circular GMS Resolution on the Dismissal and Appointment of PT PLN NP Board of Commissioners Members Dated December 14, 2022.

Keterangan:

1. RUPS Sirkuler tanggal 21 September 2022, memberhentikan dengan hormat Sdr. Dedeng Hidayat sebagai Komisaris Utama serta mengangkat dan menetapkan Sdr. Evy Haryadi sebagai Komisaris Utama.
2. RUPS Sirkuler tanggal 14 Desember 2022, memberhentikan dengan hormat Sdr. Komang Parmita sebagai Komisaris serta mengangkat dan menetapkan Sdr. Kenedy sebagai Komisaris.

Description:

1. Circular GMS dated September 21, 2022, respectfully dismissed Mr. Dedeng Hidayat as the President Commissioner as well as appointed and determined Mr. Evy Haryadi as the President Commissioner.
2. Circular GMS dated December 14, 2022, respectfully dismissed Mr. Komang Parmita as Commissioner as well as appointed and determined Mr. Kenedy as the Commissioner.

Komposisi Komisaris Independen

Composition of Independent Commissioners

Penetapan Komisaris Independen mengacu pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tanggal 1 Agustus 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 Tanggal 6 Juli 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN. Kriteria Komisaris Independen sebagaimana dijelaskan dalam Tata Laksana Kerja Direksi-Dewan Komisaris (*Board Manual*) sebagai berikut:

1. Berasal dari luar Perusahaan;
2. Tidak memiliki saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;
3. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan, Komisaris, Direktur atau Pemegang Saham Utama Perusahaan;
4. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham dan memenuhi kriteria Komisaris Independen, namun tidak definitif dinyatakan sebagai Komisaris Independen berjumlah 3 (tiga) orang komisaris atau 50% dari 6 (enam) orang anggota Dewan Komisaris per 31 Desember 2022 yaitu Sdr. Emir Kresna Wardana, Sdr. Bagus Puruhito, dan Sdr. Kenedy.

Determination of Independent Commissioners refers to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Regulation of the Minister of SOEs No. PER-01/MBU/2011 Dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs as last amended through Regulation of the Minister of SOEs No. PER-09/MBU/2012 Dated July 6, 2012 concerning Amendments to Regulation of the Minister of SOEs No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs. The criteria for Independent Commissioners as described in the Work Procedures of the Board of Directors-Board of Commissioners (Board Manual) are as follows:

1. Comes from outside the Company;
2. Does not have direct or indirect shares in the Company;
3. Does not have any affiliation with the Company, Commissioners, Directors or Major Shareholders of the Company;
4. Does not have a direct or indirect business relationship related to the Company's business activities.

Members of the Board of Commissioners who are not affiliated with shareholders and meet the criteria for Independent Commissioners, but are not definitively declared as Independent Commissioners, are 3 (three) commissioners or 50% of the 6 (six) members of the Board of Commissioners as of December 31, 2022, namely Mr. Emir Kresna Wardana and Mr. Bagus Puruhito and Mr. Kenedy.

Pernyataan Independensi dan Potensi Benturan Kepentingan

Declaration of Independence and Potential Conflict of Interests

Anggota Dewan Komisaris Perusahaan secara berkala membuat Pakta Integritas dan menyampaikan kepada Perusahaan terkait kepemilikan saham pribadi dan keluarga di Perusahaan dan perusahaan lainnya. Setiap Anggota Dewan Komisaris Perusahaan telah menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk pernyataan untuk bersikap independen dan bebas benturan kepentingan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dengan menyebutkan bahwa:

1. Tidak memiliki benturan kepentingan dan/atau terlibat dalam transaksi yang memiliki benturan kepentingan dengan PT Pembangkitan Jawa Bali dan/atau anak perusahaannya yang terkonsolidasi dan terafiliasi;
2. Tidak memangku jabatan rangkap dalam jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang merugikan perusahaan dan dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PJB;

Members of the Company's Board of Commissioners periodically make an Integrity Pact and submit to the Company related to personal and family share ownership in the Company and other companies. Each Member of the Company's Board of Commissioners has signed an Integrity Pact as a form of statement to act independently and free of conflict of interest in carrying out their functions and duties by stating that:

1. Does not have a conflict of interest and/or is involved in transactions that have a conflict of interest with PT Pembangkitan Jawa Bali and/or its consolidated and affiliated subsidiaries;
2. Does not hold concurrent positions in other positions that may cause conflicts of interest that are detrimental to the Company and are prohibited in the laws and regulations applicable to PLN NP;

3. Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda dengan anggota Direksi lainnya maupun dengan anggota Dewan Komisaris PJB.

3. Does not have a blood family relationship up to the second degree, either in a straight line or sideways line or a marital relationship with other members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners of PLN NP.

Penandatanganan Pakta Integritas Dewan Komisaris
Signing of the Integrity Pact of the Board of Commissioners

Nama Name	Tanggal Penandatanganan Date of Signing
Dedeng Hidayat[1]	16 Agustus 2022 August 16, 2022
Evy Haryadi[1]	6 November 2022 November 6, 2022
Bagus Puruhito	15 Agustus 2022 August 15, 2022
Emir Kresna Wardana	15 Agustus 2022 August 15, 2022
Jisman P. Hutajulu	29 Agustus 2022 August 29, 2022
Komang Parmita[2]	15 Agustus 2022 August 15, 2022
Hendra Iswahyudi	15 Agustus 2022 August 15, 2022
Kenedy[2]	-

Keterangan:
1. RUPS Sirkuler tanggal 21 September 2022, memberhentikan dengan hormat Sdr. Dedeng Hidayat sebagai Komisaris Utama serta mengangkat dan menetapkan Sdr. Evy Haryadi sebagai Komisaris Utama.
2. RUPS Sirkuler tanggal 14 Desember 2022, memberhentikan dengan hormat Sdr. Komang Parmita sebagai Komisaris serta mengangkat dan menetapkan Sdr. Kenedy sebagai Komisaris.

Description:
1. Circular GMS dated September 21, 2022, respectfully dismissed Mr. Dedeng Hidayat as the President Commissioner as well as appointed and determined Mr. Evy Haryadi as the President Commissioner.
2. Circular GMS dated December 14, 2022, respectfully dismissed Mr. Komang Parmita as Commissioner as well as appointed and determined Mr. Kenedy as Commissioner.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris
Board of Commissioners Manual

Dewan Komisaris telah menetapkan pedoman kerja yang mengacu pada Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman kerja Dewan Komisaris ditetapkan oleh Komisaris Utama pada tanggal 12 Desember 2011 dalam bentuk Piagam Kerja Dewan Komisaris. Piagam Kerja Dewan Komisaris kemudian dimutakhirkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 011.K/DK/PJB/2014 tanggal 22 Desember 2014 menjadi pedoman kerja yang saat ini dikenal dengan Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris atau *Board of Commissioner Manual* (BoC *Manual*). Muatan BoC *Manual* merupakan penjabaran lebih lanjut dari *Board Manual* yang bersifat teknis dari pelaksanaan kerja organ Dewan Komisaris. *Board Manual* disusun pada tahun 2010 dan terakhir kali dimutakhirkan serta ditetapkan melalui kesepakatan bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 25 November 2014. Dewan Komisaris secara berkala melakukan review terhadap pedoman kerja Dewan Komisaris dan jika dipandang perlu, dilakukan pemutakhiran sesuai kebutuhan Dewan Komisaris dan perkembangan Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Board of Commissioners determined work guidelines that refer to the Articles of Association as well as the prevailing laws and regulations. The Board of Commissioners work guidelines were determined by the President Commissioner on December 12, 2011 in the form of the Board of Commissioners Work Charter. The Board of Commissioners Work Charter was then updated based on the Board of Commissioners Decree No. 011.K/DK/PJB/2014 dated December 22, 2014 into a work guideline which is currently known as the Board of Commissioners Work Procedure or Board of Commissioners Manual (BoC Manual). The content of the BoC Manual is a further elaboration of the Board Manual which is technical in nature from the implementation of work of the Board of Commissioners organ. The Board Manual was prepared in 2010 and was last updated and stipulated through a joint agreement between the Board of Directors and the Board of Commissioners on November 25, 2014. The Board of Commissioners periodically reviews the Board of Commissioners' manual and if deemed necessary, updates are made according to the needs of the Board of Commissioners and the development of the Company as well as applicable laws and regulations.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

Dewan Komisaris menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan diuraikan lebih jelas dalam *Board Manual* serta BoC *Manual*. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat yang dijalankan Dewan Komisaris bertujuan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Direksi sesuai dengan tujuan Perusahaan dan arahan Pemegang Saham. Pengambilan keputusan Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris, sehingga tidak meniadakan wewenang dan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan operasional kecuali hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Komisaris Perusahaan meliputi:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan.
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.
3. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP.
4. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan.
5. Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan.
6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.
7. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan apabila diminta.
8. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
9. Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan tersebut dan Perusahaan lain.
10. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang barulampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
11. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

The Board of Commissioners carries out its duties and responsibilities as stipulated in the Articles of Association and described more clearly in the Board Manual and BoC Manual. The supervisory and advisory functions carried out by the Board of Commissioners aim to ensure the effectiveness of the implementation of policies and decision-making processes conducted by the Board of Directors in accordance with the Company's objectives and the direction of the Shareholders. Decision-making by the Board of Commissioners is part of the Board of Commissioners' supervisory duties, so it does not negate the authority and responsibility of the Board of Directors for the implementation of management. The Board of Commissioners is not involved in decision-making related to operational activities except for other matters stipulated in the Articles of Association and applicable laws and regulations. The main duties and responsibilities of the Company's Board of Commissioners include:

1. Providing advice to the Board of Directors in carrying out the Company management.
2. Examining, reviewing and signing the Company's Long Term Plan and the Company's Annual Budget and Operational Plan prepared by the Board of Directors, according to the provisions of these Articles of Association.
3. Providing opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the Company's Long-Term Plan and the Company's Annual Budget and Operational Plan regarding the reasons for the Board of Commissioners to sign the RJPP and ABOP.
4. Following the development of the Company's activities, providing opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding any issues deemed important for the management of the Company.
5. Reporting immediately to the General Meeting of Shareholders if there are symptoms of declining Company performance.
6. Examining and reviewing periodic reports and annual reports prepared by the Board of Directors and signing the annual report.
7. Providing explanations, opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the Annual Report if requested.
8. Making minutes of the Board of Commissioners meeting and keeping a copy.
9. Reporting to the Company regarding his/her and/or his/her family's share ownership in the Company and other companies.
10. Providing a report on the supervisory duties that have been conducted during the past fiscal year to the General Meeting of Shareholders.
11. Carrying out other obligations in the context of supervisory and advisory duties, as long as it does not conflict with laws and regulations, articles of association, and/or resolutions of the General Meeting of Shareholders.

Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisaris

Duties Division of the Board of Commissioners Members

Pada prinsipnya Dewan Komisaris sebagai majelis melaksanakan fungsi pengawasan secara kolegial dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri mewakili Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan menyangkut fungsi pengawasan. Sebagai upaya mendorong efektivitas fungsi pengawasan, Dewan Komisaris menetapkan masing-masing anggota Dewan komisaris untuk secara khusus melakukan pengawasan atas pengelolaan Perusahaan pada bidang-bidang tertentu.

In principle, the Board of Commissioners as a panel carries out the supervisory function collegially and cannot act individually representing the Board of Commissioners in making decisions regarding the supervisory function. In an effort to encourage the effectiveness of the supervisory function, the Board of Commissioners determines each member of the Board of Commissioners to specifically supervise the management of the Company in certain sectors.

Pembagian Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Division of Supervisory Duties of the Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Tugas Pengawasan Supervisory Duty	
Dedeng Hidayat[1]	Komisaris Utama President Commissioner	1. Koordinator atas semua tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.	1. Coordinator of all duties and obligations of the Board of Commissioners.
Evy Haryadi[1]	Komisaris Utama President Commissioner	1. Koordinator atas semua tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.	1. Coordinator of all duties and obligations of the Board of Commissioners.
Jisman P. Hutajulu	Komisaris Commissioner	1. Pengawasan dalam bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan. 2. Pengawasan bidang investasi dan pengembangan usaha.	1. Supervision in the Risk Management and Compliance sector. 2. Supervision in the investment and business development sector.
Hendra Iswahyudi	Komisaris Commissioner	1. Pengawasan dalam bidang SDM dan Organisasi. 2. Pengawasan dalam kinerja dan K3L.	1. Supervision in the HR and Organization sector. 2. Supervision in performance and OHSE.
Komang Parmita[2]	Komisaris Commissioner	1. Pengawasan dalam bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan. 2. Pengawasan dalam bidang Kesehatan, Keselamatan Kerja (K3). 3. Pengawasan dalam bidang Kesehatan dan Keselamatan Peralatan Pembangkit.	1. Supervision in the Risk Management and Compliance sector. 2. Supervision in the Occupational Health and Safety (OHS) sector. 3. Supervision in the Power Plant Equipment Health and Safety sector.
Bagus Puruhito	Komisaris (Independen) Commissioner (Independent)	1. Pengawasan dalam bidang Operasi dan Pemeliharaan. 2. Pengawasan dalam bidang Kesehatan, Keselamatan Kerja (K3). 3. Pengawasan dalam bidang SDM dan Organisasi.	1. Supervision in the Operation and Maintenance sector. 2. Supervision in the Occupational Health and Safety (OHS) sector. 3. Supervision in the Human Resources and Organization sector.
Emir Kresna Wardana	Komisaris (Independen) Commissioner (Independent)	1. Pengawasan bidang investasi dan pengembangan usaha. 2. Pengawasan dalam bidang Teknologi Informasi. 3. Pengawasan dalam bidang *Stakeholder Management*.	1. Supervision in the investment and business development sector. 2. Supervision in the Information Technology sector. 3. Supervision in the Stakeholder Management sector.
Kenedy[2]	Komisaris Commissioner	1. Pengawasan dalam bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan. 2. Pengawasan dalam bidang Kesehatan, Keselamatan Kerja (K3). 3. Pengawasan dalam bidang Kesehatan dan Keselamatan Peralatan Pembangkit.	1. Supervision in the Risk Management and Compliance sector. 2. Supervision in the Occupational Health and Safety (OHS) sector. 3. Supervision in the Power Plant Equipment Health and Safety sector.

Keterangan:
1. RUPS Sirkuler tanggal 21 September 2022, memberhentikan dengan hormat Sdr. Dedeng Hidayat sebagai Komisaris Utama serta mengangkat dan menetapkan Sdr. Evy Haryadi sebagai Komisaris Utama.
2. RUPS Sirkuler tanggal 14 Desember 2022, memberhentikan dengan hormat Sdr. Komang Parmita sebagai Komisaris serta mengangkat dan menetapkan Sdr. Kenedy sebagai Komisaris.

Description:
1. Circular GMS dated September 21, 2022, respectfully dismissed Mr. Dedeng Hidayat as the President Commissioner as well as appointed and determined Mr. Evy Haryadi as the President Commissioner.
2. Circular GMS dated December 14, 2022, respectfully dismissed Mr. Komang Parmita as Commissioner as well as appointed and determined Mr. Kenedy as Commissioner.

Dewan Komisaris menempatkan anggota Dewan Komisaris sebagai ketua dan wakil ketua pada komite di bawah organ Dewan Komisaris yang telah dibentuk dengan mempertimbangkan pengalaman, kompetensi dan keahlian sesuai dengan fungsi masing-masing komite tersebut. Susunan anggota Dewan Komisaris yang ditugaskan pada komite di bawah organ Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

The Board of Commissioners assigns the Board of Commissioners members as chairman and vice chairman to the committees under the Board of Commissioners organ that have been established by considering experience, competence and expertise in accordance with the functions of each committee. The composition of members of the Board of Commissioners assigned to committees under the Board of Commissioners organ is as follows:

Susunan Anggota Dewan Komisaris pada Komite Dewan Komisaris
Composition of the Board of Commissioners Members on the Board of Commissioners Committees

Komite Committee	Ketua Chairman
Komite Audit Audit Committee	Hendra Iswahyudi
Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan Risk Management and Compliance Committee	Komang Parmita
Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee	Jisman P. Hutajulu

Sehubungan dengan adanya perubahan komposisi Dewan Komisaris maka, Susunan anggota Dewan Komisaris yang ditugaskan pada komite di bawah organ Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

In connection with the changes in the composition of the Board of Commissioners, the composition of the Board of Commissioners members assigned to committees under the Board of Commissioners organ is as follows:

Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris pada Komite Dewan Komisaris
Changes in the Composition of the Board of Commissioners Members on the Board of Commissioners Committees

Komite Committee	Ketua Chairman	Wakil Ketua Vice Chairman
Komite Audit Audit Committee	Hendra Iswahyudi	-
Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan Risk Management and Compliance Committee	Jisman P. Hutajulu	Emir Kresna Wardana
Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee	Komang Parmita	Bagus Puruhito

Pelaksanaan Fungsi Dewan Komisaris

Implementation of the Board of Commissioners Functions

Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat atas kegiatan pengelolaan Perusahaan mencakup aspek operasional dan keuangan serta aspek lainnya yang terkait dengan kelangsungan bisnis Perusahaan. Pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris sepanjang tahun 2022 secara garis besar meliputi:

1. Aspek Korporat
   a. Berperan sesuai fungsinya pada persiapan dan penyelenggaraan RUPS tahunan yakni RUPS Persetujuan RKAP dan RUPS Pertanggungjawaban Tahunan (LPT).
   b. Memberikan laporan pelaksanaan pengawasan tahun 2022 yang dilaporkan kepada Pemegang Saham.
   c. Arahan dalam penyusunan RJPP dan RKAP 2022.
   d. Monitoring pelaksanaan RJPP dan RKAP serta kebutuhan revisinya.
   e. Penasehatan dalam penyusunan Tata Kelola Niaga, Risiko Korporat, Risiko Bisnis, Kepatuhan, Agenda Korporat dan lain-lain.
   f. Pembaharuan Pedoman Manajemen Risiko sesuai dengan ISO 31000:2018.
   g. Pembaharuan Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*).

2. Niaga dan Operasi - Pemeliharaan
   a. Produksi/penjualan KWh dan pengendalian Biaya Pokok Produksi.
   b. Analisa market share Perusahaan di Sistem Kelistrikan Jawa Bali.
   c. *Energy mix dan security of supply* energi primer.
   d. Program dan realisasi pemeliharaan unit pembangkit.
   e. Bisnis O&M baik yang dilaksanakan oleh Perusahaan maupun Anak Perusahaan.
   f. Bisnis lain di luar O&M ketenagalistrikan dengan kompetensi unggul yang dimiliki.
   g. Aspek K3L atas seluruh unit pembangkit untuk menjaga *Zero Accident* dan tingkat PROPER.

3. Pengembangan Usaha dan Pembinaan Anak Perusahaan
   a. Arahan dalam menindaklanjuti penugasan yang diterima dari Pemegang Saham, termasuk dalam penyiapan SDM dan sumber daya lainnya.
   b. Evaluasi dan rekomendasi atas pelaksanaan program kemitraan IPP termasuk pemilihan partner/mitra bisnis.

The Board of Commissioners has carried out its duties and responsibilities to supervise and provide advice on the Company's management activities including operational and financial aspects as well as other aspects related to the Company's business continuity. The implementation of the Board of Commissioners' functions throughout 2022 broadly includes:

1. Corporate Aspect
   a. Playing a role in accordance with its function in the preparation and organization of the annual GMS, namely the GMS for the ABOP Approval and the Annual Accountability GMS (LPT).
   b. Providing a report on the implementation of supervision in 2022 which was reported to the Shareholders.
   c. Direction in the preparation of the 2022 RJPP and ABOP.
   d. Monitoring the implementation of RJPP and ABOP as well as the need for revision.
   e. Advising in the preparation of Commercial Governance, Corporate Risk, Business Risk, Compliance, Corporate Agenda and others.
   f. Updating the Risk Management Guidelines in accordance with ISO 31000:2018.
   g. Updating of the Board of Commissioners and Board of Directors Work Procedures (Board Manual).

2. Commerce and Operation - Maintenance
   a. Production/sale of KWh and control of Cost of Production.
   b. Analysis of the Company's market share in the Java Bali Electricity System.
   c. Energy mix and security of primary energy supply.
   d. Program and realization of power plant unit maintenance.
   e. O&M business both implemented by the Company and its subsidiaries.
   f. Other businesses outside of electricity O&M with superior competencies.
   g. OHSE aspects of all power plant units to maintain Zero Accident and PROPER level.

3. Business Development and Subsidiary Development
   a. Direction in following-up on assignments received from Shareholders, including in the preparation of human resources and other resources.
   b. Evaluation and recommendations on the implementation of the IPP partnership program including the selection of partners/business partners.

c. Evaluasi atas pembentukan Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi dan setoran sahamnya.
d. Pengawasan dan penasehatan atas kemajuan seluruh proyek penugasan.
e. Mendorong dan mendampingi Direksi dan Manajemen dalam pengembangan usaha di bidang energi baru terbarukan.

4. SDM dan Organisasi
   a. Pemilihan Direksi & Komisaris pada Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi.
   b. Penyusunan organisasi dan pembagian tugas.
   c. Evaluasi dan analisa atas Efektivitas Organisasi.
   d. Review atas proses bisnis seluruh fungsi dengan mengacu pada standar APQC (*American Productivity Quality Center*) dan keselarasannya dengan teknologi informasi melalui penyusunan *Enterprise Architecture.*
   e. Review atas kebijakan aspek K3L (Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Lingkungan).
   f. *Review Talent Mobility* untuk memastikan adaptasi lebih cepat terhadap perubahan transformasi dengan cara menyebarkan dan memindahkan kompetensi utama Talent lintas proyek atau lintas bisnis saat diperlukan.

5. Audit
   a. *Review* rencana kerja SPI serta pelaksanaannya, termasuk evaluasi temuan-temuan penting.
   b. Memantau pelaksanaan *Risk Based Audit* dan memberikan arahan dalam pelaksanaan *Three Line of Defences.*
   c. Memantau kebijakan dan pelaksanaan ICOFR (*Internal Control Over Financial Report*).
   d. Evaluasi hasil audit eksternal (KAP dan auditor eksternal lainnya).
   e. *Monitoring* tindak lanjut keputusan dan arahan RUPS.
   f. *Monitoring* pelaksanaan *Whistle Blowing System* (WBS) serta revisi terhadap pedomannya.
   g. Memberikan masukan mengenai pengkinian Piagam Audit Intern SPI Perusahaan.

c. Evaluation of the establishment of Subsidiaries and Affiliated Companies and their share deposits.
d. Monitoring and advising on the progress of all assignment projects.
e. Encouraging and assisting the Board of Directors and Management in business development in the new and renewable energy sector.

4. HR and Organization
   a. Election of the Board of Directors & Commissioners of Subsidiaries and Affiliated Companies.
   b. Preparation of organization and division of duties.
   c. Evaluation and analysis of Organizational Effectiveness.
   d. Review of business processes of all functions by referring to APQC (American Productivity Quality Center) standards and their alignment with information technology through the preparation of Enterprise Architecture.
   e. Review of the OHSE (Occupational Health and Safety and Environment) aspect policy.
   f. Review of Talent Mobility to ensure faster adaptation to transformation changes by spreading and moving Talent's key competencies across projects or across businesses when needed.

5. Audit
   a. Reviewing the IAU work plan and its implementation, including evaluation of important findings.
   b. Monitoring the implementation of Risk Based Audit and providing direction in the implementation of Three Line of Defenses.
   c. Monitoring the policy and implementation of ICOFR (Internal Control Over Financial Report).
   d. Evaluation of external audit results (PAF and other external auditors).
   e. Monitoring the follow-up of GMS resolutions and directives.
   f. Monitoring the implementation of the Whistle Blowing System (WBS) and revision of its guidelines.
   g. Providing input regarding the updating of the Internal Audit Charter of the Company's IAU.

Kunjungan Kerja Dewan Komisaris

Work Visit by the Board of Commissioners

Dewan Komisaris secara rutin melakukan kunjungan ke Unit Pembangkit maupun Anak Perusahaan guna mendapat informasi secara langsung mengenai operasional Unit/Anak Perusahaan tersebut. Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris telah melakukan kunjungan sebagai berikut:

The Board of Commissioners regularly conducts work visits to the Power Plant Units and Subsidiaries to obtain direct information regarding the Unit's/Subsidiary's operations. Throughout 2022, the Board of Commissioners has made the following visits:

Kunjungan Kerja Dewan Komisaris

Work Visits of the Board of Commissioners

No.	Lokasi Location	Waktu Time
1	PLTU Indramayu Indramayu CFPP	20 Januari 2022 January 20, 2022
2	PLTS Cirata Cirata SPP	11 Februari 2022 February 11, 2022
3	Kantor Pusat PT PLN Nusantara Power, Surabaya PT PLN Nusantara Power Head Office, Surabaya	11 Maret 2022 March 11, 2022
4	PLTU Pacitan dan Jogja Pacitan and Jogja CFPP	24 Maret 2022 March 24, 2022
5	PLTU Rembang Rembang CFPP	7 April 2022 April 7, 2022
6	Kantor Pusat PT PLN Nusantara Power, Surabaya PT PLN Nusantara Power Head Office, Surabaya	19 April 2022 April 19, 2022
7	PLTS Cirata Cirata SPP	13 Mei 2022 May 13, 2022
8	PLTU Indramayu Indramayu CFPP	23 Mei 2022 May 23, 2022
9	PLTU Cilacap Cilacap CFPP	30 Mei 2022 May 30, 2022
10	Bandung	6 Juni 2022 June 6, 2022
11	PLTS Cirata Cirata SPP	13 Juni 2022 June 13, 2022
12	Bandung	13 Juni 2022 June 13, 2022
13	Bandung	16 Juni 2022 June 16, 2022
14	PLTGU Gresik Gresik CCPP	16 Juni 2022 June 16, 2022
15	Kantor Pusat PT PLN Nusantara Power, Surabaya PT PLN Nusantara Power Headquarter, Surabaya	20 Juni 2022 June 20, 2022
16	Bandung	17 Juli 2022 July 17, 2022
17	Bandung	22 Juli 2022 July 22, 2022
18	PLTA Batang Toru Batang Toru HPP	26 Agustus 2022 August 26, 2022
19	Kantor Pusat PT PLN Nusantara Power, Surabaya PT PLN Nusantara Power Headquarter, Surabaya	3 Oktober 2022 October 3, 2022
20	PLTGU Muara Tawar Muara Tawar CCPP	18 November 2022 November 18, 2022
21	PLTS Cirata Cirata SPP	1 Desember 2022 December 1, 2022

Persetujuan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Approval and Recommendation by the Board of Commissioners

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, Dewan Komisaris memiliki wewenang memberikan persetujuan dan rekomendasi kepada Direksi terkait kegiatan pengelolaan Perusahaan dalam lingkup fungsi pengawasan. Persetujuan dan rekomendasi diberikan baik melalui keputusan hasil Rapat Dewan Komisaris dan Direksi yang tertuang dalam Notulen Rapat maupun dengan surat keputusan Dewan Komisaris. Persetujuan dan rekomendasi yang diberikan Dewan Komisaris sepanjang tahun 2022 mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Rekomendasi Dekom atas Wakil PJB pada AP (PJBS-PLNSC), Surat Dewan Komisaris nomor DK002430 tanggal 17 Januari 2022.
2. Tanggapan Dekom pada RUPS RKAP Tahun 2022, Surat Dewan Komisaris nomor DK 003004 tanggal 25 Januari 2022.
3. Tanggapan Tertulis Dekom atas Penyampaian Usulan RKAP Tahun 2022, Surat Dewan Komisaris nomor DK004521 tanggal 25 Januari 2022.
4. Tanggapan Tertulis Dekom atas Penyampaian Usulan Penempatan Wakil PJB pada AP (BDSN), Surat Dewan Komisaris nomor DK005433R tanggal 27 Januari 2022.
5. Rekomendasi / Persetujuan PH ATTB dengan Nilai diatas 5 tahun, Surat Dewan Komisaris nomor DK007552 tanggal 04 Februari 2022.
6. Rekomendasi / Persetujuan PH ATTB dengan Nilai sampai dengan 5 Tahun (Kurang dari 5 Tahun), Surat Dewan Komisaris nomor DK008552 tanggal 04 Februari 2022.
7. Permohonan Persetujuan atas Usulan Remunerasi Direksi dan Dekom Tahun 2022, Tantiem Direksi dan Dekom serta Bonus Karyawan 2021, Surat Dewan Komisaris nomor DK013422R tanggal 19 Mei 2022.
8. Tanggapan Dekom pada RUPS LPT Tahun Buku 2021, Surat Dewan Komisaris nomor DK017004 tanggal Juni 2022.
9. Tanggapan Dekom atas Rencana Penghapusbukuan Lahan PT PJB Dalam Rangka Pembangunan Fasilitas Khusus PLTS Terapung Cirata, Surat Dewan Komisaris nomor DK018552 tanggal 10 Juni 2022.
10. Persetujuan Dekom atas Penyampaian Usulan Penempatan Wakil PT PJB pada Anak Perusahaan PT PJB, Surat Dewan Komisaris nomor DK020433R tanggal 27 Juni 2022.
11. Rekomendasi Dekom atas Penyampaian Usulan Penempatan Wakil PT PJB pada Perusahaan Afiliasi PT PJB, Surat Dewan Komisaris nomor DK028433R tanggal 10 Agustus 2022.

According to the provisions of the Articles of Association, the Board of Commissioners has the authority to provide approval and recommendations to the Board of Directors related to the Company's management activities in the scope of the supervisory function. Approval and recommendation are provided either through the decision of the Board of Commissioners and Board of Directors Meeting as stated in the Minutes of the Meeting or by a decree of the Board of Commissioners. The approvals and recommendations provided by the Board of Commissioners throughout 2022 include the following matters:

1. The Board of Commissioners' recommendation of PJB Representative in AP (PJBS-PLNSC), Letter of the Board of Commissioners number DK002430 dated January 17, 2022.
2. The Board of Commissioners' Response to the GMS of the 2022 ABOP, Letter of the Board of Commissioners number DK 003004 dated January 25, 2022.
3. The Board of Commissioners' Written Response to the Submission of the 2022 ABOP Proposal, Letter of the Board of Commissioners number DK004521 dated January 25, 2022.
4. The Board of Commissioners' Written Response to the Submission of the Proposal for Placement of PJB Representative in AP (BDSN), Letter of the Board of Commissioners number DK005433R dated January 27, 2022.
5. Recommendation/Approval of PH ATTB with Value above 5 years, Letter of the Board of Commissioners number DK007552 dated February 04, 2022.
6. Recommendation/Approval of PH ATTB with Value up to 5 Years (Less than 5 Years), Letter of the Board of Commissioners number DK008552 dated February 04, 2022.
7. Request for Approval of the Proposed Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners in 2022, Tantiem of the Board of Directors and Board of Commissioners as well as Employee Bonus in 2021, Letter of the Board of Commissioners number DK013422R dated May 19, 2022.
8. The Board of Commissioners' Response to the GMS of LPT for the 2021 Financial Year, Letter of the Board of Commissioners number DK017004 dated June 2022.
9. The Board of Commissioners' response to PT PJB's Land Write-off Plan in the Context of Cirata Floating SPP Special Facilities Development, Letter of the Board of Commissioners number DK018552 dated June 10, 2022.
10. The Board of Commissioners' Approval on the Submission of Proposal for Placement of PT PJB Representative in PT PJB Subsidiary, Letter of the Board of Commissioners number DK020433R dated June 27, 2022.
11. The Board of Commissioners' Recommendation on the Submission of Proposed Placement of PT PJB Representative in PT PJB Affiliated Company, Letter of the Board of Commissioners number DK028433R dated August 10, 2022.

12. Rekomendasi Dekom atas Penyampaian Usulan Penempatan Wakil PT PJB pada AP PT PJB (PT NII), Surat Dewan Komisaris nomor DK033433R tanggal 30 Agustus 2022.

13. Tanggapan Dekom Terhadap Permohonan Persetujuan / Rekomendasi Usulan Rekomposisi Anggaran Investasi Pengembangan Usaha RKAP PJB PJB 2022, Surat Dewan Komisaris nomor DK022501 tanggal 27 Oktober 2022.

14. Tanggapan Tertulis Dekom atas Penyampaian Usulan RKAP Tahun 2023, Surat Dewan Komisaris nomor DK023521 tanggal 28 Oktober 2022.
15. Tanggapan Tertulis Dekom PT PJB atas Tindak Lanjut Pembentukan *Holding & Subholdin*g PT PLN (Persero) Tahap *Legal End State*, Surat Dewan Komisaris nomor DK027094R tanggal 12 Desember 2022.

16. Tanggapan Tertulis atas Perubahan Kegiatan Usaha pada Pasal 3 ayat 2 AD PT PJB Terkait Pengurusan Perizinan Dalam Rangka *Holding & Subholding*, Surat Dewan Komisaris nomor DK028101 tanggal 23 Desember 2022.

12. The Board of Commissioners' Recommendation on the Submission of Proposed Placement of PT PJB Representative in AP PT PJB (PT NII), Letter of the Board of Commissioners number DK033433R dated August 30, 2022.
13. The Board of Commissioners' Response to Request for Approval/Recommendation on Proposed Recomposition of PJB's 2022 ABOP Business Development Investment Budget, Letter of the Board of Commissioners number DK022501 dated October 27, 2022.
14. The Board of Commissioners' Written Response to the Submission of the 2023 ABOP Proposal, Letter of the Board of Commissioners number DK023521 dated October 28, 2022.
15. The Board of Commissioners' Written Response to PT PJB's Follow-up on the Establishment of Holding & Subholding of PT PLN (Persero) at Legal End State Stage, Letter of the Board of Commissioners number DK027094R dated December 12, 2022.
16. Written Response to Changes in Business Activities in Article 3 paragraph 2 of PT PJB AD Related to Licensing Administration in the Context of Holding & Subholding, Letter of the Board of Commissioners number DK028101 dated December 23, 2022.

Rapat Dewan Komisaris
Board of Commissioners Meetings

Sebagaimana diatur dalam BoC *manual* dan *Board Manual*, Rapat Dewan Komisaris baik Rapat Internal maupun Rapat Pengawasan masing-masing dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan. Selain itu, anggota Dewan Komisaris juga dapat menghadiri Rapat Konsultasi yang diadakan oleh Direksi. Rapat Konsultasi merupakan Rapat Direksi yang dihadiri oleh Dewan Komisaris untuk membahas berbagai aspek operasional dan pengelolaan finansial Perusahaan.

Rencana rapat Dewan Komisaris disusun sebelum tahun berjalan baik rapat internal Dewan Komisaris maupun Rapat Pengawasan masing-masing minimal 1 kali setiap bulan. Agenda rapat internal Dewan Komisaris secara umum meliputi tindak lanjut rapat sebelumnya dan tugas Dewan Komisaris, laporan manajemen dan kinerja, dan laporan Komite Dewan Komisaris. Sementara agenda rapat pengawasan secara umum meliputi laporan manajemen dan kinerja, tindak lanjut rapat sebelumnya serta progres proyek dan penugasan. Materi yang akan dibahas dalam rapat pengawasan/konsultasi terlebih dahulu dikaji dalam Rapat Internal Dewan Komisaris (RID) maupun Rapat Komite berdasarkan laporan-laporan yang dibuat oleh Manajemen.

Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat internal sebanyak 13 kali dengan agenda secara umum serta rapat pengawasan sebanyak 12 kali sepanjang tahun 2022, dengan agenda dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris sebagai berikut:

As stipulated in the BoC manual and Board Manual, Board of Commissioners Meetings, both Internal Meetings and Supervisory Meetings, are held at least 1 (one) time a month. In addition, members of the Board of Commissioners may also attend Consultation Meetings held by the Board of Directors. Consultation Meeting is a meeting of the Board of Directors attended by the Board of Commissioners to discuss various aspects of the Company's operations and financial management.

The Board of Commissioners meeting plan is prepared prior to the current year, both internal meetings of the Board of Commissioners and Supervisory Meetings, each at least once a month. The agenda for internal meetings of the Board of Commissioners generally includes follow-up to previous meetings and duties of the Board of Commissioners, management and performance reports, and Board of Commissioners Committee reports. While the supervisory meeting agenda generally includes management and performance reports, follow-up to previous meetings as well as project and assignment progress. The material that will be discussed in the supervision/consultation meeting is first reviewed in the Internal Meeting of the Board of Commissioners (RID) and Committee Meetings based on reports made by Management.

The Board of Commissioners has held 13 internal meetings with a general agenda and 12 supervisory meetings throughout 2022, with the agenda and attendance rate of the Board of Commissioners as follows:

Rapat Internal Dewan Komisaris Tahun 2022

Internal Meeting of the Board of Commissioners in 2022

No.	Tanggal Date	Agenda	
1.	26 Januari 2022 January 26, 2022	1. Arahan Dewan Komisaris. 2. Evaluasi Kegiatan Bulan Januari 2022 oleh Sekdekom. 3. Laporan Kegiatan Komite Audit. 4. Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan. 5. Laporan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi.	1. Direction from the Board of Commissioners. 2. Evaluation of Activities in January 2022 by the Secretary of the Board of Commissioners. 3. Activity Report by the Audit Committee. 4. Activity Report by the Risk Management and Compliance Committee. 5. Activity Report by the Nomination and Remuneration Committee.
2.	23 Februari 2022 February 23, 2022	1. Arahan Dewan Komisaris. 2. Evaluasi Kegiatan Bulan Februari 2022 oleh Sekdekom. 3. Laporan Kegiatan Komite Audit. 4. Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan. 5. Laporan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi.	1. Direction from the Board of Commissioners. 2. Evaluation of Activities in February 2022 by the Secretary of the Board of Commissioners. 3. Activity Report by the Audit Committee. 4. Activity Report by the Risk Management and Compliance Committee. 5. Activity Report by the Nomination and Remuneration Committee.
3.	22 Maret 2022 March 22, 2022	1. Arahan Dewan Komisaris. 2. Evaluasi Kegiatan Bulan Maret 2022 oleh Sekdekom. 3. Laporan Kegiatan Komite Audit. 4. Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan. 5. Laporan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi.	1. Direction from the Board of Commissioners. 2. Evaluation of Activities in March 2022 by the Secretary of the Board of Commissioners. 3. Activity Report by the Audit Committee. 4. Activity Report by the Risk Management and Compliance Committee. 5. Activity Report by the Nomination and Remuneration Committee.
4.	26 April 2022 April 26, 2022	1. Arahan Dewan Komisaris. 2. Evaluasi Kegiatan Bulan Maret – April 2022 oleh Sekdekom. 3. Laporan Kegiatan Komite Audit. 4. Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan. 5. Laporan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi.	1. Direction from the Board of Commissioners. 2. Evaluation of Activities in March-April 2022 by the Secretary of the Board of Commissioners. 3. Activity Report by the Audit Committee. 4. Activity Report by the Risk Management and Compliance Committee. 5. Activity Report by the Nomination and Remuneration Committee.
5.	24 Mei 2022 May 24, 2022	1. Arahan Dewan Komisaris. 2. Evaluasi Kegiatan Bulan April - Mei 2022 oleh Sekdekom. 3. Laporan Kegiatan Komite Audit. 4. Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan. 5. Laporan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi.	1. Direction from the Board of Commissioners. 2. Evaluation of Activities in April-May 2022 by the Secretary of the Board of Commissioners. 3. Activity Report by the Audit Committee. 4. Activity Report by the Risk Management and Compliance Committee. 5. Activity Report by the Nomination and Remuneration Committee.
6.	21 Juni 2022 June 21, 2022	1. Arahan Dewan Komisaris. 2. Evaluasi Kegiatan Bulan Mei - Juni 2022 oleh Sekdekom. 3. Laporan Kegiatan Komite Audit. 4. Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan. 5. Laporan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi.	1. Direction from the Board of Commissioners. 2. Evaluation of Activities in May-June 2022 by the Secretary of the Board of Commissioners. 3. Activity Report by the Audit Committee. 4. Activity Report by the Risk Management and Compliance Committee. 5. Activity Report by the Nomination and Remuneration Committee.

No.	Tanggal Date	Agenda	
7.	22 Juli 2022 July 22, 2022	1. Arahan Dewan Komisaris. 2. Evaluasi Kegiatan Bulan Juni - Juli 2022 oleh Sekdekom. 3. Laporan Kegiatan Komite Audit. 4. Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan. 5. Laporan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi. 6. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Semester I Tahun 2022.	1. Direction from the Board of Commissioners. 2. Evaluation of Activities in June-July 2022 by the Secretary of the Board of Commissioners. 3. Activity Report by the Audit Committee. 4. Activity Report by the Risk Management and Compliance Committee. 5. Activity Report by the Nomination and Remuneration Committee. 6. Supervisory Report of the Board of Commissioners for the First Semester of 2022.
8.	25 Agustus 2022 August 25, 2022	1. Arahan Dewan Komisaris. 2. Evaluasi Kegiatan Bulan Juli - Agustus 2022 oleh Sekdekom. 3. Laporan Kegiatan Komite Audit. 4. Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan. 5. Laporan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi.	1. Direction from the Board of Commissioners. 2. Evaluation of Activities in July-August 2022 by the Secretary of the Board of Commissioners. 3. Activity Report by the Audit Committee. 4. Activity Report by the Risk Management and Compliance Committee. 5. Activity Report by the Nomination and Remuneration Committee.
9.	6 Oktober 2022 October 6, 2022	1. Arahan Dewan Komisaris. 2. Paparan terkait Pengelolaan Sekretariat Dewan Komisaris dan Update Komite.	1. Direction from the Board of Commissioners. 2. Presentation related to the Management of the Board of Commissioners Secretariat and Committee Update.
10.	26 Oktober 2022 October 26, 2022	1. Arahan Dewan Komisaris. 2. Presentasi Sekdekom. 3. Presentasi Komite Audit. 4. Presentasi Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan. 5. Presentasi Komite Nominasi dan Remunerasi.	1. Direction from the Board of Commissioners. 2. Presentation by the Secretary of the Board of Commissioners. 3. Presentation by the Audit Committee. 4. Presentation by the Risk Management and Compliance Committee. 5. Presentation by the Nomination and Remuneration Committee.
11.	30 November 2022 November 30, 2022	1. Arahan Dewan Komisaris. 2. Presentasi Sekdekom. 3. Laporan Kegiatan Komite Audit. 4. Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan. 5. Laporan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi.	1. Direction from the Board of Commissioners. 2. Presentation by the Secretary of the Board of Commissioners. 3. Activity Report by the Audit Committee. 4. Activity Report by the Risk Management and Compliance Committee. 5. Activity Report by the Nomination and Remuneration Committee.
12.	11 Desember 2022 December 11, 2022	1. Tanggapan atas Rencana Aksi Korporasi Holding Subholding.	1. Response to the Subholding Holding Corporate Action Plan.
13.	29 Desember 2022 December 29, 2022	1. Evaluasi Kegiatan Bulan Desember 2022 oleh Sekdekom. 2. Laporan Kegiatan Komite Audit. 3. Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan. 4. Laporan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi.	1. Evaluation of Activities in December 2022 by the Secretary of the Board of Commissioners. 2. Activity Report by the Audit Committee. 3. Activity Report by the Risk Management and Compliance Committee. 4. Activity Report by the Nomination and Remuneration Committee.

Rapat Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2022

Supervisory Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2022

No.	Tanggal Tanggal	Agenda	
1	27 Januari 2022 January 27, 2022	1. Pengantar Dewan Komisaris. 2. Rencana RUPS RKAP PT PJB. 3. Laporan Kinerja Tahun 2021 *Unaudited*. 4. Progres Proyek Pengembangan Usaha. 5. Simulasi RUPS RKAP 2022.	1. Introduction to the Board of Commissioners. 2. GMS Plan of PT PJB ABOP. 3. Unaudited 2021 Performance Report. 4. Progress of Business Development Project. 5. Simulation of the GMS of the 2022 ABOP.
2	24 Februari 2022 February 24, 2022	1. Pengantar Dewan Komisaris. 2. Pelaporan K3. 3. Laporan Kinerja Bulan Januari 2022. 4. Laporan Progres Perkembangan Proyek.	1. Introduction to the Board of Commissioners. 2. OHS Reporting. 3. Performance Report for January 2022. 4. Project Development Progress Report.
3	23 Maret 2022 March 23, 2022	1. Pengantar Dewan Komisaris. 2. Pelaporan K3. 3. Laporan Kinerja Bulan Februari 2022. 4. Laporan hasil Audit KAP.	1. Introduction to the Board of Commissioners. 2. OHS Reporting. 3. Performance Report for February 2022. 4. Report on the results of the PAF Audit.
4	27 April 2022 April 27, 2022	1. Pengantar Dewan Komisaris. 2. Pelaporan K3. 3. Laporan Kinerja Bulan Maret 2022. 4. Persiapan RUPS LPT.	1. Introduction to the Board of Commissioners. 2. OHS Reporting. 3. Performance Report for March 2022. 4. Preparation of the LPT GMS.
5	19 Mei 2022 May 19, 2022	1. Pengantar Dewan Komisaris. 2. Pelaporan K3. 3. Laporan Kinerja Bulan April 2022. 4. Update Progress Project. 5. Persiapan RUPS LPT.	1. Introduction to the Board of Commissioners. 2. OHS Reporting. 3. Performance Report for April 2022. 4. Update of Project Progress. 5. Preparation of the LPT GMS.
6	22 Juni 2022 June 22, 2022	1. Pengantar Dewan Komisaris. 2. Pelaporan K3. 3. Laporan Kinerja Bulan Mei 2022. 4. Persiapan RUPS LPT.	1. Introduction to the Board of Commissioners. 2. OHS Reporting. 3. Performance Report for May 2022. 4. Preparation of the LPT GMS.
7	22 Juli 2022 July 22, 2022	1. Pengantar Dewan Komisaris. 2. Pelaporan K3. 3. Laporan Kinerja Bulan Juni 2022. 4. Proses Pengembangan Usaha.	1. Introduction to the Board of Commissioners. 2. OHS Reporting. 3. Performance Report for June 2022. 4. Business Development Process.
8	25 Agustus 2022 August 25, 2022	1. Pengantar Dewan Komisaris. 2. Pelaporan K3. 3. Laporan Kinerja Bulan Juli 2022. 4. Proses Pengembangan Usaha.	1. Introduction to the Board of Commissioners. 2. OHS Reporting. 3. Performance Report for July 2022. 4. Business Development Process.
9	7 Oktober 2022 October 7, 2022	1. Pengantaran Dewan Komisaris. 2. Executive Summary. 3. Pelaporan K3L. 4. Perubahan Struktur Organisasi. 5. Update Progress Kesiapan *Holding & Subholding*.	1. Introduction to the Board of Commissioners. 2. Executive Summary. 3. OHSE Reporting. 4. Change in Organizational Structure. 5. Update on Holding & Subholding Readiness Progress.
10	27 Oktober 2022 October 27, 2022	1. Pengantaran Dewan Komisaris. 2. Executive Summary. 3. Laporan K3L. 4. Pembahasan Draft Usulan RKAP 2023.	1. Introduction to the Board of Commissioners. 2. Executive Summary. 3. OHSE Report. 4. Discussion on the Draft Proposal of the 2023 ABOP.
11	1 Desember 2022 December 1, 2022	1. Pengantaran Dewan Komisaris. 2. *Executive Summary.* a. Laporan K3L. b. Laporan Kinerja Korporat. 3. Penyampaian Progres Transformasi Korporat *Holding* dan *Subholding*.	1. Introduction to the Board of Commissioners. 2. Executive Summary. a. OHSE Report. b. Corporate Performance Report. 3. Submission of Holding and Subholding Corporate Transformation Progress.

No.	Tanggal Tanggal	Agenda	
12	30 Desember 2022 December 30, 2022	1. Pengantaran Dewan Komisaris. 2. *Executive Summary.* a. Laporan K3L. b. Laporan Kinerja Korporat.	1. Introduction to the Board of Commissioners. 2. Executive Summary. a. OHSE Report. b. Corporate Performance Report.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Tahun 2022
Frequency and Attendance Rate of the Board of Commissioners in Meetings in 2022

Nama Name	Rapat Internal Internal Meeting		Rapat Pengawasan Supervisory Meeting		Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders	
	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Tingkat Kehadiran Attendance Rate	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Tingkat Kehadiran Attendance Rate	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Dedeng Hidayat[1]	8	100%	8	100%	2	100%
Evy Haryadi[1]	4	100%	4	100%	-	-
Jisman P. Hutajulu	11	84,61%	12	100%	2	100%
Hendra Iswahyudi	10	76,92%	11	91,67%	2	100%
Komang Parmita[2]	12	100%	11	100%	2	100%
Bagus Puruhito	13	100%	12	100%	2	100%
Emir Kresna Wardana	11	84,61%	12	100%	2	100%
Kenedy[2]	0	0%	0	0%	-	-

Keterangan:
1. RUPS Sirkuler tanggal 21 September 2022, memberhentikan dengan hormat Sdr. Dedeng Hidayat sebagai Komisaris Utama serta mengangkat dan menetapkan Sdr. Evy Haryadi sebagai Komisaris Utama.
2. RUPS Sirkuler tanggal 14 Desember 2022, memberhentikan dengan hormat Sdr. Komang Parmita sebagai Komisaris serta mengangkat dan menetapkan Sdr. Kenedy sebagai Komisaris.

Description:
1. Circular GMS dated September 21, 2022, respectfully dismissed Mr. Dedeng Hidayat as the President Commissioner as well as appointed and determined Mr. Evy Haryadi as the President Commissioner.
2. Circular GMS dated December 14, 2022, respectfully dismissed Mr. Komang Parmita as Commissioner as well as appointed and determined Mr. Kenedy as Commissioner.

Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris
Competency Development Program for the Board of Commissioners

Dewan Komisaris mengikuti program pengembangan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi yang relevan dengan bisnis Perusahaan dalam rangka mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sesuai dengan Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris (*Board of Commissioner Manual*) dan *Board Manual*. Selama tahun 2022, anggota Dewan Komisaris telah mengikuti kegiatan program pengembangan kompetensi sebagaimana telah dijelaskan pada uraian terkait Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Kepala SPI.

The Board of Commissioners participates in development programs to improve knowledge and competencies relevant to the Company's business in order to support the duties and responsibilities of the Board of Commissioners in accordance with the Board of Commissioners Manual and the Board Manual. During 2022, members of the Board of Commissioners have participated in competency development program activities as has been described in the description related to Education and Training of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Head of IAU.

Program Pengenalan Bagi Dewan Komisaris Baru

Induction Program for New Board of Commissioners

Perusahaan melaksanakan program pengenalan (Program Induksi) bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris (*Board of Commissioner Manual*) dan *Board Manual*. Sekretaris Perusahaan berkoordinasi dengan Sekretaris Dewan Komisaris dalam pelaksana program pengenalan. Materi program pengenalan meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di Perusahaan;
2. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya sesuai dengan RJPP Perusahaan;
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan audit eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.

Program pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perusahaan/Anak Perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perusahaan dimana program tersebut dilaksanakan. Pada tahun 2022, telah dilaksanakan program pengenalan bagi Komisaris baru sebagai berikut:

The Company carries out an introduction program (Induction Program) for newly appointed members of the Board of Commissioners as stipulated in the Board of Commissioners Manual and the Board Manual. The Corporate Secretary coordinates with the Secretary of the Board of Commissioners in implementing the induction program. The induction program materials include:

1. Implementation of the GCG principles in the Company;
2. An overview of the Company relating to its purpose, nature and scope of activities, financial and operating performance, strategy, short-term and long-term business plans, competitive position, risks and various other strategic issues in accordance with the Company's RJPP;
3. Information relating to delegated authority, internal audit and external audit, internal control systems and policies, including the Audit Committee;
4. Information regarding the duties and responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners.

The Company induction program can be in the form of presentations, meetings, visits to the Company/Subsidiaries and document review or other programs deemed appropriate to the Company where the program is carried out. In 2022, the induction program for new Commissioners has been carried out as follows:

Program Induksi Anggota Dewan Komisaris Baru Tahun 2022

Induction Program for New Members of the Board of Commissioners in 2022

No.	Tanggal Date	Agenda	Anggota Dewan Komisaris The Board of Commissioners Members
1	16 Februari 2022 February 16, 2022	1. Kebijakan Penerapan GCG 2. Pengenalan Pembangkit serta Proses Bisnis Operasi dan Pemeliharaan 1. GCG Implementation Policy 2. Introduction to Power Plant as well as Operation and Maintenance Business Process	1. Dedeng Hidayat 2. Emir Kresna Wardana 3. Bagus Puruhito
2	7 Oktober 2022 October 7, 2022	Program Keja Perihal *Holding* dan *Subholding* Work Program regarding Holding and Subholding	Evy Haryadi

Penilaian Kinerja Komite–Komite Di Bawah Dewan Komisaris

Performance Assessment of Committees Under the Board of Commissioners

Dewan Komisaris melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas masing-masing komite secara berkala pada setiap akhir periode tahun buku sebagai bentuk pelaksanaan atas mekanisme penilaian atas kinerja komite di bawah Dewan Komisaris sesuai dengan Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris (*Board of Commissioner Manual*) dan *Board Manual*. Penilaian kinerja komite di bawah Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan Dewan Komisaris berupa pencapaian target-target rencana kerja tahunan komite. Uraian lebih lanjut mengenai penilaian kinerja komite di bawah Dewan Komisaris dapat dilihat pada bagian Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan, serta Komite Nominasi dan Remunerasi.

The Board of Commissioners evaluates the implementation of duties of each committee periodically at the end of each fiscal year period as a form of implementation of the mechanism for assessing the performance of committees under the Board of Commissioners in accordance with the Board of Commissioners Manual and the Board Manual. The performance assessment of committees under the Board of Commissioners is conducted based on criteria determined by the Board of Commissioners in the form of achieving the targets of the committee's annual work plan. Further description on the performance assessment of committees under the Board of Commissioners can be seen in the Audit Committee, Risk Management and Compliance Committee, as well as Nomination and Remuneration Committee sections.

Penilaian Kinerja Direksi oleh Dewan Komisaris

Performance Assessment of the Board of Directors by the Board of Commissioners

Sebagai bagian dari fungsi Pengawasan, Dewan Komisaris bersama komite Dewan Komisaris melakukan evaluasi atas kinerja Direksi sesuai dengan Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris (*Board of Commissioner Manual*) dan *Board Manual*. Penilaian kinerja Direksi dilakukan secara berkala berdasarkan laporan manajemen bulanan maupun triwulanan dan kriteria pencapaian atas *Key Performance Indicator* (KPI) baik kolegial maupun individu pada setiap akhir periode tahun buku. Uraian lebih lanjut mengenai penilaian kinerja Direksi dapat dilihat pada bagian Direksi.

As part of the Supervisory function, the Board of Commissioners together with the Board of Commissioners committee evaluates the performance of the Board of Directors in accordance with the Board of Commissioners Manual and the Board Manual. The performance assessment of the Board of Directors is conducted periodically based on monthly and quarterly management reports and the criteria for achieving the Key Performance Indicator (KPI) both collegially and individually at the end of each financial year period. Further description on the performance assessment of the Board of Directors can be seen in the Board of Directors section.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Performance Assessment of the Board of Commissioners

Dewan Komisaris melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas pengawasan yang dijalankan Dewan Komisaris berdasarkan Laporan Tugas Pengawasan, penerapan tata kelola perusahaan yang baik aspek Dewan Komisaris dan pencapaian realisasi *Key Performance Indicators* (KPI) Dewan Komisaris. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara mandiri (*self-assessment*) pada setiap akhir periode tahun buku bersamaan pelaksanaan evaluasi atas kinerja komite Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar, Board Manual dan Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris (*Board of Commissioner Manual*). Kinerja Dewan Komisaris berdasarkan Pencapaian KPI tahun 2022 adalah sebagai berikut:

The Board of Commissioners evaluates the implementation of supervisory duties carried out by the Board of Commissioners based on the Supervisory Task Report, the implementation of good corporate governance aspects of the Board of Commissioners and the achievement of the realization of Key Performance Indicators (KPI) of the Board of Commissioners. The performance assessment of the Board of Commissioners is conducted independently (self-assessment) at the end of each fiscal year period in conjunction with the evaluation of the performance of the Board of Commissioners committees by taking into account the provisions of the Articles of Association, Board Manual and Board of Commissioners Manual. The performance of the Board of Commissioners based on KPI Achievement in 2022 is as follows:

Realisasi *Key Performance Indicators* Dewan Komisaris 2022

Realization of Board of Commissioners Key Performance Indicators in 2022

No.	Indikator Kinerja Kunci Key Performance Indicators	Bobot Weight	Nilai Capaian Achievement Value
1.	*Review* dan Tanggapan atas Rencana Perusahaan Review and Response to the Company Plan	8	7
2.	*Review* dan Tanggapan atas Kinerja Perusahaan Review and Response to Company Performance	10	10
3.	*Review* tindak lanjut hasil/temuan audit internal/eksternal Review of follow-up of internal/external audit results/findings	7	7
4.	Memberi tanggapan tertulis/persetujuan/nasihat/saran terkait rencana strategis Perusahaan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Providing written responses/approvals/advice/suggestions related to the Company's strategic plans that require the approval of the Board of Commissioners.	20	15
5.	Menyampaikan program kerja dan KPI Dewan Komisaris Tahun 2022 Submitting work programs and KPIs for the Board of Commissioners in 2022.	6	6
6.	Menyampaikan pendapat/usul Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham/RUPS Submitting opinions/suggestions of the Board of Commissioners to the Shareholders/GMS	5	4
7.	Menyampaikan Laporan tentang tugas pengawasan Dewan Komisaris Submitting a Report on the supervisory duties of the Board of Commissioners	9	7
8.	Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting	20	25
9.	Kajian Komite Committee Review	5	4
10.	Pengenalan/Induksi/Peningkatan Kompetensi Introduction/Induction/Competency Improvement	5	5
11.	Pengelolaan GCG GCG Management	5	5
	Nilai Kinerja Performance Score	**100**	**95**

Penilaian atas aspek Dewan Komisaris termasuk organ pendukung Dewan Komisaris terkait pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik juga dilakukan secara berkala baik oleh pihak independen maupun secara mandiri (*self-assessment*) secara bergantian setiap tahun. Hal tersebut merupakan bagian dari penilaian tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan kriteria penilaian sesuai dengan kerangka acuan yang diatur dalam Surat Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No.16/S.MBU/2012. Hasil penilaian penerapan tata kelola perusahaan yang baik tahun 2022 dilakukan oleh pihak independen yaitu Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, dimana pada aspek Dewan Komisaris mencapai skor 33,26 dari skor maksimal 35 atau setara dengan 95,03% dengan kategori Sangat Baik.

Assessment of aspects of the Board of Commissioners including supporting organs of the Board of Commissioners related to the implementation of good corporate governance is also conducted periodically by both independent parties and self-assessment alternately every year. This is part of the assessment of good corporate governance based on assessment criteria in accordance with the framework of reference stipulated in the Decree of the Secretary of the Minister of SOEs No.16/S.MBU/2012. The results of the assessment of the implementation of good corporate governance in 2022 were conducted by an independent party, namely the BPKP Representative of East Java Province, where the Board of Commissioners aspect achieved a score of 33.26 out of a maximum score of 35 or equivalent to 95.03% in the Very Good category.

Direksi
Board of Directors

Peran Direksi sangat penting dalam memastikan keberhasilan transformasi Perusahaan sebagai Subholding PT PLN (Persero) menjadi perusahaan energi yang berbasis teknologi, inovasi dan berorientasi pada masa depan. Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, Direksi menjalankan peran dan tanggung jawabnya untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik jangka panjang korporasi dan pemegang saham serta para pemangku kepentingan. Direksi secara kolektif memimpin jalannya fungsi pengelolaan Perusahaan sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan asas tata kelola yang baik. Sehingga Perusahaan menjadi entitas bisnis yang berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang, beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis, berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan, serta berkemampuan dalam bertahan dan bertumbuh. Setiap anggota Direksi menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, bertindak secara cermat, hati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek penting yang relevan serta menggunakan wewenang, sumber daya yang dimiliki.

The role of the Board of Directors is crucial in ensuring the successful transformation of the Company as a Subholding of PT PLN (Persero) into a technology-based, innovative and future-oriented energy company. In an effort to realize it, the Board of Directors carries out its roles and responsibilities to create sustainable value by considering the long-term best interests of the corporation and shareholders as well as stakeholders. The Board of Directors collectively leads the management of the Company in accordance with the Company's Articles of Association and laws and regulations as well as taking into account the principles of good governance. So that the Company becomes a competitive business entity that focuses on long-term performance, is ethical and responsible in carrying out business, contributes positively to society and the environment, and has the ability to survive and grow. Each member of the Board of Directors carries out his/her duties in good faith and with full responsibility, acting carefully, cautiously and considering various important relevant aspects and using his/her authority and resources.

Susunan Direksi
Composition of the Board of Directors

Direksi Perusahaan berjumlah 6 (enam) orang sesuai dengan nomenklatur berdasarkan struktur organisasi Perusahaan yang mengacu pada keputusan RUPS. Susunan Direksi sebagai organ yang menjalankan fungsi pengelolaan Perusahaan ditetapkan oleh Pemegang Saham melalui keputusan RUPS. Anggota Direksi yang menjabat telah melalui proses penjaringan dan seleksi serta dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham. Susunan Direksi Perusahaan periode Januari sampai dengan Desember 2022 adalah sebagai berikut:

The Company's Board of Directors consists of 6 (six) persons in accordance with the nomenclature based on the Company's organizational structure which refers to the GMS resolution. The composition of the Board of Directors as an organ that carries out the management function of the Company is determined by the Shareholders through the GMS resolution. Members of the Board of Directors who served have gone through the screening and selection process and passed the fit and proper test by PT PLN (Persero) as the Shareholder. The composition of the Company's Board of Directors for the period January to December 2022 is as follows:

Susunan Direksi Tahun 2022
Composition of the Board of Directors in 2022

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	
Gong Matua Hasibuan[1]	Direktur Utama President Director	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pengangkatan Anggota Direksi PT PJB tanggal 19 Februari 2021	Circular GMS Resolution on the Appointment of Members of the Board of Directors of PT PJB dated February 19, 2021
Ruly Firmansyah[1]	Direktur Utama President Director	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pengangkatan Anggota Direksi PT PJB tanggal 21 September 2022	Circular GMS Resolution on the Appointment of Members of the Board of Directors of PT PJB dated September 21, 2022

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	
M. Yossy Noval A.	Direktur Operasi Pembangkit Gas Director of Gas Power Plant Operations	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris PT PJB Tanggal 23 April 2021	Circular GMS Resolution on the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of PT PJB dated April 23, 2021
Rachmanoe Indarto	Direktur Operasi Pembangkit Batu Bara Director of Coal Power Plant Operations	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 15 Juli 2020 jo. Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 12 November 2020	Circular GMS Resolution on the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors dated July 15, 2020 jo. Circular GMS Resolution on the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors dated November 12, 2020
Iwan Purwana[2]	Direktur Pengembangan dan Niaga Director of Development and Commerce	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 12 Juni 2020 jo. Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 12 November 2020	Circular GMS Resolution on the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors dated June 12, 2020 jo. Circular GMS Resolution on the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors dated November 12, 2020
R Rawan Insani[3]	Direktur Keuangan Director of Finance	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 12 Juni 2020 jo. Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 12 November 2020	Circular GMS Resolution on the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors dated June 12, 2020 jo. Circular GMS Resolution on the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors dated November 12, 2020
Karyawan Aji	Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi Director of Human Capital Management and Administration	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 12 Juni 2020 jo. Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 12 November 2020	Circular GMS Resolution on the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors dated June 12, 2020 jo. Circular GMS Resolution on the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors dated November 12, 2020
Muhamad Reza[2]	Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga Director of Business Development and Commerce	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pengangkatan Anggota Direksi PT PJB tanggal 21 September 2022	Circular GMS Resolution on the Appointment of Members of the Board of Directors of PT PJB dated September 21, 2022
Dwi Hartono[3]	Direktur Keuangan Director of Finance	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pengangkatan Anggota Direksi PT PJB tanggal 21 September 2022	Circular GMS Resolution on the Appointment of Members of the Board of Directors of PT PJB dated September 21, 2022

Keterangan:
1. RUPS Sirkuler tanggal 21 September 2022, memberhentikan dengan hormat Sdr. Gong Matua Hasibuan sebagai Direktur Utama mengangkat dan menetapkan Sdr. Ruly Firmansyah sebagai Direktur Utama
2. RUPS Sirkuler tanggal 21 September 2022, memberhentikan dengan hormat Sdr. Iwan Purwana sebagai Direktur Pengembangan dan Niaga serta mengangkat dan menetapkan Sdr. Muhamad Reza sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga.
3. RUPS Sirkuler tanggal 21 September 2022, memberhentikan dengan hormat Sdr. R. Rawan Insani sebagai Direktur Keuangan serta mengangkat dan menetapkan Sdr. Dwi Hartono sebagai Direktur Keuangan.

Description:
1. Circular GMS dated September 21, 2022, respectfully dismissed Mr. Gong Matua Hasibuan as President Director as well as appointed and determined Mr. Ruly Firmansyah as President Director.
2. Circular GMS dated September 21, 2022, respectfully dismissed Mr. Iwan Purwana as Director of Development and Commerce as well as appointed and determined Mr. Muhamad Reza as Director of Business Development and Commerce.
3. Circular GMS dated September 21, 2022, respectfully dismissed Mr. R. Rawan Insani as Director of Finance as well as appointed and determined Mr. Dwi Hartono as Director of Finance.

Pernyataan Independensi dan Potensi Benturan Kepentingan

Declaration of Independence and Potential Conflict of Interest

Anggota Direksi Perusahaan secara berkala membuat Pakta Integritas dan menyampaikan kepada Perusahaan terkait kepemilikan saham pribadi dan keluarga di Perusahaan dan perusahaan lainnya. Setiap Anggota Direksi Perusahaan telah menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk pernyataan untuk bersikap independen dan bebas benturan kepentingan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dengan menyebutkan bahwa:

1. Akan melaksanakan tugas dan wewenang maupun pengembangan karir serta mengambil keputusan dalam keadaan mandiri, tidak berada di bawah tekanan dan/atau bebas dari pengaruh maupun intervensi dari pihak manapun termasuk tidak terbatas pada intervensi dari partai politik, kelompok maupun golongan tertentu (*independency*).
2. Akan melaksanakan tugas dan wewenang serta mengambil keputusan dengan mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan lainnya oleh karenanya tidak akan menyalahgunakan kewenangan jabatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk kepentingan pihak manapun termasuk namun tidak terbatas pada kepentingan pribadi, partai politik, kelompok maupun golongan tertentu (*duty care and loyalty*).
3. Akan melaksanakan tugas dan wewenang serta mengambil keputusan, tanpa ada kepentingan pribadi atau tujuan untuk melakukan sesuatu untuk manfaat diri sendiri, maupun menguntungkan pihak-pihak yang terkait, atau pihak yang terafiliasi, partai politik, kelompok maupun golongan tertentu (*conflict of interest*).
4. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta dalam mengambil keputusan, tidak akan meminta, tidak akan menawarkan/tidak menjanjikan untuk memberi/menerima hadiah, upeti, suap, sogok, gratifikasi apapun dan/atau bentuk imbalan lainnya yang bukan menjadi hak secara sah dan secara hukum dari pihak manapun.
5. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta dalam mengambil keputusan, tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) baik yang secara langsung maupun tidak langsung.
6. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta dalam mengambil keputusan, tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan terjadinya ketidakwajaran dalam penetapan harga pembelian, pemborosan dan kebocoran keuangan perusahaan.
7. Akan melaksanakan tugas dan wewenang serta mengambil keputusan dengan pemahaman/penugasan yang cukup tentang berbagai ketentuan dan peraturan yang terkait (*prudent person role*), dan mematuhi serta melaksanakan seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*duty abiding the laws*).

Members of the Company's Board of Directors periodically make an Integrity Pact and submit to the Company related to personal and family share ownership in the Company and other companies. Each Member of the Company's Board of Directors has signed an Integrity Pact as a form of statement to act independently and free of conflict of interest in carrying out their functions and duties by stating that:

1. Will carry out duties and authorities as well as career development and make decisions in an independent state, not under pressure and/or free from influence or intervention from any party including not limited to intervention from political parties, groups or certain groups (independency).
2. Will carry out duties and authorities as well as make decisions by prioritizing the interests of the Company above other interests and therefore will not abuse the authority of the position, either directly or indirectly, for the benefit of any party including but not limited to the interests of individuals, political parties, groups or certain groups (duty care and loyalty).
3. Will carry out duties and authorities as well as make decisions, without any personal interest or purpose to do something for personal benefit, as well as to benefit related parties, or affiliated parties, political parties, groups or certain groups (conflict of interest).
4. In carrying out its duties and authorities as well as in making decisions, will not request, will not offer/not promise to give/receive gifts, tributes, bribes, kickbacks, any gratuities and/or other forms of compensation that are not legally and legally entitled from any party.
5. In carrying out its duties and authorities as well as in making decisions, will not practice corruption, collusion and nepotism (KKN) either directly or indirectly.
6. In carrying out its duties and authorities as well as in making decisions, will not take actions that result in irregularities in the determination of purchase prices, waste and leakage of company finances.
7. Will carry out duties and authorities as well as make decisions with sufficient understanding/assignment of various related provisions and regulations (prudent person role), as well as comply with and implement all provisions and applicable laws and regulations (duty abiding the laws).

Penandatanganan Pakta Integritas Dewan Komisaris
Signing of the Integrity Pact of the Board of Directors

Nama Name	Tanggal Penandatanganan Date of Signing
Gong Matua Hasibuan[1]	Pernyataan telah ditandatangani pada 25 Agustus 2022 Statement has been signed on August 25, 2022
Ruly Firmansyah[1]	Pernyataan telah ditandatangani pada 5 November 2022 Statement has been signed on November 5, 2022
M. Yossy Noval A.	Pernyataan telah ditandatangani pada 3 November 2022 Statement has been signed on November 3, 2022
Rachmanoe Indarto	Pernyataan telah ditandatangani pada 3 November 2022 Statement has been signed on November 3, 2022
Iwan Purwana[2]	Pernyataan telah ditandatangani pada 31 Agustus 2022 Statement has been signed on August 31, 2022
R Rawan Insani[3]	Pernyataan telah ditandatangani pada 16 Agustus 2022 Statement has been signed on August 16, 2022
Karyawan Aji	Pernyataan telah ditandatangani pada 3 November 2022 Statement has been signed on November 3, 2022
Muhamad Reza2	Pernyataan telah ditandatangani pada 16 November 2022 Statement has been signed on November 16, 2022
Dwi Hartono[3]	Pernyataan telah ditandatangani pada 3 November 2022 Statement has been signed on November 3, 2022

Keterangan:
1. RUPS Sirkuler tanggal 21 September 2022, memberhentikan dengan hormat Sdr. Gong Matua Hasibuan sebagai Direktur Utama mengangkat dan menetapkan Sdr. Ruly Firmansyah sebagai Direktur Utama
2. RUPS Sirkuler tanggal 21 September 2022, memberhentikan dengan hormat Sdr. Iwan Purwana sebagai Direktur Pengembangan dan Niaga serta mengangkat dan menetapkan Sdr. Muhamad Reza sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga.
3. RUPS Sirkuler tanggal 21 September 2022, memberhentikan dengan hormat Sdr. R. Rawan Insani sebagai Direktur Keuangan serta mengangkat dan menetapkan Sdr. Dwi Hartono sebagai Direktur Keuangan.

Description:
1. Circular GMS dated September 21, 2022, respectfully dismissed Mr. Gong Matua Hasibuan as President Director as well as appointed and determined Mr. Ruly Firmansyah as President Director.
2. Circular GMS dated September 21, 2022, respectfully dismissed Mr. Iwan Purwana as Director of Development and Commerce as well as appointed and determined Mr. Muhamad Reza as Director of Business Development and Commerce.
3. Circular GMS dated September 21, 2022, respectfully dismissed Mr. R. Rawan Insani as Director of Finance as well as appointed and determined Mr. Dwi Hartono as Director of Finance.

Pedoman Kerja Direksi
Board of Directors Manual

Direksi telah menetapkan pedoman kerja yang mengacu pada Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman kerja Direksi disusun sejak tahun 2013 dalam bentuk Tata Laksana Kerja Direksi. Tata Laksana Kerja Direksi atau *Board of Directors Manual* (BoD *Manual*) kemudian ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 030.K/020/DIR/2014 tanggal 30 Desember 2014. Muatan BoD Manual merupakan penjabaran lebih lanjut dari *Board Manual* yang bersifat teknis dari pelaksanaan kerja organ Direksi. *Board Manual* disusun pada tahun 2010 dan terakhir kali dimutakhirkan serta ditetapkan melalui kesepakatan bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 25 November 2014. Direksi secara berkala melakukan review terhadap pedoman kerja Direksi dan jika dipandang perlu, dilakukan pemutakhiran sesuai kebutuhan Direksi dan perkembangan Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Board of Directors has determined work guidelines that refer to the Articles of Association and prevailing laws and regulations. The work guidelines of the Board of Directors were prepared since 2013 in the form of the Board of Directors Manual. The Board of Directors Manual (BoD Manual) was then established based on the Decree of the Board of Directors Number: 030.K/020/DIR/2014 dated December 30, 2014. The content of the BoD Manual is a further elaboration of the Board Manual which is technical in nature from the implementation of the work of the Board of Directors organ. The Board Manual was prepared in 2010 and was last updated and stipulated through a joint agreement between the Board of Directors and Board of Commissioners on November 25, 2014. The Board of Directors periodically reviews the Board of Directors' manual and if deemed necessary, updates are made according to the needs of the Board of Directors and the development of the Company as well as applicable laws and regulations.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Duties and Responsibilities of the Board of Directors

Direksi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan diuraikan lebih jelas dalam *Board Manual* serta BoD *Manual*. Fungsi pengelolaan Perusahaan yang dijalankan Direksi bertujuan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan proses bisnis Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan dan arahan Pemegang Saham dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif serta memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tujuan Perusahaan dituangkan dalam Visi dan Misi Perusahaan yang dijabarkan dalam sasaran dan strategi dalam bentuk Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan yang disusun Direksi atas persetujuan Pemegang Saham. Tugas dan tanggung jawab Direksi secara umum meliputi:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
2. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
3. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
4. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi.
5. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perusahaan, serta dokumen keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan.
6. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
7. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan.
8. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan.
9. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan, dan dokumen keuangan Perusahaan, dan dokumen Perusahaan lainnya.

The Board of Directors carries out its duties and responsibilities as stipulated in the Articles of Association and described more clearly in the Board Manual and BoD Manual. The management function of the Company carried out by the Board of Directors aims to ensure the effectiveness of the implementation of the Company's policies and business processes in accordance with the Company's objectives and the direction of the Shareholders by utilizing innovation and technology effectively and fulfilling social and environmental responsibilities. The Company's objectives are outlined in the Company's Vision and Mission, which are elaborated into goals and strategies in the form of the Company's Long Term Plan (RJPP) and the Annual Budget and Operational Plan (ABOP) prepared by the Board of Directors with the approval of the Shareholders. The duties and responsibilities of the Board of Directors generally include:

1. Striving for and ensuring the implementation of the Company's business and activities in accordance with its purposes and objectives and business activities.
2. Preparing in due time the Company's Long Term Plan, the Company's Annual Budget and Operational Plan, and any amendments thereto and submitting them to the Board of Commissioners and Shareholders to obtain the GMS ratification.
3. Providing explanation to the GMS regarding the Company's Long Term Plan and the Company's Annual Budget and Operational Plan.
4. Preparing the Register of Shareholders, Special Register, Minutes of GMS, and Minutes of Board of Directors Meeting.
5. Preparing the Annual Report as a form of accountability for the management of the Company, as well as the Company's financial documents as referred to in the Law on Company Documents.
6. Preparing the Financial Statements based on Financial Accounting Standards and submitting them to the Public Accountant to be audited.
7. Submitting the Annual Report including the Financial Statements to the GMS to be approved and ratified.
8. Providing explanation to the GMS regarding the Annual Report.
9. Submitting the Balance Sheet and Income Statement that has been ratified by the GMS to the Minister in charge of Law and Human Rights in accordance with the provisions of laws and regulations.
10. Maintaining the Register of Shareholders, Special Register, Minutes of GMS, Minutes of Board of Commissioners Meeting and Minutes of Board of Directors Meeting, Annual Report, Company's financial documents, and other Company's documents.

11. Menyimpan di tempat kedudukan Perusahaan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris, dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan serta dokumen Perusahaan lainnya.
12. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.
13. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham.
14. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya.
15. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta Anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham.
16. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

11. Keeping at the Company's domicile: Register of Shareholders, Special Register, Minutes of GMS, Minutes of Board of Commissioners Meeting, and Minutes of Board of Directors Meeting, Annual Report, Company's financial documents and other Company's documents.
12. Preparing an accounting system in accordance with Financial Accounting Standards and based on the principles of internal control, especially the functions of management, recording, storage, and supervision.
13. Providing periodic reports according to the manner and time in accordance with applicable provisions, as well as other reports whenever requested by the Board of Commissioners and/or Shareholders.
14. Preparing the Company's organizational structure complete with details and duties.
15. Providing explanations on all matters asked or requested by Members of the Board of Commissioners and Shareholders.
16. Carrying out other obligations in accordance with the provisions stipulated in the Articles of Association and those stipulated by the GMS based on laws and regulations.

Pembagian Tugas Anggota Direksi

Division of Duties of Members of the Board of Directors

Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dengan melakukan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi berdasarkan nomenklatur jabatan anggota Direksi yang tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan struktur organisasi Perusahaan. Pembagian tugas Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, maka hal tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. Direksi Perusahaan juga menetapkan pembagian tugas melalui Keputusan Direksi Nomor: 026.P/019/DIR/2022 tanggal 21 September 2022. Pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi ditetapkan sebagai berikut:

The Board of Directors carries out its leadership role by dividing the management duties and authorities among members of the Board of Directors based on the nomenclature of the positions of members of the Board of Directors whose duties and responsibilities are in accordance with the Company's organizational structure. The division of duties of the Board of Directors is determined based on the GMS resolution as stated in the Law on Limited Liability Companies. In the event that the GMS does not stipulate the division of duties and authority of members of the Board of Directors, it shall be determined by decision of the Board of Directors. The Company's Board of Directors also stipulates the division of duties through Decision of the Board of Directors Number: 026.P/019/DIR/2022 dated September 21, 2022. The division of duties and responsibilities of each member of the Board of Directors is stipulated as follows:

Pembagian Tugas Anggota Direksi

Division of Duties of Members of the Board of Directors

Jabatan Position	Tugas Pengawasan Duties and Responsibilities	
Direktur Utama President Director	1. Memastikan arah, kebijakan dan strategi jangka panjang dan jangka pendek Perusahaan serta menjaga agar pengelolaan Perusahaan berjalan sesuai dengan arah, kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan. 2. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi tugas Perusahaan dan Unit Kerja, agar seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan visi, misi, sasaran usaha, strategi, kebijakan dan program kerja yang ditetapkan. 3. Menyelaraskan seluruh inisiatif-inisiatif internal Perusahaan, serta memastikan terjadinya peningkatan kemampuan bersaing Perusahaan. 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas operasional di bidang pelaksanaan audit internal dan kesekretariatan, pelayanan hukum, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi serta proses manajemen risiko. 5. Memastikan bahwa Perusahaan dikelola sesuai dengan kaidah bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) 6. Memastikan bahwa Perusahaan terus berkembang dan memberikan nilai tambah bagi para *stakeholder* 7. Melaksanakan fungsi *corporate leader* untuk memastikan engagement seluruh anggota Perusahaan sekaligus sebagai inspirator dan motivator yang mengarahkan semua sumber daya Perusahaan melangkah mencapai visi, misi dan tujuan Perusahaan.	1. Ensuring the direction, policies and long-term and short-term strategies of the Company and maintaining the management of the Company in accordance with the direction, policies and strategies that have been set. 2. Planning, coordinating, directing, controlling, supervising and evaluating duties of the Company and Work Units, so that all activities run in accordance with the vision, mission, business objectives, strategies, policies and work programs set. 3. Aligning all internal initiatives of the Company, as well as ensuring the improvement of the Company's competitive ability. 4. Coordinating the implementation of operational duties in the field of internal audit and secretarial implementation, legal services, and ensuring compliance with laws and regulations as well as risk management processes. 5. Ensuring that the Company is managed in accordance with business principles and good corporate governance. 6. Ensuring that the Company continues to grow and provide added value to stakeholders. 7. Carrying out the corporate leader function to ensure the engagement of all members of the Company as well as an inspirer and motivator who directs all Company resources to achieve the Company's vision, mission and goals.
Direktur Operasi Pembangkit Gas Director of Gas Power Plant Operations	1. Memastikan pengelolaan Unit Pembangkit untuk menjaga *sustainability maturity* pengelolaan dan kinerja Unit Pembangkit. 2. Memastikan bahwa Unit Pembangkit mampu mencapai sasaran kinerja operasional yang ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) maupun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan menjaga kesehatan Unit Pembangkit guna menjamin *sustainability* dan mendukung pertumbuhan Perusahaan. 3. Memastikan pengendalian portofolio kinerja Unit Pembangkit termasuk kinerja kontrak Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL). 4. Memastikan perencanaan dan pengendalian operasi dan pemeliharaan agar tingkat kesiapan unit, efisiensi, mutu dan keandalan setara kelas dunia dengan tetap memperhatikan aspek komersial untuk memperoleh harga jual yang kompetitif. 5. Memastikan pengelolaan operasi dan pemeliharaan mengacu pada kaidah *best practices* untuk memastikan peningkatan *performance* pembangkit secara berkelanjutan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. 6. Memastikan perencanaan dan pengendalian energi primer baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan memperhatikan kondisi internal dan kebutuhan/peluang pasar, sekaligus untuk menjamin kelancaran operasi Unit Pembangkit.	1. Ensuring the management of the Power Plant Unit to maintain sustainability maturity of the management and performance of the Power Plant Unit. 2. Ensuring that the Generating Unit is able to achieve the operational performance targets set out in the Company's Long Term Plan (RJPP) and the Company's Annual Budget and Operational Plan (ABOP) and maintain the health of the Power Plant Unit to ensure sustainability and support the Company's growth. 3. Ensuring portfolio control of Power Plant Unit performance including the performance of Power Purchase Agreement (PPA) contracts. 4. Ensuring the planning and control of operations and maintenance so that the level of unit readiness, efficiency, quality and reliability is world-class while taking into account commercial aspects to obtain competitive selling prices. 5. Ensuring the management of operations and maintenance refers to the best practices principles to ensure the continuous improvement of power plant performance in accordance with the predetermined performance targets. 6. Ensuring the planning and control of primary energy both short and long term by taking into account internal conditions and market needs/opportunities, as well as ensuring the smooth operation of the Power Plant Unit.

Jabatan Position	Tugas Pengawasan Duties and Responsibilities	
	7. Memastikan perencanaan, analisa dan evaluasi penyiapan jadwal pemeliharaan dengan menerapkan *outage management system* secara optimal. 8. Memastikan pengendalian sistem operasi dan perniagaan ketenagalistrikan, serta pengendalian anggaran dan kontrak jasa pengelolaan Jasa O&M dan AMC. 9. Memastikan pengelolaan teknologi pembangkit dan pengembangannya untuk menjawab tantangan Perusahaan dalam pengelolaan pembangkit dan mempertahankan *corporate competitive advantage* secara berkelanjutan. 10. Mengevaluasi dan mengembangkan kebijakan-kebijakan dalam Divisi dan Satuan di bawah Direktorat Operasi Pembangkit Gas.	7. Ensuring the planning, analysis and evaluation of maintenance schedule preparation by implementing the outage management system optimally. 8. Ensuring control of the electricity operation and trading system, as well as control of budgets and service contracts for the management of O&M and AMC Services. 9. Ensuring the management of power plant technology and its development to meet the Company's challenges in power plant management and maintain corporate competitive advantage in a sustainable manner. 10. Evaluating and developing policies within the Divisions and Units under the Directorate of Gas Power Plant Operations.
Direktur Operasi Pembangkit Batu Bara Director of Coal Power Plant Operations	1. Memastikan pengelolaan Unit Pembangkit untuk menjaga *sustainability maturity* pengelolaan dan kinerja Unit Pembangkit. 2. Memastikan bahwa Unit Pembangkit mampu mencapai sasaran kinerja operasional yang ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) maupun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan menjaga kesehatan Unit Pembangkit guna menjamin *sustainability* dan mendukung pertumbuhan Perusahaan. 3. Memastikan pengendalian portofolio kinerja Unit Pembangkit termasuk kinerja kontrak Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL). 4. Memastikan perencanaan dan pengendalian operasi dan pemeliharaan agar tingkat kesiapan unit, efisiensi, mutu dan keandalan setara kelas dunia dengan tetap memperhatikan aspek komersial untuk memperoleh harga jual yang kompetitif. 5. Memastikan pengelolaan operasi dan pemeliharaan mengacu pada kaidah *best practices* untuk memastikan peningkatan performance pembangkit secara berkelanjutan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. 6. Memastikan perencanaan dan pengendalian energi primer baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan memperhatikan kondisi internal dan kebutuhan/peluang pasar, sekaligus untuk menjamin kelancaran operasi Unit Pembangkit. 7. Memastikan perencanaan, analisa dan evaluasi penyiapan jadwal pemeliharaan dengan menerapkan *outage management system* secara optimal. 8. Memastikan pengendalian sistem operasi dan perniagaan ketenagalistrikan, serta pengendalian anggaran dan kontrak jasa pengelolaan Jasa O&M dan AMC. 9. Mengevaluasi dan mengembangkan kebijakan-kebijakan dalam Divisi dan Satuan di bawah Direktorat Operasi Pembangkit Batubara	1. Ensuring the management of the Power Plant Unit to maintain sustainability maturity of the management and performance of the Power Plant Unit. 2. Ensuring that the Power Plant Unit is able to achieve the operational performance targets set out in the Company's Long Term Plan (RJPP) and the Company's Annual Budget and Operational Plan (ABOP) and maintain the soundness of the Power Plant Unit to ensure sustainability and support the Company's growth. 3. Ensuring portfolio control of Power Plant Unit performance including the performance of Power Purchase Agreement (PPA) contracts. 4. Ensuring the planning and control of operations and maintenance so that the level of unit readiness, efficiency, quality and reliability is world-class while taking into account commercial aspects to obtain competitive selling prices. 5. Ensuring the management of operations and maintenance refers to the best practices principles to ensure the continuous improvement of power plant performance in accordance with the predetermined performance targets. 6. Ensuring the planning and control of primary energy both short and long term by taking into account internal conditions and market needs/opportunities, as well as to ensure the smooth operation of the Power Plant Unit. 7. Ensuring the planning, analysis and evaluation of maintenance schedule preparation by implementing the outage management system optimally. 8. Ensuring control of the electricity operation and trading system, as well as control of budgets and service contracts for O&M and AMC services. 9. Evaluating and developing policies within the Divisions and Units under the Directorate of Coal Power Plant Operations.

Jabatan Position	Tugas Pengawasan Duties and Responsibilities	
Direktur Pengembangan dan Niaga Director of Development and Commerce	1. Memastikan pengelolaan dan pengembangan Strategi Bisnis dan Pemasaran untuk mendukung pengembangan bisnis perusahaan. 2. Memastikan bahwa bisnis yang dijalankan dan akan dikembangkan mampu mencapai sasaran yang ditetapkan dalam RJPP maupun RKAP serta mendukung *sustainability* dan menjamin pertumbuhan Perusahaan. 3. Memastikan pengelolaan kegiatan pengembangan bisnis (baik pengembangan aset, pengembangan usaha, pengelolaan IPP) dengan proses kajian rencana dan rancangan pengembangan secara profesional, dalam rangka mendukung *sustainability* pertumbuhan Perusahaan. 4. Memastikan pelaksanaan penyusunan kontrak-kontrak bisnis dapat memenuhi syarat baik secara teknis, komersial dan hukum serta memenuhi kinerja keuangan Perusahaan. 5. Memastikan pengelolaan dan pengendalian proses kegiatan *supply chain* dan *purchasing management*, agar dapat mendukung kelancaran proses bisnis perusahaan. 6. Memastikan pengelolaan kegiatan konstruksi dan PMO pembangkitan beserta turunannya dapat berjalan *on time, on cost* dan *on scope.* 7. Mengevaluasi dan mengembangkan kebijakan-kebijakan dalam Divisi di bawah Direktorat Pengembangan Bisnis dan Niaga.	1. Ensuring the management and development of Business and Marketing Strategies to support the Company's business development. 2. Ensuring that the business carried out and will be developed is able to achieve the targets set in the RJPP and ABOP and support sustainability and ensure the growth of the Company. 3. Ensuring the management of business development activities (both asset development, business development, IPP management) with a professional development plan and design review process, in order to support the sustainability of the Company's growth. 4. Ensuring the implementation of business contracts preparation can meet the requirements both technically, commercially and legally and meet the Company's financial performance. 5. Ensuring the management and control of the process of supply chain activities and purchasing management, in order to support the smooth running of the Company's business processes. 6. Ensuring the management of construction activities and electric power generator PMO and its derivatives can run on time, on cost and on scope. 7. Evaluating and developing policies in the Division under the Directorate of Business Development and Commerce.
Direktur Keuangan Director of Finance	1. Memastikan tersusunnya pengelolaan anggaran perusahaan dilakukan secara optimal sesuai strategi dan program perusahaan, yang ditetapkan dalam RJPP maupun RKAP. 2. Mengelola perencanaan dan pelaksanaan pendanaan Perusahaan. 3. Memastikan pengelolaan keuangan perusahaan secara optimal guna menjamin likuiditas dalam mendukung kegiatan perusahaan. 4. Memastikan pengelolaan kegiatan akuntansi perusahaan sesuai kaidah akuntansi yang berlaku. 5. Melakukan *monitoring* terhadap pengelolaan keuangan Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi, untuk memastikan integrasi dengan kebijakan pengelolaan keuangan Perusahaan. 6. Memastikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dan strategi dalam pengelolaan perolehan sumber pendanaan termasuk identifikasi penyedia dan ketersediaan sumber pinjaman lokal dan global. 7. Memastikan berjalannya kegiatan manajemen risiko dan kepatuhan sesuai dengan strategi Perusahaan dalam rangka memperkecil dan mengeliminasi dampak finansial atau non-finansial. 8. Memastikan pengelolaan bisnis proses, manajemen mutu dan teknologi informasi Perusahaan mendukung pencapaian kinerja operasional ekselen dan pengembangan Perusahaan serta memastikan pengembangan sistem manajemen aset Perusahaan dikelola mengacu pada standar kelas dunia. 9. Mengevaluasi dan mengembangkan kebijakan-kebijakan dalam Divisi dan satuan di bawah Direktorat Keuangan.	1. Ensuring that the Company's budget management is conducted optimally in accordance with the Company's strategies and programs, as stipulated in the RJPP and ABOP. 2. Managing the planning and implementation of the Company's funding. 3. Ensuring optimal management of the Company's finances to ensure liquidity in supporting the Company's activities. 4. Ensuring the management of the Company's accounting activities in accordance with applicable accounting principles. 5. Monitoring the financial management of Subsidiaries and Affiliated Companies, to ensure integration with the Company's financial management policies. 6. Ensuring the planning, implementation and evaluation of policies and strategies in managing the acquisition of funding sources including identification of providers and availability of local and global loan sources. 7. Ensuring the implementation of risk management and compliance activities in accordance with the Company's strategy in order to minimize and eliminate financial or non-financial impacts. 8. Ensuring the management of the Company's business processes, quality management and information technology supports the achievement of excellent operational performance and Company development and ensures the development of the Company's asset management system is managed according to world-class standards. 9. Evaluating and developing policies in the Divisions and units under the Directorate of Finance.

Jabatan Position	Tugas Pengawasan Duties and Responsibilities	
Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi Director of Human Capital Management and Administration	1. Memastikan pengelolaan human capital dan organisasi dilakukan secara optimal dan mencapai sasaran yang ditetapkan dalam RJPP maupun RKAP serta mendukung *sustainability* dan pertumbuhan Perusahaan. 2. Memastikan pengelolaan *human capital* dan pengembangan organisasi untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas. 3. Memastikan pengelolaan administrasi karyawan dan pengelolaan fasilitas kesejahteraan karyawan secara tertib. 4. Memastikan pengelolaan dan kesiapan human capital di internal Perusahaan, Anak Perusahaan dan keberadaan di Perusahaan Afiliasi, untuk mendukung perkembangan bisnis Perusahaan. 5. Memastikan pengelolaan pengembangan talenta untuk menjamin ketersediaan dan kesiapan human capital selaras dengan kebutuhan perusahaan. 6. Memastikan pengelolaan manajemen perubahan dan budaya perusahaan secara efektif untuk menciptakan lingkungan organisasi yang dinamis dan mampu menjawab tantangan persaingan. 7. Memastikan pengelolaan sistem otomatisasi *Human Capital* untuk mendukung kedinamisan dan keakuratan *database* Sistem Informasi *Human Capital*. 8. Memastikan penyusunan, pengkoordinasian dan evaluasi anggaran biaya fasilitas dan administrasi. 9. Memastikan pengelolaan pengembangan human capital melalui program pembelajaran yang selaras dengan kebutuhan Perusahaan. 10. Memastikan terpenuhinya kebutuhan Perusahaan terkait fasilitas kerja, fasilitas kantor, kesekretariatan, pemeliharaan gedung.	1. Ensuring the management of human capital and organization is conducted optimally and achieves the targets set in RJPP and ABOP as well as supporting the sustainability and growth of the Company. 2. Ensuring human capital management and organizational development to enhance motivation and productivity. 3. Ensuring the management of employee administration and the management of employee welfare facilities in an orderly manner. 4. Ensuring the management and readiness of human capital within the Company, Subsidiaries and presence in Affiliated Companies, to support the Company's business development. 5. Ensuring the management of talent development to ensure the availability and readiness of human capital in line with Company needs. 6. Ensuring effective management of change management and corporate culture to create a dynamic organizational environment capable of responding to competitive challenges. 7. Ensuring the management of the Human Capital automation system to support the dynamism and accuracy of the Human Capital Information System database. 8. Ensuring the preparation, coordination and evaluation of facility and administration cost budgets. 9. Ensuring the management of human capital development through learning programs that are aligned with the needs of the Company. 10. Ensuring the fulfillment of the Company's needs related to work facilities, office facilities, secretarial, building maintenance.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors

Direksi memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana tahunan dan jangka menengah korporasi konsisten dengan tujuan jangka panjang, dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif untuk meningkatkan daya saing, menanggapi perhatian dan harapan pemangku kepentingan, memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan serta menciptakan nilai yang berkelanjutan. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dijalankan sesuai dengan tujuan Perusahaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan secara tahunan dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta *Key Performance Indicators* (KPI). RKAP dan KPI tahun 2022 telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Pemegang Saham dalam RUPS tanggal 29 Januari 2022. Direksi telah melakukan inisiatif upaya pencapaian target-target RKAP dan KPI di tahun 2022 sebagai berikut:

The Board of Directors ensures that the Corporation's mission, vision, goals, targets, strategies, and annual and medium-term plans are consistent with long-term objectives, by effectively utilizing innovation and technology to enhance competitiveness, respond to stakeholder concerns and expectations, fulfill social and environmental responsibilities and create sustainable value. The implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors is carried out in accordance with the Company's objectives set out in the Company's Long-Term Plan (RJPP) and annually set out in the form of the Company's Annual Budget and Operational Plan (RKAP) and Key Performance Indicators (KPIs). The 2022 ABOP and KPIs were approved by the Board of Commissioners and Shareholders at the GMS dated January 29, 2022. The Board of Directors has undertaken initiatives to achieve the ABOP and KPI targets in 2022 as follows:

Inisiatif Upaya Pencapaian Target RKAP dan KPI di tahun 2022
Initiatives to Achieve ABOP and KPI Targets in 2022

Aspek Aspect	Program kerja Work Program	
Nilai Ekonomi Sosial Social Economic Value	1. Memastikan Capaian Angka *Equivalent Availability Factor* (EAF) Pembangkit Jawa Bali 2. *Monitoring* Efisiensi Biaya Pokok Penyediaan Pembangkit 3. Memastikan Capaian Angka *Equivalent Forced Outage Rate* (EFOR) Jawa Bali 4. Mengukur Tingkat *Specific Fuel Consumption* (SFC) 5. *Monitoring* EBITDA	1. Ensuring the Achievement of Equivalent Availabiltiy Factor (EAF) of Java Bali Power Plants 2. Monitoring the Efficiency of Power Plant Cost of Supply 3. Ensuring the Achievement of Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) of Java Bali 4. Measuring Specific Fuel Consumption (SFC) Rate 5. Monitoring EBITDA
Inovasi Model Bisnis Business Model Innovation	1. Mengoptimalkan Sinergi Antar Anak Perusahaan Lain (tidak termasuk Sinergi Unit PLN) 2. Mengukur *Maturity Level* ERM 3. Meningkatkan Pendapatan diluar PLN Grup 4. Mengimplementasikan *Co firing biomass*	1. Optimizing Synergy Between Other Subsidiaries (excluding PLN Unit Synergy) 2. Measuring ERM Maturity Level 3. Increasing Revenue outside PLN Group 4. Implementing biomass co-firing
Kepemimpinan Teknologi Technology Leadership	1. Mengimplementasikan *Digital Power Plant* 2. Mengimplementasikan *Program Making Digital Talent*	1. Implementing Digital Power Plant 2. Implementing Making Digital Talent Program
Pengembangan Investasi Investment Development	1. *Monitoring Milestone* JVC PLTS Cirata 2. Memastikan Tingkat Proper unit (*Beyond Compliance*)	1. Monitoring Milestone of JVC Cirata SPP 2. Ensuring the unit's Proper Level (Beyond Compliance)
Pengembangan Talenta Talent Development	1. Mengukur % Perempuan dalam *nominated talent* 2. Mengukur % Milenial (<42 tahun) dalam *nominated talent*	1. Measuring the % of Women in nominated talent 2. Measuring the % of Millennials (<42 years old) in nominated talent
Aspek Kepatuhan Compliance Aspect	1. Mematuhi Keselamatan Ketenagalistrikan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Memastikan Ketepatan Penyampaian Laporan dan Akurasi data Kinerja	1. Complying with Electricity Safety and Environmental Management 2. Ensuring the Accuracy of Report Submission and Performance data Accuracy

Sepanjang tahun 2022, Direksi juga telah mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Perusahaan berdasarkan aspek dan program kerja Direksi sebanyak 15 keputusan.

Throughout 2022, the Board of Directors has also issued 15 decisions related to the implementation of duties and responsibilities of managing the Company based on the aspects and work programs of the Board of Directors.

Rapat Direksi
Board of Directors Meeting

Sebagaimana diatur dalam BoD *manual* dan *Board Manual*, Rapat Direksi diadakan setiap kali dianggap perlu, namun sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan. Rapat Direksi dapat diadakan di luar jadwal rutin, jika dianggap perlu serta bersifat segera dan strategis, dengan agenda hal-hal yang memerlukan pengambilan keputusan. Dalam pelaksanaannya, Direksi mengupayakan agar Rapat diselenggarakan minimal satu kali dalam satu minggu (setiap hari Kamis).

As stipulated in the BoD manual and Board Manual, Board of Directors Meetings are held whenever deemed necessary, but at least once in 1 (one) month. Board of Directors Meetings may be held outside the regular schedule, if deemed necessary and of an immediate and strategic nature, with an agenda of matters requiring decision-making. In its implementation, the Board of Directors strives for the Meeting to be held at least once a week (every Thursday).

Rencana rapat Direksi disusun sebelum tahun berjalan yang membahas agenda rutin dan agenda non rutin (lain-lain). Agenda rutin terdiri dari Laporan Kondisi Pasar, Posisi Perusahaan dan Laporan Manajemen. Agenda non rutin (lain-lain) adalah hal-hal diluar agenda rutin yang perlu dibahas sebagai laporan kepada Direksi maupun memerlukan persetujuan Direksi atau pembahasan atas arahan/keputusan Dewan Komisaris dan/atau RUPS.

The Board of Directors meeting plan is prepared prior to the current year which discusses routine agenda and non-routine agenda (others). Routine agenda consists of the Market Condition Report, Company Position and Management Report. Non-routine agenda (others) are matters outside the routine agenda that need to be discussed as a report to the Board of Directors or require approval of the Board of Directors or discussion of the directives/decisions of the Board of Commissioners and/or GMS.

Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta pengambilan keputusan secara kolegial terkait fungsi pengelolaan Perusahaan melalui mekanisme Rapat Internal Direksi. Selain itu, dalam rangka pelaporan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan fungsi pengelolaan Perusahaan salah satunya dilakukan melalui Rapat Pengawasan Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Direksi. Direksi juga dapat mengadakan Rapat Konsultasi dengan mengundang Dewan Komisaris. Direksi telah melaksanakan 28 kali Rapat Internal Direksi selama tahun 2022, dengan agenda dan tingkat kehadiran Direksi adalah sebagai berikut:

The Board of Directors carries out duties and responsibilities as well as collegial decision-making related to the Company's management function through the mechanism of the Internal Meeting of the Board of Directors. In addition, in order to report to the Board of Commissioners on the implementation of the Company's management function, one of which is conducted through the Board of Commissioners Supervisory Meeting attended by the Board of Directors. The Board of Directors may also hold Consultation Meetings by inviting the Board of Commissioners. The Board of Directors conducted 28 Internal Meetings of the Board of Directors during 2022, with the agenda and attendance level of the Board of Directors as follows:

Rapat Internal Direksi Tahun 2022

Internal Meeting of the Board of Directors in 2022

No.	Waktu Pelaksanaan Time of Implementation	Agenda	
1.	14 Januari 2022 January 14, 2022	1. Penyampaian Hasil *Assessment* GCG Tahun 2021. 2. Persiapan Rapat Kerja Tahun 2022.	1. Submission of GCG Assessment Results for 2021. 2. Preparation for the 2022 Work Meeting.
2.	30 Januari 2022 January 30, 2022	1. Pembahasan Arahan Direksi PJB dalam RUPS RKAP Anak Perusahaan. 2. KPI Anak Perusahaan 2022.	1. Discussion of Directives of PJB's Board of Directors in the GMS of Subsidiaries' ABOP. 2. KPI of Subsidiaries in 2022.
3.	17 Februari 2022 February 17, 2022	1. Penyampaian Progres Audit Laporan Keuangan PJB Group Tahun 2021. 2. Laporan Implementasi dan Evaluasi HSSE Bulan Januari 2022.	1. Submission of Audit Progress of PJB Group's Financial Statements for 2021. 2. HSSE Implementation and Evaluation Report for January 2022.
4.	23 Februari 2022 February 23, 2022	1. Laporan Kinerja Januari 2022 & *Action Tracker* PBR. 2. Laporan Progres Proyek Pengembangan Usaha.	1. Performance Report for January 2022 & PBR Action Tracker. 2. Progress Report of Business Development Project.
5.	17 Maret 2022 March 17, 2022	1. Laporan Kinerja Bulan Februari. 2. Laporan Implementasi HSSE Bulan Februari. 3. Laporan Progres Proyek Pengembangan Usaha. 4. Laporan Progres Audit.	1. Performance Report for February. 2. HSSE Implementation Report for February. 3. Progress Report of Business Development Project. 4. Audit Progress Report.
6.	5 April 2022 April 5, 2022	Laporan Progres Persiapan PJB untuk Program *Subholding* PLN.	PJB Preparation Progress Report for PLN Subholding Program.
7.	12 April 2022 April 12, 2022	Konsultasi terkait Proyek *Power Quality.*	Consultation related to Power Quality Project.
8.	14 April 2022 April 14, 2022	Persiapan Kerjasama dengan TNI AD untuk Penugasan Pengembangan Potensi PLTA di DAS Mamberamo Papua.	Preparation of Cooperation with the Army for the Assignment of HPP Potential Development in Mamberamo Watershed Papua.
9.	20 Mei 2022 May 20, 2022	Laporan Progres Persiapan Transisi *Holding* & *Sub Holding.*	Progress Report on Preparation of Holding & Sub Holding Transition.

No.	Waktu Pelaksanaan Time of Implementation	Agenda	
10.	23 Mei 2022 May 23, 2022	1. Permohonan Persetujuan Eksekusi Pekerjaan Relokasi PLTG Jakabaring & Batanghari. 2. Permohonan Persetujuan Penugasan Proyek EBT.	1. Request for Approval of Execution of Jakabaring & Batanghari GTPP Relocation Work. 2. Request for Approval of the NRE Project Assignment.
11.	8 Juni 2022 June 8, 2022	Persiapan RUPS LPT Tahun 2021.	Preparation for the 2021 LPT GMS.
12.	16 Juni 2022 June 16, 2022	Konsolidasi internal dan persiapan holdingisasi.	Internal consolidation and preparation for holding.
13.	24 Juni 2022 June 24, 2022	Konsultasi PLTB Tanah Laut.	Consultation of Tanah Laut WPP.
14.	27 Juni 2022 June 27, 2022	Konsultasi terkait Hasil *Focused Group Discussion* (FGD) *Streamline Subsidiary* Inisiatif *Quick Win* Transformasi Portofolio PLN Group Inisiatif *Cluster* Enjiniring (Inisiatif A-15) dan Inisiatif *Cluster* Konstruksi (Inisiatif A-16).	Consultation related to the results of Focused Group Discussion (FGD) on Streamline Subsidiary Initiative Quick Win Portfolio Transformation of PLN Group, Engineering Cluster Initiative (Initiative A-15) and Construction Cluster Initiative (Initiative A-16).
15.	15 Juli 2022 July 15, 2022	1. Laporan Rencana Akuisisi PLTGU Sengkang. 2. Permohonan Keputusan Pembangunan PLTS Substitusi PS. 3. Laporan Rencana Pembelian Gedung RE. 4. Laporan Pembahasan Integrasi Bisnis RE-PPN & REC-PLNE.	1. Report on the Acquisition Plan of Sengkang CCPP. 2. Request for Decision on the Construction of PS Substitution SPP. 3. Report on RE Building Purchase Plan. 4. RE-PPN & REC-PLNE Business Integration Discussion Report.
16.	20 Juli 2022 July 20, 2022	1. Laporan Program *Paperless*. 2. Paparan RJPP PT PJBS 2022 – 2026.	1. Paperless Program Report. 2. Exposure of PT PJBS' Long-Term Plan (RJPP) 2022 - 2026.
17.	10 Agustus 2022 August 10, 2022	1. Laporan Persiapan PJB *Connect* 2022. 2. Laporan Monetisasi REMDO. 3. Konsultasi Rencana Akuisisi Saham PT Rekayasa Industri pada PT Rekadaya Elektrika.	1. PJB Connect 2022 Preparation Report. 2. REMDO Monetization Report. 3. Consultation on PT Rekayasa Industri's Share Acquisition Plan in PT Rekadaya Elektrika.
18.	18 Agustus 2022 August 18, 2022	Penyampaian Postur Keuangan Rancangan RKAP 2023.	Submission of Financial Posture of the 2023 ABOP Draft.
19.	23 Agustus 2022 August 23, 2022	Laporan Progres Persiapan Transisi *Holding & Sub Holding*.	Progress Report on Holding & Sub Holding Transition Preparation.
20.	24 Agustus 2022 August 24, 2022	1. Rencana Pengembangan PLTU Paiton 1-2 dalam Mendukung Transisi Energi Bersih. 2. Laporan Ratifikasi Peraturan Direksi mengenai Manajemen Kinerja Korporasi dan Penilaian Kinerja Organisasi sebagai Dampak Holdingisasi.	1. Development Plan of Paiton 1-2 CFPP in Supporting Clean Energy Transition. 2. Ratification Report of the Board of Directors Regulation on Corporate Performance Management and Organizational Performance Assessment as an Impact of Holding.
21.	29 September 2022 September 29, 2022	1. Laporan Rencana Pengembangan Proyek PLTS Karangkates 100 MW. 2. Laporan Progres dan Persiapan HUT. 3. Laporan Progres dan Persiapan PJB Connect.	1. Report on the Development Plan of the 100 MW Karangkates SPP Project. 2. Anniversary Progress and Preparation Report. 3. PJB Connect Progress and Preparation Report.
22.	10 Oktober 2022 October 10, 2022	Laporan Rencana Pengembangan Proyek PLTS Karangkates 100 MW.	Report on the Development Plan of the 100 MW Karangkates SPP Project.
23.	21 Oktober 2022 October 21, 2022	1. Laporan Update Arahan Direksi/Program Korporat. 2. Profil Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi (Induksi). 3. Konsultasi Strategi PPN (*Merger* vs *Dormant*). 4. Laporan *Update* Persiapan HSH *Retreat*.	1. Update Report of Board of Directors Directives/ Corporate Programs. 2. Profile of Subsidiaries and Associated Companies (Induction). 3. VAT Strategy Consultation (Merger vs Doormant). 4. Update Report of HSH Retreat Preparation.
24.	25 Oktober 2022 October 25, 2022	Usulan RKAP 2023.	Proposed 2023 ABOP.

No.	Waktu Pelaksanaan Time of Implementation	Agenda	
25.	11 November 2022 November 11, 2022	1. Konsolidasi Internal Direksi (Rapat Terbatas). 2. Progres Relokasi Jakabaring dan Batanghari. 3. Progres Proyek PLTS Terapung Cirata. 4. Konsultasi Strategi PPN.	1. Consolidation of Internal Board of Directors (Limited Meeting). 2. Jakabaring and Batanghari Relocation Progress. 3. Progress of Cirata Floating SPP Project. 4. VAT Strategy Consultation.
26.	28 November 2022 November 28, 2022	Persetujuan Tindak Lanjut Pembentukan *Holding* dan *Sub Holding* masa *Legal End-State.*	Approval of Follow-up to the Establishment of Holding and Sub Holding during Legal End-State.
27.	21 Desember 2022 December 21, 2022	1. Persetujuan Usulan RJPP PJBI. 2. Laporan Progres Proyek Penugasan / Pengembangan Usaha: a. PLTMH Prafi b. PLTS Cirata c. Relokasi Jakabaring dan Batanghari d. *Add On* Muara Tawar e. PLTS Karangkates f. KTT / *Additional Demand* 3. Persetujuan Fasilitas Direksi - Dewan Komisaris.	1. Approval of the proposed PJBI's RJPP. 2. Progress Report of Project Assignment/Business Development: a. Prafi MHPP b. Cirata SPP c. Jakabaring and Batanghari Relocation d. Muara Tawar Add On e. Karangkates SPP f. Summit/Additional Demand 3. Approval of Board of Directors - Board of Commissioners Facilities.
28.	28 Desember 2022 December 28, 2022	Pembahasan Rencana Penerbitan Kebijakan Masa Transisi Pasca *Legal End State.*	Discussion of the Plan for Issuance of Transition Period Policy Post Legal End State.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Direksi dalam Rapat Tahun 2022

Frequency and Attendance Rate of the Board of Directors in Meetings in 2022

Nama Name	Rapat Internal Internal Meeting		Rapat Pengawasan Supervision Meeting		Rapat Umum Pemegang Saham General meeting of Shareholders	
	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Tingkat Kehadiran Attendance Rate	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Tingkat Kehadiran Attendance Rate	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Gong Matua Hasibuan[1]	20	100%	8	100%	2	100%
Ruly Firmansyah[1]	8	100%	3	75%	-	-
M. Yossy Noval A.	28	100%	12	100%	2	100%
Rachmanoe Indarto	27	96%	12	100%	2	100%
Iwan Purwana[2]	20	100%	8	100%	2	100%
R Rawan Insani[3]	20	100%	8	100%	2	100%
Karyawan Aji	24	86%	12	100%	2	100%
Muhamad Reza[2]	8	100%	4	100%	-	-
Dwi Hartono[3]	8	100%	4	100%	-	-

Keterangan:
1. RUPS Sirkuler tanggal 21 September 2022, memberhentikan dengan hormat Sdr. Gong Matua Hasibuan sebagai Direktur Utama mengangkat dan menetapkan Sdr. Ruly Firmansyah sebagai Direktur Utama
2. RUPS Sirkuler tanggal 21 September 2022, memberhentikan dengan hormat Sdr. Iwan Purwana sebagai Direktur Pengembangan dan Niaga serta mengangkat dan menetapkan Sdr. Muhamad Reza sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga.
3. RUPS Sirkuler tanggal 21 September 2022, memberhentikan dengan hormat Sdr. R. Rawan Insani sebagai Direktur Keuangan serta mengangkat dan menetapkan Sdr. Dwi Hartono sebagai Direktur Keuangan.

Description:
1. Circular GMS dated September 21, 2022, respectfully dismissed Mr. Gong Matua Hasibuan as President Director as well as appointed and determined Mr. Ruly Firmansyah as President Director.
2. Circular GMS dated September 21, 2022, respectfully dismissed Mr. Iwan Purwana as Director of Development and Commerce as well as appointed and determined Mr. Muhamad Reza as Director of Business Development and Commerce.
3. Circular GMS dated September 21, 2022, respectfully dismissed Mr. R. Rawan Insani as Director of Finance as well as appointed and determined Mr. Dwi Hartono as Director of Finance.

Program Pengembangan Kompetensi Direksi

Competency Development Program of the Board of Directors

Direksi mengikuti program pengembangan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi yang relevan dengan bisnis Perusahaan dalam rangka mendukung tugas dan tanggung jawab Direksi sesuai dengan Pedoman Tata Laksana Kerja Direksi (*Board of Directors Manual*) dan *Board Manual*. Selama tahun 2022, anggota Direksi telah mengikuti kegiatan program pengembangan kompetensi sebagaimana telah dijelaskan pada uraian terkait Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Kepala SPI.

The Board of Directors participates in development programs to improve knowledge and competencies relevant to the Company's business in order to support the duties and responsibilities of the Board of Directors in accordance with the Board of Directors Manual and the Board Manual. During 2022, members of the Board of Directors have participated in competency development program activities as has been described in the description related to Education and Training of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Head of IAU.

Program Pengenalan Direksi

Induction Program for the Board of Directors

Perusahaan melaksanakan program pengenalan (Program Induksi) bagi anggota Direksi yang baru menjabat sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Laksana Kerja Direksi (*Board of Directors Manual*) dan *Board Manual*. Sekretaris Perusahaan sebagai pelaksana Program Pengenalan bagi Direktur yang baru diangkat, mempersiapkan materi program pengenalan yang meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di Perusahaan.
2. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya.
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan audit eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit.
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.

Program pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perusahaan/ Anak Perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perusahaan dimana program tersebut dilaksanakan. Pada tahun 2022, telah dilaksanakan program pengenalan bagi Direktur yang baru diangkat sebagai berikut:

The Company carries out an Induction Program for newly appointed members of the Board of Directors as stipulated in the Board of Directors Manual and the Board Manual. The Corporate Secretary, as the executor of the Induction Program for newly appointed Directors, prepares the induction program materials which include:

1. Implementation of the GCG principles in the Company;
2. An overview of the Company relating to its purpose, nature and scope of activities, financial and operating performance, strategy, short-term and long-term business plans, competitive position, risks and various other strategic issues in accordance with the Company's RJPP;
3. Information relating to delegated authority, internal audit and external audit, internal control systems and policies, including the Audit Committee;
4. Information regarding the duties and responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners.

The Company induction program can be in the form of presentations, meetings, visits to the Company/Subsidiaries and document review or other programs deemed appropriate to the Company where the program is carried out. In 2022, an induction program for newly appointed Directors has been implemented as follows:

Program Induksi Anggota Direksi Baru Tahun 2022
Induction Program for New Members of the Board of Directors in 2022

No.	Tanggal Date	Agenda	Anggota Direksi/ Dewan Komisaris Member of the Board of Directors/Board of Commissioners
1	16 Februari 2022 February 16, 2022	1. Kebijakan Penerapan GRC (*Governance, Risk and Compliance*). 2. Pengenalan Pembangkit serta Proses Bisnis Operasi dan Pemeliharaan. 1. GRC (Governance, Risk and Compliance) Implementation Policy. 2. Introduction to Power Plant as well as Operation and Maintenance Business Process.	1. Dedeng Hidayat 2. Emir Kresna Wardana 3. Bagus Puruhito
2	26 September 2022 September 26, 2022	Program Kerja perihal *Holding* dan *Sub Holding*. Work Program regarding Holding and Sub Holding.	1. Ruly Firmansyah 2. Muhamad Reza 3. Dwi Hartono
3	13 Oktober 2022 October 13, 2022	*Corporate Exposure*.	1. Ruly Firmansyah 2. Muhamad Reza 3. Dwi Hartono
4	17 Oktober 2022 October 17, 2022	Program Kerja perihal *Holding* dan *Sub Holding*. Work Program regarding Holding and Sub Holding.	Evy Haryadi
5	19 Oktober 2022 October 19, 2022	Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Company's Long-Term Plan (RJPP).	1. Ruly Firmansyah 2. Muhamad Reza 3. Dwi Hartono
6	4 November 2022 November 4, 2022	Progres Proyek EBT. Progress of the NRE Project.	1. Ruly Firmansyah 2. Dwi Hartono
7	10 November 2022 November 10, 2022	1. Kebijakan penerapan GRC (*Governance, Risk, and Compliance*). 2. Kebijakan Perdir 021/2021 jo 032/2021 tentang Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan di Lingkungan PT PJB. 1. GRC (Governance, Risk, and Compliance) implementation policy. 2. Policy on Regulation of the Board of Directors 021/2021 in conjunction with 032/2021 on the Limitation of Decision Making Authority within PT PJB.	1. Ruly Firmansyah 2. Muhamad Reza 3. Dwi Hartono
8	14 November 2022 November 14, 2022	*I-Core* dan *Cofiring*. I-Core and Cofiring.	1. Ruly Firmansyah 2. Muhamad Reza 3. Dwi Hartono

Penilaian Kinerja Komite–Komite dan Unit Kerja atau Organ Pendukung Tata Kelola dan Pengendalian Internal di Bawah Direksi
Performance Assessment of Committees and Work Units or Supporting Organs for Governance and Internal Control under the Board of Directors

Sampai dengan akhir tahun 2022, belum terdapat komite di bawah Direksi dengan mempertimbangkan skala bisnis dan struktur organisasi Perusahaan saat ini yang dipandang telah memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas Direksi. Oleh karena itu, tidak terdapat penilaian atas kinerja komite dibawah Direksi sepanjang tahun 2022.

Until the end of 2022, there was no committee under the Board of Directors considering the scale of business and the current organizational structure of the Company which was deemed adequate to support the implementation of duties of the Board of Directors. Therefore, there is no assessment of the performance of committees under the Board of Directors throughout 2022.

Perusahaan telah memiliki organ pendukung tata kelola Perusahaan dan pengendalian internal yaitu Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawasan Internal, Satuan Pelayanan Hukum, dan Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Direktur Utama secara berkala melakukan penilaian kinerja Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawasan Internal dan Satuan Hukum, Risiko, dan Kepatuhan berdasarkan parameter kriteria Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas. Pelaksanaan tugas organ pendukung tersebut tercermin dalam *Key Performance Indicator* (KPI) yang disepakati sebagai acuan dan ukuran pencapaian target pelaksanaan tugas. Selain itu, penilaian atas pelaksanaan GCG atas organ pendukung tata kelola dan pengendalian internal juga menjadi bagian dalam penilaian penerapan GCG Perusahaan aspek Direksi berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No.16/S.MBU/2012.

The Company has had supporting organs for corporate governance and internal control, namely the Corporate Secretary, Internal Audit Unit, Legal Services Unit, and Risk Management and Compliance Unit. The President Director periodically assesses the performance of the Corporate Secretary, Internal Audit Unit as well as the Legal, Risk and Compliance Unit based on the parameters of the Completeness and Duties Implementation criteria. The implementation of duties of these supporting organs is reflected in the Key Performance Indicator (KPI) agreed upon as a reference and measure of the achievement of duty implementation targets. In addition, the assessment of GCG implementation of the supporting organs of governance and internal control is also part of the assessment of GCG implementation of the Company in the aspect of the Board of Directors based on the Decree of the Secretary of the Minister of SOEs No.16/S.MBU/2012.

Penilaian Kinerja Direksi

Performance Assessment of the Board of Directors

Direksi melakukan evaluasi secara mandiri (*self-assessment*) baik individu maupun kolegial atas realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta capaian target-target KPI sebagai bagian dari laporan yang akan disampaikan dalam pembahasan kinerja Perusahaan dengan Dewan Komisaris dalam Rapat Pengawasan. Evaluasi tersebut dilaksanakan setiap bulan dan pada akhir periode tahun buku dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan Board Manual. Direksi juga menyampaikan laporan manajemen yang memuat realisasi program kerja berdasarkan RKAP serta menyampaikan realisasi capaian KPI korporat dan masing-masing Direksi secara triwulanan dan tahunan. Dewan Komisaris melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi secara kolegial dan individu berdasarkan laporan manajemen dan realisasi *Key Performance Indicators* (KPI) sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pengawasan. RUPS melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi berdasarkan Laporan Keuangan, Laporan realisasi RKAP (Manajemen), Laporan Tahunan dan Realisasi *Key Performance Indicators* (KPI) serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Pengukuran keberhasilan kinerja Direksi oleh RUPS yang merupakan hasil kerja kolegial dari seluruh Anggota Direksi tercermin dari pencapaian KPI Korporat tahun 2022 sebagai berikut:

The Board of Directors conducts self-assessment both individually and collegially on the realization of the Company's Annual Budget and Operational Plan (ABOP) as well as the achievement of KPI targets as part of the report that will be submitted in the discussion of the Company's performance with the Board of Commissioners in the Supervisory Meeting. The evaluation is carried out every month and at the end of the financial year period with due observance of the provisions of the Articles of Association and the Board Manual. The Board of Directors also submits a management report containing the realization of the work program based on the ABOP and submits the realization of KPI achievements of the corporation and each of the Board of Directors on a quarterly and annual basis. The Board of Commissioners assesses the performance of the Board of Directors collegially and individually based on the management report and the realization of Key Performance Indicators (KPI) as part of the implementation of supervisory duties. The GMS assesses the performance of the Board of Directors based on the Financial Report, ABOP (Management) realization report, Annual Report and Key Performance Indicators (KPI) realization as well as the implementation of good corporate governance. The measurement of the success of the Board of Directors' performance by the GMS, which is the result of the collegial work of all members of the Board of Directors, is reflected in the achievement of the Corporate KPIs in 2022 as follows:

Realisasi *Key Performance Indicators* Direksi 2022

Realization of the Board of Directors Key Performance Indicators in 2022

No.	Indikator Kinerja Kunci Key Performance Indicators	Bobot Weight	Nilai Capaian Achievement Value
1.	Nilai Ekonomi Sosial Social Economic Value	45	47.47
2.	Inovasi Model Bisnis Business Model Innovation	24	22.64
3.	Kepemimpinan Teknologi Technology Leadership	11	12.10
4.	Pengembangan Investasi Investment Development	10	9.67
5.	Pengembangan Talenta Talent Development	10	11.00
6.	Aspek Kepatuhan Compliance Aspect	Max (-8)/Max (-4)	0.00
	Nilai Kinerja Performance Value	**100**	**102,88**

Penilaian aspek Direksi termasuk organ pendukung tata kelola dan pengendalian internal terkait pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik juga dilakukan secara berkala baik oleh pihak independen maupun secara mandiri (*self-assessment*) secara bergantian setiap tahun. Hal tersebut merupakan bagian dari penilaian tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan kriteria penilaian sesuai dengan kerangka acuan yang diatur dalam Surat Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No.16/S.MBU/2012. Hasil penilaian penerapan tata kelola perusahaan yang baik tahun 2022 dilakukan oleh pihak independen yaitu Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, dimana pada aspek Direksi mencapai skor 33,9 dari skor maksimal 35,00 atau setara dengan 96,86 % dengan kategori Sangat Baik.

Assessment of the Board of Directors aspect, including the supporting organs of governance and internal control related to the implementation of good corporate governance, is also conducted periodically by both independent parties and self-assessment alternately every year. This is part of the assessment of good corporate governance based on assessment criteria in accordance with the terms of reference stipulated in the Decree of the Secretary of the Minister of SOEs No.16/S.MBU/2012. The results of the assessment of good corporate governance implementation in 2022 were conducted by an independent party, namely the BPKP Representative of East Java Province, where the Board of Directors aspect achieved a score of 33.9 out of a maximum score of 35.00 or equivalent to 96.86% in the Very Good category.

Hubungan Afiliasi, Kepemilikan Saham Serta Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi

Affiliation, Share Ownership and Work Relationship of the Board of Commissioners and Board of Directors

Dewan Komisaris dan Direksi sebagai organ utama tata kelola Perusahaan harus mampu bersikap independen dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan. Hubungan antara Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan kerja untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan fungsi pengelolaan Perusahaan. Dewan Komisaris dan Direksi memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebesar-besarnya untuk mencapai tujuan, meningkatkan nilai dan menjalankan peran strategis Perusahaan dalam pembangunan secara berkelanjutan, serta tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan *stakeholder* dengan kegiatan Perusahaan.

The Board of Commissioners and Board of Directors as the main organs of corporate governance must be able to act independently and avoid any form of conflict of interest. The relationship between the Board of Commissioners and Board of Directors is a work relationship to carry out the supervisory and management functions of the Company. The Board of Commissioners and Board of Directors ensure that every decision taken in the implementation of duties and authorities is as much as possible to achieve goals, increase value and carry out the Company's strategic role in sustainable development, as well as continuing to take into account the balance of stakeholder interests with the Company's activities.

Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris

Affiliation of Members of the Board of Commissioners

Anggota Dewan Komisaris harus mampu menjalankan fungsi pengawasan secara independen dan bebas benturan kepentingan semata-mata demi menjaga nilai Perusahaan dan pemangku kepentingan dalam jangka panjang khususnya dalam hal terdapat hubungan afiliasi. Hubungan afiliasi yang dimaksud mencakup hubungan keluarga dan keuangan antara anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi serta anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali Perusahaan. Hubungan afiliasi anggota Dewan Komisaris yang menjabat sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Members of the Board of Commissioners must be able to carry out supervisory functions independently and free of conflicts of interest solely for the sake of maintaining the value of the Company and stakeholders in the long term, especially in the event that there is an affiliation. Affiliation includes family and financial relationships between members of the Board of Commissioners with fellow members of the Board of Commissioners, members of the Board of Commissioners with members of the Board of Directors as well as members of the Board of Commissioners with Major and/or Controlling Shareholders of the Company. Affiliations of members of the Board of Commissioners who served throughout 2022 are as follows:

Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris

Affiliation of Members of the Board of Commissioners

Deskripsi Description	Jabatan Position	Hubungan Keluarga Dengan Family Relationship With			Hubungan Keuangan Dengan Financial Relationship With		
		Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders
Dedeng Hidayat[1]	Komisaris Utama President Commissioner	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Evy Haryadi[1]	Komisaris Utama President Commissioner	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Komang Parmita[2]	Komisaris Commissioner	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No

Deskripsi Description	Jabatan Position	Hubungan Keluarga Dengan Family Relationship With			Hubungan Keuangan Dengan Financial Relationship With		
		Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders
Emir Kresna Wardana	Komisaris (Independen) Commissioner (Independent)	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Bagus Puruhito	Komisaris (Independen) Commissioner (Independent)	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Jisman P. Hutajulu	Komisaris Commissioner	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Hendra Iswahyudi	Komisaris Commissioner	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Kenedy[2]	Komisaris Commissioner	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No

Keterangan:
1. RUPS Sirkuler tanggal 21 September 2022, memberhentikan dengan hormat Sdr. Dedeng Hidayat sebagai Komisaris Utama serta mengangkat dan menetapkan Sdr. Evy Haryadi sebagai Komisaris Utama.
2. RUPS Sirkuler tanggal 14 Desember 2022, memberhentikan dengan hormat Sdr. Komang Parmita sebagai Komisaris serta mengangkat dan menetapkan Sdr. Kenedy sebagai Komisaris.

Description:
1. Circular GMS dated September 21, 2022, respectfully dismissed Mr. Dedeng Hidayat as President Commissioner as well as appointed and determined Mr. Evy Haryadi as President Commissioner.
2. Circular GMS dated December 14, 2022, respectfully dismissed Mr. Komang Parmita as Commissioner as well as appointed and determined Mr. Kenedy as Commissioner.

Selain itu, seluruh anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang menjabat sepanjang tahun 2022 tidak memiliki hubungan afiliasi di perusahaan lain yang dilarang sesuai dengan ketentuan internal Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

In addition, all members of the Company's Board of Commissioners who served throughout 2022 had no affiliation in other companies that were prohibited in accordance with the Company's internal provisions and applicable laws and regulations.

Hubungan Afiliasi Anggota Direksi
Affiliation of Members of the Board of Directors

Anggota Direksi harus mampu menjalankan fungsi pengelolaan Perusahaan secara independen dan bebas benturan kepentingan semata-mata demi menjaga nilai Perusahaan dan pemangku kepentingan dalam jangka panjang khususnya dalam hal terdapat hubungan afiliasi. Hubungan afiliasi yang dimaksud mencakup hubungan keluarga dan keuangan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dengan sesama anggota Direksi serta anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali Perusahaan. Hubungan afiliasi anggota Direksi yang menjabat sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Members of the Board of Directors must be able to carry out the management function of the Company independently and free of conflicts of interest solely for the sake of maintaining the value of the Company and stakeholders in the long term, especially in the event that there is an affiliation. Affiliation includes family and financial relationships between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and fellow members of the Board of Directors as well as members of the Board of Directors and Major and/or Controlling Shareholders of the Company. Affiliations of members of the Board of Directors who served throughout 2022 are as follows:

Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris

Affiliation of Members of the Board of Directors

Deskripsi Description	Jabatan Position	Hubungan Keluarga Dengan Family Relationship With			Hubungan Keuangan Dengan Financial Relationship With		
		Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders
Gong Matua Hasibuan[1]	Direktur Utama President Director	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Ruly Firmansyah[1]	Direktur Utama President Director	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
M. Yossy Noval A.	Direktur Operasi Pembangkit Gas Director of Gas Plant Operations	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Rachmanoe Indarto	Direktur Operasi Pembangkit Batu Bara Director of Coal Plant Operations	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Iwan Purwana[2]	Direktur Pengembangan dan Niaga Director of Development and Commerce	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Muhamad Reza[2]	Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga Director of Business Development and Commerce	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
R. Rawan Insani[3]	Direktur Keuangan Director of Finance	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Dwi Hartono[3]	Direktur Keuangan Director of Finance	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Karyawan Aji	Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi Director of Human Capital Management and Administration	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No

Keterangan:
1. RUPS Sirkuler tanggal 21 September 2022, memberhentikan dengan hormat Sdr. Gong Matua Hasibuan sebagai Direktur Utama mengangkat dan menetapkan Sdr. Ruly Firmansyah sebagai Direktur Utama
2. RUPS Sirkuler tanggal 21 September 2022, memberhentikan dengan hormat Sdr. Iwan Purwana sebagai Direktur Pengembangan dan Niaga serta mengangkat dan menetapkan Sdr. Muhamad Reza sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga.
3. RUPS Sirkuler tanggal 21 September 2022, memberhentikan dengan hormat Sdr. R. Rawan Insani sebagai Direktur Keuangan serta mengangkat dan menetapkan Sdr. Dwi Hartono sebagai Direktur Keuangan.

Description:
1. Circular GMS dated September 21, 2022, respectfully dismissed Mr. Gong Matua Hasibuan as President Director as well as appointed and determined Mr. Ruly Firmansyah as President Director.
2. Circular GMS dated September 21, 2022, respectfully dismissed Mr. Iwan Purwana as Director of Development and Commerce as well as appointed and determined Mr. Muhamad Reza as Director of Business Development and Commerce.
3. Circular GMS dated September 21, 2022, respectfully dismissed Mr. R. Rawan Insani as Director of Finance as well as appointed and determined Mr. Dwi Hartono as Director of Finance.

Selain itu, seluruh anggota Direksi Perusahaan yang menjabat sepanjang tahun 2022 tidak memiliki hubungan afiliasi di perusahaan lain yang dilarang sesuai dengan ketentuan internal Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

In addition, all members of the Company's Board of Directors who served throughout 2022 had no affiliation in other companies that were prohibited in accordance with the Company's internal provisions and applicable laws and regulations.

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Beserta Keluarga

Share Ownership of Members of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors and Their Families

Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi secara berkala melaporkan kepemilikan sahamnya baik atas nama pribadi maupun keluarga pada Perusahaan dan/atau perusahaan lainnya untuk dicatat dalam Daftar Khusus. Kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi yang menjabat sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Members of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors periodically report their share ownership both in their personal and family names in the Company and/or other companies to be recorded in the Special Register. The share ownership of Members of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors who served throughout 2022 is as follows:

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Beserta Keluarga

Share Ownership of Members of the Board of Commissioners and Their Families

Deskripsi Description	Jabatan Position	Kepemilikan Saham Oleh Pribadi Pada Personal Share Ownership In		Kepemilikan Saham Oleh Keluarga Pada Family Share Ownership In	
		Perusahaan Company	Perusahaan Lain Other Companies	Perusahaan Company	Perusahaan Lain Other Companies
Dedeng Hidayat[1]	Komisaris Utama President Commissioner	-	-	-	-
Evy Haryadi[1]	Komisaris Utama President Commissioner	-	√	-	-
Komang Parmita[2]	Komisaris Commissioner	-	-	-	-
Emir Kresna Wardana	Komisaris (Independen) Commissioner (Independent)	-	-	-	-
Bagus Puruhito	Komisaris (Independen) Commissioner (Independent)	-	-	-	-
Jisman P. Hutajulu	Komisaris Commissioner	-	-	-	-
Hendra Iswahyudi	Komisaris Commissioner	-	-	-	-
Kenedy[2]	Komisaris Commissioner	-	-	-	-

Keterangan:
1. RUPS Sirkuler tanggal 21 September 2022, memberhentikan dengan hormat Sdr. Dedeng Hidayat sebagai Komisaris Utama serta mengangkat dan menetapkan Sdr. Evy Haryadi sebagai Komisaris Utama.
2. RUPS Sirkuler tanggal 14 Desember 2022, memberhentikan dengan hormat Sdr. Komang Parmita sebagai Komisaris serta mengangkat dan menetapkan Sdr. Kenedy sebagai Komisaris.

Description:
1. Circular GMS dated September 21, 2022, respectfully dismissed Mr. Dedeng Hidayat as President Commissioner as well as appointed and determined Mr. Evy Haryadi as President Commissioner.
2. Circular GMS dated December 14, 2022, respectfully dismissed Mr. Komang Parmita as Commissioner as well as appointed and determined Mr. Kenedy as Commissioner.

Kepemilikan Saham Anggota Direksi Beserta Keluarga

Share Ownership of Members of the Board of Directors and their families

Deskripsi Description	Jabatan Position	Kepemilikan Saham Oleh Pribadi Pada Personal Share Ownership In		Kepemilikan Saham Oleh Keluarga Pada Family Share Ownership In	
		Perusahaan Company	Perusahaan Lain Other Companies	Perusahaan Company	Perusahaan Lain Other Companies
Gong Matua Hasibuan[1]	Direktur Utama President Director	-	√	-	√
Ruly Firmansyah[1]	Direktur Utama President Director	-	√	-	-
M. Yossy Noval A.	Direktur Operasi Pembangkit Gas Director of Gas Plant Operations	-	-	-	-
Rachmanoe Indarto	Direktur Operasi Pembangkit Batu Bara Director of Coal Plant Operations	-	-	-	-
Iwan Purwana[2]	Direktur Pengembangan dan Niaga Director of Development and Commerce	-	-	-	-
Muhamad Reza[2]	Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga Director of Business Development and Commerce	-	-	-	-
R. Rawan Insani[3]	Direktur Keuangan Director of Finance	-	-	-	-
Dwi Hartono[3]	Direktur Keuangan Director of Finance	-	-	-	-
Karyawan Aji	Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi Director of Human Capital Management and Administration	-	-	-	-

Keterangan:

1. RUPS Sirkuler tanggal 21 September 2022, memberhentikan dengan hormat Sdr. Gong Matua Hasibuan sebagai Direktur Utama mengangkat dan menetapkan Sdr. Ruly Firmansyah sebagai Direktur Utama
2. RUPS Sirkuler tanggal 21 September 2022, memberhentikan dengan hormat Sdr. Iwan Purwana sebagai Direktur Pengembangan dan Niaga serta mengangkat dan menetapkan Sdr. Muhamad Reza sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga.
3. RUPS Sirkuler tanggal 21 September 2022, memberhentikan dengan hormat Sdr. R. Rawan Insani sebagai Direktur Keuangan serta mengangkat dan menetapkan Sdr. Dwi Hartono sebagai Direktur Keuangan.

Description:

1. Circular GMS dated September 21, 2022, respectfully dismissed Mr. Gong Matua Hasibuan as President Director as well as appointed and determined Mr. Ruly Firmansyah as President Director.
2. Circular GMS dated September 21, 2022, respectfully dismissed Mr. Iwan Purwana as Director of Development and Commerce as well as appointed and determined Mr. Muhamad Reza as Director of Business Development and Commerce.
3. Circular GMS dated September 21, 2022, respectfully dismissed Mr. R. Rawan Insani as Director of Finance as well as appointed and determined Mr. Dwi Hartono as Director of Finance.

Hubungan Kerja Dewan Komisaris Dengan Direksi

Work Relationship between the Board of Commissioners and Board of Directors

Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi merupakan implementasi atas tata kelola Perusahaan yang mengacu pada Anggaran Dasar dan *Corporate Governance Code* sebagai payung kebijakan atas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan Perusahaan. Sebagai organ utama tata kelola perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi menjalankan hubungan kerja secara *checks and balances* serta bersinergi demi kemajuan bisnis Perusahaan. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas pengelolaan Perusahaan yang dijalankan Direksi serta memberikan rekomendasi dalam rangka memastikan bahwa keputusan atas pengelolaan Perusahaan yang diambil Direksi semata-mata demi kepentingan jangka panjang Perusahaan. Direksi melaporkan secara berkala atas kegiatan dan capaian program kerja yang telah ditetapkan serta mempertimbangkan keputusan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris dalam setiap pengambilan keputusan strategis. *Corporate Governance Code* menjelaskan bahwa prinsip-prinsip Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris menghormati tugas dan wewenang Direksi dalam mengelola Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan;
2. Direksi menghormati tugas dan wewenang Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap kebijakan pengelolaan Perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
3. Setiap hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris merupakan hubungan yang bersifat formal kelembagaan, dalam arti senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan;
4. Sarana korespondensi baku yang digunakan dalam hubungan kerja Direksi Dewan Komisaris selain menggunakan surat-menyurat secara *hardcopy* juga menggunakan Tata Laksana Surat dan Kearsipan berdasarkan *Office Automation* yang berlaku di Perusahaan dan atau menggunakan email;
5. Setiap hubungan kerja yang bersifat informal dapat dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, namun tidak dapat digunakan sebagai kebijakan formal sebelum melalui mekanisme atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan;
6. Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi Perusahaan secara tepat waktu, lengkap, terukur dan akurat;
7. Direksi bertanggung jawab atas penyampaian informasi Perusahaan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu, lengkap, terukur dan akurat.

The work relationship between the Board of Commissioners and Board of Directors is an implementation of the corporate governance that refers to the Articles of Association and Corporate Governance Code as an umbrella policy for the implementation of good corporate governance within the Company. As the main organ of corporate governance, the Board of Commissioners and Board of Directors carry out a work relationship in checks and balances and synergize for the advancement of the Company's business. The Board of Commissioners supervises the implementation of the Company's management duties carried out by the Board of Directors and provides recommendations in order to ensure that decisions on the management of the Company taken by the Board of Directors are solely for the long-term interests of the Company. The Board of Directors reports periodically on the activities and achievements of the work program that has been determined and considers the decisions and recommendations of the Board of Commissioners in every strategic decision making. The Corporate Governance Code explains that the principles of the Work Relationship between the Board of Commissioners and Board of Directors are as follows:

1. The Board of Commissioners respects the duties and authorities of the Board of Directors in managing the Company as has been regulated in the laws and regulations and the Company's Articles of Association;
2. The Board of Directors respects the duties and authority of the Board of Commissioners to supervise and provide advice on the Company's management policy in accordance with the provisions of the Articles of Association;
3. Every work relationship between the Board of Directors and Board of Commissioners is a formal institutional relationship, in the sense that it is always based on a standard mechanism or correspondence that can be accounted for;
4. The standard correspondence facilities used in the work relationship of the Board of Directors and Board of Commissioners in addition to using hardcopy correspondence also use the Management of Letters and Archives based on Office Automation applicable in the Company and/or use email;
5. Any informal work relationship can be conducted by each member of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, but cannot be used as a formal policy before going through a mechanism or correspondence that can be accounted for;
6. The Board of Commissioners has the right to obtain Company information in a timely, complete, measurable and accurate manner;
7. The Board of Directors is responsible for the submission of Company information to the Board of Commissioners in a timely, complete, measurable and accurate manner.

Ketentuan terkait hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi diuraikan lebih lanjut pada Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) yang terakhir kali ditetapkan pada tanggal 25 November 2014. *Board Manual* menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami, dan dapat dijalankan dengan konsisten. Ketentuan hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang diatur dalam *Board Manual* mencakup aspek diantaranya:

1. Tata Laksana Kerja Terkait Jabatan;
2. Tata Laksana Kerja Terkait Batas Kewenangan;
3. Tatalaksana Kerja Terkait Pelaksanaan dan Pengawasan Operasional Perusahaan;
4. Alur Kerja Kewenangan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris dan Kewenangan Direksi yang Memerlukan Persetujuan RUPS Setelah Mendapatkan Tanggapan Tertulis Dari Dewan Komisaris;
5. Tata Tertib Rapat Direksi dan Dewan Komisaris (Rapat Pengawasan dan Rapat Konsultasi).

Provisions related to the work relationship between the Board of Commissioners and Board of Directors are further elaborated in the Board of Directors and Board of Commissioners Work Procedures (Board Manual) which was last determined on November 25, 2014. The Board Manual explains the stages of activity in a structured, systematic, easy-to-understand manner, and can be carried out consistently. The provisions of the work relationship between the Board of Commissioners and Board of Directors regulated in the Board Manual cover aspects, among others:

1. Work Procedures Related to Position;
2. Work Procedures Related to the Limit of Authority;
3. Work Procedures Related to the Implementation and Supervision of Company Operations;
4. Workflow of the Authorities of the Board of Directors that Require the Approval of the Board of Commissioners and the Authorities of the Board of Directors that Require GMS Approval After Obtaining a Written Response from the Board of Commissioners;
5. Meeting Rules of the Board of Directors and Board of Commissioners (Supervisory Meeting and Consultation Meeting).

Keputusan atau Kewenangan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris

Decision or Authority of the Board of Directors that Requires the Approval of the Board of Commissioners

Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris untuk:

1. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek (sampai dengan 1 (satu) tahun).
2. Mengadakan transaksi, kontrak, perjanjian, kesepakatan dan / atau kerjasama dengan badan usaha / pihak lain dengan ketentuan pekerjaan, kerjasama, kontrak atau kegiatan tersebut nilai per transaksinya melebihi 2% (dua persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari ekuitas Perusahaan yang telah diaudit tahun buku terakhir. Pembatasan tersebut diberikan tanpa memperhatikan jangka waktu pelaksanaan kerjasama/ kontrak/kegiatan dimaksud.
3. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/ panjang (lebih dari 1 (satu) tahun), kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang diberikan kepada anak perusahaan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan dilaporkan kepada Dewan Komisaris; Seluruh Pinjaman kepada anak perusahaan, termasuk pinjaman jangka pendek, dilaporkan kepada Dewan Komisaris melalui Laporan Manajemen Triwulanan.
4. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati.
5. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun.

The following actions of the Board of Directors must obtain prior written approval from the Board of Commissioners for:

1. Pledging property, plant and equipment for short-term credit withdrawal (up to 1 (one) year).
2. Entering into transactions, contracts, agreements, agreements and/or cooperation with business entities/other parties with the provisions that the work, cooperation, contract or activity value per transaction exceeds 2% (two percent) up to 10% (ten percent) of the Company's equity that has been audited in the last fiscal year. The restriction is provided without regard to the period of implementation of the cooperation/contract/activity concerned.
3. Receiving or granting medium/long term loans (more than 1 (one) year), except loans (payables or receivables) granted to subsidiaries with the provisions that loans to subsidiaries are reported to the Board of Commissioners; All Loans to subsidiaries, including short term loans, are reported to the Board of Commissioners through the Quarterly Management Report.
4. Writing off bad debts and dead inventory.
5. Disposing of movable property, plant and equipment with an economic life generally applicable in the industry of up to 5 (five) years.

6. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, tidak termasuk pengangkatan pejabatnya.
7. Melakukan perubahan pos anggaran maupun peruntukan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah ditetapkan.
8. Pengusulan wakil Perusahaan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang tidak memenuhi kriteria kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis.

Terkait keputusan atau kewenangan Direksi yang memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris mengacu kepada Anggaran Dasar Perusahaan sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Permohonan Persetujuan / Rekomendasi Usulan Rekomposisi Anggaran Investasi Pengembangan Usaha RKAP 2022 - 4 Oktober 2022.
2. Usulan Pengangkatan Kepala Satuan Pengawasan Internal - 8 Desember 2022.

6. Determining the organizational structure of 1 (one) level below the Board of Directors, excluding the appointment of its officers.
7. Making changes to budget items and appropriations in the Company's Annual Budget and Operational Plan (ABOP) that have been determined.
8. Proposing Company representatives to become candidates for members of the Board of Directors and Board of Commissioners in joint ventures and/or subsidiaries that do not meet the criteria of significant contribution to the Company and/or have strategic value.

Related to the decisions or authority of the Board of Directors that require the Approval of the Board of Commissioners referring to the Company's Articles of Association throughout 2022 are as follows:

1. Request for Approval/Recommendation of Proposed Recomposition of Business Development Investment Budget of the 2022 ABOP- October 4, 2022.
2. Proposed Appointment of Head of Internal Audit Unit - December 8, 2022.

Keputusan atau Kewenangan Direksi yang Memerlukan Persetujuan RUPS Setelah Mendapatkan Tanggapan Tertulis dari Dewan Komisaris.

Keputusan atau Kewenangan Direksi yang Memerlukan Persetujuan RUPS Setelah Mendapatkan Decision or Authority of the Board of Directors that Requires GMS Approval After Obtaining Written Response from the Board of Commissioners.

Direksi hanya dapat melakukan perbuatan-perbuatan setelah mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan tertulis RUPS untuk tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang (lebih dari 1 (satu) tahun).
2. Melakukan penyertaan modal pada perseroan lain, termasuk penambahan modal pada Anak Perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
3. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
4. Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
5. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
6. Mengikat Perusahaan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*) dan jaminan lainnya (*Corporate Guarantee* dan sejenisnya), kecuali untuk penerbitan *Standby Letter of Credit*/SBLC, *Letter of Credit*/LC yang timbul karena transaksi bisnis tetap mengacu pada ketentuan ayat 8 huruf b Pasal 11 Anggaran Dasar Perusahaan.

The Board of Directors may only conduct actions after obtaining written feedback from the Board of Commissioners and written approval from the GMS for the following actions:

1. Pledging property, plant and equipment for medium/long term credit withdrawal (more than 1 (one) year).
2. Investing capital in other companies, including additional capital in Subsidiaries and/or joint ventures.
3. Establishing subsidiaries and/or joint ventures.
4. Disposing of capital investment in subsidiaries and/or joint ventures.
5. Conducting merger, consolidation, acquisition, separation and dissolution of subsidiaries and/or joint ventures.
6. Binding the Company as a guarantor (borg or avalist) and other guarantees (Corporate Guarantee and the like), except for the issuance of Standby Letter of Credit/SBLC, Letter of Credit/LC arising due to business transactions still refers to the provisions of paragraph 8 letter b Article 11 of the Company's Articles of Association.

7. Mengadakan transaksi, kontrak, perjanjian, kesepakatan dan /atau kerjasama dengan badan usaha/pihak lain dengan ketentuan pekerjaan, kerjasama, kontrak atau kegiatan tersebut nilai per transaksinya melebihi kewenangan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (8) huruf b Anggaran Dasar Perusahaan atau ditentukan lain oleh Anggaran Dasar dan/atau RUPS.
8. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan.
9. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perseroan kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun.
10. Menetapkan *blue print* organisasi Perusahaan;
11. Menetapkan dan merubah logo Perusahaan;
12. Melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal 11 Anggaran Dasar Perusahaan, yang belum ditetapkan dalam RKAP, termasuk melakukan perubahan RKAP, kecuali untuk perubahan pos anggaran maupun peruntukannya wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris;
13. Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan yang berdampak bagi Perusahaan;
14. Pembebanan biaya Perusahaan yang bersifat tetap dan rutin untuk kegiatan yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan;
15. Pengusulan wakil Perusahaan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis.

Terkait keputusan atau kewenangan Direksi yang memerlukan persetujuan RUPS setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris mengacu kepada Anggaran Dasar Perusahaan sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Usulan Penempatan Wakil Perusahaan pada Anak Perusahaan - 12 Januari 2022.
2. Permohonan Penerbitan Penugasan Atas Rencana Pekerjaan Relokasi. Pembangkit dan Pengelolaan Aset *(Asset Management Contract)* PLTG Jakabaring (3x17 MW) dan PLTG Batanghari (2x30 MW) untuk Pabrik Feronickel PT ANTAM di Halmahera Timur - 29 September 2022.
3. Permohonan Perubahan Anggaran Dasar dan Aksi Korporasi Sehubungan dengan Pembentukan *Holding Subholding* PT PLN (Persero) Tahap *Legal End State* - 5 Desember 2022.

7. Entering into transactions, contracts, agreements, agreements and/or cooperation with business entities/other parties with the provisions that the work, cooperation, contract or activity value per transaction exceeds the authority of the Board of Commissioners as referred to in Article 11 paragraph (8) letter b of the Company's Articles of Association or is determined otherwise by the Articles of Association and/or GMS.
8. Not collecting bad debts that have been written off.
9. Releasing and writing off the Company's property, plant and equipment, except for movable property, plant and equipment with an economic life commonly applicable in the industry in general of up to 5 (five) years.
10. Determining the Company's organizational blue print;
11. Determining and changing the Company's logo;
12. Conducting actions as referred to in paragraph 8 of Article 11 of the Company's Articles of Association, which have not been stipulated in the ABOP, including making changes to the ABOP, except for changes in budget items and their allocation must obtain approval from the Board of Commissioners;
13. Establishing foundations, organizations and/or associations either directly or indirectly related to the Company that have an impact on the Company;
14. Charging fixed and routine Company expenses for the activities of foundations, organizations and/or associations both directly and indirectly related to the Company;
15. Proposing Company representatives to become candidates for members of the Board of Directors and Board of Commissioners in joint ventures and/or subsidiaries that provide significant contributions to the Company and/or have strategic value.

Related to the decision or authority of the Board of Directors that requires GMS approval after obtaining a written response from the Board of Commissioners referring to the Company's Articles of Association throughout 2022 are as follows:

1. Proposal for Placement of Company Representative in Subsidiary - January 12, 2022.
2. Request for Issuance of Assignment of Relocation Work Plan. Power Plant and Asset Management Contract for Jakabaring GTPP (3x17 MW) and Batanghari GTPP (2x30 MW) for PT ANTAM Feronickel Plant in East Halmahera - September 29, 2022.
3. Application for Amendments to the Articles of Association and Corporate Actions in Connection with the Establishment of PT PLN (Persero) Subholding Holding in Legal End State Stage - December 5, 2022.

Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Policy on the Composition Diversity of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dapat memberikan pandangan yang lebih luas dan komprehensif terkait dengan alternatif pemecahan masalah dan strategi pengembangan Perusahaan sehingga menghasilkan keputusan yang lebih efektif untuk menciptakan nilai Perusahaan secara berkelanjutan. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dipilih dan ditetapkan sedemikian rupa sehingga komposisi Dewan Komisaris sebagai pelaksana fungsi pengawasan dan komposisi Direksi sebagai pelaksana fungsi pengelolaan adalah beragam serta masing-masing terdiri dari para Direktur dan Komisaris yang memiliki komitmen, pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan keahlian yang dibutuhkan untuk menjalankan peran pengelolaan Direksi dan peran pengawasan Dewan Komisaris. Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dan Profil Direksi.

Kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi secara tertulis mengacu pada Anggaran Dasar, ketentuan Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai bentuk implementasi atas kebijakan tersebut Perusahaan melalui Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi telah menandatangani Kontrak Manajemen yang didalamnya memuat KPI terkait persentase Perempuan dalam *nominated talent* dan milenial (<42 tahun) dalam *nominated talent*. Sebagaimana arahan Pemegang Saham dalam RUPS bahwa Perusahaan harus memperhatikan dan melaksanakan target-target komposisi *talent* perempuan dan *talent* milenial mengacu pada petunjuk teknis kinerja talent dari PLN kepada Anak Perusahaan. Perusahaan telah melakukan beberapa upaya dalam rangka memenuhi target tersebut diantaranya:

1. Melakukan pemetaan talent mengacu pada pedoman kontrak manajemen yang diberikan oleh PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham.
2. Menyampaikan data *talent* kepada PT PLN (Persero) dengan jumlah *women talent* 26,19% dan milenial 71,43% dari jumlah *nominated talent.*
3. Implementasi program pengembangan *women talent* yang selaras dengan kebutuhan kompetensi dalam mendukung program strategis korporat antara lain *excellent stakeholder management, business ecosystem,* diklat kepemimpinan: *leading community* dan *coaching clinic: networking & collaboration.*
4. Melakukan asesmen kaderisasi periodik mengacu pada peraturan direksi terkait manajemen suksesi sebagai bagian penyiapan kader Perusahaan.

The composition diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors can provide a broader and more comprehensive perspective related to alternative problem solving and the Company's development strategy, thus resulting in more effective decisions to create the Company's value in a sustainable manner. Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors are selected and determined in such a way so that the composition of the Board of Commissioners as the executor of the supervisory function and the composition of the Board of Directors as the executor of the management function are diverse and each consists of Directors and Commissioners who have the commitment, knowledge, ability, experience and expertise needed to carry out the management role of the Board of Directors and the supervisory role of the Board of Commissioners. The composition diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors can be seen in the Board of Commissioners Profile and Board of Directors Profile sections.

The written policy on the composition diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors refers to the Articles of Association, the provisions of the Shareholders and the prevailing laws and regulations. As a form of implementation of the policy, the Company through the Shareholders, Board of Commissioners and Board of Directors has signed a Management Contract which contains KPIs related to the percentage of Female in nominated talent and millennial (<42 years old) in nominated talent. As directed by the Shareholders in the GMS, the Company is required to take into account and carry out targets for the composition of women talent and millennial talent, referring to the technical guidelines for talent performance from PLN to its Subsidiaries. The Company has made several efforts in order to meet these targets, including:

1. Conducting talent mapping referring to the management contract guidelines provided by PT PLN (Persero) as the Shareholder.
2. Submitting talent data to PT PLN (Persero) with the number of female talents of 26.19% and millennials of 71.43% from the number of nominated talents.
3. Implementation of female talent development programs that are aligned with competency needs in supporting corporate strategic programs, including excellent stakeholder management, business ecosystem, leadership training: leading community and coaching clinic: networking & collaboration.
4. Conducting periodic regeneration assessments referring to the Board of Directors' regulations related to succession management as part of the preparation of the Company's cadres.

Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Nomination and Remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting untuk menjaga keberlangsungan bisnis. Perusahaan memastikan tersedianya sumber daya manusia yang memadai di lingkungan PLN Nusantara Power salah satunya dengan menjalankan fungsi nominasi. Setiap individu di lingkungan Perusahaan memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan dalam struktur organisasi Perusahaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan juga memberikan imbalan atau penghargaan atas pelaksanaan tanggung jawab dan kontribusinya dalam menjalankan dan mengembangkan Perusahaan melalui kebijakan Remunerasi. Sebagai anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT PLN (Persero), ketentuan Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris secara khusus mengacu pada Peraturan Menteri BUMN dan kebijakan internal PT PLN (Persero) sebagai pemegang saham utama dan pengendali.

Human resources is one of the key factors to maintain business continuity. The Company ensures the availability of adequate human resources within PLN Nusantara Power, including by running the nomination function. Every individuals within the Company has an equal opportunity to occupy a position in the Company's organizational structure based on the provisions of the applicable laws and regulations. The Company also provides benefits or awards for carrying out their responsibilities and contribution in running and developing the Company through the Remuneration policy. As a Subsidiary of a State-Owned Enterprises (SOE) namely PT PLN (Persero), provisions for the Nomination and Remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners specifically refers to the Minister of SOE regulations and PT PLN (Persero) policy as the majority and controlling shareholder.

Nominasi Direksi dan Dewan Komisaris

Nomination of the Board of Directors and the Board of Commissioners

Nominasi Direksi dan Dewan Komisaris PLN Nusantara Power, mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor Menteri BUMN Nomor PER- 04/MBU/06/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Suksesi Direksi merupakan bagian dari penerapan fungsi nominasi di tingkat manajerial tertinggi dalam rangka mempersiapkan regenerasi untuk melanjutkan tonggak kepemimpinan Perusahaan. Penunjukan calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dilakukan melalui serangkaian proses yaitu penjaringan, penilaian calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris serta penetapan. Bakal Calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan formal, persyaratan materiil dan persyaratan lain yang telah ditetapkan.

Nomination for PLN Nusantara Power's Board of Directors and the Board of Commissioners refers to SOE Minister Regulation No. PER- 04/MBU/06/2020 concerning Amendment of the SOE Minister Regulation No. PER-03/MBU/2012 concerning Guidelines for the Appointment of Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the Subsidiaries of State-Owned Enterprises. Succession policy for the Board of Directors is part of the implementation of the nomination function at the highest managerial level in order to prepare regeneration to continue the Company's leadership milestones. Candidate appointment for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners is carried out through a series of processes, namely selection, evaluation and determination of candidates for the Board of Directors and the Board of Commissioners. Prospective candidates for the Board of Directors and Board of Commissioners are required to fulfill the established formal requirements, material requirements and other requirements.

Mekanisme Nominasi Direksi

Nomination Mechanism for The Board of Directors

Pembentukan Tim Evaluasi

Evaluation Team Establishment

Pemegang Saham membentuk Tim Evaluasi untuk :
- Melakukan penjaringan dan penilaian terhadap Calon Direksi;
- Menetapkan hasil evaluasi akhir penilaian untuk disampaikan kepada Direksi BUMN/ Pemegang Saham guna mendapatkan penetapan;
- Menyiapkan hasil evaluasi akhir yang telah ditetapkan oleh Direksi BUMN/ Pemegang Saham guna disampaikan oleh Direksi BUMN/ Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris dan/atau Menteri Negara BUMN, jika diperlukan.

The Shareholders establish Evaluation Team for the following:
- Electing and assessing the prospective Board of Directors.
- Determining the final result of the evaluation to be delivered to the State-Owned Enterprises Board of Directors/Shareholders in order to obtain the approval.
- Preparing evaluation result determined by SOE Board of Directors/ Shareholders to be delivered to the Board of Commissioners and/or Ministry of State- Owned Enterprises of Indonesia, if necessary.

Proses Penjaringan

Election Process

- Tim Evaluasi menerima usulan dan mencari informasi bakal Calon Direksi dari berbagai sumber.
- Tim Evaluasi melakukan seleksi berdasarkan kriteria dan persyaratan administrasi yang ditetapkan (CV, dokumen lain, dan informasi yang diterima) untuk menyusun Daftar Bakal Calon (*long list*) sebanyak minimal 5 (lima) orang calon untuk masing-masing jabatan anggota Direksi.
- Tim Evaluasi menyerahkan Daftar Bakal Calon (*long list*) kepada Direksi BUMN/ Pemegang Saham untuk memperoleh persetujuan.
- The Evaluation Team receives the recommendation and collects information concerning the prospective Board of Directors from various sources.
- The Evaluation Team conducts selection based on stipulated administrative criteria and requirements (CV, other documents, and other information collected) to enlist the candidates in the long list with at least 5 (five) prospective Candidates.
- The Evaluation Team submits the Prospective Candidate List (long list) to the StateOwned Enterprises Board of Directors/ Shareholders for approval.

Proses Penilaian

Assessment Process

- Tim Evaluasi dapat menunjuk tenaga ahli atau Lembaga Profesional untuk melakukan Penilaian, jika diperlukan.
- Tim Evaluasi melakukan penilaian terhadap CV dan wawancara bakal Calon Direksi yang namanya tercantum dalam Daftar Bakal Calon (*long list*) yang telah disetujui oleh Direksi BUMN/ Pemegang Saham untuk memperoleh calon-calon terbaik yang akan diusulkan kepada Direksi BUMN/ Pemegang Saham sebagai Calon Direksi.
- Tim Evaluasi menyampaikan Daftar Calon (*short list*) kepada Direksi BUMN/ Pemegang Saham untuk menetapkan Calon Direksi terpilih.
- The Evaluation Team may appoint experts or Professional Institutions to take the Assessment, if necessary.
- The Evaluation Team evaluates the CV and interviews of prospective Board of Directors whose names are listed in the long list approved by the State-Owned Enterprises Board of Directors/ Shareholders to select the best candidates to be proposed to the State-Owned Enterprises Board of Directors/Shareholders as the Prospective Board of Directors.
- The Evaluation Team submits Candidate List (short list) to the State- Owned Enterprises Board of Directors/Shareholders to determine the appointed Board of Directors.

Proses Penetapan

Determination Process

- Direksi BUMN/ Pemegang Saham melakukan evaluasi akhir atas hasil Penilaian untuk menetapkan 1 (satu) Calon Direksi terpilih untuk jabatan anggota Direksi Perusahaan.
- Direksi BUMN/ Pemegang Saham mengajukan Calon Direksi untuk ditetapkan dalam RUPS Anak Perusahaan menjadi anggota Direksi Perusahaan.
- Keputusan Pemegang Saham baik di dalam RUPS maupun di luar RUPS menetapkan calon Direksi terpilih sebagai anggota Direksi Perusahaan.
- The Board of Directors of SOEs/Shareholders conducts a final evaluation of the Assessment results to determine 1 (one) candidate for the position of member of the Board of Directors of the Company.
- The Board of Directors of the SOE/Shareholder proposes a candidate for the Board of Directors to be determined at the GMS of the Subsidiary to become a member of the Company's Board of Directors.
- Shareholders' resolutions both in the GMS and outside the GMS determine the elected candidates as members of the Company's Board of Directors.

Mekanisme Nominasi Komisaris

The Board of Commissioner Nomination Mechanism

Pembentukan Tim Evaluasi

Evaluation Team Establishment

Pemegang Saham membentuk Tim Evaluasi untuk :
- Melakukan penjaringan dan penilaian terhadap Calon Komisaris;
- Menetapkan hasil evaluasi akhir penilaian untuk disampaikan kepada Direksi BUMN/ Pemegang Saham guna mendapatkan penetapan;
- Menyiapkan hasil evaluasi akhir yang telah ditetapkan oleh Direksi BUMN/ Pemegang Saham guna disampaikan oleh Direksi BUMN/ Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris dan/atau Menteri Negara BUMN, jika diperlukan.

The Shareholders establishes Evaluation Team for the following
- Electing and assessing the prospective Board of Commissioners.
- Determining the final result of the evaluation to be delivered to the State-Owned Enterprises Board of Directors/Shareholders in order to obtain the approval.
- Preparing evaluation result determined by SOE Board of Directors/ Shareholders to be delivered to the Board of Commissioners and/or Ministry of State- Owned Enterprises of Indonesia, if necessary

Proses Penjaringan

Election Process

- Tim Evaluasi menerima usulan dan mencari informasi bakal Calon Komisaris dari berbagai sumber.
- Tim Evaluasi melakukan seleksi berdasarkan kriteria dan persyaratan administrasi yang ditetapkan (CV, dokumen lain, dan informasi yang diterima) untuk menyusun Daftar Bakal Calon (*long list*) sebanyak minimal 3 (tiga) kali lipat jumlah jabatan Dewan Komisaris yang lowong.
- Tim Evaluasi menyerahkan Daftar Bakal Calon (*long list*) kepada Direksi BUMN/ Pemegang Saham untuk memperoleh persetujuan.
- The Evaluation Team receives the recommendation and collects information concerning the prospective Board of Commissioners from various sources.
- The Evaluation Team conducts selection based on stipulated administrative criteria and requirements (CV, other documents, and other information collected) to enlist the candidates in the long list with at least 3 (three) prospective Candidates of the Board of Commissioners.
- The Evaluation Team submits the Prospective Candidate List (long list) to the State Owned Enterprises Board of Directors/ Shareholders for approval.

Proses Penilaian

Assessment Process

- Tim Evaluasi melakukan penilaian terhadap CV dan wawancara bakal Calon Komisaris yang namanya tercantum dalam Daftar Bakal Calon (*long list*) yang telah disetujui oleh Direksi BUMN/ Pemegang Saham untuk memperoleh calon-calon terbaik yang akan diusulkan kepada Direksi BUMN/ Pemegang Saham sebagai Calon Direksi.
- Tim Evaluasi menyampaikan Daftar Calon (*short list*) kepada Direksi BUMN/ Pemegang Saham untuk menetapkan Calon Direksi terpilih.
- The Evaluation Team evaluates the CV and interviews of prospective Board of Commissioners whose names are listed in the long list approved by the State-Owned Enterprises Board of Directors/Shareholders to select the best candidates to be proposed to the State-Owned Enterprises Board of Directors/ Shareholders as the Prospective Board of Commissioners.
- The Evaluation Team submits Candidate List (short list) to the State- Owned Enterprises Board of Directors/Shareholders to determine the elected Board of Commissioners.

Proses Penetapan

Determination Process

- Direksi BUMN/ Pemegang Saham melakukan evaluasi akhir atas hasil Penilaian untuk menetapkan 1 (satu) Calon Komisaris terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Dewan Komisaris.
- Direksi BUMN/ Pemegang Saham mengajukan Calon Komisaris untuk ditetapkan dalam RUPS Anak Perusahaan menjadi anggota Dewan Komisaris Perusahaan.
- Keputusan Pemegang Saham baik di dalam RUPS maupun di luar RUPS menetapkan calon Komisaris terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan.
- State-Owned Enterprises Board of Directors/ Shareholders conducts the final evaluation of the assessment results to determine 1 (one) Candidate to occupy the Board of Commissioners position.
- State-Owned Enterprises Board of Directors/ Shareholders recommends the Candidate to be determined in the GMS of Subsidiaries to become the Company's Board of Commissioners member.
- Shareholders decisions, both in the GMS and outside the GMS, determine candidates for the Board of Directors to be elected as the Company's Board of Directors members.

Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners

Kebijakan remunerasi dan pemberian fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris merupakan bentuk apresiasi dan kompensasi yang diberikan Perusahaan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terkait fungsi pengelolaan dan pengawasan Perusahaan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PT PLN (Persero) sebagai pemegang saham utama dan pengendali yang mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/06/2016, Nomor PER-01/MBU/06/2017, Nomor PER-06/MBU/06/2018, Nomor PER-01/MBU/05/2019, Nomor PER/12/MBU/11/2020 dan Nomor PER-13/MBU/09/2021. Perusahaan secara internal telah menetapkan kebijakan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi melalui Keputusan Bersama antara Direktur PT Pembangkitan Jawa Bali dan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Nomor 004.K/021/DIR/2017 dan 012.K/DK-PJB/2017 tentang Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT PJB dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.

The Company provides remuneration policy and provision of other facilities for the Board of Directors and the Board of Commissioners as the appreciation and compensation for the implementation of duties and responsibilities related to the Company management and supervisory functions carried out in line with the provisions of PT PLN (Persero) as the main and controlling shareholder referring to Regulation of SOE Minister No. PER-04/MBU/2014 which was amended several times by Regulation of SOE Minister No. PER-02/MBU/06/2016, No. PER-01/MBU/06/2017, No. PER-06/MBU/06 /2018, No. PER-01/MBU/05/2019, No. PER/12/MBU/11/2020 and No. PER-13/MBU/09/2021. The Company has internally established the remuneration policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors through Joint Decree between the Board of Directors and the Board of Commissioner of PT Pembangkitan Jawa Bali No. 004.K/021/DIR/2017 and 012.K/DK-PJB/2017 concerning Determination of Income for PT PJB's Board of Directors and Board of Commissioners considering the provisions of the Company's Articles of Association.

Struktur Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Remuneration Structure for the Board of Commissioners and the Board of Directors

Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama antara Direktur dan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Nomor 004.K/021/DIR/2017 dan 012.K/DK-PJB/2017 tentang Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT PJB, terdiri dari komponen remunerasi berupa Gaji/Honorarium, tunjangan, fasilitas dan Insentif Kinerja. Komponen remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan secara rincian diuraikan sebagai berikut:

Remuneration Structure for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners as stipulated in the Joint Decree between PT Pembangkit Jawa-Bali's Board of Director and Board of Commissioners No. 004.K/021/DIR/2017 and 012.K/DK-PJB/2017 concerning the Determination of Income for PT PJB's Board of Directors and Board of Commissioners, consisting of remuneration components in the form of Salary/Honorarium, benefits, facilities and Performance Incentives. Remuneration components for the Company's Board of Commissioners and Board of Directors are detailed as follows:

Struktur Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Remuneration Structure for the Board of Directors and the Board of Commissioners

Komponen Remunerasi Remuneration Component	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Gaji/Honorarium Gaji/Honorarium	Honorarium Komisaris Utama ditetapkan sebesar 45%(empat puluh lima persen) dari Gaji Direktur Utama. Honorarium Komisaris ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Honorarium Komisaris Utama. The President Commissioner's salary is set at 45% (forty-five percent) of the President Director's Salary The Commissioners' salary is stipulated at 90% (ninety percent) of the President Commissioner's salary.	Gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Pemegang Saham. Gaji Direktur yang lain ditetapkan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari Gaji Direktur Utama. The President Director's salary is stipulated by using internal guidelines determined by the Shareholders. The salary of other Directors is set at 85% (eighty five percent) of the President Director's Salary.

Komponen Remunerasi Remuneration Component	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Tunjangan Cuti Tahunan dan Cuti Besar Annual and Collective Leave Benefits	Tidak diberikan Not granted	Tidak diberikan Not granted
Tunjangan Hari Raya Religious Holiday Allowance	Tunjangan hari raya diberikan sebesar 1 (satu) kali Honorarium. Holiday allowance is provided at once Honorarium.	Diberikan sebesar 1 (satu) kali Gaji Provided at 1 alary
Fasilitas /Tunjangan Perumahan Facility/Housing Benefits	-	1 (satu) Rumah Jabatan beserta perlengkapan pemeliharaan, utilitas, dan pengamanannya ditanggung sepenuhnya oleh Perusahaan. 1 (one) Housing facility and its appliances maintenance, utilities, and security equipment are granted entirely by the Company.
Tunjangan Transportasi Transportation Allowances	Tunjangan transportasi diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Honorarium masing-masing anggota Dewan Komisaris. Transportation allowance is provided at 20% (twenty percent) of the Salary of the Board of Commissioners member respectively.	-
Asuransi Purna Jabatan Retirement Insurance	Ketentuan mengenai asuransi purna jabatan anggota Direksi mutatis mutandis berlaku bagi penetapan asuransi purna jabatan anggota Dewan Komisaris. The provisions regarding retirement insurance for the Board of Directors members, mutatis mutandis, applied to the determination of retirement insurance for the Board of Commissioners members.	Asuransi purna jabatan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Direksi yang statusnya definitif. 2. Tidak diberikan untuk anggota Direksi yang berstatus pegawai PT PLN (Persero) atau pegawai Anak Perusahaan PT PLN (Persero). 3. Premi yang ditanggung oleh perusahaan paling banyak 25% (dua puluh lima persen)dari Gaji dalam satu tahun. 4. Pemberian premi, iuran atau istilah lain yang relevan untuk asuransi purna jabatan,sudah termasuk di dalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan kematian . Retirement insurance is provided with the following conditions: 1. Definitive Board of Directors. 2. Not provided to the Board of Directors member with PT PLN (Persero) or PT PLN (Persero) Subsidiaries employee status. 3. The premium provided by the Company is at most 25% (twenty five percent) of the Salary in one year. 4. Premiums, contributions, or other terms relevant to the retirement insurance include the premiums for life insurance.
Fasilitas Kendaraan Vehicle Facility	-	Anggota Direksi hanya berhak atas 1 (satu) Fasilitas kendaraan dari perusahaan. Fasilitas kendaraan termasuk di dalamnya biaya pemeliharaan dan operasional diberikan dengan memperhatikan kondisi keuangan perusahaan. The Board of Directors Members are only provided 1 (one) vehicle facility from the Company. Vehicle facility including maintenance and operational costs are provided by considering financial condition of the Company.
Fasilitas Kesehatan Healthcare Facilities	Ketentuan mengenai Fasilitas kesehatan anggota Direksi, mutatis mutandis berlaku bagi Fasilitas kesehatan anggota Dewan Komisaris. Provision regarding health facilities for the Board of Directors members, mutatis mutandis apply to health facilities for the Board of Commissioners members	Fasilitas kesehatan diberikan berupa : a) Rawat jalan dan obat; b) rawat inap dan obat; dan c) *medical check up.* Healthcare facilities are provided as follows: a) Outpatient care and medicine; b) Hospitalization and medicine; and c) Medical check-up

Komponen Remunerasi Remuneration Component	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Fasilitas Bantuan Hukum Legal Service Facilities	Ketentuan mengenai Fasilitas bantuan hukum anggota Direksi dan mantan anggota Direksi, mutatis mutandis berlaku bagi Fasilitas bantuan hukum bagi anggota Dewan Komisaris serta mantan anggota Dewan Komisaris. Provision regarding Legal service facilities for members and the former members of the Board of Directors, mutatis mutandis, applied to legal service facilities for members and former members of the Board of Commissioners.	Fasilitas bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum yang meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan. Legal service facilities are provided in the form of financing the services of lawyer's firm/legal consultant covering the investigation process as witnesses, suspects, and defendants at the judicial institution.
Tantiem/Insentif Kinerja Tantiem/Performance Incentive	Tantiem ditetapkan oleh Pemegang Saham dengan komposisi besaran Komisaris Utama 45% dari Direktur Utama; dan Anggota Komisaris sebesar 90% dari Komisaris Utama. Tantiem is determined by the Shareholders with composition of President Commissioneris granted 45% of thePresident Director;and the Board of Commissioners members are granted 90% of the President Commissioner.	Tantiem ditetapkan oleh Pemegang Saham dengan komposisi besaran anggota Direksi lainnya 85% dari Direktur Utama. Tantiem is determined by the Shareholders with a composition of 85% of the other Board of Directors members from the President Director.

Prosedur Penetapan Usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Proposal Procedure in Determining Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors

Direksi dan Dewan Komisaris dapat melakukan kajian dan pengusulan remunerasi secara berkala setiap tahun untuk memperoleh penetapan Pemegang Saham melalui RUPS sesuai dengan kebijakan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris diusulkan melalui beberapa tahap termasuk di level pengawasan untuk dikaji dan memperoleh rekomendasi dari organ pengawasan yang menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi sebagai perwakilan Pemegang Saham sampai kemudian ditetapkan dalam RUPS. Penetapan Penghasilan berupa gaji/honorarium dan tantiem akan dilakukan oleh Pemegang Saham dan disampaikan melalui surat penetapan tersendiri berdasarkan keputusan RUPS. Sedangkan untuk tunjangan dan fasilitas diberikan berdasarkan ketentuan PT PLN (Persero) selaku pemegang saham mayoritas yang mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/06/2016, Nomor PER-01/MBU/06/2017, Nomor PER-06/MBU/06/2018 dan Nomor PER-01/MBU/05/2019, Nomor PER/12/MBU/11/2020 dan Nomor PER-13/MBU/09/2021 sebagai revisi atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Mekanisme penetapan usulan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

The Board of Directors and Board of Commissioners may periodically review and propose remuneration every year to obtain the determination of Shareholders through the GMS in accordance with the applicable policies by taking into account the principles of prudence, fairness and accountability. The remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners is proposed through several stages including at the supervisory level to be reviewed and obtain recommendations from the supervisory organ that carries out the nomination and remuneration functions as the Shareholders representative until it is determined in the GMS. Determination of income in the form of salary/honorarium and tantiem will be conducted by the Shareholders and submitted through a separate determination letter based on the GMS decision. Meanwhile, allowances and facilities are provided based on PT PLN (Persero) as the majority shareholder referring to the Minister of SOEs Regulation No. PER-02/MBU/06/2016, No. PER-01/MBU/ 06/2017, No. PER-06/MBU/06/2018 and No. PER-01/MBU/05/2019, No. PER/12/MBU/11/2020 and No. PER-13/MBU/09/2021 as a revision to the Minister of SOEs Regulation No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining Income of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of State- Owned Enterprises. The mechanism for determining the proposed remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners is as follows:

Mekanisme Penetapan Usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Mechanism for Determining Remuneration Proposal for the Board of Directors and Board of Commissioners

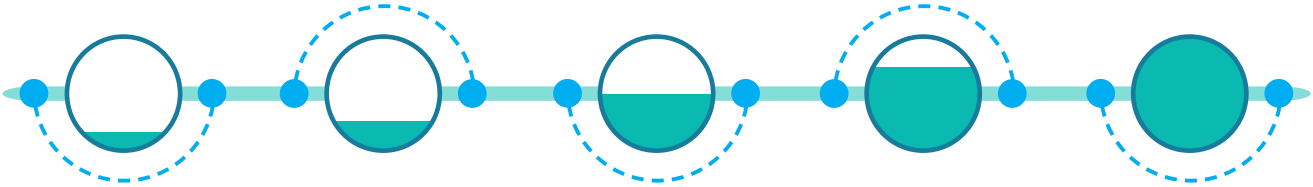

Usulan Remunerasi oleh Direksi
Remuneration Proposal by the Board of Directors

Direksi mengajukan usulan remunerasi kepada Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi.
The Board of Directors submits the remuneration proposal to the Board of Commissioners through the Nomination & Remuneration Committee.

Pembahasan dengan Komite Nominasi dan Remunerasi
Discussion with the Nomination and Remuneration Committee

Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan penelaahan atas kompensasi yang diberikan di pasar untuk pekerjaan yang bersangkutan pada perusahaan lainnya dengan bidang usaha dan status yang sama. Dengan memperhitungkan kinerja usaha perusahaan dan kontribusi masing-masing individu, kemudian dilakukan pembahasan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menyiapkan rekomendasi.
The Nomination and Remuneration Committee reviews the compensation provided in the market for the work concerned in other companies with the same business field and status. By considering the Company's business performance and the contribution of each individual, a discussion is then conducted by the Nomination and Remuneration Committee to prepare recommendations.

Pembahasan dan Persetujuan oleh Dewan Komisaris
Discussion and Approval with the Board of Commissioners

Dewan Komisaris melakukan pembahasan lanjutan dan persetujuan atas usulan remunerasi yang diajukan.
The Board of Commissioners conducts further discussion and approval of the proposed remuneration.

Penyampaian Usulan
Proposal Submission

Usulan remunerasi disampaikan kepada pemegang saham untuk mendapat persetujuan dan penetapan.
The remuneration proposal is submitted to shareholders for approval and determination.

Persetujuan dan Penetapan Remunerasi
Approval and Determination of Remuneration

Pemegang Saham memberikan persetujuan dan menetapkan remunerasi melalui RUPS.
Shareholders approve and determine remuneration through the GMS.

Jumlah Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Total Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners

Besaran masing-masing komponen remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan memperhatikan indikator penetapan remunerasi yang mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang pedoman penetapan penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN. Indikator penetapan remunerasi tersebut menjadi dasar perumusan usulan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi antara lain:

The amount of each component of remuneration for the Company's Board of Commissioners and Board of Directors takes into account the indicators for determining remuneration which refers to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-04/MBU/2014 concerning guidelines for determining income of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of SOEs. Indicators for determining remuneration are the basis for the formulation of the proposed remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors, among others:

1. Faktor skala usaha.
2. Faktor kompleksitas usaha.
3. Tingkat inflasi.
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan.
5. Faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk tahun 2022 ditetapkan oleh Pemegang saham melalui Surat Keputusan Pemegang Saham Mayoritas Perusahaan No. 52264/MNJ.01.02/D01000000/2022-R tanggal 8 September 2022 Perihal Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun 2021, Penetapan Remunerasi 2022 dan Tantiem 2021 Direksi/Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali. Rincian remunerasi untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi adalah sebagai berikut:

1. Business Scale factor.
2. Business Complexity factor.
3. Inflation Rate.
4. Financial conditions and capabilities of the Company.
5. Other relevant factors, and must not conflict with laws and regulations.

Remuneration for the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for 2022 was determined by Shareholders through the Decree of the Company's Majority Shareholders No. 52264/MNJ.01.02/D01000000/2022-R dated September 8, 2022 regarding the Determination of the Use of Net Profit in 2021, Determination of the 2022 Remuneration, and the 2021 Tantiem of the Board of Directors/Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa Bali. Details of remunerations for each member of the Board of Commissioners and member of the Board of Directors are as follows:

Remunerasi Dewan Komisaris

Remuneration for the Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Remunerasi Bulanan Monthly Remuneration			Tunjangan Tahunan THR Annual Religious Holiday Allowances (Rp)	Honorarium dan Tunjangan 2022 Honorarium and Allowances in 2022 (Rp)	Tantiem (Rp)
		Honor Per Bulan Honor Per Month (Rp)	Tunjangan Transport Per Bulan Transport Allowances per Month (Rp)	Total (Rp)			
Dedeng Hidayat[1]	Komisaris Utama President Commissioner	81.632.813	16.326.563	97.959.376	81.632.813	97.959.376	162.075.000
Evy Haryadi[1]	Komisaris Utama President Commissioner	-	-	-	-	-	-
Komang Parmita[2]	Komisaris Commissioner	96.795.000	19.359.000	116.154.000	96.795.000	116.154.000	583.470.000
Jisman P. Hutajulu	Komisaris Commissioner	96.795.000	19.359.000	116.154.000	96.795.000	116.154.000	875.205.000
Hendra Iswahyudi	Komisaris Commissioner	96.795.000	19.359.000	116.154.000	96.795.000	116.154.000	875.205.000
Bagus Puruhito	Komisaris (Independen) Commissioner (Independent)	96.795.000	19.359.000	116.154.000	96.795.000	116.154.000	-
Emir Kresna Wardana	Komisaris (Independen) Commissioner (Independent)	96.795.000	19.359.000	116.154.000	96.795.000	116.154.000	-
Kenedy[2]	Komisaris Commissioner	96.795.000	19.359.000	116.154.000	96.795.000	116.154.000	-

Keterangan:
1. RUPS Sirkuler tanggal 21 September 2022, memberhentikan dengan hormat Sdr. Dedeng Hidayat sebagai Komisaris Utama serta mengangkat dan menetapkan Sdr. Evy Haryadi sebagai Komisaris Utama.
2. RUPS Sirkuler tanggal 14 Desember 2022, memberhentikan dengan hormat Sdr. Komang Parmita sebagai Komisaris serta mengangkat dan menetapkan Sdr. Kenedy sebagai Komisaris.

Description:
1. Circular GMS dated September 21, 2022, respectfully dismissed Mr. Dedeng Hidayat as President Commissioner as well as appointed and determined Mr. Evy Haryadi as President Commissioner.
2. Circular GMS dated December 14, 2022, respectfully dismissed Mr. Komang Parmita as Commissioner as well as appointed and determined Mr. Kenedy as Commissioner.

Remunerasi Direksi

Remuneration for the Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Remunerasi Bulanan Monthly Remuneration			Tunjangan Tahunan THR Annual Religious Holiday Allowances (Rp)	Honorarium dan Tunjangan 2022 Honorarium and Allowances in 2022 (Rp)	Tantiem (Rp)
		Honor Per Bulan Honor Per Month (Rp)	Tunjangan Transport Per Bulan Transport Allowances per Month (Rp)	Total (Rp)			
Gong Matua Hasibuan[1]	Direktur Utama President Director	181.406.250	-	181.406.250	181.406.250	181.406.250	1.980.916.667
Ruly Firmansyah[1]	Direktur Utama President Director	239.000.000	-	239.000.000	239.000.000	239.000.000	-
Rachmanoe Indarto	Direktur Operasi Pembangkit Batu Bara Director of Coal Plant Operations	203.150.000	-	203.150.000	203.150.000	203.150.000	1.836.850.000
Iwan Purwana[2]	Direktur Pengembangan dan Niaga Director of Development and Commerce	154.195.313	-	154.195.313	154.195.313	154.195.313	1.836.850.000
Muhamad Reza[2]	Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga Director of Business Development and Commerce	203.150.000	-	203.150.000	203.150.000	203.150.000	-
R. Rawan Insani[3]	Direktur Keuangan Director of Finance	154.195.313	-	154.195.313	154.195.313	154.195.313	1.836.850.000
Dwi Hartono[3]	Direktur Keuangan Director of Finance	203.150.000	-	203.150.000	203.150.000	203.150.000	-
Karyawan Aji	Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi Director of Human Capital Management and Administration	203.150.000	-	203.150.000	203.150.000	203.150.000	1.836.850.000
M. Yossy Noval A.	Direktur Operasi Pembangkit Gas Director of Gas Plant Operations	203.150.000	-	203.150.000	203.150.000	203.150.000	1.224.566.667

Keterangan:
1. RUPS Sirkuler tanggal 21 September 2022, memberhentikan dengan hormat Sdr. Gong Matua Hasibuan sebagai Direktur Utama mengangkat dan menetapkan Sdr. Ruly Firmansyah sebagai Direktur Utama
2. RUPS Sirkuler tanggal 21 September 2022, memberhentikan dengan hormat Sdr. Iwan Purwana sebagai Direktur Pengembangan dan Niaga serta mengangkat dan menetapkan Sdr. Muhamad Reza sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga.
3. RUPS Sirkuler tanggal 21 September 2022, memberhentikan dengan hormat Sdr. R. Rawan Insani sebagai Direktur Keuangan serta mengangkat dan menetapkan Sdr. Dwi Hartono sebagai Direktur Keuangan.

Description:
1. Circular GMS dated September 21, 2022, respectfully dismissed Mr. Gong Matua Hasibuan as President Director as well as appointed and determined Mr. Ruly Firmansyah as President Director.
2. Circular GMS dated September 21, 2022, respectfully dismissed Mr. Iwan Purwana as Director of Development and Commerce as well as appointed and determined Mr. Muhamad Reza as Director of Business Development and Commerce.
3. Circular GMS dated September 21, 2022, respectfully dismissed Mr. R. Rawan Insani as Director of Finance as well as appointed and determined Mr. Dwi Hartono as Director of Finance.

Bonus Non Kinerja dan Opsi Saham Direksi dan Dewan Komisaris

Non-Performance Bonuses and Stock Options for the Board of Directors and Board of Commissioners

Sampai dengan akhir tahun 2022, belum terdapat kebijakan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan yang mencakup bonus non kinerja dan opsi saham. Sehingga Perusahaan tidak memberikan bonus non kinerja dan opsi saham kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

As of the end of 2022, there was no remuneration policy for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners that includes non-performance bonuses and stock options. So that the Company did not provide non-performance bonuses and stock options to each member of the Board of Commissioners and Board of Directors.

Sekretaris Dewan Komisaris

The Board of Commissioners Secretary

Dewan Komisaris membentuk Sekretariat Dewan Komisaris yang dipimpin oleh seorang sekretaris Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perusahaan dan dibantu staf Sekretariat Dewan Komisaris. Sekretariat Dewan Komisaris melakukan kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan. Sekretaris Dewan Komisaris dan staf Sekretariat Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners established the Board of Commissioners Secretariat chaired by the Board of Commissioners secretary from outside of the Company and supported by the staff of the Board of Commissioners Secretariat, the Board of Commissioners Secretariat carried out activities to support the Board of Commissioners in running supervisory duties and providing advices for the Board of Directors in carrying out the Company management activities. The Board of Commissioners Secretariat and the Board of Commissioners Secretariat staff are appointed and dismissed by the Board of Commissioners.

Sekretaris Dewan Komisaris harus memiliki pengetahuan yang memadai terkait fungsi pengawasan Perusahaan yang dijalankan organ Dewan Komisaris dan memahami sistem pengelolaan dan pembinaan Perusahaan, fungsi kesekretariatan serta memiliki integritas yang baik dan mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.

The Board of Commissioners Secretary is required to have knowledge related to the Company's supervisory functions carried out by the Board of Commissioners organs and understands the Company management and guidance system, secretarial functions and to have good integrity as well as be able to communicate and coordinate well.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Profile of the Board of Commissioners Secretary

Kuncoro Suryokusumo

Warga Negara Indonesia, 45 tahun, berdomisili di Tangerang.

Menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris sejak tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 007/DK/PJB/2022 tanggal 1 November 2022.

Pendidikan

Menyelesaikan pendidikan S1 Listrik dari Institut Teknologi Bandung tahun 2002 dan S2 Bidang Kelistrikan dari Institut Teknologi Bandung dan Hochschule Darmstadt University of Applied Sciences pada tahun 2015.

Riwayat Pekerjaan

Mengawali karir sejak tahun 2004 di PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Beliau pernah menjabat sebagai Manager Unit Pelaksana Penyaluran dan Pengatur Beban Sistem Kaltim pada PT PLN (Persero) UIKL Kalimantan (2019), Manager Unit Pelaksana Transmisi Kaltim dan Kaltara pada PT PLN (Persero) UIKL Kalimantan (2019-2021), Manager Unit Pelaksana Pengatur Beban Kalimantan pada PT PLN (Persero) UIKL Kalimantan (2021-2022), Manager Perencanaan Sistem Kelistrikan pada PT PLN (Persero) UIKL Kalimantan (2022), Plt Vice President Eksekutif Direksi pada PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2022-Sekarang).

Indonesian Citizen, 45 years old, domiciled in Tangerang.

Have served as the Board of Commissioners Secretary since 2022 based on the Board of Commissioners Decree No. 007/DK/PJB/2022 of November 1, 2022.

Education

Completed a Bachelor's Degree education in Electricity from Bandung Institute of Technology in 2002 and Master's Degree in Electricity from Bandung Institute of Technology and Applied Sciences from Hochschule Darmstadt University in 2015.

Career History

Started his career in 2004 at PT PLN (Persero) South and Central Kalimantan Area. He served as Manager of the Implementation Unit for Distribution and Control of the East Kalimantan System Load at PT PLN (Persero) UIKL Kalimantan (2019), Manager of the East and North Kalimantan Transmission Implementing Unit at PT PLN (Persero) UIKL Kalimantan (2019-2021), Manager of the Regulatory Implementing Unit of Kalimatan Burden at PT PLN (Persero), UIKL Kalimantan (2019-2021), Manager of Electrical System Planning at PT PLN (Persero) UIKL Kalimantan (2022), Acting Executive Vice President of the Board of Directors at PT PLN (Persero) Headquarters (2022-Present).

Pedoman Kerja dan Tugas Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Board Manual, Duties, and Responsibilities of the Board of Commissioners Secretary

Sebagai organ pendukung Dewan Komisaris Sekretaris Dewan Komisaris berpedoman pada *Corporate Governance Code, Board Manual* dan *Board of Commissioner Manual* (BoC Manual) dalam memimpin Sekretariat Dewan Komisaris melaksanakan tugas membantu fungsi pengawasan Dewan Komisaris. *Corporate Governance Code, Board Manual* dan *Board of Commissioner Manual* (BoC Manual) menguraikan ketentuan mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris yang menjadi dasar dari tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris. Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris secara khusus dalam membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan dan implementasi GCG adalah sebagai berikut:

As a supporting organ of the Board of Commissioners, the Board of Commissioners Secretary is guided by the Corporate Governance Code, Board Manual and the Board of Commissioners Manual (BOC Manual) in leading the Board of Commissioners Secretariat to carry out their duty to support the Board of Commissioners supervisory functions. Corporate Governance Code, Board Manual and Board of Commissioners Manual (BOC Manual) outlines provisions regarding the implementation of the supervisory functions of the Board of Commissioners as the basis of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners Secretary. The Board of Commissioners Secretary has duties and responsibilities specifically in supporting the Board of Commissioners in running supervisory functions and GCG implementation, including:

1. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam lingkungan Dewan Komisaris yang rincian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Dewan Komisaris.
2. Mengoordinasikan penyediaan informasi yang dibutuhkan Dewan Komisaris dan Komite-Komite Dewan Komisaris, seperti monitoring tindak lanjut hasil keputusan/ rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris, laporan berkala dari Direksi (Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Tahunan, Laporan Hasil Pemeriksaan SPI) serta laporan/informasi lainnya mengenai pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi.
3. Menyusun dan memfinalisasi laporan dan dokumen yang menjadi kewajiban Dewan Komisaris, antara lain Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
4. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, penyiapan dan pengiriman undangan, penyampaian materi rapat serta pembuatan risalah rapat, serta tugas-tugas lain yang terkait.
5. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Komite Komisaris.
6. Mengumpulkan data-data teknis yang berasal dari Komite-Komite Dewan Komisaris untuk keperluan Dewan Komisaris.
7. Menyusun dan mengadministrasikan risalah rapat dan dokumen Dewan Komisaris lainnya serta mengirimkan hasil-hasil keputusan rapat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
8. Menetapkan prosedur teknis kunjungan kerja Dewan Komisaris.
9. Menjadi penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.
10. Dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris dan wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan tersebut.
11. Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan tugasnya.

1. Leading and organizing secretarial activities within the Board of Commissioners with the details of the duties further regulated by the Board of Commissioners.
2. Coordinating the provision of information needed by the Board of Commissioners and the Committees of the Board of Commissioners, such as monitoring follow-up on the decisions/ recommendations and directions of the Board of Commissioners, periodic reports from the Board of Directors (Monthly Reports, Quarterly Reports, Annual Reports, IAU Examination Results Reports) and other reports/information regarding the Company management carried out by the Board of Directors.
3. Drafting and finalizing obligation reports and documents of the Board of Commissioners, including reports on the Supervisory Results by the Board of Commissioners as well as the Work Plan and Budget by the Board of Commissioners.
4. Organizing the Board of Commissioners meetings, preparing and sending invitations, delivering meeting materials, and making minutes of meetings, as well as other related tasks.
5. Coordinating and facilitating the activities of the Board of Commissioners Committees.
6. Collecting technical data from the Board of Commissioners Committees for the Board of Commissioners needs.
7. Preparing and administering minutes of meetings and other Board of Commissioners documents and sending the meeting resolution to the interested parties.
8. Establishing technical procedures for working visits by the Board of Commissioners.
9. Serving as liaison officer for the Board of Commissioner with other parties.
10. Being able to access records or information concerning employees, funds, assets and other Company resources related to the implementation of their duties based on written assignment letters from the Board of Commissioners and is obliged to report in writing of the assignment results.
11. The Secretary and Secretariat Staff of the Board of Commissioners are required to maintain the confidentiality of the Company's documents, data, and information, both from internal parties and external parties and are only used for the benefits of their duties.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

Duty Implementation by the Board of Commissioners Secretary

Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dalam menjalankan fungsi kesekretariatan dalam lingkup organ pengawasan serta memberikan informasi, reviu, kajian dan laporan kepada Dewan Komisaris sepanjang tahun 2022, secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan di lingkungan Dewan Komisaris.
2. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya.
3. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan:
   a) *Monitoring* tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris.
   b) Bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai laporan/kegiatan Direksi dalam mengelola Perusahaan.
   c) Dukungan administrasi serta monitoring berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.
4. Mengumpulkan data-data teknis yang berasal dari komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris dan tenaga ahli Dewan Komisaris untuk keperluan Dewan Komisaris.
5. Sekretariat Dewan Komisaris melakukan tugas administrasi dan penyimpanan dokumen berupa:
   a) Sekretaris Dewan Komisaris mempunya fasilitas penyimpanan dokumen Dewan Komisaris yang disediakan oleh Perseroan.
   b) Sekretaris Dewan Komisaris mengadministrasikan surat keluar dan surat masuk ke Dewan Komisaris dan dokumen lainnya dengan tertib.
6. Berdasarkan penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Sekretariat Dewan Komisaris dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

The Board of Commissioner Secretary carried out his duties in the implementation of secretarial function in the scope of supervisory organ as well as provided information, review and reports to the Board of Commissioners throughout 2022, generally include the following:

1. Carried out secretarial administrative activities within the Board of Commissioners.
2. Held meetings of the Board of Commissioners and meetings between the Board of Commissioners and Shareholders, the Board of Directors as well as other related parties.
3. Provided data/information needed by the Board of Commissioners and other committees within the Board of Commissioner related to the following:
   a) Monitored the follow-up to the results of decision, recommendation and direction by the Board of Commissioner.
   b) Administrative subjects/materials regarding reports/activities by the Board of Directors in managing the Company
   c) Administrative support and monitoring related to matters that must obtain approval or recommendations from the Board of Commissioners related to the Company management activities implemented by the Board of Directors.
4. Collected technical data from the Committees within the Board of Commissioners and experts of the Board of Commissioners for the Board of Commissioners.
5. The Board of Commissioners Secretariat performed administrative tasks and documents storing in the form of the following:
   a) The Board of Commissioners Secretary has a Board of Commissioners document storing facility provided by the Company.
   b) The Board of Commissioners Secretary administrated the outgoing and incoming letters to the Board of Commissioners and other documents in an orderly manner.
6. Based on the written delegation from the Board of Commissioners, the Board of Commissioners Secretariat was able to access notes or information regarding employees, funds, assets, and other resources of the Company related to their duties.

Penilaian Kinerja Sekretaris Dewan Komisaris
Performance Assessment of the Board of Commissioners Secretary

Dewan Komisaris melakukan evaluasi atas kinerja Sekretaris Dewan Komisaris sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas Sekretariat Dewan Komisaris khususnya terkait fungsi pengawasan dalam mendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Penilaian kinerja Sekretaris Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan realisasi atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris dalam mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris serta indikator lain yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Pelaksanaan tugas Sekretaris Dewan Komisaris dievaluasi secara internal dalam lingkup organ Dewan Komisaris secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

The Board of Commissioners evaluates performance of the Board of Commissioners Secretary as a part of the effort in improving the quality of the Board of Commissioners Secretary duty implementation especially related to the of supervisory duties in supporting GCG implementation. Performance assessment of the Board of Commissioners is carried out based on the realization of duties implementation of the responsibilities of the Board of Commissioners Secretary in supporting the Board of Commissioners supervisory functions as well as other established indicators by the Board of Commissioners. Duties implementation by the Board of Commissioners is periodically evaluated internally with within the Board of Commissioners organ at least 1 (one) time a year.

Remunerasi Sekretaris Dewan Komisaris
Remuneration for the Board of Commissioners Secretary

Penghasilan sekretaris Dewan Komisaris dan staf Sekretariat Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan. Komponen penghasilan Sekretaris Dewan Komisaris paling sedikit terdiri dari Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan. Besaran dan jenis penghasilan staf Sekretariat Dewan Komisaris ditetapkan dengan ketentuan total penghasilan setahun tidak lebih besar dari penghasilan Organ Pendukung Dewan Komisaris lainnya.

Income for the Board of Commissioners Secretary and the Board of Commissioners Secretariat staff are determined by the Board of Commissioners while considering the Company's abilities. The Components of the Board of Commissioners Secretary income at least consist of Honorarium, Facilities and Allowances. The amount and type of income of the Board of Commissioners Secretariat Staff is determined with the provision of the total annual income is not greater than the income of other Supporting Organs of the Board of Commissioners.

Komite Audit
Audit Committee

Komite Audit merupakan salah satu organ pendukung fungsi Pengawasan yang dijalankan Dewan Komisaris dalam tata kelola Perusahaan. Dewan Komisaris membentuk Komite Audit dengan tugas pokok membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, khususnya terkait *oversight* (pengawasan) atas kualitas dan integritas pelaporan keuangan Perseroan serta efektivitas sistem pengendalian internal. Komite Audit bekerja secara profesional, independen, dan kolektif dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan serta pemberian nasihat kepada Direksi serta memantau dan memastikan berjalannya fungsi-fungsi yang berhubungan dengan audit dan pengendalian internal Perusahaan.

Audit Committee is one of the supporting organ of the Supervisory function carried out by the Board of Commissioners in the Company's governance. The Board of Commissioners established the Audit Committee with the main task of assisting duties and responsibilities implementation by the Board of Commissioners, specifically related to oversight over the quality and integrity of the Company's financial statements and the effectiveness of the internal control system. Audit Committee works professionally, independently, and collectively in carrying out supervisory duties and functions and providing advices to the Board of Commissioners as well as monitoring and ensuring the running of functions related to audit and internal control in the Company.

Dasar pembentukan Komite Audit mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-06/MBU/04/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-14/MBU/10/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

The basis for the establishment of the Audit Committee refers to Law Number 19 of 2003; Law Number 40 of 2007 and Regulation of the Ministry of SOEs Number: PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012, Regulation of the Ministry of SOEs Number PER-06/MBU/04/2021 concerning Amendments to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER- 12/MBU/2012 concerning the Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises and Regulation of the Ministry of SOEs Number PER-14/MBU/10/2021 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Ministry of State-Owned Enterprises Number PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State- Owned Enterprises.

Susunan, Periode dan Masa Jabatan Komite Audit

Composition, Period and Term of Office of the Audit Committee

Komite Audit dipimpin oleh seorang Ketua yang merupakan anggota Dewan Komisaris dan dibantu oleh Sekretaris merangkap anggota serta setidaknya 2 (dua) orang anggota.

The Audit Committee is led by a Chairman who is a member of the Board of Commissioners and assisted by a Secretary concurrently members and at least 2 (two) members.

Anggota Komite Audit ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang merangkap sebagai anggota Komite Audit sama dengan masa jabatan penunjukannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Sedangkan masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Members of the Audit Committee are determined based on the Board of Commissioners' Decision with the term of office for a member of the Board of Commissioners who concurrently serves as a member of the Audit Committee the same as the term of office of their appointment as a member of the Board of Commissioners determined by the General Meeting of Shareholders. Meanwhile, the term of office for members of the Audit Committee who are not a members of the Board of Commissioners is 3 (three) years and can be extended for 1 (one) term of office without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss at any time.

Susunan keanggotaan Komite Audit mengalami beberapa kali perubahan karena terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris yang jangka waktunya telah habis. Susunan Komite Audit ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Nomor 014.K/DK/PJB/2021, tanggal 31 Desember 2021, tentang Pembentukan Komite Audit Pada Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali sebagai berikut:

The composition of the Audit Committee membership has changed several times due to changes in the composition of the Board of Commissioners whose term has ended. The composition of the Audit Committee is determined based on the Decision of the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa Bali Number 014.K/DK/PJB/2021, dated December 31 2021, concerning the Establishment of the Audit Committee of the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa Bali as follows:

Susunan Komite Audit 1 Januari – 31 Juni 2022

Composition of the Audit Committee on January 1 – June 31 2022

Nama Name	Jabatan Position	Keahlian Expertise	Periode Jabatan Term of Office	Masa Jabatan Tenure
Hendra Iswahyudi	Ketua (Komisaris) Chairman (Commissioner)	Teknik Fisika, Perencanaan dan Kebijakan Publik, Ekonomi Engineering Physics, Planning and Public Policy, Economics	Kesatu First	Oktober 2021 - Desember 2022 October 2021 - December 2022
Edward Fahrizal	Wakil Ketua (Pihak Independen) Vice Chairman (Independent Party)	Akuntansi, Keuangan, Anggaran dan Pajak Accounting, Finance, Budget and Tax	Kesatu First	Januari 2022 - Desember 2022 January 2021- December 2022

Nama Name	Jabatan Position	Keahlian Expertise	Periode Jabatan Term of Office	Masa Jabatan Tenure
Sigit Djalu Purwoko	Sekretaris merangkap anggota (Pihak Independen) Secretary and member (Independent Party)	Manajemen Strategik, Internal *Auditing*, dan Eksaminasi *Fraud*. Strategic Management, Internal Auditing, and Fraud Examination.	Kedua Second	Oktober 2017 - Juni 2022 October 2017 - June 2022
Andar Sudiar Sukma	Anggota (Pihak Independen) Member (Independent Party)	Hukum/Kepatuhan, Internal *Auditing*, dan Eksaminasi *Fraud*. Legal/Compliance, Internal Auditing and Fraud Examination.	Kedua Second	Oktober 2017 - Desember 2022 October 2017 - December 2022

Susunan Komite Audit ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Nomor 005.K/DK/PJB/2022, tanggal 27 Juni 2022, tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit Pada Dewan Komisaris PT Pembangkit Jawa Bali sebagai berikut:

The Composition of the Audit Committee is determined based on the Decision of PT Pembangkitan Jawa Bali's Board of Commissioners No. 005.K/DK/PJB/2022, dated June 27, 2022 concerning the Composition of the Audit Committee Membership on PT Pembangkitan Jawa Bali's Board of Commissioners as follows:

Susunan Komite Audit Juni – 31 Desember 2022
Composition of the Audit Committee on June – December 31, 2022

Nama Name	Jabatan Position	Keahlian Expertise	Periode Jabatan Term of Office	Masa Jabatan Tenure
Hendra Iswahyudi	Ketua (Komisaris) Chairman (Commissioner)	Teknik Fisika, Perencanaan dan Kebijakan Publik, Ekonomi Engineering Physics, Planning and Public Policy, Economics	Kesatu First	Oktober 2021 - Desember 2022 October 2021 - December 2022
Edward Fahrizal	Sekretaris merangkap anggota (Pihak Independen) Secretary and member (Independent Party)	Akuntansi, Keuangan, Anggaran dan Pajak Accounting, Finance, Budget and Tax	Kesatu First	Januari 2022- Desember 2022 January 2021- December 2022
Andar Sudiar Sukma	Anggota (Pihak Independen) Member (Independent Party)	Hukum/Kepatuhan, Internal *Auditing*, dan Eksaminasi *Fraud*. Legal/Compliance, Internal Auditing, and Fraud Examination	Kedua Second	Oktober 2017 - Desember 2022 October 2017 - December 2022

Profil Anggota Komite Audit
Profile of the Audit Committee Member

Hendra Iswahyudi
Ketua Komite Audit
Chairman of the Audit Committee

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.

The profile can be seen in the Profile of the Board of Commissioners section.

Edward Fahrizal

Sekretaris Komite Audit
Secretary of the Audit Committee

Warga Negara Indonesia, 57 tahun, berdomisili di Bandung.

Dasar Pengangkatan
Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Nomor 005.K/DK/PJB/2022.

Rangkap Jabatan
Tidak memiliki rangkap jabatan yang bertentangan dengan ketentuan internal Perusahaan dan peraturan serta perundangan yang berlaku.

Pendidikan
Menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi - Universitas Islam Indonesia tahun 1990 dan Magister Manajemen Bisnis - Universitas DR Soetomo tahun 2006. Selain itu, pendidikan non-formal yang pernah diikuti untuk mendapatkan sertifikasi diantaranya Corporate Finance (2015), Merger & Acquisition Managing Subsidiaries (2018) dan Executive Education I (2019).

Riwayat Pekerjaan
Pernah berkarir sebagai VP Pengembangan Akuntansi PT PLN (Persero), Manajer Keuangan PLN UID Jawa Barat, Manajer Keuangan PLN Wilayah NTB dan Kepala Divisi Keuangan PLN Batam.

Indonesian Citizen, 57 years old, domiciled in Bandung.

Basis of Appointment
Appointed based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa Bali No. 005.K/DK/PJB/2022.

Concurrent Position
Does not have concurrent position that conflict with the Company's internal provisions as well as applicable laws and regulations.

Education
He completed his Bachelor of Accounting - Islamic University of Indonesia in 1990 and Master of Business Management - DR Soetomo University in 2006. In addition, non-formal education that has been attended to obtain certification includes Corporate Finance (2015), Merger & Acquisition Managing Subsidiaries (2018) and Executive Education I (2019)

Career History
He had a career as VP of Accounting Development of PT PLN (Persero), Finance Manager at PLN UID West Java, Finance Manager of PLN NTB Area and the Head of Finance Division of PLN Batam.

Andar Sudiar Sukma

Anggota Komite Audit
Member of the Audit Committee

Warga Negara Indonesia, 42 tahun, berdomisili di Jakarta.

Dasar Pengangkatan
Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Nomor 008.K/DK/PJB/2017 tanggal 4 Oktober 2017 dan ditetapkan kembali terakhir kali berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Nomor 005.K/DK/PJB/2022 tanggal 27 Juni 2022.

Rangkap Jabatan
Tidak memiliki rangkap jabatan yang bertentangan dengan ketentuan internal Perusahaan dan peraturan serta perundangan yang berlaku.

Pendidikan
Menyelesaikan pendidikan S1 Hukum dari Universitas Indonesia tahun 2004, dan S2 (Magister Hukum) Hukum Ekonomi Bisnis dari Universitas Indonesia tahun 2022.

Selain itu, pendidikan non-formal yang pernah diikuti untuk mendapatkan sertifikasi diantaranya *Certified Fraud Examiner* (CFE) (2012), kandidat *Certified Risk Management Professional* (CRMP) (2016), *Certified Governance Profesional* (CGP)

Indonesian citizen, 42 years old, domiciled in Jakarta.

Basis of Appointment
Appointed based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa Bali No. 008.K/DK/PJB/2017 dated October 4, 2017 and reappointed for the last time based on the Decree of PT Pembangkitan Jawa Bali's Board of Commissioners Number 005.K/DK/PJB/2022 dated June 27, 2022.

Concurrent Position
Does not have concurrent position that conflict with the Company's internal provisions as well as applicable laws and regulations.

Education
He completed his Bachelor of Laws from the University of Indonesia in 2004 and Master of Laws in Business Economics Law from the University of Indonesia in 2022.

In addition, non-formal education that has been attended to obtain certification includes Certified Fraud Examiner (CFE) (2012), Certified Risk Management Professional (CRMP) candidate (2016), Certified Governance Professional (CGP)

(2019), dan *Certified on Committee Audit Practice* (CACP) (2019); Sertifikasi *Team Leader Audit* ISO 37001 (2021) serta telah memiliki lisensi untuk menjalankan Profesi Advokat (2018).

Riwayat Pekerjaan

Pernah berkarir sebagai Good Corporate Governance (GCG) Associate Consultant Sofyan Djalil & Partner (2004-2005), Executive Compliance PT Prudential Life Assurance (Life Insurance) (2005-2006), Resident Auditor dan Auditor Internal untuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2006-2014), Manajer Hukum Perikatan Bisnis PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2014-2015), Legal Head/GM Legal untuk PT Transjakarta (2015-2016), Associate Director PT Sinergi Daya Prima (SDP Consulting) (2016-2018) dan Komite Manajemen Risiko & Kepatuhan PT Pembangkitan Jawa Bali (2016 -2017).

(2019), and Certified on Committee Audit Practice (CACP) (2019); ISO 37001 Audit Team Leader Certification (2021) and has a license to carry out the Advocate Profession (2018).

Career History

He had a career as Good Corporate Governance (GCG) Associate Consultant of Sofyan Djalil & Partner (2004-2005), Executive Compliance at PT Prudential Life Assurance (Life Insurance) (2005-2006), Resident Auditor and Internal Auditor for PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2006-2014), Business Engagement Legal Manager of PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2014-2015), Legal Head/GM Legal for PT Transjakarta (2015-2016), Associate Director of PT Sinergi Daya Prima (SDP Consulting) (2016 -2018) and Risk Management & Compliance Committee of PT Pembangkitan Jawa Bali (2016-2017).

Independensi Komite Audit

Audit Committee Independence

Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite Audit dapat bertindak independen semata-mata untuk kepentingan Perusahaan, terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan Perusahaan. Anggota Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi sebagai berikut:

The Board of Commissioners ensures that the Audit Committee can act independently solely for the interests of the Company, regardless of the influence of various parties who have interests that may conflict with the interests of the Company. Members of the Audit Committee have met the following independence criteria:

Independensi Komite Audit

Audit Committee Independence

Kriteria Independensi Independence Criteria		Hendra Iswahyudi	Edward Fahrizal	Andar Sudiar Sukma
Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit dan non-audit atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.	Not an insider of a public accounting firm, legal consulting firm, or other parties providing audit and non-audit services or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months	√	√	√
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung di Perusahaan.	Does not have any direct or indirect shares in the Company.	√	√	√
Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan/atau mengendalikan Perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir.	Not a person who has the authority and responsibility to plan, lead, and/or control the Company within the last six months.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun ke samping atau hubungan semenda.	Does not have a blood family relationship with members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners up to the second degree, either in a straight line or sideways or a marital relationship.	√	√	√

Kriteria Independensi Independence Criteria		Hendra Iswahyudi	Edward Fahrizal	Andar Sudiar Sukma
Tidak mempunyai hubungan usaha langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan; dan	Does not have direct and indirect business relationships related to the Company's business activities; and	√	√	√
Tidak sedang berada dalam institusi yang kegiatan usahanya memberikan jasa kepada Perusahaan.	Not being in an institution whose business activities provide services to the Company.	√	√	√

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit
Duties and Responsibilities of the Audit Committee

Komite Audit dalam mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab dimana dalam pelaksanaannya, berhubungan dengan pihak-pihak terkait yang masing-masing memiliki tanggung jawab yang jelas pada semua kegiatan termasuk Direksi dan seluruh jajaran manajemen, terutama terkait dengan penerapan audit internal dan efektivitas pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Tanggung jawab ini didasarkan kepada fungsi dan tugas pokok sebagaimana diatur di dalam Piagam Komite. Tugas pokok Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Membuat program/rencana kerja tahunan yang berisi rencana kegiatan, jadwal dan penggunaan sumber daya.
2. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Dewan Komisaris mengenai kegiatan Komite Audit.
3. Menyampaikan dengan segera temuan hasil pemeriksaan Auditor Eksternal maupun Internal yang potensial dan signifikan.
4. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan Auditor, terutama temuan potensial dan signifikan yang belum ditindaklanjuti secara tuntas.
5. Menelaah Laporan Keuangan Perusahaan dan informasi Keuangan lainnya yang akan disampaikan kepada pemegang saham.
6. Memberikan saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang terkait dengan tugas Dewan Komisaris antara lain melakukan *review*/evaluasi internal audit charter, kinerja dan efektivitas kegiatan SPI, kecukupan SDM SPI serta struktur organisasi SPI.
7. Mengusulkan kepada Dewan Komisaris agar Direksi menugaskan kepada SPI untuk melaksanakan pemeriksaan tertentu/pemeriksaan khusus.

The Audit Committee in supporting the supervisory function of the Board of Commissioners has duties and responsibilities which in the implementation, related to the related parties who each have clear responsibilities in all activities including the Board of Directors and all levels of management, especially related to the implementation of internal audit and the effectiveness internal control including the adequacy of the financial reporting process. The Audit Committee is responsible to the Board of Commissioners. This responsibility is based on the main functions and duties as stipulated in the Committee Charter. The main duties of the Audit Committee are as follows:

1. Making an annual work program/plan containing activity plans, schedules, and the use of resources.
2. Submitting reports regularly to the Board of Commissioners regarding the Audit Committee activities.
3. Conveying immediately the potential and significant findings of internal or external auditor examination results.
4. Providing inputs to the Board of Commissioners regarding the follow-up of Auditor's examination results, especially potential and significant findings that have not been followed-up thoroughly.
5. Reviewing the Company's Financial Statement and other Financial Information to be submitted to the shareholders.
6. Providing advices and recommendations to the Board of Commissioners regarding matters related to the Board of Commissioners duties, among others, conducting review/evaluation of internal audit charter, performance, and effectiveness of IAU activities, adequacy of IAU HR, and IAU organizational structure.
7. Proposing to the Board of Commissioners so as the Board of Directors assigns the IAU to carry out certain examinations/special examinations.

8. Menyampaikan usulan kepada Dewan Komisaris dalam proses penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan.
9. Menyampaikan usulan kepada Dewan Komisaris untuk memasukkan hal-hal strategik dalam ruang lingkup pemeriksaan, dalam penyusunan PKAT SPI.

8. Submitting proposals to the Board of Commissioners in the appointing process of a Public Accounting Firm that will audit the Financial Statements.
9. Submitting proposals to the Board of Commissioners to include strategic matters in the scope of the audit, in the preparation of IAU AAWP.

Pedoman Kerja Komite Audit
Audit Committee Work Guidelines

Pedoman kerja Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris dalam bentuk Piagam Komite Audit pada tanggal 31 Desember 2018. Piagam Komite Audit memuat ketentuan antara lain: Maksud dan Tujuan, Fungsi dan Tugas Pokok dan Tanggung Jawab, Wewenang, Organisasi dan Keanggotaan, Penilaian Kinerja Anggota Komite, Pertemuan/rapat dan Kode Etik. Piagam Komite Audit dikaji secara berkala dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan pemutakhiran guna memastikan kesesuaian muatannya dengan dinamika organisasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *best practices.*

The work guidelines of the Audit Committee are determined by the Board of Commissioners in the form of the Audit Committee Charter on December 31, 2018. The Audit Committee Charter contains provisions including: Purpose and Objectives, Main Functions and Duties and Responsibilities, Authority, Organization and Membership, Performance Assessment of Committee Members, Meetings, and Code of Conduct. The Audit Committee Charter is periodically reviewed and if deemed necessary can be updated to ensure the suitability of the contents with the dynamics of the organization, applicable laws and regulations, and best practices.

Rencana Program Kerja Komite Audit
Work Program Plan of the Audit Committee

Program kerja Komite Audit disusun setiap tahun untuk mendorong efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Program kerja Komite Audit tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan rutin yang terdiri dari :
   a. Kegiatan internal Komite Audit yang mencakup :
      1) Evaluasi Laporan Manajemen dan Kinerja Korporat.
      2) Penyiapan surat Dewan Komisaris sesuai bidang tugas Komite Audit.
      3) Melakukan *monitoring* KPI Dewan Komisaris dan monitoring arahan Dewan Komisaris serta Pemegang Saham sesuai RUPS.
      4) Penyiapan dan penyampaian Laporan Kinerja Komite Audit.
   b. Kegiatan Koordinasi Komite Audit Dengan Satuan Pengawasan Intern (SPI), mencakup :
      1) *Review* dan Evaluasi Program Kerja Audit Tahunan (PKAT).
      2) Pembahasan berkala mengenai Hasil Audit SPI dan Hasil Audit Eksternal.

The Audit Committee annually prepares a work program to encourage the effectiveness of the implementation of duties and responsibilities of the Audit Committee in supporting the implementation of the supervisory duties of the Board of Commissioners. The work program of the Audit Committee in 2022 were:

1. Routine Activities consisting of:
   a. Internal activities of the Audit Committee, including:
      1) Evaluation of Management Reports and Corporate Performance.
      2) Preparation of the Board of Commissioners' letter according to the Audit Committee's duties.
      3) Monitoring the KPI of the Board of Commissioners and direction of the Board of Commissioners and the shareholders according to the GMS.
      4) Preparation and Submission of the Audit Committee Performance Reports.
   b. Audit Committee Coordination Activities with Internal Audit Unit (IAU), including:
      1) Review and evaluation of the Annual Audit Work Program (AAWP).
      2) Periodic discussions concerning the results of the IAU audit result and external audit result.

3) Supervisi terhadap pelaksanaan *Risk Based Audit* (RBA), evaluasi pengendalian internal korporat, implementasi *Quality Assurance Review*, dan Fungsi SPI diluar Audit.

4) Koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik (KAP), SPI PT PLN (Persero) dan auditor eksternal lainnya.

2. Kegiatan Khusus/Non Rutin yang terdiri dari :
   a. *Review* dan pengkinian atas dokumen Piagam Komite Audit.
   b. *Review* dan Evaluasi atas program korporat tahun 2022 di bidang Akuntansi dan keuangan.
   c. *Review* dan Evaluasi atas isu/program operasional korporat tahun 2022 di bidang *Equivalent Availability Factor* (EAF) Pembangkit Eksisting, serta dampak penerapan *coal switching* pada pembangkit eksisiting.
   d. *Review* dan Evaluasi mengenai penerapan *Three Line of Defence* di Perusahaan
   e. Evaluasi atas rencana korporat untuk melaksanakan *Internal Control for Financial Reporting* (ICoFR)
   f. Kunjungan lapangan ke pembangkit-pembangkit milik dan yang dikelola oleh Perusahaan
   g. Koordinasi dengan Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris lainnya.
3. Program Pengembangan Kompetensi Komite Audit.

3) Supervision of the Risk-Based Audit (RBA) implementation, evaluation of corporate internal control, the implementation of the Quality Assurance Review, and the IAU function outside the audit.

4) Coordination with the Public Accountant Firm (PAF), IAU of PT PLN (Persero), and other external auditors.

2. Special/Non-Routine Activities consisting of:
   a. Review and update of the Audit Committee Charter document.
   b. Review and evaluation of the Corporate Program in 2022 in the field of Accounting and Finance.
   c. Review and evaluation of corporate operational issues/ programs in 2022 in the field of Equivalent Availability Factor (EAF) of Existing Power Plant, as well as the impacts of coal switching implementation on the existing power plant.
   d. Review and evaluation regarding the implementation of Three Line of Defense in the Company.
   e. Evaluation of corporate plans to implement Internal Control for Financial Reporting (ICoFR).
   f. Field visits to power plants owned and managed by the Company.
   g) Coordination with the Secretary of the Board of Commissioners and the Board of Commissioners Committee.
3. Competency Development Program of the Audit Committee.

Pelaksanaan Tugas Komite Audit
Duty Implementation of the Audit Committee

Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan rencana program kerja Komite Audit tahun 2021. Rencana program kerja tersebut direalisasikan diantaranya dengan melakukan telaah, memberikan masukan atau rekomendasi, menghadiri rapat-rapat dengan Dewan Komisaris, Direksi, SPI dan pertemuan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas Komite Audit serta melakukan kunjungan kerja bersama Dewan Komisaris. Komite Audit melaporkan realisasi program kerja secara triwulanan kepada Dewan Komisaris.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit telah direalisasikan berdasarkan rencana program kerja tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Komite Audit melaporkan realisasi program kerja secara triwulanan kepada Dewan Komisaris. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit diantaranya melakukan telaah, memberikan masukan atau rekomendasi, menghadiri rapat-rapat dengan Dewan Komisaris, Direksi, seluruh jajaran manajemen dan pertemuan lain serta melakukan kunjungan kerja bersama Dewan Komisaris.

The Audit Committee has carried out its duties and responsibilities based on the 2021 Audit Committee work program plan. The work program plan is realized among others by conducting reviews, providing input or recommendations, attending meetings with the Board of Commissioners, Board of Directors, IAU, and other meetings related to the implementation duties of the Audit Committee as well as conducting working visits with the Board of Commissioners. The Audit Committee reports the realization of the work program quarterly to the Board of Commissioners.

The implementation of duties and responsibilities of the Audit Committee has been realized based on the 2022 work program plan which has been determined to support the implementation of supervisory duties of the Board of Commissioners. The Audit Committee reports the realization of the work program on a quarterly basis to the Board of Commissioners. Activities conducted in the context of carrying out duties and responsibilities of the Audit Committee include conducting reviews, providing input or recommendations, attending meetings with the Board of Commissioners, Board of Directors, all levels of management

Secara umum, Komite Audit telah melakukan pengawasan dan pendampingan serta memberikan masukan sepanjang tahun 2022 antara lain untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pembahasan evaluasi Tindak Lanjut Arahan RUPS dan Dewan Komisaris PILAR.
2. Penyelesaian Laporan Komite Audit Triwulan IV Tahun 2021.
3. *Kick Off Meeting* GCG PLN Grup dengan BPKP.
4. Pembahasan Laporan Kerja Satuan Pengawasan Internal (LKSPI) Triwulan IV Tahun 2021 serta Triwulan I, II dan III Tahun 2022.
5. Kunjungan Kerja bersama Dewan Komisaris ke beberapa pembangkit antara lain PLTU Indramayu, PLTU Cilacap, PLTA Cirata, PLTU Cilacap, PLTU Muara Karang, dan PLTU Muara Tawar.
6. Mengikuti Webinar mengenai penguatan pencegahan korupsi .
7. *Focus Group Discussion* (FGD) *Assessment* GCG Aspek III Dewan Komisaris bersama BPKP.
8. Penyelesaian Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Semester II Tahun 2021.
9. Pembahasan Permasalahan Operasional Pembangkit, terutama EFOR, yang dihadapi Perusahaan.
10. Pembahasan *Overhaul* Pembangkit.
11. Pembahasan Internal *Control Over Financial Report* (ICoFR).
12. Pembahasan KPI Individu Direksi.
13. Evaluasi Kinerja KAP tahun buku 2021.
14. *Sharing Knowledge* Komite Audit dengan PJBA.
15. Pembahasan Kinerja Keuangan Perusahaan tahun 2022.
16. Diskusi *Three Line Of Defence* antara lain penerapannya di PLTU Tanjung Awar Awar.
17. Pembahasan TKDN Proyek PLTS Cirata.
18. Pembahasan *Corporate Charter.*
19. Pembahasan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) 2023 dengan Satuan Pengawasan Internal (SPI).
20. Pembahasan RKAP tahun 2023.
21. *Assessment* GCG tahun buku 2022.
22. Mengikuti Kegiatan yang diinisiasi oleh komite lainnya.

and other meetings as well as conducting working visits with the Board of Commissioners. In general, the Audit Committee has supervised and assisted as well as provided input throughout 2022, among others, for the following matters:

1. Discussion on the follow-up evaluation of the GMS and the Board of Commissioners' PILAR Directions.
2. Completion of the 2021 Quarter IV Audit Committee Report.
3. Kick Off Meeting of GCG PLN Group with BPKP.
4. Discussion on the Work Report of the Internal Audit Unit (LKSPI) for the fourth quarter of 2021 and for the first, second and third quarters of 2022.
5. Working visits with the Board of Commissioners to several power plants including Indramayu CFPP, Cilacap CFPP, Cirata HPP, Cilacap CFPP, Muara Karang CFPP and Muara Tawar CFPP.
6. Participated in a Webinar on strengthening corruption prevention.
7. Focus Group Discussion (FGD) GCG Assessment Aspect III of the Board of Commissioners with BPKP.
8. Completion of the Supervisory Report of the Board of Commissioners for Semester II of 2021.
9. Discussion of Power Plant Operational Issues, especially EFOR, faced by the Company.
10. Discussion of Power Plant Overhaul.
11. Discussion of Internal Control over Financial Report (ICoFR).
12. Discussion of the Board of Directors' Individual KPIs.
13. PAF Performance Evaluation for the 2021 financial year.
14. Knowledge Sharing of the Audit Committee with PJBA.
15. Discussion of the Company's Financial Performance in 2022.
16. Discussion of the Three Lines of Defense, including its application at Tanjung Awar-Awar CFPP.
17. Discussion of the TKDN of Cirata SPP Project.
18. Discussion of Corporate Charter.
19. Discussion of the 2023 Annual Audit Work Program (AAWP) with the Internal Audit Unit (IAU).
20. Discussion of the 2023 ABOP.
21. GCG Assessment for the 2022 fiscal year.
22. Participated in activities initiated by other committees.

Rapat Komite Audit
Audit Committee Meeting

Piagam Komite Audit mengatur bahwa Komite Audit mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan untuk menyelesaikan Program Komite Audit. Selain itu, BoC *Manual* juga menjelaskan bahwa Komite Audit wajib melakukan pertemuan rutin dengan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan serta melakukan pertemuan dengan fungsi terkait terutama fungsi keuangan dan Internal Audit dalam rangka membahas perkembangan dan aktivitas Perusahaan baik secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan. Komite Audit telah melaksanakan rapat sepanjang tahun 2022 sebanyak 20 (dua puluh) kali.

The Audit Committee Charter stipulates that the Audit Committee holds meetings periodically at least 1 (once) a month to complete the Audit Committee Program. In addition, the BoC Manual also explains that the Audit Committee is required to hold regular meetings with the Board of Commissioners at least 1 (once) a month and hold meetings with related functions, especially the financial and internal audit function in the context of discussing the Company's developments and activities both periodically and at any time if necessary. The Audit Committee has held 20 (twenty) meetings throughout 2022.

Rapat Komite Audit
Audit Committee Meeting

No.	Tanggal Date	Agenda
1	13 Januari 2022 January 13, 2022	Rencana Perubahan Anggaran Dasar Tentang Kewenangan Dekom Dalam Hapus Buku Aset Planned Amendment to the Articles of Association Concerning the Authority of the Board of Commissioners in Writing Off Assets
2	7 Februari 2022 February 7, 2022	Progres Audit Laporan Keuangan oleh KAP PwC Audit Progress of the Financial Statements by PwC PAF
3	7 Februari 2022 February 7, 2022	LKSPI TW IV tahun 2021 IAUWR of Q4 2021
4	11 Februari 2022 February 11, 2022	Pembahasan Pendahuluan Pemantauan Tindak Lanjut Arahan dan Rekomendasi RUPS (PILAR) 2022 Preliminary Discussion of Follow-up Monitoring of the 2022 GMS Directions and Recommendations (PILAR)
5	11 Maret 2022 March 11, 2022	Diskusi terkait digitalisasi *Power Plant* dan on *progress Dashboard* Perusahaan Discussion related to digitizing the Power Plant and on progress of the Company Dashboard
6	11 April 2022 April 11, 2022	*Exit Meeting* Audit Laporan Keuangan, Kepatuhan dan Kinerja 2021 oleh KAP PwC Exit Meeting Audit of the 2021 Financial Statements, Compliance and Performance Reports by PwC PAF
7	19 April 2022 April 19, 2022	Diskusi KPI Direksi dan KPI Individu Direksi Discussion of the Board of Directors' KPIs and Individual KPIs
8	22 April 2022 April 22, 2022	*Progress* Tindak lanjut arahan RUPS Follow-up Progress on the GMS directives
9	11 Mei 2022 May 11, 2022	1. Rapat Evaluasi KAP PwC untuk Tahun Buku 2021 2. Rapat LKSPI TW I tahun 2022 1. PwC PAF Evaluation Meeting for the 2021 Fiscal Year 2. IAUWR Meeting in Q1-2022
10	7 Juni 2022 June 7, 2022	1. Rapat Mitigasi & Upaya Penurunan EFOR2022 2. Pembahasan Model 3 lini dari hasil audit SPI untuk unit kerja UBJOM TJ. Awar Awar 1. Mitigation & Reduction Effort Meeting for EFOR 2022 2. Discussion of the 3-line Model from the results of the IAU audit for the TJ Awar Awar OMSBU work unit.
11	15 Juli 2022 July 15, 2022	Diskusi mengenai Revaluasi Aset Perusahaan tahun 2022 Discussion regarding Revaluation of the Company's Assets in 2022
12	9 Juli 2022 July 9, 2022	Pembahasan Arahan RUPS dan Arahan Dewan Komisaris Discussion of the Direction of the GMS and the Board of Commissioners
13	11 Agustus 2022 August 11, 2022	Diskusi mengenai Pencapaian *Beyond* kWh Discussion on the Beyond kWh Achievement
14	19 Agustus 2022 August 19, 2022	Pembahasan Laporan Kinerja SPI (LKSPI) TW II tahun 2022 Discussion of the IAU Performance Report (IAUWR) in Q2 of 2022
15	19 September 2022 September 19, 2022	*Kick Off Meeting* Audit Laporan Keuangan Tahun 2022 oleh KAP PwC Kick Off Meeting of Audit for the 2022 Financial Statements by PwC PAF
16	13 Oktober 2022 October 13, 2022	Diskusi mengenai *Review* dan Evaluasi Pengadaan PT PNP Discussion regarding Procurement Review and Evaluation of PT PNP
17	24 Oktober 2022 October 24, 2022	Pembahasan Laporan Kinerja SPI TW III 2022 dan Laporan WBS Semester I 2022 Discussion of the IAU Q3-2022 Performance Report and WBS Report in Semester I of 2022
18	23 November 2022 November 23, 2022	Pembahasan Program Kerja Audit Tahun untuk tahun 2023 Discussion of the Year Audit Work Program for 2023
19	15 Desember 2022 December 15, 2022	Pembahasan Tindak Lanjut Arahan RUPS dan Dekom Discussion on the Follow-up to the Directions of the GMS and the Board of Commissioners
20	26 Desember 2022 December 26, 2022	Pembahasan Progress Akuntansi dalam rangka HSH Discussion of Accounting Progress in the context of HSH

Frekuensi Rapat Internal dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Audit
Frequency of Internal Meetings and Attendance of the Audit Committee Members

Nama Name	Jabatan Position	Frekuensi Rapat Meetings Frequency	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Hendra Iswahyudi	Ketua Chairman	20	16	80 %
Sigit Djalu Purwoko[1]	Sekretaris (Pihak Independen) Secretary (Independent Party)	10	10	100%
Edward Fahrizal	Sekretaris (Pihak Independen) Secretary (Independent Party)	20	18	90%
Andar Sudiar Sukma	Anggota (Pihak Independen) Member (Independent Party)	20	19	95%

1 Menjabat sampai dengan Juni 2022 Served until June 2022

Program Pengembangan Kompetensi Komite Audit
Competency Development Program of the Audit Committee

Pengembangan kompetensi Anggota Komite Audit dilaksanakan dalam rangka mendorong efektivitas pelaksanaan tugas Komite Audit. Program pengembangan kompetensi Anggota Komite Audit sepanjang tahun 2022 diuraikan pada bagian Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Kepala SPI.

The competency development for Members of the Audit Committee is carried out in order to encourage the effectiveness of the Audit Committee duties implementation. The Audit Committee competency development program throughout 2022 are explained in the Education and Training section for the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Head of IAU.

Penilaian Kinerja Komite Audit
Audit Committee Performance Assessment

Komite Audit melakukan evaluasi mandiri (*self assessment*) secara berkala atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang telah dijalankan. Selain itu, Dewan Komisaris juga melakukan evaluasi atas kinerja Komite Audit dalam agenda rapat evaluasi internal Dewan Komisaris dan organ Dewan Komisaris untuk memastikan dan mendorong efektivitas pelaksanaan tugas Komite Audit. Penilaian kinerja Komite Audit dilakukan berdasarkan kriteria dan realisasi rencana kerja Komite Audit yang telah ditetapkan. Berikut adalah kriteria dan hasil penilaian tahun 2022 atas kinerja Komite Audit:

The Audit Committee conducted self-assessment periodically for the implementation of duties and responsibilities that have been carried out. In addition, the Board of Commissioners also conducted evaluation of the performance of the Audit Committee in the agenda of the internal evaluation meeting of the Board of Commissioners and the organs of the Board of Commissioners to ensure and encourage the effectiveness of the implementation of duties of the Audit Committee. Assessment of the performance of the Audit Committee is conducted based on criteria and realization of the Audit Committee's work plan that has been determined. The following are the criteria and result of the Audit Committee's performance assessment in 2022:

Tabel Evaluasi Kinerja Komite Audit
Table of the Audit Committee Performance Evaluation

No.	Kriteria Penilaian Assessment Criteria	Rata-rata Averages
1	Ketepatan waktu agenda kegiatan Dewan Komisaris Timeliness of the agenda for the activities of the Board of Commissioners	9,05
2	Kualitas pekerjaan Quality of work	9,20
3	Kontribusi pada kegiatan Dewan Komisaris Contribution to the activities of the Board of Commissioners	8,90

No.	Kriteria Penilaian Assessment Criteria	Rata-rata Averages
4	Presentasi pada Rapat Internal Dewan Komisaris (RID) Presentation at the Internal Meeting of the Board of Commissioners (RID)	8,60
5	Pelaksanaan rapat (RID, RDD, RKM) Meetings (RID, RDD, RKM)	8,60
6	Penyiapan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Preparation of the Supervisory Report of the Board of Commissioners	9,20
Rata-Rata Skor Average Score		**8,93**

Hasil evaluasi atas kinerja Komite Audit yang telah dilakukan selanjutnya digunakan untuk menyusun langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka perbaikan dan pengembangan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Audit dalam mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

The evaluation results on the performance of the Audit Committee that have been conducted are then used to compile the necessary measures in the context of improvement and development as well as increasing the effectiveness of the implementation of duties of the Audit Committee in supporting the implementation of duties of the Board of Commissioners.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee

Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan salah satu organ pendukung fungsi Pengawasan yang dijalankan Dewan Komisaris dalam tata kelola Perusahaan. Dewan Komisaris membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dengan tugas pokok membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, khususnya terkait pengawasan atas efektivitas pelaksanaan pengelolaan SDM dan Organisasi dan kebijakan remunerasi. Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan telaah dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang berhubungan dengan sistem pengelolaan talenta, sistem penilaian kinerja, nominasi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris perusahaan anak, kebijakan remunerasi serta lingkungan.

The Nomination and Remuneration Committee is one of the supporting organs of the Supervisory function carried out by the Board of Commissioners in corporate governance. The Board of Commissioners establishes the Nomination and Remuneration Committee with the main duties of assisting the implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners, specifically related to supervising the effectiveness of the implementation of HR and Organization management and remuneration policies. The Nomination and Remuneration Committee reviews and provides input to the Board of Commissioners on matters relating to the talent management system, performance assessment system, nomination for members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners of subsidiaries, remuneration policies and the environment.

Dasar pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-06/MBU/04/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-14/MBU/10/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

The basis for establishing the Nomination and Remuneration Committee refers to Law Number 19 of 2003; Law Number 40 of 2007 and Regulation of the Minister of SOEs Number: PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012, Regulation of the Minister of SOEs Number PER-06/MBU/04/2021 concerning Amendments to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organ of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises and Regulation of the Minister of SOEs Number PER-14/MBU/10/2021 concerning Second Amendment to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organ of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises.

Susunan, Periode dan Masa Jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi

Composition, Period and Term of Office of the Nomination and Remuneration Committee

Komite Nominasi dan Remunerasi dipimpin oleh seorang Ketua yang merupakan anggota Dewan Komisaris dan dibantu oleh Sekretaris merangkap anggota. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang merangkap sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sama dengan masa jabatan penunjukannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Sedangkan masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

The Nomination and Remuneration Committee is led by a Chairman who is a member of the Board of Commissioners and assisted by a Secretary who is concurrently a member. Members of the Nomination and Remuneration Committee are determined based on the Decision of the Board of Commissioners with the term of office of members of the Board of Commissioners who concurrently serve as members of the Nomination and Remuneration Committee equal to the term of office of their appointment as members of the Board of Commissioners determined by the General Meeting of Shareholders. Meanwhile, the term of office for members of the Nomination and Remuneration Committee who are not members of the Board of Commissioners is 3 (three) years and can be extended 1 (one) time for 2 (two) years, without reducing the rights of the Board of Commissioners to dismiss them at any time.

Susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi mengalami perubahan, karena terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris yang jangka waktunya telah habis. Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Nomor 016.K/DK/PJB/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi pada Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa-Bali. Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

The composition of the Nomination and Remuneration Committee membership has changed due to the change in composition of the Board of Commissioners whose term has expired. The composition of the Nomination and Remuneration Committee is determined based on the Decision of the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa Bali Number 016.K/DK/PJB/2021 dated December 31, 2021 concerning the Establishment of the Nomination and Remuneration Committee on the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa-Bali. The composition of the Nomination and Remuneration Committee in 2022 is as follows:

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Januari - Desember 2022

Composition of the Nomination and Remuneration Committee in January - December 2022

Nama Name	Jabatan Position	Keahlian Expertise	Periode Jabatan Term of Office	Masa Jabatan Term of Office
Komang Parmita	Ketua (Komisaris) Chairman (Commissioner)	Manajemen Bisnis; Operation & Maintenance Pembangkitan; Health, Safety, Security And Environment Business Management; Operation & Maintenance of Electric Power Generator; Health, Safety, Security And Environment	Kesatu First	1 Januari - 13 Desember 2022 January 1 - December 13, 2022
Bagus Puruhito	Wakil Ketua (Komisaris) Vice Chairman (Commissioner)	Human Capital Management, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Organisasi Human Capital Management, Occupational Health and Safety, Organization	Kesatu First	1 Januari - 31 Desember 2022 January 1 - December 31, 2022
Chaerudin Darsa	Sekretaris merangkap anggota (Pihak Independen) Secretary and member (Independent Party)	Human Capital, Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Corporate Culture Human Capital, Occupational Health and Safety Management, Corporate Culture	Kesatu First	1 Januari - 31 Desember 2022 January 1 - December 31, 2022
Eri Nucahyanto	Anggota (Pihak Independen) Member (Independent Party)	Regulasi dan Manajemen Bisnis Penyediaan Tenaga Listrik, Tarif Tenaga Listrik Electricity Supply Business Regulation and Management, Electricity Tariffs	Kesatu First	1 Januari - 31 Desember 2022 January 1 - December 31, 2022

Dengan adanya perubahan susunan Dewan Komisaris, per 14 Desember 2023 susunan Komite Nominasi dan Remunerasi menjadi sebagai berikut:

With the change in the composition of the Board of Commissioners, as of December 14, 2023 the composition of the Nomination and Remuneration Committee is as follows:

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi 14 – 31 Desember 2022
Composition of the Nomination and Remuneration Committee on December 14-31, 2022

Nama Name	Jabatan Position	Keahlian Expertise	Periode Jabatan Term of Office	Masa Jabatan Term of Office
Bagus Puruhito	Wakil Ketua (Komisaris) Vice Chairman (Commissioner)	Human Capital Management, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Organisasi Human Capital Management, Occupational Health and Safety, Organization	Kesatu First	1 Januari - 31 Desember 2022 January 1 - December 31, 2022
Chaerudin Darsa	Sekretaris merangkap anggota (Pihak Independen) Secretary and member (Independent Party)	Human Capital, Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Corporate Culture Human Capital, Occupational Health and Safety Management, Corporate Culture	Kesatu First	1 Januari - 31 Desember 2022 January 1 - December 31, 2022
Eri Nucahyanto	Anggota (Pihak Independen) Member (Independent Party)	Regulasi dan Manajemen Bisnis Penyediaan Tenaga Listrik, Tarif Tenaga Listrik Electricity Supply Business Regulation and Management, Electricity Tariffs	Kesatu First	1 Januari - 31 Desember 2022 January 1 - December 31, 2022

Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Profile of Nomination and Remuneration Committee Members

Bagus Puruhito
Wakil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
Vice Chairman of Nomination and Remuneration Committee

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.

The profile can be seen in the Profile of the Board of Commissioners section.

Chaerudin Darsa

Sekretaris dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Secretary and Member of the Nomination and Remuneration Committee

Warga Negara Indonesia, 63 tahun, berdomisili di Depok.

Dasar Pengangkatan
Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Nomor 012.K/DK/PJB/2021, tanggal 21 September 2021 dan ditetapkan kembali terakhir kali berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Nomor 016.K/DK/PJB/2021 tanggal 31 Desember 2021.

Rangkap Jabatan
Tidak memiliki rangkap jabatan yang bertentangan dengan ketentuan internal Perusahaan dan peraturan serta perundangan yang berlaku.

Pendidikan
Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 1984 dan S2 Manajemen Keuangan dari UPN Veteran tahun 2005.

Selain itu, pendidikan non-formal yang pernah diikuti untuk mendapatkan sertifikasi diantaranya Sertifikasi *Quality Management Systems Assessment* (1997), *Malcolm Baldrige Criteria* (2013), *Socialization of* ISO/IEC 17021-1 : 2015 ; ISO/IEC 17021-3 : 2015; ISO 9001:2015 (2015), Implementasi Manajemen Risiko Berbasis SNI ISO 31000:2018 (2020) dan *Capacity Building* Pamahaman SNI ISO /IEC 17020:2012 (2021).

Riwayat Pekerjaan
Pernah berkarir sebagai Asisten ahli survei hidrologi dan Kasie Pemetaan (1984-1996), Asisten Manajer Sertifikasi Sistem Mutu (1996-2007), Manajer Bidang Pengembangan Usaha PT PLN (2007-2010), Manajer Senior Budaya Perusahaan dan Manajemen Perubahan pada Direktorat SDM PT PLN (2010-2015), Selain itu juga menjadi Auditor ISO 9001 & 14001 LMK QSC (1996-2010), Dosen Tidak Tetap STT PLN (2008-2011), Instruktur PLN Pusdiklat (2008-Sekarang), Auditor SNI Award (2010-Sekarang), Auditor KAN SNI 17021 (2012-Sekarang), Anggota Governing Board LSP PLN Pusdiklat (2014-2015), Auditor Malcolm Baldrige/KPKU (2015-Sekarang) dan Konsultan ISO 9001 (2015-Sekarang), Ketua Komite Pengaman Ketidakberpihakan Lembaga Sertifikasi Produk LMK Certification PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi (2019 – sekarang).

Indonesian citizen, 63 years old, domiciled in Depok.

Basis of Appointment
Appointed based on Decree of the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa Bali Number 012.K/DK/PJB/2021, dated September 21, 2021 and reappointed for the last time based on Decree of the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa Bali Number 016.K/DK/PJB/2021 dated December 31, 2021.

Concurrent Position
Does not have concurrent positions that conflict with the Company's internal provisions as well as the prevailing laws and regulations.

Education
He completed his Bachelor of Civil Engineering from Bandung Institute of Technology (ITB) in 1984 and Master of Financial Management from UPN Veteran in 2005.

In addition, non-formal education that has been attended to obtain certifications includes Quality Management Systems Assessment Certification (1997), Malcolm Baldrige Criteria (2013), Socialization of ISO/IEC 17021-1: 2015; ISO/IEC 17021-3: 2015; ISO 9001: 2015 (2015), Implementation of Risk Management Based on SNI ISO 31000: 2018 (2020) and Capacity Building for Understanding of SNI ISO/IEC 17020: 2012 (2021).

Career History
He had a career as an Assistant Hydrological Survey Expert and Head of Mapping Section (1984-1996), Assistant Manager of Quality System Certification (1996-2007), Manager of PT PLN's Business Development Division (2007-2010), Senior Manager of Corporate Culture and Change Management at the Directorate of Human Resources of PT PLN (2010-2015), In addition, he was also an ISO 9001 & 14001 Auditor at LMK QSC (1996-2010), Non-permanent Lecturer at STT PLN (2008-2011), PLN Pusdiklat Instructor (2008-Present), SNI Award Auditor (2010-Present), KAN SNI 17021 Auditor (2012-Present), Member of the Governing Board of LSP PLN Pusdiklat (2014-2015), Malcolm Baldrige Auditor/KPKU (2015-Present) and ISO 9001 Consultant (2015-Present), Chairman of the Impartiality Safety Committee of the Product Certification Institute for LMK Certification of PT PLN (Persero) Certification Center (2019 - present).

Eri Nurcahyanto

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of the Nomination and Remuneration Committee

Warga Negara Indonesia, 40 tahun, berdomisili di Jakarta Selatan.

Dasar Pengangkatan
Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Nomor 016.K/DK/PJB/2021 tanggal 31 Desember 2021.

Rangkap Jabatan
Tidak memiliki rangkap jabatan yang bertentangan dengan ketentuan internal Perusahaan dan peraturan serta perundangan yang berlaku.

Pendidikan
Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Elektro dari Universitas Diponegoro (UNDIP) tahun 2004 dan Magister Teknik Tenaga Listrik dan Energi dari Universitas Indonesia tahun 2009.

Selain itu, pendidikan non-formal yang pernah diikuti untuk mendapatkan sertifikasi diantaranya Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tahun 2009.

Riwayat Pekerjaan
Memulai karir di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sejak tahun 2005 sampai sekarang. Pada tahun 2013-2015 pernah menduduki sebagai Kepala Seksi Pengawasan Usaha Tenaga Listrik, Tahun 2015-2018 sebagai Kepala Seksi Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Tahun 2018-2021 sebagai Kepala Subdirektorat/Koordinator Kelompok Kerja Harga Tenaga Listrik. Pada tahun 2021 mendapatkan penugasan sebagai Senior Researcher on Energy di Asia Pacific Energy Research Centre (APERC), Japan. Sejak tahun 2022 sampai saat ini sebagai Koordinator Kelompok Kerja Tarif dan Subsidi Listrik.

Indonesian citizen, 40 years old, domiciled in South Jakarta

Basis of Appointment
Appointed based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa Bali Number 016.K/DK/PJB/2021 dated December 31, 2021.

Concurrent Position
Does not have concurrent positions that conflict with the Company's internal provisions as well as the prevailing laws and regulations.

Education
He completed his Bachelor of Electrical Engineering from Diponegoro University (UNDIP) in 2004 and Master of Electric Power and Energy Engineering from the University of Indonesia in 2009.

In addition, non-formal education that has been attended to obtain certification includes Government Goods and Services Procurement Certification in 2009.

Career History
He started his career at the Directorate General of Electricity, Ministry of Energy and Mineral Resources since 2005 until present. In 2013-2015, he served as Section Head of Electricity Business Supervision, as Section Head of Selling Price and Electricity Network Rental in 2015-2018, and as Head of Sub-directorate/ Coordinator of Electricity Price Working Group in 2018-2021. In 2021, he was assigned as Senior Researcher on Energy at the Asia Pacific Energy Research Center (APERC), Japan. Since 2022 until now as Coordinator of the Electricity Tariff and Subsidy Working Group.

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Independence of the Nomination and Remuneration Committee

Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi dapat bertindak independen semata-mata untuk kepentingan Perusahaan, terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan Perusahaan. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi kriteria independensi sebagai berikut:

The Board of Commissioners ensures that the Nomination and Remuneration Committee can act independently solely for the interests of the Company, regardless of the influence of various parties who have interests that may conflict with the interests of the Company. Members of the Nomination and Remuneration Committee have met the following independence criteria:

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi
Independence of the Nomination and Remuneration Committee

Kriteria Independensi Independence Criteria		Bagus Puruhito	Chaerudin Darsa	Eri Nurcahyanto
Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit dan non-audit atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.	Not an insider of a public accounting firm, legal consulting firm, or other parties providing audit and non-audit services or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months.	√	√	√
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung di Perusahaan.	Does not have shares either directly or indirectly in the Company.	√	√	√
Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan/atau mengendalikan Perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir.	Not a person who has the authority and responsibility to plan, lead, and/or control the Company within the last six months.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun ke samping atau hubungan semenda.	Does not have a blood family relationship with members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners up to the second degree, either in a straight line or sideways or a marital relationship.	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan; dan	Do not have direct and indirect business relationships related to the Company's business activities; and	√	√	√
Tidak sedang berada dalam institusi yang kegiatan usahanya memberikan jasa kepada Perusahaan.	Not being in an institution whose business activities provide services to the Company.	√	√	√

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi
Duties and Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee

Komite Nominasi dan Remunerasi dalam mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab dimana dalam pelaksanaannya, berhubungan dengan pihak-pihak terkait yang masing-masing memiliki tanggung jawab yang jelas pada semua kegiatan termasuk Direksi dan seluruh jajaran manajemen, terutama terkait dengan sistem pengelolaan talenta, sistem penilaian kinerja dan kebijakan remunerasi. Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Tanggung jawab ini didasarkan kepada fungsi dan tugas pokok sebagaimana diatur di dalam Piagam Komite. Tugas pokok Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan *review* secara berkala atas Sistem Pengelolaan Talenta (T*alent Management System*) perusahaan serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya.
2. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur Pengklasifikasian Talenta (*Talent Classification*) yang dilakukan oleh Direksi.
3. Melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris (*Selected Talent*), untuk menghasilkan daftar Talenta yang akan dinominasikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS (*Nominated Talent*).

The Nomination and Remuneration Committee in supporting the supervisory function of the Board of Commissioners has duties and responsibilities which in its implementation, relate to the related parties who each have clear responsibilities in all activities including the Board of Directors and all levels of management, especially related to the talent management system, performance assessment system and remuneration policy. The Nomination and Remuneration Committee is responsible to the Board of Commissioners. This responsibility is based on the main functions and duties as regulated in the Committee Charter. The main duties of the Nomination and Remuneration Committee are as follows:

1. Conducting periodic reviews of the Company's Talent Management System as well as monitoring and evaluating its implementation.
2. Evaluating the Talent Classification system and procedures conducted by the Board of Directors.
3. Validating and calibrating the Talent proposed by the Board of Directors to the Board of Commissioners (Selected Talent), to produce a list of Talent that will be nominated by the Board of Commissioners to the GMS (Nominated Talent).

4. Melakukan evaluasi terhadap Calon Wakil Perseroan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris perusahaan anak, sebelum diajukan kepada RUPS.
5. Melakukan evaluasi atas usulan *Key Performance Indicators* Individu anggota Direksi.
6. Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
7. Menyiapkan usulan program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
8. Melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi pegawai yang membutuhkan persetujuan/ tanggapan dari Dewan Komisaris.
9. Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi perusahaan.
10. Melakukan analisa, memberi masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan, pedoman, strategi dan sistem SDM dan Organisasi Perusahaan.
11. Melakukan analisa, memberi masukan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan SDM dan Organisasi yang dilakukan oleh Perusahaan.
12. Bersama komite lainnya menilai dan memberi masukan sesuai dengan bidang komite kepada Dewan Komisaris atas :
    a. Pelaksanaan Anggaran Dasar dan Board Manual Perusahaan;
    b. Rencana Kerja Jangka Panjang (RJPP);
    c. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
    d. Laporan Tahunan, Triwulanan dan Laporan Kinerja bulanan;
    e. *Good Corporate Governance* (GCG);
    f. *Key Performance Indicator* (KPI) Perusahaan;
13. Mempelajari, mengevaluasi dan memberikan masukan terhadap Laporan Manajemen, Kinerja SDM dan Organisasi dan Laporan K3L yang disusun oleh Direksi.
14. Melakukan analisa, memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas usulan-usulan Direksi dalam:
    a. Program Pengembangan SDM dan Organisasi yang mendukung *Human Capital Readiness* (HCR) dan *Organizational Capital Readiness* (OCR);
    b. Nominasi pejabat satu tingkat di bawah Direksi.
15. Melakukan analisa, memberi masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan, strategi dan pelaksanaan pengelolaan LK3 (Lingkungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja) perusahaan.
16. Melakukan analisa, memberi masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan, strategi dan pelaksanaan pengelolaan budaya perusahaan, hubungan industrial serta pelaksanaan *reward and punishment* pegawai.

4. Evaluating the Company's Representative Candidates who will be proposed as members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners of subsidiaries, before being submitted to the GMS.
5. Evaluating the proposal of Individual Key Performance Indicators of members of the Board of Directors.
6. Preparing proposals of individual performance evaluation system for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
7. Preparing proposals of development programs for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
8. Evaluating remuneration policies for employees who require approval/response from the Board of Commissioners.
9. Evaluating the Board of Directors' proposal regarding the Company's organizational structure.
10. Analyzing, providing input and recommendations to the Board of Commissioners on the policies, guidelines, strategies and systems of the Company's HR and Organization.
11. Analyzing, providing input to the Board of Commissioners on the implementation of HR and Organization management activities conducted by the Company.
12. Together with other committees, assessing and providing input in accordance with the committee's field to the Board of Commissioners:
    a. Implementation of the Company's Articles of Association and Board Manual;
    b. Company's Long Term Plan (RJPP);
    c. Annual Budget and Operational Plan (ABOP);
    d. Annual, Quarterly and monthly Performance Reports;
    e. Good Corporate Governance (GCG);
    f. Key Performance Indicator (KPI) of the Company;
13. Studying, evaluating and providing input on the Management Report, HR and Organization Performance and OHSE Report prepared by the Board of Directors.
14. Analyzing, providing input and recommendations to the Board of Commissioners on the proposals of the Board of Directors in:
    a. HR and Organizational Development Programs that support Human Capital Readiness (HCR) and Organizational Capital Readiness (OCR);
    b. Nomination of officers one level below the Board of Directors.
15. Analyzing, providing input and recommendations to the Board of Commissioners on policies, strategies and implementation of the Company's OHSE (Occupational Health and Safety Environment) management.
16. Analyzing, providing input and recommendations to the Board of Commissioners on policies, strategies and implementation of corporate culture management, industrial relations as well as the implementation of employee reward and punishment.

17. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Komite Nominasi dan Remunerasi, melaksanakan rapat-rapat komite, membuat risalah rapat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas-tugas komite secara berkala kepada Dewan Komisaris.
18. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian, memastikan selesainya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sesuai lingkup tugas dan kewajiban Komite Dewan Komisaris.
19. Menjaga kerahasiaan data serta informasi perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Dewan Komisaris.

17. Preparing the Nomination and Remuneration Committee's activity plan and budget, carrying out committee meetings, preparing minutes of meetings and submitting reports on the implementation of committee duties regularly to the Board of Commissioners.
18. Identifying matters that require attention, ensuring their completion and carrying out other duties assigned by the Board of Commissioners in accordance with the scope of duties and obligations of the Committee of the Board of Commissioners.
19. Maintaining the confidentiality of company data and information in accordance with the applicable provisions of the Board of Commissioners.

Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Work Guidelines of the Nomination and Remuneration Committee

Komite Nominasi dan Remunerasi sebelumnya menggunakan nomenklatur Komite SDM dan Organisasi. Dalam pelaksanaan tugasnya berpedoman pada Piagam Komite SDM dan Organisasi yang telah ditetapkan Dewan Komisaris pada tahun 2018. Piagam Komite SDM dan Organisasi mengatur beberapa hal terkait antara lain: Maksud dan Tujuan, Fungsi dan Tugas Pokok, Tanggung Jawab dan Wewenang, Organisasi dan Keanggotaan, *Key Performance Indicator* dan Penilaian kinerja Komite, Mekanisme Kerja dan Kode Etik. Pedoman kerja Komite Nominasi dan Remunerasi dikaji secara berkala dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan pemutakhiran guna memastikan kesesuaian muatannya dengan dinamika organisasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *best practices.*

The Nomination and Remuneration Committee previously used the nomenclature of the HR and Organization Committee. In carrying out its duties, the Nomination and Remuneration Committee is guided by the HR and Organization Committee Charter that has been determined by the Board of Commissioners in 2018. The HR and Organization Committee Charter regulates several matters related to, among others: Purpose and Objectives, Functions and Main Duties, Responsibilities and Authority, Organization and Membership, Key Performance Indicator and Committee Performance Assessment, Working Mechanism and Code of Conduct. The work guidelines of the Nomination and Remuneration Committee are reviewed regularly and if deemed necessary, updates can be conducted to ensure the suitability of its content with organizational dynamics, applicable laws and regulations as well as best practices.

Rencana Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Work Program Plan of the Nomination and Remuneration Committee

Program kerja Komite Nominasi dan Remunerasi disusun setiap tahun untuk mendorong efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Program kerja Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Internal Komite Nominasi dan Remunerasi :
   a. Evaluasi Laporan Manajemen Bulanan, Triwulanan dan Tahunan.
   b. Evaluasi pencapaian target Program Bidang SDM dan Organisasi.
   c. Evaluasi pencapaian *Target Zero Accident*, K3L dan Proper.

The Nomination and Remuneration Committee work program is prepared annually to encourage the effective implementation of duties and responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee in supporting the implementation of the supervisory duties of the Board of Commissioners. The work program of the Nomination and Remuneration Committee in 2022 is as follows:

1. Internal Activities of the Nomination and Remuneration Committee:
   a. Evaluation of Monthly, Quarterly and Annual Management Reports.
   b. Evaluation of the achievement of the HR and Organization Division Program targets.
   c. Evaluation of the achievement of Zero Accident, OHSE and Proper Targets.

d. Evaluasi pencapaian Target HCR dan OCR.
e. *Monitoring* dan Evaluasi Tata Kelola IT dan Manajemen Dokumen.
f. Menyiapkan Laporan Kegiatan Komite SDM dan Organisasi.
g. Menyiapkan dan memantau Program Kerja Komite SDM dan Organisasi.
h. Mengevaluasi dan memberikan masukan kepada Dekom terhadap usulan Direksi dalam hal pengembangan Organisasi, Nominasi dan Remunerasi Perusahaan.
i. Berpartisipasi Aktif dalam Rapat Internal Dekom (RID), untuk membahas bahan rapat pengawasan dengan Direksi.
j. Memberikan masukan (apabila diminta) kepada Dewan Komisaris dalam rapat pengawasan dengan Direksi.

2. Kegiatan bersama Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan.
   a. Melakukan rapat mingguan antar Komite dan Sekretaris Dewan Komisaris.
   b. Melakukan evaluasi Laporan Kinerja dan Laporan Manajemen.
   c. Evaluasi atas usulan RKAP 2023 dan Usulan revisi RKAP 2022.
   d. Evaluasi atas Kinerja Anak Perusahaan / Perusahaan Afiliasi.
   e. Evaluasi atas IT *Governance* dan Evaluasi TLD (*Three Lines of Defence*).
   f. Menindaklanjuti arahan Dewan Komisaris terkait fungsi pengawasan dan pemberian nasehat.
   g. Menyiapkan dokumen pendukung terkait dengan asesmen GCG.
   h. Menyiapkan draft tanggapan Dewan Komisaris atas RKAP dan LPT.
   i. Menyiapkan *draft* tanggapan / rekomendasi Dewan Komisaris atas surat Direksi.
   j. Pembahasan permasalahan korporat dengan jajaran manajemen sesuai permintaan Dewan Komisaris / Direksi.

d. Evaluation of the achievement of HCR and OCR Targets.
e. Monitoring and Evaluation of IT Governance and Document Management.
f. Preparing the HR and Organization Committee Activity Report.
g. Preparing and monitoring the Work Program of the HR and Organization Committee.
h. Evaluating and providing input to the Board of Commissioners on the Board of Directors' proposal in terms of the development of the Company's Organization, Nomination and Remuneration.
i. Actively participating in the Board of Commissioners' Internal Meeting (RID), to discuss materials for the supervisory meeting with the Board of Directors.
j. Providing input (if requested) to the Board of Commissioners in supervisory meetings with the Board of Directors.

2. Activities with the Secretary of the Board of Commissioners, Audit Committee, Risk Management and Compliance Committee.
   a. Conducting weekly meetings between Committees and the Secretary of the Board of Commissioners.
   b. Evaluating the Performance Report and Management Report.
   c. Evaluation of the proposed 2023 ABOP and the Proposed revision of the 2022 ABOP.
   d. Evaluation of the Performance of Subsidiaries/Affiliated Companies.
   e. Evaluation of IT Governance and TLD (Three Lines of Defense).
   f. Following-up on the direction of the Board of Commissioners related to the supervisory and advisory functions.
   g. Preparing the supporting documents related to GCG assessment.
   h. Preparing a draft of the Board of Commissioners' response to the ABOP and LPT.
   i. Preparing a draft of the Board of Commissioners' response/ recommendation on the Board of Directors' letter.
   j. Discussing corporate issues with management as requested by the Board of Commissioners/Board of Directors.

Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi

Duties Implementation of the Nomination and Remuneration Committee

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi telah direalisasikan berdasarkan rencana program kerja tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Komite Nominasi dan Remunerasi melaporkan realisasi program kerja secara triwulanan kepada Dewan Komisaris. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi diantaranya melakukan telaah, memberikan masukan atau rekomendasi, menghadiri rapat-rapat dengan Dewan Komisaris, Direksi, seluruh jajaran manajemen

The implementation of duties and responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee has been realized based on the 2022 work program plan that has been determined in supporting the implementation of the supervisory duties of the Board of Commissioners. The Nomination and Remuneration Committee reports the realization of the work program quarterly to the Board of Commissioners. Activities conducted in the context of carrying out duties and responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee include conducting reviews, providing input or recommendations, attending meetings with the Board

terutama yang menangani sistem pengelolaan talenta, sistem penilaian kinerja, kebijakan remunerasi dan pertemuan lain serta melakukan kunjungan kerja bersama Dewan Komisaris. Secara umum, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan pengawasan dan pendampingan serta memberikan masukan sepanjang tahun 2022 antara lain untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Evaluasi Laporan Kinerja setiap bulan dan Laporan Manajemen Triwulanan tahun 2022.
2. Pembahasan usulan wakil Perusahaan pada Anak Perusahaan.
3. Pembahasan pelaksanaan Program Bidang SDM dan Organisasi termasuk mengevaluasi pencapaian targetnya.
4. Evaluasi pencapaian target *Zero Accident* terkait Implementasi K3L dan Reposisi Fungsi K3L dan Persiapan PROPER.
5. Evaluasi pencapaian target OCR dan HCR.
6. *Monitoring* dan Evaluasi Tata Kelola IT terkait IT *Master Plan, Enterprise Architecture* (EA) Perusahaan, IMS - 2.0 dan Pengembangan Teknologi Informasi.
7. Pembahasan usulan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
8. Menyampaikan Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi secara Triwulanan sepanjang tahun 2022.
9. Menyiapkan Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2023.
10. Berpartisipasi Aktif dalam Rapat Internal Dewan Komisaris (RID).
11. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam rapat pengawasan dengan Direksi.
12. Mengikuti rapat Komite Audit; Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan; Sekretaris Dewan Komisaris.
13. Mengikuti rapat antar Komite dan Sekretaris Dewan Komisaris.
14. Mengikuti kunjungan kerja lapangan dengan Dewan Komisaris.

of Commissioners, Board of Directors, all levels of management, especially those handling the talent management system, performance assessment system, remuneration policy and other meetings as well as conducting work visits with the Board of Commissioners. In general, the Nomination and Remuneration Committee has conducted supervision and assistance as well as provided input throughout 2022, among others, for the following matters:

1. Evaluation of monthly Performance Reports and Quarterly Management Reports in 2022.
2. Discussion of the Company's proposed representative to the Subsidiary.
3. Discussion of the implementation of the HR and Organization Division Program including evaluating the achievement of its targets.
4. Evaluation of Zero Accident target achievement related to OHSE Implementation, OHSE Function Repositioning and PROPER Preparation.
5. Evaluation of OCR and HCR target achievement.
6. Monitoring and Evaluation of IT Governance related to IT Master Plan, Company Enterprise Architecture (EA), IMS - 2.0 and Information Technology Development.
7. Discussion of the proposed Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors.
8. Submitting the Nomination and Remuneration Committee Report on a Quarterly basis throughout 2022.
9. Preparing the Nomination and Remuneration Committee Work Program for 2023.
10. Actively participating in the Internal Meeting of the Board of Commissioners (RID).
11. Providing input to the Board of Commissioners in supervisory meetings with the Board of Directors.
12. Attending meetings of the Audit Committee; Risk Management and Compliance Committee; Secretary of the Board of Commissioners.
13. Attending meetings between Committees and the Secretary of the Board of Commissioners.
14. Participating in field work visits with the Board of Commissioners.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee Meeting

Piagam Komite mengatur bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan untuk menyelesaikan Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi. Selain itu, BoC *Manual* juga menjelaskan bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan pertemuan rutin dengan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan serta melakukan pertemuan dengan fungsi terkait mengenai pelaksanaan nominasi dan remunerasi di

The Committee Charter regulates that the Nomination and Remuneration Committee holds regular meetings at least 1 (one) time a month to complete the Nomination and Remuneration Committee Work Program. In addition, the Board of Commissioners Manual also explains that the Nomination and Remuneration Committee is required to conduct regular meetings with the Board of Commissioners at least 1 (one) time a month and conduct meetings with related functions regarding the implementation of

Perusahaan dalam rangka membahas perkembangan dan aktivitas Perusahaan baik secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan. Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan rapat sepanjang tahun 2022 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kali.

nomination and remuneration in the Company in order to discuss the development and activities of the Company, both periodically and at any time if necessary. The Nomination and Remuneration Committee has carried out 38 (thirty eight) meetings throughout 2022.

Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Meeting Agenda of the Nomination and Remuneration Committee

No.	Tanggal Date	Agenda
1	7 Januari 2022 January 7, 2022	Induksi Anggota Komite Baru Induction of New Committee Members
2	11 Januari 2022 January 11, 2022	*Talent Mobility*
3	14 Januari 2022 January 14, 2022	Basis Komunikasi Lingkungan PLTA Cirata Environmental Communication Base of Cirata HPP
4	11 Februari 2022 February 11, 2022	Finalisasi Basis Komunikasi Lingkungan PLTA Cirata Finalization of Cirata HPP Environmental Communication Base
5	21 Februari 2022 February 21, 2022	Mitigasi Kebakaran Fire Mitigation
6	14 Maret 2022 March 14, 2022	Remunerasi 2022 Remuneration 2022
7	15 Maret 2022 March 15, 2022	Pengembangan EBT dan *Mapping* SDM Konstruksi NRE Development and Construction HR Mapping
8	21 Maret 2022 March 21, 2022	*Integrated Management System (IMS)*
9	30 Maret 2022 March 30, 2022	Remunerasi Komite Remuneration for Committee
10	4 April 2022 April 4, 2022	Persiapan Proper 2022 Proper Preparation 2022
11	12 April 2022 April 12, 2022	*Mapping* SDM Konstruksi Construction HR Mapping
12	19 April 2022 April 19, 2022	Pemetaan Proses Bisnis Business Process Mapping
13	22 April 2022 April 22, 2022	*Board Manual*
14	10 Mei 2022 May 10, 2022	Monetisasi PJB Academy dan Pelatihan Tanggap Darurat PJB Academy Monetization and Emergency Response Training
15	13 Mei 2022 May 13, 2022	Ratas Remunerasi Remuneration Private Meeting
16	6 Juni 2022 June 6, 2022	Pengolahan FABA FABA Processing
17	10 Juni 2022 June 10, 2022	DAS Cirata DAS Cirata
18	15 Juni 2022 June 15, 2022	Sismindokum Sismindokum
19	5 Juli 2022 July 5, 2022	Organisasi Proyek Project Organization
20	11 Juli 2022 July 11, 2022	*Top* GRC *Award*
21	12 Juli 2022 July 12, 2022	Kinerja K3L PLTU Indramayu OHSE performance of Indramayu CFPP
22	13 Juli 2022 July 13, 2022	*Workshop* SMAP SMAP Workshop
23	15 Juli 2022 July 15, 2022	Pengelolaan Arsip Archive Management
24	19 Juli 2022 July 19, 2022	Holdingisasi Holdingization
25	26 Juli 2022 July 26, 2022	Digitalisasi Arsip Archive Digitization
26	5 Agustus 2022 August 5, 2022	KJA Cirata KJA Cirata
27	9 Agustus 2022 August 9, 2022	PILAR
28	10 Agustus 2022 August 10, 2022	Digitalisasi Arsip Archive Digitization
29	18 Agustus 2022 August 18, 2022	Progres Persiapan Proper Proper Preparation Progress

No.	Tanggal Date	Agenda
30	22 Agustus 2022 August 22, 2022	*Workshop* ESG ESG Workshop
31	7 September 2022 September 7, 2022	*Talent Mobility* dan *Career Path* Sistem Proteksi Talent Mobility and Career Path for Protection System
32	13 September 2022 September 13, 2022	Progress K3L OHSE Progress
33	17 Oktober 2022 October 17, 2022	Proses Bisnis HSH HSH Business Process
34	2 November 2022 November 2, 2022	Pengelolaan SDM dan Organisasi HSH HR and Organization Management of HSH
35	9 November 2022 November 9, 2022	Progres Migrasi SAP dalam rangka HSH SAP Migration Progress in the context of HSH
36	6 Desember 2022 December 6, 2022	Fasilitas Kesehatan dan *Payroll* HSH HSH Health Facility and Payroll
37	7 Desember 2022 December 7, 2022	Tanggapan Dekom Atas HSH Board of Commissioners' Response to HSH
38	22 Desember 2022 December 22, 2022	K3L dalam rangka HSH OHSE in the context of HSH

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Frequency of Meetings and Attendance of Members of the Nomination and Remuneration Committee

Nama Name	Jabatan Position	Frekuensi Rapat Frequency of Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Komang Parmita[1]	Ketua Chairman	38	38	100%
Bagus Puruhito	Wakil Ketua Vice Chairman	38	38	100%
Chaerudin Darsa	Sekretaris (Pihak Independen) Secretary (Independent Party)	38	38	100%
Eri Nurcahyanto	Anggota (Pihak Independen) Member (Independent Party)	38	38	100%

Keterangan:
1 RUPS Sirkuler tanggal 14 Desember 2022, memberhentikan dengan hormat Sdr. Komang Parmita sebagai Komisaris serta mengangkat dan menetapkan Sdr. Kenedy sebagai Komisaris.

Information:
1 Circular GMS dated December 14, 2022, respectfully dismissed Mr. Komang Parmita as Commissioner as well as appointed and determined Mr. Kenedy as Commissioner.

Program Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Competency Development Program of the Nomination and Remuneration Committee

Pengembangan kompetensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan dalam rangka mendorong efektivitas pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi. Program pengembangan kompetensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sepanjang tahun 2022 diuraikan pada bagian Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Kepala SPI.

Competency development of the Nomination and Remuneration Committee Members is carried out in order to encourage the effectiveness of duties implementation of the Nomination and Remuneration Committee. The competency development program of the Nomination and Remuneration Committee Members throughout 2022 is described in the Education and Training section of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Head of IAU.

Penilaian Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Performance Assessment of the Nomination and Remuneration Committee

Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi dievaluasi secara berkala baik *self assessment* maupun oleh Dewan Komisaris dalam agenda rapat evaluasi internal Dewan Komisaris dan organ Dewan Komisaris untuk memastikan dan mendorong efektivitas pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi. Penilaian kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan kriteria berupa pencapaian target-target atas realisasi Rencana Kerja Tahunan Komite Nominasi dan Remunerasi dengan indikator penilaian yang meliputi:

1. Ketepatan waktu agenda kegiatan Dewan Komisaris.
2. Kualitas pekerjaan.
3. Kontribusi pada kegiatan Dewan Komisaris.
4. Presentasi pada Rapat Internal Dewan Komisaris (RID).
5. Pelaksanaan rapat (RID, RDD, RKM).
6. Penyiapan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.

Berikut adalah hasil penilaian kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi pada tahun 2021:

Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi mandiri (*self assessment*) secara berkala atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang telah dijalankan. Selain itu, Dewan Komisaris juga melakukan evaluasi atas kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi dalam agenda rapat evaluasi internal Dewan Komisaris dan organ Dewan Komisaris untuk memastikan dan mendorong efektivitas pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi. Penilaian kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan kriteria dan realisasi rencana kerja Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah ditetapkan. Berikut adalah kriteria dan hasil penilaian tahun 2022 atas kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi:

The performance of the Nomination and Remuneration Committee is regularly evaluated, both by self-assessment and by the Board of Commissioners in the agenda of the internal evaluation meeting of the Board of Commissioners and organs of the Board of Commissioners to ensure and encourage the effective implementation of duties of the Nomination and Remuneration Committee. The performance assessment of the Nomination and Remuneration Committee is conducted based on criteria in the form of targets achievement on the realization of the Annual Work Plan of the Nomination and Remuneration Committee with assessment indicators including:

1. Timeliness of the Board of Commissioners' activity agenda.
2. Quality of work.
3. Contribution to the activities of the Board of Commissioners.
4. Presentation at the Internal Meeting of the Board of Commissioners (RID).
5. Implementation of meetings (RID, RDD, RKM).
6. Preparation of the Board of Commissioners Supervisory Report.

The following are the results of performance assessment of the Nomination and Remuneration Committee in 2021:

The Nomination and Remuneration Committee conducts periodic independent evaluation (self-assessment) on the implementation of duties and responsibilities that have been carried out. In addition, the Board of Commissioners also evaluates the performance of the Nomination and Remuneration Committee in the agenda of the internal evaluation meeting of the Board of Commissioners and organs of the Board of Commissioners to ensure and encourage the effective implementation of duties of the Nomination and Remuneration Committee. The performance assessment of the Nomination and Remuneration Committee is conducted based on the criteria and realization of the Nomination and Remuneration Committee work plan that has been determined. The following are the criteria and results of the 2022 assessment of the Nomination and Remuneration Committee's performance:

Tabel Evaluasi Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Table of Performance Evaluation of the Nomination and Remuneration Committee

No.	Kriteria Penilaian Kriteria Penilaian	Rata-rata Averages
1	Ketepatan waktu agenda kegiatan Dewan Komisaris Timeliness of the agenda for the activities of the Board of Commissioners	9,00
2	Kualitas pekerjaan Quality of work	9,00
3	Kontribusi pada kegiatan Dewan Komisaris Contribution to the activities of the Board of Commissioners	9,00

No.	Kriteria Penilaian Kriteria Penilaian	Rata-rata Averages
4	Presentasi pada Rapat Internal Dewan Komisaris (RID) Presentation at the Internal Meeting of the Board of Commissioners (RID)	8,70
5	Pelaksanaan rapat (RID, RDD, RKM) Meetings (RID, RDD, RKM)	8,70
6	Penyiapan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Preparation of the Supervisory Report of the Board of Commissioners	9,00
Rata-Rata Skor Average Score		**8,90**

Hasil evaluasi atas kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah dilakukan selanjutnya digunakan untuk menyusun langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka perbaikan dan pengembangan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi dalam mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

The results of evaluating the performance of the Nomination and Remuneration Committee that has been conducted are then used to formulate the necessary measures in order to improve and develop as well as increase the effective implementation of duties of the Nomination and Remuneration Committee in supporting the implementation of duties of the Board of Commissioners.

Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Risk Management and Compliance Committee

Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan merupakan organ pendukung fungsi Pengawasan yang dijalankan Dewan Komisaris dalam tata kelola Perusahaan. Dewan Komisaris membentuk Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan dengan tugas pokok membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, khususnya terkait pengawasan kebijakan dan strategi Perusahaan dari sisi risiko maupun kepatuhan. Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan melakukan telaah dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas penilaian terhadap hasil kajian risiko dan kepatuhan pada kegiatan perencanaan, operasional dan investasi Perusahaan serta kegiatan evaluasi atas penerapan *Enterprise Risk Management* di Perusahaan.

The Risk Management and Compliance Committee is a supporting organ of the Supervisory function carried out by the Board of Commissioners in corporate governance. The Board of Commissioners establishes the Risk Management and Compliance Committee with the main duty to assist the implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners, particularly related to the supervision of the Company's policies and strategies in terms of risk and compliance. The Risk Management and Compliance Committee reviews and provides input to the Board of Commissioners on the assessment of the results of risk and compliance studies on the Company's planning, operational and investment activities as well as evaluation activities on the implementation of Enterprise Risk Management in the Company.

Dasar pembentukan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-06/MBU/04/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-14/MBU/10/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

The basis of establishment of the Risk Management and Compliance Committee refers to Law No. 19 of 2003; Law No. 40 of 2007 and Regulation of the Minister of SOEs No. PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012, Regulation of the Minister of SOEs No. PER-06/MBU/04/2021 concerning Amendments to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises, and Regulation of the Minister of SOEs No. PER-14/MBU/10/2021 concerning Second Amendment to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises.

Susunan, Periode dan Masa Jabatan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Composition, Tenure and Term of Office of the Risk Management and Compliance Committee

Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan dipimpin oleh seorang Ketua yang merupakan anggota Dewan Komisaris dan dibantu oleh Sekretaris merangkap anggota serta setidaknya 2 (dua) orang anggota.

Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang merangkap sebagai anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan sama dengan masa jabatan penunjukannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Sedangkan masa jabatan anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan tidak mengalami perubahan pada tahun 2022. Susunan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Nomor 015.K/DK/PJB/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang pembentukan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan pada Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali sebagai berikut:

The Risk Management and Compliance Committee is led by a Chairman who is a member of the Board of Commissioners and assisted by a Secretary who is concurrently a member as well as at least 2 (two) members.

Members of the Risk Management and Compliance Committee are determined based on the Decision of the Board of Commissioners with the term of office of members of the Board of Commissioners who concurrently serve as members of the Risk Management and Compliance Committee is the same as the term of office of their appointment as members of the Board of Commissioners determined by the General Meeting of Shareholders. Meanwhile, the term of office for members of the Risk Management and Compliance Committee who are not members of the Board of Commissioners is 3 (three) years and can be extended for 1 (one) term of office without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss them at any time.

The composition of the Risk Management and Compliance Committee membership did not change in 2022. The composition of the Risk Management and Compliance Committee is determined based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa Bali Number 015.K/DK/PJB/2021 dated December 31, 2021 concerning the establishment of the Risk Management and Compliance Committee of the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa Bali as follows:

Composition of the Risk Management and Compliance Committee in January – December, 2022

Composition of the Risk Management and Compliance Committee in January – December, 2022

Nama Name	Jabatan Position	Keahlian Expertise	Periode Jabatan Tenure	Masa Jabatan Term of Office
Jisman P. Hutajulu	Ketua (Komisaris) Chairman (Commissioner)	Keselamatan, Standardisasi Ketenagalistrikan dan Inspector. Safety, Electricity Standardization and Inspector.	Kedua Second	1 Januari 2022 – 31 Desember 2022 January 1, 2022 - December 31, 2022
Emir Kresna Wardana	Wakil Ketua (Komisaris) Vice Chairman (Commissioner)	*Stakeholder Management, Risk Management*	Kesatu First	1 Januari 2022 – 31 Desember 2022 January 1, 2022 - December 31, 2022
Bambang lstianto	Sekretaris merangkap anggota (Pihak Independen) Secretary and member (Independent Party)	*General Accounting and Cost Accounting, Capital Budgeting, Corporate Finance, Organization Management, Process Facilitation* dan and *Risk Management*	Kedua Second	1 Januari 2022 – 31 Desember 2022 January 1, 2022 - December 31, 2022
Gigih Udi Atmo	Anggota (Pihak Independen) Member (Independent Party)	*Project Management, Financial Management*	Kesatu First	1 Januari 2022 – 31 Desember 2022 January 1, 2022 - December 31, 2022

Profil Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Profile of Risk Management and Compliance Committee Members

Jisman P. Hutajulu

Ketua Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Chairman of the Risk Management and Compliance Committee

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.

The profile can be seen in the Profile of the Board of Commissioners section.

Emir Kresna Wardana

Wakil Ketua Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Vice Chairman of the Risk Management and Compliance Committee

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.

The profile can be seen in the Profile of the Board of Commissioners section.

Bambang Istianto

Sekretaris Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Secretary of the Risk Management and Compliance Committee

Warga Negara Indonesia, 48 tahun, berdomisili di Jakarta.

Dasar Pengangkatan
Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Nomor 006/DK/PJB/2017 tanggal 19 Juli 2017 dan ditetapkan kembali terakhir kali berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Nomor 015.K/DK/PJB/2021 tanggal 31 Desember 2021.

Rangkap Jabatan
Tidak memiliki rangkap jabatan yang bertentangan dengan ketentuan internal Perusahaan dan peraturan serta perundangan yang berlaku.

Pendidikan
Menyelesaikan pendidikan Ahli Madya Manajemen Keuangan dan Perbankan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPKP Bandung tahun 1998 dan S1 Ekonomi dari Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2009.

Selain itu, pendidikan non-formal yang pernah diikuti untuk mendapatkan sertifikasi diantaranya Sertifikasi *Certified Risk Management Professional* (CRMP) (2016), Pelatihan *Governance Risk & Compliance* (GRC) (2018), Pelatihan Meningkatkan Kinerja Program melalui *Monitoring & Evaluation* (2019), *Sharing session* "Peran GRC dalam Merealisasikan Kebijakan dan Pengawasan Terpadu (2020), *Developing Risk Based* KPI (2020), *Best Practices on Risk Aggregation* (2021) dan *Risk Beyond* 2021. Konferensi Nasional Manajemen Risiko Tahun 2022 dan Sertifikasi *Certified Risk Management Professional* (CRMP) (2022).

Riwayat Pekerjaan
Mulai berkarir sebagai staff keuangan dan administrasi PT Studio Cilaki 45 sebuah perusahaan konsultan manajemen dan teknik (1998), Manajer Administrasi, Keuangan dan Akuntansi PT ISI Indraco (2008), Manajer Keuangan PT Ganesha Petro (2009), Manajer Keuangan di PT Meisa Dwi Kencana (2010), Komisaris dan Tenaga Ahli pada PT Netritva Pradhana (2010 – sekarang) dan Anggota Komite Manajemen Risiko & Kepatuhan Dewan Komisaris pada PT Pembangkitan Jawa Bali, (2014- 2016), Sekretaris Komite Manajemen Risiko & Kepatuhan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa-Bali (2016-sekarang)

Indonesian citizen, 48 years old, domiciled in Jakarta.

Basis of Appointment
Appointed based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa Bali Number 006/DK/PJB/2017 dated July 19, 2017 and reappointed for the last time based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa Bali Number 015.K/DK/PJB/2021 dated December 31, 2021.

Concurrent Position
Does not have concurrent positions that conflict with the Company's internal provisions as well as the applicable laws and regulations.

Education
He graduated as an Associate Expert in Financial and Banking Management from YPKP Bandung College of Economics in 1998 and Bachelor of Economics from Padjadjaran University Bandung in 2009.

In addition, non-formal education that has been attended to obtain certification includes the Certified Risk Management Professional (CRMP) Certification (2016), Governance Risk & Compliance (GRC) Training (2018), Training on Improving Program Performance through Monitoring & Evaluation (2019), Sharing session "The Role of GRC in Realizing Integrated Policies and Supervision (2020), Developing Risk Based KPI (2020), Best Practices on Risk Aggregation (2021) and Risk Beyond 2021. National Risk Management Conference 2022 and Certified Risk Management Professional (CRMP) Certification (2022).

Career History
Started his career as a finance and administration staff of PT Studio Cilaki 45 a management and engineering consulting company (1998), Administration, Finance and Accounting Manager of PT ISI Indraco (2008), Finance Manager of PT Ganesha Petro (2009), Finance Manager at PT Meisa Dwi Kencana (2010), Commissioner and Expert at PT Netritva Pradhana (2010 - present) and Member of the Risk Management & Compliance Committee of the Board of Commissioners at PT Pembangkitan Jawa Bali, (2014- 2016), Secretary of the Risk Management & Compliance Committee of the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa-Bali (2016-present).

Gigih Udi Atmo

Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Member of the Risk Management and Compliance Committee

Warga Negara Indonesia, 44 tahun, berdomisili di Jakarta.

Dasar Pengangkatan
Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Nomor 015.K/DK/PJB/2021 tanggal 31 Desember 2021.

Rangkap Jabatan
Tidak memiliki rangkap jabatan yang bertentangan dengan ketentuan internal Perusahaan dan peraturan serta perundangan yang berlaku.

Pendidikan
Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Elektro dari Universitas Gadjah Mada tahun 2021 dan Master of Engineering Project Management dari University of Melbourne tahun 2008.

Selain itu, pendidikan non-formal yang pernah diikuti untuk mendapatkan sertifikasi diantaranya *Phyton Programming for Data Science dari Asia Pacific Energy Research* (2020) dan SCADA *Data Centre Programming and Configuration* dari ALSTOM Grid dan SAINCO ABENGOA (2001).

Riwayat Pekerjaan
Pernah berkarir sebagai Commision Manager di Alstom Transmission and Distribution, Indonesia (2001.–2004), Visiting Researcher, Asia Pacific Energy Research Centre, Japan (2017-2020), Anggota dari the National Task Force for Reliability Operation of National Electric Power System, Kementerian ESDM (2006-2011), Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM (2021 – 2022)

Indonesian citizen, 44 years old, domiciled in Jakarta.

Basis of Appointment
Appointed based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa Bali Number 015.K/DK/PJB/2021 dated December 31, 2021.

Concurrent Position
Does not have concurrent positions that conflict with the Company's internal provisions as well as the applicable laws and regulations.

Education
Graduated with a Bachelor of Electrical Engineering from Gadjah Mada University in 2021 and Master of Engineering Project Management from the University of Melbourne in 2008.

In addition, non-formal education that has been attended to obtain certification includes Phyton Programming for Data Science from Asia Pacific Energy Research (2020) and SCADA Data Center Programming and Configuration from ALSTOM Grid and SAINCO ABENGOA (2001).

Career History
He had a career as Commission Manager at Alstom Transmission and Distribution, Indonesia (2001-2004), Visiting Researcher, Asia Pacific Energy Research Center, Japan (2017-2020), Member of the National Task Force for Reliability Operation of National Electric Power System, Ministry of EMR (2006-2011), Associate Expert of Electricity Inspector, Directorate General of Electricity, Ministry of EMR (2021-2022).

Independensi Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Independence of the Risk Management and Compliance Committee

Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan dapat bertindak independen semata-mata untuk kepentingan Perusahaan, terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan Perusahaan. Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan telah memenuhi kriteria independensi sebagai berikut:

The Board of Commissioners ensures that the Risk Management and Compliance Committee can act independently solely for the interests of the Company, regardless of the influence of various parties who have interests that may conflict with the interests of the Company. Members of the Risk Management and Compliance Committee have met the following independence criteria:

Independensi Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Independence of the Risk Management and Compliance Committee

Kriteria Independensi Independence Criteria		Jisman P. Hutajulu	Emir Kresna Wardana	Bambang Istianto	Gigih Udi Atmo
Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit dan non-audit atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.	Not an insider of a public accounting firm, legal consulting firm, or other parties providing audit and non-audit services or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months.	√	√	√	√
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung di Perusahaan.	Does not have shares either directly or indirectly in the Company.	√	√	√	√
Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan/atau mengendalikan Perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir.	Not a person who has the authority and responsibility to plan, lead, and/or control the Company within the last six months.	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun ke samping atau hubungan semenda.	Does not have a blood family relationship with members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners up to the second degree, either in a straight line or sideways or a marital relationship.	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan; dan	Do not have direct and indirect business relationships related to the Company's business activities; and	√	√	√	√
Tidak sedang berada dalam institusi yang kegiatan usahanya memberikan jasa kepada Perusahaan.	Not being in an institution whose business activities provide services to the Company.	√	√	√	√

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Duties and Responsibilities of the Risk Management and Compliance Committee

Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan dalam mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab dimana dalam pelaksanaannya, berhubungan dengan pihak-pihak terkait yang masing-masing memiliki tanggung jawab yang jelas pada semua kegiatan termasuk Direksi dan seluruh jajaran manajemen, terutama terkait dengan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan. Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Tanggung jawab ini didasarkan kepada fungsi dan tugas pokok sebagaimana diatur di dalam Piagam Komite. Tugas pokok Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan adalah sebagai berikut:

The Risk Management and Compliance Committee in supporting the supervisory function of the Board of Commissioners has duties and responsibilities which in its implementation, relate to related parties who each have clear responsibilities in all activities including the Board of Directors and all levels of management, especially related to risk management and compliance functions. The Risk Management and Compliance Committee is responsible to the Board of Commissioners. This responsibility is based on the main functions and duties as regulated in the Committee Charter. The main duties of the Risk Management and Compliance Committee are as follows:

1. Menilai dan memberi masukan terhadap kebijakan dan strategi Perusahaan kepada Dewan Komisaris, baik dari sisi risiko maupun kepatuhan.
2. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas penilaian terhadap hasil kajian analisa risiko dan kepatuhan pada:
   a. Kegiatan Perencanaan Perusahaan.
   b. Kegiatan Operasional Perusahaan.
   c. Kegiatan Investasi Perusahaan.
   d. Kegiatan Evaluasi atas penerapan *Enterprise Risk Management* di Perusahaan.
   e. Tingkat Kepatuhan Perusahaan dalam menyampaikan laporan berkala kepada Dewan Komisaris.
3. Menyampaikan laporan berkala kepada Dewan Komisaris mengenai kegiatan Komite.
4. Memantau dan menilai bahwa semua kegiatan Perusahaan yang ada di dalam RJPP dan RKAP telah mengandung pendekatan *Enterprise Risk Management* terhadap berbagai risiko Perusahaan;
5. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan saran kepada Direksi mengenai berbagai hal yang dapat meningkatkan kelancaran dan efektivitas proses manajemen risiko;
6. Melakukan penelaahan terhadap aksi korporasi strategis yang memerlukan persetujuan atau tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris terkait aspek kepatuhan dan manajemen risiko.
7. Melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan apakah pengendalian risiko dan penerapan aspek kepatuhan telah dilaksanakan tepat dan efektif.
8. Melakukan penilaian terhadap penerapan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris; dan
9. Bertindak sebagai *early warning system* dengan memberikan kajian berupa saran dan rekomendasi terkait penerapan manajemen risiko dan kepatuhan kepada Dewan Komisaris.

1. Assessing and providing input on the Company's policies and strategies to the Board of Commissioners, both in terms of risk and compliance.
2. Providing input to the Board of Commissioners on the assessment of the results of the risk and compliance analysis study:
   a. Company Planning Activities.
   b. Company Operational Activities.
   c. Company Investment Activities.
   d. Evaluation activities on the implementation of Enterprise Risk Management in the Company.
   e. Compliance level of the Company in submitting periodic reports to the Board of Commissioners.
3. Submitting periodic reports to the Board of Commissioners regarding the Committee's activities.
4. Monitoring and assessing that all Company activities in the RJPP and ABOP have contained an Enterprise Risk Management approach to various Company risks;
5. Assisting the Board of Commissioners in providing advice to the Board of Directors on various matters that can improve the smoothness and effectiveness of the risk management process;
6. Reviewing strategic corporate actions that require approval or written response from the Board of Commissioners related to compliance and risk management aspects.
7. Conducting field reviews to ensure that risk control and compliance aspect implementation have been carried out appropriately and effectively.
8. Assessing the implementation of risk management and compliance functions and reporting to the Board of Commissioners; and
9. Acting as an early warning system by providing studies in the form of suggestions and recommendations related to the implementation of risk management and compliance to the Board of Commissioners.

Pedoman Kerja Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Work Guidelines of the Risk Management and Compliance Committee

Pedoman kerja Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan ditetapkan oleh Dewan Komisaris dalam bentuk Piagam Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan pada tahun 2018. Piagam Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan mengatur beberapa hal terkait antara lain: Maksud dan Tujuan, Fungsi dan Tugas Pokok, Tanggung Jawab dan Wewenang, Organisasi dan Keanggotaan, *Key Performance Indicator* dan Penilaian kinerja Komite, Mekanisme Kerja dan Kode Etik. Piagam Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan dikaji secara berkala dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan pemutakhiran guna memastikan kesesuaian muatannya dengan dinamika organisasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *best practices*.

The work guidelines of the Risk Management and Compliance Committee were determined by the Board of Commissioners in the form of the Risk Management and Compliance Committee Charter in 2018. The Risk Management and Compliance Committee Charter regulates several matters related to, among others: Purpose and Objectives, Functions and Main Duties, Responsibilities and Authority, Organization and Membership, Key Performance Indicator and Committee Performance Assessment, Work Mechanisms and Code of Conduct. The Risk Management and Compliance Committee Charter is reviewed periodically and if deemed necessary, it can be updated to ensure the suitability of its content with organizational dynamics, prevailing laws and regulations and best practices.

Rencana Program Kerja Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Work Program Plan of the Risk Management and Compliance Committee

Program kerja Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan disusun setiap tahun untuk mendorong efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Program kerja Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan rutin yang terdiri dari :
   a. Kegiatan koordinasi Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan dengan manajemen yang mencakup :
      1) Review RJPP.
      2) Menyiapkan bahan pertemuan Dekom dengan Pemegang Saham.
      3) Evaluasi RKAP 2022
      4) Penyusunan RKAP 2023
   b. Monitoring dan Evaluasi Laporan Manajemen berkala.
   c. Koordinasi Internal Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan.
   d. Koordinasi berkala Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan dengan manajemen.
   e. Evaluasi Potensi/Mitigasi Risiko di Korporat.
   f. Rapat bersama dengan Komite lain.
2. Kegiatan Khusus/Non Rutin yang terdiri dari :
   a. Review kebijakan, strategi dan implementasi Penugasan PT PLN.
   b. Review strategi portofolio terkait *Unrestricted Subsidiaries*, RJPP dan *Corporate Charter.*
   c. *Monitoring* dan *Review* Implementasi Tindak Lanjut Hasil Audit IT.
   d. Monitoring dan Review Pengendalian Internal (COSO, ERM, ICOFR, APQC, *Three Lines of Defense*).
   e. *Monitoring* dan *Review* Kebijakan Strategi *Security of Supply.*
   f. *Review Enterprise Architecture.*
   g. *Monitoring* dan *Review* implementasi *Corporate* Agenda.
   h. *Monitoring* dan *Review* implementasi *Corporate Transformation.*
3. Program Pengembangan Kompetensi Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan.

The work program of the Risk Management and Compliance Committee is prepared annually to encourage the effective implementation of duties and responsibilities of the Risk Management and Compliance Committee in supporting the implementation of the supervisory duties of the Board of Commissioners. The work program of the Risk Management and Compliance Committee in 2022 is as follows:

1. Routine activities consisting of:
   a. Coordination activities of the Risk Management and Compliance Committee with management which includes:
      1) RJPP Review.
      2) Preparing materials for the Board of Commissioners' meeting with the Shareholders.
      3) Evaluation of the 2022 ABOP
      4) Preparation of the 2023 ABOP
   b. Monitoring and Evaluation of periodic Management Reports.
   c. Internal coordination of the Risk Management and Compliance Committee.
   d. Periodic coordination of the Risk Management and Compliance Committee with management.
   e. Potential Evaluation/Risk Mitigation in the Corporation.
   f. Joint meetings with other Committees.
2. Special/Non-Routine Activities consisting of:
   a. Reviewing policy, strategy and implementation of PT PLN Assignment.
   b. Reviewing portfolio strategies related to Unrestricted Subsidiaries, RJPP and Corporate Charter.
   c. Monitoring and Reviewing the Implementation of Follow-up of IT Audit Results
   d. Monitoring and Reviewing Internal Control (COSO, ERM, ICOFR, APQC, Three Lines of Defense).
   e. Monitoring and Reviewing Strategic Security of Supply Policy.
   f. Reviewing Enterprise Architecture.
   g. Monitoring and Reviewing the implementation of Corporate Agenda.
   h. Monitoring and Reviewing the implementation of Corporate Transformation.
3. Competency Development Program for the Risk Management and Compliance Committee.

Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Duties Implementation of the Risk Management and Compliance Committee

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan telah direalisasikan berdasarkan rencana program kerja tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan melaporkan realisasi program kerja secara triwulanan kepada Dewan Komisaris. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan diantaranya melakukan telaah, memberikan masukan atau rekomendasi, menghadiri rapat-rapat dengan Dewan Komisaris, Direksi, seluruh jajaran manajemen terutama yang menangani manajemen risiko dan pertemuan lain serta melakukan kunjungan kerja bersama Dewan Komisaris. Secara umum, Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan telah melakukan pengawasan dan pendampingan serta memberikan masukan sepanjang tahun 2022 antara lain untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Evaluasi pelaksanaan RKAP 2022.
2. Proses penyusunan draft RKAP 2023.
3. Pelaksanaan *enterprise risk management* di level korporat.
4. Pengawasan kebijakan pengelolaan Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi.
5. Pengawasan pelaksanaan pengendalian internal dengan menggunakan pendekatan *Three line of Defences.*
6. Permintaan rekomendasi dan persetujuan tertulis Dewan Komisaris atas tindakan korporasi yang dilakukan oleh Direksi.
7. Pembaharuan informasi mengenai pengelolaan UBJOM dan Unit Pembangkit.
8. Proses investasi dan/atau pengembangan usaha korporat.
9. Proses bisnis internal diantaranya tapi tidak terbatas kepada bidang pengembangan usaha, pengadaan, UBJOM dan lain-lain.
10. Pendampingan pelaksanaan proses transformasi korporat *Holding* dan *Sub Holding.*

The implementation of duties and responsibilities of the Risk Management and Compliance Committee has been realized based on the 2022 work program plan that has been determined in supporting the implementation of the Board of Commissioners' supervisory duties. The Risk Management and Compliance Committee reports the realization of the work program quarterly to the Board of Commissioners. Activities conducted in order to carry out the duties and responsibilities of the Risk Management and Compliance Committee include conducting reviews, providing input or recommendations, attending meetings with the Board of Commissioners, Board of Directors, all levels of management, especially those handling risk management and other meetings as well as conducting work visits with the Board of Commissioners. In general, the Risk Management and Compliance Committee has conducted supervision and assistance as well as provided input throughout 2022, among others, for the following matters:

1. Evaluation of the implementation of the 2022 ABOP.
2. Preparation process of the 2023 ABOP draft.
3. Implementation of enterprise risk management at the corporate level.
4. Supervision of management policies of Subsidiaries and Affiliated Companies.
5. Supervision of the implementation of internal control by using the Three lines of Defense approach.
6. Request for recommendations and written approval from the Board of Commissioners for corporate actions taken by the Board of Directors.
7. Updating information regarding the management of OMSBU and the Power Plant Unit.
8. Investment process and/or corporate business development.
9. Internal business processes including but not limited to the fields of business development, procurement, OMSBU and others.
10. Assistance in the implementation of the corporate transformation process of Holding and SubHolding.

Rapat Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Meetings of the Risk Management and Compliance Committee

Piagam Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan mengatur bahwa Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan untuk menyelesaikan Program Kerja Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Selain itu, BoC *Manual* juga menjelaskan bahwa Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan wajib melakukan pertemuan rutin dengan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya

The Risk Management and Compliance Committee Charter stipulates that the Risk Management and Compliance Committee shall hold regular meetings at least 1 (one) time a month to complete the Work Program of the Risk Management and Compliance Committee. In addition, the BoC Manual also explains that the Risk Management and Compliance Committee must conduct regular meetings with the Board of Commissioners at least 1 (one) time

1 (satu) kali dalam sebulan serta melakukan pertemuan dengan fungsi terkait terutama mengenai pelaksanaan manajemen risiko dan kepatuhan di Perusahaan dalam rangka membahas perkembangan dan aktivitas Perusahaan baik secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan. Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan telah melaksanakan rapat sepanjang tahun 2022 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali.

a month and conduct meetings with related functions, especially regarding the implementation of risk management and compliance in the Company in order to discuss the development and activities of the Company, both periodically and at any time if necessary. The Risk Management and Compliance Committee has conducted 27 (twenty seven) meetings throughout 2022.

Agenda Rapat Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Meeting Agenda of the Risk Management and Compliance Committee

No.	Tanggal Date	Agenda
1	12 Januari 2022 January 12, 2022	Pembahasan IT *Maturity Level* Discussion of IT Maturity Level
2	18 Januari 2022 January 18, 2022	Pembahasan *Risk Profile* TW IV 2021 Discussion of Risk Profile for the fourth quarter of 2021
3	4 Februari 2022 February 4, 2022	*Progress* Penugasan Proyek EBT Progress of NRE Project Assignment
4	11 Februari 2022 February 11, 2022	Finalisasi *Draft* Bascom Lingkungan Cirata Finalization of Cirata Environmental Bascom Draft
5	22 Februari 2022 February 22, 2022	Mitigasi dan Program Kerja Peningkatan Kinerja Paiton 1,2 Mitigation and Work Program for Performance Improvement of Paiton 1,2
6	1 Maret 2022 March 1, 2022	Pembahasan aplikasi *Project Monitoring* di Perusahaan (PRIME) Discussion of the Project Monitoring application in the Company (PRIME)
7	15 Maret 2022 March 15, 2022	Pengembangan EBT dan *Mapping* SDM Konstruksi NRE Development and Mapping of Construction Human Resources
8	16 Maret 2022 March 16, 2022	Pembahasan TKDN PLTS Cirata Discussion of TKDN for Cirata SPP
9	01 April 2022 April 1, 2022	Pembahasan metode pengendalian SFC pada pembangkit esksisting dan AMC yang dikelola oleh Perusahaan Discussion of SFC control methods in existing power plants and AMC managed by the Company
10	14 April 2022 April 14, 2022	Pembahasan hasil kajian pola operasi PLTA Cirata Discussion of the results of the Cirata HPP operation pattern study
11	10 Mei 2022 May 10, 2022	Pembahasan Pedoman Manajemen Risiko Korporat tahun 2022 Discussion of Corporate Risk Management Guidelines in 2022
12	13 Mei 2022 May 13, 2022	Pembahasan *Progress* Proyek PLTS Cirata Discussion of Cirata SPP Project Progress
13	16 Juni 2022 May 16, 2022	*Overview* Sistem Proteksi Pembangkit dalam rangka optimalisasi EFOR Overview of Power Plant Protection System in the context of EFOR optimization
14	17 Juni 2022 May 17, 2022	- Pembahasan Penerapan Teknologi CCUS di pembangkit yang dikelola oleh Perusahaan - Pembahasan teknologi produksi *blue amonia* - Discussion of CCUS Technology Implementation in power plants managed by the Company - Discussion of blue ammonia production technology
15	18 Juli 2022 July 18, 2022	Pembahasan IT *Master Plan* Discussion of IT Master Plan
16	29 Juli 2022 July 29, 2022	*Benchmark Beyond* kWh
17	2 Agustus 2022 August 2, 2022	Pembahasan kinerja AP/PA Discussion of AP/PA performance
18	10 Agustus 2022 August 10, 2022	FGD sistem Proteksi FGD on Protection system
19	18 Agustus 2022 August 18, 2022	*Risk Profile* Semester 1 Risk Profile Semester 1
20	30 Agustus 2022 August 30, 2022	*Benchmark* Pengelolaan Arsip PT KAI Benchmark of PT KAI Archives Management

No.	Tanggal Date	Agenda
21	7 September 2022 September 7, 2022	Rencana Penggunaan *Biomass* 100% di UP Paiton 1,2 Plan to Use 100% Biomass in Paiton 1,2 GU
22	16 September 2022 September 16, 2022	Rekomposisi AKI 2022 (Pembelian Gedung RE + PLTGU Sengkang) AKI 2022 Recomposition (Purchase of RE Building + Sengkang CCPP)
23	18 Oktober 2022 October 18, 2022	- Rekomposisi AKI 2022 (Pembelian Gedung RE + PLTGU Sengkang) - Pembahasan *draft* RKAP 2023 - AKI 2022 Recomposition (Purchase of RE Building + Sengkang CCPP) - Discussion of the 2023 ABOP draft
24	15 November 2022 November 15, 2022	Evaluasi Proses *Assesment* Unit Pembangkit yang Dialihkan ke PNP Evaluation of the Assessment Process of Power Plant Units Transferred to PNP
25	17 November 2022 November 17, 2022	Pembahasan Perubahan AKI 2022 - Pembelian PLTGU Sengkang Discussion of Changes in AKI 2022 - Purchase of Sengkang CCPP
26	7 Desember 2022 December 7, 2022	Finalisasi Aksi Korporasi HSH Finalization of HSH Corporate Action
27	20 Desember 2022 December 20, 2022	Pembahasan Perubahan Ruang lingkup Usaha + KBLI Discussion of Changes in Business Scope + KBLI

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Frequency of Internal Meetings and Attendance Rate of the Risk Management and Compliance Committee Members

Nama Name	Jabatan Position	Frekuensi Rapat Frequency of Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Jisman P. Hutajulu	Ketua Chairman	27	27	100%
Emir Kresna Wardana	Wakil Ketua Vice Chairman	27	27	100%
Bambang lstianto	Sekretaris (Pihak Independen) Secretary (Independent Party)	27	27	100%
Gigih Udi Atmo	Anggota (Pihak Independen) Member (Independent Party)	27	27	100%

Program Pengembangan Kompetensi Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Competency Development Program of the Risk Management and Compliance Committee

Pengembangan kompetensi Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan dilaksanakan dalam rangka mendorong efektivitas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Program pengembangan kompetensi Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan sepanjang tahun 2022 diuraikan pada bagian Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Kepala SPI.

The competency development of the Risk Management and Compliance Committee Members is carried out in order to encourage the effectiveness of the implementation of duties of the Risk Management and Compliance Committee. The competency development program of the Risk Management and Compliance Committee Members throughout 2022 is described in the section on Education and Training of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Head of IAU.

Penilaian Kinerja Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Performance Assessment of the Risk Management and Compliance Committee

Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan melakukan evaluasi mandiri (*self assessment*) secara berkala atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang telah dijalankan. Selain itu, Dewan Komisaris juga melakukan evaluasi atas kinerja Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan dalam agenda rapat evaluasi internal Dewan Komisaris dan organ Dewan Komisaris untuk memastikan dan mendorong efektivitas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Penilaian kinerja Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan dilakukan berdasarkan kriteria dan realisasi rencana kerja Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang telah ditetapkan. Berikut adalah kriteria dan hasil penilaian tahun 2022 atas kinerja Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan:

The Risk Management and Compliance Committee conducts periodic self-assessment on the implementation of its duties and responsibilities. In addition, the Board of Commissioners also evaluates the performance of the Risk Management and Compliance Committee in the agenda of the internal evaluation meeting of the Board of Commissioners and organs of the Board of Commissioners to ensure and encourage the effective implementation of duties of the Risk Management and Compliance Committee. The performance assessment of the Risk Management and Compliance Committee is conducted based on the criteria and realization of the work plan of the Risk Management and Compliance Committee that has been determined. The following are the criteria and results of the 2022 assessment of the Risk Management and Compliance Committee's performance:

Tabel Evaluasi Kinerja Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Table of Performance Evaluation of the Risk Management and Compliance Committee

No.	Kriteria Penilaian Assessment Criteria	Rata-rata Averages
1	Ketepatan waktu agenda kegiatan Dewan Komisaris Timeliness of the agenda for the activities of the Board of Commissioners	9,00
2	Kualitas pekerjaan Quality of work	9,05
3	Kontribusi pada kegiatan Dewan Komisaris Contribution to the activities of the Board of Commissioners	9,05
4	Presentasi pada Rapat Internal Dewan Komisaris (RID) Presentation at the Internal Meeting of the Board of Commissioners (RID)	8,70
5	Pelaksanaan rapat (RID, RDD, RKM) Meetings (RID, RDD, RKM)	8,70
6	Penyiapan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Preparation of the Supervisory Report of the Board of Commissioners	9,05
Rata-Rata Skor Average Score		**8,93**

Hasil evaluasi atas kinerja Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang telah dilakukan selanjutnya digunakan untuk menyusun langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka perbaikan dan pengembangan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan dalam mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

The evaluation results on the performance of the Risk Management and Compliance Committee that have been conducted are then used to formulate the necessary measures in order to improve and develop as well as increase the effectiveness of the implementation of duties of the Risk Management and Compliance Committee in supporting the implementation of duties of the Board of Commissioners.

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Perusahaan menetapkan Sekretaris Perusahaan sebagai pejabat satu level di bawah Direksi yang memimpin organ Sekretariat Perusahaan. Pembentukan dan pelaksanaan fungsi Sekretaris Perusahaan mengacu pada Undang-undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER- 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (G*ood Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan PER-09/MBU/2012 dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan sumber daya manusia terkait dengan promosi dan mutasi yang berlaku di lingkungan Perusahaan.

The Company determines the Corporate Secretary as an official one level below the Board of Directors who leads the Corporate Secretariat organ. The establishment and implementation of the Corporate Secretary function refer to Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises, Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. IX: PER- 01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, as has been amended by PER-09/MBU/2012 and the Company's Articles of Association.

The Corporate Secretary is appointed and dismissed by the President Director based on the Company's internal mechanism with the approval of the Board of Commissioners in accordance with the provisions of laws and regulations as well as human resource policies related to promotions and transfers that apply within the Company.

Profil Sekretaris Perusahaan
Profile of Corporate Secretary

Zubaidah

Warga Negara Indonesia, 55 tahun, dan berdomisili di Surabaya.

Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak 2021 melalui Surat Keputusan Direksi PT PJB No. P.129/440/PJB/2021 tanggal 26 April 2021.

Pendidikan
Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Jurnalistik (Non Teknik Lainnya) dari Universitas Padjadjaran (1992).

Riwayat Pekerjaan
Pernah menjabat sebagai VP CSR PT PLN (Persero) (2017 – 2021), Senior Manajer Komunikasi Hukum & Administrasi PT PLN (Persero) Distribusi Bali pada tahun (2016-2017), Manajer Area PLN Sumedang pada tahun (2012-2016) dan Manajer Area PLN Salatiga pada tahun (2009-2012).

Indonesian citizen, 55 years old, and domiciled in Surabaya.

She serves as Corporate Secretary since 2021 through the Board of Directors Decree of PT PJB No. P.129/440/PJB/2021 dated April 26, 2021.

Education
Graduated with a Bachelor of Journalism (Other Non-Engineering) from Padjadjaran University (1992).

Work History
She served as VP of CSR of PT PLN (Persero) (2017 - 2021), Senior Manager of Legal & Administrative Communication of PT PLN (Persero) Bali Distribution in 2016-2017, Area Manager of PLN Sumedang in 2012-2016 and Area Manager of PLN Salatiga in 2009-2012.

Kedudukan dan Struktur Organ Sekretariat Perusahaan

Position and Structure of Corporate Secretariat Organ

Sebagai sebuah organ, Sekretariat Perusahaan merupakan organ pendukung Direksi dalam struktur organ tata kelola Perusahaan yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Struktur Organ Sekretariat Perusahaan ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 0026.P/019/DIR/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pembangkitan Jawa-Bali serta Peraturan Direksi Nomor 0032.P/019/DIR/2022 tentang Peraturan Pelaksana Susunan Organisasi dan Formasi Tenaga Kerja Sekretariat Perusahaan. Sekretaris Perusahaan membawahi dua bidang, yaitu Bidang Hubungan Internal, dan Bidang *Stakeholder Management*.

As an organ, the Corporate Secretariat is a supporting organ of the Board of Directors in the structure of the corporate governance organ that is responsible to the President Director. The structure of the Corporate Secretariat Organ is determined based on the Board of Directors Regulation No. 0026.P/019/DIR/2022 concerning the Organization and Work Procedures of PT Pembangkitan Jawa-Bali and the Board of Directors Regulation No. 0032.P/019/DIR/2022 concerning Regulations for Executors of Organizational Composition and Manpower Formation of the Corporate Secretariat. The Corporate Secretary supervises two departments, namely the Internal Relations Department and Stakeholder Management Department.

Struktur Organ Sekretariat Perusahaan
Structure of the Corporate Secretariat Organ

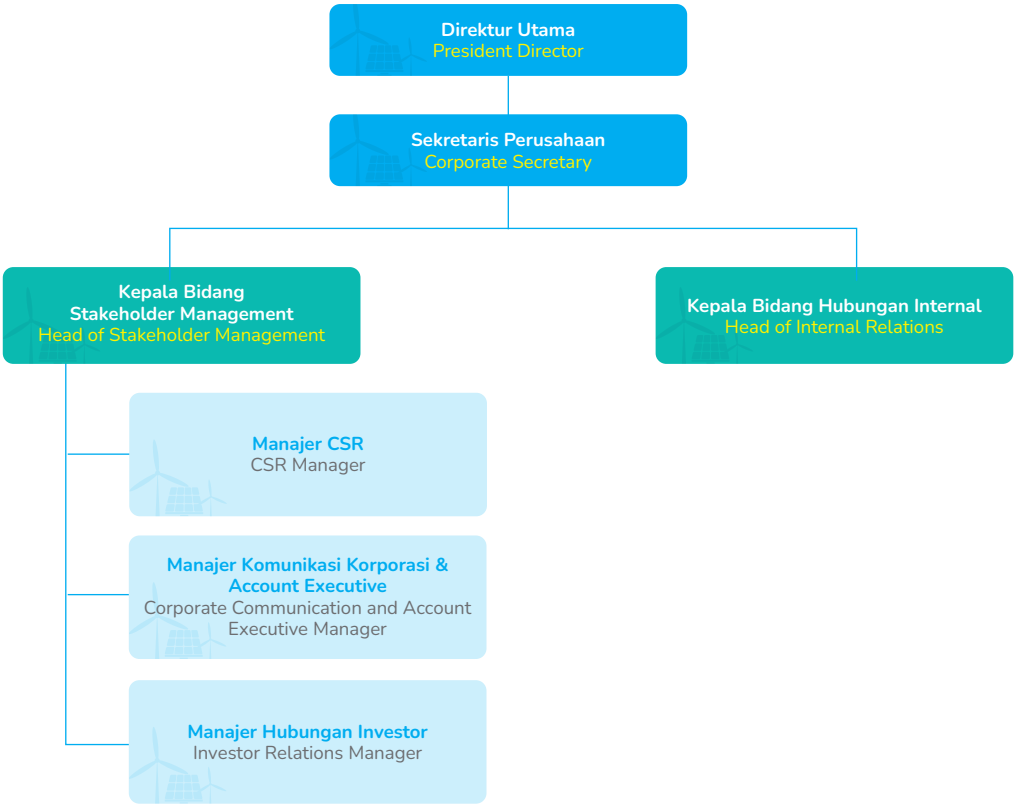

Pedoman Kerja Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary Work Guidelines

Lingkup tanggung jawab dan garis koordinasi dalam pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan mengacu pada Peraturan Direksi Nomor 0026.P/019/DIR/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pembangkitan Jawa-Bali serta Peraturan Direksi Nomor 0032.P/019/DIR/2022 tentang Peraturan Pelaksana Susunan Organisasi dan Formasi Tenaga Kerja Sekretariat Perusahaan. Sebagai organ pendukung Direksi dalam tata kelola Perusahaan, Sekretaris Perusahaan juga berpedoman pada *Corporate Governance Code.* Sekretaris Perusahaan secara khusus telah didukung dengan *Corporate Secretary Manual* sebagai pedoman kerja yang merupakan kebijakan turunan atas *Corporate Governance Code* terkait fungsi Sekretaris Perusahaan.

The scope of responsibilities and coordination lines in the implementation of duties of the Corporate Secretary refer to the Board of Directors Regulation No. 0026.P/019/DIR/2022 concerning the Organization and Work Procedures of PT Pembangkitan Jawa-Bali and Board of Directors Regulation No. 0032.P/019/DIR/2022 concerning Regulations for Executors of Organizational Composition and Manpower Formation of the Corporate Secretariat. As a supporting organ of the Board of Directors in corporate governance, the Corporate Secretary is also guided by the Corporate Governance Code. The Corporate Secretary has been specifically supported by the Corporate Secretary Manual as a work guideline which is a derivative policy of the Corporate Governance Code related to the Corporate Secretary function.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary

Peraturan Direksi Nomor 0026.P/019/DIR/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pembangkitan Jawa-Bali serta Peraturan Direksi Nomor 0032.P/019/DIR/2022 tentang Peraturan Pelaksana Susunan Organisasi dan Formasi Tenaga Kerja Sekretariat Perusahaan dan *Corporate Secretary Manual* diantaranya mengatur tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan mengevaluasi kebijakan strategis dan operasional pada Sekretariat Perusahaan.
2. Memastikan strategi pengelolaan, monitoring dan evaluasi tata kelola Perusahaan, laporan Perusahaan, pedoman dan program korporat, protokoler internal dan eksternal, pendokumentasian kegiatan strategis Perusahaan serta pemilihan kegiatan award yang diikuti Perusahaan.
3. Memastikan strategi pengelolaan pembinaan, pemenuhan dan asesmen GCG.
4. Memastikan strategi pengelolaan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan administrasi Direksi dan Dewan Komisaris antara lain meliputi kesekretariatan, remunerasi, fasilitas, protokoler dan program pengembangan.
5. Memastikan strategi pengelolaan, *monitoring* dan evaluasi kebijakan kesekretariatan Kantor Perwakilan.
6. Memastikan strategi pengelolaan pengembangan, pengendalian dan evaluasi kebijakan strategi komunikasi internal dan eksternal, penyediaan informasi publik dan *corporate branding,* serta pembinaan ke seluruh Unit Kerja dalam kegiatan komunikasi Perusahaan.

The Board of Directors Regulation No. 0026.P/019/DIR/2022 concerning the Organization and Work Procedures of PT Pembangkitan Jawa-Bali and the Board of Directors Regulation No. 0032.P/019/DIR/2022 concerning Regulations for Executors of Organizational Composition and Manpower Formation of the Corporate Secretariat and Corporate Secretary Manual, among others, regulate the duties and responsibilities of the Corporate Secretary as follows:

1. Developing and evaluating strategic and operational policies in the Corporate Secretariat.
2. Ensuring the management strategy, monitoring and evaluation of corporate governance, Company's reports, corporate guidelines and programs, internal and external protocols, documentation of the Company's strategic activities and selection of award activities participated by the Company.
3. Ensuring the strategy of managing guidance, fulfillment and assessment of GCG.
4. Ensuring the management strategy, monitoring and evaluation of the implementation of the Board of Directors and Board of Commissioners administration, including secretarial, remuneration, facilities, protocol and development programs.
5. Ensuring the management strategy, monitoring and evaluation of secretarial policy of the Representative Office.
6. Ensuring the strategy of managing development, control and evaluation of internal and external communication strategy policies, provision of public information and corporate branding, as well as guidance to all Work Units in the Company's communication activities.

7. Memastikan strategi pengelolaan *stakeholder management,* pengendalian potensi krisis komunikasi, serta menjalankan fungsi mediator dalam penyelasaian masalah yang dihadapi Perusahaan.
8. Memastikan strategi pengelolaan pelaksanaan dan pelaporan *Environment, Social and Governance* (ESG) pada *stream social* dan *governance*.
9. Mengoordinasikan pelaksanaan strategis dan operasional pada Bidang GCG, *Secretary and protocol* dan Bidang *Corporate Communication* and CSR.
10. Memastikan dukungan *resources* terhadap pengembangan bisnis kepada fungsi yang mengelola pengembangan bisnis.
11. Memastikan implementasi budaya Perusahaan, Kepatuhan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Keamanan dan Lingkungan (K3KL) serta sistem manajemen yang diterapkan perusahaan sesuai visi dan misi Perusahaan.
12. Memastikan pelaksanaan identifikasi dan mitigasi risiko Sekretariat Perusahaan.
13. Memastikan pengelolaan dan pengendalian program kerja, anggaran dan monitoring realisasi program kerja pada Sekretariat Perusahaan.

7. Ensuring the strategy of managing stakeholder management, controlling potential communication crises, and carrying out the mediator function in resolving issues faced by the Company.
8. Ensuring the strategy of managing the implementation and reporting of Environment, Social and Governance (ESG) in the social and governance stream.
9. Coordinating the strategic and operational implementation in the GCG, Secretary and protocol Department as well as the Corporate Communication and CSR Department.
10. Ensuring resource support towards business development to the function that manages business development.
11. Ensuring the implementation of the Company's culture, Compliance, Occupational Health and Safety, Security and Environment (K3KL) as well as the management system implemented by the Company in accordance with the Company's vision and mission.
12. Ensuring the implementation of risk identification and mitigation of the Corporate Secretariat.
13. Ensuring the management and control of work programs, budgets and monitoring the realization of work programs in the Corporate Secretariat.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2022

Duties Implementation of the Corporate Secretary in 2022

Pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan disampaikan kepada Direksi melalui Laporan Sekretaris Perusahaan yang mencakup realisasi atas pelaksanaan program kerja masing-masing bidang dalam Sekretariat Perusahaan. Pelaksanaan fungsi Sekretaris Perusahaan sepanjang tahun 2022 meliputi:

1. Bidang Hubungan Internal
   a. Melaksanakan Rapat Direksi, yang selama 2022 telah terselenggara sebanyak 31 kali.
   b. Koordinasi pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris-Direksi (Konsultasi dan Pengawasan), yang selama 2022 telah terselenggara sebanyak 12 kali.
   c. Koordinasi pelaksanaan RUPS Tahunan Perusahaan yang selama 2022 terlaksana sebanyak 2 kali, yaitu RUPS Pengesahan RKAP 2022 pada 29 Januari 2022 dan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 pada tanggal 29 Juni 2022.
   d. Sosialisasi GCG mengenai pembinaan *scope* dalam *Good Corporate* seperti Standar Etika Perusahaan, Tata Nilai Perusahaan, Gratifikasi, LHKPN, Kebijakan Anti *Fraud*, Benturan Kepentingan, ISO 37001 Anti Penyuapan, *Compliance* dan *Whistle Blowing System.*

The implementation of duties of the Corporate Secretary is submitted to the Board of Directors through the Corporate Secretary Report which includes the realization of the implementation of work programs of each department in the Corporate Secretariat. The implementation of the Corporate Secretary function throughout 2022 includes the following:

1. Internal Relations Department
   a. Carryied out 31 Meetings of the Board of Directors Meeting during 2022.
   b. Coordination of the implementation of the Board of Commissioners-Board of Directors Meeting (Consultation and Supervision), which has been held 12 times during 2022.
   c. Coordination of the implementation of the Company's Annual GMS which was carried out twice during 2022, namely the GMS for Ratification of the 2022 ABOP on January 29, 2022 and the GMS for Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statements for the 2021 Financial Year on June 29, 2022.
   d. GCG socialization regarding scope development in Good Corporate such as Corporate Ethics Standards, Corporate Values, Gratification, LHKPN, Anti-Fraud Policy, Conflict of Interest, ISO 37001 Anti-Bribery, Compliance and Whistle Blowing System.

e. Evaluasi dan *monitoring* pelaksanaan GCG dengan melakukan *Assessment* GCG periode tahun 2022 oleh pihak independen berdasarkan parameter Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012.
f. Melakukan *monitoring* atas tindak lanjut keputusan RUPS tahun 2021 dan 2022.
g. Menyelenggarakan Rapat Kerja tahun 2022 dalam 2 tahap yaitu Pra Rapat Kerja pada tanggal 5-7 Januari 2022 dan Rapat Kerja pada tanggal 19-21 Januari 2022.
h. Melaksanakan Induksi Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2022 sebanyak 8 kali pertemuan.
i. *Plant Walkdown Performance Dialogue* (PWPD) sebanyak 14 kali.

2. Bidang Stakeholder Management
   a. Menerbitkan Laporan Kinerja Bulanan, yang selama 2022 terbit sebanyak 8 (delapan) kali.
   b. Menyusun Laporan Manajemen Perusahaan yang diterbitkan dan disampaikan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris. Laporan tersebut terdiri atas:
      1) Laporan Manajemen Tahunan Unaudited tahun 2021,
      2) Laporan Manajemen Tahunan Audited tahun 2021
      3) Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2022,
      4) Laporan Manajemen Triwulan II tahun 2022,
      5) Laporan Manajemen Triwulan III tahun 2022;
   c. Menyusun Laporan Tahunan 2021 (*Annual Report* dan *Sustainability Report*) yang telah didistribusikan kepada *stakeholder* Perusahaan serta telah diunggah di *website* Perusahaan;
   d. Memberikan pelayanan data dan informasi kepada para pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan yaitu Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi serta pihak ketiga lainnya;
   e. Menyusun *Corporate Presentation* Tahun 2022 untuk setiap triwulan;
   f. Menyusun buku Statistik Perusahaan Tahun 2022;
   g. Melakukan koordinasi pelaksanaan *benchmark* tahun 2022 dari eksternal sebanyak 7 kali;
   h. *Media Relation : Press Release & Press Conference*;
   i. Monitoring Media Koran Cetak dan *Online*;
   j. Bertindak sebagai pelaksana kegiatan *sponsorship* dan iklan sebagai bentuk partisipasi Perusahaan kepada *stakeholders* agar tercipta hubungan yang baik di antara kedua belah pihak. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut terdiri atas lima kategori, yaitu: Olahraga, Sosial, Seni dan budaya, Agama serta Pendidikan;
   k. Melaksanakan fungsi kehumasan eksternal dengan memanfaatkan media sosial Perusahaan, yang terdiri atas akun Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube;
   l. Media Informasi Korporat meliputi *Video Company Profile,* TV Plasma, E-Kiosk, Portal, dan Mengelola majalah Info PJB yang merupakan majalah korporat Perusahaan;

e. Evaluated and monitored GCG implementation by conducting GCG Assessment for the 2022 period by an independent party based on the parameters of the Decree of the Ministry of State-Owned Enterprises Secretary No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012.
f. Monitored the follow-up of GMS resolutions in 2021 and 2022.
g. Organized the 2022 Work Meeting in 2 stages, namely the Pre-Work Meeting on January 5-7, 2022 and the Work Meeting on January 19-21, 2022.
h. Held 8 meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors Induction during 2022.
i. Held 14 programs of Plant Walkdown Performance Dialogue (PWPD).

2. Stakeholders Management Department
   a. Issued Monthly Performance Reports, which were published 8 (eight) times during 2022.
   b. Drafted the Company Management Report which was published and submitted to the Shareholders and Board of Commissioners. The report consisted of:
      1) Unaudited 2021 Annual Management Report,
      2) Audited 2021 Annual Management Report,
      3) Management Report for the First Quarter of 2022,
      4) Management Report for the Second Quarter of 2022,
      5) Management Report for the Third Quarter of 2022;
   c. Drafted the 2021 Annual Report (Annual Report and Sustainability Report) which has been distributed to the Company's stakeholders and has been uploaded on the Company's website;
   d. Provided data and information services to the parties with an interest in the Company, namely Shareholders, Board of Commissioners, Board of Directors and other third parties;
   e. Prepared Corporate Presentation Year 2022 for each quarter;
   f. Prepared the 2022 Company Statistics book;
   g. Conducted 7 times coordination of the implementation of the 2022 benchmark from external;
   h. Media Relation: Press Release & Press Conference;
   i. Print and Online Newspaper Media Monitoring;
   j. Acted as the executor of sponsorship and advertising activities as a form of the Company's participation to stakeholders in order to create a good relationship between the two parties. The implementation of these activities consists of five categories, namely: Sports, Social, Art and Culture, Religion as well as Education;
   k. Carried out external public relations function by utilizing the Company's social media, which consists of Facebook, Twitter, Instagram and Youtube accounts;
   l. Corporate Information Media including Company Profile Video, Plasma TV, E-Kiosk, Portal, and Managing PJB Info magazine which is the Company's corporate magazine;

m. Pengelolaan *Website* sebagai wadah untuk memberikan informasi kepada *stakeholder* mengenai perusahaan.
n. Koordinator Kegiatan Perusahaan, seperti: *Coffee Morning,* Rapat Kerja/Koordinasi Tahun 2022, Safari Ramadhan Tahun 2022, HUT Perusahaan Tahun 2022, dan Pelaksanaan Upacara;
o. Koordinator CSR Perusahaan, Perusahaan melaksanakan program CSR di 16 unit kerja. Aktivitas CSR tersebut diklasifikasikan dalam 5 tipologi kelompok yaitu: *Empowerment*, *Capacity Building,* Infrastruktur serta Bantuan Sosial dan Kejadian Luar Biasa (KLBS);
p. Mengukur tingkat keberhasilan program CSR dengan mengukur indeks kepuasan pada masyarakat.

m. Website Management as a forum to provide information to stakeholders regarding the Company;
n. Coordinator of Company Activities, such as: Coffee Morning, 2022 Work Meeting/Coordination, 2022 Ramadan Safari, 2022 Company Anniversary, and Ceremony Implementation;
o. Coordinator of Corporate CSR, the Company carried out CSR programs in 16 work units. The CSR activities are classified into 5 typology groups, namely: Empowerment, Capacity Building, Infrastructure as well as Social Assistance and Extraordinary Events (KLBS);
p. Measured the success level of CSR programs by measuring the satisfaction index in the community.

Program Pengembangan Kompetensi Personel Sekretaris Perusahaan

Competency Development Program for Corporate Secretary Personnel

Program pengembangan kompetensi Sekretaris Perusahaan sepanjang tahun 2022 dapat dilihat pada uraian terkait Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Kepala SPI. Selain itu, Staf pada Organ Sekretaris Perusahaan juga mengikuti program pengembangan kompetensi sepanjang tahun 2022 sebagai berikut:

Competency development program of the Corporate Secretary throughout 2022 is available in the description related to Education and Training of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Head of Internal Audit Unit. In addition, staff in the Corporate Secretary Organ also participated in competency development programs throughout 2022 as follows:

Program Pengembangan Kompetensi Personel Sekretaris Perusahaan

Competency Development Program for Corporate Secretary Personnel

No.	Jabatan Position	Nama Sertifikasi/Pelatihan Name of Certification/Training	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Penyelenggara Organizer
1.	Kepala Bidang Hubungan Internal Head of Internal Relations Department	*Certified* GRC *Professional* (GRCP)	19 – 21 April 2022 April 19 - 21, 2022	OCEG
2.	Assistant Officer Hubungan Internal Assistant Officer of Internal Relations	ISO 37301 *Compliance Management*	18 Mei 2022 May 18, 2022	PJB
3.	Assistant Officer Hubungan Internal Assistant Officer of Internal Relations	Pelatihan Desain Infografis Infographic Design Training	24 Agustus 2022 August 24, 2022	PJB
4.	Assistant Officer Hubungan Internal Assistant Officer of Internal Relations	Forum Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi Subsidiary and Associated Company Forum	26 Oktober 2022 October 26, 2022	PJB
5.	Assistant Officer Hubungan Internal Assistant Officer of Internal Relations	Penyusunan *Sustainability Report* Preparation of Sustainability Report	9 November 2022 November 9, 2022	PJB
6.	Assistant Officer Hubungan Internal Assistant Officer of Internal Relations	*Open Broadcaster Software*	14 Desember 2022 December 14, 2022	PJB
7.	Assistant Officer Hubungan Investor (1 orang) Assistant Officer of Internal Relations (1 person)	*Effective Communication & Negotiation Skill (Good Leader Good Communicator)*	31 Maret - 1 April 2022 March 31 - April 1, 2022	Dale Carnegie
8.	Assistant Officer Hubungan Investor (1 orang) Assistant Officer of Internal Relations (1 person)	ISO 37301 *Compliance Management*	18 Mei 2022 May 18, 2022	PJB Academy

No.	Jabatan Position	Nama Sertifikasi/Pelatihan Name of Certification/Training	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Penyelenggara Organizer
9.	Assistant Officer Hubungan Investor (1 orang) Assistant Officer of Internal Relations (1 person)	ISO 37001 Manajemen Anti Suap ISO 37001 Anti-Bribery Management	06 Juli 2022 July 6, 2022	PJB Academy
10.	Assistant Officer Hubungan Investor (1 orang) Assistant Officer of Internal Relations (1 person)	*Coaching clinic women talent*	15-16 Agustus 2022 August 15-16, 2022	Dale Carnegie
11.	Assistant Officer Hubungan Investor (1 orang) Assistant Officer of Internal Relations (1 person)	*Building Digital Mindset*	16 Agustus 2022 August 16, 2022	PJB Academy
12.	Assistant Officer Hubungan Investor (1 orang) Assistant Officer of Internal Relations (1 person)	Pelatihan Desain Infografis Infographic Design Training	24 Agustus 2022 August 24, 2022	PJB Academy Kampus Cirata
13.	- Manajer Hubungan Investor (1 orang) - Assistant Officer Hubungan Investor (2 orang) - Investor Relations Manager (1 person) - Investor Relations Assistant Officer (2 people)	Penyusunan *Sustainability Report* Preparation of Sustainability Report	7-9 November 2022 November 7-9, 2022	NCSR
14.	Manajer Hubungan Investor (1 orang) Investor Relations Manager (1 person)	Pembelajaran *Workshop Strengthening Integrated Communication Strategy* Learning Workshop on Strengthening Integrated Communication Strategy	7 November 2022 November 7, 2022	PJB Academy
15.	Assistant Officer Hubungan Investor (1 orang) Investor Relations Assistant Officer (1 person)	*Networking & Relationship*	16 November 2022 November 16, 2022	PJB Academy
16.	Manajer Hubungan Investor (1 orang) Investor Relations Manager (1 person)	*Workshop Business Idea Generation*	21-22 Desember 2022	PJB Academy
17.	Asst. Officer Corporate Communication	Media Sosial dan Media Korporat Social Media and Corporate Media	2 Agustus 2022 August 2, 2022	PJB Academy
18.	Asst. Officer Corporate Communication	*Building Digital Mindset*	16 Agustus 2022 August 16, 2022	PJB Academy
19.	Asst. Officer Corporate Communication	Pelatihan Desain Infografis Pelatihan Desain Infografis	24 Agustus 2022 August 24, 2022	PJB Academy
20.	Asst. Officer Corporate Communication	Pelatihan *Networking & Relationship* Infographic Design Training	11 November 2022 November 11, 2022	PJB Academy
21.	Asst. Officer Corporate Communication	*Open Broadcaster Software*	14 Desember 2022 December 14, 2022	PJB Academy Pusat (jemursari)
22.	Manager Corporate Communication	*Marketing and Sales Skill*	27 Desember 2022 December 27, 2022	PJB Academy Jemursari
23.	Asst. Officer Corporate Communication	*Social Return On Investment Batch 1*	20-21 Juni 2022 June 20-21, 2022	Prospect
24.	Asst. CSR Officer & Junior CSR Officer	ISO 26000	1 Desember 2022 December 1, 2022	Social Investment Indonesia
25.	Asst. CSR Officer & Junior CSR Officer	Sosmap dan SROI Sosmap and SROI	Juni 2022 June, 2022	Universitas Trisakti Trisakti University
26.	Manager CSR	Sertifikasi QRMA QRMA Certification	1-4 November 2022 November 1-4, 2022	CRMS Indonesia
27.	Asst. CSR Officer & Junior CSR Officer	*Stakeholder Management*	24-25 Agustus 2022 August 24-25, 2022	PJB

Evaluasi Kinerja Sekretaris Perusahaan

Evaluation of Corporate Secretary Performance

Pencapaian target pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan dievaluasi berdasarkan indikator yang disusun dalam bentuk *Key Performance Indicator* dan laporan pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan oleh Direktur Utama. Evaluasi kinerja Sekretaris Perusahaan dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun. Sekretaris Perusahaan tahun 2022 telah mencapai target sebesar 100,45% dari *Key Performance Indicator* telah disepakati.

The achievement of duties implementation targets of the Corporate Secretary is evaluated based on indicators prepared in the form of Key Performance Indicators and reports on the implementation of duties of the Corporate Secretary by the President Director. The evaluation of the Corporate Secretary's performance is conducted 2 (two) times a year. In 2022, the Corporate Secretary achieved the target of 100.45% of the established Key Performance Indicator.

Audit Internal

Internal Audit

Pengawasan internal Perusahaan oleh Direksi telah didukung dengan fungsi Audit Internal sebagai perangkat penting dalam sistem pengendalian internal. Direksi menetapkan Satuan Pengawasan Internal (SPI) sebagai pelaksana fungsi Audit Internal yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menjalankan audit (*assurance*) dan konsultasi secara independen dan objektif. SPI menerapkan pendekatan audit berbasis risiko pada proses bisnis serta kepatuhan atas kebijakan internal Perusahaan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan berorientasi pada peningkatan nilai strategis Perusahaan secara berkelanjutan. Satuan Pengawasan Internal dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pengawasan Internal (KSPI) dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

The Company's internal supervision by the Board of Directors has been supported by the Internal Audit function as an important tool in the internal control system. The Board of Directors determines the Internal Audit Unit (IAU) as the executor of the Internal Audit function which is tasked and responsible for carrying out audits (assurance) and consultations independently and objectively. The IAU applies a risk-based audit approach to business processes as well as compliance with the Company's internal policies and applicable laws and regulations with an orientation towards increasing the Company's strategic value in a sustainable manner. The Internal Audit Unit is led by a Head of Internal Audit Unit (IAU) and responsible directly to the President Director.

Profil Kepala Satuan Pengawasan Internal

Profile of the Head of Internal Audit Unit

R. Efin Febriantoro

Warga Negara Indonesia, 51 tahun.

Menjabat sebagai KSPI sejak tahun 2015 sesuai Keputusan Direksi PT PJB No. P.135/440/PJB/2015 tanggal 27 Juli 2015 dan perbaharui melalui Surat Keputusan Direktur Utama No. P.078/440/PJB/2016 tanggal 15 April 2016, P.025/440/PJB/2017 tanggal 08 Februari 2017 dan No. P.262/440/PJB/2017 tanggal 10 November 2017.

Pendidikan

Menyelesaikan pendidikan S1 Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya pada tahun 1996.

Sertifikasi yang dimiliki dan pelatihan audit yang telah diikuti diantaranya adalah *Qualified Internal Auditor* (QIA).

Riwayat Pekerjaan

Pernah menjabat sebagai Auditor BPK RI (1997-2001), Auditor SPI PJB (2001-2008), Asisten Manajer Pengembangan Akuntansi Sub Direktorat Akuntansi PJB (2008-2010), Manajer Pengembangan Akuntansi Sub Direktorat Akuntansi PJB (2010-2012) dan Senior Manajer Akuntansi Sub Direktorat Akuntansi PJB (2012-2015).

Indonesian citizen, 51 years old.

He has served as the Head of Internal Audit Unit since 2015 in accordance with the Decree of the Board of Directors of PT PJB No. P.135/440/PJB/2015 dated July 27, 2015 and renewed through President Director Decree No. P.078/440/PJB/2016 dated April 15, 2016, P.025/440/PJB/2017 dated February 08, 2017 and No. P.262/440/PJB/2017 dated November 10, 2017.

Education

Completed his education as a Bachelor of Economics from the Faculty of Economics, Brawijaya University in 1996.

Certifications owned and audit training that has been followed include Qualified Internal Auditor (QIA).

Work History

Has served as Auditor of BPK RI (1997-2001), Auditor of IAU PJB (2001-2008), Assistant Manager of Accounting Development of PJB Accounting Sub Directorate (2008-2010), Manager of Accounting Development of PJB Accounting Sub Directorate (2010-2012) and Senior Manager of Accounting of PJB Accounting Sub Directorate (2012-2015).

Pemberhentian Kepala SPI mengacu pada kebijakan sumber daya manusia terkait dengan promosi dan mutasi yang berlaku di lingkungan Perusahaan serta ketentuan Piagam Pengawasan Internal. Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama melalui surat keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

The dismissal of the Head of IAU refers to the human resources policy related to promotions and mutations that apply within the Company as well as the provisions of the Internal Supervisory Charter. The Head of IAU is appointed and dismissed by the President Director through a decree of the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners.

Struktur Organ dan Kedudukan Satuan Pengawasan Internal

Organ Structure and Position of Internal Audit Unit

Struktur Organ Satuan Pengawasan Internal ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 017.P/019/DIR/2019 tentang Peraturan Pelaksana Susunan Organisasi dan Formasi Tenaga Kerja SPI dan 034.P/019/DIR/2021 tentang Susunan Organisasi dan FTK SPI dimana secara struktural SPI berada di bawah Direktur Utama. SPI secara fungsional memiliki akses komunikasi langsung kepada Komite Audit untuk berkoordinasi dan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan dan hasil audit.

The Organ Structure of the Internal Audit Unit is determined based on the Decree of the Board of Directors No. 017.P/019/DIR/2019 concerning Regulations for Executors of the Organizational Structure and Workforce Formation of IAU and 034.P/019/DIR/2021 concerning the Organizational Structure and Workforce Formation of IAU; where structurally, the IAU is under the President Director. Functionally, the IAU has direct communication access to the Audit Committee to coordinate and submit information relating to the implementation and results of audits.

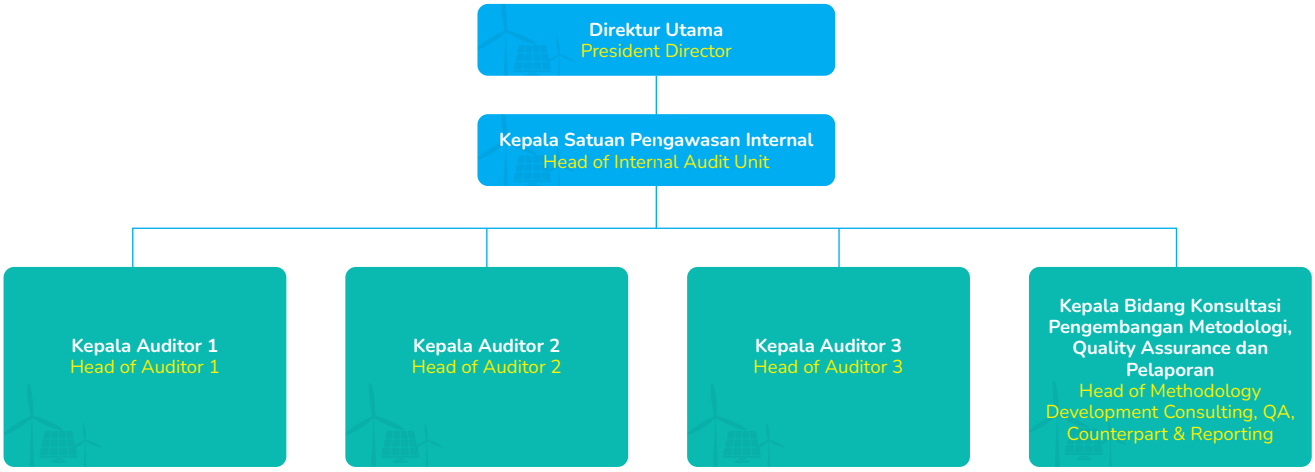

Pedoman Kerja Satuan Pengawasan Internal

Work Guidelines for Internal Audit Unit

Satuan Pengawasan Internal dilengkapi dengan pedoman kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Pedoman tersebut disesuaikan dengan struktur organisasi dan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan. Pedoman kerja SPI antara lain:

1. *International Professional Practices Framework* Tahun 2017 (IPPF)
   IPPF adalah kerangka kerja konseptual yang mengatur pedoman resmi praktik auditor internal yang dikeluarkan oleh *Institute of Internal Auditor*. Pedoman dalam IPPF meliputi Pedoman Wajib (*Mandatory Guidance*) dan Pedoman yang Disarankan (*Strongly Recommended Guidance*).
2. Piagam Pengawasan Internal Tahun 2020
   Piagam Pengawasan Internal merupakan pedoman umum pelaksanaan pengawasan internal Perusahaan yang dijalankan oleh SPI. Piagam Pengawasan Internal disahkan oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama terakhir kali pada tanggal 11 September 2020 yang ditandatangani dan. Piagam Pengawasan Internal dievaluasi secara periodik untuk mematikan kecukupan muatan ketentuan sesuai dengan perkembangan organisasi dan ketentuan yang berlaku. Piagam Pengawasan Internal secara umum telah muatan ketentuan yang mencakup struktur; tugas, tanggung jawab dan wewenang serta lingkup pekerjaan; standar pelaksanaan tugas audit internal, kode etik dan program *quality assurance*; komunikasi; pelaporan dan pertanggungjawaban Satuan Pengawasan Internal.

The Internal Audit Unit is equipped with work guidelines as a reference in the implementation of its duties and responsibilities. The guidelines are adjusted to the organizational structure and complexity of the Company's business activities. The IAU work guidelines include:

1. International Professional Practices Framework 2017 (IPPF)

   The IPPF is a conceptual framework that regulates the official guidelines for the practice of internal auditors issued by the Institute of Internal Auditors. The guidelines in the IPPF include Mandatory Guidance and Strongly Recommended Guidance.

2. Internal Audit Charter 2020
   The Internal Audit Charter is a general guideline for the implementation of the Company's internal audit carried out by the IAU. The Internal Audit Charter was approved by the President Commissioner and President Director for the last time on September 11, 2020, signed and. The Internal Audit Charter is evaluated periodically to determine the adequacy of the provisions content in accordance with organizational developments and applicable provisions. The Internal Audit Charter has generally contained provisions covering structure; duties, responsibilities and authorities as well as scope of work; standards for the implementation of internal audit duties, code of ethics and quality assurance program; communication; reporting and accountability of the Internal Audit Unit.

3. Standar Profesi Satuan Pengawasan Internal ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.039.P/019/DIR/2022. Standar ini mengatur tentang kode etik, standar perilaku, standar profesi, standar atribut dari auditor.
4. Pedoman Umum Satuan Pengawasan Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.039.P/019/DIR/2022 yang merupakan panduan umum untuk pelaksanaan penugasan audit internal yang meliputi kegiatan *assurance* dan *consulting*, sehingga pelaksanaan penugasan dapat berjalan dengan efektif dan konsisten sesuai dengan kode etik dan standar profesi audit internal yang berlaku.
5. Pedoman Teknis Audit Internal Berbasis Risiko yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 039.P/019/DIR/2022 yang merupakan pedoman teknis bagi SPI dalam melakukan setiap tahapan proses audit dimulai dari perencanaan audit tahunan, perencanaan penugasan, pelaksanaan penugasan, komunikasi hasil penugasan, pemantauan tindakan perbaikan dan evaluasi penugasan audit dengan selalu mempertimbangkan risiko pada setiap tahapan tersebut.
6. Pedoman Pengembangan Audit Program yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.039.P/019/DIR/2022 yang merupakan pedoman teknis bagi SPI untuk menyusun audit program yang berisikan seperangkat prosedur analisis atau langkah-langkah pengumpulan dan pengujian bukti-bukti audit.

3. Professional Standards of the Internal Audit Unit are determined based on the Decree of the Board of Directors No.039.P/019/DIR/2022. This standard regulates the code of ethics, standards of behavior, professional standards, attribute standards of auditors.
4. General Guidelines for the Internal Audit Unit determined based on the Decree of the Board of Directors No.039.P/019/DIR/2022 which is a general guide for the implementation of internal audit assignments covering assurance and consulting activities, so that the implementation of assignments can run effectively and consistently in accordance with the applicable code of ethics and professional standards of internal audit.
5. Risk-Based Internal Audit Technical Guidelines determined based on the Decree of the Board of Directors No. 039.P/019/DIR/2022 which is a technical guideline for the IAU in conducting each stage of the audit process starting from annual audit planning, assignment planning, assignment implementation, communication of assignment results, monitoring of corrective actions and evaluation of audit assignments by always considering the risks at each stage.
6. Audit Program Development Guidelines determined based on the Decree of the Board of Directors No.039.P/019/DIR/2022 which is a technical guideline for the IAU to develop an audit program that contains a set of analytical procedures or steps for collecting and testing audit evidence.

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pengawasan Internal

Duties and Responsibilities of the Internal Audit Unit

Satuan Pengawasan Internal menjalankan fungsi assurance dan konsultasi yang didasarkan pada Standar Profesi Internal Auditor dalam rangka menjamin keandalan dan integritas informasi; ketaatan terhadap peraturan, ketentuan, kebijakan dan prosedur yang disepakati; perlindungan terhadap aset; pemanfaatan sumber daya secara efisien dan ekonomis; pelaksanaan kegiatan operasi/program sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Tugas dan tanggung jawab SPI dalam menjalankan fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memastikan penyusunan, evaluasi, pengembangan kebijakan dan prosedur satuan pengawasan internal.
2. Memastikan Perusahaan dikelola dengan prinsip niaga yang sehat dan berdasarkan GCG melalui pelaksanaan audit dan menjadi *counterpart* dari auditor eksternal (BPK/KAP).
3. Memberikan rekomendasi perbaikan pengelolaan perusahaan berdasarkan hasil audit yang dilakukan dan melakukan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi.

The Internal Audit Unit carries out assurance and consulting functions based on the Internal Auditor Professional Standards in order to ensure the reliability and integrity of information; compliance with agreed regulations, provisions, policies and procedures; protection of assets; efficient and economical use of resources; implementation of operations/programs in accordance with established objectives and targets. The duties and responsibilities of the IAU in carrying out the function are as follows:

1. Ensuring the preparation, evaluation, development of policies and procedures of the internal audit unit.
2. Ensuring that the Company is managed with sound commercial principles and based on GCG through the implementation of audits and being a counterpart to external auditors (BPK / KAP).
3. Providing recommendations for improvement of company management based on the results of audits conducted and monitoring the follow-up of recommendations.

4. Melakukan kegiatan pelaporan kepada *external auditor*/ pihak regulator/ internal manajemen Perusahaan.
   Berdasarkan SK No.006.P.019.DIR.2022 tentang Peraturan Pelaksana Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dalam menjalankan peran sebagai Model Tiga Lini (*Three-Lines Model*) dalam melakukan kegiatan pengendalian internal melalui pelaksanaan audit berdasarkan hasil inputan dari Lini 1 (*Risk Owner*) dan Lini 2 (Fungsi Manajemen Risiko/*Risk Unit* dan Fungsi Kepatuhan) sehingga pengendalian internal perusahaan berjalan dengan optimal.
5. Melakukan penyempurnaan secara berkelanjutan atas kebijakan, pedoman, dan prosedur Pengawasan Internal serta pemanfaatan aplikasi *Audit Management System* (AMS) untuk mendukung mekanisme kerja Satuan Pengawasan Internal.
6. Menjalankan fungsi pembinaan, supervisi, pengendalian, dan koordinasi terhadap program-program pengawasan, baik di Kantor Pusat maupun seluruh Unit Kerja Perusahaan.
7. Melayani pelanggan eksternal & internal perusahaan, Mitra, Unit/AP/PA dan memenuhi kebutuhan perusahaan dan pemegang saham, melalui dukungan terhadap implementasi Budaya Perusahaan (AKHLAK) dan Sistem Manajemen yang diterapkan perusahaan (SIT, GCG, PJB IMS, Kriteria *Baldrige*, SMK3, *Maturity Level* Proses Bisnis) sejalan dengan Visi & Misi Perusahaan.
8. Bertanggungjawab penuh atas perencanaan program kerja, anggaran dan monitoring realisasi program kerja dan anggaran pada Satuan Pengawasan Internal secara prudent dengan mempertimbangkan kajian kelayakan dan risiko.
9. Melakukan identifikasi risiko dan mitigasi risiko terkait program-program yang menjadi kewenangan fungsi Satuan Pengawasan Internal.
10. Mengevaluasi dan mengembangkan kebijakan-kebijakan internal di Satuan Pengawasan Internal.

4. Conducting reporting activities to external auditors/regulators/ internal management of the Company.
   Based on Decree No.006.P.019.DIR.2022 concerning Regulations for Executors of the Implementation of Integrated Risk Management in carrying out the role of the Three-Lines Model in conducting internal control activities through the implementation of audits based on the results of input from Line 1 (Risk Owner) and Line 2 (Risk Management Function/ Risk Unit and Compliance Function) so that the Company's internal control runs optimally.
5. Conducting continuous improvement of Internal Audit policies, guidelines, and procedures as well as utilization of the Audit Management System (AMS) application to support the work mechanism of the Internal Audit Unit.
6. Carrying out the functions of guidance, supervision, control, and coordination of supervision programs, both at the Head Office and all Company's Work Units.
7. Serving Company's external & internal customers, Partners, Units/AP/PA and meeting the needs of the Company and shareholders, through supporting the implementation of Corporate Culture (AKHLAK) and Management Systems implemented by the Company (SIT, GCG, PJB IMS, Baldrige Criteria, OHSMS, Business Process Maturity Level) in line with the Company's Vision & Mission.
8. Fully responsible for planning work programs, budgets and monitoring the realization of work programs and budgets in the Internal Audit Unit in a prudent manner by considering feasibility and risk studies.
9. Identifying risks and mitigating risks related to programs under the authority of the Internal Audit Unit function.
10. Evaluating and developing internal policies in the Internal Audit Unit.

Formasi dan Kualifikasi Auditor Satuan Pengawasan Internal

Formation and Qualifications of Internal Audit Unit Auditors

Formasi auditor SPI sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan fungsi internal audit yang dihasilkan dari analisis beban kerja. SPI telah didukung dengan auditor yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai dengan kualifikasi dan sertifikasi sebagai berikut:

The IAU auditor formation is in accordance with the needs for the implementation of the internal audit function resulting from the workload analysis. The IAU has been supported by auditors who have adequate knowledge and expertise with the following qualifications and certifications:

Formasi dan Kualifikasi Auditor Satuan Pengawasan Internal

Formation and Qualifications of Internal Audit Unit Auditors

No.	Nama Name	Jabatan Position	Kualifikasi Pendidikan Kualifikasi Pendidikan
1	R. Efin Febriantoro	Kepala Satuan Pengawasan Internal Head of Internal Audit Unit	• S1 Ekonomi • Bachelor of Economics
2	Sulistyo Utomo	Kepala Auditor 1 Head of Auditor 1	• S1 Fisika • S2 Bidang Manajemen • Program Profesi Insinyur • Bachelor of Physics • Master of Management • Professional Engineer Program
3	Mochamad Triyono	Kepala Auditor 2 Head of Auditor 2	• S1 Teknik Industri • S2 Master of Business Administration) • Bachelor of Industrial Engineering • Master of Business Administration
4	Hairul Aswad	Kepala Auditor 3 Head of Auditor 3	• S1 Ekonomi Akuntansi • S2 Ekonomi Syariah • Bachelor of Accounting Economics • Master of Sharia Economics
5	Mochammad Agustian	Kepala Bidang Konsultasi, QA, Counterpart & Reporting Kepala Bidang Konsultasi, QA, Counterpart & Reporting	• S1 Teknik Elektro • S2 Manajemen Teknik • S2 Teknik Elektro • Bachelor of Electrical Engineering • Master of Engineering Management • Master of Electrical Engineering
6	Sugito	Senior Spesialis I Konsultasi Senior Specialist I Consulting	• S1 Mesin • Bachelor of Engineering
7	Hadeyanti Sylviani	Senior Spesialis I Auditor 3 Senior Specialist I of Auditor 3	• S1 Akutansi • S2 Manajemen Keuangan • Bachelor of Accounting • Master of Financial Management
8	Agus Priyo Kusumo	Senior Spesialis II Auditor 2 Senior Specialist II of Auditor 2	• S1 Teknik Industri • Bachelor of Industrial Engineering
9	Ali Umar Sjafi'i	Senior Spesialis II Auditor 2 Senior Specialist II of Auditor 2	• S1 Informatika • Bachelor of Informatics
10	Ahmad Fajar Ridlo	Senior Spesialis II Auditor 2 Senior Specialist II of Auditor 2	• S1 Elektro • S2 Magister Manajemen Teknik • Bachelor of Electrical • Master of Engineering Management
11	Rita Kartika	Senior Spesialis II Auditor 2 Senior Specialist II of Auditor 2	• S1 Hukum • Bachelor of Law
12	Suherman	Analyst Auditor 1	• S1 Elektro • Bachelor of Electrical
13	Budi Purwono	Analyst Auditor 1	• S1 Ekonomi Manajemen • S2 Magister Akuntansi • Bachelor of Management Economics • Master of Accounting
14	Lisna Mery T	Analyst Auditor 1	• S1 Manajemen • S2 Magister Manajemen • S1 Management • Master of Management
15	Ahmad Syaiful Zuhri	Analyst Auditor 1	• S1 Teknik Industri • S2 Bidang Manajemen • Bachelor of Industrial Engineering • Master of Management

No.	Nama Name	Jabatan Position	Kualifikasi Pendidikan Kualifikasi Pendidikan
16	Therry Widya Laksmi	Assistant Analyst Auditor 1	• S1 Elektro • Bachelor of Electrical
17	Rina Febyanasari	Assistant Analyst Auditor 1	• S1 Teknik Kimia • S2 Teknik Mesin • Bachelor of Chemical Engineering • Master of Mechanical Engineering
18	Achmad Hatta Wiyata	Assistant Analyst Auditor 1	• S1 Teknik Elektro • Bachelor of Electrical Engineering
19	Fadianto Mirza	Assistant Analyst Auditor 1	• S1 Teknik Elektro • Bachelor of Electrical Engineering
20	Fitratus Shiddiq S.P.	Assistant Analyst Auditor 2	• S1 Hukum • Bachelor of Law
21	Dendi Mahawarman	Assistant Analyst Auditor 2	• D4 Teknik Elektronika • Diploma of Electronic Engineering
22	Alex Munandar	Assistant Analyst Auditor 2	• S1 Teknik Elektro • Bachelor of Electrical Engineering
23	Achmad Farizal I.	Assistant Analyst Auditor 3	• S1 Teknik Industri • Bachelor of Industrial Engineering
24	Lahmsa Alkautsa Harysa	Assistant Analyst Auditor 3	• S1 Manajemen • Bachelor of Management
25	Ricardo Pasaribu	Assistant Analyst Auditor 3	• S1 Manajemen • S2 Magister Manajemen Teknologi • Bachelor of Management • Master of Technology Management
26	Okky Gati Hambali	Assistant Analyst Auditor 3	• S1 Teknik Elektro • Bachelor of Electrical Engineering
27	Malinda Dinna Auliya	Assistant Analyst Auditor 3	• S1 Teknik Elektro • Bachelor of Electrical Engineering
28	Ridho Adhie Hernowo	Analyst Methodology & QA	• S1 Manajemen • S2 Magister Manajemen • Bachelor of Management • Master of Management
29	Bima Surya Sofhananda	Assistant Analyst Methodology & QA	• S1 Teknik Industri • Bachelor of Industrial Engineering
30	Arizky Aryantio	Assistant Analyst Methodology & QA	• S1 Teknik Industri • Bachelor of Industrial Engineering
31	Elvira Saris Virmania	Assistant Analyst Counterpart & Reporting	• S1 Akuntansi • Bachelor of Accounting
32	Rachmatika Anjani Kuncahyo	Assistant Analyst Counterpart & Reporting	• S1 Manajemen • Bachelor of Management
33	Riyo Hussain Muhammad	Assistant Analyst Counterpart & Reporting	• S1 Teknik Fisika • Bachelor of Physics Engineering
34	Tri Wuryani	Analyst Konsultasi	• S1 Ilmu Hukum • S2 Magister Manajemen • Bachelor of Law Science • Master of Management
35	Samsul Efendi	Senior Specialist II Konsultasi	• S1 Akuntansi • Bachelor of Accounting

Sertifikasi Auditor Satuan Pengawasan Internal
Certification of Internal Audit Unit Auditors

Sertifikasi Profesi Professional Certification	Jumlah Auditor Total Auditor
Qualified Internal Auditor (QIA) Manajerial Managerial Qualified Internal Auditor (QIA)	23
Qualified Internal Auditor (QIA) Lanjutan Advanced Qualified Internal Auditor (QIA)	5
Qualified Internal Auditor (QIA) Dasar Basic Qualified Internal Auditor (QIA)	4
Certified Risk Management Officer (CRMO)	1
Certified Fraud Examiner (CFE)	1

Pelaksanaan Kegiatan Satuan Pengawasan Internal
Implementation of Internal Audit Unit Activities

Satuan Pengawasan Internal menyusun Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) dengan mengacu pada sasaran-sasaran strategis (*Strategy Map*) Perusahaan menggunakan pendekatan *Risk Based Internal Audit* (RBIA). Sesuai dengan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Satuan Pengawasan Internal tahun 2022, program-program utama Satuan Pengawasan Internal mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. Audit Internal dengan objek audit Unit Pembangkitan (UP), *Unit Maintenance Repair Overhaul* (UMRO), Unit Bisnis Jasa Operation and Maintenance (UBJOM), Divisi/ Bidang/ Satuan Kerja Kantor Pusat, dan Anak Perusahaan;
2. Penugasan audit dengan tujuan tertentu dan audit tematik;
3. Pelaksanaan koordinasi dengan Komite Audit dan *counterpart* auditor eksternal;
4. Peran sebagai *consultant* dan *catalyst*;
5. *Monitoring* tindak lanjut hasil audit
6. Penguatan *networking* SPI dengan *Stakeholders*;
7. Penguatan Tata Kelola SPI;
8. Peningkatan kapabilitas dan kapasitas personil SPI.

SPI telah merealisasikan program kerja utama sepanjang tahun 2022 berdasarkan Rencana Kerja SPI tersebut yang mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. **Pelaksanaan Audit Internal**
   Audit rutin, audit dengan tujuan tertentu dan audit tematik telah dilaksanakan sepanjang tahun 2022 pada beberapa obyek audit sebagai berikut:

The Internal Audit Unit prepares the Annual Audit Work Program (PKAT) by referring to the Company's strategic targets (Strategy Map) using the Risk-Based Internal Audit (RBIA) approach. In accordance with the 2022 Annual Audit Work Program (PKAT) of the Internal Audit Unit, the main programs of the Internal Audit Unit include the following activities:

1. Internal Audit with audit objects of the Generating Unit (UP), Maintenance Repair Overhaul Unit (UMRO), Operation and Maintenance Services Business Unit (UBJOM), Head Office Divisions/Sectors/Work Units, and Subsidiaries;
2. Audit assignments with certain objectives and thematic audits;
3. Coordination with the Audit Committee and counterpart external auditors;
4. Role as consultant and catalyst;
5. Monitoring the follow-up of audit results;
6. Strengthening the IAU networking with Stakeholders;
7. Strengthening the IAU Governance;
8. Increasing the capability and capacity of the IAU personnel.

The IAU has realized the main work program throughout 2022 based on the IAU Work Plan which includes the following activities:

1. **Internal Audit Implementation**
   Routine audits, audits with certain objectives and thematic audits have been carried out throughout 2022 on several audit objects as follows:

Pelaksanaan Audit Internal Tahun 2022

Implementation of Internal Audit in 2022

No.	Objek Audit Audit Object	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation
Triwulan I Quarter I		
1	Unit Pembangkitan Gresik Gresik Generation Unit	3 – 21 Januari 2022 January 3 - 21, 2022
2	Unit Pembangkitan Paiton Paiton Generation Unit	3 – 21 Januari 2022 January 3 - 21, 2022
3	Unit Pembangkitan Muara Tawar Muara Tawar Generation Unit	3 – 28 Januari 2022 January 3 - 28, 2022
4	Unit Pembangkitan Muara Karang Muara Karang Generation Unit	31 Januari – 18 Februari 2022 January 31 - February 18, 2022
5	Unit Bisnis Jasa Operasi dan Pemeliharaan (O&M) PLTU Pacitan Operation and Maintenance (O&M) Services Business Unit of Pacitan CFPP	31 Januari – 25 Februari 2022 January 31 - February 25, 2022
6	Unit Bisnis Jasa Operasi dan Pemeliharaan (O&M) PLTU Paiton Operation and Maintenance (O&M) Services Business Unit of Paiton CFPP	31 Januari – 25 Februari 2022 January 31 - February 25, 2022
7	Unit Bisnis Jasa Operasi dan Pemeliharaan (O&M) PLTU Tanjung Awar-Awar Operation and Maintenance (O&M) Services Business Unit of Tanjung Awar-Awar CFPP	28 Februari – 18 Maret 2022 February 28 - March 18, 2022
Triwulan II Quarter II		
8	Unit Bisnis Jasa Operasi dan Pemeliharaan (O&M) PLTU Indramayu Operation and Maintenance (O&M) Services Business Unit of Indramayu CFPP	28 Februari – 18 Maret 2022 February 28 - March 18, 2022
9	Unit *Maintenance Repair & Overhaul* (UMRO)	28 Februari – 25 Maret 2022 February 28 - March 25, 2022
10	Unit Bisnis Jasa Operasi dan Pemeliharaan (O&M) PLTU Rembang Operation and Maintenance (O&M) Services Business Unit of Rembang CFPP	28 Maret – 18 April 2022 March 28 - April 18, 2022
11	Unit Pembangkitan Brantas Brantas Generation Unit	28 Maret – 18 April 2022 March 28 - April 18, 2022
12	Unit Pembangkitan Cirata Cirata Generation Unit	28 Maret – 18 April 2022 March 28 - April 18, 2022
13	Unit Bisnis Jasa Operasi dan Pemeliharaan (O&M) PLTU Pulang Pisau Operation and Maintenance (O&M) Services Business Unit of Pulang Pisau CFPP	17 Mei – 8 Juni 2022 May 17 - June 8, 2022
14	Unit Bisnis Jasa Operasi dan Pemeliharaan (O&M) PLTU Kaltim Teluk Operation and Maintenance (O&M) Services Business Unit of Kaltim Teluk CFPP	17 Mei – 8 Juni 2022 May 17 - June 8, 2022
15	Unit Bisnis Jasa Operasi dan Pemeliharaan (O&M) PLTU Arun Operation & Maintenance Service Business Units of Arun CFPP	17 Mei – 8 Juni 2022 May 17 - June 8, 2022
Triwulan III Quarter III		
16	Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan Risk Management and Compliance Unit	4 – 22 Juli 2022 July 4 - 22, 2022
17	Unit Bisnis Jasa Operasi dan Pemeliharaan (O&M) PLTU Tenayan Operation and Maintenance (O&M) Services Business Unit of Tenayan CFPP	4 – 22 Juli 2022 July 4 - 22, 2022
18	PJB Academy	11 – 29 Juli 2022
19	Direktorat Operasi-1 Directorate of Operations-1	23 Agustus – 13 September 2022 August 23 - September 13, 2022
20	Direktorat Pengembangan dan Niaga Directorate of Development and Commerce	23 Agustus – 13 September 2022 August 23 - September 13, 2022

No.	Objek Audit Audit Object	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation
21	Satuan Perencanaan dan Transformasi Korporat Corporate Planning and Transformation Unit	23 Agustus – 13 September 2022 August 23 - September 13, 2022
22	Direktorat Operasi-2 Directorate of Operations-2	19 September – 7 Oktober 2022 September 19 - October 7, 2022
23	Direktorat Keuangan Directorate of Finance	19 September – 7 Oktober 2022 September 19 - October 7, 2022
24	PT Rekadaya Elektrika	19 September – 7 Oktober 2022 September 19 - October 7, 2022
Triwulan IV Quarter IV		
30	Satuan Teknologi dan Enjiniring Technology and Engineering Unit	17 Oktober – 4 November 2022 October 17 - November 4, 2022
31	PT PJB Investasi	17 Oktober – 4 November 2022 October 17 - November 4, 2022
32	PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang	17 Oktober – 4 November 2022 October 17 - November 4, 2022
33	PT PJB Services	14 November - 2 Desember 2022 November 14 - December 2, 2022
34	Direktorat Sumber Daya Manusia dan Administrasi Directorate of Human Capital and Administration	14 November - 2 Desember 2022 November 14 - December 2, 2022
35	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	21 November - 8 Desember 2022 November 21 - December 8, 2022

2. Pelaksanaan Koordinasi Dengan Komite Audit dan *Counterpart* Eksternal Auditor

Pelaksanaan koordinasi dengan Komite Audit mengacu pada Piagam Audit Internal yang menjelaskan bahwa Laporan Kegiatan Satuan Pengawasan Internal (LKSPI) disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit setiap triwulan sebagai bahan untuk evaluasi dan tindak lanjut. Koordinasi dengan Komite Audit secara rutin dilakukan yang mencakup kegiatan penyampaian laporan atas pelaksanaan tugas SPI dan reviu atas penerapan Model Tiga Lini (*Three-Lines Model*) dengan realisasi sebanyak 6 (enam) kali rapat sebagai berikut:

a. Tanggal 7 Februari 2022, Satuan Pengawasan Internal dan Komite Audit telah menyelenggarakan Rapat Pembahasan Laporan Kegiatan Satuan Pengawasan Internal (LKSPI) Triwulan IV tahun 2021.
b. Tanggal 29 Maret 2022, Satuan Pengawasan Internal dan Komite Audit telah menyelenggarakan rapat reviu Model Tiga Lini (*Three-Lines Model*) untuk temuan hasil audit Direktorat Niaga tahun 2021.
c. Tanggal 22 April 2022, Satuan Pengawasan Internal dan Komite Audit telah menyelenggarakan Rapat Pembahasan Laporan Kegiatan Satuan Pengawasan Internal (LKSPI) Triwulan I tahun 2022.

2. Implementation of Coordination with the Audit Committee and Counterpart External Auditor

The implementation of coordination with the Audit Committee refers to the Internal Audit Charter which explains that the Internal Audit Unit Activity Report (LKSPI) is submitted to the Board of Commissioners through the Audit Committee every quarter as material for evaluation and follow-up. Coordination with the Audit Committee is routinely conducted which includes the activities of submitting reports on the implementation of the IAU's duties and reviewing the implementation of the Three-Lines Model with the realization of 6 (six) meetings as follows:

a. Dated February 7, 2022, the Internal Audit Unit and the Audit Committee have held a Meeting to Discuss the Internal Audit Unit Activity Report (LKSPI) for the Fourth Quarter of 2021.
b. Dated March 29, 2022, the Internal Audit Unit and Audit Committee have held a Three-Lines Model review meeting for the audit findings of the Directorate of Commerce in 2021.
c. Dated April 22, 2022, the Internal Audit Unit and the Audit Committee have held a Meeting to Discuss the Internal Audit Unit Activity Report (LKSPI) for the First Quarter of 2022.

d. Tanggal 7 Juni 2022, Satuan Pengawasan Internal dan Komite Audit telah menyelenggarakan rapat reviu Model Tiga Lini (*Three-Lines Model*) untuk temuan hasil audit UBJOM Tanjung Awar-Awar 2022.
e. Tanggal 19 Agustus 2022, Satuan Pengawasan Internal dan Komite Audit telah menyelenggarakan Rapat Pembahasan Laporan Kegiatan Satuan Pengawasan Internal (LKSPI) Triwulan II tahun 2022.
f. Tanggal 24 Oktober 2022, Satuan Pengawasan Internal dan Komite Audit telah menyelenggarakan Rapat Pembahasan Laporan Kegiatan Satuan Pengawasan Internal (LKSPI) Triwulan III tahun 2022.

SPI juga melakukan fungsi *Counterparting* terhadap auditor eksternal sepanjang tahun 2022, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan *opening meeting* pada tanggal 19 September 2022 dengan Kantor Akuntan Publik Tanudirejda, Wibisana, Rintis & Rekan (KAP PwC) terkait kegiatan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan UMK, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal, Evaluasi Kinerja Perseroan (Tingkat Kesehatan) dan *Key Performance Indicator* (KPI) serta jasa atestasi/non atestasi lainnya untuk periode Tahun Buku 2022.
b. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melakukan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Perhitungan Subsidi Listrik Tahun Anggaran 2021 pada PT PLN (Persero), Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.
c. Badan Pengawasan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melakukan pemeriksaan pendahuluan atas kepatuhan pengelolaan pendapatan dan biaya penyediaan tenaga listrik Tahun 2020 sampai dengan Semester I 2022 pada PT PLN (Persero), anak perusahaan, dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta.
d. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan Reviu Atas Peningkatan Penggunaan produk Dalam Negeri (P3DN) Dalam Rangka Bangga Buatan Indonesia (BBI) Pada PT Pembangkitan Jawa Bali.
e. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan Penilaian Tingkat Maturitas Penerapan Manajemen Risiko Pada PT Pembangkitan Jawa Bali Tahun Buku 2021.

d. Dated June 7, 2022, the Internal Audit Unit and Audit Committee have held a Three-Lines Model review meeting for the audit findings of UBJOM Tanjung Awar-Awar 2022.

e. Dated August 19, 2022, the Internal Audit Unit and the Audit Committee have held a Meeting to Discuss the Internal Audit Unit Activity Report (LKSPI) for the Second Quarter of 2022.

f. Dated October 24, 2022, the Internal Audit Unit and the Audit Committee have held a Meeting to Discuss the Internal Audit Unit Activity Report (LKSPI) for the Third Quarter of 2022.

The IAU also conducted Counterparting functions to external auditors throughout 2022, with the following activities:

a. Implementation of an opening meeting on September 19, 2022 with Public Accounting Firm Tanudirejda, Wibisana, Rintis & Partners (KAP PwC) related to the audit activity of the Company's Consolidated Financial Statements, Financial Statements and Implementation of the MSE Funding Program, Compliance with Laws and Regulations and Internal Control, Evaluation of the Company's Performance (Soundness Level) and Key Performance Indicators (KPIs) as well as other attestation/non-attestation services for the 2022 Financial Year period.
b. The Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI) conducted an Audit with Certain Objectives on Electricity Supply Business Activities and Electricity Subsidy Calculation for the 2021 Fiscal Year at PT PLN (Persero), Subsidiaries, and Other Related Agencies in DKI Jakarta, West Java, Central Java, Yogyakarta, East Java, North Sumatra, Riau, Riau Islands, South Sumatra, Jambi, Bengkulu, South Kalimantan, South Sulawesi, North Sulawesi, Southeast Sulawesi, Central Sulawesi, Gorontalo, Bali, West Nusa Tenggara, Maluku, North Maluku, Papua and West Papua.
c. The Finance Supervisory Agency of the Republic of Indonesia (BPK RI) conducted a preliminary examination of compliance with the management of revenue and expenses for providing electricity from 2020 to the First Semester of 2022 at PT PLN (Persero), subsidiaries, and other related agencies in DKI Jakarta.
d. The Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) conducted a Review of the Increased Use of Domestic Products (P3DN) in the Context of Proudly Made in Indonesia (BBI) at PT Pembangkitan Jawa Bali.
e. The Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) conducted an Assessment of the Maturity Level of Risk Management Implementation at PT Pembangkitan Jawa Bali for the 2021 Financial Year.

f. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan Evaluasi atas Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2021 sampai dengan Triwulan I Tahun 2022.
g. Satuan Pengawasan Intern PT PLN (Persero) melakukan audit atas subsidi listrik Tahun Anggaran 2022.

3. Peran Sebagai Konsultan dan Katalis

Peran Satuan Pengawasan Internal sebagai *Consultant* dan *Catalyst* dilakukan melalui pemberian saran dan masukan kepada Unit Pembangkitan/ Pemeliharaan/Sub Direktorat/ Badan/Anak Perusahaan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas operasional khususnya terkait dengan pencapaian kinerja dan optimalisasi sumber daya.

4. *Monitoring* Tindak Lanjut Hasil Audit

Satuan Pengawasan Internal melakukan *monitoring* atas tindak lanjut hasil audit dan dilaporkan secara berkala kepada Direksi dan Komite Audit. Rekapitulasi atas pemantauan tindak lanjut hasil audit tahun 2022 adalah sebagai berikut:

f. The Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) conducted an Evaluation of the Development of New Renewable Energy and Reduction of Greenhouse Gas Emissions from 2021 to the First Quarter of 2022.
g. The Internal Audit Unit of PT PLN (Persero) conducted an audit of electricity subsidies for the 2022 fiscal year.

3. Role as Consultant and Catalyst

The role of the Internal Audit Unit as a Consultant and Catalyst is conducted through providing advice and input to the Generation Unit/Maintenance Unit/Sub Directorate/Agency/Subsidiary for the optimization of the implementation of operational tasks, especially related to performance achievement and optimization of resources.

4. Monitoring Follow-up of Audit Results

The Internal Audit Unit monitors the follow-up of audit results, and it is reported regularly to the Board of Directors and the Audit Committee. A recapitulation of the monitoring of follow-up on audit results in 2022 is as follows:

Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Audit Signifikan
Recapitulation of Follow-up on Significant Audit Results

Tahun Year	Status Awal Initial Status		Status Akhir Final Status		Persentase Penyelesaian Percentage of Completion	
	Temuan Findings	Deskripsi Description	Temuan Findings	Deskripsi Description	Temuan Findings	Deskripsi Description
2018	86	259	0	0	100%	100%
2019	85	283	0	0	100%	100%
2020	71	228	0	0	100%	100%
2021	73	229	0	0	100%	100%
2022	61	211	0	0	100%	100%

Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Audit Tujuan Tertentu
Recapitulation of the Follow-up on Significant Audit Result

Tahun Year	Status Awal Initial Status		Status Akhir Final Status		Persentase Penyelesaian Percentage of Completion	
	Temuan Findings	Deskripsi Description	Temuan Findings	Deskripsi Description	Temuan Findings	Deskripsi Description
2022	5	12	1	2	80%	84%

Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Audit Eksternal Tahun 2022

Recapitulation of the Follow-up on External Audit Results in 2022

No.	Auditor Eksternal External Auditor	Temuan Findings	Selesai Settled	Monitor	Persentase Penyelesaian Percentage of Completion
1	BPK RI	-	-	-	-
2	BPKP Finance and Development Supervisory Agency	3	3	0	100%
3	KAP Public Accounting Firm	-	-	-	-
4	Bea Cukai Customs and Excise	2	2	0	100%
5	SPI PLN Internal Audit Unit of PLN	-	-	-	-

5. Program Pengembangan Auditor Satuan Pengawasan Internal

Program pengembangan auditor dilaksanakan untuk peningkatan mutu dan kompetensi auditor dalam menunjang pelaksanaan tugas SPI. Auditor SPI mengikuti diklat berjenjang untuk memperoleh sertifikat *Qualified Internal Auditor* (QIA) atau sertifikat kompetensi lainnya, seminar dan lokakarya internal audit sepanjang tahun 2022 sebagai berikut:

5. Auditor Development Program of the Internal Audit Unit

The auditor development program is carried out to improve the quality and competence of auditors in supporting the implementation of the IAU's duties. The IAU auditors participated in tiered training to obtain Qualified Internal Auditor (QIA) certificates or other competency certificates, seminars and internal audit workshops throughout 2022 as follows:

Program Pengembangan Auditor Satuan Pengawasan Internal

Auditor Development Program of the Internal Audit Unit

No.	Pelatihan Training	Jumlah Auditor Number of Auditors	Tanggal Date
Triwulan I Quarter I			
1	*Lead Auditor* ISO 27001	3	10-14 Januari 2022 January 10-14, 2022
2	QIA Tingkat Dasar Basic Level QIA	6	7-18 Februari 2022 February 7-18, 2022
3	*Lead Auditor* ISO 21001	3	21-25 Februari 2022 February 21-25, 2022
4	Pengadaan Barang dan Jasa Goods and Services Procurement	2	7-11 Maret 2022 March 7-11, 2022
5	Sertifikasi AK3 Umum AK3 General Certification	2	14-25 Maret 2022 March 14-25, 2022
6	Audit Internal & Forensik Internal & Forensic Audit	1	7-9 Maret 2022 March 7-9, 2022
7	*Internal Control Financial Report*	12	21 Maret 2022 March 21, 2022
8	*Lead Auditor* ISO 22301	3	28 Maret-8 April 2022 March 28-April 8, 2022
9	QIA Tingkat Lanjutan Advanced Level QIA	2	7-18 Maret 2022 March 7-18, 2022
Triwulan II Quarter II			
10	Internal Control Financial Report	1	11 April 2022 April 11, 2022
11	ISO 37001 Compliance Management	3	4-8 April 2022 April 4-8, 2022
12	Pelaksanaan Pengadaan Procurement Implementation	4	18-29 April 2022 April 18-29, 2022
13	QIA Tingkat Manajerial Managerial Level QIA	5	6-14 Juni 2022 June 6-14, 2022
14	QIA Tingkat Lanjutan Advanced Level QIA	3	6-17 Juni 2022 June 6-17, 2022
15	QIA Tingkat Dasar Basic Level QIA	3	6-17 Juni 2022 June 6-17, 2022

No.	Pelatihan Training	Jumlah Auditor Number of Auditors	Tanggal Date
16	*Data Analytics*	1	9-11 Mei 2022 May 9-11, 2022
17	ISO 20000-1 IT **Service Management**	2	5-12 Mei 2022 May 5-12, 2022
18	Konferensi Auditor Internal, Wisuda Sertifikasi Profesi dan Munas FKSPI 2022 Internal Auditor Conference, Professional Certification Graduation and FKSPI National Conference 2022	2	23-25 Mei 2022 May 23-25, 2022
Triwulan III Quarter III			
19	ISO 37001 Manajemen Anti Suap ISO 37001 Anti-Bribery Management	4	4-8 Juli 2022 July 4-8, 2022
20	*Effective Communication & Negotiation Skill*	1	18-19 Juli 2022 July 18-19, 2022
21	Ekspor Impor & Kepabeanan Export Import & Customs	5	28-29 Juli 2022 July 28-29, 2022
22	QIA Tingkat Dasar Basic Level QIA	1	22 Agustus- 2 September 2022 August 22-September 2, 2022
23	QIA Tingkat Lanjutan Advanced Level QIA	7	1-12 Agustus 2022 August 1-12, 2022
24	QIA Tingkat Manajerial Managerial Level QIA	7	5-14 September 2022 September 5-14, 2022
25	ISO 37002 *Whistleblowing System*	7	8-9 September 2022 September 8-9, 2022
26	Pembekalan *Certified Fraud Examiner* Certified Fraud Examiner Briefing	2	19-23 September 2022 September 19-23, 2022
27	Manajemen Risiko Risk Management	6	30 September 2022 September 30, 2022
28	GRC *Summit / Webinar*	2	5 September 2022 September 5, 2022
Triwulan IV Quarter IV			
29	Lead Auditor ISO 50001 EMS	4	3-7 Oktober 2022 October 3-7, 2022
30	Seminar Nasional Internal Audit National Seminar on Internal Audit	1	13-14 Oktober 2022 October 13-14, 2022
31	*Feasibility Study*	1	19-21 Oktober 2022 October 19-21, 2022
32	*Stakeholder Management*	1	24-25 Oktober 2022 October 24-25, 2022
33	*Lead Auditor* ISO 55001	2	17-21 Oktober 2022 October 17-21, 2022
34	QIA Tingkat Dasar Basic Level QIA	1	7-18 November 2022 November 7-18, 2022
35	QIA Tingkat Lanjutan Advanced Level QIA	4	7-18 November 2022 November 7-18, 2022
36	QIA Tingkat Manajerial Managerial Level QIA	7	21-30 November 2022 November 21-30, 2022
37	*National Anti Fraud Conference*	2	1-2 Desember 2022 December 1-2, 2022
38	Seminar FKSPI FKSPI Seminar	2	22-23 Desember 2022 December 22-23, 2022
39	*Audit Management System* 2.0	1	28 November-2 Desember 2022 November 28-December 2, 2022
40	CIA *Review Course*	2	21 November-2 Desember 2022 November 21-December 2, 2022
41	Resertifikasi ERMAP/ERMCP ERMAP/ERMCP Recertification	2	19-23 Desember 2022 December 19-23, 2022
42	*Business Development*	4	5-7 Desember 2022 December 5-7, 2022
43	*Marketing Skills*	1	10-11 November 2022 November 10-11, 2022

Quality Assurance Review Audit Internal

Quality Assurance Review of Internal Audit

International Professional Practices Framework (IPPF) menjadi salah satu acuan Satuan Pengawasan Internal dalam pelaksanaan fungsi audit internal Perusahaan. IPPF Standar 1300 mengatur bahwa pelaksanaan *Quality Assurance Review Internal* terhadap program jaminan kualitas dan peningkatan fungsi audit internal secara keseluruhan harus dilakukan setiap tahun melalui *self assessment*, sedangkan secara eksternal harus dilakukan setiap 5 (lima) tahun oleh asesor yang independen.

Quality Assurance Review oleh asesor independen telah dilaksanakan pada tahun 2018. PT BAI ditunjuk dan ditetapkan untuk melaksanakan *Quality Assurance Review* berdasarkan Surat Perintah Kerja dari Kepala Bidang Umum dan Administrasi Nomor: 347.SPK/061/BMUM/2018 tanggal 24 Oktober 2018. Pada tahun 2022, SPI melaksanakan *Quality Assurance Review* secara *self assessment* yang diselesaikan pada tanggal 12 Desember 2022. Hasil observasi dan evaluasi atas 4 (empat) aspek dari praktik-praktik audit internal, yaitu aspek tata kelola, manajemen audit internal, pengelolaan staf auditor dan pelaksanaan aktivitas audit internal berdasarkan standar IPPF 2017 menunjukan bahwa secara keseluruhan SPI PJB telah memenuhi Standar dan Kode Etik *The Institute of Internal Auditors* (IPPF 2017).

The International Professional Practices Framework (IPPF) is one of the references for the Internal Audit Unit in the implementation of the Company's internal audit function. The IPPF Standard 1300 regulates that the implementation of Internal Quality Assurance Review of the quality assurance program and improvement of the overall internal audit function must be carried out annually through self-assessment, while externally, it must be conducted every 5 (five) years by an independent assessor.

Quality Assurance Review by an independent assessor has been carried out in 2018. PT BAI was appointed and determined to carry out the Quality Assurance Review based on a Work Order from the Head of General and Administrative Affairs Number: 347.SPK/061/BMUM/2018 dated October 24, 2018. In 2022, the IAU carried out a Quality Assurance Review by self-assessment which was completed on December 12, 2022. The results of observation and evaluation of 4 (four) aspects of internal audit practices, namely aspects of governance, internal audit management, management of auditor staff and implementation of internal audit activities based on the IPPF 2017 standard show that overall PJB IAU has met the Standards and Code of Ethics of the Institute of Internal Auditors (IPPF 2017).

Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

Sistem Pengendalian Internal merupakan serangkaian proses, kebijakan, dan prosedur yang menyeluruh, saling berkaitan dan berkesinambungan pada setiap tindakan dan kegiatan baik individu maupun kelompok mulai pimpinan dan seluruh pegawai dalam rangka memastikan tercapainya tujuan Perusahaan. Sistem Pengendalian Internal sebagai sebuah proses yang integral melibatkan seluruh jenjang organisasi Perusahaan dan didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi serta pengamanan aset Perusahaan.

The Internal Control System is a series of processes, policies and procedures that are comprehensive, interrelated and continuous in every action and activity of both individuals and groups, starting from the leaders and all employees in order to ensure the achievement of the Company's objectives. The Internal Control System as an integral process involves all levels of the Company's organization and is designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial statements, efficiency and effectiveness of operations, compliance with laws and regulations as well as securing the Company's assets.

Kerangka Kerja Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System Framework

Internal Control-Integrated Framework yang ditetapkan COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) menjadi salah satu acuan dalam penyusunan kebijakan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan. Kebijakan Sistem Pengendalian Internal ditetapkan dalam Peraturan Direksi PT Pembangkitan Jawa – Bali No.0039.P/019/DIR/2022 tentang Pedoman Pelaksana Audit Internal PT Pembangkitan Jawa Bali dan Peraturan Direksi PT Pembangkitan Jawa – Bali No.0006.P/019/DIR/2022 tentang Peraturan Pelaksana Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi PT Pembangkitan Jawa – Bali. Kerangka kerja Sistem Pengendalian Internal Perusahaan mengacu kepada kebijakan yang ditetapkan Perusahaan dengan mengadopsi prinsip-prinsip Internal *Control-Integrated Framework* serta Manajemen Risiko Terintegrasi – *Three Lines Model*.

The Internal Control-Integrated Framework determined by COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) is one of the references in the preparation of the Company's Internal Control System policy. The Internal Control System policy is stipulated in the Regulation of the Board of Directors of PT Pembangkitan Jawa - Bali No.0039.P/019/DIR/2022 concerning Guidelines for Internal Audit Executors of PT Pembangkitan Jawa - Bali, and Regulation of the Board of Directors of PT Pembangkitan Jawa - Bali No.0006.P/019/DIR/2022 concerning Executors Regulation of Integrated Risk Management Implementation of PT Pembangkitan Jawa - Bali. The framework of the Company's Internal Control System refers to the policies determined by the Company by adopting the principles of the Internal Control-Integrated Framework and Integrated Risk Management - Three Lines Model.

Internal Control-Integrated Framework

Prinsip-prinsip *Internal Control-Integrated Framework* yang mencakup lima komponen penunjang pengendalian internal yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan (*monitoring*). Sistem Pengendalian Internal Perusahaan sejalan dan memperhatikan lima komponen tersebut dalam penerapannya. Lingkungan pengendalian dibangun dengan membentuk sikap dan kesadaran akan pentingnya pengendalian internal. Pengelolaan risiko diterapkan dengan mengidentifikasi, menganalisis & evaluasi, menilai serta menentukan langkah penanggulangan risiko usaha yang relevan. Perusahaan memastikan pembagian tugas dan tanggung jawab untuk kegiatan terkait; penggunaan wewenang secara tepat untuk melakukan suatu kegiatan serta pembuatan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai.

The principles of the Internal Control-Integrated Framework which includes five supporting components of internal control including the control environment, risk assessment, control procedures, information and communication as well as monitoring. The Company's Internal Control System is in line with and takes into account these five components in its implementation. The control environment is established by building attitudes and awareness of the importance of internal control. Risk management is applied by identifying, analyzing & evaluating, assessing and determining relevant business risk management steps. The Company ensures the division of duties and responsibilities for related activities; appropriate use of authority to conduct an activity, as well as the creation and use of adequate documents and records. Related to information and communication, PJB has provided media such as

Terkait informasi dan komunikasi, PJB telah menyediakan media diantaranya melalui Rapat Kerja, Rapat Koordinasi, sosialisasi, email, *website* Perusahaan, intranet, portal dan media lainnya. Pemantauan dilakukan secara berkala melalui *performance check* oleh Direktur Pembina Teknis, Audit Internal oleh Satuan Pengawasan Internal dan Fungsi Quality Assurance Audit Internal serta Audit oleh eksternal (BPK, BPKP dan KAP).

through Work Meeting, Coordination Meeting, socialization, email, Company website, intranet, portal and other media. Monitoring is carried out periodically through performance checks by the Technical Development Director, Internal Audit by the Internal Audit Unit and Internal Audit Quality Assurance Function as well as Audit by external (BPK, BPKP and KAP).

Three Lines Model

Kerangka kerja sistem pengendalian *Three Lines Model* membagi peran dan tanggung jawab menjadi 3 (tiga) lapis dalam organisasi yang melibatkan

1. Lini 1 (*Risk Owner*): melaksanakan Pengelolaan Risiko pada area tanggung jawabnya.
2. Lini 2 (Fungsi Manajemen Risiko/Risk Unit dan fungsi kepatuhan): bersama dengan unit kerja lainnya menjalankan mekanisme 4EP dan mendukung para pihak di Lini 1 dalam melaksanakan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan Risiko yang dijalankan.
3. Lini 3 (Fungsi Audit Internal): melaksanakan pemeriksaan dan verifikasi atas keandalan kendali dan tindak lanjut terhadap Risiko yang berlangsung di Lini 1.

Pembagian peran, tugas dan tanggung jawab Model Tiga Lini mengacu pada proses bisnis dalam IMS 2.0 yang diterapkan saat ini dan tidak terbatas pada:

a. Lini 1

1. Melaksanakan sistem pengendalian internal sesuai dengan rancang bangun kriteria yang disusun oleh Lini 2.
2. Memastikan adanya lingkungan pengendalian (*control environment)* yang kondusif dalam menjalankan proses bisnis.
3. Menerapkan kebijakan manajemen risiko, yaitu memastikan identifikasi seluruh risiko, kecukupan mitigasi risiko dan memantau efektivitas tindak lanjutnya.

b. Lini 2

1. Memastikan efektivitas rancang bangun sistem pengendalian internal yang dilaksanakan oleh Lini 1.
2. Mereview rancang bangun sistem pengendalian internal secara periodik sesuai kebutuhan mempertimbangkan usulan Lini 1 dan rekomendasi Lini 3.
3. Melakukan fungsi pembinaan, supervisi, pengendalian, sosialisasi, koordinasi dan evaluasi atas proses dan hasil kepada Lini 1.
4. Membina, mengarahkan, dan memantau pelaksanaan manajemen risiko sesuai Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Perusahaan.

The Three Lines Model control system framework divides roles and responsibilities into 3 (three) layers in the organization involving

1. Line 1 (Risk Owner): carrying out Risk Management in their area of responsibility.
2. Line 2 (Risk Management Function/Risk Unit and compliance function): carrying out the 4EP mechanism and supporting the parties in Line 1 together with other work units in carrying out and improving the effectiveness of the Risk management.
3. Line 3 (Internal Audit Function): carrying out checks and verifications on the reliability of controls and follow-up on Risks occurring in Line 1.

The division of roles, duties and responsibilities of the Three-Line Model refers to the business processes in the current IMS 2.0 and is not limited to:

a. Line 1

1. Carrying out the internal control system in accordance with the design criteria prepared by Line 2.
2. Ensuring a conducive control environment in carrying out business processes.
3. Implementing risk management policies, namely ensuring the identification of all risks, the adequacy of risk mitigation and monitoring the effectiveness of follow-up.

b. Line 2

1. Ensuring the effectiveness of the internal control system design carried out by Line 1.
2. Reviewing the design of the internal control system periodically as needed considering Line 1 proposals and Line 3 recommendations.
3. Conducting functions of guidance, supervision, control, socialization, coordination and evaluation of processes and results to Line 1.
4. Fostering, directing, and monitoring the implementation of risk management in accordance with the Risk Management Implementation Policy within the Company.

c. Lini 3

1. Melakukan audit berbasis risiko untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal yang dilaksanakan oleh Lini 1 dan Lini 2 telah berjalan efektif.
2. Memberikan rekomendasi untuk memastikan adanya peningkatan kualitas secara berkelanjutan (*continuous improvement*) terhadap proses bisnis perusahaan.
3. Melakukan konsultasi dan pendampingan kepada *First* Lini 1 dan Lini 2 guna penyempurnaan sistem pengendalian internal berdasarkan hasil audit.

c. Line 3

1. Conducting risk-based audits to ensure that the internal control system carried out by Line 1 and Line 2 has been effective.
2. Providing recommendations to ensure continuous improvement of the Company's business processes.
3. Consulting and assisting First Line 1 and Line 2 in order to improve the internal control system based on the audit results.

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Operasional

Implementation of the Operational Internal Control System

Sistem Pengendalian Internal pada aspek operasional salah satunya bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas efektivitas dan efisiensi kegiatan fisik pengelolaan Perusahaan dalam rangka mencapai tujuan, terpercayanya informasi, dan terjaganya aset-aset perusahaan. Pengendalian Internal diimplementasikan sampai dengan level unit dan individu dengan memastikan aktivitas operasional yang dijalankan sesuai dengan *job desk* dan program kerja termasuk sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Setiap unit dan individu melakukan aktivitas operasional sesuai dengan prosedur dan program kerja termasuk sasaran kinerja yang telah ditetapkan, menganalisis risiko dan melakukan upaya mitigasi di level unit masing-masing serta memastikan pelaksanaannya berjalan secara optimal berdasarkan ketersediaan sumber daya dan hasil yang peroleh.

SPI melakukan audit pada unit dalam rangka memastikan aktivitas operasional berjalan sesuai dengan tujuan Perusahaan dan prosedur yang telah ditetapkan. Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan melakukan *update* profil risiko dan monitoring atas upaya mitigasi yang dijalankan pada aktivitas operasional Perusahaan. Direksi memperoleh laporan pelaksanaan tugas dari setiap unit termasuk Satuan Pengawasan Internal dan Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan dan melalui rapat dan laporan tertulis. Selain itu, Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan serta SPI secara khusus menyampaikan laporan berkala kepada Dewan komisaris serta berkoordinasi dengan Komite Audit dan Komite Manajemen risiko. Berdasarkan laporan yang diterima dari setiap unit, Direksi memberikan laporan tertulis melalui laporan manajemen dan membahas kinerja operasional melalui rapat Direksi dan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris juga secara rutin melakukan kunjungan ke unit-unit bisnis untuk memastikan kegiatan operasional berjalan dengan baik.

One of the objectives of the Internal Control System in the operational aspect is to provide adequate assurance of the effectiveness and efficiency of the Company's physical management activities in order to achieve goals, reliable information, and secure the Company's assets. Internal Control is implemented up to the unit and individual levels by ensuring that operational activities carried out are in accordance with job desks and work programs including predetermined performance targets. Each unit and individual conducts operational activities in accordance with procedures and work programs including predetermined performance targets, analyzes risks and conducts mitigation efforts at the level of their respective units as well as ensures optimal implementation based on the availability of resources and the results obtained.

The Internal Audit Unit (IAU) conducts audits on units in order to ensure that operational activities run in accordance with the Company's objectives and predetermined procedures. The Risk Management and Compliance Unit updates the risk profile and monitors the mitigation efforts carried out in the Company's operational activities. The Board of Directors receives reports on the implementation of duties from each unit, including the Internal Audit Unit and the Risk Management and Compliance Unit, through meetings and written reports. In addition, the Risk Management and Compliance Unit as well as the IAU specifically submit periodic reports to the Board of Commissioners and coordinate with the Audit Committee and Risk Management Committee. Based on the reports received from each unit, the Board of Directors provides written reports through management reports and discusses operational performance through the Board of Directors and Board of Commissioners meetings. The Board of Commissioners also regularly conducts visits to business units to ensure operational activities are running well.

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Keuangan

Implementation of the Financial Internal Control System

Pengendalian Internal atas aspek keuangan salah satunya melalui *Internal Controls Over Financial Reporting* (ICoFR) yang pelaksanaannya berada di bawah pengawasan pimpinan Perusahaan serta unit kerja terkait. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan efektivitas dan pelaksanaan atas pengendalian internal dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai terhadap kehandalan pelaporan keuangan, terpercayanya informasi, dan terjaganya aset-aset perusahaan. Implementasi dan pengembangan ICoFR memiliki 3 (tiga) tahapan proses yang terdiri dari penyusunan pedoman dan rancangan pengendalian, pengujian dan pemutakhiran rancangan pengendalian serta pelaksanaan penyusunan pernyataan berjenjang. Laporan ICoFR akan digunakan sebagai salah satu bentuk komitmen manajemen untuk memastikan integritas penyajian laporan keuangan Perusahaan yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai auditor eksternal yang ditunjuk oleh PT PLN (Persero).

One of the Internal Controls over financial aspects is through Internal Controls Over Financial Reporting (ICoFR), the implementation of which is under the supervision of the Company's leaders and related work units. This is conducted to ensure the effectiveness and implementation of internal controls in order to provide adequate assurance of the reliability of financial reporting, the trustworthiness of information, and the protection of the Company's assets. The implementation and development of ICoFR has 3 (three) stages of the process consisting of the preparation of guidelines and control design, testing and updating of control design as well as the implementation of the preparation of tiered statements. The ICoFR report will be used as a form of management commitment to ensure the integrity of the presentation of the Company's financial statements prepared by the Public Accounting Firm (KAP) as an external auditor appointed by PT PLN (Persero).

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Compliance with Laws and Regulations

Kepatuhan terhadap hukum, peraturan dan kontrak yang berlaku bagi Perusahaan merupakan tanggung jawab Direksi yang dalam penerapannya diturunkan kepada unit-unit terkait. Sebagai upaya dalam memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material, maka Perusahaan menunjuk auditor eksternal untuk melakukan pengujian terhadap kepatuhan Perusahaan atas pasal-pasal tertentu hukum peraturan dan kontrak. Hasil pengujian tersebut menunjukan bahwa Perusahaan mematuhi dalam semua hal yang material.

Compliance with laws, regulations and contracts applicable to the Company is the responsibility of the Board of Directors, which in its application is passed down to the relevant units. In an effort to obtain reasonable assurance that the financial statements are free from material misstatement, the Company appointed an external auditor to test the Company's compliance with certain articles of laws, regulations and contracts. The results of these tests show that the Company complies in all material respects.

Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Adequacy of the Internal Control System

Penerapan sistem pengendalian internal dievaluasi metode pengumpulan dan review dokumen, survei persepsi, *interview* dan observasi serta review analitis oleh auditor Internal maupun eksternal sesuai prosedur audit yang berlaku untuk memastikan kecukupan atas penerapannya. Satuan Pengawasan Internal (SPI) melakukan audit pada tingkatan aktivitas atas objek yang ditetapkan dalam Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) serta objek lain sebagai penugasan khusus dari pimpinan Perusahaan. Sedangkan secara entitas, audit dilakukan oleh Auditor Eksternal, yakni Kantor Akuntan Publik (KAP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

The implementation of the internal control system is evaluated by document collection and review methods, perception surveys, interviews and observations as well as analytical reviews by internal and external auditors in accordance with applicable audit procedures to ensure the adequacy of its implementation. The Internal Audit Unit (IAU) conducts audits at the activity level on objects determined in the Annual Audit Work Program (PKAT) and other objects as special assignments from the Company's leaders. While on an entity basis, audits are conducted by External Auditors, namely the Public Accounting Firm (KAP), the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) and the Audit Board (BPK).

Perusahaan juga melakukan asesmen pengendalian internal berdasarkan COSO 2013 sebagai evaluasi penerapan sistem pengendalian internal berdasarkan prinsip-prinsip *Internal Control-Integrated Framework* terhadap seluruh elemen pengendalian. Asesmen pengendalian internal tahun 2022 dilakukan secara korporat dengan mengambil sampling pada Unit Pembangkitan Gresik, Unit Pembangkitan Brantas, Unit *Maintenance Repair & Overhaul* (UMRO), UBJOM Tenayan dan Divisi/Bidang Kantor Pusat. Berdasarkan survei persepsi melalui kuesioner dan wawancara diperoleh hasil bahwa pengendalian internal di PLN NP secara umum sudah ada (*present*) dan berfungsi (*function*). Selain itu, terdapat rekomendasi terkait prinsip-prinsip atas elemen pengendalian internal agar dapat dilakukan peningkatan atas penerapannya.

The Company also conducts an internal control assessment based on COSO 2013 as an evaluation of the implementation of the internal control system based on the principles of the Internal Control-Integrated Framework on all control elements. The internal control assessment in 2022 was conducted corporately by sampling the Gresik Generating Unit, Brantas Generating Unit, Maintenance Repair & Overhaul Unit (UMRO), Tenayan UBJOM and Division/Field of Head Office. Based on a perception survey through questionnaires and interviews, the results show that internal control in PLN NP is generally present and functioning. In addition, there are recommendations related to the principles of internal control elements in order to be able to improve the implementation.

Direksi membuat pernyataan bahwa Direksi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dan penerapannya di dalam Perusahaan. Selain itu, Hasil audit berdasarkan Laporan Auditor Independen atas kepatuhan pengendalian internal tahun buku 2022 menunjukan bahwa Perusahaan mematuhi, dalam semua hal yang material. Atas hasil tersebut Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa sistem pengendalian internal Perusahaan dipandang cukup memadai.

The Board of Directors makes a statement that it is responsible for the internal control system and its implementation within the Company. In addition, the audit results based on the Independent Auditor's Report on internal control compliance for the 2022 financial year showed that the Company complied, in all material respects. Based on these results, the Board of Directors and Board of Commissioners stated that the Company's internal control system is considered adequate.

Auditor Eksternal
External Auditor

Audit laporan keuangan tahunan diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan keyakinan yang memadai mengenai akuntabilitas pelaporan keuangan dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Perusahaan melakukan audit laporan keuangan tahunan sebagai bagian dari sistem pengendalian pada tingkat entitas yang dibantu oleh auditor eksternal sebagai pihak independen.

Audits of annual financial statements are expected to provide accurate information and reasonable assurance regarding financial reporting accountability and conformity with generally accepted accounting principles and compliance with laws and regulations. The Company conducts annual financial statement audits as part of the control system at the entity level assisted by external auditors as independent parties.

Penunjukan auditor eksternal untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan memperhatikan ketentuan terkait pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas. Audit tersebut dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang 5 Februari 2008 tentang Praktik Akuntan Publik pada pasal 11.

The appointment of an external auditor to conduct an audit of financial statements takes into account the provisions related to the provision of general audit services for the financial statements of an entity. The audit is conducted by a Public Accounting Firm (KAP) for a maximum of 6 (six) consecutive financial years as regulated in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 20 of 2015 dated February 5, 2008 concerning Public Accountant Practices in article 11.

RUPS memberi kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan untuk tahun buku 2022 sebagaimana Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 2022 tanggal 27 Juni 2022. Dewan Komisaris menetapkan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagai auditor eksternal Perusahaan tahun buku 2022 sesuai dengan keputusan Pemegang Saham mayoritas berdasarkan surat 46372/KEU.02.04/D01060400/2022 pada tanggal 12 Agustus 2022 perihal Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Tahun 2022. Tahun buku 2022 merupakan periode penugasan yang ketiga bagi akuntan publik dan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dalam lima tahun terakhir.

The GMS grants authority to the majority Shareholders to determine the appointment of a Public Accounting Firm as the auditor who will audit the Company's Financial Statements, Performance Evaluation Report and Compliance Report for the 2022 fiscal year as the Resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS) for the 2022 fiscal year dated June 27, 2022. The Board of Commissioners determined KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners as the Company's external auditor for the 2022 fiscal year in accordance with the decision of the majority Shareholders based on letter 46372/KEU.02.04/D01060400/2022 on August 12, 2022 regarding the Implementation of the Audit of Financial Statements for the 2022 fiscal year. The 2022 financial year is the third assignment period for public accountants and KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners in the last five years.

Jasa, Biaya dan Opini Audit
Audit Services, Fees and Opinions

Akuntan publik dan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan tidak memberikan jasa lain selain audit Laporan Keuangan Konsolidasian, Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan UMK, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal, Evaluasi Kinerja Perseroan (Tingkat Kesehatan) dan *Key Performance Indicator* (KPI) serta jasa atestasi/non atestasi lainnya untuk periode Tahun Buku 2022. Perusahaan selama 5 (lima) tahun terakhir secara konsisten mampu mempertahankan predikat opini audit yang menyatakan bahwa laporan keuangan Perusahaan telah disajikan secara "Wajar Tanpa Pengecualian" dalam semua hal yang material berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Public accountants and KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners do not provide other services other than auditing the Consolidated Financial Statements, Financial Statements and Implementation of the MSE Funding Program, Compliance with Laws and Regulations and Internal Control, Evaluation of the Company's Performance (Soundness Level) and Key Performance Indicator (KPI) as well as other attestation/non-attestation services for the 2022 Financial Year period. For the last 5 (five) years, the Company is consistently able to maintain the title of audit opinion stating that the Company's financial statements have been presented in an "Unqualified" manner in all material respects based on generally accepted accounting principles in Indonesia.

Audit Laporan Keuangan Perusahaan
Audit of Company's Financial Statements

Tahun Buku Fiscal Year	Akuntan Accountant	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Jasa yang Diberikan Service Provided	Jasa Lain Other Services	Biaya Audit Audit Fee (Rp)	Opini Audit Audit Opinion
2022	Yanto Kamarudin	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners	Laporan Keuangan Konsolidasi Consolidated Financial Statements	• Laporan Evaluasi Kinerja • Laporan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal. • Report on Performance Evaluation • Report on Compliance with Laws and Regulations and Internal Control.	4.630.381.000	Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified
2021	Yanto Kamarudin	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners	Laporan Keuangan Konsolidasi Consolidated Financial Statements	• Laporan Evaluasi Kinerja • Laporan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal. • Report on Performance Evaluation • Report on Compliance with Laws and Regulations and Internal Control.	4.071.254.000	Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified

Tahun Buku Fiscal Year	Akuntan Accountant	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Jasa yang Diberikan Service Provided	Jasa Lain Other Services	Biaya Audit Audit Fee (Rp)	Opini Audit Audit Opinion
2020	Yanto Kamarudin	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners	Laporan Keuangan Konsolidasi Consolidated Financial Statements	• Laporan Evaluasi Kinerja • Laporan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal. • Report on Performance Evaluation • Report on Compliance with Laws and Regulations and Internal Control.	4.832.250.000	Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified
2019	Dedy Sukrisnadi	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners	Laporan Keuangan Konsolidasi Consolidated Financial Statements	• Laporan Evaluasi Kinerja • Laporan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal. • Report on Performance Evaluation • Report on Compliance with Laws and Regulations and Internal Control.	1.507.900.000	Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified
2018	Saptoto Agustomo	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners	Laporan Keuangan Konsolidasi Consolidated Financial Statements	• Laporan Evaluasi Kinerja • Laporan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal. • Report on Performance Evaluation • Report on Compliance with Laws and Regulations and Internal Control.	1.200.500.000	Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified

Audit Eksternal Lainnya
Other External Audits

Selain general audit, pelaksanaan audit eksternal juga dilakukan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dan permintaan dari Pemegang Saham. Audit eksternal lainnya yang dilakukan sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melakukan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Perhitungan Subsidi Listrik Tahun Anggaran 2021 pada PT PLN (Persero), Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat melalui Surat Tugas No.5/ST/I/01/2022 tanggal 7 Januari 2022. Audit dilaksanakan 60 hari sejak tanggal surat tugas.
b. Badan Pengawasan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) berdasarkan surat tugas BPK RI No. 32/ST/IX-XX/07/2022 tanggal 15 Juli 2022 perihal pemeriksaan pendahuluan atas kepatuhan pengelolaan Pendapatan dan Biaya penyediaan tenaga listrik Tahun 2020 sampai dengan Semester I 2022 pada PT PLN (Persero), anak perusahaan, dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta melalui surat dari PT PLN (Persero) No.

In addition to general audits, the implementation of external audits is also conducted in accordance with the needs of the Company and requests from Shareholders. Other external audits conducted throughout 2022 were as follows:

a. The Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI) conducted an Audit with Specific Purposes on Electricity Supply Business Activities and Electricity Subsidy Calculation for the 2021 Fiscal Year at PT PLN (Persero), Subsidiaries, and Other Related Agencies in DKI Jakarta, West Java, Central Java, Yogyakarta, East Java, North Sumatra, Riau, Riau Islands, South Sumatra, Jambi, Bengkulu, South Kalimantan, South Sulawesi, North Sulawesi, Southeast Sulawesi, Central Sulawesi, Gorontalo, Bali, West Nusa Tenggara, Maluku, North Maluku, Papua and West Papua through Assignment Letter No. 5/ST/I/01/2022 dated January 7, 2022. The audit was carried out 60 days from the date of the assignment letter.
b. The Finance Supervisory Agency of the Republic of Indonesia (BPK RI) based on BPK RI's assignment letter No. 32/ST/IX-XX/07/2022 dated July 15, 2022 regarding preliminary examination of compliance with the management of Revenues and Expenses for the provision of electricity in 2020 until the First Semester of 2022 at PT PLN (Persero), subsidiaries, and other related agencies in DKI Jakarta through a letter from

51173/SPI.02.01/D01000200/2022 tanggal 2 September 2022 perihal Permintaan Data Pemeriksaan Pendahuluan atas Kepatuhan Pengelolaan Pendapatan dan Biaya Penyediaan Tenaga Listrik Tahun 2022 sampai dengan Semester 1 Tahun 2022.

c. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST-393/PW13/4/2022 tanggal 10 Mei 2022 akan melakukan Reviu Atas Peningkatan Penggunaan produk Dalam Negeri (P3DN) Dalam Rangka Bangga Buatan Indonesia (BBI) Pada PT Pembangkitan Jawa Bali.

d. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST-806/PW13/4/2022 tanggal 8 Agustus 2022 akan melakukan Penilaian Tingkat Maturitas Penerapan Manajemen Risiko Pada PT Pembangkitan Jawa Bali Tahun Buku 2021.

e. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan Surat BPKP No. S-139/D4/04/2022 tanggal 8 Februari 2022 perihal Evaluasi atas Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2021 sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 dengan Surat Tugas BPKP No.ST-82/D404/2/2022 melalui surat PT PLN (Persero) Nomor: 54513/SPI.02.02/D01000200/2022 tanggal 19 September 2022 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Uji Petik BPKP atas Monitoring Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2022.

PT PLN (Persero) No. 51173/SPI.02.01/D01000200/2022 dated September 2, 2022 regarding Request for Preliminary Examination Data on Compliance with the Management of Revenues and Expenses for the Provision of Electricity in 2022 until the First Semester of 2022.

c. The Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) based on Assignment Letter Number: ST-393/PW13/4/2022 dated May 10, 2022 will conduct a Review of the Increased Use of Domestic Products (P3DN) in the Context of Proudly Made in Indonesia (BBI) at PT Pembangkitan Jawa Bali.

d. The Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) based on Assignment Letter Number: ST-806/PW13/4/2022 dated August 8, 2022 will conduct a Maturity Level Assessment of Risk Management Implementation at PT Pembangkitan Jawa Bali for the 2021 Financial Year.

e. The Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) based on BPKP Letter No. S-139/D4/04/2022 dated February 8, 2022 regarding Evaluation of the Development of New Renewable Energy and Reduction of Greenhouse Gas Emissions in 2021 until the First Quarter of 2022 with BPKP Assignment Letter No. ST-82/D404/2/2022 through PT PLN (Persero) letter Number: 54513/SPI.02.02/D01000200/2022 dated September 19, 2022 regarding Notification of BPKP Examination Test Implementation on Monitoring the Development of New Renewable Energy and Reduction of Greenhouse Gas Emissions in 2022.

Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal

Evaluation of the Effectiveness of External Audit Implementation

Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan pengawasan atas pelaksanaan audit eksternal. Direksi dibantu Satuan Pengawasan Internal dan unit terkait lainnya melakukan fungsi counterparting atas pelaksanaan audit eksternal dan memastikan pemenuhan dokumen dan data yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan audit eksternal. Komite Audit melakukan pengawasan dan koordinasi selama pelaksanaan proses audit eksternal melalui pertemuan secara rutin dengan Kantor Akuntan Publik dan Auditor lainnya untuk membahas progress pelaksanaan dan temuan atas pemeriksaan yang dilakukan serta melakukan evaluasi atas kualitas proses audit. Komite Audit berkoordinasi dengan Satuan Pengawasan Internal untuk melakukan telaah atas efektivitas pelaksanaan audit eksternal serta memastikan bahwa seluruh temuan dapat ditindaklanjuti dan memberikan nilai tambah bagi Perusahaan.

The Board of Commissioners through the Audit Committee supervises the implementation of external audits. The Board of Directors, assisted by the Internal Audit Unit and other related units, conducts counterparting functions for the implementation of external audits and ensures the fulfillment of documents and data required in supporting the implementation of external audits. The Audit Committee conducts supervision and coordination during the implementation of the external audit process through regular meetings with the Public Accounting Firm and other Auditors to discuss the progress of the implementation and findings of the audit conducted as well as to evaluate the quality of the audit process. The Audit Committee coordinates with the Internal Audit Unit to review the effectiveness of the external audit implementation and ensure that all findings can be followed-up and provide added value to the Company.

Manajemen Risiko
Risk Management

Keberlanjutan Perusahaan sangat bergantung dengan bagaimana Perusahaan mampu mengelola risiko yang dihadapi baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan kegiatan bisnis yang dijalankan. Oleh karena itu, manajemen risiko masuk sebagai salah satu elemen sistem pengendalian internal. Manajemen risiko didesain untuk dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan secara efektif serta mengalokasikan dan menggunakan sumber daya untuk mengelola risiko yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Perusahaan demi memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Perusahaan secara berkala mereview seluruh risiko untuk menghasilkan risiko utama sesuai dengan *risk appetite* dalam menyusun profil risiko berdasarkan sasaran tahunan dan *strategic objective* jangka panjang Perusahaan. Profil risiko dikaji secara komprehensif oleh Direksi sebagai *risk owner* utama dan dikomunikasikan Kepada Dewan Komisaris.

The Company sustainability is significantly dependent on how the Company is able to manage the risks faced both directly and indirectly related to the business activities carried out. Therefore, risk management is included as one of the elements of the internal control system. Risk management is designed to be able to effectively identify opportunities and threats that affect the Company's business activities as well as allocate and use resources to manage the risks faced in order to support the achievement of the Company's objectives to provide added value to stakeholders, both short and long term. The Company periodically reviews all risks to generate key risks in accordance with the risk appetite in preparing a risk profile based on the Company's annual targets and long-term strategic objectives. The risk profile is comprehensively reviewed by the Board of Directors as the main risk owner and communicated to the Board of Commissioners.

Kebijakan Manajemen Risiko
Risk Management Policy

Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan disusun dengan mengacu pada standar ISO 31000:2018 (*Risk management - Guidelines*) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PJB Nomor : 005.K/021/DIR/2020 dan Nomor : 008.K/DK-PJB/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan PT Pembangkitan Jawa Bali tanggal 27 Juli 2020 sebagai pemutakhiran atas Keputusan Direksi No. 128.K/010/DIR/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan PT Pembangkitan Jawa Bali. Selain itu, Perusahaan juga menetapkan Peraturan Direksi Nomor: 0030.P/019/DIR/2021 tentang Penerapan *Governance, Risk Management and Compliance* (GRC) di Lingkungan PT PJB dan Keputusan Direksi Nomor: 0035.K/020/DIR/2021 tentang penetapan *Risk Appetite Statement* (RAS) untuk mendukung implementasi manajemen risiko. Kebijakan Manajemen Risiko ditinjau ulang secara berkala sesuai dengan kebijakan, *best practices* serta skala organisasi dan bisnis yang dijalankan Perusahaan.

The Company's Risk Management Policy was prepared by referring to the ISO 31000:2018 standard (Risk management - Guidelines) which was determined through the Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners of PJB No. 005.K/021/DIR/2020 and No. 008.K/DK-PJB/2020 concerning the Implementation of Risk Management within PT Pembangkitan Jawa Bali dated July 27, 2020 as an update to the Board of Directors Decree No. 128.K/010/DIR/2014 concerning the Implementation of Risk Management within PT Pembangkitan Jawa Bali. In addition, the Company also determines the Board of Directors Regulation No. 0030.P/019/DIR/2021 concerning the Implementation of Governance, Risk Management and Compliance (GRC) within PT PJB and the Board of Directors Decree No. 0035.K/020/DIR/2021 concerning the determination of Risk Appetite Statement (RAS) to support the implementation of risk management. The Risk Management Policy is reviewed periodically in accordance with policies, best practices and the scale of the organization and business run by the Company.

Sistem Manajemen Risiko

Risk Management System

Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi terstruktur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memperlakukan, dan memantau risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Perusahaan. Manajemen Risiko mencakup pengurusan aktif oleh Direksi dan pengawasan oleh Dewan Komisaris, kecukupan kebijakan dan standar prosedur Manajemen Risiko dan penetapan strategi Risiko serta kecukupan proses identifikasi, pengukuran, perlakuan, pencatatan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang didukung dengan sistem informasi Manajemen Risiko. Sistem Manajemen Risiko dirancang sebagai kerangka kerja dalam pengelolaan risiko dengan mekanisme yang mencerminkan siklus *Plan, Do, Check, Act* (PDCA). Kerangka Kerja Manajemen Risiko tersebut bersifat dinamis, terstruktur, terintegrasi dengan perbaikan berkesinambungan.

Risk Management is a structured set of procedures and methodologies used to identify, measure, treat and monitor risks arising from all of the Company's business activities. Risk Management includes active management by the Board of Directors and supervision by the Board of Commissioners, the adequacy of Risk Management policies and standard procedures and the determination of Risk strategies as well as the adequacy of identification, measurement, treatment, recording, monitoring, evaluation and reporting processes supported by the Risk Management information system. The Risk Management System is designed as a framework in risk management with a mechanism that reflects the Plan, Do, Check, Act (PDCA) cycle. The Risk Management Framework is dynamic, structured, integrated with continuous improvement.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko
Risk Management Framework

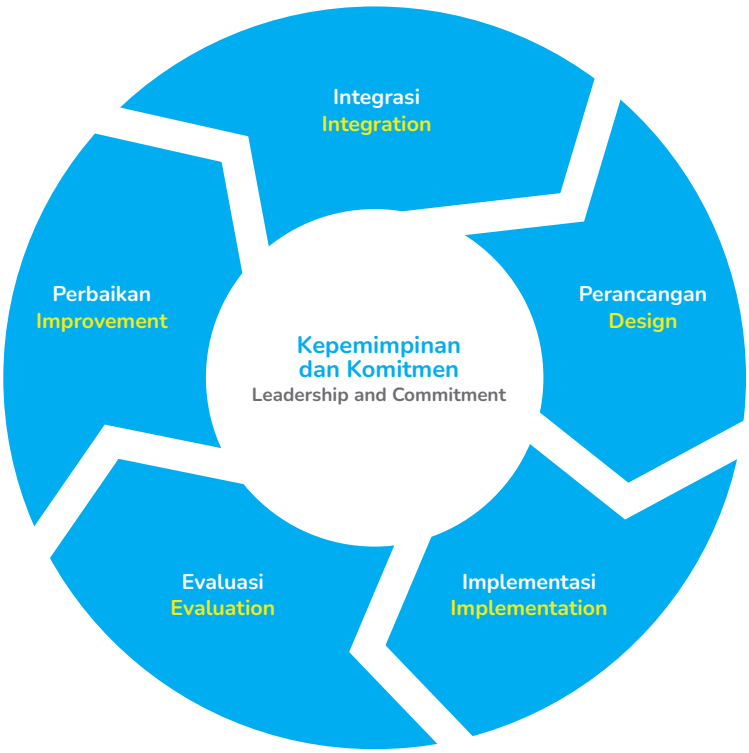

Kerangka Kerja Manajemen Risiko menjadi acuan dalam mengintegrasikan pengelolaan risiko kepada keseluruhan manajemen sehingga Perusahaan mampu menerapkan manajemen risiko secara efektif. Proses manajemen risiko dilakukan oleh *Risk Owner* yang dibantu oleh *Risk Officer* masing-masing Unit Kerja yang difasilitasi oleh Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Identifikasi dan penilaian risiko di lingkungan Perusahaan menggunakan pendekatan *Enterprise Risk Management* berbasis ISO 31000 : 2018. Pengelolaan risiko aset pembangkit dilakukan selaras dengan sistem manajemen aset PASS 55 – ISO 55000. Beberapa teknik *assessment* risiko untuk aset pembangkit seperti *Risk Evaluation and Prioritization* (REAP), *Failure Mode Effect Analysis* (FMEA), *Root Cause Failure Analysis* (RCFA), dan *Life Cycle Cost* (LCC) yang digunakan sebagai bahan pertimbangan investasi.

The Risk Management Framework serves as a reference in integrating risk management to the overall management so that the Company is able to implement risk management effectively. The risk management process is conducted by the Risk Owner assisted by the Risk Officer of each Work Unit facilitated by the Risk Management and Compliance Unit. Identification and assessment of risks within the Company uses the Enterprise Risk Management approach based on ISO 31000: 2018. Risk management of generating assets is conducted in line with the PASS 55 - ISO 55000 asset management system. Several risk assessment techniques for generating assets such as Risk Evaluation and Prioritization (REAP), Failure Mode Effect Analysis (FMEA), Root Cause Failure Analysis (RCFA), and Life Cycle Cost (LCC) are used as investment consideration materials.

Struktur dan Tanggung Jawab Manajemen Risiko
Structure and Responsibilities of Risk Management

Pengelolaan risiko Perusahaan merupakan mekanisme terintegrasi yang melibatkan setiap jenjang organisasi dalam Perusahaan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Perusahaan secara khusus membentuk fungsi pengelolaan risiko yang dijalankan oleh Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan melalui Bidang Risiko berkoordinasi dengan setiap jenjang organisasi mulai dari unit kerja sebagai pemilik risiko sampai dengan Dewan Komisaris termasuk Komite sebagai pelaksanaan fungsi Pengawasan serta berkoordinasi dengan Divisi Manajemen Risiko Strategis PT PLN (Persero) sebagai Divisi Pairing untuk implementasi Manajemen Risiko dalam pembuatan keputusan di setiap proses bisnis kritikal Perusahaan. Tanggung jawab pengelola risiko Perusahaan mengacu pada Peraturan Direksi Nomor 0006.P/019/DIR/2022 tentang Peraturan Pelaksana Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi PT Pembangkitan Jawa-Bali sebagai berikut:

The Company's risk management is an integrated mechanism that involves every level of organization in the Company in accordance with their respective responsibilities. The Company specifically establishes the risk management function carried out by the Risk Management and Compliance Unit. The Risk Management and Compliance Unit coordinates with every level of the organization starting from the work unit as the risk owner to the Board of Commissioners including the Committee as the implementation of the Supervisory function and coordinates with the Strategic Risk Management Division of PT PLN (Persero) as the Pairing Division for the implementation of Risk Management in decision making in every critical business process of the Company. The responsibilities of the Company's risk managers refer to the Board of Directors Regulation Number 0006.P/019/DIR/2022 concerning Regulations for Executors of the Implementation of Integrated Risk Management of PT Pembangkitan Jawa-Bali as follows:

Struktur dan Tanggung Jawab dalam Manajemen Risiko
Structure and Responsibilities in Risk Management

Pengelola Management	Tugas & Tanggung Jawab Duties & Responsibilities	
Dewan Komisaris Board of Commissioners	Peran dan kewenangan Dewan Komisaris sesuai dengan board manual dan anggaran dasar Perusahaan.	The roles and authorities of the Board of Commissioners are in accordance with the Board Manual and the Company's Articles of Association.

Pengelola Management	Tugas & Tanggung Jawab Duties & Responsibilities	
Direksi Board of Directors	• Pemegang mandat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk melaksanakan pengelolaan perusahaan, termasuk di dalamnya melaksanakan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi maupun praktik pengelolaan Risiko perusahaan, mulai dari perencanaan strategis hingga pada eksekusinya dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran perusahaan. • Menetapkan kebijakan dan arahan strategis penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi. • Memimpin penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan memberikan komitmen untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi serta menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam pengelolaan Risiko perusahaan di direktoratnya masing-masing. • Membangun dan memperkuat budaya Risiko perusahaan. • Menetapkan, mengelola, dan memantau Risiko Utama yang dihadapi perusahaan dalam pencapaian sasaran strategis perusahaan. • Mengambil keputusan pengelolaan Risiko sesuai batasan kewenangan yang berlaku di lingkungan perusahaan.	• Holder of the mandate of the General Meeting of Shareholders (GMS) to carry out the management of the Company, including to carry out the implementation of Integrated Risk Management and corporate risk management practices, starting from strategic planning to its execution in order to achieve the Company's targets. • Establishing policies and strategic directives for the implementation of Integrated Risk Management. • Leading the implementation of Integrated Risk Management and providing commitment to support the implementation of Integrated Risk Management as well as providing the resources needed in corporate Risk management in their respective directorates. • Establishing and strengthening the Company's risk culture. • Determining, managing, and monitoring the Main Risks faced by the Company in achieving the Company's strategic targets. • Making Risk management decisions in accordance with the limits of authority that apply within the Company.
Satuan Kerja Manajemen Risiko Risk Management Work Unit	• Sebagai penanggung jawab penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi perusahaan sesuai dengan desain kerangka kerja dan tata kelola Risiko, beserta upaya pengembangannya. • Sebagai pendamping dan *Checker/Reviewer*, dan Approval sesuai mekanisme pendelegasian wewenang terhadap penilaian Risiko maupun tindak lanjut Risiko perusahaan. • Sebagai pemberi masukan terhadap penilaian Risiko maupun tindak lanjut Risiko yang dijalankan oleh *Risk Leader* dan *Risk Champion* di Satuan Kerja, Unit. • Mengusulkan pembentukan entitas kerja untuk membantu Direksi dalam hal mengkoordinasikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi perusahaan untuk disetujui Direktur Pembina Manajemen Risiko (DPMR). • Mengusulkan rumusan arahan strategis penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi perusahaan maupun tata kelola Risiko perusahaan untuk disetujui Direktur Pembina Manajemen Risiko (DPMR). • Mengusulkan kebijakan dan strategi penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, termasuk di dalamnya kriteria Risiko perusahaan untuk disetujui Direktur Pembina Manajemen Risiko (DPMR). • Menyediakan rumusan target kinerja efektivitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi maupun praktik pengelolaan Risiko yang dijalankan perusahaan. • Melaksanakan evaluasi terhadap capaian kinerja pengelolaan Risiko secara berkala, serta pengembangan berkelanjutan Manajemen Risiko Terintegrasi. • Meminta informasi dari para pihak internal Perusahaan untuk kebutuhan penyusunan kajian Risiko, perumusan laporan Profil Risiko, dan efektivitas pengelolaan Risiko Perusahaan untuk dilaporkan kepada Direktur Pembina Manajemen Risiko (DPMR) serta informasi lain yang dibutuhkan Direktur Pembina Manajemen Risiko (DPMR) dalam menjalankan perannya.	• Serving as the person in charge of implementing the Company's Integrated Risk Management in accordance with the framework design and Risk governance, along with its development efforts. • Serving as a companion and Checker/Reviewer, and Approval in accordance with the mechanism of delegating authority to the Company's Risk assessment and Risk follow-up. • Serving as provider of input to the Risk assessment and Risk follow-up carried out by the Risk Leader and Risk Champion in the Work Unit/Unit. • Proposing the establishment of a work entity to assist the Board of Directors in terms of coordinating the implementation of the Company's Integrated Risk Management to be approved by the Supervisory Director of Risk Management (DPMR). • Proposing the formulation of strategic directives for the implementation of the Company's Integrated Risk Management and corporate risk governance to be approved by the Supervisory Director of Risk Management (DPMR). • Proposing policies and strategies for the implementation of Integrated Risk Management, including the Company's Risk criteria to be approved by the Supervisory Director of Risk Management (DPMR). • Providing the formulation of performance targets for the effectiveness of the implementation of Integrated Risk Management and Risk management practices carried out by the Company. • Evaluating the achievement of risk management performance on a regular basis, as well as the continuous development of Integrated Risk Management. • Requesting information from the Company's internal parties for the needs of preparing Risk studies, formulating Risk Profile reports, and the effectiveness of the Company's Risk management to be reported to the Supervisory Director of Risk Management (DPMR) and other information needed by the Supervisory Director of Risk Management (DPMR) in carrying out its role.

Pengelola Management	Tugas & Tanggung Jawab Duties & Responsibilities	
	• Merancang program peningkatan kapabilitas internal di bidang Manajemen Risiko, termasuk di dalamnya kesadaran dan budaya Risiko dalam menjalankan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, serta tingkat maturitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, sesuai kebutuhan perusahaan bersama fungsi kerja terkait.	• Designing internal capability improvement programs in the field of Risk Management, including Risk awareness and culture in carrying out the implementation of Integrated Risk Management, as well as the maturity level of Integrated Risk Management implementation, according to the needs of the Company with the relevant work functions.
Satuan Pengawas Internal Internal Audit Unit	• Berperan sebagai entitas kerja yang dibentuk Direksi untuk membantu direksi melaksanakan perannya sesuai mandat yang diberikan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), khususnya dalam melaksanakan fungsi audit internal Perusahaan. • Sebagai *reviewer* sekaligus *independent assurance provider* terhadap pelaksanaan penerapan manajemen Risiko terintegrasi dan praktik pengelolaan Risiko perusahaan. • Mengelola audit *universe* dalam rangka perumusan rencana audit internal tahunan. • Meminta informasi dari Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Fungsi Manajemen Risiko di Satuan Kerja/Unit serta auditee dalam rangka menjalankan perannya. • Melaksanakan fungsi audit internal, merumuskan laporan hasil audit internal, dan melaporkannya kepada Direktur Utama dan komite audit. • Meminta *auditee* untuk melaksanakan usulan tindakan perbaikan atau rekomendasi pengembangan berdasarkan hasil audit.	• Serving as a work entity established by the Board of Directors to assist the Board of Directors in carrying out its role in accordance with the mandate provided by the General Meeting of Shareholders (GMS), especially in carrying out the Company's internal audit function. • Serving as reviewer as well as independent assurance provider for the implementation of integrated risk management and corporate risk management practices. • Managing the audit universe in order to formulate the annual internal audit plan. • Requesting information from the Risk Management Work Unit and Risk Management Function in the Work Unit/Unit as well as the auditee in order to carry out its role. • Carrying out internal audit functions, formulating internal audit reports, and reporting them to the President Director and audit committee. • Requesting auditees to carry out proposed corrective actions or development recommendations based on audit results.
Risk Leader	• Sebagai *reviewer* dan *approver* atas: - Penilaian dan tindak lanjut Kajian Risiko dalam proses pengambilan keputusan kritikal; - Penilaian dan tindak lanjut Profil Risiko pada unit kerjanya - Penilaian dan tindak lanjut Risiko Operasional pada satuan kerjanya; dan - Pelaporan Risiko kepada atasan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. • Meminta laporan penilaian Risiko dan tindak lanjut Risiko, beserta informasi terkait lainnya dari *Risk Champion* pada unit kerjanya. • *Risk Leader* Satuan Kerja/Unit dapat meminta pendampingan dari Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Fungsi Manajemen Risiko Satuan Kerja/Unit dalam melaksanakan akuntabilitasnya. • Mengambil keputusan pengelolaan Risiko sesuai dengan batasan kewenangan yang berlaku.	• Serving as reviewer and approver of the following: - Assessment and follow-up of Risk Studies in critical decision-making processes; - Assessment and follow-up of Risk Profile in its work unit - Assessment and follow-up of Operational Risk in its work unit; and - Risk Reporting to superiors and the Risk Management Work Unit. • Requesting Risk assessment and Risk follow-up reports, along with other related information from the Risk Champion in his/her work unit. • The Risk Leader of the Work Unit/Unit may request assistance from the Risk Management Work Unit and the Risk Management Function of the Work Unit/Unit in carrying out its accountability. • Making Risk management decisions in accordance with applicable authority limits.
Risk Champion	• Berperan sebagai *Maker* atas: - penilaian dan tindak lanjut kajian Risiko dalam proses pengambilan keputusan kritikal. - penilaian dan tindak lanjut profil Risiko pada unit kerjanya; dan - pelaporan Risiko kepada *Risk Leader.* • Meminta informasi dari unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka menjalankan perannya. • Melaksanakan penilaian Risiko dan tindak lanjut Risiko serta merumuskan laporannya kepada *Risk Leader.* • *Risk Champion* Satuan Kerja/Unit dapat meminta pendampingan dari Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Fungsi Manajemen Risiko Satuan Kerja/Unit dalam melaksanakan akuntabilitasnya. • Mengambil keputusan pengelolaan Risiko pada unit kerjanya sesuai dengan batasan kewenangan yang berlaku.	• Taking role as a Maker of the following: - assessment and follow-up of risk studies in critical decision-making processes. - assessment and follow-up of Risk profiles in their work units; and - risk reporting to the Risk Leader. • Requesting information from the work unit under his/her responsibility in order to carry out his/her role. • Carrying out Risk assessment and Risk follow-up, and formulating reports to the Risk Leader. • The Risk Champion of the Work Unit/Unit may request assistance from the Risk Management Work Unit or the Risk Management Function of the Work Unit/Unit in carrying out its accountability. • Making Risk management decisions in their work unit in accordance with applicable authority limits.

Pengelola Management	Tugas & Tanggung Jawab Duties & Responsibilities	
Seluruh Karyawan Company Employee	• Mempelajari dan memahami kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi, serta mengimplementasikan proses Manajemen Risiko Terintegrasi dalam melakukan pekerjaan. • Mendokumentasikan proses bisnis yang ada di bidang/lingkup kewenangannya, permasalahan yang telah terjadi, dan Risiko yang berpotensi terjadi beserta pengendaliannya, serta melakukan *Control Self Assessment* (CSA) secara periodik sesuai ketentuan. • Memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan dan implementasi Manajemen Risiko Terintegrasi. • Menginformasikan Risiko yang terkait dengan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasannya.	• Studying and understanding the Integrated Risk Management policy, and implementing the Integrated Risk Management process in conducting work. • Documenting existing business processes in the field/scope of authority, issues that have occurred, and Risks that have the potential to occur along with their control, as well as conducting Control Self Assessment (CSA) periodically in accordance with the provisions. • Providing input for the improvement of Integrated Risk Management policies and implementation. • Informing the Risks associated with the activities under his/her responsibility to his/her superiors.

Fungsi Pelaksanaan Program Manajemen Risiko
Function of Risk Management Program Implementation

Program Manajemen Risiko dijalankan oleh Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 026.P/019/DIR/2022 tanggal 21 September 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pembangkitan Jawa-Bali. Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan secara struktural melaporkan pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

The Risk Management Program is carried out by the Risk Management and Compliance Unit based on the Decree of the Board of Directors Number 026.P/019/DIR/2022 dated September 21, 2022 concerning Organization and Work Procedures of PT Pembangkitan Jawa-Bali. The Risk Management and Compliance Unit structurally reports the implementation of its duties and is directly responsible to the President Director.

Struktur Organisasi Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Organizational Structure of the Risk Management and Compliance Unit

Bidang Risiko telah didukung oleh tenaga profesional yang memiliki keahlian dan kompetensi terkait manajemen risiko dengan sertifikasi profesi sebagai berikut:

The Risk Department has been supported by professionals who have expertise and competence related to risk management with the following professional certifications:

Sertifikasi Profesi Personel Bidang Risk Management
Professional Certification of Risk Management Personnel

Sertifikasi Profesi Professional Certification	Jumlah Auditor Total Auditor
Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP)	6
Certified Risk Management Professional (CRMP)	1
Governance Risk and Compliance Professional (GRCP)	2
Business Continuity Management Certified Professional (BCMCP)	4

Laporan Realisasi Program Kerja Manajemen Risiko
Report on the Realization of Risk Management Work Program

Perusahaan menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko melalui program kerja yang dijalankan oleh Bidang Risiko. Realisasi program kerja terkait penerapan manajemen risiko sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

The Company implements the Risk Management Policy through a work program run by the Risk Division. The realization of work programs related to the implementation of risk management throughout 2022 is as follows:

Realisasi Program Kerja Manajemen Risiko
Realization of Risk Management Work Program

No.	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization	
1	Kegiatan *Awareness* Manajemen Risiko kepada Divisi Bidang Kantor Pusat dan Unit Risk Management Awareness Activities to Head Office and Unit Divisions	Kegiatan ini dikemas dalam bentuk *sharing knowledge* manajemen risiko (*Clear Talk*) dengan mengundang narasumber yang kompeten dalam bidangnya. Pada tahun 2022 telah dilakukan sebanyak 11 kegiatan *Clear Talk*.	This activity is packaged in the form of risk management knowledge sharing (Clear Talk) by inviting competent resource persons in their fields. In 2022, 11 Clear Talk activities have been conducted.
2	Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Berbasis Risiko. Development of Risk-Based Performance Management System.	Sudah dilakukan pengesahan kertas kerja KRI dan penyusunan pedoman Manajemen Kinerja Berbasis Risiko.	KRI working papers have been ratified and guidelines for Risk-Based Performance Management have been prepared.
3	Menuangkan Implementasi Manajemen Risiko dalam Kontrak Kinerja Divisi/Bidang Kantor Pusat. Including Risk Management Implementation in the Head Office Division/Department Performance Contract.	Pencapaian Implementasi Manajemen Risiko diukur dengan *Maturity Level* ERM PLN NP Semester 2 2022 yang diasesmen oleh PT PLN (Persero) sebesar 4,15. Hal tersebut didukung dengan upaya meningkatkan pengelolaan manajemen risiko yang terintegrasi serta peningkatan budaya dan kesadaran akan pentingnya pengelolaan manajemen risiko perusahaan, maka mulai tahun 2020 telah dituangkan *Maturity Level* Implementasi Manajemen Risiko pada Kontrak Kinerja tiap-tiap Divisi/Bidang di Kantor Pusat.	The achievement of Risk Management Implementation is measured by the Maturity Level of PLN NP ERM Semester 2 2022 assessed by PT PLN (Persero) of 4.15. This is supported by efforts to improve integrated risk management as well as increase culture and awareness of the importance of managing corporate risk management, so starting in 2020, the Maturity Level of Risk Management Implementation has been stated in the Performance Contract of each Division/ Department at the Head Office.
4	Penyusunan Profil Risiko Korporat Tahun 2023. Preparation of the 2023 Corporate Risk Profile.	Pada tahun 2022 target Kontrak Kinerja di semester 1 sebesar 72,5% dan semester 2 tahun 2022 sebesar 75%, dengan tambahan parameter penilaian konsistensi dalam melakukan review dan update risiko setiap bulan. Hasil assessment ML ERM Divisi Bidang di KP periode semester 1 tahun 2022, semua tercapai sesuai target.	In 2022, the Performance Contract target in semester 1 was 72.5% and semester 2 of 2022 was 75%, with additional parameters assessing consistency in conducting risk reviews and updates every month. The results of the ML ERM assessment of the Division at Head Office for the first semester of 2022, all achieved according to the target.

No.	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization	
5	Penyusunan materi *Self Learning* Manajemen Risiko & *Video Risk Awareness.* Preparation of Risk Management Self Learning material & Risk Awareness Video.	Profil risiko tahun 2023 telah ditandatangani oleh Direksi PLN NP.	The process of making self learning videos has been completed and uploaded to PJB Box.
6	*Review* dan Validasi Dokumen Manajemen Risiko. Review and Validation of Risk Management Documents.	Sebagai implementasi pelaksanaan GRC, dalam pengambilan keputusan strategis oleh Direksi dipersyaratkan adanya Dokumen Manajemen Risiko dan Evaluasi Kepatuhan (DMRK)/Kajian Risiko.	As an implementation of GRC, strategic decision-making by the Board of Directors requires a Risk Management and Compliance Evaluation (DMRK)/ Risk Assessment Document.
		Dokumen Kajian Risiko ini dibuat oleh pemilik proses bisnis dan direview dan divalidasi oleh BRIS dan BPTH, serta dimintakan legal opinion ke SPH. Sampai dengan Triwulan IV 2022 telah dilakukan review dan validasi untuk 31 (tiga puluh satu) Kajian Risiko.	This Risk Assessment document is made by the business process owner, reviewed and validated by BRIS and BPTH, as well as requested for legal opinion to SPH. Up to the fourth quarter of 2022, 31 (thirty one) Risk Assessments have been reviewed and validated.

Selain itu untuk perbaikan berkesinambungan manajemen risiko, PLN NP telah menyusun *roadmap* manajemen risiko beserta rencana kerja tindak lanjut analisa *gap* tingkat kematangan risiko beserta rencana perbaikan yang telah disetujui. Sesuai dengan rencana kerja, pada Triwulan IV telah dibangun integrasi manajemen risiko kedalam suatu sistem berupa Pengembangan Aplikasi Manajemen Risiko (pengintegrasian dengan aplikasi PRIME); mengimplementasikan Manajemen Kinerja berbasis Risiko dengan Menyusun KRI disetiap KPI; melakukan tindak lanjut OFI (Opportunity for improvement) atas penilaian maturity level ERM PLN NP semester 1 tahun 2022 untuk mencapai target *maturity level* ERM, mengikuti ajang GRC *Award* serta pembahasan pelaksanaan *Risk Competition.*

Furthermore, for continuous improvement of risk management, PLN NP prepared a risk management roadmap along with a follow-up work plan to analyze the gap in risk maturity level along with an approved improvement plan. In accordance with the work plan, in the fourth quarter, risk management integration has been built into a system in the form of Risk Management Application Development (integration with the PRIME application); implementing Risk-based Performance Management by compiling KRIs in each KPI; following-up on OFI (Opportunity for improvement) on the assessment of PLN NP's ERM maturity level in semester 1 of 2022 to achieve the ERM maturity level target, participating in the GRC Award event as well as discussing the implementation of Risk Competition.

Sistem Informasi Manajemen Risiko
Risk Management Information System

Manajemen Risiko Perusahaan telah didukung dengan sistem informasi berupa aplikasi manajemen risiko terintegrasi yang diberi nama I-CARE (*Integrated - Compliance, Risk Management, Effective and Efficient Operation*). I-CARE dirancang untuk dapat mempermudah dalam pengoperasian, pengambilan dan pengolahan data sehingga proses pengambilan keputusan didukung dengan data-data yang akurat. I-CARE telah digunakan secara konsisten dalam melakukan identifikasi, analisa dan evaluasi risiko di lingkungan Perusahaan. I-CARE dapat diakses oleh seluruh unit dan bidang di kantor pusat. Adapun konten pada I-CARE yaitu risiko-risiko yang ada di Perusahaan baik Kantor Pusat maupun Unit Kerja yang terdiri dari Penetapan *Scope*, Identifikasi Risiko sampai dengan penentuan Program Mitigasi Risiko (*Action Plan*),

The Company's Risk Management has been supported by an information system in the form of an integrated risk management application called I-CARE (Integrated - Compliance, Risk Management, Effective and Efficient Operation). I-CARE is designed to be able to facilitate the operation, retrieval and processing of data so that the decision-making process is supported by accurate data. I-CARE has been used consistently in conducting risk identification, analysis and evaluation within the Company. I-CARE can be accessed by all units and departments at the head office. The content of I-CARE is the risks in the Company, both Head Office and Work Units, which consists of Scope Determination, Risk Identification up to the determination of the Risk Mitigation Program (Action Plan), Loss Event, Risk and Underwriter Survey,

Loss Event, Risk and Underwriter Survey, Risk Evaluation and Prioritization (REAP), *Business Continuity Management System* (BCMS). Selian itu, I-CARE juga mengimplementasikan *tools* untuk pengukuran efektivitas program mitigasi risiko, sehingga apabila diperlukan, bidang atau divisi sebagai *risk owner* bisa melakukan penyesuaian program mitigasi apabila dinilai program tersebut kurang efektif. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran Perusahaan.

Risk Evaluation and Prioritization (REAP), Business Continuity Management System (BCMS). In addition, I-CARE also implements tools for measuring the effectiveness of risk mitigation programs, so that if necessary, the department or division as the risk owner can adjust the mitigation program if the program is considered less effective. This is expected to be able to encourage the achievement of the Company's targets.

Profil dan Mitigasi Risiko
Risk Profile and Mitigation

Penyusunan Profil Risiko Korporat tahun 2022 menghasilkan 13 risiko utama yang teridentifikasi dapat menghambat pencapaian sasaran di tahun 2022. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan dengan Profil Risiko tahun 2021 yang berjumlah 18, hal ini dikarenakan beberapa risiko sudah bisa terkendali dan masuk dalam risk appetite sehingga tidak dimunculkan lagi serta ada penggabungan beberapa risiko yang similar. Profil Risiko tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Perusahaan telah menyusun upaya pengelolaan risiko korporat tahun 2022 sebagai langkah mitigasi sebagai berikut:

The preparation of the 2022 Corporate Risk Profile resulted in 13 key risks identified as being able to hinder the achievement of targets in 2022. This number is less than the 2021 Risk Profile which was 18, this is due to several risks that can be controlled and are included in the risk appetite so that they are no longer raised and there is a merger of several similar risks. The Risk Profile is an integral part of the Company's Annual Budget and Operational Plan (ABOP). The Company has prepared corporate risk management efforts in 2022 as mitigation measures as follows:

Profil dan Mitigasi Risiko Tahun 2022
Risk Profile and Mitigation in 2022

No.	Risiko dan Mitigasi Risk and Mitigation	
1	**Risiko:** Terjadinya kecelakaan kerja dan darurat Kesehatan.	**Risk:** Occurrence of occupational accidents and health emergencies.
	Mitigasi: 1) Melaksanakan vaksinasi untuk *workforce* PLN NP. 2) Penguatan *monitoring* pelaksanaan program pencegahan covid 19. 3) Membuat kurikulum dan memberikan knowledge sharing kepada mitra kerja/kontraktor. 4) Implementasi CSMS secara *full cycle*. 5) Optimalisasi penggunaan aplikasi K3 terkait fitur baru dan konsistensi penggunaannya. 6) Evaluasi dan Penguatan implementasi *Crisis Response* Korporat. 7) Program SMK3 di Unit PLN NP. 8) Melakukan sertifikasi *system fire* alarm di Kantor Pusat. 9) Penguatan budaya K3 dan Infrastruktur K3.	**Mitigation:** 1) Carrying out vaccinations for PLN NP workforce. 2) Strengthening the monitoring of the Covid-19 prevention program implementation. 3) Creating curriculum and providing knowledge sharing to partners/contractors. 4) Full cycle implementation of CSMS. 5) Optimizing the use of OHS applications related to new features and consistency of use. 6) Evaluation and Strengthening the implementation of Corporate Crisis Response. 7) OHSMS program in PLN NP Unit. 8) Certifying the fire alarm system at the Head Office. 9) Strengthening OHS culture and OHS Infrastructure.
2	**Risiko:** Pengembangan bisnis *Beyond Power* dan *Power Solution* tidak efektif.	**Risk:** The development of the Beyond Power and Power Solution businesses was ineffective.
	Mitigasi: 1) Pengembangan dan komersialisasi digitalisasi pembangkit. 2) Pengembangan bisnis di PLN NP Group. 3) Permohonan penugasan Jasa OM Pembangkit. 4) Optimisasi bisnis AP PLN NP Group. 5) Pengembangan bisnis dengan mengoptimalkan aset.	**Mitigation:** 1) Carrying out vaccinations for PLN NP workforce. 2) Strengthening the monitoring of the Covid-19 prevention program implementation. 3) Creating curriculum and providing knowledge sharing to partners/contractors. 4) Full cycle implementation of CSMS. 5) Optimizing the use of OHS applications related to new features and consistency of use.

No.	Risiko dan Mitigasi Risk and Mitigation	
	6) Pengembangan bisnis Jasa Konsultan teknik, enjiniring dan komersialisasi Repair. 7) Pengembangan bisnis asset management (EAM). 8) Monetisasi *Intangible Knowledge* Perusahaan. 9) Integrasi marketing PLN NP Group dan optimalisasi penggunaan digitalisasi marketing. 10) *Updating* strategi dan road map pengembangan bisnis. 11) Menyusun proses bisnis/prosedur/tata Kelola pengembangan bisnis. 12) Penyusunan proses bisnis implementasi organisasi matriks dan integrasi *resource* PLN NP Group untuk bisnis *beyond power*.	6) Business development of engineering consulting services, engineering and commercialization of Repair. 7) Asset management (EAM) business development. 8) Monetization of the Company's Intangible Knowledge. 9) Integration of PLN NP Group marketing and optimization of the use of marketing digitalization. 10) Updating business development strategy and road map. 11) Developing business processes/procedures/governance for business development. 12) Preparation of business process for the implementation of matrix organization and integration of PLN NP Group resources for the beyond power business.
3	**Risiko:** Pengembangan bisnis EBT tidak efektif.	**Risk:** NRE business development was ineffective.
	Mitigasi: 1) Peningkatan koordinasi dengan *stakeholder* kunci secara rutin. 2) Permohonan persetujuan Pembangunan Pembangkit 100% dimiliki PLN NP. 3) Pembangunan pembangkit dengan skema IPP mayoritas dan minoritas. 4) Melakukan penyusunan model bisnis dalam pengembangan bisnis EBT non pembangkitan (pendanaan, *partnership*, sinergi AP). 5) Menyusun proposal proyek reinvestasi PLTS milik PLN dengan model bisnis yang kompetitif & komprehensif yang kemudian disampaikan kepada *Stakeholder* untuk mendapatkan Proyek. 6) Pengembangan bisnis dan produk *rooftop* solar PV dengan model bisnis yang kompetitif. 7) Penyusunan tupoksi terkait pembagian kewenangan untuk pengelolaan EBT pembangkitan dan non pembangkitan. 8) Melakukan pemenuhan *resource* pelaksana pengembangan EBT. 9) Implementasi *stakeholder management.* 10) Integrasi *marketing* PLN NP Group dan optimalisasi penggunaan digitalisasi *marketing.* 11) *Benchmark* teknologi baterai ke manufaktur global.	**Mitigation:** 1) Increased coordination with key stakeholders on a routine basis. 2) Request for approval of Plant Construction 100% owned by PLN NP. 3) Construction of power plants with majority and minority IPP schemes. 4) Conducting business model preparation in the development of non-generation NRE business (funding, partnership, AP synergy). 5) Preparing PLN's SPP reinvestment project proposal with a competitive & comprehensive business model which is then submitted to Stakeholders to obtain the Project. 6) Development of rooftop solar PV business and products with competitive business models. 7) Preparation of main tasks and functions related to the division of authority for the management of NRE generation and non-generation. 8) Fulfilling resources for executors of NRE development. 9) Implementation of stakeholder management. 10) Integration of PLN NP Group marketing and optimization of the use of marketing digitalization. 11) Benchmark battery technology to global manufacturers.
4	**Risiko:** Implementasi strategi transformasi tidak efektif dalam meningkatkan market share/pendapatan.	**Risk:** The implementation of the transformation strategy was not effective in increasing market share/revenue.
	Mitigasi: 1) Pembangunan pembangkit dengan skema IPP mayoritas dan minoritas. 2) *Cofiring* untuk Unit Kerja PLN NP. 3) Optimasi Pola Operasi Pembangkitan. 4) Melakukan kajian sistem ketenagalistrikan serta alternatif solusi. 5) Implementasi komersialisasi digitalisasi pembangkit melalui peningkatan efisiensi pembangkit. 6) Penyusunan Pedoman untuk Melakukan *Review* Aset Eksisting terhadap Kesesuaiannya dengan FS. 7) Pengembangan *Captive Power Unit.* 8) Peningkatan *Integrated Marketing* produk PLN NP Group yang lebih agresif. 9) Optimasi *Inventory* Level dan *Strategic Spare.* 10) Program Optimalisasi SDM di PLN NP Group untuk mendukung sasaran Go To Market. 11) Penyusunan proses bisnis keselarasan strategi RJPP dengan KPI Korporat. 12) Menyusun/menetapkan *Quick Win* serta melakukan pengawalan terhadap pelaksanaannya.	**Mitigation:** 1) Construction of power plants with majority and minority IPP schemes. 2) Cofiring for PLN NP Work Units. 3) Optimization of Generation Operation Pattern. 4) Conducting electricity system studies and alternative solutions. 5) Implementation of commercialization of power plant digitalization through improving power plant efficiency. 6) Preparation of Guidelines for Reviewing Existing Assets towards their Conformity with FS. 7) Development of Captive Power Unit. 8) Increased Integrated Marketing of PLN NP Group products that are more aggressive. 9) Optimization of Inventory Level and Strategic Spare. 10) HR Optimization Program in PLN NP Group to support Go To Market target. 11) Preparation of business process for RJPP strategy alignment with Corporate KPIs. 12) Preparing/determining Quick Win and overseeing its implementation.

No.	Risiko dan Mitigasi Risk and Mitigation	
	13) Membangun & updating proses *business* secara korporat terkait pelaksanaan inisiatif strategis RJPP dan mendukung *agility*. 14) Melakukan kajian akuisisi saham IPP.	13) Building & updating business processes corporately related to the implementation of RJPP strategic initiatives and supporting agility. 14) Conducting a study on the acquisition of IPP shares.
5	**Risiko:** Ketidakamanan pasokan energi primer.	**Risk:** Insecurity of primary energy supply.
	Mitigasi: 1) Komunikasi dan koordinasi untuk melakukan harmonisasi kebijakan penyediaan *stock* EP di PLN disesuaikan dengan kebutuhan PLN NP. 2) Menambah moda transportasi *Vessel* dalam kontrak batubara. 3) Menambah pengadaan batubara *multi source*. 4) Koordinasi dengan PLN untuk pasokan gas di Unit Pembangkit PLN NP. 5) Pengadaan jasa angkutan BBM dengan multi suplai *point*. 6) Pengadaan jasa pendukung penerimaan batubara (jasa surveyor, jasa Perusahaan Bongkar Muat, Jasa Sewa perairan). 7) Peningkatan kompetensi SDM dalam mengelola Energi Primer melalui PJB Academy. 8) Penguatan GEMBA kesiapan CHF melalui vicon selama masa pandemi.	Mitigation: 1) Communication and coordination to conduct harmonization of EP stock provision policies in PLN is adjusted to the needs of PLN NP. 2) Adding Vessel transportation mode in coal contract. 3) Increasing multi-source coal procurement. 4) Coordination with PLN for gas supply in PLN NP Generating Unit. 5) Procurement of fuel transportation services with multi- supply points. 6) Procurement of coal receiving support services (surveyor services, Loading and Unloading Company services, Water Leasing Services). 7) Increasing the competence of human resources in managing Primary Energy through PJB Academy. 8) Strengthening CHF readiness GEMBA through vicon during the pandemic.
6	**Risiko:** Ketidaksiapan pembangkit yang dikelola Perusahaan.	**Risk:** Unpreparedness of the power plants managed by the Company.
	Mitigasi: 1) Implementasi digitalisasi pembangkit. 2) Penguatan kompetensi SDM. 3) Mengamankan pasokan batubara. 4) Memastikan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan pemeliharaan. 5) Pemenuhan material cadang (*Strategic Parts*) dan optimalisasi penggunaan material persediaan. 6) Menyusun level kompetensi *asset management*. 7) Melakukan *Review* Implementasi *Asset Management*. 8) Menjalin komunikasi dan *stakeholder management* yang lebih baik dengan *Asset Owner* (PLN Sektor/Wilayah) dan PLN Regional Kantor Pusat khususnya terkait AI untuk unit pembangkit jasa O&M Luar Jawa. 9) Penguatan implementasi tata Kelola pembangkit model 2 dan 3 yang memenuhi maturitas level yang diperlukan untuk mencapai OM ekselen. 10) Mengelola rekomendasi hasil *assessment* kondisi peralatan pembangkit untuk unit pembangkit jasa O&M Luar Jawa. 11) Melakukan penajaman terhadap BMS terutama terkait management *resources* untuk mempercepat eksekusi MRO unit. 12) Optimalisasi biaya dengan melakukan *repair* peralatan pembangkit di UBJOM secara swakelola di *Workshop* MRO. 13) Permohonan persetujuan Alih Aset Pembangkit FTP-1 dan PLTGU AMC. 14) Pengadaan Fasilitas *Blackstart* untuk mendukung 6 *lines of defense system* Jamali. 15) Penguatan Keandalan *Coal Handling Facility*.	**Mitigation:** 1) Implementation of plant digitization. 2) Strengthening HR competencies. 3) Securing coal supply. 4) Ensuring budget availability for the implementation of maintenance. 5) Fulfillment of spare materials (Strategic Parts) and optimization of the use of inventory materials. 6) Developing asset management competency levels. 7) Reviewing Asset Management Implementation. 8) Establishing better communication and stakeholder management with Asset Owner (PLN Sector/Area) and PLN Regional Headquarters, especially related to AI for O&M service generating units Outside Java. 9) Strengthening the implementation of model 2 and 3 generation governance that meets the maturity level required to achieve OM excellence. 10) Managing recommendations on the results of the condition assessment of generating equipment for O&M service generating units Outside Java. 11) Sharpening the BMS, especially related to resource management to accelerate the execution of MRO units. 12) Cost optimization by repairing generating equipment at OMSBU in a self-managed manner at the MRO Workshop. 13) Request for approval of Asset Transfer of FTP-1 Plants and AMC CCPP. 14) Procurement of Blackstart Facility to support 6 lines of defense system Jamali. 15) Strengthening the Reliability of Coal Handling Facility.

No.	Risiko dan Mitigasi Risk and Mitigation	
7	**Risiko:** Eksekusi Tata Kelola Perusahaan terkait *Digital Transformation* tidak optimal.	**Risk:** The execution of Corporate Governance related to Digital Transformation was not optimal.
	Mitigasi: 1) Penyusunan dan *endorsement roadmap digital* transformasi. 2) Penyusunan & *review* usulan proses bisnis berbasis digital. 3) Penguatan *digital mindset* karyawan sesuai *roadmap digital transformation.* 4) Pelaksanaan pembelajaran yang berkaitan dengan pengembangan penguatan Bisnis *mindset & Digital mindset.* 5) Implementasi *Digital Equipment Specification.* 6) *Roll-out* layanan TI korporat. 7) Pengadaan *Network Access Control* (NAC) mendukung *Zero Trust Architecture.* 8) Prioritisasi program digital transformasi 2022 sesuai ketersediaan anggaran. 9) Pendampingan ke unit teknis pengisian dan optimasi/ perubahan teknis di modul CMMS. 10) Pembentukan PIC khusus masing-masing unit di pihak Vendor dan pendamping dari iCORE.	**Mitigation:** 1) Preparation and endorsement of digital transformation roadmap. 2) Preparation & review of digital-based business process proposals. 3) Strengthening the digital mindset of employees according to the digital transformation roadmap. 4) Implementation of learning related to the development of strengthening Business mindset & Digital mindset. 5) Implementation of Digital Equipment Specification. 6) Roll-out of corporate IT services. 7) Procurement of Network Access Control (NAC) supporting Zero Trust Architecture. 8) Prioritization of the 2022 digital transformation program according to budget availability. 9) Assistance to technical units on filling and optimization/ technical changes in the CMMS module. 10) Establishment of a special PIC for each unit on the Vendor side and an assistant from iCORE.
8	**Risiko:** Ketidaksiapan dan perubahan kondisional proyek ketenagalistrikan berdampak pada ketidakmampuan dalam pembayaran kewajiban perusahaan.	**Risk:** The unpreparedness and conditional changes of the electricity project have an impact on the inability to pay the Company's obligations.
	Mitigasi: 1) Melakukan *stakeholder management* untuk koordinasi dan update informasi terkait penugasan proyek, kejelasan status proyek dan optimasi terkait anggaran yang dikembangkan PLN NP. 2) Melakukan koordinasi dengan PLN terkait kondisi PLN NP dan opsi skema terbaik untuk menurunkan potensi dikenakan denda keterlambatan pembayaran. 3) Mereview PJBTL PJB PLN atas pencairan pembayaran SHL dan bunga sudah termasuk kedalam pasal pembayaran komponen A untuk proyek non IPP dan pengembalian investasi untuk *switch yard* melalui komponen E. 4) Mengembangkan/mengupdate strategi program proyek dengan merujuk pada hasil evaluasi dan *monitoring* rutin, dinamika kondisi eksternal dan internal serta menganalisa dampaknya bagi Perusahaan. 5) Penyiapan proses bisnis akselerasi proyek untuk mengantisipasi perubahan jadwal proyek. 6) Inisiasi Pengembangan aplikasi PRIME untuk diintegrasikan dengan aplikasi i-care. 7) Merencanakan kebutuhan TKA dan berkoordinasi dalam menyusun permohonan *exception Travel banned* bagi TKA untuk kebutuhan *commissioning* kepada instansi terkait. 8) Melakukan inisiasi/mengusulkan proyek baru di dalam shortlist proyek apabila terdapat proyek yang mengalami penundaan jadwal COD.	**Mitigation:** 1) Conducting stakeholder management to coordinate and update information related to project assignments, clarity of project status and optimization related to the budget developed by PLN NP. 2) Coordinating with PLN related to the condition of PLN NP and the best scheme options to reduce the potential for late payment penalties. 3) Reviewing PJBTL PJB PLN on the disbursement of SHL and interest payments included in the payment clause of component A for non-IPP projects and return on investment for switchyard through component E. 4) Developing/updating project program strategies by referring to the results of routine evaluation and monitoring, the dynamics of external and internal conditions as well as analyzing their impact on the Company. 5) Preparation of project acceleration business process to anticipate the changes in project schedule. 6) Initiation of PRIME application Development to be integrated with i-care application. 7) Planning the needs of foreign workers and coordinating in preparing requests for exception Travel bans for foreign workers for commissioning needs to the relevant agencies. 8) Initiating/proposing new projects in the project shortlist if there are projects that have delayed COD schedules.

No.	Risiko dan Mitigasi Risk and Mitigation	
9	**Risiko:** Terhambatnya kontinuitas implementasi *cofiring*.	**Risk:** Hindered continuity of cofiring implementation.
	Mitigasi: 1) Melakukan kontrak jangka panjang terkait pengadaan biomasa. 2) Pembuatan *temporary shelter* untuk mendukung implementasi *cofiring* di paiton. 3) Melakukan uji durability untuk mengetahui dampak *cofiring*. 4) Penyusunan dan *review* usulan proses bisnis terkait *cofiring*. 5) Penguatan organisasi pengelola biomassa. 6) Penyiapan Pendanaan untuk memenuhi target *cofiring*. 7) Ekspansi implementasi *cofiring*.	**Mitigation:** 1) Conducting long-term contracts related to biomass procurement. 2) Making temporary shelter to support the implementation of cofiring in Paiton. 3) Conducting durability tests to know the impact of cofiring. 4) Preparation and review of business process proposals related to cofiring. 5) Strengthening the biomass management organization. 6) Funding preparation to meet the cofiring target. 7) Expansion of cofiring implementation.
10	**Risiko:** Ketidakpatuhan terhadap regulasi lingkungan yang semakin ketat.	**Risk:** Non-compliance with increasingly strict environmental regulations.
	Mitigasi: 1) Pemenuhan regulasi lingkungan. 2) Pemasangan CEMs merkuri dan CO_2 secara *online* sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 3) Perencanaan dan Pengadaan batubara *low sulphur* untuk PLTU Batubara. 4) Perencanaan alternatif pemanfaatan FABA untuk PLTU batubara secara internal maupun eksternal. 5) Perencanaan pembangunan *landfill* dan pengurusan izin penimbunan untuk UBJOM Luar Jawa. 6) Revitalisasi WWTP dan STP. 7) Mendukung pelaksanaan *cofiring* dengan memastikan bahwa kegiatan tersebut tercantum di dalam dokumen lingkungan. 8) Penyusunan BMS untuk mekanisme berbasis pasar dan pajak karbon. 9) Penguatan kompetensi SDM berkaitan dengan pengelolaan lingkungan.	**Mitigation:** 1) Fulfillment of environmental regulations. 2) Online installation of mercury and Co2 CEMs in accordance with applicable laws and regulations. 3) Planning and procurement of low sulphur coal for Coal-Fired Power Plant. 4) Planning for alternative utilization of FABA for Coal-fired power plants internally and externally. 5) Planning for landfill construction and processing of landfill permits for Outer Java OMSBU. 6) Revitalization of WWTP and STP. 7) Supporting the implementation of cofiring by ensuring that the activity is included in the environmental document. 8) Preparation of BMS for market-based mechanism and carbon tax. 9) Strengthening HR competencies related to environmental management.
11	**Risiko:** Kontribusi APPA belum optimal mendukung bisnis PLN NP Group.	**Risk:** APPA's contribution has not been optimal in supporting PLN NP Group's business.
	Mitigasi: 1) Penyusunan Pedoman untuk Melakukan *Review* APPA terhadap Kesesuaiannya dengan FS. 2) Melakukan evaluasi dan kajian optimalisasi atas investasi PLN NP di AP melalui *asset review*. 3) Menyusun kajian opsi pendanaan lain yang dapat digunakan untuk investasi di PLN NP Group. 4) Mengarahkan AP untuk dapat menjajaki proyek produk baru sehingga bisa mempercepat perputaran modal. 5) Mendorong pemanfaatan *idle asset* di AP agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. 6) Mengawal proses perbaikan proses bisnis dan skema komersial APPA. 7) Inisiasi pengembangan aplikasi PRIME untuk AP lainnya. 8) Meningkatkan kompetensi karyawan APPA PLN NP. 9) Implementasi *stakeholder management*. 10) Melakukan proses alignment RJPP AP selaras dengan perubahan bisnis baru *Jump to New S Curve* PLN NP.	**Mitigation:** 1) Preparation of Guidelines for Reviewing APPA towards its Conformity with FS. 2) Conducting evaluation and optimization study on PLN NP's investment in AP through asset review. 3) Preparing a study of other funding options that can be used for investment in PLN NP Group. 4) Directing AP to be able to explore new product projects so as to accelerate capital turnover. 5) Encouraging the utilization of idle assets in AP so that they can be utilized as much as possible. 6) Supervising the process of improving APPA's business processes and commercial schemes. 7) Initiating PRIME application development for other APs. 8) Improving the competency of APPA PLN NP employees. 9) Implementation of stakeholder management. 10) Conducting RJPP AP alignment process in line with the changes in new business of Jump to New S Curve of PLN NP.

No.	Risiko dan Mitigasi Risk and Mitigation	
12	**Risiko:** Organisasi dan *human capital* kurang mendukung dalam eksekusi program strategis korporat.	**Risk:** Organization and human capital were less supportive in the execution of corporate strategic programs.
	Mitigasi : 1) Penguatan kompetensi SDM untuk mendukung pengembangan bisnis *Beyond* kWh serta penguatan Bisnis *mindset & Digital mindset.* 2) Optimalisasi Integrasi *Resources* PLN NP Group untuk meningkatkan *competitiveness* dan kompetensi SDM PLN NP Group. 3) Penyesuaian organisasi dengan strategi korporat termasuk organisasi pengelola *integrated marketing* dan *sales* dan *product owner* untuk lini bisnis baru. 4) Optimasi organisasi dan *human capital* pada unit yang mengalami penurunan CF. 5) Melakukan evaluasi organisasi matriks. 6) Meng*cascade* program strategis perusahaan ke individu (*to do list*). 7) Melakukan penempatan dan pengembangan karyawan berdasarkan *soft competency* yang dimiliki karyawan. 8) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran. 9) Koordinasi dengan *vendor* sertifikasi untuk dapat menggunakan sistem *road show* ke Unit. 10) *Workshop* pengelolaan KLRA.	Mitigation: 1) Strengthening HR competencies to support Beyond kWh business development and strengthening Business mindset & Digital mindset. 2) Optimizing the Integration of PLN NP Group Resources to increase the competitiveness and competence of PLN NP Group HR. 3) Organizational adjustments with corporate strategies including integrated marketing and sales management organizations and product owners for new business lines. 4) Optimization of organization and human capital in units that experienced a decrease in CF. 5) Conducting matrix organization evaluation. 6) Cascading the Company's strategic programs to individuals (to do list). 7) Placing and developing employees based on their soft competencies. 8) Improving facilities and infrastructure to support learning. 9) Coordination with certification vendors to be able to use the roadshow system to the Unit. 10) KLRA management workshop.
13	**Risiko:** Pelanggaran Etika Bisnis.	**Risk:** Business Ethics Violations.
	Mitigasi: 1) Melakukan Kerjasama dengan penyedia jasa regulasi. 2) Melakukan sosialisasi pembuatan *legal mapping.* 3) Pengembangan aplikasi ICOFR. 4) Melakukan *gap analysis* dan *awareness* ISO 37301: 2021 Sistem Manajemen Kepatuhan. 5) Pembuatan aplikasi *monitoring* kontrak pelanggan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi *monitoring* progress proyek pengembangan usaha. 6) Menyusun *checklist* regulasi internal pengembangan usaha. 7) Penguatan kompetensi SDM berkaitan dengan Regulasi Perizinan Ketenagalistrikan, *Awareness* SISMINDOKUM, dan ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Suap. 8) Pengembangan aplikasi COS.	Mitigation: 1) Cooperating with regulatory service providers. 2) Socializing the making of legal mapping. 3) ICOFR application development. 4) Conducting gap analysis and awareness of ISO 37301: 2021 Compliance Management System. 5) Creation of customer contract monitoring application and optimization of the use of application for monitoring the progress of business development projects. 6) Preparing a checklist of internal regulations for business development. 7) Strengthening HR competencies related to Electricity Licensing Regulations, SISMINDOKUM Awareness, and ISO 37001 Anti-Bribery Management System. 8) COS application development.

Pemetaan risiko tahun 2022 menggambarkan level dari masing-masing risiko utama korporat dimana terdapat *Inherent Risk, Actual Risk* dan *Target Risk. Inherent Risk* adalah tingkat risiko awal dimana perlakuan risiko baik itu tindakan pengendalian maupun tindakan mitigasi risikonya belum dilaksanakan, *Actual Risk* adalah tingkat risiko yang tertinggal saat dilaporkan dan *Target Risk* adalah target tingkat risiko yang diharapkan oleh Perusahaan mengacu Selera Risiko setelah seluruh tindakan perlakuan risiko telah dilakukan pada akhir masa pemantauan risiko.

The 2022 risk mapping illustrates the level of each key corporate risk where there is Inherent Risk, Actual Risk and Target Risk. Inherent Risk is the initial risk level where risk treatment both control measurement and risk mitigation measurement have not been implemented, Actual Risk is the level of risk left behind when reported and Target Risk is the risk level target expected by the Company referring to Risk Appetite after all risk treatment measurement have been conducted at the end of the risk monitoring period.

Peta Risiko Tahun 2022
Risk Map in 2022

Tingkat Kemungkinan / Possibility							
Sangat Besar / Very Large	E	Moderat / Moderate	Moderat / Moderate	Tinggi / High	Ekstrem / Extreme (2, 3, 6, 7, 11)	Ekstrem / Extreme (1)
Besar / Large	D	Rendah / Low	Moderat / Moderate	Tinggi / High (8, 9)	Ekstrem / Extreme (4, 5, 8, 9, 10, 12, 13; 2, 3, 4, 5)	Ekstrem / Extreme
Sedang / Medium	C	Rendah / Low	Moderat / Moderate (8, 9, 10, 11)	Tinggi / High (10, 11, 12)	Tinggi / High (6, 7)	Ekstrem / Extreme (1)
Kecil / Small	B	Rendah / Low	Rendah / Low (13)	Moderat / Moderate (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13)	Tinggi / High	Ekstrem / Extreme
Sangat Kecil / Very Small	A	Rendah / Low	Rendah / Low	Moderat / Moderate	Tinggi / High	Ekstrem / Extreme
		1	2	3	4	5
		Tidak Signifikan / Not Significant	Minor	Medium	Signifikan / Significant	Malapetaka / Disaster
		Tingkat Dampak / Impact level				

- *Inherent Risk*
- *Actual Risk*
- *Target Risk*

Program Pengembangan Kompetensi Bidang Risiko
Risk Competency Development Program

Program pengembangan kompetensi merupakan salah satu upaya dalam mendorong efektivitas penerapan manajemen risiko Perusahaan. Program pengembangan kompetensi dilakukan baik berupa *public training* yang diselenggarakan oleh lembaga profesional maupun *in house training* yang bekerjasama dengan narasumber berpengalaman di dalam Manajemen Risiko. Program pengembangan kompetensi terkait manajemen risiko tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Competency development program is one of the efforts in encouraging the effectiveness of the Company's risk management implementation. Competency development programs are conducted both in the form of public training organized by professional institutions and in-house training in collaboration with experienced resource persons in Risk Management. Competency development programs related to risk management in 2022 were as follows:

Program Pengembangan Kompetensi Manajemen Risiko
Risk Management Competency Development Program

No.	Program Pengembangan Development Program	Jumlah Peserta Number of Participant	Tanggal Date
1	Pelatihan & Sertifikasi QRMA - *Batch* 1 QRMA Training & Certification - Batch 1	33	18-20 Oktober 2022 October 18-20, 2022
2	Pelatihan & Sertifikasi QRMA - *Batch* 2 QRMA Training & Certification - Batch 2	26	25-28 Oktober 2022 October 25-28, 2022
3	Pelatihan & Sertifikasi QRMA - *Batch* 3 QRMA Training & Certification - Batch 3	28	01-04 November 2022 November 1-4, 2022
4	Pelatihan & Sertifikasi QRMA - ERMAP - *Batch* 4 QRMA – ERMAP Training & Certification - Batch 4	29	08-11 November 2022 November 8-11, 2022
5	Pelatihan & Sertifikasi QRMA - *Batch* 5 QRMA Training & Certification - Batch 5	31	15-18 November 2022 November 15-18, 2022
6	Pelatihan & Sertifikasi QRMA - *Batch* 6 QRMA Training & Certification - Batch 6	29	15-18 November 2022 November 15-18, 2022
7	Pelatihan & Sertifikasi QRMA - *Batch* 7 QRMA Training & Certification - Batch 7	27	06-09 Desember 2022 December 6-9, 2022
8	Resertifikasl ERMAP/ERMCP - *Batch* 1 ERMAP/ERMCP Recertification - Batch 1	7	21 – 22 November 2022 November 21-22, 2022
9	Resertifikasl ERMAP/ERMCP - *Batch* 2 ERMAP/ERMCP Recertification - Batch 2	6	23 – 24 November 2022 November 23-24, 2022
10	Resertifikasl ERMAP/ERMCP - *Batch* 3 ERMAP/ERMCP Recertification - Batch 3	9	28 – 29 November 2022 November 28-29, 2022
11	Resertifikasl ERMAP/ERMCP - *Batch* 4 ERMAP/ERMCP Recertification - Batch 4	18	12-13 Desember 2022 December 12-13, 2022
12	BCMCP	11	23-30 Mei 2022 May 23-30, 2022
13	Manajemen Risiko ISO 31000 ISO 31000 Risk Management	76	27 April 2022 April 27, 2022

Kegiatan *Awareness* Manajemen Risiko
Risk Management Awareness Activities

Kegiatan awareness dikemas dalam Program Clear Talk yang merupakan kegiatan sharing knowledge manajemen risiko dengan mengundang narasumber yang kompeten dalam bidangnya. Pada tahun 2022 telah dilakukan Clear Talk dan sosialisasi sebagai berikut:

Awareness activities are presented in the Clear Talk Program, which is a risk management knowledge sharing activity by inviting competent resource persons in their fields. In 2022, Clear Talk and socialization have been conducted as follows:

No.	Kegiatan Activity	Tanggal Date
1	*Clear Talk* dengan tema "Pengelolaan Manajemen Risiko Unit melalui I-CARE". Clear Talk with the theme "Unit Risk Management through I-CARE".	28 Januari 2022 January 28, 2022
2	*Clear Talk* dengan tema "*Best Practice* dari Manajemen Kinerja Berbasis Risiko". Clear Talk with the theme "Best Practice of Risk-Based Performance Management".	10 Februari 2022 February 10, 2022
3	*Clear Talk* dengan tema "Sosialisasi Perdir Manajemen Risiko Terintegrasi". Clear Talk with the theme "Socialization of the Board of Directors Regulation on Integrated Risk Management".	22 Maret 2022 March 22, 2022

No.	Kegiatan Activity	Tanggal Date
4	*Clear Talk* dengan tema "Progres Mitigasi Profil Risiko Korporat sampai dengan April 2022". Clear Talk with the theme "Corporate Risk Profile Mitigation Progress until April 2022".	20 Mei 2022 May 20, 2022
5	*Clear Talk* dengan tema "Transisi Energi dan *Early Retirement* PLTU Batubara". Clear Talk with the theme "Energy Transition and Early Retirement of Coal-Fired Power Plant".	28 Juni 2022 June 28, 2022
6	*Workshop* Penyusunan *Key Risk Indicator* Sebagai Implementasi Sistem Manajemen Kinerja Berbasis Risiko. Workshop on Key Risk Indicator Preparation as an Implementation of the Risk-Based Performance Management System.	26-27 Juli 2022 July 26-27, 2022
7	*Clear Talk* dengan tema"*Risk Insight* 2023 & Transformasi *Digital General Affair*". Clear Talk with the theme "Risk Insight 2023 & General Affair Digital Transformation".	19 Agustus 2022 August 19, 2022
8	*Clear Talk* dengan tema "*Success Story, Resilience* untuk Mencapai *Market Share* Telekomunikasi No.1 di Indonesia". Clear Talk with the theme "Success Story, Resilience to Achieve No.1 Telecommunication Market Share in Indonesia".	29 September 2022 September 29, 2022
9	Progres Mitigasi Profil Risiko Korporat sampai dengan Oktober 2022 (Risiko No. 1,5,6,7,10). Corporate Risk Profile Mitigation Progress until October 2022 (Risk No. 1, 5, 6, 7, 10).	31 Oktober 2022 October 31, 2022
10	Progres Mitigasi Profil Risiko Korporat sampai dengan Oktober 2022 (Risiko No. 2,3,4,8). Corporate Risk Profile Mitigation Progress until October 2022 (Risk No. 2, 3, 4, 8).	8 November 2022 November 8, 2022
11	Sosialisasi Polis Asuransi Tahun 2022. Socialization of Insurance Policy Year 2022.	13 Desember 2022 December 13, 2022

Evaluasi Kinerja Manajemen Risiko

Risk Management Performance Evaluation

Kinerja pengelolaan risiko dievaluasi secara berkala untuk dapat melihat kecukupan sistem manajemen risiko Perusahaan. Evaluasi dilakukan dengan metode *Assessment Maturity Level* ERM dan *Risk Survey.*

Assessment Maturity Level ERM PLN NP semester 2 tahun 2022 berdasarkan kriteria PLN, diperoleh hasil dengan nilai validasi 4,15 di atas target semester 2 sebesar 3,7. *Assessment Maturity Level* ERM pada unit yang dikelola PLN NP dilakukan satu semester sekali oleh asesor yang ditunjuk oleh Bidang kinerja korporat. Penilaian *maturity level* ERM baik anak perusahaan maupun unit dilaksanakan diakhir tahun 2022. Namun demikian, setiap triwulan unit tetap melakukan *self-assessment maturity level* ERM untuk memastikan proses ERM di unit tetap berjalan sesuai yang direncanakan.

The Company evaluates risk management performance periodically in order to be able to view the adequacy of the Company's risk management system. The evaluation is conducted using the ERM Maturity Level Assessment and Risk Survey methods.

Assessment of ERM Maturity Level of PLN NP in semester 2 of 2022 based on PLN criteria, obtained results with a validation value of 4.15 above the semester 2 target of 3.7. The ERM Maturity Level Assessment in units managed by PLN NP is carried out once a semester by an assessor appointed by the Corporate Performance Department. The ERM maturity level assessment for both subsidiaries and units was carried out at the end of 2022. However, every quarter, the unit still conducts a self-assessment of the ERM maturity level to ensure that the ERM process in the unit continues to run according to plan.

Hasil Assessment Maturity Level ERM Unit

Assessment Result of ERM Maturity Level of Unit

No.	Unit Pembangkitan Generation Unit	Target Semester II Tahun 2022 Target for Semester II of 2022	Realisasi sd Triwulan IV 2022 Realization up to Quarter IV of 2022	Pencapaian Achievement (%)
1	UP Paiton Paiton GU	3.60	3.65	101%
2	UP Gresik Gresik GU	3.60	3.65	101%
3	UP Muara Karang Muara Karang GU	3.60	3.61	100%
4	UP Muara Tawar Muara Tawar GU	3.60	3.65	101%
5	UP Cirata Cirata GU	3.60	3.63	101%
6	UP Brantas Brantas GU	3.60	3.66	102%
7	UP Indramayu Indramayu GU	3.55	3.55	100%
8	UP Pacitan Pacitan GU	3.55	3.56	100%
9	UP Rembang Rembang GU	3.55	3.57	101%
10	UP Tanjung Awar-Awar Tanjung Awar-Awar GU	3.55	3.59	101%
11	UP Arun Arun GU	3.00	3.16	105%
12	UP Kaltim Teluk Kaltim Teluk GU	3.20	3.30	103%
13	UP Pulang Pisau Pulang Pisau GU	3.20	3.27	102%
14	UP Tenayan Tenayan GU	3.2O	3.26	102%
15	PJB Academy	3.25	3.25	100%
16	UMRO	3.35	3.36	100%

Hasil *assessment maturity level* ERM menunjukan bahwa tingkat kematangan sistem manajemen risiko Perusahaan:

1. Budaya sadar risiko cukup melekat pada *risk owner*, hal ini ditandai dengan upaya dilakukannya pengelolaan risiko.
2. Manajemen risiko telah menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.
3. Manajemen risiko telah menjadi bagian dari seluruh proses bisnis Perusahaan.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut Direksi dan Dewan Komisaris memandang bahwa sistem manajemen risiko Perusahaan telah cukup memadai. Namun demikian, Direksi dan Dewan Komisaris terus mendorong peningkatan pengelolaan risiko Perusahaan melalui pengurusan aktif oleh Direksi dan pengawasan oleh Dewan Komisaris; memastikan kecukupan kebijakan dan standar prosedur Manajemen Risiko dan penetapan strategi Risiko berdasarkan ketentuan yang berlaku; memastikan kecukupan implementasi mencakup proses komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi, pengukuran, perlakuan, pencatatan, pemantauan, serta sistem informasi Manajemen Risiko di Perusahaan.

The results of the ERM maturity level assessment indicate the following from the maturity level of the Company's risk management system:

1. Risk awareness culture is quite inherent in risk owners, this is indicated by efforts to manage risk.
2. Risk management has become the basis in decision making.
3. Risk management has become part of the Company's entire business process.

Based on the evaluation results, the Board of Directors and Board of Commissioners consider that the Company's risk management system is adequate. However, the Board of Directors and Board of Commissioners continue to encourage the improvement of the Company's risk management through active management by the Board of Directors and supervision by the Board of Commissioners; ensuring the adequacy of Risk Management policies and standard procedures and the determination of Risk strategies based on applicable provisions; ensuring the adequacy of implementation including communication and consultation processes, context determination, identification, measurement, treatment, recording, monitoring, and Risk Management information systems in the Company.

Standar Etika Perusahaan
Code of Conduct

Standar perilaku etis yang diharapkan oleh Perusahaan dari seluruh Insan Perusahaan sebagai pelaku bisnis korporasi didokumentasikan dalam bentuk *Code of Conduct* (COC). COC mengidentifikasikan standar perilaku yang harus ditaati (perintah) dan dihindari (larangan). Penyusunan COC bertujuan untuk memberikan pedoman yang harus ditaati oleh Insan Perusahaan dan menjadi kriteria untuk menilai apakah seorang Insan Perusahaan telah mematuhi atau melakukan penyimpangan. Perilaku yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi norma-norma sosial diyakini dapat menjaga keberlanjutan bisnis Perusahaan dan memperluas jangkauan manfaat yang dihasilkan baik bagi Perusahaan maupun bagi pemangku kepentingan lainnya. Penerapan COC dalam jangka panjang secara konsisten diharapkan akan mendorong perbaikan kinerja Perusahaan dan meningkatkan citra Perusahaan.

Code of Conduct (COC) merupakan salah satu infrastruktur untuk mewujudkan *Good Corporate Governance* di Perusahaan. Perusahaan terakhir kali menetapkan Standar Etika Perusahaan pada tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 002.K/021/DIR/2019 dan 005.K/DK/PJB/2019 tentang Standar Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) PT Pembangkitan Jawa-Bali. Standar Etika Perusahaan secara berkala dievaluasi dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan pemutakhiran dalam menjaga relevansinya terhadap kondisi bisnis, lingkungan dan sosial Perusahaan yang terus berkembang.

The standards of ethical behavior expected by the Company from all Company personnel as corporate business actors are documented in the form of a Code of Conduct (COC). The COC identifies standards of behavior that must be obeyed (commands) and avoided (prohibitions). The preparation of the COC aims to provide guidelines that must be adhered to by the Company's personnel and become a criteria for assessing whether the Company's personnel have complied or deviated. Responsible behavior and upholding social norms are believed to maintain the sustainability of the Company's business and expand the range of benefits generated both for the Company and for other stakeholders. Consistent implementation of the COC in the long term is expected to encourage improvements in the Company's performance and enhance the Company's image.

Code of Conduct (COC) is one of the infrastructures to realize Good Corporate Governance in the Company. The Company last established the Code of Conduct in 2019 based on the Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa-Bali Number 002.K/021/DIR/2019 and 005.K/DK/PJB/2019 concerning the Code of Conduct of PT Pembangkitan Jawa-Bali. The Code of Conduct is periodically evaluated and if deemed necessary can be updated in maintaining its relevance to the Company's evolving business, environmental and social conditions.

Budaya Perusahaan
Corporate Culture

Budaya Perusahaan (*Core Values*) adalah "*the way we do things around here*" yang merupakan nilai, anggapan, asumsi, sikap, dan norma perilaku yang telah melembaga kemudian berwujud dalam wujud penampilan, sikap, dan tindakan, sehingga menjadi identitas perusahaan. Selain itu, Perusahaan turut mengimplementasikan AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) sebagai *core values* di lingkungan Perusahaan yang sejalan dengan transformasi Human Capital di BUMN dan transformasi PT PLN (Persero). AKHLAK sebagai *core values* di lingkungan Perusahaan, menjadi panduan Insan Perusahaan dalam bertindak dan berperilaku dalam rangka mewujudkan Visi Perusahaan. Perusahaan telah meresmikan *core values* AKHLAK sebagai Budaya Perusahaan yang terdiri dari:

Corporate Culture (Core Values) is "the way we do things around here" which are values, perceptions, assumptions, attitudes, and norms of behavior that have been institutionalized and then manifested in the form of appearance, attitudes, and actions, thus becoming the Company's identity. In addition, the Company also implements AKHLAK (Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, Collaborative) as core values within the Company which is in line with the transformation of Human Capital in SOEs and the transformation of PT PLN (Persero). AKHLAK as core values within the Company, serves as a guide for the Company's personnel in acting and behaving in order to realize the Company's Vision. The Company has officialized AKHLAK core values as a Corporate Culture consisting of:

Core Values AKHLAK
AKHLAK Core Values

Nilai Utama Core Value	Definisi Definition	Panduan Perilaku Behavior Guidelines	
Amanah Trustworthy	Memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Upholding the trust given.	1. Memenuhi janji dan komitmen. 2. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan. 3. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.	1. Fulfilling promises and commitments. 2. Be responsible for duties, decisions and actions taken. 3. Adhering to moral and ethical values.
Kompeten Competent	Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas Continuing to learn and develop capabilities.	1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. 2. Membantu orang lain belajar. 3. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.	1. Improving personal competence to meet ever-changing challenges. 2. Helping others learn. 3. Completing duties with the highest quality.
Harmonis Harmonious	Saling peduli dan menghargai perbedaan. Caring for each other and respecting differences.	1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. 2. Suka menolong orang lain. 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.	1. Respecting everyone regardless of their background. 2. Likes to help others. 3. Building a conducive work environment.
Loyal	Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara. Dedicated and prioritizing the interests of the Nation and State.	1. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara. 2. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar. 3. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.	1. Maintaining the good name of fellow employees, leaders, SOEs, and the State. 2. Willing to sacrifice to achieve a greater goal. 3. Complying with the leadership as long as it does not conflict with the law and ethics.
Adaptif Adaptive	Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Continuing to innovate and be enthusiastic in driving or facing change.	1. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. 2. Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi. 3. Bertindak proaktif.	1. Adapting quickly to be better. 2. Constantly making improvements following technological developments. 3. Acting proactively.
Kolaboratif Collaborative	Membangun kerja sama yang sinergis. Building synergistic cooperation.	1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. 3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama	1. Providing opportunities to various parties to contribute. 2. Open in cooperating to generate added value. 3. Mobilizing the utilization of various resources for a common goal.

Internalisasi Budaya Perusahaan
Corporate Culture Internalization

Perusahaan telah menyusun *Roadmap* Budaya Perusahaan dalam menginternalisasikan *Core Values* AKHLAK sebagai upaya penguatan budaya perusahaan. Tahapan implementasi penguatan budaya perusahaan dimulai dengan membangkitkan *awareness*, membangun pemahaman dan kemudian mendorong keterlibatan insan Perusahaan (*acceptance*), sehingga pada akhirnya semua karyawan Perusahaan diharapkan memiliki komitmen penuh dalam mewujudkan visi Perusahaan (*commitment/transform*).

The Company has developed a Corporate Culture Roadmap in internalizing the AKHLAK Core Values as an effort to strengthen corporate culture. The implementation stages of strengthening corporate culture are started by raising awareness, building understanding and then encouraging the involvement of the Company's people (acceptance), so that in the end all employees of the Company are expected to have full commitment in realizing the Company's vision (commitment/transform).

Roadmap Budaya Implementasi *Core Values* AKHLAK Tahun 2020-2024

Cultural Roadmap for the Implementation of AKHLAK Core Values in 2020-2024

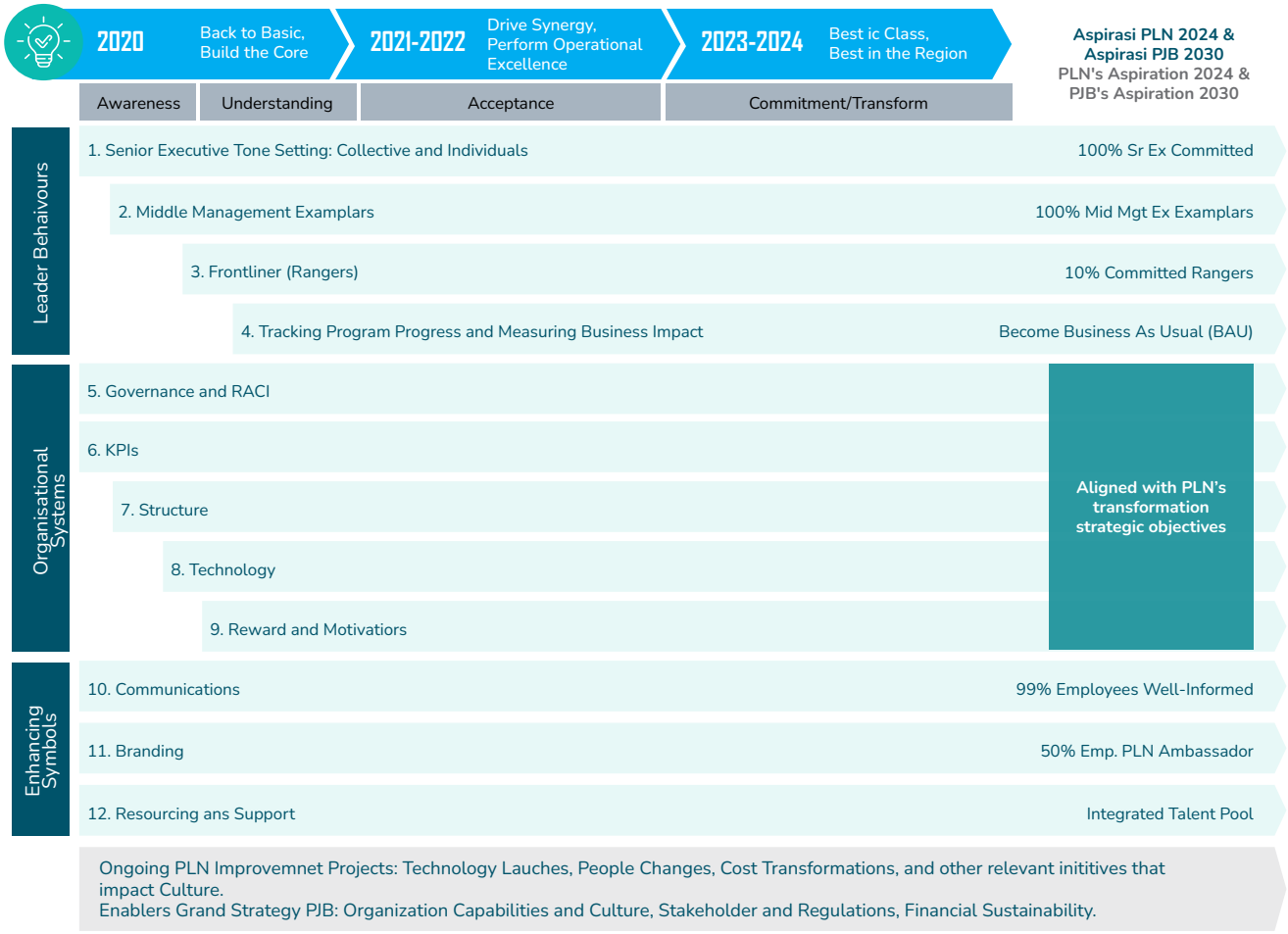

Internalisasi budaya perusahaan mencakup penguatan 3 (tiga) aspek sebagaimana Roadmap Implementasi Budaya Perusahaan dalam rangka membangun budaya Perusahaan yang berkelanjutan, yaitu:

Internalization of corporate culture includes strengthening 3 (three) aspects as the Roadmap for Implementation of Corporate Culture in order to build a sustainable corporate culture, namely:

Aspek Perkuat Budaya
Culture Strengthening Aspects

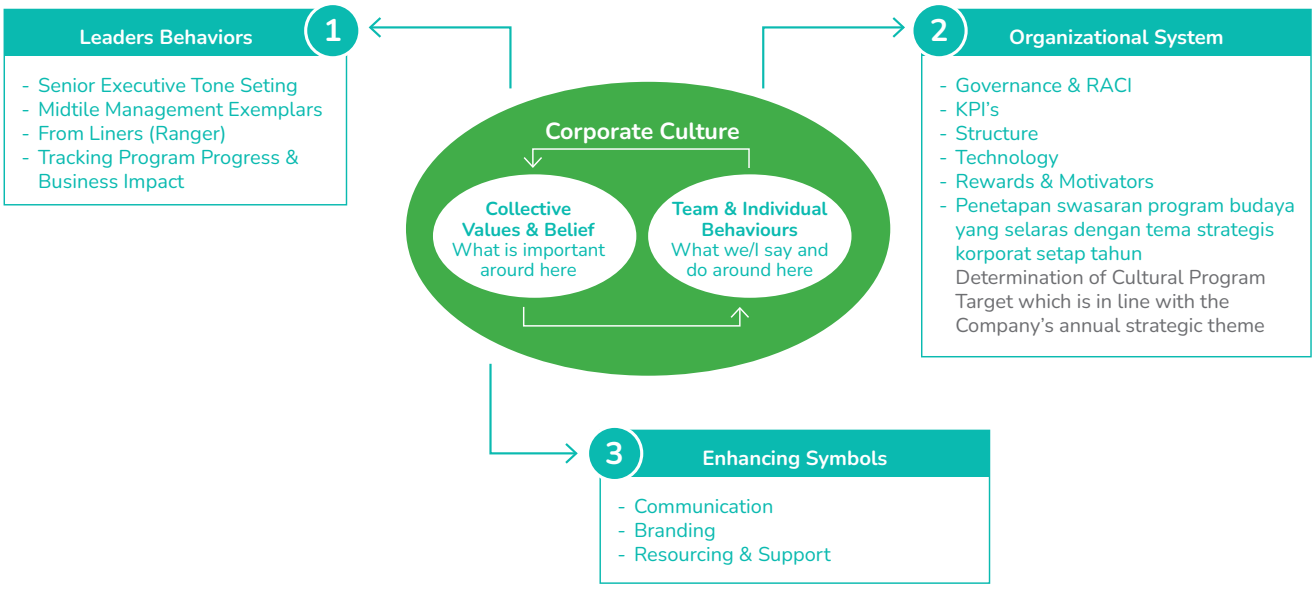

High Level Roadmap Budaya Perusahaan 2020-2024 memasuki periode *Milestone* 2 tahun 2021-2022. Tema penguatan budaya dan *key message Milestone* 2 tahun 2021-2022 adalah *Drive Sinergy, Perform Operational Excellence*. Tema ini sekaligus mengingatkan bahwa keberhasilan penguatan budaya hanya akan dicapai dengan sinergi seluruh *stakeholder* Perusahaan, termasuk Tenaga Alih Daya. Sebagaimana periode *Milestone* 1 Tahun 2020, *Critical Few Behavior* (CFB) atau perilaku prioritas dari AKHLAK Kembali menjadi driver menuju objektif transformasi budaya (GRC *Culture, Collaboration & Performance Culture,* dan *Service Culture*). Terdapat 1 tambahan CFB selain 4 CFB yang sudah diusung di *Milestone* 1 pada implementasi *Milestone* 2. CFB tersebut adalah "Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik" dari values KOMPETEN. Dalam hal ini, PLNers harus mampu menyelesaikan tugas secara berkualitas melebihi ekspektasi pemberi tugas. Beberapa contoh perilaku ini misalnya: Membuat skala prioritas dalam bekerja; Melakukan pemeriksaan kembali setiap proses dan hasil pekerjaan agar sesuai dengan prosedur dan standar kualitas yang sudah ditetapkan; Menyelesaikan pekerjaan secara efektif dan efisien sesuai dengan standar SLA yang telah ditentukan; Aktif menggali informasi untuk memahami dan memberikan nilai tambah dalam memenuhi kebutuhan perusahaan, dll. Secara detail, CFB AKHLAK di *Milestone* 2 adalah sebagai berikut:

The 2020-2024 High Level Roadmap for Corporate Culture enters the Milestone 2 period in 2021-2022. The theme of cultural strengthening and the key message of Milestone 2 in 2021-2022 is Drive Synergy, Perform Operational Excellence. This theme also reminds us that the success of cultural strengthening will only be achieved with the synergy of all Company stakeholders, including Outsourced Workers. As in the 2020 Milestone 1 period, Critical Few Behavior (CFB) or priority behavior from AKHLAK is again becoming a driver towards cultural transformation objectives (GRC Culture, Collaboration & Performance Culture, and Service Culture). There is 1 additional CFB in addition to the 4 CFBs that have been promoted in Milestone 1 in the implementation of Milestone 2. The CFB is "Completing duties with the best quality" from the COMPETENT value. In this case, PLNers are required to be able to complete duties in a quality manner exceeding the expectations of the assignor. Several examples of this behavior include: Making a priority scale at work; Re-checking every process and work result to be in accordance with established procedures and quality standards; Completing work effectively and efficiently in accordance with predetermined SLA standards; Actively digging for information to understand and provide added value in meeting the needs of the Company, etc. In detail, CFB AKHLAK in Milestone 2 is as follows:

Critical Few Behaviors Program Budaya PLN 1,2,3 _Milestone_ 2

Cultural Roadmap for the Implementation of AKHLAK Core Values in 2020-2024

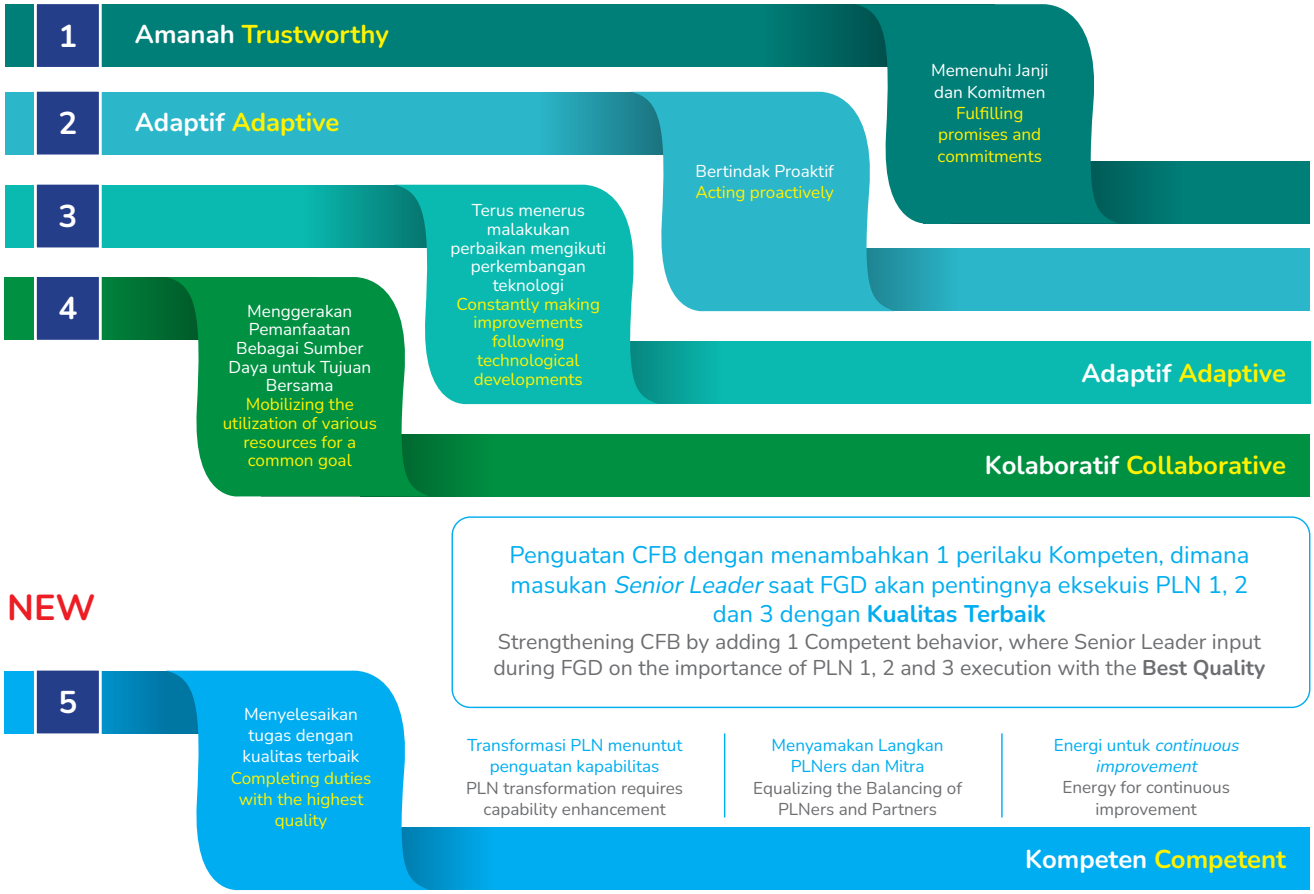

Membangun budaya memerlukan konsistensi program dan komitmen seluruh *stakeholder* mengawal program menjadi kunci. Beberapa penguatan dilakukan pada Program Budaya PLN 123 di Perusahaan pada implementasi *Milestone* 2 tersebut, sebagaimana digambarkan sebagai berikut:

Building a culture requires program consistency and the commitment of all stakeholders to oversee the program is the key. Several enhancements were conducted to the PLN 123 Culture Program in the Company during the implementation of Milestone 2, as described below:

Penguatan Implementasi Budaya PLN 123 *Milestone* 2

Strengthening the Culture Implementation of PLN 123 Milestone 2

Fokus pada penguatan GRC, COllaboration & Performance Service Culture

Focused on strengthening GRC, Collaboration, Performance and Service Culture

Program Budaya Cultural Program	*Critical Few Behaviours* (Perilaku Behavior AKHLAK #)	Tujuan Program Objectives			PROGRAM PLN 123 DI PLN NP PLN 123 PROGRAM AT PLN NP
PLN 1 **GRC *Culture*** (satu informasi setiap hari) (One Information Every Day)	# Memenuhi janji & komitmen # Menggerakan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama # Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik # Fulfill the promise and commitment # Mobilize the utilization of various resources for common goals # Execute tasks with the highest quality	**Satu informasi** setiap harinya mengenai GRC (Transformasi, *Value, compliance, risk*, kebijakan prosedur, dll) **One Information Every Day** focusing on GRC Topic (Transformation, Risk, Policy, Procedure, and others)	**Peningkatan *Maturity Level* Pecengahan *Fraud*** melaui *monitoring* FRA atau implementasi SMAP **Enhancement of Maturity Level to Prevent Fraud Risk** through FRA Monitoring or SMAP implementation	**Peningkatan *Maturity Level* Pecengahan Risiko Operasional** melalui pengeolaan risiko unit kerja **Enhancement of Maturity Level to Prevent Operational Risk** through work unit's risk management	**PLN 1** 1. PJB JARKOM (Jaringan Komunikasi) PJB JARKOM (Communication Network) 2. #PJBAman Total Patrol
PLN 2 ***Collaboration Performance Culture***	# Terus-menerus malakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi # Bertindak proaktif # Menggerakan pemanfaatan bebagai sumber daya untuk tujuan bersama # Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik # Continuously make improvements & following technological developments # Act proactively # Mobilize the utilization of various resources for common goals # Execute tasks with the highest quality	Memperkuat kolaborasi melibatkan minimal: **1) 1 (satu) Unit Kerja di PLN (Divisi, Unit Induk, Anak Perusahaan lain) dan 2) 1 (satu) korporasi/Leambaga/instansi di luar PLN** untuk dua capaian setiap minggu mengenai: Strengthen the Collaboration involving: **1. One Work Unit in PLN (Division, Holding Unit, and Another Subsidiary) and 2. One corporation/organization/ institution outside PLN** to reach two weekly achievements concerning: a. Meningkatkan keandalan Reliability improvement b. Meningkatkan *revenue* Revenue improvement c. Menekan *cost* Cost improvement d. Meningkatkan layanan Service improvement **Penguatan Sistem:** Penerapan KPI Kolaborasi **System Improvement:** Implementation of Collaborative KPI			**PLN 2** 1. *Collaboration for* SOKET *Implementation* (Digitalisasi *Power Plant* / SOKET - Sistem Optimasi Keandalan & Efisiensi Terintegritasi) Collaboration for SOKET Implementation (Digitalization of Power Plant / SOKET - Integrated Reliability and Efficiency Optimization System) 2. PJB *Data Science Club for Digital Power Plant* (*Club* OME & *Non* OME)
PLN 3 ***Service Culture***	# Terus-menerus malakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi # Bertindak proaktif # Menggerakan pemanfaatan bebagai sumber daya untuk tujuan bersama # Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik # Continuously make improvements & following technological developments # Act proactively # Mobilize the utilization of various resources for common goals # Execute tasks with the highest quality	Meningkatkan *service culture* dengan "membangun pengalaman bagi pelanggan" diantaranya dengan tiga perbaikan setiap bulan (fokus adalah pelanggan eksternal Unit kerja) mengenai: Strengthen the Service Culture through "Building Customer Experience" by three monthly improvements (focused on external customers of Work Unit) concerning: a. Mencari pelanggan baru New customer acquisition b. Meningkatkan Pemakaian/*revenue* Revenue improvement c. Meningkatkan kepuasan pelanggan Customer satisfaction improvement d. Meningkatkan produk/bisnis proses Product/Business process improvement ***Mandatory Program:*** Yantek *Optimization* (Budaya Melayani) Seluruh UID dan UIW **Mandatory Program:** Yantek Optimization (Service Culture) for all UID UIW			**PLN 3** 1. *Relation Investment* 2. PJB *Ranger Business and Digital Experiential Learning* (BIDEX)

Pokok Muatan Standar Etika Perusahaan

Core Contents of the Code of Conduct

Standar Etika Perusahaan secara fundamental mengatur mengenai standar etika perilaku dan bisnis dalam membangun hubungan dengan para pemangku kepentingan mencakup karyawan, pelanggan, rekanan, kompetitor, mitra kerja, pemerintah, dan masyarakat. Muatan Standar Etika Perusahaan disederhanakan dengan akronim “PEMBANGKIT” atas penjabaran beberapa ketentuan yang berkaitan dengan etika pengelolaan Perusahaan yang harus dipatuhi oleh seluruh Insan Perusahaan. Penjelasan mengenai cakupan muatan yang diatur dalam Standar Etika Perusahaan adalah sebagai berikut:

The Code of Conduct fundamentally regulates regarding ethical standards of behavior and business in building relationships with stakeholders including employees, customers, associates, competitors, partners, government, and society. The content of the Code of Conduct is simplified with the acronym "PEMBANGKIT" for the elaboration of several provisions relating to the ethical management of the Company that must be obeyed by all Company personnel. An explanation regarding the scope of content regulated in the Code of Conduct is as follows:

Pokok Muatan Standar Etika Perusahaan

Core Contents of the Code of Conduct

Cakupan Muatan Scope	Penjelasan Explanation	
Kegiatan Politik dan Sosial Perusahaan Political and Social Activities of the Company	Perusahaan mempertahankan sikap netral terhadap partai politik sesuai dengan tata nilai ***integrity*** dan perilaku utama etis. Oleh karena itu, Perusahaan tidak memberikan bantuan dana ke partai politik, politis, ataupun calon pejabat manapun. Namun hal ini tidak berarti Perusahaan melarang hak karyawannya sebagai warga negara untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik.	The Company maintains a neutral stance towards political parties in accordance with the values of integrity and ethical core behaviors. Therefore, the Company does not provide financial assistance to any political party, politician, or candidate for official. However, this does not mean that the Company prohibits its employees' rights as citizens to participate in political activities.
	Perusahaan juga berkomitmen untuk mengutamakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat terutama di sekitar pusat kegiatan operasi. Pengembangan dan pemberdayaan tersebut diutamakan dalam bidang ekonomi sosial budaya dan keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Insan Perusahaan yang berwenang dilarang untuk melakukan diskriminasi dan bersifat subjektif dalam menjalankan program CSR seperti mendahulukan program CSR di wilayah tempat asal Insan Perusahaan tersebut. Hal ini didasari oleh sesuai dengan tata nilai ***integrity*** dan perilaku utama **amanah**	The Company is also committed to prioritizing community development and empowerment, especially around the center of operations activity. Such development and empowerment is prioritized in the sectors of socio-cultural economy and religion, education, health, and environment. Authorized Company personnel are prohibited from discriminating and being subjective in carrying out CSR programs such as prioritizing CSR programs in the area where the Company personnel come from. This is based on the values of **integrity** and the core behavior of **trustworthiness**.
Etika Bekerja Insan Perusahaan Work Ethics of Company Personnel	Setiap Insan Perusahaan berkomitmen untuk tumbuh dan berkembang bersama dengan Perusahaan. Oleh karena itu, dirancang aturan-aturan untuk menjaga komitmen Insan Perusahaan terhadap pengembangan diri Insan Perusahaan serta Perusahaan secara keseluruhan.	Every personnel of the Company is committed to growing and developing together with the Company. Therefore, rules are designed to maintain the commitment of Company Personnel towards the self-development of Company Personnel and the Company as a whole.
	Komitmen yang dimaksud yaitu : 1. Komitmen pengembangan diri 2. Komitmen kemajuan & perkembangan perusahaan 3. Komitmen anti diskriminasi	The commitments referred to are: 1. Commitment to self-development 2. Commitment to progress & development of the Company 3. Commitment to anti-discrimination

Cakupan Muatan Scope	Penjelasan Explanation	
Perlindungan Informasi, Hak Kekayaan Intelektual dan Penggunaan Media Sosial Information Protection, Intellectual Property Rights and Social Media Usage	Sesuai dengan tata nilai ***integrity*** dengan perilaku utama **jujur** dan **amanah**, setiap Insan Perusahaan berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan sesuai klasifikasinya. Pengungkapan informasi kepada Publik dan *Stakeholder* lainnya harus dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi informasi, kepentingan Perusahaan, dan kebutuhan pihak yang berkepentingan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.	In accordance with the integrity value with the core behavior of honesty and trustworthiness, every Company personnel is obliged to maintaining the confidentiality of the Company's information according to its classification. Disclosure of information to the Public and other Stakeholders must be conducted by taking into account the classification of information, the interests of the Company, and the needs of interested parties in accordance with applicable legislation.
	Perusahaan tidak mentolerir adanya praktik penjualan informasi dari orang dalam (*insider trading*) dan Perusahaan akan melakukan tindakan hukum terhadap pelaku insider trading sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh insan Perusahaan dilarang melakukan praktik penjualan informasi dari orang dalam	The Company does not tolerate the practice of selling information from insiders (insider trading) and the Company will take legal action against insider trading actors in accordance with applicable rules. Therefore, all Company personnel are prohibited to practice the sale of insider information.
	Perusahaan menghargai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak lain, oleh karena itu Insan Perusahaan dilarang untuk menggunakan HAKI milik pihak lain tanpa izin dan prosedur yang sudah diatur karena dapat mengakibatkan Perusahaan menanggung gugatan hukum.	The Company respects the Intellectual Property Rights (IPR) of other parties, therefore, Company personnel are prohibited to use IPR belonging to other parties without permission and procedures that have been regulated due to the fact that it can cause the Company to bear lawsuits.
	Di sisi lain, Perusahaan dan seluruh Insan Perusahaan juga wajib melindungi HAKI milik Perusahaan karena HAKI adalah intangible asset yang sangat bernilai untuk Perusahaan.	On the other hand, the Company and all Company personnel are also obliged to protect its IPR due to the fact that IPR is a very valuable intangible asset for the Company.
	Media sosial yang mengatasnamakan Perusahaan hanya boleh dikelola oleh pihak yang diberi hak oleh Perusahaan. Unit dan bagian lain dilarang membuat media sosial sendiri yang mengatasnamakan Perusahaan. Insan Perusahaan dilarang mengunggah pernyataan di media sosial yang mengatasnamakan Perusahaan, kecuali pihak yang telah diberi kewenangan oleh Perusahaan. Perusahaan menghormati kebebasan Insan Perusahan untuk menyampaikan pikirannya dalam bentuk lisan maupun tulisan di dalam media sosial pribadi Insan Perusahaan, selama konten yang diunggah bukan hal yang merugikan perusahaan.	Social media on behalf of the Company may only be managed by parties authorized by the Company. Other units and departments are prohibited from creating their own social media on behalf of the Company. Company personnel are prohibited from uploading statements on social media on behalf of the Company, except those who have been authorized by the Company. The Company respects the freedom of Company personnel to convey their thoughts in oral or written form in the Company's personal social media, as long as the uploaded content is not detrimental to the Company.
Benturan Kepentingan Conflict of Interest	Aturan mengenai benturan kepentingan dibuat sesuai dengan tata nilai ***integrity*** dan perilaku utama etis, **jujur** dan **amanah**.	Rules regarding conflict of interest are made in accordance with the values of **integrity** and the core behaviors of ethics, **honesty** and **trustworthiness**.
	Benturan kepentingan terjadi apabila Insan Perusahaan: 1. Terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan perusahaan pesaing atau dengan Mitra Usaha Perusahaan. 2. Bekerja di perusahaan pesaing atau dengan Mitra Usaha Perusahaan. 3. Mempunyai hubungan keluarga langsung dengan pemilik atau pengambil keputusan Mitra Usaha Perusahaan.	Conflict of interest occurs when Company personnel: 1. Directly or indirectly involved in the management of competing companies or with the Company's Business Partners. 2. Working in a competing company or with the Company's Business Partners. 3. Having a direct family relationship with the owner or decision maker of the Company's Business Partner.
	Apabila terjadi benturan kepentingan tersebut maka Insan Perusahaan harus mengundurkan diri dari proses pengambilan keputusan sesuai ketentuan berlaku.	In the event of a conflict of interest, Company personnel must resign from the decision-making process in accordance with applicable provisions.

Cakupan Muatan Scope	Penjelasan Explanation	
Perlindungan Aset Perusahaan Protection of Company Assets	Harta/Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan digunakan untuk pencapaian tujuan Perusahaan. Sesuai dengan tata nilai ***integrity*** dan perilaku utama **etis**, disusunlah pedoman perilaku yang bertujuan untuk memelihara keutuhan dan keselamatan Aset Perusahaan.	Assets are resources owned by the Company and used to achieve the Company's objectives. In accordance with the values of **integrity** and **ethical** core behaviors, a code of conduct is established which aims to maintain the integrity and safety of the Company's Assets.
Networking dengan *Stakeholder*	Setiap Insan Perusahaan wajib untuk menjaga hubungan baik dengan seluruh *Stakeholder* Perusahaan sesuai dengan nilai-nilai Perusahaan. Pedoman dalam hubungan ini diatur dalam bentuk kewajiban dan larangan yang harus dipenuhi oleh seluruh Insan Perusahaan.	Every Company personnel is obliged to maintaining good relations with all Company Stakeholders in accordance with the Company's values. The guidelines in this relationship are regulated in the form of obligations and prohibitions that must be fulfilled by all Company Personnel.
Gratifikasi Gratification	Setiap Insan Perusahaan senantiasa menaati aturan terkait Gratifikasi sebagai pencerminan dari salah satu tata nilai Perusahaan, yaitu ***integrity*** dengan perilaku utama **etis**, **jujur** dan amanah yang bertujuan untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat dan bersih di Perusahaan. Setiap Insan Perusahaan wajib mengetahui perkembangan aturan terkini mengenai Gratifikasi dan mematuhi aturan yang berlaku tersebut. Aturan-aturan tersebut harus disosialisasikan ke seluruh Insan Perusahaan untuk menghindari terjadinya Gratifikasi di lingkungan Perusahaan.	Every Company Personnel always complies with the rules related to Gratification as a reflection of one of the Company's values, namely **integrity** with the core behavior of **ethical**, **honest** and **trustworthy** which aims to create a healthy and clean competitive climate in the Company. Every Company Personnel is required to know the development of the latest rules regarding Gratification and comply with the applicable rules. These rules must be socialized to all Company personnel to avoid the occurrence of Gratification within the Company.
Kepedulian terhadap K3, serta Pelestarian Lingkungan Concern for OHS, and Environmental Preservation	Komitmen Perusahaan terhadap pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta pelestarian lingkungan tercermin dari nilai ***professional*** dengan perilaku utama **mengutamakan keselamatan dan lingkungan** yang ada di dalam tata nilai Perusahaan. Aktivitas di Perusahaan berorientasi terhadap keselamatan dan keharmonisan lingkungan. Perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan kepedulian dan menanamkan nilai-nilai Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta pelestarian lingkungan hidup terhadap seluruh Insan Perusahaan.	The Company's commitment to the importance of Occupational Health and Safety (OHS) and environmental preservation is reflected in the professional values with the core behavior of prioritizing safety and the environment in the Company's values. Activities in the Company are oriented towards safety and environmental harmony. The Company is committed to increasing awareness and instilling the values of Occupational Health and Safety as well as environmental preservation to all Company personnel.
InTegritas Proses dan Data Pelaporan Keuangan Integrity of Financial Reporting Process and Data	Seluruh transaksi bisnis Perusahaan harus digambarkan dalam bentuk laporan keuangan. Hal ini tercermin dari nilai *integrity* dengan perilaku utama **jujur** dan nilai ***professional*** dengan perilaku utama **bertanggung jawab**. Perusahaan wajib membuat laporan keuangan secara tepat dan akurat untuk mendukung integritas dan reputasi Perusahaan. Semua proses pencatatan dibuat dengan memastikan bahwa seluruh berkas lengkap, akurat, tepat waktu dan dapat dilacak bukti transaksinya.	All business transactions of the Company must be described in the form of financial statements. This is reflected in the integrity value with **honest** core behavior and professional value with **responsible** core behavior. The Company is obliged to make precise and accurate financial statements to support the Company's integrity and reputation. All recording processes are made by ensuring that all files are complete, accurate, timely and traceable proof of transactions.

Pemberlakuan Standar Etika Bagi Seluruh Level Organisasi

Enforcement of Ethical Standards for All Organizational Levels

Standar Etika Perusahaan berlaku bagi Direksi dan Dewan Komisaris beserta seluruh karyawan yang mempunyai hubungan kerja langsung baik karyawan tetap maupun kontrak sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 002.K/021/DIR/2019 dan 005.K/DK/PJB/2019 tentang Standar Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) PT Pembangkitan Jawa-Bali. Seluruh Insan Perusahaan wajib mengacu dan berpedoman pada Standar Etika Perusahaan (*Code of Conduct*). Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh karyawan wajib menandatangani Surat Pernyataan Kepatuhan terhadap Standar Etika Perusahaan secara berkala setiap tahun. Selain itu, Standar Etika Perusahaan dijadikannya sebagai salah satu target kinerja unit di dalam aspek OCR merupakan bagian dari upaya pemberlakukan Standar Etika Perusahaan bagi seluruh level organisasi.

The Code of Conduct applies to the Board of Directors and Board of Commissioners as well as all employees who have a direct working relationship, both permanent and contract employees as stipulated in the Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa-Bali Number 002.K/021/DIR/2019 and 005.K/DK/PJB/2019 concerning the Code of Conduct of PT Pembangkitan Jawa-Bali. All Company personnel must refer to and be guided by the Company's Ethical Standards (Code of Conduct). The Board of Directors, Board of Commissioners, and all employees are required to sign a Statement of Compliance with the Code of Conduct periodically every year. In addition, the use of the Code of Conduct as one of the unit performance targets in the OCR aspect is part of the effort to enforce the Code of Conduct for all organizational levels.

Sosialisasi Standar Etika Perusahaan

Outreach Program for the Code of Conduct

Standar Etika Perusahaan dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan, dari level operasional sampai *top management* sebagai bagian dari tahapan internalisasi Budaya Perusahaan. Pelaksanaan sosialisasi Standar Etika Perusahaan dilakukan melalui saluran media di seluruh Unit Kerja Perusahaan, meliputi BOD *Talk*, sosialisasi tatap muka, *email, website*, intranet, visual manajemen, dan forum internal. Perusahaan juga menyusun ringkasan *Code of Conduct* dalam bentuk buku saku yang dapat mempermudah pemahaman penerapannya dalam kegiatan sehari-hari. Sosialisasi juga diberikan bagi karyawan baru pada saat pembekalan *Code of Conduct*, Budaya Perusahaan dan nilai-nilai GCG yang dilakukan oleh tim GCG.

Kegiatan sosialisasi Standar Etika Perusahaan merupakan upaya Perusahaan untuk memberikan pemahaman dan mendorong kepedulian seluruh insan Perusahaan untuk menaati dan menerapkan Standar Etika Perusahaan di setiap kegiatan usaha Perusahaan yang sejalan dengan Budaya Perusahaan. Guna memastikan sosialisasi terlaksana secara efektif, Perusahaan melakukan evaluasi dan pengukuran terhadap proses pelaksanaan dan hasil/*output* mengenai pemahaman karyawan terhadap Standar Etika Perusahaan.

The Code of Conduct is communicated and socialized to all employees, from the operational level to the top management as part of the internalization stage of the Corporate Culture. The implementation of the socialization of the Code of Conduct is carried out through media channels in all Work Units of the Company, including BOD Talk, face-to-face socialization, email, website, intranet, management visuals, and internal forums. The Company also compiled a summary of the Code of Conduct in the form of a pocket book that can facilitate understanding of its application in daily activities. Socialization is also provided for new employees during the debriefing of the Code of Conduct, Corporate Culture and GCG values conducted by the GCG team.

The socialization of the Code of Conduct is the Company's effort to provide understanding and encourage the concern of all Company personnel to comply with and implement the Code of Conduct in every business activity of the Company which is in line with the Corporate Culture. In order to ensure that the socialization is carried out effectively, the Company evaluates and measures the implementation process and results/output regarding employee understanding of the Code of Conduct.

Sanksi Pelanggaran Standar Etika Perusahaan

Sanctions for Violation of the Code of Conduct

Sanksi atas pelanggaran Standar Etika Perusahaan diberikan berdasarkan mekanisme internal Perusahaan yang mengacu pada Peraturan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali No.0009.P/019/DIR/2021 tentang Peraturan Disiplin Karyawan PT Pembangkitan Jawa-Bali. Sanksi disiplin dilakukan untuk memberikan efek jera dan meminimalisir (mitigasi) dampak risiko *fraud* yang dapat mempengaruhi kinerja dan citra Perusahaan.

Sanctions for violations of the Code of Conduct are given based on the Company's internal mechanism which refers to the Regulation of the Board of Directors of PT Pembangkitan Jawa-Bali No.0009.P/019/DIR/2021 concerning Disciplinary Regulations for Employees of PT Pembangkitan Jawa-Bali. Disciplinary sanctions are conducted to provide a deterrent effect and minimize (mitigate) the impact of fraud risks that can affect the Company's performance and image.

Sanksi Disiplin Standar Etika Perusahaan

Disciplinary Sanctions of the Code of Conduct

Jenis Hukuman Type of Penalty	Sanksi Sanction		
	Pokok Main		Tambahan Additional
Disiplin Ringan Light Discipline	1. Peringatan tertulis yang berlaku selama 3 (tiga) bulan; atau 2. Peringatan tertulis yang berlaku selama 6 (enam) bulan.	1. A written warning valid for 3 (three) months; or 2. A written warning valid for 6 (six) months.	-
Disiplin Sedang Moderate Discipline	1. Peringatan tertulis 1 yang berlaku selama 6 (enam) bulan dengan Kriteria Talenta Perlu Penyesuaian (PPS). 2. Peringatan tertulis 2 yang berlaku selama 6 (enam) bulan dengan: a. Pemotongan Tunjangan Posisi (P2) sebesar 75%; dan b. Kriteria Talenta Perlu Penyesuaian (PPS). 3. Peringatan tertulis 2 terakhir yang berlaku selama 6 (enam) bulan dengan Kriteria Talenta Sangat Perlu Penyesuaian (SPP). 4. Peringatan tertulis 3 terakhir yang berlaku selama 6 (enam) bulan dengan Kriteria Talenta Sangat Perlu Penyesuaian (SPP). 5. Peringatan tertulis 1 terakhir yang berlaku selama 6 (enam) bulan dengan: a. Pemotongan Tunjangan Posisi (P2) sebesar 100%; b. Kriteria Talenta Sangat Perlu Penyesuaian (SPP); dan c. Penurunan 1 *grade*.	1. Written warning 1 valid for 6 (six) months with the Criteria of Talent Needs Adjustment (PPS). 2. Written warning 2 valid for 6 (six) months with: a. Deduction of Position Allowance (P2) by 75%; and b. Talent Needs Adjustment (PPS) criteria. 3. The last 2 written warnings valid for 6 (six) months with the Criteria of Talent Strongly Needs Adjustment (SPP). 4. The last 3 written warnings valid for 6 (six) months with the Criteria of Talent Strongly Needs Adjustment (SPP). 5. The last 1 written warning valid for 6 (six) months with: a. Deduction of Position Allowance (P2) by 100%; b. Talent Strongly Needs Adjustment (SPP) criteria; and c. 1-grade demotion.	1. Demosi 2. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 1. Demosi 2. Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
Disiplin Berat Severe Discipline	Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	Termination of Employment (PHK)	Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Claim for Compensation (TGR)

Penegakan Standar Etika Perusahaan

Enforcement of the Code of Conduct

Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Standar Etika Perusahaan ini dikomunikasikan, dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh Insan Perusahaan. Perusahaan berkomitmen menindak tegas setiap pelaku pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bentuk penegakan disiplin terhadap Standar Etika Perusahaan. Perusahaan secara berkala melakukan evaluasi atas penerapan Standar Etika Perusahaan sesuai dengan mekanisme Internalisasi Budaya Perusahaan.

Perusahaan menyediakan fasilitas pengaduan atas pelanggaran dalam mendukung penegakan Standar Etika Perusahaan. Terdapat dua saluran pengaduan yang disediakan yaitu melalui laporan kepada atasan langsung dan mekanisme *Whistleblowing System* (WBS) untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di Perusahaan. Setiap karyawan Perusahaan didorong berperan aktif dan wajib melaporkan apabila terdapat indikasi tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Standar Etika Perusahaan. Insan Perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran diperiksa oleh Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Karyawan, dan yang bersangkutan dijatuhi sanksi sesuai jenis dan tindakan pelanggaran berdasarkan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

Selama tahun 2022, terdapat 4 (empat) pelanggaran disiplin di Perusahaan. Kualitas penerapan dan penegakan Standar Etika Perusahaan selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

The Board of Directors is responsible for ensuring that the Code of Conduct is communicated, understood and carried out by all Company personnel. The Company is committed to taking firm action against any violators in accordance with the stipulated provisions as a form of disciplinary enforcement of the Code of Conduct. The Company periodically evaluates the implementation of the Code of Conduct in accordance with the Corporate Culture Internsalization mechanism.

The Company provides a complaint facility for violations in supporting the enforcement of the Code of Conduct. There are two complaint channels provided, namely through reports to direct superiors and the Whistleblowing System (WBS) mechanism to be followed-up in accordance with the provisions of applicable regulations in the Company. Every employee of the Company is encouraged to play an active role and is obliged to report if there are indications of actions that can be categorized as violations of the Code of Conduct. Company personnel who are proven to have committed a violation are examined by the Employee Discipline Violation Examination Team, and the person concerned is sanctioned according to the type and act of violation based on the applicable provisions in the Company.

During 2022, there were 4 (four) disciplinary violations in the Company. The quality of implementation and enforcement of the Code of Conduct for the latest five years is as the following chart:

Penegakan Pelanggaran Standar Etika Perusahaan Tahun 2018-2022
Enforcement of Violations of the Code of Conduct in 2018-2022

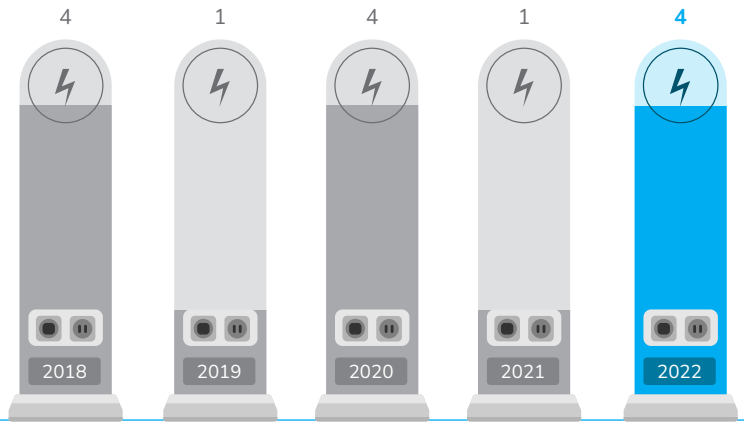

Bentuk pelanggaran dan sanksi atas pelanggaran *Code of Conduct* yang telah dikeluarkan Perusahaan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

The forms of violations and sanctions for violations of the Code of Conduct that have been issued by the Company in 2022 are as follows:

Bentuk Pelanggaran dan Jenis Sanksi Pelanggaran Standar Etika
Violations and Types of Sanctions for Violations of the Code of Conduct

Bentuk Pelanggaran Violation	Jumlah Karyawan Terkena Sanksi Disiplin Number of Employees Affected by Disciplinary Sanctions	Jenis Sanksi Type of Sanction	Hukuman Penalty	
Fundamental (Pencurian) Fundamental (Theft)	1	Disiplin Sedang – Peringatan Tertulis 1 Terakhir Moderate Discipline - Last Written Warning 1	Sanksi pokok : a. Pemotongan Tunjangan Posisi (P2) 100% b. Kriteria Talenta Sangat Perlu Penyesuaian (SPP); dan c. Penurunan 1 *Grade* Sanksi tambahan : Berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) berupa barang	Principal sanctions: a. Deduction of Position Allowance (P2) by 100% b. Talent Strongly Needs Adjustment (SPP) Criteria; and c. 1-Grade Demotion Additional sanctions: In the form of Claims for Compensation (TGR), in the form of goods
Fundamental (Pemanfaatan Jabatan dan Manipulasi data dengan kerugian materiil) Fundamental (Position Utilization and Data Manipulation with material loss)	2	Disiplin Sedang – Peringatan Tertulis 1 Moderate Discipline - Written Warning 1	Berupa Peringatan tertulis 1 yang berlaku selama 6 (enam) bulan dengan Kriteria Talenta Perlu Penyesuaian (PPS), dan Sanksi tambahan : Berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	In the form of Written warning 1 valid for 6 (six) months with the Criteria of Talent Needs Adjustment (PPS), and Additional sanctions: In the form of Claims for Compensation (TGR)
Fundamental (Manipulasi data) Fundamental (Data Manipulation)	1	Disiplin Sedang – Peringatan Tertulis 1 Moderate Discipline - Written Warning 1	Berupa Peringatan tertulis 1 yang berlaku selama 6 (enam) bulan dengan Kriteria Talenta Perlu Penyesuaian (PPS)	In the form of Written warning 1 valid for 6 (six) months with the Criteria of Talent Needs Adjustment (PPS)

Evaluasi Implementasi Standar Etika Perusahaan
Evaluation of the Implementation of the Code of Conduct

Perusahaan mengevaluasi strategi sosialisasi dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kesadaran terhadap penerapan Standar Etika Perusahaan dan perangkat pendukung lainnya serta mendorong kualitas penerapan dan penegakan Standar Etika Perusahaan agar mencapai sasaran tata kelola berkelanjutan. Standar Etika Perusahaan sebagai pedoman yang bersifat dinamis, dikaji secara berkala dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa muatannya senantiasa relevan dengan perkembangan Perusahaan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang ada pada Budaya Perusahaan.

The Company evaluates socialization strategies and activities in order to increase awareness towards the implementation of the Code of Conduct and other supporting tools as well as to encourage the quality of the implementation and enforcement of the Code of Conduct in order to achieve sustainable governance targets. The Code of Conduct as a dynamic guideline, is reviewed periodically and continuously to ensure that its content is always relevant to the development of the Company while taking into account the values that exist in the Corporate Culture.

Kebijakan Anti Korupsi
Anti-Corruption Policy

Kebijakan anti korupsi merupakan bagian dari implementasi Standar Etika Perusahaan yang tidak terpisahkan dalam upaya membangun *Good Corporate Governance* di Perusahaan yang tujuan utamanya adalah memberikan nilai tambah dan menjaga keberlanjutan. Kebijakan anti korupsi dijalankan melalui Program PJB Bersih termasuk ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Pengendalian Gratifikasi, Kebijakan Anti Fraud dan memenuhi kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Implementasi kebijakan anti korupsi sangat penting untuk meminimalisir ada risiko *fraud* dan permasalahan hukum yang dapat menimbulkan inefisiensi dalam pengelolaan Perusahaan serta menjaga reputasi Perusahaan dimata konsumen, mitra bisnis ataupun Pemegang Saham.

The anti-corruption policy is part of the implementation of the Code of Conduct which is integral in the effort to build Good Corporate Governance in the Company whose main objective is to provide added value and maintain sustainability. The anti-corruption policy is carried out through the PJB Bersih Program including ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP), Gratification Control, Anti-Fraud Policy and compliance with the State Official Wealth Report (LHKPN). The implementation of anti-corruption policies is very important to minimize the risk of fraud and legal issues that can cause inefficiencies in the management of the Company and maintain the Company's reputation in the eyes of consumers, business partners or Shareholders.

Program PJB Bersih
PJB Bersih Program

Program PJB Bersih merupakan salah satu upaya Perusahaan dalam menciptakan kegiatan bisnis yang unggul, tangguh, bermartabat (bersih dari segala bentuk penyimpangan dan kecurangan termasuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), memenuhi prinsip-prinsip *Good corporate Governance* dan meningkatkan budaya perusahaan (*corporate culture*) serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Pelaksanaan PJB Bersih melibatkan semua organ Perusahaan, karyawan, pejabat, dan pemangku kepentingan. Perusahaan telah melakukan deklarasi “PJB Bersih” yang diikuti oleh seluruh karyawan serta mitra kerja melalui kegiatan *Supplier Gathering* pada tanggal 6 Mei 2015 di Kantor Pusat.

PJB Bersih Program is one of the Company's efforts in creating superior, resilient, dignified business activities (clean from all forms of irregularities and fraud including Corruption, Collusion and Nepotism), fulfilling the principles of Good corporate Governance and improving corporate culture as well as supporting sustainable development. The implementation of PJB Bersih involves all organs of the Company, employees, officials and stakeholders. The Company has made a declaration of " PJB Bersih" which was participated by all employees and partners through Supplier Gathering activities on May 6, 2015 at the Head Office.

Pelaksanaan Program PJB Bersih mengacu pada Pedoman PJB Bersih yang ditetapkan Direksi melalui Keputusan Direksi No. 092.K/010/DIR/2014. Penyusunan Pedoman PJB Bersih turut memperhatikan kesesuaian terhadap peraturan/perundang-undangan yang berlaku, serta kondisi lingkungan dan kegiatan bisnis yang dijalankan Perusahaan. Pedoman PJB Bersih disosialisasikan kepada seluruh Insan Perusahaan melalui media saluran informasi yang dimiliki Perusahaan. Pada tahun 2022, telah dilakukan sosialisasi PJB Bersih kepada Karyawan di Unit yang rutin dilaksanakan melalui agenda *coffee morning/weekly meeting* serta dalam kegiatan *Supplier Gathering Unit.*

The implementation of the PJB Bersih Program refers to the PJB Bersih Guidelines determined by the Board of Directors through the Decree of the Board of Directors No. 092.K/010/DIR/2014. The preparation of PJB Bersih Guidelines also takes into account compliance with applicable laws/regulations, as well as environmental conditions and business activities carried out by the Company. PJB Bersih Guidelines are socialized to all Company personnel through the Company's information channel media. In 2022, Clean PJB has been socialized to Employees in the Unit which was routinely carried out through the coffee morning/weekly meeting agenda as well as in the Supplier Gathering Unit activities.

Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Anti-Bribery Management System (ABMS)

Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016) merupakan standar yang menjadi panduan untuk organisasi publik, swasta dan nirlaba yang diakui oleh nasional ataupun internasional sebagai instrumen pencegahan terjadinya penyuapan yang memadai (*adequate procedure*), mendeteksi, maupun mengatasi penyuapan yang mungkin terjadi di lingkungan Perusahaan.

Perusahaan berkomitmen untuk menciptakan kondisi perusahaan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme melalui penerapan budaya Perusahaan *No Bribery, No Kickback, No Gift, No Luxurious Hospitality* yang didukung kerangka kerja pengendalian yang efektif untuk mendeteksi dan meminimalisir praktik penyuapan.

Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan mengacu pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
3. Surat Kementerian BUMN Nomor: S-17/S.MBU/02/2020 pada tanggal 17 Februari 2020 menyebutkan semua BUMN wajib melakukan sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan; dan
4. Peraturan Direksi terkait Kebijakan Manajemen Anti *Fraud* di Lingkungan PT PLN Nusantara Power (PLN NP).

Perusahaan telah mengimplementasikan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dalam proses bisnis pada industri ketenagalistrikan dengan menerbitkan kebijakan yang mendukung penerapannya antara lain Pedoman pengendalian gratifikasi, Pedoman LHKPN, Pengelola Pengaduan Pelanggaran, Pedoman Budaya Perusahaan, Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko, implementasi *Integrated Management System* (IMS) 2.0. Perusahaan akan berkomitmen untuk selalu melakukan perbaikan berkelanjutan guna peningkatan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

The Anti-Bribery Management System (ISO 37001:2016) is a standard that serves as a guide for public, private and non-profit organizations that is recognized nationally or internationally as an adequate instrument to prevent the occurrence of bribery (adequate procedure), detect, and overcome bribery that may occur within the Company.

The Company is committed to creating corporate conditions that are free of corruption, collusion and nepotism through the implementation of the No Bribery, No Kickback, No Gift, No Luxurious Hospitality corporate culture supported by an effective control framework to detect and minimize bribery practices.

Implementation of the Anti-Bribery Management System refers to:

1. Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 1999 concerning State Organization that is Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism;
2. Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering;
3. Letter of the Ministry of SOEs Number: S-17/S.MBU/02/2020 on February 17, 2020 stating that all SOEs are required to conduct ISO 37001 Anti-Bribery Management System certification; and
4. Board of Directors Regulation related to Anti-Fraud Management Policy within PT PLN Nusantara Power (PLN NP).

The Company has implemented ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (ABMS) in business processes in the electricity industry by issuing policies that support its implementation, including Guidelines for gratification control, LHKPN Guidelines, Management of Violation Complaints, Corporate Culture Guidelines, Risk Management Policies and Guidelines, implementation of the Integrated Management System (IMS) 2.0. The Company will be committed to always make continuous improvements in order to improve the implementation of the Anti-Bribery Management System.

Pengendalian Gratifikasi

Gratification Control

Pengendalian gratifikasi merupakan upaya dalam menjaga komitmen Perusahaan terhadap penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai penjabaran dari implementasi AKHLAK dan peningkatan Budaya Integritas. Seluruh Insan Perusahaan dilarang untuk menerima bingkisan dan/atau hadiah dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung, dari mitra dan/atau pihak ketiga lainnya terkait dengan hubungan kedinasan.

Penerapan Pengendalian Gratifikasi mengacu pada Surat Keputusan Direksi No. 092.K/010/DIR/2014 dan dipertegas dengan Surat Edaran Direksi Nomor 008.K/012/DIR/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelaporan dan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Pembangkitan Jawa-Bali. Kebijakan Pengendalian Gratifikasi tersebut diperbaharui dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Direksi dan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 005.K/021/DIR/2017 dan Nomor 013.K/DK-PJB/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelaporan dan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Pembangkitan Jawa-Bali sebagai bentuk dukungan Dewan Komisaris terhadap program pengendalian gratifikasi. Penerbitan SKB tersebut juga menjadi dasar pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Perusahaan.

Kegiatan pengendalian gratifikasi yang telah dilaksanakan Perusahaan dilaporkan Unit Pengendalian Gratifikasi secara berkala kepada Direksi. Kegiatan pengendalian gratifikasi yang dilaksanakan sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Laporan Penolakan, Penerimaan dan Pemberian Gratifikasi oleh karyawan PLN NP.
2. Penyampaian Laporan Kegiatan UPG Tahun 2021 dan 2022.
3. Penyampaian Himbauan Internalisasi Program Pencegahan Gratifikasi.
4. Partisipasi pada *E-Learning* Bimbingan Teknis Pengendalian Gratifikasi.
5. Partisipasi UPG dalam Bimbingan Teknis Terkait Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi.
6. Koordinasi Persiapan dan Pelaksanaan Survei *Awareness* Integritas Tahun 2022.
7. Pemberitahuan Larangan Menerima Parcel/Bingkisan atau hadiah lainnya dalam Hari Raya Keagamaan.
8. Diseminasi Media Sosialisasi Pesan Anti-Gratifikasi.
9. Sosialisasi Pencegahan Gratifikasi oleh Admin UPG Unit kepada karyawan PLN NP.
10. Bimbingan Teknis Aplikasi *Compliance Online System* (COS) dan Pengelolaan Gratifikasi.
11. Pemberitahuan Larangan Menerima Parcel/Bingkisan atau hadiah lainnya dalam peringatan Hari Natal dan Tahun Baru 2022.

Gratification control is an effort in maintaining the Company's commitment to the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles as an elaboration of the implementation of AKHLAK and the enhancement of Integrity Culture. All Company personnel are prohibited from receiving parcels and/or gifts in any form, either directly or indirectly, from partners and/or other third parties related to official relations.

The implementation of Gratification Control refers to the Decree of the Board of Directors No. 092.K/010/DIR/2014 and is emphasized with the Circular Letter of the Board of Directors No. 008.K/012/DIR/2016 concerning Guidelines for the Implementation of Gratification Reporting and Control within PT Pembangkitan Jawa-Bali. The Gratification Control Policy was updated with a Joint Decree (SKB) of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa-Bali Number 005.K/021/DIR/2017 and Number 013.K/DK-PJB/2017 concerning Guidelines for the Implementation of Gratification Reporting and Control within PT Pembangkitan Jawa-Bali as a form of support from the Board of Commissioners for the gratification control program. The issuance of the Joint Decree is also the basis for the establishment of the Gratification Control Unit (UPG) in the Company.

Gratification control activities that have been implemented by the Company are reported by the Gratification Control Unit periodically to the Board of Directors. The gratification control activities carried out throughout 2022 are as follows:

1. Management of Rejection, Acceptance and Provision of Gratification Reports by PLN NP employees.
2. Submission of UPG Activity Reports for 2021 and 2022.
3. Submission of the Appeal for Internalization of the Gratification Prevention Program.
4. Participation in E-Learning Technical Guidance on Gratification Control.
5. UPG Participation in Technical Guidance Related to the Implementation of the Gratification Control Program.
6. Coordination of Preparation and Implementation of the Integrity Awareness Survey in 2022.
7. Notification of Prohibition of Receiving Parcels/Gifts or other gifts in Religious Holidays.
8. Dissemination of Anti-Gratification Message Socialization Media.
9. Socialization of Gratification Prevention by UPG Unit Admin to PLN NP employees.
10. Technical Guidance on Compliance Online System (COS) Application and Gratification Management.
11. Notification of Prohibition of Receiving Parcels/Gifts or other gifts in commemoration of Christmas Day and New Year 2022.

Unit Pengendalian Gratifikasi telah menerima laporan gratifikasi dari seluruh unit dan anak Perusahaan sepanjang tahun 2022 sebanyak 65 laporan. Laporan tersebut terdiri dari 11 Laporan Penolakan Gratifikasi, 29 Laporan Penerimaan dan 25 Laporan Pemberian Gratifikasi.

The Gratification Control Unit has received 65 gratification reports from all units and subsidiaries throughout 2022. The reports consisted of 11 Gratification Rejection Reports, 29 Acceptance Reports and 25 Gratification Provision Reports.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

State Official Wealth Report (LHKPN)

LHKPN merupakan laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan wajib LHKPN. Perusahaan menetapkan kebijakan LHKPN melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Direksi dan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 004.K/021/DIR/2017 tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan PT Pembangkitan Jawa-Bali. Kebijakan LHKPN tersebut mengacu pada:

1. Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)
2. Permen BUMN No. PER-10/MBU/06/202 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/01/2018 Tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara
3. Peraturan Direksi PT PLN Nomor 0074.P/DIR/2017 tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan PT PLN (Persero).

Fungsi Pengelola LHKPN diatur dalam Surat Keputusan Bersama Nomor 004.K/021/DIR/2017 tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan PT Pembangkitan Jawa-Bali. Fungsi Pengelola LHKPN di lingkungan PLN sebagai Admin Instansi yang mempunyai wewenang khusus terhadap pengelolaan LHKPN yaitu Bidang Risiko Legal dan Kepatuhan pada Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Fungsi Pengelola LHKPN di lingkungan Perusahaan sebagai Admin Unit e-LHKPN yang mempunyai wewenang khusus terhadap pengelolaan LHKPN yaitu Bidang Kepatuhan Kantor Pusat PJB. Bidang kepatuhan kantor pusat berkoordinasi dengan Fungsi Kepatuhan unit dan anak perusahaan dan perusahaan asosiasi (AP/PA) untuk membantu kelancaran pelaksanaan pelaporan LHKPN di masing-masing Unit.

LHKPN is a report in printed form and/or other forms on the description and details of information regarding assets, personal data, including income, expenditures and other data on the mandatory wealth of LHKPN. The Company determines the LHKPN policy through a Joint Decree (SKB) between the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa-Bali Number 004.K/021/DIR/2017 concerning Guidelines for the State Official Wealth Report (LHKPN) within PT Pembangkitan Jawa-Bali. The LHKPN policy refers to:

1. KPK Regulation Number 2 of 2020 concerning Amendments to KPK Regulation Number 7 of 2016 concerning Procedures for Registration of Announcements and Examination of State Official Wealth (LHKPN)
2. Regulation of the Minister of SOEs No. PER-10/MBU/06/202 of 2021 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/01/2018 concerning Reporting the State Official Wealth within the Ministry of State-Owned Enterprises
3. Regulation of the Board of Directors of PT PLN Number 0074.P/DIR/2017 concerning Guidelines for the State Official Wealth Report (LHKPN) within PT PLN (Persero).

The LHKPN Management function is regulated in a Joint Decree Number 004.K/021/DIR/2017 concerning Guidelines for the State Official Wealth Report (LHKPN) within PT Pembangkitan Jawa-Bali. The LHKPN Management function within PLN as an Institutional Admin that has special authority over LHKPN management, namely the Legal and Compliance Risk Department in the Risk Management and Compliance Division. The LHKPN Management function within the Company as an e-LHKPN Unit Admin that has special authority over LHKPN management, namely the Compliance Department of PJB Head Office. The head office compliance department coordinates with the Compliance Function of units, subsidiaries, and associated companies (AP/PA) to assist the smooth implementation of LHKPN reporting in each unit.

Pejabat Wajib Lapor LHKPN sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan LHKPN berdasarkan Surat Keputusan Bersama Nomor 004.K/021/DIR/2017 pasal 4 adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris Perusahaan
2. Direksi Perusahaan;
3. Wakil Perusahaan yang ditugaskan sebagai Direksi atau Komisaris di Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi;
4. Karyawan Perusahaan pada jenjang jabatan struktural yang meliputi Manajemen Atas, Manajemen Menengah, Manajemen Dasar dan Supervisor Atas;
5. Karyawan Perusahaan pada jenjang jabatan fungsional yang meliputi Fungsional 1, Fungsional 2, dan Fungsional 3; dan
6. Pejabat Perencana Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Pengadaan.

Bidang Kepatuhan secara berkala melakukan monitoring untuk mengetahui perubahan jumlah Wajib LHKPN dikarenakan jumlah Wajib LHKPN Perusahaan mengalami pergerakan yang dinamis pada tiap periodenya. Sampai dengan akhir tahun 2022, terdapat 900 wajib LHKPN dengan rincian sebagai berikut :

The LKHPN Obligatory Reporting Officials as stipulated in the LHKPN policy based on the Joint Decree Number 004.K/021/DIR/2017 article 4 are as follows:

1. Board of Commissioners of the Company
2. Board of Directors of the Company;
3. Representatives of the Company who are assigned as the Board of Directors or Commissioners in Subsidiaries and Affiliated Companies;
4. Employees of the Company at the structural position level which includes Upper Management, Middle Management, Basic Management and Upper Supervisor;
5. Employees of the Company at the functional position level which includes Functional 1, Functional 2, and Functional 3; and
6. Procurement Planning Officer and Procurement Implementing Officer.

The Compliance Department periodically conducts monitoring to find out changes in the number of LHKPN Obligatory due to the number of Company LHKPN Obligatory experiencing dynamic movements in each period. Until the end of 2022, there were 900 LHKPN Obligatory with the following details:

No.	Jenjang Jabatan Position Level	Jumlah Total
1	Direksi dan Komisaris PLN NP The Board of Directors and the Board of Commissioners of PLN NP	10
2	Manajemen Atas Upper Management	10
3	Manajemen Menengah Middle Management	82
4	Manajemen Dasar Basic Management	231
5	Supervisor Atas Upper Supervisor	407
6	Supervisor Dasar Basic Supervisor	10
7	Fungsional 2 Functional 2	21
8	Fungsional 3 Functional 3	117
9	Fungsional 4 Functional 4	12
Jumlah Total		**900**

Monitoring Pelaporan Penyelenggaraan Negara
Monitoring Pelaporan Penyelenggaraan Negara

Kepatuhan
Compliance

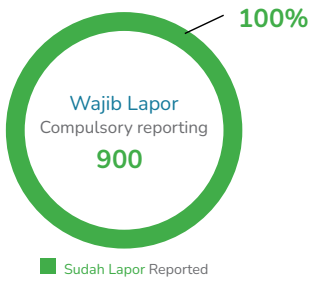

Sudah Lapor Reported	Wajib Lapor Compulsory reporting
900	900

Ketepatan
Accuracy

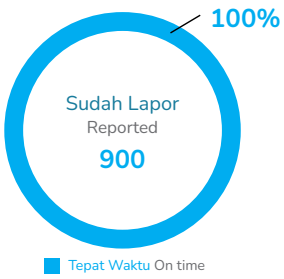

Sudah Lapor Reported	Wajib Lapor Compulsory reporting
900	900

Grafik Penyampaian LHKPN
Submission Graph of LHKPN

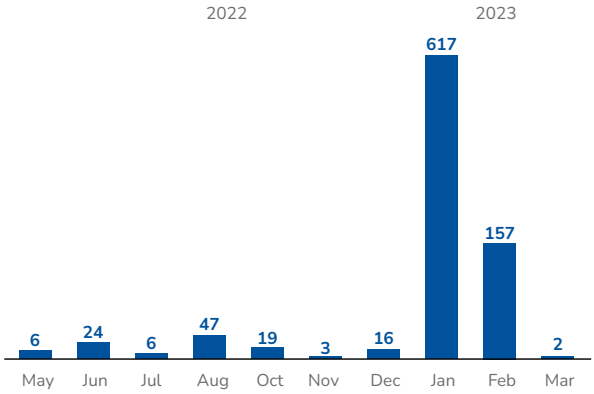

Kepatuhan Perusahaan terhadap pelaporan LHKPN dimonitor oleh Bidang Kepatuhan yang melalui e-filing. Penyampaian LHKPN Tahun 2022 kepada KPK telah dilakukan secara tepat waktu oleh 900 Wajib LHKPN melalui e-lhkpn.kpk.go.id atau telah mencapai 100 % dari total Wajib LHKPN.

The Company's compliance with LHKPN reporting is monitored by the Compliance Department through e-filing. Submission of the 2022 LHKPN to the KPK has been conducted in a timely manner by 900 LHKPN Obligatory through e-lhkpn.kpk.go.id or has reached 100% of the total LHKPN Obligatory.

Kebijakan Anti *Fraud*
Anti-Fraud Policy

Perusahaan berkomitmen dalam menjalankan setiap proses bisnis secara bersih, transparan dan akuntabel dengan memegang teguh penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan kerja Perusahaan. Perusahaan telah melakukan ratifikasi peraturan kebijakan Anti *Fraud* PT PLN (Persero) yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris PT PJB Nomor 002.K/021/DIR/2020 dan Nomor 003.K/DK-PJB/2020 tentang Kebijakan Anti Fraud di Lingkungan PT PJB. Dengan ditetapkannya Kebijakan Anti *Fraud*, diharapkan dapat mendorong efektivitas implementasi Standar Etika Perusahaan.

The Company is committed to carrying out every business process in a clean, transparent and accountable manner by upholding the implementation of the principles of Good Corporate Governance (GCG) within the Company. The Company has ratified PT PLN (Persero) Anti-Fraud policy regulations stipulated in the Joint Decree between the Board of Directors and Board of Commissioners of PT PJB Number 002.K/021/DIR/2020 and Number 003.K/DK-PJB/2020 concerning Anti-Fraud Policy within PT PJB. With the determination of the Anti-Fraud Policy, it is expected to be able to encourage the effectiveness of the implementation of the Code of Conduct.

Benturan Kepentingan

Conflict of Interest

Perusahaan memastikan bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan yang ambil dalam menjalankan bisnis Perusahaan dilakukan semata-mata demi kepentingan dan keberlanjutan Perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan menetapkan ketentuan terkait benturan kepentingan. Benturan kepentingan merupakan situasi dimana terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi/golongan Insan Perusahaan sehingga dapat mempengaruhi kinerja Perusahaan dan menimbulkan kerugian Perusahaan.

Perusahaan telah menerbitkan kebijakan terkait benturan kepentingan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris PT PJB Nomor 003.K/021/DIR/2020 dan 004.K/DK/PJB/2020 tentang Pengelolaan Benturan Kepentingan di Lingkungan PT PJB.

Pencegahan benturan kepentingan di Perusahaan juga dilakukan dengan penyampaian Pakta Integritas setiap tahun oleh Insan Perusahaan, yang berisikan pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan dan akan mencegah/menangani benturan kepentingan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Perusahaan.

Selain itu, seluruh Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat harus menandatangani Pakta Integritas yang diperbaharui secara berkala setiap tahun. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Dewan Komisaris dan Direksi harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, harus senantiasa mendahulukan kepentingan ekonomis Perusahaan diatas kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga, maupun pihak lainnya. Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi yang memiliki potensi benturan kepentingan tidak diperkenankan ikut serta dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan Perusahaan.

The Company ensures that every decision and/or action taken in carrying out the Company's business is conducted solely for the interest and sustainability of the Company. Therefore, the Company determines the provisions related to conflict of interest. Conflict of interest is a situation where there is a difference between the economic interests of the Company and the economic interests of the Company's personal/group of personnel so that it can affect the Company's performance and cause losses to the Company.

The Company has issued a policy related to conflict of interest outlined in the Joint Decree between the Board of Directors and Board of Commissioners of PT PJB Number 003.K/021/DIR/2020 and 004.K/DK/PJB/2020 concerning Management of Conflict of Interest within PT PJB.

Prevention of conflicts of interest in the Company is also conducted by submitting an Integrity Pact every year by Company personnel, which contains a statement that there is no conflict of interest and will prevent/handle conflicts of interest so as not to cause losses to the Company.

In addition, all serving Board of Directors and Board of Commissioners are required to sign an Integrity Pact which is renewed annually. In line with this statement, the Board of Commissioners and Board of Directors must avoid domination by any party, not be influenced by certain interests, free from conflict of interest and from any influence or pressure, so that decision making can be carried out objectively. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors in carrying out their duties and obligations, must always prioritize the economic interests of the Company over the economic interests of their personal or family, or other parties. Members of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors who have a potential conflict of interest are not allowed to participate in the discussion and decision-making process of the Company.

Whistleblowing System

Sistem pelaporan pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) merupakan perangkat pendukung implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam rangka penegakan Standar Etika Perusahaan. Penerapan sistem pelaporan pelanggaran menjadi bagian dari upaya Perusahaan dalam pengelolaan risiko khususnya terkait risiko pelanggaran etika bisnis.

Pedoman penerapan *Whistleblowing System* (WBS) telah ditetapkan pada tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: 004.K/021/DIR/2020 dan Nomor: 007.K/DK-PJB/2020 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) sebagai pemutakhiran atas Keputusan Direksi Nomor: 095.K/010/DIR/2012. Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) disosialisasikan kepada pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal melalui media komunikasi visual (*website*, media elektronik, dll) serta forum tatap muka (*Focus Group Discussion, Supplier Gathering, Customer Gathering*, dll).

The Whistleblowing System (WBS) is a supporting tool for the implementation of Good Corporate Governance in the context of upholding the Code of Conduct. The implementation of the whistleblowing system is part of the Company's efforts in risk management, especially related to the risk of violations of business ethics.

Guidelines for the implementation of the Whistleblowing System (WBS) have been determined in 2020 based on the Joint Decree (SKB) between the Board of Directors and Board of Commissioners Number: 004.K/021/DIR/2020 and Number: 007.K/DK-PJB/2020 concerning the Whistleblowing System as an update to the Decree of the Board of Directors Number: 095.K/010/DIR/2012. The Whistleblowing System policy is socialized to both internal and external stakeholders through visual communication media (website, electronic media, etc.) as well as face-to-face forums (Focus Group Discussion, Supplier Gathering, Customer Gathering, etc.).

Pengelola Pelaporan Pengaduan Pelanggaran
Whistleblowing Manager

Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran mengatur bahwa WBS dikelola oleh Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran. Penanganan lebih lanjut atas laporan pelanggaran khususnya yang dilakukan oleh Karyawan dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Karyawan (TP2DK).

1. Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran
   a. Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran dibentuk dengan Keputusan Direksi yang beranggotakan fungsi pengawasan internal, fungsi hukum dan fungsi kepatuhan.
   b. Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran bertugas untuk mengelola pelaporan/pengaduan pelanggaran, antara lain:
      1) Menerima pelaporan pelanggaran;
      2) Melakukan verifikasi;
      3) Menganalisa dan menyeleksi laporan pelanggaran untuk memutuskan perlu tidaknya dilakukan investigasi lebih lanjut;
      4) Bertanggung jawab atas pelaksanaan program perlindungan Pelapor sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Perusahaan, terutama aspek kerahasiaan dan jaminan keamanan Pelapor. Untuk keperluan ini anggota Komite Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran mendapat akses terhadap bantuan hukum, keuangan dan operasional bila diperlukan.

   Dalam menjalankan tugas Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran dapat meminta bantuan bidang/fungsi lain sesuai obyek pelaporan pelanggaran bila diperlukan.

The Whistleblowing System Policy regulates that the WBS is managed by the Whistleblowing Management Committee. Further handling of violation reports, especially those committed by Employees, is conducted by the Employee Discipline Violation Inspection Team (TP2DK).

1. Whistleblowing Management Committee
   a. The Whistleblowing Management Committee was established by the Board of Directors' Decree with members from the internal control function, legal function and compliance function.
   b. The Whistleblowing Management Committee is tasked with managing reporting/complaints of violations, among others:
      1) Receiving reports of violations;
      2) Verifying;
      3) Analyzing and selecting reports of violations to decide whether further investigation is necessary;
      4) Responsible for the implementation of the Whistleblower protection program in accordance with the policies that have been determined by the Company, especially the aspects of confidentiality and security guarantees of the Whistleblower. For this purpose, members of the Whistleblowing Management Committee receive access to legal, financial and operational assistance if needed.

   In carrying out its duties, the Whistleblowing Management Committee may request assistance from other departments/functions in accordance with the object of whistleblowing if necessary.

c. Anggota Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran juga mendapatkan akses pelaporan langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

2. Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Karyawan (TP2DK)
   a. TP2DK berfungsi untuk menindaklanjuti penerimaan pelaporan dengan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap substansi pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan. Dalam melakukan tugasnya, TP2DK berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang Peraturan Disiplin Karyawan Perusahaan.
   b. Dalam hal pemeriksaan terbukti adanya pelanggaran, maka TP2DK memberikan rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan untuk diputuskan oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Sanksi (PYBMS). Bila Terlapor adalah Karyawan Kantor Pusat, maka PYBMS adalah Direktur MHC dan Administrasi, bila Terlapor adalah Karyawan Unit, maka PYBMS adalah Pimpinan Unit.

c. Members of the Whistleblowing Management Committee also receive direct reporting access to the President Director and the Board of Commissioners.

2. Employee Discipline Violation Inspection Team (TP2DK)
   a. The TP2DK has the function to follow-up the receipt of reports by conducting further inspection of the violations substance committed by Employees. In conducting its duties, the TP2DK is guided by the provisions governing the Company's Employee Disciplinary Regulations.
   b. In the event that the inspection proves that there is a violation, the TP2DK provides recommendations for sanctions against the violation committed to be decided by the Authorized Officer to Give Sanctions (PYBMS). If the Reported Party is a Head Office Employee, the PYBMS is the Director of MHC and Administration, if the Reported Party is a Unit Employee, the PYBMS is the Unit Leader.

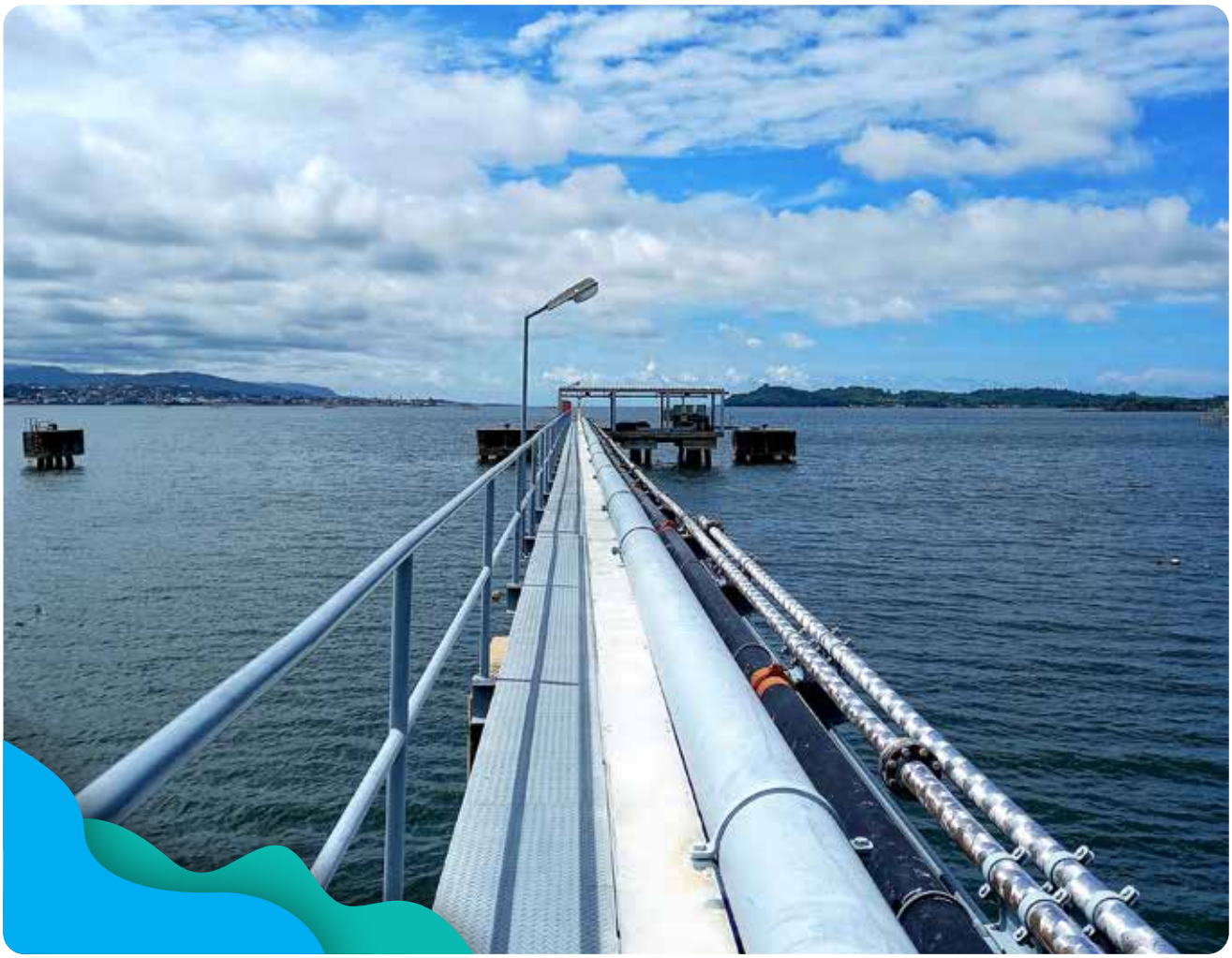

Sarana dan Proses Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran

Facilities and Follow-up Process for Whistleblowing

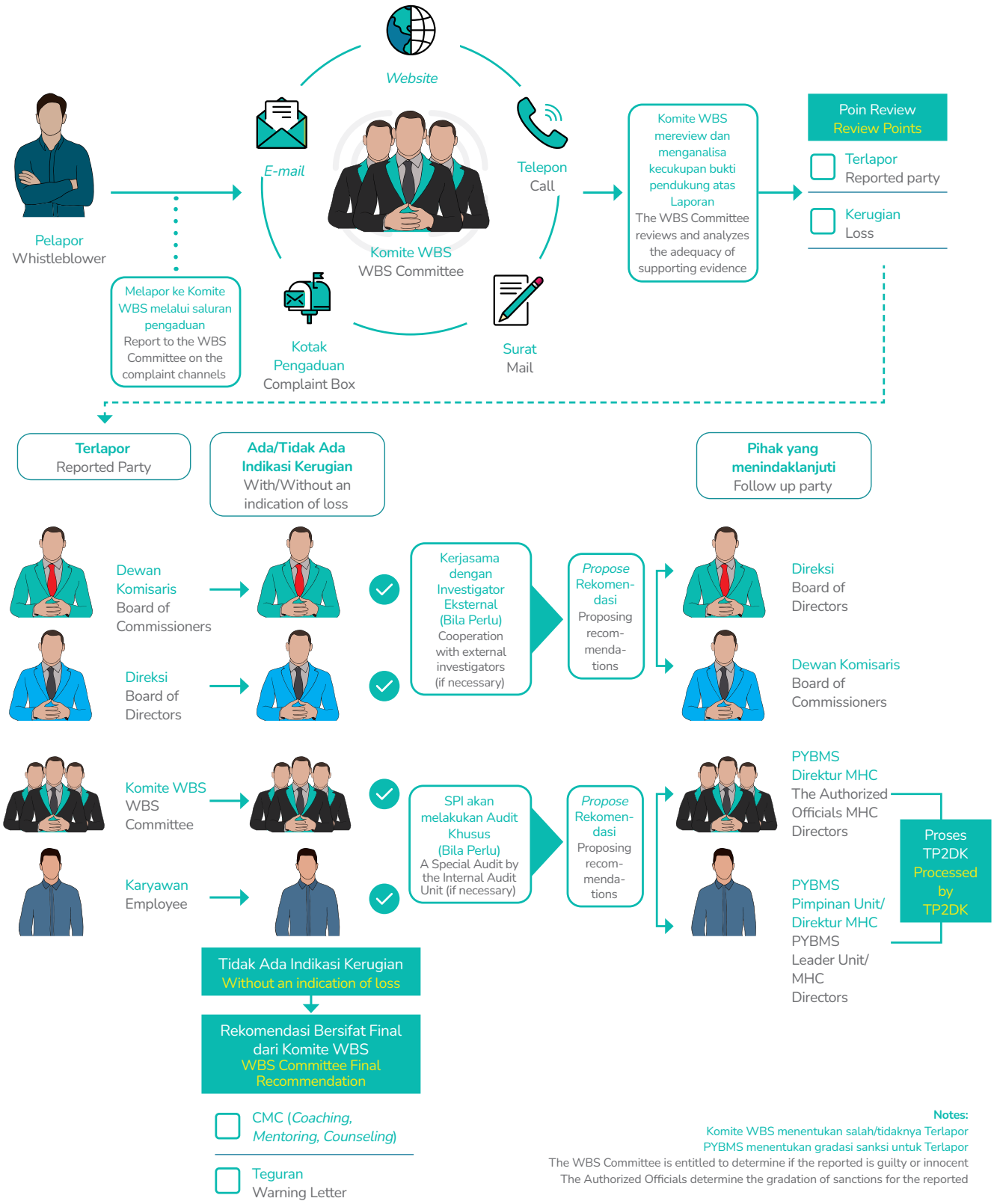

Notes:
Komite WBS menentukan salah/tidaknya Terlapor
PYBMS menentukan gradasi sanksi untuk Terlapor
The WBS Committee is entitled to determine if the reported is guilty or innocent
The Authorized Officials determine the gradation of sanctions for the reported

Sarana Pelaporan Pelanggaran

Means of Whistleblowing

1. Perusahaan wajib menerima laporan pelanggaran dari pihak internal maupun eksternal, baik dari Pelapor yang mencantumkan identitas maupun yang tidak (anonim). Semua laporan yang diterima wajib diproses lebih lanjut sepanjang dapat memberikan bukti-bukti kuat, dapat dipertanggungjawabkan serta tidak mengarah kepada fitnah.
2. Pelaporan pelanggaran wajib disampaikan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dan disertai bukti pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran, diantaranya meliputi:
   a. Pelanggaran yang dilaporkan;
   b. Pihak yang terlibat/Terlapor;
   c. Waktu terjadinya pelanggaran;
   d. Tempat terjadinya pelanggaran;
   e. Bagaimana kejadiannya.
3. Saluran yang tersedia untuk melaporkan pelanggaran adalah:
   a. Surat menyurat dengan alamat:
      Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran
      PT PLN Nusantara Power
      Jalan Ketintang Baru No.11 Surabaya 60231 Indonesia
   b. Kotak Pengaduan:
      1) Gedung PT PLN Nusantara Power Kantor Pusat;
      2) Gedung Administrasi seluruh Unit Kerja.
   c. *Website* dengan alamat https://www.plnnusantarapower.co.id/wbs/
   d. Email dengan alamat pengaduan@plnnusantarapower.co.id.
   e. Telepon/SMS/WhatsApp dengan nomor 08113388448.
      Saluran pelaporan di Unit Kerja dikelola oleh Unit Kerja dan dikomunikasikan secara periodik ke Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran.
4. Untuk mempermudah proses komunikasi dan klarifikasi, dapat dilakukan dengan cara:
   a. Tatap muka; dan/atau
   b. Telepon; dan/atau
   c. Email; dan/atau
   d. Surat menyurat/kotak pos; dan/atau
   e. Sarana komunikasi lainnya.

1. The Company is required to receive violation reports from internal and external parties, both from Whistleblowers who include their identity and those who do not (anonymous). All reports received must be processed further as long as they can provide strong evidence, can be accounted for and do not lead to defamation.
2. Violation reporting must be submitted in a clear and accountable manner and accompanied by supporting evidence relating to the violation, including:
   a. Reported violations;
   b. The party involved/Reported party;
   c. Time of occurrence of the violation;
   d. The place where the violation occurred;
   e. How the violation occurred.
3. Channels available to report violations are:
   a. Correspondence with address:
      Whistleblowing Management Committee
      PT PLN Nusantara Power
      Jalan Ketintang Baru No.11 Surabaya 60231 Indonesia
   b. Complaint Box:
      1) PT PLN Nusantara Power Head Office Building;
      2) Administration Building of all Work Units.
   c. Website with the address https://www.plnnusantarapower.co.id/wbs/
   d. Email with the address pengaduan@plnnusantarapower.co.id.
   e. Phone/SMS/WhatsApp with the number 08113388448.
      The reporting channel in the Work Unit is managed by the Work Unit and communicated periodically to the Whistleblowing Management Committee.
4. To facilitate the communication and clarification process, it can be conducted by:
   a. Face-to-face; and/or
   b. Telephone; and/or
   c. Email; and/or
   d. Correspondence/mail box; and/or
   e. Other means of communication.

Proses Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran

Follow-up Process of Whistleblowing

1. Laporan pelanggaran ditujukan ke Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran melalui saluran pelaporan yang tersedia.
2. Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi untuk selanjutnya memutuskan perlu tidaknya dilakukan investigasi lebih lanjut atas laporan pengaduan pelanggaran dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.
3. Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa laporan pelanggaran tidak benar (tidak sesuai fakta) dan tidak ada bukti permulaan yang cukup, maka tidak akan diproses lebih lanjut. Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi pelanggaran (sesuai fakta) yang disertai bukti permulaan yang cukup, maka pengaduan dapat diproses ke tahap investigasi.
4. Dalam proses verifikasi dan penentuan tindak lanjut, Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran mengklasifikasikan Terlapor sebagai berikut:
   a) Bila Terlapor adalah Karyawan
      1) Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi, melaporkan ringkasan kasus serta usulan rekomendasi kepada PYBMS untuk proses lebih lanjut. Usulan rekomendasi dapat berupa pemeriksaan lebih lanjut oleh TP2DK bila jenis pelanggaran memiliki indikasi fraud;
      2) Bila tidak ada indikasi fraud maka usulan rekomendasi dapat berupa *Coaching Mentoring Counseling* (CMC) dan teguran kepada Karyawan yang bersangkutan;
      3) Apabila berdasarkan pertimbangan jenis pelanggaran bersifat kompleks, rumit dan memerlukan analisa bukti-bukti yang lebih mendalam, maka Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran dapat meminta kepada Direksi untuk menugaskan SPI melakukan audit khusus terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh TP2DK sesuai ketentuan yang berlaku.
   b) Bila Terlapor adalah Direksi
      1) Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi, melaporkan ringkasan kasus serta usulan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk proses lebih lanjut;
      2) Dewan Komisaris melakukan proses lebih lanjut terhadap pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi, termasuk memutuskan perlu tidaknya bekerjasama dengan Investigator Eksternal. Hasil proses lebih lanjut ini dilaporkan oleh Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham.

1. Violation reports are addressed to the Whistleblowing Management Committee through the available reporting channels.
2. The Whistleblowing Management Committee conducts verification to further decide whether or not further investigation of the whistleblowing report is necessary within 30 (thirty) days and can be extended for a maximum of 30 (thirty) days.
3. If the verification results show that the violation report is not true (not in accordance with the facts) and there is insufficient preliminary evidence, it will not be processed further. If the verification results show that there are indications of violations (according to the facts) accompanied by sufficient preliminary evidence, the complaint can be processed to the investigation stage.
4. In the process of verification and determination of follow-up, the Whistleblowing Management Committee classifies the Reported Party as follows:
   a) If the Reported Party is an Employee
      1) The Whistleblowing Management Committee conducts verification, reports case summaries and proposed recommendations to the PYBMS for further processing. Proposed recommendations can be in the form of further inspection by the TP2DK if the type of violation has indications of fraud;
      2) If there is no indication of fraud, the proposed recommendation can be in the form of Coaching Mentoring Counseling (CMC) and a warning to the Employee concerned;
      3) If based on the consideration of the type of violation is complex, complicated and requires a more in-depth analysis of evidence, the Whistleblowing Management Committee may request the Board of Directors to assign the IAU to conduct a special audit first before further inspection by the TP2DK in accordance with applicable provisions.
   b) If the Reported Party is the Board of Directors
      1) The Whistleblowing Management Committee conducts verification, reports case summaries and proposed recommendations to the Board of Commissioners for further processing;
      2) The Board of Commissioners conducts further processing of the whistleblowing conducted by the Board of Directors, including deciding whether or not to cooperate with External Investigators. The results of this further process are reported by the Board of Commissioners to the Shareholders.

c) Bila Terlapor adalah Dewan Komisaris
   1) Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi, melaporkan ringkasan kasus serta usulan rekomendasi kepada Direksi untuk proses lebih lanjut;

   2) Direksi melakukan proses lebih lanjut terhadap pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, termasuk memutuskan perlu tidaknya bekerjasama dengan Investigator Eksternal. Hasil proses lebih lanjut ini dilaporkan oleh Direksi kepada Pemegang Saham.

d) Bila Terlapor adalah Organ Pendukung Dewan Komisaris

   1) Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi, melaporkan ringkasan kasus serta usulan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk proses lebih lanjut;
   2) Dewan Komisaris melakukan proses lebih lanjut terhadap pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh Organ Pendukung Dewan Komisaris, termasuk memutuskan perlu tidaknya bekerjasama dengan Investigator Eksternal.

e) Bila Terlapor adalah Anggota Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran
   Apabila yang dilaporkan melakukan pelanggaran adalah Anggota Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran, maka yang bersangkutan harus dinon-aktifkan untuk sementara sampai menunggu hasil verifikasi dan investigasi. Apabila tidak terbukti, maka yang bersangkutan akan diaktifkan kembali, namun apabila terbukti maka Direksi dapat melakukan penggantian keanggotaan Komite.

5. Apabila hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran yang mengarah ke tindak pidana, maka dapat ditindaklanjuti dengan proses hukum yang berlaku kepada lembaga penegak hukum dengan Direksi atau Pejabat Lain yang diberi kuasa oleh Pemegang Saham sebagai Pejabat Penyerah Perkara.

c) If the Reported Party is the Board of Commissioners
   1) The Whistleblowing Management Committee conducts verification, reports case summaries and proposed recommendations to the Board of Directors for further processing;
   2) The Board of Directors conducts a further process of the whistleblowing conducted by the Board of Commissioners, including deciding whether or not to cooperate with External Investigators. The results of this further process are reported by the Board of Directors to the Shareholders.

d) If the Reported Party is a Supporting Organ of the Board of Commissioners
   1) The Whistleblowing Management Committee conducts verification, reports case summaries and proposed recommendations to the Board of Commissioners for further processing;
   2) The Board of Commissioners conducts further processing of the whistleblowing conducted by the Supporting Organ of the Board of Commissioners, including deciding whether or not to cooperate with External Investigators.

e) If the Reported Party is Member of the Whistleblowing Management Committee
   If the person reported to have committed a violation is a Member of the Whistleblowing Management Committee, then the person concerned must be temporarily deactivated until the results of verification and investigation. If not proven, then the person concerned will be reactivated, however, if proven, the Board of Directors may replace the Committee membership.

5. If the results of the investigation prove that there is a violation that leads to a criminal offense, it can be followed-up with the applicable legal process to law enforcement agencies with the Board of Directors or Other Officials authorized by the Shareholders as the Case Handover Officer.

Perlindungan Terhadap Pelapor
Whistleblower Protection

Semua laporan pelanggaran akan dijamin kerahasiaan dan keamanannya oleh Perusahaan. Pengelolaan kerahasiaan identitas Pelapor dilakukan dengan otoritas bertingkat, sehingga dapat dijaga kerahasiaannya secara permanen, kecuali dalam hal proses hukum memerlukan dibukanya identitas Pelapor sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Confidentiality and security of all violation reports will be guaranteed by the Company. The confidentiality management of the Whistleblower's identity is conducted with multilevel authority, so that the confidentiality can be maintained permanently, except in the event that the legal process requires the disclosure of the Whistleblower's identity in accordance with applicable legal provisions.

Perusahaan berkomitmen untuk melindungi Pelapor pelanggaran yang beritikad baik sebagai upaya untuk mendorong terjadinya pelaporan pelanggaran dan menjamin keamanan Pelapor maupun keluarganya. Perusahaan akan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait serta *best practices* yang berlaku dalam penyelenggaraan WBS.

1. Jika Pelapor adalah pihak internal Perusahaan, maka akan mendapatkan perlindungan standar dari Perusahaan terhadap perlakuan yang merugikan seperti:
   a. Pemecatan yang tidak adil;
   b. Penurunan jabatan atau pangkat;
   c. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuk;
   d. Catatan merugikan dalam personal *file record*.
2. Jika Pelapor adalah pihak eksternal Perusahaan, maka akan mendapatkan perlindungan standar dari Perusahaan terhadap perlakuan yang merugikan atas tindakan balasan dari Terlapor atau Organisasi seperti:
   a. Diskriminasi dalam kerjasama usaha;
   b. Diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
3. Jika Pelapor adalah *Justice Collaborator*, maka akan mendapatkan perlindungan standar dari Perusahaan terhadap perlakuan yang merugikan atas laporan yang disampaikan. Apabila dalam proses investigasi Pelapor terbukti ikut bersalah dalam pelanggaran yang dilaporkan, maka kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan yang meringankan terhadap sanksi yang direkomendasikan TP2DK kepada PYBMS.
4. Selain perlindungan di atas, untuk Pelapor yang beritikad baik, Perusahaan juga akan menyediakan perlindungan hukum (jika diperlukan) sebagaimana diatur pada pasal 5 dan pasal 10 Undang-Undang No.31 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan pasal 12 Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:
   a. Perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata;
   b. Perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga Pelapor dari ancaman fisik dan/atau mental;
   c. Perlindungan terhadap harta Pelapor;
   d. Perahasiaan dan penyamaran identitas Pelapor; dan/atau
   e. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan Terlapor pada setiap tingkat pemeriksaan perkara dalam hal pelanggaran tersebut masuk pada sengketa pengadilan.

Jika diperlukan, Pelapor juga dapat meminta bantuan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagaimana diatur pada pasal 5, pasal 10 dan pasal 28 ayat (3) Undang-Undang No.31 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

The Company is committed to protecting Whistleblowers who act in good faith as an effort to encourage the occurrence of whistleblowing and ensure the safety of the Whistleblower and his/her family. The Company will comply with all relevant laws and regulations as well as best practices applicable in the implementation of the WBS.

1. If the Whistleblower is an internal party of the Company, he/she will receive standard protection from the Company against adverse treatment such as:
   a. Unfair dismissal;
   b. Demotion in position or rank;
   c. Harassment or discrimination in all forms;
   d. Adverse record in the personal file record.
2. If the Whistleblower is an external party of the Company, he/she will receive standard protection from the Company against adverse treatment of retaliation from the Reported Party or an Organization such as:
   a. Discrimination in business cooperation;
   b. Discrimination in the provision of services.
3. If the Whistleblower is a Justice Collaborator, he/she will receive standard protection from the Company against adverse treatment of the report submitted. If in the investigation process the Whistleblower is proven to be guilty of the reported violation, his/her testimony can be used as a lightened consideration for the sanction recommended by the TP2DK to the PYBMS.
4. In addition to the above protection, for Whistleblowers who are in good faith, the Company will also provide legal protection (if needed) as stipulated in article 5 and article 10 of Law No. 31 of 2014 concerning Amendments to Law No. 13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection and article 12 of Government Regulation No. 43 of 2018 concerning Procedures for Implementing Community Participation and Awarding in the Prevention and Eradication of Corruption, namely:
   a. Protection from criminal and/or civil claims;
   b. Protection of personal security, and/or the Whistleblower's family from physical and/or mental threats;
   c. Protection of the Whistleblower's property;
   d. Confidentiality and disguise the identity of the Whistleblower; and / or
   e. Providing information without meeting face to face with the Reported Party at every level of case inspection in the event that the violation is included in a court dispute.

If necessary, the Whistleblower can also request assistance from the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) as stipulated in Article 5, Article 10 and Article 28 paragraph (3) of Law No. 31 of 2014 concerning Amendments to Law No. 13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection.

Pengaduan dan Penanganan Pelaporan

Complaints and Reporting Handling

Pengaduan yang masuk melalui WBS sepanjang tahun 2022 berjumlah 3 (tiga) pengaduan. Pengaduan yang masuk ke tahap tindak lanjut berdasarkan hasil verifikasi sebanyak 3 (tiga) laporan pelanggaran. Penanganan pelaporan yang masuk ke tahap tindak lanjut adalah sebagai berikut:

Complaints received through the WBS throughout 2022 were 3 (three) complaints. Complaints that entered the follow-up stage based on the verification results were 3 (three) violation reports. The handling of reports that enter the follow-up stage is as follows:

Penanganan Pelaporan Tahap Tindak Lanjut

Handling of Follow-up Stage Reporting

No.	Kategori Pelapor Category of Whistleblower	Kategori Laporan Pelanggaran Category of Violation Report	Tindak Lanjut Pengaduan Complaint Follow-up	Status Tindak Lanjut Follow-up Status
1	Anonim Anonymous	Pelanggaran SOP Perusahaan terutama terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pemberian manfaat dan remunerasi Violations of the Company's SOPs mainly related to procurement of goods and services, provision of benefits and remuneration	Komite WBS telah melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor dan Pihak Terkait. The WBS Committee has confirmed and clarified to the Whistleblower, Reported Party and Related Parties.	Selesai Completed
2	Anonim Anonymous	Pelanggaran SOP Perusahaan terutama terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pemberian manfaat dan remunerasi Violation of the Company's SOPs mainly related to the procurement of goods and services, provision of benefits and remuneration	Komite WBS telah melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor dan Pihak Terkait. The WBS Committee has confirmed and clarified to the Whistleblower, Reported Party and Related Parties.	On progress tindak lanjut On progress follow-up
3	Anonim Anonymous	Perbuatan Melanggar Hukum Unlawful Acts	Komite WBS telah melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor dan Pihak Terkait. The WBS Committee has confirmed and clarified to the Whistleblower, Reported Party and Related Parties.	On progress tindak lanjut On progress follow-up

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan *Whistleblowing System*

Monitoring and Evaluation of the Whistleblowing System Implementation

Penerapan *Whistleblowing System* dimonitoring secara berkala dalam rangka memastikan efektivitas kebijakan *Whistleblowing System* berdasarkan laporan berkala yang disusun oleh Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran. Laporan berkala penerapan *Whistleblowing System* disampaikan setiap semester kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk dievaluasi sebagai bentuk akuntabilitas *Whistleblowing System* mencakup hasil penerimaan laporan pelanggaran dan tindak lanjut dari pelaporan tersebut serta pelaksanaan rencana kerja dan program sosialisasi WBS oleh Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran.

The implementation of the Whistleblowing System is monitored periodically in order to ensure the effectiveness of the Whistleblowing System policy based on periodic reports prepared by the Whistleblowing Management Committee. Periodic reports on the implementation of the Whistleblowing System are submitted every semester to the President Director and the Board of Commissioners to be evaluated as a form of accountability for the Whistleblowing System, including the results of receiving violation reports and follow-up on these reports as well as the implementation of work plans and WBS socialization programs by the Whistleblowing Management Committee.

Perkara Hukum dan Sanksi yang Dikenakan Kepada Perusahaan

Legal Cases and Sanctions Imposed on the Company

Perusahaan mengantisipasi dan memastikan agar tidak terjadi gugatan atau perkara hukum yang berdampak pada citra atau kerugian Perusahaan dan Grup PLN (Persero) secara Konsolidasian. Perkara hukum tersebut mencakup kasus hukum litigasi dan non-litigasi yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. Kepatuhan atas ketentuan regulator yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dijalankan Perusahaan terus ditingkatkan guna menghindari adanya sanksi yang diberikan kepada Perusahaan. Perusahaan senantiasa melakukan monitoring dan membuat laporan kasus hukum litigasi dan non-litigasi yang dihadapi Perusahaan secara berkala setiap triwulan.

The Company anticipates and ensures that there are no lawsuits or legal cases that have an impact on the image or losses of the Company and PLN (Persero) Group on a Consolidated basis. Such legal cases include litigation and non-litigation legal cases being faced by the Company, its subsidiaries, as well as members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors. Compliance with regulatory provisions relating to the business activities carried out by the Company continues to be improved in order to avoid sanctions given to the Company. The Company continuously monitors and makes reports on litigation and non-litigation legal cases faced by the Company periodically every quarter.

Perkara Hukum

Legal Cases

Permasalahan hukum dapat timbul terkait dengan proses perizinan yang ada di Perusahaan, karena adanya sengketa perdata dan sebagai akibat dari adanya dugaan tindak pidana yang terkait dengan proses bisnis Perusahaan. Selama tahun 2022, kasus hukum yang dihadapi Perusahaan adalah sebagai berikut:

Legal issues may arise related to the Company's licensing process, due to civil disputes and as a result of alleged criminal offenses related to the Company's business processes. During 2022, the legal cases faced by the Company were as follows:

Jumlah Perkara Hukum Perusahaan

Number of Company Legal Cases

Jenis Perkara Type of Case	Total	Selesai (Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap) Completed (Has Had Permanent Legal Force)	Proses Penyelesaian Settlement Process
Perkara Perdata/ Arbitrase Civil/ Arbitration Cases	2	0/2	2
Kasus Korupsi Corruption Cases	-	-	-
Kasus Hubungan Industrial Industrial Relations Cases	-	-	-
Kasus Lain-lain Other Cases	-	-	-

Penyelesaian Perkara Hukum Perusahaan

Settlement of Company Legal Cases

Para Pihak Parties	Pokok Perkara Subject Matter of Case	Status Perkara Case Status	Upaya Manajemen Management Effort	Pengaruh/ Risiko Terhadap Perusahaan Effect/Risk to the Company
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No. 21/Pdt.G/2019/PN.CKR Penggugat: 1. Ir. Ronald Manurung dkk Tergugat: 1. Budiawan Susantio 2. PT PLN (Persero) cq PT PLN NP Turut Tergugat: 1. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Bekasi 2. Pemda Bekasi 3. Pemerintah Desa Segara Jaya 4. Ahli Waris H. Serih Bin Madang 5. PPAT Sementara Lawsuit Against Law No. 21/Pdt.G/2019/PN.CKR Plaintiff: 1. Ir. Ronald Manurung dkk Defendants: 1. Budiawan Susantio 2. PT PLN (Persero) cq PT PLN NP Co-Defendants: 1. National Land Agency (BPN) Bekasi District. 2. Bekasi Regional Government 3. Segara Jaya Village Government 4. Heirs of H. Serih Bin Madang 5. Temporary PPAT	Bahwa pada tahun 2019, Ir. Ronald Manurung dkk ("Penggugat") mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Cikarang atas tanah seluas 11.918 m^2 yang telah dipergunakan oleh PLN dan PT PJB Unit Pembangkit Muara Tawar sebagai pipa gas UP Muara Tawar diakui sebagai milik yang bersangkutan berdasarkan Girik. Terhadap tanah tersebut, PT PLN (Persero) telah membebaskan bersama dengan BPN dan mendapatkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dari Budiawan Susantio ("Tergugat I") dengan Nomor HGB 205 yang kemudian tanah tersebut dikelola oleh PT PJB UP Muara Tawar. That in 2019, Ir. Ronald Manurung et al ("Plaintiffs") filed a tort lawsuit at the Cikarang District Court for 11,918 m2 of land that has been used by PLN and PT PJB Muara Tawar Generating Unit as a gas pipeline of Muara Tawar GU, which was recognized as the relevant property based on Girik. Towards the land, PT PLN (Persero) has acquired together with BPN and obtained a Right to Build (HGB) Certificate from Budiawan Susantio ("Defendant I") with HGB Number 205 which then the land is managed by PT PJB Muara Tawar GU.	Pada Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat. Kemudian Penggugat mengajukan Banding kepada Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan hasil Majelis Hakim Tingkat Banding menolak Banding tersebut. Selanjutnya Penggugat mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung dengan Putusan menolak permohonan Kasasi Penggugat. Status perkara saat ini Penggugat telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dan menunggu hasil putusan. At the Court of First Instance, the Panel of Judges rejected the Plaintiff's Lawsuit. Then the Plaintiff filed an Appeal to the West Java High Court with the result that the Appeal Level Panel of Judges rejected the Appeal. Furthermore, the Plaintiff filed an Cassation to the Supreme Court with the Decision rejecting the Plaintiff's Cassation application. The current status of the case is that the Plaintiff has filed a Judicial Review and is waiting for the results of the decision.	Manajemen telah menjalankan seluruh rangkaian proses persidangan pada tingkat Pertama, Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) serta saat ini terus berkoordinasi dengan Panitera Pengadilan setempat sampai dengan keluarnya putusan PK. Management has carried out the entire series of trial processes at the First Instance, Cassation Appeal and Judicial Review (PK) and is currently continuing to coordinate with the local Court Registrar until the PK decision is issued.	Apabila Gugatan Penggugat diterima, maka PT PLN (Persero) harus membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat senilai Rp 33.836.000.000,- (tiga puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh enam juta rupiah) If the Plaintiff's claim is accepted, PT PLN (Persero) must pay compensation to the Plaintiffs amounting to Rp33,836,000,000,- (thirty-three billion eight hundred thirty-six million rupiah)

Para Pihak Parties	Pokok Perkara Subject Matter of Case	Status Perkara Case Status	Upaya Manajemen Management Effort	Pengaruh/ Risiko Terhadap Perusahaan Effect/Risk to the Company
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No. 31/Pdt.G/2022/PN.KRS Penggugat: 1. Direksi PT NBI Tergugat: 1. Komisaris PT NBI 2. PT PLN NP UP Paiton Lawsuit Against Law No. 31/Pdt.G/2022/PN.KRS Plaintiff: 1. Board of Directors of PT NBI Defendants: 1. Commissioner of PT NBI 2. PT PLN NP Paiton GU	Bahwa PT NBI merupakan salah satu peserta lelang dalam proses Pengadaan *Sawdust* 12.000 Ton UP Paiton. Pada saat akan ditetapkan sebagai pemenang lelang, terdapat surat dari Komisaris PT NBI yang menyatakan pemberhentian sementara Direksi PT NBI dan pengunduran diri PT NBI dari proses lelang. Setelah dilakukan konfirmasi kepada PT NBI dan diakui keabsahan surat tersebut, berdasarkan Perdir Pengadaan PJB maka PT NBI dijatuhkan sanksi *blacklist* selama 24 Bulan. Setelah tidak dilakukan RUPSLB PT NBI selanjutnya Direksi tersebut kembali aktif. Atas pemberhentian sementara oleh Komisaris dan dijatuhkannya sanksi blaclist kemudian Direksi PT NBI mengajukan gugatan kepada Komisaris PT NBI dan PT PJB UP Paiton. That PT NBI is one of the bidders in the Sawdust 12,000 Ton Paiton GU Procurement process. When it will be determined as the winner of the auction, there is a letter from the Commissioner of PT NBI stating the temporary dismissal of the Board of Directors of PT NBI and the resignation of PT NBI from the auction process. After confirmation was made to PT NBI and the validity of the letter was recognized, based on the Regulation of PJB' Director of Procurement, PT NBI was imposed a blacklist sanction for 24 months. After the EGM of PT NBI was not held, subsequently, the Board of Directors became active again. For the temporary dismissal by the Commissioner and the imposition of blacklist sanctions, the Board of Directors of PT NBI filed a lawsuit against the Commissioner of PT NBI and PT PJB Paiton GU.	Pada Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat. Kemudian PT PLN NP mengajukan Banding kepada Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan hasil Majelis Hakim Tingkat Banding mengabulkan Banding dan membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama. Selanjutnya Penggugat mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung dan menunggu hasil putusan tingkat Kasasi. At the Court of First Instance, the Panel of Judges granted the Plaintiff's Lawsuit. Subsequently, PT PLN NP filed an Appeal to the East Java High Court with the result that the Appeal Level Panel of Judges granted the Appeal and canceled the decision of the first instance court. Furthermore, the Plaintiff filed an Cassation to the Supreme Court and is awaiting the results of the Cassation level decision.	Manajemen berkerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Kraksaan untuk melakukan pendampingan hukum atas permasalahan tersebut. Selain itu Manajemen telah menjalankan seluruh rangkaian proses persidangan pada tingkat Pertama, Banding dan Kasasi serta saat ini terus berkoordinasi dengan Panitera Pengadilan setempat sampai dengan keluarnya hasil putusan. Management cooperated with the East Java High Attorney and Kraksaan District Attorney to conduct legal assistance on the issue. In addition, Management has carried out the entire series of trial processes at the First Instance, Appeal and Cassation and is currently continuing to coordinate with the local Court Registrar until the verdict is issued.	Apabila Gugatan Para Penggugat diterima, maka PT PLN NP harus membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat senilai Rp 2.032.527.637,- (dua miliar tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) If the Plaintiffs' claim is accepted, PT PLN NP must pay compensation to the Plaintiffs amounting to Rp2,032,527,637 (two billion thirty-two million five hundred twenty-seven thousand six hundred thirty-seven rupiah)

Perkara Penting yang sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang Sedang Menjabat

Important Cases Currently Faced by the Board of Commissioners and Board of Directors

Sepanjang tahun 2022, tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi oleh Dewan Komisaris maupun Direksi Perusahaan yang sedang menjabat baik perdata maupun pidana.

Throughout 2022, there were no legal issues faced by the Company's incumbent Board of Commissioners or Board of Directors, either civil or criminal.

Perkara Hukum Anak Perusahaan

Legal Cases of Subsidiaries

Sepanjang tahun 2022, Tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi oleh Anak Perusahaan Perusahaan baik perdata maupun pidana.

Throughout 2022, there were no legal issues faced by the Company's subsidiaries, either civil or criminal.

Sanksi Kepada Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota Direksi oleh Otoritas Terkait

Sanctions to the Company, Members of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors by Related Authorities

Selama tahun 2022, tidak terdapat sanksi administrasi/sanksi yang dikenakan kepada Perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi oleh Otoritas Terkait.

During 2022, there were no administrative sanctions imposed on the Company, members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors by the Related Authorities.

Selain itu, tidak terdapat kasus ketidakpatuhan terhadap hukum, aturan dan peraturan yang berkaitan dengan transaksi pihak berelasi yang signifikan atau material serta keputusan bersalah dari pengadilan pajak tertinggi terkait masalah perpajakan apapun dalam tiga tahun terakhir

In addition, there were no cases of non-compliance with laws, rules and regulations relating to significant or material related party transactions as well as guilty decisions from the highest tax court related to any tax issues in the last three years.

Pengadaan Barang dan Jasa

Procurement of Goods and Services

Aktivitas pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perusahaan didasarkan pada konsep *Value for Money* atau Nilai Beli yang Sepadan. Konsep tersebut merupakan kombinasi optimum dari 6 (enam) rights (tepat kualitas, kuantitas, waktu, tempat, tujuan sosial ekonomi, dan harga) yang memenuhi kebutuhan dari pengguna, dan tidak selalu merupakan opsi harga awal paling murah (*lowest initial price option*), tetapi merupakan pengembalian tertinggi (*best return*) dari investasi yang mempertimbangkan kriteria evaluasi yang sudah ditentukan.

Konsep *Value for Money* diinternalisasikan kedalam kebijakan pengadaan Perusahaan sebagai landasan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan antara lain melalui Peraturan Direksi Nomor 034M.P/019/DIR/2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang-Jasa dan Peraturan Direksi Nomor 0098.P/019/DIR/2022 Tentang Kewenangan Pelaksanaan Pengadaan Barang-Jasa.

Procurement activities of goods and services within the Company are based on the concept of Value for Money. The concept is an optimum combination of 6 (six) rights (right quality, quantity, time, place, socio-economic purpose, and price) that meet the needs of users, and is not always the lowest initial price option, but is the highest return (best return) on investment considering predetermined evaluation criteria.

The concept of Value for Money is internalized into the Company's procurement policy as the basis for goods and services procurement activities determined, among others, through Board of Directors Regulation Number 034M.P/019/DIR/2021 concerning Guidelines for Procurement of Goods and Services, and Board of Directors Regulation Number 0098.P/019/DIR/2022 concerning Authority for the Implementation of Goods and Services Procurement.

Pelaksana Fungsi Pengadaan Barang dan Jasa

Executor of Goods and Services Procurement Function

Pelaksana fungsi pengadaan barang dan jasa diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 034M.P/019/DIR/2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang-Jasa dan Peraturan Direksi Nomor 0098.P/019/DIR/2022 Tentang Kewenangan Pelaksanaan Pengadaan Barang-Jasa dimana fungsi pengadaan Kantor Pusat dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk Direksi sedangkan untuk Unit ditunjuk oleh Pimpinan Unit. Selain itu terdapat *Value for Money Committee* yang bertugas melakukan reviu dan rekomendasi atas strategi Pengadaan Barang/Jasa yang disiapkan oleh fungsi Perencanaan Pengadaan untuk memastikan strategi pengadaan telah memenuhi prinsip *value for money* serta melakukan reviu dan rekomendasi atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh Fungsi Pelaksana Pengadaan untuk memastikan pelaksana pengadaan telah memenuhi prinsip *value for money* dan selanjutnya dilakukan penandatangan Perjanjian/ Kontrak. Pada Kantor Pusat *Value for Money Committee* dilaksanakan melalui Rapat Direksi untuk pengadaan yang memerlukan persetujuan Direksi dan Rapat Manajemen Satuan Supply Chain Management untuk pengadaan yang menjadi kewenangan Satuan Supply Chain Management. Sedangkan di Unit fungsi *Value for Money Committee* dilaksanakan melalui Rapat Manajemen Unit.

The executor of the goods and services procurement function is regulated in Board of Directors Regulation Number 034M.P/019/DIR/2021 concerning Guidelines for Procurement of Goods and Services, and Board of Directors Regulation Number 0098.P/019/DIR/2022 concerning Authority for the Implementation of Goods and Services Procurement where the procurement function of the Head Office is carried out by an Official appointed by the Board of Directors, while for the Unit it is appointed by the Unit Leader. In addition, there is a Value for Money Committee which is tasked with reviewing and recommending the Goods/Services Procurement strategy prepared by the Procurement Planning function to ensure that the procurement strategy has met the principles of value for money as well as reviewing and recommending the implementation of Goods/Services Procurement conducted by the Procurement Executor Function to ensure that the procurement executor has met the principles of value for money and subsequently the signing of the Agreement/Contract. At the Head Office, the Value for Money Committee is carried out through the Board of Directors Meeting for procurements that require the approval of the Board of Directors, and the Management Meeting of the Supply Chain Management Unit for procurements that are under the authority of the Supply Chain Management Unit. While in the Unit, the Value for Money Committee function is carried out through the Unit Management Meeting.

Metode Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa

Selection Method of Goods and Services Provider

Metode pemilihan tergantung pada nilai pengadaan, *level criticality,* kondisi pasar dan pengetahuan atas pasar. Secara umum, metode pemilihan penyedia barang dan jasa adalah sebagai berikut:

1. Pelelangan Terbatas
   Dilakukan dengan mengundang Penyedia Barang/Jasa yang terdapat dalam Daftar Penyedia Terseleksi (DPT). Pelelangan Terbatas dapat berupa pelelangan internasional, nasional, dan lokal. Pelelangan Terbatas dengan DPT merupakan strategi utama Pengadaan Barang/Jasa.
2. Pelelangan Terbuka
   Dilakukan dengan cara mengundang Penyedia Barang/Jasa, yang diumumkan secara luas guna memberi kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi kualifikasi melalui proses prakualifikasi maupun pascakualifikasi, untuk mengikuti pelelangan.
3. Pengecualian dari Kompetisi:
   a. Penunjukan Langsung : dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu Penyedia Barang/Jasa, berdasarkan Riset Pasar, *Due Diligence* atau dari DPT;
   b. Pengadaan Langsung : Pengadaan Barang/Jasa yang ada di pasaran untuk memenuhi kebutuhan operasional yang diyakini bahwa harga tersebut merupakan hasil persaingan di pasar, berteknologi sederhana dan berisiko kecil dengan nilai maksimal 500 juta;
   c. Penunjukan Langsung dengan Metode *Open Book:* Dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan harga yang kompetitif tanpa melalui proses Pelelangan Terbatas/ Pelelangan Terbuka, dengan tetap menjaga kualitas/mutu dan memenuhi ketepatan waktu pengadaan di lingkungan Perusahaan.

The selection method depends on the value of the procurement, the level of criticality, market conditions and knowledge of the market. In general, the methods of selecting goods and services providers are as follows:

1. Limited Auction
   Limited Auction is conducted by inviting Goods/Services Providers contained in the Selected Provider List (SPL). Limited Auction can be in the form of international, national, and local auctions. Limited Auction with SPL is the main strategy for Procurement of Goods/Services.
2. Open Auction
   An open auction is conducted by inviting Goods/Services Providers, which is widely announced in order to provide opportunities for Goods/Services Providers who meet the qualifications through a pre-qualification or post-qualification process, to participate in the auction.
3. Exemption from Competition:
   a. Direct Appointment: direct appointment is conducted by appointing one Goods/Services Provider, based on Market Research, Due Diligence or from SPL;
   b. Direct Procurement: Procurement of Goods/Services available in the market to meet operational needs, which is believed that the price is the result of competition in the market, simple technology and small risk with a maximum value of 500 million;
   c. Direct Appointment with Open Book Method: It is conducted with the aim of obtaining competitive prices without going through the Limited Auction/Open Auction process, while maintaining quality and meeting the timeliness of procurement within the Company.

Metode Penawaran

Bidding Method

1. *Request for Quotation* (RFQ)
   RFQ digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang termasuk kategori Rutin, dengan spesifikasi yang mudah ditemui di pasar.
2. *Initation to Bid* (ITB)
   ITB dapat digunakan untuk Pengadaan Barang/ Jasa yang termasuk kategori *Leverage* atau *Critical/Bottleneck,* di mana spesifikasi, kualitas dan kuantitasnya dapat dibuat secara jelas dan lengkap, serta penunjukan pemenang dilakukan berdasarkan penawaran biaya terendah, sepanjang secara kualitas, kuantitas, waktu, tempat, Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), telah memenuhi persyaratan.

1. Request for Quotation (RFQ)
   RFQ is used for the Procurement of Goods/Services that are included in the Routine category, with specifications that are easily found in the market.
2. Initation to Bid (ITB)
   ITB can be used for Procurement of Goods/Services that are included in the Leverage or Critical/Bottleneck category, where the specifications, quality and quantity can be made clearly and completely, as well as the appointment of winners is conducted based on the lowest cost bid, as long as the quality, quantity, time, place, Local Content Level (TKDN), have met the requirements.

3. *Request for Proposals (*RFP)
   RFP digunakan untuk Pengadaan Barang dan Jasa yang termasuk kategori Strategis (seperti EPC) atau jasa konsultansi atau pekerjaan yang memerlukan inovasi serta keahlian tertentu.

3. Request for Proposals (RFP)
   RFP is used for Procurement of Goods and Services that are included in the Strategic category (such as EPC) or consultancy services or work that requires innovation and specific expertise.

Pengadaan Khusus
Special Procurement

Pengadaan Khusus merupakan strategi pengadaan dan perjanjian/ kontrak yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pihak lain untuk kemudahan operasional pengadaan. Kegiatan pengadaan yang termasuk dalam kategori pengadaan khusus adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan Gas Bumi/LNG/CNG
2. Pengadaan Batubara
3. Sewa Menyewa/Sewa Beli
4. Sewa Guna Usaha

Sewa Guna Usaha terdiri dari:

a. *Financial Lease*
   Penyewa Guna (*Lessee*) pada akhir masa Perjanjian/ Kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli obyek sewa guna dari pihak yang menyewa gunakan (*Lessor*) berdasarkan nilai sisa (*residual value*) yang disepakati bersama,
b. *Operating Lease*
   Adalah obyek sewa guna usaha yang dioperasikan sendiri oleh Lessee namun kepemilikan obyek sewa guna usaha tidak beralih kepada *Lessee*;
5. Alih Daya;
6. Pengadaan Jasa Konsultasi Perorangan;
7. Pengadaan Asuransi;
8. Pengadaan *parts* Pembangkit *Reverse Engineering* dan *Re-Engineering*.

Special Procurements are procurement strategies and agreements/ contracts that have been predetermined by other parties to facilitate procurement operations. Procurement activities that are included in the special procurement category are as follows:

1. Natural Gas/LNG/CNG Procurement
2. Coal Procurement
3. Lease/Hire Purchase
4. Lease

Lease consists of:

a. Financial Lease
   The Lessee at the end of the Agreement/Contract period has the option rights to purchase the leased object from the Lessor based on the agreed residual value,

b. Operating Lease
   Operating lease is a leased object that is operated by the Lessee; however, the ownership of the leased object is not transferred to the Lessee;
5. Outsourcing;
6. Procurement of Individual Consulting Services;
7. Procurement of Insurance;
8. Procurement of Reverse Engineering and Re-Engineering Plant parts.

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
Implementation of Goods and Services Procurement

Pelaksanaan pengadaan dirancang dengan prinsip "*level playing field*" dimana semua calon penyedia mendapatkan informasi yang sama, pada saat yang sama, sehingga mereka mempunyai waktu yang sama untuk mempersiapkan Penawaran. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terbagi atas beberapa tahapan yaitu:

The implementation of procurement is designed with the principle of "level playing field" where all prospective providers obtain the same information, at the same time, so that they have the same time to prepare an offer. The implementation of the procurement of goods and services is divided into several stages, namely:

Proses Pelaksanaan Pengadaan
Procurement Implementation Process

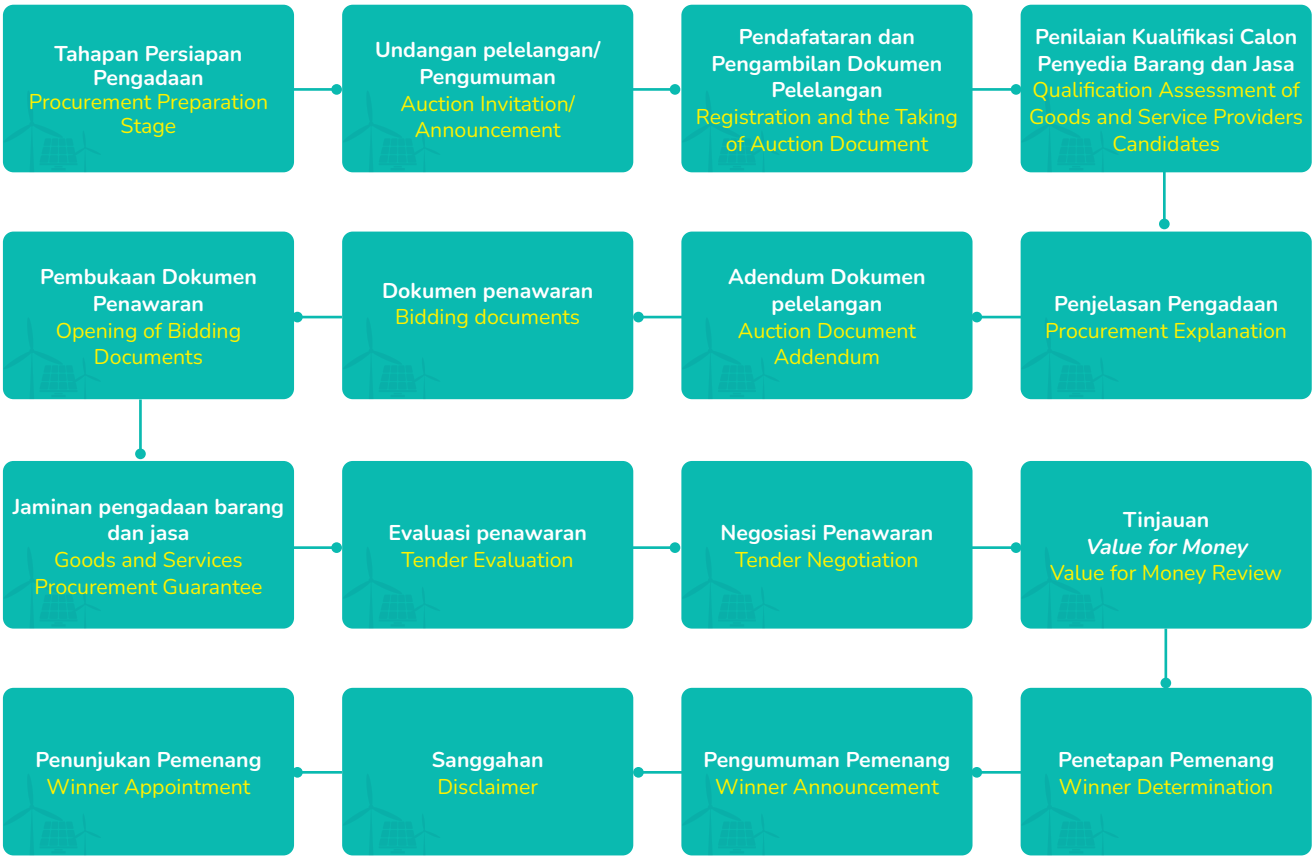

Transparansi dan Akuntabilitas Proses Pengadaan

Transparency and Accountability of Procurement Process

Perusahaan berupaya mewujudkan *good procurement practice* dengan menjaga serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, beberapa upaya yang dilakukan Perusahaan diantaranya:

1. Pemanfaatan Media Pengumuman Pengadaan berbasis *Web*
   Pengumuman Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya wajib dilakukan secara terbuka untuk umum yang dapat diakses secara luas antara lain melalui *website* Perusahaan.

2. Penerapan Masa Sanggah
   Peserta kualifikasi yang keberatan atas penetapan pemenang dapat mengajukan sanggahan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pengumuman hasil kualifikasi, dengan memberikan jaminan

The Company strives to realize good procurement practice by maintaining and improving accountability and transparency in the goods and services procurement process. Therefore, several efforts conducted by the Company include:

1. Utilization of Web-based Procurement Announcement Media
   Announcement of Procurement of Goods/Construction Works/ Other Services is required to be conducted openly to the public which can be widely accessed, among others, through the Company's website.
2. Implementation of Disclaimer Period
   Qualification participants who object to the determination of the winner may submit a written disclaimer no later than 3 (three) working days after the date of announcement of the qualification result, by providing a disclaimer guarantee of

sanggah sebesar 2‰ (dua perseribu) dari nilai total HPS atau setinggi-tingginya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah). Sanggahan hanya diajukan terhadap adanya penyimpangan pelaksanaan prosedur kualifikasi yang diatur dalam Dokumen Kualifikasi Pelelangan Pekerjaan bersangkutan, KKN dan atau pelanggaran persaingan yang sehat. Masa sanggah hasil prakualifikasi diberikan 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi dan Jawaban atas sanggahan diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya sanggahan dari peserta prakualifikasi. Surat sanggahan diajukan kepada Pejabat yang berwenang menetapkan pemenang disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada Kepala Satuan Pengawasan Internal (KSPI).

3. Menyediakan Media Pengaduan Pengadaan melalui Komite WBS
   Whistleblowing System dapat digunakan sebagai sarana pengaduan atas pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: 004.K/021/DIR/2020 dan Nomor: 007.K/DK-PJB/2020 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) PT Pembangkitan Jawa-Bali.

2‰ (two thousandths) of the total HPS value or a maximum of Rp50,000,000.00 (fifty million Rupiah). The disclaimer shall only be submitted against any irregularities in the implementation of the qualification procedure regulated in the Qualification Document of the relevant Job Auction, KKN, and/or violation of fair competition. The rebuttal period of the pre-qualification result is provided 3 (three) working days after the announcement of the qualification result and the answer to the rebuttal is provided no later than 7 (seven) working days after the receipt of the rebuttal from the pre-qualification participant. The disclaimer letter is submitted to the Official authorized to determine the winner along with evidence of irregularities, with a copy to the Head of the Internal Audit Unit (KSPI).

3. Providing Procurement Complaint Media through the WBS Committee
   The Whistleblowing System can be used as a means of complaints on violations in the procurement process of goods and services in accordance with the Joint Decree (SKB) between the Board of Directors and Board of Commissioners Number: 004.K/021/DIR/2020 and Number: 007.K/DK-PJB/2020 concerning the Whistleblowing System of PT Pembangkitan Jawa-Bali.

Informasi dan Data Perusahaan

Company Information and Data

Informasi dan data Perusahaan merupakan salah satu aset penting Perusahaan yang harus dikelola dengan baik. Perusahaan memastikan ketersediaan dan kemudahan akses informasi bagi setiap *stakeholders* termasuk karyawan Perusahaan serta menjaga informasi-informasi yang bersifat rahasia dengan mempertimbangkan kepentingan Perusahaan dalam jangka panjang. Perusahaan menetapkan Sekretaris Perusahaan sebagai pejabat atau unit kerja sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya untuk memastikan ketersediaan akses informasi dan data Perusahaan bagi *stakeholders* khususnya yang bersifat publik.

The Company's information and data is one of the Company's important assets that must be managed properly. The Company ensures the availability and ease of access to information for every stakeholder including the Company's employees and maintains confidential information by considering the Company's interests in the long term. The Company establishes the Corporate Secretary as an official or work unit in accordance with its duties, authorities and responsibilities to ensure the availability of access to the Company's information and data for stakeholders, especially those that are public.

Kebijakan Pengelolaan Informasi dan Data Perusahaan

Policy on Management of Company Information and Data

Perusahaan menetapkan kebijakan pengelolaan informasi dan data perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 152.K/010/DIR/2010 tanggal 4 Desember 2010 dengan memperhatikan kepentingan jangka panjang Perusahaan. Kebijakan tersebut mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Klasifikasi Informasi.
2. Pengungkapan Informasi meliputi prinsip dasar pengungkapan informasi, pengelola, juru bicara, dan akses terhadap pengungkapan informasi.
3. Mekanisme pemberian informasi, baik internal dan eksternal (publik).
4. Pengamanan Informasi, meliputi tugas dan tanggung jawab keamanan informasi, pengendali dan administrasi informasi, data dan dokumen Perusahaan, tanggung jawab pihak lain atas informasi sangat rahasia dan informasi rahasia, rumor, hubungan dengan komunitas investasi dan media.
5. Sanksi.
6. Panduan teknis.

Pengelolaan informasi Perusahaan juga memperhatikan standar etika dalam pengungkapan informasi dan data kepada pihak-pihak yang berkepentingan guna menjaga aset informasi Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap Insan Perusahaan tidak diijinkan untuk membicarakan, membocorkan atau menyebarluaskan informasi mengenai Perusahaan yang dianggap sebagai rahasia kepada siapapun (kecuali rekan kerja yang perlu mengetahui tentang hal tersebut);
2. Insan Perusahaan tidak diijinkan untuk memberikan data dan informasi yang tergolong rahasia Perusahaan kepada pihak lain, baik yang menyangkut keuangan, teknologi, kepegawaian dan data lainnya yang diyakini dan dianggap akan dapat merugikan Perusahaan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan/atau disyaratkan oleh lembaga yang berwenang;

The Company determines the policy of managing company information and data based on the Decree of the Board of Directors Number: 152.K/010/DIR/2010 dated December 4, 2010 by taking into account the long-term interests of the Company. The policy regulates the following matters:

1. Information Classification.
2. Information Disclosure includes the basic principles of information disclosure, managers, spokesperson, and access to information disclosure.
3. Mechanisms for providing information, both internal and external (public).
4. Information Security, including duties and responsibilities for information security, control and administration of information, data and documents of the Company, responsibility of other parties for highly confidential and confidential information, rumors, relations with the investment community and the media.
5. Sanctions.
6. Technical guidance.

The Company's information management also takes into account ethical standards in the disclosure of information and data to the interested parties in order to maintain the Company's information assets with the following provisions:

1. Each Company Personnel is not permitted to discuss, divulge or disseminate information regarding the Company that is considered confidential to anyone (except colleagues who need to kowledge about it);
2. Company personnel are not permitted to provide data and information classified as the Company's confidential to other parties, both concerning financial, technological, personnel and other data that are believed and considered to be detrimental to the Company unless otherwise determined by laws and regulations and/or required by authorized institutions;

3. Insan Perusahaan yang tidak bekerja lagi di Perusahaan wajib untuk tetap menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama yang bersangkutan bekerja di Perusahaan, dan tidak diperkenankan mengambil dan/atau menyebarkan informasi rahasia Perusahaan kepada siapapun kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan/atau disyaratkan oleh Lembaga yang berwenang.

Perusahaan mengklasifikasikan informasi dan data Perusahaan dengan memperhatikan kepentingan jangka panjang Perusahaan sebagaimana ditetapkan pada Surat Keputusan Direksi Nomor: 152.K/010/DIR/2010 tanggal 4 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

1. **Informasi Sangat Rahasia**
   Informasi yang sifatnya tidak dapat diungkapkan kepada pihak manapun, kecuali kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan pihak lain yang disetujui oleh Direktur Utama.
2. **Informasi Rahasia**
   Informasi yang karena sifatnya hanya dapat diungkapkan kepada pihak internal Perusahaan yang memiliki kewenangan.
3. **Informasi Terbatas**
   Informasi yang hanya ditujukan untuk kepentingan Perusahaan dan tidak untuk diungkapkan kepada publik.
4. **Informasi Biasa**
   Informasi yang tidak termasuk ke dalam kategori sangat rahasia, rahasia dan terbatas yang tidak menimbulkan dampak negatif kepada Perusahaan apabila diungkapkan kepada publik.

3. Company personnel who no longer work in the Company are required to maintain the confidentiality of information obtained during their employment in the Company, and are not allowed to take and/or disseminate confidential information of the Company to anyone unless otherwise stipulated by laws and regulations and/or required by the authorized institution.

The Company classifies the Company's information and data by taking into account the long-term interests of the Company as stipulated in the Decree of the Board of Directors Number: 152.K/010/DIR/2010 dated December 4, 2010 as follows:

1. **Highly Confidential Information**
   Information that cannot be disclosed to any party, except to the Shareholders, Board of Commissioners, Board of Directors and other parties approved by the President Director.
2. **Confidential Information**
   Information which due to its nature can only be disclosed to authorized internal parties of the Company.
3. **Limited Information**
   Information that is only intended for the interests of the Company and not to be disclosed to the public.
4. **Ordinary Information**
   Information that does not include the highly confidential, confidential and limited categories that will not have a negative impact on the Company if disclosed to the public.

Akses Informasi bagi Internal Perusahaan
Access to Information for Internal Company

Perusahaan memastikan akses informasi dan data yang memadai bagi internal Perusahaan dalam mendukung kegiatan operasional Perusahaan sesuai dengan wewenang dan ketentuan yang diatur dalam Kebijakan Pengelolaan Informasi Perusahaan. Informasi dan data dengan klasifikasi Informasi Terbatas dan Informasi Biasa Akses dapat diakses oleh internal Perusahaan melalui:

1. MyPower, yang merupakan aplikasi smartphone yang dapat digunakan untuk mengakses informasi Perusahaan. Aplikasi ini berisikan informasi antara lain agenda korporat, publikasi korporat, data kepegawaian (gaji, absensi, perjalanan dinas, dan informasi pelatihan), kontak seluruh karyawan, dan link menuju aplikasi korporat;
2. *Intranet, Office Automation* (OA), dan *Email* Serentak (*Email Blast*). Pengelolaan isi dan *update* dari Intranet dan OA dilakukan bersama antara Sekretaris Perusahaan dan Bidang Information Technology and Digital serta pihak terkait. Email serentak berisi informasi terkait keperluan pekerjaan dan Perusahaan atau *sharing knowledge* mengenai hal-hal yang

The Company ensures adequate access to information and data for the Company's internal in supporting the Company's operational activities in accordance with the authority and provisions regulated in the Company's Information Management Policy. Information and data with the classification of Limited Information and Ordinary Information can be accessed by the Company's internal through:

1. MyPower, which is a smartphone application that can be used to access information of the Company. This application contains information such as corporate agenda, corporate publications, employment data (salary, attendance, official travel, and training information), contacts of all employees, and links to corporate applications;
2. Intranet, Office Automation (OA), and Email Blast. Management of the content and updates of the Intranet and OA is conducted jointly between the Corporate Secretary and the Information Technology and Digital Division as well as related parties. Emails blast contains information related to work and Company needs or knowledge sharing on managerial matters, does not

bersifat manajerial, tidak mengandung unsur SARA dan politik, serta tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, khususnya yang dapat menimbulkan keresahan di lingkungan internal maupun eksternal Perusahaan;

3. Info PJB, merupakan media internal yang berfungsi sebagai sarana informasi, edukasi dan sosialisasi kebijakan manajemen untuk seluruh karyawan. Perusahaan telah menerbitkan majalah internal perusahaan sebanyak 10 (sepuluh) edisi sepanjang tahun 2022 dan dapat diakses melalui https://www.plnnusantarapower.co.id/info-pjb/;
4. Komunikasi secara formal dapat melalui forum rapat harian khusus di unit (*daily meeting*), rapat mingguan (*weekly meeting*), rapat bulanan, rapat kerja, upacara bendera, pesan Direksi, dan pertemuan manajemen dengan Serikat Pekerja. Sedangkan secara informal komunikasi dilakukan melalui BoD *Talk, Plant Walkdown, Briefing* dan Safari Ramadhan dan kegiatan lainnya.

contain racial and political elements, as well as not being used for personal interests, especially those that can cause unrest within the internal and external of the Company;

3. Info PJB is an internal media that functions as a means of information, education and socialization of management policies for all employees. The Company has published 10 (ten) editions of the Company's internal magazine throughout 2022 and can be accessed through https://www.plnnusantarapower.co.id/info-pjb/;
4. Formal communication can be through the forum of special daily meetings in the unit, weekly meetings, monthly meetings, work meetings, flag ceremonies, Board of Directors messages, and management meetings with the Labor Union. Meanwhile, informal communication is conducted through BoD Talk, Plant Walkdown, Briefing and Safari Ramadhan, and other activities.

Akses Informasi bagi Publik
Access to Information for the Public

Informasi dan data dengan klasifikasi Informasi Biasa dapat diakses oleh Publik secara luas. Perusahaan menyediakan beberapa media informasi dan komunikasi untuk memenuhi ketentuan tentang persyaratan keterbukaan sesuai dengan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Informasi dan data tersebut dapat diperoleh melalui:

1. *Website*, yang dapat diakses melalui situs www.plnnusantarapower.co.id dan disajikan secara bilingual yaitu dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa inggris. Informasi yang dapat diakses melalui Website PLN NP diantaranya profil, kegiatan operasional, kinerja Perusahaan, peristiwa di lingkungan Perusahaan, kliping berita media, soft copy Info PJB, *soft copy* data Perusahaan (*Annual Report, Sustainability Report*, Buku Statistik, Laporan Keuangan), pengumuman pelelangan dan beberapa informasi lain yang bisa diakses dengan mudah oleh publik. Selain itu, Perusahaan telah mengembangkan *platform* layanan "PJB *Access*" yang menyatu pada *website* Perusahaan. Kehadiran PJB *Access* diharapkan dapat memperluas jangkauan Perusahaan terhadap pasar karena memudahkan pelaku bisnis dan memberikan akses kepada khalayak luas untuk mengeksplor beragam layanan terbaik dari PLN NP;
2. Surat elektronik (*email*) melalui alamat email info@plnnusantarapower.co.id sebagai sarana komunikasi elektronik yang dikelola oleh Bidang Information Technology and Digital. Fungsi Komunikasi Korporasi bertugas memonitor, mengidentifikasi email yang masuk untuk selanjutnya memberikan respon yang memadai;

Information and data with the classification of Ordinary Information can be accessed by the Public at large. The Company provides several information and communication media to fulfill the provisions on disclosure requirements in accordance with the implementation of good corporate governance principles. The information and data can be obtained through:

1. Website, which can be accessed through the site www.plnnusantarapower.co.id and presented bilingually, namely in Indonesian and English. Information that can be accessed through PLN NP Website includes profile, operational activities, Company performance, events within the Company, media news clippings, PJB Info soft copy, Company data soft copy (Annual Report, Sustainability Report, Statistical Book, Financial Statements), tender announcement and several other information that can be easily accessed by the public. In addition, the Company has developed a service platform "PJB Access" which is integrated on the Company's website. The presence of PJB Access is expected to be able to expand the Company's reach to the market due to facilitating business actors and providing access to a wide audience to explore a variety of the best services from PLN NP;
2. Electronic mail (email) through the email address info@plnnusantarapower.co.id as a means of electronic communication managed by the Information Technology and Digital Division. The Corporate Communications function is in charge of monitoring, identifying incoming emails and subsequently providing adequate responses;

3. Media Elektronik Interaktif antara lain berupa *Kiosk*, CD *profile*, LCD TV di kantor pusat & unit dan email. *Kiosk* merupakan media informasi interaktif yang dapat dimanfaatkan oleh tamu PJB untuk mengakses *company profile* dan pengumuman lelang PLN NP. Media informasi berupa CD *profile* dan *display* LCD TV tersedia di kantor pusat & unit yang menayangkan *company profile*, informasi terbaru terkait PLN NP dalam bentuk foto dan video dan informasi lain yang perlu diketahui oleh karyawan dan tamu Perusahaan;
4. Events, partisipasi acara/pameran/*events* diupayakan memiliki ruang lingkup promosi, publikasi, dan cakupan kegiatan yang berskala nasional, atau acara/ pameran/ *events* kedaerahan yang memiliki keterkaitan erat dengan wilayah operasi, atau kegiatan atau rencana pengembangan Perusahaan dimasa depan, atau yang bersifat *career expo* sesuai dengan kebutuhan SDM PLN NP;
5. *Sponsorship* & Iklan Non-Media, partisipasi sponsor ataupun iklan pada kegiatan atau materi cetakan tertentu diupayakan semaksimal mungkin untuk kegiatan atau materi cetakan yang memiliki ruang lingkup promosi, publikasi dan cakupan kegiatan yang berskala nasional, atau kegiatan yang bersifat edukasi bagi banyak pihak;
6. Media Massa (cetak dan elektronik). Setiap proses wawancara pihak internal PLN NP dengan media cetak ataupun media elektronik harus didampingi oleh perwakilan dari Sekretaris Perusahaan (Kantor Pusat), atau bidang Umum (Unit Pembangkitan (UP), Unit Pelaksana Pembangkitan (UPK), Unit pelaksana Pengendalian pembangkitan (UPDK), *Unit Maintenance Repair and Overhaul* (UMRO), Unit PJB *Academy*, Unit Pelaksana Proyek dan Unit lain);
7. Media Sosial berupa Facebook (plnnusantarapower), Instagram (plnnusantarapower), twitter (ptpln_np) dan Youtube (PJBTV Media).

Selain itu, informasi tentang Perusahaan dapat pula diperoleh pada Sekretaris Perusahaan yang beralamat di:

3. Interactive Electronic Media such as Kiosk, CD profile, LCD TV at head office & unit and email. Kiosk is an interactive information media that can be utilized by PJB guests to access company profile and PLN NP auction announcement. Information media in the form of CD profile and LCD TV displays are available at the head office & units that show the Company profile, the latest information related to PLN NP in the form of photos and videos, and other information that needs to be known by employees and guests of the Company;
4. Events, participation in events/exhibitions/events is strived to have the scope of promotion, publication, and scope of activities on a national scale, or regional events/exhibitions/events that are closely related to the operating area, or the Company's future development activities or plans, or career expos in accordance with the needs of PLN NP's Human Resources;
5. Sponsorship & Non-Media Advertising, sponsorship or advertising participation in certain activities or printed materials is strived as much as possible for activities or printed materials that have the scope of promotion, publication and coverage of activities on a national scale, or activities that are educational for many parties;
6. Mass Media (print and electronic). Every interview process of PLN NP internal parties with print or electronic media is required to be accompanied by representatives from the Corporate Secretary (Head Office), or the General Division (Generation Unit (GU), Generation Executor Unit (UPK), Generation Control Executor Unit (UPDK), Maintenance Repair and Overhaul Unit (UMRO), PJB Academy Unit, Project Executor Unit and other Units);
7. Social Media in the form of Facebook (plnnusantarapower), Instagram (plnnusantarapower), twitter (ptpln_np) and Youtube (PJBTV Media).

In addition, information on the Company can also be obtained from the Corporate Secretary at:

PT PLN Nusantara Power

Kantor Pusat Head Office
Jl. Ketintang Baru No.11,
Surabaya 60231
Indonesia
(62-31) 8283180 (Hunting)
(62-31) 8283183

Kantor Jakarta Jakarta Office
18 Office Park Lt. 2 ABCD
Jl. TB Simatupang No. 18, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, Indonesia

Publikasi dan Pemberitaan Perusahaan
Company Publications and News

Perusahaan secara rutin melakukan publikasi dan melakukan monitoring atas pemberitaan terkait Perusahaan baik yang dilakukan melalui media informasi Perusahaan maupun oleh media eksternal. Publikasi melalui media informasi Perusahaan diantaranya berupa Laporan Tahunan (*Annual Report*), Laporan Berkelanjutan (*Sustainability Report*), Info PJB sebanyak 10 (sepuluh) edisi serta 54 press release. Sementara itu, pemberitaan oleh media eksternal terkait Perusahaan sepanjang tahun 2022 terdapat sebanyak 149 media online dan 63 media cetak.

The Company routinely publishes and monitors news related to the Company, both through the Company's information media and by external media. Publications through the Company's information media include the Annual Report, Sustainability Report, Info PJB as many as 10 (ten) editions and 54 press releases. Meanwhile, coverage by external media related to the Company throughout 2022 was 149 online media and 63 print media.

Pertemuan dengan *Stakeholders*
Meeting with Stakeholders

Pertemuan dengan *stakeholders* menjadi salah satu sarana dalam mengakses informasi dan data Perusahaan melalui komunikasi dua arah antara Perusahaan dengan *stakeholders*. Pertemuan tersebut dilakukan baik secara fisik maupun *virtual* dalam forum atau even tertentu yang melibatkan *stakeholders* Perusahaan. Sepanjang tahun 2022, Perusahaan telah melakukan beberapa pertemuan dengan para *stakeholder* sebagai berikut:

Meeting with stakeholders is one of the means to access the Company's information and data through two-way communication between the Company and stakeholders. The meetings are conducted both physically and virtually in certain forums or events involving the Company's stakeholders. Throughout 2022, the Company has conducted several meetings with stakeholders as follows:

Pertemuan dengan *Stakeholders* Tahun 2022
Table and Graphic Title

Deskripsi Description	Deskripsi Description	Deskripsi Description
Pemegang Saham Shareholders	Rapat Kerja PJB PJB Work Meeting	1 kali time
	Forum HSH "*Synergizing The New Power*" HSH Forum "Synergizing The New Power"	1 kali time
Karyawan Employees	BOD *Talk* (*Coffee Morning*)	2 kali times
	Plant Walkdown Performance Dialogue (PWPD)	13 kali times
	Serikat Pekerja Labor Union	2 kali times
Pelanggan Customers	*Customer Gathering*	1 kali time (Kantor pusat dan Unit masing-masing) (Head office and Unit, respectively)
Pemasok Suppliers	*Supplier Gathering*	1 kali time (Kantor pusat dan Unit masing-masing) (Head office and Unit, respectively)w
Media Massa Mass Media	*Media Gathering*	1 kali time

Tanggung Jawab Perusahaan

Corporate Social Responsibility

Strategi Keberlanjutan
Sustainability Strategy

PLN NP berkomitmen untuk menerapkan strategi keberlanjutan dalam setiap inti bisnis Perusahaan dengan menerapkan pembangunan berkelanjutan dengan berorientasi pada tujuan berkelanjutan/TPB (*sustainable development goals*/SDGs). Perusahaan juga berkomitmen dalam menciptakan dan berbagi nilai-nilai dengan pemangku kepentingan dan terus berupaya meminimalkan dampak lingkungan. Dalam komitmennya terhadap strategi keberlanjutan, PLN NP telah merancang berbagai kebijakan strategis terkait keberlanjutan dan terus dievaluasi secara berkala untuk mengikuti perkembangan kondisi lingkungan dan bisnis PLN NP.

PLN NP is committed to applying sustainability strategy in each core businesses the Company by implementing sustainable development oriented towards sustainable goals/SDGs. The Company is also committed to creating and sharing values with the stakeholders and continuously working to minimize environmental impact. In its commitment to the sustainability strategy, PLN NP already designed various strategic policies related to sustainability and periodically keeps evaluating it in order to keep abreast of the environmental and business condition development in PLN NP.

Menjawab Tantangan dan Menangkap Peluang Keberlanjutan
Responding to Challenges and Seizing Sustainability Opportunities

PLN NP menghadapi banyak peluang dan tantangan keberlanjutan di dalam dunia kelistrikan global maupun Indonesia yaitu perubahan iklim, dorongan penggunaan energi bersih, dekarbonisasi, desentralisasi dan digitalisasi dalam pembangunan pembangkit ke depan. Selain itu, keamanan pasokan energi primer, berkembangnya teknologi EBT, pandemi Covid-19, regulasi lingkungan, kondisi SDM Perusahaan juga menjadi tantangan yang dihadapi Perusahaan. Bersamaan dengan hal tersebut, lingkungan bisnis di sektor ketenagalistrikan terus mengalami berbagai perubahan baik dari segi pasar dan persaingan, tren dan dorongan teknologi, iklim investasi yang semakin hangat serta hal-hal lain yang mempengaruhi Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk menjawab kondisi dan tantangan tersebut, PLN NP telah menentukan arah pengembangan dan langkah yang akan diambil dengan mengoptimalkan *core competency* dan inovasi. Arah pengembangan PLN NP adalah sebagai berikut:

PLN NP faces many sustainability opportunities and challenges in the electricity sector globally and domestically, i.e., climate change, the push to use clean energy, decarbonization, decentralization, and digitalization in the construction of power plants in the future. In addition, the Company also faces various challenges, including the security of the primary energy supply, the NRE technology development, the Covid-19 pandemic, environmental regulations, and the Company's HR. Simultaneously, the business environment in the electricity sector experiences various changes that affect the Company directly and indirectly, such as the market and competition, technological trends and push, a better investment climate, etc. To respond to these conditions and challenges, PLN NP has determined the direction of development and measures to be taken, by optimizing core competency and innovation. PLN NP's developmental direction is as follows:

Arah Pengembangan PLN NP
PLN NP's Developmental Direction

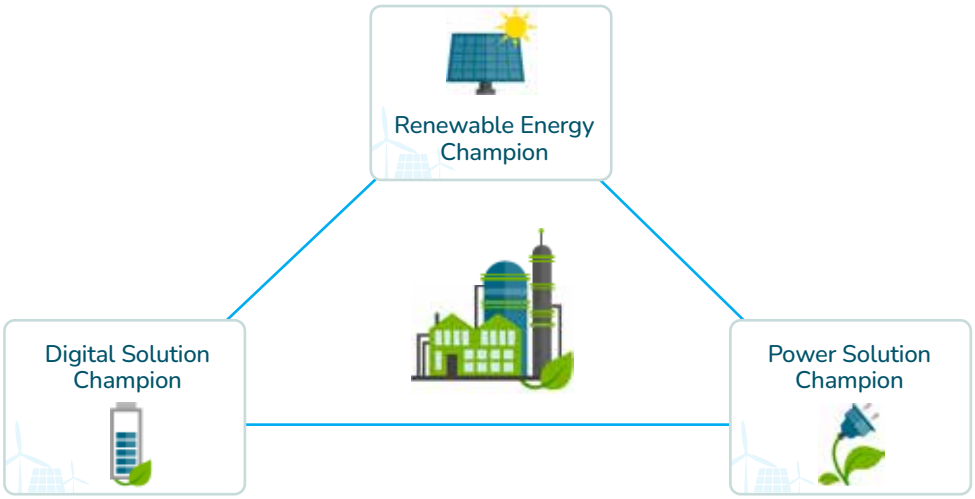

New Energy and Sustainable

Tren dekarbonisasi, digitalisasi, desentralisasi dan tuntutan masyarakat untuk memperoleh energi lebih bersih menjadi landasan Perusahaan untuk bergerak ke arah *new energy* dan *sustainable*.

Trends in decarbonization, digitalization, decentralization, and the community's demands for cleaner energy are the Company's foundation to move towards new and sustainable energy.

Renewable Energy Champion

Dengan target Pemerintah pembangunan energi terbarukan untuk mencapai bauran energi nasional menuju 23% pada tahun 2025, PLN NP menargetkan untuk menjadi operator solar PV yang terbesar di Indonesia, menjadi leader dalam biomass *cofiring* hingga 5% *fuel mix*, menjadi *operator wind* terbesar di Indonesia dan pemain terkemuka di bidang *battery storage solution.*

With the Government's target to develop renewable energy to achieve the 23% energy mix nationally by 2025, PLN NP has the objective to become the largest solar PV operator in Indonesia, be a leader in biomass co-firing of up to 5% fuel mix, be the largest wind operator in Indonesia, and a flagship player in the battery storage solutions.

Digital Solution Champion

PLN NP menargetkan untuk menjadi pembangkit listrik berbasis digital, pengadaan *digital, control tower digital* pada proyek pembangkit listrik serta otomasi proses pendukung pada *finance, human resource* dan IT.

PLN NP targets to become a digital-based power plant, digital procurement, digital control tower in power plant projects and automation support process in finance, human resources, and IT.

Power Solution Champion

PLN NP menargetkan menjadi pengelola energi paling terpercaya bagi pelanggan C&I skala menengah di Indonesia (mencapai efisiensi hingga 30%), *partner* bagi pelaku teknologi global untuk mengembangkan solusi energi inovatif bagi Indonesia, rooftop solar untuk pelanggan C&I dan residensial dan mengembangkan pembangkit listrik virtual.

PLN NP targets to be the most trusted energy manager for medium-scale C&I customers in Indonesia (achieving up to 30% efficiency), a partner for global technology players to develop innovative energy solutions in Indonesia, solar rooftops for C&I and residential customers, and develop virtual power plants.

Landasan Lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Scope of Social and Environmental Responsibility

PLN NP terus mendukung upaya peningkatan kinerja dari berbagai aspek yaitu aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Upaya ini bertujuan agar dapat memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan yaitu karyawan, pelanggan, *vendor* dan masyarakat. Peningkatan strategi keberlanjutan ini dirumuskan oleh PLN NP dalam bentuk tanggung jawab sosial Perusahaan yang telah diterapkan oleh PLN NP sesuai dengan Standar Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) yang ditetapkan dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris No.002.K/021/DIR/2019 dan 005.K/DK/PJB/2019 serta Keputusan Direksi No.065.K/010/DIR/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial

PLN NP continues to support efforts to improve performance from various aspects, namely environmental, social and economic aspects. This effort aims to provide benefits to stakeholders, namely employees, customers, vendors and the community. This increased sustainability strategy is formulated by PLN NP in the form of corporate social responsibility that has been implemented by PLN NP in accordance with the Corporate Ethics Standards (Code of Conduct) stipulated in the Joint Decree of the Board of Directors and the Board of Commissioners No.002.K/021/DIR/2019 and 005.K/DK/PJB/2019 and Decree of the Board of Directors No.065.K/010/DIR/2013 concerning Guidelines for the

dan Lingkungan (TJSL). Strategi dan kebijakan yang mengatur pelaksanaan program tanggung jawab sosial oleh PLN NP senantiasa disempurnakan dengan mengacu pada Undang-Undang No. 40 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan, Peraturan Pemerintah No.47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan.

Implementation of Social and Environmental Responsibility (TJSL). Strategies and policies governing the implementation of social responsibility programs by PLN NP are constantly being refined with reference to Law No. 40 on Limited Liability Companies article 74 Social and Environmental Responsibility, Government Regulation No.47 of 2012 on Corporate Social and Environmental Responsibility.

Visi Misi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Vision and Mission on Social and Environmental Responsibility

Visi TJSL PLN NP

Vision of PLN NP CSR

Menjadi Perusahaan Energi yang memiliki kinerja tinggi dalam pengelolaan dampak lingkungan, sosial, ekonomi, dengan memperhatikan keseimbangan antara harapan pemangku kepentingan dan tujuan perusahaan untuk menjadi "*most trusted and preferred company*".

To become an Energy Company that performs excellently in managing environmental, social, and economic impacts, by considering the balance between stakeholders' expectations and the Company's goal to become the "most trusted and preferred company"

Misi TJSL PLN NP

Mission of PLN NP CSR

- Meningkatkan reputasi perusahaan melalui peningkatan kinerja lingkungan, sosial, dan ekonomi dengan program-program CSR yang lebih berkualitas dan akuntabel.
- Meningkatkan orientasi pengelolaan program yang terukur dampaknya.
- Meningkatkan dukungan terhadap operasi PLN NP melalui peningkatan penerimaan para pemangku kepentingan terhadap eksistensi PLN NP sebagai bagian dari masyarakat (*corporate citizenship*).
- Meningkatkan konsistensi komitmen terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat melalui pelibatan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan program-program CSR relevan dan unik.
- Meningkatkan kualitas hubungan yang luas dengan para pemangku kepentingan melalui strategi komunikasi yang elegan mempromosikan tema CSR yang kokoh, sesuai dengan tujuan perusahaan dan harapan para pemangku kepentingan.

- Improving the Company's reputation through environmental, social, and economic performance improvement through CSR programs that are more qualified and accountable.
- Improving the orientation of program management with the measurable impacts.
- Increasing support for PLN NP operations by improving the stakeholders acceptance in PLN Nusantara Power existence as part of the corporate citizenship.
- Increasing the consistency of commitment to sustainability and community welfare through the involvement of the stakeholders in the management of relevant and unique CSR programs.
- Improving the quality of extensive relationships with stakeholders through well-established communication strategies which promote a solid CSR theme aligned with the Company goals and the stakeholders' expectations.

Roadmap dan Strategi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Social and Environmental Responsibility Roadmap and Strategy

Dalam pelaksanaannya, PLN NP telah memiliki *roadmap* TJSL yang senantiasa disempurnakan untuk mendukung strategi korporasi dalam menjaga kelangsungan bisnisnya, serta berkontribusi dalam pemenuhan sasaran pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Dalam implementasinya, CSR PT PLN NP mengedepankan kaidah *Good Corporate Governance* (GCG) yang dituangkan dalam Rencana Strategis atau *roadmap* CSR 2018-2024 guna mendukung *grand strategy* perusahaan dalam bisnis energi berkelanjutan.

In its implementation, PLN NP has a TJSL roadmap that is constantly being refined to support corporate strategies in maintaining business continuity, as well as contributing to the fulfillment of Sustainable Development Goals (SDGs) by the government. In its implementation, PT PLN NP's CSR emphasizes the principles of Good Corporate Governance (GCG) as outlined in the 2018-2024 CSR Strategic Plan or roadmap to support the Company's grand strategy in the sustainable energy business.

Rencana Strategis TJSL PLN Nusantara Power Tahun 2018 – 2024

PLN Nusantara Power CSR Strategic Plan 2018 - 202

2018

- *Workshop* dan sosialisasi/pemahaman
- Implementasi PJB Empati
- Workshop and socialization/ understanding
- PJB Empathy Implementation

2019

- GAP *Analisis*
- Membangun Komitmen menerapkan CSR berbasis ISO 26000
- Penetapan Pedoman Integrasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- *Blue Print* CSR Berbasis ISO 26000
- GAP Analysis
- Built Commitment to performing CSR based on ISO 26000
- Determination of Corporate Social Responsibility Integration Guidelines
- ISO 26000 Based CSR Blue Print

2020
Holistic CSR

- Membentuk Komite CSR
- Menyusun Strategi Keberlanjutan yang komprehensif
- Established CSR Committee
- Developed a comprehensive Sustainability Strategy

2021
Transformasi
Transformation

- Melaksanakan transformasi PLN Power Beyon Generations mewujudkan Visi dan Misi menuju bisnis berkelanjutan
- Melaksanakan program PLN *Empower* untuk mewujudkan *Sustainable Energy*
- Pelaksanaan *Sustainable Finance*
- Pengukuran dampak menggunakan SROI
- Transformation of PLN Power Beyond Generations to realize the Vision and Mission towards a sustainable business
- PLN Empower program to realize Sustainable Energy
- Implementation of Sustainable Finance
- Impact measurement using SROI

2022
Empower

- Program PLN Empower menciptakan *Share Value* (CSV) bagi bisnis dan masyarakat yang terukur (SROI dan Index Kepuasan Masyarakat
- PLN Empower program creates measurable Share Value (CSV) for business and society (SROI and Community Satisfaction Index).

2023
Sustainable Impact Creation

- Menciptakan Program CSR yang berdampak berkelanjutan melalui proses produksi dengan energi bersih dan berkelanjutan
- Implementasi PLN Peduli
- Created a CSR Program that presents sustainable impact through a production process with clean and sustainable energy
- Implementation of PLN Cares

2024
Sustainable Bussines Energy

- Mewujudkan bisnis berkelanjutan
- Menjadi Perusahaan terkemuka Se-Asia Tenggara dan Menjadi pilihan nomor 1 pelanggan untuk solusi energi
- Realized a sustainable business
- To be a leading company in Southeast Asia and to be the number 1 choice of customers for energy solutions

Realisasi Program
Program Realization

Program Kinerja Keberlanjutan PLN NP telah dimasukkan dalam RKAP setiap tahunnya. Anggaran tersebut dialokasikan oleh PLN NP kedalam berbagai program strategi keberlanjutan. diantaranya yaitu:

1. Program peningkatan kinerja keuangan dan kinerja operasi;
2. Program anti korupsi;
3. Program efisiensi energi;
4. Perlindungan K3 kepada Pemangku Kepentingan.
5. Penanganan Pengaduan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
6. Penelitian dan Pengembangan Pembangkit;
7. Evaluasi Pengelolaan SDM dan Penanganan Pengaduan Karyawan;
8. Mengelola dan Mengendalikan Emisi;
9. Pengelolaan Limbah;
10. Keanekaragaman Hayati;
11. Program Pijar Berdaya;
12. Program Kampung Mang Jasri;
13. Dll.

Realisasi biaya program tanggung jawab sosial PLN NP tahun 2022 sebesar Rp40,70 meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp35,16 miliar.

PLN NP Sustainability Performance Program has been included in the annual ABOP. The budget is allocated by PLN NP into various sustainability strategy programs, including:

1. Financial and operating performance improvement program;
2. Anti-corruption program;
3. Energy efficiency program;
4. OHS protection to Stakeholders.
5. Handling of Occupational Safety and Health Complaints;
6. Power Plant Research and Development;
7. Evaluation of HR Management and Handling of Employee Complaints;
8. Managing and Controlling Emissions;
9. Waste Management;
10. Biodiversity;
11. Empowered Incandescent Program;
12. Mang Jasri Village Program;
13. Etc.

PLN NP social responsibility program cost for 2022 was Rp40.70, an increase compared to 2021 which was Rp35.16 billion.

Anggaran dan Realisasi Biaya CSR Tahun 2022 (dalam jutaan)
Budget and Realization of CSR Costs for 2022 (in millions)

No.	Tipologi Typology	RKAP 2022 2022 ABOP	Realisasi 2022 2022 Realization	Pencapaian terhadap RKAP ABOP Achievement
1	*Empowerment*	16.675	16.008	96%
2	*Capacity Building*	10.756	10.121	94%
3	Infrastruktur Infrastructure	5.878	4.945	84%
4	*Charity*	4.113	6.219	151%
5	KLBS	4.309	3.411	79%
Total		**41.730**	**40.704**	**97%**

Kinerja Keberlanjutan Aspek Ekonomi

Sustainability Performance of Economic Aspect

PLN NP terus berkomitmen untuk mendorong perkembangan perekonomian di Indonesia dengan menyediakan energi listrik bermutu tinggi, andal dan ramah lingkungan. Komitmen ini berkontribusi memberikan dampak positif bagi upaya Indonesia untuk mengambil bagian pada rantai pasok global di tengah momentum transisi energi saat ini. Transformasi yang dilakukan PLN NP pada tahun 2022 menjadi *subholding* dari PT PLN (Persero) memantapkan cita-cita Perusahaan untuk menjadi Perusahaan pembangkit listrik terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini juga menjadi momentum bagi Perusahaan untuk menegaskan kompetensinya di bidang pembangkitan.

PLN NP continues to be committed to encouraging economic development in Indonesia by providing high-quality, reliable and environmentally friendly electrical energy. This commitment contributes to a positive impact on Indonesia's efforts to take part in the global supply chain in the middle of the current energy transition momentum. The transformation of PLN NP in 2022 into a subholding of PT PLN (Persero) solidifies the Company's goal to become the largest power plant Company in Southeast Asia. This is also a momentum for the Company to emphasize its competence in the field of electric power generator.

Ikhtisar Capaian Kinerja Ekonomi

Highlights of Economic Performance Achievements

Pada tahun 2022 pencapaian kinerja ekonomi dapat dilihat pada aspek realisasi produksi tenaga listrik yang berhasil melebihi target RKAP yaitu sebesar 17.064.310 MWh dari 15.276.418 MWh (tercapai 111,70%) dimana dari total produksi tersebut, kontribusi produksi pembangkit EBT berhasil melebihi target RKAP yaitu sebesar 3.180,84 GWh dari 2.297,32 GWh (tercapai 138,46%). Adanya jumlah produksi listrik yang melebihi target tersebut, memberikan dampak positif pada penjualan tenaga listrik yang juga melebihi target RKAP yaitu sebesar 16.379.481 MWh dari 14.688.300 MWh (tercapai 111,51%). Begitupun dengan kinerja keuangan, dimana realisasi laba bersih berhasil melebihi target RKAP yaitu sebesar Rp6.583.546 juta dari Rp4.057.853 juta (tercapai 162,24%).

In 2022, the achievement of economic performance can be seen in the aspect of the realization of electricity production which managed to exceed the ABOP target of 17,064,310 MWh from 15,276,418 MWh (achieved 111.70%) where from the total production, the contribution of NRE power plant production managed to exceed the ABOP target of 3,180.84 GWh from 2,297.32 GWh (achieved 138.46%). The amount of electricity production that exceeded the target, had a positive impact on electricity sales which also exceeded the ABOP target of 16,379,481 MWh from 14,688,300 MWh (achieved 111.51%). Likewise with financial performance, where the realization of net profit managed to exceed the ABOP target of Rp6,583,546 million from Rp4,057,853 million (achieved 162.24%).

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Ekonomi
Highlights of Economic Performance Achievements

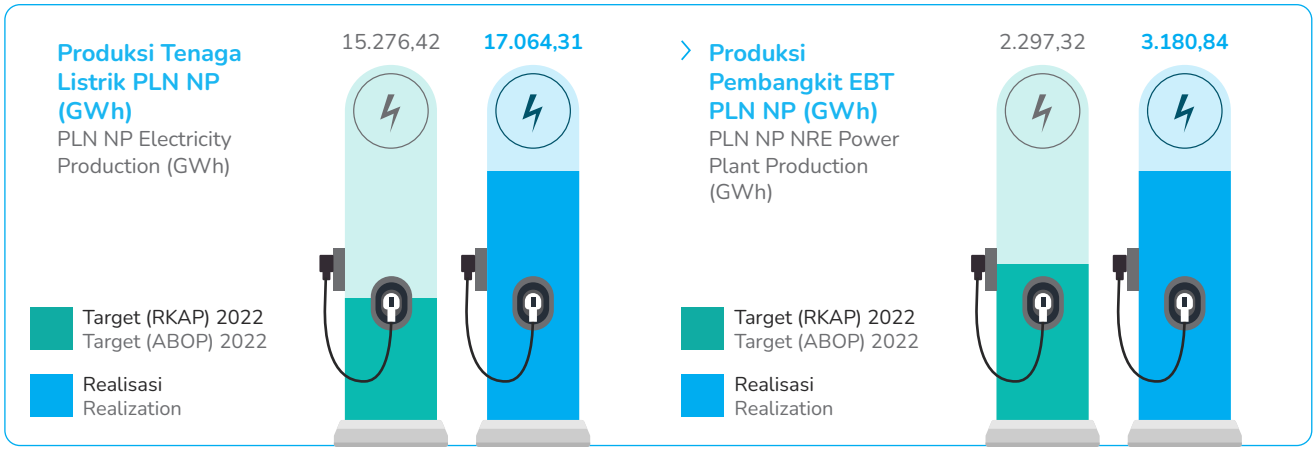

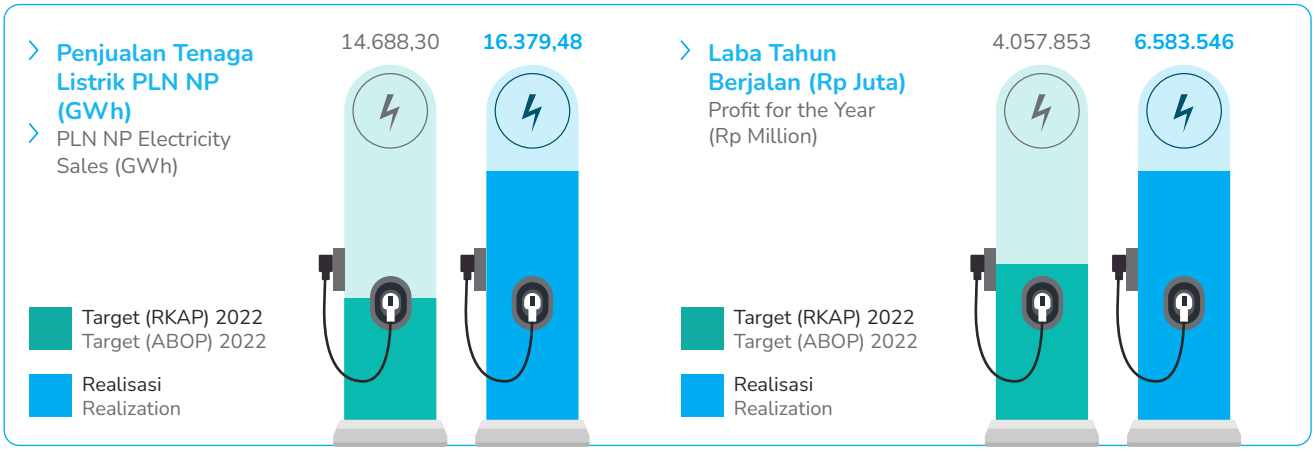

Perbandingan Target dan Kinerja Operasional dan Keuangan

Comparison of Operational and Financial Targets and Performance

Indikator Indicator	2022		Pencapaian Achievement	2021		Pencapaian Achievement	2020		Pencapaian Achievement
	Target	Realisasi Realization		Target	Realisasi Realization		Target	Realisasi Realization	
Produksi Tenaga Listrik (GWh) Electricity Production (GWh)	15.276,42	17.064,31	111,70%	19.407,50	20.640,92	106,36%	19.580,86	17.815,81	90,99%
Penjualan Listrik (GWh) Electricity Sales (GWh)	14.688,30	16.379,48	111,51%	18.538,88	19.848,44	107,06	18.693,13	17.117,04	91,57%
Pendapatan Usaha (Rp Juta) Revenue (Rp Million)	29.395.680	27.202.200	92,54%	30.779.721	29.508.134	95,87%	35.504.803	30.434.176	85,72%
Laba Tahun Berjalan (Rp Juta) Profit for the Year (Rp Million)	4.057.853	6.583.546	162,24%	3.207.546	5.820.188	181,45%	6.802.853	7.703.812	113,24

Perbandingan Target dan Kinerja Keuangan Berkelanjutan
Comparison of Sustainable Finance Targets and Performance

Indikator Indicator	2022		Pencapaian Achievement	2021		Pencapaian Achievement	2020		Pencapaian Achievement
	Target	Realisasi Realization		Target	Realisasi Realization		Target	Realisasi Realization	
Produksi Pembangkit EBT (GWh) NRE Power Plant Production (GWh)	2.297,32	3.180,84	138,46%	2.211,50	2.654,32	120,02%	2.700,09	2.507,82	92,88%
Produksi Pembangkit Hidro (GWh) Hydro Power Plant Production (GWh)	2.256,89	3.077,84	136,38%	2.211,50	2.590,34	117,13%	2.700,09	2.498,03	92,52%
Produksi Pembangkit Biomassa (GWh) Biomass Power Plant Production (GWh)	40,43	103,00	254,76%	-	63,98	-	-	9,79	-

Mengoptimalkan Perolehan dan Pendistribusian Nilai Ekonomi
Optimizing the Acquisition and Distribution of Economic Value

Dalam melakukan perhitungan perolehan dan pendistribusian nilai ekonomi kepada pemangku kepentingan, PLN NP menggunakan ketentuan perhitungan sesuai dengan pedoman GRI Standards dengan menggunakan informasi dalam laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit.

In calculating the acquisition and distribution of economic value to stakeholders, PLN NP uses the calculation provisions in accordance with the GRI Standards guidelines by using information in the audited consolidated financial statements.

Pada tahun 2022, PLN NP berhasil menciptakan kinerja ekonomi positif yang terlihat dari jumlah nilai ekonomi langsung yang dihasilkan sebesar Rp30.578.010 juta. Dari perolehan pendapatan tersebut, PLN NP distribusikan kepada pemangku kepentingan Perusahaan sebesar Rp29.651.554 juta untuk kepentingan beban usaha, pemenuhan biaya kepegawaian, pembayaran pajak kepada Negara, pembagian dividen kepada pemegang saham dan pengeluaran untuk program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan.

In 2022, PLN NP succeeded in creating positive economic performance as seen from the total direct economic value generated of Rp30,578,010 million. From this revenue, PLN NP distributed Rp29,651,554 million to the Company's stakeholders for the benefit of business expenses, fulfillment of personnel expenses, tax payments to the State, dividend distribution to shareholders and expenditures for the Company's Corporate Social Responsibility (CSR) program.

Nilai Ekonomi PLN NP
Economic Value of PLN NP

Nilai Ekonomi Economic Value	Tahun Year		
	2020	2021	2022
Nilai Ekonomi Langsung Yang Dihasilkan Direct Economic Value Generated	**32.504.428**	**32.566.972**	**30.578.010**
Pendapatan penjualan tenaga listrik Revenue from sales of electricity	25.476.470	24.541.378	21.682.476
Pendapatan usaha lainnya (operasi dan pemeliharaan, konstruksi dan lainnya) Other operating revenue (operation and maintenance, construction and others)	4.957.706	4.966.756	5.519.724
Penghasilan keuangan Finance income	126.658	186.603	182.327
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing-bersih Gains/(losses) on foreign exchange - net	-8.913	3.924	-4.205
Bagian laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama Share in net profit of associates and joint ventures	1.952.507	2.868.311	2.854.031
Penghasilan lain-lain Other income	-	-	343.657
Nilai Ekonomi yang Didistribusikan Economic Value Distributed	**29.703.381**	**34.197.487**	**29.651.550**
Beban usaha*Operating expenses*	20.225.564	23.310.690	20.760.039
Biaya kepegawaian Personnel expenses	1.682.988	1.790.453	1.811.388
Beban lain-lain Other expenses	355.769	273.789	-
Pembayaran pajak kepada Negara Tax payment to the State	767.020	1.126.000	1.229.386
Pembagian dividen kepada pemegang saham Dividend distribution to shareholders	6.645.392	7.661.396	5.810.033
Pengeluaran untuk Program CSR Expenditure for CSR Program	26.648	35.159	40.704
Nilai Ekonomi Yang Ditahan Economic Value Retained	**2.801.047**	**-1.630.515**	**926.460**

Catatan:
* Beban Usaha di luar Biaya Kepegawaian
Notes:
* Operating Expenses excluding Personnel Expenses

Kontribusi Kepada Negara
Contribution to the State

PLN NP sebagai Perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN yaitu PT PLN (Persero), ikut berperan sebagai *agent of value creator* dan *agent of development* yang diharapkan mampu memberikan kontribusi keuntungan bagi Negara. Untuk itu, kontribusi PLN NP kepada Negara terwujud dalam kepatuhan pemenuhan kewajiban Perusahaan sebagai Wajib Pajak melalui pembayaran pajak dan dividen. Jumlah setoran pajak tahun 2022 sebesar Rp1.229,39 miliar, meningkat 9,18% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp1.126,00 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh jumlah pembelian material dan penggunaan jasa dari pihak ketiga.

PLN NP as a Company whose shares are mostly owned by SOE, PT PLN (Persero), plays a role as an agent of value creator and agent of development which is expected to contribute profits to the State. For this reason, PLN NP's contribution to the State is realized in compliance with the fulfillment of the Company's obligations as a Taxpayer through tax and dividend payments. The amount of tax payments in 2022 was Rp1,229.39 billion, increased by 9.18% compared to 2021 of Rp1,126.00 billion. The increase was mainly influenced by the amount of material purchases and the use of services from third parties.

Sebagai pemotong pajak, Perusahaan secara aktif berperan serta dalam melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas pajak-pajak seperti PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi dan sewa bangunan; PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi; dan PPh Pasal 23 atas penghasilan yang diterima wajib pajak badan.

As a tax withholder, the Company actively participates in withholding, paying and reporting on taxes such as Income Tax Article 4 paragraph 2 on construction services and building leases; Income Tax Article 21 on income received by individual taxpayers; and Income Tax Article 23 on income received by corporate taxpayers.

Kontribusi Pajak PLN NP kepada Negara (Rp Miliar)
PLN NP Tax Contribution to the State (Rp Billion)

Jenis Pajak Type of Tax	2020	2021	2022
PPh Pasal 21 Income Tax Article 21	138.981,03	177.722,36	143.154,72
PPh Pasal 23 Income Tax Article 23	53.613,00	58.251,76	55.566,41
PPh Pasal 4 ayat 2 Income Tax Article 4 paragraph 2	31.308,31	21.982,40	12.960,23
PPh Pasal 15 Income Tax Article 15	96,20	590,90	0,0020
PPh Pasal 22 Income Tax Article 22	51.607,91	63.084,27	76.631,85
PPh Pasal 26 Income Tax Article 26	51.607,91	63,30	17,80
PBB Land and Building Tax	6.507,78	18.809,91	25.649,46
PPN Masukan Input VAT	484.313,60	785.104,43	915.405,90
Jumlah Setoran Pajak Total Tax Payment	**767.019,83**	**1.125.609,33**	**1.229.386,38**

Selain pembayaran pajak kepada Negara, adapun kontribusi lain PLN NP terhadap Negara secara tidak langsung melalui peningkatan APBN yaitu PLN NP telah menyumbang dividen kepada PT PLN (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun 2022. Berdasarkan surat PLN tanggal 8 September 2022, pembagian dividen untuk tahun buku 2021 ditetapkan sebesar Rp5.810 miliar.

In addition to tax payments to the State, another contribution of PLN NP to the State indirectly through an increase in the State Budget is that PLN NP has contributed dividends to PT PLN (Persero), which is a State-Owned Enterprise (BUMN) in 2022. Based on PLN's letter dated September 8, 2022, the dividend distribution for the 2021 financial year was set at Rp5,810 billion.

Kinerja Keberlanjutan Aspek Lingkungan

Sustainability Performance in Environmental Aspect

PLN NP berkomitmen untuk terus membangun bisnis yang ramah lingkungan dan menjalankan tanggung jawab Perusahaan atas aspek lingkungan sebagai dukungan atas upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan memberikan nilai tambah bagi *stakeholders*. Komitmen PLN NP untuk tetap menjaga dan mempertahankan sekaligus melestarikan lingkungan hidup telah dituangkan dalam Keputusan Direksi No.017.K/020/DIR/2020 tentang Kebijakan Sistem Manajemen PT Pembangkitan Jawa-Bali. Kebijakan ini mengacu pada peraturan yang berlaku diantaranya PP 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta ISO 14001 tentang Sistem Manajemen Lingkungan. Kebijakan tersebut mengatur penggunaan sumber daya energi dan sumber daya alam dalam kegiatan operasional dan pemeliharaan unit pembangkit PLN NP secara efisien. Untuk itu, PLN NP berupaya untuk mempraktikkan operasional Perusahaan yang ramah lingkungan dan meminimalkan dampak negatif bagi lingkungan dengan memaksimalkan prinsip 3R (*reduce, reuse,* dan *recycle*).

PLN NP is committed to continuing to build an environmentally friendly business and carrying out corporate responsibility for environmental aspects as support of efforts to preserve the environment and provide added value to stakeholders. PLN NP's commitment to maintain and sustain while preserving the environment has been outlined in the Decision of the Board of Directors No.017.K/020/DIR/2020 concerning the Management System Policy of PT Pembangkitan Jawa-Bali. This policy refers to applicable regulations including PP 22 of 2021 concerning Environmental Protection and Management as well as ISO 14001 concerning Environmental Management Systems. The policy regulates the efficient use of energy resources and natural resources in the operational and maintenance activities of PLN NP's power plant units. Therefore, PLN NP strives to practice environmentally friendly Company operations and minimize negative impacts on the environment by maximizing the 3R principle (reduce, reuse, and recycle).

Manajemen PLN NP senantiasa meninjau kebijakan pengelolaan lingkungan hidup secara berkala untuk menjamin kesesuaian kebijakan dengan peraturan yang berlaku dan efektivitas penerapan program. Kebijakan yang berlaku saat ini merupakan penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi 0029.K/020/DIR/2021 Tentang Kebijakan Sistem Manajemen Terintegrasi. Kesungguhan PLN NP dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial terhadap lingkungan merupakan wujud kontribusi dalam memelihara kualitas lingkungan hidup di sekitar area operasional Perusahaan.

The management of PLN NP always reviews the environmental management policy periodically to ensure policy conformity with applicable regulations and effectiveness of program implementation. The current policy is a refinement of the previous policy stipulated in the Decree of the Board of Directors 0029.K/020/DIR/2021 concerning the Integrated Management System Policy. PLN NP's commitment in implementing the environmental social responsibility program is a form of contribution in maintaining the quality of the environment around the Company's operational areas.

Kegiatan Tanggung Jawab Lingkungan

Environmental Responsibility Activities

Dalam setiap aktivitas bisnisnya, PLN NP selalu berupaya memperhatikan aspek lingkungan hidup melalui berbagai kegiatan di tahun 2022 sebagai berikut:

In every business activity, PLN NP always strives to take into account environmental aspects through various activities in 2022 as follows:

Program Kepatuhan Pengelolaan Lingkungan

Environmental Management Compliance Program

Program Kepatuhan terhadap pengelolaan lingkungan merupakan kegiatan pendampingan dan pemantauan secara rutin untuk memastikan kepatuhan PLN NP terhadap pengelolaan lingkungan melalui:

The Compliance Program for environmental management is a routine mentoring and monitoring activity to ensure PLN NP's compliance with environmental management through:

Program Kepatuhan Pengelolaan Lingkungan
Environmental Management Compliance Program

No.	Program Kegiatan Activity Program	Realisasi Kegiatan Activity Realization	
1.	Mengelola dan Mengendalikan Emisi Managing and Controlling Emissions	• Inventarisasi Emisi Gas Buang. • Pengurangan Emisi • Emisi Bahan Perusak Ozon	• Exhaust Gas Emission Inventory. • Emission Reduction • Ozone-Depleting Substance Emissions
2.	Mengelola Air dan Efluen Managing Water and Effluent	• Pengelolaan Dampak Terkait Air • Pengambilan/Penarikan Air • Penggunaan Air • Pembuangan Air Limbah	• Water-related Impact Management • Water Abstraction/Withdrawal • Water Use • Wastewater Discharge
3.	Meningkatkan Pengelolaan dan Penanganan Limbah Improving Waste Management and Handling	• Pengelolaan Dampak Terkait Limbah • Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) • Pengelolaan Limbah Non B3	• Waste-related Impact Management • Toxic and Hazardous (B3) Waste Management • Non-Toxic and Hazardous Waste Management
4.	Mengelola Keanekaragaman Hayati dan Pemulihan Lahan Managing Biodiversity and Land Restoration	• Konservasi budidaya kakao, kopi, bamboo, mangrove dll. • Pembuatan Rumah Burung Hantu • Program pelestarian Sumber Mata Air Sendang Mudal Pamotan • dll	• Conservation of cocoa, coffee, bamboo, mangrove cultivation, etc. • Owl House Construction • Spring Water preservation program of Sendang Mudal Pamotan • etc.

Penggunaan Energi Ramah Lingkungan
Use of Eco-friendly Energy

PLN NP telah melakukan upaya untuk mengembangkan konsep yang mendukung pelestarian alam dan ramah lingkungan. Salah satunya diwujudkan melalui penggunaan energi yang ramah lingkungan demi meminimalkan dampak negatif akibat polusi udara, air, dan tanah.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, PLN NP selalu menggunakan energi primer yaitu Bahan Bakar Minyak, Diesel, Batubara, dan Gas/LPG/CNG untuk produksi listrik. Beberapa inisiatif program efisiensi energi yang diterapkan pada pembangkit dalam proses produksi listrik antara lain:

- Modifikasi *line cooling* dan *sealing* CWP
- Modifikasi *line backwash* ditambahkan menjadi pendingin CWP
- Pemanfaatan ulang air limbah WWTP untuk pembersihan Unit
- Pemanfaatan *Reuse Water* Untuk *Wash Down Coal Handling Facility*
- *Upgrade drain-drain valve* (*online sealing*)
- Pemanfaatan kembali air buangan *cooling* HSD *pump*
- Melakukan *recycle flow reject* 2nd RO water ke tangki UF
- Penambahan *Dry Fog Dust Suppression Conveyor* 4A
- Program *Cofiring Biomass*
- T*iny Oil Burner System*

PLN NP has made efforts to develop concepts that support nature conservation and are environmentally friendly. One of them is realized through the use of environmentally friendly energy to minimize negative impacts due to air, water and soil pollution.

In carrying out its activities, PLN NP always uses primary energy, namely Fuel Oil, Diesel, Coal, and Gas/LPG/CNG for electricity production. Several initiatives of energy efficiency programs implemented at the power plant in the electricity production process include:

- CWP cooling and sealing line modification
- Modification of backwash line added to CWP cooling
- WWTP wastewater reutilization for Unit cleaning
- Utilization of Reuse Water for Wash Down Coal Handling Facility
- Drain valve upgrade (online sealing)
- Reutilization of HSD pump cooling waste water
- Recycle 2nd RO water reject flow to UF tank
- Addition of Dry Fog Dust Suppression Conveyor 4A
- Biomass Cofiring Program
- Tiny Oil Burner System

- *Froztection*
- *Optimizing Coal to Air Ration in Boiler*
- *Digital Power Plant: Boiler Efficiency Tuning to reduce Unburnt Carbon*
- *Fuel switching to LRC Coal*
- *Modified Inlet Air Intake Valve* Blok 2
- *Online Cleaning Compressor*
- *Redesign* Pipa Gas

- Froztection
- Optimizing Coal to Air Ration in Boiler
- Digital Power Plant: Boiler Efficiency Tuning to reduce Unburnt Carbon
- Fuel switching to LRC Coal
- Modified Inlet Air Intake Valve Block 2
- Online Cleaning Compressor
- Redesign Gas Pipeline

Komitmen dalam penerapan inisiatif efisiensi khususnya energi primer PLN NP ditunjukkan dengan penggunaan biomassa sebagai campuran bahan bakar pembangkit. Jumlah konsumsi energi primer tahun 2022 yaitu 212.022.493,82 Gigajoule menurun dari tahun 2021 sebesar 259.994.891,59 Gigajoule, yang dirincikan dalam tabel berikut.

Commitment to implementing efficiency initiatives, especially primary energy for PLN NP, is shown by the use of biomass as a mixture of power plant fuels. Total primary energy consumption in 2022 was 212,022,493.82 Gigajoules, decreased from 2021 of 259,994,891.59 Gigajoules, which is detailed in the following table.

Konsumsi Energi Primer Tahun 2020-2022 (Gigajoule)
Primary Energy Consumption in 2020-2022 (Gigajoule)

Jumlah Energi Power Total Power Energy	2022	2021	2020
Energi Fosil Fossil Energy			
HSD	305,100.63	3,789,159.34	563,801.45
MFO	462,470.47	1,747,085.95	346,423.61
Batubara Coal	111,577,695.20	130,301,728.33	83,414,979.26
Gas	84,786,469.76	112,363,235.71	100,875,747.13
Energi Terbarukan Renewable Energy			
Air Air	11,080,213.17	9,325,226.32	8,957,451.62
Biomassa Biomass	3,810,544.60	2,468,455.94	
Total	**212,022,493.82**	**259,994,891.59**	**194,158,403.07**

Green Power Plant

Dalam pelaksanaan kegiatannya PLN NP berkomitmen untuk menerapkan teknologi pembangkitan yang ramah lingkungan dan mendorong pengembangan program *green power plant.* PLN NP berhasil mengelola *Green Power Plant* Cirata yang meliputi agroforestri dengan varian tanaman endemik dan buah-buahan sebagai bagian dari upaya PLN NP dalam melindungi keanekaragaman hayati; Gedung Dan *Control Centre* yang menjadi pusat kontrol dan *monitoring* Bendungan Cirata; Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan *underground powerhouse* terbesar di dunia; dan *Photovoltaic* atau Pembangkit Listrik Tenaga Surya dengan kapasitas 1 MW sebagai pembangkit riset di pulau Jawa.

In the implementation of its activities, PLN NP is committed to implementing environmentally friendly electric power generator technology and encouraging the development of green power plant programs. PLN NP successfully manages the Cirata Green Power Plant, which includes agroforestry with variants of endemic plants and fruits as part of PLN NP's efforts to protect biodiversity; the Dan Control Center Building, which is the control and monitoring center for the Cirata Dam; a Hydro Power Plant with the largest underground powerhouse in the world; and a 1 MW Photovoltaic or Solar Power Plant as a research plant on the Java island.

Seiring dengan perkembangan energi baru terbarukan di dunia dan kepedulian terhadap produksi listrik melalui energi hijau, PLN NP juga bekerjasama dengan Masdar Energy dari Uni Emirat Arab. Melalui kerjasama ini, PLN NP bersama dengan Masdar akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung pertama di Indonesia dan terbesar di Asia Tenggara yaitu PLTS Terapung Cirata 145 MW.

PLN NP terus melahirkan inovasi-inovasi yang memperkokoh posisi Perusahaan menjadi yang terdepan dalam bisnis pembangkitan serta wujud kontribusi kepada sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Beberapa inovasi yang telah dihasilkan oleh PLN NP pada tahun 2022 diantaranya Implementasi *Co Firing* Berkelanjutan, Pengembangan Teknologi Amonia *Co-Firing*, A-BOOT (*Advanced Boiler Optimization and Tuning*), dan implementasi *Digital Power Plant.*

Along with the development of new and renewable energy in the world and concern for electricity production through green energy, PLN NP also collaborates with Masdar Energy from the United Arab Emirates. Through this collaboration, PLN NP together with Masdar will build the first Floating Solar Power Plant (SPP) in Indonesia and the largest in Southeast Asia, namely the 145 MW Cirata Floating SPP.

PLN NP continues to produce innovations that strengthen the Company's position to be the leading in the electric power generator business as well as a form of contribution to the electricity sector in Indonesia. PLN NP produced several innovations in 2022, including the Implementation of Sustainable Co-Firing, Development of Ammonia Co-Firing Technology, A-BOOT (Advanced Boiler Optimization and Tuning), and implementation of Digital Power Plant.

Sistem Pengolahan Limbah
Waste Treatment System

Dalam rangka mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan sehat, diperlukan suatu pengelolaan limbah padat/sampah serta limbah B3 secara terpadu dan terintegrasi sehingga tidak menimbulkan dampak negatif seperti bau, penyakit, kotor, dan dampak buruk lainnya. PLN NP juga melaksanakan pengelolaan limbah cair dan padat baik yang termasuk Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) maupun Non B3 sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

In order to realize a clean and healthy work environment, it is necessary to manage solid waste/garbage and B3 waste in an integrated manner so as not to cause negative impacts such as odor, disease, dirty, and other adverse impacts. PLN NP also carries out liquid and solid waste management both including Toxic and Hazardous Materials (B3) and Non-B3 in accordance with applicable procedures and provisions.

Limbah Cair
Liquid Waste

PLN NP melakukan pengelolaan air limbah sebelum dibuang ke badan air baik itu laut maupun sungai untuk mencegah potensi pencemaran akibat aktivitas operasional pembangkit. PLN NP juga memiliki unit instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di setiap unit pembangkitan. Secara umum, IPAL terdiri dari proses fisik (sedimentasi & oil separator), kimia (penambahan koagulan dan flokulan), serta filtrasi (media pasir). Ketiga metode ini digunakan untuk mengontrol parameter kontaminan agar tidak melebihi baku mutu yang dipersyaratkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2009 seperti pH, TSS, minyak dan lemak, sisa klor, dan lain-lain. Selain itu, PLN NP melakukan pengukuran kualitas air limbah di unit eksisting dan unit FTP-1 sebagai berikut.

PLN NP conducts wastewater management before being discharged into water bodies, both sea and river, to prevent potential pollution due to operational activities of the power plant. PLN NP also has a wastewater treatment plant (WWTP) unit in each generation unit. In general, WWTP consists of physical (sedimentation & oil separator), chemical (coagulant and flocculant addition), and filtration (sand media) processes. These three methods are used to control contaminant parameters so that they do not exceed the quality standards required by the Regulation of the Minister of Environment No. 8 of 2009 such as pH, TSS, oil and fats, residual chlorine, and others. In addition, PLN NP conducts wastewater quality measurements in the existing unit and FTP-1 unit as follows.

Unit Eksisting

Existing Unit

Tabel Kualitas Air Limbah Proses/WWTP
Table of Process Wastewater/WWTP Quality

Parameter	Satuan Unit	Baku Mutu* Quality Stan-dards*	Gresik		Paiton		Muara Karang		Muara Tawar	
			Max	Min	Max	Min*	Max	Min	Max	Min
pH	-	6 - 9	7.77	7.30	8.30	7.38	8.40	7.00	8.45	7.31
TSS	mg/l	100	9.0	2.0	28.0	1.0	39.0	2.0	17.0	2.5
Minyak dan Lemak Oil and Fat	mg/l	20	2.4	2.4	2.4	2.4	3.0	0.54	2.0	2.0
Cr Total	mg/l	0,5	0.09	0.04	0.31	0.04	0.3	0.08	0.18	0.02
Tembaga (Cu) Copper (Cu)	mg/l	0,5	0.108	0.108	0.11	0.11	0.04	0.01	0.01	0.01
Besi (Fe) Iron (Fe)	mg/l	1	0.04	0.04	0.06	0.04	0.3	0.01	0.01	0.01
Seng (Zn) Zinc (Zn)	mg/l	3	0.86	0.23	2.65	0.27	2.0	0.01	2.2	0.3
Phosphate (PO_4)	mg/l	1	0.39	0.10	0.14	0.06	0.08	0.01	0.2	0.04

Tabel Kualitas Air Limbah Bahang/ Air Laut Pendingin
Table of Heat Wastewater/Cooling Seawater Quality

Parameter	Satuan Unit	Baku Mutu* Quality Stan-dards*	Gresik		Paiton		Muara Karang		Muara Tawar	
			Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min
Suhu Temperature	°C	40	35.4	32.2	37.5	32.5	35.0	31.0	33.1	30.8
Chlorin	mg/l	0,5	0.09	0.04	0.31	0.04	0.3	0.08	0.18	0.02

Kualitas Air Limbah dan Air Limbah Bahang (Air Laut Pendingin) masih dibawah ambang batas:

The quality of Wastewater and Heat Wastewater (Cooling Seawater) is still below the threshold:

Unit FTP-1

Unit FTP-1

Tabel Kualitas Air Limbah Proses/WWTP
Table of Process Wastewater/WWTP Quality

Parameter	Satuan Unit	Baku Mutu* Quality Stan-dards*	Indramayu		Rembang		Tjg. Awar-awar		Paiton 9		Pacitan	
			Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min
pH	-	6 - 9	7,98	7,75	6,25	6,1	*	*	*	*	*	*
TSS	mg/l	100	17	15	7	3	*	*	*	*	*	*
Minyak dan Lemak Oil and Fat	mg/l	10	0,37	0,37	2,4	2,4	*	*	*	*	*	*
Chlorine (Cl_2)	mg/l	0,5	0,039	0,039	0,11	0,11	*	*	*	*	*	*

Parameter	Satuan Unit	Baku Mutu* Quality Stan-dards*	Indramayu		Rembang		Tjg. Awar-awar		Paiton 9		Pacitan	
			Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min
Cr total Total Cr	mg/l	1	0,015	0,015	0,05	0,04	*	*	*	*	*	*
Tembaga (Cu) Copper (Cu)	mg/l	3	0,6	0,48	1,91	1,58	*	*	*	*	*	*
Besi (Fe) Iron (Fe)	mg/l	1	0,03	0,028	0,74	0,39	*	*	*	*	*	*
Seng (Zn) Zinc (Zn)	mg/l	10	0,033	0,033	#	#	*	*	*	*	*	*
Phosphate (PO_4)	mg/l	10	9.03	0.12	1.18	0.17	1.18	0.17	0.3	0.03	0.8	0.1

* Paiton 9, Tanjung Awar-Awar & Pacitan, tidak memiliki kewajiban penaatan pada titik outlet WWTP SK Izin Pembuangan Limbah Cair ke Laut
# Parameter yang dimaksud tidak Dipersyaratkan dalam SK Izin Pembuangan Limbah Cair ke Laut yang dimiliki Unit yang bersangkutan
* Paiton 9, Tanjung Awar-Awar & Pacitan, do not have compliance obligations at the WWTP outlet point based on Decree of Permit for Discharge of Liquid Waste to the Sea
# The parameter mentioned is not required in the Decree of Permit for Discharge of Liquid Waste to the Sea owned by the Unit concerned

Tabel Kualitas Air Limbah Bahang/ Air Laut Pendingin (Kep.Men.LHK. No. SK 434/Menlhk/ Setjen/ PKL 1/7/2019, KepMenLHK No. SK.284/Menlhk/ Setjen/ PKL.1/6/2017, KepMenLHK No. SK.213/ Menlhk/ Setjen/ PKL.1/5/2018, KepMenLHK No. SK.443/ Menlhk/ Setjen/ PKL.1/6/2016, KepMenLHK No. SK.328/ Menlhk/ Setjen/ PKL.1/7/2017)

Table of Heat Wastewater/Cooling Seawater Quality (Kep.Men.LHK. No. SK 434/Menlhk/Setjen/PKL 1/7/2019, KepMenLHK No. SK.284/Menlhk/Setjen/PKL.1/6/2017, KepMenLHK No. SK.213/Menlhk/Setjen/PKL.1/5/2018, KepMenLHK No. SK.443/Menlhk/Setjen/ PKL.1/6/2016, KepMenLHK No. SK.328/Menlhk/Setjen/PKL.1/7/2017)

Parameter	Satuan Unit	Baku Mutu* Quality Stan-dards*	Indramayu		Rembang		Tjg. Awar-awar		Paiton 9		Pacitan	
			Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min
Suhu Temperature	0C	40	35	35	36,6	32,7	37,2	31,1	34,9	32,9	33,9	30
Chlorin	mg/l	0.5	0,2	0,06	0,12	0,04	0,09	0,08	0,17	0,1	0,3	0,17

Limbah B3

Hazardous and Toxic Waste

PLN NP dalam melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan regulasi yang berlaku saat ini diantaranya Permen LHK No. 6 tahun 2021 tentang pengelolaan limbah B3. Limbah B3 yang dihasilkan dari operasional pembangkit, maka limbah B3 tersebut disimpan di TPS LB3 yang berizin atau terintegrasi di dalam dokumen lingkungan selama masa simpan yang diperbolehkan. Selanjutnya, limbah B3 tersebut diserahkan ke pihak ketiga yang memiliki izin pengelolaan limbah B3 (pengumpul/pemanfaat/pengolah). PLN NP juga bekerja sama dengan transporter yang memiliki perizinan lengkap dari KLHK dan Kemenhub.

PLN NP in managing Hazardous and Toxic waste in accordance with current regulations, including the Regulation of the Minister of Environment and Forestry No. 6 of 2021 concerning the management of Hazardous and Toxic waste. The Hazardous and Toxic waste generated from the operation of the power plant, the Hazardous and Toxic waste is stored in a licensed LHazardous and Toxic Landfill or integrated in the environmental document for the allowed shelf life. Furthermore, the Hazardous and Toxic waste is handed over to a third party that has a Hazardous and Toxic waste management license (collector/beneficiary/processor). PLN NP also cooperates with transporters who have complete licenses from the Ministry of Environment and Forestry and the Ministry of Transportation.

Limbah Non-B3
Non-Hazardous and Toxic Waste

PLN NP dalam melakukan pengelolaan limbah Non-B3 yaitu memaksimalkan 3R agar sampah yang berakhir di TPA berkurang. PLN NP melakukan pemanfaatan limbah organik menjadi kompos ataupun briket, sedangkan sebagian limbah anorganik seperti kardus kemasan, botol minuman sekali pakai, plastic, dan limbah non-B3 lainnya dikelola di bank sampah binaan di sekitar lokasi pembangkit. Sisa limbah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali, diserahkan ke TPA.

FABA dikategorikan menjadi Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non-B3) sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kegiatan Pemanfaatan FABA merupakan salah satu bentuk pengelolaan limbah Non B3 yang dilakukan oleh perusahaan penghasil limbah (PLTU). Pemanfaatan FABA yang dilakukan oleh PLTU merupakan kegiatan tambahan (*beyond compliance*) yang dilakukan oleh pihak perusahaan dalam mengelola lingkungan yg lebih baik. Total pemanfaatan FABA tahun 2022 sebesar 851.080,31 Ton atau 123,47% dari total FABA yang dihasilkan serta meningkat sebesar 102,56% dari total FABA yang dimanfaatkan tahun sebelumnya. Dalam upaya untuk mengurangi kegiatan Penimbunan FABA di Landfill, dilakukan Pemanfaatan FABA sebagai Bahan Baku Substitusi Produk Beton Perkerasan, Roadbase (*subgrade* atau *sub-base*), Bata Ringan, Paving/Batako, Penetralisir Air Asam Tambang, Break Water dan Pupuk.

Berikut adalah berbagai macam inovasi yang dilakukan perusahaan dalam pengelolaan limbah baik B3 maupun non-B3:

PLN NP in conducting Non-Hazardous and Toxic waste management is maximizing the 3Rs so that the waste that ends up in the landfill decreases. PLN NP utilizes organic waste into compost or briquettes, while some inorganic waste such as cardboard boxes, disposable drink bottles, plastic, and other Non-Hazardous and Toxic waste is managed in waste banks built around the power plant site. The remaining waste that cannot be reutilized is handed over to the landfill.

FABA is categorized as Non-Hazardous and Toxic Waste (Non-Hazardous and Toxic Waste) according to Government Regulation (PP) 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management. FABA Utilization activities are a form of Non-B3 waste management conducted by waste generating companies (CFPP). The utilization of FABA conducted by CFPP is an additional activity (beyond compliance) carried out by the Company in managing a better environment. Total FABA utilization in 2022 was 851,080.31 tons or 123.47% of the total FABA produced and increased by 102.56% from the total FABA utilized in the previous year. In an effort to reduce FABA Stockpiling activities in Landfills, FABA Utilization is conducted as a Substitute Raw Material for Concrete Pavement Products, Roadbase (subgrade or sub-base), Lightweight Brick, Paving/Brick, Neutralizer for Acid Mine Drainage, Break Water and Fertilizer.

The following are various innovations made by the Company in managing both Hazardous and Toxic Waste and Non-Hazardous and Toxic waste:

Unit Pembangkit Generation Unit	Inovasi Innovation	Deskripsi Description	
Limbah B-3 Hazardous and Toxic Waste			
UP Indramayu Indramayu GU	Program Perubahan Sistem Periodik Penggantian Silica dengan Sistem *Assessment* Periodic System Change Program of Silica Replacement with Assessment System	Sistem *Assessment* yang dilakukan memperhitungkan kondisi silica seperti jika silica belum jenuh, maka akan berwarna biru sedangkan bila sudah jenuh akan berubah warna. Selain itu diperhitungkan waktu periode kapan akan dilakukan *overhaul* kembali.	The assessment system takes into account the condition of the silica such as if the silica is not saturated, it will be blue while if it is saturated it will change color. In addition, it takes into account the time period when the overhaul will be conducted again.
UP Paiton 9 Paiton 9 GU	Penambahan Labirin Sebagai Tempat Pengendapan *Sludge* Batubara Addition of Labyrinth as Coal Sludge Deposition Place	Program penambahan labirin sebagai tempat pengendapan *sludge* batubara dilaksanakan di unit *Coal Handling*. Setelah dilakukan program inovasi, sludge batu bara dari limpasan *Coal Yard* akan otomatis terfilter dan terendap. pada proses ini hasil endapan *sludge* pada labirin akan diangkut secara rutin dan dikembalikan ke *Coal Yard* untuk dibakar bersama batubara lainnya di dalam *Boiler*.	Labyrinth addition program as a coal sludge deposition place is carried out in the Coal Handling unit. After the innovation program is conducted, coal sludge from the Coal Yard runoff will be automatically filtered and deposited. In this process, the sludge deposited in the labyrinth will be routinely transported and returned to the Coal Yard to be burned with other coal in the Boiler.

Unit Pembangkit Generation Unit	Inovasi Innovation	Deskripsi Description	
UP Rembang Rembang GU	Kopling Kompresor Oli Sintetik (KOMPRES ITIK) Synthetic Oil Compressor Coupling (ITIK COMPRESS)	Inovasi Kopling Kompresor Oli Sintetik termasuk Perubahan Komponen dan berdampak pada *product improvement, process improvement* dan *material efficient manufacturing* karena penggantian *material model rigid coupling* ini dapat mensubstitusi jenis oli yang lebih ramah lingkungan dan penggunaannya lebih efisien dan sedikit, di sisi proses peralatan lebih efisien karena lebih handal.	Innovation of Synthetic Oil Compressor Coupling includes Component Change and has an impact on product improvement, process improvement and material efficient manufacturing due to the replacement of rigid coupling model material that can substitute a more environmentally friendly type of oil and its use is more efficient and less, in terms of process, equipment is more efficient due to more reliable.
UP Muara Karang Muara Karang GU	Perubahan Metode Pembersihan Pipa *Heat Exchanger* Menggunakan *Specific Tools* untuk Mengurangi Pemakaian Kemasan Bekas B3" Changes in Heat Exchanger Pipe Cleaning Method Using Specific Tools to Reduce the Use of Used B3 Packaging	Metode baru dengan *specific tools* menggunakan plastik yang digunakan untuk pembersihan pipa *heat exchanger* lebih efektif, efisien dan ramah lingkungan, tidak digunakan bahan kimia dalam pembersihan pipa *heat exchanger*, tidak mengakibatkan timbulan kemasan bekas B3.	The new method with specific tools using plastic used for cleaning heat exchanger pipes is more effective, efficient and environmentally friendly, no chemicals are used in cleaning heat exchanger pipes, not resulting in the pile of used B3 packaging.
UP Tanjung Awar-Awar Tanjung Awar-Awar GU	*Green Used Rag for Preventive Maintenance*	Kondisi sebelum adanya program: Desain kain majun berukuran 25x20 cm dan memiliki rata-rata berat 36,50 gram atau 0,0365 kg dengan tiap satu majun tersusun oleh 5 layer/lapis kain, Kemudian Kondisi setelah adanya program: Desain kain majun berukuran 20x15 cm dan memiliki rata-rata berat 16,41 gram atau 0,01641 kg dan tiap satu kain majun berubah menjadi 3 layer/lapis kain. Hasil *improvement* yang dilakukan melalui program inovasi ini adalah berkurangnya jumlah timbulan limbah majun bekas sehingga berkurang pula biaya pengangkutan dan pengadaan majun baru.	Conditions before the program: Design of majun fabric measuring 25x20 cm and has an average weight of 36.50 grams or 0.0365 kg with each one majun composed of 5 layers of fabric, then Condition after the program: Design of majun fabric measuring 20x15 cm and having an average weight of 16.41 grams or 0.01641 kg and each one majun fabric changed to 3 layers/layers of fabric. The result of the improvement made through this innovation program is a reduction in the amount of waste pile of used majun so that the cost of transporting and procuring new majun is also reduced.
UP Cirata Cirata GU	*Reuse* Minyak Pelumas Hasil Filtrasi Reuse of Lubricating Oil from Filtration Results	UP Cirata sebelumnya menggunakan sistem filtrasi *press pump* namun kurang maksimal dalam memisahkan minyak pelumas dengan partikel *contain*, maka perusahaan melakukan penggantian sistem filtrasi yang lebih maksimal dalam proses penyaringan minyak pelumas dengan partikel contain sehingga kualitas minyak pelumas kembali seperti semula dan mengurangi limbah minyak pelumas.	The Cirata GU previously used a press pump filtration system, however it was less than optimal in separating lubricating oil with contain particles, so the Company replaced the filtration system which was more optimal in the process of filtering lubricating oil with contain particles so that the quality of lubricating oil returned to its original state and reduced lubricating oil waste.
UP Gresik Gresik GU	Program Pengurangan Kerak *Boiler* Dengan Pemasangan Staf *Weater Portable* (*Special Tool Blower Heater Portable*) pada HRSG PLTGU Boiler Scale Reduction Program with Installation of Portable Weater Staff (Special Tool Blower Heater Portable) on HRSG CCPP	Inovasi ini memberikan perbaikan lingkungan akibat perubahan sub sistem (*Value Chain Optimization*) dan terdapat dampak positif bagi produsen, konsumen, *supplier* dan lingkungan. Setelah adanya inovasi ini, HRSG yang sedang dalam status RSH dengan durasi cukup lama (>60 hari) akan mendapat perlakuan khusus yaitu dengan menginjeksikan udara panas pada HRSG untuk menurunkan kelembaban udara, sehingga menurunkan potensi terjadinya korosi. Dengan pengaplikasian program ini potensi kerusakan HRSG dapat diminimalisasi dan timbulan limbah kerak *boiler*/HRSG dapat menurun.	This innovation provides environmental improvements due to sub-system changes (Value Chain Optimization) and there are positive impacts on producers, consumers, suppliers and the environment. After this innovation, HRSGs that are in RSH status with a long duration (> 60 days) will receive special treatment by injecting hot air into the HRSG to reduce air humidity, thereby reducing the potential for corrosion. With the application of this program, the potential for HRSG damage can be minimized and the pile of boiler/HRSG scale waste can decrease.

Unit Pembangkit Generation Unit	Inovasi Innovation	Deskripsi Description	
UP Muara Tawar Muara Tawar GU	CANNON (*Condition Based Anion Kation Exchange Polymer Regeneration*)	Inovasi ini merupakan salah satu program yang dilaksanakan pada unit proses *Water Treatment Plant* dan termasuk ke dalam boundary kajian LCA. Inovasi ini menghasilkan dampak positif berupa *Value Chain Optimisation* bagi produsen, konsumen, dan *supplier* karena melalui penerapan program CANNON performa *Water Treatment Plant* sebagai unit proses yang paling penting dalam kegiatan produksi *feed water* untuk pengoperasian pembangkit dapat terjaga sehingga menghindari terjadinya derating maupun gagal *start* pada unit pembangkit.	This innovation is one of the programs implemented in the Water Treatment Plant process unit and is included in the LCA study boundary. This innovation results in a positive impact in the form of Value Chain Optimization for producers, consumers, and suppliers as the implementation of the CANNON program can maintain the performance of the Water Treatment Plant as the most important process unit in the production of feed water for power plant operations so as to avoid derating or failing to start the power plant unit.
UP Paiton 1-2 Paiton 1-2 GU	Pengurangan Limbah Kemasan *Hidrazine* Melalui Penggunaan *All Volatile Treatment Oxydizing* Reduction of Hydrazine Packaging Waste Through the Use of All Volatile Oxydizing Treatment	Program inovasi pengurangan limbah kemasan *hidrazine* melalui penggunaan *all volatile treatment oxydizing*, penggunaan *hidrazin* sebagai *reducing agent* pada air umpan *boiler* berkurang akibat dari pengoptimalan kinerja dari *deaerator* pada saat PLTU beroperasi. *Treatment* ini dapat mempercepat proses pengkondisian air untuk proses produksi, mempercepat produksi listrik PLTU dan mengurangi timbulan limbah kemasan bekas B3 dari pengurangan penggunaan *hydrazine*.	Innovation program to reduce hydrazine packaging waste through the use of all volatile oxydizing treatment, the use of hydrazine as a reducing agent in boiler feed water is reduced due to optimizing the performance of the deaerator when the CFPP operates. This treatment can accelerate the water conditioning process for the production process, accelerate CFPP electricity production and reduce the pile of B3 used packaging waste from reducing the use of hydrazine.
Limbah Non-B3 Terdaftar Registered Non-Hazardous and Toxic Waste			
UP Indramayu Indramayu GU	Pemanfaatan FABA sebagai *Breakwater* di Kawasan Wisata Berbasis Masyarakat Utilization of FABA as Breakwater in Community-Based Tourism Area	Pemasangan – Tetrapod dan Kubus Beton dengan Material FABA sejumlah 155 pcs Pantai Plentong.	Installation - Tetrapods and Concrete Cube with FABA Material of 155 pcs for Plentong Beach.
UP Paiton 9 Paiton 9 GU	Budidaya Anggrek Bulan dengan Memanfaatkan FABA sebagai Media Tanam Moon Orchid Cultivation by Utilizing FABA as Planting Media	Hasil pembuatan pot anggrek dengan memanfaatkan *fly ash* cukup kokoh dengan komposisi semen diganti dengan persentase 60% dan pertumbuhan anggrek bulan juga cukup baik dengan penggantian arang oleh *bottom ash*, karena pada dasarnya FABA mengandung hampir semua unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman.	The results of making orchid pots by utilizing fly ash are quite sturdy with the composition of cement replaced with a percentage of 60% and the growth of moon orchids is also quite good with the replacement of charcoal by bottom ash, since FABA basically contains almost all the nutrients needed by plants.
UP Rembang Rembang GU	Pembangunan Gedung Pondok Pesantren Nurul Musthofa Desa Bonang Construction of Nurul Musthofa Islamic Boarding School Building in Bonang Village	Pembangunan Gedung Pondok Pesantren Nurul Musthofa Desa Bonang menggunakan FABA sebagai bahan dasar pengecoran, plesteran, pasang keramik dan stabilisasi lahan	Construction of the Nurul Musthofa Islamic Boarding School Building in Bonang Village using FABA as a base material for casting, plastering, tiling and land stabilization.
UP Tanjung Awar-Awar Tanjung Awar-Awar GU	Produksi *Paving* FABA PLTU Tanjung Awar-Awar FABA Paving Production of Tanjung Awar-Awar CFPP	Sejak 2021 hingga 2022 PLTU Tanjung Awar-Awar rutin memproduksi *Paving Block* di mana komposisi utama campuran *paving* adalah FABA sebesar 42%.	From 2021 to 2022, Tanjung Awar-Awar CFPP routinely produces Paving Blocks where the main composition of the paving mixture is FABA by 42%.
UP Paiton 1-2 Paiton 1-2 GU	Bedah Rumah Tidak Layak Huni Uninhabitable House Renovation	Kegiatan bedah rumah di sekitar wilayah pembangkit dengan memanfaatkan bahan material FABA untuk pembangunan rumah sehingga dapat meningkatkan akses warga miskin terhadap hunian yang layak.	House renovation activities around the power plant area by utilizing FABA materials for house construction so as to increase the access of poor people to decent housing.

Unit Pembangkit Generation Unit	Inovasi Innovation	Deskripsi Description	
Limbah Non B3 Non-Hazardous and Toxic Waste			
UP Indramayu Indramayu GU	Pemanfaatan Cangkang Kerang menjadi Pupuk Organik Utilization of Clam Shells into Organic Fertilizer	Nilai tambah dari program inovasi ini adalah perubahan perilaku dan keuntungan yang diperoleh yaitu menurunkan timbulan limbah non B3 organik, mengurangi pembelian pupuk non organic eksternal, meningkatkan kualitas unsur hara bagi tanaman dan memperbaiki struktur tanah.	The added value of this innovation program is the change in behavior and the benefits obtained, namely reducing the pile of organic non-B3 waste, reducing the purchase of external non organic fertilizers, increasing the quality of nutrients for plants and improving soil structure.
UP Paiton 9 Paiton 9 GU	Program Pemanfaatan Besi Bekas Elemen Air *Heater* Sebagai Media Transplantasi Terumbu Karang Program on Utilization of Used Iron Water Heater Element as Coral Reef Transplant Media	Implementasi pemanfaatan besi bekas elemen air heater sebagai media transplantasi terumbu karang memberikan keuntungan yaitu mengurangi timbulan limbah padat non B3 besi bekas, hemat biaya, meningkatkan biodiversitas terumbu karang dan ikan karang, tangkapan ikan nelayan semakin meningkat, dan pemberdayaan masyarakat.	The implementation of the utilization of used iron air heater elements as coral reef transplant media provides benefits, namely reducing the pile of non-B3 solid waste of used iron, saving costs, increasing the biodiversity of coral reefs and reef fish, increasing fishermen's fish catches, and community empowerment.
UP Rembang Rembang GU	CAMILAN (CAcahan ruMput probiotik EM4 di area *LANdscape* PLTU Rembang) CAMILAN (The output of EM4 probiotics grass in the LANdscape area of Rembang CFPP)	Pemanfaatan limbah *organic* (rumput) sebagai bahan yang dipakai untuk pakan ternak yang terfermentasi dengan campuran probiotik EM4 yang diproduksi sendiri dari limbah dapur PLTU Rembang sehingga menciptakan pakan ternak fermentasi yang dapat tahan lama sehingga memenuhi untuk pakan ternak sampai musim kemarau.	Utilization of organic waste (grass) as an ingredient used for fermented animal feed with a mixture of self-produced EM4 probiotics from Rembang CFPP kitchen waste so as to create fermented animal feed that can be durable so as to fulfill animal feed until the dry season.
UP Muara Karang Muara Karang GU	Pembersihan Kondensor dengan Perubahan *Recurring Material* untuk Mengganti Pemakaian *Plastic Bullet* Condenser Cleaning with Change in Recurring Material to Replace Plastic Bullet Usage	Penggunaan *wire bullet* yang lebih efektif, efisien dan ramah lingkungan karena dapat digunakan secara berulang kali dengan hasil pembersihan kondensor lebih bersih dibandingkan metode sebelumnya. Dengan material yang digunakan berulang kali menghasilkan penurunan limbah padat non B3, sehingga tidak menimbulkan limbah padat non B3.	The use of a more effective, efficient and environmentally friendly wire bullet as it can be used repeatedly with the results of cleaning the condenser cleaner than the previous method. With materials that are used repeatedly, it results in a decrease in non-B3 solid waste, so that it does not cause non-B3 solid waste.
UP Tanjung Awar-Awar Tanjung Awar-Awar GU	Pemanfaatan Drum dan Pipa Besi *Drain Sootblower* Bekas *Overhaul* sebagai Tempat Pakan Hewan Ternak pada *Integrated Farming System* CSR Desa Utilization of Drums and Iron Pipe Drain Sootblower Used Overhaul as Animal Feed Place in the Integrated Farming System of CSR Village	Program pemanfaatan drum dan pipa drain *sootblower* menjadi tempat pakan hewan ternak ini tergolong perubahan komponen yang mampu menjadi *product sharing* berupa produk yang dihasilkan perusahaan yaitu tempat pakan hewan ternak dapat dimanfaatkan oleh kelompok bernama Kelompok Masyarakat (PokMas) Sekerta	The program to utilize sootblower drums and drain pipes into animal feed containers is classified as a component change that can become product sharing in the form of products produced by the Company, namely animal feed containers that can be utilized by a group called the Sekerta Community Group (PokMas).
UP Cirata Cirata GU	Pemanfaatan limbah pipa logam untuk pembatas *cable ducting* Utilization of metal pipe waste for cable ducting barrier	Program pemanfaatan limbah pipa logam untuk pembatas *cable ducting* berdampak pada perubahan komponen karena masuk kriteria material efisiensi manufaktur dimana terdapat modifikasi dari pemadatan beton menjadi logam dengan memanfaatkan limbah logam Non B3.	The program of utilizing waste metal pipes for cable ducting barriers has an impact on component changes due to the material criteria of manufacturing efficiency where there is a modification from concrete to metal by utilizing Non-B3 metal waste.

Unit Pembangkit Generation Unit	Inovasi Innovation	Deskripsi Description	
UP Gresik Gresik GU	Inovasi *Recleaning* IAF (*Intake Air Filter*) dengan Metode PAC IAF (Intake Air Filter) Recleaning Innovation with PAC Method	Dengan metode PAC ini dapat meningkatkan kembali kinerja IAF sehingga dapat menurunkan timbulan limbah IAF. Sebelum dilakukan inovasi, IAF yang sudah tidak layak pakai akan langsung dibawa ke TPS Limbah Non B3. Setelah inovasi ini diterapkan, perubahan signifikan terjadi pada timbulan IAF yaitu terjadi penurunan dari 586 buah menjadi 352 buah per tahun.	With this PAC method, it can improve the performance of the IAF again so that it can reduce the pile of IAF waste. Before the innovation, IAF that is no longer suitable for use will be taken directly to the Non-B3 Waste Landfill. After this innovation was implemented, significant changes occurred in the pile of IAF, which decreased from 586 pieces to 352 pieces per year.
UP Muara Tawar Muara Tawar GU	PEMANCAR (Pemanfaatan Kayu Meranti Untuk Taman Baca dan Belajar) PEMANCAR (Utilization of Meranti Wood for Reading and Learning Parks)	Inovasi ini berdampak pada perubahan *sub system* (adanya *value chain optimisation*) yaitu memanfaatkan limbah kayu dengan cara mengkreasikan kayu menjadi taman baca.	This innovation has an impact on sub-system changes (value chain optimization), namely utilizing wood waste by transforming wood into a reading park.
UP Paiton 1-2 Paiton 1-2 GU	Pemanfaatan Limbah *Rockwool* sebagai Bahan Peredam Knalpot Utilization of Rockwool Waste as Exhaust Silencer Material	Pemanfaatan limbah *rockwool* sebagai bahan peredam knalpot untuk kendaraan bermotor oleh masyarakat sebagai material utama peredam suara knalpot pada usaha bengkel knalpot yang mereka miliki. Sehingga, program ini bisa bermanfaat untuk mendukung UMKM di sekitar perusahaan.	Utilization of rockwool waste as exhaust silencer material for motor vehicles by the community as the main material for exhaust silencers in their exhaust workshop business. Thus, this program can be useful to support MSMEs around the Company.

Pemantauan Kualitas Lingkungan
Environmental Quality Control

PLN NP melaksanakan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan berupa pengelolaan emisi udara dan emisi gas rumah kaca sebagai upaya untuk memelihara kualitas udara di sekitar area operasional Perusahaan.

PLN NP carries out environmental quality control activities in the form of air emissions and greenhouse gas emissions management as an effort to maintain air quality around the Company's operational areas.

Pengelolaan Emisi Udara
Air Emissions Management

Emisi udara dikelola oleh PLN NP dengan menggunakan alat pengendali seperti *electronic presipitator* (ESP). Alat ini digunakan terutama untuk mengontrol partikulat yang dihasilkan dari pembakaran batubara. Beberapa pembangkit PLN NP pun menggunakan bahan bakar gas yang termasuk bahan bakar ramah lingkungan. PLN NP juga melakukan pengukuran emisi gas buang yang dihasilkan dari kegiatan operasional. Emisi gas buang untuk seluruh PLTU/PLTGU minyak dan gas serta PLTU Batubara baik unit eksisting maupun Unit Bisnis Jasa *Operation & Maintenance* (UBJOM) FTP-1 diukur secara berkala. Hasil pengukuran emisi gas buang tersebut menunjukkan bahwa emisi gas buang berada di bawah ambang batas sebagaimana dirincikan dalam tabel berikut:

Air emissions are managed by PLN NP by using control devices such as electronic precipitators (ESPs). These devices are used primarily to control particulates generated from coal combustion. Several of PLN NP's power plants also use gas fuel, which is an environmentally friendly fuel. PLN NP also measures exhaust emissions resulting from operational activities. Exhaust gas emissions for all oil and gas CFPPs/CCPPs and coal CFPPs, both existing units and the FTP-1 Operation & Maintenance Services Business Unit (OMSBU), are measured regularly. The results of the measurement of exhaust gas emissions show that exhaust gas emissions are below the threshold as detailed in the following table:

Unit Eksisting

Existing Unit

Tabel Emisi Gas Buang PLTU/PLTGU Minyak dan Gas – Unit Eksisting

Table of Exhaust Gas Emissions of Oil and Gas CFPP/CCPP - Existing Unit

Parameter	Satuan Unit	Baku Mutu* Quality Stan-dards*	Gresik (PLTGU) Gresik (CCPP)		Muara Karang (PLTGU) Muara Karanag (CCPP)		Muara Tawar	
			Max	Min	Max	Min	Max	Min
SO_2	mg/Nm³	150	143.4	143.4	21	5	76	3
NO_x	mg/Nm³	400	134.3	134.3	343	85	298	161
Total partikulat Total particulate	mg/Nm³	30	5.26	5.26	10	5	13.5	5.8

Tabel Emisi Gas Buang PLTU Batubara – Unit Eksisting

Table of Exhaust Gas Emissions of Coal CFPP - Existing Unit

Parameter	Satuan Unit	Baku Mutu* Quality Stan-dards*	Paiton		Tenayan	
			Max	Min	Max	Min
SO_2	mg/Nm³	550	43	37	332	271
NO_x	mg/Nm³	550	408	326	147	197
Total partikulat Total particulate	mg/Nm³	100	20	2	58.3	56.6
Merkuri (Hg) Mercury (Hg)	mg/Nm³	0,03	0.01	0.01	0.006	0.006

Semua hasil pemantauan memenuhi batas baku mutu di tiap unit PLTGU maupun unit PLTU
All control results meet the quality standard limits in each CCPP unit and CFPP unit.

Unit FTP-1

Unit FTP-1

Tabel Emisi Gas Buang PLTU Batubara (Per.Men.LH.K No.P15/ 2019)

Table of Exhaust Gas Emissions of Coal CFPP (Regulation of the Minister of Environment and Forestry No.P15/2019)

Parameter	Satuan Unit	Baku Mutu* Quality Stan-dards*	Indramayu		Rembang		Tj. Awar-awar		Paiton 9		Pacitan	
			Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min
SO_2	mg/Nm³	550	517,7	488,09	23	7	324,93	324,93	6	6	14	14
NO_x	mg/Nm³	550	530,9	500,79	217	68	372,76	372,76	266	266	121	121
Total partikulat Total particulate	mg/Nm³	100	95,78	83,55	83	22	77,25	77,25	42,5	42,5	6,87	6,87
Merkuri (Hg) Mercury (Hg)	mg/Nm³	0,03	0,002	0,002	0,011	0,011	0,002	0,002	0,011	0,011	0,011	0,011

PLN NP juga mengukur kualitas udara ambien dan kebisingan untuk unit eksisting dan UBJOM FTP-1. Hasil pengukuran tersebut menunjukkan bahwa kualitas udara *ambient* dan kebisingan unit eksisting dan UBJOM FTP-1 berada di bawah ambang batas. Unit PLN NP melakukan beberapa upaya untuk mengendalikan kebisingan baik terhadap paparan ke pekerja serta sebaran kebisingannya melalui penambahan tanaman sebagai peredam kebisingan kompresor dan penggunaan alat pelindung diri di area kompresor. Rincian hasil pengukuran kualitas udara *ambient* dan kebisingan unit eksisting dan unit FTP-1 ditunjukkan dalam tabel berikut. Udara ambien di sekitar pembangkit menunjukkan hasil memenuhi standar. Ini menunjukkan PLN NP telah berhasil mengelola kualitas udara emisi yang keluar dari cerobong dengan cara menggunakan alat pengendali partikulat ESP serta pengendalian kualitas bahan bakar yang digunakan.

PLN NP also measures ambient air and noise quality for the existing unit and FTP-1 OMSBU. The measurement results show that the ambient air and noise quality of the existing unit and FTP-1 OMSBU are below the threshold. The PLN NP unit made several efforts to control noise both on exposure to workers and noise distribution through the addition of plants as compressor noise absorbers and the use of personal protective equipment in the compressor area. Details of the ambient air and noise quality measurement results of the existing unit and FTP-1 unit are shown in the following table. Ambient air around the power plant shows results that meet the standards. This shows that PLN NP has successfully managed the air emissions quality coming out of the chimney by using ESP particulate control equipment and controlling the quality of the fuel used.

Unit Eksisting

Existing Unit

Tabel Kualitas Udara *Ambient* Dan Kebisingan (SK.Gub. Jawa Timur No. 10 / 2009, SK.Gub. DKI No. 551 / 2001, dan PP. RI. No. 41 / 1999, dan Kep Men LH No.48/11/1996)

Table of Ambient Air and Noise Quality (SK.Gub. East Java No. 10/2009, SK.Gub. DKI No. 551/2001, and PP. RI. No. 41/1999, and Kep Men LH No.48/11/1996)

Parameter	Satuan Unit	Baku Mutu* Quality Stan-dards*	Gresik		Paiton		Muara Karang		Muara Tawar	
			Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min
SO_2	µg/Nm³	365	55.9	8.28	42.0	28.0	36.0	30.0	22.0	22.0
NO_x	g/Nm³	150	6.5	6.5	26.0	16.0	34.0	22.0	5.0	5.0
Debu Dust	ug/Nm³	230	31.9	8.69	146.0	21.0	122.0	67.0	46.6	18.3
Kebisingan Noise	dBA	55-70	52.3	48.8	71.4	47.3	61	54	63.3	54.1

Unit FTP-1

Unit FTP-1

Tabel Kualitas Udara *Ambient* dan Kebisingan (SK.Gub. Jawa Timur No. 10/2009 tentang Baku Mutu *Ambient* dan Emisi Sumber Tidak Bergerak)

Table of Ambient Air and Noise Quality (SK.Gub. East Java No. 10/2009 concerning Ambient and Emissions Quality Standards of Immovable Sources)

Parameter	Satuan Unit	Baku Mutu* Quality Stan-dards*	Pacitan		Paiton		Tj. Awar-Awar	
			Max	Min	Max	Min	Max	Min
SO_2	µg/Nm³	262	39	22,9	26,2	17,2	64,33	15,07
NO_x	g/Nm³	92.5	32,6	6,5	6,5	6,5	29,17	13,79
Debu Dust	ug/Nm³	230	0,047	0,0062	43,2	13,3	0,29	0,15
Kebisingan Noise	dBA	55-85	60,5	45,4	55,4	47,4	68,8	43,5

Tabel Kualitas Udara Ambient dan Kebisingan untuk PLTU Indramayu (Peraturan Pemerintah No. 41/1999 tentang Baku Mutu Kualitas Udara Ambient Nasional)

Table of Ambient Air and Noise Quality for Indramayu CFPP (Government Regulation No. 41/1999 concerning National Ambient Air Quality Standards)

Parameter	Satuan Unit	Baku Mutu* Quality Standards*	Tj. Awar-Awar	
			Max	Min
SO_2	µg/Nm³	365	70,38	14,35
NO_x	g/Nm³	150	75,79	12,02
Debu Dust	ug/Nm³	230	141,85	35,55
Kebisingan Noise	dBA	55-85	61,2	45,2

Tabel Kualitas Udara Ambient dan Kebisingan untuk PLTU Rembang (SK Gub. Jateng No. 08/2001 tentang Baku Mutu Udara Ambien di Provinsi Jawa Tengah

Table of Ambient Air and Noise Quality for Rembang CFPP (SK Gub. Central Java No. 08/2001 concerning Ambient Air Quality Standard in Central Java Province

Parameter	Satuan Unit	Baku Mutu* Quality Standards*	Tj. Awar-Awar	
			Max	Min
SO_2	µg/Nm³	365	74,1	70,1
NO_x	g/Nm³	150	67,1	30,2
Debu Dust	ug/Nm³	230	51,1	24,5
Kebisingan Noise	dBA	55-85	54,3	51

Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca

Greenhouse Gas Emissions Reduction

Perusahaan mendukung upaya pemerintah dalam program mitigasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Hal ini tercermin melalui upaya dan inisiatif PLN NP terkait pengurangan emisi kegiatan operasi dengan melakukan penghematan energi dan merealisasikan program penanaman pohon yang mampu menyerap CO_2 di dalam maupun di luar daerah operasi PLN NP. Sama seperti listrik, ketersediaan BBM sebagai sumber energi tidak terbarukan semakin terbatas. Sebab itu, Perusahaan berupaya menggunakan sumber energi tersebut secara bijaksana, antara lain, dengan berupaya melakukan upaya efisiensi atau penghematan.

The Company supports the government's efforts in the Greenhouse Gas (GHG) emission mitigation program. This is reflected through PLN NP's efforts and initiatives related to reducing emissions from operating activities by saving energy and realizing tree planting programs that can absorb CO_2 inside and outside PLN NP's operating areas. Just like electricity, the availability of fuel as a non-renewable energy source is increasingly limited. Therefore, the Company seeks to use this energy source wisely, among others, by striving to make efficiency or savings efforts.

Program pengurangan emisi melalui *Carbon Offset* atau dikenal juga sebagai pembelian kredit karbon guna mengurangi pencatatan pelepasan emisi dari pembakaran bahan bakar fosil. *Carbon offset* di lingkungan perusahaan pertama kali berhasil dilakukan antara kolaborasi PLTU Paiton dengan PLTA Sipansihaporas dengan besaran 1000 Ton CO_2. Kredit karbon yang diperjualbelikan berasal dari mekanisme sukarela VCS (*Verified Carbon System*) yang diverifikasi oleh pihak internasional Southpole, Inc.

Emission reduction program through Carbon Offset or also known as the purchase of carbon credits to reduce the recording of emission releases from burning fossil fuels. Carbon offset within the company was first successfully carried out between the collaboration of PLTU Paiton and PLTA Sipansihaporas with the amount of 1000 tons of CO2. The carbon credits traded come from a voluntary VCS (Verified Carbon System) mechanism verified by the international party Southpole, Inc.

Perusahaan juga melakukan pengelolaan terhadap emisi bahan perusak ozon (BPO) yang menjadi salah satu sumber perubahan iklim. BPO adalah senyawa kimia yang berpotensi dapat bereaksi dengan molekul ozon di lapisan stratosfer. BPO biasa terdapat di mesin pendingin ruangan (AC), kulkas, dan tabung pemadam api. Penggunaan BPO akan menyebabkan terjadinya penipisan lapisan ozon yang mengakibatkan terjadinya degradasi lingkungan, keterbatasan sumber air bersih, kerusakan rantai makanan di laut, menurunnya hasil produksi pertanian dan sebagainya. Oleh karena dampak buruk akibat pemanfaatan BPO sangat besar, PLN NP mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk memperketat penggunaan BPO. Langkah konkret yang dilakukan Perusahaan adalah menggunakan AC dengan refrigeran (zat pendingin) yang ramah lingkungan. Kebijakan yang sama berlaku untuk penggunaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan), yaitu menggunakan zat pemadam non-Halon. Dengan demikian, Perusahaan ikut andil dalam upaya untuk mencegah penipisan/terjadinya lubang lapisan ozon di atmosfer yang memicu pemanasan global dan potensial menimbulkan masalah bagi bumi dan penduduknya.

The company also manages ozone-depleting substances (BPO) emissions, which are one of the sources of climate change. BPOs are chemical compounds that can potentially react with ozone molecules in the stratosphere. BPOs are commonly found in air conditioners, refrigerators, and fire extinguishers. The use of BPOs will cause depletion of the ozone layer which results in environmental degradation, limited clean water sources, damage to the marine food chain, decreased agricultural production and so on. Because the adverse impact of BPO utilization is very large, PLN NP fully supports government policies to tighten the use of BPOs. A concrete step taken by the Company is to use air conditioners with environmentally friendly refrigerants. The same policy applies to the use of APAR (Light Fire Extinguisher), which uses non-Halon extinguishing agent. Thus, the Company contributes to efforts to prevent the depletion of the ozone layer in the atmosphere which triggers global warming and potentially causes problems for the earth and its inhabitants.

Pemantauan terhadap emisi gas rumah kaca juga dilakukan melalui pengukuran komposisi emisi gas rumah kaca secara berkala sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Monitoring of greenhouse gas emissions is also carried out through periodic measurements of the composition of greenhouse gas emissions as described in the following table:

Tabel Emisi Gas Rumah Kaca PLN NP Tahun 2020-2022
Table of Greenhouse Gas Emissions of PLN NP in 2020-2022

Deskripsi Description	Satuan Unit	2020	2021	2022
Paiton	Ton CO_2	4.813.716,86	5.557.835,77	4.844.042,30
Muara Karang	Ton CO_2	2.316.355,94	3.124.446,92	2.361.826,95
Gresik	Ton CO_2	2.782.831,81	2.640.290,14	2.279.328,84
Muara Tawar	Ton CO_2	1.160.832,33	1.867.910,6	1.238.167,47
Indramayu	Ton CO_2	6.578.152,40	5.839.874,04	6.122.973,88
Rembang	Ton CO_2	4.345.918,38	3.432.679,77	3.649.775,55
Paiton 9	Ton CO_2	4.395.766,63	4.192.336,97	4.183.884,63
Pacitan	Ton CO_2	3.715.890,99	3.247.550,99	3.871.795,85
Tj.Awar-Awar	Ton CO_2	4.571.270,81	4.683.153,76	4.580.375,80
Total	**Ton CO_2**	**34.680.736,15**	**34.586.078,96**	**33.132.171,27**

Unit Eksisting

Existing Unit

Tabel Komposisi Emisi Gas Rumah Kaca
Table of Greenhouse Gas Emissions Composition

Emisi Gas Rumah Kaca Greenhouse Gas Emissions	Paiton (Ton)	Muara Karang (Ton)	Gresik (Ton)	Muara Tawar (Ton)
CO_2	4.819.603,82	2.358.968,26	2.276.740,34	1.236.797,87
CH_4	79,18	54,79	49,6	26,1
N_2O	73,47	5,51	4,99	2,65

Unit FTP-1

Unit FTP-1

Tabel Komposisi Emisi Gas Rumah Kaca
Table of Greenhouse Gas Emissions Composition

Emisi Gas Rumah Kaca Greenhouse Gas Emissions	Indramayu (Ton)	Rembang (Ton)	Tj. Awar-Awar (Ton)	Paiton 9 (Ton)	Pacitan (Ton)
CO_2	4.819.603,82	2.358.968,26	2.358.968,26	2.276.740,34	1.236.797,87
CH_4	79,18	54,79	54,79	49,6	26,1
N_2O	73,47	5,51	5,51	4,99	2,65

Keanekaragaman Hayati
Biodiversity

PLN NP melaksanakan penanaman pohon di seluruh unit pembangkitan sebagai salah satu program *Green and Clean Power Plant*. Program ini merupakan wujud peran PLN NP untuk mengatasi emisi karbondioksida yang berasal dari proses produksi listrik. Penanaman pohon dapat membuat proses produksi listrik lebih aman dan bersih karena karbondioksida dapat terserap. Berikut adalah daftar program penanaman pohon selama tahun 2022

PLN NP carries out tree planting in all generation units as one of the Green and Clean Power Plant programs. This program is a form of PLN NP's role to overcome carbon dioxide emissions from the electricity production process. Tree planting can make the electricity production process safer and cleaner due to the carbon dioxide that can be absorbed. The following is a list of tree planting programs during 2022.

Program Penanaman Pohon Tahun 2022
Tree Planting Program in 2022

Deskripsi Description	2020	2021	2022
UP Indramayu Indramayu GU	1.737	11.096	6.960
UP Paiton 9 Paiton 9 GU	1.000	2.000	4.900
UP Rembang Rembang GU	8.625	345	1.329
UP Muara Karang Muara Karang GU	1.521	0	25.958
UP Tanjung Awar-Awar Tanjung Awar-Awar GU	185	623	4.181
UP Cirata Cirata GU	112.500	1.500	44.250
UP Gresik Gresik GU	9.876	4.303	4.303
UP Muara Tawar Muara Tawar GU	2.500	0	1.853
UP Paiton 1-2 Paiton 1-2 GU	10.400	4.500	16.700
Jumlah Penanaman Pohon Jumlah Penanaman Pohon	**148.344**	**24.367**	**110.434**

Selain menanam pohon mangrove, PLN NP juga Membangun rubuha (rumah burung hantu) sebagai tempat perlindungan burung hantu dan juga membangun penangkaran burung hantu sebanyak 165 buah dengan Jumlah burung hantu sudah mencapai 305 ekor yang menempati rubuha.

In addition to planting mangrove trees, PLN NP also built a rubuha (owl house) as an owl sanctuary and also built owl breeding as many as 165 pieces with the number of owls already reaching 305 owls occupying the owl house.

Menangani Pengaduan Lingkungan
Handling Environmental Complaints

PLN NP menilai bahwa pengaduan adalah bentuk kepedulian masyarakat luas dan pengguna jasa demi kemajuan Perusahaan. Komitmen PLN NP dalam mewujudkan lingkungan sekitar area operasional baik dan sehat telah mendorong upaya pengelolaan perusahaan berbasis lingkungan secara konsisten. PLN NP menyediakan fasilitas pengaduan terkait lingkungan sebagai upaya evaluasi untuk senantiasa menciptakan lingkungan yang lestari. Mekanisme pengaduan korporat dapat disampaikan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya melalui *Whistleblowing System* (WBS) yang bisa diakses pada *website* PLN NP atau melalui kontak Sekretaris Perusahaan PLN NP sebagai berikut:

PLN NP considers that complaints are a form of concern from the wider community and service users for the Company's progress. PLN NP's commitment in creating a good and healthy environment around the operational area has encouraged consistent environment-based company management efforts. PLN NP provides a complaint facility related to the environment as an evaluation effort to always create a sustainable environment. The corporate complaint mechanism can be submitted by the public and other stakeholders through the Whistleblowing System (WBS) which can be accessed on the PLN NP website or through the contact of the Corporate Secretary of PLN NP as follows:

pengaduan@plnnusantarapower.co.id

www.plnnusantarapower.co.id/wbs

1. Lobby Utama PT PLN NP Kantor Pusat
2. Lobby Gedung Administrasi Seluruh Unit PLN NP
1. Main Lobby of PT PLN NP Head Office
2. Administration Building Lobby of All PLN NP Units

Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran
Whistleblower Management Committee

PT PLN Nusantara Power
Jl. Ketintang Baru No. 11
Surabaya, Jawa Timur 60231
Indonesia

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

PT PLN Nusantara Power
Kantor Pusat: Head Office
Jl. Ketintang Baru No. 11
Surabaya, Jawa Timur 60231

Kantor Jakarta
Jakarta Office

18 Office Park Lt. 2 ABCD
Jl. TB Simatupang No. 18
Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Indonesia

031-8283180

031-8283180

info@plnnusantarapower.co.id

Melalui pengelolaan lingkungan yang baik, selama tahun 2022 PLN NP tidak menerima pengaduan terkait lingkungan dari masyarakat sekitar maupun pemangku kepentingan lainnya, sehingga PLN NP tidak mendapatkan denda atau sanksi non moneter atas peristiwa ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait lingkungan.

Through good environmental management, during 2022, PLN NP did not receive any environmental complaints from the surrounding community or other stakeholders, so PLN NP did not receive any fines or non-monetary sanctions for non-compliance events towards environmental-related laws and regulations.

Biaya Kegiatan Pengelolaan Lingkungan

Environmental Management Activity Costs

Anggaran Biaya untuk kegiatan pengelolaan lingkungan PLN NP tahun 2022 baik di unit eksisting dan unit FTP-1 sebesar Rp76,14 miliar naik dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp76,93 miliar

Budget for PLN NP environmental management activities in 2022 both in the existing unit and the FTP-1 unit was Rp76.14 billion, an increase compared to 2021 which was Rp76.93 billion

Tabel Anggaran Kegiatan Pengelolaan Lingkungan PLN NP Tahun 2019-2022 (Rp Ribu)

Table of PLN NP Environmental Management Activities Budget in 2020-2022 (Rp Thousand)

Deskripsi Description	2020	2021	2022
UP Gresik Gresik GU	10.975.225	11.307.166	9.946.976
UP Muara Karang Muara Karang GU	10.329.414	9.736.246	9.253.298
UP Muara Tawar Muara Tawar GU	10.359.523	10.330.775	9.997.727
UP Paiton Paiton GU	14.626.689	16.452.881	15.235.534
UP Cirata Cirata GU	9.735.375	11.163.377	7.617.434
UP Brantas Brantas GU	1.371.500	1.170.200	1.166.705
UBJOM PLTU Indramayu OMSBU Indramayu GU	3.404.000	3.693.160	3.998.226
UBJOM PLTU Rembang OMSBU Rembang GU	3.020.853	3.521.988	4.162.406
UBJOM PLTU Tj. Awar-Awar OMSBU Tj. Awar-Awar GU	3.870.000	3.625.000	3.528.354
UBJOM PLTU Paiton 9 OMSBU Paiton 9 GU	2.501.818	2.961.695	7.777.300
UBJOM PLTU Pacitan OMSBU Pacitan GU	2.969.320	2.968.560	3.459.423
Jumlah Total	**73.163.717**	**76.931.048**	**76.143.383**

PLN NP merealisasikan anggaran tersebut sebesar Rp75,57 miliar untuk kegiatan tanggung jawab sosial terkait lingkungan selama tahun 2022.

PLN NP realized this budget of Rp75.57 billion for social responsibility activities related to the environment during 2022.

Tabel Realisasi Biaya Kegiatan Pengelolaan Lingkungan PLN NP Tahun 2019-2022 (Rp Ribu)

Table of Cost Realization of PLN NP Environmental Management Activities in 2020-2022 (Rp Thousand)

Deskripsi Description	2020	2021	2022
UP Gresik Gresik GU	9.577.523	12.687.007	9.857.136
UP Muara Karang Muara Karang GU	10.364.072	11.940.444	11.136.740
UP Muara Tawar Muara Tawar GU	10.537.302	14.307.751	9.957.669
UP Paiton Paiton GU	14.493.407	17.245.220	16.187.606
UP Cirata Cirata GU	8.620.808	7.559.349	4.914.735
UP Brantas Brantas GU	1.488.061	1.401.410	1.334.040
UBJOM PLTU Indramayu OMSBU Indramayu GU	3.209.004	3.282.689	1.719.506

Deskripsi Description	2020	2021	2022
UBJOM PLTU Rembang OMSBU Rembang GU	2.413.324	2.779.158	1.779.926
UBJOM PLTU Tj. Awar-Awar OMSBU Tj. Awar-Awar GU	3.154.451	3.489.946	4.971.423
UBJOM PLTU Paiton 9 OMSBU Paiton 9 GU	3.228.585	3.129.107	3.028.312
UBJOM PLTU Pacitan OMSBU Pacitan GU	2.917.375	2.968.560	10.665.060
Jumlah Total	**74.785.741**	**80.790.641**	**75.572.153**

Penghargaan dan Sertifikasi Di Bidang Lingkungan yang Dimiliki
Awards and Certifications in the Environmental Sector

PLN NP telah menerapkan sistem manajemen lingkungan secara terpadu dan terintegrasi dengan sistem manajemen yang lain serta terus konsisten melaksanakan upaya-upaya perbaikan berkelanjutan untuk mencapai visi misi PLN NP. Dengan komitmen PLN NP tersebut, PLN NP dan Anak Perusahaan mendapatkan beberapa sertifikasi antara lain ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan, ISO 5001:2011 tentang Sistem Manajemen Energi, dan ISO 55001:2014 tentang Sistem Manajemen Aset. PLN NP juga membekali karyawan dengan beragam sertifikasi terkait lingkungan diantaranya penanggung jawab Pengendalian dan Pencemaran Air (PPPA), penanggung jawab Pengendalian dan Pencemaran Udara (PPPU), operator Pengendalian dan Pencemaran Air (PPA), operator Pengendalian dan Pencemaran Udara (PPU), dan Pengendalian Limbah B3 (PLB3).

PLN NP has implemented the integrated environmental management system and is integrated with other management systems as well as consistently carrying out continuous improvement efforts to achieve PLN NP's vision and mission. With PLN NP's commitment, PLN NP and its subsidiaries received several certifications including ISO 14001:2015 on Environmental Management System, ISO 5001:2011 on Energy Management System, and ISO 55001:2014 on Asset Management System. PLN NP also provides employees with various certifications related to the environment including the person in charge of Water Pollution and Control (PPPA), person in charge of Air Pollution and Control (PPPU), Water Pollution and Control operator (PPA), Air Pollution and Control operator (PPU), and B3 Waste Control (PLB3).

Selama Tahun 2022, PLN NP berhasil mendapatkan penghargaan dibidang lingkungan, yaitu:

During 2022, PLN NP managed to get awards in the environmental sector, namely:

28 April 2022
April, 2022

PJB berhasil mendapatkan penghargaan Transparansi Emisi Korporasi (TEK) 2022 yang diselenggarakan oleh Beritasatu Media Holdings dan Bumi Global Karbon, yaitu:
- Gelar Green Sektor Korporasi Non Emiten (Kategori Transparansi Penurunan Emisi)
- Gelar Silver Sektor Korporasi Non Emiten (Kategori Transparansi Penurunan Emisi)

PJB won the 2022 Corporate Emissions Transparency (TEK) award organized by Beritasatu Media Holdings and Bumi Global Karbon, namely:
- Green title for Non-Issuer Corporate Sector (Emission Reduction Transparency Category)
- Silver title for Non-Issuer Corporate Sector (Emission Reduction Transparency Category)

Penghargaan Transparansi Emisi Korporasi 2022
Penghargaan Transparansi Emisi Korporasi 2022

27 Oktober 2022
October 27, 2022

PLN NP mendapat penghargaan dalam K3L Terbaik 2022 PT PLN (Persero), antara lain:

- **K3L Terbaik 2022 : Kategori PLTU Regional Sumkal**
  » Juara 1, 2 dan 3 K3L Terbaik Pemanfaatan FABA
- **K3L Terbaik 2022 : Kategori PLTU Regional Jamali**
  » Juara 1 dan 3 K3L Terbaik Pemanfaatan FABA
- **K3L Terbaik 2022 : Kategori Pembangkitan PLTU**
  » Juara 1 K3L Terbaik Implementasi 3R Limbah Padat Non B3
- **K3L Terbaik 2022 : Kategori PLTU Regional Sulmapana**
  » Juara 1 K3L Terbaik Pemanfaatan FABA

PLN NP received awards in the Best OHSE 2022 of PT PLN (Persero), among others:

- Best OHSE 2022: Sumkal Regional CFPP Category 1st, 2nd and 3rd place Best OHSE for FABA Utilization
- Best OHSE 2022 : Jamali Regional CFPP Category 1st and 3rd place Best OHSE for FABA Utilization
- Best OHSE 2022 : CFPP Generation Category 1st place Best OHSE Implementation of 3R for Non-B3 Solid Waste
- Best OHSE 2022: Sulmapana Regional CFPP Category 1st place Best OHSE for FABA Utilization

K3L Terbaik 2022 PT PLN (Persero)
Best OHSE 2022 of PT PLN (Persero)

27 Oktober 2022
October 27, 2022

PLN NP mendapat penghargaan dalam *Green Energy Award* PT PLN (Persero), antara lain:

- **Unit Pengembang *Green Energy* CCT & Gas on Grid Jamali**
  » PLTGU Muara Karang
- **Unit Pengembang *Green Energy Cofiring on Grid* Jamali**
  » PLTU Paiton 1-2

PLN NP received awards in the Green Energy Award of PT PLN (Persero), among others:

- Green Energy CCT & Gas on Grid Jamali Development Unit Muara Karang CCPP
- Jamali Green Energy Cofiring on Grid Development Unit Paiton 1-2 CFPP

Green Energy Award of PT PLN (Persero)

29 Desember 2022
December 29, 2022

PLN Nusantara Power (PLN NP) berhasil meraih penghargaan PROPER tahun 2022:

- **Proper Emas (5 unit) : UP Paiton, UP Gresik, UBJOM Paiton, UBJOM Indramayu, dan UBJOM Rembang**
- **Proper Hijau (4 Unit): UP Muara Karang, UP Muara Tawar, UP Cirata, UBJOM Tj Awar-Awar**
- **Proper Biru (12 Unit): UBJOM Nii Tanasa, UBJOM Pacitan, UP Brantas PLTA Wlingi, UP Brantas PLTA Sutami, UBJOM Tenayan, UBJOM Bangka, UBJOM Belitung, UBJOM Tidore, UBJOM Amurang, UBJOM Arun, UBJOM Bolok, dan UBJOM Tembilahan**

PLN Nusantara Power (PLN NP) has won the PROPER award in 2022:

- Gold Proper (5 Units) : Paiton GU, Gresik GU, Paiton OMSBU, Indramayu OMSBU, dan Rembang OMSBU
- Green Proper (4 Units): Muara Karang GU, Muara Tawar GU, Cirata GU, Tj. Awar-Awar OMSBU
- Blue Proper (12 Units): Nii Tanasa OMSBU, Pacitan OMSBU, Brantas GU of Wlingi HPP, Brantas GU of Sutami HPP, Tenayan OMSBU, Bangka OMSBU, Belitung OMSBU, Tidore OMSBU, Amurang OMSBU, Arun OMSBU, Bolok OMSBU, and Tembilahan OMSBU

PLN NP Raih 5 Penghargaan PROPER Emas Tahun 2022
PLN NP Achieves 5 Gold PROPER Awards in 2022

Kinerja Sosial
Social Performance

PLN NP berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawab lingkup sosial yang meliputi pelanggan, karyawan dan masyarakat. Komitmen ini dilakukan oleh PLN NP dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan sebagai langkah konkrit Perusahaan untuk memberikan timbal balik yang positif kepada pelanggan, karyawan dan masyarakat. Dalam program tanggung jawab sosial perusahaan, PLN NP telah melakukan berbagai program kerja yaitu: peningkatan kualitas layanan kepada pelanggan, survey kepuasan pelanggan; Pendidikan, pelatihan dan pengembangan karyawan, pemberian kesejahteraan kepada karyawan, meningkatkan kualitas lingkungan kerja yang sehat; memberikan bantuan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, program kerja sama bidang pendidikan, bantuan biaya pendidikan, membina dan mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Program Kelompok Binaan, melakukan penguatan kapasitas dan penciptaan peluang usaha masyarakat.

PLN NP is committed to fulfilling social responsibility which includes the customers, employees and community. PLN Nusantara Power carries out this commitment in the form of corporate social responsibility as a concrete step by the Company in providing positive feedback to the customers, employees and the community. In the corporate social responsibility program, PLN Nusantara Power has carried out various work programs, namely: improving the quality of service to the customers, customer satisfaction surveys; employee education, training and development, providing welfare to the employees, improving the quality of a healthy work environment; providing assistance and repairing educational facilities and infrastructure, cooperation programs in the field of education, tuition assistance, fostering and developing Micro, Small and Medium Enterprises through Partnership Program, strengthening capacity and creating community business opportunities.

Kinerja Sosial Aspek Ketenagakerjaan
Employment and OHS Commitment and Policy

Komitmen dan Kebijakan Ketenagakerjaan dan K3
Employment and OHS Commitment and Policy

Sumber Daya Manusia merupakan aset utama bagi PLN NP dalam pencapaian indikator kinerja dan keberlanjutan Perusahaan. Karena itu, Perusahaan selalu berupaya untuk memenuhi hak-hak karyawan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Human Resources are the main asset for PLN NP in achieving the Company's performance indicators and sustainability. Therefore, the Company always strives to fulfill employee rights in accordance with the provisions of applicable laws and regulations.

Pelaksanaan inisiatif keberlanjutan aspek ketenagakerjaan diantaranya mengacu pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain aspek ketenagakerjaan, Perusahaan juga memprioritaskan aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bagi karyawan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

The implementation of sustainability initiatives in the employment aspect refers to the Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003 concerning Manpower. In addition to the employment aspect, the Company also prioritizes the Occupational Health and Safety (K3) aspect for employees as stipulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1970 concerning Occupational Safety, Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2009 concerning Electricity, and Government Regulation No. 50 of 2012 concerning the Implementation of Occupational Health and Safety Management System.

Perusahaan berkomitmen untuk menjamin Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi karyawan maupun pihak lain yang beraktivitas di lingkungan PT PLN NP melalui penerapan SMK3 sesuai ISO 45001:2018 dan PP 50 Tahun 2012, dengan target tingkat kecelakaan nihil atau *zero accident*. Komitmen tersebut juga tertuang dalam Kebijakan Sistem Manajemen Terintegrasi PT PLN NP, *Safety Golden Rules*, dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Oleh karena itu, Manajemen PLN NP ikut andil sebagai Tim Perunding dan Tim Perumus dalam penyusunan dan kesepakatan PKB. PKB yang berlaku saat ini yaitu PKB antara PLN NP dengan Serikat Pekerja PJB 2022-2024 Nomor PT PJB 0001.K/021/DIR/2022 dan Nomor SP PJB 003.K/SP-DPP/2022 telah didaftarkan ke Kementerian Ketenagakerjaan dengan Nomor KEP. 4/HI.00.01/00.0000.221123013/B/I/2023 tanggal 25 Januari 2023.

The Company is committed to ensuring Occupational Health and Safety for employees and other parties who are active within PT PLN NP through the implementation of OHSMS in accordance with ISO 45001: 2018 and PP 50 of 2012, with a target of zero accident rate. This commitment is also contained in the Integrated Management System Policy of PT PLN NP, Safety Golden Rules, and Collective Labor Agreement (CLA). Therefore, PLN Nusantara Power Management took part as a Negotiating Team and Formulation Team in the CLA preparation and agreement of the CLA. The current applicable CLA is between PLN NP and the PJB Workers Union 2022-2024 No. PT PJB 0001.K/021/DIR/2022 and SP PJB No. 003.K/SP-DPP/2022 has been registered with the Ministry of Manpower with KEP No. 4/HI.00.01/00.0000.221123013/B/I/2023 dated January 25, 2023.

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Ketenagakerjaan
Employment Social Responsibility Activities

Selama Tahun 2022 PLN NP telah melakukan inisiatif keberlanjutan aspek ketenagakerjaan meliputi sebagai berikut:

During 2022, PLN NP carried out sustainability initiatives in the employment aspect, including:

Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Kompetensi Karyawan

Employees Education, Training, and Competency Development

Dalam komitmennya terhadap inisiatif keberlanjutan terhadap ketenagakerjaan, PLN NP melakukan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan *knowledge, skill,* dan *ability* yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, *performance*, dan sikap mental karyawan PLN NP melalui PJB *Academy*. Program yang dilaksanakan berbeda-beda sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan tiap karyawan. Program PJB *Academy* melibatkan Direktur Utama sebagai Dean dan anggota Direksi sebagai Vice Dean serta Kepala Divisi, General Manager dan Kepala Satuan sebagai learning *steering committee*. Pengelola PJB *Academy* sejumlah 24 karyawan telah memenuhi standar internasional yang dibuktikan dengan sertifikat *Corporate Learning Technologist* untuk mengelola *learning process* dan content berstandar internasional. Selain itu PJB *Academy* juga sudah terstandar ISO 21001:2018 dari *British Standard Institution* (BSI) yang merupakan standar yang diakui secara internasional untuk dapat menyajikan layanan pembelajaran yang bermutu dan efektif bagi penerima layanan Pendidikan.

In its commitment to sustainability initiatives towards employment, PLN NP conducts education and training programs to improve knowledge, skills, and abilities that aim to improve the competence, performance, and mental attitude of PLN NP employees through PJB Academy. The programs implemented are different according to the competencies needed by each employee. PJB Academy program involves President Director as Dean and members of the Board of Directors as Vice Dean as well as Head of Division, General Manager and Head of Unit as learning steering committee. 24 employees managing PJB Academy have met international standards as evidenced by the Corporate Learning Technologist certificate to manage international standard learning processes and content. Furthermore, PJB Academy has also received ISO 21001:2018 standards from the British Standard Institution (BSI), which is an internationally recognized standard for being able to provide quality and effective learning services for education service recipients.

Kegiatan Pendidikan, pelatihan dan pengembangan pegawai yang telah dilaksanakan selama tahun 2022 yaitu:

- Pelatihan Teknik dan Non-Teknik
- Sertifikasi Teknik dan Non-Teknik
- *Workshop* Teknik dan Non-Teknik
- Program Purna
- *Soft Leadership*
- PJB *Class*
- PGD

PLN NP held the following education, training and employee development activities during 2022:

- Technical and Non-Technical Training
- Technical and Non-Technical Certification
- Technical and Non-Technical Workshops
- Full Program
- Soft Leadership
- PJB Class
- PGD

Penghargaan Produktivitas Karyawan

Employee Productivity Award

Dalam rangka memberikan motivasi kinerja kepada karyawan, serta untuk meningkatkan produktivitas karyawan, kinerja, kompetensi, kreativitas serta digital *mindset*, maka PLN NP memberikan penghargaan bagi karyawan yang produktif di lingkungan Perusahaan. Pemberian penghargaan ini diberikan berdasarkan absensi, perilaku disiplin, tingkat produktivitas maupun prestasi yang diraih oleh karyawan. Adapun pemberian yang diberikan oleh PLN NP kepada karyawan yang produktif sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan yaitu dalam bentuk hadiah atau sertifikat.

In order to provide performance motivation to employees, as well as to increase employee productivity, performance, competence, creativity and digital mindset, PLN NP provides awards for productive employees within the Company. This award is provided based on attendance, disciplinary behavior, productivity levels, as well as the employees achievements. PLN NP grants awards to productive employees following the predetermined criteria in the form of gifts or certificates.

Pemberian Kesejahteraan
Welfare Support

Dalam rangka meningkatkan motivasi kinerja agar semakin tertantang untuk berprestasi dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Perusahaan serta untuk menarik calon karyawan potensial, dan mempertahankan karyawan kompeten sekaligus meningkatkan kesejahteraan karyawan, PLN NP menerapkan sistem remunerasi yang setara dan kompetitif dengan industri sejenis. Remunerasi yang diberikan kepada karyawan PLN NP dibagi menjadi 2 yaitu penghargaan ekstrinsik (kompensasi dan manfaat karyawan) dan penghargaan intrinsik (program ataupun fasilitas lainnya) diantaranya:

- Kompensasi Tetap *Pay for Person*
- Kompensasi tidak tetap
  - Kompensasi Jangka Pendek terdiri atas
    a) *Pay for Position*
    b) *Pay for Performance*
    c) Insentif Kinerja/Bonus
    d) THR
    e) Tunjangan Cuti Tahunan
  - Kompensasi Jangka Panjang terdiri atas
    a) Tunjangan Cuti Besar
    b) Penghargaan Kesetiaan Kerja (winduan)
    c) Bantuan Ganti Rugi/Peristiwa Luar Biasa
    d) Jaminan Sosial Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
    e) Penghargaan Pensiun
- Manfaat Karyawan
- Penghargaan Intrinsik

Setiap tahun PLN NP melaksanakan penyesuaian remunerasi. Gaji seluruh karyawan baik wanita maupun laki-laki telah sesuai dengan ketentuan pemberian upah yang ditetapkan Pemerintah. Selain itu, PLN NP juga memberikan insentif atau bonus berdasarkan kinerja karyawan serta tunjangan cuti tahunan maupun cuti besar dan penghargaan kesetiaan kerja (winduan) sebagai bentuk apresiasi sehingga karyawan dapat senantiasa meningkatkan produktivitas dan loyalitasnya. PLN NP juga menyediakan Bantuan Ganti Rugi yaitu bantuan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Karyawan yang mengalami musibah akibat peristiwa luar biasa atau karena kecelakaan kerja.

In order to increase performance motivation in order to be more challenged to excel and make the best contribution to the Company and to attract potential candidates, and retain competent employees while improving employee welfare, PLN NP implements a remuneration system that is equal and competitive with similar industries. Remuneration provided to PLN NP employees is divided into 2, namely extrinsic rewards (compensation and employee benefits) and instrinsic rewards (programs or other facilities) including:

- Fixed Compensation Pay for Person
- Non-fixed Compensation
  - Short-Term Compensation consists of
    a) Pay for Position
    b) Pay for Performance
    c) Performance Incentive/Bonus
    d) Religious Allowance (THR)
    e) Annual Leave Allowance
  - Long-Term Compensation consists of
    a) Mass Leave Allowance
    b) Work Loyalty Award (per 8 years)
    c) Compensation Assistance/Extraordinary Events
    d) Social Security, Work Accident Insurance and Life Insurance
    e) Retirement Award
- Employee Benefits
- Intrinsic Rewards

Annually, PLN NP adjusts the remuneration. Salaries for all employees, both female and male, are in accordance with the wage provisions set by the Government. Moreover, PLN NP also provides incentives or bonuses based on employee performance as well as annual and major leave allowances and work loyalty awards (per 8 years) as a form of appreciation so that employees can always increase their productivity and loyalty. PLN NP also provides Compensation Assistance, which is assistance provided by the Company to Employees who experience disasters due to extraordinary events or due to work accidents.

Program Pensiun
Retirement Program

Karyawan yang mencapai batas usia pensiun yaitu 56 tahun mendapatkan manfaat pensiun dari PLN NP. Beberapa program jaminan sosial dan hari tua yang diterapkan oleh PLN NP antara lain:

- Program Pensiun Manfaat Pasti
  Program ini dikelola oleh pihak Dana Pensiun PLN (Persero) atau DP-PLN dengan pendanaan yang diperoleh DP-PLN berasal dari iuran Peserta sebesar 6% x Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) dan iuran Pemberi Kerja sebesar 18,94% x PhDP. Hal ini diatur dan sesuai dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Selaku Pendiri Dana Pensiun PT PLN (Persero) Nomor Nomor 0159.K/DIR/2022 tanggal 31 Mei 2022.
- Program Iuran Pasti
  Program ini dikelola oleh pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) untuk karyawan dengan iuran Peserta sebesar 6% x *Pay for Person* (P1) serta iuran Pemberi Kerja sebesar 4% x P1.

PLN NP juga mengikutsertakan seluruh karyawan pada program BPJS Ketenagakerjaan berupa program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Jaminan Pensiun (JP) serta turut memberikan pendampingan masa pensiun melalui program Masa Persiapan Pensiun (MPP). Pensiunan dan keluarganya mendapatkan bantuan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 039.K/010/ DIR/2017 tentang Bantuan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Karyawan Yang Telah Berhenti Bekerja (Pensiunan) di PLN NP.

Employees who reach the retirement age limit of 56 years receive pension benefits from PLN NP. Several social security and retirement programs implemented by PLN NP include:

- Defined Benefit Pension Plan
  This program is managed by the PLN Pension Fund (Persero) or DP-PLN with funding obtained by DP-PLN originating from Participant contributions of 6% x Basic Retirement Income (PhDP) and Employer contributions of 18.94% x PhDP. This is regulated and according to PT PLN (Persero)'s Board of Directors Decree as the Founder of the PT PLN (Persero) Pension Fund No. 0159.K/DIR/2022 May 31, 2022.
- Defined Contribution Program
  This program is managed by the Financial Institution Pension Fund (DPLK) for employees with Participant contributions of 6% x Pay for Person (P1) and Employer contributions of 4% x P1.

PLN NP also enrolls all employees in the Employment BPJS program in the form of Old Age Security (JHT) programs, Work Accident Benefits, Death Benefits, Job Loss Benefits and Retirement Benefits (JP) and also provides retirement assistance through the Retirement Preparation Period (MPP) program. Pensioners and their families receive health care assistance following the Board of Directors Decree No. 039.K/010/DIR/2017 concerning Health Care Assistance for the Retired Employees at PLN NP.

Bidang Kesehatan Kerja, Keselamatan Kerja dan Keamanan
Occupational Health, Safety, and Security

Pengembangan penerapan K3 dalam Perusahaan adalah sebuah kewajiban. Hal ini ditujukan untuk meminimalisasi risiko terjadinya kecelakaan di tempat kerja, memberikan hak keselamatan terhadap tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan, dan melahirkan deretan tenaga kerja yang sehat serta produktif.

The development of OHS implementation in the Company is an obligation. This is aimed at minimizing the risk of accidents in the workplace, providing safety rights to workers in conducting work, and creating a healthy and productive workforce.

Selama tahun 2022, PLN NP telah melakukan berbagai program pengembangan SMK3 yaitu sebagai berikut:

During 2022, PLN Nusantara Power has conducted various OHSMS development programs, as follows:

Program Pengembangan Sistem Manajemen K3
OHS Management System Development Program

Peringatan Bulan K3 Tahun 2022 untuk menginternalkan K3 kepada seluruh karyawan PLN Nusantara Power agar ikut peduli aktif memastikan kondisi tempat kerja aman dari Kecelakaan Kerja

The commemoration of the OHS Month in 2022 to internalize OHS to all PLN Nusantara Power employees to actively care in ensuring workplace conditions are safe from Work Accidents.

Monitoring dan evaluasi Implementasi SMK3 melalui program Rapat P2K3, Sertifikasi SMK3, *assessment* kontrak kinerja manajemen K3, Penyempurnaan *stream Working Permit Online* untuk memastikan bahwa aspek K3 diterapkan secara konsisten di lingkungan PT PLN NP

Monitoring and evaluation of OHSMS Implementation through P2K3 Meeting program, OHSMS Certification, Assessment on OHS management performance contract, Refinement of Online Working Permit stream to ensure that OHS aspects are consistently applied within PT PLN NP.

Peringatan Bulan K3 Tahun 2022 untuk menginternalkan K3 kepada seluruh karyawan PLN Nusantara Power agar ikut peduli aktif memastikan kondisi tempat kerja aman dari Kecelakaan Kerja

Implementation of Integrated Genba with Other divisions in the Directorate of Operations to evaluate the consistency of SOP implementation and OHS policies.

Penguatan Tim *Fire Rescue* PT PLN NP melalui Refreshment Training bersama BASARNAS, Pelatihan dan sertifikasi K3 sesuai kalender akademik PJB Academy mengacu matrik pelatihan dan sertifikasi K3 PLN NP

Strengthening PT PLN NP's Fire Rescue Team through Refreshment Training with BASARNAS, OHS training and certification according to academic calendar at PJB Academy refers to OHS training and certification matrix at PLN NP.

Standardisasi Pedoman Tanggap Darurat Kebakaran PLTU Batubara

Standardization of Coal CFPP Fire Emergency Response Guidelines

Implementasi *Contractor Safety Management System* (CSMS) PT PLN Nusantara Power

Implementation of Contractor Safety Management System (CSMS) at PT PLN Nusantara Power

Digitalisasi proses bisnis K3 untuk mengoptimalkan fungsi *monitoring* dan evaluasi K3, melalui Implementasi IZAT 2.0, WPO Plus, CSMS, *Cubetecs*

OHS business processes digitization to optimize OHS monitoring and evaluation functions, through the Implementation of IZAT 2.0, WPO Plus, CSMS, Cubetecs

Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Kerja Kontraktor
Implementation of the Contractor Work Safety Management System

PLN NP mendorong penerapan K3 tidak hanya bagi karyawan, tetapi juga rekanan/mitra kerja yang bekerja di lingkungan Perusahaan. Sistem manajemen keselamatan kerja kontraktor atau *Contractor Safety Management System* (CSMS) diterapkan oleh PLN NP secara ketat bagi para rekanan/mitra kerja untuk menjamin aspek K3 dalam pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Perusahaan. Rekanan/mitra kerja yang mengikuti lelang pekerjaan di lingkungan PLN NP atau Anak Perusahaan wajib melakukan pendaftaran dan prakualifikasi CSMS secara *online*. Implementasi CSMS secara *full cycle* dapat diakses di https://csms.plnnusantarapower.co.id/. Penerapan CSMS menjadi salah satu wujud sinergi antara PLN NP dengan *stakeholder* dalam mewujudkan budaya K3 secara menyeluruh agar nihil kecelakaan pada rekanan juga dapat tercapai.

PLN NP encourages the implementation of OHS not only for employees, but also partners who work within the Company. The Contractor Safety Management System (CSMS) is strictly implemented by PLN NP for partners to ensure OHS aspects in the implementation of work within the Company. Associates/partners who take part in job auctions within PLN NP or its subsidiaries are required to register and prequalify for CSMS online. Full cycle CSMS implementation can be accessed at https://csms.plnnusantarapower.co.id/. CSMS implementation is manifestation of synergy between PLN NP and the stakeholders in realizing a comprehensive OHS culture so that zero accidents to partners can also be achieved.

Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja
Gender Equality and Job Opportunities

PLN NP berupaya menerapkan prinsip kesetaraan dan anti diskriminasi yakni dengan melakukan pengelolaan karyawan tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, pendidikan, dan latar belakang. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang khususnya karyawan PLN NP terkait rekrutmen, program pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, pengembangan karir, sampai dengan pemberian remunerasi dan kesejahteraan kepada karyawan tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, agama, dan faktor keberagaman lainnya.

Selama tahun 2022, tidak terdapat laporan mengenai insiden diskriminasi terkait ras, warna kulit, gender, agama, opini politik, asal usul sosial dan segala bentuk diskriminasi lainnya yang melibatkan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal yang terkait Perusahaan.

PLN NP strives to apply the principles of equality and anti-discrimination by managing employees without discriminating against gender, education, and background. The Company provides equal opportunities for everyone, especially PLN NP employees related to recruitment, competency development programs, performance assessment, career development, to the provision of remuneration and welfare to employees regardless of differences in gender, religion, and other diversity factors.

During 2022, there were no reported incidents of discrimination related to race, color, gender, religion, political opinion, social origin and any other form of discrimination involving internal and external stakeholders related to the Company.

Digitalisasi Proses Bisnis K3
Digitization of OHS Business Process

Pada Tahun 2022 PLN NP melakukan digitalisasi proses bisnis K3 untuk mengoptimalkan fungsi *monitoring* dan evaluasi K3 melalui program:

- Migrasi data IZAT untuk UMRO pasca Restrukturisasi Organisasi
- Monetisasi IZAT 2.0 untuk rencana di komersialkan ke eksternal PLN NP

In 2022, PLN NP digitized the OHS business process to optimize the OHS monitoring and evaluation function through the following program:

- IZAT data Migration for UMRO after Organizational Restructuring
- IZAT 2.0 Monetization for plans to be commercialized externally to PLN NP

Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan
Grievance Mechanism for Employment Issues

Tentunya, pengaduan ataupun masukan terkait ketenagakerjaan dari masyarakat luas dan pelanggan dapat membantu PLN NP dalam mengembangkan kapasitas SDM. Oleh karena itu, PLN NP telah menyediakan saluran pengaduan terkait masalah ketenagakerjaan. Mekanisme pengaduan bagi karyawan yang diterapkan di lingkungan PLN NP sebagai berikut:

Complaints or input related to employment from the wider community and customers certainly can help PLN NP in developing HR capacity. Therefore, PLN NP has provided a complaint channel related to employment issues. The complaint mechanism for employees applied within PLN NP is as follows:

Tata Cara Tingkatan Penyelesaian Keluhan dan Pengaduan

Procedure for Levels of Complaint and Grievance Settlement

Keluhan dan Pengaduan Karyawan dibicarakan dan diselesaikan dengan Atasannya Langsung Employee Complaints and Grievances are discussed and resolved with their Direct Supervisor	Bila penyelesaian tingkat pertama belum mencapai hasil yang memuaskan, maka dengan sepengetahuan Atasannya langsung, Karyawan dapat meneruskan keluhan dan pengaduannya kepada Atasannya yang lebih tinggi. If the first level settlement has not achieved satisfactory results, then with the knowledge of his/her Direct Supervisor, the Employee may forward his/her complaints and grievances to his/her higher Supervisor.	Bila penyelesaian tingkat kedua tersebut telah dijalankan tanpa hasil yang memuaskan, maka Pekerja dapat meneruskan keluhan dan pengaduannya kepada Serikat Pekerja. Dalam tingkatan ini keluhan dan pengaduan Pekerja tersebut akan diselesaikan antara Pengusaha dan Serikat Pekerja dalam Lembaga Bipartit. If the second level settlement has been carried out without satisfactory results, then the Worker may forward his/her complaints and grievances to the Trade Union. At this level, the Worker's complaints and grievances will be resolved between the Employer and the Trade Union in a Bipartite Institution.	Untuk memudahkan pelaksanaan dari ketentuan dalam pasal ini maka dibuat Berita Acara Penyelesaian Keluhan dan Pengaduan Karyawan. To facilitate the implementation from the provisions in this article, the Minutes of Employee Complaint and Grievance Settlement is made.

Selama tahun 2022 PLN NP tidak menerima pengaduan dari karyawan mengenai masalah ketenagakerjaan. Kondisi ini mencerminkan kepuasan karyawan terhadap penerapan pengelolaan SDM di PLN NP.

PLN NP received no complaints from employees regarding employment issues in 2022. This condition reflects the employee satisfaction with the implementation of HR management at PLN NP.

Tingkat Keterikatan dan Kepuasan Karyawan

Employee Engagement and Satisfaction Index

Aspek yang berperan penting dalam pencapaian kinerja karyawan diantaranya keterikatan dan kepuasan karyawan. PLN NP melaksanakan *survey* kepuasan karyawan setiap tahun sebagai salah satu media untuk menilai efektivitas program pengelolaan SDM dari sudut pandang karyawan. Aspek-aspek yang mempengaruhi keterikatan dan kepuasan karyawan PLN NP yang diukur dalam survei tersebut diantaranya:

1) *Company Policy*
2) *Work Conditions*
3) *Overall Organization Culture*
4) *Brand reputation*
5) *Leadership & Supervision*
6) *Career Management*
7) *Compensation & Benefits*
8) *Teamwork & Relationship*
9) *Opportunities for Training & Development*
10) *Performance Management*
11) *Recognition*
12) *Meaningful Work*
13) *Diversity & Inclusion*

Aspects that play an important role in achieving employee performance include employee engagement and satisfaction. PLN NP carries out an employee satisfaction survey every year as one of the media to assess the effectiveness of HR management programs from the employee's point of view. Aspects that affect PLN NP's employee engagement and satisfaction measured in the survey include:

1) Company Policy
2) Work Conditions
3) Overall Organization Culture
4) Brand reputation
5) Leadership & Supervision
6) Career Management
7) Compensation & Benefits
8) Teamwork & Relationship
9) Opportunities for Training & Development
10) Performance Management
11) Recognition
12) Meaningful Work
13) Diversity & Inclusion

Hasil *survey* kepuasan karyawan tahun 2022 yaitu *Engagement Index* sebesar 84,48% dan *satisfaction Index* sebesar 81,10%

The results of the 2022 employee satisfaction survey are the Engagement Index of 84.48% and the satisfaction Index of 81.10%.

Penghargaan dan Sertifikasi di Aspek Ketenagakerjaan

Awards and Certifications in the Employment Aspects

Penghargaan dan sertifikasi yang telah diraih oleh PLN NP terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja selama tahun 2022 adalah:

PLN NP won awards and certifications regarding Employment, Occupational Health and Safety during 2022, including:

12 Januari 2022

January 12, 2022

4 Penghargaan Program P2 COVID-19

Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 di Tempat Kerja dari Gubernur Jatim untuk:

- UP Brantas (*Platinum*)
- UBJOM Paiton 9 (*Platinum*)
- UBJOM Pacitan (*Gold*)
- UBJOM Tanjung Awar-Awar (*Gold*)

4 COVID-19 P2 Program Award

COVID-19 Prevention and Countermeasure Program Award in the Workplace from the Governor of East Java for:

- Brantas GU (Platinum)
- Paiton 9 OMSBU (Platinum)
- Pacitan OMSBU (Gold)
- Tanjung Awar-Awar OMSBU (Gold)

12 Januari 2022
January 12, 2022

5 Penghargaan Program K3 – *Zero Accident*

Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) *Zero Accident*:

1. UP Gresik sebanyak 21.287.987 jam kerja tanpa kecelakaan kerja sejak 1 November 2014 - 31 Oktober 2021.
2. UP Paiton sebanyak 19.713.963 Jam Kerja Orang tanpa kecelakaan kerja sejak tanggal 22 November 2012 s/d 31 Oktober 2021.
3. UP Paiton 9 sebanyak 14.270.854 Jam Kerja Orang tanpa kecelakaan kerja sejak tanggal 31 Oktober 2014 s/d 31 Oktober 2021.
4. UBJOM Pacitan sebanyak 10.108.291 Jam Kerja Orang tanpa kecelakaan kerja sejak tanggal 1 November 2017 s/d 31 Oktober 2021.
5. UBJOM Tanjung Awar-awar sebanyak 8.122.517 Jam kerja orang tanpa kecelakaan kerja sejak tanggal 1 Juni 2019 s/d 31 Oktober 2021.

5 OHS Program Awards - Zero Accident

Zero Accident Occupational Safety and Health (OHS) Award:

1. Gresik GU for 21,287,987 working hours without work accident from November 1, 2014 - October 31, 2021.
2. Paiton GU for 19,713,963 man-hours without work accident from November 22, 2012 to October 31, 2021.
3. Paiton 9 GU for 14,270,854 man-hours without work accidents from October 31, 2014 to October 31, 2021.
4. Pacitan OMSBU for 10,108,291 man-hours without work accidents from November 1, 2017 to October 31, 2021.
5. Tanjung Awar2 OMSBU for 8,122,517 man-hours without work accidents from June 1, 2019 to October 31, 2021.

13 Mei 2022
May 13, 2022

5 Penghargaan P2 COVID (Kemenaker)
Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 di Tempat Kerja:
- UBJOM Indramayu (*Platinum*)
- UBJOM Paiton 9 (*Platinum*)
- UBJOM Kaltim Teluk (*Platinum*)
- UP Muara Karang (*Gold*)
- UBJOM Pacitan (*Gold*)

5 P2 COVID Awards (Ministry of Manpower)
COVID-19 Prevention and Countermeasure Program Awards in the Workplace:
- Indramayu OMSBU (Platinum)
- Paiton 9 OMSBU (Platinum)
- Kaltim Teluk OMSBU (Platinum)
- Muara Karang GU (Gold)
- Pacitan OMSBU (Gold)

20 Oktober 2022
October 20, 2022

Indonesia *Safety Excellence Awards* (ISEA) 2022
Penghargaan dalam ajang Indonesia *Safety Excellence Awards* (ISEA) 2022 yang diselenggarakan oleh First Indonesia Magazine yaitu sebagai:
- 4 star - *The Best Safety in Digital.*
- 4 star - *The Best Safety Innovation Award.*
- *The Best Health & Safety Leadership of The Year* – Idrus Pamungkas.

Indonesia Safety Excellence Awards (ISEA) 2022
Awards in the Indonesia Safety Excellence Awards (ISEA) 2022 organized by First Indonesia Magazine are as follows:

- 4 star - The Best Safety in Digital.
- 4 star - The Best Safety Innovation Award.
- The Best Health & Safety Leadership of The Year – Idrus Pamungkas.

5 Desember 2022
December 5, 2022

2 Gelar Ajang *Culture Festival* PLN Group 2022
Meraih 2 gelar di ajang *Culture Festival* PLN Group 2022 yaitu juara 1 Unit *Benchmark* Implementasi Budaya 2022 Kategori Anak Perusahaan/*Subholding* dan Juara 1 *Video Competition* pada kategori *A Day in My Life Competition* (Brisky Musyahidah).

2 PLN Group Culture Festival 2022 Titles
Won 2 titles at the PLN Group 2022 Culture Festival event, namely 1st place in the 2022 Culture Implementation Benchmark Unit in the Subsidiary / Subholding Category and 1st place in the Video Competition in the A Day in My Life Competition category (Brisky Musyahidah).

Biaya yang Dikeluarkan terkait Kegiatan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Costs Incurred related to Employment, Occupational Health and Safety (OHS) Activities

Biaya yang dianggarkan oleh Perusahaan untuk kegiatan yang terkait dengan tanggung jawab terhadap Ketenagakerjaan tahun 2022 adalah sebesar Rp. Rp 1,62 Triliun, dengan realisasi sebesar Rp 1,48 triliun (91,26%) menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp. 1.790 Miliar. Biaya yang dikeluarkan meliputi gaji dan tunjangan; bonus dan insentif karyawan; imbalan kerja; pendidikan dan pelatihan; tunjangan kesehatan; serta biaya kepegawaian lainnya.

The Company set budget for activities related to responsibility for Employment in 2022 of Rp1.62 trillion, with a realization of Rp1.48 trillion (91.26%), a decrease compared to 2021 which was Rp1,790 Billion. Expenses incurred include salaries and benefits; employee bonuses and incentives; employee benefits; education and training; health benefits; as well as other personnel costs.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan
Corporate Social Responsibility Related to Social and Community Development

Komitmen dan Kebijakan
Commitment and Policies

PLN NP terus berkomitmen dalam mendukung pembangunan masyarakat berkelanjutan. Partisipasi dan kepercayaan masyarakat luas tentunya telah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan serta perjalanan usaha Perusahaan. Karena itu, PLN NP melakukan upaya dengan berbagai program tanggung jawab sosial agar memberikan timbal balik yang positif bagi pembangunan masyarakat.

PLN NP keeps its commitment in supporting sustainable community development. Participation and trust from the wider community certainly bring positive contribution to the business growth and journey of the Company. Therefore, PLN NP makes efforts with various social responsibility programs in order to provide positive reciprocity for community development.

Komitmen penerapan program tanggung jawab sosial pengembangan masyarakat didukung dengan penyusunan kebijakan dan perencanaan yang matang. PLN NP menetapkan panduan penerapan program ini berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 065.K/010/CIR/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial yang mengacu pada sejumlah peraturan yang berlaku antara lain Undang-undang No. 40 tentang Perseroan Terbatas yang tercantum pada pasal 74 terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Peraturan Pemerintah no. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Commitment to implementing community development social responsibility program is supported by the preparation of policies and careful planning. PLN NP sets guidelines for this program implementation based on the Board of Directors Decree No. 065.K/010/CIR/2013 on Guidelines for the Implementation of Social Responsibility which refers to a set of applicable regulations including Law No. 40 on Limited Liability Companies listed in article 74 related to Social and Environmental Responsibility and Government Regulation No. 47 of 2012 on Corporate Social and Environmental Responsibility.

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Kemasyarakatan
Social Responsibility Activities

Pelaksanaan program tanggung jawab sosial terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan dilaksanakan pada 18 unit kerja yang meliputi Kantor Pusat, Muara Tawar, Muara Karang, UP Cirata, UP Gresik, Paiton, UP brantas, UBJOM Rembang, UBJOM Indramayu, UBJOM Pacitan, UBJOM Tanjung Awar-awar, UBJOM Palton 9, UBJOM Arun, UBJOM Kaltim Teluk, UBJOM Pulang Pisau, UBJOM tenayan, UJLI, dan Suppa. Program tanggung jawab sosial terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan diterapkan sesuai tipologi yang ditetapkan yaitu *Empowerment, Capacity Building*, Infrastruktur, *Charity* dan Kejadian Luar Biasa (KLBS).

PLN NP implements the social responsibility programs for social and community development in 18 work units which include Head Office, Muara Tawar, Muara Karang, Cirata GU, Gresik GU, Paiton, Brantas GU, Rembang OMSBU, Indramayu OMSBU, Pacitan OMSBU, Tanjung Awarawar OMSBU, Paiton 9 OMSBU, Arun OMSBU, Kaltim Teluk OMSBU, Pulang Pisau OMSBU, Tenayan OMSBU, UJLI, and Suppa. Corporate social responsibility programs on social and community development are implemented based on the established typology, namely Empowerment, Capacity Building, Infrastructure, Charity, and Extraordinary Events.

Program Pijar Berdaya
Pijar Berdaya Program

Program Pijar berdaya merupakan program pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari beberapa sub program serta berfokus pada lingkungan dan kesehatan ibu dan anak. Program ini dilaksanakan di tiga yaitu Desa Kramatinggil, Desa Sidorukun dan Desa Pulopancikan dengan tujuan untuk memberikan kontribusi nyata pada lingkungan yang lebih berkualitas yang terlebih mampu memberikan manfaat ekonomi masyarakat dari lingkungan sekitar. Selain itu tujuan program Pijar Berdaya yang berslogan "Pijarkan Kebaikan untuk Semua" yaitu untuk kebaikan kesehatan Ibu dan anak. Adapun beberapa pelaksanaan sub program dalam program Pijar Berdaya adalah :

a) Bank Sampah
   Program Pijar Berdaya di ring I ini dilaksanakan menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu diperuntukan untuk Desa Kramatinggil yang telah difokuskan pada pembentukan "C*ommunity Center*" dan dua desa lainnya yaitu Desa Pulopancikan dan Desa Sidorukun untuk pembentukan "Wilayah Perintis". *Community Center* adalah Program

Pijar Berdaya Program is a community empowerment program that covers several sub-programs and focuses on the environment and the health of women and children. This program is implemented in three villages: Kramatinggil Village, Sidorukun Village, and Pulopancikan Village, intended to create a real contribution to a higher quality environment that potentially provides economic benefits to the community from the surrounding environment. Furthermore, the goal of the Pijar Berdaya Program with the slogan "Spread Goodness for All (Pijarkan Kebaikan Untuk Semua)" is for the good of the health of women and children. Several subprograms implementation in Pijar Berdaya Program is as follows:

a) Waste Bank
   Pijar Budaya Program in the ring was carried out in two parts. The first part is intended for Kramatinggil Village which has focused on the establishment of a "Community Center" and two other villages, namely Pulopancikan Village and Sidorukun Village for the establishment of a Pioneer Area (Wilayah Perintis). Community Center is a potential development program in the

pengembangan potensi yang ada di wilayah kampung hijau produktif yang telah memiliki kemampuan aplikasi program terdahulu secara lebih menyeluruh di berbagai bidang/pilar. Terdapat tiga pilar utama untuk penguatan *Community Center* yaitu Pilar Lingkungan, Pilar Nutrisi, Pilar Sanitasi. Total bank sampah yang ada di tiga desa adalah 40 bank sampah dengan 303 kader lingkungan. Program Bank Sampah juga telah direplikasikan ke Kelurahan Ketintang. Sudah dilakukan usaha dalam pengembangan unit usaha bank sampah, bekerjasama dengan BNI menjadikan unit usaha bank sampah sebagai payment point agen 46. Sudah ada 2 unit usaha yang berpartisipasi menjadi agen 46 yaitu bank sampah Bilkarnis dan bank sampah RT 07 RW 01 Desa Sidorukun.

Tujuan dari program ini adalah :

- Menciptakan lingkungan hidup yang hijau dan bersih dari program Pijar Berdaya di Desa Kramattinggil, Desa Sidorukun, dan Desa Pulopancikan.
- Timbul kesadaran Masyarakat dalam memilah sampah.
- Masyarakat mampu memanfaatkan sampah menjadi prakarya yang bernilai ekonomi
- Mengembangkan unit usaha untuk bank sampah.
- Digitalisasi Bank Sampah.
- Bisa Melakukan Diseminasi ke Desa lain

b) Bank Tanaman

Setelah program bank sampah dinilai berhasil dan bisa diterapkan di desa-desa *Ring* I lainnya (desa perintis), PT PJB UP Gresik kembali membuat program untuk membantu meminimalisir permasalahan yang ada, diantaranya adalah sosial, pengembangan, dan lingkungan sehat, dengan membuat program debayur (desa banyak sayur). Program ini juga dilaksanakan di Desa Kramatinggil, perusahaan membagikan beberapa jenis bibit tanaman untuk penghijauan. Adapun jenis bibit tanaman yang diberikan yaitu, jeruk, mangga, sirsak, jambu, markisa, belimbing, buah tin, buah zaitun, rosela, dan tanaman obat keluarga (TOGA). Tanaman tersebut dibagikan ke setiap RT dan diharapkan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis. Pada program penghijauan ini diharapkan setiap RT memiliki tanaman unggulan, untuk mencapai hal tersebut perusahaan memberikan tanaman khusus ke 3 RT sebagai RT percontohan yaitu, RT01, RT02, dan RT07. Dengan adanya RT percontohan ini diharapkan memotivasi RT lainnya untuk melakukan penghijauan. Program Bank sampah dan debayur terintegrasi dengan kampung hijau produktif yang merupakan integrasi program di Desa Kramatingil, yang kemudian PT PJB UP Gresik melakukan ekspansi program kampung hijau produktif menjadi Pijar Berdaya.

productive green village area that already can apply to previous programs more thoroughly in various fields/pillars. There are three main pillars for strengthening the Community Center, namely the Environmental Pillar, the Nutrition Pillar, and the Sanitation Pillar. Total waste banks in the three villages are 40 waste banks with 303 environmental cadres. The Waste Bank Program has also been replicated in Ketintang Village. Efforts have been made in developing the waste bank business unit, in collaboration with BNI to make the waste bank business unit a payment point agent 46. There are already 2 business units that have participated in joining agent-46, namely the Bilkarnis Waste Bank and RT-07-RW-01 Sidorukun Village Waste Bank.

This program is purposed to the following:

- To create a green and clean living environment from the Pijar Berdaya program in Kramattinggil Village, Sidorukun Village, and Pulopancikan Village.
- To raise public awareness in sorting waste.
- To assist the community to reuse waste into crafts that have economic value
- To develop a business unit for a waste bank.
- To digitize the Waste Banks.
- To conduct Dissemination to Other Villages

b) Plant Bank

After the success of the waste bank program which has been implemented in other Ring I villages (pioneer villages), PLN NP's Gresik GU created a program to help minimize the existing issues, including social, development, and a healthy environment, by making a debayur (village with lots of vegetables) program. This program is also implemented in Kramatinggil Village. The Company distributes several types of plant seeds for reforestation. The types of plant seeds given were citrus, mango, soursop, guava, passion fruit, star fruit, figs, olives, roselle, and family medicinal plants (TOGA). The plants are distributed to each Neighborhood Association (RT) and are expected to be processed into products with economic value. In this reforestation program, it is expected that each RT has superior plants; to achieve this, the Company provides special plants to 3 Neighborhood Associations: RT01, RT02, and RT07. These are expected to be able to motivate other Neighborhood Associations to do reforestation. The Waste Bank and Debayur program is integrated with the productive green village which is an integration program in Kramatingil Village, which then PL NP's Gresik GU expands Kampung Hijau Produktif program into Pijar Berdaya.

Tujuan dari program ini adalah :

- Menciptakan lingkungan hidup yang hijau dan bersih dari program Pijar Berdaya di Desa Kramattinggil, Desa Sidorukun, dan Desa Pulopancikan.
- Masyarakat mampu memanfaatkan hasil tanaman yang ada untuk memenuhi kebutuhan dari hasil tanaman.
- Terciptanya pasar produksi terkait pemasaran hasil olahan produk panen Bank Tanaman yang memberikan dampak ekonomi dari program Pijar Berdaya di Desa Kramattinggil, Desa Sidorukun, dan Desa Pulopancikan.
- Menjadi Pusat Rumah pembibitan bagi segala jenis tanaman yang ada di Desa Kramattinggil, Desa Sidorukun, dan Desa Pulopancikan.
- Menciptakan *organic market center* sebagai wadah untuk memasarkan produk bank tanaman.
- Mengadakan kegiaan *cooking class* sebagai inovasi dalam mengelola produk unggulan yang dihasilkan.
- Digitalisasi Bank Tanaman.
- Penyelenggaraan event bank tanaman seru "batru".
- Bank tanaman membantu café jamu dalam penyediaan jamuku untuk negatifmu.
- Produk Bank Tanaman dijadikan sebagai minuman penambah imun setelah kegiatan vaksinasi.

c) Polihatra dan Café Jamu

Program Polihatra dan Cafe Jamu merupakan inovasi program dengan membuka poli kesehatan tradisional (Poli Hatra). Polihatra dapat menjadi alternatif pada saat pandemi untuk Masyarakat yang takut berobat ke rumah sakit atau dokter. Pada saat pelaksanaan vaksinasi covid-19 banyak Masyarakat yang gagal vaksinasi akibat tidak lolos *screening*, dikarenakan masalah kesehatan baik darah rendah atau darah tinggi. Berdasarkan latar belakang tersebut maka pada saat pelaksanaan vaksinasi covid-19 di PT PJB UP Gresik, didirikanlah posko kesehatan polihatra. Di posko kesehatan polihatra peserta vaksinasi yang tidak lolos assessment kesehatan diterapi dan diberikan jamu herbal, yang dapat membantu menaikan atau menurunkan tensi peserta, sehingga peserta dapat lolos *screening* dan dapat mendapatkan vaksinasi covid-19. Tujuan program ini adalah membantu meningkatkan angka keberhasilan vaksinasi di kecamatan Gresik.

This program is purposed to the following:

- To create a green and the clean living environment from Pijar Berdaya program in Kramattinggil Village, Sidorukun Village, and Pulopancikan Village.
- To assist the community to take advantage of existing plant products to meet the needs of crop products.
- To create a production market related to the marketing of processed products harvested by the Plant Bank has an economic impact on Pijar Berdaya program in Kramattinggil Village, Sidorukun Village, and Pulopancikan Village.
- To become a center for nursery houses for all types of plants in Kramattinggil Village, Sidorukun Village, and Pulopancikan Village.
- To create an organic market center as a place to market plant bank products.
- Holding cooking class activities as an innovation in managing the superior products produced.
- To digitize the Plant Banks.
- To organize a "new" exciting plant bank event.
- To allow the plant bank in assisting the herbal medicine cafe in providing herbal medicine for your negativity.
- For Plant Bank products to be used as immune-boosting drinks after vaccination activities.

c) Polihatra and Café Jamu

The Polihatra and Cafe Jamu programs are program innovations by opening a traditional health poly (Poli Hatra). Polihatra can be an alternative during a pandemic for people who are afraid to go to a hospital or doctor. During the Covid-19 vaccination scheme, some people failed to get vaccinated since they did not pass the screening, due to health problems, either low blood or high blood pressure. With this background, during the COVID-19 vaccination at PLN NP's Gresik GU, the Polihatra Health Post was then established. At the polihatra health post, vaccination participants who did not pass the health assessment are treated and given herbal medicine, which can help raise or lower the participant's tension; therefore, those participants could pass screening and obtain the covid-19 vaccination. This program purposes to help increase the success rate of vaccination in Gresik sub-district.

Program Kampung Mang Jasri

Mas Jasri Village Program

Tumpukan sampah yang menggunung di wilayah pesisir Muara Angke menjadi permasalahan utama yang kemungkinan sudah tidak bisa lagi teratasi. Sampah tersebut berasal dari laut dan terus menumpuk hingga menjadi daratan dengan ketebalan mencapai 1,5 meter. Gunungan sampah tersebut menyebabkan rusaknya ekosistem hutan mangrove, hilangnya habitat bagi satwa liar, limbahnya pun dapat menjadi sumber penyakit bagi masyarakat sekitar. KOMMA sebagai komunitas lokal wilayah Muara Angke tidak ingin melihat lingkungannya semakin buruk. Maka dari itu, KOMMA bersama PT PJB UP Muara Karang berkomitmen untuk melestarikan kembali kawasan pesisir Muara Angke dengan melakukan rehabilitasi lahan yang penuh sampah menjadi kawasan hutan mangrove yang asri. Penanaman dilakukan dengan memanfaatkan daratan sampah sebagai lahan subur untuk menanam bibit mangrove. Dan ternyata hal tersebut berhasil menumbuhkan mangrove menjadi pohon besar. Kegiatan pengembangan yang telah dilakukan antara lain penanaman dan perawatan rutin, pembuatan tambak silvofishery, pengolahan produk olahan mangrove, serta produksi batik berbahan mangrove.

Tujuan dari program adalah :

- Merehabilitasi lautan sampah menjadi kawasan hutan mangrove
- Menciptakan habitat yang nyaman bagi satwa liar yang hidup di kawasan hutan mangrove
- Mencegah terjadinya intrusi air laut dan abrasi pantai
- Menambah pendapatan masyarakat lewat program tambak silvofishery dan Mangrovee (produk olahan mangrove)
- Meningkatkan kapasitas dan pengetahuan komunitas serta masyarakat Muara Angke
- Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat Muara Angke yang lebih luas lagi.

The accumulated garbage piles at the Muara Angke coastal area are a major issue that may no longer be resolved. The garbage comes from the sea and continues to accumulate creating a land with a thickness of up to 1.5 meters. The mountain of garbage causes damage to the mangrove forest ecosystem, loss of habitat for wildlife, the waste can also be a source of disease for the surrounding community. KOMMA as the local community of Muara Angke wishes the environment will not get worse. Therefore, KOMMA together with PLN NP's Muara Karang GU are committed to preserving the Muara Angke coastal area by rehabilitating land full of garbage into a beautiful mangrove forest area. The planting is leveraging garbage land as fertile land for planting mangrove seedlings. Eventually, it was successful in growing mangroves into large trees. The Company carries out development activities, including planting and routine maintenance, making silvofishery ponds, processing mangrove processed products, and producing batik made from mangroves.

This program is purposed to the following:

- Rehabilitating the garbage piles into a mangrove forest area
- Creating a comfortable habitat for wildlife living in mangrove forest areas
- Preventing the sea water intrusion and coastal abrasion
- Increasing community income through silvofishery and Mangrovee (mangrove processed products) pond programs
- Increasing the capacity and knowledge of the community and the people of Muara Angke
- Increasing active participation from the wider Muara Angke community.

Program Sanggar Ceria: Cerita Tari Betawi

Sanggar Ceria Program: Betawi Dance Stories

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya meliputi aspek ekonomi dan lingkungan saja, aspek sosial dan budaya pun dapat turut andil dalam membangun kapabilitas masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam aspek sosial dan budaya dapat dilakukan melalui pelestarian budaya daerah. Di Jakarta Utara sangat kental dengan budaya betawi khususnya lewat tarian-tariannya. PT PJB UP Muara Karang sebagai salah satu perusahaan yang berlokasi di Jakarta Utara memiliki semangat untuk berupaya

Community empowerment does not only cover economic and environmental aspects, but also social and cultural aspects to contribute to building the community capabilities. Community empowerment in social and cultural aspects can be implemented through the preservation of regional culture. North Jakarta has a highly Betawi culture, especially through the dances. PLN NP's Muara Karang GU, a company located in North Jakarta, has a passion in preserving the Betawi Culture. Therefore, PLN NP's

melestarikan budaya betawi. Oleh karenanya, PT PJB UP Muara Karang bekerjasama dengan Yayasan Pewaris Negeri berupaya untuk menularkan semangat ini kepada masyarakat Muara Angke, khususnya bagi generasi muda yaitu anak-anak lewat program pelatihan menari tradisional secara gratis yang diberi nama Sanggar Ceria (Cerita Tari Betawi). Minimnya kegiatan positif dan produktif bagi anak-anak yang ada di wilayah Muara Angke juga menjadi salah satu latar belakang terciptanya program ini. Melalui Sanggar Tari Ceria, diharapkan dapat menjadi wadah bermain dan belajar yang positif bagi anak-anak, selain itu mereka juga dapat lebih lagi mengenal dan mencintai budayanya, sehingga budaya lokal tetap lestari dan tidak dilupakan. Memberikan wadah bagi anak-anak untuk mengekspresikan diri.

Muara Karang GU, in collaboration with Pewaris Negeri Foundation seeks to transmit this spirit to the people of Muara Angke, especially to the younger generation and children through free training for a traditional dance called Sanggar Ceria (Betawi Dance Story). The the backgrounds for this program include the lack of positive and productive activities for children in the Muara Angke area. Sanggar Tari Ceria is expected to become a positive place for children to play, learn, and also get to know and love their culture more so that local culture remains sustainable and not forgotten. It also provides a place for children to express themselves.

Adapun tujuan program:

- Menambah wawasan Budaya Betawi pada anak-anak Muara Angke
- Melestarikan budaya lokal khususnya Tari Betawi kepada anak-anak Muara Angke
- Memberikan wadah bagi anak-anak Muara Angke untuk berekspresi
- Meningkatkan kepercayaan diri dan kreatifitas anak-anak Muara Angke
- Menciptakan generasi yang cinta akan budayanya sendiri

This program is purposed to the following:

- To increase the knowledge of Betawi Culture for the children in Muara Angke
- To preserve local culture, especially Betawi Dance for children in Muara Angke
- To provide a platform to express for children in Muara Angke
- To increase the self-confidence and creativity of children in Muara Angke
- To create a cultural-aware generation

Program Batik Khas Desa Sengguruh Kab. Malang Batik Jagadjowo Khas Blitar

Typical Batik Program from Sengguruh Village, Malang Regency and Jagadjowo Typical Batik from Blitar

Peningkatan ekonomi masyarakat di pedesaan, menjadi fokus perhatian dari pemerintah maupun perusahaan yang ada di sekitar. Diperlukan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Aparat desa perlu melakukan monitoring terhadap industri kerajinan yang ada di desa sebagai salah satu cara pengembangan sumber daya ekonomi masyarakat desa, pengembangan termasuk dalam bidang, seperti pertanian, kerajinan batik dan sebagainya. Dalam bidang kerajinan batik, perlu dikembangkan dan dilestarikan, selain untuk meningkatkan pendapatan pengrajin batik juga untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Sasaran program adalah kelompok Batik Zeng desa Sengguruh Kec. Kepanjen Kabupaten Malang, dan Organisasi Batik Jagadjowo di Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar.

Improving the community economy in rural areas is the focus of attention from the government and the surrounding companies. Community empowerment is required to improve the quality of community life. Village officials are also required to monitor the handicraft industry in the village as a way of developing the economic resources of the village community, including development in fields such as agriculture, batik, and so on. In the context of batik, it is necessary to develop and preserve to increase the income of batik craftsmen and to preserve the existing culture in Indonesia. The target of the program is the Batik Zeng group in Sengguruh village, Kepanjen District, Malang Regency, and Jagadjowo Batik Organization in Kanigoro District, Blitar Regency.

Tujuan program ini adalah :

- Melestarikan seni batik tradisional
- Mendatangkan penghasilan tambahan untuk membantu perekonomian masyarakat sekitar
- Membantu mewujudkan program pemerintah untuk membeli produk-produk lokal
- Membantu mewujudkan program pemerintah untuk mengampanyekan batik ke mancanegara

Sepanjang tahun 2022, pelaksanaan kegiatan yang dilakukan diantaranya penandatanganan MoU terkait pelatihan membatik bagi masyarakat di desa Sengguruh Kec. Kepanjen, Kab. Malang dan pembangunan sarana dan prasarana Batik Jagadjowo di Lodoyo, Kabupaten Blitar berupa:

- Bantuan 2 (dua) tungku Kompor Gas
- Bantuan 10 (sepuluh) set Kompor Minyak
- Bantuan 2 (dua) unit Panci Lurik
- Bantuan 20 unit Canting
- Bantuan 135 yard Kain Katun

This program is purposed to the following:

- To preserve Batik as a traditional art
- To generate additional income to help the local community's economy
- To help realize the government's program to purchase local products
- To help realize the government's program to campaign for Batik abroad

In 2022, the activities held include the MoU signing concerning Batik training for the community in Sengguruh Village, Kepanjen District, Malang Regency, and construction of facilities and infrastructure for Batik Jagadjowo in Lodoyo, Blitar Regency in the form of the following:

- Assistance with 2 (two) Gas Stoves
- Assistance with 10 (ten) sets of Oil Stoves
- Assistance with 2 (two) Lurik Pans
- Assistance with 20 units of Canting
- Assistance with 135 yards of Cotton Fabric

Biaya Yang Dikeluarkan
Budget Cost

PLN NP mengeluarkan biaya untuk program tanggung jawab sosial terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan sebesar Rp40,70 Miliar yang mencakup bidang pendidikan, kesehataan, ekonomi, sosial budaya dan keagamaan, serta lingkungan dengan rincian yang diklasifikasikan berdasarkan tipologi sebagai berikut:

PLN NP incurred the cost of Rp40,70 billion for corporate social responsibility programs on social and community development covering the aspects of education, health, economy, social culture, and religion, as well as the environment with more detailed information based on the following typology:

Anggaran dan Realisasi Biaya CSR Tahun 2022 (dalam jutaan)
Budget and Realization of CSR Costs in 2022 (in millions)

No.	Tipologi Typology	RKAP 2022 2022 ABOP	Realisasi 2022 2022 Realization	Pencapaian terhadap RKAP ABOP Achievement
1	*Empowerment*	16.675	16.008	96%
2	*Capacity Building*	10.756	10.121	94%
3	Infrastruktur Infrastructure	5.878	4.945	84%
4	*Charity*	4.113	6.219	151%
5	KLBS Extraordinary Event	4.309	3.411	79%
Total		**41.730**	**40.704**	**98%**

Penghargaan
Awards

Pada tahun 2022 PLN NP mendapatkan penghargaan dan apresiasi atas program-program CSR yang berhasil dilaksanakan secara berkesinambungan antara lain:

1) **PROPER 2022**
   PLN NP meraih 21 penghargaan Program Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Lima PROPER emas berhasil diraih oleh UP Paiton, UP Gresik dan UBJOM Rembang, UBJOM Paiton, dan UBJOM Indramayu. PROPER Hijau disematkan pada UP Muara Karang, UP Muara Tawar, UP Cirata, dan UBJOM Tanjung Awar-Awar. Sedangkan Biru untuk UP Brantas (PLTA Sutami), UP Brantas (PLTA Wlingi), UBJOM Tenayan, UBJOM Bangka, UBJOM Belitung, UBJOM TIdore, UBJOM Arun, UBJOM Pacitan, UBJOM, UBJOM Amurang, UBJOM Bolok, UBJOM Tembilahan, dan UBJOM Nii Tanasa.

2) **Indonesia CSR *Awards* 2022**
   PLN NP berhasil meraih gelar The Best SDG's Program Implementation – 2022 *Responsible Consumption & Production Score* : 92.00 (Platinum *Award*) *Very Excellent* dan PT PEMBANGKITAN JAWA BALI (PJB) 1st The Best *Company for Environmental Social Governance* (ESG) *Score* : 95.24 (*Platinum Award*) *Very Excellent*. Ajang CSR Indonesia Awards 2022 yang digelar untuk ke-5 kalinya oleh Majalah CSR Indonesia dan Meprindo Communications. Kategori Bangun Karsa Rupa (bidang sosial) merupakan penghargaan untuk program Pengurangan Risiko Bencana bagi masyarakat sehingga bisa bangkit dan terbangung kembali.

3) **ISDA 2022**
   Melalui program-program CSR yang dikelola secara berkelanjutan, PLN NP kembali mendapatkan apresiasi di bidang CSR pada Jumat (28/11) yang dianugerahkan oleh *Indonesian Sustainable Development Goals Awards* (ISDA) tahun 2022 yang bertempat di Hotel The Ritz Carlton, Jakarta. Secara total terdapat 12 program CSR, 2 penghargaan individu untuk local hero dan CDO serta meraih penghargaan dari 9 Unit yang mengikuti penjurian, yaitu UP Paiton, UP Muara Tawar, UBJOM Tanjung Awar-awar, UBJOM Rembang, UP Cirata, UBJOM Pulang Pisau, UP Muara Karang, Kantor Pusat dan UBJOM Tenayan dengan berhasil meraih penghargaan 7 Kategori Gold, 3 Kategori silver, 1 Kategori CDO terbaik, dan 1 Kategori *Local Heroes* terbaik.

in 2022, PLN NP received awards and appreciation for CSR programs that were successfully implemented continuously, including:

1) **PROPER 2022**
   PLN NP won 21 awards from the 2022 Corporate Performance Program in Environmental Management (PROPER) organized by the Ministry of Environment and Forestry (KLHK). Five gold PROPERs were achieved by Paiton GU, Gresik GU and Rembang OMSBU, Paiton OMSBU, and Indramayu OMSBU. Green PROPER was pinned on Muara Karang GU, Muara Tawar GU, Cirata GU, and Tanjung Awar-Awar OMSBU. While Blue PROPER for Brantas GU (Sutami HPP), Brantas GU (Wlingi HPP), Tenayan OMSBU, Bangka OMSBU, Belitung OMSBU, Tidore OMSBU, Arun OMSBU, Pacitan OMSBU, Amurang OMSBU, Bolok OMSBU, Tembilahan OMSBU, and Nii Tanasa OMSBU.

2) **Indonesia CSR Awards 2022**
   PLN NP won the title of The Best SDG's Program Implementation - 2022 Responsible Consumption & Production Score : 92.00 (Platinum Award) Very Excellent and PT PEMBANGKITAN JAWA BALI (PJB) 1st The Best Company for Environmental Social Governance (ESG) with Score: 95.24 (Platinum Award) Very Excellent. CSR Indonesia Awards 2022 held for the 5th time by CSR Indonesia Magazine and Meprindo Communications. The Bangun Karsa Rupa category (social field) is an award for the Disaster Risk Reduction program for the community so that they can get up and be revived.

3) **ISDA 2022**
   PLN NP once again received appreciation in the field of CSR on Friday (28/11) awarded by the Indonesian Sustainable Development Goals Awards (ISDA) in 2022 at The Ritz Carlton Hotel, Jakarta.

   There are 12 CSR programs in total, 2 individual awards for local hero and CDO and won awards from 9 units that participated in the judging, namely Paiton GU, Muara Tawar GU, Tanjung Awar-awar, Rembang OMSBU, Cirata GU, Pulang Pisau OMSBU, Muara Karang GU, Head Office and Tenayan OMSBU by winning 7 Gold categories, 3 silver categories, 1 best CDO category, and 1 best Local Heroes category.

4) AREA (*Asia Responsible Enterprise Award*)

PLN NP melalui UBJOM Rembang dengan program Wanita Berdaya Tani' berhasil meraih gelar juara di ajang Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2022. Penghargaan ini bertujuan untuk membantu mempromosikan daya saing dan pengembangan kewirausahaan yang berkelanjutan, sebagai upaya mengangkat status ekonomi masyarakat di seluruh Asia.

5) TOP CSR *Awards* 2022

Penghargaan untuk PLN NP didapatkan dari dari unit UBJOM Tenayan dengan meraih penghargaan Bintang 4. Penilaian ini dilakukan tidak hanya berdasarkan satu program melainkan mencakup seluruh kegiatan CSR di Unit tersebut. TOP CSR *Awards* 2022 berbasis ketentuan ISO 26000, *Good Corporate Governance* (GCG), dan Strategi Bisnis dari para kandidat pemenang.

6) Indonesia CSR dan TJSL *Award* (ICA)

Penghargaan ini didapatkan oleh PLN NP yaitu Penghargaan di bidang sosial melalui penghargaan 4th ICA in *Power Generation Company Sector Industry* 2022 yang dipresentasikan oleh CSR Kantor Pusat.

7) Penghargaan Walikota Pekanbaru

PLN NP melalui UBJOM Tenayan mendapatkan apresiasi dari Walikota Pekanbaru atas kontribusi program CSR mengenai kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan pemberdayaan kepada masyarakat. Apresiasi ini didapat dari Pelaksanaan Program Taman Bunga Okura.

8) PJB CSR *Awards*

Awarding yang diselenggarakan oleh PLN NP untuk seluruh Unit-Unit pembangkitnya, dilaksanakan dalam turut memeriahkan HUT PT PJB dan sebagai bentuk pengukuran serta apresiasi dalam pelaksanaan Program Unggulan CSR Unit PLN NP. Ini merupakan tahun pertama diselenggarakannya *awarding* ini. Unit yang berhasil memenangkan *awarding* ini diantaranya UBJOM Tenayan melalui program Taman Wisata Bunga Okura sebagai Juara 3, UP Muara Tawar melalui Program Ekowisata Sungai Jingkem sebagai Juara 2, dan UBJOM Pacitan melalui Program Faba Untuk Masyarakat sebagai Pemenang Juara 1.

4) AREA (Asia Responsible Enterprise Award)

PLN NP through Rembang OMSBU with the 'Wanita Berdaya Tani' program won the title at the Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2022. This awards purposes to help promote competitiveness and sustainable entrepreneurship development, as an effort to lift the economic status of communities throughout Asia.

5) TOP CSR Awards 2022

The award for PLN NP was obtained from the Tenayan OMSBU unit by achieving a 4-Star award. This assessment is not only based on one program but includes all CSR activities in the Unit. TOP CSR Awards 2022 is based on the provisions of ISO 26000, Good Corporate Governance (GCG), and Business Strategy of the winning candidates.

6) Indonesia CSR dan TJSL Award (ICA)

This award obtained by PLN NP is an award in social field through the 4th ICA in Power Generation Company Sector Industry 2022 award presented by CSR Head Office.

7) Pekanbaru Mayor's Award

PLN NP through Tenayan OMSBU received appreciation from the Mayor of Pekanbaru for the contribution of CSR programs regarding the Company's concern for the environment and empowerment to the community. This appreciation was obtained from the implementation of the Okura Flower Park Program.

8) PJB CSR Awards

Awarding organized by PLN NP for all of its power plant units, held in enlivening the anniversary of PLN NP and as the measurement and appreciation in the implementation of CSR Excellence Program by PLN NP Unit. This is the first year of this awarding. Units that successfully won this awarding include Tenayan OMSBU through the Okura Flower Tourism Park program as 3rd place, Muara Tawar GU through the Jingkem River Ecotourism Program as 2nd place, and Pacitan OMSBU through the Faba Program for the Community as 1st place winner.

9) **SUSTAINABILITY CID PLN *AWARDS* 2022 *SUBHOLDING***
Sustainability CID PLN *Award* 2022 adalah ajang penghargaan untuk program TJSL yang *Sustainable* milik Unit Induk PLN dan *Subholding* PLN. Penghargaan ini bertujuan untuk memotivasi dan menambah wawasan peserta dalam menciptakan Program TJSL yang lebih baik dan *Sustainable*, yang selaras dengan program strategis korporat. PJB berhasil meraih 5 Penghargaan dari 4 Unit yang mengikuti tahapan seleksinya. Diantaranya yaitu UP Paiton meraih . Juara 3 kategori SME Development dan Juara 2 Kategori *Local Hero,* UP Brantas Juara 3 Kategori Sosial, UBJOM Pacitan Juara 2 Kategori Lingkungan, dan UBJOM Rembang Juara 2 Kategori Pendidikan.

9) **SUSTAINABILITY CID PLN AWARDS 2022 SUBHOLDING**
Sustainability CID PLN Award 2022 is an award event for sustainable CSR programs owned by PLN Parent Unit and PLN Subholding. This award purposes to motivate and add insight to the participants in creating a better and sustainable CSR Program, which is in line with the corporate strategic program. PLN NP won 5 awards from 4 units that participated in the selection stage. Paiton GU won the 3rd place in SME Development category and the 2nd place in Local Hero category, Brantas GU won the 3rd place in Social category, Pacitan OMSBU won the 2nd place in Environment category, and Rembang OMSBU won the 2nd place in Education category.

Manfaat Program Tanggung Jawab Sosial dan Pengembangan Masyarakat

Positive Impacts of Corporate Social Responsibility on Community Development

Nilai positif yang dapat diambil oleh para Kelompok binaan dalam program pemberdayaan, antara lain:
1. Dapat meningkatkan usaha ekonomi kecil di area
2. Dapat meningkatkan *image* mitra binaan;
3. Dapat meningkatkan derajat/taraf hidup masyarakat golongan ekonomi kecil menengah beserta keluarganya;
4. Dapat menjadi kelompok binaan secara berkelanjutan hingga usaha masyarakat yang menjadi mitra binaan dapat mandiri.

Sedangkan nilai positif yang dapat diambil oleh PLN NP sebagai perusahaan antara lain:
1. Masyarakat sekitar tempat usaha diharapkan menjadi partner usaha dengan pedulinya PLN NP kepada lingkungan sekitar diharapkan masyarakat juga peduli dengan keberadaan PLN NP sehingga keberadaan PLN NP memiliki nilai tambah bagi masyarakat sekitar;
2. Dapat meningkatkan pelayanan Perusahaan;
3. Dapat meningkatkan image Perusahaan;

Serta nilai positif yang dapat diambil oleh pemerintah, antara lain:

1. Mengurangi pengangguran dengan penciptaan lapangan kerja;
2. Ikut menggerakkan sektor riil, sehingga mampu meningkatkan perekonomian daerah setempat;
3. Memasyarakatkan koperasi;
4. *Multiplier* efek lainnya.

Positive values that can be taken by the fostered group in the distribution of the partnership program include the following:
1. Able to improve small economic enterprises in the area
2. Able to improve the image of the fostered partners;
3. Able to improve the quality/standard of living of the small and medium economic group and their families;
4. Able to be a foster group continuously so that the community businesses that become foster partners can be independent.

Meanwhile, positive values that can be taken by PLN NP as a company include the following:
1. Local communities are expected to become business partners with PLN NP's care for the surrounding environment. It is expected that the community is also aware of the PLN NP existence so that PLN NP has added values for the surrounding community;
2. Able to improve the Company's services;
3. Able to improve the Company's reputation;

Additionally, positive values that can be taken by the government include the following:
1. Reducing unemployment by creating jobs;
2. Participating in driving the real sector to improve the local economy;
3. Promoting cooperatives;
4. Multiplier other effects.

Kinerja Sosial Aspek Pelanggan
Social Performance on the Customers Aspect

Komitmen dan Kebijakan Terhadap Pelanggan
Commitment and Policies on Customers

Perusahaan memiliki komitmen tinggi untuk menjalankan tanggung jawab kepada Pelanggan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Perusahaan meyakini bahwa kepuasan Pelanggan merupakan elemen penting bagi keberlanjutan usaha PLN NP. Dengan kepuasan maksimal yang diperoleh Pelanggan, maka dapat meningkatkan loyalitas Pelanggan. Di era digital yang begitu kuat saat ini, kepuasan Pelanggan semakin menemukan nilai pentingnya.

PLN NP menerapkan sejumlah ketentuan dalam memberikan layanan terbaik kepada pelanggan di antaranya:

- Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik (*Grid Code*) tahun 2020 yang mencakup aturan mengenai manajemen jaringan, penyambungan, operasi, perencanaan dan pelaksanaan operasi, transaksi tenaga listrik, pengukuran, dan kebutuhan data;
- Aturan Transaksi Pembangkitan 2010 yang mengatur komunikasi transaksi jual-beli tenaga listrik, mengatur ancillary services;
- Prosedur Tetap Deklarasi Kondisi Pembangkit dan Indeks Kinerja Pembangkit tahun 2017, yang mengatur status kondisi pembangkit, tata cara komunikasi operasi, dan perhitungan kinerja pembangkit;
- Pedoman Operasi Baku Komunikasi Pengelolaan Tenaga Listrik tahun 2019.

Sebagai salah satu upaya dalam mendukung komitmen terhadap Pelanggan, PLN NP telah merumuskan Standar pelayanan berupa kesiapan operasi dan energi listrik serta jasa *Operation & Maintenance* (O&M) diatur dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) dan Kontrak Perjanjian Jasa O&M antara PLN NP dengan PT PLN (Persero) sebagai pelanggan tunggal. Faktor-faktor yang menjadi indikator tingkat kualitas layanan pun dijadikan target KPI Korporat setiap tahun, sehingga pencapaian indikator tersebut dipantau secara berkala oleh Manajemen PLN NP. Indikator tersebut antara lain *Equivalent Availability Factor* (EAF) sebagai indikator faktor kesiapan pembangkit untuk beroperasi, *Scheduled Outage Factor* (SOF) sebagai indikator ketepatan jadwal pemeliharaan dan Efisiensi Thermal Pembangkit.

The Company is highly committed to its responsibilities to customers by complying with the Company policies. The Company believes that customer satisfaction is an important element for business sustainability of PLN NP. With optimal satisfaction for the customers, it may increase the customers' loyalty. In current powerful digital era, customer satisfaction is increasingly to be important.

PLN NP implements several provisions in providing the best services to the customers, including:

- 2020 Java-Madura-Bali Electric Power System Network Regulation covers network management, operation, planning, and implementation of operations, settlement, and metering;
- Generation Transaction Regulations 2010 which regulates the communication of purchasing and selling the electricity transactions, regulating ancillary services;
- Fixed Procedures for Declaration on Power Plant Conditions and Power Plant Performance Index 2017, which regulates the status of generator conditions, procedures for operating communications, and calculation of power plant performance;
- Electric Power Management Communication Standard Operating Guidelines for 2019.

As an effort to support the commitment to Customers, PLN NP has formulated service Standards in the form of operational readiness and electricity as well as Operation & Maintenance (O&M) services regulated in the Power Purchase Agreement (PPA) and O&M Service Agreement Contract between PLN NP and PT PLN (Persero) as the sole customer. Factors that become indicators of service quality levels are also used as Corporate's KPI targets every year, so that the achievement of these indicators is monitored regularly by PLN NP Management. These indicators are among others Equivalent Availability Factor (EAF) as an indicator of the readiness factor of power plants to operate, Scheduled Outage Factor (SOF) as an indicator of the accuracy of maintenance schedules and Thermal Power Plant Efficiency.

Realisasi Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Aspek Pelanggan
Realization of Corporate Social Responsibility Activities on Customers

Peningkatan Layanan Pelanggan
Customer Service Improvement

PLN NP memandang perlindungan Pelanggan merupakan suatu kewajiban, hal ini sejalan dengan setiap proses bisnis yang dijalankan oleh Perusahaan selalu memperhatikan kesesuaian rangkaian prosedur Standar Pelayanan PLN NP, hal ini merupakan komitmen Perusahaan untuk terus meningkatkan mutu dan layanan sebagai bentuk tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap Pelanggan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan Perusahaan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada Pelanggan yaitu:

1. Memberikan kemudahan layanan bagi Pelanggan untuk memperoleh informasi terkait produk, layanan, dan operasional bisnis Perusahaan di *Call Center, website,* dan media sosial Perusahaan;
2. Melakukan survei kepuasan Pelanggan;
3. Menangani keluhan serta pendapat Pelanggan untuk terus menyempurnakan proses dan kualitas pelayanan;
4. Mempercepat rangkaian proses bisnis dan pekerjaan lainnya sehingga dapat memberikan pelayanan yang lancar dan optimal;
5. Memberi kepastian dalam penyelesaian klaim sehingga dapat meningkatkan kepuasan Pelanggan.

PLN NP considers Customer protection as mandatory, in line with every business process carried out by the Company that always paying attention to the suitability of the PLN NP Service Standard procedure series; this is the Company's commitment to continuously improving quality and services as the Company's social responsibility towards the Customers. The steps taken by the Company to improve service to customers are as follows:

1. Providing services facilities for Customers to obtain information related to the Company's products, services, and business operations at the Call Center, website, and social media of the Company;
2. Conducting customer satisfaction surveys;
3. Handling customer complaints and opinions to continuously improve processes and services quality;
4. Accelerating a series of business processes and other work to provide smooth and optimal services;
5. Providing certainty in the settlement of claims to increase the customers satisfaction.

Survei Kepuasan Pelanggan
Customer Satisfaction Survey

Setiap tahunnya, PLN NP terus berkomitmen untuk melaksanakan survei kepuasan terhadap pelanggan. Survei tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi area-area yang menjadi prioritas untuk dilakukannya perbaikan, selain itu untuk mengukur kepuasan Pelanggan, dan sebagai media untuk memperoleh saran dan masukan dari kebutuhan Pelanggan.

Each year, PLN NP continues to be committed to conducting customer satisfaction surveys. The survey aims to identify areas that are prioritized for improvement, in addition to measuring customer satisfaction, and as a medium to obtain suggestions and input from customer needs.

Hasil Penilaian Pelanggan PLN NP
PLN NP Customer Assessment Results

Nilai Kepuasan, Ketidakpuasan dan Keterikatan Pelanggan PT PLN NP
PT PLN NP Customer Satisfaction, Dissatisfaction, and Engagement Index

No.	Tipologi Category	Nilai (%) Value (%)		
		2020	2021	2022
A	Nilai Kepuasan Pelanggan Customers Satisfaction Value	85.94	87.10	85.81
B	Nilai Ketidakpuasan Pelanggan Customers Dissatisfaction Rate	14.27	11.81	14.03
C	Nilai Keterikatan Pelanggan Customers Engagement Value	89.50	95.45	96.60

Akses Informasi Layanan dan Pengaduan Pelanggan

Access to Services Information and Customers Complaints

Guna mendukung jaminan kepuasan pelanggan, Perusahaan menyediakan fasilitas pusat informasi dan layanan pengaduan terkait keluhan pelanggan. Hal ini diwujudkan melalui pembentukan Aplikasi MACO (*Management Complaint*) sebagai wujud komitmen Perusahaan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasa. Aplikasi MACO (*Management Complaint*) adalah saluran/jembatan komunikasi antara pengguna jasa dengan Perusahaan yang akan memenuhi kebutuhan permintaan informasi terkait layanan Perusahaan (*inquiry*), saran, apresiasi, serta penanganan keluhan dari pengguna jasa (*complaint handling*).

Tujuan pembentukan Aplikasi MACO (*Management Complaint*) secara terperinci adalah untuk:

a. Memenuhi permintaan informasi layanan yang akurat dan cepat bagi pengguna jasa, misalnya mengenai jadwal keberangkatan kapal, tarif, dll;
b. Menerima setiap saran dan apresiasi yang disampaikan oleh pengguna jasa dan melaporkannya kepada Divisi/Cabang terkait agar dapat dijadikan sebagai acuan perbaikan pelayanan di masa mendatang;
c. Menerima dan menjawab keluhan dari pengguna jasa dan melaporkannya kepada Divisi/Cabang terkait untuk segera ditindaklanjuti;
d. Mencatat dan merekam permintaan informasi, saran, apresiasi, dan keluhan dari pengguna jasa dan melaporkannya kepada Manajemen Perusahaan sebagai proses evaluasi kinerja; dan
e. Meningkatkan kepercayaan pengguna jasa terhadap Perusahaan melalui penyediaan informasi yang lengkap dan akurat serta memberikan tanggapan cepat atas keluhan yang disampaikan.

Untuk meningkatkan jangkauan media Aplikasi MACO (*Management Complaint*) kepada pengguna jasa di seluruh Indonesia, Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan melalui beberapa sarana berikut:

- Situs resmi: maco.plnnusantarapower.co.id
- Telepon: 031-8283180 ext. 417
- Faks : 031-8283192
- Surat: Jl. Ketintang Baru No. 11 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, 60231

Seluruh pengaduan akan ditindaklanjuti oleh Divisi OSK. Pengaduan atau keluhan yang masuk akan dikelompokkan berdasarkan dimensi kepuasan pelanggan untuk setiap produk sebagaimana ditetapkan dalam PJB IMS IPM-06.2.3 Mengelola Keluhan Pelanggan. Mekanisme pengaduan pelanggan dan tindak lanjutnya diuraikan dalam skema berikut.

To support the guarantee of customers satisfaction, the Company provides information center facilities and complaint services related to the customers complaints. This is realized through the establishment of MACO (Management Complaint) Application) as the Company's commitment to providing the best services to service users. MACO (Management Complaint) Application is a communication channel/bridge between service users and the Company that can fulfill the needs of information requests related to the Company's services (inquiry), suggestions, appreciation, and handling complaints from service users (complaint handling).

More detailed information on the purpose of establishing MACO (Management Complaint) is as follows:

a. Fulfilling requests for accurate and fast service information for service users, for example regarding ship departure schedules, fares, etc.;
b. Receiving every suggestion and appreciation submitted by service users and report it to the relevant Division/ Branch so that it can be used as a reference for service improvement in the future;
c. Receiving and responding to complaints from service users and reporting them to the relevant Divisions/Branches for immediate follow-up;
d. Making notes and recording requests for information, suggestions, appreciation, and complaints from service users and reporting them to the Company Management as a performance evaluation process; and
e. Increasing the trust of service users in the Company by providing complete and accurate information as well as providing quick responses to complaints submitted.

To increase the reach of MACO (Management Complaint) media for users all over Indonesia, Customers can submit complaints through the following channels:

- Official website: maco.plnnusantarapower.co.id
- Phone: 031-8283180 ext. 417
- Fax: 031-8283192
- Mail: Jl. Ketintang Baru No. 11 Surabaya, East Java, Indonesia, 60231

All complaints will be followed up by the OSK Division. Incoming complaints or reports are then grouped based on the customers satisfaction dimensions for each product as stipulated in PJB IMS IPM-06.2.3 Managing Customer Complaints. The customers complaint mechanism and its follow-up are described in the following scheme.

Mekanisme Pengaduan Pelanggan
Customers Complaint Mechanism

Sampai dengan tahun 2022 pengaduan yang diterima oleh PLN NP melalui aplikasi MACO berjumlah 123 laporan dan seluruh keluhan pelanggan telah ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan komitmen tinggi PLN NP dalam melindungi hak pelanggan untuk didengar pendapat dan keluhannya sehingga layanan yang diperoleh dapat sesuai dengan kontrak perjanjian.

As of 2022, the complaints received by PLN NP through the MACO application are 123 reports and all customer complaints have been followed up. This indicates PLN NP's high commitment to protecting the customers rights to have their opinions and complaints heard so that the services obtained can be following the contract agreement.

Perlindungan Privasi Pelanggan
Customer Privacy Protection

PLN NP berkomitmen menjamin kerahasiaan informasi yang disampaikan oleh pelanggan termasuk menjaga nama baik pelanggan sebagaimana yang diatur dalam *Code of Conduct.* Informasi berupa keluhan pelanggan yang disampaikan melalui SIMACO (Sistem *Management Complaint*) dikelola secara profesional oleh PLN NP, sehingga hanya pihak terkait yang memiliki akses terhadap informasi tersebut guna menindaklanjuti dan menyelesaikan keluhan tersebut. Penggunaan teknologi dalam pengelolaan keluhan pelanggan diharapkan dapat menjaga kepercayaan pelanggan sehingga kualitas layanan PLN NP dapat terus dikembangkan.

PLN NP is committed to ensuring the confidentiality of information submitted by the customers, including maintaining the customers' identities as regulated in the Code of Conduct. Information in the form of customer complaints submitted through SIMACO (Complaint Management System) is managed professionally by PLN NP; therefore, there are only relevant parties that are granted to access the information to follow up and resolve the complaints. The use of technology in the management of customer complaints is expected to maintain customer trust so that the quality of PLN NP services can continue to be developed.

Pengembangan dan Inovasi Produk Berkelanjutan
Sustainable Product Development and Innovation

Dalam komitmennya terhadap kepuasan pelanggan, PLN NP terus melakukan pengembangan dan inovasi terhadap produknya. Pengembangan dan inovasi produk berkelanjutan serta pengembangan pelayanan pelanggan yang dilakukan PLN NP pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

In its commitment to customer satisfaction, PLN NP continues to develop and innovate its products. Continuous product development and innovation as well as customer service development carried out by PLN NP in 2022 are as follows:

1. Implementasi *Co-Firing* berkelanjutan
   Cofiring berkelanjutan telah diujicoba di 20 unit pembangkit PLN NP dan telah dikomersialisasi di 16 unit pembangkit. Sampai dengan tahun 2022, PLN NP telah memproduksi MWh Green sebesar 250,337 GWh dengan pemanfaatan biomassa sebanyak 230.450,86 Ton.

2. A-BOOT (*Advance Boiler Optimization and Tuning*)
   Program yang mengintegrasikan 5 elemen, yakni: A-BOOT *Analysis, Power Tools, Expert, Combustion Test*, dan *Modelling* sebagai Strategi Peningkatan Efisiensi Bahan Bakar Untuk Mendukung Transformasi Lean PLN. Implementasi program ini dapat menurunkan konsumsi batu bara, sehingga mereduksi emisi karbon yang dilepas ke atmosfer sehingga MT CO_2 ekuivalen menjadi berkurang dan lebih ramah lingkungan (*Environmentally Save*).

3. *Sootblower Optimization System* (SBS)
   SBS adalah aplikasi berbasis *web* yang memungkinkan soot blower pada boiler PLTU beroperasi secara otomatis dan sesuai target. Sistem ini memanfaatkan *Machine Learning* yang mampu meminimalisir akumulasi pembentukan jelaga (*slagging-fouling*) pada boiler berdasarkan algoritma - rule clause serta *dynamic threshold* yang ditentukan dari perubahan parameter operasi yang diakibatkan oleh slagging maupun fouling. Hasil implementasi *Sootblower Optimization System* ini dapat meningkatkan efisiensi *boiler* PLTU sebesar 0.76 % setara penurunan *Heat Rate* 24.5 kCal/kWh dan sampai dengan tahun 2022, sistem ini telah diterapkan pada 8 Unit Pembangkit PLN NP.

4. Pemeliharaan Mandiri Sinergi UMRO
   Pemeliharaan yang dilakukan dengan mengoptimalkan *resources* internal PLN NP baik SDM, *tools* maupun *workshop*, bersinergi dengan UMRO. Pada tahun 2022, pemeliharaan mandiri ini telah dilakukan di 8 unit PLN NP dan berhasil melakukan efisiensi biaya pemeliharaan sebesar 24 miliar.

1. Sustainable Co-Firing Implementation
   Sustainable cofiring has been tested in 20 PLN NP power plant units and has been commercialized in 16 power plant units. Until 2022, PLN NP already produced 250.337 GWh of Green MWh with the utilization of 230,450.86 tons of biomass.

2. A-BOOT (Advance Boiler Optimization and Tuning)
   A program that integrates 5 elements, namely: A-BOOT Analysis, Power Tools, Expert, Combustion Test, and Modeling as a Strategy to Improve Fuel Efficiency to Support PLN's Lean Transformation. The implementation of this program can reduce coal consumption, thereby reducing carbon emissions released into the atmosphere so that MT CO2 equivalent is reduced and more environmentally friendly (Environmentally Save).

3. Sootblower Optimization System (SBS)
   SBS is a web-based application that allows soot blowers in CFPP boilers to operate automatically and on target. This system utilizes Machine Learning which is able to minimize the accumulation of soot formation (slagging-fouling) in boilers based on algorithms - rule clauses and dynamic thresholds determined from changes in operating parameters caused by slagging and fouling. The results of the implementation of the Sootblower Optimization System can increase the efficiency of the CFPP boiler by 0.76% equivalent to a decrease in Heat Rate of 24.5 kCal/kWh and until 2022, this system had been applied to 8 PLN NP Power Plant Units.

4. UMRO Synergy Self Maintenance
   Maintenance is carried out by optimizing PLN NP's internal resources, both human resources, tools and workshops, in synergy with UMRO. In 2022, this independent maintenance was carried out in 8 PLN NP power plant units and succeeded in reducing maintenance costs by 24 billion.

Dampak atas Kegiatan Perusahaan terhadap Pelanggan

Impacts of the Company Activities on Customers

Secara garis besar kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh PLN NP terkait pelanggan selama tahun 2022, menyebabkan timbulnya dampak positif bagi Perusahaan diantaranya sebagai berikut:

Generally, PLN NP's activities on customers in 2022 resulted in positive impacts for the Company, including the following:

1. Pelanggan dapat melihat komitmen PLN NP dalam menindaklanjuti suara pelanggan yang didapat dalam hasil Survei Kepuasan Pelanggan tahun 2022;
2. Meningkatkan sinergi dengan Pelanggan PLN NP;
3. Mempererat hubungan dan komunikasi dengan Pelanggan PLN NP;
4. Adanya saran dan diskusi bersama untuk perbaikan kedepan;
5. Mengetahui Nilai Kepuasan, Ketidakpuasan, dan Keterikatan Pelanggan selama periode 2022;
6. Mendapat masukan (*feedback*) untuk perbaikan di tahun 2022;
7. Memecahkan masalah terkait keluhan pelanggan yang masuk;
8. Mendapat solusi dan kesepakatan bersama untuk perbaikan kedepan dalam hal hubungan pelanggan.

1. The customers are able to see PLN NP's commitment to following up on the customer voices obtained in the results of the 2022 Customer Satisfaction Survey;
2. Increased synergy with PLN NP Customers;
3. Maintained relationships and communication with PLN NP Customers;
4. Suggestions and joint discussions for future improvements;
5. Found out the Value of Customer Satisfaction, Dissatisfaction, and Engagement during the 2022 period;
6. Feedback for improvement in 2022;
7. Problems solving related to incoming customer complaints;
8. Solutions and mutual agreements for future improvements in customer relations.

Biaya Pelaksanaan Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pelanggan
Budget Cost of Corporate Social Responsibility on Customers

Selama tahun 2022 PLN NP mengeluarkan biaya sebesar Rp 1,26 Miliar untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap Pelanggan yaitu untuk pelaksanaan kegiatan survei kepuasan pelanggan PLN NP dan Anak Perusahaan, Forum Komunikasi Pelanggan, Diskusi Operasi dan Kunjungan Pelanggan.

During 2022 PLN NP incurred costs of Rp1.26 billion for the implementation of Corporate Social Responsibility towards the Customers, namely for the implementation of PLN NP and Subsidiaries customers satisfaction survey activities, Customers Communication Forums, Operation Discussions and Customer Visits.

Laporan Keberlanjutan
Sustainability Report

PLN NP telah menyusun Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Reporting*) yang memuat Informasi terkait dengan pengelolaan dan kinerja aspek keberlanjutan termasuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan PLN NP dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Pedoman penyusunan Laporan ini mengacu pada peraturan dan standar pelaporan keberlanjutan sebagai berikut:

- GRI *Standards*, dimana PLN NP telah melaporkan sesuai (*in accordance*) dengan GRI *Standards* untuk periode 1 Januari 2022 – 31 Desember 2022, dan menyertakan Pengungkapan Sektor Utilitas Listrik (*Electric Utilities Sector Disclosures*);
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik; serta
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (SEOJK) Nomor 16/SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Untuk informasi lebih lengkap terkait Laporan Keberlanjutan, dapat dilihat dalam buku terpisah dari Buku Laporan Tahunan ini.

PLN NP drafted the Sustainability Report which contains information related to the management and performance of sustainability aspects including the implementation of PLN Nusantara Power's social and environmental responsibilities in supporting the achievement of sustainable development goals. The guidelines for preparing this Report refer to the following sustainability reporting regulations and standards:

- GRI Standards, in which PLN NP has reported in accordance with the GRI Standards for the period of 1 January 2022 - 31 December 2022, and included the Electric Utilities Sector Disclosures;
- Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 51/POJK.03/2017 on the Application of Sustainable Finance to Financial Services Institution, Issuer, and Publicly Listed Companies; and
- Circular Letter of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia (SEOJK) No. 16 /SEOJK.04/2021 on the Form and Content of Annual Report of Issuers or Public Companies.

Further information regarding the Sustainability Report is available separately from this Annual Report Book.

Laporan Keuangan Audit 2022

Audited Financial Statement 2022

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly*
PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

31 DESEMBER 2022 DAN 2021/
31 DECEMBER 2022 AND 2021

PLN Nusantara Power

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG/
BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS AT 31 DECEMBER 2022 AND 2021 AND FOR THE YEARS THEN ENDED

PT PLN NUSANTARA POWER (DAHULU/*FORMERLY* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI) DAN ENTITAS ANAKNYA/ *AND ITS SUBSIDIARIES*

Atas nama Direksi, kami yang bertanda tangan di bawah ini: *On behalf of the Board of Directors, we, the undersigned:*

Nama	Ruly Firmansyah	*Name*
Alamat Kantor	Jalan Ketintang Baru No.11 Surabaya	*Office Address*
Alamat Domisili	Jalan Legoso Raya No.66 RT 003 RW 001, Pisangan Ciputat Timur, Tangerang Selatan	*Address of Domicile*
Telepon	(031) 8283180	*Telephone*
Jabatan	Direktur Utama/*President Director*	*Position*
Nama	Dwi Hartono	*Name*
Alamat Kantor	Jalan Ketintang Baru No.11 Surabaya	*Office Address*
Alamat Domisili	Jalan Pulau Tanabala Blok A2 No.13 RT 004 RW 010 Jatimakmur, Pondok Gede, Bekasi	*Address of Domicile*
Telepon	(031) 8283180	*Telephone*
Jabatan	Direktur Keuangan/*Finance Director.*	*Position*

menyatakan bahwa:

1. Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT PLN Nusantara Power (dahulu PT Pembangkitan Jawa-Bali) dan entitas anaknya ("Grup");
2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Direksi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Grup.

Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Direksi.

declare that:

1. *The Board of Directors is responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT PLN Nusantara Power (formerly PT Pembangkitan Jawa-Bali) and its subsidiaries (the "Group");*
2. *The Group's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. *a. All information has been fully and correctly disclosed in the Group's consolidated financial statements;*
   b. The Group's consolidated financial statements do not contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts; and
4. *The Board of Directors is responsible for the Group's internal control system.*

The statement is made truthfully.

For and on behalf of the Board of Directors.

Surabaya, 04 April 2023

Ruly Firmansyah
Direktur Utama/
President Director

Dwi Hartono
Direktur Keuangan/
Finance Director

PT PLN NUSANTARA POWER
Kantor Pusat : Jl. Ketintang Baru 11, Surabaya - Indonesia 60231 : ☎ 62-31-8283180 (hunting) Fax : 62-31-8283183
Kantor Jakarta : Gedung Office 18 Park, Lantai 2 ABCD Jl. TB Simatupang No. 18, Jakarta Selatan DKI Jakarta 12520
Email : info@plnnusantarapower.co.id Website : www.plnnusantarapower.co.id

pwc

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF

PT PLN NUSANTARA POWER (DAHULU/*FORMERLY* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT PLN Nusantara Power (dahulu PT Pembangkitan Jawa-Bali) dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT PLN Nusantara Power (formerly PT Pembangkitan Jawa-Bali) and its subsidiaries (the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2022, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at 31 December 2022, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia
T: +62 (21) 5099 2901 / 3119 2901, F: +62 (21) 5290 5555 / 5290 5050, www.pwc.com/id

Nomor Izin Usaha: KEP-241/KM.1/2015.

00563/2.1025/AU.1/02/0241-3/1/IV/2023

pwc

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*

00563/2.1025/AU.1/02/0241-3/1/IV/2023

pwc

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.

Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

JAKARTA,
4 April 2023

Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA
Izin Akuntan Publik/*License of Public Accountant* No. AP.0241

PLN Nusantara Power
00563/2.1025/AU.1/02/0241-3/1/IV/2023

00563/2.1025/AU.1/02/0241-3/1/IV/2023

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 1/1 *Schedule*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal dan data saham)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, except for par value and share data)

	Catatan/ *Notes*	2022	2021	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	6	8,958,158	7,343,968	*Cash and cash equivalents*
Deposito berjangka	7	491,299	290,103	*Time deposits*
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	8	301,420	206,279	*Restricted cash in banks and time deposits*
Piutang usaha	9	20,550,254	21,954,378	*Trade receivables*
Piutang lain-lain - bagian lancar		317,919	187,199	*Other receivables - current portion*
Piutang kepada ventura bersama - bagian lancar	10	67,785	124,055	*Receivables from joint ventures - current portion*
Persediaan	11	1,904,262	1,463,848	*Inventories*
Pajak dibayar di muka - bagian lancar	30a	701,465	755,157	*Prepaid taxes - current portion*
Biaya dibayar di muka dan uang muka		101,556	135,238	*Prepaid expenses and advances*
Jumlah aset lancar		**33,394,118**	**32,460,225**	***Total current assets***
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Aset tetap	12	122,531,260	124,151,268	*Property, plant and equipment*
Properti investasi	13	1,577,154	1,460,599	*Investment properties*
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	14	16,114,319	12,390,846	*Investments in associates and joint ventures*
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	8	37,231	-	*Restricted cash in banks and time deposits*
Aset pajak tangguhan - bersih	30d	74,566	47,778	*Deferred tax assets - net*
Piutang kepada ventura bersama - bagian tidak lancar	10	756,068	692,002	*Receivables from joint ventures - non-current portion*
Piutang lain-lain - bagian tidak lancar		47,789	44,028	*Other receivables - non-current portion*
Pajak dibayar di muka - bagian tidak lancar	30a	189,478	752,248	*Prepaid taxes - non-current portion*
Aset tidak lancar lain	15	200,946	164,834	*Other non-current assets*
Jumlah aset tidak lancar		**141,528,811**	**139,703,603**	***Total non-current assets***
JUMLAH ASET		**174,922,929**	**172,163,828**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 1/2 *Schedule*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal dan data saham)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, except for par value and share data)

	Catatan/ *Notes*	2022	2021	
EKUITAS DAN LIABILITAS				***EQUITY AND LIABILITIES***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha	16	2,337,913	3,261,362	*Trade payables*
Utang lain-lain	17	795,048	597,040	*Other payables*
Utang pajak lainnya	30b	121,969	109,124	*Other taxes payable*
Utang pajak penghasilan badan		62,024	18,239	*Corporate income tax payable*
Beban masih harus dibayar		56,026	61,761	*Accrued expenses*
Pinjaman dari pemegang saham - bagian jangka pendek	31	291,050	233,979	*Loans from a shareholder - short-term portion*
Liabilitas sewa		19,317	33,730	*Lease liabilities*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	18	765,398	702,192	*Short-term employee benefits liabilities*
Jumlah liabilitas jangka pendek		**4,448,745**	**5,017,427**	***Total current liabilities***
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	30d	2,252,738	1,072,316	*Deferred tax liabilities - net*
Pinjaman dari pemegang saham - bagian jangka panjang	31	2,376,033	2,183,226	*Loans from a shareholder - long-term portion*
Liabilitas sewa		32,354	26,274	*Lease liabilities*
Liabilitas imbalan kerja	18	3,457,971	2,695,320	*Employee benefits liabilities*
Jumlah liabilitas jangka panjang		**8,119,096**	**5,977,136**	***Total non-current liabilities***
JUMLAH LIABILITAS		**12,567,841**	**10,994,563**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS				***EQUITY***
Modal saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham				*Capital stock - par value of Rp500 (full amount) per share*
Modal dasar - 24.000 juta saham				*Authorised - 24,000 million shares*
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 6.000 juta saham	19	3,000,000	3,000,000	*Subscribed and fully paid-up - 6,000 million shares*
Tambahan modal disetor	21	2,890,829	2,915,205	*Additional paid-in capital*
Selisih transaksi dengan kepentingan non-pengendali		(62,725)	(62,725)	*Difference in transaction with non-controlling interest*
Saldo laba				*Retained earnings*
Ditentukan penggunaannya		1,429,875	1,429,875	*Appropriated*
Tidak ditentukan penggunaannya		30,802,599	30,064,155	*Unappropriated*
Penghasilan komprehensif lain		124,016,234	123,579,572	*Other comprehensive income*
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada				*Equity attributable to*
Pemilik entitas induk		162,076,812	160,926,082	*Owners of the parent*
Kepentingan non-pengendali	22	278,276	243,183	*Non-controlling interests*
JUMLAH EKUITAS		**162,355,088**	**161,169,265**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH EKUITAS DAN LIABILITAS		**174,922,929**	**172,163,828**	***TOTAL EQUITY AND LIABILITIES***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 2/1 *Schedule*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2022	2021	
PENDAPATAN USAHA				***REVENUE***
Penjualan tenaga listrik	23	21,682,476	24,541,378	*Sales of electricity*
Pendapatan usaha lainnya	24	5,519,724	4,966,756	*Other operating revenue*
Jumlah pendapatan usaha		**27,202,200**	**29,508,134**	***Total revenue***
BEBAN USAHA				***OPERATING EXPENSES***
Bahan bakar dan pelumas	25	(11,851,078)	(14,672,806)	*Fuel and lubricants*
Pemeliharaan	27	(4,283,473)	(4,126,561)	*Maintenance*
Penyusutan	12	(3,203,292)	(3,253,144)	*Depreciation*
Kepegawaian	28	(1,811,388)	(1,790,453)	*Employee costs*
Pembelian tenaga listrik	26	(275,409)	(333,617)	*Purchased electricity*
Lain-lain	29	(1,146,787)	(924,562)	*Others*
Jumlah beban usaha		**(22,571,427)**	**(25,101,143)**	***Total operating expenses***
LABA USAHA		**4,630,773**	**4,406,991**	***OPERATING INCOME***
Penghasilan keuangan		182,327	186,603	*Finance income*
(Kerugian)/keuntungan kurs mata uang asing - bersih		(4,205)	3,924	*(Losses)/gains on foreign exchange - net*
Bagian laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama	14	2,854,031	2,868,311	*Share in net profit of associates and joint ventures*
Penghasilan/(beban) lain-lain - bersih		343,657	(273,789)	*Other income/(expenses) - net*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**8,006,583**	**7,192,040**	***PROFIT BEFORE INCOME TAX***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	30c	(1,423,037)	(1,371,852)	***INCOME TAX EXPENSE***
LABA TAHUN BERJALAN		**6,583,546**	**5,820,188**	***PROFIT FOR THE YEAR***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 2/2 *Schedule*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2022	2021	
LABA TAHUN BERJALAN (lanjutan)		**6,583,546**	**5,820,188**	***PROFIT FOR THE YEAR*** *(continued)*
Penghasilan/(kerugian) komprehensif lain tahun berjalan:				***Other comprehensive income/(loss) for the year:***
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that may be reclassified subsequently to profit or loss:*
Bagian penghasilan/(kerugian) komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama	14	969,996	(4,868)	*Share in other comprehensive income/(loss) from associates and joint ventures*
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that will not be reclassified to profit or loss:*
Revaluasi aset tetap	12	(7,054)	(3,154,021)	*Revaluation of property, plant and equipment*
Pengukuran kembali atas program manfaat pasti	18	(664,508)	192,415	*Remeasurement of defined benefit plans*
Manfaat pajak penghasilan terkait	30d	148,312	665,085	*Related income tax benefits*
		(523,250)	(2,296,521)	
Penghasilan/(kerugian) komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak		446,746	(2,301,389)	*Other comprehensive income/(loss) for the year after tax*
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**7,030,292**	**3,518,799**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
Laba tahun berjalan diatribusikan kepada:				***Profit for the year attributable to:***
Pemilik entitas induk		6,548,477	5,810,033	*Owners of the parent*
Kepentingan non-pengendali		35,069	10,155	*Non-controlling interests*
LABA TAHUN BERJALAN		**6,583,546**	**5,820,188**	***PROFIT FOR THE YEAR***
Jumlah penghasilan komprehensif berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				***Total comprehensive income for the year attributable to:***
Pemilik entitas induk		6,985,139	3,494,125	*Owners of the parent*
Kepentingan non-pengendali		45,153	24,674	*Non-controlling interests*
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**7,030,292**	**3,518,799**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 3/1 *Schedule*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

		Diatribusikan kepada pemilik entitas induk/*Attributable to the owners of the parent entity*											
						Penghasilan/(kerugian) komprehensif lain/ *Other comprehensive income/(loss)*							
	Catatan/ *Notes*	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Subscribed and fully paid-up capital stock*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Saldo laba/*Retained earnings* Ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Saldo laba/*Retained earnings* Tidak ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*	Surplus revaluasi aset tetap/ *Property, plant and equipment revaluation surplus*	Pengukuran kembali atas program manfaat pasti/ *Remeasurement on defined benefit plan*	Bagian penghasilan/ (kerugian) komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama/ *Share of other comprehensive income/ (loss) from associates and joint ventures*	Selisih transaksi kepentingan non-pengendali/ *Difference in transaction with non-controlling interest*	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk/ *Equity attributable to the parent entity*	Kepentingan non-pengendali/ *Non-controlling interests*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2021		3,000,000	2,915,205	1,429,875	31,915,518	125,731,065	(475,952)	640,367	(62,725)	165,093,353	221,598	165,314,951	*Balance as at 1 January 2021*
Dividen	20	-	-	-	(7,661,396)	-	-	-	-	(7,661,396)	(2,679)	(7,664,075)	*Dividends*
Penerbitan saham entitas anak kepada kepentingan non-pengendali	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	*Issuance of subsidiaries' shares to non-controlling interest*
Pelepasan entitas anak		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(414)	(414)	*Disposal of a subsidiary*
Laba tahun berjalan		-	-	-	5,810,033	-	-	-	-	5,810,033	10,155	5,820,188	*Profit for the year*
Kerugian komprehensif lain tahun berjalan		-	-	-	-	(2,462,877)	166,086	(19,117)	-	(2,315,908)	14,519	(2,301,389)	*Other comprehensive losses for the year*
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	-	-	5,810,033	(2,462,877)	166,086	(19,117)	-	3,494,125	24,674	3,518,799	*Total comprehensive income for the year*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021		**3,000,000**	**2,915,205**	**1,429,875**	**30,064,155**	**123,268,188**	**(309,866)**	**621,250**	**(62,725)**	**160,926,082**	**243,183**	**161,169,265**	***Balance as at 31 December 2021***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 3/2 *Schedule*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

		Diatribusikan kepada pemilik entitas induk/*Attributable to the owners of the parent entity*											
						Penghasilan/(kerugian) komprehensif lain/ *Other comprehensive income/(loss)*							
	Catatan/ *Notes*	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Subscribed and fully paid-up capital stock*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Saldo laba/*Retained earnings* Ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Saldo laba/*Retained earnings* Tidak ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*	Surplus revaluasi aset tetap/ *Property, plant and equipment revaluation surplus*	Pengukuran kembali atas program manfaat pasti/ *Remeasurement on defined benefit plan*	Bagian penghasilan/ (kerugian) komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama/ *Share of other comprehensive income/ (loss) from associates and joint ventures*	Selisih transaksi kepentingan non-pengendali/ *Difference in transaction with non-controlling interest*	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk/ *Equity attributable to the parent entity*	Kepentingan non-pengendali/ *Non-controlling interests*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021 (lanjutan)		3,000,000	2,915,205	1,429,875	30,064,155	123,268,188	(309,866)	621,250	(62,725)	160,926,082	243,183	161,169,265	***Balance as at 31 December 2021** (continued)*
Dividen	20	-	-	-	(5,810,033)	-	-	-	-	(5,810,033)	(779)	(5,810,812)	*Dividends*
Akuisisi entitas anak dari kepentingan non-pengendali	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9,084)	(9,084)	*Acquisition of subsidiaries' shares from non-controlling interest*
Divestasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(197)	(197)	*Divestment*
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	21	-	(24,376)	-	-	-	-	-	-	(24,376)	-	(24,376)	*Difference in value from from restructuring transactions of entities under common control*
Laba tahun berjalan		-	-	-	6,548,477	-	-	-	-	6,548,477	35,069	6,583,546	*Profit for the year*
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan		-	-	-	-	(7,054)	(515,635)	959,351	-	436,662	10,084	446,746	*Other comprehensive income for the year*
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	-	-	6,548,477	(7,054)	(515,635)	959,351	-	6,985,139	45,153	7,030,292	*Total comprehensive income for the year*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022		3,000,000	2,890,829	1,429,875	30,802,599	123,261,134	(825,501)	1,580,601	(62,725)	162,076,812	278,276	162,355,088	***Balance as at 31 December 2022***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 4/1 *Schedule*

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	2022	2021	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas dari pelanggan	14,539,557	15,415,195	*Cash receipts from customers*
Pembayaran kas kepada pemasok, karyawan dan lainnya	(12,362,975)	(11,533,375)	*Cash paid to suppliers, employees and others*
Penerimaan bunga	225,454	106,441	*Interest received*
Pembayaran surat keterangan pajak kurang bayar	-	(136,172)	*Payments of tax assessment letter for underpayment*
Penerimaan pengembalian atas surat keterangan pajak kurang bayar	450,195	-	*Receipts of refund tax assessment letter for underpayment*
Penerimaan restitusi pajak penghasilan badan	234,488	227,944	*Cash receipt for corporate income tax refund*
Penerimaan restitusi Pajak Penambahan Nilai	424,759	581,587	*Cash receipts for Value Added Taxes refund*
Pembayaran pajak penghasilan badan dan pajak penghasilan final	(253,522)	(338,412)	*Payments of corporate income tax and final income tax*
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	**3,257,956**	**4,323,208**	***Net cash provided by operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penerimaan dividen dari entitas asosiasi dan ventura bersama	496,634	307,069	*Dividends received from associates and joint ventures*
Penempatan investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	(393,398)	(92,598)	*Additions of investments in associates and joint ventures*
Penambahan piutang kepada ventura bersama	-	(9,632)	*Additions of receivables from joint ventures*
Penerimaan atas piutang kepada ventura bersama	64,720	-	*Receipts of receivables from joint ventures*
Perolehan aset tetap	(1,484,086)	(1,093,904)	*Purchase of property, plant and equipment*
Perolehan aset takberwujud	(42,346)	-	*Purchase of intangible assets*
Penarikan deposito berjangka	30,000	554,372	*Withdrawal of time deposits*
Penempatan deposito berjangka	(231,196)	-	*Placement of time deposits*
Penarikan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	972	15,737	*Withdrawal of restricted cash in banks and time deposits*
Penempatan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	(122,022)	(15,400)	*Placement of restricted cash in banks and time deposits*
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	**(1,680,722)**	**(334,356)**	***Net cash used in investing activities***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 4/2 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2022	2021	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan pinjaman dari pemegang saham	355,940	227,467	*Proceeds of loans from a shareholder*
Pembayaran pinjaman dari pemegang saham	(358,505)	(334,297)	*Payments of loans from a shareholder*
Pembayaran penambahan kepemilikan pada entitas anak dari kepentingan non-pengendali	(11,184)	-	*Payments of additional ownership in a subsidiary from non-controlling interest*
Penerimaan atas divestasi entitas anak	8,785	-	*Receipts for divestment of a subsidiary*
Pembayaran liabilitas sewa	(54,546)	(57,991)	*Payments of lease liabilities*
Pembayaran dividen oleh entitas anak kepada kepentingan non-pengendali	(779)	(2,679)	*Payments of dividends by subsidiaries to non-controlling interests*
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	**(60,289)**	**(167,500)**	***Net cash used in financing activities***
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**1,516,945**	**3,821,352**	***NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**7,343,968**	**3,511,113**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR***
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	97,245	11,503	*Effect of changes in foreign currency*
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**8,958,158**	**7,343,968**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR***

Lihat Catatan 34 untuk penyajian informasi arus kas Grup.

Refer to Note 34 for the presentation of the Group's cash flow information.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/1 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT PLN Nusantara Power (dahulu PT Pembangkitan Jawa-Bali) ("Perusahaan") didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Notaris No. 16 tanggal 3 Oktober 1995, dari Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-12495-HT.01.01.Th.95 tanggal 3 Oktober 1995 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 9299 tanggal 10 November 1995, Tambahan No. 90.

Anggaran Dasar Perusahaan terakhir diubah berdasarkan Akta Notaris No. 70 tanggal 30 Desember 2022, dari Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta, untuk mengubah nama Perusahaan yang semula bernama PT Pembangkitan Jawa-Bali menjadi PT PLN Nusantara Power. Akta perubahan ini telah diterima dan dicatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-0000005.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 1 Januari 2023.

Perusahaan berdomisili di Surabaya dengan satuan-satuan usaha yang berlokasi di Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Kantor pusat Perusahaan beralamat di Jl. Ketintang Baru No. 11, Surabaya.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah untuk menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat yang mencakup aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

a. Pembangkitan tenaga listrik;
b. Konstruksi bangunan elektrikal;
c. Pemasangan peralatan ketenagalistrikan;
d. Pemeliharaan dan/atau pengoperasian peralatan ketenagalistrikan; dan
e. Perdagangan dan/atau kegiatan usaha pendukung dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan termasuk memberikan penugasan kepada entitas anaknya.

Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN").

1. GENERAL

a. Establishment and general information

PT PLN Nusantara Power (previously PT Pembangkitan Jawa-Bali) (the "Company") was established in Jakarta based on Notarial Deed No. 16 dated 3 October 1995, of Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notary in Jakarta. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. C2-12495-HT.01.01.Th.95 dated 3 October 1995 and was published in State Gazette No. 9299 dated 10 November 1995, Supplement No. 90.

The Articles of Association of the Company were recently amended by Notarial Deed No. 70 dated 30 December 2022, of Muhammad Hanafi, S.H., Notary in Jakarta, to change the Company's name from PT Pembangkitan Jawa-Bali to PT PLN Nusantara Power. This change was received and recorded by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree Letter No. AHU-0000005.AH.01.02.TAHUN 2023 dated 1 January 2023.

The Company is domiciled in Surabaya with business units located in Java, Kalimantan, and Sumatera. The Company's head office is located in Jl. Ketintang Baru No. 11, Surabaya.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of its activities is to engage in the electric power industry business, based on the principles of competitive industry and commerce, consisting of the following activities:

a. Power plants;
b. Electrical buildings construction;
c. Installation of electrical equipments;
d. Maintenance and/or operation of electrical equipments; and
e. Sales and/or other supporting business activities in order to optimise the available resources of the Company, including delegating assignments to its subsidiaries.

The Company is one of the group of companies owned by Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN").

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/2 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, jumlah karyawan tetap Perusahaan dan entitas anaknya (secara keseluruhan dirujuk sebagai "Grup") masing-masing sebanyak 10.082 karyawan (tidak diaudit) dan 9.607 karyawan (tidak diaudit).

b. Pembentukan struktur *subholding*

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") Republik Indonesia No. S-886/MBU/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 perihal Persetujuan Pembentukan *Holding* dan *Subholding* PLN Masa/Tahap *Legal End-State* serta Restrukturisasi dan Pengalihan Harta yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 70 tanggal 30 Desember 2022 dari Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, PLN membentuk empat *subholding* yang terdiri dari:

1. Dua *subholding* di bidang pembangkitan tenaga listrik, yaitu PLN Nusantara Power ("PNP") (sebelumnya Pembangkitan Jawa Bali) dan PT Indonesia Power atau disebut PLN Indonesia Power ("PIP"), nama merek yang digunakan;
2. Satu *subholding* di bidang penyediaan dan logistik energi primer, yaitu PT PLN Energi Primer Indonesia ("EPI") (sebelumnya PLN Batubara); dan
3. Satu *subholding* untuk kegiatan usaha di luar pembangkitan, transmisi, dan distribusi ketenagalistrikan (Beyond kWh), yaitu bernama Indonesia Comnet Plus ("ICON+").

Sebagai tindak lanjut pembentukan *subholding* PLN tersebut sesuai dengan Akta Notaris No. 76 tanggal 30 Desember 2022, dari Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan tentang Persetujuan atas Pemisahan Kegiatan Usaha Pembangkitan Listrik PLN kepada Perusahaan, yang menyatakan bahwa sebagian aset dan liabilitas kegiatan usaha pembangkitan listrik PLN akan beralih secara hukum menjadi hak serta kewajiban dari Perusahaan yang menerima pemisahan sejak tanggal efektif pemisahan di 1 Januari 2023.

***1. GENERAL** (continued)*

***a. Establishment and general information** (continued)*

As at 31 December 2022 and 2021, the Company and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group") had a total permanent number of employees of 10,082 (unaudited) and 9,607 (unaudited), respectively.

b. Establishment of subholding structures

Based on Decision Letter of the Minister of State-Owned Enterprise ("SOE") of the Republic of Indonesia No. S-886/MBU/12/2022 dated 30 December 2022, regarding the Approval for The Establishment of Holding and Subholding of PLN for the Legal End-State Period/Stage as well as the Restructuring and Transfer of Assets as stated in the Notarial Deed No. 70, dated 30 December 2022, of Muhammad Hanafi, S.H., Notary in South Jakarta, PLN established four subholdings, consisting of:

1. *Two subholdings in the power generation sector, namely PLN Nusantara Power ("PNP") (formerly Pembangkitan Jawa Bali) and PT Indonesia Power or namely PLN Indonesia Power ("PIP"), the branding name used;*
2. *One subholding in the primary energy procurement and logistics sector, namely PT PLN Energi Primer Indonesia ("EPI") (formerly PLN Batubara); and*
3. *One subholding for business activities outside of power generation, transmission, and distribution (Beyond kWh), namely Indonesia Comnet Plus ("ICON+").*

As a follow-up to the establishment of the PLN subholding in accordance with Notarial Deed No. 76 dated 30 December 2022, from Muhammad Hanafi, S.H., Notary in South Jakarta regarding Approval of Separation of PLN's Power Generation Business Activities to the Company, it was stated that several assets and liabilities of PLN's power generation business activities will legally be transferred to become the rights and obligations of the Company that received the separation from the effective date of the separation on 1 January 2023.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/3 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Susunan pengurus dan informasi lain

Susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

	2022	2021	
Komisaris Utama	Evy Haryadi**)	Dedeng Hidayat	*President Commissioner*
Komisaris	Kenedy***)	Komang Parmita	*Commissioners*
	Jisman P. Hutajulu	Jisman P. Hutajulu	
	Hendra Iswahyudi	Hendra Iswahyudi	
	Emir Kresna Wardana	Emir Kresna Wardana*)	
	Bagus Puruhito	Bagus Puruhito	

*) Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler tanggal 30 Desember 2021.
**) Berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 14 Oktober 2022, dari Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta.
***) Berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 4 Januari 2023, dari Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta.

Susunan Dewan Direksi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022	2021	
Direktur Utama	Ruly Firmansyah****)	Gong Matua Hasibuan**)	*President Director*
Direktur Sumber Daya Manusia dan Administrasi	Karyawan Aji	Karyawan Aji	*Director of Human Resources and Administration*
Direktur Pengembangan dan Niaga	Muhamad Reza****)	Iwan Purwana*)	*Director of Development and Commerce*
Direktur Keuangan	Dwi Hartono****)	R. Rawan Insani	*Director of Finance*
Direktur Operasi Pembangkit Gas	M. Yossy Noval A.	M. Yossy Noval A.***)	*Director of Operation Gas Power Plant*
Direktur Operasi Pembangkit Batubara	Rachmanoe Indarto	Rachmanoe Indarto	*Director of Operation Coal Power Plant*

*) Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 25 Januari 2021.
**) Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 19 Februari 2021.
***) Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 23 April 2021.
****) Berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 14 Oktober 2022, dari Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta.

Susunan Komite Audit pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022**)	2021	
Ketua	Kenedy	Hendra Iswahyudi*)	*Chairman*
Sekretaris/Anggota	Edward Fahrizal	Sigit Djalu Prakoso	*Secretary/Members*
Anggota	Andi Haslinda	Andar Sudiar Sukma	*Members*

*) Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 010.K/DK/PJB/2021.
**) Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 002.K/DK-PLN NP/2023.

***1. GENERAL** (continued)*

c. Management and other information

The composition of the Company's Board of Commissioners was as follows:

*) *Based on decision of the shareholders at the Circular General Shareholders Meeting of the Company dated 30 December 2021.*
**) *Based on Notarial Deed No. 10 dated 14 October 2022, of Muhammad Hanafi, S.H., Notary in Jakarta.*
***) *Based on Notarial Deed No. 2 dated 4 January 2023, of Muhammad Hanafi, S.H., Notary in Jakarta.*

The composition of the Company's Board of Directors as at 31 December 2022 and 2021 was as follows:

*) *Based on decision of the shareholders at the Circular General Shareholders Meeting of the Company dated 25 January 2021.*
**) *Based on decision of the shareholders at the Circular General Shareholders Meeting of the Company dated 19 February 2021.*
***) *Based on decision of the shareholders at the Circular General Shareholders Meeting of the Company dated 23 April 2021.*
****) *Based on Notarial Deed No. 10 dated 14 October 2022, of Muhammad Hanafi, S.H., Notary in Jakarta.*

The composition of the Company's Audit Committee as at 31 December 2022 and 2021 was as follows:

*) *Based on Decision of the Board of Commissioners No. 010.K/DK/PJB/2021.*
**) *Based on Decision of the Board of Commissioners No. 002.K/DK-PLN NP/2023.*

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/4 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("PSAK") BARU, REVISI, AMANDEMEN DAN PENYESUAIAN TAHUNAN

Penerapan dari amandemen dan penyesuaian tahunan terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2022 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian pada tahun berjalan:

- Amandemen PSAK No. 22, "Kombinasi Bisnis - Referensi ke Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan"
- Amandemen PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi - Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 69, "Agrikultur"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 73, "Sewa"

Sehubungan dengan amandemen PSAK No. 71, No. 55, No. 60, No. 62 dan No. 73, Grup saat ini memiliki piutang kepada ventura bersama (Catatan 10) dan pinjaman dari pemegang saham (Catatan 31) yang mengacu pada Dolar Amerika Serikat *London Interbank Offered Rate* ("LIBOR") dan berlaku hingga lebih dari tahun 2022. Pada tanggal 31 Desember 2022, suku bunga acuan alternatif belum ditentukan.

Standar baru, amandemen, dan revisi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2022 adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 74, "Kontrak Asuransi"
- Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan - Klasifikasi Kewajiban Lancar atau Tidak Lancar"
- Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan - Pengungkapan Kebijakan Akuntansi"
- Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan - Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan"
- Amandemen PSAK No. 16, "Aset Tetap - Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan"

2. NEW, REVISIONS, AMENDMENTS AND ANNUAL IMPROVEMENTS STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD ("SFAS")

The adoption of the following amendments and annual improvements to accounting standards which are effective from 1 January 2022 did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported in the consolidated financial statements for the current year:

- *Amendment to SFAS No. 22, "Business Combinations - References to the Conceptual Framework for Financial Reporting"*
- *Amendment to SFAS No. 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets - Onerous Contracts - Cost of Fulfilling a Contract"*
- *Annual improvement to SFAS No. 69, "Agriculture"*
- *Annual improvement to SFAS No. 71, "Financial Instruments"*
- *Annual improvement to SFAS No. 73, "Leases"*

With respect to the amendments to SFAS No. 71, No. 55, No. 60, No. 62 and No. 73, the Group currently has receivables from joint ventures (Note 10) and loans from a shareholder (Note 31) which refer to United States Dollars London Interbank Offered Rate ("LIBOR") and extend beyond 2022. As at 31 December 2022, the alternative benchmark has not yet been determined.

The new standard, amendments, and revisions issued but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2022 are as follows:

- *SFAS No. 74, "Insurance Contracts"*
- *Amendment to SFAS No. 1, "Presentation of Financial Statements - Classification of Liabilities as Current or Non-Current"*
- *Amendment to SFAS No. 1, "Presentation of Financial Statements - Disclosure of Accounting Policies"*
- *Amendment to SFAS No. 1, "Presentation of Financial Statements - Long-term Liabilities with Covenants"*
- *Amendment to SFAS No. 16, "Property, Plant and Equipment - Proceeds before Intended Use"*

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/5 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("PSAK") BARU, REVISI, AMANDEMEN DAN PENYESUAIAN TAHUNAN (lanjutan)

Standar baru, amandemen dan revisi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2022 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

- Amandemen PSAK No. 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan - Definisi Estimasi Akuntansi"
- Amandemen PSAK No. 46, "Pajak Penghasilan - Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal"
- Amandemen PSAK No. 73, "Sewa - Liabilitas Sewa Pada Transaksi Jual dan Sewa-balik"
- Amandemen PSAK No. 74, "Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK No. 74 dan PSAK No. 71 - Informasi Komparatif"

- Revisi PSAK No. 101, "Penyajian Laporan Keuangan Syariah"
- Revisi PSAK No. 107, "Akuntansi Ijarah"
- Revisi PSAK No. 109, "Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah"

Standar baru, amandemen, dan revisi di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2023, kecuali untuk Amandemen PSAK No. 1 "Penyajian Laporan Keuangan - Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan", Amandemen PSAK No. 73, Revisi PSAK No. 101 dan Revisi PSAK No. 109 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2024, dan PSAK No. 74 dan Amandemen PSAK No. 74 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, tetapi penerapan dini diperkenankan.

Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Grup sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amandemen dan revisi pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

2. NEW, REVISIONS, AMENDMENTS AND ANNUAL IMPROVEMENTS STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD ("SFAS") *(continued)*

The new standard, amendments and revisions issued but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2022 are as follows: (continued)

- *Amendment to SFAS No. 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors - Definition of Accounting Estimates"*
- *Amendment to SFAS No. 46, "Income Tax - Deferred Taxes related to Assets and Liabilities Arising from a Single Transaction"*
- *Amendment to SFAS No. 73, "Leases - Lease Liability in a Sale and Leaseback Transaction"*
- *Amendment to SFAS No. 74, "Insurance Contract regarding Initial Application of SFAS No. 74 and SFAS No. 71 - Comparative Information"*
- *Revision to SFAS No. 101, "Presentation of Sharia Financial Statements"*
- *Revision to SFAS No. 107, "Ijarah Accounting"*
- *Revision to SFAS No. 109, "Zakah, Infaq and Sadaqah Accounting"*

The above new standard, amendments and revisions are effective beginning 1 January 2023, except for Amendment to SFAS No. 1 "Presentation of Financial Statements - Long-term Liabilities with Covenants", Amendment to SFAS No. 73, Revision to SFAS No. 101 and Revision to SFAS No. 109 which are effective beginning 1 January 2024, and SFAS No. 74 and Amendment to SFAS No. 74 which are effective beginning 1 January 2025, but early adoption is permitted.

As at the completion date of these consolidated financial statements, the Group is evaluating the potential impact of these new standards, amendments and revisions to the Group's consolidated financial statements.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/6 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup. Kebijakan ini telah diaplikasikan secara konsisten terhadap semua tahun yang disajikan, kecuali dinyatakan lain.

a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”)

Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

b. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian adalah dasar akrual. Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha dan dengan pengukuran nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia memerlukan penggunaan estimasi dan asumsi akuntansi penting tertentu. Penyusunan laporan keuangan juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area-area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi, atau area dimana asumsi dan estimasi yang berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan dalam Catatan 4.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Presented below are the significant accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements of the Group. These policies have been consistently applied to all of the years presented, unless otherwise stated.

a. Compliance with the Financial Accounting Standards (“FAS”)

The Group’s consolidated financial statements have been prepared in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.

b. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, are prepared on the accrual basis of accounting. The preparation and presentation of the consolidated financial statements are based on a going concern assumption and the measurement basis is historical cost, except for certain accounts that have been measured on the basis described in the related accounting policies.

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Group’s accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 4.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/7 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian

i.1. Konsolidasi

Entitas anak merupakan semua entitas (termasuk entitas terstruktur), dimana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan suatu entitas ketika Grup memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan suatu entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut.

Entitas anak dikonsolidasi sejak tanggal pengendalian beralih kepada Grup dan tidak lagi dikonsolidasi sejak tanggal hilangnya pengendalian.

Saldo, transaksi, penghasilan dan beban intra kelompok usaha dieliminasi. Keuntungan dan kerugian hasil dari transaksi intra kelompok usaha yang diakui dalam aset juga dieliminasi. Kebijakan akuntansi entitas anak telah diubah seperlunya untuk memastikan konsistensi penerapan kebijakan oleh Grup.

i.2. Akuisisi

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat setiap kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk mengakuisisi entitas anak adalah nilai wajar seluruh aset yang dialihkan, liabilitas yang diakui oleh pihak pengakuisisi kepada pemilik sebelumnya dari entitas yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup. Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar setiap aset dan liabilitas yang dihasilkan dari suatu kesepakatan imbalan kontinjensi. Aset teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontinjensi yang diambil alih, yang diperoleh dalam kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Principles of consolidation

i.1. Consolidation

Subsidiaries are all entities (including structured entities), over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity.

Subsidiaries are consolidated from the date on which control is transferred to the Group and are de-consolidated from the date on which that control ceases.

Intragroup balances, transactions, income and expenses are eliminated. Profits and losses resulting from intragroup transactions that are recognised in assets are also eliminated. The accounting policies of subsidiaries have been amended where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

i.2. Acquisition

The Group applies the acquisition method to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred to the former owners of the acquired entity and the equity interests issued by the Group. The consideration transferred is the fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement. Identifiable assets acquired, liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair values as at the acquisition date.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/8 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

i.2. Akuisisi (lanjutan)

Grup mengakui kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi, baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan non-pengendali atas aset neto teridentifikasi pihak yang diakuisisi. Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Biaya terkait akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

Jika kombinasi bisnis diperoleh secara bertahap, Grup akan mengukur kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki pada pihak yang diakuisisi sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan, jika ada, dalam laba rugi. Imbalan kontinjensi yang masih harus dialihkan oleh Grup diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan selanjutnya atas nilai wajar imbalan kontinjensi yang diakui sebagai aset atau liabilitas dan dicatat dalam laba rugi. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

Selisih lebih antara imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan non-pengendali dalam pihak yang diakuisisi, dan nilai wajar pada tanggal akuisisi dari kepemilikan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi, dibandingkan dengan nilai wajar bagian Grup atas aset bersih teridentifikasi yang diakuisisi, dicatat sebagai *goodwill*. Jika jumlah tersebut lebih kecil dari nilai wajar atas aset bersih teridentifikasi entitas anak yang diakuisisi dan pengukuran atas seluruh jumlah tersebut telah ditelaah, dalam hal pembelian dengan diskon, selisih tersebut diakui secara langsung dalam laba rugi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Principles of consolidation *(continued)*

i.2. Acquisition *(continued)*

The Group recognises any non-controlling interest in the acquiree on an acquisition-by-acquisition basis, either at fair value or at the non-controlling interest's proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Non-controlling interests are reported as equity in the consolidated statements of financial position, separate from the owners of the parent entity.

Acquisition-related costs are expensed as incurred.

If the business combination is achieved in stages, the Group will remeasure its previously held equity interest in the acquiree at its fair value at its acquisition date and recognise the resulting gain or loss, if any, in profit or loss. Any contingent consideration to be transferred by the Group is recognised at its fair value as at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration that is deemed to be an asset or a liability are recognised in profit or loss. A contingent consideration that is classified as equity is not remeasured, and its subsequent settlement is accounted for within equity.

The excess of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree and the acquisition-date fair value of any previous equity interest in the acquiree over the fair value of the Group's share of the identifiable net assets acquired is recorded as goodwill. If those amounts are less than the fair value of the net identifiable assets of the subsidiary acquired and the measurement of all amounts has been reviewed, in the case of a bargain purchase, the difference is recognised directly in profit or loss.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/9 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

ii. Perubahan kepemilikan atas entitas anak tanpa kehilangan pengendalian

Transaksi dengan kepentingan non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dibayarkan dan bagiannya atas jumlah tercatat aset neto yang diperoleh dicatat dalam ekuitas. Keuntungan atau kerugian atas pelepasan kepada kepentingan non-pengendali juga dicatat pada ekuitas.

iii. Pelepasan entitas anak

Ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, Grup menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada nilai tercatatnya ketika pengendalian hilang. Jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain juga direklasifikasi ke laba rugi atau dialihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh PSAK lain.

Sisa investasi pada entitas anak terdahulu diakui sebesar nilai wajarnya. Setiap perbedaan antara nilai tercatat sisa investasi pada tanggal hilangnya pengendalian dan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi.

iv. Akuntansi atas entitas asosiasi dan ventura bersama

Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Grup mempunyai pengaruh signifikan, tetapi tidak mengendalikan, dan biasanya Grup memiliki 20% atau lebih hak suara, tetapi tidak melebihi 50% hak suara. Investasi pada entitas asosiasi dicatat pada laporan keuangan konsolidasian menggunakan metode ekuitas dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

Ventura bersama merupakan pengaturan bersama antara beberapa pihak yang melakukan kesepakatan pengendalian bersama yang memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Ventura bersama ini menggunakan metode ekuitas dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Principles of consolidation *(continued)*

ii. Changes in ownership interest in subsidiaries without loss of control

Transactions with non-controlling interests that do not result in a loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying amount of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to non-controlling interests are also recorded in equity.

iii. Disposal of subsidiaries

When the Group loses control of a subsidiary, the Group derecognises the assets (including any goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts as at the date on which control is lost. Amounts previously recognised in other comprehensive income are also reclassified to profit or loss or transferred directly to retained earnings if required under other SFAS.

Any investment retained in the former subsidiary is recognised at its fair value. The difference between the carrying amount of the investment retained at the date when the control is lost and its fair value is recognised in profit or loss.

iv. Accounting for associates and joint ventures

An associate is an entity over which the Group has significant influence, but not control, generally accompanied by a shareholding giving rise to voting rights of 20% or greater but not exceeding 50%. Investments in an associate are accounted for in the consolidated financial statements using the equity method less impairment losses, if any.

A joint venture is a joint arrangement in which the parties that share joint control have rights to the net assets of the arrangement. Joint ventures are accounted for using the equity method less impairment losses, if any.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/10 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

iv. Akuntansi atas entitas asosiasi dan ventura bersama (lanjutan)

- **Akuisisi**

Investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan, instrumen ekuitas yang diterbitkan atau liabilitas yang timbul atau diambil alih pada tanggal akuisisi, ditambah biaya yang berhubungan langsung dengan akuisisi.

Goodwill pada akuisisi entitas asosiasi atau ventura bersama merupakan selisih lebih yang terkait dengan biaya perolehan investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dengan bagian Grup atas nilai wajar neto aset teridentifikasi dari entitas asosiasi atau ventura bersama dan dimasukkan dalam jumlah tercatat investasi.

- **Metode ekuitas**

Dalam menerapkan metode ekuitas, bagian Grup atas laba rugi entitas asosiasi atau ventura bersama setelah perolehan diakui dalam laba rugi, dan bagian Grup atas penghasilan komprehensif lain setelah tanggal perolehan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Perubahan dan penerimaan distribusi dari entitas asosiasi atau ventura bersama setelah tanggal perolehan disesuaikan terhadap nilai tercatat investasi.

Jika bagian Grup atas rugi entitas asosiasi atau ventura bersama sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi atau ventura bersama, termasuk piutang tidak lancar tanpa jaminan, maka Grup menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut, kecuali Grup memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atau telah melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi atau ventura bersama.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Principles of consolidation *(continued)*

iv. Accounting for associates and joint ventures *(continued)*

- ***Acquisitions***

Investment in an associate or a joint venture is initially recognised at cost. The cost of an acquisition is measured at the fair value of the assets transferred, equity instruments issued or liabilities incurred or assumed as at the date of exchange, plus costs directly attributable to the acquisition.

Goodwill on the acquisition of an associate or a joint venture represents the excess of the cost of the acquisition of the associate or joint venture over the Group's share of the fair value of the identifiable net assets of the associate or joint venture and is included in the carrying amount of the investment.

- ***Equity method of accounting***

In applying the equity method of accounting, the Group's share of its associate's or joint venture's post-acquisition profit or loss is recognised in profit or loss and its share of post-acquisition other comprehensive income is recognised in other comprehensive income.

These post-acquisition movements and distributions received from an associate or a joint venture are adjusted against the carrying amounts of the investment.

When the Group's share of the losses of an associate or a joint venture equals or exceeds its interest in the associate or joint venture, including any other unsecured non-current receivables, the Group does not recognise further losses, unless it has obligations to make or has made payments on behalf of the associate or joint venture.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/11 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

iv. Akuntansi atas entitas asosiasi dan ventura bersama (lanjutan)

- **Metode ekuitas** (lanjutan)

Keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi atau ventura bersama dieliminasi sebesar bagian Grup dalam entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi atau ventura bersama akan disesuaikan, apabila diperlukan, agar konsisten dengan kebijakan akuntansi Grup.

Dividen yang akan diterima dari entitas asosiasi atau ventura bersama diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama. Jika bukti tersebut ada, maka Grup menghitung besarnya penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang terpulihkan dan nilai tercatat atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dan mengakui selisih tersebut pada laba rugi.

- **Pelepasan**

Investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dihentikan pengakuannya apabila Grup tidak lagi memiliki pengaruh signifikan dan Grup mengukur investasi yang tersisa sebesar nilai wajar. Selisih antara jumlah tercatat investasi yang tersisa pada tanggal hilangnya pengaruh signifikan dan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Principles of consolidation *(continued)*

iv. Accounting for associates and joint ventures *(continued)*

- ***Equity method of accounting*** *(continued)*

Unrealised gains on transactions between the Group and its associate or joint venture are eliminated to the extent of the Group's interest in the associate or joint venture. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of impairment of the asset being transferred. The accounting policies of the associate or joint venture have been changed where necessary to ensure consistency with the accounting policies adopted by the Group.

Dividend receivables from an associate or a joint venture are recognised as reductions in the carrying amount of the investment.

At each reporting date, the Group determines whether there is any objective evidence that the investment in an associate or joint venture is impaired. If any such evidence exists, the Group calculates the amount of the impairment as the difference between the recoverable amount of the associate or the joint venture and its carrying amount and recognises the amount in profit or loss.

- ***Disposals***

An investment in an associate or a joint venture is derecognised when the Group loses significant influence and any retained equity interest in the entity is remeasured at its fair value. The difference between the carrying amount of the retained interest at the date when significant influence is lost and its fair value is recognised in profit or loss.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/12 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

iv. Akuntansi atas entitas asosiasi dan ventura bersama (lanjutan)

- **Pelepasan** (lanjutan)

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pelepasan sebagian atau dilusi yang timbul pada investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama dimana pengaruh signifikan masih dipertahankan diakui dalam laba rugi dan hanya suatu bagian proporsional atas jumlah yang telah diakui sebelumnya pada penghasilan komprehensif lain yang direklasifikasi ke laba rugi.

d. Penjabaran mata uang asing

i. Mata uang fungsional dan penyajian

Akun-akun yang disertakan dalam laporan keuangan setiap entitas anggota Grup, diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas tersebut beroperasi ("mata uang fungsional"). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah Indonesia ("Rp"), yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan penyajian Grup.

ii. Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi mata uang fungsional menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, setiap aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing menggunakan kurs yang berlaku pada akhir tahun pelaporan diakui dalam laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, kurs konversi yang digunakan Grup untuk mata uang Dolar Amerika Serikat ("AS$") adalah masing-masing Rp15.592 dan Rp14.269.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Principles of consolidation *(continued)*

iv. Accounting for associates and joint ventures *(continued)*

- ***Disposals*** *(continued)*

Gains and losses arising from the partial disposal or dilution of an investment in an associate and joint venture in which significant influence is retained are recognised in profit or loss, and only a proportionate share of the amount previously recognised in other comprehensive income is reclassified to profit or loss, where appropriate.

d. Foreign currency transactions

i. Functional and presentation currency

Items included in the financial statements of each of the Group's entities, are measured using the currency of the primary economic environment in which the relevant entity operates (the "functional currency"). The consolidated financial statements are presented in Indonesian Rupiah ("Rp"), which is the Company's functional currency and the Group's presentation currency.

ii. Transactions and balances

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates prevailing as at the date of the transactions. As at the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are adjusted to reflect the prevailing exchange rates at such a date. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in profit or loss.

The conversion rates used by the Group on 31 December 2022 and 2021 for United States Dollar ("US$") are Rp15,592 and Rp14,269, respectively.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/13 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Transaksi dengan pihak berelasi

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sesuai yang didefinisikan oleh PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" sebagai berikut:

(a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
  (i) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
  (ii) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
  (iii) Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

(b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
  (i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
  (ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
  (iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
  (iv) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
  (v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
  (vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
  (vii) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

e. Transactions with related parties

The Group has transactions with related parties as defined under SFAS No. 7, "Related Party Disclosures" as follows:

(a) A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
  (i) Has control or joint control over the reporting entity;
  (ii) Has significant influence over the reporting entity; or
  (iii) A member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

(b) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions apply:
  (i) The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
  (ii) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
  (iii) Both entities are joint ventures of the same third party;
  (iv) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
  (v) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of the employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
  (vi) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
  (vii) A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/14 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh Pemerintah. Pemerintah mengacu kepada instansi Pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah termasuk entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

f. Aset keuangan

i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran

Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori berikut ini:

- aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Klasifikasi tersebut tergantung pada model bisnis Grup untuk mengelola aset keuangan dan persyaratan kontraktual arus kas apakah penentuan arus kasnya semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Grup menentukan klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal.

(i). Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Klasifikasi ini berlaku untuk instrumen utang yang dikelola dalam model bisnis "dimiliki untuk mendapatkan arus kas" dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

e. Transactions with related parties *(continued)*

A Government related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by the Government. Government refers to Government agencies and similar bodies whether local, national or international.

Government-related entities include entities that are controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance or Local Governments being the shareholders of the entity or an entity controlled by the Government of the Republic of Indonesia, represented by the Ministry of SOE as shareholder's representative.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.

f. Financial assets

i. Classification, recognition and measurement

The Group classifies its financial assets into the following categories:

- *financial assets measured at amortised cost; and*
- *financial assets measured at fair value either through profit or loss ("FVTPL") or through other comprehensive income ("FVOCI").*

The classification depends on the Group's business model and the contractual terms of the cash flows when determining whether their cash flows are solely payments of principal and interest ("SPPI").

The Group determines the classification of its financial assets at initial recognition.

(i). Financial assets measured at amortised cost

This classification applies to debt instruments which are held under a "hold to collect" business model and which have cash flows that meet the SPPI criteria.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/15 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Aset keuangan (lanjutan)

i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

(i). Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Pada pengakuan awal, piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan, diakui sebesar harga transaksi. Aset keuangan lainnya awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang terkait. Aset keuangan ini selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian pada penghentian atau modifikasi aset keuangan yang dicatat yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada laba rugi.

(ii). Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut. Dalam semua kasus, biaya transaksi dibebankan pada laba rugi:

- Instrumen utang yang tidak memiliki kriteria biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian nilai wajar selanjutnya akan dicatat pada laba rugi.

- Investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dimana pilihan penghasilan komprehensif lain tidak berlaku. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dan penghasilan dividen terkait diakui pada laba rugi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

f. Financial assets *(continued)*

i. Classification, recognition and measurement *(continued)*

(i). Financial assets measured at amortised cost (continued)

At initial recognition, trade receivables that do not have a significant financing component are recognised at their transaction price. Other financial assets are initially recognised at fair value plus related transaction costs. They are subsequently measured at amortised cost using the effective interest method. Any gains or losses on derecognition or modification of a financial asset held at amortised cost are recognised in profit or loss.

(ii). Financial assets measured at FVTPL

The classification applies to the following financial assets. In all cases, transaction costs are immediately expensed in profit or loss:

- *Debt instruments that do not meet the criteria of amortised cost or FVOCI. Subsequent fair value gains or losses are recognised in profit or loss.*

- *Equity investments that are held for trading or where FVOCI election has not been applied. All fair value gains or losses and related dividend income are recognised in profit or loss.*

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/16 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Aset keuangan (lanjutan)

i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

(ii). Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

- Derivatif yang bukan merupakan instrumen lindung nilai. Keuntungan atau kerugian nilai wajar selanjutnya diakui pada laba rugi.

- Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya semata-mata merupakan pembayaran pokok dan bunga.

(iii). Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut ini:

- Instrumen utang yang dikelola dengan model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual dan di mana arus kasnya memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".

  Perubahan nilai wajar aset keuangan ini dicatat pada penghasilan komprehensif lain, kecuali pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga (termasuk biaya transaksi menggunakan metode suku bunga efektif), keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian dan keuntungan dan kerugian dari selisih kurs diakui pada laba rugi. Ketika aset keuangan dihentikan, keuntungan atau kerugian nilai wajar kumulatif yang sebelumnya diakui pada penghasilan komprehensif lain direklasifikasi pada laba rugi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

f. Financial assets *(continued)*

i. Classification, recognition and measurement *(continued)*

(ii). Financial assets measured at FVTPL

- *Derivatives that are not designated as a hedging instrument. All subsequent fair value gains or losses are recognised in profit or loss.*

- *Financial assets with embedded derivatives are considered in their entirety when determining whether their cash flows are SPPI.*

(iii). Financial assets measured at FVOCI

This classification applies to the following financial assets:

- *Debt instruments that are held under a business model where they are held for collection of contractual cash flows and also for sale ("collect and sell") and which have cash flows that meet the SPPI criteria.*

  All movements in the fair value of these financial assets are taken through other comprehensive income, except for the recognition of impairment gains or losses, interest revenue (including transaction costs by applying the effective interest method), gains or losses arising on derecognition and foreign exchange gains and losses that are recognised in profit or loss. When the financial asset is derecognised, the cumulative fair value gains or losses previously recognised in other comprehensive income are reclassified to profit or loss.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/17 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Aset keuangan (lanjutan)

i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

(iii). Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut ini:

- Investasi ekuitas di mana Grup telah memilih tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar dari revaluasi pada penghasilan komprehensif lain.

  Pilihan dapat didasarkan pada investasi individu, namun, tidak berlaku pada investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dari revaluasi investasi ekuitas, termasuk komponen selisih kurs, diakui pada penghasilan komprehensif lain. Ketika investasi ekuitas dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian nilai wajar yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi pada laba rugi. Dividen diakui dalam laba rugi ketika hak untuk menerima pembayaran telah ditetapkan.

Grup mereklasifikasi investasi utang jika dan hanya jika model bisnis untuk mengelola aset tersebut berubah.

ii. Penghentian pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari investasi tersebut telah jatuh tempo atau telah ditransfer dan Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset.

iii. Saling hapus antar instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

f. Financial assets *(continued)*

i. Classification, recognition and measurement *(continued)*

(iii). Financial assets measured at FVOCI

This classification applies to the following financial assets:

- *Equity investments where the Group has irrevocably elected to present fair value gains and losses on revaluation in other comprehensive income.*

  The election can be made for each individual investment; however, it is not applicable to equity investments held for trading. Fair value gains or losses on the revaluation of such equity investments, including any foreign exchange component, are recognised in other comprehensive income. When the equity investment is derecognised, there is no reclassification of fair value gains or losses previously recognised in other comprehensive income to profit or loss. Dividends are recognised in profit or loss when the right to receive payment is established.

The Group reclassifies debt investments, if, and only if, the business model for managing those assets changes.

ii. Derecognition

Financial assets are derecognised when the rights to receive the cash flows from the investments have expired or have been transferred and the Group has transferred substantially all risks and rewards of ownership.

iii. Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amounts are reported in the consolidated statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/18 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Aset keuangan (lanjutan)

iv. Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap tahun pelaporan, Grup menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Grup menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Grup membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat tahun pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Grup menerapkan pendekatan umum dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan. Kerugian kredit ekspektasian dikenali dalam dua tahap. Untuk eksposur kredit yang belum ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal. Kerugian kredit ekspektasian disediakan untuk kerugian kredit yang diakibatkan oleh peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam 12 bulan ke depan (kerugian kredit ekspektasian 12 bulan). Untuk eksposur kredit yang telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diperlukan untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur eksposur, terlepas dari waktu *default* (kerugian kredit ekspektasian seumur hidup).

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

f. Financial assets *(continued)*

iv. Impairment of financial assets

At each reporting date, the Group assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Group uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Group compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and considers reasonable and supportable information, which is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

The Group applies a general approach to calculating the expected credit losses ("ECL") for financial assets. ECLs are recognised in two stages. For credit exposures for which there has not been a significant increase in the credit risk since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). For those credit exposures for which there has been a significant increase in the credit risk since initial recognition, a loss allowance is required for the credit losses that are expected over the remaining life of the exposure, irrespective of the timing of the default (a lifetime ECL).

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/19 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank, dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

h. Piutang usaha

Piutang usaha adalah jumlah terutang dari pelanggan atas listrik atau jasa yang diberikan dalam kegiatan usaha biasa. Piutang non-usaha merupakan jumlah terutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha biasa. Jika piutang diperkirakan tertagih dalam satu tahun atau kurang, piutang tersebut diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang tersebut disajikan sebagai aset tidak lancar pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Piutang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, jika efek pendiskontoan signifikan, dikurangi dengan cadangan kerugian.

Kerugian penurunan nilai piutang disajikan sebagai bagian dari beban usaha pada laba rugi. Jumlah yang selanjutnya dapat dipulihkan kembali atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukukan, dikreditkan terhadap item baris yang sama.

Lihat Catatan 4 untuk informasi lebih lanjut mengenai kebijakan penentuan jumlah cadangan kerugian piutang Grup.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

g. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in banks and time deposits with maturity periods of three months or less at the time of placement that are not used as collateral or are not restricted.

The consolidated statements of cash flows have been prepared using the direct method by classifying the cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

h. Trade receivables

Trade receivables are amounts due from customers for electricity sold or services performed in the ordinary course of business. Non-trade receivables are amounts arising from transactions outside of the ordinary course of business. If the collection of the receivables is expected within one year or less, they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets in the consolidated statements of financial position.

Trade receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, if the impact of discounting is significant, less any loss allowance.

Impairment losses on receivables are presented as part of operating expenses in profit or loss. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the same line item.

See Note 4 for further information regarding the policy on the determination of the amount for the loss allowance on the Group's receivables.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/20 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Persediaan

Persediaan suku cadang, bahan bakar, minyak pelumas, perlengkapan dan bahan pendukung dinilai dengan harga perolehan dikurangi dengan provisi persediaan usang dan bergerak lambat. Harga perolehan ditentukan dengan metode rata-rata bergerak. Provisi persediaan usang dan bergerak lambat ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan pada masa mendatang. Bahan pendukung kegiatan pemeliharaan dicatat sebagai beban pemeliharaan pada periode digunakan.

j. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama periode manfaat dengan menggunakan metode garis lurus.

k. Aset tetap

Grup menganalisis fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis tanah dan hak atas tanah dalam menentukan akuntansi untuk masing-masing tanah dan hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat suatu kejadian atau transaksi ekonomis yang mendasarinya. Jika tanah dan hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar kepada Grup, melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasar, Grup menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut sebagai sewa berdasarkan PSAK No. 73, “Sewa”. Jika tanah dan hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Grup menerapkan PSAK No. 16, “Aset tetap” yaitu tanah dan hak atas tanah diakui sebesar harga perolehan dan tidak disusutkan.

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

i. Inventories

Spare parts, fuel, lubricants, tools and supplies are valued at cost less a provision for obsolete and slow-moving inventory. Cost is determined based on the moving average method. A provision for obsolete and slow-moving inventory is determined on the basis of estimated future usage. Supplies of maintenance materials are charged to maintenance costs in the period in which they are used.

j. Prepaid expenses

Prepaid expenses are amortised over the periods benefited using the straight-line method.

k. Property, plant and equipment

The Group analyses the facts and circumstances for each type of land and land rights in determining the accounting for each of these land and land rights so that it can accurately represents an underlying economic event or transaction. If the land and land rights do not transfer control of the underlying assets to the Group, but give the rights to use the underlying assets, the Group applies the accounting treatment of these transactions as leases under SFAS No. 73, “Leases”. If the land and land rights are substantially similar to land purchases, the Group applies SFAS No. 16, “Property, plant and equipment” under which land and land rights are recognised at cost and not depreciated.

Property, plant and equipment are initially recognised at cost, which comprises the purchase price and any cost directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/21 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Aset tetap (lanjutan)

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama tahun tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama tahun tersebut.

Setelah pengakuan awal, kelas-kelas aset berikut ini yang diukur menggunakan metode revaluasi:
- Tanah dan hak atas tanah;
- Bangunan umum, waduk dan prasarana;
- Instalasi dan mesin pembangkit;
- Perlengkapan transmisi;
- Perlengkapan distribusi;
- Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik; dan
- Material cadang utama.

Kelas aset di atas, disajikan sebesar nilai wajar dikurangi penyusutan dan penurunan nilai. Tanah dan hak atas tanah tidak disusutkan. Penilaian terhadap aset-aset tersebut dilakukan oleh penilai independen eksternal yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya. Aset yang tidak mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan wajib direvaluasi paling kurang setiap 3 (tiga) tahun. Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dieliminasi terhadap nilai tercatat bruto aset, dan nilai netonya disajikan kembali sebesar nilai revaluasi aset tetap.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi aset tetap yang menggunakan model revaluasi dikreditkan pada "surplus revaluasi aset" sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain. Penurunan yang menghapus nilai kenaikan sebelumnya atas aset yang sama dibebankan terhadap "surplus revaluasi aset" sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain termasuk aset yang ditransfer ke aset tidak digunakan dalam operasi; penurunan lainnya dibebankan pada laba rugi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

k. Property, plant and equipment *(continued)*

When applicable, the cost may also comprise the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular year for purposes other than to produce inventories during that year.

After initial recognition, the following classes of assets are measured using the revaluation method:
- *Land and land rights;*
- *Buildings, reservoirs and infrastructure;*
- *Installations and power plants;*
- *Transmissions equipment;*
- *Distribution equipment;*
- *Telecommunications and data processing equipment used for electricity supply; and*
- *Major spare parts.*

The classes of asset above, are shown at fair value less subsequent depreciation and impairment losses. Land and land rights are not depreciated. The valuation of those assets is performed by external independent valuers that are registered with the Financial Services Authority ("FSA"). The valuations are performed with sufficient regularity to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its carrying amount. Assets that do not change significantly in fair value must be re-evaluated at least every 3 (three) years. Any accumulated depreciation at the date of revaluation is eliminated against the gross carrying amount of the asset and the net amount is restated to the revalued amount of the property, plant and equipment.

Increases in the carrying amount arising on revaluation of property, plant and equipment that use a revaluation model are credited to "asset revaluation surplus" as part of other comprehensive income. Decreases that offset previous increases of the same asset are debited against "asset revaluation surplus" as part of other comprehensive income including the assets that are transferred to assets not used in operations; all other decreases are charged to profit or loss.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/22 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Aset tetap (lanjutan)

Aset tetap, disusutkan hingga mencapai estimasi nilai sisa dengan menggunakan metode garis lurus selama masa manfaatnya sebagai berikut:

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

k. Property, plant and equipment *(continued)*

Property, plant and equipment are depreciated to their residual values using the straight-line method over their expected useful lives as follows:

	Tahun/ *Years*	
Bangunan umum, waduk dan prasarana	10 - 50	*Buildings, reservoirs and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	12 - 40	*Installation and power plants*
Perlengkapan transmisi dan distribusi	40	*Transmissions and distribution equipment*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	10	*Telecommunications and data processing equipment*
Perlengkapan umum	5	*General equipment*
Kendaraan bermotor	5	*Motor vehicles*
Material cadang utama	20 - 40	*Major spare parts*

Masa manfaat ekonomis, nilai sisa dan metode penyusutan aset tetap ditelaah, jika diperlukan, setidaknya disesuaikan, pada setiap akhir tahun buku. Dampak dari setiap revisi diakui dalam laba rugi, ketika perubahan terjadi.

The useful lives, residual values and depreciation methods of property, plant and equipment are reviewed and adjusted if appropriate, at the end of each financial year. The effects of any revisions are recognised in profit or loss, when the changes arise.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan apabila nilai tercatat aset lebih besar daripada estimasi jumlah yang dapat dipulihkan (Catatan 3.m).

An asset's carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than its estimated recoverable amount (Note 3.m).

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap diakui sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

The costs of repairs and maintenance are charged to profit or loss as incurred. Subsequent costs that are incurred in order to add, replace part of, or service an item of property, plant and equipment, are recognised as assets if and only if it is probable that the future economic benefits that are associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

Aset tetap yang tidak digunakan lagi atau dijual, nilai tercatatnya dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penghapusan aset tetap tersebut diakui dalam laba rugi.

For property, plant and equipment that can no longer be utilised or sold, the carrying amounts are eliminated from the group of property, plant and equipment. The resulting gains or losses on disposals of property, plant and equipment are recognised in profit or loss.

Jika aset yang direvaluasi dijual, jumlah yang dicatat di dalam ekuitas dipindahkan ke saldo laba.

When revalued assets are sold, the amounts included in equity are transferred to retained earnings.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/23 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Aset tetap (lanjutan)

Aset tidak digunakan dalam operasi terdiri dari aset tetap yang akan dihapuskan dan aset tetap yang sedang diperbaiki. Aset tetap ini disusutkan dengan metode garis lurus dan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap.

Aset dalam pembangunan merupakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan pembangunan aset tetap. Aset dalam pembangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan, termasuk biaya pinjaman selama masa pembangunan dari pinjaman yang digunakan untuk pembangunan, beban penyusutan aset tetap yang digunakan dalam pekerjaan pembangunan dan biaya pengujian ketika aset dapat berfungsi setelah dikurangi penjualan listrik ketika masa uji coba. Aset dalam pembangunan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan. Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

l. Properti investasi

Properti investasi adalah properti (tanah dan hak atas tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi diakui sebagai aset jika, dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

k. Property, plant and equipment *(continued)*

Assets not used in operations consist of property, plant and equipment that will be disposed of and property, plant and equipment that will be repaired. These assets are depreciated using the straight-line method and based on the economic useful lives of the property, plant and equipment.

Construction in progress represents the costs directly attributable to the construction of property, plant and equipment. Construction in progress is stated at cost, which includes borrowing costs during construction on debts incurred to finance the construction, the depreciation of property, plant and equipment used in the construction and the cost of testing whether the asset is functioning properly after deducting sales of electricity during the commissioning period. Construction in progress is transferred to the respective property, plant and equipment account when completed and ready for use. Depreciation is charged from the date on which the assets are ready for use in the manner intended by management.

l. Investment properties

Investment properties are properties (land and land rights or a building or part of a building or both) held by the owner or the lessee under a finance lease to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes; or sale in the daily business activities.

Investment property is recognised as an asset when, and only when it is probable that the future economic benefits that are associated with the investment property will flow to the entity; and the cost of the investment property can be measured reliably.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/24 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

I. Properti investasi (lanjutan)

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

Setelah pengakuan awal, Grup memilih menggunakan model nilai wajar dan mengukur seluruh properti investasi berdasarkan nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar properti investasi diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

Penentuan nilai wajar investasi didasarkan pada penilaian oleh penilai independen yang mempunyai kualifikasi profesional yang telah diakui dan relevan seta memiliki pengalaman terkini di lokasi dan kategori properti investasi yang dinilai. Penilaian ini membentuk dasar untuk nilai tercatat pada laporan keuangan konsolidasian.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan (pada tanggal penerima mendapatkan kontrol) atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset diakui dalam laba rugi pada tahun terjadinya penghentian atau pelepasan. Dalam menentukan nilai pertimbangan dari pelepasan properti investasi, Grup mempertimbangkan dampak dari variabel pertimbangan, adanya komponen pembiayaan yang signifikan, dan pertimbangan utang ke pembeli (jika ada).

Pengalihan dilaksanakan ke (atau dari) properti investasi hanya ketika adanya perubahan pemakaian. Untuk pengalihan dari properti investasi menjadi properti yang ditempati pemilik, biaya yang dianggap untuk akuntansi selanjutnya adalah nilai wajar pada tanggal perubahan pemakaian tersebut. Jika properti yang ditempati pemilik menjadi properti investasi, Grup mengakui properti tersebut sesuai dengan kebijakan yang tercantum pada aset tetap sampai tanggal perubahaan pemakaian.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

I. Investment properties *(continued)*

An investment property shall be measured initially at its cost, comprising its purchase price and any directly attributable expenditure (professional fees for legal services, property transfer taxes and other transaction costs). Transaction costs are included in the initial measurement.

After initial recognition, the Group chooses to use the fair value model and measure all of its investment properties at fair value. Any gain or loss arising from a change in the fair value of investment property is recognised in profit or loss for the period in which it arises.

The fair value of investment property is based on an annual valuation by an independent valuer who holds a recognised and relevant professional qualification and has recent experience in the location and category of the investment property being valued. These valuations form the basis for the carrying amounts in the consolidated financial statements.

Investment properties are derecognised either when they have been disposed of (i.e., at the date the recipient obtains control) or when they are permanently withdrawn from use and no future economic benefit is expected from their disposal. The difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset is recognised in profit or loss in the year of derecognition. In determining the amount of consideration from the derecognition of investment property, the Group considers the effects of variable consideration, existence of a significant financing component, non-cash consideration, and consideration payable to the buyer (if any).

Transfers are made to (or from) investment property only when there is a change in use. For a transfer from investment property to owner-occupied property, the deemed cost for subsequent accounting is the fair value at the date of change in use. If owner-occupied property becomes an investment property, the Group accounts for such property in accordance with the policy stated under property, plant and equipment up to the date of change in use.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/25 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Penurunan nilai aset non-keuangan

Aset yang memiliki masa manfaat yang tidak terbatas, misalnya *goodwill*, tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya setiap tahun atau lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan pada kondisi yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai. Aset yang diamortisasi diuji ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai aset. Dalam menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah dimana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi. Aset non-keuangan selain *goodwill* yang mengalami penurunan nilai diuji setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai.

Pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset selain *goodwill*, diakui jika dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali dilakukan. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi. Pembalikan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset melebihi biaya perolehan disusutkan sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pembalikan dilakukan. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dibalik lagi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

m. Impairment of non-financial assets

Assets that have an indefinite useful life, for example goodwill, are not subject to amortisation but are tested annually for impairment, or more frequently if events or changes in circumstances indicate that they might be impaired. Assets that are subject to amortisation are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognised for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs of disposal and its value-in-use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows. Non-financial assets other than goodwill that suffer impairment are reviewed for a possible reversal of the impairment at each reporting date.

Reversal on impairment losses for assets other than goodwill would be recognised, if and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal on impairment losses will be immediately recognised in profit or loss. The reversal should not result in the carrying amount of an asset exceeding what the depreciated cost would have been had the impairment not been recognised as the date of which the impairment was reversed. Impairment losses relating to goodwill would not be reversed.

n. Utang usaha

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek apabila pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang setelah tanggal pelaporan. Jika tidak, utang usaha tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

n. Trade payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Trade payables are classified as current liabilities if payment is due within one year of the reporting date. If not, they are presented as non-current liabilities.

Trade payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/26 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Sewa

Grup sebagai pesewa

Ketika Grup bertindak sebagai pesewa, Grup akan mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Untuk mengklasifikasi masing-masing sewa, Grup membuat penilaian secara keseluruhan atas apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika penilaian membuktikan hal tersebut, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan; jika tidak, maka diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Pendapatan sewa dari sewa operasi dimana Grup bertindak sebagai pesewa diakui sebagai pendapatan secara garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung awal yang terjadi saat mendapatkan sewa operasi ditambahkan pada nilai tercatat aset pendasar dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan basis yang sama dengan pendapatan sewa. Aset terkait yang disewakan ditampilkan di laporan posisi keuangan berdasarkan sifatnya.

Grup sebagai penyewa

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa dibuat berdasarkan substansi perjanjian itu sendiri dan penilaian apakah pemenuhan atas perjanjian bergantung dari penggunaan aset tertentu atau aset, dan apakah perjanjian memberikan hak untuk menggunakan aset.

Grup menyewa aset tetap tertentu yang kontrak sewanya dibuat untuk periode tetap dari 1 hingga 3 tahun tetapi mungkin memiliki opsi ekstensi. Kontrak dapat berisi komponen sewa dan non-sewa berdasarkan harga relatif yang berdiri sendiri.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

o. Leases

The Group as a lessor

When the Group acts as a lessor, it will classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease.

To classify each lease, the Group makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all of the risks and rewards incidental to the ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is classified as a finance lease; if not, then it is classified as an operating lease.

Lease income from operating leases where the Group is a lessor is recognised in income on a straight-line basis over the lease term. Initial direct costs incurred in obtaining an operating lease are added to the carrying amount of the underlying asset and recognised as expense over the lease term on the same basis as lease income. The respective leased assets are included in the statement of financial statements based on their nature.

The Group as a lessee

Determination of whether an arrangement is, or contains, a lease is made based on the substance of the arrangement and an assessment of whether the fulfilment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets, and the arrangement conveys a right to use the asset.

The Group leases certain property, plant and equipment, for which the rental contracts are typically made for fixed periods of 1 to 3 years but they may have extension options. Contracts may contain both lease and non-lease components based on their relative stand-alone prices.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/27 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai pesewa (lanjutan)

Sewa diakui sebagai aset hak pakai dan liabilitas terkait pada tanggal di mana aset sewaan tersedia untuk digunakan oleh Grup.

Aset dan liabilitas yang timbul dari sewa pada awalnya diukur dengan basis nilai kini. Liabilitas sewa termasuk nilai bersih sekarang dari pembayaran sewa berikut:
- pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi), dikurangi piutang insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang didasarkan pada indeks atau tingkat, pada awalnya diukur menggunakan indeks atau tingkat pada tanggal mulai;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa berdasarkan jaminan nilai residu;
- harga pelaksanaan dari opsi pembelian jika penyewa cukup yakin untuk menggunakan opsi tersebut; dan
- pembayaran penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Grup cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

Pembayaran sewa yang harus dilakukan berdasarkan opsi perpanjangan tertentu juga termasuk dalam pengukuran liabilitas.

Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika tarif tidak dapat segera ditentukan, di mana hal tersebut secara umum terjadi pada sewa dalam Grup, suku bunga pinjaman inkremental penyewa digunakan, yaitu tarif yang harus dibayar oleh penyewa untuk meminjam dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak guna dalam lingkungan ekonomi serupa dengan syarat dan ketentuan yang serupa.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

o. Leases *(continued)*

The Group as a lessor *(continued)*

Leases are recognised as a right-of-use asset and a corresponding liability at the date on which the leased asset is available for use by the Group.

Assets and liabilities arising from a lease are initially measured on a present value basis. Lease liabilities include the net present value of the following lease payments:
- *fixed payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives receivable;*
- *variable lease payments that are based on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;*
- *amounts expected to be payable by the lessee under residual value guarantees;*
- *the exercise price of a purchase option if the lessee is reasonably certain to exercise that option; and*
- *penalty payments for early termination of a lease unless the Group is reasonably certain not to terminate early.*

Lease payments to be made under reasonably certain extension options are also included in the measurement of the liability.

The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease. If the rate cannot be readily determined, which is generally the case for leases in the Group, the lessee's incremental borrowing rate is used, being the rate that the individual lessee would have to pay to borrow the funds necessary to obtain an asset of similar value to the right-of-use asset in a similar economic environment with similar terms, security and conditions.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/28 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Untuk menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup:
- jika memungkinkan, menggunakan pembiayaan pihak ketiga terkini yang diterima oleh penyewa individu sebagai titik awal, disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kondisi pembiayaan sejak pembiayaan pihak ketiga diterima;
- menggunakan pendekatan *build-up* yang dimulai dengan suku bunga bebas risiko yang disesuaikan dengan risiko kredit untuk sewa yang dimiliki oleh Grup, yang tidak memiliki pembiayaan pihak ketiga baru-baru ini; dan
- membuat penyesuaian spesifik untuk sewa, misalnya jangka waktu, mata uang dan keamanan.

Grup dihadapkan pada potensi kenaikan di masa depan dalam pembayaran sewa variabel berdasarkan indeks atau tarif, yang tidak termasuk dalam liabilitas sewa sampai diberlakukan. Ketika penyesuaian pembayaran sewa berdasarkan indeks atau suku bunga mulai berlaku, liabilitas sewa dinilai kembali dan disesuaikan dengan aset hak guna.

Pembayaran sewa dialokasikan antara biaya pokok dan keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laporan laba rugi selama masa sewa sehingga menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas sisa saldo liabilitas untuk setiap tahun.

Aset hak guna diukur pada biaya perolehan yang terdiri dari berikut ini:
- jumlah pengukuran awal liabilitas sewa;
- pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal dimulainya dikurangi insentif sewa yang diterima;
- biaya langsung awal; dan
- biaya restorasi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

o. Leases *(continued)*

The Group as a lessee *(continued)*

To determine the incremental borrowing rate, the Group:
- *where possible, uses recent third-party financing received by the individual lessee as a starting point, adjusted to reflect changes in financing conditions since third party financing was received;*
- *uses a build-up approach that starts with a risk-free interest rate adjusted for credit risk for leases held by the Group, which does not have recent third-party financing; and*
- *makes adjustments specific to the lease, e.g. term, currency and security.*

The Group is exposed to potential future increases in variable lease payments based on an index or rate, which are not included in the lease liability until they take effect. When adjustments to lease payments based on an index or rate take effect, the lease liability is reassessed and adjusted against the right-of-use asset.

Lease payments are allocated between principal and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each year.

Right-of-use assets are measured at cost comprising the following:
- *the amount of the initial measurement of the lease liability;*
- *any lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received;*
- *any initial direct costs; and*
- *restoration costs.*

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/29 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Aset hak guna umumnya disusutkan sepanjang waktu yang lebih pendek antara lama masa manfaat aset dan jangka waktu sewa menggunakan metode garis lurus. Jika Grup cukup yakin untuk melaksanakan opsi pembelian, aset hak guna disusutkan selama masa manfaat aset yang mendasarinya.

Aset hak guna juga mengalami penurunan nilai (Catatan 3.m).

Pembayaran terkait dengan sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah diakui atas dasar garis lurus sebagai beban dalam laporan laba rugi. Sewa jangka pendek adalah sewa dengan masa sewa 12 bulan atau kurang. Aset bernilai rendah terdiri dari perlengkapan umum.

Grup menyajikan aset hak guna sebagai bagian dari "Aset tetap" di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Opsi perpanjangan dan terminasi

Opsi perpanjangan dan terminasi termasuk dalam sejumlah sewa properti dan peralatan di seluruh Grup. Istilah-istilah ini digunakan untuk memaksimalkan fleksibilitas operasional dalam hal pengelolaan kontrak. Mayoritas opsi perpanjangan dan terminasi yang dimiliki hanya dapat dilaksanakan oleh Grup dan bukan oleh pemberi sewa masing-masing.

Modifikasi sewa

Grup mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

o. Leases *(continued)*

The Group as a lessee *(continued)*

Right-of-use assets are generally depreciated over the shorter of the asset's useful life and the lease term on a straight-line basis. If the Group is reasonably certain to exercise a purchase option, the right-of-use asset is depreciated over the underlying assets's useful life.

The right-of-use assets are also subject to impairment (Note 3.m).

Payments associated with short-term leases and leases of low-value assets are recognised on a straight-line basis as an expense in profit or loss. Short-term leases are leases with a lease term of 12 months or less. Low-value assets comprise general equipment.

The Group presents right-of-use assets as part of "Property, plant and equipment" in the consolidated statement of financial position.

Extension and termination options

Extension and termination options are included in a number of property and equipment leases across the Group. These terms are used to maximise operational flexibility in terms of managing contracts. The majority of the extension and termination options that are held are exercisable only by the Group and not by the respective lessor.

Lease modification

The Group accounts for a lease modification as a separate lease if both:

- *the modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and*
- *the consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.*

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/30 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Sewa (lanjutan)

Modifikasi sewa (lanjutan)

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Grup:

- mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- menentukan masa sewa dari sewa modifikasian; dan
- mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga implisit dalam sewa untuk sisa masa sewa, jika dapat ditentukan; atau suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal efektif modifikasi, jika suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, penyewa mencatat pengukuran kembali liabilitas sewa dengan:

- menurunkan jumlah tercatat aset hak guna untuk merefleksikan penghentian parsial atau penuh sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Penyewa mengakui dalam laba rugi setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan penghentian parsial atau penuh sewa tersebut.
- membuat penyesuaian terkait dengan aset hak guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

p. Biaya pinjaman

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti biaya diskonto pinjaman baik yang secara langsung atau tidak langsung digunakan untuk pendanaan konstruksi aset kualifikasian, dikapitalisasi hingga aset tersebut selesai dikonstruksi. Untuk biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung pada aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dari biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode berjalan, dikurangi penghasilan yang diperoleh dari investasi sementara atas dana hasil pinjaman tersebut. Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusikan secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi terhadap jumlah yang dikeluarkan untuk memperoleh aset kualifikasian. Tingkat kapitalisasi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang biaya pinjaman yang dibagi dengan jumlah pinjaman yang tersedia selama tahun berjalan, selain pinjaman yang secara spesifik diambil untuk tujuan memperoleh suatu aset kualifikasian.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

o. Leases *(continued)*

Lease modification (continued)

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, at the effective date of the lease modification, the Group:

- *allocates the consideration in the modified contract;*
- *determines the lease term of the modified lease; and*
- *remeasures the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate. The revised discount rate is determined as the interest rate implicit in the lease for the remainder of the lease term, if that rate can be readily determined, or the lessee's incremental borrowing rate at the effective date of the modification, if the interest rate implicit in the lease cannot be readily determined.*

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, the lessee shall account for the remeasurement of the lease liability by:

- *decreasing the carrying amount of the right-of-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The lessee shall recognise in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease.*
- *making a corresponding adjustment to the right-of-use asset for all other lease modifications.*

p. Borrowing costs

Interest and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalised up to the date when construction is complete. For borrowings that are directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined as the actual borrowing cost incurred during the period, less any income earned on the temporary investment of such borrowings. For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined by applying a capitalisation rate to the amount expended on the qualifying assets. The capitalisation rate is the weighted average of the total borrowing costs applicable to the total borrowings outstanding during the year, other than borrowings made specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/31 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya memperoleh pinjaman ditangguhkan sampai penarikan pinjaman terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya memperoleh pinjaman dikapitalisasi sebagai pembayaran di muka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

Biaya pinjaman akan dihentikan pengakuannya dari laporan posisi keuangan ketika kewajiban yang tertulis pada kontrak dibatalkan, atau sudah tidak berlaku. Selisih antara nilai tercatat dari liabilitas keuangan yang sudah berakhir atau dialihkan ke pihak lain dan imbalan yang dibayarkan, termasuk aset non-kas yang dialihkan atau liabilitas yang ditanggung, dialui dalam laba rugi sebagai pendapatan lain-lain atau biaya keuangan.

Ketika liabilitas keuangan dinegosiasikan kembali dan entitas mengeluarkan instrumen ekuitas kepada kreditor untuk menyelesaikan seluruh atau sebagian liabilitas (*debt for equity swap*), keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi yang dicatat sebagai selisih antara jumlah tercatat dari liabilitas keuangan.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Grup memiliki hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran liabilitas selama paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

q. Borrowings

Borrowings are recognised initially at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortised cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in profit or loss over the period of the borrowings using the effective interest method.

Fees paid on the establishment of loan facilities are recognised as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawn down. In this case, the fee is deferred until the draw-down occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawn down, the fee is capitalised as a pre-payment for liquidity services and amortised over the period of the facility to which it relates.

Borrowings are removed from the statement of financial position when the obligation specified in the contract is discharged, cancelled or expired. The difference between the carrying amount of a financial liability that has been extinguished or transferred to another party and the consideration paid, including any non-cash assets transferred or liabilities assumed, is recognised in profit or loss as other income or finance costs.

Where the terms of a financial liability are renegotiated and the entity issues equity instruments to a creditor to extinguish all or part of the liability (debt for equity swap), a gain or loss is recognised in profit or loss, which is measured as the difference between the carrying amount of the financial liability and the fair value of the equity instruments issued.

Loans are classified as current liabilities unless the Group has an unconditional right to defer payment of the liability for at least 12 months after the reporting date.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/32 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Provisi

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Grup diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi diukur pada nilai kini dari estimasi terbaik manajemen atas pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir tahun pelaporan. Tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai kini adalah tingkat diskonto sebelum pajak, yang mencerminkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan liabilitas tersebut. Peningkatan provisi sehubungan dengan berlalunya waktu diakui sebagai beban keuangan.

Jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diganti oleh pihak ketiga, maka penggantian itu diakui hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti akan diterima jika entitas menyelesaikan kewajiban. Penggantian tersebut diakui sebagai aset yang terpisah. Jumlah yang diakui sebagai penggantian tidak boleh melebihi nilai provisi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

r. Provisions

Provisions are recognised when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event and it is probable that the Group will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The provision is measured at the present value of the management's best estimate of the expenditure required to settle the present obligation at the end of the reporting date. The discount rate used to determine the present value is a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the liabilities. The increase in the provision due to the passage of time is recognised as interest expense.

Where some or all of the expenditure required to settle a provision is expected to be reimbursed by another party, the reimbursement shall be recognised when, and only when, it is virtually certain that reimbursement will be received if the entity settles the obligation. The reimbursement shall be treated as a separate asset. The amount recognised for the reimbursement shall not exceed the amount of the provision.

s. Imbalan kerja

Imbalan pascakerja

Skema pensiun diklasifikasikan sebagai program iuran pasti atau program manfaat pasti, tergantung pada substansi ekonomi dari syarat dan kondisi utama program tersebut. Program iuran pasti adalah program pensiun yang mewajibkan Grup membayar sejumlah iuran tertentu kepada entitas terpisah. Grup tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika entitas tersebut tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan atas jasa yang diberikan pekerja pada tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya. Program manfaat pasti adalah program pensiun yang bukan merupakan program iuran pasti. Program manfaat pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima seorang pekerja pada saat pensiun, biasanya berdasarkan pada satu atau lebih faktor seperti usia, masa kerja, dan kompensasi.

s. Employee benefits

Post-employment benefits

Pension schemes are classified as either defined contribution plans or defined benefit plans, depending on the economic substance of the plan as derived from its principal terms and conditions. A defined contribution plan is a pension plan under which the Group pays fixed contributions into a separate entity. The Group has no legal or constructive obligations to pay further contributions if the fund does not hold sufficient assets to pay all employees the benefits relating to employee service in the current and prior years. A defined benefit plan is a pension plan that is not a defined contribution plan. Typically, defined benefit plans define an amount of pension benefit that an employee will receive upon retirement, which is usually dependent on one or more factors such as age, years of service and compensation.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/33 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Grup harus mencadangkan jumlah minimal imbalan pensiun sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan atau Perjanjian Kerja Bersama ("PKB") atau Peraturan Perusahaan ("PP"), mana yang lebih tinggi. Karena Peraturan Ketenagakerjaan atau PKB menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya, program pensiun berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan atau PKB adalah program manfaat pasti.

Sehubungan dengan program manfaat pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian setara dengan nilai kini kewajiban manfaat pasti pada akhir tahun pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban manfaat pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Imbalan pascakerja terdiri dari imbalan pesangon dan penghargaan purna jabatan.

Nilai kini kewajiban manfaat pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga obligasi korporat berkualitas tinggi dalam denominasi mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun. Apabila tidak terdapat pasar aktif untuk obligasi korporat tersebut, digunakan bunga obligasi Pemerintah.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program manfaat pasti diakui pada saat kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Pengukuran kembali yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi-asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan pada ekuitas dalam laporan penghasilan komprehensif lain pada tahun dimana beban tersebut terjadi. Akumulasi saldo pengukuran kembali dilaporkan di saldo laba.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

s. Employee benefits *(continued)*

Post-employment benefits (continued)

The Group is required to provide a minimum amount of pension benefit in accordance with Manpower Regulation or the Group's Collective Labour Agreement (the "CLA") or Company Regulation ("CR"), whichever is higher. Since the Manpower Regulation or the CLA sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the Manpower Regulation or the CLA represent defined benefit plans.

The liability recognised in the consolidated statement of financial position with respect to the defined benefit pension plans is equivalent to the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting year less the fair value of the plan's assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. Post-employment benefits consist of severance benefits and employment awards.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using the interest rates of high quality corporate bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms of maturity approximating the terms of the related pension obligations. When there is no deep market for such bonds, the market rates of Government bonds are used.

Past service costs are recognised immediately in profit or loss. Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognised when the curtailment or settlement occurs.

Remeasurements arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in the statement of other comprehensive income in the year in which they arise. The accumulated remeasurements balance is reported in retained earnings.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/34 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Untuk program iuran pasti, Grup membayar iuran kepada dana pensiun yang dikelola oleh publik atau swasta, dengan dasar wajib, kontraktual dan sukarela. Grup tidak memiliki kewajiban membayar lebih lanjut jika iuran tersebut telah dibayarkan. Iuran tersebut diakui sebagai beban imbalan kerja ketika jatuh tempo. Iuran dibayar dimuka diakui sebagai aset sepanjang pengembalian dana atau pengurangan pembayaran masa depan dimungkinkan.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Grup memberikan imbalan pascakerja lainnya seperti uang cuti besar, tunjangan kecelakan dinas, bantuan kematian dan penghargaan kesetiaan kerja. Nilai imbalan yang diberikan didasari pada PKB.

Cuti besar diberikan kepada karyawan yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 tahun terus menerus. Tunjangan kecelakaan dinas diberikan kepada karyawan yang mengalami kecelakaan dinas. Bantuan kematian diberikan kepada ahli waris bagi karyawan yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja maupun tidak. Penghargaan kesetiaan kerja diberikan setiap delapan tahun bagi pegawai yang telah bekerja selama 16 tahun terus menerus.

Perhitungan imbalan kerja jangka panjang ditentukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan kerja jangka panjang di laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan nilai kini liabilitas imbalan kerja pasti.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

s. Employee benefits *(continued)*

Post-employment benefits (continued)

For defined contribution plans, the Group pays contributions to public or private pension plans on a mandatory, contractual or voluntary basis. The Group has no further payment obligations once the contributions have been paid. The contributions are recognised as employee benefit expenses when they become due. Prepaid contributions are recognised as an asset to the extent that a cash refund or reduction in future payments is available.

Other long-term benefits

The Group provides other long-term employee benefits such as long leave allowance, disability benefit, death benefit and loyalty benefit. The benefits that are paid are based on the CLA.

Long leave allowance is given to employees who have worked for at least 6 years continuously. Disability benefit is provided to employees who have a work accident. Death benefit is provided to the heirs whether or not the employee passes away as a result of a work accident. Loyalty benefit is given every eight years for employees who have worked for 16 years continuously.

Long-term benefits are determined using the Projected Unit Credit Method. The long-term employee benefits liabilities that are recognised in the consolidated statement of financial position represent the present value of the defined benefit obligation.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/35 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Imbalan kerja (lanjutan)

Pesangon pemutusan kontrak kerja

Pesangon pemutusan kontrak kerja dibayarkan ketika pekerja diberhentikan, atau ketika pekerja menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela. Grup mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja pada tanggal yang lebih dahulu dari: (i) ketika Grup tidak bisa lagi membatalkan penawaran pesangon; dan (ii) ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam lingkup PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi" dan melibatkan pembayaran pesangon pemutusan kontrak kerja. Dalam hal penawaran pengunduran diri secara sukarela, pesangon pemutusan kontrak kerja diukur berdasarkan ekspektasi jumlah karyawan yang menerima penawaran tersebut. Pesangon pemutusan kontrak kerja yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan didiskontokan ke nilai kini.

t. Modal saham

Saham biasa dikelompokkan sebagai ekuitas, dan biaya langsung yang berkaitan dengan penerbitan saham baru atau opsi disajikan sebagai pengurang ekuitas, setelah dikurangi pajak, dari jumlah yang diterima.

u. Pembagian dividen

Pembagian dividen kepada pemegang saham Perusahaan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dalam periode ketika pembagian dividen telah diumumkan.

v. Pengakuan pendapatan dan beban

Pengakuan pendapatan

Pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 (lima) langkah penilaian sebagai berikut:

i. Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
ii. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

s. Employee benefits *(continued)*

Termination benefits

Termination benefits are payable when employment is terminated by the Group before the normal retirement date, or when an employee accepts voluntary redundancy in exchange for certain benefits. The Group recognises termination benefits at the earlier of the following dates: (i) when the Group can no longer withdraw the offer of those benefits; and (ii) when the Group recognises costs for a restructuring that is within the scope of SFAS No. 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" that involve the payment of termination benefits. In the case of an offer made to encourage voluntary redundancy, the termination benefits are measured based on the number of employees who are expected to accept the offer. Benefits falling due more than 12 months after the reporting date are discounted to their present value.

t. Share capital

Ordinary shares are classified as equity, and incremental costs directly attributable to the issuance of new shares or options are shown in equity as a deduction, net of tax, from the proceeds.

u. Dividend distributions

Dividend distributions to the Company's shareholders are recognised as liabilities in the consolidated financial statements in the period when the dividends are declared.

v. Revenue and expense recognition

Revenue recognition

Revenue recognition has to fulfil 5 (five) steps of assessment as follows:

i. Identify contract(s) with a customer;
ii. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct;

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/36 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

v. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pengakuan pendapatan (lanjutan)

Pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 (lima) langkah penilaian sebagai berikut: (lanjutan)

iii. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak;

iv. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin; dan

v. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu tertentu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- Sepanjang waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam sepanjang waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

v. Revenue and expense recognition *(continued)*

Revenue recognition *(continued)*

Revenue recognition has to fulfil 5 (five) steps of assessment as follows: (continued)

iii. Determine the transaction price. The transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer. If the consideration that is promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee that will be paid during the contract period;

iv. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct good or service promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative standalone selling prices are estimated based on expected cost plus margin; and

v. Recognise revenue when the performance obligation is satisfied by transferring the promised good or service to the customer (which is when the customer obtains control of that good or those services).

A performance obligation may be satisfied at the following:

- *A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or*
- *Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognised as the performance obligation is satisfied.*

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/37 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

v. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pengakuan pendapatan (lanjutan)

Dalam hal kontrak harga tetap, pelanggan membayar jumlah tetap berdasarkan jadwal pembayaran. Jika jasa yang diberikan oleh Grup melebihi pembayaran, maka aset kontrak diakui. Jika pembayaran melebihi jasa yang diberikan, liabilitas kontrak diakui.

Penjualan tenaga listrik

Pendapatan penjualan listrik diakui berdasarkan pemakaian energi listrik (kWh) yang dipasok kepada PLN dengan menggunakan formula tarif yang ditetapkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. Formula tarif mencakup perhitungan komponen harga kapasitas, harga tetap operasi dan pemeliharaan, harga bahan bakar, tingkat pasokan energi serta variabel lainnya.

Grup mengakui pendapatan atas kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dalam sepanjang waktu ketika listrik dikonsumsi oleh PLN.

Pendapatan jasa pemeliharaan dan operasi, pembangunan pembangkit tenaga listrik dan jasa lainnya

Grup mengakui pendapatan atas kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dalam sepanjang waktu hanya jika Grup dapat mengukur dengan andal atas penyelesaian kewajiban pelaksanaan. Dalam keadaan tertentu, Grup mungkin tidak dapat mengukur hasil atas kewajiban pelaksanaan secara wajar, tetapi Grup berekspektasi untuk memulihkan biaya yang timbul dalam memenuhi kewajiban pelaksanaan. Dalam keadaan tersebut, Grup mengakui pendapatan hanya sebatas biaya yang timbul sampai saat yang dapat mengukur hasil kewajiban pelaksanaan secara wajar.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

v. Revenue and expense recognition *(continued)*

Revenue recognition *(continued)*

In the case of fixed-price contracts, the customer pays a fixed amount based on a payment schedule. If the services rendered by the Group exceed the payment, a contract asset is recognised. If the payments exceed the services rendered, a contract liability is recognised.

Sales of electricity

Revenue from sales of electricity is recognised based on electricity usage (kWh) to PLN using the tariff formula stipulated in the power purchase agreements. The tariff formula includes the calculation of the capacity component, the fixed cost for operations and maintenance components, the fuel costs, power supply levels and other variables.

The Group recognises revenue for a performance obligation satisfied over time when electricity is consumed by PLN.

Rendering of services on maintenance and operation, power plant construction and other services

The Group recognises revenue for a performance obligation satisfied over time only if the Group can reasonably measure its progress towards the complete satisfaction of the performance obligation. In some circumstances, the Group may not be able to reasonably measure the outcome of a performance obligation, but the Group expects to recover the costs that have been incurred in satisfying the performance obligation. In those circumstances, the Group recognises revenue only to the extent of the costs that have been incurred until such a time that it can reasonably measure the outcome of the performance obligation.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/38 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

v. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pengakuan pendapatan (lanjutan)

Pendapatan jasa pemeliharaan dan operasi, pembangunan pembangkit tenaga listrik dan jasa lainnya (lanjutan)

Pendapatan jasa diakui atas dasar pekerjaan yang diselesaikan dalam sepanjang waktu pada saat jasa tersebut diberikan kepada pelanggan.

Komponen pembiayaan

Grup tidak memperkirakan adanya kontrak di mana jangka waktu antara pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dan pembayaran oleh pelanggan melebihi satu tahun. Akibatnya, Grup tidak menyesuaikan harga transaksi apa pun dengan nilai waktu uang.

Pengakuan beban

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

w. Pajak penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laba rugi, kecuali jika pajak itu terkait dengan kejadian atau transaksi yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, beban pajak tersebut masing-masing diakui pada penghasilan komprehensif lain atau secara langsung dicatat ke ekuitas.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

v. Revenue and expense recognition *(continued)*

Revenue recognition *(continued)*

Rendering of services on maintenance and operation, power plant construction and other services (continued)

Revenue from services is recognised on the basis of the work that is completed over time as the services are rendered to the customers.

Financing component

The Group does not expect to have any contracts where the period between the transfer of the promised goods or services to the customer and the payment by the customer exceeds one year. As a consequence, the Group does not adjust any of the transaction prices for the time value of money.

Expense recognition

Expenses are recognised as incurred on an accrual basis.

w. Income tax

Tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax expense is recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/39 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

w. Pajak penghasilan (lanjutan)

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan dan dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang diambil dalam Surat Pemberitahuan Tahunan sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi atas peraturan pajak yang berlaku. Jika perlu, manajemen menentukan provisi dibentuk berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar pada otoritas pajak.

Untuk pendapatan yang menjadi subjek pajak penghasilan final, beban pajak diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan akuntansi yang diakui dan disajikan dalam sebagai bagian dari akun beban operasional pada tahun berjalan dikarenakan pajak tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai pajak penghasilan.

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan konsolidasian. Namun, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika timbul dari pengakuan awal *goodwill*; atau pada saat pengakuan awal suatu aset atau liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi maupun laba rugi kena pajak. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada akhir tahun pelaporan dan diharapkan diterapkan jika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasikan atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat digunakan.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

w. Income tax *(continued)*

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws that have been enacted as at the reporting date and computed using the prevailing tax rates. Management periodically evaluates the positions taken in Annual Tax Returns with respect to situations in which the applicable tax regulations are subject to interpretation. It establishes a provision where appropriate on the basis of the amounts expected to be paid to the tax authorities.

For income that is subject to final tax, tax expenses are recognised proportionally with the accounting revenue that is recognised and presented as part of the operating expenses account in the current year as such tax does not satisfy the criteria of income tax.

Deferred income tax is recognised, using the liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognised if they arise from the initial recognition of goodwill; deferred income tax is not accounted for if it arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using the tax rates that have been enacted or substantially enacted at the end of the reporting year and that are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the temporary differences can be utilised.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/40 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

w. Pajak penghasilan (lanjutan)

Liabilitas dan aset pajak tangguhan tidak diakui untuk perbedaan temporer antara nilai tercatat dan dasar pengenaan pajak atas investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama dimana Grup dapat mengendalikan waktu pembalikan perbedaan temporer dan kemungkinan besar perbedaan tersebut tidak akan dibalik di masa mendatang.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus jika terdapat hak yang berkekuatan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

w. Income tax *(continued)*

Deferred tax liabilities and assets are not recognised for temporary differences between the carrying amount and tax bases of investments in associates and joint ventures where the Group is able to control the timing of the reversal of the temporary differences and it is probable that the differences will not be reversed in the foreseeable future.

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities.

4. PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING DAN ESTIMASI AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi, pertimbangan dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal pelaporan, serta jumlah pendapatan dan beban selama tahun pelaporan. Estimasi, asumsi, dan pertimbangan tersebut dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya, termasuk harapan peristiwa di masa datang yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

Grup telah mengidentifikasi hal-hal berikut dimana diperlukan pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan dan dimana hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut jika menggunakan asumsi dan kondisi yang berbeda dan dapat mempengaruhi secara material hasil keuangan atau posisi keuangan konsolidasian Grup yang dilaporkan dalam tahun mendatang.

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS AND ACCOUNTING ESTIMATES

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make estimates, judgements and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and the disclosure of contingent assets and liabilities at the reporting date and the reported amounts of revenue and expenses during the reporting year. Estimates, assumptions and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

The Group has identified the following matters under which significant judgements, estimates and assumptions are made and where actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions and may materially affect the consolidated financial results or financial position of the Group as reported in future years.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/41 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING DAN ESTIMASI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan dalam penerapan kebijakan akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 3, Grup telah menentukan hal-hal berikut yang memerlukan pertimbangan signifikan:

Kepentingan dalam pengaturan bersama

Pertimbangan diperlukan untuk menentukan ketika Grup memiliki pengendalian bersama, yang membutuhkan penilaian mengenai aktivitas yang relevan dan ketika keputusan yang berkaitan dengan aktivitas tersebut membutuhkan persetujuan dengan suara bulat. Grup menentukan bahwa aktivitas yang relevan untuk pengaturan bersama adalah aktivitas yang berkaitan dengan operasi dan pengambilan keputusan dalam pengaturan tersebut.

Pertimbangan juga diperlukan untuk mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai pengendalian bersama atau ventura bersama. Pengklasifikasian pengaturan tersebut mengharuskan Grup untuk menilai hak dan kewajiban yang timbul dari pengaturan tersebut. Secara khusus, Grup mempertimbangkan hal berikut ini:

- Struktur dari pengaturan bersama - apakah dibentuk melalui kendaraan terpisah;
- Ketika pengaturan tersebut terstruktur melalui kendaraan terpisah, Grup juga mempertimbangkan hak dan kewajiban yang timbul dari:
  - bentuk legal dari kendaraan terpisah;
  - persyaratan dari perjanjian kontraktual; dan
  - fakta dan kondisi lain (ketika relevan).

Penilaian ini sering membutuhkan pertimbangan yang signifikan. Kesimpulan yang berbeda mengenai pengendalian bersama dan apakah suatu pengaturan adalah sebuah operasi bersama atau ventura bersama, dapat memiliki dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Grup memiliki pengaturan bersama yang terstruktur melalui ventura bersama. Struktur dan persyaratan dari perjanjian kontraktual mengindikasikan bahwa Grup memiliki hak atas aset bersih dari pengaturan bersama tersebut. Grup menilai fakta dan kondisi lain yang berkaitan dengan pengaturan ini dan kesimpulan final dari penilaian yang dilakukan adalah pengaturan tersebut merupakan ventura bersama (Catatan 14).

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES *(continued)*

Judgements in applying accounting policies

In the process of applying the accounting policies described in Note 3, the Group has identified the following matters under which significant judgements are made:

Interest in joint arrangements

Judgement is required to determine when the Group has joint control, which requires an assessment of the relevant activities and when the decisions in relation to those activities require unanimous consent. The Group has determined that the relevant activities for its joint arrangements are those relating to the operating and capital decisions of the arrangement.

Judgement is also required to classify a joint arrangement as either a joint operation or a joint venture. Classifying the arrangement requires the Group to assess its rights and obligations arising from the arrangement. Specifically, it considers the following:

- *The structure of the joint arrangement - whether it is structured through a separate vehicle;*
- *When the arrangement is structured through a separate vehicle, the Group also considers the rights and obligations arising from:*
  - *the legal form of the separate vehicle;*
  - *the terms of the contractual arrangement; and*
  - *other facts and circumstances (when relevant).*

This assessment often requires significant judgement. A different conclusion on joint control and also whether the arrangement is a joint operation or a joint venture, may materially impact the consolidated financial statements.

The Group has joint arrangements which are structured through joint ventures. These structures and the terms of the contractual arrangements indicate that the Group has rights to the net assets of the arrangements. The Group also assessed the other facts and circumstances relating to these arrangements and concluded final conclusions were that the arrangements are joint ventures (Note 14).

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/42 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING DAN ESTIMASI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Sumber ketidakpastian estimasi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi lainnya pada akhir tahun pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam tahun pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

Provisi atas kerugian kredit ekspektasian piutang usaha dan aset keuangan lainnya

Dalam menentukan kerugian kredit ekspektasian piutang, manajemen diharuskan untuk melakukan pertimbangan dalam menentukan apa yang dianggap sebagai peningkatan risiko kredit yang signifikan dan dalam membuat asumsi dan estimasi untuk memasukkan informasi yang relevan tentang peristiwa masa lalu, kondisi saat ini dan prakiraan kondisi ekonomi. Pertimbangan telah diterapkan dalam menentukan umur dan titik pengakuan awal piutang.

Tingkat penyisihan tertentu dievaluasi oleh manajemen berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kolektibilitas akun. Dalam kasus ini, Grup menggunakan penilaian berdasarkan fakta dan keadaan terbaik yang tersedia, termasuk hubungan dengan status kredit pelanggan berdasarkan laporan kredit pihak ketiga dan faktor pasar yang diketahui, untuk mencatat cadangan khusus untuk pelanggan terhadap jumlah yang jatuh tempo dalam jumlah yang diharapkan dapat diterima. Cadangan spesifik ini dievaluasi ulang dan disesuaikan karena informasi tambahan yang diterima mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES *(continued)*

Sources of estimation uncertainty

The key assumptions concerning the future and the other key sources of estimation at the end of the reporting year, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are discussed below:

Provision for expected credit losses of trade receivables and other financial assets

In determining ECL, management is required to exercise judgement in defining what is considered to be a significant increase in credit risk and in making assumptions and estimates to incorporate relevant information about past events, current conditions and forecasts of economic conditions. Judgement has been applied in determining the lifetime and point of initial recognition of receivables.

The level of a specific provision is evaluated by management on the basis of factors that affect the collectability of the accounts. In these cases, the Group uses judgement based on the best available facts and circumstances, including but relationship with the customers credits status based on third-party credit reports and known market factors, to record specific reserves for customers against amounts due in amounts that it expects to collect. These specific reserves are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts estimated.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/43 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING DAN ESTIMASI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Sumber ketidakpastian estimasi (lanjutan)

Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap

Masa manfaat setiap aset tetap Grup, ditentukan berdasarkan periode kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi di masa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan beban yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan nilai tercatat aset tetap.

Nilai wajar aset tetap dan properti investasi yang menggunakan model revaluasi

Dalam proses penilaian, manajemen, dengan bantuan penilai independen, menentukan data dan asumsi, menelaah metode penilaian serta berdiskusi dengan penilai. Pendekatan dan metode yang digunakan dalam melakukan revaluasi tergantung pada kelas aset. Walaupun data dan asumsi Grup dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada data input atau asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap nilai aset yang menggunakan model revaluasi.

Rincian dari pendekatan dan data input signifikan yang digunakan dalam melakukan revaluasi aset tetap dan properti investasi diungkapkan masing-masing dalam Catatan 12 dan 13.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES *(continued)*

Sources of estimation uncertainty *(continued)*

Estimated useful lives of property, plant and equipment

The useful life of each item of the Group's property, plant, and equipment is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of property, plant and equipment would affect the recorded depreciation expense and the carrying values of property, plant and equipment.

Fair value of property, plant and equipment and investment properties that use revaluation model

Management, with the assistance of an independent valuer, determines the data inputs and assumptions, assesses the valuation methods and holds discussions with the valuers as part of the valuation process. The approaches and methods used in the revaluation depend on the asset class. While it is believed that the Group's data and assumptions are reasonable and appropriate, significant changes in data inputs or significant changes in assumptions may materially affect the value of assets that use the revaluation model.

Details of the valuation approach and significant data inputs used in the revaluation of property, plant and equipment and investment properties are disclosed in Notes 12 and 13, respectively.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/44 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING DAN ESTIMASI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Sumber ketidakpastian estimasi (lanjutan)

Imbalan pascakerja

Nilai kini kewajiban pensiun tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan berdasarkan basis dari aktuaria dengan menggunakan sejumlah asumsi. Asumsi yang digunakan dalam menentukan beban/(pendapatan) bersih untuk pensiun termasuk tingkat diskonto, perubahan remunerasi masa depan, tingkat pengurangan karyawan, tingkat harapan hidup dan periode sisa yang diharapkan dari masa aktif karyawan. Setiap perubahan dalam asumsi-asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat atas kewajiban pensiun.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada setiap akhir tahun. Tingkat suku bunga inilah yang digunakan untuk menentukan nilai kini dari estimasi arus kas keluar masa depan yang akan dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pensiun. Dalam menentukan tingkat diskonto yang sesuai, Grup menggunakan tingkat suku bunga obligasi korporat berkualitas tinggi (atau obligasi pemerintah, dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan memiliki waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo kewajiban pensiun yang bersangkutan.

Asumsi kunci kewajiban pensiun lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES *(continued)*

Sources of estimation uncertainty *(continued)*

Post-employment benefits

The present value of the pension obligation depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost/(income) for pensions include the discount rate, future remuneration changes, employee attrition rates, life expectancy and the expected remaining service periods of employees. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of the pension obligation.

The Group determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the related pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Group considers the interest rates of high quality corporate bonds (or government bonds, if there is no deep market for high quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation.

Other key assumptions for pension obligations are based in part on current market conditions.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/45 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING DAN ESTIMASI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Sumber ketidakpastian estimasi (lanjutan)

Pajak penghasilan

Perhitungan beban pajak penghasilan Grup memerlukan pertimbangan dan asumsi dalam menentukan pengurangan beban tertentu selama proses pengestimasian. Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan pajak. Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Grup, melalui negosiasi dengan otoritas pajak yang relevan dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam tahun dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari rugi pajak dan perbedaan temporer, diakui apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Asumsi atas pembentukan laba kena pajak sangat dipengaruhi oleh estimasi dan asumsi manajemen atas tingkat penjualan dan biaya-biaya terkait yang terdapat risiko ketidakpastian, sehingga ada kemungkinan perubahan estimasi dan asumsi tersebut akan mengubah proyeksi laba kena pajak di masa mendatang.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES *(continued)*

Sources of estimation uncertainty *(continued)*

Income taxes

The calculations of income tax expense for the Group require judgements and assumptions in determining the deductibility of certain expenses during the estimation process. All judgements and estimates made by management may be challenged by the Directorate General of Taxation. As a result, the ultimate tax determination becomes uncertain. The resolution of tax positions taken by the Group, through negotiations with the relevant tax authorities can take several years to complete and in some cases it is difficult to predict the ultimate outcome. Where the final outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income tax provision in the year in which this determination is made.

Deferred tax assets, including those arising from tax losses carried forward and temporary differences, are recognised only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which is dependent on the generation of sufficient future taxable profits. The assumptions about the generation of future taxable profits are heavily affected by the level of sales and the associated costs which are subject to risk and uncertainty and hence there is a possibility that changes in circumstances will alter the projected future taxable profits.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/46 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. ENTITAS ANAK

Perusahaan memiliki saham entitas anak, baik langsung maupun tidak langsung sebagai berikut:

5. SUBSIDIARIES

The Company has ownership interests directly or indirectly in the following subsidiaries:

Entitas anak/ *Subsidiaries*	Domisili/ *Domicile*	Jenis usaha/ *Nature of business*	Persentase pemilikan/ *Percentage of ownership* 2022	2021	Tahun operasi komersial/ *Start of commercial operations*	Jumlah aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination* 2022	2021
PT Pembangkitan Jawa Bali Services ("PJBS") dan entitas anaknya/ *and its subsidiaries*	Surabaya	Jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik dan pembangunan/(pemasangan) peralatan ketenagalistrikan/ *Operation and maintenance of power plant and construction/ (installation) of electricity equipment*	99.00	98.00	2001	1,688,856	1,414,145
PT Mitra Karya Prima ("MKP") *)	Surabaya	Jasa/*Service*	92.00	92.00	2005	174,059	146,005
PT Rekadaya Elektrika ("RE") dan entitas anaknya/ *and its subsidiary*	Jakarta	Enjiniring, pengadaan dan konstruksi, dan operasi dan pemeliharaan sektor ketenagalistrikan/ *Engineering, procurement and construction, and operations and maintenance in the electricity sector*	99.00	98.90	2004	1,943,148	1,437,002
PT Prima Power Nusantara ("PPN") *)	Jakarta	Enjiniring, pengadaan dan konstruksi, dan operasi dan pemeliharaan sektor ketenagalistrikan/ *Engineering, procurement and construction, and operations and maintenance in the electricity sector*	100.00	-	2016	200,240	-
PT Rekadaya Elektrika Consult ("REC") *)	Jakarta	Supervisi dan konsultasi/ *Supervision and consultation*	-	99.80	2010	-	123,025
PT Navigat Innovative Indonesia ("NII")	Palembang	Perdagangan, konstruksi, pertambangan dan pertanian/ *Trade, construction, mining and agriculture*	72.97	72.97	2002	485,345	394,773
PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi ("PJBI") dan entitas anaknya/ *and its subsidiary*	Jakarta	Investasi ketenagalistrikan/ *Investment in electricity*	100.00	100.00	2015	8,009,706	6,428,282
PT Pembangkitan Jawa Bali Investindo ("PJB Investindo") *) dan entitas anaknya/ *and its subsidiary*	Jakarta	Penempatan investasi di pengadaan listrik/ *Investments in electricity procurement*	100.00	100.00	2020	194,205	117,840
PT Pembangkitan Jawa Baskara Investasi Cirata ("PJBIC") *)	Jakarta	Pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal/ *Financing through equity participation*	100.00	100.00	2020	193,908	123,100
PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang ("PLNSC")	Jakarta	Perdagangan barang dan jasa, enjiniring, rantai pasokan, dan konsultasi di bidang ketenagalistrikan/ *Operation and services trading, engineering, supply chain, consultation in the electricity sector*	51.00	51.00	2018	470,653	298,601

*) Pemilikan tidak langsung/*Indirect ownership*

Efektif pada tanggal 20 Desember 2021, sesuai dengan Akta Notaris No. 7 dari Erna Anggraini Hutabarat, S.H., M.Si., Notaris di Surabaya, Perusahaan mengadakan perjanjian jual beli saham untuk menjual saham PT Sertifikasi Kompetensi Pembangkitan Tenaga Listrik ("SKP") ke Yayasan Kesejahteraan PT Pembangkitan Jawa-Bali ("YK PJB"), dimana Perusahaan menjual seluruh kepemilikan saham SKP atau setara dengan 95% kepemilikan atas SKP dengan nilai pengalihan sebesar Rp9.785. Nilai buku bersih SKP untuk porsi kepemilikan Perusahaan adalah sebesar Rp6.158. Keuntungan dari penjualan saham sebesar Rp3.627 disajikan sebagai bagian dari penghasilan/(beban) lain-lain - bersih dalam laporan laba rugi konsolidasian Grup.

Effective on 20 December 2021, in accordance with Notarial Deed No. 7 of Erna Anggraini Hutabarat, S.H., M.Si., Notary in Surabaya, the Company entered into a share sale and purchase agreement to sell shares of PT Sertifikasi Kompetensi Pembangkitan Tenaga Listrik ("SKP") to Yayasan Kesejahteraan PT Pembangkitan Jawa-Bali ("YK PJB"), under which the Company sold all shares or equivalent to 95% ownership of SKP with a total transaction value of Rp9,785. The net book value of the Company's ownership portion in SKP was Rp6,158. The gain on sales of investment amounted to Rp3,627 is presented as part of other income/(expenses) - net in the Group's consolidated statements of profit or loss.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/47 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. ENTITAS ANAK (lanjutan)

Pada tahun 2021, PJBI, entitas anak, melakukan penambahan penyetoran modal sebesar Rp66.290 sehingga nilai penyertaan pada PJB Investindo menjadi Rp85.013.

Pada tahun 2021, Perusahaan melakukan penambahan penyetoran modal sebesar Rp181.092 sehingga nilai penyertaan pada PJBI menjadi Rp6.038.048.

Berdasarkan Akta Notaris No. 38 tanggal 27 April 2022 dari Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan mengadakan perjanjian jual beli saham untuk membeli saham PJBS dari YK PJB, dimana Perusahaan membeli sebagian kepemilikan saham PJBS atau setara dengan 1% kepemilikan atas PJBS dengan nilai pengalihan sebesar Rp11.184. Nilai buku bersih PJBS untuk porsi kepemilikan YK PJB adalah sebesar Rp9.612.

Pada tahun 2022, Perusahaan melakukan penambahan penyetoran modal sebesar Rp65.384 sehingga nilai penyertaan pada RE menjadi Rp710.709.

Pada tahun 2022, RE, entitas anak, melakukan akuisisi PPN dan divestasi REC dengan entitas sepengendali. Lihat Catatan 21 untuk informasi terkait nilai transaksi.

***5. SUBSIDIARIES** (continued)*

In 2021, PJBI, a subsidiary, made additional investments amounting to Rp66,290, therefore, the investment amount in PJB Investindo changed to Rp85,013.

In 2021, the Company made additional investments amounting to Rp181,092, therefore, the carrying amount of investments in PJBI amounting to Rp6,038,048.

Based on Notarial Deed No. 38 dated 27 April 2022 of Lenny Janis Ishak, S.H., Notary in Jakarta, the Company entered into a share sale and purchase agreement to purchase shares of PJBS to YK PJB, under which the Company purchased a part of shares or equivalent to 1% ownership of PJBS with a total transaction value of Rp11,184. The net book value of the YK PJB's ownership portion in PJBS was Rp9,612.

In 2022, the Company made additional investments amounting to Rp65,384, therefore, the carrying amount of investments in RE amounting to Rp710,709.

In 2022, RE, a subsidiary, acquired PPN and divested REC with an entity under common control. Refer to Note 21 for information regarding the transaction value.

6. KAS DAN SETARA KAS / ***6. CASH AND CASH EQUIVALENTS***

	2022	2021	
Kas	1,478	1,804	*Cash on hand*
Bank			*Cash in banks*
Pihak berelasi (Catatan 31)			*Related parties (Note 31)*
Bank Mandiri			*Bank Mandiri*
Rupiah	2,597,781	2,356,052	*Rupiah*
AS$	97,258	149,625	*US$*
BRI			*BRI*
Rupiah	528,448	890,283	*Rupiah*
AS$	469,001	505,680	*US$*
BNI			*BNI*
Rupiah	4,589,059	2,283,706	*Rupiah*
AS$	26,861	76,141	*US$*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI")	10,002	1	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI")*
Sub-jumlah	8,318,410	6,261,488	***Sub-total***

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/48 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan) / ***6. CASH AND CASH EQUIVALENTS*** *(continued)*

	2022	2021	
Bank (lanjutan)			*Cash in banks (continued)*
Pihak ketiga			*Third parties*
Bank CIMB Niaga			*Bank CIMB Niaga*
Rupiah	56,034	126,966	*Rupiah*
AS$	125	115	*US$*
PT Bank Bukopin Tbk (“Bank Bukopin”)			*PT Bank Bukopin Tbk (“Bank Bukopin”)*
Rupiah	784	8,268	*Rupiah*
AS$	-	2,556	*US$*
Lain-lain (masing-masing dibawah 5% dari jumlah)			*Others (each below 5% of total)*
Rupiah	-	125	*Rupiah*
AS$	-	1	*US$*
Sub-jumlah	56,943	138,031	***Sub-total***
Jumlah bank	8,375,353	6,399,519	***Total cash in banks***
Deposito berjangka			*Time deposits*
Pihak berelasi (Catatan 31)			*Related parties (Note 31)*
Bank Mandiri	85,000	60,000	*Bank Mandiri*
BRI			*BRI*
Rupiah	135,000	135,000	*Rupiah*
AS$	16,587	537,664	*US$*
BNI			*BNI*
Rupiah	76,384	50,000	*Rupiah*
AS$	268,244	159,869	*US$*
Sub-jumlah	581,215	942,533	***Sub-total***
Pihak ketiga			*Third parties*
Bank CIMB Niaga	112	112	*Bank CIMB Niaga*
Jumlah deposito berjangka	581,327	942,645	***Total time deposits***
Jumlah	**8,958,158**	**7,343,968**	***Total***
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun			*Interest rates per annum on time deposits*
Rupiah	2.25% - 5.00%	2.25% - 2.60%	*Rupiah*
AS$	0.25% - 1.75%	0.20% - 0.40%	*US$*
Jangka waktu	1 - 3 bulan/ *months*	1 - 3 bulan/ *months*	*Maturity*

Lihat Catatan 31 untuk informasi saldo dan transaksi-transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 31 for the balances and transactions with related parties.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/49 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

7. DEPOSITO BERJANGKA / *7. TIME DEPOSITS*

	2022	2021	
Pihak berelasi (Catatan 31)			*Related parties (Note 31)*
BRI			*BRI*
Rupiah	260,000	260,000	*Rupiah*
AS$	37,421	-	*US$*
BNI			*BNI*
Rupiah	-	30,000	*Rupiah*
AS$	31,462	-	*US$*
Bank Mandiri			*Bank Mandiri*
Rupiah	103	103	*Rupiah*
AS$	162,313	-	*US$*
Jumlah, bersih	**491,299**	**290,103**	***Total, net***
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun			*Interest rates per annum on time deposits*
Rupiah	2.25% - 5.55%	2.25% - 3.00%	*Rupiah*
AS$	2.00% - 3.00%	-	*US$*
Jangka waktu	6 - 12 bulan/ *months*	6 - 12 bulan/ *months*	*Maturity*

Lihat Catatan 31 untuk informasi saldo dan transaksi-transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 31 for the balances and transactions with related parties.

8. REKENING BANK DAN DEPOSITO BERJANGKA DIBATASI PENGGUNAANNYA / *8. RESTRICTED CASH IN BANKS AND TIME DEPOSITS*

	2022	2021	
Jaminan bank garansi			*Bank guarantees*
Pihak berelasi (Catatan 31)			*Related parties (Note 31)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”)			*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”)*
AS$	112,262	-	*US$*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“BRI”)			*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“BRI”)*
Rupiah	19,550	10,000	*Rupiah*
AS$	161,764	150,792	*US$*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”)	1,137	577	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”)*
Pihak ketiga			*Third party*
PT Bank CIMB Niaga Tbk (“Bank CIMB Niaga”)	43,938	44,910	*PT Bank CIMB Niaga Tbk (“Bank CIMB Niaga”)*
Jumlah	338,651	206,279	*Total*
Dikurangi: bagian lancar	**(301,420)**	**(206,279)**	***Less: current portion***
Bagian tidak lancar	**37,231**	**-**	***Non-current portion***

Pada tanggal 19 Juli 2021, PJBI dan PJBIC memberikan jaminan berupa *Standby Letter of Credit* (“SBLC”) kepada Sumitomo Mitsui Banking Co. sebesar AS$8.557.778 atau setara dengan Rp133.433 (2021: Rp122.111) untuk proyek PLTS Cirata di Kabupaten Purwakarta.

As at 19 July 2021, PJBI and PJBIC provides guarantee in form of Standby Letter of Credit (“SBLC”) to Sumitomo Mitsui Banking Co. amounting to US$8,557,778 or equivalent to Rp133,433 (2021: Rp122,111) for PLTS Cirata project in Purwakarta Regency.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/50 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. REKENING BANK DAN DEPOSITO BERJANGKA DIBATASI PENGGUNAANNYA (lanjutan)

Pada tanggal 22 Desember 2022, PJBI dan PJBIC memberikan jaminan berupa *Standby Letter of Credit* ("SBLC") kepada Bank Mandiri sebesar AS$7.200.000 atau setara dengan Rp112.262 untuk proyek PLTS Cirata di Kabupaten Purwakarta yang dilakukan oleh PT Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energy ("PMSE").

Lihat Catatan 31 untuk informasi saldo dan transaksi-transaksi dengan pihak berelasi.

8. RESTRICTED CASH IN BANKS AND TIME DEPOSITS *(continued)*

As at 22 December 2022, PJBI and PJBIC provides guarantee in form of Standby Letter of Credit ("SBLC") to Bank Mandiri amounting to US$7,200,000 or equivalent to Rp112,262 for PLTS Cirata project in Purwakarta Regency which is developed by PT Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energy ("PMSE").

Refer to Note 31 for the balances and transactions with related parties.

9. PIUTANG USAHA

9. TRADE RECEIVABLES

	2022	2021	
Pihak berelasi (Catatan 31)	20,475,373	21,938,127	*Related parties (Note 31)*
Pihak ketiga	131,219	39,948	*Third parties*
Sub-jumlah	20,606,592	21,978,075	*Sub-total*
Cadangan kerugian kredit ekspektasian	(56,338)	(23,697)	*Allowance for expected credit losses*
Jumlah, bersih	**20,550,254**	**21,954,378**	***Total, net***

Pergerakan cadangan kerugian kredit ekspektasian adalah sebagai berikut:

The movement of the allowance for expected credit losses is as follows:

	2022	2021	
Saldo awal tahun	23,697	23,697	*Balance at beginning of year*
Penambahan	32,641	-	*Additions*
Saldo akhir tahun	**56,338**	**23,697**	***Balance at end of year***

Berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan dan PLN, piutang usaha Perusahaan disalinghapuskan terhadap utang usaha terkait pembelian energi primer dan utang bunga atas pinjaman dari pemegang saham (Catatan 33e).

Manajemen berpendapat bahwa cadangan atas kerugian kredit ekspektasian untuk piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang dibentuk cukup untuk menutupi risiko kerugian kredit dari piutang usaha.

Lihat Catatan 31 untuk informasi saldo dan transaksi-transaksi dengan pihak berelasi.

Based on the agreement between the Company and PLN, the trade receivables of the Company were offset with trade payables related to the purchase of primary energy and interest payable on loans from a shareholder (Note 33e).

Management is of the opinion that the established allowance for expected credit losses of trade receivables as at 31 December 2022 and 2021 is adequate to cover the credit loss risk of trade receivables.

Refer to Note 31 for the balances and transactions with related parties.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/51 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. PIUTANG KEPADA VENTURA BERSAMA / *10. RECEIVABLES FROM JOINT VENTURES*

	2022	2021	
SGPJB	813,424	806,425	*SGPJB*
PMSE	10,429	9,632	*PMSE*
Jumlah	823,853	816,057	*Total*
Dikurangi: bagian lancar	**(67,785)**	**(124,055)**	***Less: current portion***
Bagian tidak lancar	**756,068**	**692,002**	***Non-current portion***

Pada tanggal 20 November 2018, PJBI, entitas anak, melakukan perjanjian pinjaman jangka panjang dengan SGPJB, dimana PJBI memberikan pinjaman jangka panjang sebesar AS$56.516.733 dengan suku bunga LIBOR 6 bulan + 4%. Pinjaman akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2033. Bunga akan jatuh tempo setiap tanggal 15 Januari dan 15 Juli. Selama tahun 2022, SGPJB melakukan pembayaran pinjaman sebesar AS$4.347.441 (setara dengan Rp64.720) (2021: AS$nihil). Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo terutang atas seluruh pinjaman ini adalah masing-masing sebesar AS$52.169.292 (setara dengan Rp813.424) dan AS$56.516.733 (setara dengan Rp806.425).

On 20 November 2018, PJBI, a subsidiary, entered into a long-term loan with SGPJB, whereby PJBI agreed to provide long-term loans to SGPJB amounting to US$56,516,733 with an interest rate of LIBOR 6 month + 4%. The agreement will mature on 15 December 2033. The interest will be due every 15 January and 15 July. During 2022, SGPJB made loan payment of US$4,347,441 (equivalent to Rp64,720) (2021: US$nil). As at 31 December 2022 and 2021, the total outstanding balances of the loans were US$52,169,292 (equivalent to Rp813,424) dan US$56,516,733 (equivalent to Rp806,425), respectively.

Pada tanggal 20 Mei 2021, PJBIC memberikan pinjaman jangka panjang sebesar AS$663.000 (setara dengan Rp10.429) (2021: AS$663.000 (setara dengan Rp9.632)) kepada PMSE dengan suku bunga tahunan sebesar 4,7%.

On 20 May 2021, PJBIC granted a long-term loan to PMSE amounting to US$663,000 (equivalent to Rp10,429) (2021: US$663,000 (equivalent to Rp9,632)) with an annual interest rate of 4.7%.

Bunga pinjaman kepada SGPJB dan PMSE yang belum dibayarkan masing-masing sebesar AS$2.288.456 (setara dengan Rp35.682) dan AS$48.213 (setara dengan Rp752) dicatat sebagai piutang lain-lain.

Unpaid interest on receivables from SGPJB and PMSE amounting to US$2,288,456 (equivalent to Rp35,682) and US$48,213 (equivalent to Rp752) were recorded as other receivables, respectively.

Berdasarkan penilaian penyisihan kerugian kredit ekspektasian, manajemen Grup berpendapat bahwa penyisihan atas kerugian kredit ekspektasian atas piutang kepada ventura bersama tidak material, sehingga penyisihan atas kerugian kredit ekspektasian dianggap tidak diperlukan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Based on the assessment of allowance for expected credit losses, the management of the Group is of the opinion that the provision for expected credit losses of receivables from joint ventures is not material, therefore, a provision for expected credit losses is considered not necessary as at 31 December 2022 and 2021.

Lihat Catatan 31 untuk informasi saldo dan transaksi-transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 31 for the balances and transactions with related parties.

11. PERSEDIAAN / *11. INVENTORIES*

	2022	2021	
Batubara, bahan bakar dan pelumas	1,527,026	1,135,328	*Coal, fuel and lubricants*
Material pemeliharaan	397,858	347,548	*Maintenance materials*
Sub-jumlah	1,924,884	1,482,876	*Sub-total*
Cadangan penurunan nilai persediaan dan persediaan usang	(20,622)	(19,028)	*Allowance for decline in value of inventories and inventory obsolescence*
Jumlah, bersih	**1,904,262**	**1,463,848**	***Total, net***

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/52 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. PERSEDIAAN (lanjutan)

Pergerakan cadangan penurunan nilai persediaan dan persediaan usang adalah sebagai berikut:

11. INVENTORIES (continued)

The movement of the allowance for the decline in the value of inventories and inventory obsolescence is as follows:

	2022	2021	
Saldo awal tahun	19,028	17,042	*Balance at beginning of year*
Penambahan	1,788	3,817	*Additions*
Pembalikan	(194)	(1,831)	*Reversal*
Saldo akhir tahun	**20,622**	**19,028**	***Balance at end of year***

Manajemen berpendapat bahwa cadangan penurunan nilai persediaan dan persedian usang yang dibentuk pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah cukup untuk menutupi risiko kerugian penurunan nilai persediaan dan persediaan usang.

Jumlah pemakaian persediaan yang diakui sebagai beban usaha dalam laporan laba rugi konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, adalah masing-masing sebesar Rp2.787.656 dan Rp4.247.806.

Management is of the opinion that the allowance for decline in value of inventories and inventory obsolescence as at 31 December 2022 and 2021 is adequate to cover the possible losses on the decline in the value of inventories and inventory obsolescence.

The total amount of inventories used recognised as operating expenses in profit or loss for the years ended 31 December 2022 and 2021 amounted to Rp2,787,656 and Rp4,247,806, respectively.

12. ASET TETAP

12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

	2022					
	1 Januari/ *January* 2022	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	31 Desember/ *December* 2022	
Biaya perolehan						***Acquisition cost***
Pemilikan langsung						*Direct acquisition*
Tanah dan hak atas tanah	17,050,809	-	-	-	17,050,809	*Land and land rights*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	7,899,199	165,521	-	7,155	8,071,875	*Buildings, reservoirs and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	87,981,243	187,725	-	3,069,370	91,238,338	*Installation and power plants*
Perlengkapan transmisi dan distribusi	4,287,673	3,906	-	10,819	4,302,398	*Transmissions and distribution equipment*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	5,908	49	-	-	5,957	*Telecommunications and data processing equipment*
Perlengkapan umum	1,267,806	64,220	-	37,976	1,370,002	*General equipment*
Kendaraan bermotor	164,351	8,214	-	(20,480)	152,085	*Motor vehicles*
Material cadang utama	20,789	13,212	-	-	34,001	*Major spare parts*
Sub-jumlah	118,677,778	442,847	-	3,104,840	122,225,465	*Sub-total*
Aset hak guna						*Right-of-use assets*
Bangunan	9,113	9,650	(1,689)	-	17,074	*Buildings*
Perlengkapan umum	216	274	(216)	-	274	*General equipment*
Kendaraan bermotor	116,882	36,289	(33,161)	-	120,010	*Motor vehicles*
Sub-jumlah	126,211	46,213	(35,066)	-	137,358	*Sub-total*
Aset dalam pembangunan	5,377,245	1,227,332	(87,040)	(2,906,578)	3,610,959	*Construction in progress*
Aset tidak digunakan dalam operasi	1,903,100	-	-	(198,262)	1,704,838	*Assets not used in operations*
Jumlah	126,084,334	1,716,392	(122,106)	-	127,678,620	*Total*

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/53 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP (lanjutan) / *12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)*

	2022					
	1 Januari/ *January* 2022	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	31 Desember/ *December* 2022	
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Pemilikan langsung						*Direct acquisition*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	-	260,873	-	-	260,873	*Buildings, reservoirs and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	-	2,639,140	-	(132)	2,639,008	*Installation and power plants*
Perlengkapan transmisi dan distribusi	-	123,201	-	-	123,201	*Transmissions and distribution equipment*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	-	1,112	-	-	1,112	*Telecommunications and data processing equipment*
Perlengkapan umum	970,830	123,266	-	(6,586)	1,087,510	*General equipment*
Kendaraan bermotor	121,601	12,662	-	(13,116)	121,147	*Motor vehicles*
Material cadang utama	-	703	-	-	703	*Major spare parts*
Sub-jumlah	1,092,431	3,160,957	-	(19,834)	4,233,554	*Sub-total*
Aset hak guna						*Right-of-use assets*
Bangunan	3,318	9,805	(1,689)	-	11,434	*Buildings*
Perlengkapan umum	135	104	(216)	-	23	*General equipment*
Kendaraan bermotor	67,376	32,426	(20,499)	-	79,303	*Motor vehicles*
Sub-jumlah	70,829	42,335	(22,404)	-	90,760	*Sub-total*
Aset tidak digunakan dalam operasi	759,671	33,496	(90)	19,834	812,911	*Assets not used in operations*
Jumlah	1,922,931	3,236,788	(22,494)	-	5,137,225	*Total*
Penyisihan penurunan nilai	(10,135)	-	-	-	(10,135)	*Provision for impairment losses*
Jumlah tercatat	**124,151,268**				**122,531,260**	***Net carrying value***

	2021						
	1 Januari/ *January* 2021	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Selisih penilaian kembali/ *Difference arising on revaluation*	31 Desember/ *December* 2021	
Biaya perolehan							***Acquisition cost***
Pemilikan langsung							*Direct acquisition*
Tanah dan hak atas tanah	17,293,303	-	-	(846)	(241,648)	17,050,809	*Land and land rights*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	8,823,787	18,646	-	(4,372)	(938,862)	7,899,199	*Buildings, reservoirs and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	98,559,855	77,812	-	312,040	(10,968,464)	87,981,243	*Installation and power plants*
Perlengkapan transmisi dan distribusi	5,001,339	26,291	-	369	(740,326)	4,287,673	*Transmissions and distribution equipment*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	9,938	-	-	(455)	(3,575)	5,908	*Telecommunications and data processing equipment*
Perlengkapan umum	1,104,908	101,342	-	61,556	-	1,267,806	*General equipment*
Kendaraan bermotor	151,205	11,627	-	1,519	-	164,351	*Motor vehicles*
Material cadang utama	21,654	-	-	(230)	(635)	20,789	*Major spare parts*
Sub-jumlah	130,965,989	235,718	-	369,581	(12,893,510)	118,677,778	*Sub-total*
Aset hak guna							*Right-of-use assets*
Bangunan	9,983	7,813	(8,683)	-	-	9,113	*Buildings*
Perlengkapan umum	1,061	-	(845)	-	-	216	*General equipment*
Kendaraan bermotor	93,656	37,178	(13,952)	-	-	116,882	*Motor vehicles*
Sub-jumlah	104,700	44,991	(23,480)	-	-	126,211	*Sub-total*
Aset dalam pembangunan	4,996,372	858,083	-	(477,210)	-	5,377,245	*Construction in progress*
Aset tidak digunakan dalam operasi	1,927,399	13,537	-	73,837	(111,673)	1,903,100	*Assets not used in operations*
Jumlah	137,994,460	1,152,329	(23,480)	(33,792)	(13,005,183)	126,084,334	*Total*

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/54 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP (lanjutan) / *12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)*

	2021						
	1 Januari/ *January* 2021	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Selisih penilaian kembali/ *Difference arising on revaluation*	31 Desember/ *December* 2021	
Akumulasi penyusutan							***Accumulated depreciation***
Pemilikan langsung							*Direct acquisition*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	1,075,833	198,954	-	(686)	(1,274,101)	-	*Buildings, reservoirs and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	5,367,111	2,731,203	-	(30,174)	(8,068,140)	-	*Installation and power plants*
Perlengkapan transmisi dan distribusi	268,042	136,620	-	(12)	(404,650)	-	*Transmissions and distribution equipment*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	2,484	1,347	-	(74)	(3,757)	-	*Telecommunications and data processing equipment*
Perlengkapan umum	848,971	122,602	-	(743)	-	970,830	*General equipment*
Kendaraan bermotor	97,884	10,404	-	13,313	-	121,601	*Motor vehicles*
Material cadang utama	256	1,055	-	(15)	(1,296)	-	*Major spare parts*
Sub-jumlah	7,660,581	3,202,185	-	(18,391)	(9,751,944)	1,092,431	*Sub-total*
Aset hak guna							*Right-of-use assets*
Bangunan	5,562	6,439	(8,683)	-	-	3,318	*Buildings*
Perlengkapan umum	116	146	(127)	-	-	135	*General equipment*
Kendaraan bermotor	33,689	44,374	(10,687)	-	-	67,376	*Motor vehicles*
Sub-jumlah	39,367	50,959	(19,497)	-	-	70,829	*Sub-total*
Aset tidak digunakan dalam operasi	765,358	115,033	-	(9,047)	(111,673)	759,671	*Assets not used in operations*
Jumlah	8,465,306	3,368,177	(19,497)	(27,438)	(9,863,617)	1,922,931	*Total*
Penyisihan penurunan nilai	(5,309)	-	-	-	(4,826)	(10,135)	*Provision for impairment losses*
Jumlah tercatat	**129,523,845**					**124,151,268**	***Net carrying value***

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense was allocated to the following:

	2022	2021	
Beban usaha	3,203,292	3,253,144	*Operating expenses*
Penghasilan/(beban) lain-lain - bersih	33,496	115,033	*Other income/(expenses) - net*
Jumlah	**3,236,788**	**3,368,177**	***Total***

Grup memiliki beberapa bidang tanah dengan hak legal berupa Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan ("HGB"). Hak Pakai tidak mempunyai jangka waktu, sedangkan HGB akan jatuh tempo antara tahun 2023 sampai dengan 2044, tetapi dapat diperpanjang oleh Grup. Grup juga mempunyai beberapa bidang tanah yang sedang dalam proses perpanjangan HGB dan pengurusan balik nama menjadi atas nama Grup.

The Group owns several pieces of land with Rights to Use and Building Use Rights ("HGB"). Rights to Use have no expiration date, while HGB will expire from 2023 to 2044, but they are renewable by the Group. The Group also has several pieces of land rights, that are still in the extension process and in the process of transfer of certificates to the name of the Group.

Aset tetap, kecuali tanah dan kendaraan bermotor, diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan kemungkinan risiko lainnya (termasuk *machinery breakdown*) kepada PT Asuransi Jasa Indonesia ("Jasindo") dan PT Asuransi Perisai Listrik Nasional ("APLN"), dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar AS$2,9 milyar dan Rp31.840 (2021: AS$2,9 milyar dan Rp89.905) pada 31 Desember 2022. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutup kerugian aset.

The property, plant and equipment, except land and motor vehicles, has been insured against fire and other possible risks (including machinery breakdown) with PT Asuransi Jasa Indonesia ("Jasindo") and PT Asuransi Perisai Listrik Nasional ("APLN"), with the coverage amounting to US$2.9 billion and Rp31,840 (2021: US$2.9 billion and Rp89,905) at 31 December 2022. Management is of the opinion that the sum insured is adequate to cover the possible losses on the assets.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/55 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, jumlah tercatat bruto aset tetap yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan masing-masing sebesar Rp766.385 dan Rp646.080.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Grup melakukan penilaian kembali atas nilai wajar aset tetap, yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Rekan ("KJPP RHR") dalam laporan No. 00113/2.0012-00/PI/02/0006/1/III/2022 tanggal 30 Maret 2022, penilai independen yang telah terdaftar di Kementerian Keuangan dengan nomor izin usaha No. 2.09.0012 dan OJK.

Manajemen tidak mengidentifikasi adanya perubahan signifikan yang mengharuskan dilakukannya jasa revaluasi untuk tahun 2022.

Tabel di bawah ini menganalisis aset tetap yang dicatat pada nilai wajar berdasarkan hirarki nilai wajar sesuai dengan PSAK No. 68 berdasarkan valuasi tanggal 31 Desember 2021. Perbedaan tingkatan nilai wajar dijelaskan sebagai berikut:

12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT *(continued)*

As at 31 December 2022 and 2021, the gross carrying amount of property, plant and equipment that had been fully depreciated but was still in use amounted to Rp766,385 and Rp646,080, respectively.

On 31 December 2021, the Group performed a revaluation of the fair value of its property, plant, and equipment which was performed by Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Rekan ("KJPP RHR") in report No. 00113/2.0012-00/PI/02/0006/1/III/2022 dated 30 March 2022, an independent valuer registered in the Ministry of Finance, with license permit No. 2.09.0012 and FSA.

Management did not identify any significant changes in circumstances which would require a revaluation exercise to be performed for 2022.

The table below analyses the fixed assets that have been recorded at fair value, based on the fair value hierarchy in SFAS No. 68 based on valuation as at 31 December 2021. The different levels of fair value are defined as follows:

	Pengukuran nilai wajar 31 Desember 2021 menggunakan/ *Fair value measurements as at 31 December 2021 using*				
	Tingkat 1/ *Level 1*	**Tingkat 2/ *Level 2***	**Tingkat 3/ *Level 3***	**Jumlah/ *Total***	
Tanah dan hak atas tanah	-	980,619	16,070,190	17,050,809	*Land and land rights*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	-	564,134	7,335,065	7,899,199	*Buildings, reservoirs and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	-	-	87,981,243	87,981,243	*Installation and power plants*
Perlengkapan transmisi dan penyaluran	-	-	4,282,848	4,282,848	*Transmissions and distribution equipment*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	-	-	5,907	5,907	*Telecommunications and data processing equipment*
Material cadang utama	-	-	20,789	20,789	*Major spare parts*
Jumlah	**-**	**1,544,753**	**115,696,042**	**117,240,795**	***Total***

- Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Level 1);
- Input selain harga yang kuotasian dari pasar yang disertakan pada Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (yaitu sebagai sebuah harga) atau secara tidak langsung (yaitu sebagai turunan dari harga) (Tingkat 2); dan
- Input untuk aset atau liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi) (Tingkat 3).

- *Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1);*
- *Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived from prices) (Level 2); and*
- *Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (that is, unobservable inputs) (Level 3).*

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/56 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP (lanjutan)

Tidak terdapat aset tetap yang bisa digolongkan ke dalam nilai wajar Tingkat 1.

Tidak terdapat transfer antara Tingkat 1 dan Tingkat 2 selama tahun berjalan.

Nilai wajar Tingkat 2 dari tanah dan hak atas tanah dihitung dengan menggunakan pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan tergantung dari kondisi tertentu, sedangkan untuk bangunan umum, instalasi dan mesin pembangkitan, serta gardu induk menggunakan pendekatan biaya. Input yang diperoleh dari pasar yaitu antara lain:

a. Harga jual atau harga sewa per meter persegi;
b. Tingkat hunian;
c. Tingkat pertumbuhan;
d. Tingkat diskonto dan kapitalisasi;
e. Biaya pembuatan baru per meter persegi;
f. Tingkat depresiasi;
g. Biaya operasional;
h. Keuntungan pengembang; dan
i. Indeks Kemahalan Konstruksi.

Rekonsiliasi atas saldo awal terhadap saldo akhir dari pengukuran nilai wajar dengan menggunakan informasi signifikan yang tidak dapat diobservasi (Tingkat 3) adalah sebagai berikut:

12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT *(continued)*

There were no fixed assets which could be classified at Level 1 fair value.

There were no transfers between Levels 1 and 2 during the year.

The Level 2 fair value of land and land rights is calculated using the market approach and income approach depends on certain circumstances, building, installation and power plant, and substation value is calculated using the cost approach. Data inputs were obtained from the market that consists of, among others, the following:

a. Sale or rental price per square metre;
b. Occupancy rate;
c. Growth rate;
d. Discount and capitalisation rate;
e. Replacement cost new per square metre;
f. Depreciation rate;
g. Operational expense;
h. Developer margin; and
i. Construction Cost Index.

Reconciliation of the beginning balances to the closing balances of the fair value measurements using significant unobservable inputs (Level 3) is as follows:

	1 Januari/ *January* 2021	Penambahan/ *Additions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Jumlah yang diakui dalam laba rugi/ *Amounts to be recognised in profit or loss*		Penghasilan/ (kerugian) yang diakui pada penghasilan komprehensif lain/ *Gains/(losses) recognised in other comprehensive income*	31 Desember/ *December* 2021	
				Depresiasi/ *Depreciation*	Penurunan nilai/ *Impairment*			
Tanah dan hak atas tanah	16,198,463	-	661	-	-	(128,934)	16,070,190	*Land and land rights*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	7,244,567	5,972	-	(172,910)	-	257,436	7,335,065	*Buildings, reservoirs and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	93,192,744	77,812	342,214	(2,731,203)	-	(2,900,324)	87,981,243	*Installation and power plants*
Perlengkapan transmisi dan penyaluran	4,733,297	26,291	381	(136,620)	(4,825)	(335,676)	4,282,848	*Transmissions and distribution equipment*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	7,454	-	(381)	(1,347)	(1)	182	5,907	*Telecommunications and data processing equipment*
Material cadang utama	21,398	-	(215)	(1,055)	-	661	20,789	*Major spare parts*
Jumlah	**121,397,923**	**110,075**	**342,660**	**(3,043,135)**	**(4,826)**	**(3,106,655)**	**115,696,042**	***Total***

Penyesuaian dilakukan berdasarkan ukuran, kapasitas, usia, lokasi, bentuk dan spesifikasi, hak atas tanah dan elemen perbandingan lainnya.

Nilai wajar Tingkat 3 dihitung dengan menerapkan pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dan pendekatan biaya dengan menggunakan input yang tidak dapat diobservasi.

Selain menggunakan input yang berasal dari pasar, KJPP RHR juga menggunakan input yang tidak dapat diobservasi dari pasar dan menggunakan asumsi khusus terkait dengan jenis aset yang tergolong sebagai properti khusus, seperti pembangkit listrik, jaringan transmisi dan distribusi, gardu listrik dan lainnya.

Adjustments were made based on size, capacity, age, location, shapes and specifications, land rights and other comparison elements.

The Level 3 fair value is calculated through the market approach, income approach, and cost approach by using unobservable inputs.

Other than the data inputs observed from the market, KJPP RHR also used unobservable market data inputs and used special assumptions related to the assets classified as specialised property, such as power plants, transmission and distribution networks, substations and others.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/57 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP (lanjutan)

12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)

Informasi mengenai pengukuran nilai wajar yang menggunakan informasi signifikan yang tidak dapat diobservasi (Level 3) adalah sebagai berikut:

Information about fair value measurements using significant unobservable inputs (Level 3) are as follows:

	Nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2021/ *Fair value as at 31 December 2021*	Teknik penilaian/ *Valuation technique*	Informasi yang tidak dapat diobservasi/ *Unobservable inputs*	Kisaran input yang tidak dapat diobservasi/ *Range of unobservable inputs*	Hubungan informasi yang tidak dapat diobservasi terhadap nilai wajar/ *Relationship of unobservable inputs to fair value*	
Tanah						***Land***
Tanah kantor dan pembangkit	16,070,190	Pendekatan pendapatan dengan metode pengembangan lahan/ *The income approach with the land development method*	-Penyesuaian parameter pengembangan/ *Adjustment of parameter development*	60% - 80%*	-Semakin tinggi koefisien luas bangunan ("KLB") maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher KLB, the higher fair value*	*Office and power plant land*
			-Data luas dan aspek legal/ *Land area and legal aspects*	-	-Tanah bersertifikat akan memiliki nilai wajar lebih tinggi/ *Certified land will have higher fair value*	
			-Perubahan peruntukan/ *Zoning changes*	-	-Peruntukan tanah sekitar mengindikasikan nilai wajar yang lebih tinggi/ *Zoning of neighboring land might have higher fair value*	
Bangunan						***Buildings***
Bangunan umum	1,100,571	Pendekatan biaya/ *Cost approach*	-Indeks koefisien/ *Index coefficient*	0.45 - 5.46	-Semakin besar indeks koefisien maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher index coefficient, the higher fair value*	*General buildings*
			-Volume bangunan/ *Building volumes*	60% - 70%*	-Semakin besar volume maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher building volumes, the higher fair value*	
Waduk dan prasarana	6,210,770	Trending/ *Trending*	-Indeks koefisien/ *Index coefficient*	1.00 - 2.27	-Semakin besar tingkat indeks maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher index coefficient, the higher fair value*	*Reservoir and infrastructure*
Jalan dan sepur samping	23,724	Trending/ *Trending*	-Indeks koefisien/ *Index coefficient*	1.00 - 2.35	-Semakin besar tingkat indeks maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher index coefficient, the higher fair value*	*Road and rail side*
Instalasi dan mesin pembangkit	87,981,243	Pendekatan biaya/ *Cost approach*	-Tingkat kemunduran fungsional/ *Functional obsolescence rate*	1% - 30%	-Semakin besar tingkat kemunduran fungsional maka semakin rendah nilai wajar/ *The higher functional obsolescence rate, the lower fair value*	***Installation and power plants***
			-Tingkat kemunduran ekonomis/ *Economical obsolescence rate*	1% - 3%	-Semakin besar tingkat kemunduran ekonomis maka semakin rendah nilai wajar/ *The higher economical obsolescence rate, the lower fair value*	
			-Tingkat indeks PPI/ *PPI index rate*	1.00 - 2.00	-Semakin besar tingkat indeks PPI maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher PPI index rate, the higher fair value*	
Perlengkapan transmisi dan distribusi	4,282,848	Pendekatan biaya/ *Cost approach*	-Tingkat indeks PPI/ *PPI index rate*	1.00 - 3.00	-Semakin besar tingkat indeks PPI maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher PPI index rate, the higher fair value*	***Transmissions and distribution equipment***
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	5,907	Pendekatan biaya/ *Cost approach*	-Tingkat indeks PPI/ *PPI index rate*	1.01 - 1.02	-Semakin besar tingkat indeks PPI maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher PPI index rate, the higher fair value*	***Telecommunications and data processing***
Material cadang utama	20,789	Pendekatan biaya/ *Cost approach*	-Tingkat indeks PPI/ *PPI index rate*	1.00 - 3.00	-Semakin besar tingkat indeks PPI maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher PPI index rate, the higher fair value*	***Major spare parts***

*) kisaran bobot dari input yang tidak dapat diobservasi/*the range of weights of the unobservable input*

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/58 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP (lanjutan)

Surplus revaluasi, dikurangi dengan pajak penghasilan tangguhan terkait, telah dikreditkan pada penghasilan komprehensif lain dan disajikan sebagai surplus revaluasi aset tetap pada laporan perubahan ekuitas konsolidasian.

Selain yang menggunakan model revaluasi, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai wajar aset tetap dengan nilai tercatatnya.

Pergerakan surplus revaluasi aset tetap adalah sebagai berikut:

12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT *(continued)*

The revaluation surplus, net of applicable deferred income taxes, was credited to other comprehensive income and presented in property, plant, and equipment revaluations surplus in the consolidated statements of changes in equity.

There is no significant difference between the fair value and the carrying value of the property, plant, and equipment other than the assets that have applied the revaluation model.

The movements of property, plant and equipment revaluation surplus are as follows:

	2022	2021	
Saldo awal tahun	123,268,188	125,731,065	*Balance at beginning of year*
Revaluasi aset tetap	-	(3,141,566)	*Revaluation of property, plant and equipment*
Reklasifikasi surplus revaluasi ke saldo laba atas penghapusan aset tidak digunakan dalam operasi	(7,054)	(12,455)	*Reclassification on revaluation surplus from disposals of assets not used in operations*
Sub-jumlah	(7,054)	(3,154,021)	*Sub-total*
Manfaat pajak terkait	-	691,144	*Related income tax benefit*
Saldo akhir tahun	**123,261,134**	**123,268,188**	***Balance at end of year***

Jika Grup tidak menerapkan model revaluasi, nilai tercatat bersih aset tetap pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp20.430.824 dan Rp19.653.043.

If the Group did not apply the revaluation model, the net carrying value of the property, plant and equipment as at 31 December 2022 and 2021 would have amounted to Rp20,430,824 and Rp19,653,043, respectively.

Aset dalam pembangunan

Akun ini merupakan biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan pembangunan dan renovasi/ perbaikan sarana kelistrikan, sebagai berikut:

Construction in progress

This account represents the costs that have been incurred in relation to the construction and renovation/repairs of power supply facilities, as follows:

	2022	2021	
Pembangkit tenaga listrik			*Power plants*
Tenaga gas uap (“PLTGU”)	3,462,604	5,237,478	*Steam gas power plant (“PLTGU”)*
Tenaga gas (“PLTG”)	24,853	24,853	*Gas power plant (“PLTG”)*
Tenaga air (“PLTA”)	23,000	14,643	*Hydro power plant (“PLTA”)*
Tenaga uap (“PLTU”)	10,210	62,517	*Steam power plant (“PLTU”)*
Tenaga surya (“PLTS”)	-	24,436	*Solar power plant (“PLTS”)*
Fungsi pendukung	90,292	13,318	*Supporting function*
Jumlah	**3,610,959**	**5,377,245**	***Total***

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/59 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, jumlah tercatat aset dalam pembangunan Grup adalah sebagai berikut:

12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)

As at 31 December 2022 and 2021, the carrying amount of the Group's construction in progress was as follows:

Nama Proyek/*Project Name*	Nilai/*Amount* 2022	Nilai/*Amount* 2021
Proyek/*Project add-on* PLTGU Muara Tawar Blok 2, 3 dan 4	3,321,650	5,101,227
Lainnya/*Others*	289,309	276,018
Jumlah/*Total*	**3,610,959**	**5,377,245**

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan masing-masing sebesar Rp66.223 dan Rp33.997.

As at 31 December 2022 and 2021, the borrowing costs that were capitalised to construction in progress were Rp66,223 and Rp33,997, respectively.

Aset tidak digunakan dalam operasi

Aset tidak digunakan dalam operasi meliputi aset tetap yang yang sementara belum digunakan dalam operasi dan aset tetap akan diperbaiki.

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap secara siginifikan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Assets not used in operations

Assets not used in operations comprised property, plant and equipment temporarily not in use in operations, and those to be repaired.

Based on management's assessment, there were no events or changes in circumstances that may significantly impair the value of the property, plant and equipment as at 31 December 2022 and 2021.

13. PROPERTI INVESTASI

13. INVESTMENT PROPERTIES

	2022					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Perubahan nilai wajar/ *Change in fair value*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Pemilikan langsung						*Direct acquisition*
Tanah dan bangunan	1,460,599	116,555	-	-	1,577,154	*Land and buildings*

	2021					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Perubahan nilai wajar/ *Change in fair value*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Pemilikan langsung						*Direct acquisition*
Tanah dan bangunan	1,540,756	(86,511)	-	6,354	1,460,599	*Land and buildings*

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/60 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)

Properti investasi merupakan tanah milik Perusahaan yang terletak di Paiton - Jawa Timur, Bekasi - Jawa Barat, Pluit - Jakarta Utara, Cipeundeuy - Bandung Barat dan Asahan - Sumatera Utara dengan hak legal berupa HGB berjangka waktu dari 32 sampai 40 tahun, jatuh tempo pada 2032, yang disewakan kepada PT PLN (Persero), PT Paiton Energy, PT Jawa Power, PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero), PT Anugerah Mega Energi, PT Pertamina Hulu Energi ONWJ, PT Nusantara Regas, PT Cirata Karya Lestari, BUT Sinohydro Corporation Limited dan PT Bajradaya Sentranusa.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan melakukan penilaian kembali atas nilai wajar properti investasi, yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan dalam laporan No. 02172/2.0027-00/PI/11/0196/1/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 dan KJPP RHR dalam laporan No. 00113/2.0012-00/PI/02/0006/1/III/2022 tanggal 30 Maret 2022, penilai independen yang telah terdaftar di Kementerian Keuangan dan OJK.

Nilai wajar properti investasi diklasifikasikan sebagai Tingkat 2 dalam hirarki nilai wajar.

Nilai wajar Tingkat 2 dari tanah dihitung dengan menggunakan pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan. Input yang diperoleh dari pendekatan pasar yaitu:
a. Harga jual atau harga sewa per meter persegi;
b. Tingkat hunian;
c. Tingkat pertumbuhan;
d. Tingkat diskonto;
e. Biaya operasional; dan
f. Keuntungan pengembang.

Penyesuaian dilakukan berdasarkan ukuran, lokasi, bentuk dan spesifikasi, tanah dan aset tanah dan elemen perbandingan lainnya.

Grup juga mencatat perubahan nilai wajar yang disajikan sebagai bagian dari penghasilan/(beban) lain-lain-bersih dalam laporan laba rugi konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 December 2022 dan 2021.

Berdasarkan penilaian manajemen, tidak ada kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset investasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

13. INVESTMENT PROPERTIES *(continued)*

Investment properties pertain to pieces of land that are owned by the Company located in Paiton - East Java, Bekasi - West Java, Pluit - North Jakarta, Cipeundeuy - West Bandung and Asahan - North Sumatera with HGB for periods between 32 to 40 years, which will be expired in 2032, which are leased to PT PLN (Persero), PT Paiton Energy, PT Jawa Power, PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero), PT Anugerah Mega Energi, PT Pertamina Hulu Energi ONWJ, PT Nusantara Regas, PT Cirata Karya Lestari, BUT Sinohydro Corporation Limited and PT Bajradaya Sentranusa.

As at 31 December 2022 and 2021, the Company performed a revaluation of the fair value of its investment properties which was performed by Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun and Partners in report No. 02172/2.0027-00/PI/11/0196/1/III/2023 dated 30 March 2023 and KJPP RHR in report No. 00113/2.0012-00/PI/02/0006/1/III/2022 dated 30 March 2022, independent valuers registered with the Ministry of Finance and FSA.

The fair values of the investment properties are within Level 2 of the fair value hierarchy.

The Level 2 fair value of the land is calculated using the market approach and the income approach. Data inputs were obtained from the market approach that consists of:
a. Sale or rental price per square metre;
b. Occupancy rate;
c. Growth rate;
d. Discount rate;
e. Operational expense; and
f. Developer margin.

Adjustments were made based on size, location, shapes and specifications, land and land rights and other comparison elements.

The Group also recorded the changes in fair value were presented as part of other income/(expenses) - net in the consolidated statements of profit or loss for the years ended 31 December 2022 and 2021.

Based on management's assessment, there are no events or changes in circumstances that indicate any impairment in the value of the investment properties as at 31 December 2022 and 2021.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/61 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA

14. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES

Rincian investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut:

Details of the investments in associates and joint ventures are as follows:

Nama entitas asosiasi dan ventura bersama/ *Name of associates and joint ventures*	Domisili/ *Domicile*	Jenis usaha/ *Nature of business*	Awal operasi komersial/ *Start of commercial operations*	Persentase penyertaan/ *Percentage of ownership* 2022	2021
Investasi pada entitas asosiasi/ *Investments in associates*					
PT Sumber Segara Primadaya (“S2P”)	Cilacap	Pembangkit listrik tenaga uap/ *Steam gas electricity power plant*	2006	49.00	49.00
PT Rekind Daya Mamuju (“RDM”)	Jakarta	Pembangkit listrik tenaga uap/ *Steam gas electricity power plant*	2018	10.00	10.00
PT Sumbagsel Energi Sakti Pewali (“SS Pewali”)	Jakarta	Pembangkit listrik tenaga uap/ *Steam gas electricity power plant*	*)	10.00	10.00
Investasi pada ventura bersama/ *Investments in joint ventures*					
PT Bajradaya Sentranusa (“BDSN”)	Asahan	Pembangkit listrik tenaga air/ *Hydro electricity power plant*	2011	36.61	36.61
PT Bukit Pembangkit Innovative (“BPI”)	Palembang	Pembangkit listrik tenaga uap/ *Steam gas electricity power plant*	2015	40.25	40.25
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali (“KPJB”)	Jepara	Operasi dan pemeliharaan/ *Operational and maintenance*	2010	49.00	49.00
PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali (“SGPJB”)	Jakarta	Pembangkit listrik tenaga uap/ *Steam gas electricity power plant*	2019	30.00	30.00
PT Guohua Taidian Pembangkitan Jawa Bali (“GTPJB”)	Jakarta	Operasi dan pemeliharaan/ *Operational and maintenance*	2019	30.00	30.00
PT Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energy (“PMSE”)	Jakarta	Pembangkit listrik tenaga surya/ *Solar electricity power plant*	*)	51.00	51.00
PT North Sumatera Hydro Energy (“NSHE”)	Jakarta	Pembangkit listrik tenaga air/ *Hydro electricity power plant*	*)	25.00	25.00

*) Dalam tahap pengembangan/*Under development stage*

Pergerakan investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut:

The movements in the investments in associates and joint ventures are as follows:

	2022						
	Jumlah tercatat 1 Januari 2022/ *Carrying amount 1 January 2022*	Penambahan/ *Additions*	Dividen/ *Dividends*	Bagian atas laba/(rugi)/ *Share in net profit/ (loss)*	Bagian atas penghasilan/ (kerugian) komprehensif lainnya/ *Share in other comprehensive income/(loss)*	Jumlah tercatat 31 Desember 2022/ *Carrying amount 31 December 2022*	
Entitas asosiasi							***Associates***
S2P	5,192,671	-	(275,376)	1,785,106	-	6,702,401	*S2P*
RDM	54,497	-	-	(1,825)	4,924	57,596	*RDM*
SS Pewali	25,505	-	-	1,282	-	26,787	*SS Pewali*
Sub-jumlah	**5,272,673**	**-**	**(275,376)**	**1,784,563**	**4,924**	**6,786,784**	***Sub-total***
Ventura bersama							***Joint ventures***
BDSN	936,965	-	(106,324)	58,414	327,195	1,216,250	*BDSN*
BPI	1,502,427	-	-	96,511	167,989	1,766,927	*BPI*
KPJB	59,487	-	(4,900)	21,603	-	76,190	*KPJB*
SGPJB	3,310,343	-	(107,186)	718,315	336,427	4,257,899	*SGPJB*
GTPJB	2,726	-	(166)	269	259	3,088	*GTPJB*
PMSE	69,241	-	-	70,705	9,920	149,866	*PMSE*
NSHE	1,236,984	393,398	-	103,651	123,282	1,857,315	*NSHE*
Sub-jumlah	**7,118,173**	**393,398**	**(218,576)**	**1,069,468**	**965,072**	**9,327,535**	***Sub-total***
Jumlah	**12,390,846**	**393,398**	**(493,952)**	**2,854,031**	**969,996**	**16,114,319**	***Total***

	2021						
	Jumlah tercatat 1 Januari 2021/ *Carrying amount 1 January 2021*	Penambahan/ *Additions*	Dividen/ *Dividends*	Bagian atas laba/(rugi)/ *Share in net profit/ (loss)*	Bagian atas penghasilan/ (kerugian) komprehensif lainnya/ *Share in other comprehensive income/(loss)*	Jumlah tercatat 31 Desember 2021/ *Carrying amount 31 December 2021*	
Entitas asosiasi							***Associates***
S2P	3,640,270	-	(229,042)	1,781,443	-	5,192,671	*S2P*
RDM	61,384	-	-	(6,887)	-	54,497	*RDM*
SS Pewali	25,491	-	-	14	-	25,505	*SS Pewali*
Sub-jumlah	**3,727,145**	**-**	**(229,042)**	**1,774,570**	**-**	**5,272,673**	***Sub-total***

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/62 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

14. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES (continued)

Pergerakan investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The movements in the investments in associates and joint ventures are as follows: (continued)

	2021						
	Jumlah tercatat 1 Januari 2021/ *Carrying amount 1 January 2021*	Penambahan/ *Additions*	Dividen/ *Dividends*	Bagian atas laba/(rugi)/ *Share in net profit/ (loss)*	Bagian atas penghasilan/ (kerugian) komprehensif lainnya/ *Share in other comprehensive income/(loss)*	Jumlah tercatat 31 Desember 2021/ *Carrying amount 31 December 2021*	
Ventura bersama							***Joint ventures***
BDSN	874,060	-	(74,268)	99,293	37,880	936,965	*BDSN*
BPI	1,373,266	-	-	65,169	63,992	1,502,427	*BPI*
KPJB	60,295	-	(6,441)	5,633	-	59,487	*KPJB*
SGPJB	2,589,526	-	-	662,539	58,278	3,310,343	*SGPJB*
GTPJB	2,474	-	-	296	(44)	2,726	*GTPJB*
PMSE	23,741	56,740	-	(10,520)	(720)	69,241	*PMSE*
NSHE	1,094,049	35,858	-	271,331	(164,254)	1,236,984	*NSHE*
Sub-jumlah	**6,017,411**	**92,598**	**(80,709)**	**1,093,741**	**(4,868)**	**7,118,173**	***Sub-total***
Jumlah	**9,744,556**	**92,598**	**(309,751)**	**2,868,311**	**(4,868)**	**12,390,846**	***Total***

Seluruh entitas asosiasi dan ventura bersama dicatat oleh Grup dengan menggunakan metode ekuitas. Seluruh entitas adalah entitas tertutup dan tidak terdapat harga pasar yang dikutip yang tersedia untuk sahamnya.

All the associates and joint ventures are recorded by the Group using the equity method. They are private entities and there is no quoted market price available for their shares.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat pembatasan dan risiko signifikan yang terkait dengan investasi pada asosiasi dan ventura bersama.

As at 31 December 2022 and 2021, management believes that there is no significant restriction and risk regarding the investments in associates and joint ventures.

Berikut ini adalah ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi dan ventura bersama pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas:

The following tables contain the summarised financial information for the associates and joint ventures as at 31 December 2022 and 2021, that have been accounted for using the equity method:

Entitas asosiasi

Associates

	31 Desember/*December 2022*				
	S2P	RDM	SS Pewali	Total	
Kas dan setara kas	1,585,991	52,128	1,131,293	2,769,412	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya (tidak termasuk kas)	3,416,904	275,822	80	3,692,806	*Other current assets (excluding cash)*
Jumlah aset lancar	5,002,895	327,950	1,131,373	6,462,218	*Total current assets*
Utang usaha	1,588,051	123,624	-	1,711,675	*Trade payables*
Liabilitas lancar lainnya	4,915,883	231,788	55	5,147,726	*Other current liabilities*
Jumlah liabilitas lancar	6,503,934	355,412	55	6,859,401	*Total current liabilities*
Aset tidak lancar	30,970,555	1,499,783	327,912	32,798,250	*Non-current assets*
Liabilitas keuangan	8,275,878	854,919	1,039,029	10,169,826	*Financial liabilities*
Liabilitas lainnya	7,515,269	41,513	152,327	7,709,109	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas tidak lancar	15,791,147	896,432	1,191,356	17,878,935	*Total non-current liabilities*
Aset bersih	13,678,369	575,889	267,874	14,522,132	*Net assets*
% kepemilikan	49.00%	10.00%	10.00%		*% of ownership*
Bagian Grup atas aset bersih asosiasi	6,702,401	57,589	26,787	6,786,777	*The Group's share of the net assets of associates*
Penyesuaian metode ekuitas	-	7	-	7	*Adjustments of equity methods*
Jumlah tercatat	**6,702,401**	**57,596**	**26,787**	**6,786,784**	***Total carrying value***

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/63 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

14. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES (continued)

Entitas asosiasi (lanjutan)

***Associates** (continued)*

	31 Desember/*December 2022*				
	S2P	RDM	SS Pewali	Total	
Pendapatan	12,563,860	319,770	-	12,883,630	*Revenue*
Beban pokok pendapatan	(5,959,095)	(273,701)	-	(6,232,796)	*Cost of revenue*
Depresiasi dan amortisasi	(43,806)	(1,866)	-	(45,672)	*Depreciation and amortisation*
Penghasilan keuangan	3,572	-	-	3,572	*Finance income*
Beban keuangan	(965,962)	(57,744)	-	(1,023,706)	*Finance costs*
Beban operasi	(2,387,543)	(21,617)	(6,035)	(2,415,195)	*Operating expenses*
Pendapatan/(beban) lain-lain, bersih	1,122,370	14,781	18,857	1,156,008	*Other income/(expenses)-net*
(Beban)/manfaat pajak penghasilan	(690,322)	2,123	-	(688,199)	*Income tax (expense)/income*
Laba tahun berjalan	3,643,074	(18,254)	12,822	3,637,642	*Profit for the year*
% kepemilikan	49.00%	10.00%	10.00%		*% of ownership*
Bagian Grup atas laba bersih asosiasi tahun berjalan	**1,785,106**	**(1,825)**	**1,282**	**1,784,563**	***The Group's share in net profit for the year of associates***
Penghasilan komprehensif lainnya	-	49,237	-	49,237	*Other comprehensive income*
Bagian Grup atas penghasilan komprehensif lainnya asosiasi	**-**	**4,924**	**-**	**4,924**	***The Group's share of other comprehensive income of associates***
Dividen yang diterima dari perusahaan asosiasi	**(275,376)**	**-**	**-**	**(275,376)**	***Dividends received from associates***

	31 Desember/*December 2021*				
	S2P	RDM	SS Pewali	Total	
Kas dan setara kas	1,139,399	797	1,058,385	2,198,581	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya (tidak termasuk kas)	3,024,301	284,865	30	3,309,196	*Other current assets (excluding cash)*
Jumlah aset lancar	4,163,700	285,662	1,058,415	5,507,777	*Total current assets*
Utang usaha	1,246,735	97,749	-	1,344,484	*Trade payables*
Liabilitas lancar lainnya	5,077,251	167,058	38	5,244,347	*Other current liabilities*
Jumlah liabilitas lancar	6,323,986	264,807	38	6,588,831	*Total current liabilities*
Aset tidak lancar	29,863,035	1,425,822	119,718	31,408,575	*Non-current assets*
Liabilitas keuangan	9,424,681	872,117	923,043	11,219,841	*Financial liabilities*
Liabilitas lainnya	6,558,646	36,933	-	6,595,579	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas tidak lancar	15,983,327	909,050	923,043	17,815,420	*Total non-current liabilities*
Aset bersih	11,719,422	537,627	255,052	12,512,101	*Net assets*
% kepemilikan	49.00%	10.00%	10.00%	-	*% of ownership*
Bagian Grup atas aset bersih asosiasi	5,742,517	53,763	25,505	5,821,785	*The Group's share of the net assets of associates*
Penyesuaian metode ekuitas	(549,846)	734	-	(549,112)	*Adjustments of equity methods*
Jumlah tercatat	**5,192,671**	**54,497**	**25,505**	**5,272,673**	***Total carrying value***
Pendapatan	11,645,263	272,200	-	11,917,463	*Revenue*
Beban pokok pendapatan	(5,775,285)	(236,981)	-	(6,012,266)	*Cost of revenue*
Depresiasi dan amortisasi	(207,503)	-	-	(207,503)	*Depreciation and amortisation*
Penghasilan keuangan	7,322	68	1,048	8,438	*Finance income*
Beban keuangan	(999,357)	(46,031)	(9)	(1,045,397)	*Finance costs*
Beban operasi	(1,960,675)	(13,954)	(4,251)	(1,978,880)	*Operating expenses*
Pendapatan/(beban) lain-lain, bersih	1,287,830	(52,084)	3,356	1,239,102	*Other income/(expenses)-net*
Beban pajak penghasilan	(361,997)	7,909	-	(354,088)	*Income tax expense*
Laba tahun berjalan	3,635,598	(68,873)	144	3,566,869	*Profit for the year*
% kepemilikan	49.00%	10.00%	10.00%	-	*% of ownership*
Bagian Grup atas laba bersih asosiasi tahun berjalan	**1,781,443**	**(6,887)**	**14**	**1,774,570**	***The Group's share in net profit for the year of associates***
Penghasilan komprehensif lainnya	-	-	-	-	*Other comprehensive income*
Bagian Grup atas penghasilan komprehensif lainnya asosiasi	**-**	**-**	**-**	**-**	***The Group's share of other comprehensive income of associates***
Dividen yang diterima dari perusahaan asosiasi	**(229,042)**	**-**	**-**	**(229,042)**	***Dividends received from associates***

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/64 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

14. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES (continued)

Ventura bersama / *Joint ventures*

	31 Desember/*December* 2022							
	BPI	KPJB	SGPJB	BDSN	NSHE	Lainnya/ *Others*	Jumlah/ *Total*	
Kas dan setara kas	46,288	55,794	3,666,740	652,936	302,515	104,687	4,828,960	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya (tidak termasuk kas)	650,825	102,620	6,711,063	662,198	68,013	190,366	8,385,085	*Other current assets (excluding cash)*
Jumlah aset lancar	697,113	158,414	10,377,803	1,315,134	370,528	295,053	13,214,045	*Total current assets*
Utang usaha	311,760	3,998	5,166	66,175	-	13,180	400,279	*Trade payables*
Liabilitas lancar lainnya	230,868	21,017	4,142,617	193,967	534,888	81,409	5,204,766	*Other current liabilities*
Jumlah liabilitas lancar	542,628	25,015	4,147,783	260,142	534,888	94,589	5,605,045	*Total current liabilities*
Aset tidak lancar	4,791,900	36,340	24,747,224	5,822,212	9,806,685	573,613	45,777,974	*Non-current assets*
Liabilitas keuangan	-	-	15,314,854	2,363,502	529,228	405,347	18,612,931	*Financial liabilities*
Liabilitas lainnya	574,070	10,832	1,469,393	1,171,747	1,702,698	64,584	4,993,324	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas tidak lancar	574,070	10,832	16,784,247	3,535,249	2,231,926	469,931	23,606,255	*Total of non-current liabilities*
Aset bersih	4,372,315	158,907	14,192,997	3,341,955	7,410,399	304,146	29,780,719	*Net assets*
% kepemilikan	40.25%	49.00%	30.00%	36.61%	25.00%	30.00% - 51.00%	-	*% of ownership*
Bagian Grup atas aset bersih ventura bersama	1,759,857	77,864	4,257,899	1,223,490	1,852,600	152,952	9,324,662	*The Group's share of the net assets of joint ventures*
Penyesuaian metode ekuitas	7,070	(1,674)	-	(7,240)	4,715	2	2,873	*Adjustments of equity methods*
Jumlah tercatat	**1,766,927**	**76,190**	**4,257,899**	**1,216,250**	**1,857,315**	**152,954**	**9,327,535**	***Carrying value***
Pendapatan	1,063,858	223,169	9,454,486	641,023	3,280,336	389,665	15,052,537	*Revenue*
Beban pokok pendapatan	(721,440)	(159,725)	(5,756,034)	(59,386)	(2,640,055)	(338,849)	(9,675,489)	*Cost of revenue*
Depresiasi dan amortisasi	(5,955)	(8,050)	(11,981)	(1,226)	-	-	(27,212)	*Depreciation and amortisation*
Penghasilan keuangan	1,171	1,522	137,971	-	-	15	140,679	*Finance income*
Beban keuangan	(5,888)	(113)	(922,757)	(266,181)	(69,978)	(23,167)	(1,288,084)	*Finance costs*
Beban operasi	(85,933)	(29,387)	(225,227)	-	(43,111)	(13,670)	(397,328)	*Operating expenses*
Pendapatan/(beban) lain-lain, bersih	126,772	30,538	(218,613)	(85,239)	15,453	177,892	46,803	*Other income/(expenses) - net*
Beban pajak penghasilan	(132,806)	(13,867)	(63,461)	(69,434)	(128,042)	(52,350)	(459,960)	*Income tax expense*
Laba tahun berjalan	239,779	44,087	2,394,384	159,557	414,603	139,536	3,391,946	*Profit for the year*
% kepemilikan	40.25%	49.00%	30.00%	36.61%	25.00%	30.00% - 51.00%	-	*% of ownership*
Bagian Grup atas laba bersih ventura bersama tahun berjalan	**96,511**	**21,603**	**718,315**	**58,414**	**103,651**	**70,974**	**1,069,468**	***The Group's share of net profit for the year of joint ventures***
Penghasilan komprehensif lainnya	417,364	-	1,121,423	893,731	493,127	20,314	2,945,959	*Other comprehensive income*
Bagian atas penghasilan komprehensif lainnya ventura bersama	**167,989**	**-**	**336,427**	**327,195**	**123,282**	**10,179**	**965,072**	***Share of other comprehensive income of joint ventures***
Dividen yang diterima dari perusahaan ventura bersama	**-**	**(4,900)**	**(107,186)**	**(106,324)**	**-**	**(166)**	**(218,576)**	***Dividends received from joint ventures***

	31 Desember/*December* 2021							
	BPI	KPJB	SGPJB	BDSN	NSHE	Lainnya/ *Others*	Jumlah/ *Total*	
Kas dan setara kas	293,902	20,981	1,929,434	355,570	92,070	236,592	2,928,549	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya (tidak termasuk kas)	561,615	76,750	6,224,185	320,009	2,033	7,867	7,192,459	*Other current assets (excluding cash)*
Jumlah aset lancar	855,517	97,731	8,153,619	675,579	94,103	244,459	10,121,008	*Total current assets*
Utang usaha	769,800	2,941	19,442	60,560	-	2,723	855,466	*Trade payables*
Liabilitas lancar lainnya	647,454	17,318	4,245,300	453,895	614,308	44,179	6,022,454	*Other current liabilities*
Jumlah liabilitas lancar	1,417,254	20,259	4,264,742	514,455	614,308	46,902	6,877,920	*Total current liabilities*
Aset tidak lancar	4,657,167	53,479	24,039,202	5,437,068	5,841,849	390,546	40,419,311	*Non-current assets*
Liabilitas keuangan	-	-	15,650,358	1,872,532	-	434,991	17,957,881	*Financial liabilities*
Liabilitas lainnya	539,072	11,207	1,243,255	942,450	373,710	3,996	3,113,690	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas tidak lancar	539,072	11,207	16,893,613	2,814,982	373,710	438,987	21,071,571	*Total of non-current liabilities*
Aset bersih	3,556,358	119,744	11,034,466	2,783,210	4,947,934	149,116	22,590,828	*Net assets*
% kepemilikan	40.25%	49.00%	30.00%	36.61%	25.00%	30.00% - 51.00%	-	*% of ownership*
Bagian Grup atas aset bersih ventura bersama	1,431,434	58,675	3,310,340	1,018,933	1,236,984	74,141	7,130,507	*The Group's share of the net assets of joint ventures*
Penyesuaian metode ekuitas	70,993	812	3	(81,968)	-	(2,174)	(12,334)	*Adjustments of equity methods*
Jumlah tercatat	**1,502,427**	**59,487**	**3,310,343**	**936,965**	**1,236,984**	**71,967**	**7,118,173**	***Carrying value***

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/65 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

14. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES (continued)

Ventura bersama (lanjutan)

***Joint ventures** (continued)*

	31 Desember/*December* 2021							
	BPI	KPJB	SGPJB	BDSN	NSHE	Lainnya/ *Others*	Jumlah/ *Total*	
Pendapatan	1,046,089	228,549	8,492,010	664,441	1,380,437	619,894	12,431,420	*Revenue*
Beban pokok pendapatan	(601,323)	(179,652)	(5,324,028)	(65,024)	(871,073)	(373,770)	(7,414,870)	*Cost of revenue*
Depresiasi dan amortisasi	-	(6,610)	-	(855)	-	-	(7,465)	*Depreciation and amortisation*
Penghasilan keuangan	1,464	1,141	330,615	158	2,514	109	336,001	*Finance income*
Beban keuangan	(34,199)	(322)	(687,586)	(182,674)	(81,235)	(19,998)	(1,006,014)	*Finance costs*
Beban operasi	(82,257)	(21,046)	(238,453)	-	(77,822)	(233,969)	(653,547)	*Operating expenses*
Pendapatan/(beban) lain-lain, bersih	(60,402)	(3,106)	(23,788)	3,095	867,339	(3,950)	779,188	*Other income/(expenses) - net*
Beban pajak penghasilan	(107,461)	(7,458)	(340,307)	(147,922)	(134,836)	(7,958)	(745,942)	*Income tax expense*
Laba/(rugi) tahun berjalan	161,911	11,496	2,208,463	271,219	1,085,324	(19,642)	3,718,771	*Profit/(loss) for the year*
% kepemilikan	40.25%	49.00%	30.00%	36.61%	25.00%	30.00% - 51.00%	-	*% of ownership*
Bagian Grup atas laba/(rugi) bersih ventura bersama tahun berjalan	**65,169**	**5,633**	**662,539**	**99,293**	**271,331**	**(10,224)**	**1,093,741**	***The Group's share of net profit/(loss) for the year of joint ventures***
Penghasilan/(kerugian) komprehensif lainnya	158,988	-	194,261	103,470	(657,017)	(1,558)	(201,856)	*Other comprehensive income/(loss)*
Bagian atas penghasilan/ (kerugian) komprehensif lainnya ventura bersama	**63,992**	**-**	**58,278**	**37,880**	**(164,254)**	**(764)**	**(4,868)**	***Share of other comprehensive income/(loss) of joint ventures***
Dividen yang diterima dari perusahaan ventura bersama	**-**	**(6,441)**	**-**	**(74,268)**	**-**	**-**	**(80,709)**	***Dividends received from joint ventures***

Investasi pada entitas diatas diperoleh terutama untuk tujuan potensi pertumbuhan jangka panjang, karena seluruh entitas tersebut bergerak dalam industri ketenagalistrikan yang sama dengan industri Grup. Manajemen meyakini bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai.

The investments in the above entities are held primarily for long-term growth potential, since these entities are engaged in the same electricity industry as the Group. Management believes that there are no indications of impairment.

15. ASET TIDAK LANCAR LAIN

15. OTHER NON-CURRENT ASSETS

	2022	2021	
Biaya ditangguhkan	134,237	112,876	*Deferred charges*
Aset takberwujud			*Intangible assets*
Piranti lunak	3,506	3,333	*Software*
Biaya legal terkait perpanjangan hak atas tanah	63,203	48,625	*Legal costs for renewal of land rights*
Jumlah	**200,946**	**164,834**	***Total***

Amortisasi aset tak berwujud

Beban amortisasi aset takberwujud tahun 2022 dan 2021, masing-masing sebesar Rp27.595 dan Rp33.617 disajikan sebagai bagian dari pendapatan/(beban) lain-lain - bersih dalam laporan laba rugi konsolidasian tahun berjalan.

Amortisation of intangible assets

Amortisation of intangible assets in 2022 and 2021, amounted to Rp27,595 and Rp33,617 respectively, and are presented as part of other income/(expenses) - net in profit or loss during the years.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/66 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

16. UTANG USAHA / *16. TRADE PAYABLES*

Akun ini merupakan liabilitas sehubungan dengan pembelian bahan bakar, barang dan jasa sebagai berikut:

This account represents the payables arising from purchases of fuel, goods and services as follows:

	2022	2021	
Pihak ketiga	1,864,987	1,719,776	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 31)	472,926	1,541,586	*Related parties (Note 31)*
Jumlah	**2,337,913**	**3,261,362**	***Total***

Lihat Catatan 31 untuk informasi saldo dan transaksi-transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 31 for the balances and transactions with related parties.

17. UTANG LAIN-LAIN / *17. OTHER PAYABLES*

Akun ini merupakan liabilitas sehubungan dengan kegiatan diluar usaha sebagai berikut:

This account represents liabilities in connection with non-business activities as follows:

	2022	2021	
Pihak ketiga	495,794	561,683	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 31)	299,254	35,357	*Related parties (Note 31)*
Jumlah	**795,048**	**597,040**	***Total***

Lihat Catatan 31 untuk informasi saldo dan transaksi-transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 31 for the balances and transactions with related parties.

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA / *18. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES*

	2022	2021	
Program pensiun manfaat pasti	23,671	64,671	*Defined benefit pension program*
Imbalan pascakerja lainnya	1,189,167	1,069,360	*Other post-employment benefits*
Imbalan pemeliharaan kesehatan	2,381,906	1,607,882	*Health care benefits*
Imbalan jangka panjang lainnya	69,988	116,579	*Other long-term benefits*
Jumlah	3,664,732	2,858,492	*Total*
Bagian jangka panjang	**(3,457,971)**	**(2,695,320)**	***Non-current portion***
Bagian jangka pendek	206,761	163,172	*Current portion*
Bonus dan insentif prestasi kerja	558,637	539,020	*Bonus and performance incentives*
Bagian jangka pendek	**765,398**	**702,192**	***Current portion***

	2022	2021	
Beban diakui di laba rugi (Catatan 28):			***Expense recognised in profit or loss (Note 28):***
Program pensiun manfaat pasti	8,639	12,066	*Defined benefit pension program*
Imbalan pascakerja lainnya	117,871	148,729	*Other post-employment benefits*
Imbalan pemeliharaan kesehatan	168,328	155,316	*Health care benefits*
Imbalan jangka panjang lainnya	(23,638)	37,594	*Other long-term benefits*
Jumlah	**271,200**	**353,705**	***Total***

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/67 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

18. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES *(continued)*

	2022	2021	
Pengukuran kembali program manfaat pasti diakui di penghasilan/(kerugian) komprehensif lain:			***Remeasurement on defined benefit plan recognised in other comprehensive income/(loss):***
Program pensiun manfaat pasti	38,957	8,467	*Defined benefit pension program*
Imbalan pascakerja lainnya	(48,977)	(3,031)	*Other post-employment benefits*
Imbalan pemeliharaan kesehatan	(654,488)	186,979	*Health care benefits*
Jumlah	**(664,508)**	**192,415**	***Total***

Liabilitas imbalan pascakerja karyawan

Program pensiun manfaat pasti

Grup menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk semua karyawan tetap yang memenuhi syarat. Program pensiun ini memberikan imbalan berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan.

Dana pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun PLN ("DP-PLN"), pihak berelasi, yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. KEP-284/KM.17/1997 tanggal 15 Mei 1997.

DP-PLN telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. KEP-8/NB.1/2016 tanggal 11 Februari 2016 atas peningkatan manfaat pasti pensiun yang disediakan Grup dalam program dana pensiun.

Pendanaan DP-PLN terutama berasal dari iuran karyawan dan pemberi kerja masing-masing sebesar 6,00% dan 17,77% dari penghasilan dasar pensiun.

Imbalan pascakerja lainnya

Selain dari program dana pensiun dan imbalan pemeliharaan kesehatan, Grup menyediakan imbalan pesangon dan penghargaan purna jabatan tanpa pendanaan bagi pegawai yang memenuhi syarat.

PJBS melakukan pendanaan dana pensiun yang dikelola bank lokal sebesar 4% dari penghasilan dasar.

MKP serta RE, memberikan imbalan pascakerja manfaat pasti tanpa pendanaan kepada karyawan yang memenuhi syarat sesuai dengan PP.

Entitas lainnya memberikan imbalan pascakerja kepada karyawan sesuai dengan PKB.

Post-employment benefit obligations

Defined benefit pension program

The Group has established a defined benefit pension program covering all of its eligible permanent employees. This plan provides benefits based on the basic pension income and the period of employment.

The pension plan is managed by Dana Pensiun PLN ("DP-PLN"), a related party, whose deed of establishment was approved by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. KEP-284/KM.17/1997 dated 15 May 1997.

DP-PLN has obtained an approval from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. KEP-8/NB.1/2016 dated 11 February 2016 in relation to the increase in the defined pension benefits that are provided by the Group's pension plan.

DP-PLN is mainly funded by contributions from both the employees and the employer which are 6.00% and 17.77% from the basic pension income, respectively.

Other post-employment benefits

In addition to the pension plan and health care benefits, the Group also provides unfunded severance benefits and completion of employment awards for eligible employees.

PJBS provides a funded pension plan that is managed by local banks at 4% of the basic income.

MKP and RE, provided the unfunded post-employment benefits for their qualifying employees under the CR.

Other entities provided the post-employment benefits for the qualifying employee under the CLA.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/68 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Liabilitas imbalan pascakerja karyawan (lanjutan)

Imbalan pemeliharaan kesehatan

Selain program pensiun yang dikelola oleh DP-PLN, Grup menyediakan imbalan program kesehatan tanpa pendanaan bagi pensiunan dan tanggungannya yang memenuhi persyaratan.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Grup memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya berupa uang cuti besar, tunjangan kecelakaan dinas, bantuan kematian dan pemakaman dan manfaat penghargaan winduan bagi karyawan yang memenuhi persyaratan.

Perhitungan aktuaria atas program pensiun manfaat pasti, imbalan pascakerja lainnya, imbalan pemeliharaan kesehatan dan imbalan kerja jangka panjang lainnya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, dihitung oleh kantor konsultan aktuaria terdaftar, Kantor Konsultan Aktuaria ("KKA") Tubagus Syafrial dan Amran Nangasan dalam laporannya masing-masing tertanggal 29 Maret 2023 dan 24 Maret 2022.

Asumsi aktuarial utama yang digunakan dalam perhitungan liabilitas imbalan kerja:

18. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES *(continued)*

Post-employment benefit obligations *(continued)*

Health care benefits

In addition to the pension plan managed by DP-PLN, the Group also provides unfunded health care benefit plans for their pensioners and their eligible dependents.

Other long-term benefits

The Group provides other long-term employee benefits such as long service leave, work accident, death and funeral allowances and an eight-year service awards for the qualifying employees.

The actuarial calculations of the defined benefit pension program, other post-employment benefits, health care benefits and other long-term benefits for the years ended 31 December 2022 and 2021 were calculated by a registered actuarial consulting firm, Kantor Konsultan Aktuaria ("KKA") Tubagus Syafrial dan Amran Nangasan based on its report dated 29 March 2023 and 24 March 2022, respectively.

The principal actuarial assumptions that have been used in the calculations of the employment benefits obligation:

Tabel mortalita	CSO-58	*Mortality table*
Usia pensiun normal	56 tahun/*years old*	*Normal retirement age*

Asumsi yang berhubungan dengan pengalaman mortalitas masa depan ditentukan berdasarkan saran aktuaris menurut statistik yang telah diterbitkan dan pengalaman Grup. Asumsi mortalitas yang digunakan adalah tabel mortalita CSO-58 yang diterapkan dalam penghitungan liabilitas kerja jangka panjang yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada tahun 2020, Grup melakukan studi untuk melihat tabel mortalitas mana yang paling sesuai dengan profil mortalitas pegawai dan pensiunan Grup. Dalam melakukan studi, Grup telah mempertimbangkan CSO-58, GAM-71, ANN-49, GAM-83, TMI-2011 dan TMI-2019. Dari studi tersebut, Grup memutuskan bahwa aset mortalitas yang paling sesuai dengan profil mortalitas pegawai dan pensiunan Grup adalah CSO-58.

The assumptions regarding the future mortality experience are based on actuarial advice in accordance with published statistics and experiences by the Group. The mortality assumptions that have been used are based on the CSO-58 mortality table which was applied when calculating the long-term benefits liability recognised within the consolidated statement of financial position.

In 2020, the Group conducted a study to determine which mortality tables best suited most of the Group's employees' and pensioners' mortality profile. In the study, the Group considered CSO-58, GAM-71, ANN-49, GAM-83, TMI-2011 and TMI-2019. Based on the study, the Group decided that the mortality table that best suited the mortality profile of the Group's employees and pensioners was CSO-58.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/69 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

18. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Liabilitas imbalan pascakerja karyawan (lanjutan)

Post-employment benefit obligations *(continued)*

Program pensiun manfaat pasti

Defined benefit pension program

Jumlah yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian ditentukan sebagai berikut:

The amounts recognised in the consolidated statements of financial position were determined as follows:

	2022	2021	
Nilai kini kewajiban yang didanai	549,463	544,874	*Present value of funded obligations*
Nilai wajar aset program	(525,792)	(480,203)	*Fair value of plan assets*
Liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian	**23,671**	**64,671**	***Liability in the consolidated statements of financial position***

Pergerakan liabilitas program pensiun manfaat pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movements in the defined benefit pension program obligations during the years were as follows:

	2022	2021	
Pada awal tahun	544,874	513,853	*At beginning of the year*
Dibebankan ke laba rugi:			*Charged to profit or loss:*
Biaya jasa kini	7,910	10,379	*Current service cost*
Biaya bunga	36,604	37,382	*Interest expense*
	44,514	47,761	
Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain:			*Charged to other comprehensive income:*
(Keuntungan)/kerugian dari penyesuaian atas pengalaman	(286)	446	*(Gains)/losses from experience adjustments*
(Keuntungan)/kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(5,669)	16,311	*(Gains)/losses from changes in financial assumptions*
Keuntungan aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografik	433	-	*Gains from changes in demographic assumptions*
Keuntungan aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi lainnya	27	-	*Gains from changes in other assumptions*
	(5,495)	16,757	
Pembayaran manfaat	(34,430)	(33,497)	*Benefit payments*
Pada akhir tahun	**549,463**	**544,874**	***At end of the year***

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/70 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

18. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES *(continued)*

Liabilitas imbalan pascakerja karyawan (lanjutan)

Post-employment benefit obligations *(continued)*

Program pensiun manfaat pasti (lanjutan)

Defined benefit pension program *(continued)*

Pergerakan nilai wajar aset program selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movements in the fair value of the plan assets during the years were as follows:

	2022	2021	
Pada awal tahun	480,203	443,491	*At beginning of year*
Imbalan hasil aset program	32,751	32,558	*Return on plan assets*
Iuran dari pemberi kerja	10,682	9,290	*Contribution from employers*
Iuran pekerja	3,124	3,137	*Contribution from employees*
Keuntungan aktuarial yang diakui	33,462	25,224	*Recognised actuarial gains*
Pembayaran manfaat	(34,430)	(33,497)	*Benefit payments*
Pada akhir tahun	**525,792**	**480,203**	***At end of the year***

Aset program terdiri dari:

The plan assets comprise the following:

	2022		2021		
	Jumlah/ *Total*	%	Jumlah/ *Total*	%	
Instrumen utang	325,889	61.98	254,790	53.06	*Debt instruments*
Instrumen ekuitas	85,673	16.29	84,206	17.54	*Equity instruments*
Properti	60,538	11.51	59,327	12.35	*Property*
Kas dan setara kas	20,708	3.94	22,912	4.77	*Cash and cash equivalents*
Lain-lain	32,984	6.28	58,968	12.28	*Others*
Jumlah	**525,792**	**100.00**	**480,203**	**100.00**	***Total***

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used that were as follows:

	2022	2021	
Tingkat diskonto	7.17%	6.97%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji per tahun	5.00%	5.00%	*Salary increase rate per annum*

Sensitivitas dari liabilitas program pensiun manfaat pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefits pension program obligations to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

		Dampak atas liabilitas/ *Impact on liabilities*		
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	Kenaikan asumsi/ *Increase in assumption*	Penurunan asumsi/ *Decrease in assumption*	
Tingkat diskonto	1%	(13,531)	14,979	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	1%	14,740	(13,504)	*Salary increase rate*

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/71 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *18. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

Liabilitas imbalan pascakerja karyawan (lanjutan) / ***Post-employment benefit obligations*** *(continued)*

Imbalan pascakerja lainnya / ***Other post-employment benefits***

Jumlah yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian ditentukan sebagai berikut:

The amounts recognised in the consolidated statements of financial position were determined as follows:

	2022	2021	
Nilai kini kewajiban yang didanai	1,257,488	1,191,375	*Present value of funded obligations*
Nilai wajar aset program	(68,321)	(122,015)	*Fair value of plan assets*
Liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian	**1,189,167**	**1,069,360**	***Liability in the consolidated statements of financial position***

Pergerakan liabilitas imbalan pascakerja lainnya selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movements of the other post-employment benefits obligations during the years were as follows:

	2022	2021	
Pada awal tahun	1,191,375	1,086,136	*At beginning of the year*
Dibebankan ke laba rugi:			*Charged to profit or loss:*
Biaya jasa kini	77,079	75,667	*Current service cost*
Biaya bunga	86,536	80,747	*Interest expense*
Biaya jasa lalu	(36,060)	-	*Past service cost*
	127,555	156,414	
Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain:			*Charged to other comprehensive income:*
(Keuntungan)/kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(14,134)	29,994	*(Gains)/losses from changes in financial assumptions*
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografik	3,489	-	*Losses from changes in demographic assumptions*
Kerugian/(keuntungan) aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi lainnya	507	(291)	*Losses/(gains) from changes in other assumptions*
Keuntungan dari penyesuaian atas pengalaman	(16,186)	(22,734)	*Gains from experience adjustments*
	(26,324)	6,969	
Pembayaran manfaat	(35,118)	(58,144)	*Benefit payments*
Pada akhir tahun	**1,257,488**	**1,191,375**	***At end of the year***

Pergerakan nilai wajar aset program selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movements in the fair value of the plan assets during the years were as follows:

	2022	2021	
Pada awal tahun	122,015	98,082	*At beginning of year*
Imbalan hasil aset program	9,684	7,685	*Return on plan assets*
Iuran dari pemberi kerja	13,758	12,310	*Contribution from employers*
(Kerugian)/keuntungan aktuarial yang diakui	(75,301)	3,938	*Recognised actuarial (losses)/gains*
Pembayaran manfaat	(1,835)	-	*Benefit payments*
Pada akhir tahun	**68,321**	**122,015**	***At end of the year***

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/72 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Liabilitas imbalan pascakerja karyawan (lanjutan)

Imbalan pascakerja lainnya (lanjutan)

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

18. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES *(continued)*

Post-employment benefit obligations *(continued)*

Other post-employment benefits *(continued)*

The principal actuarial assumptions used that were as follows:

	2022	2021	
Tingkat diskonto	7.13% - 7.48%	7.12% - 7.59%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji per tahun	1.00% - 7.12%	1.00% - 7.12%	*Salary increase rate per annum*

Sensitivitas dari liabilitas imbalan pascakerja lainnya terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the other post-employment benefits obligations to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	Dampak atas liabilitas/ *Impact on liabilities* Kenaikan asumsi/ *Increase in assumption*	Penurunan asumsi/ *Decrease in assumption*	
Tingkat diskonto	1%	(101,904)	128,095	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	1%	131,254	(106,528)	*Salary increase rate*

Imbalan pemeliharaan kesehatan

Grup memiliki beberapa skema imbalan pemeliharaan kesehatan pascakerja. Metode akuntansi, asumsi dan frekuensi penilaian adalah sama dengan yang digunakan dalam skema pensiun manfaat pasti.

Pergerakan liabilitas imbalan pemeliharaan kesehatan selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Health care benefits

The Group has a number of post-employment health care benefit schemes. The accounting method, assumptions and frequency of the valuations are similar to those used for the defined benefit pension schemes.

The movements of the health care benefits obligations during the years were as follows:

	2022	2021	
Pada awal tahun	1,607,882	1,684,411	*At beginning of the year*
Dibebankan ke laba rugi:			*Charged to profit or loss:*
Biaya jasa kini	49,092	30,501	*Current service cost*
Biaya bunga	119,236	124,815	*Interest expense*
	168,328	155,316	
Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain:			*Charged to other comprehensive income:*
Kerugian/(keuntungan) aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	8,023	(395,254)	*Losses/(gains) from changes in financial assumptions*
Keuntungan aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi lainnya	(2,809)	(1,504)	*Gains from changes in other assumptions*
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografik	617,246	-	*Losses from changes in demographic assumptions*
Kerugian dari penyesuaian atas pengalaman	32,028	209,779	*Losses from experience adjustments*
	654,488	(186,979)	
Pembayaran manfaat	(48,792)	(44,866)	*Benefit payments*
Pada akhir tahun	**2,381,906**	**1,607,882**	***At end of the year***

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/73 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Liabilitas imbalan pascakerja karyawan (lanjutan)

Imbalan pemeliharaan kesehatan (lanjutan)

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

	2022	2021	
Tingkat diskonto	7.36%	7.53%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan biaya kesehatan di masa depan	5.35%	5.40%	*Future health cost increase rate*

Sensitivitas dari liabilitas liabilitas pemeliharaan kesehatan terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

18. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES *(continued)*

Post-employment benefit obligations *(continued)*

Health care benefits *(continued)*

The principal actuarial assumptions used that were as follows:

The sensitivity of the health care benefits obligations to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

	Dampak atas liabilitas/ *Impact on liabilities*			
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	Kenaikan asumsi/ *Increase in assumption*	Penurunan asumsi/ *Decrease in assumption*	
Tingkat diskonto	1%	(277,774)	342,516	*Discount rate*
Tingkat kenaikan biaya kesehatan di masa depan	1%	346,155	(284,921)	*Future health cost increase rate*

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Pergerakan liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Other long-term employee benefits

The movements of the other long-term employee benefits obligations during the years were as follows:

	2022	2021	
Pada awal tahun	116,579	104,769	*At beginning of the year*
Dibebankan ke laba rugi:			*Charged to profit or loss:*
Biaya jasa kini	(17,735)	28,246	*Current service cost*
Biaya bunga	5,109	6,615	*Interest expense*
(Keuntungan)/kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(1,908)	6,148	*(Gains)/losses from changes in financial assumptions*
(Keuntungan)/kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi lainnya	(12)	17	*(Gains)/losses from changes in other assumptions*
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografik	375	-	*Losses from changes in demographic assumptions*
Keuntungan dari penyesuaian atas pengalaman	(9,467)	(3,432)	*Gains from experience adjustments*
	(23,638)	37,594	
Pembayaran manfaat	(22,953)	(25,784)	*Benefit payments*
Pada akhir tahun	**69,988**	**116,579**	***At end of the year***

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used that were as follows:

	2022	2021	
Tingkat diskonto	6.38% - 6.65%	4.92% - 7.38%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji per tahun	7.12%	7.12%	*Salary increase rate per annum*

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/74 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

Sensitivitas dari liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

18. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES *(continued)*

Other long-term employee benefits *(continued)*

The sensitivity of the other long-term employee benefits obligations to changes in the weighted principal assumptions were as follows:

		Dampak atas liabilitas/ *Impact on liabilities*		
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	**Kenaikan asumsi/ *Increase in assumption***	**Penurunan asumsi/ *Decrease in assumption***	
Tingkat diskonto	1%	(1,722)	1,817	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	1%	1,804	(1,741)	*Salary increase rate*

Grup terekspos dengan beberapa risiko melalui program pensiun manfaat pasti dan program kesehatan pascakerja. Risiko yang paling signifikan adalah sebagai berikut:

The Group is exposed to a number of risks through its defined benefit pension program and post-employment medical plans. The most significant risks are as follows:

Volatilitas aset

Liabilitas program dihitung menggunakan tingkat diskonto yang merujuk kepada *Zero Coupon Bond* dari *Indonesia Government Securities Yield Curve* ("IGSYC"). Jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program.

Investasi didiversifikasi dengan baik, sehingga kinerja buruk satu investasi tidak akan memberikan dampak material bagi seluruh kelompok aset. Proporsi terbesar aset investasi ditempatkan pada instrumen utang, meskipun Grup juga berinvestasi pada instrumen ekuitas, properti, kas dan setara kas dan lain-lain. Grup meyakini bahwa instrumen utang memberikan imbal hasil yang paling baik dalam jangka panjang pada tingkatan risiko yang dapat diterima.

Asset volatility

The plan liabilities are calculated using a discount rate set with reference to Zero Coupon Bond from Indonesia Government Securities Yield Curve ("IGSYC"). If the plan assets underperform this yield, this will create a deficit.

Investments are well-diversified, such that the failure of any single investment would not have a material impact on the overall level of assets. The largest proportion of assets is invested in debt instruments, although the Group also invests in equity instruments, property, cash and cash equivalents and others. The Group believes that debt instruments offer the best returns over the long term with an acceptable level of risk.

Harapan umur hidup

Sebagian besar dari liabilitas program menyediakan manfaat seumur hidup, sehingga kenaikan harapan umur hidup akan mengakibatkan kenaikan liabilitas program.

Rata-rata durasi adalah masing-masing 10,51 tahun untuk program pensiun manfaat pasti, 10,68 - 25,35 tahun untuk imbalan pascakerja lainnya, 15,49 tahun untuk imbalan pemeliharaan kesehatan dan 3,59 - 3,79 tahun untuk imbalan jangka panjang lainnya.

Life expectancy

The majority of the plans' obligations are to provide lifetime benefits, so the increase in life expectancy will result in an increase in the plans' liabilities.

The weighted average durations are 10.51 years for defined benefit pension program, 10.68 - 25.35 years for other post-employment benefits, 15.49 years for health care benefits, and 3.59 - 3.79 years for other long-term benefits, respectively.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/75 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Harapan umur hidup (lanjutan)

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

18. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Life expectancy *(continued)*

The expected maturity analysis of the undiscounted post-employment benefits and other long-term benefits is as follows:

	Kurang dari 1 tahun/ *Less than a year*	Antara 1-2 tahun/ *Between 1-2 years*	Antara 2-5 tahun/ *Between 2-5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*	Jumlah/ *Total*	
Program pensiun manfaat pasti	35,041	35,957	118,630	2,120,691	2,310,319	*Defined benefit pension program*
Imbalan pascakerja lainnya	61,783	93,849	387,311	9,204,132	9,747,075	*Other post-employment benefits*
Imbalan pemeliharaan kesehatan	90,426	97,845	346,551	23,390,912	23,925,734	*Health care benefits*
Imbalan jangka panjang lainnya	19,511	22,904	82,857	55,134	180,406	*Other long-term benefits*
Jumlah	**206,761**	**250,555**	**935,349**	**34,770,869**	**36,163,534**	***Total***

Manajemen Grup berpendapat bahwa liabilitas imbalan pascakerja cukup untuk menutupi semua imbalan yang diatur dalam Peraturan Ketenagakerjaan atau PKB atau PP.

Pada tanggal 4 April 2022, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") menerbitkan siaran pers tentang "Pengatribusian Imbalan pada Periode Jasa (PSAK No. 24)" sebagai tanggapan terhadap *International Financial Accounting Standard Interpretation Committee Agenda Decision: International Accounting Standards 19 Employee Benefits – Attributing Benefit to Periods of Service*, yang diterbitkan pada Mei 2021. Pada tanggal 31 Desember 2021, dampak perubahan perhitungan tersebut sebesar Rp41.556 tidak material bagi Grup, oleh karena itu, dampak perubahan tersebut dicatat secara keseluruhan dalam laporan keuangan konsolidasian tahun berjalan.

The Group's management is of the opinion that the post-employment benefit obligation is adequate to cover all benefits provided for in the Manpower Regulation or CLA or CR.

On 4 April 2022, the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants ("DSAK-IAI") published a press release regarding "Attributing Benefit to Periods of Service (SFAS No. 24)" in response to the International Financial Accounting Standards Interpretation Committee Agenda Decision: International Accounting Standard 19 Employee Benefits - Attributing Benefit to Periods of Service, published in May 2021. As at 31 December 2021, the impact of the changes of the calculation of Rp41,556 is not significant to the Group, therefore, the impact of changes is recorded in its entirety in the consolidated financial statements for the current year.

19. MODAL SAHAM

Pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

19. CAPITAL STOCK

The Company's shareholders as at 31 December 2022 and 2021 were as follows:

Pemegang saham	Jumlah saham/ *Number of shares*	Persentase pemilikan/ *Percentage of ownership* %	Jumlah modal disetor/ *Total paid-up capital*	*Shareholders*
PLN	5,999,999,999	100	3,000,000	*PLN*
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero)	1	-	-	*Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero)*
Jumlah	**6,000,000,000**	**100**	**3,000,000**	***Total***

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/76 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

19. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perusahaan diharuskan untuk membuat penyisihan cadangan wajib hingga sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Tidak ada batasan waktu untuk membentuk cadangan tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan belum membentuk cadangan umum sesuai dengan Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan Akta Notaris No. 70 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PLN Nusantara Power yang juga memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000006.AH.01.02.TAHUN 2023. Dampak pembentukan struktur *subholding* (Catatan 1b) maka komposisi modal saham Perusahaan yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 adalah sebagai berikut:

19. CAPITAL STOCK (continued)

Under Indonesian Limited Company Law, the Company is required to establish a statutory reserve amounting to at least 20% of the Company's subscribed and paid-up capital. There is no time limit on the establishment of this reserve. As at 31 December 2022 and 2021, the Company had not yet established its general reserve in accordance with the Limited Liability Company Law.

Based on Notarial Deed No. 70 dated 30 December 2022 concerning Amendments to the Articles of Association of PT PLN Nusantara Power which obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-0000006.AH.01.02.TAHUN 2023. The impact of establishing subholding structures (Note 1b) on the composition of the Company's share capital effective on 1 January 2023 is as follows:

Pemegang saham	Jumlah saham/ *Number of shares*	Persentase pemilikan/ *Percentage of ownership* %	Jumlah modal disetor/ *Total paid-up capital*	*Shareholders*
PLN	308,510,497,999	100	154,255,249	*PLN*
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero)	1	-	-	*Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero)*
Jumlah	**308,510,498,000**	**100**	**154,255,249**	***Total***

20. DIVIDEN DAN CADANGAN UMUM

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 29 Juni 2022, pemegang saham memberi kuasa kepada pemegang saham mayoritas untuk menetapkan saldo laba, cadangan umum dan tujuan serta dividen atas laba Perusahaan tahun 2021. Berdasarkan surat PLN tanggal 8 September 2022, pembagian dividen untuk tahun buku 2021 ditetapkan sebesar Rp5.810.033 atau Rp968 (nilai penuh) per lembar saham.

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 29 Juni 2021, pemegang saham memberi kuasa kepada pemegang saham mayoritas untuk menetapkan saldo laba, cadangan umum dan tujuan serta dividen atas laba Perusahaan tahun 2020. Berdasarkan surat PLN tanggal 31 Desember 2021, pembagian dividen untuk tahun buku 2020 ditetapkan sebesar Rp7.661.396 atau Rp1.277 (nilai penuh) per lembar saham.

Pada tahun 2022 dan 2021, pembayaran dividen kepada PLN dilakukan dengan pengurangan terhadap piutang usaha dari pihak berelasi (Catatan 9 dan 31).

20. DIVIDENDS AND GENERAL RESERVE

Based on the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders dated 29 June 2022, the shareholders granted the authority to the majority shareholder to determine the Company's retained earnings, appropriation of general reserves and dividends for the 2021 net income. Based on the letter from PLN dated 8 September 2022, the distribution of dividends for the year 2021 amounted to Rp5,810,033 or Rp968 (full amount) per share.

Based on the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders dated 29 June 2021, the shareholders granted the authority to the majority shareholder to determine the Company's retained earnings, appropriation of general reserves and dividends for the 2020 net income. Based on the letter from PLN dated 31 December 2021, the distribution of dividends for the year 2020 amounted to Rp7,661,396 or Rp1,277 (full amount) per share.

In 2022 and 2021, the dividend payments to PLN were made through deduction of the trade receivables from related parties (Notes 9 and 31).

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/77 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

21. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Tambahan modal disetor berasal dari nilai pengalihan aset tetap, termasuk dana rehabilitasi PLTU Gresik Unit 1 dan 2 (berdasarkan Surat Direktur Utama PLN No. 1311/533/DIRUT/2001 tanggal 19 Maret 2001), dan material pemeliharaan sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2000 yang diterima dari PLN.

Berdasarkan Akta Notaris No. 101 tanggal 28 Juli 2022, dari Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, RE mengadakan perjanjian jual beli saham dengan PT PLN Enjiniring ("PLNE") yang merupakan entitas sepengendali, untuk mengakuisisi 125.074.552 lembar saham biasa atau setara dengan 100% kepemilikan atas PPN dengan mengalihkan 93.411.836 lembar saham biasa atau setara dengan 99,8% kepemilikan atas REC. Selisih sebesar Rp24.376 antara nilai pengalihan dan nilai buku bersih yang diterima dicatat dalam akun ekuitas sebagai tambahan modal disetor.

21. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Additional paid-in capital represents the transferred property, plant and equipment, including the funds that were provided for the rehabilitation of Gresik PLTU Unit 1 and 2 (based on Letter No. 1311/533/DIRUT/2001 dated 19 March 2001 from the President Director of PLN), and the maintenance materials from 1996 to 2000 that were received from PLN.

Based on Notarial Deed No. 101 dated 28 July 2022, of Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notary in Jakarta, RE entered into a share sale and purchase agreement with PT PLN Enjiniring ("PLNE") which is an entity under common control, to acquire 125,074,552 shares of common stock or equivalent to 100% ownership on PPN by transferring 93,411,836 common shares or equivalent to 99.8% ownership in REC. The difference of Rp24,376 between the transfer value and the net book value received is recorded in the equity account as additional paid-in capital.

22. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

22. NON-CONTROLLING INTERESTS

2022

	Jumlah tercatat 1 Januari 2022/ *Carrying amount 1 January 2022*	Akuisisi entitas anak dari kepentingan non-pengendali/ *Acquisition of subsidiaries' shares from non-controlling interest*	Divestasi/ *Divestment*	Dividen/ *Dividends*	Bagian atas laba bersih/ *Share of net profit*	Penghasilan/ (kerugian) komprehensif lain/ *Other comprehensive income/(loss)*	Jumlah tercatat 31 Desember 2022/ *Carrying amount 31 December 2022*	
PJBS	28,171	(9,084)	-	(779)	4,612	(572)	22,348	*PJBS*
NII	106,684	-	-	-	13,881	10,596	131,161	*NII*
RE	6,610	-	(197)	-	339	60	6,812	*RE*
PJBI	9	-	-	-	4	-	13	*PJBI*
PLNSC	101,709	-	-	-	16,233	-	117,942	*PLNSC*
Jumlah	**243,183**	**(9,084)**	**(197)**	**(779)**	**35,069**	**10,084**	**278,276**	***Total***

2021

	Jumlah tercatat 1 Januari 2021/ *Carrying amount 1 January 2021*	Penerbitan saham entitas anak kepada kepentingan non-pengendali/ *Issuance of subsidiaries' shares to non-controlling interests*	Divestasi/ *Divestment*	Dividen/ *Dividends*	Bagian atas laba bersih/ *Share of net profit*	Penghasilan/ (kerugian) komprehensif lain/ *Other comprehensive income/(loss)*	Jumlah tercatat 31 Desember 2021/ *Carrying amount 31 December 2021*	
PJBS	26,679	-	(414)	(2,640)	4,265	281	28,171	*PJBS*
NII	86,925	-	-	-	5,510	14,249	106,684	*NII*
RE	6,663	-	-	(39)	(3)	(11)	6,610	*RE*
PJBI	3	4	-		2	-	9	*PJBI*
PLNSC	101,328	-	-	-	381	-	101,709	*PLNSC*
Jumlah	**221,598**	**4**	**(414)**	**(2,679)**	**10,155**	**14,519**	**243,183**	***Total***

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/78 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

23. PENJUALAN TENAGA LISTRIK

Akun ini merupakan penjualan tenaga listrik kepada PLN.

Lihat Catatan 31 untuk informasi saldo dan transaksi-transaksi dengan pihak berelasi.

23. SALES OF ELECTRICITY

This account represents the sales of electricity to PLN.

Refer to Note 31 for the balances and transactions with related parties.

24. PENDAPATAN USAHA LAINNYA

Akun ini merupakan pendapatan jasa pemeliharaan, konstruksi dan lainnya yang diperoleh dari pihak berelasi dan pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut:

24. OTHER OPERATING REVENUE

This account represents the operating revenues from maintenance services, constructions and others, which were obtained from related parties and third parties, with details as follows:

	2022	2021	
Jasa operasi dan pemeliharaan	4,099,714	4,057,567	*Operation and maintenance services*
Konstruksi	845,101	727,224	*Constructions*
Lain-lain	574,909	181,965	*Others*
Jumlah	**5,519,724**	**4,966,756**	***Total***

Lihat Catatan 31 untuk informasi saldo dan transaksi-transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 31 for the balances and transactions with related parties.

25. BEBAN BAHAN BAKAR DAN PELUMAS

25. FUEL AND LUBRICANTS EXPENSES

	2022	2021	
Bahan bakar minyak			*Fuel oils*
Solar High Speed Diesel ("HSD")	105,207	1,148,437	*High Speed Diesel ("HSD")*
Fuel Marine Oil ("MFO")	111,113	413,635	*Fuel Marine Oil ("MFO")*
Sub-jumlah	216,320	1,562,072	*Sub-total*
Bahan bakar non-minyak			*Non-oil fuels*
Gas alam	8,829,391	10,328,556	*Natural gas*
Batubara	2,326,506	2,409,639	*Coals*
Air	319,351	295,026	*Water*
Biomassa	62,214	-	*Biomass*
Bahan kimia dan bahan lainnya	38,896	35,523	*Chemicals and other materials*
Pajak air permukaan	26,374	17,203	*Surface water tax*
Sub-jumlah	11,602,732	13,085,947	*Sub-total*
Minyak pelumas	32,026	24,787	*Lubricants*
Jumlah	**11,851,078**	**14,672,806**	***Total***

Lihat Catatan 31 untuk informasi saldo dan transaksi-transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 31 for the balances and transactions with related parties.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/79 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

26. BEBAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK / *26. PURCHASED ELECTRICITY EXPENSES*

Akun ini merupakan biaya pemakaian tenaga listrik dari *auxiliary equipment* mesin pembangkit.

This account represents the cost of using electricity from auxiliary equipment of generating machineries.

Lihat Catatan 31 untuk informasi saldo dan transaksi-transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 31 for the balances and transactions with related parties.

27. BEBAN PEMELIHARAAN / *27. MAINTENANCE EXPENSES*

Akun ini merupakan beban yang timbul dari pemakaian material pemeliharaan dan jasa borongan untuk keperluan pemeliharaan. Rinciannya adalah sebagai berikut:

This account represents the maintenance materials used and the contracted services for maintenance purposes. The details are as follows:

	2022	2021	
Jasa borongan	2,915,112	2,740,289	*Contracted services*
Pemakaian material pemeliharaan	1,368,361	1,386,272	*Maintenance materials used*
Jumlah	**4,283,473**	**4,126,561**	***Total***

Lihat Catatan 31 untuk informasi saldo dan transaksi-transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 31 for the balances and transactions with related parties.

28. BEBAN KEPEGAWAIAN / *28. EMPLOYEE COSTS*

	2022	2021	
Gaji dan tunjangan	894,199	812,955	*Salaries and allowances*
Bonus dan insentif karyawan	415,144	448,048	*Employee bonus and incentives*
Imbalan kerja (Catatan 18)	271,200	353,705	*Employee benefits (Note 18)*
Tunjangan kesehatan	129,439	90,367	*Medical allowances*
Pendidikan dan pelatihan	77,380	54,275	*Education and trainings*
Lain-lain	24,026	31,103	*Others*
Jumlah	**1,811,388**	**1,790,453**	***Total***

29. BEBAN USAHA LAIN-LAIN / *29. OTHER OPERATING EXPENSES*

	2022	2021	
Beban konstruksi	732,507	596,759	*Construction cost*
Honorarium	106,303	69,125	*Honorarium*
Asuransi (Catatan 31)	53,824	54,803	*Insurance (Note 31)*
Perjalanan dinas	40,385	15,246	*Business travelling*
Pajak dan retribusi lainnya	31,513	28,130	*Taxes and other retribution*
Pajak final	25,871	25,459	*Final tax*
Sewa bangunan dan tanah	23,557	24,171	*Building and land rental*
Konsumsi	20,907	19,007	*Meals consumption*
Jasa profesional	17,149	17,261	*Professional fees*
Pos dan telekomunikasi	11,840	12,531	*Postage and telecommunications*
Listrik, gas dan air	11,671	11,479	*Electricity, gas and water*
Lain-lain	71,260	50,591	*Others*
Jumlah	**1,146,787**	**924,562**	***Total***

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/80 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30. PERPAJAKAN / *30. TAXATION*

a. Pajak dibayar di muka / *a. Prepaid taxes*

	2022	2021	
Pajak Penghasilan Badan ("PPh Badan")			*Corporate Income Taxes ("CIT")*
2022	150,345	-	*2022*
2021	259,319	259,319	*2021*
2020	18,555	253,043	*2020*
Pembayaran dimuka atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar	138,532	388,727	*Prepayment of Tax Assessment Letter for Underpayment*
PPN	324,192	606,316	*VAT*
Jumlah	890,943	1,507,405	*Total*
Dikurangi: bagian lancar	**(701,465)**	**(755,157)**	***Less: current portion***
Bagian tidak lancar	**189,478**	**752,248**	***Non-current portion***

b. Utang pajak lainnya / *b. Other taxes payable*

	2022	2021	
Pajak lainnya			*Other income taxes*
Pasal 21	35,191	16,917	*Article 21*
Pasal 22	9,953	11,868	*Article 22*
Pasal 23	9,994	9,790	*Article 23*
Pasal 4 (2)	52,661	36,834	*Article 4 (2)*
PPN	13,541	33,313	*VAT*
Lain-lain	629	402	*Others*
Jumlah	**121,969**	**109,124**	***Total***

c. Beban pajak penghasilan / *c. Income tax expense*

	2022	2021	
Beban pajak kini			*Current tax*
Perusahaan			*The Company*
Tahun berjalan	-	-	*Current year*
Entitas anak			*Subsidiaries*
Tahun berjalan	121,091	65,708	*Current year*
Tahun sebelumnya (Catatan 30e)	-	5,628	*Prior year (Note 30e)*
Sub-jumlah	121,091	71,336	*Sub-total*

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/81 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30. PERPAJAKAN (lanjutan) / ***30. TAXATION** (continued)*

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan) / ***c. Income tax expense** (continued)*

	2022	2021	
Beban/(manfaat) pajak tangguhan			*Deferred tax expense/(benefit)*
Perusahaan	1,310,164	1,294,766	*The Company*
Entitas anak	(8,218)	5,750	*Subsidiaries*
Sub-jumlah	1,301,946	1,300,516	*Sub-total*
Beban pajak penghasilan konsolidasian	**1,423,037**	**1,371,852**	***Consolidated income tax expense***

Pajak atas laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian berbeda dengan jumlah teoritis yang dihitung menggunakan rata-rata tertimbang tarif pajak yang berlaku atas laba masing-masing entitas anak yang dikonsolidasi sebagai berikut:

The tax on consolidated profit before income tax differs from the theoretical amount that would arise using the weighted average tax rate applicable to profits of the consolidated subsidiaries as follows:

	2022	2021	
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	8,006,583	7,192,040	*Consolidated profit before income tax*
Beban pajak dengan tarif pajak yang berlaku 22%	1,761,448	1,582,249	*Tax expense at prevailing tax rate of 22%*
Penghasilan keuangan telah dikenakan pajak final	(27,598)	(41,482)	*Finance income subject to final tax*
Penghasilan lain tidak dapat dikurangkan	(640,518)	(518,972)	*Other non-deductible income*
Aset pajak tangguhan yang tidak diakui	329,705	321,680	*Unrecognised deferred tax assets*
Penyesuaian perubahan tarif pajak	-	28,377	*Adjustments due to changes in tax rate*
Beban pajak penghasilan konsolidasian	**1,423,037**	**1,371,852**	***Consolidated income tax expense***

Rugi pajak perusahaan yang dibawa ke depan yang masih dapat dikompensasikan dengan penghasilan kena pajak di masa depan untuk jangka waktu lima tahun dari periode di mana kerugian itu terjadi pada tanggal kedaluwarsa adalah sebagai berikut:

Tax losses carried-forward that can still be offset against future taxable income for a period of five years from the period in which the loss was incurred, with expiration dates as follows:

Tahun pajak/ *Fiscal year*	Tanggal kedaluwarsa/ *Expiry year*	Saldo/ *Balance*
2021	2026	1,462,182
2022	2027	1,498,657
Jumlah/*Total*		**2,960,839**

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/82 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan.

Pajak penghasilan sehubungan dengan penghasilan komprehensif lain selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

***30. TAXATION** (continued)*

***c. Income tax expense** (continued)*

The taxable income resulting from the reconciliation will become the basis for filing the Annual Corporate Income Tax Return.

The income tax relating to other comprehensive income during the year is as follows:

	2022			2021			
	Sebelum pajak/ *Before tax*	Manfaat pajak/ *Tax benefit*	Setelah pajak/ *After tax*	Sebelum pajak/ *Before tax*	Manfaat/ (beban) pajak/ *Tax benefit/(expense)*	Setelah pajak/ *After tax*	
Pengukuran kembali atas program manfaat pasti	(664,508)	148,312	(516,196)	192,415	(26,059)	166,356	*Remeasurement on defined benefit plan*
Surplus revaluasi aset tetap	(7,054)	-	(7,054)	(3,154,021)	691,144	(2,462,877)	*Property, plant and equipment revaluation surplus*
Bagian penghasilan/ (kerugian) komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama	969,996	-	969,996	(4,868)	-	(4,868)	*Share of other comprehensive income/(loss) from associates and joint ventures*
Jumlah	**298,434**	**148,312**	**446,746**	**(2,966,474)**	**665,085**	**(2,301,389)**	***Total***

d. Pajak tangguhan

Pergerakan pajak tangguhan Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

d. Deferred tax

The movements in the Group's deferred tax for the years ended 31 December 2022 and 2021 is as follows:

	2022					
	31 Desember/ *December* 2021	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited/ (charged) to profit or loss*	Dikreditkan/ (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ *Credited/ (charged) to other comprehensive income*	Reklasifikasi aset pajak tangguhan menjadi liabilitas pajak tangguhan/ *Reclassification from deferred tax assets to deferred tax liabilities*	31 Desember/ *December* 2022	
Aset/(liabilitas) pajak tangguhan						***Deferred tax assets/ (liabilities)***
Perusahaan						***The Company***
Liabilitas imbalan kerja	615,842	38,002	129,742	-	783,586	*Employee benefit liabilities*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	89,186	(8,290)	-	-	80,896	*Short-term employee benefits liabilities*
Provisi untuk persediaan usang	3,125	393	-	-	3,518	*Provision for obsolete inventories*
Provisi untuk penurunan nilai piutang	3,768	(492)	-	-	3,276	*Provision for impairment of receivables*
Aset tetap	(711,921)	(1,339,777)	-	1,180,422	(871,276)	*Property, plant and equipment*
Sub-jumlah	-	(1,310,164)	129,742	1,180,422	-	*Sub-total*

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/83 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30. PERPAJAKAN (lanjutan) / *30. TAXATION (continued)*

d. Pajak tangguhan (lanjutan) / *d. Deferred tax (continued)*

	2022					
	31 Desember/ *December* 2021	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited/ (charged) to profit or loss*	Dikreditkan/ (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ *Credited/ (charged) to other comprehensive income*	Reklasifikasi aset pajak tangguhan menjadi liabilitas pajak tangguhan/ *Reclassification from deferred tax assets to deferred tax liabilities*	31 Desember/ *December* 2022	
Aset/(liabilitas) pajak tangguhan (lanjutan)						***Deferred tax assets/ (liabilities)*** *(continued)*
Entitas anak						***Subsidiaries***
Liabilitas imbalan kerja	11,727	(9,145)	18,570	-	21,152	*Employee benefit liabilities*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	30,856	10,477	-	-	41,333	*Short-term employee benefits liabilities*
Provisi untuk persediaan usang	839	(43)	-	-	796	*Provision for obsolete inventories*
Provisi untuk penurunan nilai piutang	4,507	3,769	-	-	8,276	*Provision for impairment of receivables*
Aset tetap	(151)	3,160	-	-	3,009	*Property, plant and equipment*
Sub-jumlah	47,778	8,218	18,570	-	74,566	*Sub-total*
Jumlah aset pajak tangguhan - bersih	**47,778**	**(1,301,946)**	**148,312**	**1,180,422**	**74,566**	***Total of deferred tax assets - net***
Perusahaan						***The Company***
Aset tetap	(1,072,316)	-	-	(1,180,422)	(2,252,738)	*Property, plant and equipment*
Jumlah liabilitas pajak tangguhan - bersih	**(1,072,316)**	**-**	**-**	**(1,180,422)**	**(2,252,738)**	***Total of deferred tax liabilities - net***
Beban pajak tangguhan		**(1,301,946)**	**148,312**	**-**		***Deferred tax expense***

	2021							
	31 Desember/ *December* 2020	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited/ (charged) to profit or loss*	Dikreditkan/ (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ *Credited/ (charged) to other comprehensive income*	Reklasifikasi aset pajak tangguhan menjadi liabilitas pajak tangguhan/ *Reclassification from deferred tax assets to deferred tax liabilities*	Penyesuaian perubahan tarif pajak yang disajikan ke laba rugi/ *Adjustments due to changes in tax rate presented in profit or loss*	Penyesuaian perubahan tarif pajak yang disajikan ekuitas/ *Adjustments due to changes in tax rate presented in equity*	31 Desember/ *December* 2021	
Aset/(liabilitas) pajak tangguhan								***Deferred tax assets/ (liabilities)***
Perusahaan								***The Company***
Liabilitas imbalan kerja	561,615	41,493	(34,519)	-	34,812	12,441	615,842	*Employee benefit liabilities*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	82,417	3,747	-	-	3,022	-	89,186	*Short-term employee benefits liabilities*
Provisi untuk persediaan usang	1,653	(403)	-	-	1,875	-	3,125	*Provision for obsolete inventories*
Provisi untuk penurunan nilai piutang	1,874	(705)	-	-	2,599	-	3,768	*Provision for impairment of receivables*
Aset tetap	(647,559)	(1,326,876)	691,144	625,700	(54,330)	-	(711,921)	*Property, plant and equipment*
Sub-jumlah	-	(1,282,744)	656,625	625,700	(12,022)	12,441	-	*Sub-total*
Entitas anak								***Subsidiaries***
Liabilitas imbalan kerja	15,724	1,754	(4,565)	-	(1,770)	584	11,727	*Employee benefit liabilities*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	36,023	9,094	-	-	(14,261)	-	30,856	*Short-term employee benefits liabilities*
Provisi untuk persediaan usang	650	(3)	-	-	192	-	839	*Provision for obsolete inventories*
Provisi untuk penurunan nilai piutang	3,473	-	-	-	1,034	-	4,507	*Provision for impairment of receivables*
Aset tetap	1,639	(240)	-	-	(1,550)	-	(151)	*Property, plant and equipment*
Sub-jumlah	57,509	10,605	(4,565)	-	(16,355)	584	47,778	*Sub-total*
Jumlah aset pajak tangguhan - bersih	**57,509**	**(1,272,139)**	**652,060**	**625,700**	**(28,377)**	**13,025**	**47,778**	***Total of deferred tax assets - net***
Perusahaan								***The Company***
Aset tetap	(446,616)	-	-	(625,700)	-	-	(1,072,316)	*Property, plant and equipment*
Jumlah liabilitas pajak tangguhan - bersih	**(446,616)**	**-**	**-**	**(625,700)**	**-**	**-**	**(1,072,316)**	***Total of deferred tax liabilities - net***
Beban pajak tangguhan		**(1,272,139)**	**652,060**	**-**	**(28,377)**	**13,025**		***Deferred tax expense***

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/84 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Pajak tangguhan (lanjutan)

Analisis liabilitas pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

***30. TAXATION** (continued)*

***d. Deferred tax** (continued)*

The analysis of deferred tax liabilities is as follows:

	2022	2021	
Liabilitas pajak tangguhan yang akan diselesaikan dalam 12 bulan	126,383	125,084	*Deferred tax liabilities to be settled within 12 months*
Liabilitas pajak tangguhan yang akan diselesaikan setelah 12 bulan	(2,379,121)	(1,197,400)	*Deferred tax liabilities to be settled after 12 months*
Total	**(2,252,738)**	**(1,072,316)**	***Total***

Rugi pajak dapat dikompensasikan dengan laba pajak pada masa lima tahun mendatang sejak kerugian pajak terjadi. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan tidak mengakui aset pajak tangguhan dari rugi pajak karena manajemen memperkirakan bahwa kerugian pajak tidak dapat dikompensasikan dengan laba pajak di masa mendatang.

The tax loss can be compensated against taxable income for a period of five years subsequent to the year in which the tax loss was incurred. As at 31 December 2022 and 2021, the Company does not recognise deferred tax assets from tax losses due to management believing that it is probable that future taxable profits will not be able to fully offset tax losses.

e. Surat ketetapan pajak

Perusahaan

e. Tax assessment letters

The Company

Jenis pajak/*Tax type*	Tahun pajak/ *Fiscal year*	2022	2021	Status
PPh 22/*Income Tax Art 22*	2016	-	307,089	Peninjauan kembali/*Judicial review*
PPh 22/*Income Tax Art 22*	2017	7,768	172,520	Peninjauan kembali/*Judicial review*
PPh 22/*Income Tax Art 22*	2018	162,946	162,946	Banding/*Appeal*
PPh 22/*Income Tax Art 22*	2019	136,172	136,172	Banding/*Appeal*
Jumlah		**306,886**	**778,727**	***Total***
Provisi		**(168,354)**	**(390,000)**	***Provision***
Jumlah, bersih		**138,532**	**388,727**	***Total, net***

Pada tahun 2022, Perusahaan telah menerima pengembalian atas kurang bayar PPh 22 tahun 2016 dan 2017 masing-masing sebesar Rp307.089 dan 143.106. Sisa pengembalian sebesar Rp21.646 dihapuskan dari provisi.

In 2022, the Company received a refund of underpayment income tax art 22 for 2016 and 2017 amounting to Rp307,089 and Rp143,106, respectively. Remaining balance amounting to Rp21,646 is written off against provision.

Pada tanggal 28 April 2022, Perusahaan menerima SKPLB atas PPN bulan Desember 2020 sebesar Rp265.964 yang telah diterima oleh Perusahaan pada Mei 2022.

On 28 April 2022, the Company received a SKPLB for its VAT of December 2020 amounting to Rp265,964 which was received by the PJBS in May 2022.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/85 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

PJBS

Pada tanggal 25 Januari 2023, PJBS menerima SKPLB atas PPN bulan Desember 2021 sebesar Rp39.051. Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini diterbitkan, PJBS belum menerima pengembalian lebih bayar dari Kantor Pajak.

Pada tanggal 21 Desember 2021, PJBS menerima SKPLB atas PPN bulan Desember 2020 sebesar Rp31.747 yang telah diterima PJBS pada bulan Mei 2021. Kelebihan bayar pajak tersebut telah diterima oleh PJBS pada tahun 2022.

Pada tanggal 20 Desember 2021, PJBS menerima SKPKB atas Pajak Penghasilan Badan tahun 2016 sebesar Rp5.628 yang telah diterima PJBS pada bulan Desember 2021. PJBS telah mengakui seluruh kekurangan pembayaran pajak tersebut sebagai bagian dari beban pajak penghasilan pada laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Pada tanggal 10 Mei 2021, PJBS menerima SKPLB atas PPN bulan Desember 2019 sebesar Rp100.878 yang telah diterima PJBS pada bulan Mei 2021. Kelebihan bayar pajak tersebut telah diterima oleh PJBS pada tahun 2021.

RE

Pada bulan 23 Mei, 12 Juli dan 19 September 2022, RE menerima SKPLB atas PPN bulan Mei 2020 sampai Maret 2021 sebesar Rp56.738. Kelebihan bayar pajak tersebut telah diterima oleh RE pada tahun 2022.

Pada bulan 3 Mei dan 7 Juni 2021, RE menerima SKPLB atas PPN bulan Januari 2018 sampai April 2020 sebesar Rp196.510. Kelebihan bayar pajak tersebut telah diterima oleh RE pada tahun 2021.

PLNSC

Pada bulan 29 Juni 2022, PLNSC menerima SKPLB atas PPN bulan Juli 2018 sampai Desember 2020 sebesar Rp70.310. Kelebihan bayar pajak tersebut telah diterima oleh PLNSC pada tahun 2022.

***30. TAXATION** (continued)*

***e. Tax assessment letters** (continued)*

PJBS

On 25 January 2023, PJBS received a SKPLB for its VAT of December 2021 amounting to Rp39,051. As at the completion date of these consolidated financial statements, PJBS has not received the refund of overpayment from Tax Office.

On 21 December 2021, PJBS received a SKPLB for its VAT of December 2020 amounting to Rp31,747 which was received by the PJBS in May 2021. These overpayment tax has been received by PJBS in 2022.

On 20 December 2021, PJBS received a SKPKB for its 2016 corporate income tax amounting to Rp5,628 which was received by PJBS in December 2021. PJBS has recognised all the underpayment tax as part of income tax expense in the statement of profit or loss for the year ended 31 December 2021.

On 10 May 2021, PJBS received a SKPLB for its VAT of December 2019 amounting to Rp100,878 which was received by the PJBS in May 2021. These overpayment tax has been received by PJBS in 2021.

RE

On 23 May, 12 July and 19 September 2022, RE received a SKPLB for its VAT of May 2020 until March 2021 amounting to Rp56,738. These overpayment tax has been received by RE in 2022.

On 3 May and 7 June 2021, RE received a SKPLB for its VAT of January 2018 until April 2020 amounting to Rp196,510. These overpayment tax has been received by RE in 2021.

PLNSC

On 29 June 2022, PLNSC received a SKPLB for its VAT of July 2018 until December 2020 amounting to Rp70,310. These overpayment tax has been received by PLNSC in 2022.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/86 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, perusahaan-perusahaan di dalam Grup yang berdomisili di Indonesia menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah pajak dalam batas waktu lima tahun saat terutangnya pajak.

g. Tarif pajak

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("UU HPP") telah disahkan. UU HPP menetapkan tarif pajak penghasilan badan bagi Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap dari tahun pajak 2022 tetap sebesar 22%.

***30. TAXATION** (continued)*

f. Administration

Under the Taxation Laws of Indonesia, companies within the Group which are domiciled in Indonesia calculate and pay tax on the basis of self assessment. The Directorate General of Taxes ("DGT") may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

g. Tax rate

On 29 October 2021, Law No. 7 Year 2021 on Harmonisation of Tax Regulations (the "HPP Law") was issued. The HPP Law stipulates that the corporate income tax rate for Corporate Tax Payers and Permanent Establishments from fiscal year 2022 remains at 22%.

31. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat hubungan berelasi

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Grup:

31. THE BALANCE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Nature of related parties

Below is the list of the related parties that engage in transactions with the Group:

Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat hubungan/ *Nature of relationship*	Sifat transaksi/ *Nature of transaction*
BRI	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka/ *Placement of cash in banks and time deposits*
BNI	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka/ *Placement of cash in banks and time deposits*
Bank Mandiri	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka/ *Placement of cash in banks and time deposits*
BSI	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan rekening bank/ *Placement of cash in banks*
PT Pertamina (Persero) ("Pertamina")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian bahan bakar dan minyak pelumas/ *Purchase of fuels and lubricants*
PT Perusahaan Gas Negara Tbk ("PGN")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian bahan bakar gas/ *Purchase of gas fuel*

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/87 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

31. THE BALANCE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

Sifat hubungan berelasi (lanjutan)

Nature of related parties *(continued)*

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Grup: (lanjutan)

Below is the list of the related parties that engage in transactions with the Group: (continued)

Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat hubungan/ *Nature of relationship*	Sifat transaksi/ *Nature of transaction*
PT Nusantara Regas ("NR")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian bahan bakar gas/ *Purchase of gas fuel*
PT Superintending Company of Indonesia (Persero) ("Sucofindo")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pelayanan teknik, survei dan pengukuran batubara/ *Engineering services, survey and coal measurement*
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) ("Jasindo")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Asuransi instalasi dan mesin pembangkit, dan perlengkapan transmisi/ *Insurance services for installation and power plants and transmissions equipment*
Perum Jasa Tirta ("Jasa Tirta")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian air/ *Purchase of water*
PT PLN (Persero)	Entitas induk pengendali/ *Controlling parent entity*	Transaksi penjualan tenaga listrik/ *Sales of electricity*
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero)	Pemegang saham minoritas/ *Minority shareholder*	Penyertaan modal/ *Paid-in capital*
PIP	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Transaksi penjualan barang dan jasa/ *Sales of goods and services*
PT PLN Batam ("PLN Batam")	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Transaksi penjualan barang dan jasa/ *Sales of goods and services*
PT PLN Batubara ("PLNBB")	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Transaksi pembelian bahan bakar/ *Purchase of fuels*
PT Haleyora Power ("HP")	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Transaksi pembelian barang dan jasa/ *Purchase of goods and services*
PT Indonesia Comnets Plus ("ICON")	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Transaksi pembelian barang dan jasa/ *Purchase of goods and services*
PLNE	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Transaksi pembelian barang dan jasa/ *Purchase of goods and services*
PT PLN Tarakan ("PLN Tarakan")	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Transaksi pembelian barang dan jasa/ *Purchase of goods and services*
PT Energy Management Indonesia (Persero) ("EMI")	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Transaksi pembelian barang dan jasa/ *Purchase of goods and services*
PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara ("MCTN")	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Transaksi pembelian barang dan jasa/ *Purchase of goods and services*
PT Pelayaran Bahtera Adiguna ("BAG")	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Jasa pengangkutan batubara/ *Coal transport services*
APLN	Pihak berelasi lainnya/ *Other related parties*	Asuransi bangunan dan perlengkapan umum/ *Insurance for buildings and general equipment*
S2P	Entitas asosiasi/*Associate*	Jasa operasi dan pemeliharaan/ *Operation and maintenance services*
RDM	Entitas asosiasi/*Associate*	Transaksi jasa proyek/ *Project services*
BDSN	Ventura bersama/*Joint venture*	Jasa operasi dan pemeliharaan/ *Operation and maintenance services*
BPI	Ventura bersama/*Joint venture*	Jasa operasi dan pemeliharaan/ *Operation and maintenance services*
SGPJB	Ventura bersama/*Joint venture*	Piutang kepada ventura bersama/ *Receivables from joint ventures*
PMSE	Ventura bersama/*Joint venture*	Piutang kepada ventura bersama/ *Receivables from joint ventures*

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/88 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

31. THE BALANCE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Sifat hubungan berelasi (lanjutan)

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Grup: (lanjutan)

***Nature of related parties** (continued)*

Below is the list of the related parties that engage in transactions with the Group: (continued)

Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat hubungan/ *Nature of relationship*	Sifat transaksi/ *Nature of transaction*
NSHE	Ventura bersama/*Joint venture*	Piutang lain-lain/ *Other receivables*
KPJB	Ventura bersama/*Joint venture*	Jasa operasi dan pemeliharaan/ *Operation and maintenance services*
PT Geo Dipa Energi (Persero) ("Geodipa")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Jasa pemeliharaan dan pemeriksaan/ *Maintenance and inspection services*
PT Pupuk Indonesia Energi ("PI Energi")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Jasa pemeliharaan dan pemeriksaan/ *Maintenance and inspection services*
PT Hutama Karya (Persero) ("HK")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi jasa konstruksi/ *Construction services*
Dana pensiun PLN	Pihak berelasi lainnya/ *Other related parties*	Pengelola dana pensiun/ *Pension fund manager*
Personil manajemen kunci/ *Key management personnel*	Komisaris, Direktur dan Kepala Divisi/ *Commissioners, Directors and Division Heads*	Upah dan tunjangan/ *Salaries and allowances*

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi

The balances and transactions with related parties

	2022	2021	
Kas dan setara kas (Catatan 6)			***Cash and cash equivalents (Note 6)***
BNI	4,960,548	2,569,716	*BNI*
Bank Mandiri	2,780,039	2,565,677	*Bank Mandiri*
BRI	1,149,036	2,068,627	*BRI*
BSI	10,002	1	*BSI*
Jumlah	**8,899,625**	**7,204,021**	***Total***
Deposito berjangka (Catatan 7)			***Time deposits (Note 7)***
BRI	297,421	260,000	*BRI*
Bank Mandiri	162,416	103	*Bank Mandiri*
BNI	31,462	30,000	*BNI*
Jumlah	**491,299**	**290,103**	***Total***
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya (Catatan 8)			***Restricted cash in banks and time deposits (Note 8)***
BRI	181,314	160,792	*BRI*
Bank Mandiri	112,262	-	*Bank Mandiri*
BNI	1,137	577	*BNI*
Jumlah	**294,713**	**161,369**	***Total***
Piutang usaha (Catatan 9)			***Trade receivables (Note 9)***
PLN	20,324,438	21,788,196	*PLN*
PIP	95,031	28,094	*PIP*
BPI	37,173	88,400	*BPI*
BDSN	13,660	23,711	*BDSN*
Lain-lain	5,071	9,726	*Others*
Jumlah	**20,475,373**	**21,938,127**	***Total***
Piutang lain-lain			***Other receivables***
SGPJB	35,682	95,064	*SGPJB*
NSHE	15,703	-	*NSHE*
PMSE	752	200	*PMSE*
Jumlah	**52,137**	**95,264**	***Total***

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/89 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

31. THE BALANCE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

The balances and transactions with related parties *(continued)*

	2022	2021	
Piutang kepada ventura bersama (Catatan 10)			***Receivables from joint ventures (Note 10)***
SGPJB	813,424	806,425	*SGPJB*
PMSE	10,429	9,632	*PMSE*
Jumlah	**823,853**	**816,057**	***Total***
Utang usaha (Catatan 16)			***Trade payables (Note 16)***
HK	207,826	71,043	*HK*
Jasa Tirta	207,342	167,152	*Jasa Tirta*
PLNBB	22,962	307,854	*PLNBB*
Pertamina	24,455	833,450	*Pertamina*
PLN	10,341	6,845	*PLN*
NR	-	155,242	*NR*
Jumlah	**472,926**	**1,541,586**	***Total***
Utang lain-lain (Catatan 17)			***Other payables (Note 17)***
PLN	285,649	16,965	*PLN*
BAG	4,461	-	*BAG*
PLNE	3,125	-	*PLNE*
ICON	3,023	14,023	*ICON*
HP	2,313	2,388	*HP*
PIP	683	1,981	*PIP*
Jumlah	**299,254**	**35,357**	***Total***
Pinjaman dari pemegang saham (Catatan 31a)			***Loans from a shareholder (Note 31a)***
PLN	**2,667,083**	**2,417,205**	*PLN*
Penjualan tenaga listrik (Catatan 23)			***Sales of electricity (Note 23)***
PLN	**21,682,476**	**24,541,378**	*PLN*
Pendapatan usaha lainnya			***Other operating revenue***
PLN	4,852,017	4,593,225	*PLN*
PIP	335,832	122,763	*PIP*
BPI	92,143	92,771	*BPI*
BDSN	82,446	91,671	*BDSN*
Lain-lain	30,527	30,655	*Others*
Jumlah	**5,392,965**	**4,931,085**	***Total***
Pembelian tenaga listrik (Catatan 26)			***Purchased electricity (Note 26)***
PLN	**275,409**	**333,617**	*PLN*
Beban bahan bakar dan pelumas			***Fuel and lubricants expenses***
PGN	2,928,146	2,696,693	*PGN*
Pertamina	2,462,527	4,705,735	*Pertamina*
Jasa Tirta	319,351	295,026	*Jasa Tirta*
NR	224,247	731,108	*NR*
PLNBB	104,772	597,099	*PLNBB*
Jumlah	**6,039,043**	**9,025,661**	***Total***
Beban pemeliharaan			***Maintenance expenses***
PIP	289,397	-	*PIP*
PLNE	53,476	23,241	*PLNE*
Lain-lain	52,143	18,907	*Others*
Jumlah	**395,016**	**42,148**	***Total***
Beban usaha lain-lain (Catatan 29)			***Other operating expenses (Note 29)***
Jasindo	52,335	54,615	*Jasindo*
APLN	1,489	188	*APLN*
Jumlah	**53,824**	**54,803**	***Total***

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/90 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Pinjaman dari pemegang saham

Pada tanggal 20 Maret 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan PLN sebesar AS$280.000.000 dengan tingkat bunga tahunan LIBOR USD enam bulan dengan marjin 0,98%. Pinjaman ini digunakan untuk mendanai proyek *add-on* PLTGU Muara Tawar Blok 2, 3 dan 4. Jangka waktu perjanjian efektif sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan akan berakhir pada tanggal 8 Mei 2032.

Saldo pinjaman ini pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp2.667.083 (setara dengan AS$171.054.541) dan Rp2.417.205 (setara dengan AS$169.402.450), dengan porsi jangka pendek masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp291.050 dan Rp233.979.

b. Kompensasi manajemen kunci

Jumlah kompensasi Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp15.977 dan Rp10.140.

Jumlah kompensasi Direksi Perusahaan untuk tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp28.835 dan Rp24.287.

Seluruh kompensasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan merupakan imbalan kerja jangka pendek.

31. THE NATURE OF THE RELATIONSHIPS AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

a. Loans from a shareholder

On 20 March 2018, the Company entered into a loan agreement with PLN amounted to US$280,000,000 with an annual interest rate of LIBOR USD six-month with 0.98% margin. The loan will be used to fund the add-on project of PLTGU Muara Tawar Block 2, 3 and 4. The terms of this agreement is effective since the loan is signed and will be expired on 8 May 2032.

The outstanding balances of this loan as at 31 December 2022 and 2021 amounted to Rp2,667,083 (equivalent to US$171,054,541) and Rp2,417,205 (equivalent to US$169,402,450), respectively, with the current portion as at 31 December 2022 and 2021 amounted to Rp291,050 and Rp233,979, respectively.

b. Key management compensation

The total remuneration of the Company's Board of Commissioners in 2022 and 2021 amounted to Rp15,977 and Rp10,140, respectively.

The total remuneration of the Company's Directors in 2022 and 2021 amounted to Rp28,835 and Rp24,287, respectively.

All of the compensation to the Company's Boards of Commissioners and Directors are short-term employee benefits.

32. IKATAN DAN KONTINJENSI

Pada tanggal 31 Desember 2022, Grup memiliki perikatan penting dan kontinjensi sebagai berikut:

a. Perjanjian Pengadaan Bahan Bakar

i. Batubara

32. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

As at 31 December 2022, the Group had significant commitments and contingencies as follows:

a. Fuel Supply Agreements

i. Coal

Pemasok/*Supplier*	No. Kontrak/ *Contract no.*	Satuan/ *Unit of measure*	Jumlah/ *Quantity*	Periode/ *Period*
PT PLN Batubara	013.PJ/061/PJB-PLNBB/V/2020	Metrik ton/ *Metric ton*	Sesuai kebutuhan	Mar 2020 - Mar 2040
PT Kaltim Prima Coal	070.PJ/061/2018	Metrik ton/ *Metric ton*	3,120,000	Jan 2019 - Dec 2021*
PT Global Energi Lestari	043.PJ/061/2021	Metrik ton/Metric ton	103,205	Aug 2021 - Feb 2023
PT Bara Tabang	093.PJ/061/2022	Metrik ton/Metric ton	1,320,000	Nov 2022 - Sep 2023
PT Berkah Berjaya Energi Indonesia	054.PJ/061/2022	Metrik ton/Metric ton	500,000	Aug 2022 - Jun 2023
PT Anugrah Borneo Sinergy	SPK No. Z6103904R	Metrik ton/Metric ton	90,000	Sep 2022 - Jul 2023
PT Borneo Inter Global	SPK No. Z6105103R	Metrik ton/Metric ton	220,000	Dec 2022 - Oct 2023

*) Berlaku sampai kuota terpenuhi

**) Valid until quota fulfilled*

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/91 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

32. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

a. Perjanjian Pengadaan Bahan Bakar (lanjutan)

i. Batubara (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk dan atas nama Menteri ESDM menerbitkan surat No. B-1605/MB.05/DJB.B/2021 ("Surat B-1605") yang antara lain mengatur bahwa seluruh pemegang PKP2B, IUP, IUPK Operasi Produksi, IUPK Kelanjutan Kontrak/Perjanjian Operasi, dan pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara (a) dilarang melakukan penjualan batubara ke luar negeri sejak tanggal 1 sampai dengan 31 Januari 2022; (b) wajib memasok seluruh produksi batubaranya untuk memenuhi kebutuhan listrik untuk kepentingan umum sesuai kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri ("DMO") dan/atau penugasan dari Pemerintah kepada perusahaan dan/atau kontrak dengan PLN dan *Independent Power Producer* ("IPP") ; dan (c) dalam hal sudah terdapat batubara di pelabuhan muat dan/atau telah dimuat di kapal, harus segera dikirim ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap ("PLTU") milik Grup PLN dan IPP yang pelaksanaannya agar segera diselesaikan dengan PLN. Dalam Surat B-1605 juga terdapat informasi bahwa larangan ekspor batubara akan dievaluasi dan ditinjau berdasarkan realisasi pasokan batubara untuk pembangkit listrik tenaga batubara PLN dan IPP.

Pada tanggal 19 Januari 2022, KESDM mengeluarkan Keputusan Menteri No. 13.K/HK.021/MEM.B/2022 yang mengatur tentang pedoman pengenaan sanksi administratif, larangan ekspor batubara, pengenaan denda dan pemberian dana kompensasi untuk memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri.

32. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

a. Fuel Supply Agreements *(continued)*

i. Coal (continued)

On 31 December 2021, the Director General of Mineral and Coal for and on behalf of Minister of EMR issued letter No. B-1605/MB.05/DJB.B/2021 ("Letter B-1605") which, among others, stipulated that all holders of CCA/CCoW, IUP, IUPK Operation Production, IUPK for the Continuation of Contract/Agreement Operation, and holders of Coal Transportation and Sales Permit (a) are prohibited from selling coal overseas from 1 to 31 January 2022; (b) must supply all of its coal production to meet electricity needs for public interests in accordance with Domestic Market Obligation ("DMO") fulfilment and/or assignment from the Government to companies and/or contracts with PLN and Independent Power Producer ("IPP"); and (c) in the event that coal is already available at the loading port and/or has been loaded on a ship, it must immediately be sent to the Coal-Fired Steam Power Plant belonging to PLN Group and IPP, the implementation of which will be concluded with PLN. There is also information in Letter B-1605 that the prohibition on coal exports will be evaluated and reviewed based on the realisation of coal supply for coal fired power plants of PLN and IPP.

On 19 January 2022, the MoEMR issued Ministerial Decree No. 13.K/HK.021/ MEM.B/2022 which stipulates the guidelines for imposing administrative sanctions, prohibition of coal exports, imposing fines and providing compensation funds to fulfil domestic coal requirements.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/92 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

32. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

a. Perjanjian Pengadaan Bahan Bakar (lanjutan)

i. Batubara (lanjutan)

Selama tahun 2022, harga dasar batubara di tempat penyerahan *stockpile* unit berkisar antara Rp603.838 (nilai penuh) sampai dengan Rp1.093.608 (nilai penuh) per ton, yang disesuaikan terhadap nilai kalori, kadar abu, sulfur, air, *Ash Fusion Temperature* ("AFT"), *Hardgrove Grindability Index* ("HGI") dan ukuran batubara.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 07 tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara, seluruh harga dasar kontrak diatas akan ditinjau secara periodik setiap 3 (tiga) bulanan untuk disesuaikan dengan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang AS$, dan harga dasar bahan bakar minyak HSD untuk industri.

Sehubungan dengan perjanjian jual beli batubara, pemasok diwajibkan untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan.

ii. Gas

32. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

a. Fuel Supply Agreements *(continued)*

i. Coal (continued)

In 2022, the stockpile price of coal ranges from Rp603,838 (full amount) to Rp1,093,608 (full amount) per ton, which is adjusted against calorific value, ash content, sulphur, water, Ash Fusion Temperature ("AFT"), Hardgrove Grindability Index ("HGI") and coal size.

Based on the Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources of Indonesia No. 07 year 2017 regarding the Procedures of Coal and Metal Sales Pricing, the base prices in all contracts above will be reviewed quarterly to justify the price with the exchange rate from Rupiah to US$, and the HSD basic price for industries.

In relation to the coal sales and purchase agreement, suppliers are obliged to submit their performance guarantees.

ii. Gas

Sektor/*Sector*	Pemasok/*Supplier*	Nomor dan tanggal kontrak/ *Contract number and date*	Jumlah yang disepakati/ *Agreed quantity*		
			Periode/ *Periods*	Satuan/*Unit of measure*	Jumlah/ *Quantity*
Gresik	PT Pertamina Hulu Energi WMO	Kesepakatan Bersama Perjanjian Jual Beli Gas	2002 - 2023	TBTU	837,692
Gresik	PGN SAKA (SIPL)	Amandemen GSA 8 Nov 2011	2011 - 2026	BCF	330.20
Gresik	Kangean Energy Indonesia	462.PJ AMDII/041/DIR/2010 beserta Amandemen dan Kesepakatannya	2008 - 2028	TBTU	371.00
Gresik	PT Petrogas Jatim Utama	061.PJ/061/2013 beserta Addendum dan kesepakatannya	2016 - 2023	BCF	41.59
				TBTU	7.30
Muara Karang	PT Pertamina Hulu Energi ONWJ	0083.Pj/EPI.01.03/C01050000/2022	2023 - 2023	TBTU	5,475
Muara Karang	PT Perusahaan Gas Negara	0041.Pj/Epi.01.02/F01010600/2022	2022 - 2023	TBTU	7,227
Muara Tawar	PT Pertamina EP	0103-2.PJ/EPI.01.02/DIR/2019	2018 - 2024	BBTU	29,244
Muara Karang & Muara Tawar	PT Nusantara Regas	PLN.273.PJ/041/DIR/2012	2012 - 2022*	Kargo/*Cargo*	191
Muara Karang & Muara Tawar	PT Tangguh PSC	0237.PJ/EPI.01.02/DIRUT/2016	2012 - 2034	Kargo/*Cargo*	732
Muara Karang & Muara Tawar	PT Pertamina (Persero)	0592.PJ/EPI.01.02/DITDAN-2/2017	2017 - 2022*	BBTU	Sesuai kebutuhan

*) Dalam proses perpanjangan

*) *In the extension progress*

Harga realisasi pembelian gas pipa pada titik penyerahan di tahun 2022 berkisar antara AS$6,17 sampai dengan AS$13,59 dan Rp94.106 (nilai penuh) sampai dengan Rp213.925 (nilai penuh) per *Million British Thermal Unit* ("MMBTU")/*Million Standard Cubic Feet* ("MSCF").

The gas pipe purchase prices at the point of delivery range in 2022 from US$6.17 to US$13.59 and Rp94,106 (full amount) to Rp213,925 (full amount) per Million British Thermal Unit ("MMBTU")/Million Standard Cubic Feet ("MSCF").

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/93 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

32. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

a. Perjanjian Pengadaan Bahan Bakar (lanjutan)

iii. Bahan Bakar Minyak ("BBM")

Perusahaan melalui PLN dan Pertamina mengadakan Perjanjian Induk Jual Beli Bahan Bakar Minyak No. 071.PJ/060/DIR/2001 tanggal 8 Oktober 2001. Perjanjian ini telah diaddendum pada tanggal 16 Mei 2007, dimana PLN dan Pertamina menyepakati antara lain: (i) penggunaan harga bahan bakar bulanan ditetapkan oleh Pertamina untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 April 2007 dan harga bahan bakar 109,5% dari *Mid Oil Platts Singapore* ("MOPS") ditambah PPN untuk periode 1 Mei 2007 sampai dengan 31 Desember 2007; (ii) harga bahan bakar setelah tanggal 31 Desember 2007 akan ditetapkan oleh kedua belah pihak setiap tahun; (iii) jangka waktu pembayaran berikut pengenaan denda keterlambatan pembayaran sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia bulanan ditambah 1,3%; (iv) efektif mulai 1 Mei 2007, saldo utang yang belum dibayar atas pembelian bahan bakar sampai dengan 30 April 2007 dikenakan bunga sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia per tahun ditambah 1,3%, sampai diselesaikan dengan menerbitkan obligasi PLN paling lambat tanggal 31 Agustus 2007; (v) utang kepada Pertamina, termasuk obligasi yang akan diterbitkan maksimum sebesar Rp18 triliun (angka penuh); (vi) perjanjian ini berlaku untuk 5 tahun sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011; dan (vii) Sucofindo ditunjuk sebagai surveyor independen.

Perjanjian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Berdasarkan Addendum VIII tertanggal 8 Februari 2022, kesepakatan harga jual beli bahan bakar minyak (HSD dan MFO) sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2023 antara Pertamina dan Perusahaan adalah sebagai berikut:

a. Terhitung sejak 1 September 2021, seluruh tanggung jawab, hak dan kewajiban Pertamina berdasarkan perjanjian dialihkan kepada PT Pertamina Patra Niaga.

32. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

a. Fuel Supply Agreements *(continued)*

iii. Fuel

The Company through PLN and Pertamina entered into a Fuel Sell and Purchase Agreement No. 071.PJ/060/DIR/2001 dated 8 October 2001. This agreement has been amended on 16 May 2007, whereby PLN and Pertamina agreed among others: (i) the monthly fuel price to be used for the period from 1 January until 30 April 2007 was determined by Pertamina and, that the fuel price of 109.5% from Mid Oil Platts Singapore ("MOPS") plus VAT was used for the period from 1 May 2007 until 31 December 2007; (ii) the fuel price subsequent to 31 December 2007 will be determined by both parties every year; (iii) the terms of payment and penalty charges on late payments with a rate of monthly Certificate of Bank Indonesia plus 1.3%; (iv) effective from 1 May 2007, the unpaid balances of payables for purchases of fuel until 30 April 2007 will bear interest at a rate per annum of Certificate of Bank Indonesia plus 1.3%, until settled by the issuance of PLN Bonds, which is no later than 31 August 2007; (v) the maximum payables to Pertamina, including the bonds which will be issued amounting to Rp18 trillion (full amount); (vi) this agreement is valid for 5 years which is from 1 January 2007 until 31 December 2011; and (vii) that Sucofindo is assigned as an independent surveyor.

The agreement has been amended several times. Based on Amendment VIII dated 8 February 2022, the agreement on the sale and purchase price of fuel oil (HSD and MFO) from 1 January 2021 to 31 December 2023 between Pertamina and the Company is as follows:

a. As at 1 September 2021, all of Pertamina's responsibilities, rights and obligations under the agreement have been transferred to PT Pertamina Patra Niaga.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/94 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

32. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

a. Perjanjian Pengadaan Bahan Bakar (lanjutan)

iii. Bahan Bakar Minyak ("BBM") (lanjutan)

b. Perubahan formulasi harga bahan bakar minyak yang berlaku sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023.
c. Penyerahan BBM pada tanggal 1 hingga akhir bulan, MOPS, *Jakarta Interbank Spot Dollar* ("JISDOR") dan *Jakarta Interbank Offered Rate* ("JIBOR") yang berlaku adalah rata-rata tengah MOPS, rata-rata JISDOR dan rata-rata JIBOR selama 1 bulan, yang terbit sejak tanggal 25 pada 2 bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 24 pada 1 bulan sebelum bulan penyerahan BBM.

Perusahaan telah mencatat pembelian HSD dan MFO selama tahun 2022 berdasarkan harga tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo utang usaha atas pembelian bahan bakar kepada Pertamina adalah masing-masing sebesar Rp24.455 dan Rp833.450.

b. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ("PJBTL")

Perusahaan memiliki sejumlah PJBTL dengan PLN. Dalam perjanjian tersebut, PLN membayar pasokan tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan formula pembayaran. Pembayaran tersebut mencakup komponen biaya kapasitas, energi, operasional dan pemeliharaan yang tergantung pada tingkat pasokan energi serta variabel lain yang ditentukan dalam perjanjian.

32. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

a. Fuel Supply Agreements *(continued)*

iii. Fuel (continued)

b. Changes in the formulation of fuel prices are effective from 1 January 2022 to 31 December 2023.

c. BBM delivery on the 1st to the end of the month, MOPS, Jakarta Interbank Spot Dollar ("JISDOR") and Jakarta Interbank Offered Rate ("JIBOR") that apply are the middle average of MOPS, JISDOR average and 1-month JIBOR average, which are issued from the 25th of the previous 2 months to the 24th of the 1st month prior to the month of fuel delivery.

The Company has recorded purchases of HSD and MFO for the year 2022 based on those prices.

As at 31 December 2022 and 2021, the trade payables outstanding for purchases of fuel from Pertamina amounted to Rp24,455 and Rp833,450, respectively.

b. Power Purchase Agreements ("PPA")

The Company has various PPAs with PLN. Under those agreements, PLN will pay the Company for the supply of electricity at the amount determined based on the payment formula. Such a payment formula includes the cost of capacity, energy, as well as operations and maintenance components which depends on the level of energy supplied and other variables as stipulated in the agreement.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/95 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

32. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

b. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (“PJBTL”) (lanjutan)

Pada tanggal 30 Desember 2022, PLN dan Perusahaan telah menandatangani 20 amandemen dan pernyataan kembali PJBTL yang terdiri dari: 5 Buku PJBTL atas wilayah Jawa-Bali, 7 Buku PJBTL atas wilayah Sumatera, 4 atas Buku PJBTL atas wilayah Kalimantan, dan 4 Buku PJBTL atas wilayah Sulawesi. Amandemen dan pernyataan kembali PJBTL tersebut akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2023 dengan periode kontrak dari tahun 2023 sampai dengan 2032.

c. Perjanjian Pengadaan dan Pemeliharaan

Perusahaan memiliki beberapa Perjanjian Jasa Operasi dan Pemeliharaan sampai dengan 31 Mei 2025. Sebagai tindak lanjut pembentukan *subholding* yang dijabarkan pada Catatan 2b, manajemen berkeyakinan bahwa Perjanjian Jasa Operasi dan Pemeliharaan akan diterminasi sejak 1 Januari 2023.

Selain itu, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Jasa Operasi dan Pemeliharaan PLTU Sambelia (2x50 MW) tahap *Supporting Based* pada tanggal 29 November 2021. Masa penyelesaian kontrak sampai dengan 30 November 2022. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, kontrak masih dalam proses perpanjangan.

d. Perolehan barang modal

Pada tanggal 19 Desember 2017, Perusahaan telah menandatangani perjanjian novasi dengan PLN, Konsorsium Doosan Heavy Industries and Construction Co. Ltd. dan PT Hutama Karya (Persero) sehubungan dengan Perjanjian Kontrak No. 0125.PJ/DAN.02.01/ DIR/2017, tertanggal 29 Maret 2017 untuk proyek *add on* PLTGU Muara Tawar Blok 2, 3 dan 4. Perjanjian tersebut terakhir diubah yaitu Addendum II, pada tanggal 1 September 2021 terkait kerja tambah untuk pekerjaan pemancangan.

Sehubungan dengan perjanjian diatas, Perusahaan mempunyai fasilitas *stand-by letter of credit* dengan rincian sebagai berikut:

32. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

b. Power Purchase Agreements (“PPA”) *(continued)*

On 30 December 2022, PLN and the Company have signed 20 amendments and restatements of the PPA consisting of: 5 books of PPA for the Java-Bali area, 7 books of PPA for the Sumatra area, 4 books of PPA for the Kalimantan area, and 4 books of PPA for the Sulawesi area. The amendments and restatements of these PPA will become effective on 1 January 2023 with a contract period from 2023 up to 2032.

c. Supply and Maintenance Agreements

The Company has several Operation and Maintenance Service Agreements up to 31 May 2025. As a follow-up to the establishment of subholding described in Note 2b, management believes that the Operation and Maintenance Service Agreement will be terminated from 1 January 2023.

In addition, the Company has entered into an Operation and Maintenance Service Agreements with PLTU Sambelia (2x50 MW) Supporting Based phase on 29 November 2021. The contract period is until 30 November 2022. Until the completion date of the consolidated financial statements, the contract is still in the process of extension.

d. Capital expenditures

On 19 December 2017, the Company signed a novation agreement with PLN, Consortium of Doosan Heavy Industries and Construction Co. Ltd. and PT Hutama Karya (Persero) which entered into an agreement with Trade Agreement No. 0125.JP/DAN.02.01/DIR/ 2017, dated 29 March 2017 for the add on project of PLTGU Muara Tawar Block 2, 3 and 4. The latest amendment, Amendment II, dated 1 April 2022 related to additional work for pilling work.

In relation with the above agreements, the Company has stand-by letter of credit facilities with the following details:

Bank penerbit/ *Issuing Bank*	Penerima manfaat/ *Beneficiary*	Mata uang/ *Currency*	Jumlah/ *Total *)*
Mandiri	Mitsubishi Corporation Ltd.	JPY	9,125,900
	Doosan Heavy Industries	KRW	2,037,397,912
	Doosan Heavy Industries	USD	3,057,859
	Doosan Heavy Industries	EUR	2,307,326

*) dalam jumlah penuh

*) *in full amount*

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/96 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

32. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

e. Litigasi

Pada tahun 2019, Ronald Manurung dan rekan ("Penggugat") mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Cikarang atas tanah seluas 11.918 m2 yang telah dipergunakan oleh PLN dan PT PJB Unit Pembangkit Muara Tawar ("UPMT") dengan meminta pembayaran ganti rugi sebesar Rp33.836. Dari hasil persidangan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Cikarang, gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya. Pada tanggal 6 Mei 2020, Penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung namun Majelis Hakim menolak Kasasi tersebut. Pada tanggal 7 Oktober 2022, Penggugat mengajukan Peninjauan Kembali. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, perkara ini masih dalam proses Peninjauan Kembali oleh Penggugat pada Mahkamah Agung.

Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, Grup memiliki dasar yang kuat dalam kasus ini karena keputusan pengadilan terakhir menguntungkan Grup, sehingga tidak ada provisi kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan konsolidasian ini.

32. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

e. Litigation

In 2019, Ronald Manurung and partners ("Plaintiff") filed claims for compensation in the Cikarang District Court over a land area of 11,918 sqm that has been used by PLN and PT PJB Muara Tawar Unit ("UPMT") by asking for a compensation payment of Rp33,836. From the results of the Cikarang District Court, the Plaintiff's claim was rejected in its entirely. On 6 May 2020, the Plaintiff submitted an appeal to the Supreme Court but the Panel of Judges rejected the appeal. On 7 October 2022, the Plaintiff submitted a Judicial Review. As at the issuance date of the consolidated financial statements, this case is still in the process of Judicial Review by the plaintiff to the Supreme Court.

As at the completion date of these consolidated financial statements, the Group has strong grounds supporting the case as the recent court decisions were in favour of the Group, therefore no provision has been recorded in these consolidated financial statements.

33. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL

a. Kategori dan klasifikasi instrumen keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2022, Grup mengklasifikasikan kas dan setara kas, deposito berjangka, piutang usaha, piutang lain-lain, rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya dan piutang kepada ventura bersama sebesar Rp31.527.923 (2021: Rp30.842.012) sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

33. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT

a. Categories and classes of financial instruments

As at 31 December 2022, the Group classified its cash and cash equivalents, time deposits, trade receivables, other receivables, restricted cash in banks and time deposits and receivables from joint ventures amounting to Rp31,527,923 (2021: Rp30,842,012) as financial assets at amortised cost.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/97 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

33. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

a. Kategori dan klasifikasi instrumen keuangan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2022, Grup mengklasifikasikan utang usaha, utang lain-lain, beban masih harus dibayar, liabilitas sewa dan pinjaman dari pemegang saham sebesar Rp5.907.741 (2021: Rp6.397.372) sebagai kewajiban keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Grup adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Grup beroperasi dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh Dewan Direksi.

Dalam melaksanakan aktivitas manajemen risiko, Grup telah memiliki panduan dalam bentuk Pedoman Umum Manajemen Risiko. Pedoman ini mengatur keseimbangan antara fungsi operasional bisnis dengan pengelolaan risiko keuangan.

Risiko keuangan utama Grup adalah pada risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Manajemen menelaah dan mengeluarkan kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko. Grup menerapkan kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalisasi pengaruh dari ketidakpastian risiko keuangan terhadap kinerja keuangan Grup. Berikut ini ringkasan kebijakan dan pengelolaan manajemen risiko tersebut:

i. Manajemen risiko mata uang asing

Grup memiliki eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar yang timbul dari transaksi dengan pelanggan maupun pemasok yang didenominasi dalam mata uang asing, sehingga Grup terekspos terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

Kebijakan Grup untuk mengelola eksposur mata uang asing dalam batas yang dapat diterima.

33. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT *(continued)*

a. Categories and classes of financial instruments *(continued)*

As at 31 December 2022, the Group classified its trade payables, other payables, accrued expenses, lease liabilities and loans from a shareholder amounting to Rp5,907,741 (2021: Rp6,397,372) as financial liabilities carried at amortised cost.

b. Financial risk management objectives and policies

The objectives and policies of the Group's financial risk management are to ensure that adequate financial resources are available for the operation and development of their business, while managing their exposure to market risks (including foreign currency risks and interest rate risks), credit risks and liquidity risks. The Group operates within defined policies approved by the Board of Directors.

In performing the risk management, the Group has established guidance in the form of a Risk Management General Manual. This manual provides guidance to manage the harmonisation between the business's operational function and financial risk management.

The main financial risks of the Group are market risks (including foreign currency risks and interest rate risks), credit risks and liquidity risks. The management evaluates and establishes policies for managing each of these risks. The Group applies the financial risk management policies to minimise the impact of the financial risks unpredictability on the Group's financial performance. The summary of the financial risk management policies is as follows:

i. Foreign currency risk management

The Group has foreign currency exposures arising from transactions with customers and suppliers which are denominated in foreign exchange, therefore the Group is exposed to exchange rate fluctuations.

The Group's policy is to maintain foreign currency exposure within acceptable limits.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/98 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

33. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

i. Manajemen risiko mata uang asing (lanjutan)

Sensitivitas mata uang asing

Tabel di bawah ini memaparkan rincian sensitivitas Grup untuk setiap 10% kenaikan dan penurunan Rupiah terhadap mata uang asing yang relevan. 10% kenaikan dan penurunan menggambarkan penilaian manajemen terhadap perubahan yang rasional pada nilai tukar setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini. Analisis sensitivitas ini hanya mencakup saldo item moneter setelah pajak dalam mata uang asing dan menyesuaikan translasi pada akhir tahun untuk 10% perubahan dalam nilai tukar mata uang asing.

33. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT *(continued)*

b. Financial risk management objectives and policies *(continued)*

i. Foreign currency risk management *(continued)*

Foreign currency sensitivity

The following table explains the details of the Group's sensitivity to a 10% increase and decrease in Rupiah against the relevant foreign currencies. 10% increase or decrease represents the management's assessment of the reasonably possible changes in foreign currency rates after considering the current economic conditions. The sensitivity analysis includes only after tax outstanding foreign denominated monetary items and adjusts their translation at the end of the year for a 10% change in foreign currency rates.

	Dampak pada laba setelah pajak dalam AS$/ *Effect of profit after tax in US$*				
	2022		**2021**		
	+10%	**-10%**	**+10%**	**-10%**	
Aset keuangan					***Financial assets***
Kas dan setara kas	68,378	(68,378)	111,686	(111,686)	*Cash and cash equivalents*
Deposito berjangka	18,012	(18,012)	-	-	*Time deposits*
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	21,609	(21,609)	-	-	*Restricted cash in banks and time deposits*
Piutang lain-lain	4,891	(4,891)	2,262	(2,262)	*Other receivables*
Piutang kepada ventura bersama	63,447	(63,447)	70,324	(70,324)	*Receivables from joint ventures*
Sub-jumlah	176,337	(176,337)	184,272	(184,272)	*Sub-total*
Liabilitas keuangan					***Financial liabilities***
Pinjaman dari pemegang saham	(208,144)	208,144	(188,542)	188,542	*Loans from a shareholder*
Utang usaha	(2,957)	2,957	(662)	662	*Trade payables*
Sub-jumlah	(211,101)	211,101	(189,204)	189,204	*Sub-total*
Jumlah	**(34,764)**	**34,764**	**(4,932)**	**4,932**	***Total***

ii. Manajemen risiko tingkat suku bunga

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, manajemen percaya risiko tingkat suku bunga adalah minimal dikarenakan Grup hanya terekspos risiko tingkat suku bunga melalui saldo kas di bank dan pinjaman dari pemegang saham.

ii. Interest rate risk management

As at 31 December 2022 and 2021, management believes that the exposure from interest rate risk is minimal because the Group is exposed interest rate risk only from cash in banks and loans from a shareholder.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/99 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

33. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

ii. Manajemen risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

Sensitivitas tingkat suku bunga

Analisis sensitivitas berikut telah ditentukan berdasarkan eksposur Grup terhadap tingkat suku bunga untuk saldo instrumen keuangan terutang setelah pajak pada tanggal pelaporan. Analisis ini disusun dengan mengasumsikan jumlah saldo aset dan liabilitas terutang pada akhir periode pelaporan, terutang sepanjang tahun. Analisis sensitivitas ini menggunakan asumsi kenaikan dan penurunan sebesar 50 basis poin ("bp") pada tingkat bunga yang relevan dengan variabel lain dianggap konstan. Kenaikan dan penurunan sebesar 50 bp merupakan penilaian manajemen atas kemungkinan perubahan yang rasional terhadap tingkat bunga setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini.

Pada tanggal 31 Desember 2022, jika tingkat suku bunga atas pinjaman dari pemegang saham 50 basis poin lebih tinggi/lebih rendah, dengan asumsi semua variabel lain konstan, laba setelah pajak untuk tahun berjalan akan menjadi lebih rendah/tinggi sebesar Rp10.357 (2021: Rp9.411).

iii. Manajemen risiko kredit

Pada tanggal 31 Desember 2022, total maksimum eksposur dari risiko kredit adalah Rp31.526.445 (2021: Rp30.840.208). Risiko kredit terutama berasal dari rekening bank, deposito berjangka, piutang usaha, piutang lain-lain, rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya dan piutang kepada ventura bersama.

Semua rekening bank, deposito berjangka, dan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya ditempatkan di bank lokal yang memiliki reputasi.

33. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT *(continued)*

b. Financial risk management objectives and policies *(continued)*

ii. Interest rate risk management *(continued)*

Interest rate sensitivity

The sensitivity analysis below has been determined based on the Group's exposure to interest rates for financial instruments after tax at the reporting date. The analysis has been prepared by assuming that the amounts of assets and liabilities that were outstanding at the end of the reporting period were outstanding for the whole year. The sensitivity analysis uses an assumption of a 50 basis point ("bp") increase and decrease in the relevant interest rates with all other variables being held constant. A 50 bp increase or decrease represents management's assessment of the reasonably possible changes in interest rates after considering the current economic conditions.

As at 31 December 2022, if interest rates on loans from a shareholder had been 50 basis points higher/lower with all other variables being held constant, the post-tax profit for the year would have been Rp10,357 (2021: Rp9,411) lower/higher.

iii. Credit risk management

As at 31 December 2022, the total maximum exposure from credit risk was Rp31,526,445 (2021: Rp30,840,208). Credit risk arises from cash in banks, time deposits, trade receivables, other receivables, restricted cash in banks and time deposits and receivables from joint ventures.

All of the cash in banks, time deposits and restricted cash in banks and time deposits are placed in reputable local banks.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/100 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

33. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

iii. Manajemen risiko kredit (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, PLN memberikan kontribusi masing-masing sebesar 98,90% dan 99,24% dari seluruh nilai piutang usaha. Manajemen berkeyakinan bahwa risiko kredit terbatas karena risiko kegagalan kredit dari PLN rendah dimana Grup telah secara legal terikat dalam perjanjian dengan PLN untuk penjualan listrik dan jasa lainnya.

Aset keuangan tertentu dinilai secara individu untuk penurunan nilai dan jika ditemukan terjadi penurunan nilai, rugi penurunan nilai harus diterapkan secara individu.

Pada setiap akhir tahun pelaporan, Grup diharuskan untuk menilai penyisihan ECL untuk semua piutang. Grup telah mencatat penambahan atas penyisihan kerugian kredit sebesar Rp32.641 pada tanggal 31 Desember 2022 (2021: Rpnihil). Tidak ada pergerakan lain dalam penyisihan kerugian kredit.

iv. Manajemen risiko likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko bahwa Grup akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban terkait dengan liabilitas keuangan yang diselesaikan dengan pembayaran kas atau aset keuangan lainnya. Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada Direksi, yang telah membangun kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan Grup. Grup mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan kas dan cadangan fasilitas pinjaman dengan terus menerus memonitor perkiraan dan realisasi arus kas aktual dan mencocokkan profil jatuh tempo liabilitas keuangan.

33. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT *(continued)*

b. Financial risk management objectives and policies *(continued)*

iii. Credit risk management *(continued)*

As at 31 December 2022 and 2021, PLN gave a contribution of 98.90% and 99.24% from the total trade receivables, respectively. Management believes that the credit risk is limited because the credit default of PLN is low since the Group has legally binding agreement with PLN for sales of electricity and other services transactions.

Certain financial assets are individually assessed for impairment and, if found to be impaired, have an impairment loss assigned to them on an individual basis.

At the end of each reporting date, the Group is required to assess an allowance for ECLs for all receivables. The Group has recorded an addition of credit loss allowance amounting to Rp32,641 as of 31 December 2022 (2021: Rpnil). There are no other movements within the credit loss allowance.

iv. Liquidity risk management

Liquidity risk is defined as the risk that the Group will encounter difficulty in meeting its obligations associated with financial liabilities that are settled by delivering cash or other financial assets. The ultimate responsibility for liquidity risk management was in the Directors, who have built an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Group's funding and liquidity management requirements. The Group manages its liquidity risk by maintaining adequate cash and reserve borrowing facilities by continuously monitoring the forecast and actual cash flows and by matching the maturity profiles of financial liabilities and assets.

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/101 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

33. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

iv. Manajemen risiko likuiditas (lanjutan)

Tabel dibawah ini menganalisa liabilitas keuangan Grup pada tanggal pelaporan berdasarkan kelompok jatuh temponya dari sisa periode hingga tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel ini adalah nilai arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto termasuk estimasi pembayaran bunga:

33. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT *(continued)*

b. Financial risk management objectives and policies *(continued)*

iv. Liquidity risk management *(continued)*

The table below analyses the Group's financial liabilities at the reporting date into relevant maturity groupings based on the remaining period to the contractual maturity date. The amounts disclosed in the table represent contractual undiscounted cash flows including estimated interest payments:

	2022					
	Dalam satu tahun/*Within one year*	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/ *More than one year but not longer than three years*	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ *More than three years but not longer than five years*	Lebih dari lima tahun/ *More than five years*	Jumlah/ *Total*	
Utang usaha	2,337,913	-	-	-	2,337,913	*Trade payables*
Liabilitas sewa	26,957	39,071	-	-	66,028	*Lease liabilities*
Utang lain-lain	795,048	-	-	-	795,048	*Other payables*
Beban masih harus dibayar	56,026	-	-	-	56,026	*Accrued expenses*
Pinjaman dari pemegang saham	437,736	825,237	755,226	1,450,521	3,468,720	*Loans from a shareholder*
Jumlah	**3,653,680**	**864,308**	**755,226**	**1,450,521**	**6,723,735**	***Total***

	2021					
	Dalam satu tahun/*Within one year*	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/ *More than one year but not longer than three years*	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ *More than three years but not longer than five years*	Lebih dari lima tahun/ *More than five years*	Jumlah/ *Total*	
Utang usaha	3,261,362	-	-	-	3,261,362	*Trade payables*
Liabilitas sewa	54,450	52,926	-	-	107,376	*Lease liabilities*
Utang lain-lain	597,040	-	-	-	597,040	*Other payables*
Beban masih harus dibayar	61,761	-	-	-	61,761	*Accrued expenses*
Pinjaman dari pemegang saham	260,875	512,733	500,602	1,313,970	2,588,180	*Loans from a shareholder*
Jumlah	**4,235,488**	**565,659**	**500,602**	**1,313,970**	**6,615,719**	***Total***

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/102 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

33. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

c. Manajemen modal

Grup mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan usaha dan untuk memastikan pemenuhan batasan rasio kecukupan modal. Struktur modal Grup terdiri ekuitas pemegang saham induk, yang terdiri dari modal saham, tambahan modal disetor dan saldo laba.

Dewan Direksi Grup secara berkala melakukan tinjauan struktur permodalan Grup. Sebagai bagian dari tinjauan ini, Dewan Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

Grup berusaha untuk meminimalkan biaya modal sehingga dapat memaksimalkan nilai Grup. Oleh karena itu, kebijakan Grup dalam mencari pendanaan akan selalu memperhitungkan risiko keuangan yang mungkin timbul di masa depan.

d. Estimasi nilai wajar

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai wajarnya sebagai berikut:

1. Kas dan setara kas, deposito berjangka, rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaanya, piutang usaha dan piutang lain-lain merupakan aset keuangan jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, sehingga nilai tercatat aset keuangan tersebut kurang lebih telah mencerminkan nilai wajarnya.

2. Nilai tercatat dari piutang ventura bersama mendekati nilai wajarnya karena merupakan bunga pinjaman mengambang yang pada awalnya diakui pada nilai wajar berdasarkan tingkat bunga pasar pada saat tanggal pengakuan awal.

3. Utang usaha, utang lain-lain, dan beban masih harus dibayar merupakan liabilitas jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sehingga nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut kurang lebih telah mencerminkan nilai wajarnya.

4. Pinjaman dari pemegang saham merupakan pinjaman yang memiliki suku bunga variabel sehingga nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut telah mendekati nilai wajar.

33. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT *(continued)*

c. Capital management

The Group manages capital risk to ensure that it will be able to continue as a going concern and to ensure compliance with the covenants of the capital adequacy ratio. The Group's capital structure consists of equity shareholders that consist of capital stock, additional paid-in capital and retained earnings.

The Board of Directors of the Group periodically reviews the Group's capital structure. As part of this review, the Board of Directors considers the cost of capital and related risks.

The Group aims to minimise the cost of capital, in order to maximise its value. Therefore, the Group's policy in seeking the funding that will always take into account the financial risks that may arise in the future.

d. Fair value estimation

As at 31 December 2022 and 2021, the carrying amounts of the financial assets and liabilities approximate their fair values as follows:

1. *Cash and cash equivalents, time deposits, restricted cash in banks and time deposits, trade receivables and other receivables are due within 12 months, thus the carrying values of the financial assets approximate their fair values.*

2. *The carrying amount of the receivables from joint ventures approximates its fair value as they are floating interest receivables which were initially recognised at fair value based in market rates at the initial recognition date.*

3. *Trade payables, other payables, and accrued expenses are due within 12 months, thus the carrying values of the financial liabilities approximate their fair values.*

4. *Loans from a shareholder comprises liabilities with floating interest rates where the carrying values of the financial liabilities approximate their fair values.*

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/103 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

33. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

e. Saling hapus aset dan liabilitas keuangan

Aset dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian ketika Grup memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut, dan terdapat niat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Tabel berikut menyajikan instrumen keuangan yang diakui yang saling hapus pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

33. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT *(continued)*

e. Offsetting financial assets and liabilities

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the consolidated statements of financial position where the Group currently has a legally enforceable right to offset the recognised amounts, and there is an intention to settle on a net basis or realise the asset and settle the liability simultaneously.

The following table presents the recognised financial instruments that are offset as at 31 December 2022 and 2021:

	Jumlah bruto instrumen keuangan yang diakui/ *Gross amounts of recognised financial instruments*	Jumlah bruto instrumen keuangan yang diakui disalinghapuskan di laporan posisi keuangan konsolidasian/ *Gross amounts of recognised financial instruments offset in the consolidated statement of financial position*	Jumlah neto instrumen keuangan yang disajikan di laporan posisi keuangan konsolidasian/ *Net amounts of financial instruments presented in the consolidated statement of financial position*	Jumlah terkait yang tidak disalinghapuskan di laporan posisi keuangan konsolidasian/ *Related amounts not offset in the consolidated statement of financial position*		
				Jumlah yang tunduk pada pengaturan induk/ *Amounts subject to master netting arrangements*	Jumlah neto/ *Net amount*	
31 Desember 2022						***31 December 2022***
Aset keuangan						***Financial assets***
Piutang usaha	21,104,369	(554,115)	20,550,254	(11,517)	20,538,737	*Trade receivables*
Liabilitas keuangan						***Financial liabilities***
Utang usaha	2,892,028	(554,115)	2,337,913	-	2,337,913	*Trade payables*
Pinjaman dari pemegang saham - bagian jangka pendek	291,050	-	291,050	(11,517)	279,533	*Loans from a shareholder short-term portion*
31 Desember 2021						***31 December 2021***
Aset keuangan						***Financial assets***
Piutang usaha	22,531,954	(577,576)	21,954,378	(4,166)	21,950,212	*Trade receivables*
Liabilitas keuangan						***Financial liabilities***
Utang usaha	3,838,938	(577,576)	3,261,362	-	3,261,362	*Trade payables*
Pinjaman dari pemegang saham - bagian jangka pendek	233,979	-	233,979	(4,166)	229,813	*Loans from a shareholder short-term portion*

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/104 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

34. INFORMASI ARUS KAS / *34. CASH FLOW INFORMATION*

a. Transaksi non-kas / *a. Non-cash transactions*

Pengungkapan tambahan atas aktivitas investasi dan pendanaan non-kas:

Supplemental disclosures on non-cash investing and financing activites:

	2022	2021	
Aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi arus kas:			***Non-cash investing and financing activities:***
Saling hapus piutang usaha dengan utang usaha	8,163,162	9,738,649	*Offsetting trade receivables with trade payables*
Saling hapus piutang usaha dengan utang bunga	60,931	35,439	*Offsetting trade receivables with interest payables*
Pembayaran dividen dengan memperhitungkan piutang usaha	5,810,033	7,661,396	*Dividend payments through trade receivables offset*
Penambahan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya dengan reklasifikasi dari deposito berjangka	-	23,347	*Placement of restricted cash in banks and time deposits through reclassification from time deposits*
Penambahan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya dengan reklasifikasi dari deposito jangka panjang	-	122,111	*Placement of restricted cash in banks and time deposits through reclassification from long-term time deposits*
Penambahan aset tidak digunakan dalam operasi melalui reklasifikasi dari persediaan	-	13,537	*Additions of assets not used in operations through reclassifications from inventories*
Penambahan aset tetap dari liabilitas sewa	46,213	44,991	*Additions of property, plant and equipment through lease liability*
Perolehan aset tetap melalui utang usaha	704,817	584,947	*Additions of property, plant and equipment through trade payables*
Perolehan aset tetap melalui kapitalisasi biaya pinjaman	66,223	33,997	*Additions of property, plant and equipment through capitalisation of borrowing costs*
Penambahan aset tetap melalui reklasifikasi dari properti investasi	-	751	*Additions of property, plant and equipment through reclassification from investment property*
Penambahan properti investasi yang berasal dari reklasifikasi aset tetap	-	7,105	*Additions of investment property from reclassification of property, plant and equipment*
Penambahan/(pengurangan) nilai properti investasi melalui hasil revaluasi nilai wajar	116,555	(86,511)	*Additions/(deductions) of carrying amount of investment properties through revaluation of assets*
Penurunan nilai aset tetap melalui hasil revaluasi nilai wajar	-	(3,146,392)	*Deductions of value of assets through revaluation of property, plant and equipment*
Dividen dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang belum diterima	-	2,682	*Dividends from associates and joint ventures that have not been received*

PT PLN NUSANTARA POWER (dahulu/*formerly* PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI)
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/105 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

34. INFORMASI ARUS KAS (lanjutan)

b. Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan

Tabel di bawah ini menunjukkan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

***34. CASH FLOW INFORMATION** (continued)*

b. Reconciliation of liabilities arising from financing activities

The below tables set out the reconciliation of the liabilities arising from financing activities for the years ended 31 December 2022 and 2021 as follows:

2022	Arus kas dari aktivitas pendanaan/ *Cash flows from financing activities*			Perubahan transaksi non-kas/ *Non-cash changes*			
		Arus kas/*Cash flows*					
	1 Januari/ *January 2022*	Penerimaan/ *Proceeds*	Pembayaran/ *Payments*	Sewa baru/ *New leases*	Perubahan mata uang asing/ *Changes in foreign exchange rate*	31 Desember/ *December 2022*	
Pinjaman dari pemegang saham	2,417,205	355,940	(358,505)	-	252,443	2,667,083	*Loans from a shareholder*
Liabilitas sewa	60,004	-	(54,546)	46,213	-	51,671	*Lease liabilities*

2021	Arus kas dari aktivitas pendanaan/ *Cash flows from financing activities*			Perubahan transaksi non-kas/ *Non-cash changes*			
		Arus kas/*Cash flows*					
	1 Januari/ *January 2022*	Penerimaan/ *Proceeds*	Pembayaran/ *Payments*	Sewa baru/ *New leases*	Perubahan lainnya/ *Other changes*	31 Desember/ *December 2022*	
Pinjaman dari pemegang saham	2,498,086	227,467	(334,297)	-	25,949	2,417,205	*Loans from a shareholder*
Liabilitas sewa	67,660	-	(57,991)	44,991	5,344	60,004	*Lease liabilities*

35. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Pada tanggal 20 Maret 2023, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pendahuluan Jual Beli dengan PT Energi Sengkang ("Penjual") untuk pembelian PLTGU Sengkang (315 MW).

35. EVENT AFTER REPORTING PERIOD

On 20 March 2023, the Company entered into a Preliminary Sale Purchase Agreement with PT Energi Sengkang ("Seller") to purchase the PLTGU Sengkang (315 MW).

36. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 4 April 2023.

36. MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY AND APPROVAL OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements were the responsibilities of the management and were approved by the Directors and authorised for issue on 4 April 2023.

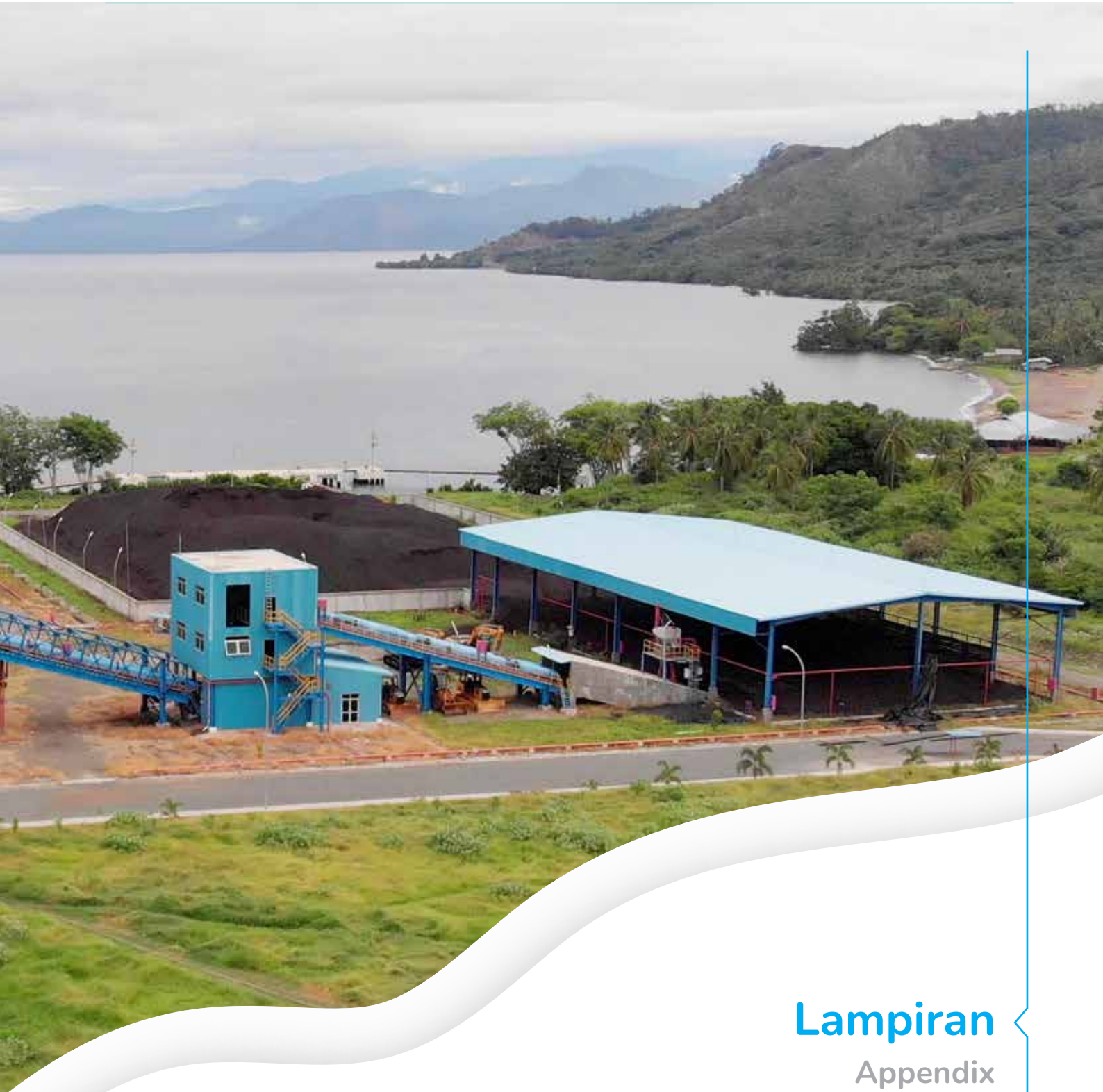

Lampiran

Appendix

Referensi SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten

Reference to SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 regarding the Form and Content of the Issuer's Annual Report

Keterangan Description	Halaman Page
a. Ikhtisar Data Keuangan Penting Key Financial Highlights	
Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat: 1) pendapatan/penjualan; 2) laba bruto; 3) laba (rugi); 4) jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; 5) total laba (rugi) komprehensif; 6) jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; 7) laba (rugi) per saham; 8) jumlah aset; 9) jumlah liabilitas; 10) jumlah ekuitas; 11) rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset; 12) rasio laba (rugi) terhadap ekuitas; 13) rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan; 14) rasio lancar; 15) rasio liabilitas terhadap ekuitas; 16) rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan 17) informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya. Key Financial Highlights presents financial information in a comparative format for 3 (three) financial years, or since the commencement of business for Issuers or Public Companies that have been in business for less than 3 (three) years. At the very least, financial highlights covers: 1) income/sales; 2) gross profit; 3) profit (loss); 4) total profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and non-controlling interest; 5) total comprehensive profit (loss); 6) total comprehensive profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and non-controlling interest; 7) earnings (loss) per share; 8) total assets; 9) total liabilities; 10) total equity; 11) profit (loss) to total assets ratio; 12) profit (loss) to equity ratio; 13) profit (loss) to income ratio; 14) current ratio; 15) debt to equity ratio; 16) debt to total assets ratio; and 17) other information and financial ratios relevant to the Issuer or Public Company and type of industry;	44 - 57
b. Informasi Saham Stock Information	
Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat: 1) saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: a) jumlah saham yang beredar; b) kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; c) harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan d) volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan. Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek; Stock Information for Public Companies at least contains: 1) shares issued for each three-month period in a comparison for the last 2 (two) financial years, at least covering: a) number of outstanding shares; b) market capitalization based on the price at the Stock Exchange where the shares listed on; c) highest share price, lowest share price, closing share price at the Stock Exchange where the shares listed on; and d) share volume at the Stock Exchange where the shares listed on; Information in point b), point c), and point d) only be disclosed if the Issuer is a public company whose shares is listed on the Stock Exchange;	57

Keterangan Description	Halaman Page
2) dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai: a) tanggal pelaksanaan aksi korporasi; b) rasio pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham; c) jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; d) jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan e) harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi; in the event of corporate actions, including stock split, reverse stock, dividend, bonus share, and change in par value of shares, then the share price referred to in point 1), should be added with explanation on: a) date of corporate action; b) Ratio of stock split, reverse stock, dividend, bonus shares, and change in par value of shares; c) number of outstanding shares prior to and after corporate action; and d) the number of convertible securities exercised (if any); and e) share price prior to and after corporate action;	
3) dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) tersebut; dan in the event that shares were suspended and/or delisted from trading during the financial year under review, then the Issuer or Public Company should provide explanation on the reason for the suspension and/or delisting; and	
4) dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (suspension) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/atau proses pembatalan pencatatan saham (delisting) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut. in the event that the suspension and/or delisting as referred to in point 3) was still in effect until the date of the Annual Report, then the Issuer or the Public Company should also explain the corporate actions taken in resolving the suspension and/or delisting;	
c. Laporan Direksi The Board of Directors Report	
Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The Board of Directors Report should at least contain the following items:	84 - 101
1. kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a. strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; b. peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; c. proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik; d. perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan e. kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik; the performance of the Issuer or Public Company, at least covering: a. strategy and strategic policies of the Issuer or Public Company; b. Role of the Board of Directors in formulating strategy and strategic policies of the Issuer or Public Company; c. Process carried out by the Board of Directors to ensure the implementation of the Issuer's or Public Company's strategy; d. comparison between achievement of results and targets of the Issuer of Public Company; and e. challenges faced by the Issuer or Public Company;	
2. gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik; dan description on business prospects of the Issuer of Public Company; and	
3. penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik. implementation of governance by the Issuer or Public Company.	
d. Laporan Dewan Komisaris The Board of Commissioners Report	
Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The Board of Commissioners Report should at least contain the following items:	68 - 80
1. penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi; assessment on the performance of the Board of Directors in managing the Issuer or the Public Company; including the supervision of the Board of Commissioners on the formulation and implementation of the Issuer's or Public Company's strategy by the Board of Directors;	
2. pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi; dan View on the business prospects of the Issuer or Public Company as established by the Board of Directors;	
3. pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik View on the implementation of governance by the Issuer or Public Company;	

Keterangan Description	Halaman Page
e. Profil Emiten atau Perusahaan Publik Profile of the Issuer or Public Company	
Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat informasi: Profile of the Issuer or Public Company should cover at least:	
1. nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku; name of Issuer or Public Company, including change of name, reasons for such change, and the effective date of the change of name during the financial year under review;	110-111
2. akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi: a) alamat; b) nomor telepon; c) alamat surat elektronik; dan d) alamat situs web; access to the Issuer or Public Company, including branch or representative offices, where public can have access to information of the Issuer or Public Company, which include: a) address; b) telephone number; c) e-mail address; and d) website address;	111
3. riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik; brief history of the Issuer or Public Company;	112-115
4. visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik serta budaya perusahaan (*corporate culture*) atau nilai-nilai perusahaan; vision and mission of the Issuer or Public Company including corporate culture and values;	131-133
5. kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan; line(s) of business according to the latest articles of association, business activities performed in the financial year, and types of products and/or services provided;	116-130
6. wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik; wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan operational area of the Issuer or Public Company; operational area is the area in which operational activities are taken place or the scope of the company's operational activities	198-199
7. struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan; structure of organization of the Issuer or Public Company in chart, at least 1 (one) level below the Board of Directors including committees under the Board of Directors (if any) and those under the Board of Commissioners, with the names and titles;	134-136
8. daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan; list of industry association memberships both on a national and international scale related to the implementation of sustainable finance;	205

Keterangan Description	Halaman Page
9. profil Direksi, paling sedikit memuat: a) nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab; b) foto terbaru; c) usia; d) kewarganegaraan; e) riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; f) riwayat jabatan, meliputi informasi: (1) dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; (2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan (3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; g) hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; dan h) perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; The Board of Directors profile at least contains: a) name and position according to duties and responsibilities; b) latest photograph; c) age; d) citizenship; e) educational background and/or certification; f) work history, including information on: (1) legal basis for appointment as member of the Board of Directors to the said Issuer or Public Company; (2) concurrent position, as member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or member of committee, and other position in or outside the Issuer or Public Company.; and in the event that members of the Board of Directors do not have concurrent positions, such matter shall be disclosed; and (3) working experience and period in and outside the Issuer or Public Company; g) Affiliation with other members of the Board of Directors, Board of Commissioners, majority and controlling shareholders, either directly or indirectly up to individual owners, including names of affiliated parties. in the event that a member of the Board of Directors has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter; and h) Changes in the composition of the members of the Board of Directors and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Directors, such matter shall be disclosed;	146-151 137-138
10. profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: a) nama dan jabatan; b) foto terbaru; c) usia; d) kewarganegaraan; e) riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; f) riwayat jabatan, meliputi informasi: (1) dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris; (2) dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; (3) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan (4) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; g) hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi; Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; h) pernyataan independensi komisaris independent dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode; dan i) perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	**137-145**

Keterangan Description	Halaman Page
The Board of Commissioners profile, at least contains: a) name and position; b) latest photograph; c) age; d) citizenship; e) educational background and/or certification; f) work history, including information on: (1) legal basis for the appointment as member of the Board of Commissioners; (2) legal basis for the first appointment as member of the Board of Commissioners who is also an Independent Commissioner at the said Issuer or Public Company; (3) concurrent position, as member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or member of committee, and other position in or outside the Issuer or Public Company. in the event that members of the Board of Commissioners do not have concurrent positions, such matter shall be disclosed; and (4) working experience and period in and outside the Issuer or Public Company; g) Affiliation with other members of the Board of Commissioners, majority and controlling shareholders, either directly or indirectly, up to individual owners, including names of affiliated parties; In the event that a member of the Board of Commissioners has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter; h) Statement of independence of the Independent Commissioner in the event that the Independent Commissioner has been appointed more than 2 (two) periods; and i) changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Commissioners, such matter shall be disclosed;	
11. dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya; In the event of changes in the membership composition of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners occurring subsequent to the end of the financial year and up to the deadline for submission of the Annual Report, membership composition of the Board of Directors and/or Board of Commissioners shall be presented both prior and after such change(s);	137-138
12. jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Number of employees by gender, position, age, education, and employment status (permanent/contracted) in the fiscal year; Disclosure of information can be presented in tabular form.	152-155
13. nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai: a) pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik; b) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan c) kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik; Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel. names of shareholders and percentage of shareholding at the beginning and end of the financial year, comprising information on: a) shareholders with a minimum of 5% (five percent) of shares of the Issuer of Public Company; b) members of the Board of Directors and Board of Commissioners that own shares of the Issuer or Public Company. In the event that all members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners do not own shares, such matter shall be disclosed; and c) public shareholders, that is, shareholders that each owns less than 5% (five percent) of shares of the Issuer or Public Company; disclosure of such information can be presented in tabular form.	170-172
14. persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. the percentage of indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company by members of the Board of Directors and Board of Commissioners at the beginning and end of the financial year, including information on shareholders listed in the shareholder register for the benefit of indirect ownership of members of the Board of Directors and Board of Commissioners; In the event that all members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners do not hold indirect ownership of shares, such matter shall be disclosed.	171

Keterangan Description	Halaman Page
15. jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi: a) kepemilikan institusi lokal; b) kepemilikan institusi asing; c) kepemilikan individu lokal; dan d) kepemilikan individu asing; number of shareholders and percentage of shareholding at the end of the financial year, classified by: a) ownership of local institutions; b) ownership of foreign institutions; c) ownership of local individual; and d) ownership of foreign individual;	172
16. informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan; information on the majority and controlling shareholder(s) of the Issuer or Public Company, either directly or indirectly, up to the individual ultimate shareholders, presented in a schematic diagram or chart;	171
17. nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama; Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut. name of subsidiary entity, associated company or joint venture company where the Issuer or Public Company exercise a joint control with the entity (if any), along with the percentage of shareholding, lines of business, total assets, and operating status of the subsidiary entity, associated company or joint venture company; for subsidiary entities, include information on address of such subsidiary entities.	173-196
18. kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada); chronology of share listing, number of shares, par value, and bid price from the beginning of listing up to the end of the financial year, and name of Stock Exchange where the Issuers of Public Company shares are listed, including stock split, reverse stock, dividend, bonus share, and change in par value of shares, conversion effect, addition and reduction of capital (if any)	204
19. informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 18), yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada); Information on the listing of securities other than the ones as referred to in number 18), which have not yet matured during the financial year, at least contains the name of the securities, year of issuance, interest rate/rate of return, maturity date, bid value, and rating (if any);	205
20. informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi: a) nama dan alamat; b) periode penugasan; c) informasi jasa audit dan/atau non audit yang d) diberikan; e) biaya jasa (*fee*) audit dan/atau non audit untuk f) masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan g) dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut; dan Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel. Information on the use of a Public Accountant (AP) and a Public Accounting firm (KAP) services along with their networks/ associations/alliances include: a) name and address; b) period of assignment; c) information on audit and/or non-audit services provided; d) audit and/or non-audit fees for each assignment given during the financial year; and e) In the event that the appointed AP, KAP and their networks/associations/alliances do not provide non-audit services, such information shall be disclosed; and Disclosure of such information can be presented in tabular form.	**203**
21. nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP. name and address of capital market supporting institutions and/or professionals other than AP and KAP.	203-204

Keterangan Description	Halaman Page
f. Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis	
Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat: Management discussion and analysis presents an analysis and discussion of financial statements accounts and other important information with an emphasis on material changes that occurred during the financial year, which at least includes:	
1. tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai: a) produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya; b) pendapatan/penjualan; dan c) profitabilitas; operational review by business segment, according to the type of industry of the Issuer or Public Company, at least containing information on: a) production, covering process, capacity, and growth; b) income/sales; and c) profitability	257-290
2. kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai: a) aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; b) liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; c) ekuitas; d) pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan e) arus kas; Comprehensive financial performance anaysis, incuding a comparison of the financial performance for the current year with the previous year, as well as explanation on the cause of changes and impact of such changes, covering at least: a) current assets, non-current assets, and total assets; b) short term liabilities, long term liabilities and total liabilities; c) equity; d) revenues/sales, expenses, profit (loss), other comprehensive income, and total comprehensive profit (loss); and e) cash flows;	291-325
3. kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; solvency by including the computation of relevant ratios;	325-333
4. tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; collectability of receivables of the Issuer or Public Company, including the computation of relevant ratios;	330
5. struktur modal (*capital structure*) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (*capital structure*) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud; capital structure and management policies on capital structure, including the basis for determining the said policies;	334-335
6. bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit memuat: a) tujuan dari ikatan tersebut; b) sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut; c) mata uang yang menjadi denominasi; dan d) langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait; discussion on material commitments for capital expenditure, including the explanation on at least: a) the purpose of commitments; b) sources of funds expected to fulfill the commitments; c) currency of denomination; and d) steps taken by the Issuer of Public Company to mitigate relevant foreign exchange risk;	336-343
7. bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: a) jenis investasi barang modal; b) tujuan investasi barang modal; dan c) nilai investasi barang modal yang dikeluarkan; discussion on capital expenditure realized during the last financial year, at least include: a) type of capital expenditure; b) purpose of capital expenditure; and c) value of capital expenditure;	343-346
8. informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada); material information and facts occurring subsequent to the date of accountant's report (if any); and	382
9. prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya; business prospects of the Issuer or Public Company in connection with the conditions of the industry, economy in general, accompanied by supporting quantitative data from a reliable data source;	394-402

Keterangan Description	Halaman Page
10. perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai: a) pendapatan/penjualan; b) laba (rugi); c) struktur modal (capital structure); atau d) hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik; comparison between target/projection at beginning of financial year and the results achieved (realization), concerning: a) income/sales; b) profit (loss); c) capital structure; or d) other matters deemed important by the Issuer or Public Company;	347-357
11. target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai: a) pendapatan/penjualan; b) laba (rugi); c) struktur modal (*capital structure*); d) kebijakan dividen; atau e) hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik; Target/projection at most for the next 1 (one) year of the Issuer or Public Company, concerning: a) income/sales; b) profit (loss); c) capital structure; or d) dividend policy; or e) other matters deemed important by the Issuer or Public Company;	**347-357**
12. aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar; marketing aspects of products and/or services of the Issuer or Public Company, at the very least on marketing strategy and market share;	391-393
13. uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit: a. kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih; b) tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas; c) jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan d) jumlah dividen per tahun yang dibayar; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. description of the dividend policy during the last 2 (two) financial years, at least covering: a. dividend policy, including information on the percentage of total dividends distributed to net profit; b) the payment date of cash dividend and/or date of non-cash dividend distribution; c) amount of dividend per share (cash and/or non-cash); and d) amount of dividend per year paid; disclosure of information can be presented in tabular form. in the event that the Issuer or Public Company does not distribute dividends in the last 2 (two) years, such matter shall be disclosed.	358-360
14. realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dengan ketentuan: a) dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan b) dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut; use of proceeds from public offering, under the condition of: a) during the year under review, on which the Issuer has the obligation to report the realization of the use of proceeds, then the realization of the cumulative use of proceeds until the year end should be disclosed; and b) in the event that there were changes in the use of proceeds as stipulated in the Regulation of the Financial Services Authority on the Report of the Utilization of Proceeds from Public Offering, then the Issuer should explain the said changes;	362

Keterangan Description	Halaman Page
15. informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, paling sedikit memuat: a) tanggal, nilai, dan objek transaksi; b) nama pihak yang melakukan transaksi; c) sifat hubungan afiliasi (jika ada); d) penjelasan mengenai kewajaran transaksi; e) pemenuhan ketentuan terkait; dan f) dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi: (1) pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*armslength principle*); dan (2) peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*armslength principle*); g) untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan; Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut. h) untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut; i) dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; material information (if any), among others concerning investment, expansion, divestment, merger/consolidation acquisition, debt/capital restructuring, material transactions, transactions with related parties and transactions with conflicts of interest that occurred during the year under review, at least includes: a) transaction date, value, and object; b) name of transacting parties; c) nature of affiliation (if any); d) description of the fairness of the transaction; and e) compliance with related rules and regulations; f) in the event that there is an affiliation, apart from disclosing the information as referred to in letter a) to letter e), the Issuer or Public Company also discloses information on: (1) a statement from the Board of Directors that the affiliate transaction has gone through adequate procedures to ensure that such transaction is carried out in accordance with generally accepted business practices, by complying with the arms-length principle; and (2) the role of the Board of Commissioners and the audit committee in carrying out adequate procedures to ensure that such transaction is carried out in accordance with generally accepted business practices, by complying with the arms-length principle; g) for affiliated or material transactions which are business activities aimed to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/or continuously, add an explanation of such information; in the event that the said transactions have been disclosed in the annual financial statements, add references to the disclosure in the said annual financial statements. h) for disclosure of affiliated transactions and/or transactions with conflicts of interest resulting from the implementation of such transactions that have been approved by independent shareholders, add information regarding the date of the GMS which approved the said transactions; i) in the event that there is no affiliated transaction and/or transaction with conflicts of interest transaction, such matter shall be disclosed;	363-373
16. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan changes in laws and regulations which have a significant effect on the Issuer or Public Company and impacts on the financial statements (if any); and	376-382
17. perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada). changes in the accounting policy, rationale and impact on the financial statements (if any);	374-376

Keterangan Description	Halaman Page
g. Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik Corporate Governance of the Issuer or Public Company	
Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: Corporate Governance of the Issuer or Public Company contains at least:	
1. RUPS, paling sedikit memuat a) Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi: (1) keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan (2) keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan; b) dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; GMS, at least contains: a) Information regarding the resolutions of the GMS during and 1 (one) year prior to the financial year, including: (1) resolutions of the GMS during and 1 (one) year prior to the financial year which are realized in the financial year; and (2) resolutions of the GMS during and 1 (one) year prior to the financial year which have not been realized along with the reasons; b) In the event that the Issuer or Public Company uses an independent party for vote counting at the GMS, such matter shall be disclosed;	445 - 451
2. Direksi, paling sedikit memuat: a) tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel. b) pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Direksi; c) kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. d) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi: (1) kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan (2) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada); e) penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat: 1) prosedur penilaian kinerja; dan 2) kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan f) dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas ireksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. The Board of Directors at least covering: a) the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors; description of the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors can be presented in tabular form. b) statement that the Board of Directors already has board manual or charter; c) policies and implementation of the frequency of meetings of the Board of Directors, meetings with the Board of Commissioners, and the level of attendance of members of the Board of Directors in the meeting including attendance at the GMS; information on the level of attendance of members of the Board of Directors at the said meetings can be presented in tabular form. d) training and/or competency development for members of the Board of Directors: (1) policies on training and/or competency development for members of the Board of Directors, including an induction program for newly appointed members (if any); and (2) training and/or competency development attended by members of the Board of Directors during the financial year (if any); e) the Board of Directors' assessment of the performance of the committees supporting the implementation of the Board of Directors' duties during the financial year shall at least contain: 1) performance appraisal procedures; and 2) the criteria used such as performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings; and f) in the event that the Issuer or Public Company does not have a committee supporting the implementation of the Board of Directors' duties, such matter shall be disclosed.	470 - 487

Keterangan Description	Halaman Page
3. Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: a) tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; b) pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Dewan Komisaris; c) kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. d) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris: (1) kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan (2) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada); e) penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: (1) prosedur pelaksanaan penilaian kinerja; (2) kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan (3) pihak yang melakukan penilaian. f) penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi: (1) prosedur penilaian kinerja; dan (2) kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat The Board of Commissioners, at least covering: a) duties and responsibilities of the Board of Commissioners; b) statement that the Board of Commissioners already has board manual or charter; c) policies and implementation of the frequency of meetings of the Board of Commissioners, meetings with the Board of Directors, and the level of attendance of members of the Board of Commissioners in the meeting including attendance at the GMS; information on the level of attendance of members of the Board of Commissioners at the said meetings can be presented in tabular form. d) training and/or competency development for members of the Board of Commissioners: (1) policies on training and/or competency development for members of the Board of Commissioners, including an induction program for newly appointed members (if any); and (2) training and/or competency development attended by members of the Board of Commissioners during the financial year (if any); e) the performance appraisal of the Board of Directors and Board of Commissioners including of each respective member, at least covering: (1) performance appraisal procedure; (2) the criteria used such as performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings; and (3) assessor; f) the Board of Commissioners' assessment of the performance of the committees supporting the implementation of the Board of Commissioners' duties during the financial year shall at least contain: (1) performance appraisal procedures; and (2) the criteria used such as performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings	451 - 469
4. Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: a) prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan b) prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain: (1) prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; (2) struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan (3) besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. The nomination and remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners shall at least contain: a) nomination procedure, including a brief description of the policies and process for nominating members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners; and b) procedures and implementation of remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners, among others: (1) procedures for determining remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners; (2) The structure of remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners such as salary, allowances, tantiem/bonus and others; and (3) the amount of remuneration for each member of the Board of Directors and Board of Commissioners; disclosure of information can be presented in tabular form.	498 - 507

Keterangan Description	Halaman Page
5. Dewan pengawas syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat: a) nama; b) dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah; c) periode penugasan dewan pengawas syariah; d) tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah; dan e) frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik; Sharia Supervisory Board, for Issuers or Public Companies that conduct business based on Islamic law, as stipulated in the articles of association, at least contains: a) name; b) legal basis of appointment; c) assignment period; d) duties and responsibilities; and e) frequency and procedure in providing advice and suggestion, as well as the compliance with Islamic Principles by the Issuer or Public Company in the capital market;	(N/A)
6. Komite audit, paling sedikit memuat: a) nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; b) usia; c) kewarganegaraan; d) riwayat pendidikan; e) riwayat jabatan, meliputi informasi: (1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; (2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan (3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; f) periode dan masa jabatan anggota komite audit; g) pernyataan independensi komite audit; h) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); i) kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut; dan j) pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (*charter*) komite audit; The Audit Committee, at least covering: a) name and position in the committee; b) age; c) citizenship; d) educational background; e) work history, including information on: (1) legal basis of appointment as committee member; (2) concurrent position(s), as member of the Board of Commissioners, Board of Board of Directors, and/or committees and other position (if any); and (3) working experience and period in and outside the Issuer or Public Company; f) period and terms of office of each member of the Audit Committee; g) statement of independence of the Audit Committee; h) training and/or competency development attended during the financial year (if any); i) policies and implementation of the frequency of the audit committee meetings and the level of attendance of each members in the meetings; and j) the activities of the Audit Committee in the year under review, in accordance with the Audit Committee Charter;	511 - 522

Keterangan Description	Halaman Page
7. Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a) nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; b) usia; c) kewarganegaraan; d) riwayat pendidikan; e) riwayat jabatan, meliputi informasi: (1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; (2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan (3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; f) periode dan masa jabatan anggota komite; g) pernyataan independensi komite; h) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); i) uraian tugas dan tanggung jawab; j) pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter); k) kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; l) uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan m) dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan: (1) alasan tidak dibentuknya komite; dan (2) pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi; The nomination and remuneration committee or function of the Issuer or Public Company, at least containing: a) name and position in the committee; b) age; c) citizenship; d) educational background; e) work history, including information on: (1) legal basis of appointment as committee member; (2) concurrent position(s), as member of the Board of Commissioners, Board of Board of Directors, and/or committees and other position (if any); and (3) working experience and period in and outside the Issuer or Public Company; f) period and terms of office of each member of the Committee; g) statement of independence of the Committee; h) training and/or competency development attended during the financial year (if any); i) description of duties and responsibilities; j) statement that the Committee already has committee charter; k) policies and implementation of the frequency of the Committee meetings and the level of attendance of each members in the meetings; and l) brief description of the implementation of activities during the financial year; and m) in the event that no nomination and remuneration committee is established, the Issuer or Public Company is sufficient to disclose the information as referred to in letter i) to letter l) and disclose: (1) reasons for not establishing the committee; and (2) the party carrying out the nomination and remuneration function;	**522 - 535**

Keterangan Description	Halaman Page
8. Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: a) nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; b) usia; c) kewarganegaraan; d) riwayat pendidikan; e) riwayat jabatan, meliputi informasi: (1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; (2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan (3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; f) periode dan masa jabatan anggota komite; g) pernyataan independensi komite; h) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan i) uraian tugas dan tanggung jawab; j) pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*) komite; k) kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; dan l) uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku; Other committees owned by Issuers or Public Companies in order to support the functions and duties of the Board of Directors (if any) and/or committees supporting the functions and duties of the Board of Commissioners, the least contain: a) name and position in the committee; b) age; c) citizenship; d) educational background; e) work history, including information on: (1) legal basis of appointment as committee member; (2) concurrent position(s), as member of the Board of Commissioners, Board of Board of Directors, and/or committees and other position (if any); and (3) working experience and period in and outside the Issuer or Public Company; f) period and terms of office of each member of the Committee; g) statement of independence of the Committee; h) training and/or competency development attended during the financial year (if any); i) description of duties and responsibilities; j) statement that the Committee already has committee charter; k) policies and implementation of the frequency of the committee meetings and the level of attendance of each members in the meetings; and l) brief description of the implementation of activities during the financial year; and	535 - 546
9. Sekretaris perusahaan, paling sedikit memuat: a) nama; b) domisili; c) riwayat jabatan, meliputi: (1) dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan; dan (2) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; d) riwayat pendidikan; e) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; dan f) uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku; The Corporate Secretary, at least covering: a) name; b) domicile; c) work history, including information on: (1) legal basis of the appointment as the Corporate Secretary; and (2) working experience and period in and outside the Issuer or Public Company; d) educational background; e) training and/or competency development attended during the financial year; and f) brief description of the implementation of the Corporate Secretary's duties during the financial year;	547 - 554

Keterangan Description	Halaman Page
10. Unit audit internal, paling sedikit memuat: a) nama kepala unit audit internal; b) riwayat jabatan, meliputi: (1) dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal; dan (2) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; c) kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada); d) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; e) struktur dan kedudukan unit audit internal; f) uraian tugas dan tanggung jawab; g) pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*) unit audit internal; dan h) uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit; The Internal Audit Unit, at least covering: a) name of Head of Internal Audit Unit; b) work history, including information on: (1) legal basis of the appointment as Head of the Internal Audit Unit; and (2) working experience and period in and outside the Issuer or Public Company; c) qualification or certification as internal auditor (if any); d) training and/or competency development attended during the financial year; e) structure and position of the Internal Audit Unit; f) description of duties and responsibilities; g) statement that the Internal Audit Unit already has Internal Audit Unit charter; and h) brief description on the implementation of duties of the Internal Audit Unit during the year under review including the policies and implementation of frequency of meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or the Audit Committee;	554 - 568
11. Uraian mengenai sistem pengendalian internal *(internal control)* yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a) pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; b) tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; dan c) pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal; Description on internal control system adopted by the Issuer or Public Company, at least covering: a) financial and operational control, and compliance with other prevailing laws and regulations; and b) review of the effectiveness of internal control system; c) statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system;	569 - 573
12. Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a) gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; b) jenis risiko dan cara pengelolaannya; c) tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; dan d) pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko; Risk management system implemented by the Issuer or Public Company, at least covering: a) General description of the risk management system of the Issuer or Public Company; b) risk type and management c) Review of the effectiveness of the risk management system implemented by the Issuer or Public Company; and d) statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners or the Audit Committee on the adequacy of the risk management system;	577 - 594
13. Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), paling sedikit memuat: a) pokok perkara/gugatan; b) status penyelesaian perkara/gugatan; dan c) pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik; Legal issues with material impacts faced by Issuers or Public Companies, subsidiaries, members of the Board of Directors and Board of Commissioners (if any), at least contain: a) substance of the case/claim; b) status of settlement of case/claim; and c) potential impacts on the condition of the Issuer or Public Company;	623 - 626
14. Informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada); Information about administrative sanctions imposed to the Issuer or Public Company, members of the Board of Commissioners and Board of Directors, by the Financial Services Authority and other authorities during the financial year (if any);	626

Keterangan Description	Halaman Page
15. Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi: a) pokok-pokok kode etik; b) bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya;dan c) pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; Information on the code of conduct of the Issuer or Public Company, includes: a) key points of the code of conduct; b) socialization of the code of conduct and enforcement; and c) statement that the code of conduct is applicable for the Board of Commissioners, Board of Directors and employees of the Issuer of Public Company;	595 - 607
16. Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (*management stock ownership program*/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (*employee stock ownership program*/ESOP); Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (*management stock ownership program*/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (*employee stock ownership program*/ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat: a) jumlah saham dan/atau opsi; b) jangka waktu pelaksanaan; c) persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan d) harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan; A brief description of the policy of providing long-term performance-based compensation to management and/or employees owned by the Issuer or Public Company (if any), including the management stock ownership program (MSOP) and/or employee stock ownership (ESOP) program; In the event of providing the MSOP and/or ESOP program, the information disclosed shall contain at least: a) number of shares and/or options; b) exercise period; c) requirements for eligible employees and/or management; and d) exercise price or determination of exercise price;	362
17. Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai: a) kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka; dan b) pelaksanaan atas kebijakan dimaksud; A brief description of the information disclosure policy regarding: a) share ownership of members of the Board of Directors and Board of Commissioners no later than 3 (three) working days after the occurrence of ownership or any change in ownership of shares of a Public Company; and b) implementation of the policy;	491 - 492
18. Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) di Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a) cara penyampaian laporan pelanggaran; b) perlindungan bagi pelapor; c) penanganan pengaduan; d) pihak yang mengelola pengaduan; dan e) hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit: (1) jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan (2) tindak lanjut pengaduan; Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), maka diungkapkan mengenai hal tersebut. Description of whistleblowing system at the Issuer or Public Company, at least covering: a) mechanism for violation reporting; b) protection for the whistleblower; c) handling of violation reports; d) unit responsible for handling violation reports; and e) results of violation report handling, at least includes: (1) number of complaints received and processed during the financial year; and (2) follow-up of complaints; in the event that the Issuer or Public Company does not have a whistleblowing system, such matter shall be disclosed.	615 - 622

Keterangan Description	Halaman Page
19. Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a) program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), *fraud*, suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan b) pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud. A description of the anti-corruption policy of the Issuer or Public Company, at least containing: a) programs and procedures implemented in dealing with corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery and/or gratuities in the Issuer or Public Company; and b) anti-corruption training/socialization to employees of the Issuer or Public Company; In the event that the Issuer or Public Company does not have an anti-corruption policy, the reasons for not having such a policy shall be explained.	608 - 614
20. Penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi: a) pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau b) penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternative pelaksanaannya (jika ada). Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Implementation of the Guidelines for Corporate Governance of Public Companies for Issuers issuing equity-based securities or for Public Companies, including: a) a statement regarding recommendation that have been implemented; and/or b) description of recommendation that have not been implemented, along with the reason and alternative implementation (if any); Disclosure of information can be presented in tabular form.	420 - 441
h. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik **Social and Environmental Responsibility of Issuers or Public Companies**	
1. Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a) penjelasan strategi keberlanjutan; b) ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup); c) profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik; d) penjelasan Direksi; e) tata kelola keberlanjutan; f) kinerja keberlanjutan; g) verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada; h) lembar umpan balik (feedback) untuk pembaca, jika ada; dan i) tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya; The information disclosed in the social and environmental responsibility section is a Sustainability Report as referred to in the Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 on Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, at at least includes: a) explanation of the sustainability strategy; b) overview of sustainability aspects (economic, social, and environmental); c) brief profile of the Issuer or Public Company; d) explanation of the Board of Directors; e) sustainability governance; f) sustainability performance; g) written verification from an independent party, if any; h) feedback sheet for readers, if any; and i) the response of the Issuer or Public Company to the previous year's report feedback;	639-697 Laporan Keberlanjutan Sustainability Report
2. Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; The Sustainability Report as referred to in number 1) must be prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of Sustainability Reports for Issuers and Public Companies as contained in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter;	697 Laporan Keberlanjutan Sustainability Report

Keterangan Description	Halaman Page
3. informasi Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) pada angka 1) dapat: a) diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait Laporan Keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait Laporan Direksi; dan/atau b) merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, seperti profil Emiten atau Perusahaan Publik; Information on the Sustainability Report in number 1) can: a) disclosed in other relevant sections outside the Social and Environmental Responsibility section, such as the Board of Directors' explanation regarding the Sustainability Report is disclosed in the section related to the Board of Directors' Report; and/or b) refers to other sections outside the Social and Environmental Responsibility section by still referring to the Technical Guidelines for the Preparation of Sustainability Reports for Issuers and Public Companies as listed in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter, such as the profile of the Issuer or Public Company;	639-697 Laporan Keberlanjutan Sustainability Report
4. Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan; The Sustainability Report as referred to in number 1) is an inseparable part of the Annual Report but can be presented separately from the Annual Report;	639-697 Laporan Keberlanjutan Sustainability Report
5. Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus: a) memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan b) disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; in the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, the information disclosed in the Sustainability Report must: a) contain all the information as referred to in number 1); and b) be prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of a Sustainability Reports for Issuers and Public Companies as listed in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter;	639-697 Laporan Keberlanjutan Sustainability Report
6. Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan; dan In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, the Social and Environmental Responsibility section conveys that information on Social and Environmental Responsibility has been disclosed in the Sustainability Report which is presented separately from the Annual Report; and	697 Laporan Keberlanjutan Sustainability Report
7. Penyampaian Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan. The separate Sustainability Report must be submitted together with the Annual Report.	697 Laporan Keberlanjutan Sustainability Report
i. Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit **Audited Annual Financial Statements**	
Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan keuangan tahunan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai laporan berkala perusahaan efek dalam hal Emiten merupakan perusahaan efek. Financial Statements included in Annual Report should be prepared in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia and have been audited by a public accountant registered in the Financial Services Authority. The said financial statements include an accountability statement for financial statements as stipulated in the Financial Services Authority Regulations on the responsibility of the Board of Directors on the financial statements or the legislations in the Capital Markets sector governing the periodic reports of securities company in the event the Issuer is a Securities Company.	698-817
j. Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan **Statement of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners regarding Responsibility for the Annual Report**	
Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. Statement of members of the Board of Directors and Board of Commissioners regarding the responsibility for the Annual Report is prepared according to the format as attached in the Appendix I, which is an integral part of this Circulation Letter of the Financial Services Authority.	104 - 105

DRIVING **ENERGY TRANSITION** TO DELIVERING **VALUE CREATION EXCELLENCES**

Mendorong Percepatan Transisi Energi untuk Memberikan *Value Creation* Terbaik

PLN Nusantara Power

Kantor Pusat Head Office
Jl. Ketintang Baru No. 11
Surabaya 60231
Jawa Timur, Indonesia

Kantor Jakarta Jakarta Office
18 Office Park Lt. 2 ABCD
Jl. TB Simatupang No. 18
DKI Jakarta, Indonesia

+62 31 8283 180
+62 31 8283 183
info@plnnusantarapower.co.id
www.plnnusantarapower.co.id